



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII. Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SEPARDI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAK KEBUDAYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. 1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Dari beberapa peraturan diatas maka setiap PD wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 -2026, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai Untuk itu perlu disusun Renstra PD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026. Sehingga diharapkan seluruh SKPP Provinsi Kalimantan Timur dapat menyusun Renstra PD Tahun 2024 - 2026 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Pengertian Renstra PD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Renstra

PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 - 2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (lima) tahun.

Proses penyusunan renstra PD Tahun 2024 - 2026 disusun melalui 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Sosialisasi Rencana;
4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan;
5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Kelima tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap Penyusunan Rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu :

1. Menyusun rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur;
2. Menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing program dan kegiatan yang ada di Bidang, UPTD dan Cabang Dinas di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui rapat-rapat internal;
3. Menyusun rancangan akhir rencana Strategis pembangunan tiga tahun ke depan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tahap berikutnya adalah Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah.

Tahap berikutnya adalah Sosialisasi Rencana yang dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan Renstra kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mengetahui, memahami dan bersama-sama melaksanakan rencana.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Pelaksanaan Rencana yang dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra PD melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala PD. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahap berikutnya adalah Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi serta untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap PD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, PD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian kinerja yang terukur dengan efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program serta pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Tahapan penyusunan, penetapan dan sosialisasi Renstra PD Tahun 2024 - 2026 dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Akhir Renstra PD. Tahapan dan langkah- langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD
 - a. Kepala PD membentuk Tim Penyusunan Renstra PD;
 - b. Tim Fasilitas merumuskan tim fasilitas awal renstra PD dengan :
 - 1) Memperhatikan tugas pokok dan fungsi PD;
 - 2) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
 - 3) Memperhatikan prioritas dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025 sesuai dengan tahapan jangka menengah rencana;
 - 4) Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026;
 - 5) Memperhatikan dan mempertimbangkan Renstra KL dalam menyusun Renstra PD;
 - 6) Melakukan konsultasi kepada Bappeda Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan bidang kerja dalam menyusun Renstra PD.
 - c. Kepala PD menyampaikan rancangan awal Renstra PD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum PD dan atau forum gabungan PD.
2. Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD tentang Pembahasan Rancangan Awal Renstra PD
 - a. Forum Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas Rancangan Renstra PD yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Forum Gabungan renstra PD dilakukan seperti Forum Renstra PD, yang dikelompokkan berdasarkan misi,

urusan, fungsi, atau bidang untuk menjaga sinergitas antar pelaku pembangunan;

- b. Tujuan dilaksanakannya Forum renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD adalah mensinergikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai visi dan misi dalam RPJM Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD;
- c. Keluaran yang dihasilkan dari Forum Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD adalah rancangan awal Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum Renstra PD dan atau Forum Gabungan Renstra PD;
- d. Peserta Forum PD terdiri dari PD Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat di tingkat Provinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi PD, instansi vertikal tingkat Provinsi, Ikatan/Asosiasi Profesi lainnya, Anggota DPRD dari Komisi Mitra Kerja PD Provinsi, dan Ahli/Profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis. Sedangkan peserta Forum Gabungan Renstra PD adalah peserta Forum Renstra PD ditambah PD Provinsi yang memiliki keterkaitan fungsi;
- e. Penyelenggaraan Forum Renstra PD dilakukan oleh PD yang bersangkutan, sementara Forum Gabungan Renstra PD diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD:

- a. Tim Fasilitasi Penyusunan Renstra PD menyusun rancangan akhir Renstra PD berdasarkan hasil Forum PD dan atau Forum Gabungan PD;
- b. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Bappeda (dibantu *external adviser*) untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi terhadap rancangan akhir renstra PD bertujuan untuk menjamin keselarasan, keterpaduan dan harmonisasi

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

- c. Verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah rancangan akhir Renstra PD diterima Kepala Bappeda.

Tahap Penetapan Rencana Strategis (Renstra) PD dilaksanakan untuk menetapkan rancangan akhir Renstra PD menjadi Peraturan Kepala PD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Penyusunan Renstra PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Bappeda dan menyusun rancangan Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD;
2. Kepala PD menetapkan Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD;
3. Kepala PD menyampaikan Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda mengumpulkan seluruh Peraturan Kepala PD tentang Renstra PD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan;
5. Kepala Bappeda menyebarluaskan hasil pengesahan oleh Kepala Daerah tentang Renstra PD kepada Kepala PD.

Tahap Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) PD dilaksanakan menyampaikan dan menjelaskan Renstra PD kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mengetahui, memahami dan bersama-sama melaksanakan Renstra PD. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi menyusun rencana sosialisasi Renstra PD yang disetujui oleh Kepala PD;

2. Sosialisasi dilakukan melalui komunikasi langsung (seperti Forum / Komunikasi Publik, Rapat Kerja dan Seminar), maupun Komunikasi Tidak Langsung (seperti Media Masa, Media Elektronik/Internet, *Leflet* dan *Booklet*) kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Untuk pedoman tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD akan disusun tersendiri. Penyusunannya akan dilakukan oleh Kepala Bappeda paling lambat awal minggu pertama Bulan Januari Tahun 2023.

Jadwal penyusunan Renstra PD dimulai pada Minggu ke dua bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan minggu keempat bulan Januari Tahun 2023. Rincian jadwal terlampir.

Sedangkan secara umum jadwal penyusunan renstra PD berdasarkan tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, selesai pada Minggu Keempat bulan Januari tahun 2023;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD, selesai pada minggu Keempat bulan Februari tahun 2023;
3. Penetapan Renstra PD, selesai pada minggu kedua bulan Maret Tahun 2023;
4. Sosialisasi Renstra PD, dilaksanakan mulai minggu keempat Maret 2023.

12. 2. Landasan Hukum

Untuk menyusun Renstra SKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa produk hukum dan peraturan perundangan lainnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 16. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

13. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Pendidikan adalah agar pembangunan bidang pendidikan mempunyai pedoman dan arah yang jelas selama tiga tahun kedepan, sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan terarah dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan .

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan adalah mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 - 2026.

14. 4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra Sistematika Penulisan telah diatur sesuai tata aturan yang berlaku sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

Terdiri dari :

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan hukum
- 1.3.Maksud dan tujuan
- 1.4.Sistematika penulisan

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

- 2.1.Tugas fungsi dan Struktur organisasi
- 2.2.Sumber daya perangkat Daerah,
- 2.3.Kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.4.Sasaran Pelayanan

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari :

- 3.1.Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi PD
- 3.2.Telaahan Sasaran dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah
- 3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri dari :

- 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari wilayah Daratan seluas 127.267,52 km² dan wilayah laut seluas 25.656 km², terletak antara 113⁰ 44' dan 119⁰ 00 Bujur Timur dan antara 2⁰ 33 lintang Utara dan 2⁰ 25 Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan Pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan Provinsi terluas kedua setelah Papua terbagi menjadi 7 (tujuh) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling Timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan serawak. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah Barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir diseluruh kabupaten. Jumlah danau di provinsi ini juga cukup banyak yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 ha and 11.000 ha.

Untuk melaksanakan pelayanan di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 secara teknismelaksanakan urusan Pendidikan yang meliputi seluruh wilayah

Provinsi Kalimantan Timur. Secara Administrasi wilayah yang dilayani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota yaitu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah atas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah kejuruan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan khusus;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagaan

sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus, dan kebudayaan;

- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah :

- a. Pengelolaan Pendidikan Menengah;
- b. Pengelolaan Pendidikan Khusus;
- c. Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
- d. Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- i. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- j. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 54 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi tiga Sub Bagian :
 - 1) Subbag Perencanaan Program
 - 2) Subbag Keuangan
 - 3) Subbag Umum
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi tiga Kasi :
 - 1) Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA
 - 2) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA
 - 3) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA
- d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi tiga Kasi :
 - 1) Kasi Kurikulum dan Penilaian SMK
 - 2) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK
 - 3) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK
- e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahi tiga Kasi :
 - 1) Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus
 - 2) Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
 - 3) Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus
- f. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi tiga Kasi
 - 1) Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 2) Kasi Sejarah dan Tradisi
 - 3) Kasi Kesenian
- g. Kepala Bidang Ketenagaan, membawahi tiga Kasi :

- 1) Kasi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
 - 2) Kasi Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMK
 - 3) Kasi Tenaga Kebudayaan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Komunikasi dan Informatika Pendidikan (UPTD Tekkom dan Infodik)
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya (UPTD Taman Budaya)
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Mulawarman (UPTD Museum Mulawarman)
 - k. Cabang Dinas Wilayah I (Balikpapan dan PPU)
 - l. Cabang Dinas Wilayah II (KUTIM dan Bontang)
 - m. Cabang Dinas Wilayah III (Kutai Kartanegara)
 - n. Cabang Dinas Wilayah IV (Kubar dan Mahulu)
 - o. Cabang Dinas Wilayah V (Paser)
 - p. Cabang Dinas Wilayah VI (Berau)
 - q. Satuan Pendidikan

Untuk lebih jelasnya berikut ini bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah menurut kualifikasi, pangkat, golongan, jabatan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai menurut kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	3
2	Sekolah Lanjutan Tk. Pertama (SLTP)	8
3	Sekolah Lanjutan Tk. Atas (SLTA)	142
4	Diploma Satu (D-1)	2
5	Diploma Satu (D-2)	2
6	Diploma Tiga (D-3)	15
7	Diploma Empat (D-4)	1
8	Sarjana (S-1)	140
9	Pasca Sarjana (S-2)	13
10	Doktor (S-3)	2
	Jumlah	330

Tabel 2
Komposisi Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	29
3	Golongan III	43
4	Golongan IV	13
	Jumlah	86

Tabel 3
Komposisi Pegawai menurut Esselon

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah
1	Eselon I C	1
2	Eselon II A	2
3	Eselon II B	4
4	Eselon II C	15
5	Eselon II D	8
6	Eselon III A	4
7	Eselon III B	19
8	Eselon III C	6
9	Eselon III D	14
10	Eselon IV A	7
11	Eselon IV B	5
12	Eselon IV C	1
13	Non eselon	244
	Jumlah	330

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah seluas 3.884 m² terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, bangunan kantor seluas 2.072 m². Tanah bangunan gedung guru seluas 1.990 m², luas tanah Gedung Guru yaitu 2.284 m², dan luas gudang yaitu 120 m². Selain itu sarana dan prasarana lainnya yaitu kendaraan dinas berupa kendaraan roda empat sebanyak 17 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 32 unit, inventaris berupa AC sebanyak 51 unit, mesin ketik sebanyak 15 unit, lemari besi sebanyak 10 unit, mesin foto copy 11 unit, rak besi/kayu sebanyak 37 unit, filing besi/kayu sebanyak 23 unit, brankas sebanyak 37 unit, lemari kaca/kayu sebanyak 30 unit, overhead / proyektor sebanyak 10 unit, whiteboard sebanyak 11 unit, meja kerja sebanyak 300 set, personal komputer sebanyak 125 unit, lemari arsip dinamis sebanyak 25 unit, alat peraga olahraga dan kesenian sebanyak 18 set dan fasilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam keadaan baik dan sebagian lagi dalam keadaan kurang baik, diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Data Umum Pendidikan

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melayani jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan kewenangannya yang tersebar di seluruh Wilayah Kalimantan Timur dari Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah, juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/kota untuk penyelenggaraan pendidikan PAUD, DIKMAS, Pendidikan Dasar (SD & SMP).

Dari sumber data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Timur yang meliputi 7 Kabupaten dan 3 Kota, dapat di lihat seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Lembaga Pendidikan Tahun 2023

N0	URAIAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	PAUD	4	1.423	1.427
2	TK	89	1.346	1.435
3	SD	1.653	245	1.898
4	SMP	442	218	660
5	SMA	142	84	226
6	SMK	87	132	219
7	SLB	10	26	36

Sumber data dapodik 24 Januari 2023

Dari data tersebut di atas sebaran jumlah siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan dari 7 Kabupaten dan 3 Kota se Kalimantan Timur. Berikut tabel jumlah siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan.

Tabel 5
Jumlah Siswa menurut jenjang Tahun 2023

N0	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PAUD	13.051	12.514	25.565
2	Siswa TK	25.735	24.613	50.348
3	Siswa SD	180.492	165.384	345.876
4	Siswa SMP	73.189	69.522	142.711
5	Siswa SMA	31.018	38.787	69.805
6	Siswa SMK	41.566	29.610	71.176
7	Siswa SLB	1.461	718	2.179

Sumber data dapodik 24 Januari 2023

Dari jumlah lembaga pendidikan yang menjadi urusan wajib dan langsung di tangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada pula lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan sebagai berikut : Selain jumlah siswa, masih ada jumlah tenaga

pendidik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang tersebar di 7 Kabupaten dan 3 Kota dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Tenaga Pendidik Tahun 2023

N0	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tutor PAUD	-	6.932	6.932
2	Guru TK	452	4.247	4.699
3	Guru SD	20.424	2.910	23.334
4	Guru SMP	7.427	1.938	9.365
5	Guru SMA	3.511	746	4.257
6	Guru SMK	2.905	1.783	4.688
	Jumlah	34.719	11.624	46.343

Sumber data dapodik 24 Januari 2023

Dari jumlah lembaga pendidikan yang menjadi urusan wajibkan langsung di tangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada pula lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan sebagai berikut :

Tabel 7
Data siswa Madrasah Tahun 2022

N0	URAIAN	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	RA	124	4.838
2	Sekolah MI	130	25.891
3	MTs	161	26.956
4	MA	64	9.219

Sumber data Kemenag Prov. Kaltim/Semester I TA 2022

2.3. Kinerja Layanan PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan layanan di bidang pendidikan untuk memperluas akses pendidikan, maka terdapat anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur dari tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja (Impact)	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Target					Realisasi					Persentase Realisasi				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Partisiapasi Murni (APM) SMA/SMA	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat.	Jumlah Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama	72 Sekolah	85	100	150	200	233	80	100	150	215	-	94,1	100	100	107,5	85
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	-	-	-	60	65	70	-	-	60	85	-	-	-	100	145,45	-
		Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)	Jumlah SMK yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan pasar / Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia usaha dan industri	30 SMK	40	55	70	86	92	40	55	70	80	-	100	100	100	93,02	40
			Rata-rata Lama Sekolah	9,48	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,6	9,77	9,84	9,92	-	101,05	9,77	102,5	102,27	9,4
			Harapan Lama Sekolah	13,67	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	13,62	13,72	13,81	13,84	-	98,06	96,28	96,3	93,96	13,89
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	68,23%	70%	73%	77%	82%	85%	68,34%	73%	78,15%	83,30%	-	93,62	100	101,5	101,59	70%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	90%	92%	92%	94%	96%	85%	90,75%	92%	96,77%	95,09%	-	98,64	100	102,9	99,05	92%
		Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	-	-	-	95%	97%	100%	-	-	95,74	98,4	-	-	-	102,9	101,44	-
		Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa KALTIM TUNTAS	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS	791	6.500	13.000	19.500	26.000	31.700	9.125	28.235	48.504	39.942	-	140,38	217,19	248,74	153,62	6.500
		Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima sebanyak	635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.207	2.196	3.369	3.711	-	168,28	87,84	134,76	148,44	2.500
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pendidikan jarak jauh Berbasis Internet persentase pelayanan pendidikan luar biasa	0%	85%	90%	95%	97%	100%	65	85	90	93	-	76,47	100	94,73	95,88	85%
		Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	persentase pelayanan pendidikan luar biasa	0%	60%	65%	70%	75%	80%	66,26	65	87,61	82,75	-	110,43	100	125,15	110,33	60%

Tabel 9
Anggaran Dan Realisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.064.656.573,00	5.141.480.009,00	5.294.466.573,00	-	-	2.143.557.730,00	3.403.924.241,00	-	1,52%	66,21%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	862.472.417.150,00	1.312.311.915.554,00	864.728.001.150,00	-	-	793.357.371.542,00	827.185.295.044,00	-	52,16%	63,03%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	581.998.400,00	1.061.835.900,00	415.227.900,00	-	-	405.544.900,00	823.386.594,00	-	82,45%	77,54%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	9.345.471.180,00	6.669.736.000,00	9.345.471.180,00	-	-	6.377.431.392,00	5.982.548.318,00	-	-28,63%	89,70%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.453.809.438,00	3.014.634.000,00	2.359.882.442,00	-	-	2.864.118.058,00	2.580.284.086,00	-	-12,72%	85,59%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.771.836.850,00	117.610.975.038,00	16.564.929.150,00	-	-	14.753.833.833,00	114.277.489.976,00	-	601,24%	97,17%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	188.741.730.823,00	192.173.549.241,00	172.208.936.107,00	-	-	181.219.979.741,00	187.519.984.472,00	-	1,82%	97,58%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.093.757.175,00	1.309.905.400,00	3.093.757.175,00	-	-	2.528.305.184,00	1.062.068.239,00	-	-57,65%	81,08%
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	436.772.075.973,00	555.708.917.935,00	477.190.603.217,00	-	-	336.696.115.843,03	501.792.403.666,00	-	27,23%	90,30%
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	234.380.934.553,00	257.830.841.795,00	382.054.051.090,00	-	-	166.761.975.876,67	235.318.515.918,00	-	10%	91,27%
11	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	20.839.457.486,00	30.741.146.731,00	24.040.349.786,00	-	-	14.328.720.247,69	26.550.091.322,00	-	47,51%	86,37%
12	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	2.283.600.000,00	-	3.283.600.000,00	-	-	527.578.898,00	-	-	0%	0%
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	3.233.218.400,00	2.713.940.000,00	3.233.218.400,00	-	-	2.071.900.161,00	2.554.860.777,00	-	-16,06%	94,14%
14	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	-	-	-	1.141.299.800,00	2.000.000.000,00	-	-	-	781.035.000,00,00	-	100%	68,43%
15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	921.277.170,00	1.930.910.300,00	1.000.000.000,00	-	-	429.176.090,00	1.620.161.456,00	-	109,59%	83,91%
16	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	422.451.000,00	1.223.385.000,00	-	-	-	324.442.503,00	-	100%	76,80%
17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	-	-	75.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	4.580.000,00	-	-	0%	0%
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.554.803.200,00	3.271.114.000,00	2.686.114.000,00	-	-	863.678.350,00	2.982.579.498,00	-	28,04%	91,18%
19	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	1.188.704.200,00	813.067.400,00	813.067.400,00	-	-	474.144.900,00	657.105.690,00	-	-31,6%	80,82%

No	Program/Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
20	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	1.750.000.000,00	521.350.000,00	1.321.350.000,00	-	-	870.440.799,00	402.402.395,00	-	-70,2%	77,18%
21	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.091.375.000,00	1.653.790.000,00	1.765.400.000,00	-	-	956.915.373,00	1.365.172.713,00	-	-20,92%	82,55%
22	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	500.000.000,00	406.750.000,00	406.750.000,00	-	-	0	366.438.230,00	-	-18,65%	90,09%
23	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	2.031.288.890,00	5.094.594.074,00	2.031.288.890,00	-	-	1.579.209.804,00	4.124.352.318,00	-	150,8%	80,96%
24	UPTD TEKKOM	-	-	53.600.944.464,00	7.552.177.844,00	26.401.010.705,00	-	-	34.758.950.217,73	5.886.955.839,00	-	-85,91%	77,95%
25	UPTD TAMAN BUDAYA	-	-	5.173.431.133,00	10.810.218.233,00	1.959.200.250,00	-	-	4.155.093.142,00	9.936.035.241,00	-	108,95%	91,91%
26	UPTD MUSEUM MULAWARMAN	-	-	5.574.178.373,00	6.248.778.373,00	7.483.200.000,00	-	-	4.800.547.651,00	5.813.688.180,00	-	12,1%	93,04%
27	CABANG DINAS I	-	-	3.831.752.685,00	1.559.861.000,00	2.822.685.820,00	-	-	2.682.767.087,00	1.483.326.415,00	-	-59,29%	95,09%
28	CABANG DINAS II	-	-	3.508.286.095,00	1.210.904.000,00	1.775.000.000,00	-	-	1.318.166.045,00	1.031.569.814,00	-	-65,48%	85,19%
29	CABANG DINAS III	-	-	3.788.210.889,00	1.671.018.000,00	3.597.106.000,00	-	-	2.883.440.114,00	1.532.966.854,00	-	-55,88%	91,74%
30	CABANG DINAS IV	-	-	3.366.704.487,00	1.231.270.000,00	2.944.585.005,00	-	-	1.937.188.668,00	1.181.517.983,00	-	-63,42%	95,96%
31	CABANG DINAS V	-	-	3.470.730.580,00	1.240.800.000,00	4.185.000.000,00	-	-	1.551.712.233,00	1.210.368.956,00	-	-64,24%	97,55%
32	CABANG DINAS VI	-	-	3.833.839.400,00	1.300.560.000,00	4.744.784.930,00	-	-	1.376.007.188,00	1.259.207.755,00	-	-66,07%	96,82%

Tabel 10

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
-	Kategori Indeks Pencapaian SPM	TUNTAS MADYA			89.02 %
-	Pendidikan Menengah				94.60 %
-	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.22 %
-	Jumlah Yang Harus Dilayani :	171,295	161,066	10,229	94%
-	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19.38 %
-		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	96.89 %
1	Buku Teks Pelajaran	200	200	0	100.00 %
2	Perlengkapan Belajar	65	65	0	100.00 %
3	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	5,994	5,581	413	93.11 %
4	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	453	433	20	95.58 %
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	161,066	161,066	0	100.00 %
6	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	9,726	9,575	151	98.45 %
7	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	404	399	5	98.76 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output Jumlah Siswa			Total Pencapaian
8	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	3,205	2,859	346	89.20 %
-	Pendidikan Khusus				83.44 %
-	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.09 %
-	Jumlah yang Harus Dilayani :	3,192	2,597	595	81%
-	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18.35 %
-		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	91.77 %
1	Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	34	34	0	100.00 %
2	Perlengkapan belajar	200	200	0	100.00 %
3	Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	34	29	5	85.29 %
4	Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	540	422	118	78.15 %
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2,597	2,597	0	100.00 %
6	Kualitas Pendidik Yang Berkualifikasi S1/D-IV	394	355	39	90.10 %
7	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Yang Berkualifikasi S1/D-IV	33	31	2	93.94 %
8	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) Yang Berkualifikasi SMA/Sederajat	143	124	19	86.71 %

2.4. Tantangan, Peluang, Pengembangan dan Sasaran Pelayanan PD

1. Tantangan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap satuan kerja perangkat daerah dihadapkan dengan tantangan yang harus di hadapi agar rencanaprogram dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan target-target yang telahditetapkan.

Tantangan ada yang berasal dari internal satuan kerja perangkat daerah dan juga ada yang berasal dari eksternal lingkungan satuan kerja perangkat daerah, yang perlu diwaspadai dan mendapat perhatian serta pemecahannya agar tidak menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan antara lain :

- a. Terbatasnya sumber daya pegawai yang berkualitas dan memiliki intergitas yang tinggi
- b. Belum tertatanya manajemen kinerja dalam satuan kerja perangkat daerah yang berbasis Informasi Teknologi
- c. Belum Optimalnya standar pelayanan minimal(SPM) Pendidikan di satuan kerja perangkat daerah
- d. Belum tersedianya unit pengaduan masalah sebagai bahan evaluasi satuan kerja perangkan daerah
- e. Banyaknya peraturan perundangan yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan
- f. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar satuan kerja perangkat daerah
- g. Terbatasnya kewenangan Provinsi untuk secara langsung menangani pendidikan

- h. Letak geografis wilayah yang sulit
- i. Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Selain tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan rencana kegiatan satuan kerja perangkat daerah terdapat peluang untuk pengembangan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Peluang yang telah ada perlu di gali dan dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan memperlancar jalanya program kegiatan. Adapaun peluang pengembangan yang ada di satuan kerja perangkat antara lain:

- a. Adanya struktur organisasi yang lengkap dan utuh;
- b. Dukungan dana 20 % sesuai dengan amanat undang-undang;
- c. Adanya komitmen dari karyawan untuk maju dan berkembang;
- d. Adanya kerjasama antar staf yang solid;
- e. Tersedianya sarana dan prasaranya yang memadai;
- f. Berkembangnya teknologi dan informasi ;
- g. Adanya dukungan Kepala Daerah untuk pengembangan satuan kerja perangkat daerah;
- h. Berkembangnya lembaga pendidikan yang bermutu;
- i. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pengembangan pendidikan baik nasional maupun internasional;
- j. Berkembangnya kerjasama pemerintah dengan swasta.

Adapun kelompok sasaran yang ingin dituju terkait pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun dalam perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur tahun 2024- 2026 meliputi:

1. Masyarakat Kalimantan Timur sebagai pengguna layanan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Satuan Pendidikan
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Siswa/Siswi Sekolah dan Mahasiswa
5. Lembaga yang terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kalangan Dunia Usaha
7. Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Instansi terkait lainnya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain Tugas Pokok tersebut di atas terdapat fungsi yang melekat pada PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan tinggi; Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk tiga tahun mendatang.

Selain tugas pokok dan fungsi yang tertuang melalui Peraturan Gubernur masih ada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah

RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah :

1. Pengelolaan Pendidikan Menengah;
2. Pengelolaan Pendidikan Khusus;
3. Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
4. Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan, ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk tiga tahun mendatang.

Masalah pokok yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama Tiga tahun mendatang antara lain :

1. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM di Bidang Pendidikan Menengah dan Khusus
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Kebudayaan

Dari masalah pokok diatas terdapat beberapa Permasalahan yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama Tiga tahun mendatang antara lain :

1. Belum Optimalnya Pencapaian APM, APK, dan APS SMA/SMK/Khusus di beberapa wilayah Kalimantan Timur.
2. Belum Optimalnya Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Dari Permasalahan diatas dapat dijabarkan beberapa akar masalah yang menghambat kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur, Akar masalah yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama Tiga tahun mendatang antara lain :

1. Belum Optimalnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan secara pelayanan dasar dan mutu Pendidikan
2. Belum terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang telah diperhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah menengah dan Pendidikan khusus di wilayah tersebut
3. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

32. 2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 2024- 2026 “ **Mewujudkan SDM Berdaya Saing** “. Tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah gambaran umum yang ingin di capai pemerintah Daerah melalui beberapa sasaran. Untuk melaksanakan rencana strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memacu pada salah beberapa sasaran Rencana Pembangunan Daerah yaitu sasaran 1 (satu) yaitu : “**Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.**”

Untuk mewujudkan sasaran 1 Rencana Pembangunan Daerah diperlukan langkah-langkah srategis, yaitu perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci yang perlu di tempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur agar rencana pembangunan jangka menengah khususnya bidang pendidikan dapat tercapai.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024- 2026 perlunya adanya indikator Kinerja Utama, Indikator kinerja Kunci serta program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yaitu: “ **Mewujudkan SDM Berdaya Saing.**” Serta untuk mewujudkan tujuan itu maka dalam RPD telah ditetapkan indikator sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah
2. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah

Sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan indikator agar arah kebijakan dapat berjalan sesuai sasaran. Adapun sasaran yang telah tertuang dalam RPD adalah Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.

Adapun indikator sasaran dalam RPD Kalimantan Timur di bidang sumber daya manusia yang akan di capai dalam tiga tahun mendatang adalah sedangkan indikatornya adalah :

1. Rata-rata lama sekolah dari capaian tahun 2022 adalah 9,92 tahun dengan target pada akhir periode RPD sebesar 10,4 tahun pada tahun 2026;
2. Harapan Lama Sekolah dari capaian tahun 2022 adalah 13,84 tahun dengan target pada akhir periode RPD sebesar 14,34 tahun pada tahun 2026.

33. 3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga K/L

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam naskah yang dimaksud adalah: “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil

Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”.

Misi yang diturunkan dan untuk mencapai visi di atas, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.;

Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek. Tujuan Kemendikbudristek sebagai berikut:

1. perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;;
2. penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. pelestarian objek pemajuan Kebudayaan, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam Pendidikan dan Kebudayaan;
4. peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mempengaruhi permasalahan dalam

melaksanakan layanan, ditinjau dari visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 11
Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kebudayaan Terkait Pencapaian Tujuan dan Sasran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Sasaran 1 Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.”		
Faktor		
	Penghambat	Pendorong
1	Motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalitas belum optimal	Program pengembangan dan pembinaan profesionalme pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dan diprioritaskan untuk dikembangkan
2	Program peningkatan kualitas guru PNS maupun non PNS belum efektif meningkatkan mutu lulusan Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK-PLK	
3	Rendahnya APM dan APK SMA/SMK di beberapa wilayah Kalimantan Timur	Pemetaan masalah dan pengembangan program perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah tersedia dan siap untuk diimplementasikan.
4	Peningkatan pemenuhan standar pendidikan secara kualitas maupun kuantitas dan pemerataan sarana prasarana Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK-PLK belum optimal	Program Pengelolaan Pendidikan yang telah dilaksanakan dan diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah.
5	Masih adanya angka putus sekolah untuk siswa sekolah dasar maupun sekolah menengah hingga keperguruan tinggi	Program Prioritas yaitu pemberian beasiswa untuk seluruh masyakat terutama pada usia sekolah yang rentan miskin
6	Kurang optimalnya fungsi dan pembagian peta jabatan pada cabang dinas	Kapasitas kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan SDM dan Sumber Daya lain cukup memadai untuk menangani berbagai hambatan yang ada dan mencapai tujuan/ sasaran pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur
7	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan implementasi perubahan kebijakan pendidikan dari Kementerian membutuhkan waktu yang relatif lama	
8	Penerapan TIK dalam pembelajaran belum optimal terutama pada daerah 3T	Kinerja UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan memadai untuk melakukan pembinaan terhadap guru
9	Belum optimalnya sinergi pembangunan bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Daerah lainnya	Kemampuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk merancang kebijakan dan implementasinya guna membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun pendidikan di Kalimantan Timur memadai 10.
10	Belum terbangun sinergi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar Kabupaten/Kota	

34 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumuskan, melaksanakan, pengevaluasian dan pelaporan kebijakan di bidang pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler. Demikianlah telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

35 5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada Visi, misi, tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil telaahan dari beberapa acuan untuk menentukan isu- isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiga tahun mendatang, dan tugas pokok dan fungsinya maka dapat dikemukakan dan perlu mendapat pemecahan selama pembangunan pendidikan tiga tahun maka isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah: berdasarkan IKU

1. Belum optimalnya Revitalisasi Pendidikan Vokasi
2. Belum optimalnya pencapaian Rapor Pendidikan Publik
3. Belum tercapainya target nasional tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Terbatasnya pelayanan jaringan telekomunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pendidikan
5. Belum optimalnya pengelolaan Kebudayaan

Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara umum disusun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdapat beberapa isu-isu strategis yang memperoleh perhatian serius:

1. Belum meratanya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
2. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah

3. Pelaksanaan Kurikulum Dual Track
4. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%.
5. Dilaksanakannya secara sungguh-sungguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
6. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Leading Sector.
7. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mengoptimalkan kembali Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah Kalimantan Timur.
8. Terpenuhinya akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA).
9. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan.
10. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SMK/SLB.
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
12. Reformasi Perbukuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society.
13. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
14. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.

15. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi.
16. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.
17. Dilakukanya kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi.
18. Ditingkatkanya sarana pementasan budaya diberbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, maka Tujuan dan sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur,

No	TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemerataan taraf Pendidikan masyarakat.	Harapan Lama Sekolah	13,84	14,13	14,04	14,09	14,15
		Rata-rata lama sekolah	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	84,6	85,00	85,50	86,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,10	77,84	78,5	79,3	80,1
3	Melestarikan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92	61,76	63,26	64,76	66,26

No	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51	90,5	91,5	92,5	93,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%
3	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	59,92%	61%	62%	63,5%	65%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	32 OPK	34 OPK	36 OPK	39 OPK	42 OPK

Tabel 13

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya Harapan lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK(%)	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK(%)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Angka Kelulusan SMA	Angka Kelulusan SMA
									Meningakatnya APK SMA/SMK	APK SMA/SMK
									Meningkatnya APM SMA/SMK	APM SMA/SMK
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
									Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
						Meningkatnya Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus		Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMA	Indeks Iklim Keamanan SMA
									Meningkatnya Indeks Kebinekaan SMA	Indeks Kebinekaan SMA
									Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMA	Indeks Iklim Inklusivitas SMA
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Angka Kelulusan SMK
						Meningakatnya APK SMA/SMK	APK SMA/SMK			
						Meningkatnya APM SMA/SMK	APM SMA/SMK			
						Meningkatnya Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional			
						Meningkatnya Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional			
						Meningkatnya Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMK	Indeks Iklim Keamanan SMK
									Meningkatnya Indeks Kebinekaan SMK	Indeks Kebinekaan SMK
Meningkatnya Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMK	Indeks Iklim Inklusivitas SMK						
			Meningkatnya kemampuan daya Saing SMA/SMK/SLB yang berkualitas	Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi						

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SLB (%)	Angka Partisipasi Sekolah SLB(%)	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya APK SLB	Meningkatnya APK SLB
									Meningkatnya Angka Kelulusan Sekolah Khusus	Angka Kelulusan SLB
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
						Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		Meningkatnya Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.
									Meningkatnya Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.
						Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SDLB	Indeks Iklim Keamanan SDLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Indeks Iklim Keamanan SMPLB
									Meningkatnya Indeks Iklim Keamanan SMALB	Indeks Iklim Keamanan SMALB
									Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB
					Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terselenggaranya penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah
								Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	Pemindahan Pendidik dan Tenaga ependidikan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi
								Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Data Aset	Jumlah Laporan Data Aset
								Administrasi Umum Perangkat	Tersedianya Penunjang Kinerja Pegawai	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya dukungan Penunjang Kinerja Pegawai	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang
3	Melestarikan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Kebudayaan yang dikembangkan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah	Meningkatnya Pelaku Seni dan Budaya di Kalimantan Timur	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi
								Pelestarian kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah	Meningkatnya Pelestari dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelestari yang diapresiasi
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten /Kota Provinsi	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesenian	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya
					Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Persentase Lembaga Sejarah Dibina Provinsi	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Tersedianya Data Sejarah dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat
				Persentase pelestarian Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Meningkatnya Objek benda dan tak benda yang ditetapkan	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Meningkatnya pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan
					Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Terfasilitasinya Pengelolaan Museum	Jumlah Museum yang difasilitasi

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPD Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024- 2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 14
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan SDM Berdaya Saing	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
			Optimalisasi Boarding School
			Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
			Peningkatan literasi dan numerasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutSPPuhan pasar
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAkhlaK yang Berorientasi Pelayanan Publik	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
			Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
			Deregulasi Kebijakan
			Penyederhanaan Organisasi
			Perbaikan Tata Laksana
			Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Pembentukan tim ahli cagar budaya serta Pemenuhan SDM yang memenuhi kualifikasi dan melakukan penganggaran untuk pelestarian pada cagar budaya yang telah di tetapkan
		Peningkatan Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelaksanaan kurikulum muatan lokal tentang pelesatrian kesenian tradisional dan budaya lokal pada satuan pendidikan

BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan layanan dan untuk memperluas akses di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur memiliki rencana program dan kegiatan dari tahun 2024 s.d 2026 sebagai berikut :

Tabel 15
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1	Urusan Wajib
1	Pendidikan
1.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.01.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.01.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.01.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.01.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.01.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.1.01	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.01.58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1.01.02.1.01.59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.02.1.01.67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1.01.02.1.01.68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.01.70	Pembangunan Ruang Laboratorium
1.01.02.1.01.71	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Laboratorium
1.01.02.1.01.72	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.02.1.01.73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1.01.02.1.01.78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
1.01.02.1.02	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.02.18	Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.1.02.28	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.02.51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1.01.02.1.02.52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.02.1.02.62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.02.63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
1.01.02.1.02.64	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.02.1.02.69	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.1.02.72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
1.01.02.1.03	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah
1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
1.01.02.1.03.57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
1.01.02.1.03.58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.02.1.03.69	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.1.03.70	Pembangunan Ruang Kelas Baru
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.1.01	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.02.1.01	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.1.02	PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional
2.22.03.1.01	PEMBINAAN Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.22.04.1.01	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.1.01	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya
2.22.05.1.02	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.22.06.1.01	PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

6.2 Kerangka Pendanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur memiliki rencana pendanaan dari tahun 2024 s.d 2026 :

Tabel 16
Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL	TARGET PENDANAAN 2024-2026					
		2022	2024		2025		2026	
		K	K	RP	K	RP	K	RP
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	83,3%	100%	1.937.403.464.623	100%	2.032.173.637.855	100%	2.133.782.319.747
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	80%	100%	42.936.908.696	100%	45.083.754.131	100%	47.337.941.837
3	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,21 %	88,48 %	2.316.628.833	91,67 %	2.432.460.275	94,27 %	2.554.083.289
4	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	84,07 %	87,49 %	2.416.628.833	90,91 %	2.537.460.275	94,33 %	2.664.333.289
5	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	92,53 %	94,87 %	1.916.628.833	96,81 %	2.012.460.275	97,59 %	2.113.083.289
6	Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,23 %	67,69 %	16.985.973.650	71,14 %	17.835.272.333	74,61 %	18.727.035.949
7	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	58,84 %	60,34 %	20.985.973.650	62,26 %	22.035.272.333	64,31 %	23.137.035.949
8	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82,50 %	79,00 %	82.272.046.085	87,00 %	86.385.648.389	90,00 %	90.704.930.809
9	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,30 %	94,00 %	38.068.917.750	95,21 %	39.972.363.638	96,42 %	41.970.981.819
10	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	100%	11.721.560.000	100%	12.307.638.000	100%	12.923.019.900
11	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	98,4%	100%	9.596.846.500	100%	10.076.688.825	100%	10.580.523.266
12	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	85%	86%	8.628.175.290	87%	9.490.992.819	88%	10.440.092.101
13	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65%	66%	6.400.000.000	67%	7.040.000.000	68%	7.744.000.000
14	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75%	77%	845.339.660	78,5%	929.873.626	80%	1.022.860.989
15	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55%	62%	4.000.000.000	63,5%	4.240.000.000	65%	4.496.000.000
16	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45%	47%	2.866.129.700	48,5%	3.152.742.670	50%	3.468.016.937
17	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0	90	724.418.873.029	91,5	757.489.816.680	93	795.364.307.514
18	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindak lanjuti	0%	100%	667.719.904.868	100%	674.094.129.002	100%	749.577.256.087

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan layanan di bidang pendidikan untuk memperluas akses pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Kalimantan Timur memiliki Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, sebagai berikut :

Tabel 17
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL		TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51 %	90,5%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%	80,1%
6	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92%	62%	63,5%	65%	65%	65%
7	Persentase pelestarian Cagar Budaya	32 OPK	34 OPK	37 OPK	40 OPK	40 OPK	40 OPK

Tabel 18
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN IKU
1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian SPM Pendidikan
		Persentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar SMA/SMK+ Persentase Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Pelayanan Dasar
		Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Total Nilai Presepsi Per Unsur : Total Unsur X Nilai Penimbang = SKM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat	Perhitungan Diperoleh Dari Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
3	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Ditetapkan X 100%
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persentase	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan : Jumlah Cagar Budaya Yang Di Tetapkan X 100%

Tabel 19
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KONDISI AWAL	TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	83,3%	100%	100%	100%	100%
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	80%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	85,21 %	88,48 %	91,67 %	94,27 %	94,27 %
4	Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	84,07 %	87,49 %	90,91 %	94,33 %	94,33 %
5	Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	92,53 %	94,87 %	96,81 %	97,59 %	97,59 %
6	Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	64,23 %	67,69 %	71,14 %	74,61 %	74,61 %
7	Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	58,84 %	60,34 %	62,26 %	64,31 %	64,31 %
8	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82,50 %	79,00 %	87,00 %	90,00 %	90,00 %
9	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92,30 %	94,00 %	95,21 %	96,42 %	96,42 %
10	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	86 %	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	59,41%	63,67%	65,80%	67,93%	67,93%
12	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	85%	86%	87%	88%	88%
13	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	65%	66%	67%	68%	68%
14	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	75%	77%	78,5%	80%	80%
15	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	55%	62%	63,5%	65%	65%
16	Persentase Pengelolaan Permuseuman	45%	47%	48,5%	50%	50%
17	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0%	100%	100%	100%	100%
18	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	0%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai selama tiga tahun anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sekaligus juga merupakan rambu-rambu yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Samarinda, 02 Juli 2023

Kepala ,

Muhammad Kurniawan, S.E., AK., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701028 199703 1 008

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan norma standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Selain itu penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022.
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu Strategis yang berkembang;
- e. Kebijakan Nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan/stakeholders.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Kalimantan Timur dengan masyarakat yang sehat sejahtera, merata dan berkeadilan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun rencana strategis di bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mensinergikan terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI guna meningkatkan pembangunan kesehatan nasional dan sinergitas koordinasi terhadap Renstra Dinas Kesehatan 10 Kabupaten/Kota melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunannya dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Dokumen ini merupakan pedoman seluruh upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya dan para pelaku pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerjanya yang bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan satu pola

tindak. Renstra ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertekad mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan kepada kemandirian dan kemampuan daya saing global melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan kesehatan, pembangunan ketenagaan/aparatur, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan wilayah potensial.

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan baik yang bersifat nasional maupun global, maka untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan, perlu adanya kejelasan tentang kondisi pembangunan kesehatan dewasa ini dan kecenderungannya, serta adanya acuan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang lebih jelas dan spesifik.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, dalam tiga dekade ini, telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian derajat kesehatan di Indonesia masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Padahal kesehatan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya

angka kematian akibat penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan, serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diantaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan bidang kesehatan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2024-2026; dan
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang Kesehatan di daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2024-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2024-2026;

3. Menjadi pedoman penyusunan program/kegiatan/subkegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif dalam penyusunan APBD.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika penyajian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
2. Sumber Daya;
3. Kinerja Pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan Pelayanan;
2. Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan Sasaran tahun 2024-2026;
2. Cascading Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, serta Indikatornya masing-masing).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tugas Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas kesehatan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

2.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

a. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan bidang kesehatan.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pengelolaan Asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

b) Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

c) Sub Bagian Umum

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi;

- 2) masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- a) Seksi Kesehatan Keluarga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga

- b) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

- c) Seksi Gizi, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Gizi, kesehatan kejadian olah raga

d. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.

- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan

- b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- c) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA

- e. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN.

Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN

c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional, Matra, Indera dan Laboratorium.

f. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

(1) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :

- a. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
- c. RS. Mata
- d. RSUD. KORPRI

(2) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah susunan struktur organisasi yang akan melaksanakan tugas-tugas pokok kedinasan. Susunan kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;

Sekretariat terdiri dari :

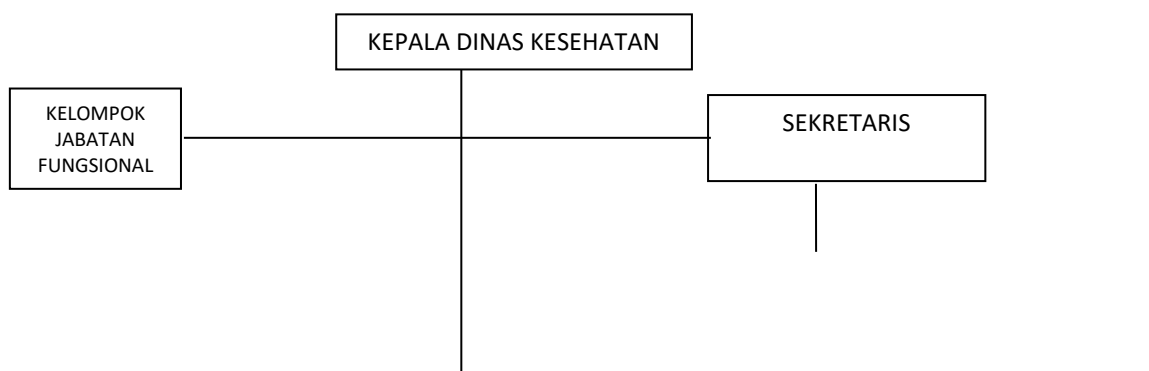
- a. Sub Bagian Perencanaan Program (Jafung);
- b. Sub Bagian Keuangan (Jafung);
- c. Sub Bagian Umum

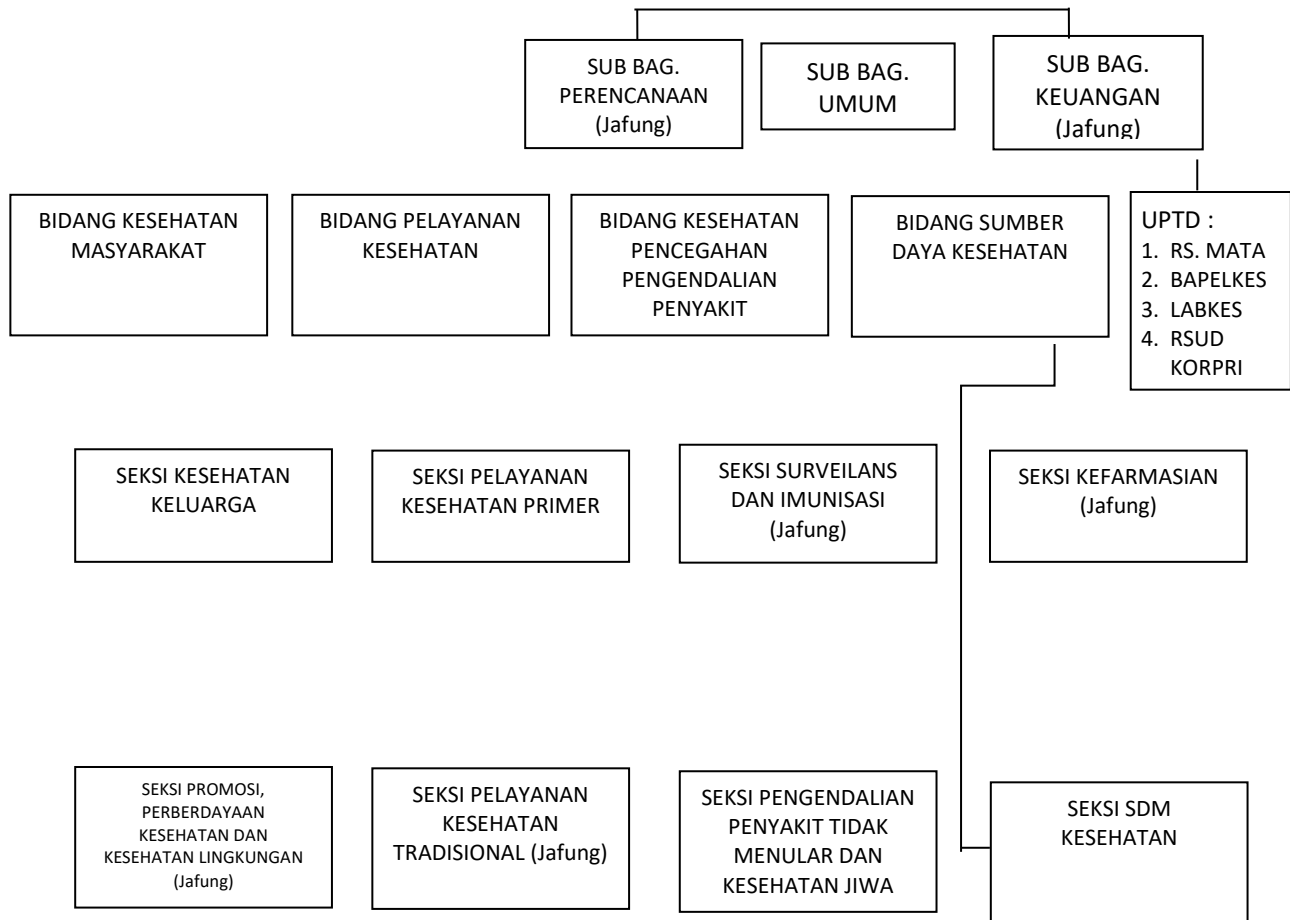
3. Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional (Jafung)

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur





2.2. SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

A. Data Ketenagaan

Tenaga kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Komposisi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta unit pelaksanaan teknis daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan dengan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021

No	Pendidikan	Dinkes		Bapelkes		Labkes		RS. Mata		RS. KORPRI		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SD	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	SLTP	3	0	1	0	2	1	0	0	0	0	7
3.	SLTA	18	2	9	1	1	0	3	1	1	0	36
4.	D1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
5.	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	D3	1	1	0	0	6	4	2	11	2	1	28
7.	D4	0	1	0	0	1	3	1	1	0	2	9
8.	S1	18	14	3	3	2	5	2	3	0	6	56
9.	S2	5	11	3	6	2	1	2	1	0	2	33
10	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.												
	Jumlah	50	30	19	10	14	14	10	17	3	11	178

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari data pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD berdasarkan Klasifikasi Pendidikan terhadap jenis kelamin sebagian besar adalah berpendidikan S1 (56 orang/31%) yang terbagi atas jenis kelamin laki-laki (25 orang/44%) dan perempuan (31 orang/56%) dan yang paling sedikit berpendidikan SD (2 Orang/1%) yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan Ruang
Per 31 Desember 2021

No	Unit Kerja	Golongan Kepegawaian				Jumlah
		IV	III	II	I	
I	Dinas Kesehatan					
1	Sekretariat	3	10	8	1	22
2	Bidang Kesmas	5	10	1	1	17
3	Bidang P2P	2	10	3	0	15
4	Bidang Yankes	2	6	2	0	10
5	Bidang SDK	2	12	1	1	16
II	UPTD					
6	Bapelkes	6	11	10	2	29
7	Labkes	4	17	4	3	28
8	RS. Mata	2	23	2	0	27
9	RS. KORPRI	2	10	2	0	14
Jumlah		28	109	33	8	178

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari data pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD berdasarkan golongan dan ruang sebagian besar adalah golongan III yakni sebanyak 109 orang (61%) dan yang paling sedikit adalah golongan I yakni sebanyak 8 orang (4%).

B. Data Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana sesuai dengan tabel :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah Kantor Dinkes Prov Kaltim	7.273 m ²
2	Luas Bangunan dan Gedung	3.950 m ²
3	Bangunan terdiri dari:	
	a. Gedung	4 Unit
	b. Mushola	1 Unit
	c. Gudang	2 Unit
	d. Aula	1 Unit
	e. Ruang Rapat	2 Unit
	f. Tempat Parkir Roda 2	1 Unit
4	Alat Angkutan:	
	a. Kendaraan Roda 4	14 Unit
	b. Kendaraan Roda 2	5 Unit

Sumber: Data Inventaris Barang Dinas Kesehatan Prov.Kaltim 2022

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah tanah seluas 7.273 m² dan bangunan gedung kantor 3.950 m².

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah tanah seluas 7.273 m² dan bangunan gedung kantor 3.950 m².

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jalan Abdul Wahab Syahrane No. 16, Kotak Pos No. 1064 Telp. 0541-743908 Fax. 743810-733427 Samarinda dan alamat UPTD yaitu :

1. RS. Mata Samarinda yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Samarinda.
2. UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan yang terletak di Jalan Wolter Mangonsidi Samarinda.
3. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan yang terletak di Jalan Achmad Dahlan di Samarinda.

4. UPTD RSUD KORPRI yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa di Samarinda.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTIM

Kinerja Pelayanan Kesehatan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu bangsa. Pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan serta kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun (2019-2023) ini telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur, meskipun ada beberapa yang masih belum memenuhi target serta memerlukan upaya keras dan berkesinambungan agar dapat lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 5 tahun terakhir.

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020								
	Dinas Kesehatan							
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal 4 kali (K4)	30	%	100	50	%	100
	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi.	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya	3050	Orang	1384	3100	Orang	3022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	20	%	40	40	%	60
	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan	72	Fasyankes	72	150	Fasyankes	71

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		kefarmasian sesuai standar						
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yang mendapatkan izin kefarmasian	15	Sarana	15	19	Sarana	34
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yang mendapatkan izin alat kesehatan	13	Sarana	22	16	Sarana	25
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	99	%	99,24	99	%	96,9

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok)	99	%	100	99	%	66
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas minimal terakreditasi utama	15	%	23,5	43	%	23,5
	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	28	Puskesmas	44	80	Puskesmas	55
	Peningkatan pelayanan	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan	3	RSUD	3	7	RSUD	7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	kesehatan rujukan	pendampingan akreditasi SNARS edisi I						
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan Telemedicine	0	Kab/Kota	0	2	Kab/Kota	2
		Persentase KLB yang ditangani	100	%	100	100	%	100
		Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	100	%	100	100	%	100
	Peningkatan pelayanan	Jumlah kab kota yang telah melakukan	6	Kab/Kota	6	7	Kab/Kota	7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	kesehatan Pengembangan	pembinaan penyehat tradisional						
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan RS UPTD sesuai standart	60	%	60	70	%	70
	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Jumlah RS UPTD yang dipenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan	1	RS	1	2	RS	2
	Program pemeliharaan	persentase sarana prasarana dan alat	90	RS	90	100	RS	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	kesehatan RS UPTD yang layak pakai sesuai standar						
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah RS UPTD yang dipelihara sarana prasarana dan alat kesehatan	1	RS	1	2	RS	2
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase prasarana layanan yg menggunakan BLUD.	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	60	%	92	70	%	100
	Pendidikan dan pelatihan teknis Kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan bidang Kesehatan	600	Tenaga	463	660	Tenaga	296
	Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T yang memiliki tenaga	0	Puskesmas	0	25	Puskesmas	13

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	pelayanan Kesehatan	kesehatan sesuai standar						
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5	Kab/Kota	5	6	Kab/Kota	6
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR $\geq$ 70% dan SR $\geq$ 90%	2	Kab/Kota	2	4	Kab/Kota	4
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase	3	Kab/Kota	3	4	Kab/Kota	4

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		ODHA yang mendapatkan ARV $\geq$ 55%						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar $\geq$ 95%	6	Kab/Kota	6	7	Kab/Kota	7
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	3	Kab/Kota	3	5	Kab/Kota	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	7	Kab/Kota	10	8	Kab/Kota	10
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	8	Kab/Kota	10	9	Kab/Kota	10
		Persentase Kab/Kota yang melakukan persiapan pencegahan kejadian bencana	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Persentase Kab/Kota yang melakukan persiapan pencegahan KLB	100	%	100	100	%	100
	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	3	PD Prov Kaltim	0	6	PD Prov Kaltim	35
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	30	%	10	50	%	20

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)	2	Kab/Kota	2	3	Kab/Kota	3
		Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	3	Kab/Kota	3	5	Kab/Kota	5
	Program Penanggulangan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang	95	%	95	97	%	97

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kemiskinan Bidang Kesehatan	mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan						
	Kemitraan Bagi Pasien Tidak Mampu, Non BPJS	Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan	132.000	Penduduk	132.000	132.000	Penduduk	132.000
		Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Program Promosi Kesehatan dan Perberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	60	%	100	70	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan Penguatan OPD / Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	3	Kegiatan	3	6	Kegiatan	3
		Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	5	Saluran	5	5	Saluran	5
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		dan PHBS) dalam setahun						
		Jumlah RS Pemerintah di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS	10	RS	10	15	RS	15
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85	%	85	86	%	86
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan	Unit kerja PD yang memiliki kinerja	5	Unit	5	5	Unit	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Sarana dan Prasarana Aparatur	pelayanan tepat waktu						
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	5	Unit	5	5	Unit	5
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	5	Unit	5	5	Unit	5
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	30	%	30	40	%	40

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemerintah Daerah							
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah pertahun	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	25	PNS	25	30	PNS	30
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67	%	67	68	%	68
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10
	UPTD Balai Latihan Kesehatan							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100	%	100	100	%	100
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan	Unit kerja PD yang memiliki kinerja	3	Unit	3	3	Unit	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Sarana dan Prasarana Aparatur	pelayanan tepat waktu						
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemerintah Daerah	Kelembagaan Pemerintah Daerah						
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	10	PNS	10	10	PNS	10
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Bapelkes terakreditasi	1	Unit	1	0	Unit	0
	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan penegndalian tenaga kesehatannya	55	%	55	100	%	100
	Pendidikan teknis Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang	150	Tenaga	150	200	Tenaga	200

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		ditingkatkan kapasitasnya						
	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0	%	0	70	%	70
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	3	3	Unit	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan perlengkapan sarana prasarana tercukupi	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan perlengkapan sarana prasarana tercukupi	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60	%	60	65	%	65
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		dan minuman (untuk tamu dan rapat)						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi klasifikasi, kompetensi dan kinerja	90	%	90	90	%	90
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	20	PNS	20	30	PNS	30
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan bahan habis pakai yang tersedia	100	%	100	100	%	100
	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Buffer stok obat dan bahan pakai habis tersedia	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	21	Unit	21	21	Unit	21
	Pembangunan Rumah Sakit	jumlah unit ruang/bangunan yang direhab/dibangun	0	Unit	0	1	Unit	1
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	10	Unit	10	10	Unit	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	50	%	50	60	%	60
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		10	Unit	10	10	Unit	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan	Jumlah unit sarana prasarana dan alkes yang dipelihara	1	Unit	1	1	Unit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Limbah Rumah Sakit							
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100	%	100	100	%	100
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	21	Layanan	21	21	Layanan	21
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	95	%	95	100	%	100
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan Tersedianya tenaga teknis BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah bulan tersedianya barang jasa BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	UPTD Laboratorium Kesehatan							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100	%	82.29	100	%	88.3
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100	Unit	100	100	Unit	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi klasifikasi,	90	%	90	90	%	90

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		kompetensi dan kinerja						
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	20	PNS	20	30	PNS	30
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan bahan habis pakai yang tersedia	100	%	199	100	%	100
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Buffer stok obat dan bahan pakai habis tersedia	100	%	100	100	%	100
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan tersedianya barang dan jasa BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	UPTD RS. Korpri							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100	%	69.60	70	%	91.2
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100	%	81.64	100	%	92.33

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana dan prasarana	59	Unit	56	23	Unit	21
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	52	Unit	28	44	Unit	40
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100	%	67.02	100	%	88.33

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	83	Kegiatan	45	75	Kegiatan	74
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	65	90	Kegiatan	85
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	40	OK	38	70	OK	66

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi klasifikasi, kompetensi dan kinerja	90	%	94.21	90	%	94.53
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan bahan habis pakai yang tersedia	82	%	0	84	%	82.11
	Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Medis	Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar	82	%	0.27	84	%	82.11
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0	-	0	100	%	0
	Peningkatan Pelayanan	Kualitas layanan administrasi RS	0	-	0	100	%	59.35

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kesehatan Rujukan							
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	80	%	0	90	%	46
	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang diadakan						
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	309	Unit	215	3	Unit	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/ Balai yang diadakan	0	-	0	100	Bahan	4
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	100	%	34.16	100	%	84
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara	1	Paket	1	2	Paket	2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	Dinas Kesehatan							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	%	100	100	%	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prsasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	68	%	68	75	%	75

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	%	88	80	%	68
	Distribusi Alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Laporan Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan	2	Laporan	2	2	Laporan	2
		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat yang diadakan berdasarkan Kelas terapi	10	Kelas Terapi	10	10	Kelas Terapi	10
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis telemedicine, dll)	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di DTPK	2	Kab	2	3	Kab	3
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, pengembangan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		penyediaan Fasyankes						
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pengadaan alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar	8	Unit	8	10	Unit	10
		Jumlah pemeliharaan alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar	23	Unit	23	30	Unit	30
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara	10	Jenis	10	10	Jenis	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Fasilitas Layanan Kesehatan							
	Pengembangan Unit Pemeliharaan Faskes Regional (RMC)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengembangan Unit RMC	8	Kab/Kota	8	9	Kab/Kota	9
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60	%	60	70	%	70
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendataan/Pembinaan/Monev/Pengawasan dan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Pengendalian Gizi Masyarakat						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	6	Kab/Kota	6	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	60	%	20	70	%	60
	Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Pendataan/Pembinaan/Monev/Pengawasan dan Pengendalian Kesjaor						
		Pengadaan logistik pemeriksaan kebugaran	6	Jenis	6	6	Jenis	6
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan standart	60	%	60	70	%	70

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten/kota yang mampu mencapai pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	7	7	Kab/Kota	7
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Persalinan di faskes (PF) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	8	7	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan nifas lengkap (KF3) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	8	7	Kab/Kota	7
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan neonatus lengkap (KN Lengkap) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	9	7	Kab/Kota	8
		Kabupaten/kota yang mampu	6	Kab/Kota	7	7	Kab/Kota	9

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		mencapai Pelayanan Kesehatan Bayi sesuai target yang telah ditentukan						
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Balita sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	4	7	Kab/Kota	8
		Kabupaten/kota yang mampu melakukan Pelayanan Kesehatan Peduli	6	Kab/Kota	10	7	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Remaja (PKPR) sesuai target yang telah ditentukan						
		Kabupaten/kota yang mampu melakukan pembinaan Sekolah/Madrasah sehat sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	10	7	Kab/Kota	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia	30	%	30	40	%	40

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		produktif sesuai dengan standart						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sesuai target yang telah ditentukan	3	Kab/Kota	10	4	Kab/Kota	8
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca	3	Kab/Kota	8	4	Kab/Kota	7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Salin sesuai target yang telah ditentukan						
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai dengan standar	80	%	70	90	%	50
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang	8	Kab/Kota	7	9	Kab/Kota	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan						
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	%	100	100	%	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	Kab/Kota	6	10	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	30	%	30	50	%	50
	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3	Kab/Kota	3	5	Kab/Kota	5
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	50	%	50	60	%	60

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		tradisional sesuai standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan	100	%	100	100	%	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sosialisasi dan Advokasi Penerapan Kebijakan yang	3	Kab/Kota	3	3	Kab/Kota	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		berwawasan kesehatan						
		Pembinaan Posyandu Aktif ke kab/kota	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6	Kab/Kota	6	7	Kab/Kota	9
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan Kesehatan	90,000	Jiwa	88,707	100,000	Jiwa	73,712

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	100	100	%	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi Kesehatan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3	Kab/Kota	3	3	Kab/Kota	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	20	%	20	40	%	40
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas	Jumlah Pembinaan/pember dayaan/penggalang an kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	Kab/Kota	6	4	Kab/kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	%	100	100	%	100
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	Saluran	5	5	Saluran	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44	%	41,71	60	%	53
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan						
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	Pkm	78	113	Pkm	110
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan/visitasi	11	RS	32	11	RS	27
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jml RS Kelas B yang mempunyai ijin operasional yang masih berlaku	6	RS	6	6	RS	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	90	%	99	92	%	96,54
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan & pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK berbasis elektronik	Laporan penyediaan dan pengelolaan data perizinan PBF Cabang & Cabang PAK berbasis elektronik	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan PAK	Jumlah PBF Cabang yang dilakukan pembinaan & pengawasan	20	Sarana	24	23	Sarana	25
		Jumlah Sarana cabang PAK yang dilakukan Pembinaan & Pengawasan	23	Sarana	23	26	Sarana	26

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100	%	100	100	%	100
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Tradisional	Jumlah UKOT yang dilakukan pembinaan & pengawasan	2	Sarana	2	2	Sarana	2
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatn	30	%	60	40	%	70

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	orang	188	175	orang	670
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang Kesehatan	156	Orang	30	180	Orang	–
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP & UKM Provinsi	Laporan Kegiatan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	1	Laporan	1	1	Laporan	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		UKP & UKM Provinsi						
	Pemenuhan kebutuhan SDMK	Binwasdal/Advoka si/ Sosialisasi /koordinasi/orient asi program SDMK	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40	%	100	60	%	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan	2	Kab/Kota	2	3	Kab/Kota	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Menular dan Tidak Menular	pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV $\geq 55\%$						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar $\geq 95\%$	2	Kab/Kota	2	3	Kab/Kota	3
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan	1	Kab/Kota	1	2	Kab/Kota	2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		pembinaan dalam program P2 DBD						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR $\geq 70\%$ dan SR $\geq 90\%$	1	Kab/Kota	1	2	Kab/Kota	2
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal oleh Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	Kab/Kota	4	4	Kab/Kota	4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kejadian Luar Biasa (KLB)	pelayanan kesehatan sesuai standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Pengelolaan Surveilens Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	8	Kab/Kota	10	9	Kab/Kota	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan	10	Laporan	10	10	Laporan	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	SPM Bidang kesehatan lintas Kab/Kota	capaian SPM Bidang Kesehatan						
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	30	%	100	40	%	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	OPD	35	45	OPD	35
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA- Sadanis)						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab/Kota yang dilakukan pembinaan masa tunggu program haji	10	Kab/Kota	9	10	Kab/Kota	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	Kab/Kota	5	6	Kab/Kota	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam	5	Kab/Kota	10	6	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	dengan Kecanduan NAPZA	pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan	80	%	84,71	82	%	86,9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	100	100	%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah dokumen evaluasi kinerja	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1
		Jumlah bulan pelaksanaan Jasa	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Administrasi Keuangan						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yangditanggapi	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12	Laporan	12	12	Laporan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	%	100	100	%	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	194	Orang	194	194	Orang	194
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	50	Pegawai	50	50	Pegawai	50

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Jenis	20	20	Jenis	20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	5	Unit	5	5	Unit	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	200000	Lembar	200000	200000	Lembar	200000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300	Exemplar	300	300	Exemplar	300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Rapat & Tamu	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	90	Kali	90	90	Kali	90
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	80	Kali	80	80	Kali	80
		Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Kelembagaan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6	Unit	1	6	Unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	2000	Surat	2000	2000	Surat	2000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	95	Jenis	95	95	Jenis	95
		Jumlah Bulan pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah Jasa pelayanan teknis & non teknis yang tersedia	1	Tahun	1	1	Tahun	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Pemeliharaan	1	Laporan	1	1	Laporan	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Urusan Pemerintahan Daerah	Barang dan Jasa Milik Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	UPTD Balai Latihan Kesehatan							
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	30	%	30	40	%	40
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	10	kali	10	15	kali	15

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100	orang	100	150	orang	150
	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi pelayanan rumah sakit, 2. Presentase kelengkapan sarana prasaran dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit, 3.	84	%	84	86	%	86

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Presentasi sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar, 4. Nilai standar pelayanan minimum rumah sakit						
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit	80	%	80	83	%	83
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana	Jumlah Pembangunan	1	Rumah Sakit	1	1	Rumah Sakit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	dan Prasarana Pendukungnya	Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarananya						
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Bulan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang terpelihara	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan Kesehatan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang Medis/Non Medis yang terpenuhi	5	Unit	5	15	Unit	15

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bulan terpeliharannya Unit bangunan RS sesuai standart	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan tersedianya obat dan BMHP	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	terlaksananya operasional Rumah Sakit	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Bulan pelaksanaan Operasional RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	100	%	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100	%	100	100	%	100
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan belanja pelayanan dan pendukung pelayanan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan didalam rumah Sakit	20	kali	20	20	Kali	35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	1	Kegiatan	1	1	Kegiatan	1
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	5	Unit	5	5	Unit	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	8	Item	8	8	Item	4

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10	exemplar	10	12	Exemplar	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat	10	kali	10	12	Kali	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	%	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Unit Kendaraan Yang di adakan	1	Unit	1	1	Unit	2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebel Yang Diadakan	3	Item	1	3	Item	88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi	7	Unit	7	9	Unit	4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara;Jumlah Bahan Bakar Minyak (Pertalite) yang diadakan	2	Unit	2	1	Unit	14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara;Bahan	4	Unit	0	7	Unit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakar Kendaraaan Ambulance/Dexlite						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	%	100	100	%	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala di RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya sarana dan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		prasarana Unit kantor						
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Yang Di Pelihara	5	Item	5	6	Item	88
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Mengalami Pemeliharaan	1	Unit	1	1	Unit	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Sumberdaya Air, dan Listrik							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya gaji non ASN	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	UPTD Laboratorium Kesehatan							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi Laboratorium	100	%	0	100	%	95.27
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP	Jumlah bulan tersedianya Kelengkapan sarana prasarana	12	Bulan	0	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	dan alkes sesuai standar Laboratorium						
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pengadaan alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar	8	Unit	0	10	Unit	31
		Jumlah pemeliharaan alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar	23	Unit	47	30	Unit	80
	UPTD RS. Korpri							

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi pelayanan rumah sakit	85	%	73.97	90	%	70.84
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit / Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,	80	%	87.99	100	%	70.79

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai kebutuhan/standart						
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	jumlah fasilitas rumah sakit sesuai standar yang dibangun / Jumlah Pembangunan Gedung RS	1	Unit	0	1	Gedung	0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	terpeliharanya fasilitas unit pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah Luasan	1	Unit	1	275	M2	259.98

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		terpeliharannya Unit bangunan RS						
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	tersedianya alat kesehatan dan penunjang / Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang yang diadakan	3	Unit	3	23	Unit	20
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	tercukupinya bahan pakai habis / Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya yang tersedia	50	Jenis	40	10	Jenis	6

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah bulan pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang / jumlah bulan Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan/Penunjang secara rutin/berkala	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan tersedianya obat dan BMHP				12	Bulan	5
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya operasional pelayanan Rumah Sakit / Capaian Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit	100	%	54.26	100	%	54.26
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah unit layanan yang tersedia sesuai standar / jumlah bulan pelaksanaan Operasional RS	21	Unit	11	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Alat/Perangkat SIK RS dan Jaringan Internet	1	Unit	22.83	1	Set	1
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat SIK RS dan Jaringan Internet yang disediakan / Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	1	Unit	1	1	Set	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	100	%	85.52	82	%	29.13
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target / Capaian pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100	%	14.66	100	%	29.13

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Rumah Sakit/Capaian penyelenggaraan Administrasi Umum Rumah Sakit	100	%	66.29	100	%	74.65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik/penerangan	12	Bulan	12	24	Jenis	24

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		/ Jumlah Jenis penyediaan komponen listrik/penerangan						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS / Jumlah Unit/Instalasi RS yang dilengkapi sarana dan prasarana	100	%	93.59	7	Unit/Instala si	7
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedia cetak dan penggandaan RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	92.08	100	%	97.18
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	1	Unit	1	0	-	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan / Jumlah	15	Unit	15	3	Jenis	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		jenis Meubel yang diadakan						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi / Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara rutin/berkala	7	Unit	76.73	100	%	84.82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Yang Dipelihara	1	Unit	1	1	Unit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara	6	Unit	6	8	Unit	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Jasa Penunjang Urusan	12	Bulan	12	100	%	87.77

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Pemerintahan Daerah / Capaian Penyediaan Jasa Penunjang untuk penatausahaan Rumah Sakit 100 %						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya gaji non ASN	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan / Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit	49	OK	30	100	%	61.25
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan	40	OK	30	62	OK	38
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi RS / Jumlah bulan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN Rumah Sakit	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	80	%	57.81	85	%	82.85
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya SDM Kesehatan	80	%	57.81	85	%	82.85

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	/Persentase SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, kompetensi dan kinerja						
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah bulan tersedianya gaji SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, kompetensi dan kinerja/ Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, Kompetensi dan kinerja	12	Bulan	12	10	orang	10

2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

**TABEL 2.5 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019 S.D 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019		2020		2021		2022	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya status	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Orang	90	79	85	92	80	168	75	73

	kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kematian Bayi	Orang	581	688	557	662	533	702	509	636
		Prevalensi Balita Stunting	%	30,08	28,01	29,56	28,1	26,5	22,8	26	23,9
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	%	60	88,29	65	88,29	70	91,09	75	91,09
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	57	67,3	58	28,2	59	50	60	60,5
		TBC/Case Detection Rate (CDR)Persentase Temuan kasus	%	50	54	55	27	60	36,07	65	51
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	53,1	60	31,2	75	27,88	90	63,72

		Persentase Penderita Diabetes Milletus yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	78,94	60	59,1	75	59,16	90	94,44
--	--	---	---	----	-------	----	------	----	-------	----	-------

a. Status Kesehatan Ibu dan Anak

Sejak 3 tahun terakhir, tren jumlah kematian ibu pada tahun 2022 merupakan puncak jumlah penurunan kematian ibu yang terendah yaitu sebanyak 73 kematian ibu. Meskipun penyebab kematian masih di dominasi oleh pendarahan (21,9%) dan hipertensi (16,4%), namun penyebab kematian ibu yang disebabkan oleh covid19 hanya berkontribusi sebesar 4,1% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 penyebab kematian ibu karena covid 19 merupakan penyebab utama (98%).

Jumlah kematian ibu di tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yaitu sebanyak 73 kasus dari target 75 kasus. Terjadi penurunan jumlah kematian ibu di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 43%, dikarenakan salah satunya adalah masa pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan 168 kasus (50% penyebab kematian ibu adalah Covid 19).

Dalam 3 tahun terakhir, tren jumlah kasus kematian ibu tahun 2022 adalah yang terendah. Kabupaten dengan jumlah kematian ibu terbanyak adalah Kutai Kartanegara (24 kasus) diikuti dengan Kota Samarinda (13 kasus). Dan Kabupaten Mahulu dengan 0 kasus kematian. Bila berdasarkan wilayah kerja secara puskesmas, maka 39,7% kasus kematian terjadi di wilayah kerja puskesmas terpencil atau tidak di dalam perkotaan / dalam kota kabupaten. Sedangkan 60% nya lagi kasus kematian terjadi di wilayah kerja puskesmas yang terletak di dalam perkotaan atau dalam kota kabupaten dimana seharusnya akses mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lebih mudah. Berdasarkan tempat meninggal ibu, 80,5% dari jumlah kematian ibu terjadi di RS dan masih terjadi kematian di perjalanan sebesar 12% serta di rumah ibu sebesar 11%. Penyebab kematian ibu secara langsung karena perdarahan dan preeklamsi (25%) dan 42% akibat lain seperti hipokalemi, TB tulang,

ARDS, dan emboli air ketuban. Masyarakat sudah cukup baik memilih persalinan di faskes (PF) 94,86% namun masih terjadi persalinan di dukun 12% dan persalinan yang ditolong oleh nakes (PN) namun tidak difaskes 14%. Berdasarkan umur ibu saat meninggal pada usia 20 - 34 tahun terbanyak (51,2%), usia lebih dari 35 th (41,9%) dan umur ibu dibawah 19 tahun (3,5%). Karena usia hamil terbanyak pada usia 20-35 tahun dan usia resiko tinggi saat hamil adalah lebih dari 35 tahun dan kurang dari 19 tahun. Penyebab kematian ibu dengan 3 terlambat : 1) terlambat identifikasi resiko pada ibu (K4 sudah memenuhi standar secara kuantitas yaitu 86% namun secara kualitas dianggap masih kurang karena kematian ibu masih cukup tinggi terjadi); 2) terlambat merujuk karena terlambat mengidentifikasi resiko dan komplikasi termasuk dalam kurangnya pemenuhan sapras, akses sulit dan rujukan berputar; 3) terlambat mendapatkan pertolongan di faskes (terkait dengan kompetensi dan ketersediaan nakes dan obat-obatan) serta komunikasi dan koordinasi yang kurang terjalin antara FKTP dan FKRTL. Dan hal terpenting adalah tidak berjalannya dengan baik pelaksanaan AMP di beberapa kabupaten kota seperti Samarinda, Paser, Kutim, Kubar dan Mahulu. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penurunan kematian ibu antara lain : peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta keterlibatan Dokter dalam pelayanan ANC, peningkatan pelayanan ANC sesuai standar dengan kunjungan sebanyak 6 kali selama kehamilan dan diperiksa oleh dokter sebanyak 2 kali (1 kali di trimester I dan 1 kali di trimester III), penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal di setiap kabupaten kota, dan pemanfaatan Buku KIA dalam pelayanan ANC terpadu.

Begitu juga dengan kematian bayi, tren 5 tahun terakhir jumlah kematian bayi mengalami penurunan dimana pada tahun 2022

merupakan puncak terendah namun apabila dibandingkan dengan target yang diharapkan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Bayi dengan BBLR merupakan penyebab kematian bayi yang paling utama (25%) , Asfiksia (20%) dan penyakit infeksi (pneumonia diare dan penyakit infeksi lainnya) juga merupakan penyebab kematian bayi yang paling dominan (14%). Hal yang menjadi perhatian adalah meningkatkan kematian bayi karena kelainan kongenital sebesar 15%, untuk itu untuk menekan kematian karena kelainan kongenital diperlukan upaya yang lebih optimal untuk melakukan skrining Hiptiroid Kongenital (SHK) dan skrining penyakit jantung bawaan (PJB) Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Provinsi dalam upaya percepatan penurunan Stunting di wilayah masing-masing. Dalam survei ini dilakukan pengukuran TB atau PB dan penimbangan BB yang nantinya akan menghasilkan data status gizi berdasarkan 3 (tiga) Indeks status gizi sesuai PMK No. 2 Tahun 2020, yaitu Underweight (BB Kurang) dinilai dari indeks BB/U, Stunting (Pendek) dinilai dari indeks TB/U atau PB/U dan Wasting (Gizi Kurang) dinilai dari indeks BB/TB atau BB/PB.

Berdasarkan data hasil SSGI yang sudah dilaunching bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-63 pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Menteri Kesehatan RI menunjukkan hasil bahwa Provinsi Kalimantan Timur beserta 5 (lima) Provinsi lainnya mengalami kenaikan prevalensi, khususnya prevalensi stunting. Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengalami kenaikan prevalensi di ketiga indeks status gizi dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Tren Prevalensi Status Gizi di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan 3 (tiga) Indeks Status Gizi

Indeks Status Gizi	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
Prevalensi Balita Underweight (BB Kurang)	16,2%	20,4%	 4,2%
Prevalensi Balita Stunting (Pendek)	22,8%	23,9%	 1,1%
Prevalensi Balita Wasting (Gizi Kurang)	8,1%	9,1%	 1%

Sumber data : Hasil SSGI (2021 dan 2022)

Dari hasil analisa korelasi, menunjukkan bahwa ada hubungan antara kenaikan prevalensi balita underweight dengan prevalensi balita stunting dan ada hubungan antara kenaikan prevalensi wasting dengan prevalensi stunting.

Hasil SSGI Kabupaten/Kota menunjukkan data yang beragam, dimana ada yang mengalami kenaikan pada 3 (tiga) indeks status gizi, ada yang hanya pada 2 (dua) indeks saja. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 dibawah ini.

Tabel 2. Tren Prevalensi Balita Underweight (BB Kurang) menurut Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
1	Paser	18,9	18,7	 0,2
2	Kutai Barat	12,7	17,9	 5,2
3	Kutai Kartanegara	17,5	25,1	 7,6
4	Kutai Timur	12	19,7	 7,7
5	Berau	19,8	18,4	 1,4
6	Penajam Paser Utara	15,9	20	 4,1
7	Mahakam Ulu	18,9	10	 8,9
8	Balikpapan	17,5	18,5	 1
9	Samarinda	13,9	20,7	 6,8

10	Bontang	21,2	15,2	 6
----	---------	------	------	---

Sumber data : SSGI (2021 dan 2022)

Dari data pada tabel diatas, terdapat kenaikan prevalensi balita underweight (BB Kurang) dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kab Kutai Barat dan Kab. Penajam Paser Utara.

Tabel 3. Tren Prevalensi Balita Stunting (Pendek) menurut Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
1	Paser	23,6	24,9	 1,3
2	Kutai Barat	15,8	23,1	 7,3
3	Kutai Kartanegara	26,4	27,1	 0,7
4	Kutai Timur	27,5	24,7	 2,8
5	Berau	25,7	21,6	 4,1
6	Penajam Paser Utara	27,3	21,8	 5,5
7	Mahakam Ulu	20,3	14,8	 5,5
8	Balikpapan	17,6	19,6	 2
9	Samarinda	21,6	25,3	 3,7
10	Bontang	26,3	21	 5,3

Sumber data : SSGI (2021 dan 2022)

Dari data pada tabel diatas, terdapat kenaikan prevalensi balita stunting (Pendek) dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Kutai Barat, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Paser dan Kab. Kutai Kartanegara.

Tabel 4. Tren Prevalensi Balita Wasting (Gizi Kurang) menurut Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
1	Paser	8,5	9,4	 0,9
2	Kutai Barat	6	7,7	 1,7
3	Kutai Kartanegara	9	9,4	 0,4
4	Kutai Timur	7,6	7,3	 0,3
5	Berau	9	9,4	 0,4
6	Penajam Paser Utara	8,3	9,4	 1,1
7	Mahakam Ulu	13,2	4,5	 8,7
8	Balikpapan	10,4	10,2	 0,2
9	Samarinda	6,1	9,3	 3,2
10	Bontang	7,1	8,1	 1

Sumber data : SSGI (2021 dan 2022)

Dari data pada tabel diatas, terdapat kenaikan prevalensi balita stunting (Pendek) dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Bontang dan Kab. Paser.

Melihat ragam kenaikan maupun penurunan prevalensi status gizi menurut Kabupaten/Kota ini terdapat hal menarik dimana salah satu Kabupaten mengalami progres penurunan prevalensi status gizi pada 3 (tiga) indeks (Underweight, Stunting, dan Wasting) yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan pada setiap indeks status gizi akan mendapatkan pendampingan yang lebih intensif tanpa mengabaikan 5 (lima) Kabupaten/Kota lainnya. Salah satunya akan dilakukan monitoring khususnya terkait intervensi spesifik. Di tingkat Provinsi pun, nantinya Provinsi Kalimantan Timur akan masuk dalam 16 Provinsi Prioritas yang akan mendapat pendampingan intensif juga dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, dimana salah satu kegiatan yang rutin akan diikuti dari Provinsi adalah Weekly Meeting bersama Tim Kerja Stunting dan Tim Kerja lainnya yang terkait.

Selain menilai kinerja khususnya perbaikan masalah gizi (status gizi) melalui hasil survei yang nantinya digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan sesuai tingkatan (Nasional, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota), terdapat juga penilaian kinerja melalui pelaporan secara rutin pada Aplikasi Sigizi Terpadu dimana tidak hanya melihat status gizi balita di wilayah tertentu tapi juga indikator lainnya baik indikator input, proses dan output. Data pada Aplikasi Sigizi Terpadu ini untuk mempercepat penemuan balita yang bermasalah gizi (deteksi dini, sehingga akan mempercepat tindaklanjut dan bisa segera dilakukan tatalaksana/intervensi sesuai permasalahan yang sudah ditegakkan diagnosanya. Dalam Aplikasi Sigizi Terpadu pada modul e-PPGBM yang memuat data individu balita by name by address menunjukkan hasil bahwa rerata balita yang ditimbang (D/S) hanya sebesar 39,81%. Apabila melihat data hasil penimbangan dan pengukuran yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022 hanya sebesar 44,32% (124.441 balita dari 280.749 balita yang sudah ada datanya dalam Aplikasi Sigizi Terpadu). Dari hasil tersebut sudah ditemukan balita yang mengalami underweight sebesar 12,58%, balita stunting 13,48% dan balita wasting sebesar 7,52%.

Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk membawa balitanya dipantau pertumbuhannya secara rutin, memerlukan dukungan dari lintas sektor dan jejaringnya masing-masing. Kita ketahui bersama dalam mengatasi masalah gizi khususnya stunting tidak hanya menjadi tugas utama bidang kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kab/Kota dalam melakukan intervensi spesifik (30%), namun perlu keterlibatan lintas sektor dalam melakukan intervensi sensitif (70%) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Akademisi.

Untuk mempercepat pencapaian target diperlukan peran serta semua sektor sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Salah satunya dengan meningkatkan pemantauan pertumbuhan hingga mencapai 80% bahkan 100% dari seluruh sasaran balita yang ada di wilayah kerja masing-masing sehingga balita yang bermasalah gizi bisa langsung ditatalaksana sesuai standart/juknis yang telah ditetapkan.

b. Akses dan Mutu pelayanan kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan Yang terakreditasi, Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sampai akhir Desember 2022 adalah 182 Puskesmas (96,81%) dari total 188 Puskesmas yang terdiri dari : 34 Puskesmas terakreditasi dasar, 104 Puskesmas terakreditasi madya, 38 Puskesmas terakreditasi utama, dan 6 Puskesmas terakreditasi paripurna. Adapun masih ada 6 Puskesmas yang belum terakreditasi. Capaian Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 182 Puskesmas (96,81%) melebihi target yaitu 70%, hal ini dikarenakan adanya upaya dari puskesmas untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses akreditasi, adanya kegiatan pendampingan akreditasi Puskesmas baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur serta adanya dukungan anggaran untuk kegiatan akreditasi Puskesmas melalui anggaran dari DAK non fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan jumlah Rumah Sakit yang ada di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Desember 2022 terdapat 59 (lima puluh sembilan) RS, RS yang telah terakreditasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) RS atau sekitar 72.88 %. Berikut uraian berdasarkan tingkat kelulusan akreditasi RS, yaitu tingkat paripurna sebanyak 18 RS, tingkat utama sebanyak 4 RS, tingkat madya sebanyak 8 RS, tingkat dasar sebanyak 3 RS dan tingkat Perdana sebanyak 10 RS. Dimasa pandemik Covid-19, untuk mencegah,

mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko tertular Covid-19 maka survei akreditasi pada tahun 2021 ditiadakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan, akreditasi fasilitas kesehatan dan penetapan RS Pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk rumah sakit akan dimulai setelah status bencana nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

c. Upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Pada saat pandemi covid-19, capaian menurun karena pasien takut pemeriksaan dan mengambil obat di fasyankes. Tahun 2022 setelah pandemi covid-19 mereda, capaian program kembali meningkat. Fasyankes yang dapat memberikan obat ARV juga bertambah setelah mendapat pelatihan. Dan dukungan komunitas atau penjangkau lapangan untuk menemukan penderita baru dan memulai pengobatan dengan ARV semakin meningkat

Pada saat pandemi covid-19, capaian menurun karena pasien takut pemeriksaan dan mengambil obat di fasyankes. Tahun 2022 setelah pandemi covid-19 mereda, capaian program kembali meningkat. Klinik-klinik swasta dilakukan kerjasama sehingga dapat memberikan pelayanan TB, meningkatkan peran organisasi profesi, kegiatan penyisiran kasus TB di RS sehingga kasus TB yang belum dilaporkan dapat dimasukkan ke dalam SITB.

Capaian Tahun 2022 sebesar 63,72 %, dan masih dibawah target sebesar 90 %. Dari 10 Kabupaten Kota capaian SPM Hipertensi yang mencapai target ada 2 kab yaitu Kukar dan PPU. Adapun Kab/Kota yang memiliki Capaian dibawah 50% ada 3 kab/kota yaitu Kota Bontang, Kab Paser dan Kab Berau. Hal ini dikarenakan masih mengalami situasi pandemi covid-19 di awal tahun 2002 hingga pertengahan tahun,

dimana jumlah kunjungan rendah baik ke faskes ataupun ke Posbindu/Posyandu. Kunjungan mulai naik pada akhir tahun.

d. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2019-2023.

Pembandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada Tahun 2020.

Tabel. 2.6 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,9	24,9
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,44	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,68	12,68
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,91	6,91
5	Capaian Kinerja	20%	7,41	7,5
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,33	70,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Lakip 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penilaian implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik” (akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik, mekanisme pengumpulan data kinerja sudah ada dan informasi kinerja pada dasarnya telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan kinerjanya). Hal ini menjadikan kemajuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat lebih ditingkatkan lagi.

Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam perencanaan kinerja Dinas Kesehatan perlu ditambahkan :
 - Tujuan & Indikator kinerja tujuan dalam Renstra dilengkapi dengan target keberhasilan.
 - Dokumen Renstra diselaraskan dengan RPD
 - Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
 - Reviu Renstra agar menunjukkan perubahan yang signifikan dan reviu berkala.
 - Rencana Aksi atas kinerja mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
 - Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan.
 - Rencana Aksi atas kinerja agar dilakukan monitor pencapaiannya secara berkala.
 - Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- b. Pengukuran Kinerja

- Menyusun indikator kinerja eselon III & IV yang memenuhi indikator yang baik.
 - Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berjenjang
 - Pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan dimana data dapat lebih mudah ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan & anggaran
 - Hasil Pengukuran (Capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Reward & Punishment.
 - Melakukan Reviu secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
- Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan penganggaran.
 - Informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja.
- d. Evaluasi Internal
- Pemantauan Rencana Aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
 - Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan setiap periode dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata untuk perbaikan pelaksanaan program.
- e. Pencapaian Kinerja
- Penetapan Kinerja disesuaikan dengan anggaran yang diterima.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan, tabel dibawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. *(Terlampir Realisasi Anggaran).*

Tabel. 2.7 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran

Uraian	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi pada tahun ke				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Langsung	106.715.699.000	108.296.652.315	159.506.618.806	152.787.849.584	294.077.419.466	52.492.987.143	87.187.570.108	131.918.692.919	126.718.478.696	-
Belanja tidak Langsung	32.852.611.350	31.623.445.000	36.438.671.000	37.960.001.501	62.515.562.837	25.696.475.100	27.355.120.188	32.571.114.183	31.520.244.625	-
Lain-Lain PAD yang Sah	15.290.136.350	13.346.741.268	39.495.417.806	27.331.822.409	13.500.000.000	7.623.201.482	8.474.799.290	31.738.554.896	19.621.841.117	-
Total	154.858.446.700	153.266.838.583	235.440.707.612	218.079.673.494	370.092.982.303	85.812.663.725	123.017.489.586	196.228.361.998	177.860.564.438	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

1. Sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, pedesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan yang belum merata.
3. Kriminilitas yang semakin meningkat
4. Peredaran NAPZA yang semakin meningkat
5. Gaya hidup yang tidak sehat meningkat
6. Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban paling berat dalam menangani dampak akibat pandemi Covid-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak Covid-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca Covid-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.8
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No.	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit	53	57	60	59	58
2	Tempat Tidur RS	6080	6541	7580	6820	6903
3	Rumah Sakit Swasta	23	31	33	30	29
4	Dokter Umum	941	1224	2161	2079	2034
5	Dokter Gigi	277	280	415	438	433
6	Dokter Spesialis	597	694	815	805	803
7	Tenaga Medis RS	114	1481	1776	2614	1874
8	Perawat RS	3941	5981	6894	6962	7059
9	RS Bersalin	11	9	9	8	8
10	Puskesmas	187	187	188	188	188
11	Pustu	724	732	699		
12	Dokter Puskesmas	409	498	539	537	519
13	Pedagang Besar Farmasi	49	51	51		
14	Apotek	704	759	745		
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	93,4	95,1	97,2		

Sumber: Dinas Kesehatan, Sidata

b. Peluang meliputi :

1. Dukungan Pemerintah pada sektor kesehatan semakin besar.
2. Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki **multiplier effect** pada program-program

pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Teknologi dan inovasi bidang kesehatan yang semakin berkembang.
4. Perkembangan transportasi, komunikasi dan peyebarluasan berbagai informasi.
5. Tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang kesehatan berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan kesehatan. Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis 2019–2023, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyusun kembali Renstra tahun 2024–2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa kendala antara lain :

- a. Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- b. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.
- c. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

- d. Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan system lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah serta provinsi dan kab/kota belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi lebih lanjut di tingkat pimpinan. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta perlu komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- e. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat.
- f. Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

Dari analisa diatas, permasalahan yang dihadapi Dinas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.) Status Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak belum optimal	Penyebab kematian ibu masih di dominasi oleh pendarahan (22%), Hipertensi (16%), Anemia bumil 14,45%, KEK bumil 9,2%, Pelayanan kesehatan bayi 59,2%, Pelayanan kesehatan balita 48,18% dan Meningkatnya kematian bayi (655 kematian)	Kualitas ANC (skrining pada ibu hamil) dan PNC baik pada ibu Nifas maupun bayi baru lahir yang masih belum sesuai dengan standart (SOP)
		Sistem rujukan yang belum optimal sehingga proses koordinasi antar tenaga kesehatan juga terhambat
		belum optimalnya dukungan lintas sektor dan lintas program

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Pemenuhan sarana dan prasarana , untuk memberikan pelayanan antenatal baru mencapai sebesar 69,4% dari standar minimal yang diharapkan yaitu 75%. Dan pelayanan neonatal baru mencapai 30% dari standar minimal seharusnya 65%
		Masih tingginya penyebab kematian bayi karena penyakit infeksi masih tinggi (diare 67% dan pneumonia 21%)
		Pelaksanaan SDIDTK memerlukan waktu cukup lama, sehingga cenderung tidak dilaksanakan apabila pasien yang datang cukup banyak (manajemen waktu)
	Masih rendahnya Capaian Pemantauan Pertumbuhan (D/S) sebesar 44,83% (target	Posyandu aktif baru 36% sehingga mengakibatkan D/S masih rendah.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	90%), masih ditemukannya prevalensi stunting 23,9%, Prevalensi wasting 9,1 % Prevalensi underweight 20,4 % (ketiga indikator tersebut berada di atas batasan WHO), ASI Eksklusif 74,3% (Target 80%), IMD 84 %, Vitamin A 73,22 % (Target 76%), Jumlah kasus gizi buruk 236 orang	Puskesmas dengan 9 tenaga baru 65,43% salah satunya petugas gizi masih ada yang belum merata.
		kurangnya pemanfaatan buku KIA (Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan masih rendah)
		belum optimalnya dukungan lintas sektor dan lintas program (TPPS)
		kurang tersedianya alat pemeriksa antropometri sesuai standar di fasilitas kesehatan,
		belum optimalnya kinerja tim penanggulangan masalah Gizi di Provinsi atau Kab/Kota dalam implementasi SOP intervensi masalah gizi (Tim Pemantauan Pertumbuhan, Tatalaksanaan Gizi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Buruk, Konselor ASI, PMBA dan PAG)
		Belum semua Puskesmas memiliki tenaga kesehatan terlatih (Pemantauan Pertumbuhan, Tatalaksanaan Gizi Buruk, Konselor ASI, PMBA dan PAG)
2.) Pelayanan kesehatan usia produktif belum optimal	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif belum optimal dan belum terintegrasi, Capaian Yankes PKPR (58,51%), Pembinaan UKSM masih rendah (43,8%), Yankespro Catin (95,03%), KB Aktif baru mencapai 66,5%, Anemia Rematri : 53,27 %, Puskesmas melaksanakan aktifitas fisik 20% (Target 70%), Capaian Posyandu Aktif masih rendah (36,9%),	Belum semua Puskesmas memenuhi syarat sebagai Puskesmas dengan SN PKPR (Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
		Alur pelayanan yankespro catin yang dilakukan oleh catin beragama Islam lebih jelas yaitu melalui KUA, sementara bagi yang beragama non Islam alurnya masih belum jelas

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Implementasi Germas Belum Optimal (60%)	Pembinaan posyandu aktif oleh kab/kota masih rendah
		Aktifasi Pokjanal Posyandu
		Belum semua kader posyandu terlatih
		Kelembagaan masih belum optimal
		Belum tersedianya BHP deteksi dini dan aktifitas fisik di Kb/Kota
3.) Pelayanan Kesehatan Lansia belum optimal	Pelayanan Kesehatan Lansia yang terstandart baru mencapai 45,65%.	Tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan lansia dan geriatri di fasilitas kesehatan masih kurang.
	Puskesmas Santun Lansia baru mencapai 61,7%, Puskesmas yang melaksanakan perawatan jangka panjang baru mencapai 38,3%, Lansia yang diberdayakan baru mencapai 5,87%	Masih kurangnya sarana/prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan lansia (lansia Kit baru mencapai 27%).

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4.) Beban penyakit menular dan penyakit tidak menular yang masih tinggi	Penemuan Kasus penyakit menular belum mencapai target nasional 90% untuk penyakit TBC (capaian 46%) Incidence Rate DBD belum mencapai target nasional <10 / 100.000 penduduk (IR DBD 158,2 / 100.000 Penduduk).	Alat kesehatan dan logistik untuk pemeriksaan diagnostik masih kurang. Seperti alat Tes Cepat Molekular untuk pemeriksaan TB baru ada 32 unit, mikroskop di Puskesmas ada yang rusak
		Sistem pencatatan dan pelaporan penyakit menular belum maksimal. Pelaporan dari jejaring internal faskes maupun pelaporan dari faskes swasta belum berjalan baik
		aplikasi pelaporan yang belum bridging dengan sistem informasi pelayanan fakes.
		pengelola program memiliki tugas rangkap.
	Tatalaksana kasus penyakit menular yang	Belum semua petugas kesehatan mendapatkan pelatihan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	belum mencapai target nasional	penegakan diagnosis dan tatalaksana kasus
		Penanganan kasus putus berobat belum maksimal
		Kesadaran penderita untuk secara teratur/patuh berobat masih rendah.
		Faskes masih mengalami stock out obat, seperti obat malaria, obat TB anak, obat Kusta anak, sementara Dinas Kesehatan Provinsi tidak memiliki kewenangan pengadaan obat.
		Kapasitas kader dalam melakukan pemantauan minum obat masih kurang
	Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi masih banyak.	Belum semua Kabupaten /Kota cakupan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sesuai target dan Adanya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		masyarakat yang anti vaksin.
	Deteksi Dini Faktor Risiko pada penduduk usia ≥ 15 tahun masih rendah 19,37% (sumber_SIPTM_Kaltim Tahun 2022)	Masyarakat tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk Deteksi Dini Risiko PTM minimal 3 bulan sekali.
		Cakupan deteksi dini pada sasaran usia ≥ 15 tahun pemeriksaan tekanan darah : 19,2%, dengan tekanan darah tinggi : 7,7% (SIPTM)
	Faktor risiko yang didapat pada skrining deteksi dini yaitu tekanan darah (39%), IMT (26%), merokok (11%) dan gula darah (8%) (sumber_SIPTM_Kaltim Tahun 2022)	Pemeriksaan/deteksi risiko PTM membutuhkan reagen BHP (pemeriksaan GD) dan peralatan yang standar. Kurang pemahaman masyarakat tentang besarnya permasalahan dan beban dari PTM dan faktor risikonya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Dari hasil skrining deteksi dini penduduk usia ≥ 15 tahun ditemukan prevalensi penyakit Hipertensi (20,7%), DM tipe 2 (5,58%) dan Obesitas (1,45%) (sumber_SIPTM_Kaltim Tahun 2022)	Masyarakat yang sudah diketahui menderita penyakit HT, DM dan obesitas masih kurang patuh terhadap pengobatan maupun hasil konseling.
		Persentase penderita HT yang dilayani sesuai standar (90%) dan persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar baru 63% (laporan rutin)
	(Riskesdas Kaltim, 2018) Prevalensi depresi usia > 15 th 6.1%	Masih kurangnya pelaporan pelayanan kesehatan jiwa dan skrining masalah kesehatan jiwa Masih dilaporkan adanya kasus pasung (ODGJ) -- Kutim dan Kubar yang berarti belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. RS

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Kab/Kota belum menyiapkan rawat Inap untuk pelayanan ODGJ, hanya RS rujukan RSJD Atma Husada Mahakam di Prov Yang tersedia.
5.) Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata	Pendayagunaan dan pemerataan 9 Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas belum sesuai standar (Indikator : Puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan)	Mutasi yang begitu mudah dan cepat dari daerah terpencil/sangat terpencil, tanpa mempertimbangkan Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), dan Formasi (Kebutuhan) tenaga Kesehatan
		Insentif tenaga Kesehatan di daerah kurang menarik
		Daerah DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan) / 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tidak diminati terutama dokter

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Terbatasnya kemampuan finansial Pemerintah Daerah untuk formasi PPPK dibanding dengan formasi kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja Kesehatan (ABK Kesehatan)
		Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan redistribusi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten (UU 23 /2014)
	Kab/Kota belum mencapai 90 % Pemenuhan 4 Spesialis dasar dan 3 Penunjang pada RSUD milik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	RS pengusul menolak pengembalian /pendayagunaan dokter spesialis yang telah selesai pendidikan dokter spesialis (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
		Lokus Pendayagunaan Dokter spesialis di Kaltim tidak diminati.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		RSUD Kab/Kota yang telah mengusulkan program Pendayagunaan Dokter Spesialis setiap tahunnya belum tentu terpilih sebagai penempatan dokter spesialis, karena insentif tidak menarik, dan lain-lain
6.) Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Masih ada Puskesmas yang belum memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar Permenkes 75 Tahun 2014 serta Update Aspak yang belum optimal dilaksanakan	Keterbatasan anggaran di kab/kota dalam pemenuhan SPA
	Puskesmas yang belum mencapai kriteria Prasarana sesuai standar sebesar 98,4 %	Keterbatasan kemampuan SDM dalam pengisian Aplikasi ASPAK
	Puskesmas yang belum mencapai kriteria Alkes sesuai standar sebesar 87,7%	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	c.akses dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan baru sampai di kecamatan	Geografis sulit diakses, biaya tinggi, budaya masyarakat, SDM kesehatan dan keterbatasan sarana transportasi.
	sistem pelayanan kesehatan berbasis telemedicine belum dilaksanakan di 8 kab/kota	Keterbatasan jaringan telekomunikasi/internet di daerah DTPK
	Prasarana dan alat Kesehatan di Faskes Rujukan di daerah DTPK belum memenuhi Standar	Sebaran Penduduk yang tidak merata di daerah DTPK sehingga utilisasi fasyankes rendah
	d. Belum semua Kab/Kota mempunyai Faskes yang sesuai standar mutu pelayanan	Adanya perubahan standar akreditasi bagi fasyankes primer dan fasyankes rujukan
	6 kab/kota belum mempunyai minimal 1 puskesmas terakreditasi Paripurna	
	6 Kab/Kota yang mempunyai RS terakreditasi paripurna	
	e. Belum optimalnya pelayanan sesuai	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	standar mutu pada UPTD Dinas Kesehatan (Labkes, RSUD Korpri, RS Mata, dan Bapelkes)	UPTD dalam pengembangan Gedung dan pemenuhan fasilitas pendukung
	e. Kepesertaan JKN telah mencapai UHC, tetapi belum semua mencapai keaktifan kepesertaan sebesar minimal 80%	Data kepesertaan masyarakat miskin merupakan kewenangan Dinas sosial & BPJS Kesehatan
		NIK yang belum valid yang menjadi kewenangan DKP3A (Dukcapil)
	f. Belum semua kab/kota mempunyai puskesmas yang menjalankan layanan kesehatan tradisional sesuai standar dan mempunyai griya sehat	Pelayanan Kesehatan tradisional belum menjadi indicator kab/kota tetapi menjadi indicator provinsi (Permendagri 81/2022)
	Kekosongan obat, vaksin, dan Perbekalan kesehatan	Keterlambatan dalam pendistribusian obat dan vaksin ke daerah yg sulit dijangkau
		Keterbatasan penyediaan obat program dan vaksin oleh Pusat

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Banyak vaksin yang expire Date Dekat
	Belum seluruh Kabupaten/Kota terpenuhi alat kesehatan, kalibrasi, dan pemeliharannya	Pembinaan alat kesehatan di Kabupaten/Kota belum berjalan optimal
		Belum ada tenaga yang mengukur kelayakan alat kesehatan di Kabupaten/Kota
		belum terpenuhinya semua ruang lingkup/parameter uji kalibrasi (UPTD Labkes)
7.) Kesiapan penanggulangan krisis kesehatan dan KLB yang belum optimal	Belum optimalnya Manajemen Krisis kesehatan pada klaster kesehatan	Tenaga krisis kesehatan belum dilatih
		Belum tersedianya sarana, prasarana, alkes, obat dan perbekalan kesehatan khusus krisis kesehatan
		Rencana kontigensi krisis kesehatan belum ada

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8) Tatalaksana Dinkes Prov Kaltim perlu penyesuaian	Perubahan kebijakan dan transisi peraturan yang sangat dinamis	Perubahan sistem kerja instansi pemerintah sesuai dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 terhadap nomenklatur Struktur Organisasi Tata kelola pemerintahan yang masih tidak seragam antara pusat dan daerah menyebabkan ruang gerak koordinasi yang terbatas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan kesehatan pada periode 2024-2026 adalah Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Sasaran pokok pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 adalah: 1) Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu 2) Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan 3) Menurunnya kematian maternal dan neonatal 4) Meningkatnya status gizi balita 5) Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6) Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor 7) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko 8) Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 9) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 10) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar 11) Meningkatnya pembiayaan Kesehatan 12) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah 13) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk

pengambilan keputusan 14) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan 14 sasaran pokok tersebut yang perlu kerja keras dilakukan saat ini adalah: 1) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan 2) Kepesertaan jaminan sosial kesehatan (JKN) 3) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan 4) Percepatan penurunan stunting 5) Promosi kebudayaan hidup sehat 6) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah 7) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM serta penguatan sistem surveilans 8) Peningkatan ketahanan kesehatan nasional 9) Menjamin kecukupan obat esensial, termasuk vaksin 10) Pemenuhan tenaga kesehatan 11) Mendorong peningkatan pembiayaan Kesehatan.

a. Isu Lingkungan

Isu lingkungan yang teridentifikasi saat ini yaitu:

- Kualitas air bersih yang belum memenuhi standar di daerah DTPK/3T.
- Kualitas sanitasi lingkungan yang belum memadai di daerah DTPK/3T.
- Perubahan Iklim tropis menyebabkan perubahan pola penyakit (mis: DBD, Malaria).

b. Isu Kebijakan

Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Masih perlunya penyesuaian dalam hal implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Tumpang tindih pelaksanaan peraturan dari beberapa instansi terkait.
- Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.

c. Isu Kelembagaan

- Masih terbatasnya regulasi kesehatan, kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.

d. Isu Infrastruktur

Pada kelompok infrastruktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup :

- Minimnya akses transportasi ke pelayanan kesehatan.
- Minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan di DTPK/3T.
- Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang sistem informasi kesehatan.
- Minimnya penyediaan sumber daya air bersih.
- Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.

e. Isu Pendanaan

- Masih cukup tingginya pembiayaan kesehatan terutama pelayanan kuratif.
- Pembiayaan daerah masih bergantung dari pusat.
- Belum optimalnya sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).
- Identifikasi potensi sumber dana dari Pemerintah Pusat (APBN/DAK) untuk mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan Kesehatan.
- Adanya dukungan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari kebijakan subsidi.
- Identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya dari swadaya masyarakat.

Dari analisis situasi dan kecenderungan di atas serta memperhatikan perkembangan dan tantangan yang terkini, maka **isu-isu strategis** yang akan dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- b. Masih tingginya jumlah kematian ibu, bayi dan balita.
- c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar.
- f. Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di wilayah tertentu.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026:

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, diantaranya adalah :

- Sasaran** : 1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak.
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar.
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi digunakan untuk mencapai pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.1 (T-C.25)

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,82	74,89	74,93
			Prevalensi Stunting	12,83	11	10
		1. Meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu dan anak	1.1. Jumlah Kematian Ibu	63	54	46
			1.2. Jumlah Kematian Bayi	547	470	404
			1.3. Persentase Balita Wasting	7,6	6,8	6
			1.4. Persentase Balita Underweight	16,2	14,1	12
		2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan	2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	87	87,5	88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		kesehatan sesuai standar	Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
		3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	3.1. Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculose (TBC)/ Success Rate (SR)	87	90	95
			3.2. Persentase penderita Diabetes Mellitus/DM yang terkendali	30	50	70
			3.3. Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	4.1. Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,53	71,93	72,23
	-		4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	87	87,5	88

a) Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1.	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS 2015)	183
2.	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI 2019)	14%
4.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7
5.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6.	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7.	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	405 (Kemkes, 2018)	405
8.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	285 (Riskesdas 2018)	8,7
9.		9,1 (Riskesdas 2018)	21,8
10.		21,8 (Riskesdas 2018)	90
11.		57,9 (Riskesdas 2018)	100
		40	

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
12.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	(Kemkes, 2018) 63	100
13.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	(Kemkes, 2018) 23 (Kemkes, 2018)	83
14.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	12 (Kemkes, 2019) 86 (Kemkes, 2019)	0
15.	Persentase rumah sakit terakreditasi		
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)		
	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)		
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)		

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kesehatan sebagai rujukan program kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

2. Visi Kementerian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”

3. Misi Kementerian Kesehatan :

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Menurunkan angka stunting pada balita;
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri.

4. Tujuan Kementerian Kesehatan

Terdapat empat tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2020-2024, yaitu :

- a. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
- b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat.
- d. Peningkatan sumber daya Kesehatan.

5. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan.
- e. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
- f. Terjaminnya pembiayaan Kesehatan.
- g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

- h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

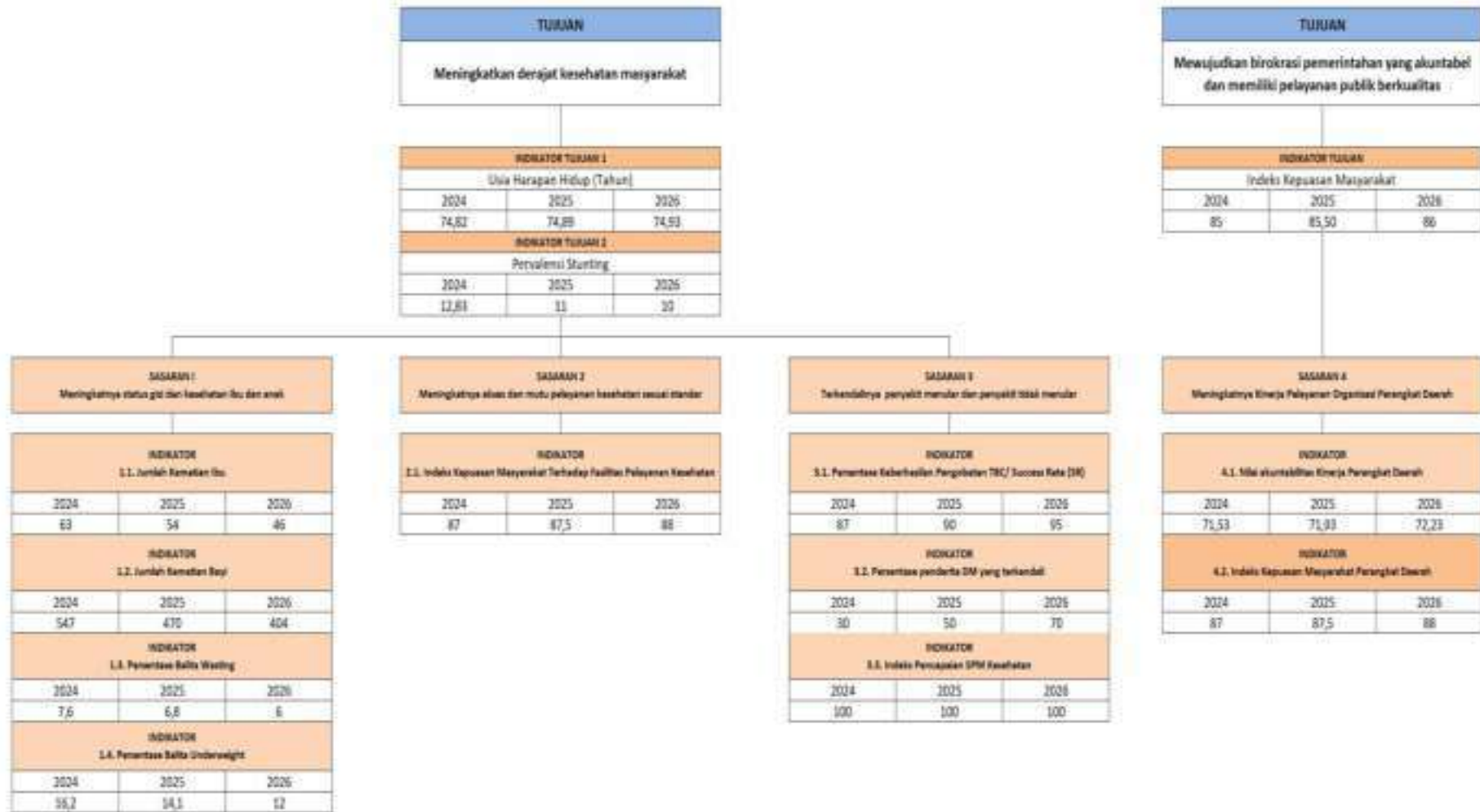
6. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada lima hal penting yakni:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- b. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- c. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- d. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
- e. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING RENSTRA DINAS KESEHATAN 2024-2026



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			
2024	2025	2026	
60	80	100	

Advisory Pemberdayaan Komunitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
INDIKATOR : Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advisory, Pemberdayaan, Koordinasi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor			
2024	2025	2026	
60	80	100	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
INDIKATOR : Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah			
2024	2025	2026	
60	80	100	

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
INDIKATOR : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dilibatkan kompetensinya			
2024	2025	2026	
35	45	50	

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
2024	2025	2026	
1	1	1	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
INDIKATOR : Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia kesehatan			
2024	2025	2026	
2	5	9	

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
INDIKATOR : Angka Keselitan			
2024	2025	2026	
10,8	10,7	10,6	

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rajukan, UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi			
INDIKATOR : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasarana Alat Kesehatan minimal 95%			
2024	2025	2026	
10	15	20	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rajukan, UKM dan UKM Rajukan Tingkat Daerah Provinsi			
INDIKATOR : Persentase Terlaksananya layanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
2024	2025	2026	
100	100	100	

PROGRAM PERJUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Layanan Kelembagaan			
2024	2025	2026	
80	90	100	
INDIKATOR 2 : Persentase Kalahan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			
2024	2025	2026	
100	100	100	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
INDIKATOR : Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu			
2024	2025	2026	
100	100	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
INDIKATOR : Persentase APN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu			
2024	2025	2026	
100	100	100	

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
2024	2025	2026
60	80	100

PROGRAM JEDARAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN/BAHAN		
INDIKATOR : Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar		
2024	2025	2026
100	100	100
Penelitian Pengkajian Peluang Pasar Farmasi (PPF) : Cabang dan Cabang : Penyuluhan Alat Kesehatan (PAK)		
INDIKATOR : Persentase pengkajian dan pendirian PPF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan penelitian		
2024	2025	2026
100	100	100
Penelitian : Uji : Uji : Obat Tradisional (UKOT)		
INDIKATOR : Persentase pengkajian dan penelitian yang dilakukan dalam penelitian Uji : Uji : Obat Tradisional (UKOT)		
2024	2025	2026
100	100	100

Pengembangan : Sistem : Informasi : Kesehatan : Secara Terintegrasi		
INDIKATOR : Persentase ketepatan data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan		
2024	2025	2026
90	95	100
Penelitian : Uji : Sistem : Informasi : Kesehatan : Secara Terintegrasi : Fasilitas : Pelayanan : Kesehatan : Tingkat : Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase RS yang memiliki akreditasi Paripurna		
2024	2025	2026
60	80	100

Administrasi Pengembangan Perangkat Daerah		
INDIKATOR : Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
2024	2025	2026
100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
INDIKATOR : Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2024	2025	2026
12	12	12
Pengadaan Barang M&A Daerah Pemungut Uang Pemertihan Daerah		
INDIKATOR : Persentase Pengadaan Barang M&A Daerah Pemungut Uang Pemertihan Daerah		
2024	2025	2026
100	100	100
Penyediaan Jasa Pemungut Uang Pemertihan Daerah		
INDIKATOR : Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Pemungut Uang Pemertihan Daerah		
2024	2025	2026
12	12	12
Penelitian : Barang : M&A : Daerah : Pemungut : Uang : Pemertihan : Daerah		
INDIKATOR : Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
2024	2025	2026
90	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis tahun 2024-2026 berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam BAB III, yang dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam BAB IV. Strategi dan arah kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor kesehatan.

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan, yaitu kekuatan dan peluang (*Strenghts-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perangkat daerah maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas analisis permasalahan dan isu strategis di seputar layanan serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan capaian transformasi kesehatan.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	<u>Tujuan :</u> Meningkatkan Derajat	1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak	1.1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak	1.1.1. Meningkatkan status gizi dan pelayanann

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Kesehatan Masyarakat		1.2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat	kesehatan ibu dan anak dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sarana, prasarana, tenaga dan peningkatan kapasitas petugas gizi dan kesehatan ibu dan anak
			1.3. Penguatan Gerakan masyarakat hidup sehat	
		2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	2.1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2.1.1. Percepatan Pemenuhan Sarana, Prasarana, Kefarmasian dan Alkes sesuai standar
				2.1.2. Percepatan akreditasi paripurna bagi fasilitas pelayanan dasar dan rujukan minimal 1 di tiap kab/kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu di DTPK melalui telemedicine dan Pelayanan Kesehatan Bergerak
				2.1.4. Pencapaian Universal Health Coverage di seluruh kab/kota
				2.1.5. Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional diseluruh puskesmas
				2.1.6. Peningkatan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
				2.1.7. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah Instalasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Farmasi, Kesehatan tradisional dan kebugaran.
		3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	3.1. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3.1.1. Penguatan sistem pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular
				3.1.2. Penguatan sistem surveilans dan upaya penanggulangan penyakit berpotensi wabah/bencana
			3.2. Pemenuhan pelayanan kesehatan pada penanggulangan krisis kesehatan dan KLB	3.2.1. Pembentukan dan pelatihan tim gerak cepat (TGC).
				3.2.2. Percepatan Pemenuhan Sarana, Prasarana, Kefarmasian dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Alkes dalam penanggulangan krisis kesehatan dan KLB
				3.2.3. Pembentukan UPTD Krisis Kesehatan
	<u>Tujuan :</u> Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	4.1. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	4.1.1. Peningkatan sarana, prasarana, kapasitas dan kinerja Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program

dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026).

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tabel 6.1 (T-C.27)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					TOTAL DINKES + UPTD				333,057,710,000.00		337,453,615,000.00		342,967,183,000.00
					DINAS KESEHATAN				260,006,415,000.00		261,155,057,000.00		262,790,189,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	67,652,415,000.00	90	67,652,415,000.00	100	67,652,415,000.00
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100	1,625,000,000.00	100	1,625,000,000.00	100	1,625,000,000.00
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	950,000,000.00	7	950,000,000.00	7	950,000,000.00
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	475,000,000.00	8	475,000,000.00	8	475,000,000.00
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	52,667,415,000.00	100	52,187,415,000.00	100	52,667,415,000.00
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	185	52,027,415,000.00	187	51,547,415,000.00	190	52,027,415,000.00
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	640,000,000.00	100	640,000,000.00	100	640,000,000.00
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	320,000,000.00	2	320,000,000.00	2	320,000,000.00
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	320,000,000.00	80	320,000,000.00	80	320,000,000.00
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,620,000,000.00	12	4,620,000,000.00	12	4,620,000,000.00
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	50,000,000.00	3	50,000,000.00	3	50,000,000.00
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3,500,000,000.00	12	3,500,000,000.00	12	3,500,000,000.00
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	20,000,000.00	100	500,000,000.00	100	20,000,000.00
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	20,000,000.00	1	500,000,000.00	0	20,000,000.00
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	7,130,000,000.00	12	7,130,000,000.00	12	7,130,000,000.00
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1,710,000,000.00	1	1,710,000,000.00	1	1,710,000,000.00
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5,400,000,000.00	1	5,400,000,000.00	1	5,400,000,000.00
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	950,000,000.00	100	950,000,000.00	100	950,000,000.00
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	38	325,000,000.00	38	325,000,000.00	38	325,000,000.00
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00
1	02	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	90	425,000,000.00	90	425,000,000.00	90	425,000,000.00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Angka	10,8	181,814,368,000.00	10,7	182,863,010,000.00	10,6	184,398,142,000.00
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	%	10	26,861,138,000.00	15	27,209,780,000.00	20	27,509,780,000.00
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	3	1,685,100,000.00	4	1,685,100,000.00	5	1,685,100,000.00
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	4,000,000,000.00	1	4,139,456,800.00	1	4,259,456,800.00
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit	20	600,000,000.00	22	600,000,000.00	24	600,000,000.00
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1	6,000,000,000.00	1	6,209,185,200.00	1	6,389,185,200.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	26	516,000,000.00	28	516,000,000.00	30	516,000,000.00
1	02	02	1.01	20	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	6	842,550,000.00	8	842,550,000.00	10	842,550,000.00
1	02	02	1.01	25	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2	2,729,154,000.00	2	2,729,154,000.00	2	2,729,154,000.00
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	10,488,334,000.00	1	10,488,334,000.00	1	10,488,334,000.00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	148,447,930,000.00	100	150,058,990,000.00	100	150,794,122,000.00
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	#####	1,000,000,000.00	#####	1,000,000,000.00	2,096,543	1,000,000,000.00
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	185	4,000,000,000.00	200	4,000,000,000.00	225	4,000,000,000.00
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	6,500,000,000.00	1	6,650,000,000.00	1	6,700,000,000.00
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	3,500,000,000.00	1	4,000,000,000.00	1	4,050,000,000.00
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	3,117,000,000.00	1	2,617,000,000.00	1	2,667,000,000.00
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	10,870,200,000.00	1	11,020,200,000.00	1	11,170,200,000.00
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1,348,080,000.00	1	1,348,080,000.00	1	1,348,080,000.00
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	5	5,055,300,000.00	6	5,560,830,000.00	7	5,560,830,000.00
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	25,101,000,000.00	2	25,401,000,000.00	2	25,701,000,000.00
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	750,000,000.00	1	750,000,000.00	1	750,000,000.00
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	75,000,000,000.00	1	75,000,000,000.00	1	75,135,132,000.00
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	700,000,000.00	1	700,000,000.00	1	700,000,000.00
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	3,370,200,000.00	1	3,875,730,000.00	1	3,875,730,000.00
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	2	700,000,000.00	2	700,000,000.00	2	700,000,000.00
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	3	842,550,000.00	4	842,550,000.00	5	842,550,000.00
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	10	100,000,000.00	10	100,000,000.00	10	100,000,000.00
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	%	90	1,450,000,000.00	95	1,550,000,000.00	100	2,050,000,000.00
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1,450,000,000.00	1	1,550,000,000.00	1	2,050,000,000.00
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	Persen	60	5,055,300,000.00	80	4,044,240,000.00	100	4,044,240,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	1	1,685,100,000.00	2	1,516,590,000.00	2	1,516,590,000.00
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	5	1,685,100,000.00	5	1,516,590,000.00	5	1,516,590,000.00
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	20	1,685,100,000.00	25	1,011,060,000.00	30	1,011,060,000.00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	35	7,425,500,000.00	45	7,525,500,000.00	50	7,625,500,000.00
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1	1,341,924,000.00	1	1,341,924,000.00	1	1,341,924,000.00
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1,610	1,341,924,000.00	1,620	1,341,924,000.00	1630	1,341,924,000.00
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	Kab/Kota	2	6,083,576,000.00	5	6,183,576,000.00	9	6,283,576,000.00
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	600	5,700,526,000	1000	5,800,526,000	1500	5,900,526,000
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	383,050,000	1	383,050,000	1	383,050,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	%	100	1,092,012,000.00	100	1,092,012,000.00	100	1,092,012,000.00
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	%	100	798,080,000.00	100	798,080,000.00	100	798,080,000.00
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	55	798,080,000.00	60	798,080,000.00	64	798,080,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	100	293,932,000.00	100	293,932,000.00	100	293,932,000.00
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3	293,932,000.00	3	293,932,000.00	3	293,932,000.00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	%	60	2,022,120,000.00	80	2,022,120,000.00	100	2,022,120,000.00
1	02	05	1.01		Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persen	60	404,424,000.00	80	404,424,000.00	100	404,424,000.00
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	404,424,000.00	1	404,424,000.00	1	404,424,000.00
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase	60	1,011,060,000.00	80	1,011,060,000.00	100	1,011,060,000.00
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00
1	02	05	1.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persen	60	606,636,000.00	80	606,636,000.00	100	606,636,000.00
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	606,636,000.00	1	606,636,000.00	1	606,636,000.00
					UTPD BALAI PELATIHAN KESEHATAN				9,159,395,000		9,282,892,000		9,682,892,000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	8,659,395,000	90	8,682,892,000	100	9,082,892,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	104,400,000	100	134,640,000	100	134,640,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	-	-
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	104,400,000	12	134,640,000	12	134,640,000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	613,560,000	100	613,560,000	100	941,349,800
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	192,800,000	3	192,800,000	3	265,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	112	420,760,000	112	420,760,000	125	676,349,800
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3,135,125,000	12	3,074,008,200	12	3,350,990,200
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	55,382,800	10	60,921,000	10	62,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	1,430,504,450	10	1,370,505,200	10	1,400,000,000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	552,655,000	3	460,000,000	3	560,000,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	1	-	1	-
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	234,097,000	1	284,097,000	1	428,990,200
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	862,485,750	12	898,485,000	12	900,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	61,672,000	100	130,000,000	0	20,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1,000,000	0	-	-	0
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	60,672,000	2	130,000,000	-	20,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,937,000,000	12	3,025,810,000	12	2,695,912,000
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	850,000,000	12	936,810,000	12	936,810,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,075,000,000	12	2,075,000,000	12	2,282,500,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	98%	1,807,638,000	98%	1,704,873,800	98%	1,940,000,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	65,000,000	14	70,000,000	14	70,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	220	166,969,000	220	166,969,000	230	170,000,000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	1,575,669,000	24	1,467,904,800	24	1,700,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	35	500,000,000	45	600,000,000	50	600,000,000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	%	95%	500,000,000	95%	600,000,000	95%	600,000,000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	90	500,000,000	120	600,000,000	120	600,000,000
					Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				28,311,925,000		29,437,842,000.00		30,566,278,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	21,811,925,000	90	22,248,163,500	100%	22,693,126,770
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100%		100%	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100%	839,214,624	100%	5,662,829,048	100%	5,776,085,629
1	02	01	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	839,214,624	12	5,662,829,048	12	5,776,085,629
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	98%	1,490,943,000	98%	1,520,761,860	98%	1,551,177,097
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	390	1,490,943,000	410	1,520,761,860	440	1,551,177,097
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	%	12	6,122,642,216	12	6,245,095,060	12	6,369,996,962

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7	93,111,200	10	94,973,424	13	96,872,892
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	24	4,829,531,016	29	4,926,121,636	35	5,024,644,070
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	1,200,000,000	36	1,224,000,000	36	1,248,480,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	300,000,000	100%	306,000,000	100%	312,120,000
1	2	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	150,000,000	3	153,000,000	3	156,060,000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis	5	150,000,000	7	153,000,000	9	156,060,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	8,541,392,160	100	1,547,965,872	100	1,578,925,189
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	1,517,613,600	12	773,982,936	12	789,462,594.00
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7,023,778,560	12	773,982,936	12	789,462,595.00
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100%	517,733,000	100%	2,885,511,660	100%	2,943,221,893
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	272,413,000	10	1,442,755,830	12	1,471,610,947
1	02	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Jenis	150	245,320,000	175	1,442,755,830	200	1,471,610,946
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Persen	98%	4,000,000,000	98%	4,080,000,000	98%	4,161,600,000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	4,000,000,000	3	4,080,000,000	3	4,161,600,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi	Persen	98%	6,420,000,000	98%	7,008,078,500	98%	7,689,919,230

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	98%	6,420,000,000	98%	7,008,078,500	98%	7,689,919,230
1	02	02	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	500,000,000	1	410,000,000	1	420,200,000
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	2	1,000,000,000	3	1,020,000,000	2	1,040,400,000
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	2	4,652,998,300	2	5,305,736,766	2	5,951,530,661
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	70	267,001,700	80	272,341,734	100	277,788,569
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	40	80,000,000	50	181,600,000.00	60	183,232,000.00
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	90	80,000,000	120	181,600,000.00	120	183,232,000.00
					UTPD Laboratorium Kesehatan				11,089,751,000.00		11,902,600,000.00		12,652,600,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	10,516,142,480	90	11,076,142,480	100	11,636,142,480
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Bulan	12	3,516,142,480	12	3,576,142,480	12	3,636,142,480
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	960,000,000	12	1,020,000,000	12	1,080,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2,556,142,480	24	2,556,142,480	24	2,556,142,480

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	%	100	7,000,000,000	100	7,500,000,000	100	8,000,000,000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	7,000,000,000	1	7,500,000,000	1	8,000,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Angka	10,8	573,608,520	10,7	826,457,520	10,6	1,016,457,520
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	Bulan	12	573,608,520	12	826,457,520	12	1,016,457,520
1	02	02	1.01	02	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	150	173,608,520	150	226,457,520	150	116,457,520
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	8	400,000,000	8	600,000,000	8	900,000,000
					UPTD RSUD KORPRI				24,490,224,000.00		25,675,224,000.00		27,275,224,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	Indeks	80 100	14,592,275,335	90	15,273,275,335	100	14,792,275,335
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	Persen	100	132,120,000	100	126,720,000	100	126,720,000
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	132,120,000	0	-	0	-
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	12	126,720,000.00	12	126,720,000.00
			1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi pengamanan barang milik daerah SKPD	%	100	738,600,000	0	-	0	-

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	738,600,000	0	-	0	-
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	%	100	945,976,865	100	1,955,000,000	100	2,056,000,000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	101,305,000	150	155,000,000	150	156,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	844,671,865	100	1,800,000,000	100	1,900,000,000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	%	100	3,432,147,510	100	2,246,106,010	100	2,262,854,410
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	24,182,500	35	40,000,000	45	42,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	309,854,410	2	309,854,410	2	309,854,410
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	76,000,000	4	76,000,000	4	76,000,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	456,426,600	4	456,426,600	4	460,000,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	221,854,000	5	223,000,000	5	225,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	2,343,830,000	12	1,140,825,000	12	1,150,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah (RSUD KORPRI)	%	100	700,000,000	100	650,000,000	100	400,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	150,000,000	1	-	1	-
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	400,000,000	5	500,000,000	10	250,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	%	100	5,113,430,960	100	5,400,449,325	100	3,451,700,925
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	723,730,800	12	723,730,800	12	723,730,800
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	29	4,389,700,160	12	4,676,718,525	12	2,727,970,125
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	%	100	395,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	250,000,000	13	250,000,000	13	250,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	145,000,000	150	145,000,000	175	145,000,000
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	%	80	3,135,000,000	85	4,500,000,000	90	6,100,000,000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	25	3,135,000,000	1	4,500,000,000	1	6,100,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)	%	75	6,837,948,665	80	6,837,948,665	100	7,928,948,665
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	%	90	6,042,948,665	90	6,042,948,665	90	7,073,948,665
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	200	2,379,904,965	300	2,453,702,665	400	2,654,702,665

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	150	117,537,700	200	170,000,000	250	120,000,000
1	02	02	1.01	26	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,500,000,000
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	2,150,000,000	4	2,419,246,000	4	2,799,246,000
			1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei. Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	4	259,246,000	0	-	0	-
				18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	300	136,260,000	0	-	0	-
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	%	100	580,000,000	100	580,000,000	100	640,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	80	300,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	75	280,000,000	12	280,000,000	12	290,000,000
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	%	95	215,000,000	95	215,000,000	95	215,000,000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	215,000,000	12	215,000,000	12	215,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	80	3,060,000,000		3,564,000,000		4,554,000,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Persen	100	3,060,000,000		3,564,000,000		4,554,000,000
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	23	3,060,000,000		3,564,000,000		4,554,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan dengan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga

tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perencana sekaligus penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
(RPD)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Usia Harapan Hidup / UHH (%)	74,62	74,82	74,89	74,93	74,93
Prevalensi Stunting	23,9	12,83	11	10	10
Jumlah Kematian Ibu	73	63	54	46	46
Jumlah Kematian Bayi	636	547	470	404	404
Persentase Balita Wasting	9,1	7,6	6,8	6	6
Persentase Balita Underweight	20,4	16,2	14,1	12	12
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan	86,8	87	87,5	88	88

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculose (TBC)/Succes Rate (SR)	86	87	90	95	95
Persentase penderita Diabetes Mellitus yang terkendali	10	30	50	70	70
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM)	100	100	100	100	100
Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	70,73	71,53	71,93	72,23	72,23
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,8	87	87,5	88	88

Tabel 7.2 (T-C.28)
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Kunci Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	100	100	100	100	100
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,78	1,78	1,79	1,8	1,8
Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program kesehatan yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan kesehatan. Peningkatan peran serta dan potensi swasta untuk menggalang pembangunan kesehatan agar dapat berhasil guna perlu dimaksimalkan, kemitraan yang setara, terbuka dan saling menguntungkan dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi yang ada.

Terwujudnya pembangunan kesehatan juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan melainkan juga menjadi tanggungjawab berbagai sektor terkait. Pembiayaan pembangunan kesehatan merupakan *public good* yang menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk pembangunan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya dapat mencapai *universal coverage*.

Sistem kesehatan akan berfungsi secara optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat termasuk swasta, yang tidak semata-mata hanya sebagai sasaran pembangunan kesehatan melainkan juga sebagai subjek/penyelenggara pada pelaku pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan itu sendiri.

Sistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan guna menghasilkan informasi kesehatan yang dibutuhkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan sektor kesehatan dan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai mampu menunjang pelayanan kesehatan secara paripurna.

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 3 tahun.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya, semoga target Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.

Samarinda, 22 Mei 2023

Kepala Dinas,

Dr.dr.H. Jaya Mualimin, Sp.KJ,.M.Kes,.MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19710720 200604 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie (RSUDAWS) Tahun 2024-2026 merupakan hasil revisi dari Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019-2023 dimana pada penyusunannya pada Revisi Renstra ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Program, yang menjelaskan secara rinci tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Permendagri no 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022. Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen . Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

RSUD A.W. Sjahranie memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan jumlah Tempat Tidur dengan kapasitas total tempat tidur adalah 746 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2022 sebesar 54.18 % dengan nilai standar Depkes tahun 2012 yaitu 60-85 %. Dari segi tata letak kota RSUD A.W. Sjahranie berada di titik yang strategis di tengah kota, mempunyai akses yang mudah dicapai oleh masyarakat sekitarnya namun dalam beberapa tahun terakhir RSUD A. W. Sjahranie mengalami banjir jika hujan deras

sehingga sebagian besar ruang rawat inap dan ruang penunjang pelayanan terdampak banjir sampai kedalam ruang perawatan pasien, bahaya yang kemungkinan besar terjadi adalah kerusakan alat alat kesehatan jika terendam air. Kesiapan tenaga Rumah Sakit untuk melakukan upaya pembersihan pasca banjir selalu dilakukan dengan cepat sehingga pelayanan berjalan normal kembali, selain banjir kondisi bangunan yang sudah berusia sangat tua sekitar 43 tahun sangat mengkhawatirkan karena bisa menyebabkan terjadinya insiden keselamatan pasien. Melihat fenomena dan dampak buruk yang terjadi maka RS merencanakan pembangunan gedung rawat inap baru 8 lantai sebagai wadah untuk mengalihkan pelayanan yang lebih representatif.

Pembangunan gedung Rawat Inap 8 lantai tersebut diberi nama gedung Pandurata yang merupakan project major dalam RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis RS tahun 2024 – 2026. Pelaksanaan pembangunan gedung Pandurata di support dengan APBD pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebesar dengan beberapa tahapan yaitu tahap II (2024) anggarannya Rp.155.678.354.876.40,- , tahapan ke III (2025) anggarannya Rp.126.935.628.539.80 yang pelaksanaan teknis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari tahun 2023-2025 dan tahapan pengadaan alat kesehatan gedung Pandurata (2025 dan 2026) sebesar Rp.72.300.500.000,- pelaksanaannya dilakukan oleh RSUD A.W. Sjahranie. Dengan terlaksananya project pembangunan pandurata ini tetap menjadikan RSUD A.W. Sjahranie menjadi pusat layanan yang memberikan pelayanan prima sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan yang ada di Kalimantan Timur ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten

Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialis/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

- 1) Upaya kesehatan,
- 2) Pembiayaan kesehatan,
- 3) Sumber daya manusia kesehatan,
- 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan,
- 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan
- 6) Pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Tersusunnya Rancangan Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan RSUD A.W. Sjahranie.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Landasan Ideal. yaitu Pancasila
- b. Landasan Konsitutional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional, yaitu:
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
17. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Program, yang menjelaskan secara rinci tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Permendagri No 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Tahun 2005-2025;

Perencanaan Strategis RSUD A.W. Sjahranie merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis RSUD A. W. Sjahranie dimaksudkan sebagai daya dukung dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Strategis RSUD A. W.

Sjahranie :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh RSUD A. W. Sjahranie untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Rumah Sakit serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pelayanan Kesehatan.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja RSUD A.W. Sjahranie.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie

Memuat Tugas, Fungsi Dan Struktur PD, Sumber Daya PD, Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis RSUD A.W. Sjahranie

Memuat Permasalahan Pelayanan PD dan Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/ atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. Cascading Kinerja PD mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta Indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat urai Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemptakhirannya).

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra RSUD A.W. Sjahranie, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD A. W. SJAHRANIE

2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD A.W. Sjahranie

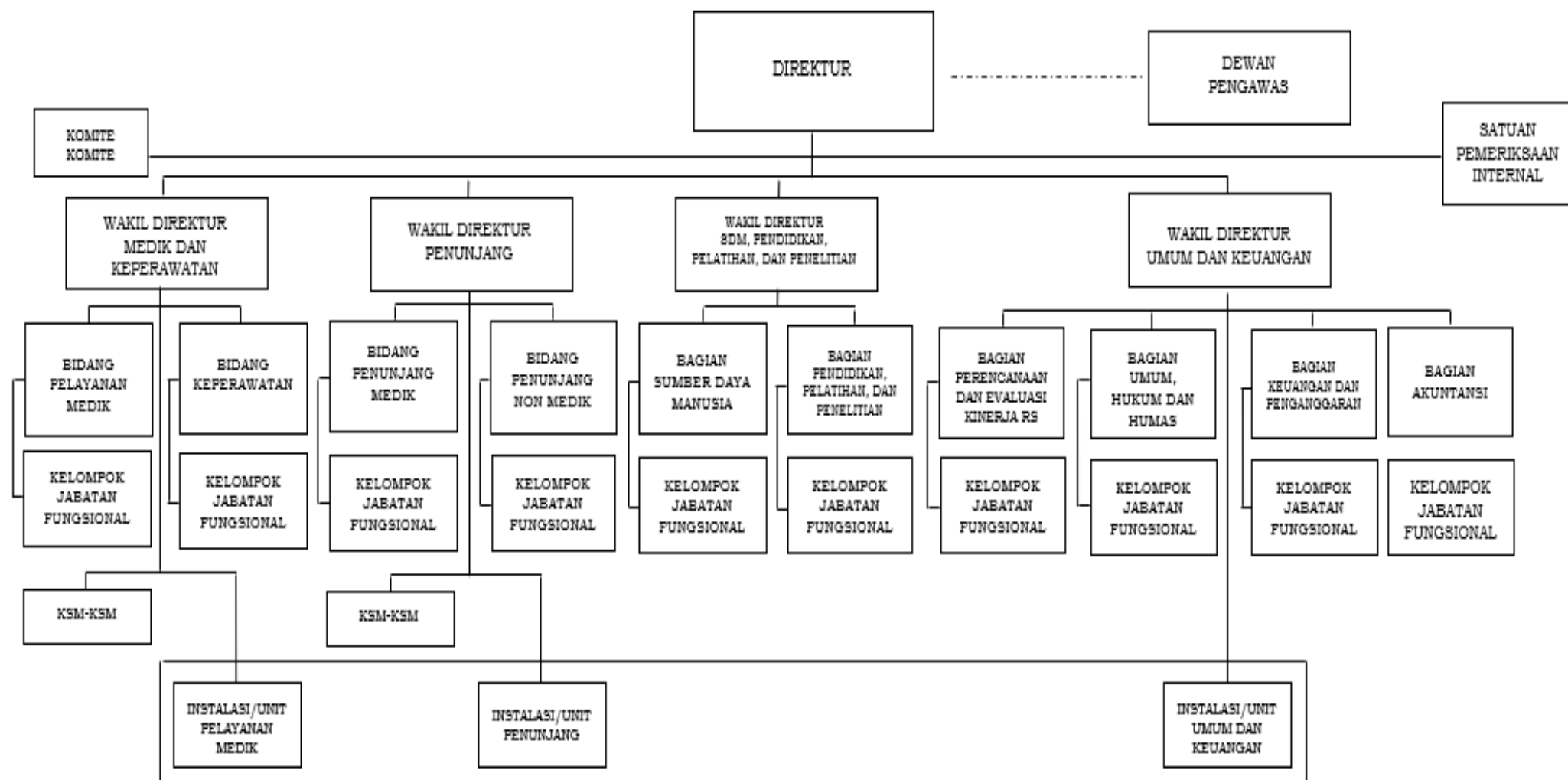
RSUD A.W. Sjahranie merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Medis Dan Kesehatan Rumah Sakit, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi RSUD A.W. Sjahranie Samarinda mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;
- f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

Bagan Susunan Organisasi UOBK RSUD AWS



Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. W. Sjahranie pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 4 Wakil Direktur, dan 10 Kepala bidang/Bagian serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Keperawatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahi:
 1. Bidang Penunjang Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Penunjang Non Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, membawahi:
 1. Bagian Sumber Daya Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, Hukum dan Humas, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Keuangan dan Penganggaran, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bagian Akuntansi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang menjadi uraian tugas dari Direktur dan Wakil Direktur, adalah sebagai berikut :

a. Direktur RSUD A.W. Sjahranie

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit dengan menetapkan kebijakan, membina, mengawasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan Rumah Sakit. Direktur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD A.W. Sjahranie berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD A.W. Sjahranie sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan daerah agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Memimpin implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen *human capital* dan manajemen logistik dan manajemen keuangan serta pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
6. Memimpin tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
7. Memimpin implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit;
8. Memimpin pelaksanaan program pengendalian standar mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit yang berfokus pada peningkatan pengalaman pasien demi terciptanya budaya keselamatan pasien, serta terpenuhinya hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Memimpin implementasi jaminan kesehatan nasional dengan prinsip kendali mutu, kendali biaya dan pencegahan terhadap potensi *fraud* serta gratifikasi di Rumah Sakit;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD A.W. Sjahranie ; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan,

mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai uraian tugas :

1. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD A.W. Sjahranie urusan pelayanan medik dan keperawatan berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD A.W. Sjahranie sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan Direktur agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di lingkup medik dan keperawatan;
6. mengarahkan implementasi badan layanan umum Daerah untuk mencapai kinerja Rumah Sakit di lingkup medik dan keperawatan;
7. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
8. melaksanakan fungsi tata kelola klinis yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di lingkup medik dan keperawatan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD A.W. Sjahranie ; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

c. Wakil Direktur Penunjang

Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penunjang medik dan penunjang non medik Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya. Wakil Direktur Penunjang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD A.W. Sjahranie urusan penunjang berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD A.W. Sjahranie sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan urusan penunjang dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan urusan penunjang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyusun rencana dan mengelola pelayanan penunjang medik dan non medik;
6. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di lingkup penunjang;
7. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
8. Melaksanakan fungsi tata kelola klinis yang baik berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
9. Mengelola penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi bidang pelayanan kesehatan;
10. Mengelola sistem informasi Rumah Sakit;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD A.W. Sjahranie ; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan SDM, pendidikan, pelatihan, dan penelitian Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya. Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD A.W. Sjahranie urusan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan pelatihan berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD A.W. Sjahranie sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian bidang pelayanan kesehatan;
6. Melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di lingkup sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
7. Melaksanakan manajemen yang baik, kerja sama dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi di lingkup sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD A.W. Sjahranie ; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

e. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya. Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD A.W. Sjahranie urusan umum dan keuangan berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD A.W. Sjahranie sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan, pedoman pengorganisasian, standar operasional prosedur dan regulasi lainnya dalam penyelenggaraan fungsi umum dan keuangan;
6. Mengarahkan implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit di lingkup umum dan keuangan;
7. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;

8. Mengendalikan standar kualitas sebagai kendali mutu bidang administrasi umum dan keuangan;
9. Mengontrol pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan prinsip kendali mutu, kendali biaya dan pencegahan terhadap potensi *fraud* serta gratifikasi di Rumah Sakit;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD A.W. Sjahranie ; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

RSUD A.W. Sjahranie per 30 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia sebanyak 2403 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 orang merupakan Pejabat Struktural sedangkan sisanya merupakan tenaga fungsional dan tenaga administrasi. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah pegawai tersebut sudah cukup memadai untuk kebutuhan pelayanan. Sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan, cukup memadai untuk kebutuhan pelayanan yang ada hanya perlu peningkatan dan pengembangan ketrampilan sesuai dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, ada 7 (tujuh) jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit disamping itu masih ada jenis tenaga non kesehatan yang diperlukan seperti Akuntansi, keuangan, hukum, administrasi, komputer, statistik, dan lain sehingga Rumah sakit dapat dikatakan “Padat Profesi” dan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/ 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit. Perhitungan kebutuhan tenaga medis mengacu kepada beban kerja (***World Indicator Load Need***

system), disamping itu mengacu kepada EBM (**Evidence Base Medicine**)

Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah A.W. Sjahranie dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Ketenagaan Di RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2021 - 2022

TIPE	JENIS TENAGA	2021		2022	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
DOKTER MEDIS	Doter Spesialis & Subspesialis	79	22	74	25
	Dokter Umum	30	27	35	25
	Dokter Gigi Spesialis	7	1	7	1
	Dokter Gigi		4		3
PERAWAT	Perawat	349	552	382	507
	Bidan	63	51	56	50
	Penata Anestesi	9	5	9	5
	Asisten Anestesi	7		8	5
	Perawat Gigi	7		7	
	Pekarya Kesehatan	2		1	
FARMASI	Apoteker	12	20	14	19
	Ass. Apoteker	34	57	40	55
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	S2				
	S1	8	21	7	20
	D4				
	D3	3		4	
	D1	3		1	
TENAGA GIZI	S2				
	S1	4	6	5	6
	D4	4	1	5	1
	D3	3	5	3	4
	Pembantu Ahli Gizi	2		1	
TENAGA KETERAPIAN FISIK	Fisioterapis	8	9	10	8
	Okupasi Terapis	2	2	2	2
	Terapi Wicara	2	1	3	1
TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	Fisikawan Medis	1	3	1	4
	Radiologi	7	24	8	23
	Elektromedis	1	3	3	4
	Analisis Kesehatan	25	26	28	25
	Teknisi Transfusi Darah	1	2	1	2
	Teknik Gigi		1		1
	Perekam Medik	5	11	8	12
	Refraksionis Optisien		1		1

TIPE	JENIS TENAGA	2021		2022	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
	Orthotik Prostetik		1		1
ADMINISTRASI	S2	20		20	
	S1/D4	33	61	32	83
	D3	10	23	11	25
	D2	1	2		1
	D1	1	5		3
	SLTA	98	459	92	438
	SLTP	23	60	24	58
	SD		26		26
TOTAL		878	1488	905	1441

Sumber: Bagian Kepegawaian (Desember 2022)

NO	RUANGAN	PENDIDIKAN																		JUMLAH		TOTAL
		SD		SLTP		SLTA		D-I		D-II		D-III		D-IV/S-1		S-2		S-3				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2	Wakil Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	3
3	Bag Keuangan	0	0	0	0	11	13	0	0	0	0	2	4	3	10	1	1	0	0	17	28	45
4	Bag Perencanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	3
5	Bag Umum	0	0	3	1	3	5	0	0	0	0	1	3	4	9	0	2	0	0	11	20	31
6	Bid Diklat Mutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	3
7	Bid Keperawatan	0	0	1	3	0	6	0	0	0	0	2	4	3	5	2	1	0	0	8	19	27
8	Bid Pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	2	0	0	5	7	12
9	Bid Peng. IT SDM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	3
10	Bid Penunjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	3
11	Bid RM Kemitraan	0	0	2	0	10	7	0	0	0	0	2	5	1	8	1	0	0	0	16	20	36
12	Ambulance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	1	4
13	Anestesi & Reanimasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	9	3	0	0	0	0	15	8	23
14	Anggrek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	5	0	0	0	0	2	12	14
15	Angsoka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	1	5	6
16	Aster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	5	0	0	0	0	3	12	15
17	Bougenville	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	0	0	0	0	3	7	10
18	Cath Lab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	5	2	7

NO	RUANGAN	PENDIDIKAN																		JUMLAH		TOTAL
		SD		SLTP		SLTA		D-I		D-II		D-III		D-IV/S-1		S-2		S-3				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
19	Cempaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	0	0	0	0	3	12	15
20	CSSD	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	4	7
21	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	43	0	0	39	43	82
22	Dokter Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	24	0	0	0	0	10	24	34
23	Edelweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	4	0	0	0	0	3	11	14
24	Endoscopi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
25	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	1	3	1	2	0	0	7	15	22
26	Farmasi IBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	5
27	Farmasi IGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
28	Farmasi IPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	3	3	6
29	Farmasi Rajal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	7	7
30	Farmasi Sakura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	6	3	9
31	Flamboyan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0	0	0	0	4	4	8
32	Forensik	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
33	Gawat Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	2	10	0	0	0	0	8	21	29
34	Gizi	0	0	1	3	1	9	0	0	0	0	0	4	1	6	1	2	0	0	4	24	28
35	Hemodialisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	7	0	0	0	0	6	11	17
36	IBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	6	6	10	0	0	0	0	19	16	35
37	ICCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	3	0	0	0	0	3	8	11
38	ICU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	2	0	0	0	0	8	5	13
39	ICU Bedah Jantung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	0	0	0	0	6	7	13

NO	RUANGAN	PENDIDIKAN																		JUMLAH		TOTAL	
		SD		SLTP		SLTA		D-I		D-II		D-III		D-IV/S-1		S-2		S-3					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
40	IPSRS	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
41	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kedokteran Nuklir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
43	Kemoterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	3	4	7
44	Kesling	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	5	6	11
45	Lab PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
46	Lab PK	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12	9	0	4	0	1	0	0	13	15	28	
47	Laundry	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	7	
48	Mawar / Lily	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	7	0	0	0	0	0	37	37	
49	Melati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	9	9	
50	Operator	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	
51	PICU NICU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	13	0	0	0	0	0	29	29	
52	Poli Sakura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	4	5	
53	Poliklinik Spesialis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	21	6	17	0	2	0	0	11	41	52	
54	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0	5	3	8	
55	Radioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3	
56	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	2	1	0	0	0	0	6	9	15	
57	Sakura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	11	0	0	0	0	1	21	22	
58	Satpam	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
59	Seroja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	5	5	

NO	RUANGAN	PENDIDIKAN																		JUMLAH		TOTAL
		SD		SLTP		SLTA		D-I		D-II		D-III		D-IV/S-1		S-2		S-3				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
60	Seruni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	3	4
61	Teratai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	0	0	0	2	6	8
62	Tulip	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	3	3	6
TOTAL																				311	587	898

Sumber: Bagian Kepegawaian (Desember 2022)

Dengan berkembangnya pelayanan yang ada di RSUD A.W. Sjahranie tentu saja harus diikuti dengan pemenuhan SDM yang akan digunakan untuk memenuhi pelayanan. Adapun rencana pengembangan pemenuhan SDM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rencana Kebutuhan Pegawai RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024-2026

KEBUTUHAN TENAGA				2024	2025	2026
RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE						
	Direktur				1	
	Wakil Direktur Umum dan Keuangan					
	Kepala Bagian Administrasi Umum					
			JF Analis Kebijakan	2	2	1
			JF Arsiparis	4		
			JF Pranata Humas	3	2	2
			Pengelola Instalasi	1		
			Pengelola Kepegawaian	1		1
			Pengelola Disiplin Pegawai	1		
			Pengelola Rumah Tangga			
			Pengelola Gudang	1		
			Sekretaris	1		
			Pengadministrasi Kepegawaian	2	1	1
			Pengadministrasi Data	1		1
			Pengadministrasi Umum	5	5	3
			Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	
			Pengadministrasi Persuratan	1		
			Komandan Petugas Keamanan	2	1	1
			Pengemudi Ambulan	3	3	3
			Operator Mesin			
			Pengemudi	1		1
			Pramu Bakti	2	2	2
	Kepala Bagian Keuangan					
			JF Perencana	1	1	1
			Bendahara	1	1	
			Penata Laporan Keuangan	1	1	1
			Pengelola Data	1	1	
			Pengelola Keuangan	1		1
			Pengelola Gaji	1		1
			Pengelola Data Transaksi	1		1
			Pengolah Data Laporan Keuangan	1		
			Pengelola Akuntansi	1		1
			Verifikator Keuangan	1		1
			Pengadministrasi Keuangan	6	5	4
			Pengadministrasi Penerimaan	14	13	14

KEBUTUHAN TENAGA					2024	2025	2026
				Pengadministrasi Umum	8	9	8
				Kepala Bagian Perencanaan Program			1
				JF Perencana	2	1	2
				Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1	
				Pengadministrasi Umum	1		
				Wakil Direktur Pelayanan			
				Kepala Bagian Pelayanan Medik			
				<u>DOKTER GIGI :</u>			
				JF Dokter Gigi Ahli Utama	1	1	1
				JF Dokter Gigi Ahli Madya	1	1	1
				JF Dokter Gigi Ahli Muda	2	1	1
				JF Dokter Gigi Ahli Pertama	2	2	1
				<u>DOKTER GIGI SPESIALIS :</u>			
				JF Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	2	1	1
				JF Dokter Gigi Spesialis Prosthodontis	2	1	1
				JF Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Konservasi Gigi	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Kesehatan Gigi Anak	2	1	1
				JF Dokter Gigi Spesialis Periodonsia/Periodonti	2	1	1
				JF Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	2	1	1
				<u>DOKTER SPESIALIS PENDIDIK KLINIS :</u>			
				JF Dokter Pendidik Klinis	23	21	3
				<u>DOKTER SPESIALIS :</u>			
				JF Dokter Spesialis Bedah	2	2	2
				JF Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	2	4
				JF Dokter Spesialis Anak	4	2	4
				JF Dokter Spesialis Obgyn (Obstetri dan Ginekologi)	4	2	4
				JF Dokter Spesialis Radiologi	2	2	2
				JF Dokter Spesialis Anesthesi	5	2	4
				JF Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	4
				JF Dokter Spesialis Jiwa	1	1	1
				JF Dokter Spesialis Mata	4	1	3
				JF Dokter Spesialis THT	4	3	1
				JF Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2	2	1
				JF Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Paru	2	1	2
				JF Dokter Spesialis Syaraf	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Bedah Syaraf	2	1	2

KEBUTUHAN TENAGA					2024	2025	2026
				JF Dokter Spesialis Bedah Orthopedi	4	3	2
				JF Dokter Spesialis Urologi	2	2	1
				JF Dokter Spesialis Patologi Anatomi	2	2	1
				JF Dokter Spesialis Forensik	2	2	1
				JF Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	2	1
				JF Dokter Spesialis Bedah Plastik	2	2	1
				JF Dokter Spesialis Gizi Klinik	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Bedah Anak	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskuler	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Onkologi Radiasi	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Andrologi	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	2	1	1
				JF Dokter Spesialis Bedah Onkologi	2	1	1
				<u>DOKTER SUB SPESIALIS :</u>			
				JF Dokter SUB SP. BEDAH-KBD	2	1	1
				JF Dokter SUB Spesialis PD - KPTI, FINASIM Ahli Utama	2	1	1
				JF Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam(K)Gastroentero Hepatologi	2	1	1
				JF Dokter SUB SP. OG-FER(K)Fertilitas Endoktrin Reproduksi	2	1	1
				JF Dokter SUB Spesialis Obgyn Onk Obstetri	2	1	1
				JF Dokter SUB Spesialis An. (K) Anestesi Obstetri	2	1	1
				JF Dokter SUB Spesialis Orthopedi ; Fies; K - Spine	2	1	1
				<u>DOKTER UMUM :</u>			
				JF Dokter Ahli Utama	4	4	3
				JF Dokter Ahli Madya	8	11	8
				JF Dokter Ahli Muda	12	12	11
				JF Dokter Ahli Pertama	13	13	13
				JF Psikologis	3		2
				JF Penyuluh Kesehatan/Tenaga Promosi Kes & Ilmu Perilaku	2	2	2
				JF Administrator Kesehatan	2	2	1
				JF Epidemiolog Kesehatan	1	1	1
				Pengelola Instalasi	1	1	1
				Pengadministrasi Umum	3	2	2
				Binatu Rumah Sakit	6	5	5
				Pramu Bhakti	6	5	6

KEBUTUHAN TENAGA					2024	2025	2026
		Kepala Bidang Keperawatan					
				JF Perawat	215	193	185
				Pengadministrasi Umum			
				Pramu Bakti	17	17	16
		Kepala Bidang Rekam Medik dan Kemitraan				1	
				JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	1		
				JF Perekam Medis	4	4	5
				Pengelola Instalasi	1		
				Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	12	11	14
				Pengadministrasi Umum	1	1	
				Pramu Bakti	2	1	1
		Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM					
		Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Mutu					
				JF Analis Kebijakan Ahli Muda			
				JF Administrator Kesehatan	1		
				Pengadministrasi Pelatihan	1		
				Pengadministrasi Umum	1		1
		Kepala Bidang Penunjang				1	
				JF Dokter Gigi	1		
				JF Administrator Kesehatan	1		
				JF Apoteker	14	6	7
				JF Asisten Apoteker	23	18	18
				JF Fisioterapis	10	5	5
				JF Okupasi Terapis	3	2	3
				JF Terapi Wicara	3	2	1
				JF Ortotis Prostetis	1	1	1
				JF Pranata Laboratorium Kesehatan	24	17	14
				JF Transfusi Darah	2	2	3
				JF Radiografer	1	1	1
				JF Radiografer	12	10	9
				JF Fisikawan Medis	3	1	2
				JF Sanitarian	8	5	3
				JF Pembimbing Kesehatan Kerja	2	1	2
				JF Teknik Elektronik	6	6	4
				JF Nutrisisionis	11	7	8
				JF Terapis Gigi dan Mulut	4	3	3
				JF Penata Anastesi	10	6	6
				JF Asisten Penata Anastesi	7	5	5

KEBUTUHAN TENAGA					2024	2025	2026
				Teknisi Gigi	2	2	2
				JF Refraksi Optisien	2	2	1
				JF Bidan Ahli Madya	63	45	39
				Pengelola Instalasi	4	3	2
				Pengelola Instalasi Air dan Listrik	1		
				Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	2	1	
				Pengadministrasi Umum	2	4	1
				Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	
				Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	2	1	1
				Teknisi Peralatan dan Mesin	3	2	3
				Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	3	3	3
				Operator Mesin	3	2	3
				Teknisi Sarana dan Prasarana	2	1	1
				Teknisi Listrik dan Jaringan	1	1	1
				Pranata Jamuan	14	12	11
				Pemulasaran Jenazah	1	1	
				Juru Rawat Jenazah	1	2	1
				Pramu Bakti	9	7	8
				Kepala Bidang Pengembangan, Informatika dan Teknologi			1
				JF Analis Kebijakan	1		
				JF Administrator Kesehatan	1		
				JF Pranata Komputer Ahli Madya	3	3	1
				Pengelola Instalasi	1		
				Pengadministrasi Umum	1		
Jumlah Kebutuhan					791	616	576

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RSUD A. W. Sjahranie dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan. peralatan medik. Peralatan keperawatan, peralatan laundry, peralatan gizi, peralatan Inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga sarana dan prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Prasarana

Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD A.W. Sjahranie adalah sebagai berikut:

- 1. Daya Listrik PLN yang tersedia : 3,465 Mega Watt
- 2. Genset yang tersedia : Automatic dengan kapasitas 4 x 1000 KVA

Tabel 3
Kapasitas Air Bersih RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Listrik Alternatif / Genset	Kapasitas Genset
1	Genset 1	1250 Kva
2	Genset 2	1250 Kva
3	Genset 3	1250 Kva
4	Genset 4	1250 Kva

- 3. Sumber air bersih / PDAM

Tabel 4
Kapasitas Air Bersih RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Ruangan	Jumlah		Kapasitas	
		Grountank	Tandon	Groundtank	Tandon
1	Ground Tank Induk	1		650 m ³	
2	Kamar mayat		1		1.200 liter
3	Tulip		1		1.200 liter
4	Flamboyan	1	1	53 m ³	1.200 liter
5	Melati & Kemoterapi	1		190 m ³	
6	Edlewies	1		125 m ³	
7	Lab PA	1	4	110 m ³	4.800 liter
8	Poliklinik	1	8	450 m ³	17.600 liter
9	Sakura	1	1	450 m ³	24 m ³
10	IGD	1	2	110 m ³	2.400 liter
11	Radiologi	1		110 m ³	
12	Radioterapi	1	1	14 m ³	1.200 liter
13	Seroja		1		1.200 liter
14	Lab PK	1	1	17 m ³	24 m ³
15	HD	1	7	17 m ³	8.400 liter
16	ICU		7		8.400 liter
17	Aster		2		2.400 liter
18	IBS	1	1	50 m ³	24 m ³
19	Laundry		7		8.400 liter
20	CSSD & Boiler		20		28.000 liter
21	Ground Tank Induk Teratai	1		650 m ³	
22	Gizi Belakang (Umum)		5		6.000 liter
23	IPSRs	1	1	650 m ³	1.200 liter

Tabel 5
Kapabilitas Air Bersih Reservoir RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Sumber Alternatif	Lokasi	Kapasitas	Area
1	Reservoir I	Depan Forensik	650 m ³	Seluruh Rawat Inap, Penunjang dan Gizi
2	Reservoir II	Belakang Gedung Utama	450 m ³	Poliklinik, Sakura, Gedung Utama
3	Reservoir III	IGD	110 m ³	IGD, Radiologi, SC,
4	Reservoir VI	Teratai	600 m ³	Teratai I, II, III dan Gizi Teratai, Masjid, Genset
5	Reservoir V	Belakang Ibs	50 m ³	IBS, CSSD & Laundry dan Boiler
6	Reservoir VI	Belakang Irna B	63 m ³	Seruni, Dahlia. Angsoka, Flamboyan,
7	Reservoir VII	Belakang Melati	190 m ³	Melati, Kemoterapi
8	Reservoir VIII	Belakang Cempaka	125 m ³	Cempaka, Edelwies
9	Reservoir IX	Belakang Radioterapi	14 m ³	Radioterapi
10	Reservoir X	Depan Lab PA	110 m ³	Lab PA, Piau/Nicu
11	Reservoir XI	Samping Ruang Tunggu ICU	17 m ³	Lab PK, HD

4. Instalasi Air tanah / Artesis

Tabel 6
Instalasi Air Tanah RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Lokasi Artesis	Jumlah Artesis
1	Belakang Gedung Koperasi	1 Titik
2	Belakang Teratai I dan Teratai II	2 Titik
3	Lokasi Pencucian Mobil Ambulance	1 Titik
4	IPSRS	1 Titik
5	Sampling Groundtank Induk	1 Titik
6	Parkiran Mobil Forensik	1 Titik

5. Pengolahan limbah padat Incenerator
dengan kapasitas : 150 kg/jam
6. Pengolahan Limbah cair / IPAL
dengan sistem AEROB & UN-AEROB dengan
debit output : 475 m³/hari
7. Sarana komunikasi Telephone / PABX : 726 extention number
a) Sentral : 1 Unit

- b) Sub Sentral : 3 Titik
 - 1) IBS
 - 2) Instalasi Sakura
 - 3) Teratai

8. Sistem pendingin ruangan / AC

Tabel 7
Sistem Pendingin / AC RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Jenis AC	Jumlah
1	AC Split 0,5 PK	48 unit
2	AC Split 1 PK	272 unit
3	AC Split 1,5 PK	188 unit
4	AC Split 2 PK	352 unit
5	AC Split 2,5 PK	11 unit
6	AC Split ¾ PK	28 unit
7	AC Split 5 PK	4 unit
8	AC Sentral 10 PK	26 unit
9	AC Sentral 15 PK	3 unit
10	AC Central 30 PK	1 unit
11	AC STANDING 3 PK	10 unit
12	AC STANDING 5 PK	2 unit
13	AC Standing	2 unit
14	AC Cassete	6 unit
15	AC Cassete 5 PK	4 unit
16	AC Central 10 PK	1 unit
17	Floor Standing	1 unit

9. Sistem pengamanan Hydrant, Fire Detector dan Alarm :

- a) Hydrant 33 titik
 - 1) Hydrant Tanam dan Box : 17 titik
 - 2) Hydrant dalam Tembok : 16 titik

10. Lift Pasien

Tabel 8
Lift Area RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Area Lift	Jumlah
1	Lift Area IPM IRJA	
	1. Lift R. Poliklinik Blok C	1 unit
	2. Lift R. Poliklinik Blok B	1 unit
2	Lift Area IPM IRNA	
	Lift Pasien dan keluarga pasien R. Flamboyan	1 unit
3	Lift Area IPM IBS	

	1. Lift Barang R. IBS 2. Lift Pasien R. IBS	4 unit 2 unit
4	Lift Area Inst. Lab Patologi Klinik	
	1. Lift Barang R. Lab PK 2. Lift Karyawan R. Lab PK	1 unit 1 unit
5	Lift Area IPM UPT. Sakura Rawat Inap	
	Lift Pasien dan Keluarga Pasien	5 unit
6	Lift Area IPM IGD	
	1. Lift Pasien 2. Lift Keluarga Pasien	1 unit 1 unit

11. Boiler CSSD, Laundry dan Kitchen

Boiler	: 1 Unit
Laundry	: 4 Unit mesin cuci 40 Kg 3 Unit mesin pengering 50 Kg 2 Unit Strika
CSSD	: 3 Unit CSSD
Pneumatic Tube	: 1 Unit dengan 16 Titik (Tube Spot)

b. Sarana Transfortasi

Tabel 9
Inventaris Kendaraan RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2022

No	Nama Aset	Merk	Type	No Polisi	Kondisi
1	Jeep	LC/Ambulance	Jeep	KT 118 BX	Baik
2	Mobil Dinas	Toyota	Kijang LGX	KT 2970 B	Baik
3	Mobil Dinas	Toyota	Kijang LGX	KT 2888 B	Baik
4	Mobil Dinas	Toyota	Kijang LGX	KT 2889 B	Baik
5	Mobil Dinas	Toyota	Kijang LGX	KT 2189 BZ	Baik
6	Mobil Dinas	Toyota	Kijang LGX	KT 2461 B	Baik
7	Mobil Dinas	Toyota	Kijang LGX	KT 1109 BZ	Baik
8	Mobil Dinas	Toyota	Avansa S	KT 1120 BZ	Baik
9	Mobil Dinas	Toyota	Kijang Innova	KT 1119 BZ	Baik
10	Mobil Dinas	Toyota	Kijang Innova	KT 1126 BZ	Baik
11	Mobil Dinas	Toyota	Kijang Innova	KT 1127 BZ	Baik
12	Mobil Dinas	Toyota	Innova Ventura	KT 1075 M	Baik
13	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1678 M	Baik
14	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1572 M	Baik
15	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1364 M	Baik
16	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1611 M	Baik

No	Nama Aset	Merk	Type	No Polisi	Kondisi
17	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1048 M	Baik
18	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1639 M	Baik
19	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1002 M	Baik
20	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1748 M	Baik
21	Mobil Dinas	Toyota	Rush Sportivo	KT 1601 M	Baik
22	Lain-Lain	Mitsubishi	Pajero Sport	KT 1770 BZ	Baik
23	Mini Bus (14 Seat)	Toyota	Avansa	KT 1438 B	Baik
24	Pick Up	Toyota	Kijang	KT 8484 B	Baik
25	Truk Sampah	Dump Truck		KT 8682 BZ	Baik
26	Mobil Ambulance	Isuzu	EK 77	KT 9143 B	Baik
27	Mobil Ambulance	Kijang		KT 2366 B	Baik
28	Mobil Ambulance	Isuzu	NHR 55	KT 9145 B	Baik
29	Mobil Ambulance	Kijang		KT 8497 B	Baik
30	Mobil Ambulance	Kijang		KT 2366 B	Baik
31	Mobil Ambulance	Kijang		KT 2956 B	Baik
32	Mobil Ambulance	Isuzu	NHR 55	KT 9145 B	Baik
33	Mobil Ambulance	Suzuki	APV	KT 1272 B	Baik
34	Mobil Ambulance	Suzuki	APV	KT 1271 B	Baik
35	Mobil Ambulance	Toyota	Kijang	KT 1877 B	Baik
36	Mobil Ambulance	Toyota	Kijang	KT 1871 B	Baik
37	Mobil Ambulance (ASKES)	Toyota	Kijang	KT 2956 B	Baik
38	Sepeda Motor	Honda	Supra X 125	KT 4822 MZ	Baik
39	Sepeda Motor	Honda	Supra X 125	KT 4823 MZ	Baik
40	Sepeda Motor	Honda	Supra X 125	KT 4824 MZ	Baik
41	Sepeda Motor	Honda	Supra X 125	KT 4825 MZ	Baik
42	Sepeda Motor	Honda	Supra X 125	KT 4826 MZ	Baik
43	Sepeda Motor	Honda		KT 4880 B	Baik
44	Sepeda Motor	Yamaha	Mio	KT 6838 MZ	Baik
45	Sepeda Motor	Yamaha	Mio	KT 6847 MZ	Baik

Sumber: Gudang Umum tahun 2022

RSUD A.W. Sjahranie memiliki 35 kendaraan operasional yang saat ini berfungsi dengan baik.

c. Unit Usaha

RSUD A. W. Sjahranie memiliki beberapa unit usaha yang beroperasi, salah satunya ialah paviliun AWS Executive Sakura dan Teratai. Pelayanan yang tersedia di Unit Sakura mulai dari kamar rawat inap dengan jumlah tempat tidur 92 unit sampai dengan Poli rawat jalan executive. Untuk unit Teratai sendiri dibagi menjadi Teratai 1 dengan 12 Tempat Tidur, Teratai 2 dengan 7 Tempat Tidur dan Teratai 3 dengan 27 tempat Tidur.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Medis

Jenis-jenis pelayanan yang disediakan RSUD A. W. Sjahranie Samarinda meliputi:

1. Pelayanan Medik Umum
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan Rawat Jalan
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Medik Dasar
6. Pelayanan Radiologi
7. Pelayanan Patologi Klinik
8. Pelayanan Patologi Anatomi
9. Pelayanan Anesitesiology
10. Pelayanan Fisioterapy
11. Pelayanan Medik Spesialis lain
12. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut
13. Pelayanan Medik Subspesialis
 - a. Bedah
 - b. Penyakit Dalam
 - c. Penyakit anak
 - d. Obstetri dan ginekologi
 - e. Jantung dan Pembuluh darah
 - f. Bedah Syaraf
14. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

- 15. Pelayanan Penunjang Klinik
- 16. Pelayanan Penunjang Non Klinik
- 17. Pelayanan Unggulan
 - a. Pelayanan Kardiovaskuler
 - b. Bedah Jantung
 - c. Pelayanan Stroke center
 - d. Pelayanan Radioterapi
 - e. Kedokteran Nuklir
 - f. ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography)
 - g. Laboratorium Fertilitas

b. Pelayanan Non Medis

Tabel 10
Capaian Kinerja Non Medis RSUD A.W. Sjahranie
Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Kapasitas TT	751	751	537
BOR	35,85	44,47	54,18
ALOS	5,07	5,4	4,9
TOI	10,92	6,9	3,4
BTO	6,19	29	46
NDR	41,04	61,79	34,05
GDR	64,89	81,32	53,93
Kunj. IGD	19.546	20.238	27.180
Kunj.Rawat Jalan	19.546	71.834	104.431
Laboratorium	831.195	774.608	800.947
Radiologi	15.118	34.269	36.801
Persalinan	922	550	967
Sectio Caesar	548	351	450

Sumber : Bidang RM & Kemitraan (Desember 2022)

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 11
Tabel T-C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD A.W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
	KESEHATAN																
	RSUD AWS 2019-2020																
	Indikator Tujuan																
1	Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas rumah sakit	80	82				75	79				94%	96%				>
2	Tersedianya layanan unggulan dengan teknologi terkini	60	80				65	80				108%	100%				=
3	Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan	10	15				10	9				100%	60%				<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
	mutu RS dan keselamatan pasien																
4	Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan	80	90				67	99				84%	110%				>
5	Tersedianya SDM yang sesuai standar Kelas Rumah Sakit	80	90				96	74				120%	82%				<
	Indikator Sasaran																
1	Persentase jenis Pelayanan sesuai dengan kelas rumah sakit.	80	82				75	79				94%	96%				>
2	Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia	60	80				65	80				108%	100%				<
3	Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan	10	15				10	9				100%	60%				<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
	Interprofesional Education [IPE]																
4	Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan	80	90				67	99				84%	110%				>
5	% pencapaian program/kinerja RS	80	90				96	74				120%	82%				<
6	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas sesuai kelas rumah sakit	85	90				64	75				75%	83%				>
7	Penerapan Ruang Terbuka Hijau	35	35				20	35				57%	100%				>
	Indikator Program																
1	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	80	80				90	80				113%	100%				<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
2	% Peningkatan capaian elemen penilaian berdasarkan standar akreditasi	80	85				0	0				0%	0%				=
3	% Peningkatan kerjasama di bidang Kemitraan pelayanan kesehatan dan Non Kesehatan.	66	0				45	0				68%	0%				<
4	% Peningkatan dalam pelayanan Rekam Medik	100	0				18	0				18%	0%				<
5	Tingkat kepuasan pasien	86	100				64	100				74%	100%				>
6	Jumlah layanan unggulan yang tersedia	80	80				0	0				0%	0%				=
7	Peningkatan mutu luaran peserta didik (Peningkatan IPK/Tahun)	3,2	32				61	97				61%	97%				>
8	Nilai Akuntabilitas	100	100				B	B				100%	100%				=

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
	Kinerja Perangkat Daerah																
9	% Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	100	100				100	90				100%	90%				<
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja keuangan Rumah Sakit	B	100				B	98				100%	98%				<
11	Tersedianya Sistem Informasi Rumah Sakit berbasis komputer terintegrasi	80	80				85	51				106%	64%				<
12	Persentase Pencapaian indikator kinerja utama rumah sakit	84	100				87	30				104%	30%				<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
13	% Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100	100				100	100				100%	100%				=
14	Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Pengembangan SDM dan Pemberdayaan SDM	85	100				68	75				80%	75%				<
15	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	90	100				60	96				67%	96%				>
16	Persentase Sarana dan prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik	90	100				89	93				99%	93%				<
17	Persentase ketersediaan obat dan bahan pakai habis medis	100	100				83	100				83%	100%				>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
18	Tercapainya nilai standar pengelolaan Limbah rumah sakit	100	100				100	100				100%	100%				=
	RSUD AWS 2021-2022																
	Indikator Tujuan																
	Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM]			88.2	88.6	88.7			77.05	77.70				88%	88%		=
	Kenaikan Jumlah Pasien			3	5	10			2.17	4.24				3%	4%		>
	Indikator Sasaran																
	Capaian Program Penunjang Kegiatan Rumah Sakit yang terukur secara baik			83	85	87			77	77.70				93%	91%		<
	Capaian pemenuhan Fasilitas dan Layanan Kesehatan RS sesuai standar			80	80	80			81	67				101%	84%		<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
	Kelas Rumah Sakit																
	Capaian Program Kebutuhan SDM baik secara Kualitatif dan kuantitatif sesuai standar kelas Rumah Sakit			85	85	85			89	95				105%	112%		>
	Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dengan RS melalui kerjasama /kemitraan yang baik			85	85	85			85	95				100%	112%		>
	Indikator Program																
1	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan			88	100				77	99				87%	99%		>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
2	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar			80	80				81	67				101%	84%		<
3	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS			85	85				89	95				105%	112%		>
4	Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			85	85				85	95				100%	112%		>
	Indikator Kegiatan																
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			75	77				74	76,38				99%	99%		<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
1.2	Nilai aspek keuangan RS Baik			75	75				58	72,52				77%	97%		>
1.3	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai RS			77	77				68	97				88%	126%		>
1.4	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS			77	89				88	100				114%	112%		<
1.5	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan			100	100				66	100				66%	100%		>
1.6	Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi			100	100				100	100				100%	100%		=
1.7	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik			100	100				83	100				83%	100%		>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
1.8	Persentase capaian hasil Kinerja BLUD			80	80				70	88				88%	110%		>
2.1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan			100	100				59	73				59%	73%		>
2.2	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS			85	87				86	87				101%	100%		=
2.3	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi RS Terintegrasi dengan Baik			0	70				0	39				0%	56%		>
2.4	Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey			83	83				69	71				83%	86%		>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2022 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3					4					5					6
	SKM, SKP dan IPK																
3.1	Persentase capaian Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan			100	100				80	100				80%	100%		>
3.2	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya			61	62				59	89				97%	144%		>
4.1	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga			85	87				72	95				85%	109%		>

d. Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Tabel 12
Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 – 2022

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Pelayanan IGD	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	85%	85%	85%	72%	75%	77%	85.04%	87.74%	90.00 %
		2	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang memiliki STR dari KKI dan SIP serta bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/BCLS/GELS /PPGD/pembacaan EKG (yang masih berlaku)	100%	70%	70%	70%	21%	32%	41%	29.73%	46.13%	59.11 %
		3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	4 tim	4 tim	4 tim	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
		4	Simulasi pelayanan gawat darurat secara periodik	Per 3 bulan	75%	75%	75%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
		5	Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (respon time)	≤5 menit setelah pasien datang	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	6 menit	9 menit	04.16 menit	83.33%	55.56%	100%
		7	Waktu tanggap pelayanan dokter konsulen	3 jam dari pasien datang	dokter spesialis onsite	dokter spesialis onsite	dokter spesialis onsite	10%	12%	11%	100%	100%	99.70 %
		8	Waktu pasien selesai pelayanan di IGD	6 jam dari pasien datang	<6:00:00	<6:00:00	<6:00:00	15%	15%	10%	100%	100%	99.70 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		9	Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		10	Kematian pasien di IGD ($\leq$ 8 jam)	$\leq$ 2 perseribu	1/1000	2/1000	2/1000	7/1000	14/1000	09/1000	28.57%	14.29%	20%
		11	Kepuasan Pasien	$\geq$ 70%	$\geq$ 70%	$\geq$ 70%	$\geq$ 70%	81%	78%	78%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Ketersediaan pelayanan rawat Jalan	minimal sesuai dengan jenis klasifikasi RS	100%	100%	100%	100%	81%	81%	100%	81.17%	81.43%
		2	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100% dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	93.75%	100.00%
		3	Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan	jam 09.00 s/d jam 16.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Waktu tunggu rawat jalan	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit	< 60 menit	8%	12%	8%	45.80%	34.09%	52.40%
		5	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
		6	Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
		7	Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	Tersedia dengan tenaga terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
		8	Peresepan Obat sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92%	100.00%	99.99%
		9	Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	$\geq$ 60 %	> 60 %	> 60 %	> 60 %	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		10	Kepuasan Pasien	≥ 90 %	≥80%	≥80%	≥80%	7868%	76%	77%	98.35%	95.60%	85.80 %
3	Pelayanan Rawat Inap		Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
		1	a Jenis pelayanan spesialisik yang tersedia	Standar RS Kelas A	100%	100%	100%	96%	94%	94%	95.83%	94.12%	94.12 %
			b Jenis pelayanan subspecialistik yang tersedia		100%	100%	100%	80%	88%	69%	80.00%	87.50%	68.75 %
		2	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
			a Pemberi pelayanan (dokter Sp & SubSp) di rawat inap	Sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS Kelas A	100%	100%	100%	89%	94%	100%	89.09%	93.75%	100.00%
			b Pemberi pelayanan (dokter dan perawat D3) di rawat inap		100%	100%	100%	79%	79%	52%	79.15%	79.15%	51.84 %
		3	Tempat tidur dengan Pengaman pegangan tangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00%
		4	Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	100%	100%	100%	6%	8%	7%	12.58%	15.48%	6.57%
		5	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00%
		6	Jam visit Dokter spesialis (Jumlah Visite Dokter yang sesuai standar)	08.00 s/d 14.00 (80%)	80%	80%	80%	62%	63%	65%	77.93%	79.09%	81.50 %
		7	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0%	0%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00%
		8	Kejadian infeksi nosokomial	≤9%	≤9%	≤9%	≤9%	1%	1%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00%

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
		9	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	99.98%	100.00%	
		10	Pasien rawat inap tuberculocis yang ditangani dengan strategi DOTS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00%	
		11	Pencatatan dan pelaporan TB di RS		≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00%
		12	Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh		≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	1%	1%	1%	100.00 %	100.00 %	100.00%
		13	Kematian pasien ≥ 48 jam		≤0,24%	0%	0%	0%	5%	2%	3%	4.83%	81.62%	8.57%
		14	Kepuasan pasien		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	76%	0%	0%	84.96%	0.00%	0.00%
4	Pelayanan Bedah Sentral	1	Ketersediaan tim bedah			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
			a	Tim bedah	Standar RS kelas A	85%	85%	85%	79%	79%	81%	92.63%	92.63%	95.20 %
			b	Kompetensi tim bedah	Standar RS kelas A	85%	85%	85%	84%	84%	88%	98.84%	98.84%	102.94%
		2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi		Sesuai dengan kelas RS	90%	90%	90%	77%	77%	84%	85.40%	85.40%	98.92 %
		3	Kemampuan melakukan tindakan operatif		Sesuai dengan kelas RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76%	100.00 %	99.76 %
		4	Waktu tunggu operasi elektif		≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1.4 hari	1,3 hari	1,3 hari	100.00 %	100.00 %	100.00%
		5	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00%

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		6	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		8	Tidak adanya kejadian tertinggal benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		9	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		10	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0%	0%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		11	Kepuasan pasien	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Pelayanan Persalinan dan perinatologi	1	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp.OG/Dokter umum/ Bidan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih	80%	80%	80%	39%	38%	38%	48.75%	47.50%	47.41 %
		3	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif	Dokter SpOG, Dokter Sp.An, Dokter Sp.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		4	Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	97.00%	100.00 %	100.00 %
		5	Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	100%	100%	100%	100%	96%	98%	93%	96.00%	97.78%	93.45 %
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	tidak dilakukan	60%	45%	tidak dilakukan	33.50%	44.56 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		7	Pelayanan kontrasepsi mantap Dilakukan oleh SpOG atau SpB, atau SpU, atau dokter umum terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		8	Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		9	Kematian ibu karena persalinan	perdarahan $\leq$ 1%	$\leq$ 1%	$\leq$ 1%	$\leq$ 1%	0%	0%	3%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
				pre-eklampsia $\leq$ 30%	$\leq$ 30%	$\leq$ 30%	$\leq$ 30%	0%	3%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
				Sepsis $\leq$ 0,2%	$\leq$ 0.2%	$\leq$ 0.2%	$\leq$ 0.2%	0%	3%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		10	Kepuasan pasien	$\geq$ 80%	$\geq$ 80%	$\geq$ 80%	$\geq$ 80%	7533%	81%	0%	94.16%	100.00 %	0.00%
6	Pelayanan Intensif	1	Pemberi pelayanan	100%	100%	100%	100%	42%	100%	60%	41.51%	100.00 %	59.93 %
		2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	100%	100%	100%	100%	71%	72%	72%	71.00%	72.00%	72.15 %
		3	Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator	100%	100%	100%	100%	61%	92%	72%	61.04%	92.00%	71.54 %
		4	Kepatuhan terhadap <i>hand hygiene</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5	Kejadian infeksi nosokomial	$\leq$ 21%	$\leq$ 21%	$\leq$ 21%	$\leq$ 21%	0%	0%	1%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		6	Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	$\leq$ 3%	$\leq$ 3%	$\leq$ 3%	$\leq$ 3%	0%	0%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		7	Kepuasan pelanggan	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	8114%	0%	0%	100.00 %	0.00%	0.00%
7	Pelayanan Radiologi	1	Pemberi Pelayanan Radiologi	Dokter spesialis radiologi,Radio grafer	0%	100%	100%	87%	87%	87%	87.00%	87.00%	87.00 %
		2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiologi	Standar Kelas RS	0%	100%	100%	89%	89%	89%	88.90%	88.90%	88.90 %
		3	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	≤3 jam	0%	100%	100%	100%	0,9 jam	0,44 jam	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		4	Kerusakan Foto	≤2 %	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5	Tidak terjadi kesalahan pembrian label	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	99.98%	99.98 %
		6	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan Radiologi (Dokter Spesialis Radiologi)	Dokter spesialis radiologi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	0%	80%	80%	90%	90%	89%	112.50 %	112.50 %	111.70 %
8	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	1	Pemberi pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	Dokter dan Analis sesuai kelas RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan	Sesuai kelas RS	100%	100%	100%	89%	89%	89%	88.81%	88.81%	88.81 %
		3	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium CITO	≤120 menit	120 menit	120 menit	120 menit	53,39 menit	51,21 menit	49,70 menit	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		4	Tidak ada kejadian tertukar specimen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	99.97%	100.00 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		5	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	Tersedia alat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		6	Kemampuan mikroskopis TB	Tersedia tenaga	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Exspertisi pelayanan laboratorium	100%	100%	100%	100%	89%	89%	97%	88.63%	89.24%	97.08 %
		8	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93%	99.97%	100.00 %
		9	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu External	100%	100%	100%	100%	0%	97%	95%	0.00%	96.70%	95.00 %
		10	Kepuasan pelanggan	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1	Pemberi pelayanan Rehabilitasi Medik	Standar kelas A	70%	70%	100%	53%	60%	86%	75.90%	85.71%	85.70 %
		2	Fasilitas dan peralatan	Standar kelas A	50%	50%	100%	33%	35%	11%	65.00%	70.00%	11.10 %
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		4	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤50%	≤30%	≤30%	≤50%	100%	0%	1%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5	Kepuasan pelanggan	≥80%	85%	85%	85%	78%	75%	82%	91.22%	87.88%	96.47 %
10	Pelayanan Farmasi	1	Pemberi pelayanan Farmasi	Jumlah apoteker adalah 1: 30 bed	30.00	3000%	3000%	26.00	2900 %	2900 %	86.67%	96.67%	96.67 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
		2	Ketersediaan Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi			100%	0%	0%	100%	0%	0%	100.00 %	0.00%	0.00%
			a	Pemberi pelayanan Farmasi	3 gudang penyimpanan(obat, B3, cairan)	3	300%	300%	3	300%	200%	100.00 %	100.00 %	66.67 %
			b		5 depo pelayanan Resep	5	500%	500%	5	500%	500%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			c		Pelayanan sediaan steril	1	100%	100%	1	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			d		Pelayanan sitostatika	1	100%	100%	1	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
			e		Pelayanan UDD disetiap ruangan	33	3300%	3300%	33	3300 %	3300 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		3	Ketersediaan formularium		95%	95%	95%	95%	100%	99%	100%	100.00 %	104.60 %	105.20 %
		4	Waktu tunggu pelayanan obat jadi		≤30 menit	33	80%	80%	71	69%	19 MNT	46%	85.66%	100.00 %
		5	Waktu tunggu pelayanan obat racikan		≤60 menit	80%	80%	80%	66%	52%	50 MNT	83.01%	65.39%	100.00 %
		6	Tidak ada kesalahan pemberian obat		100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Kepuasan pelanggan		≥85%	85	85%	85%	94	94%	86%	110.59 %	110.36 %	100.72 %
11	Pelayanan Gizi	1	Pemberi pelayanan Gizi								0.00%	0.00%		

NO	Unit Pelayanan	Indikator			Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
			a	Ahli gizi: S2/S1,D4(RD)	56 orang	56	38%	38%	50	1900 %	1700 %	90.48%	90.48%	80.90 %	
			b	Ahli gizi: D3(TRD)	16 orang	16	25%	25%	11	500%	400%	71.43%	71.43%	85.70 %	
		2	Ketersediaan Sarana & Prasarana										0.00%	0.00%	
			a	Peralatan Gizi	Sesuai kelas RS	Tersedia	Tersedia	Tersedi a	Tersedi a	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
			b	Sarana & prasarana instalasi Gizi	Sesuai kelas RS	Tersedia	Tersedia	Tersedi a	Tersedi a	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
		3	Asuhan dan konseling Gizi										0.00%	0.00%	
			a	Asuhan & konseling Gizi Rawat Jalan	100%	Tersedia	Tersedia	Tersedi a	Tersedi a	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
			b	Asuhan & konseling Gizi Rawat Inap	100%	Tersedia	Tersedia	Tersedi a	Tersedi a	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
		4	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien			≥90%	96%	96%	96%	100%	99%	100%	104.17 %	103.30 %	104.17 %
		5	Tidak ada kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		6	Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien Privat			<15,8%	<15,8%	<15,8%	<15,8%	14%	16%	14%	111.00 %	100.00 %	100.00 %
			Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien Publik			<20%	<15,8%	<15,8%	<15,8%	19%	14%	19%	82.81%	100.00 %	83.47 %
		7	Kepuasan pelanggan privat			≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	92%	0%	79%	115.00 %	0.00%	99.00 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		8	Kepuasan pelanggan publik	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	92%	0%	79%	115.00 %	0.00%	99.00 %
12	Pelayanan Lab. Tranfusi darah	1	Tenaga penyedia pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	sesuai standar BDRS	sesuai standar BDRS	sesuai standar BDRS	sesuai standar BDRS	0%	0%	100%	0.00%	0.00%	100.0 0%
		2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah Rumah Sakit	sesuai standar BDRS	sesuai standar BDRS	sesuai standar BDRS	sesuai standar BDRS	0%	0%	100%	0.00%	0.00%	100.0 0%
		3	Kejadian Infeksi Tranfusi	≤0,01	≤0,01	≤0,01	≤0,01	100%	0%	100%	100.00 %	100.00 %	100.0 0%
		4	Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di RS	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100.00 %	50.00%	100.0 0%
		5	Kepuasan pelanggan	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	0%	0%	100%	0.00%	0.00%	100.0 0%
13	Pelayanan Rekam Medik	1	Pemberi pelayanan Rekam Medik	73%	20%	20%	50%	16%	23%	36%	82.00%	116.45 %	71.88 %
		2	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	4,1 menit	3,98 menit	4,5me nit	100.00 %	100.00 %	100.0 0%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	4,6 menit	3,63 menit	4,40 menit	100.00 %	100.00 %	100.0 0%
		4	Analisa kelengkapan pengisian Rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	16%	13%	2%	15.62%	12.65%	1.82%
		5	Analisa kelengkapan pengisian informed consent(IC)	100%	100%	100%	100%	15%	2%	4%	14.80%	2.10%	4.43%
		6	Pasien rujukan	100%	80%	100%	100%	-	81%	85%	-	80.93%	84.54 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
14	Pelayanan Kesling Pengelolaan Limbah	1	Adanya penanggung jawab pengelola limbah RS	Adanya SK Direktur sesuai kelas RS(permenkes no 7 th 2019)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2	Ketersediaan fasilitas dan peratan pengelolaan limbah RS padat dan cair	Sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75.00%	75.00%	100.00 %
		3	Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	83%	80%	88%	83.00%	80.00%	88.00 %
		4	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5	Baku mutu limbah cair	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
15	Pelayanan Administrasi Manajemen	a.	Kepegawaian			100%	0%		90%	0%		90.00%	0.00%
		1	Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam organisasi	100%	100%	100%	100%	3800%	100%	2600 %	95.00%	100.00 %	100.00 %
		2	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	0%	100%	7900%	0%	5000 %	100.00 %	97.50%	100.00 %
		3	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	3800%	65%	7400 %	100.00 %	64.62%	100.00 %
		4	Adanya urutan kepangkatan karyawan	100%	100%	ada	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		b.	Keuangan									100.00 %	0.00%
		5	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	per 3 bulan	100%	-	100%	0%	-	100.00 %	100.00 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		6	Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Cost Recovery	≥ 60%	100%	≥90%	100%	103%	0%	106%	102.70 %	-	106.00 %
		8	Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100.00 %	92.92%	100.00 %
		c.	Perencanaan									0.00%	0.00%
		9	Perencanaan Strategis RS(Reviu)	ada	100%	100%	100%	100%	4000 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		10	Kelengkapan laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	7900 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		d.	Umum									100.00 %	0.00%
		11	Tindak Lanjut hasil Rapat Direksi	100%	100%	100%	100%	91%	100%	99%	91.00%	100.00 %	98.59 %
		12	Adanya Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By-Law)	Ada	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100.00 %	0.00%	100.00 %
		13	Adanya Peraturan Internal Rumah Sakit (Medical Staf By-Law)	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		e.	Diklit									100.00 %	0.00%
		14	Perencanaan pengembangan SDM	Ada (dokumen rencana pengembangan SDM)	100%	100%	100%	0%	111%	0%	0.00%	138.63 %	0.00%

NO	Unit Pelayanan	Indikator			Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
			1 5	Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	Ada (Perencanaan implementasi pengembangan SDM)	≥ 90%	100%	≥ 90%	0%	100%	0%	0.00%	100.00 %	0.00%
			1 6	Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60%	40%	0%	40%	17%	0%	54000 %	17.00%	0.00%	89.26 %
16	Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD)	1		Ketersediaan pelayanan ambulans gawat darurat	24 Jam	100%	100%	100%	100%	97%	97%	100.00 %	97.33%	97.33 %
		2		Ketersediaan sarana & prasarana AGD 119		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
			a	Sarana Transportasi	100%	100%	100%	100%	83%	50%	100%	83.00%	50.00%	100.00 %
			b	Daftar alat AGD	100%	80%	100%	100%	55%	78%	62%	54.84%	78.00%	61.90 %
		3		Pemberi pelayanan ambulans gawat darurat memiliki STR dan SIP serta bersertifikat ATLS/ BTLs/ACLS/GELS/PPGD/ Pembacaan EKG yang masih berlaku (perawat)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
			a	Daftar tenaga AGD	100%	100%	100%	100%	64%	64%	64%	63.64%	63.64%	63.64 %
			b	Daftar kompetensi dan Pelatihan tenaga AGD	100%	80%	80%	80%	15%	15%	25%	61.92%	19.35%	31.25 %
		4		Kecepatan memberikan pelayanan ambulans gawat darurat	≤ 30 mnt	≤ 30 mnt	≤ 30 mnt	≤ 30 mnt	100%	6 mnt	18 mnt	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		5	Waktu Tanggap pelayanan ambulans gawat darurat kepada masyarakat	≤ 30 mnt	≤ 30 mnt	≤ 30 mnt	≤ 30 mnt	100%	15 mnt	07,6mnt	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		6	Tidak terjadinya kecelakaan ambulans gawat darurat yang menyebabkankecacatan atau kematian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Kepuasan Pasien	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	0%	40%	40%	0.00%	57.14%	57.14 %
17	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	1.	Waktu pelayanan pemulasaraan Jenazah									0.00%	0.00%
		1	Ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah	24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2	Ketersediaan fasilitas kamar jenazah	Sesuai kelas RS	90%	90%	90%	90%	90%	80%	100.00 %	100.00 %	88.89 %
		3	Ketersediaan tenaga pemulasaraan jenazah	Ada SK dari Direktur	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100.00 %	100.00 %	90.00 %
		4	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	15 menit setelah dikamar jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	91%	100.00 %	100.00 %	91.07 %
		2.	Jumlah jenazah yang diamati dalam satu bulan									0.00%	0.00%
		5	Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		6	Tidak terjadiny identifikasi jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Kepuasan Pelanggan	100%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	100.00 %	100.00 %	87.50 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
18	Pelayanan Laundry	1.	Ketersediaan Sarana Fisik Laundry yang memenuhi standar	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2	Adanya Penanggung Jawab Pelayanan Laundry	SK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		3	Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Pelayanan	Sesuai Standar kelas RS	100%	100%	100%	76%	73%	75%	76.00%	72.50%	75.21 %
		4	Ketersediaan Linen kamar perawatan	100%	100%	100%	100%	46%	44%	81%	46.00%	55.10%	100.66 %
		5	Ketersediaan Linen bersih kamar Operasi	100%	100%	75%	75%	23%	36%	38%	23.00%	48.25%	50.97 %
		6	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7	Ketepatan Pengelolaan Linen Infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		8	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		9	Kepuasan Pengguna	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	0%	0%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
19	Pelayanan Pemeliharaan sarana RS & Elektromedik	1.	Adanya Penanggung Jawab IPSRS	SK Direktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2	Ketersediaan bengkel kerja	Sesuai kelas RS	50%	50%	50%	0%	30%	45%	0.00%	60.00%	45.00 %
		3	Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit	100%	90%	90%	90%	93%	77%	14 mnt	102.88 %	85.12%	100.00 %

NO	Unit Pelayanan	Indikator		Standar	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi			Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		4	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	100%	80%	100%	100%	99%	100%	124700%	103.79%	100.00%	43.06%
		5	Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100.00%	81.00%	100.00%
		6	Alat ukur dan alat Laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
20	Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Infeksi	1.	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	75%	95%	100%	95%	83%	100%	98%	83.00%	100.00%	98.00%
		2	Tersedianya APD	≥75%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
		3	Rencana Program PPI	Ada	Ada	100%	Ada	ada	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%
		4	Pelaksanaan Program Ppi sesuai rencana	100%	100%	85%	100%	100%	70%	100%	100.00%	82.35%	100.00%
		5	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	100%	0%	100%	100%	0%	97%	100.00%	89.36%	97.00%
		6	Terlaksannya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS	≥80%	100%	100%	100%	100%	80%	95%	100.00%	80.00%	95.00%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

A. Sasaran Internal

1. PPA (Profesional Pemberi Asuhan)
2. Staf Penunjang Rumah Sakit
3. Staf Administrasi Rumah Sakit

B. Sasaran Eksternal

1. Masyarakat Umum
2. Stakeholder
3. Akademisi
4. Supplier (Pengadaan Barang & Jasa)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

RSUD A. W. SJAHRANIE

RSUD A. W. Sjahranie adalah Rumah Sakit Pemerintah yang sesuai Rujukan Nasional selain tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat secara komprehensif, RS juga diharapkan dapat berkinerja baik dari segi tata kelola klinis maupun tata kelola non klinis, dengan kompleksitas permasalahan yang ada karena RS adalah layanan yang padat dengan sumber daya manusianya, padat tindakan/ intervensi baik medis maupun tindakan keperawatan, padat sarana penunjang, padat administratif, dan padat akan kebutuhan yang harus dipenuhi baik secara internal maupun eksternal RS. Banyaknya permasalahan yang ada maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah upaya pemetaan masalah sehingga dengan pemetaan masalah tersebut akan memudahkan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RS.

Proses yang dilakukan RS secara sistematis adalah melakukan identifikasi semua permasalahan baik yang bersifat mayor dan minor setelah itu dilakukan analisis SWOT (*strength, weakness, oppprtunity dan threat*), analisis internal berupa menganalisis *strength, weakness* dan analisis eksternal berupa *oppprtunity dan threat*, dari hasil analisis SWOT tersebut dapat dilihat posisi Rumah Sakit yang bersifat Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh RSUD A. W. Sjahranie maka permasalahan dapat digambarkan berkaitan dengan hal-hal berikut yaitu :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik masih tinggi
2. Adaptasi Rumah Sakit Terhadap Regulasi yang lambat
3. Kebijakan rujukan yang berjenjang
4. Adanya RS Daerah dan RS Swasta sebagai RS pesaing
5. SIM RS belum terintegrasi secara penuh
6. Lebih dari 50% pegawai masih berstatus TKWT
7. Tenaga TKWT terlatih yang kompeten ada kemungkinan berpindah tugas ke tempat lain Kompetensi SDM PPA (Profesional pemberi asuhan) terlatih 20 jam/orang/tahun baru 62% terpenuhi
8. Stigma RS sebagai RS pendidikan

9. Kompetensi SDM PPA (Profesional pemberi asuhan) terlatih 20 jam/orang/tahun baru 62% terpenuhi
10. Minat penelitian sangat rendah dimana RS AWS merupakan RS pendidikan utama
11. Membutuhkan biaya pemeliharaan alat canggih yang tinggi
12. Kondisi lingkungan RS yang rendah dan banjir jika hujan deras
13. Kurangnya Fasilitas Parkir/ Area Rumah sakit
14. Masih rendahnya Marketing RS terhadap produk layanan unggulan dan penunjang Rumah Sakit

3.2 Analisis SWOT

Selanjutnya dilakukan analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal RSUD A.W. Sjahranie dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 13
Analisis SWOT RS

ANALISIS EKSTERNAL				ANALISIS INTERNAL			
OPPORTUNITY	BOBOT	RATING	SKOR	STRENGTH	BOBOT	RATING	SKOR
			BOBOT X RANKING				BOBOT X RANKING
Adanya kebijakan PPK- BLUD	0.20	4.00	0.80	Kondisi Keuangan BLUD lebih sehat	0.22	4.00	0.88
Dukungan APBD dan APBN yang cukup tinggi	0.15	4.00	0.60	RS telah terakreditasi kelas A untuk RS pendidikan dan Pelaksana Diklat Bidang Kesehatan	0.18	4.00	0.72
RS Rujukan Nasional kawasan Indonesia Tengah	0.13	4.00	0.52	Tenaga kesehatan yang lengkap	0.16	4.00	0.64
Banyaknya tenaga kesehatan di institusi Kesehatan lain yang memerlukan pendidikan dan pelatihan di Rumah sakit yang terakreditasi	0.12	4.00	0.48	Tersedia Peralatan medis canggih dan Sarana dan prasarana yang lengkap	0.14	4.00	0.56
Kerjasama dengan 4 RS luar Kaltim dengan produk unggulannya	0.10	4.00	0.40	Produk layanan yang Bervariasi, keunikan dan keunggulan	0.12	4.00	0.48
Minat institusi luar untuk meningkatkan kompetensi SDM ke RS AWS, pelayanan perawatan dan pelayanan penunjang yang sangat tinggi	0.09	4.00	0.36	Letak demografi RS yang strategis di pusat kota	0.10	3.00	0.30

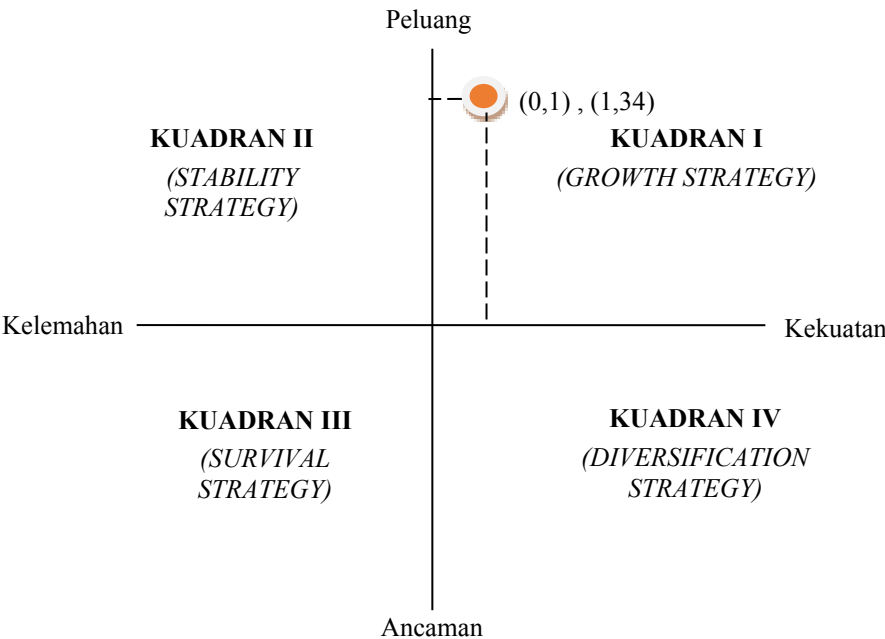
Meningkatnya perusahaan asuransi kesehatan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit dan peningkatan kerjasama COB dengan Rumah Sakit	0.08	2.00	0.16	Pembangunan gedung rawat inap 8 lantai	0.08	1.00	0.08
Meningkatnya Daya beli masyarakat	0.07	3.00	0.21				
Pola pencarian pengobatan Komplementer	0.06	1.00	0.06				

ANALISIS EKSTERNAL

ANALISIS INTERNAL

THREAT				WEAKNESS			
Adanya RS Daerah dan RS Swasta sebagai RS pesaing	0.35	1.00	0.35	Kompetensi SDM PPA (Profesional pemberi asuhan) terlatih 20 jam/orang/tahun baru 62% terpenuhi	0.20	4.00	0.80
Tenaga TKWT terlatih yang berkompeten ada kemungkinan berpindah tugas ke tempat lain	0.25	4.00	1.00	Adaptasi Rumah Sakit Terhadap Regulasi yang lambat	0.15	4.00	0.60
Stigma RS sebagai RS Pendidikan	0.20	2.00	0.40	Lebih dari 50% pegawai masih berstatus TKWT	0.13	4.00	0.52
Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik masih tinggi	0.15	3.00	0.45	Membutuhkan biaya pemeliharaan alat canggih yang tinggi	0.12	4.00	0.48
Kebijakan rujukan berjenjang	0.05	1.00	0.05	SIM RS belum terintegrasi secara penuh	0.10	4.00	0.40
				Minat penelitian sangat rendah dimana RS AWS merupakan rs pendidikan utama	0.09	3.00	0.27

				Kurangnya Fasilitas Parkir/ Area Rumah sakit	0.08	2.00	0.16
				Masih rendahnya Marketing RS terhadap produk layanan unggulan dan penunjang RS	0.07	3.00	0.21
				Kondisi lingkungan RS yang rendah dan banjir jika hujan deras	0.06	2.00	0.12
JUMLAH			1.34	JUMLAH			0.10



Gambar 1
Diagram Kartesius RSUD A.W. Sjahranie

Analisis lingkungan internal menggambarkan kinerja pelayanan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit, sarana dan prasana, dan kondisi keuangan. Analisis lingkungan eksternal termasuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan terkait pengembangan RSUD A.W. Sjahranie dalam kurun waktu tiga (3) tahun mendatang.

Kondisi lingkungan eksternal dan internal RSUD A.W. Sjahranie kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran posisi rumah sakit serta strategi pengembangannya.

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis SWOT tersebut pada tabel diatas, maka tergambar posisi RSUD A.W. Sjahranie pada **kuadran I (Agresive)**. Posisi ini menandakan sebuah Rumah Sakit yang kuat dan berpeluang, dimana rekomendasi strategi yang dapat ditempuh yakni dengan cara :

- 1. Memanfaatkan *strength* tertentu untuk menghadapi suatu *threat*
- 2. Memanfaatkan *strength* tertentu untuk menggapai *opportunity*
- 3. Meminimasi atau meniadakan *weakness* tertentu dengan menghadapi *threat* tertentu
- 4. Meminimasi atau meniadakan *weakness* tertentu dengan memanfaatkan *opportunity* tertentu

Rekomendasi strategi yang diberikan bertujuan agar kondisi Rumah Sakit prima dan mantap serta sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

3.3 Pemetaan Permasalahan

Berdasarkan Identifikasi permasalahan yang telah di sampaikan pada point (3.1) diatas, maka dilakukanlah pemetaan permasalahan dengan mencari Akar Masalah , Masalah dan Masalah Pokok. Perumusan Masalah Pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran dalam renstra perangkat daerah. Perumusan Masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan pemecahan masalah melalui strategi yang tertuang dalam renstra perangkat daerah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan yang ada didalam renstra perangkat daerah

Tabel 14
Tabel T-B-35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya capaian kinerja reformasi	Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan 8 area perubahan	1. Belum optimalnya internalisasi reformasi birokrasi di semua bidang/ bagian terkait

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	birokrasi Rumah Sakit	reformasi birokrasi Rumah Sakit	2. Penataan regulasi yang masih kurang sinkron dan harmonis 3. Beberapa regulasi yang belum siap di jalankan muncul regulasi baru 4. Birokrasi pelayanan yang masih panjang 5. Belum optimalnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam reformasi birokrasi
2	Belum optimalnya akses layanan rujukan dan mutu layanan kesehatan Rumah Sakit	Belum optimalnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam upaya meningkatkan kepuasan pasien (pelanggan) di Rumah Sakit	1. Pemberian layanan langsung dan layanan pendukung yang terstandar belum optimal 2. Sarana dan prasarana serta pemeliharaan pendukung layanan masih perlu di tingkatkan 3. Pemanfaatan transformasi Informasi dan teknologi masih minim 4. Kepatuhan dalam menjalankan standar mutu RS yang masih belum optimal
3	Belum optimalnya kinerja profesionalisme dan pengembangan karier tenaga kesehatan Rumah Sakit	Belum optimalnya penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan melalui melalui diklit dan penelitian RS	1. Pemanfaatan teknologi dalam akselerasi peningkatan kompetensi SDM RS belum optimal 2. Ketersediaan anggaran untuk memenuhi standar 20 jam /orang/tahun masih minim 3. Belum optimalnya Kualitas/ performance dan kuantitas SDM yang terlatih sesuai kompetensinya 4. Birokrasi izin pendidikan dan pelatihan serta penelitian menjadi prioritas bagi tenaga ASN

3.4 Isu Strategis

Isu Strategis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di RSUD A.W. Sjahranie sangat berkaitan erat dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Isu strategi ini mendasari Rumah Sakit dalam

menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga (3) tahun kedepan. Isu Strategis tersebut adalah :

1. Program reformasi birokrasi dengan optimalisasi tata kelola yang akuntabel
2. Transformasi sistem kesehatan dengan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier
3. Transformasi SDM Kesehatan dengan Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, maka RSUD A.W Sjahranie Samarinda menindaklanjuti perwujudan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD A. W. Sjahranie tahun 2024 - 2026

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang menjadi perwujudan RSUD A.W Sjahranie Samarinda dalam mencapai Tujuan dan Sasaran adalah :

A. Aspek Sumber Daya Manusia

- Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
- Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
- Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Indikator : Usia Harapan Hidup (Tahun)

B. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

- Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi
- Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK
- Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Indikator 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Dari Tujuan 1 dan Tujuan 4 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tersebut, RSUD A.W Sjahranie Samarinda mengcascadingkan kedalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis RS tahun 2024-2026. Sesuai kebijakan yang berlaku bahwa Sasaran dalam RPD menjadi Tujuan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran RSUD A.W. Sjahranie

4.1.1 Tujuan RSUD A.W. Sjahranie

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis RSUD A.W. Sjahranie.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024 – 2026 ini mengacu Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Tujuan : Usia Harapan Hidup (Tahun)
2. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK
Indikator Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Indikator Tujuan 1.2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4.1.2 Sasaran RSUD A.W. Sjahranie

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh RSUD A.W. Sjahranie dalam jangka waktu sampai tiga (3) tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

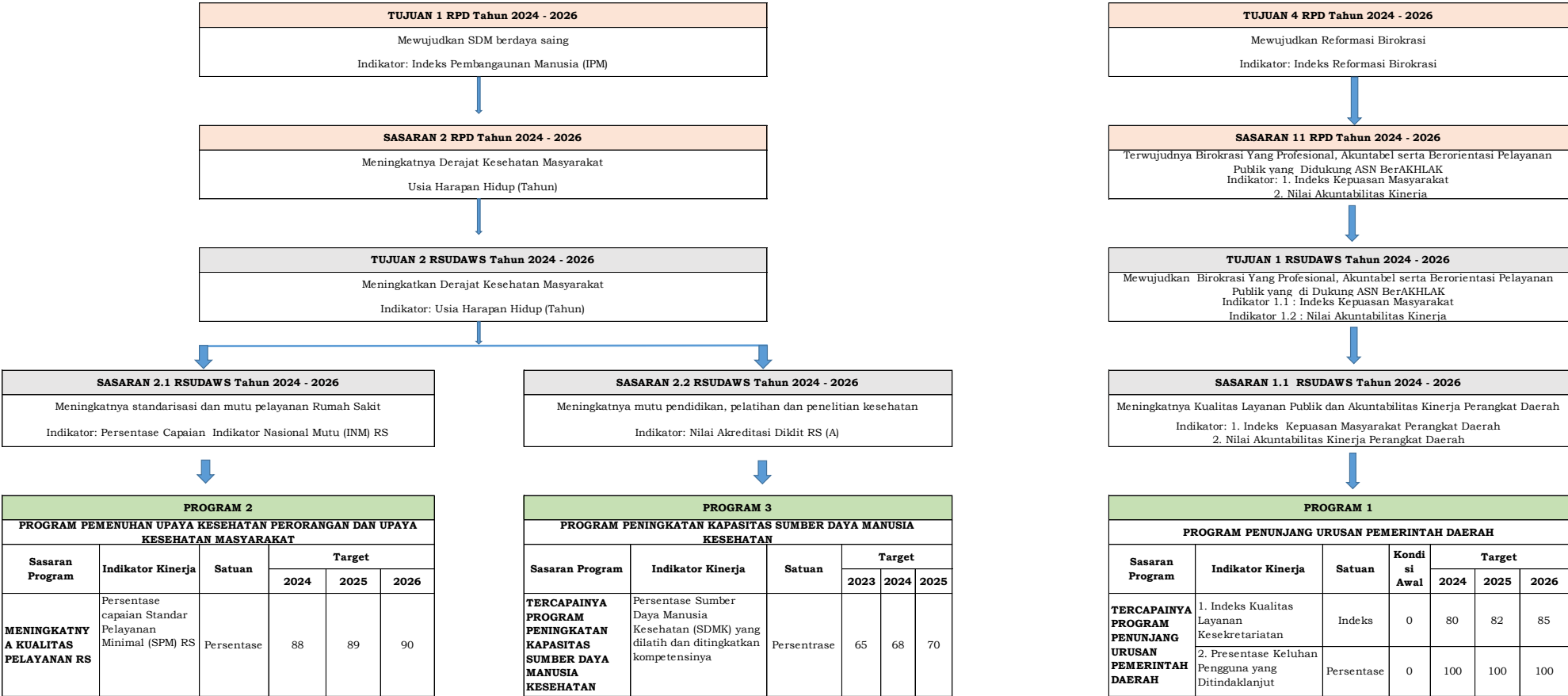
Sasaran di dalam Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Indikator sasaran : Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) RS
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian Kesehatan
Indikator Sasaran : Nilai Akreditasi Diklit RS (A)
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Indikator Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi digunakan untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kalimantan Timur khususnya bidang Kesehatan dan kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta Indikatornya masing masing



KEGIATAN 1.01						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
			2024	2025	2026	
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Nilai	90	90	90	

KEGIATAN 1.02						
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
			2024	2025	2026	
Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	Persentase	100	100	100	

KEGIATAN 1.03						
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Layanan RS terintegrasi secara sistem	Persentase	50	60	70	

KEGIATAN 1.01						
Perencanaan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
			2024	2025	2026	
Terpenuhinya Kebutuhan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar Rumah Sakit	Persentase	100	100	100	

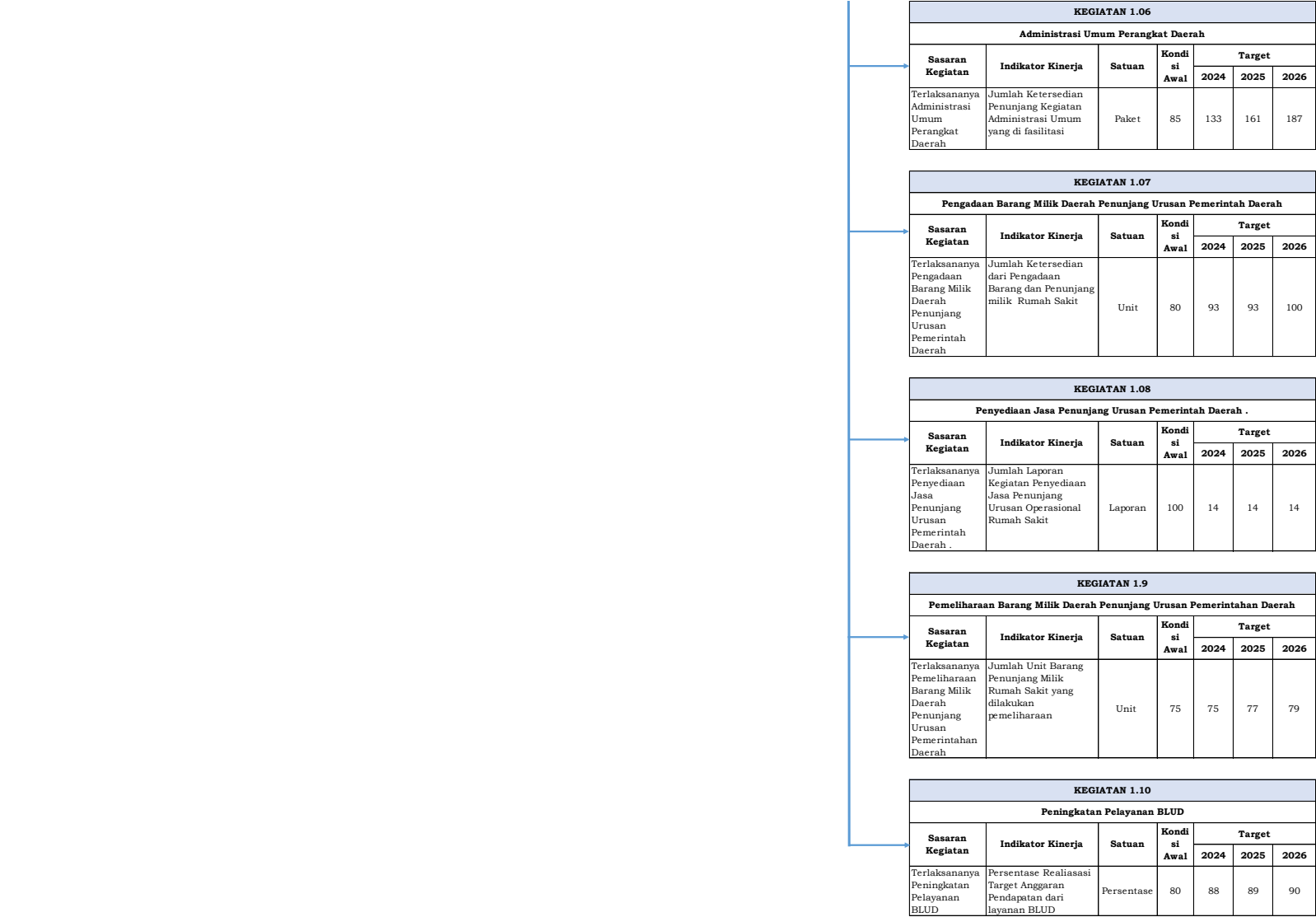
KEGIATAN 1.02						
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
			2024	2025	2026	
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Tahun di RS	Persentase	64	66	68	

KEGIATAN 1.01						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	Dokumen	100	56	56	56

KEGIATAN 1.2						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	Persentase	80	85	88	90

KEGIATAN 1.03						
1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	Dokumen	100	20	20	20

KEGIATAN 1.05						
Administrasi kepegawaian Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
Terlaksananya Administrasi kepegawaian Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	Kegiatan	100	43	45	45



Skema 1
Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta Indikatornya masing masing

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi RSUD A.W. Sjahranie dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat jabarkan strategi yang ditempuh oleh RSUD A.W. Sjahranie adalah:

Tabel 15
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024 – 2026

Tujuan 1 RPD Pemprov : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing				
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Capaian Standar Mutu RS	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Pemenuhan capaian Indikator Nasional Mutu (INM), Indikator Mutu Prioritas (IMP)dan Indikator Mutu Unit (IMU) RS 3. Penguatan Implementasi elemen akreditasi RS 4. Pelaksanaan 9 prioritas program Kemenkes 5. Penerapan budaya keselamatan pasien 6. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dan pendukung Kesehatan pasien 7. Peningkatan upaya promosi Kesehatan RS melalui program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) baik secara internal maupun eksternal 8. Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk kesinambungan pelayanan pasien 9. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kerjasama RS
		2. Meningkatnya mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan	Peningkatan Akses dan Mutu Diklat serta Penelitian Kesehatan	1. Penataan Diklat Sumber Daya Manusia (SDM) RS 2. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan dan pelatihan Internal RS 3. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan dan non Kesehatan 4. Peningkatan perluasan akses diklat dari eksternal RS 5. Peningkatan kegiatan penelitian baik klinis maupun non klinis RS 6. Pemenuhan sarana dan prasarana diklat dan penelitian RS

Tujuan 4 RPD Pemprov : Mewujudkan Reformasi Birokrasi				
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah	Implementasi Standar Pelayanan Publik RS	1. Peningkatan kualitas pelayanan public didukung dengan Informasi Teknologi (IT) 2. Penyediaan Standar Pelayanan Publik untuk semua layanan yang bersentuhan langsung dengan pasien yang melibatkan Masyarakat 3. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RS 4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok Rentan/ disabilitas 5. Peningkatan motivasi staf dengan Reward 6. Peningkatan sistem informasi , sarana dan Akuntabilitas Pengaduan Masyarakat 7. Optimalisasi kesempatan semua Unit/bidang/bagian untuk melakukan inovasi layanan
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi RS	1. Optimaliasasi manajemen perubahan 2. Deregulasi Kebijakan dan aturan RS 3. Penyederhanaan birokrasi pelayanan 4. Peningkatan tata kelola dan organisasi kelembangaan serta manajemen SDM 5. Perbaikan koordinasi dan tata hubungan kerja 6. Peningkatan kualitas perencanaan program RS 7. Peningkatan kualitas perencanaan bidang/bagian/instalasi RS 8. Penguatan Monitoring dan Evaluasi semua unsur yang tertuang dalam rencana strategis RS 9. Penguatan Pegawasan melalui SPIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Target masing-masing program serta pendanaan disajikan dalam tabel 16 terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 16
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Renstra RSUD A.W. Sjahranie (APBD)
Tahun 2024 – 2026

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				785.823.755.000		845.449.054.000		1.133.015.147.000		
Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	Indeks kepuasan masyarakat	89,33 Indeks	89,50 Indeks		89,75 Indeks		90 Indeks		90 Indeks	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,43 Poin	77,25 Poin		77,50 Poin		77,75 Poin		77,75 Poin	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	77,70 Indeks	79 Indeks		80 Indeks		81 Indeks		81 Indeks	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75,75 Nilai	79 Nilai		80 Nilai		81 Nilai		81 Nilai	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	75 Indeks	80 Indeks	733.526.992.150	82 Indeks	762.643.893.555	85 Indeks	806.122.073.094	85 Indeks	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	56 Dokumen	320.751.800	56 Dokumen	462.826.980	56 Dokumen	509.109.678	56 Dokumen	
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	153.913.800	13 Dokumen	232.305.180	13 Dokumen	233.035.698	13 Dokumen	
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	38 Laporan	106.838.000	38 Laporan	155.521.800	38 Laporan	195.073.980	38 Laporan	
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85%	85%	211.362.516.258	88%	209.262.516.258	90%	211.362.516.258	90%	
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/ Bulan	1100 Orang/ Bulan	210.849.926.258	1150 Orang/ Bulan	208.752.426.258	1150 Orang/ Bulan	210.852.426.258	1150 Orang/ Bulan	
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	339.000.000	4 Dokumen	339.000.000	4 Dokumen	339.000.000	4 Dokumen	
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	12.960.000	24 Dokumen	12.960.000	24 Dokumen	12.960.000	24 Dokumen	
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	21 Laporan	128.130.000	21 Laporan	122.130.000	21 Laporan	118.130.000	21 Laporan	
X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	13.500.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	11.500.000	12 Dokumen	13.000.000	12 Dokumen	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	20 Dokumen	143.070.000	20 Dokumen	143.070.000	20 Dokumen	143.070.000	20 Dokumen	
X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	105.900.000	2 Dokumen	105.900.000	2 Dokumen	105.900.000	2 Dokumen	
X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.170.000	2 Laporan	7.170.000	2 Laporan	7.170.000	2 Laporan	
X.XX.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	15.000.000	8 Laporan	
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	40 Kegiatan	43 Kegiatan	1.193.584.476	45 Kegiatan	1.642.384.600	45 Kegiatan	1.300.743.600	45 Kegiatan	
X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Paket	1 Paket	1.090.862.876	1 Paket	1.536.663.000	1 Paket	1.195.022.000	1 Paket	
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	782 Orang	782 Orang	40.000.000	782 Orang	40.000.000	782 Orang	40.000.000	782 Orang	
X.XX.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	0 Orang	540 Orang	28.800.000	550 Orang	28.800.000	555 Orang	28.800.000	555 Orang	
X.XX.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	18 Orang	21.921.600	20 Orang	21.921.600	20 Orang	21.921.600	20 Orang	
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	100 Paket	133 Paket	1.506.835.709	161 Paket	904.159.010	187 Paket	2.097.433.213	187 Paket	
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	100 Paket	111 Paket	179.677.496	139 Paket	101.307.800	165 Paket	583.044.200	165 Paket	
X.XX.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	5 Paket	251.915.003	5 Paket	81.712.000	5 Paket	253.399.803	5 Paket	
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	238.455.210	2 Paket	138.455.210	2 Paket	438.455.210	2 Paket	
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang di sediakan	3 Paket	3 Paket	62.572.000	3 Paket	56.292.000	3 Paket	41.662.000	3 Paket	
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	37 Laporan	109 Laporan	689.216.000	112 Laporan	441.392.000	112 Laporan	695.872.000	112 Laporan	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X.XX.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	90 Unit	93 Unit	3.686.376.036	93 Unit	2.005.078.836	100 Unit	4.397.502.474	100 Unit	
X.XX.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 Unit	4 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	6 Unit	250.000.000	6 Unit	
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	3 Unit	520.000.000	1 Unit	650.000.000	2 Unit	1.401.833.000	6 Unit	
X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mabel yang disediakan	0 Paket	14 Paket	460.628.600	14 Paket	233.915.900	14 Paket	478.068.600	14 Paket	
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	59 Unit	1.064.759.936	60 Unit	680.162.936	64 Unit	643.214.936	64 Unit	
X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	500.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	563.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	
X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	11 Unit	527.987.500	12 Unit	291.000.000	13 Unit	1.024.385.938	13 Unit	
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Rumah Sakit	14 Laporan	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	72 Unit	75 Unit	5.410.857.871	77 Unit	3.320.857.871	79 Unit	6.408.697.871	79 Unit	
X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40 Unit	40 Unit	329.800.000	40 Unit	329.800.000	40 Unit	357.640.000	40 Unit	
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	2 Unit	13 Unit	1.065.399.999	15 Unit	1.065.399.999	17 Unit	1.065.399.999	17 Unit	
X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.000.000	5 Unit	
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	4 Unit	13 Unit	1.038.948.000	13 Unit	888.948.000	13 Unit	1.888.948.000	13 Unit	
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	2.946.709.872	4 Unit	1.006.709.872	4 Unit	3.066.709.872	4 Unit	
X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88%	88%	510.000.000.000	89%	545.000.000.000	90%	580.000.000.000	90%	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X.XX.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	510.000.000.000	1 Unit Kerja	545.000.000.000	1 Unit Kerja	580.000.000.000	1 Unit Kerja	
Tujuan 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,62 Tahun	74,82 Tahun		74,89 Tahun		74,93 Tahun		74,93 Tahun	
Sasaran 2 : Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) RS	56%	76%		78%		80%		80%	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88%	88%	49.530.932.850	89%	78.468.424.445	90%	321.961.617.906	90%	
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	90 Nilai	46.595.359.644	90 Nilai	76.616.773.845	90 Nilai	318.789.937.113	90 Nilai	
1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	1 Unit	20.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	610.000.000	3 Unit	
1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	1 Unit	1.600.000.000	1 Unit	13.041.820.000	1 Unit	8.706.847.500	3 Unit	
1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	90 Unit	22.601.223.144	95 Unit	59.504.853.958	100 Unit	303.973.790.425	285 Unit	
1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1000 Unit	1604 Unit	299.492.500	500 Unit	100.000.000	500 Unit	100.000.000	2604 Unit	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6 Unit	2304 Unit	2.094.644.000	2260 Unit	1.970.099.887	1837 Unit	5.399.299.188	6401 Unit	
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100%	100%	1.124.483.666	100%	826.748.666	100%	1.714.288.666	100%	
1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	4 Dokumen	723.813.666	4 Dokumen	123.813.666	4 Dokumen	1.023.813.666	4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	22.000.000	5 Dokumen	24.000.000	5 Dokumen	
1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	15 Dokumen	395.670.000	16 Dokumen	680.935.000	18 Dokumen	666.475.000	18 Dokumen	
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	40%	50%	1.811.089.540	60%	1.024.901.934	70%	1.457.392.127	70% %	
1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	26 Dokumen	1.811.089.540	26 Dokumen	1.024.901.934	26 Dokumen	1.457.392.127	26 Dokumen	
Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Kesehatan	Nilai Akreditasi Diklit RS (A)	0	A Nilai	2.665.830.000	A Nilai	4.236.736.000	A Nilai	4.831.456.000	A Nilai	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar Rumah Sakit	100%	100%	2.665.830.000	100%	4.236.736.000	100%	4.831.456.000	100%	
[KEGIATAN] 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar Rumah Sakit	100%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL	2024		2025		2026		TARGET AKHIR	UNIT KERJA
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	15 Orang	1.000.000	20 Orang	1.000.000	25 Orang	1.000.000	60 Orang	
[KEGIATAN] 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	62%	64%	2.664.830.000	66%	4.235.736.000	68%	4.830.456.000	68%	
1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	510 Orang	734 Orang	2.664.830.000	814 Orang	4.235.736.000	900 Orang	4.830.456.000	2448 Orang	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD A. W. Sjahranie

Tabel 17
Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			Tahun 2022	Tahun 2023 (Target)	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Indikator Kinerja Tujuan							
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,62	74,71	74,82	74,89	74,93	74,93
	Indikator Kinerja Sasaran							
	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) RS	Persentase	-	75	76	78	80	80
	Nilai Akreditasi Diklit RS (A)	Nilai	-	A	A	A	A	A
II	Indikator Kinerja Tujuan							
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31,38	40.00	69.00	69.50	70.01	70.01
	Indikator Kinerja Sasaran							
	Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	77,70	78	79	80	81	81
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat	75,75	78	79	80	81	81

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD A. W. Sjahranie Samarinda tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, strategi , arah kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

Rencana Strategis (Renstra) RSUD A. W. Sjahranie Samarinda tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahun kedepan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Rumah Sakit, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Rumah Sakit maupun di lingkup Provinsi.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renstra RSUD A. W. Sjahranie Samarinda tahun 2024-2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 : ”Membangun Kaltim Untuk Nusantara”.

Samarinda, Juli 2023
Direktur

dr. David H. Masjhoer, Sp.OT.,M.K.M (MARS)
NIP. 19650314 199803 1 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	drg. Agung Dwi Kurianto, Sp. Prost. NIP. 19650715 199303 1 009	Wadir Umum dan Keuangan	
2.	Haryati Rachman.,S.Sos.,MPH NIP. 19680811 198902 2 003	Kabag. Perencanaan Program	
3.	Ns. Siti Wardatun H.,S.Kep.,MM NIP. 19740818 199603 2 001	Perencana Ahli Muda	
4.	Rinda Yuniarti., S.ST	Pengadminstrasi Perencanaan	
5.	Aufar Nur Fajri, S.Kom	Pengadminstrasi Perencanaan	
6.	Sri Wahyuni., Amd	Pengadminstrasi Perencanaan	

**RENCANA STRATEGIS
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting yang menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder (baik internal maupun eksternal) dalam suatu organisasi. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, seluruh komponen yang dimiliki dalam suatu organisasi bekerja sama dalam membuat perencanaan strategis mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi.

Dokumen Rencana Strategi tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) yang di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran. Dokumen Renstra ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah bagi berjalannya organisasi. Penyusunan renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merancang rencana strategik secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan berpedoman pada renstra, diharapkan pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program/kegiatan menunjang dalam mewujudkan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat Kalimantan Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategik ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2021 tentang penyusunan rencana perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan perencanaan strategik mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Terwujudnya Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis.

Konsekuensi terhadap adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Renstra akan mengakomodir permasalahan tersebut, yaitu pada saat analisis SWOT yang memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Strategi-strategi yang telah ditetapkan dan disusun nantinya akan diterjemahkan kedalam program / kegiatan.

1.3.2. Terwujudnya pengelolaan capaian / keberhasilan kinerja.

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan Indikator Kinerja Utama disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran. Penentuan program/kegiatan serta apaian kinerja mengacu kepada RPJMD yang ditetapkan. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan Indikator Kinerja Utama (keberhasilan) yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Gubernur Kalimantan Timur.

1.3.3. Berorientasi kepada pencapaian hasil kinerja yang akan datang.

Penyusunan Renstra memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun rencana yang telah disusun. Sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan dan menyesuaikan dengan yang akan dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Gubernur Kalimantan Timur periode 2024 – 2026 yang telah ditetapkan.

1.3.4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 yang telah ditetapkan. Program-program yang telah ditetapkan menjadi tujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

1.3.5. Terwujudnya pelayanan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan yang bermutu kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit. Pelayanan yang bermutu dan berdampak positif bagi masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya serta kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan standar yang baik dan berkualitas maka masyarakat/pasien akan mendapatkan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan pelayanan. Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

1.3.6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan .

Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan selama 3 (Tiga) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD), serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2024 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana strategik RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terdiri dari 8 (Delapan) bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

4. Kelompok sasaran layanan

Catatan: dapat ditambahkan beberapa sub.bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD).

- a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).

BAB III. Penjelasan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan Isu strategis.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

2. Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- f. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. Tujuan dan sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

1. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V. Strategi dan arah kebijakan

Paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII. Penutup.

Mengungkapkan uraian umum rencana strategis RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi dan struktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

2.1.1. Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Kota Balikpapan. Menempati lahan seluas 24,4 Ha dengan luas bangunan saat ini 10 Ha, telah menjalankan pola keuangan BLUD sejak tahun 2008. Saat ini telah menjadi rumah sakit kelas A berdasar keputusan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kesehatan terkait Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan nomor Izin : 91201094711030001 yang diterbitkan tanggal: 31 Mei 2022.

RSKD Balikpapan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

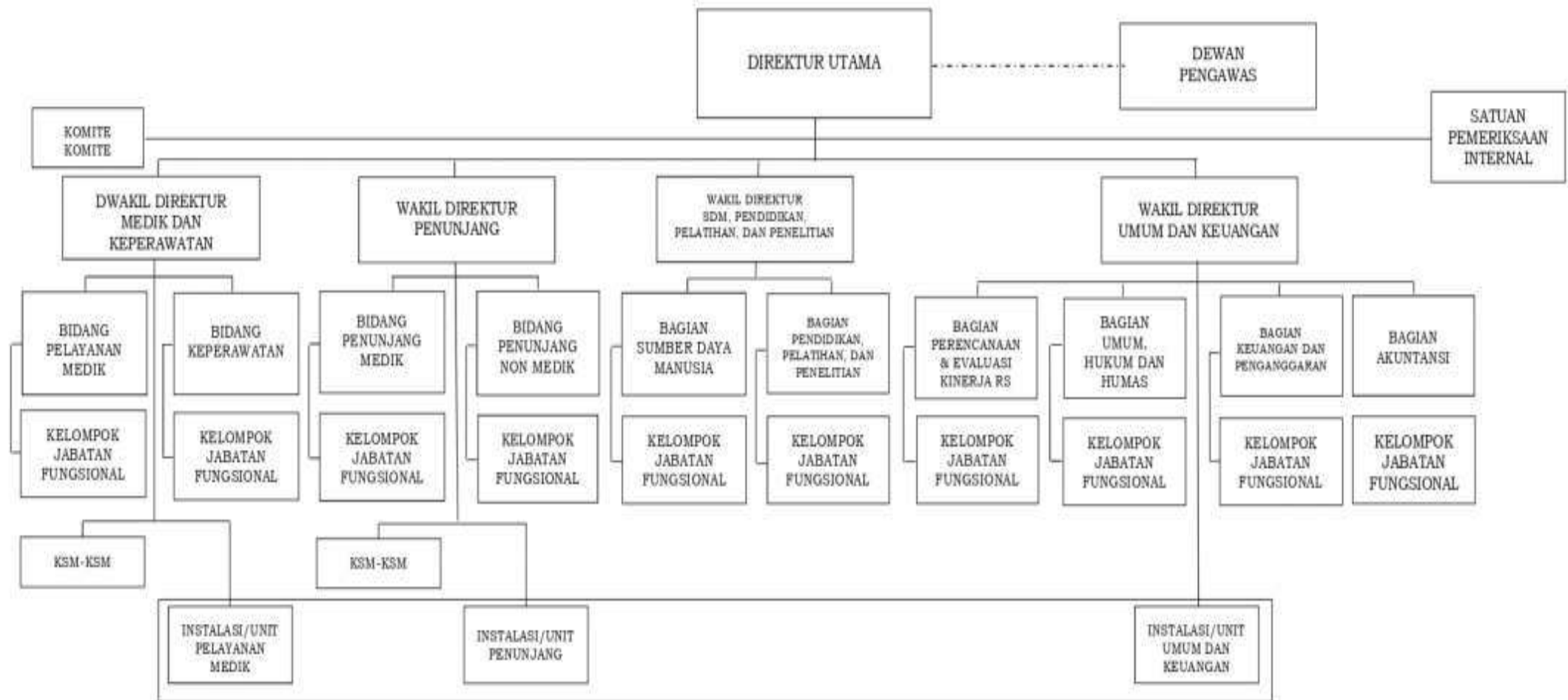
- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.2. Struktur organisasi

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terletak di Jl. MT.Haryono No. 656 Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan, dipimpin oleh seorang Direktur dan 4 (Empat) orang Wakil Direktur yaitu: Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian serta Dewan Pengawas. Seperti yang digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan



Gambar 2.1

Susunan organisasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Keperawatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 1. Bidang Penunjang Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bidang Penunjang Non Medik membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, membawahkan:
 1. Bagian Sumber Daya Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, Hukum dan Humas membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Keuangan dan Penganggaran membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bagian Akuntansi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang menjadi peran fungsi dan tugas dari Direktur dan Wakil Direktur, adalah sebagai berikut :

a. Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

1. perumusan program kerja dan kebijakan teknis sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan profesional berdasarkan rencana strategis Dinas;
2. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis umum dan keuangan;
3. perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;

4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penunjang;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
6. penetapan kebijakan strategis penyelenggaraan Rumah Sakit, visi, misi, nilai dan tujuan organisasi Rumah Sakit berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. penetapan sistem, prosedur dan tata kerja di lingkungan Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. penetapan kebijakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan;
9. penetapan kebijakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
10. penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan
11. penetapan kebijakan pengelolaan penelitian, pengembangan umum dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
12. penetapan kebijakan pengelolaan urusan administrasi umum dan keuangan di Rumah Sakit;
13. penetapan kebijakan pengelolaan sistem informasi;
14. pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan Rumah Sakit;
15. pelaksanaan manajemen yang baik, kerja sama dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan seluruh stakeholders atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
16. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis terhadap Satuan Pengawas Internal, Komite, Instalasi/Unit;
17. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan administrasi umum, sumber daya manusia dan keuangan; dan
18. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Direktorat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; memimpin implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen *human capital* dan manajemen logistik dan manajemen keuangan serta pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
- e. memimpin tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik;
- f. memimpin implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit;
- g. memimpin pelaksanaan program pengendalian standar mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit yang berfokus pada peningkatan pengalaman pasien demi terciptanya budaya keselamatan pasien, serta terpenuhinya hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memimpin implementasi jaminan kesehatan nasional dengan prinsip kendali mutu, kendali biaya dan pencegahan terhadap potensi fraud serta gratifikasi di Rumah Sakit;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Wakil Direktur

1. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan bidang medik dan keperawatan;

- b. pengoordinasian, pengembangan, dan pengendalian bidang medik dan keperawatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian bidang medik dan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pengendalian bidang medik dan keperawatan;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan pengendalian bidang medik dan keperawatan dengan instalasi dan/atau instansi lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang medik dan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo urusan medik dan keperawatan berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di lingkup medik dan keperawatan;
- f. mengarahkan implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit di lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan;
- g. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan fungsi tata kelola klinis yang baik berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan;
- i. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di lingkup medik dan keperawatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara

membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

2. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penunjang medik dan penunjang non medik Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan bidang penunjang medik dan penunjang non medik;
- b. pengoordinasian, pengembangan dan pengendalian bidang penunjang medik dan penunjang non medik;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian bidang penunjang medik dan penunjang non medik;
- d. penyelenggaraan pengendalian bidang penunjang medik dan penunjang non medik;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan pengendalian bidang penunjang medik dan penunjang non medik dengan instalasi dan/atau instansi lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penunjang medik dan penunjang non medik; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Penunjang mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo urusan penunjang berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan urusan penunjang dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan urusan penunjang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana dan mengelola pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di lingkup penunjang;
- g. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan fungsi tata kelola klinis yang baik berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- i. mengelola penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi bidang pelayanan kesehatan;
- j. mengelola sistem informasi Rumah Sakit;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

3. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan

penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, pendidikan, pelatihan, dan penelitian Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan pengendalian bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- d. penyelenggaraan pengendalian bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan pengendalian bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan penelitian dengan instalasi dan/atau instansi lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo urusan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan pelatihan berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. mengelola sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian bidang pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di lingkup sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- g. melaksanakan manajemen yang baik, kerja sama dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi di lingkup sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

4. Wadir Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi Rumah Sakit serta instalasi di bawah koordinasinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan bagian perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi dengan instalasi dan/atau instansi lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian perencanaan dan evaluasi kinerja Rumah Sakit, umum, hukum dan humas, keuangan dan penganggaran, dan akuntansi; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo urusan umum dan keuangan berdasarkan rencana strategis UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan, pedoman pengorganisasian, standar operasional prosedur dan regulasi lainnya dalam penyelenggaraan fungsi direktorat umum dan keuangan;
- f. mengarahkan implementasi BLUD untuk mencapai kinerja Rumah Sakit di lingkup umum dan keuangan;
- g. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi;
- h. mengendalikan standar kualitas sebagai kendali mutu bidang administrasi umum dan keuangan;
- i. mengontrol pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan

prinsip kendali mutu, kendali biaya dan pencegahan terhadap potensi fraud serta gratifikasi di Rumah Sakit;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur baik lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Kota Balikpapan sampai dengan Juli tahun 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak sebanyak 1.650 orang terdiri dari 633 laki-laki (38.36%) dan 1.017 perempuan (61.64%) yang terdiri dari tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 591 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 63 orang dan tenaga honor BLUD sebanyak 996 orang yang terdiri dari tenaga struktural sebanyak 12 orang (2%) dan tenaga fungsional tertentu sebanyak 437 orang (74%) dan tenaga fungsional umum 142 Orang (24%).

Jumlah SDM Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirincikan sebagai berikut: berpendidikan S2 / spesialis sebanyak 73 Orang (4%), S1 sebanyak 404 Orang (24%), D4 sebanyak 131 Orang (8%), D3 sebanyak 566 Orang (34%), D2 sebanyak 1 Orang (0,06%), D1 sebanyak 2 Orang (0,12%), 399 orang (24%) berpendidikan SMA, 37 Orang (2%) berpendidikan SMP dan masih ada yang berpendidikan SD sebanyak 37 orang (2%).

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai per Juli 2023

No	Uraian	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Jumlah
1	PNS	9	5	108	1	1	235	71	109	52	591
2	PPPK	0	0	0	0	0	29	6	25	3	63
3	NON ASN	28	32	291	1	0	302	54	270	18	996
	JUMLAH	37	37	399	2	1	566	131	404	73	1650
	PERSENTASE	2%	2%	24%	0%	0%	34%	8%	24%	4%	

Sumber data: Bagian Umum RSKD

Berdasarkan tabel diatas, dari jumlah 1.650 pegawai lebih banyak non PNS 996 orang (60%) sedangkan ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 654 orang (39%).

Tabel 2.2
Keadaan Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Karyawan
PNS RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Per Desember 2022

NO	BAGIAN/ BIDANG	PENDIDIKAN																		JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D.I		D.II		D.III		D.IV		S.1		S.2			
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	Wadir Pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	Wadir Umum & Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Wadir Penunjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
5	Struktural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	1	5	4
6	Bagian Administrasi Umum	1	0	1	0	51	6	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	0	56	11
7	Bagian Perencanaan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4	1
8	Bagian Keuangan	0	0	0	1	13	35	1	0	0	0	2	11	0	0	7	14	0	0	23	61
9	Bidang Pelayanan Medik	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
10	Bidang Keperawatan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
11	Bidang Pengembangan & Mutu Sdm	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
12	Bidang Penunjang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2
13	Bidang Rekam Medik & Kemitraan	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	6	9	0	2	2	2	0	0	15	15
14	Instalasi Rawat Inap	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	134	8	39	54	148	0	0	81	322
15	Instalasi Rawat Darurat	1	0	0	0	11	1	0	0	0	0	21	19	0	4	4	1	0	0	37	25
16	Instalasi Rawat Jalan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	33	2	6	1	4	0	0	14	45
17	Instalasi Perawatan Intensif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	69	2	1	6	12	0	0	32	82
18	Instalasi Anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	6	4	1	0	0	0	16	6
19	Instalasi Bedah Sentral	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14	13	6	4	3	3	0	0	25	21
20	Instalasi Laboratorium Sentral	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	10	18	4	8	1	1	0	0	20	29
21	Instalasi Cssd & Laundry	1	0	0	1	16	12	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	21	13
22	Instalasi K3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1
23	Instalasi Kesling	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	11	2
24	Instalasi Rehab Medik	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	8	5	3	0	1	0	0	10	14
25	Instalasi Pengolah Data Elektronik (Pde)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	1	0	0	18	2
26	Instalasi Mortuary	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
27	Instalasi Elektromedik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	2	0	0	0	0	9	3
28	Instalasi Radiologi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	2	5	1	1	0	0	10	11
29	Instalasi Gizi	0	3	2	2	14	28	0	0	0	0	0	6	3	4	1	4	0	0	20	47
30	Instalasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR)	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	26	1

NO	BAGIAN/ BIDANG	PENDIDIKAN																		JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D.I		D.II		D.III		D.IV		S.1		S.2			
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
31	Instalasi Farmasi	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	27	30	0	0	6	21	1	3	37	63
32	Smf Dokter Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	35	0	0	11	35
	SMF Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
33	Smf Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	18	35	19
34	Smf Dokter Spesialis Penunjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	8
35	Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi (Ppi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	4
36	Komite Mutu Dan Keselamatan Pasien (KMKP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	3
37	Cath Lab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	3	1
38	Hemodialisa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	8	1	0	0	0	0	0	9	9
39	Unit Onkologi Radiasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	0	2	4
40	Supervisor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	2	3
41	Manajer Pelayanan Pasien (Mpp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Satuan Pengawas Internal (Spi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
43	Komite Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Komite Medik	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	Tim Kendali Mutu & Kendali Biaya (Kmkb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
46	Security	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
47	Beautician	0	0	0	1	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3
48	Binatu Rumah Sakit	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
49	Pramu Bakti	3	20	3	20	9	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	103
50	Pramu Kebersihan	1	2	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
51	Pramu Taman	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4
TOTAL		12	25	8	29	208	191	2	0	1	0	188	378	44	87	127	277	43	30	633	1017

Sumber data: Bagian Umum RSKD Bpp

Dengan berkembangnya pelayanan yang ada di RSKD Balikpapan tentu saja harus diikuti dengan pemenuhan SDM yang akan sangat menentukan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rencana pengembangan pemenuhan SDM dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1.750	696	399	361	163	131
Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo						
Wakil Direktur Umum & Keuangan						
Kepala Bagian Umum	1		1			
Analisis Kebijakan	5	1	1	1	2	
Pranata Humas	2	2				
Arsiparis Muda	8	5	3			
Analisis Produk Hukum	1	1				
Sekretaris	1	1				
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1				
Operator komunikasi	4	1	1	1	1	
Pengelola Surat	1	1				
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga & Perlengkapan	1	1				
Pengelola Disiplin Pegawai	0					
Pengelola Kepegawaian	1	1				
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	4	1	1	1	1	
Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	0					
Pengadministrasi Kepegawaian	2	1	1			
Pengadministrasi Umum	2	1	1			
Pramu Bakti	1	1				
Kepala Bagian Keuangan	0					
Bendahara	0					
Penyusun Laporan Keuangan	2	1	1			
Pengolah Daftar Gaji	1	1				
Penata Laporan Keuangan	2	1	1			
Verifikator Keuangan	7	2	2	1	1	1
Pengadministrasi Keuangan	6	2	2	1	1	
Pengadministrasi Penerimaan	8	2	2	2	1	1
Pranata Teknologi Informasi Komputer	2			1		1
Kepala Bagian Perencanaan Program	0					
Perencana	4				4	
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1				
Pengelola Program dan Kegiatan	2	1	1			
Wakil Direktur Pelayanan	1					1
Kepala Bidang Pelayanan Medik	0					
Dokter Gigi	3	3				
Dokter Gigi Spes. Gigi Anak	2	2				
Dokter Gigi Spes. Konservasi	2	2				
Dokter Gigi Spes. Orthodonti	4	4				

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Dokter Gigi Spes. Periodonti	3	3				
Dokter Gigi Spes. Prosthodonti	3	3				
Dokter Gigi Spes. Pedodonti	3	3				
Dokter Gigi Spes. Penyakit Mulut	3	3				
Dokter Spes. Anak	6	3	1	1	1	
Dokter Spes. Anestesi	8	4	2	2		
Dokter Spes. Bedah	1	1				
Dokter Spes. Bedah Anak	2	2				
Dokter Spes. Bedah Mulut	2	2				
Dokter Spes. Orthopedi & Traumatology	4	3	1			
Dokter Spes. Bedah Saraf	4	3	1			
Dokter Spes. Jantung & Pembuluh Darah	3	2	1			
Dokter Spes. Kedokteran Jiwa	4	3	1			
Dokter Spes. Kedokteran Nuklir	3	3				
Dokter Spes. Kulit & Kelamin	4	3	1			
Dokter Spes. Obstetri dan Ginekologi	5	3				2
Dokter Spes. Paru	2	2				
Dokter Spes. Penyakit Dalam	6	2	2	1	1	
Dokter Spes. Saraf	3	2	1			
Dokter Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL)	3	3				
Dokter Spes. Urologi	3	2			1	
Dokter Spes. Mata	6	3	3			
Dokter Spes. Emergency	3	1	1	1		
Dokter Spes. Bedah Thorax Kardiak dan vaskuler	5	2	2	1		
Dokter Spes. Farmakologi Klinik	3	1	1	1		
Dokter Spes. Akupunktur	3	1	1	1		
Dokter Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika	3	3				
Dokter Sub Spes. Jantung	3	2	1			
Dokter Sub Spes. Bedah Digestif	4	2	2			
Dokter Sub Spes. Obstetri dan Ginekologi Fetomaternal	4	1	1	1	1	
Dokter Sub Spes. Reumatologi	5	4	1			
Dokter Sub Spes. P. Dalam Penyakit Ginjal	4	1	1	1	1	
Dokter Sub Spes. P. Dalam Endokrin Metabolik	3		1	1	1	
Dokter Sub Spes. Ginjal Hipertensi	3	1		1	1	
Dokter Sub Spes. Anestesi Kons. Intensive Care	2	1	1			
Dokter Sub Spes. Bedah Onkologi	6	3	1	1	1	
Dokter Sub Spes. Anak Hematologi Onkologi	4	3	1			
Dokter Sub Spes. Urologi Onkologi	4	1	1	1	1	
Dokter Sub Spes. Urologi Pediatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Urologi Wanita dan Neuro-Urologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Urologi Rekonstruksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Urologi Andrologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Pediatri Gawat Darurat	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Vaskuler	3	1	1	1		

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Gastroenterologi-hepatologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Tropik Infeksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Alergi Imunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Psikosomatis	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Geriatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Kardiovaskuler	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Pulmonologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Penyakit Dalam Hematologi Onkologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Respirologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Neurologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Nefrologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Neonatologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Endokrinologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Kardiologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Alergi Imunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Pediatri Sosial Tumbuh Kembang	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Pencitraan Pediatrik	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Nutrisi dan Penyakit Metabolik	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anak Infeksi dan Penyakit Tropik	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Obstetri dan Ginekologi Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Obstetri dan Ginekologi Onkologi Ginekologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Obstetri dan Ginekologi Uroginekologi dan rekonstruksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Obstetri dan Ginekologi Sosial	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Jiwa Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Jiwa Psikiatri adikasi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Jiwa Psikoterapi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Jiwa Psikiatri Forensik	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Jiwa Psikogeriatric	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Jiwa Psikiatri Komunitas	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata infeksi imunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Glaukoma	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Kornea, Lensa, dan bedah refraktif	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Neuro oftalmologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata oftalmologi Komunitas	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Pediatri Onkologi Strabismus	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Refraksi Lensa Kontak	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Rekonstruksi Okuloplasti dan Onkologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Mata Vitreo Retina	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Otologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Rinologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Onkologi Bedah Kepala Leher	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Laring Faring	3	1	1	1		

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Neurotologi	4	2	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Endoskopi bronkoesofagologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Alergi Imunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) Plastik rekonstruksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Paru Infeksi Paru	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Paru Onkologi Toraks	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Paru Intervensi dan gawat nafas	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Paru Asma Penyakit Paru Obstruktif Kronis	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Paru Kerja dan Lingkungan	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Paru Imunologi Paru	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Stroke dan Neurovaskuler	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Fungsi Luhur (Neurobehaviour)	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neuroinfeksi dan imunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neuro Onkologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neurofisiologi dan Neuromuskular	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Epilepsi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neuropediatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Nyeri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Nyeri Kepala	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Movement Disorder /Gangguan Gerak	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Sleep Disorder	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neuro-otologi dan Vertigo	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neurorestorasi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neurotrauma	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neurointensif	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neuroimejing	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neurogeriatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Saraf Neurointervensi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Saraf Neurotrauma	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Saraf Neuro Onkologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Saraf Neurospine	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Saraf Neurofungsional	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Saraf Neuropediatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Saraf Neurovaskular	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Aritmia	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Ekokardiografi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Kardiologi Intervensi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Kardiologi Pediatrik dan penyakit jantung bawaan	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Kedokteran Vaskular	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Pencitraan kardiovaskular	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Jantung dan Pembuluh Darah Prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Orthopedic Spine	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Hip and Knee	3	1	1	1		

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Hand, Upper Limb and Microsurgery	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Orthopedic Oncology	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Pediatric Orthopedic	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Foot and Ankle	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Shoulder and Elbow	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Advance Orthopedic Trauma	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Orthopedi dan Traumatologi Orthopedic Sports Injury	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Anak Bedah Digestif Anak	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Anak Urogenital Anak	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kulit dan Kelamin Dermatologi Tropis	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kulit dan Kelamin Venereologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kulit dan Kelamin Dermato Alergi Immunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kulit dan Kelamin Dermatologi Anak	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kulit dan Kelamin Dermatologi Kosmetik dan Estetik	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kulit dan Kelamin Onkologi dan Bedah Kulit	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Intensive Care	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Neuroanestesi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Pediatrik anestesi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Regional anestesi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Terapi Nyeri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Kardiovaskuler anestesi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Anestesi dan terapi intensif Obstetrik Anestesi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetikka Kraniomaksilofasial	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetikka Luka Bakar dan Luka	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetikka Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetikka Bedah Tangan	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetikka Genitalia Eksterna	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetikka Bedah Estetik Lanjut	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Nuklir Onkologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Nuklir Kardiologi Nuklir	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Kedokteran Nuklir Pediatrik	3	1	1	1		
Dokter	34	27	3	2	2	
Pengadministrasi Umum	1				1	
Pengemudi	2	1		1		
Pramu Bakti	1					1
Kepala Bidang Pelayanan Medik	1			1		
Bidan	89	53	10	14	8	4
Perawat	537	157	107	107	86	80
Terapis Gigi & Mulut Ahli	8	7			1	
Penata Anestesi	16	16				
Refraksionis Optien Muda	4	3		1		
Pengadministrsri Umum	3		1	1	1	

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Operator Mesin	0					
Binatu Rumah Sakit	8	2	2	2	2	
Pramu Kebersihan	1			1		
Kepala Bidang Rekam Medik & Kemitraan	1			1		
Administrator Kesehatan	2				1	1
Perekam Medis Pertama	14	7	4	3		
Pengadministrasi Program dan Kerjasama	1	1				
Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	4	1	1			2
Pengadministrasi Umum	0					
Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan	1	1				
Kepala Bidang Penunjang	1				1	
Apoteker	22	10	7	5		
Asisten Apoteker Penyelia	78	18	12	22	13	13
Fisioterapis	14	7	5	1	1	
Nutrisisionis	23	10	7	3	3	
Pranata Laboratorium Kesehatan	40	15	11	5	5	4
Radiografer	29	18	7	2	1	1
Terapi Wicara Pertama	3	3				
Okupasi Terapis Pertama	7	3	2	2		
Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana/Terampil	4	1	1	1	1	
Fisikawan Medik	6	3	1	1	1	
Psikologi Klinis Pertama	1	1				
Dokter Spes. Fisik & Rehabilitasi Med.	5	3	2			
Dokter Spes. Kedokteran Forensik dan Medikolegal Muda	2	2				
Dokter Spes. Gizi Klinik	2	2				
Dokter Spes. Mikrobiologi Klinik	2	2				
Dokter Spes. Okupasi Kerja	3	3				
Dokter Spes. Onkologi Radiasi	1			1		
Dokter Spes. Onkologi Radiasi Muda	1		1			
Dokter Spes. Onkologi Radiasi Pertama	1	1				
Dokter Spes. Patologi Anatomi	1	1				
Dokter Spes. Patologi Anatomi	0					
Dokter Spes. Patologi Anatomi Muda	1	1				
Dokter Spes. Patologi Anatomi Pertama	1	1				
Dokter Spes. Patologi Klinik	2	2				
Dokter Spes. Patologi Klinik	0					
Dokter Spes. Patologi Klinik Muda	1	1				
Dokter Spes. Patologi Klinik Pertama	1	1				
Dokter Spes. Radiologi	0					
Dokter Spes. Radiologi Muda	2	2				
Dokter Spes. Radiologi Pertama	1	1				
Dokter Sub Spes. Radiologi Neuroradiologi kepala leher	1			1		

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Dokter Sub Spes. Radiologi Neuroradiologi kepala leher Muda	1		1			
Dokter Sub Spes. Radiologi Neuroradiologi kepala leher Pertama	1	1				
Dokter Sub Spes. Radiologi Radiologi Abdomen	1			1		
Dokter Sub Spes. Radiologi Radiologi Abdomen Muda	1		1			
Dokter Sub Spes. Radiologi Radiologi Abdomen Pertama	1	1				
Dokter Sub Spes. Radiologi intervensi	1			1		
Dokter Sub Spes. Radiologi intervensi Muda	1		1			
Dokter Sub Spes. Radiologi intervensi Pertama	1	1				
Dokter Sub Spes. Radiologi Anak	1			1		
Dokter Sub Spes. Radiologi Anak Muda	1		1			
Dokter Sub Spes. Radiologi Anak Pertama	1	1				
Dokter Sub Spes. Radiologi Toraks	1			1		
Dokter Sub Spes. Radiologi Toraks Muda	1		1			
Dokter Sub Spes. Radiologi Toraks Pertama	1	1				
Dokter Sub Spes. Radiologi Pencitraan payudara dan reproduksi perempuan	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Radiologi Muskuloskeletal	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Radiologi Kedokteran Nuklir dan Pencitraan Molekuler	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Fisik dan Rehabilitasi Pediatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Fisik dan Rehabilitasi Geriatri	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Fisik dan Rehabilitasi Muskuloskeletal	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Fisik dan Rehabilitasi Neomuskuler	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Fisik dan Rehabilitasi Kardiorespirasi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Mikrobiologi Klinik dan Penyakit Infeksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Hematologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Metabolik endokrinologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Gastroenterohepatologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Imunologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Penyakit Infeksi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Nefrologi Gastroenteropepatologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Hematologi onkologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Penyakit Tropik dan Infeksi	2	1		1		
Dokter Sub Spes. Patologi Klinik Endokrinologi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Gizi Klinik Nutrisi Pada Kelainan Metabolisme Gizi	3	1	1	1		
Dokter Sub Spes. Gizi Klinik Nutrisi Pada Critical Care	3	1	1	1		
Teknisi Elektromedis	16	7	3	2	2	2
Pranata Komputer Muda	11	3	2	2	2	2
Administrator Kesehatan	2	1			1	
Sanitarian Muda	3	2	1			
Pengolah Makanan	21	5	4	4	4	4
Pengelola Lingkungan	0					
Pengadministrasi Umum	2	1				1
Pengadministrasi Gudang Farmasi	1		1			
Pranata Jamuan	33	9	6	6	6	6
Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2	1				1

JABATAN	Total Kebutuhan Pegawai	Pegawai yang Dibutuhkan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	2	1				1
Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	0					
Teknisi Gedung atau Bangunan	3		2			1
Teknisi Listrik dan Jaringan	1					1
Teknisi Mesin	1	1				
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0					
Juru Rawat Jenazah	0					
Pramu Kebersihan	0					
Pramu Bakti	1		1			
Kepala Bidang Pengembangan SDM & Mutu	0					
Pengelola Penyelenggaraan Diklat	1	1				
Pengadministrasi Tugas Belaja & Ijin Belajar	1	1				
Pengadministrasi Umum	0					

2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Kanujoso Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

2.3.1. Sarana

Table 2.4
Sarana dan Prasarana RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Tahun 2022

Tahun 2022			
No.	Sarana Kerja Yang Tersedia	Luas	M ²
1	Administrasi Kantor RSUD Gd. Lama	136,80	M ²
2	Aula Sakura	180,00	M ²
3	CSSD	450,00	M ²
4	Depo I, Depo II dan Depo III	407,00	M ²
5	Gedung Anggrek Hitam + Helipad	19.524,0	M ²
6	Rehab Medik	848,0	M ²
7	Medical Check Up	103,6	M ²
8	Unit Stroke		
9	Gedung Instalasi Farmasi	1.241,2	M ²
10	Gedung Genset Anggrek Hitam	104,4	M ²
11	Gedung Instalasi Gizi	810,0	M ²
12	Gedung Pompa Anggrek Hitam	137,7	M ²
13	Gudang Induk dan Arsip	660,0	M ²
14	Intensive Coronary Care Unit (<i>ICCU</i>)	616,0	M ²
15	Intensive Care Unit (<i>ICU</i>)	450,0	M ²
16	Instalasi Bedah Sentral + Lantai 2	3.665,0	M ²
17	Instalasi Kedokteran dan Kehakiman	540,0	M ²
18	Instalasi Laboratorium Klinik	450,0	M ²
19	Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi	220,0	M ²
20	Instalasi Laundry	963,0	M ²
21	Instalasi Pemeliharaan Sarana RS	450,0	M ²
22	Instalasi Radiologi	450,0	M ²
23	Instalasi Rawat Darurat	1.545,0	M ²
24	Instalasi Rawat Inap Gd. Lama	4.554,0	M ²
25	Instalasi Rawat Jalan Gd. Lama	2.355.31	M ²

Tahun 2022			
No.	Sarana Kerja Yang Tersedia	Luas	M ²
26	Instalasi Rekam Medis	394,28	M ²
27	Kantor IRNA	68,4	M ²
28	Kasir IRNA	16,0	M ²
29	Kemoterapi	320,0	M ²
30	Laboratorium Flu Burung	100,5	M ²
31	Luas Parkir & Jalan Gd Lama	12.736,0	M ²
32	Luas Parkir & Jalan Gd. Anggrek H	3.149,0	M ²
33	Mess/Wisma	171,0	M ²
34	NICU/PICU	507,96	M ²
35	Ruang Bougenville (ruang persalinan)	742,5	M ²
36	Ruang Elektromedik	120,0	M ²
37	Ruang Isolasi (Karamunting)	183,66	M ²
38	Ruang pendaftaran pasien	147,5	M ²
39	Rumah negara Gol. II Type A	200,0	M ²
40	Rumah Negara Gol.II Type B (5 Unit)	554,0	M ²
41	Selasar	2.745,0	M ²
42	Water Treatment Proses (WTP)	68,0	M ²
43	Gedung Ruang Dokter (Ludy Longe)	287,0	M ²
44	Gedung MRI	97,2,0	M ²
45	Gedung Pelayanan Kanker Terpadu	3601,20	M ²
46	Aula Monstera	250,0	M ²
47	Food Court RSKD	250,0	M ²
48	Yova + Ruang Koas	250,0	M ²
49	Gedung Pelayanan Kanker Terpadu	250,0	M ²
		67.820,21	M ²

2.3.2. Prasarana

Adapun prasarana yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Daya Listrik PLN terpasang 1.100 KVA di Gedung Anggrek Hitam, 1.730 KVA di Gedung lama, dan 1.250 Kva di Gedung Lavender
2. Genset terdiri dari:

- a. Gedung Anggrek Hitam : 715 KVa (2 Unit)
- b. Gedung Lama : 810 KVa (1 Unit) dan 550 KVa (3 Unit)
- c. Gedung Lavender : 1.100 KVa (1 Unit) dan 1.250 KVa (1 Unit)
3. Sumber Air Bersih PDAM dan Instalasi Air Tanah & Water Treatment dengan debit 7 L / Detik
4. Pengolahan Limbah Padat Incenerator dengan kapasitas 3 m³
5. Pengolahan Limbah padat non incinerator 1 unit, kapasitas 250 liter/hari
6. Pengolahan Limbah Cair IPAL dengan Sistim DEWATS dan Sanitary Treatment Plant
7. Sarana Komunikasi Telepon PABX, Faximile.
8. Sarana Pendingin /AC.
9. Sistim Pengaman Hydrant, Fire Detector dan Alarm
10. Sarana Transport Lift untuk pasien dan pengunjung.
11. Sarana CSSD, Loundry, Kitchen
12. Pneumatic Tube untuk pengiriman obat dan sampel laboratorium

2.4. Jenis Pelayanan

RSUD Dr. Kanujoso Balikpapan merupakan Rumah Sakit Kelas A milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Kota Balikpapan. Sebagai rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat Kota Balikpapan dan Kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama lima tahun ini periode Renstra 2024-2026, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo mengembangkan beberapa pelayanan diantaranya pengembangan pelayanan kanker terpadu, perbaikan ruangan bersalin, ruang perawatan bayi, klinik tumbuh kembang anak, pengembangan layanan hemodialisa dan lain-lain. Khusus untuk ruang bersalin dilakukan renovasi ruangan yang mengacu pada standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

Dengan anggaran yang bersumber APBD Provinsi Kalimantan Timur dan juga BLUD, dalam kurun lima tahun ini yaitu tahun 2024-2026 beberapa peralatan yang canggih dan modern telah tersedia sebelum periode Renstra ini sebagai modal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Secara terinci pelayanan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dapat kita uraikan seperti di bawah ini :

2.4.1. Instalasi Pelayanan

Instalasi yang berada di bawah pelayanan terdiri dari :

1. Instalasi Rawat Rawat Jalan yang terdiri dari :

- a. Poliklinik Penyakit Dalam.
- b. Poliklinik Jantung.
- c. Poliklinik Bedah Jantung
- d. Poliklinik Paru.
- e. Poliklinik Bedah Umum.
- f. Poliklinik Bedah Orthopedi.
- g. Poliklinik Bedah Mulut.
- h. Poliklinik Bedah Plastik.
- i. Poliklinik Bedah Syaraf.
- j. Poliklinik Bedah Anak.
- k. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit kandungan.
- l. Poliklinik Kesehatan Anak.
- m. Poliklinik Syaraf.
- n. Poliklinik THT.
- o. Poliklinik Kulit dan Kelamin.
- p. Poliklinik Mata.
- q. Poliklinik Gigi dan Mulut.
- r. Poliklinik Gizi.
- s. Poliklinik Urologi.
- t. Poliklinik Hemato onkologi
- u. Poliklinik Onkologi.
- v. Poliklinik VCT.
- w. Poliklinik Jiwa.
- x. Poliklinik Rhematologi.
- y. Poliklinik Eksekutif.
- z. Medical Cek Up
- aa. Poliklinik Radioterapi

2. Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Instalasi Gawat Darurat terdiri dari: ruang Gawat Darurat, Unit Ambulance.

3. Instalasi Rawat Inap (IRNA).

- a. Pelayanan rawat Inap dilaksanakan di gedung Anggrek Hitam dan Gedung Instalasi Rawat Inap (IRNA) Gedung lama.
- b. Lavender yaitu ruang Rawat Inap khusus untuk penanganan kemoterapi dewasa dan anak-anak serta pelayanan radioterapi.
- c. Gedung Perawatan Imdaad Hamid yang digunakan untuk perawatan isolasi, kasus infeksius, kasus Neuro dan juga ICU.

d. Ruang Bougenville yaitu ruang khusus untuk pelayanan persalinan dan perawatan bayi.

Dengan semakin berkembangnya pelayanan yang ada, maka RSKD menambahkan jumlah Fasilitas tempat tidur sebanyak 484 Tempat Tidur. Beberapa ruang perawatan seperti *Intensive Care Unit* (ICU) dan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) / *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) ditambahkan jumlah tempat tidur nya mengingat banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani di ruang tersebut.

Telah dilakukan juga pemisahan ruangan antara NICU dan PICU yang sebelumnya tergabung dalam satu ruangan. Saat ini merupakan ruangan yang berbeda dengan dipimpin oleh seorang kepala ruangan.

Tabel 2.5
Data Jumlah Tempat Tidur RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Per Desember 2023

No	Ruang	VIP			Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas Intensif	Jumlah	Keterangan
		Madya	Utama	Super						
1	Flamboyen A						36		36	Bedah Non Bedah (Perempuan Dewasa)
2	Flamboyen B						32		32	Bedah Non Bedah (Laki-Laki Dewasa)
3	Flamboyen C						32		32	Maternitas, Anak & Bedah
4	Flamboyen E					32			32	Bedah Non Bedah (Laki-Laki & Perempuan Dewasa)
5	Karamunting						10		10	Diabetik
6	Mawar				24				24	Maternitas & Anak
7	Soka					28			28	Maternitas, Anak & Bedah Anak
8	Kemuning				24				24	Bedah (Laki-laki, Perempuan dan Anak)
9	Melati					18	2		20	Bedah dan 2 Bed Jiwa (Laki-laki dan Perempuan)
10	Bougenville	2					6		8	VK
11	Edelweiss Ruang bayi	2				22			24	24 Box Bayi
12	UGD Transit						10		10	Buffer (Transit)
13	ICU 1							10	10	1 Bed HD Covid, 1 Bed Emergency COT & 8 Bed Bedah
14	ICU 2							7	7	1 Bed HD Non Bedah, 1 HD Bedah & 5 Bed Bedah

No	Ruang	VIP			Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas Intensif	Jumlah	Keterangan
		Madya	Utama	Super						
15	NICU							11	11	Anak & Bayi
16	PICU							8	8	Anak
17	Anggrek Hitam Lt. II ICCU							10	10	Laki-laki & Perempuan Dewasa
18	Anggrek Hitam Lt.IV	10			8				18	8 Tempat Tidur Pasien Kelas 1 Corporate 10 Tempat Tidur VIP Madya
19	Anggrek Hitam Lt.V				37				37	Non Bedah (Laki-Laki Dewasa)
20	Anggrek Hitam Lt.VI				37				37	Non Bedah (Perempuan Dewasa)
21	Anggrek Hitam Lt.VII	2	7	1					10	Bedah Non Bedah, Maternitas, Anak (Laki-Laki & Perempuan)
22	Lavender Lt. 1 (Kemo)	1			4	6	7		18	Laki-laki & Perempuan Dewasa
23	Lavender Lt. 2 (HOA)	1			4	4	11		20	Anak
24	Lavender Lt. 3 (Kemo)					7			7	Bedah Non Bedah, Maternitas, Anak (Laki-Laki & Perempuan)
25	Imdam Hamid Lt. Dasar	2					18		20	TB dan Covid
26	Imdad Hamid Lt. 1 ICU 3							16	16	Covid Non HD , Infeksius dan Non Bedah
27	Imdad Hamid Lt. 2				40				40	Non Bedah Infeksius (Laki-laki, Perempuan dan Anak
28	Imdad Hamid lt.3 (Teratai)	2			38				40	Saraf/Stroke (Laki-laki & Perempuan Dewasa)
	Jumlah Per Kelas	22	7	1	216	117	164	62	589	
	Persentase (%)									

Sumber Data : Rekam medik

4. Instalasi Perawatan Intensif (IRIN)

Perawatan Intensif terdiri dari :

- a) ICU (*Intensive Care Unit*)
- b) ICCU (*Intensive Cardiac Care unit*)
- c) NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*)
- d) PICU (*Perinatologi Intensive Care Unit*)

5. Instalasi Bedah sentral (IBS)

Instalasi Bedah sentral ini terdiri dari 12 (dua belas) kamar operasi yang dilengkapi fasilitas dan peralatan yang lengkap.

Selain itu IBS juga membawahi 2 Dua unit pelayanan yaitu cah lab dan radioterapi.

6. Instalasi Anestesi dan Reaminasi.

Instalasi anestesi dan reaminasi melayani Tindakan di ruang operasi yang ada di bedah sentral dan juga ruang operasi yang ada di ruang gawat darurat. Selain itu juga melayani di ruang kebidanan untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan anestesi.

7. Instalasi Sterilisasi dan laundry.

Instalasi laundry memiliki 4 mesin cuci dengan kapasitas 60 kg, 3 unit digunakan untuk pencucian biasa/non infeksius dan 1 unit digunakan untuk pencucian khusus linen infeksius.

Terdapat juga 3 unit mesin pengering (*tumble dryer*) serta 2 unit setrika roll dan 1 unit setrika press/vacuum.

Selain hal tersebut di atas, tersedai juga mesin jahit yang saat ini produksi linen rumah sakit (sprey, baju operasi, baju pasien dll) telah diproduksi secara mandiri.

8. Instalasi Kanker Terpadu

Instalasi kanker terpadu bertempat di gedung Lavender yang melaksanakan aktifitas sehari-hari kepada pasien radioterapi, kemoterapi dan untuk anak dan dewasa.

Instalasi kanker terpadu memiliki 3 poliklinik yaitu poliklinik radiotreriapi, poliklinik hemato onkologi anak, poliklinik onkologi.

Terdapat peralatan 2 unit alat radioterapi *Linear Accelerator* (LINAC), 1 unit brakhiterapi dan 1 unit CT-Simulator. Keseluruhan peralatan tersebut untuk menunjang pelayanan khususnya kepada pasien kanker baik dewasa maupun anak-anak.

9. Instalasi Jantung Terpadu

Instalasi jantung terpadu terdiri dari ruang perawatan ICCU, angiography, serta ruang operasi jantung. Terdapat 2 unit alat angiography dengan jumlah dokter spesialis jantung sebanyak 3 orang dan 1 orang spesialis bedah jantung.

2.4.2. Instalasi Penunjang,

Instalasi di bawah penunjang terdiri dari :

1. Instalasi Radiologi.

2. Instalasi Farmasi.
3. Instalasi Laboratorium Central
4. Instalasi Gizi.
5. Instalasi Rehabilitasi Medik.
6. Instalasi Kedokteran Kehakiman.
7. Instalasi Pengolahan Data elektronik (PDE).
8. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).
9. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah (Kesling).
10. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
11. Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
12. Instalasi Hemodialisa.
13. Instalasi Jantung terpadu.

2.5. Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Pelayanan kesehatan di RSUD Dr Kanujoso Balikpapan telah memberikan kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Balikpapan pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, meskipun hasil yang telah dicapai tersebut ada beberapa yang masih belum memenuhi target serta memerlukan upaya keras dan berkesinambungan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Realisasi kinerja pelayanan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 4 tahun terakhir yang dibandingkan dengan indikator SPM yang telah ditetapkan dan Rasio antara anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD
Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH		Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	TARGET RENSTRA (Tahun)					REALISASI CAPAIAN (Tahun)					RASIO CAPAIAN (Tahun)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Standarisasi RS	Sertifikat																		
2	Persentase Ruang Rawat Inap yang memiliki dokter penanggung jawab.	%	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Efisiensi Pelayanan :																			
	- Bed Occupancy Rate (BOR)	%	65-85	75-85		62	64	56	65	70	71	52,5	54.6	53.23		115	82	97.5	81.89	
	- Length Of Stay (LOS)	Hari	4-6 Hari	4-6 Hari		5	4.8	5.4	4.4	4	4	4,5	5	3.90		120	106	107	88.63	
	- Bed Turn Over (BTO)	Kali / Tahun				46.1	46.5	31	45	47	52,2	31,1	33	49.16		113	66.9	106	109.2	
	- Turn Over Interval (TOI)	Hari	1-3 Hari	1-3 Hari		2.7	2.5	4.3	3.5	3	1,9	4,5	4.2	3.43		129	80	102	102	
	- GDR	%				55	52	70	65	60	56	55,7	82.7	60.51		98	92.8	83	107.4	
	- NDR	%				32	30	45	40	35	31.8	34.1	53.6	36.14		99	86.3	82	110.6	
4	Jumlah kematian ibu dalam persalinan																			
	a.Pendarahan	%	0.00	0.00		≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	0,09	0	0	0,09		1111			1111	
	b. Eklampsia	%	0.00	0.00		≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	0,19	0,09	0,09	0,19		¹⁵⁷⁸ ₉	15789	1579	1579	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH		Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	TARGET RENSTRA (Tahun)					REALISASI CAPAIAN (Tahun)					RASIO CAPAIAN (Tahun)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	c. Sepsis	%	0.00	0.00		≤0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	0	0	0	0						
5	Presentasi pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	%	≤3	≤3		≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0,2	0,2	0,7	0,2		1500	1500	428	1500	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IGD	%	83	83		80%	80%	80%	80%	80%	90	88,36	86,5	90		112	110	107	123	
7	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) di IRJA	%	90	90		90%	90%	90%	90%	90%	99,25	85,47	86	99,25		110,2	94,9	95,5	110,2	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IRNA	%	90	90		90%	90%	90%	90%	90%	98,7	88,36	90	98,7		109	97,7	100	108	
9	Persentase Penanganan life saving anak dan dewasa	%	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
10	Response time di IGD	Menit	≤2.9	< 5		< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	4	4	4	4		125	125	125	125	
11	Persentase dokter spesialis yang memberi pelayanan di poliklinik spesialis	%	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
12	Response time di poliklinik spesialis	Menit	≤60	≤60		60	60	60	60	60	60	60	60	60		100	100	100	100	
13	Jumlah kejadian Medical Error	%	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	100	100	100	
14	Persentase pemenuhan kebutuhan darah	%	100			100%	100%	100%	100%	100%	35	36,5	38	35		35	36	38	35	
15	Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA	Menit	≤10	≤10		≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	9	5	5	9		111	200	200	111	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH		Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	TARGET RENSTRA (Tahun)					REALISASI CAPAIAN (Tahun)					RASIO CAPAIAN (Tahun)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
16	Persentase kegagalan pelayanan Rontgen	%	0	0		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0	1,5	1,5	1		150	33	33	50	
17	Persentase kesalahan hasil laboratorium	%	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		100	100	100	100	
18	Baku mutu limbah cair																			
	a. BOD	mg/l	< 30	< 30		30Mg /L	30Mg /L	30Mg /L	30Mg /L	30Mg/ L	26,40	7(Aman)	7 (aman)	26,40		113,6	428	428	113,6	
	b. COD	mg/l	< 80	< 80		80Mg /L	80Mg /L	80Mg /L	80Mg /L	80Mg/ L	13,99	12,3 (Aman)	12,3 (aman)	13,99		215	243	243	215	
	c. TSS	mg/l	< 30	< 30		30Mg /L	30Mg /L	30Mg /L	30Mg /L	30Mg/ L	7,24	3,5 (Aman)	3,5 (aman)	7,24		414	857	857	414	
19	Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan	%	100	100		100/ Tph	100/ Tph	100/ Tph	100/ Tph	100/Tp h	100/T ph	100/T ph	100/Tp h	100/ Tph		100	100	100	100	
20	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan peralatan medik	Unit				30	30	50	50	50	8	169	25	60		27	563	50	120	

Tabel -**T-C.24**
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada tahun ke -					Rasio anantara realisasi dan anggaran tahun ke -				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dana Perimbangan	348.000.000	17.044.434.967	5.000.000.000	-	-	310.594.500	15.786.572.505	3.836.074.834	-	-					
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	348.000.000	17.044.434.967	5.000.000.000			310.594.500	15.786.572.505	3.836.074.834			89,25	92,62	76,72		
Belanja Daerah	367.254.825.100	410.668.605.833	413.347.679.448	714.154.415.562	439.686.440.000	400.436.215.264	407.726.407.319	455.730.016.642	626.956.055.171	-	109,03	99,28	110,25		
Belanja Tidak Langsung	83.054.631.000	92.754.360.000	124.150.134.460	-	-	77.884.803.944	80.563.353.797	114.491.316.464	-	-	93,78	86,86	92,22		
- Belanja Pegawai	83.054.631.000	92.754.360.000	124.150.134.460			77.884.803.944	80.563.353.797	114.491.316.464			93,78	86,86	92,22		
Belanja Langsung	284.200.194.100	317.914.245.833	289.197.544.988	714.154.415.562	439.686.440.000	322.551.411.320	327.163.053.522	341.238.700.178	626.956.055.171	-	113,49	102,91	118,00	87,79	
- Belanja Pegawai	91.621.600.000	107.978.685.700	128.497.544.988	300.255.351.336	240.498.866.512	284.533.972.527	108.934.588.983	144.553.341.744	269.125.950.975		310,55	100,89	112,50	89,63	
- Belanja Barang dan Jasa	135.009.784.100	126.334.768.133	114.400.000.000	190.898.883.884	108.361.928.678	18.759.288	137.017.256.384	146.276.662.818	164.522.923.055		0,01	108,46	127,86	86,18	
- Belanja Modal	57.568.810.000	83.600.792.000	46.300.000.000	223.000.180.342	90.825.644.810	37.998.679.505	81.211.208.155	50.408.695.616	193.307.181.141		66,01	97,14	108,87	86,68	

Berdasarkan tabel TC-24, data yang disajikan merupakan dana gabungan yang terdiri dana APBD dan BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari APBN. Dapat kita lihat realisasi rata rata realisasi sebesar 94,09% , tetapi jika kita lihat bahwa pencapaian dana Langsung pada belanja pegawai rata- rata mencapai 105,55% hal ini dikarenakan dana tersebut merupakan gabungan APBD dan BLUD dalam dalam dana pegawai BLUD terdapat pengeluaran jasa pelayanan yang diterima tergantung jumlah pasien dan ini masih diperbolehkan dengan adanya fleksibilitas maksimal 20% untuk penggunaan dana BLUD.

2.6. Kelompok Saran Layanan

Pelayanan yang diberikan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo mencakup pada semua golongan, suku, agama tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.

2.6.1. Mitra RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dalam pemberian pelayanan.

Rumah sakit umum dr. kanujoso djatiwibowo sebagai rumah sakit rujukan yang ada di Kota Balikpapan, tentu saja membutuhkan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Beberapa Lembaga yang menjadi mitra dalam melakukan pelayanan adalah dari perhimpunan diabetes Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia (YKI).

2.6.2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Beberapa BUMN, BUMD serta perusahaan swasta telah melakukan kerja sama dengan RSKD Balikpapan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk pembinaan, pencegahan serta perawatan jika melakukan rawat inap di rumah sakit. BUMN yang telah bekerja sama adalah PT. PLN, PT. Angkasa Pura, PT. Pertamina dan lain-lain. Sedang kan untuk BUMD yang telah melakukan kerja sama adalah PDAM Kota Balikpapan.

2.6.3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kalimantan Timur terlebih khusus yang berada di wilayah selatan yang terdiri dari Kota Balikpapan, penajam pasir utara, tanah pasir dan sekitarnya menjadi daerah yang secara geografis berada dalam wilayah kerja RSKD Balikpapan.

Sebagai rumah sakit kelas A yang melayani rujukan dari beberapa daerah tentu saja RSKD Balikpapan merupakan tumpuan dalam pemenuhan pelayanan Kesehatan pada level tertinggi. Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat telah dilakukan khususnya dalam penanganan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah masing-masing.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD ditentukan dari aspek kajian gambaran pelayanan SKPD, kajian terhadap renstra kementerian kesehatan tahun 2020-2024, telaah RTRW dan dan Kajian lingkungan hidup strategis, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Peningkatan jumlah penduduk di Kalimantan Timur.	- Jumlah pasien diluar kapasitas rumah sakit	- Jumlah rumah sakit yang ada masih kurang jika dibanding dengan jumlah penduduk..
2	- Kesiapan peningkatan pelayanan prioritas Nasional yang ditetapkan Kemenkes RI	- Kurangnya sarana medis dan penunjang pelayanan prioritas	- Target pelayanan prioritas kemenkes yang harus diadakan rumah sakit
2	- Perubahan kelas rumah sakit RSUD dr.Kanujoso Djatiwibowo menjadi Rumah Sakit Rujukan Kelas A	- Sarana dan Prasarana yang ada masih belum lengkap sesuai dengan standar kelas A.	- Masih kurangnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diinginkan
3	- Kurangnya SDM terutama tenaga dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi sub spesialis, dokter gigi spesialis serta nakes lainnya yang sesuai standar rumah sakit kelas A.	- Jumlah tenaga Kesehatan belum sesuai standar rumah sakit kelas A	- Jumlah lulusan dokter spesialis / sub spesialis sangat terbatas. - Jumlah lulusan tenaga Kesehatan lain tertentu sangat terbatas.
4	- Pelayanan PONEK di rumah sakit masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.	pelaksanaan RS PONEK belum maksimal	- Belum adanya ruang perawatan khusus ibu dan anak

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Penanganan / waktu tunggu di Instalasi Rawat Jalan masih belum maksimal atau belum sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	- Keterlambatan pelayanan oleh Dokter Spesialis.	- Jumlah tenaga medis/dokter spesialis terbatas - Pengaturan jadwal jaga.
		- Disiplinnya petugas / SDM belum maksimal	- Masih adanya SDM bekerja ditempat lain RSKD pada jam Kerja
		- Kualitas Sumber Daya Manusia di Instalasi/unit-unit masih perlu ditingkatkan	- Petugas pelayanan yang bersertifikat yang masih berlaku BTCLS/PPGD/GE LS/ALS belum sesuai standar
		- Ketersediaan dokumen rekam medis di poli masih lama.	- belum berjalan sepenuhnya pemanfaatan elektronik rekam medis
6	Ruang perawatan kasus intensive sering penuh	sebagai rumah sakit rujukan harus menerima dari rumah sakit lain	- Ketersediaan ruang rawat kasus intensive belum memenuhi.
		- Sarana dan Prasarana Penunjang non medis belum mendukung pelayanan secara optimal	- Kapasitas Ruang Tunggu pelayanan rawat jalan maupun rawat inap masih terbatas
			- Sarpras pengelolaan limbah masih kurang jika dibanding dengan kapasitas pasien

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			yang terus bertambah.
			- Belum tersedia sarana pendukung bagi penyandang disabilitas di seluruh tempat yang ada di Rumah Sakit.
7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan administrasi rumah sakit belum sepenuhnya sesuai dengan SPM	Manajemen administrasi pengelolaan rumah sakit belum tertata dengan baik	- Waktu menunggu obat di apotik masih lama.
		Sistem rujukan masih sering terkendala	- Belum terintegrasinya data rekam medis dari puskesmas/fasyan kes perujuk lainnya.
8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit belum maksimal.	Kepuasan masyarakat terhadap manajemen administrasi keuangan RS masih rendah	- Billing System belum sepenuhnya berjalan dengan baik
9	Pengadaan alat kesehatan medis belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis, dokter, dan tenaga Kesehatan lainnya.	- Kurang sesuainya antara perencanaan dengan realita kebutuhan/trend alkes medis di RSKD	- Koordinasi Manajemen, Instalasi/unit dan KSM dalam perencanaan belum optimal.

Tabel **T-B.3.1**
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
Gambaran Pelayanan	Efisiensi Pelayanan :						
	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) Persentase Pemakaian Tempat Tidur	61,5	%	Permenkes: 65-85	BOR antar kelas tidak merata, BOR Kelas III mencapai >65%	Pengaturan JKN dengan rujukan berjenjang	Rujukan pasien di mulai dari faskes dengan kelas di bawah mulai dari Tingkat I, RS kelas D, C
	<i>Length Of Stay</i> (LOS) Rata rata lama rawat seorang pasien	5,34	Hari	IS 2010 : 4-6 HARI	Pandemic covid -19 yang dirawat di rumah sakit rujukan membutuhkan perawatan yang lama	Pandemic covid-19 yang penyebarannya masih meluas	Regulasi keperawatan/penangan anan pasien covid-19
					RSKD adalah Rumah sakit rujukan, sehingga pasien yang datang sudah memerlukan penanganan yang komplek	sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus	Angka pencapaian LOS RSKD Masih didalam standar efisiensi tetapi jika dilihat dari anggotanya hampir

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
							keluar dari zona efisiensi
							Sarana dan Prasarana untuk pengembangan pelayanan kurang
					Jumlah dokter spesialis di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan.	- Masih kurangnya minat dokter spesialis untuk menjadi PNS di Kaltim. - Formasi dokter spesialis masih belum mengakomodir sejumlah dokter spesialis.	Usulan yang diajukan dan realisasi belum terpenuhi
					Rasio dokter di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (berdasarkan Permenkes 340 tahun 2010 standarisasi dokter umum 200 TT dilayani 12 dokter umum)	Kurangnya kuota PNS untuk dokter	Banyaknya dokter honorer sulit dalam pengembangan SDM

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
					Rasio perawat/bidan di rumah sakit belum mencapai target kebutuhan (setiap 1 TT satu perawat/bidan)	Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan	Usulan yang diajukan dengan realisasi belum terpenuhi, dan banyaknya tenaga honorer yang sulit dalam pengembangan SDM
					Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat seperti stroke, jantung, kanker, dll	Pola hidup masyarakat yang tidak baik	Berubahnya pola penyakit di masyarakat
	Bed Turn Over (BTO) Frekuensi pemakaian tempat tidur	49,29	kali / tahun	IS 2010: 40-50 kali/tahun		Pasien dengan jaminan dari pemerintah dalam bentuk JKN di jamin di kelas III	
					Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat	Pola hidup masyarakat yang tidak baik	Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	Turn Over Interval (TOI) Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati	2,09	Hari	IS 2010 : 1-3 HARI	- Peningkatan jumlah pasien covid yang dirawat di RSKD Balikpapan - Kurangnya jumlah Tempat Tidur	- Peningkatan jumlah pasien covid - Pasien jaminan pemerintah seperti JKN di kelas III	Kurangnya jumlah Tempat Tidur
	GDR	54,5	%o	45,0%o	- Pandemic Covid-19 yang berkepanjangan dengan peningkatan kasus yang dirawat dirumah sakit - Kurangnya sarana prasarana - Perlu peningkatan skill SDM di RS	- Tingginya angka kejadian covid-19 - Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawat daruratan. -Meningkatnya penyakit karena pola hidup yang tidak baik.	- Sistim rujukan terpadu belum berjalan dengan baik - Kurangnya sarana prasarana untuk penanganan kasus
	NDR	34,1	%o	25,0%o	- Pandemic Covid-19 yang berkepanjangan dengan peningkatan kasus yang dirawat dirumah sakit - Kurangnya sarana prasarana	- Tingginya angka kejadian covid-19 - Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan	- Sistim rujukan terpadu belum berjalan dengan baik - Kurangnya sarana prasarana untuk penanganan kasus

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	Jumlah kematian ibu dalam persalinan						
	a. Pendarahan	0,00	%	SPM : 0,00			
	b. Eklampsia	1,35	%	SPM : 0,00	RSKD adalah Rumah sakit rujukan, sehingga pasien yang datang sudah memerlukan penanganan yang komplek	Sistem rujukan yang diterapkan belum efektif dalam menangani kasus kegawatdaruratan	Kurangnya sarana prasarana untuk penanganan kasus
	c. Sepsis	0,00	%	SPM : 0,00			
	Presentasi pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	0,6	%	≤3	Meningkatnya penyakit akibat pola hidup tidak sehat	Pola hidup masyarakat yang tidak baik	Berubahnya pola penyakit di masyarakat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IGD	81,47	%	SPM : 83	Masih perlu ditingkatkannya keramahan SDM ketika menangani kasus kegawatdaruratan	- Keluarga pasien memerlukan respon dari petugas agar dapat melalui kondisi sulit	Kurangnya keramahan SDM ketika menangani kasus kegawatdaruratan
					Kurangnya fasilitas umum	Kurangnya tempat parkir beratap, dll	Kurang fasilitas umum

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	79	%	SPM : 90	Masih perlu ditingkatkannya keramahan SDM dan lamanya waktu tunggu dokter.		
					Kurangnya jumlah dokter spesialis dalam satu poliklinik (misal hanya ada satu dokter)	Kurangnya kuota PNS untuk dokter dan kurangnya minat untuk menjadi PNS bagi dokter spesialis	Kurang SDM
					Kurangnya fasilitas umum	Kurangnya tempat parkir mobil, dll	Kurang fasilitas umum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di IRNA	76,50	%	SPM : 90	- Jumlah tenaga dengan pasien yang tidak seimbang - tingginya beban kerja karena kurang jumlah Perawat	- Kurangnya kuota PNS untuk perawat/bidan	Kurang SDM
	Persentase Penanganan life saving anak dan dewasa	100	%	SPM : 100			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	Response time di IGD	5	Menit	SPM : ≤ 5			
	Response time di poliklinik spesialis	53	Menit	SPM : ≤ 60	Jumlah dokter spesialis dalam satu poliklinik masih perlu ditingkatkan (misal hanya ada satu dokter)	Kurangnya kuota CPNS untuk dokter dan kurangnya minat untuk menjadi PNS bagi dokter spesialis	Kurang SDM
	Jumlah kejadian Medical Error	0	%	0			
	Waktu Penyediaan Rekam Medik IRJA	18	Menit	≤ 10	- Belum berjalan sepenuhnya penerapan elektronik rekam medik di rumah sakit - Penyediaan rekam medik yang masih manual.	- Masyarakat belum mengerti pentingnya. - Aplikasi elektronik rekam medik/pendaftaran elektronik belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat.	Penyediaan rekam medik yang masih manual.
	Persentase kegagalan pelayanan Rontgen	0,3	%	0	Peralatan yang digunakan sudah berusia cukup lama dan sebagian sering rusak	Pasien yang bergerak pada saat di foto	Perlu peremajaan atau penambahan peralatan radiologi.

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	Persentase kesalahan hasil laboratorium	0,05	%	0	Alat laboratorium masih ada yang manual	Ketidak disiplin masyarakat dalam SOP pemeriksaan.	Sarana dan Prasarana Laboratorium
	Kualitas mutu limbah padat dan cair sesuai dengan standar yang telah ditetapkan						
	Baku mutu limbah cair	79,17	%	100	- Pengembangan pelayanan dan penambahan kapasitas tempat tidur. - Perlu penambahan sarana pengolahan limbah rumah sakit - Pemeliharaan IPAL perlu ditingkatkan. - Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi	Pengolahan limbah RS dekat dengan pemukiman penduduk	Fasilitas pengolahan air limbah
	Baku mutu limbah padat berbahaya sesuai aturan	100	%	100			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	Jumlah tenaga Medis yang mengikuti Diklat Fungsional	40	%	Akreditasi : 60%	- Pandemic covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan pelatihan tidak dilaksanakan. - Tenaga honorer BLUD jika dilatih ada kemungkinan untuk pindah. - Anggaran sangat terbatas.	- Kondisi pandemic covid-19. - Pelatihan tatap muka belum dapat dilaksanakan	- Belum kondusifnya kondisi saat ini untuk melaksanakan kegiatan - Kurangnya kuota PNS, - Terbatasnya anggaran
	Jumlah tenaga Non Medis yang mengikuti Diklat Teknis	40	%	Akreditasi: 60%	- Pandemic covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan pelatihan tidak dilaksanakan. - Tenaga honorer BLUD jika dilatih ada kemungkinan untuk pindah. - Anggaran sangat terbatas - Tenaga honorer BLUD jika dilatih ada	- Kondisi pandemic covid-19. - Pelatihan tatap muka belum dapat dilaksanakan	- Belum kondusifnya kondisi saat ini untuk melaksanakan kegiatan. - Kurangnya kuota PNS, - Terbatasnya anggaran

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
					kemungkinan untuk pindah.		
Kajian terhadap renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024	1.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup			1. Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10%. 2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95% 3.Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota 4.Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14% 5. Persentase bayi kurang dari 6 (enam) bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60% 6.Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
				aktif dari 51% menjadi 100%. 7.Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%. 8.100% Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514) 9.Kabupaten/Kota sehat sebanyak 420 Kabupaten/Kota			
	3. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan			1.Seluruh Kecamatan memiliki minimal 1(satu) Puskesmas 2.Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi rasio Tempat Tidur 1:1.000 sebesar 100% 3.Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
				4.Persentase RS terakreditasi sebesar 100% 5.Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain			
	3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat			1.Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024 2.Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024 3.Meningkatkan eliminasi malaria di 405 Kabupaten/Kota 4.Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 % 5.Meningkatnya Kabupaten/Kota yang			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
				melakukan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 Kabupaten/Kota. 6.Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%			
	4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96%			
	5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar			1.Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%. 2.Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
				sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) sebesar 90%. 3.Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang. 4. Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%. .			
	6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan			Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5%			
	7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih			1. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
				kabupaten/kota sebesar 100%. 2.Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis bidang kesehatan sebesar 100%. 3.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58 4.Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95. 5.Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
	8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan			1.Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi. 2.Jumlah Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK			
RTRW	Kawasan PKW, PKL, dan PKLp terdapat Sarana dan Prasarana kesehatan belum optimal			Akses pelayanan kesehatan	Akses pelayanan kesehatan	- Kemacetan di beberapa spot menuju RSKD - Letak RSKD Balikpapan pada jalur lalu lintas yang cukup padat dan pada jalan poros Balikpapan-samarinda. Trayek	Akses pelayanan kesehatan, dengan medan yang berbukit, kemacetan di waktu-waktu tertentu.

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
						angkutan umum mudah diakses dengan adanya angkutan berbasis online. - Angkutan umum lancar dari terminal Batu Ampar.	
				Akreditasi	Sarana pelayanan Rumah sakit yang sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan dan kualitas pelayanan Kesehatan	Tuntunan terhadap kualitas pelayanan Kesehatan meningkat
	Angka kesakitan malaria			IS 2010 : 5 / 1000 penduduk			
	Prevalensi HIV 4,94			IS 2010 : 0,9	Meningkatnya jumlah pasien HIV	Mobilitas penduduk berisiko tinggi HIV yang tidak terkendali	Meningkatnya jumlah pasien HIV

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI			STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
					INTERNAL	EKSTERNAL	
KLHS	Pemusnahan/pengolah an limbah medis di Rumah sakit masih terbatas.				Kurangnya sarana pengolahan sistim Aerasi	Pemukiman penduduk berkembang mendekati rumah sakit	- Kapasitas Pengolahan limbah padat dan cair masih perlu dilakukan penambahan. - Kurangnya sarana pengolahan
	Pola konsep green area 48%, Developing area 52%				Perencanaan pembangunan mengacu kepada Green Hospital	Perkembangan pemukiman penduduk yang sangat dekat dengan RS	

3.2. Isu strategis.

3.2.1. Telaahan Isu Internasional

1. Komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Berbagai aksi, strategi, dan inovasi dilakukan oleh Indonesia melalui berbagai diplomasi kepada dunia internasional.

Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan Permasalahan dan Isu Strategis IV-20 pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim dengan target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 31,89% melalui upaya-upaya dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 43,20% melalui upaya-upaya dengan dukungan internasional. Target penurunan emisi GRK tersebut akan dicapai dari sektor kehutanan, energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk dan pertanian.

2. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19

Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang berangsur membaik memerlukan dukungan dan arah kebijakan yang dapat mengurangi tekanan fiskal, sekaligus kesiapan ruang fiskal untuk menghadapi krisis, guncangan, dan bencana di masa depan.

Kedepan, dukungan kebijakan fiskal dibutuhkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dari guncangan dan transisi menuju model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dengan tetap memperhatikan aspek keadilan pada kelompok miskin dan rentan. Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan sektor digital diantaranya peningkatan akses internet, pasar yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara, serta tingginya pengguna moda e-commerce dalam bisnis.

Digitalisasi menjadi menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia, walaupun dalam pengembangannya juga disertai tantangan di antaranya perlunya peningkatan keterampilan pekerja menuju high skilled labor yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah pembiayaan penetrasi digital di Indonesia yang memerlukan dukungan tidak hanya dari pembiayaan publik melalui APBN namun juga dari sektor swasta.

3. Transisi Energi

Secara umum, transisi energi dimaknai sebagai jalan menuju transformasi sektor energi global dari berbasis fosil menjadi nol karbon. Transisi energi pada prinsipnya ditandai oleh adanya pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil yang meliputi minyak, gas alam, dan batu bara ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, serta air.

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, telah ditetapkan indikator porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan transisi energi, dimana pada Tahun 2025 ditargetkan paling sedikit sebesar 23% dan pada Tahun 2050 paling sedikit sebesar 31%.

4. Potensi Krisis Ekonomi Global

Kekhawatiran akan stagflasi global menuntut para pemangku kebijakan untuk melahirkan extraordinary strategy dalam memitigasi risiko stagflasi tersebut. Kebijakan menaikkan suku bunga guna meredam gejolak inflasi dalam jangka pendek juga menimbulkan risiko bagi sektor riil berupa cost of fund yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyelaraskan antara pengendalian inflasi dengan mendorong investasi agar dapat terbebas dari jerat stagflasi.

3.2.2. Telaahan Isu Nasional

1. Penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Visi Indonesia tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

a. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 - 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
 - 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
 - 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- b. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 :
- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
 - 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
 - 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
 - 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 - 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
 - 7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
2. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)
- Kalimantan Timur sebagai bagian dari superhub ekonomi, dengan visi transformasi ekonomi Kaltim yang beralih pada sektor berbasis hilirisasi industri. Oleh karena itu, peluang untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi sangat terbuka. Kalimantan Timur perlu menangkap peluang visi IKN untuk menggerakkan dan membangkitkan perekonomian di regional Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur. Selain itu, lokus lokus wilayah potensial yang dapat mendukung Bergeraknya super hub IKN perlu diusulkan untuk ditetapkan menjadi Daerah Mitra Kalimantan Timur juga harus memperkuat kerjasama regional antar regional Kalimantan untuk mendukung pembangunan IKN.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Pelaksanaan TPB di

Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024

Pada 2024 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada digelar pada 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

5. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga serta melibatkan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

6. Percepatan Penanganan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

7. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan

birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi meliputi 8 (delapan) area perubahan, meliputi:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tata Laksana
- 5) Penataan Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.2.3. Telaahan Kebijakan Provinsi

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Pembangunan periode 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari tahap ke-5 RPJPD (204-2025). Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan".

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur tersebut, misi pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
- 2) Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
- 3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Tujuan penataan ruang provinsi adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi, disusun kebijakan penataan ruang wilayah provinsi.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- 1) pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
- 2) pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumberdaya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
- 3) perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
- 4) perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan
- 5) perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

3. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Prinsip pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim telah diterapkan di Kalimantan Timur sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dan dunia usaha.

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- 2) RAD GRK Kalimantan Timur Tahun 2010-2030
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
- 4) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan TPB sesuai komitmen nasional. Pelaksanaan TPB dipantau dan dievaluasi secara periodik sehingga diperoleh informasi ketercapaian indikator TPB. Adapun pelaksanaan TPB tahun 2022 disajikan secara rinci sebagai berikut:

- 1) TPB 1: Tanpa Kemiskinan
- 2) TPB 2: Tanpa Kelaparan
- 3) TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) TPB 4: Pendidikan Berkualitas
- 5) TPB 5: Kesehatan Gender
- 6) TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan
- 11) TPB 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 12) TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 13) TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim
- 14) TPB 14: Ekosistem Lautan
- 15) TPB 15: Ekosistem Daratan
- 16) TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17) TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3.2.4. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Isu strategis dapat digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan Daya saing tenaga kerja
 - c. Peningkatan daya saing perempuan
2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
 - a. Diversifikasi ekonomi
 - b. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup
 - a. Peningkatan kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan
 - b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - c. Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

3.2.5. Isu Strategis di RSKD Balikpapan

Seiring dengan berkembangnya RSKD Balikpapan sebagai rumah sakit kelas A yang ada di Kalimantan Timur, beberapa isu-isu penting yang berkembang dan menjadi fokus untuk dilaksanakan. Mengacu pada visi kementerian Kesehatan Tahun 2020 -2024 yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Serta Tujuan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas”. Selain itu juga pada penerapan sasaran gubernur Kalimantan timur dengan sasaran meningkatnya Kesehatan masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan dan mewujudkan hal di atas beberapa yang menjadi isu-isu strategis adalah:

1. Pengampunan sistim rujukan.

Visi Kementerian Kesehatan dan visi Gubernur Kalimantan Timur dengan sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Derajat Kesehatan masyarakat Kalimantan Timur menjadi sasaran dalam rencana kerja pemerintah daerah yang akan diwujudkan. Penguatan atau perbaikan pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan rujukan. Perbaikan pelayanan rujukan meliputi perbaikan sarana, prasarana serta pemenuhan kebutuhan SDM. Dukungan dan komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Timur sangat besar terhadap pelayanan Kesehatan. Semakin berkembangnya pelayanan di RSKD Balikpapan, semakin siap dalam mengemban sistim rujukan atau pengampunan sistim rujukan yang di amanahkan oleh kementerian Kesehatan.

Sistem rujukan ditujukan untuk terbentuknya sistem rujukan yang efektif, serta yang memperkuat provinsi menyelesaikan kasus kesehatan penduduk di wilayahnya (khususnya penyakit jantung, kanker dan ginjal) tanpa harus dirujuk keluar daerah. dalam rangka peningkatan akses dan kualitas layanan rujukan perlu dikembangkan program penguatan jejaring rujukan pada 9 layanan prioritas nasional (Jantung, Kanker, DM, ginjal, hati, stroke/otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi).

Setiap jejaring 9 (sembilan) penyakit prioritas akan dibentuk dari tingkat RSUD di tingkat Kabupaten/Kota, RSUD di tingkat Provinsi sampai ke pengampu utama RS UPT Vertikal. Rumah sakit di daerah ditingkatkan pelayanannya agar memiliki layanan unggulan di bidang sembilan penyakit prioritas dimana penyakit-penyakit ini memiliki tingkat mortalitas dan komorbiditas yang tinggi. Sehingga setiap daerah akan terbentuk pusat layanan terhadap penyakit prioritas yang didukung dengan SDM, sarana prasarana dan alat sesuai stratifikasi/level layanan yang ditetapkan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan khususnya terhadap Sembilan pelayanan prioritas dari Kemenkes baik dari sisi Sumber Daya Manusia (dokter spesialis, perawat, bidan, tenaga Kesehatan lain dan lain-lain) serta kelengkapan alat, gedung/bangunan yang menunjang sembilan pelayanan prioritas tersebut.

Dari Sembilan pelayanan prioritas yang diamanahkan kementrian Kesehatan untuk di laksanakan, RSKD Balikpapan telah memiliki layanan unggulan yang telah berjalan dengan baik. Diantara yang telah dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan antara lain:

- 1) Pelayanan kanker terpadu yang ada di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sudah ada mulai tahun 2022 terletak di Gedung Lavender, pelayanan kanker terpadu di RSKD terus dikembangkan untuk memaksimalkan pelayanan serta kelengkapan peralatan dan sdm terus dipenuhi.
- 2) Pelayanan Jantung terpadu di RSKD masih dalam tahap pembangunan Gedung Jantung Terpadu, sedangkan pelayanan terhadap penyakit jantung RSKD sudah menerima pelayanan tersebut sejak RSKD di tunjuk sebagai Rumah sakit rujukan pengampuan pelayanan kardiovaskular tahun 2022, sehingga baik SDM maupun peralatan Alat kesehatan masih terus kami lengkapi.
- 3) Pelayanan TB dan Penyakit Infeksi RSKD mempunya Gedung Imdad Hamid yang berfungsi sebagai Gedung isolasi yang akan diresmikan tahun 2023, sehingga pasien yang membutuhkan pelayanan khusus isolasi tidak perlu untuk dirujuka sampai keluar daerah.
- 4) Pelayanan KIA di RSKD terus dikembangkan fasilitasnya, saat ini telah dilaksanakan pelayanan KIA dengan yang menerapkan prinsip pelayanan KIA sesuai dengan standar. Seiring dengan perkembangan serta

meningkatnya jumlah kunjungan dan pasien. Rencana kedepan akan mengembangkan satu Gedung khusus yang menjadi pusat pelayanan KIA di rumah sakit. Pembangunan dan pengembangan pelayanan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap Kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kalimantan Timur.

5) Pelayanan Stroke.

Pelayanan stroke, DM, Ginjal RSKD Balikpapan sudah banyak menangani pasien dengan permasalahan tersebut, untuk terus memenuhi kebutuhan pasien yang akan operasi RSKD akan membangun Gedung Khusus Bedah pada tahun 2025.

2. Pengembangan pelayanan.

Pelayanan di RSKD Balikpapan selalu berkembang sesuai dengan perubahan kelas rumah sakit dan makin bertambahnya jumlah penduduk serta makin bervariasinya jenis penyakit yang berkembang saat ini.

3. Pemenuhan SDM

4. Pembangunan Gedung pelayanan.

3.2.6. Kekuatan, Kelemahan serta Tantangan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwbowo Balikpapan

Saat ini berkembang pembangunan nasional terutama pemerintah pusat yang merencanakan pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur menjadi isu yang sangat strategis.

Rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) akan memberikan dampak yang sangat besar kepada daerah terutama Kota Balikpapan selaku penyangga Ibukota. Pekerjaan besar yang akan dilaksanakan sudah tentu akan mendatangkan tenaga kerja. Peluang bagi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwbowo Balikpapan untuk mengembangkan pelayanan sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang terlaksananya proses pemindahan ibukota negara. Dalam menentukan isu isu strategis, disamping melihat gambaran pelayanan SKPD, menelaah Renstra K/L, RTRW dan KLH perlu juga analisa lingkungan internal dan analisis lingkungan external dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis **SWOT**.

Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang meliputi;
 - a. Jenis Sumber Daya Manusia yang cukup banyak 1.650 orang.
 - b. Dokter Spesialis telah mengikuti sertifikasi sebagai tenaga pengajar.

- c. Memiliki beberapa dokter sub spesialis tertentu
 - d. Tenaga Kesehatan lain yang cukup lengkap.
 - e. Lahan Rumah sakit yang luas 24 Ha dan baru dipergunakan sekitar 10 Ha
 - f. Gedung Rumah Sakit yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.
 - g. Peralatan kesehatan dan penunjang medis relative lengkap.
 - h. Pelayanan kesehatan sudah terstandarisasi Akreditasi Paripurna.
 - i. Telah memenuhi sebagai perangkat daerah dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
 - j. Tarif pelayanan kesehatan yang terjangkau.
 - k. Kesiapan fasilitas dan SDM untuk melayani pasien dengan jaminan JKN, asuransi kesehatan swasta yang lain.
 - l. Pengelolaan keuangan PPK BLUD sehingga dapat langsung menggunakan pendapatan untuk operasional.
 - m. Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk seluruh unit layanan telah tersedia.
2. Kelemahan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang meliputi;
- a. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang banyak dan cukup lengkap membutuhkan biaya yang besar untuk pemeliharaan .
 - b. Gedung perawatan yang cukup luas membutuhkan anggaran pemeliharaan yang cukup besar.
 - c. Persaingan dengan RS Swasta Nasional yang juga terus mengembangkan pelayanan.
 - d. Masih Kurangnya jumlah tenaga dokter sub spesialis, perawat/bidan untuk pengembangan lima tahun mendatang serta banyaknya tenaga BLUD yang sulit dikembangkan.
 - e. Jadwal visite dokter yang masih belum bisa tepat waktu
 - f. Belum adanya dokter sub spesialis tertentu.
 - g. Pelaksanaan elektronik rekam medis yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik disemua unit.
 - h. Banyaknya pegawai perawat, dokter dan adanya beberapa dokter spesialis yang berstatus honor sehingga sulit dikembangkan karena adanya kemungkinan pindah setelah dilatih dengan keterampilan khusus.
 - i. Masih kurangnya sarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas.
 - j. Area parkir bagi pengunjung yang masih kurang.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang meliputi;
 - a. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengembangan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
 - b. Dimulainya pembangunan IKN, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas cukup lengkap.
 - c. Semakin pesatnya perkembangan Kota Balikpapan dan diikuti dengan tingkat pendapatan masyarakat Kota Balikpapan yang tinggi.
 - d. RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan Rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lain di Balikpapan juga dari kabupaten tetangga.
 - e. Akses transportasi antar daerah dan antar Negara yang mudah dengan adanya bandara internasional.
 - f. RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melayani pasien umum, perusahaan dan juga pasien JKN.
 - g. Telah melaksanakan pelayanan yang menjadi prioritas nasional
2. Tantangan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang meliputi;
 - a. Masih ada pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.
 - b. Dengan banyaknya pengembangan kawasan industri bertaraf internasional memungkinkan masuknya tenaga kerja ke Balikpapan.
 - c. Berlakunya aturan dari BPJS dengan sistim rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan .
 - d. Cara pembayaran BPJS yang berdasarkan sistim paket.
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin tinggi
 - f. Semakin banyaknya kasus pasien dengan penyakit degeneratif
 - g. Banyaknya pasien rujukan dari rumah sakit lain yang datang terlambat ataupun dengan kondisi yang sangat kritis.
 - h. Kurangnya RS tempat pendidikan dokter di Kalimantan Timur.
 - i. Persaingan dengan rumah sakit swasta yang semakin banyak dan gencar dalam melakukan invasi pelayanan di Kota Balikpapan

3.2.7. Analisis SWOT

Analisa SWOT yang dilakukan terhadap potensi di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo seperti tampak pada tabel di bawah ini :

1. Faktor Internal :

No	Faktor Kekuatan Kritis	Bobot	Skala (1-4)	(Bobot)x (Skala)
1	Jenis Sumber Daya Manusia yang cukup banyak 1.650 orang.	0.08	4	0.31
2	Dokter Spesialis telah mengikuti sertifikasi sebagai tenaga pengajar.	0.08	3	0.23
3	Memiliki beberapa dokter sub spesialis tertentu	0.08	4	0.31
4	Tenaga Kesehatan lain yang cukup lengkap.	0.08	4	0.31
5	Lahan Rumah sakit yang luas 24 Ha dan baru dipergunakan sekitar 10 Ha	0.08	4	0.31
6	Gedung Rumah Sakit yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.	0.08	4	0.31
7	Peralatan kesehatan dan penunjang medis relative lengkap.	0.08	4	0.31
8	Pelayanan kesehatan sudah terstandarisasi Akreditasi Paripurna.	0.08	4	0.31
9	Telah memenuhi sebagai perangkat daerah dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	0.08	4	0.31
10	Tarif pelayanan kesehatan yang terjangkau.	0.08	4	0.31
11	Kesiapan fasilitas dan SDM untuk melayani pasien dengan jaminan JKN, asuransi kesehatan swasta yang lain.	0.08	4	0.31
12	Pengelolaan keuangan PPK BLUD sehingga dapat langsung menggunakan pendapatan untuk operasional.	0.08	3	0.23
13	Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk seluruh unit layanan telah tersedia.	0.08	3	0.23
		Skor Faktor Kekuatan:		3.77

	FAKTOR KELEMAHAN KRITIS	Bobot	Skala (1-4)	(Bobot)x (Skala)
1	Fasilitas pelayanan Kesehatan yang banyak dan cukup lengkap membutuhkan biaya yang besar untuk pemerilharaan .	0.1	4	0.4

	FAKTOR KELEMAHAN KRITIS	Bobot	Skala (1-4)	(Bobot)x (Skala)
2	Gedung perawatan yang cukup luas membutuhkan anggarna pemeliharaan yang cukup besar.	0.1	4	0.4
3	Persaingan dengan RS Swasta Nasional yang juga terus mengembangkan pelayanan.	0.1	3	0.3
4	Masih Kurangnya jumlah tenaga dokter sub spesialis, perawat/bidan untuk pengembangan lima tahun mendatang serta banyaknya tenaga BLUD yang sulit dikembangkan.	0.1	3	0.3
5	Jadwal visite dokter yang masih belum bisa tepat waktu	0.1	3	0.3
6	Belum adanya dokter sub spesialis tertentu.	0.1	4	0.4
7	Pelaksanaan elektronik rekam medis yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik disemua unit.	0.1	3	0.3
8	Banyaknya pegawai perawat, dokter dan adanya beberapa dokter spesialis yang berstatus honor sehingga sulit dikembangkan karena adanya kemungkinan pindah setelah dilatih dengan keterampilan khusus.	0.1	4	0.4
9	Masih kurangnya sarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas.	0.1	3	0.3
10	Area parkir bagi pengunjung yang masih kurang.	0.1	4	0.4
		Skor Faktor Kelemahan:		4
		IFE		3,63

2. Faktor Eksternal :

NO	FAKTOR PELUANG KRITIS	BOBOT	SKALA (1-4)	(BOBOT)X (SKALA)
1	Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengembangan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.	0.14	4	0.57
2	Dimulainya pembangunan IKN, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas cukup lengkap.	0.14	4	0.57
3	Semakin pesatnya perkembangan Kota Balikpapan dan diikuti dengan tingkat pendapatan masyarakat Kota Balikpapan yang tinggi.	0.14	3	0.43

NO	FAKTOR PELUANG KRITIS	BOBOT	SKALA (1-4)	(BOBOT)X (SKALA)
4	RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan Rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lain di Balikpapan juga dari kabupaten tetangga.	0.14	3	0.43
5	Akses transportasi antar daerah dan antar Negara yang mudah dengan adanya bandara internasional.	0.14	3	0.43
6	RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan melayani pasien umum, perusahaan dan juga pasien JKN.	0.14	4	0.57
7	Telah melaksanakan pelayanan yang menjadi prioritas nasional	0.14	3	0.43
		Skor Peluang		3.43

No	FAKTOR TANTANGAN KRITIS	BOBOT	Skala (1-4)	(BOBOT)X (SKALA)
1	Masih ada pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.	0.11	2	0.22
2	Dengan banyaknya pengembangan kawasan industri bertaraf internasional memungkinkan masuknya tenaga kerja ke Balikpapan.	0.11	2	0.22
3	Berlakunya aturan dari BPJS dengan sistim rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan	0.11	2	0.22
4	Cara pembayaran BPJS yang berdasarkan sistim paket.	0.11	1	0.11
5	Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin tinggi	0.11	2	0.22
6	Semakin banyaknya kasus pasien dengan penyakit degeneratif	0.11	2	0.22
7	Banyaknya pasien rujukan dari rumah sakit lain yang datang terlambat ataupun dengan kondisi yang sangat kritis.	0.11	2	0.22
8	Kurangnya RS tempat pendidikan dokter di Kalimantan Timur.	0.11	3	0.33
9	Persaingan dengan rumah sakit swasta yang semakin banyak dan gencar dalam melakukan invasi pelayanan di Kota Balikpapan	0.11	2	0.22
		Skor Faktor TANTANGAN		2
		EFE		2,71

		IFE		
		Kuat (3.0 – 4.0)	Sedang (2.0 – 2.99)	Lemah (1.0 – 1,99)
EFE	Tinggi (3.00 – 4.00)	I	II	III
	Sedang (2,0 – 2,99)	IV	V	VI
	Lemah (1,00 – 1,99)	VII	VII	IX

Dari hasil nilai IFE sebesar 3,65 berarti IFE RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berada pada daerah sedang dan EFE sebesar 2,63 berarti EFE RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berada pada daerah EFE sedang.

Strategi product development yaitu pengenalan produk produk baru saat ini, pengembangan produk lebih kepada penyempurnaan, melengkapi, atau perluasan produk yang ada secara alamiah. Jadi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan harus mempertahankan kualitas pelayanan yang telah ada saat ini serta meningkatkan promosi terhadap pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan pelayanan baru. Pengembangan pelayanan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan penyakit serta teknologi kedokteran yang ada.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
- a. Tingkatkan Pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien serta mengutamakan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu.

b. Tingkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur serta stakeholder yang ada.

c. Meningkatkan kerjasama dengan asuransi swasta, BPJS, Perusahaan swasta, dll.

d. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dengan memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.

- e. Meningkatkan pelayanan medis, penunjang serta manajemen baik untuk lingkungan internal maupun eksternal.
- f. Mengembangkan pelayanan kesehatan untuk penanganan berbagai macam penyakit terutama pelayanan terhadap program prioritas Nasional.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit berbasis lingkungan yang sehat dan juga Green Hospital.

2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)

- a. Menjadi Rumah Sakit milik pemerintah yang memberikan pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- c. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan BLUD yang efektif dan efisien serta akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya integrasi SIMRS yang kompeten.
- d. Optimalisasi penggunaan sarana prasarana yang ada untuk pelayanan kesehatan.
- e. Optimalisasi penggunaan peralatan kesehatan dan penunjang medis untuk pelayanan kesehatan.
- f. Menerapkan SPO secara konsisten serta meningkatkan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan petugas kesehatan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan lifesaving.
- h. Meningkatkan Standar Ruang Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.

3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

- a. Meningkatkan sarana, prasarana dan kualitas SDM serta melakukan promosi, memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui media mengenai jenis layanan yang ada RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan peralatan canggih yang telah dimiliki.
- b. Membudayakan untuk selalu bersikap jujur, penuh tanggung jawab, disiplin, kerjasama, visioner, adil dan peduli sebagai bagian dari gaya hidup.

- c. Mengintensifkan pelatihan *customer service*, *service excellent* dan menyelenggarakan pelatihan pasien safety untuk meningkatkan kualitas SDM dan mutu pelayanan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
- d. Meningkatkan sarana untuk fasilitas umum seperti area parkir, taman, ruang tunggu, menyediakan foodcourt dll.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah tenaga dokter, dokter spesialis dan subspesialis sesuai standar rumah sakit kelas A.
- f. Menyempurnakan pengolahan limbah rumah sakit serta menambah alat pengolah limbah non incenerator.
- g. Menambah fasilitas khususnya bagi penyandang difable

4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- a. Meningkatkan keramahan petugas dengan menggalakkan pelatihan *service excellent* kepada seluruh pegawai dan promosi tentang pelayanan dan fasilitas untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan .
- b. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam mempromosikan fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit.
- c. Menambah sarana dan prasarana serta Meningkatkan mutu pelayanan, mutu SDM dan fasilitas umum lainnya.
- d. Menambah fasilitas dan Mengembangkan pelayanan dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
- e. Mengembangkan budaya kerja RSKD yang selalu mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi instansi dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil score keterkaitan pada tabel di atas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan dengan berpedoman pada Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit .

2. Pengembangan pelayanan beberapa penyakit secara terpusat dan lengkap khususnya pelayanan kanker terpadu.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan serta fasilitas umum lainnya.
4. Meningkatkan kualitas SDM teknis maupun non teknis, dan menggalakkan pelatihan service excellent kepada seluruh karyawan.
5. Pengembangan pelayanan dan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit rujukan regional Kalimantan Timur yang berdaulat tahun 2023.
6. Meningkatkan Promosi produk pelayanan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan kepada masyarakat luas baik secara elektronik maupun media massa.

Selain penentuan faktor kunci keberhasilan, dalam rangka upaya mengembangkan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, maka perlu diperhatikan beberapa isu-isu strategis yang terjadi agar tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan untuk 3 (Tiga) tahun ke depan benar-benar dapat tercapai sesuai target yang ada. Adapun **isu-isu strategis** tersebut, antara lain yaitu :

1. Semakin Tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas.
2. Pengembangan elektronik rekam medik dalam upaya menghadapi perkembangan zaman yang terus melaju dengan pesat.
3. Pengaturan jadwal pemeriksaan dokter di rawat jalan dan rawat inap yang terus ditingkatkan dengan mempertimbangkan ketepatan waktu dalam melaksanakan pemeriksaan.
4. Jumlah dan jenis tenaga medis tertentu masih perlu penambahan menyesuaikan dengan pelayanan sesuai kelas rumah sakit.
5. Meningkatnya kejadian penyakit degeneratif.
6. Angka capaian GDR dan NDR masih belum sesuai standar nasional.
7. Pengolahan limbah medis / limbah B3 masih selalu perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
8. Akuntabilitas kinerja keuangan yang masih terus selalu harus ditingkatkan.
9. Masih kurangnya RS di Kalimantan Timur sebagai tempat pendidikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tiap perangkat daerah tentu dibutuhkan adanya tujuan, sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai RSKD Balikpapan tiga tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan strategik selama 3 (Tiga) tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK

b. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan sesuai dengan standar nasional maupun Internasional akreditasi Rumah Sakit..
2. Terwujudnya kinerja keuangan rumah sakit yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya Rumah Sakit yang aman dan ramah lingkungan.
4. Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bidang kesehatan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Untuk lebih terperinci indikator yang menjadi penilaian kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table T-C 25 di bawah ini:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.Terwujudnya pelayanan sesuai dengan standar nasional maupun internasional akreditasi Rumah Sakit	Tujuan 1: - Usia Harapan Hidup (Tahun)	74.82	74.89	74.93
		2. Terselenggaranya Pelayanan Prioritas Nasional Rumah sakit	Sasaran 1 dan 2: Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88%	88,5%	89%
		3. Terwujudnya Rumah Sakit yang aman dan ramah lingkungan.	Sasaran 3: Proper lingkungan	85 (hijau)	85 (hijau)	85 (hijau)
		4. Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bidang kesehatan di rumah sakit	Sasaran 4: Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RS Kanujoso)	60%	60%	60%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
2	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	5. Terwujudnya kinerja keuangan rumah sakit yang akuntabel dan transparan	Tujuan 2; 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83%	85%	87%
			2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	75,50	75,55	75,60
			Sasaran 5: - Indeks kualitas layanan kesekretariatan	70 Indeks	70 Indeks	70 Indeks
			- Presentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menetapkan 4 (Empat) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2024 - 2026, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi I :

Strategi I ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran:

1. Terwujudnya pelayanan sesuai dengan standar nasional maupun internasional akreditasi Rumah Sakit”.

2. Terselenggaranya Pelayanan Prioritas Nasional Rumah sakit

Kebijakan untuk Strategi I.

1) Pengembangan / peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan strategi I dituangkan dalam program sebagai berikut:

- a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
- b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- c. Program Peningkatan Pelayanan Publik

2. Strategi II

Strategi II ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK”** dengan sasaran “Terwujudnya kinerja keuangan rumah sakit yang akuntabel dan transparan”.

Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan strategi II dituangkan dalam program sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Terdiri dari beberapa kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Peningkatan Pelayanan BLUD.

3. Strategi III

Strategi III ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan sasaran “Terwujudnya Rumah Sakit yang aman dan ramah lingkungan “

Kebijakan untuk Strategi III.

Untuk melaksanakan strategi III dituangkan dalam program sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

4. Strategi IV

Strategi IV ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**” dengan sasaran “Terwujudnya rumah sakit Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bidang kesehatan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut :

Kebijakan untuk strategi IV adalah :

Untuk melaksanakan strategi III dituangkan dalam program sebagai berikut:

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini terdiri dari kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

sub kegiatan:

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Regulasi		
Administrasi Umum Perangai Daerah		
Indikator & Target		
Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Musyawarah DPRD		
2024	2025	2026
12 Januari	12 Januari	12 Januari

Sub Kegiatan		
Peningkatan Kapasitas intelektual dan intelektual DPRD		
Indikator & Target		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Musyawarah DPRD		
2024	2025	2026
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Regulasi		
Perencanaan dan Penganggaran, Urutan Prioritas dan Operasi		
Indikator & Target		
Terselenggaranya rapat koordinasi, sumber daya dan APBD		
2024	2025	2026
12 Januari	12 Januari	12 Januari

Sub Kegiatan		
Peningkatan kapasitas intelektual, sumber daya APBD dan APBD		
Indikator & Target		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Musyawarah DPRD yang Diselenggarakan		
2024	2025	2026
12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Regulasi		
Peningkatan Pelayanan BLU		
Indikator & Target		
Terselenggaranya BLU yang Meningkatkan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan		
2024	2025	2026
12 Januari	12 Januari	12 Januari

Sub Kegiatan		
Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLU		
Indikator & Target		
Jumlah BLU yang Meningkatkan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan		
2024	2025	2026
12 Januari	12 Januari	12 Januari

Sub Kegiatan		
Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator & Target		
Jumlah BLU yang Meningkatkan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan		
2024	2025	2026
12 Januari	12 Januari	12 Januari

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini dijelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam table T-C. 26 berikut:

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Mewujudkan SDM Berdaya Saing			
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
Tujuan 1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 1 1. Terselenggaranya pelayanan sesuai dengan standar nasional maupun internasional akreditasi Rumah Sakit. 2. Terselenggaranya Pelayanan Prioritas Nasional Rumah sakit	Strategi 1 Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Arah kebijakan 1 - Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit sesuai standar kelas rumah sakit. - Pembangunan gedung rumah sakit - melengkapi peralatan Kesehatan - Melengkapi prasarana rumah sakit - Melakukan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit.
	Sasaran 2 1. Terwujudnya Rumah Sakit yang aman dan ramah lingkungan	Strategi 2 - Meningkatkan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit. - Meningkatkan kualitas air, udara di	Arah Kebijakan 2 - Pemeliharaan IPAL. - Pengelolaan sampah/limbah B3 - Penyediaan sarana pemusnah limbah rumah sakit.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		lingkungan rumah sakit	
	Sasaran 3. 1. Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bidang kesehatan di rumah sakit	Strategi 3 Menjadi rumah sakit Pendidikan	Arah Kebijakan 3 - Menjadikan lahan praktik bagi mahasiswa, kedokteran, keperawatan, Kesehatan lain. - Melaksanakan pelatihan / In House Training (IHT) - Membuka kesempatan penelitian bagi peneliti bidang Kesehatan, mahasiswa dan unsur lain yang berkompeten.
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Professional, Akuntabel, Serta Berorientasi Pelayanan Public Yang Didukung ASN berAKHLAK			
Tujuan 2 Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Sasaran 4 Terwujudnya kinerja keuangan rumah sakit yang akuntabel dan transparan	Strategi 4 Melaksanakan kinerja keuangan berbasis teknologi informasi.	Arah kebijakan 4 - Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. - Transaksi keuangan berbasis digital (non tunai).

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam rangka menunjang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur maka ada beberapa indikator yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan oleh RSKD Balikpapan.

Adapaun penyajian dari hal tersebut di atas dapat dituangkan dalam tabel T-C. 27 sebagai berikut:

Tabel TC. 27
Rencana program, kegiatan dan pendanaan RSKD Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		tahun 4		tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rupiah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							448.195.547.000		473.782.541.000		552.006.970.000						1.473.985.058.000		
Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Terwujudnya kinerja keuangan rumah sakit yang akuntabel dan transparan	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Outcome : - Indeks kualitas layanan kesekretariatan	65 Indeks	70 Indeks	429.318.866.512	70 Indeks	444.093.866.512	70 Indeks	457.593.866.512		-		-	70 Indeks	1.331.006.599.536	RSKD	Bpn
				Outcome : - Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000					100%	300.000.000		
		1.02.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000					12 Dokumen	150.000.000		
		1.02.1.1.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000					12 Laporan	150.000.000		
		1.02.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan	14 Bulan	117.018.866.512	14 Bulan	120.018.866.512	14 Bulan	121.518.866.512					42 Bulan	358.556.599.536		
		1.02.1.1.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/Bulan	670 Orang/Bulan	117.018.866.512	700 Orang/Bulan	120.018.866.512	735 Orang/Bulan	121.518.866.512					735 Orang/Bulan	140.640.584.536		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		tahun 4		tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
																0			
		1.02.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1192 Stell	1192 Stell	100.000.000	1240 Stell	50.000.000	620 Stell	50.000.000					3052 Stell	200.000.000		
		1.02.1.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Output : Jumlah Stell Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1192 Stell	1192 Paket	100.000.000	1240 Paket	50.000.000	620 Paket	50.000.000					3052 Paket	200.000.000		
																0			
		1.02.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000					36 Laporan	150.000.000		
		1.02.1.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000					36 Laporan	150.000.000		
																0			
		1.02.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000					36 Laporan	250.000.000		
		1.02.1.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000					36 Laporan	250.000.000		
																0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		tahun 4		tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		1.02.1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Output : Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	312.000.000.000	22 Unit Kerja	324.000.000.000	22 Unit Kerja	336.000.000.000					22 Unit Kerja	972.000.000.000		
		1.02.1.1.10.0001	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sub Output: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	312.000.000.000	22 Unit Kerja	324.000.000.000	22 Unit Kerja	336.000.000.000					22 Unit Kerja	972.000.000.000		
																	0		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.Terselenggaranya pelayanan sesuai dengan standar nasional maupun internasional akreditasi Rumah Sakit 2.Terselenggaranya Pelayanan Prioritas Nasional Rumah sakit	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Outcome: Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS.	88%	88%	18.276.680.488	88,5%	29.088.674.488	89%	93.813.103.488					89%	141.178.458.464	RSKD	Bpn

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		tahun 4		tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Output : Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.627 Unit	1.627 Unit	17.756.680.488	1.546 Unit	28.513.674.488	1.656 Unit	93.238.103.488					1.656 Unit	139.508.458.464		
		1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Sub Output: Jumlah Gedung Baru di Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	10.000.000.000	1 Unit	3.276.920.977	1 Unit	37.372.275.488					3 Unit	50.649.196.465		
																0			
		1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Sub Output : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	93 Unit/Set/Paket	93 Unit/Set/Paket	7.000.000.000	12 Unit/Set/Paket	24.836.753.511	122 Unit/Set/Paket	55.465.828.000					227 Unit/Set/Paket	87.302.581.511		
																0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		tahun 4		tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Sub Output: Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	656.680.488	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000					6 Unit	756.680.488		
																0			
		1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Sub Output: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1523 Unit	1523 Unit	50.000.000	1523 Unit	150.000.000	1523 Unit	150.000.000					1523 Unit	350.000.000		
																0			
		1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub Output: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	8 Unit	8 Unit	50.000.000	8 Unit	200.000.000	8 Unit	200.000.000					8 Unit	450.000.000		
																0			
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Output : Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	680 Orang/ Tahun	680 Orang/ Tahun	520.000.000	690 Orang/ Tahun	575.000.000	700 Orang/ Tahun	575.000.000					700 Orang/ Tahun	1.670.000.000		
																0			
	Terwujudnya Rumah Sakit yang aman dan ramah lingkungan.	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sub Output : Proper Lingkungan	Hijau	Hijau	80.000.000	Hijau	50.000.000	Hijau	50.000.000					Hijau1	180.000.000		
																0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		tahun 4		tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
		1.02.02.1.02.009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	125.000.000	4 Dokumen	125.000.000					1	260.000.000		
																0			
		1.02.02.1.02.022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sub Output : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Dokumen	3 Dokumen	430.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000					9 Dokumen	1.230.000.000		
																0			
	Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bidang kesehatan di rumah sakit	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Outcome : Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60%	60%	500.000.000	60%	500.000.000	60%	500.000.000					60%	1.500.000.000	RSKD	Bpn
		1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Output : Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60%	60%	500.000.000	60%	500.000.000	60%	500.000.000					60%	1.500.000.000		
		1.02.03.1.02.001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Output : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		923 Orang	500.000.000	952 Orang	500.000.000	997 Orang	500.000.000						1.500.000.000		
																0			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (RS Kanujoso)		70 Indeks	70 Indeks	70 Indeks	
2	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RS Kanujoso)	60%	60%	60%	60%	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72	75,50	75,55	75,60	
4	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	89,5%	88%	88,5%	89%	
5	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso)		88%		88%	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,62	90	92	93,5	
7	Penilaian Proper Lingkungan	Proper Hijau	Proper Hijau	Proper Hijau	Proper Hijau	
	Presentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang kesehatan untuk periode 3 tahun yaitu tahun 2024 - 2026. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kalimantan timur yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam rangka kinerja penyelenggara pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah Pemerintah provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kalimantan Timur.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra RSKD Balikpapan yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA RSKD Balikpapan harus ditingkatkan.

Balikpapan, Juli 2023

Direktur,

dr. Edy Iskandar, Sp. PD FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia PBB telah mencanangkan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDG's yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Isu kesehatan jiwa merupakan salah satu target yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun kadang masih terabaikan, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2016 secara global terdapat 35 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang dengan gangguan bipolar, 21 juta orang dengan skizofrenia, dan 47,5 juta orang dengan demensia.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 7,1% rumah tangga yang memiliki penderita gangguan jiwa. Angka ini mengindikasikan terdapat 7 rumah tangga dengan penderita ODGJ di tiap 1000 rumah tangga, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat.

Melalui pendekatan Indikator Keluarga Sehat (PID-PK) terdapat indikator gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan. Berdasarkan data aplikasi keluarga sehat tahun 2020 persentase keluarga yang memiliki penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan sebesar 36,75 %.

Generasi muda adalah masa depan bagi bangsa Indonesia namun fakta menyatakan dunia remaja sangat rentan mengalami gangguan jiwa, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa yang ditunjukkan dengan gejala depresi pada usia 15 tahun keatas mencapai 6,1 %, diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

Rumah Sakit merupakan Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsi kesehatan yakni memberikan sarana dasar, upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang, dimana dalam penyelenggaraan harus memperhatikan fungsi sosial.

Sebagai fungsi sosial di bidang kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam selanjutnya disingkat RSJD AHM merupakan pelayanan publik yang senantiasa melakukan sosialisasi atas peran, fungsi dan manajemen Rumah Sakit. Oleh karena RSJD Atma Husada Mahakam terus berbenah diri untuk mengembangkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Rumah Sakit, melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit secara profesional.

RSJD Atma Husada Mahakam yang awalnya bernama Rumah Sakit Jiwa Samarinda didirikan pada tahun 1933 di atas tanah seluas 20.157 M2 yang dibiayai oleh kesultanan kutai dan merupakan Rumah Keperawatan Sakit Jiwa. Pada awalnya Rumah Sakit Jiwa Samarinda didirikan bersamaan dengan Rumah sakit Umum melalui Ketetapan Ketua *Bestwer College* Samarinda Nomor: 558/IH-9-Fed tanggal 20 April 1949 dan selanjutnya terkait pembiayaan Rumah Sakit Umum dan RSJ Samarinda diserahkan oleh Kesultanan Kutai kepada Dewan Kesultanan dan Kerajaan di Kalimantan Timur, namun pada tanggal 1 januari 1951 pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan sebuah Surat Keputusan bulan November 1951, pada tahun 1952 kantor RSJP dipisahkan dari Rumah Sakit Umum, dan berdasarkan Surat Keputusan Menkes No.135/Menkes/SK/IV/1978 tanggal 28 April 1978 Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Jiwa kelas B**.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui surat Menkes Nomor: 1732/Menkes-Kesos/XII/2000 tentang Pengalihan UPTD Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan surat revisi Depkes Nomor: 196/Menkes-sos/III/2001, tanggal 7 Maret 2001 tentang Revisi Penataan Kelembagaan UPTD kepada Pemerintah Provinsi, sehingga pengoperasian Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda dalam tahun 2001 di bawah pemerintah kota Samarinda dalam bentuk **UPTD** yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim nomor. 16 tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada dinas-dinas provinsi Kalimantan Timur sehingga rumah sakit jiwa pusat samarinda berubah nama menjadi **Rumah Sakit Jiwa Samarinda**.

Pada tahun 2005 untuk menghilangkan stigma di masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Samarinda berubah nama menjadi **Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam** melalui Surat Keputusan Gubernur No. 03 tahun 2005 tanggal 17 Januari 2005.

Ditahun yang sama Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mendapat penambahan ruangan atau gedung baru yaitu gedung Instalasi Pengelolaan Ketergantungan Napza untuk melayani pasien dengan ketergantungan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya), sehingga dengan demikian luas rumah sakit bertambah menjadi 1.035,8 m².

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam bertujuan memberi pelayanan kesehatan jiwa untuk seluruh masyarakat Kaltim yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam bekerja sama dengan instansi terkait seperti fakultas kedokteran Universitas Mulawarman dan instansi pendidikan lainnya sebagai fasilitas prevensi, promosi, kuratif dan rehabilitatif serta riset di bidang kesehatan jiwa.

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intramural dan ektramural serta melakukan pembinaan dan integrasi ke puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur dengan cara mengirim psikiater ke puskesmas dan Rumah sakit secara berkala.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat khusus dan atau spesifik yang berbentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor YM.01.10/III/02/11, tanggal 3 Januari 2011 menetapkan dan memberikan status Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut kepada Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam di kotamadya Samarinda, Provinsi kalimantan timur.

Selanjutnya menurut keputusan menteri kesehatan nomor 231/MENKES/SK/II/2011, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam telah mengalami kenaikan kelas, menjadi kelas A.

Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 06 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam berubah nama menjadi **Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam**.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam sebagai sarana pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya berfungsi di bidang

sosial saja, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya, dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir renstra) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Ranhir renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Selain menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur juga mengacu kepada Ranhir renstra sebelumnya, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain Itu Ranhir renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan Rencana kerja (RENJA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam setiap tahunnya;
2. Dasar pengambil keputusan dan penilaian kinerja Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
3. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir renstra) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan derivatnya khususnya Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memberimruang bagi partisipasi para pemangku kepentingan.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
7. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
9. Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa.
10. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekon dan Tugas Pembantuan.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010 -2014.
17. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Ranhir renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan 3 (tiga) tahunan yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Ranhir renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 yaitu:

1. Memberikan pedoman yang menentukan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pengembangan sumber daya guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tahun 2024-2026;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Tahunan);
4. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi baik pada awal maupun akhir pelaksanaan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur baik tahunan maupun 3 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Ranhir renstra, landasan hukum penyusunan Ranhir renstra, maksud dan tujuan penyusunan Ranhir renstra dan sistematika penulisan dokumen Ranhir renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi RSJD Atma Husada Mahakam; sumber daya yang dimiliki oleh RSJD Atma Husada Mahakam, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis RSJD Atma Husada Mahakam

Bab ini berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan tujuan, sasaran dan Program Kepala, Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Ranhir renstra K/L dan Ranhir renstra, Telaahan Rencana Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah, Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat daerah

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah RSJD Atma Husada Mahakam

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan Strategi dan arah kebijakan RSUD RSJD Atma Husada Mahakam dalam menjabarkan sasaran RSJD Atma Husada Mahakam

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam selama 3 (tiga) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja RSJD Atma Husada Mahakam RSJD Atma Husada Mahakam, tata ruang dan kebersihan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Ranhir renstra RSJD Atma Husada Mahakam RSJD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan perannya sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disingkat RSJD AHM memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

2.1 Tugas

Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah memberikan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan NAPZA serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian. Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

2.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- c. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, serta zat zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah daerah
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan
- f. Rumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan
- g. Rumusan, perencanaan, pembinaan dan koordinasi dan pengendalian, penunjang dan pengembangan sumberdaya manusia serta peningkatan mutu

- h. Pembinaan kelompok jabatan Fungsional
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi

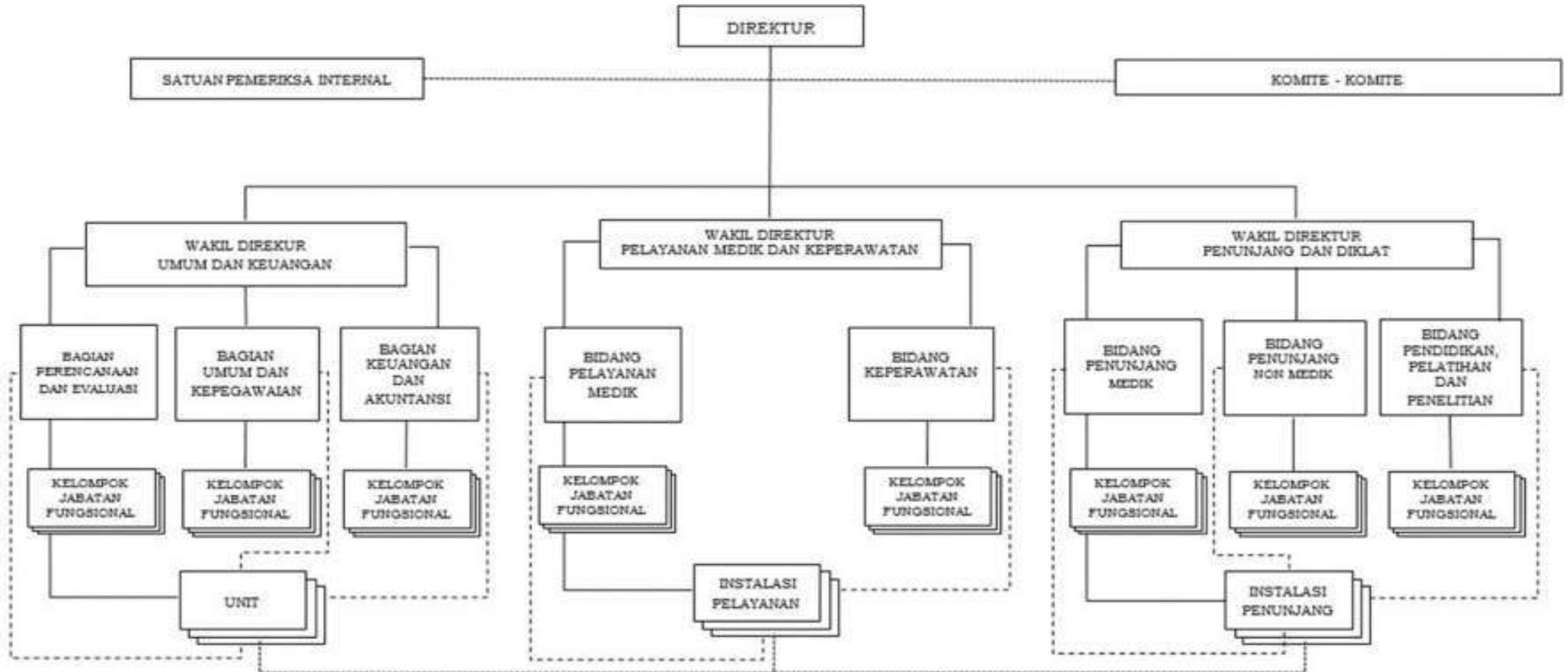
Susunan Organisasi RSJD Atma Husada Mahakam terdiri dari Direktur, membawakan:

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan:
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Bagian Keuangan dan Akuntansi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan Medis membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Keperawatan membawakan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian membawahkan:
 - a. Bidang Penunjang Medis membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Penunjang Non Medis membawakan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian membawakan Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja RSJD Atma Husada Mahakam dapat dibantu unit non struktural, terdiri dari:

1. Dewan Pengawas;
2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
3. Komite;
4. Instalasi;
5. Unit; dan
6. Kelompok Staf Medis (KSM).

STRUKTUR ORGANISASI RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Keterangan :

Instalasi Umum:

1. Instalasi Perlengkapan Sarana Dan Prasarana
2. Instalasi Humas Dan Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Instalasi Pelayanan:

1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Pemulihan Ketergantungan Napza
6. Instalasi Rawat Intensif
7. Instalasi Rehabilitasi Medik
8. Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat

Instalasi Penunjang:

1. Instalasi Farmasi
2. Instalasi Gizi
3. Instalasi Laboratorium
4. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
5. Instalasi Kesehatan Lingkungan Dan Limbah
6. Instalasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
7. Instalasi Radiologi
8. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
9. Instalasi Informasi Teknologi Dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Simrs)
10. Instalasi Elektromedik
11. Instalasi Rekam Medis
12. Instalasi Sterilisasi Dan Laundry

2.3.1 Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit, dengan menetapkan kebijakan, membina, mengawasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan rumah sakit Untuk melaksanakan Direktur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna dan profesional berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah;
2. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis sebagai unit organisasi bersifat non kekhususan yang memberikan pelayanan kesehatan non jiwa perorangan secara paripurna dan profesional berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis umum dan keuangan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penunjang dan diklat;
6. Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penandatanganan surat perintah membayar dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
8. Pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Penerapan pola pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan keuangan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran;
11. Penetapan pejabat lainnya dalam unit yang pimpinannya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
12. Pengusulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Pelaksanaan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Pelaksanaan pengembangan kegiatan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan;

15. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
16. Pelaksanaan kerja sama atau jejaring dengan rumah sakit lain dan/atau institusi kesehatan dalam lingkup pengembangan serta adopsi teknologi kesehatan atau kedokteran;
17. Penyampaian laporan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan; dan
18. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Direktur mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSJD AHM berdasarkan rencana strategis UOBK RSJD AHM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mendelegasikan tugas Kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Penunjang dan Diklat dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana;
6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi seluruh unit kerja di lingkungan rumah sakit UOBK RSJD AHM;
7. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur Penunjang dan Diklat dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan, berdasarkan ketentuan perundangan agar berjalan sesuai rencana strategis rumah sakit;
8. Mengkoordinasi kebijakan teknis terhadap Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Komite, Instalasi dan/atau Unit untuk kelancaran tugas;
9. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.2 Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi rumah sakit serta instalasi di bawah koordinasinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan bagian perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi;
2. Pengoordinasian, pengembangan, dan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bagian umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi;
5. Pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan pengendalian bagian perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi dengan instalasi dan/atau instansi lainnya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi; dan
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSJD AHM urusan umum dan keuangan berdasarkan rencana strategis UOBK RSJD AHM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada bagian perencanaan dan evaluasi kinerja rumah sakit, umum dan kepegawaian, keuangan dan akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan agar sesuai dengan kegiatan.
7. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan administrasi umum dan keuangan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja.
8. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
9. Mengkoordinasi bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten / Kota , Kementerian, Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan rumah sakit.
10. Melakukan pengawasan dalam terjaminnya kepatuhan terhadap terlaksananya undang-undang peraturan, kebijakan, panduan/standar prosedur yang berlaku di UOBK RSJD AHM;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.3.3 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja program Ranhir renstra rumah sakit dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan rencana program pelayanan berdasarkan usulan bidang pelayanan medik, bidang keperawatan, dan untuk bahan perumusan rencana kerja;
2. Penyusunan pelaksanaan program pelayanan medik berdasarkan program dan kebijakan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif;
3. Pelaksanaan koordinasi tugas bidang pelayanan medik dan keperawatan untuk sinkronisasi tugas;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas bidang pelayanan medik dan bidang keperawatan, untuk sinkronisasi tugas;
5. Pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kegiatan;
7. Pengendalian kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) agar berjalan sesuai rencana;
8. Pengendalian pelaksanaan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
10. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bidang pelayanan medik dan bidang pelayanan keperawatan serta instalasi pelayanan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;

11. Pelaksanaan koordinasi terhadap tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
12. Peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program;
13. Pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
14. Pengkoordinasian tugas, wewenang dan tanggung jawab instalasi terhadap bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan dan bidang kemitraan dan pemasaran; dan
15. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSJD AHM urusan pelayanan medik dan keperawatan berdasarkan rencana strategis UOBK RSJD AHM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan urusan Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan urusan pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang kemitraan dan pemasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
6. Mengendalikan pelaksana program dan kegiatan meliputi bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan bidang kemitraan dan pemasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kegiatan;

7. Mengendalikan pelaksanaan mutu pelayanan medik, keperawatan dan kemitraan dan pemasaran berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
8. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
9. Mengkoordinasi bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan rumah sakit.
10. Merumuskan Upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program.
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.4 Wakil Direktur Penunjang dan Diklat mempunyai fungsi:

Wakil Direktur Direkur Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas menyusun rencana kerja program ranhir renstra rumah sakit dalam pelaksanaan kegiatan penunjang, dan Diklat dan Penelitian rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan rencana program pelayanan berdasarkan usulan bidang penunjang dan Diklat, Penelitian untuk bahan perumusan rencana kerja;
2. Penyusunan pelaksanaan program penunjang dan diklat, Penelitian, Penelitian berdasarkan program dan kebijakan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif;
3. Pelaksanaan koordinasi tugas bidang penunjang, dan Diklat, Penelitian untuk sinkronisasi tugas;
4. Pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
5. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kegiatan;

6. Pengendalian tugas penunjang, dan Diklat, Penelitian berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit;
8. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bidang penunjang, diklat Penelitian, informasi dan teknologi serta instalasi penunjang untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
9. Pelaksanaan koordinasi terhadap tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja lainnya di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
10. Peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program;
11. Pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
12. Pelaksanaan koordinasi terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab instalasi terhadap bidang pelayanan medik, bidang keperawatan dan kemitraan serta penunjang, diklat Penelitian, informasi dan teknologi pemasaran; dan
13. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Wakil Direktur penunjang dan Diklat, Penelitian mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan UOBK RSJD AHM urusan penunjang dan diklat, Penelitian berdasarkan rencana strategis RSJD AHM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang penunjang, Diklat, Penelitian untuk sinkronisasi tugas;
6. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada bidang penunjang dan Diklat, Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
7. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis Information Technology (IT);
8. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi bidang penunjang dan Diklat, Penelitian berdasarkan peraturan perundangan-undangan agar sesuai dengan kegiatan;
9. Mengendalikan pelaksanaan mutu penunjang dan Diklat, Penelitian berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
10. Mengkoordinasi bahan kerjasama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, Pihak Ketiga berdasarkan tugas serta peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.5 Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa, perlengkapan dan sarana prasarana di rumah sakit.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program bagian perencanaan dan evaluasi untuk bahan perumusan rencana kerja unit;

2. Penyusunan perencanaan pelaksanaan program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Pendistribusian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
4. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai rencana;
5. Pelaksanaan peningkatan mutu kegiatan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kinerja;
6. Pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit;
8. Pelaksanaan evaluasi dan perumusan kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
9. Pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai;
10. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bagian perencanaan dan evaluasi;
11. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bagian perencanaan dan evaluasi berdasarkan program kerja RSJD Atma Husada Mahakam serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bagian perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Ranhir renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LKjIP), berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program kerja Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi;
5. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA dan LAKIP berdasarkan usulan dari bidang-bidang untuk mendukung kelancaran tugas-tugas RSJD Atma Husada Mahakam.
6. Menyiapkan bahan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal RSJD Atma Husada Mahakam sesuai peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
7. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian perencanaan dan evaluasi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian perencanaan dan evaluasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja RSJD Atma Husada Mahakam;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.3.6 Bagian Keuangan dan Akuntansi

Bagian Keuangan dan Akuntansi melaksanakan tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan penyimpanan uang, pembuatan dokumen, pembuatan daftar gaji, bendahara, casemix dan penyusunan klaim pasien di rumah sakit

Bagian Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program bagian keuangan untuk bahan perumusan rencana kerja unit;
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
4. Pengendalian pelaksanaan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang - undangan agar sesuai rencana;
5. Pelaksanaan peningkatan mutu kegiatan bagian keuangan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
6. Pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
8. Pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai;
9. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bagian keuangan dan akuntansi;
10. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bagian keuangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
11. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bagian keuangan dan akuntansi berdasarkan program kerja UOBK RSJD AHM serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai rencana;
5. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program kegiatan berdasarkan realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan;
6. Mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
7. Memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan, administrasi keuangan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik;
8. Memproses administrasi dokumen Uang Persediaan (UP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan berkas pendukung lainnya sesuai dengan prosedur pencairan anggaran untuk kelancaran proses kegiatan, administrasi dokumen Ganti Uang (GU) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), berikut berkas dan kuitansi pendukung lainnya sesuai dengan prosedur pencairan anggaran untuk kelancaran proses kegiatan, administrasi dokumen Tambahan Uang Persediaan (TUP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan berkas kwitansi pendukung lainnya sesuai dengan prosedur pencairan anggaran untuk kelancaran proses kegiatan, administrasi dokumen Langsung (LS) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dan berkas kwitansi pendukung lainnya sesuai dengan prosedur pencairan anggaran untuk kelancaran proses kegiatan, rencana Belanja Tidak Langsung (BTL) sesuai dengan prosedur pencairan anggaran untuk kelancaran proses kegiatan, usulan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai dengan prosedur pencairan anggaran untuk kelancaran proses kegiatan;
9. Memeriksa bukti potong pajak sesuai dengan ketentuan agar dapat dipertanggungjawabkan;

10. Memeriksa laporan keuangan bulanan/semester/tahunan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran berdasarkan proses akuntansi agar dapat dipertanggungjawabkan;
11. Menyiapkan data-data/dokumen surat pertanggungjawaban pengeluaran keuangan guna kelancaran audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Irjen Kemendagri maupun Inspektorat;
12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.7 Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan umum, kepegawaian, kehumasan pelayanan informasi, kemitraan, pemasaran dan pengaduan masyarakat dan keamanan di rumah sakit.

Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas nya, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program bagian umum dan kepegawaian untuk bahan perumusan rencana kerja unit;
2. penyusunan rencana pelaksanaan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
4. pengendalian pelaksanaan program kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai rencana;
5. pelaksanaan peningkatan mutu kegiatan bagian umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;

6. pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
7. mengkoordinasikan peningkatan mutu kepada masing-masing bidang, bagian dan instalasi terkait Akreditasi Rumah Sakit, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi dan standar mutu lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian, serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit;
9. pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
10. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bagian umum dan kepegawaian;
11. pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai;
12. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja UOBK RSJD AHM serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyusun rencana anggaran untuk pemenuhan kegiatan umum dan kepegawaian;
5. memimpin seluruh sumber daya di lingkungan bagian umum dan kepegawaian agar tujuan dan sasaran dapat tercapai;
6. mengatur urusan administrasi umum, dan informasi, perlengkapan

7. melakukan pengawasan, penggunaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit;
8. membuat laporan berkala mengenai hasil kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diserahkan ke atasan langsung;
9. mengatur pengusulan kegiatan di lingkungan bagian umum dan kepegawaian berupa izin, cuti, rotasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta penilaian sasaran kinerja pegawai;
10. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Infomasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.3.8 Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi instalasi pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, pemulihan ketergantungan NAPZA, rehabilitasi medik, rekam medik, promosi kesehatan rumah sakit, dan non kekhususan lainnya di rumah sakit.

Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program bidang pelayanan medik untuk bahan perumusan rencana kerja unit;
2. penyusunan rencana pelaksanaan program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. pelaksanaan tugas pelayanan medik untuk sinkronisasi tugas;

4. pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
5. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar sesuai rencana;
6. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan medik pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, NAPZA, rehabilitasi medik, dan kesehatan jiwa masyarakat;
7. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik berdasarkan standar pelayanan minimal;
8. pelaksanaan koordinasi tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi;
9. pelaksanaan koordinasi bahan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rumah sakit.
10. pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
11. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pelayanan medik;
12. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pelayanan Medik mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pelayanan medik berdasarkan program kerja RSJD Atma Husada Mahakam serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;

5. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
6. menyiapkan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan medik rawat jalan;
7. menyiapkan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan di instalasi-instalasi dibawahnya;
8. menyiapkan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat rumah sakit;
9. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.9 Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

Bidang Keperawatan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan keperawatan di rumah sakit.

Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program bidang pelayanan keperawatan untuk bahan perumusan rencana kerja unit;
2. penyusunan rencana pelaksanaan program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. pelaksanaan tugas sarana dan tenaga keperawatan, mutu asuhan keperawatan dan penelitian pengembangan dan instalasi pelayanan untuk sinkronisasi tugas;
4. pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;

5. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana;
6. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di seluruh ruang perawatan pada instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi kesehatan dan keselamatan kerja dan instalasi radiologi;
7. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di seluruh ruang perawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai rencana;
8. pelaksanaan koordinasi bahan peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
9. pelaksanaan koordinasi terhadap tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
10. pelaksanaan koordinasi bahan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
11. pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bidang pelayanan keperawatan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
12. pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
13. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.
14. Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Keperawatan mempunyai uraian tugas:
15. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang keperawatan berdasarkan program kerja RSJD Atma Husada Mahakam serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
16. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang keperawatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

17. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
18. melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
19. menyiapkan pengumpulan bahan dan pengelolaan sarana dan tenaga keperawatan untuk kebutuhan pelayanan keperawatan di ruang perawatan rumah sakit;
20. menyiapkan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan rumah sakit;
21. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
22. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
23. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
24. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
25. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.10 Bidang Penunjang Medik

Bidang Penunjang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi instalasi farmasi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi sterilisasi dan *laundry*.

Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Diklat.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program bidang penunjang Medik untuk bahan perumusan rencana kerja instalasi;
2. penyusunan rencana pelaksanaan program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;

3. pelaksanaan tugas penunjang medik untuk sinkronisasi tugas;
4. pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
5. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana;
6. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan medik pada instalasi instalasi farmasi, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi sterilisasi dan laundry;
7. pelaksanaan peningkatan mutu penunjang medik berdasarkan standar pelayanan minimal;
8. pelaksanaan koordinasi tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi;
9. pelaksanaan koordinasi bahan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
10. pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
11. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Penunjang medik mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penunjang medik berdasarkan program kerja UOBK RSJD AHM serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. menyiapkan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan dan penunjang medis rawat jalan;

6. menyiapkan pengumpulan bahan pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan dan penunjang medik rawat inap;
7. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu Instalasi di bawah koordinasi bidang penunjang;
8. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.3.11 Bidang Penunjang Non Medik

Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengawasi dan mengevaluasi instalasi gizi, instalasi kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Bidang Penunjang Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Diklat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penunjang Non Medik menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program bidang penunjang Non Medik untuk bahan perumusan rencana kerja instalasi;
2. penyusunan rencana pelaksanaan program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. pelaksanaan tugas penunjang Non Medik untuk sinkronisasi tugas;
4. pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
5. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana;

6. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan medik pada instalasi, instalasi gizi, instalasi kesehatan dan keselamatan kerja, instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
7. pelaksanaan peningkatan mutu penunjang, Mutu dan diklat berdasarkan standar pelayanan minimal;
8. pelaksanaan koordinasi tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi;
9. pelaksanaan koordinasi bahan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
10. pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
11. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang, Mutu dan Diklat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Bidang Penunjang Non Medik mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penunjang Non Medik berdasarkan program kerja UOBK RSJD AHM serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. menyiapkan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan Penunjang non Medik;
6. menyiapkan pengumpulan bahan pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan Penunjang non Medik;

7. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
8. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu Instalasi di bawah koordinasi bidang penunjang non medik;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.3.12 Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Bidang Diklat dan Penelitian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengawasi, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan, pelatihan dan Penelitian di rumah sakit.

Bidang Diklat dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang, Mutu dan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Diklat dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan program bidang diklat dan Penelitian untuk bahan perumusan rencana kerja unit;
2. penyusunan rencana pelaksanaan program berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. pelaksanaan tugas diklat dan Penelitian untuk sinkronisasi tugas;
4. pelaksanaan distribusi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pekerjaan dapat terlaksana;
5. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai rencana;
6. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan diklat dan Penelitian seluruh bidang dan bagian serta instalasi;

7. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pelayanan diklat dan Penelitian di seluruh bidang, bagian dan instalasi berdasarkan peraturan perundang-undangan agar sesuai rencana;
8. pelaksanaan koordinasi bahan peningkatan mutu diklat dan Penelitian berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
9. pelaksanaan koordinasi terhadap tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja di lingkungan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi tugas;
10. pelaksanaan koordinasi bahan kerja sama dengan Instansi terkait, Kabupaten/Kota, Kementerian serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rumah sakit;
11. pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bidang diklat dan Penelitian untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
12. pelaksanaan pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
13. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Diklat dan Penelitian mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang diklat dan Penelitian berdasarkan program kerja UOBK RSJD Atma Husada Mahakam serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
5. menyiapkan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dan Penelitian ;

6. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu dan Diklat dan Penelitian Rumah Sakit;
7. mengarahkan implementasi manajemen pemasaran, manajemen mutu, manajemen logistik dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis *Information Technology* (IT);
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja UOBK RSJD AHM; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia sebanyak 435 orang terdiri dari tenaga ASN dan Non ASN. Dari jumlah tersebut sebanyak 7 orang merupakan Pejabat Struktural sedangkan sisanya merupakan tenaga fungsional tertentu dan tenaga fungsional pelaksana. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, secara jumlah pegawai tersebut sudah cukup memadai tetapi dari segi kualitas belum memenuhi terutama jenis ketenagaan dan kompetensinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, ada 7 (tujuh) jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Selain tenaga Kesehatan di RS sangat dibutuhkan tenaga Akuntansi, Keuangan, hukum, administrasi, Informatika, statistik, dan lain-lain. Rumah sakit merupakan organisasi yang padat modal, padat profesi dan padat masalah.

Berdasarkan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja, RS Atma Husada Mahakam sebagai RS Pemerintah, dimana sebagian pegawai adalah pegawai Non PNS maka akan mengalami kendala dalam memberikan pelayanan apabila seluruh pegawai RS yang ada sekarang harus PNS dan P3K. Kenyataan di lapangan bahwa Sebagian merupakan non PNS dan proses rekrutmen dengan kuota yang terbatas.

Dalam rangka pemenuhan persyaratan Rumah Sakit Khusus Jiwa kelas A sebagai RS pengampu maka RS harus menyiapkan tenaga Kesehatan secara jenis dan jumlah yang cukup beserta tenaga Dokter Sub spesialis Kedokteran Jiwa dan dokter spesialis lainnya. Pada saat ini RS telah memiliki 6 Dokter Spesialis Jiwa dan 1 Dokter Sub Spesialis Jiwa yaitu untuk Anak dan remaja, Dengan kondisi yang sekarang masih kurang dari segi jenis Sub Spesialis karena minimal harus 2 (dua) orang. Dilihat dari status kepegawaian Dokter spesialis maka yang menjadi dokter organik adalah hanya 3 (tiga) sedang sisanya merupakan dokter mitra. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apabila keberadaan dokter organik tidak dipenuhi. Selain itu pemenuhan dokter spesialis lain seperti anak, anestesi, Patologi Klinik dll masih bermitra dengan RS lain sehingga diperlukan upaya-upaya untuk pemenuhannya..

2.4.2 Data SDM RSJD Atma Husada Mahakam

Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dapat dilihat pada tabel sebagai berikut yang datanya bersumber dari bagian Umum dan Kepegawaian **per Januari 2023**.

Tabel 2. 1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pendidikan	Pria	Wanita	Sub Total
Tenaga ASN				
1	SD	2	3	5
2	SMP	0	0	0
3	SMA	10	6	16
4	D1/D3	23	45	68
5	S1/D4	25	28	53
6	S2	2	18	20
7	S3	0	0	0
Jumlah		62	100	162
Tenaga Non ASN Termasuk MOU				
1	SD	0	0	0
2	SMP	1	2	3
3	SMA	65	22	87
4	D1/D3	42	48	90
5	S1/D4	34	47	81
6	S2	7	5	12
7	S3	0	0	0

No.	Jenis Pendidikan	Pria	Wanita	Sub Total
Jumlah		149	124	273
Total Keseluruhan				438

(sumber dari Bagian Umum & Kepegawaian Januari Tahun 2023)

Tabel 2. 2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil				
1	I	3	0	3
2	II	13	19	32
3	III	43	65	107
4	IV	6	15	20
Jumlah Total		65	99	164

(sumber dari Bagian Umum & Kepegawaian Januari Tahun 2023)

Tabel 2. 3
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2023

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Sub Total
1	Madya	3	8	11
2	Muda	7	12	19
3	Pertama	9	12	21
4	Penyelia	4	14	18
5	Mahir	12	21	32
6	Terampil	7	9	16
7	Non Fungsional	27	20	47
Jumlah Total		69	95	164

(sumber dari Bagian Umum & Kepegawaian Januari Tahun 2023)

Tabel 2. 4
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Profesi Tahun 2023

No.	Jenis Pendidikan	L	P	Sub Total
Pegawai Negeri Sipil				
1	Dokter Ahli Madya	1	2	3
2	Dokter Gigi Ahli Madya		1	1
3	Dokter Ahli Muda		5	5
4	Perawat Ahli Madya	2	4	6
5	Perawat Ahli Muda	6	7	13
6	Perawat Ahi Pertama	6	9	15
7	Perawat Mahir	10	11	21

No.	Jenis Pendidikan	L	P	Sub Total
8	Perawat Penyelia	3	11	14
9	Perawat terampil	5	2	7
10	Psikologi Klinis Madya		1	1
11	Sanitarian Ahli Muda	1		1
12	Apoteker Ahli Pertama	1	1	2
13	Fisioterapis Ahli Pertama	1		1
14	Penata Anestesi Ahli Pertama	1		1
15	Psikologi Klinis Ahli Pertama		2	2
16	Fisioterapis Penyelia	1		1
17	Perawat Gigi Penyelia	0	1	1
18	Pranata Labkes Penyelia		1	1
19	Nutrisisionis Penyelia		1	1
20	Asisten Apoteker Mahir		2	2
21	Fisioterapis Mahir	1		1
22	Nutrisisionis Mahir		1	1
23	Teknisi Elektromedik Mahir		2	2
24	Sanitarian Mahir		1	1
25	Perekam Medis Mahir	1	1	2
26	Pranata Labkes Mahir		1	1
27	Okupasi Terapis Mahir		1	1
28	Asisten Penata Anestesi Terampil	1		1
29	Nutrisisionis terampil		2	2
30	Okupasi Terapis terampil		1	1
31	Pranata Labkes Ahli Pertama		1	1
32	Pranata Labkes Terampil		1	1
33	Radiografer Terampil	1		1
34	Sanitarian Terampil		1	1
35	Terapis Wicara Terampil		1	1
36	Non Fungsional	27	20	47
Jumlah		69	93	164
Tenaga Kontrak/MOU				
1	Kedokteran Jiwa Sub Spesialis Anak & Remaja	1	0	1
2	Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	3	0	3
3	Patologi Klinik	1		1
4	Radiologi	1		1

No.	Jenis Pendidikan	L	P	Sub Total
5	Spesialis Syaraf		1	1
6	Rehabilitasi Medis	1		1
7	Dokter Spesialis Anak		1	1
8	Dokter Spesialis Anestesiologi (Sp.An)		1	1
9	Dokter Umum	5	7	12
10	Perawat Keahlian	10	14	24
11	Perawat Keterampilan	33	41	74
12	Apoteker Klinik	0	1	1
13	Apoteker	0	5	5
14	Asisten Apoteker	2	4	6
15	Pranata Labkes	3	3	6
16	Radiografer	1	0	1
17	Perekam Medik	2	0	2
18	Nutrisisionis	0	1	1
19	Non Fungsional	86	45	131
Jumlah		149	124	274
Total Keseluruhan PNS + Tenaga Kontrak /MOU				438

(sumber dari Bagian Umum & Kepegawaian Januari Tahun 2023)

2.4.3 Analisis SDM RSJD Atma Husada Mahakam

Untuk pengembangan layanan dan standar rumah sakit khusus kelas A perlu tenaga medis yang terdiri dari :

1. Dokter sub spesialis kedokteran jiwa
2. Dokter spesialis Radiologi
3. Dokter spesialis Patologi Klinis
4. Dokter spesialis Rehab Medik
5. Dokter spesialis Anak
6. Dokter spesialis Anestesi
7. Dokter spesialis Syaraf
8. Dan beberapa dokter spesialis lainnya

Disamping itu untuk peningkatan kualitas SDM yang ada perlu peningkatan dan pengembangan keterampilan dan kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan

2.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSJD Atma Husada Mahakam dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, peralatan medis, Peralatan keperawatan, peralatan CCSD dan laundry, peralatan gizi, peralatan Inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga sarana dan prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSJD Atma Husada Mahakam sesuai data per Januari 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

2.5.1 Prasarana

2.5.1.1 Luas Tanah

- a. Luas Tanah Keseluruhan : 21.538 m2
(belum termasuk tanah hibah dari kanwil kesehatan)
- b. Luas Tanah Tanpa Bangunan : 8.387 m2
(halaman, parkir,taman,parit,lapangan,dll)
- c. Luas Tanah Bangunan : 13.151 m2

Tabel 2. 5
Luas Bangunan Tahun 2023

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS	SATUAN	TAHUN PEMBUATAN	RENOVASI	KONDISI			KET
						B	RR	RB	
A	Kantor, Penunjang								
1	Adm TU 2 Lantai								
	Lantai 1 & 2 Adm. Dir.Poli	1,068	m2	1934	2009	V			Renov
	Lantai 1 & 2 (Psikolog, Penunjang)	308	m2	1934	2010	V			Renov
2	Aula Serbaguna	397	m2	1998		V			
3	Mushola	69	m2	1970		V			
4	IPSRS	157	m2	1970		V			
5	Kamar Mayat	32	m2	1985		V			
6	Gardu Listrik/Gedung BBM	7	m2	1990		V			
7	Incinerator/Genset Lama	33	m2	2000	2009	V			Renov
8	Pos Satpam Depan	-	m2	2011	2022	V			Bongkar

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS	SATUAN	TAHUN PEMBUATAN	RENOVASI	KONDISI			KET
						B	RR	RB	
9	B3/Kesling	45	m2	2005		V			
10	Aula Gembira/Belakang	259	m2	1980			V		
11	Ruang Klinik Eksekutif	265	m2	1984	2018	V			Renov
12	Pencucian/Laundry	177	m2	1984			V		
13	Gudang Perlengkapan (eks dapur)	277	m2	1980			V		
14	Gudang Perlengkapan (Samping Londry)	158	m2	1984		V			
15	Selasar	697	m2	1980		V			
16	Klinik Alat Canggih	80	m2	2005	2018	V			Renov
17	Rumah Mesin air / 2015 = 6 m2	-	m2	2005					Bongkar
18	Tandon air ruangan = 11 bh *	66	m2	2000		V			
19	Tandon Air Induk *	50	m2	2000		V			
20	TPA / Tempat Sampah Domestik	6	m2	1985	2017				Renov
21	Lapangan Parkir Roda 4 Pegawai	612	m2			V			
22	Ipal	252	m2	2011	2017	V			Renov
23	Pos Satpam Belakang (Depan R.Dapur Gizi)	5	m2	2014		V			
24	Rumah Genset	66	m2	2010	2015	V			
25	Selasar Gedung Baru / Gedung Belibis, Punai, Rehap,Dapur	127	m2	2015		V			
26	Pos Satpam Tengah (Dekat Mushola)	9	m2	2018		V			Renov
27	Gedung Oksigen Generator	50	m2	2021		V			
28	Tenan 1-7 (Kilometer Pln Sendiri)	84	m2	2022		V			
	JUMLAH A	5,356							
B	Kantor, Penunjang								
1	Pergam	506	m2	1984	2020	V			Renov
2	Tiung/Laki-laki	505	m2	1983	2020	V			Renov
3	Enggang / Wanita	422	m2	1979		V			
4	Gudang Perlengkapan dan SIMRS	414	m2	1974		V			
5	Ruang Elang	547	m2		2019	V			
8	Pusat ADHD dan Gangguan Belajar	197	m2	1970	2017	V			Renov
9	JPK/Pembiayaan	168	m2	1970		V			Renov
10	Poli Fisioterapi	96	m2	1970	2016	V			Renov

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS	SATUAN	TAHUN PEMBUATAN	RENOVASI	KONDISI			KET
						B	RR	RB	
11	R. Tunggu Rawat Jalan dan taman bermain	72	m2	1970	2018	V			Renov
12	UPIP	265	m2	1970	2017	V			Renov
13	Radiologi dan CT Scan	149	m2	1970	2017	V			Renov
14	Gelatik	383	m2	2003		V			
15	IGD 2 Lantai	827	m2	2000	2011	V			Renov
16	Laboratorium, Gudang Farmasi, Klinik MCU	389	m2	1999	2018	V			
17	Poliklinik Rawat Jalan	738	m2	2005	2021	V			Renov
18	ICU	465	m2	2005	2020	V			Renov
19	Ruang Belibis	2,474	m2	2013	2021	V			Renov Atap
20	Ruang Punai	1,456	m2	2013	2022	V			Renov Atap
21	Rehabilitasi Psikososial	784	m2	2013	2022	V			Renov Atap
22	Instalasi Gizi	560	m2	2013		V			
	JUMLAH B	11,378							

(sumber dari IPSRS RSJD Atma Husada Mahakam Januari Tahun 2023)

2.5.1.2 Listrik

1. Daya Listrik PLN yang tersedia

: 3 x 197.000 VA
7 x 900 VA
- Total

: 597.300 VA
2. Genset yang tersedia

a. Caterpillar Assembly Olimpian : 150 kVA
b. Caterpillar Assembly Olimpian : 635 kVA
3. Sumber Air Bersih

a. PDAM : 3 Inlet dengan 13 lokasi reservoir

Tabel 2. 6
Instalasi Air Bersih Tahun 2023

No	Lokasi Reservoir	Jumlah Reservoir	Kapasitas
1	Ground Tank R. Elang	1	8,38 m ³
2	Ground Tank R. Enggang	1	11,50 m ³
3	Ground Tank R. Laundry	1	12,96 m ³
4	Ground Tank R. Tiung	1	8,12 m ³

No	Lokasi Reservoir	Jumlah Reservoir	Kapasitas
5	Ground Tank R. Terapi Napza / IGD	1	4,50 m ³
6	Ground Tank R. Gelatik	1	15,97 m ³
7	Ground Tank R. Dapur	1	45 m ³
8	Ground Tank R. Punai	1	16,93 m ³
9	Ground Tank R. Pergam	1	13,70 m ³
10	Ground Tank R. Kantor (ADM)	1	13,99 m ³
11	Ground Tank R. Napza	1	18,61 m ³
12	Ground Tank Bak Induk	1	125 m ³
13	Ground Tank R. Ex. Perlengkapan	1	12,36 m ³
14	Tandon Air Fiber Terbagi di Beberapa Gedung kapasitas @1,2 m ³	42	50,4 m ³
15	Tandon Air Fiber Terbagi di Beberapa Gedung @2,2 m ³	8	17,6 m ³

b. Air tanah / Artesis : 1 titik

Tabel 2. 7
Air tanah / Artesis

No	Lokasi Reservoir	Jumlah Reservoir
1	Sampling Parkiran Ambulance	1 Titik

4. Pengolahan limbah padat

a. Incinerator : tidak dioperasikan

5. Pengolahan limbah cair/ IPAL dengan sistem

Bioreaktor dengan debit output sebesar : 30 m3

6. Sarana komunikasi Telepon / PABX : 82 extension number

a. Sentral : 1 Unit

b. Sub Sentral : 7 Unit

- 1) Gedung Rehabilitasi
- 2) Ruang Laboratorium
- 3) Ruang Tiung
- 4) Ruang Perlengkapan / SIMRS
- 5) JPK (Pos Satpam Tengah)
- 6) Gedung TU
- 7) Gedung IGD

- 7. Sistem pendingin ruangan / AC
 - a. AC Sentral : Tidak Ada
 - b. Standing AC : Aula 4 buah, IGD 2 buah
 - c. Split AC : 244 buah (Data Per Januari 2023)
- 8. Sistem pengamanan Hydrant, Fire Detector dan Alarm :
 - a. Hydrant Tanam : 1 titik
 - b. Fire Detector : 9 buah
 - c. Alarm : 3 buah
- 9. CSSD dan Laundry
 - a. Laundry :
 - 1) 2 Unit Mesin Cuci (Infeksius berkapasitas 60 Kg dan Non Infeksius berkapasitas 25 Kg)
 - 2) 1 Unit Mesin Pengering berkapasitas 60 Kg
 - 3) 1 Unit Setrika Uap
 - 4) 1 Unit Mesin Press Linen
 - b. CSSD : 1 Unit CSSD dan 1 Unit Washer
- 10. Pneumatic Tube (Oxygen Central) 2 Unit dengan 20 titik
- 11. Mesin Reverse Osmosis (RO) : 3 Unit

2.5.2 Sarana

Beberapa sarana sebagai pendukung pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam kepada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

2.5.2.1 Kendaraan Dinas

Dalam hal ini kendaraan dinas yang dimiliki oleh RSJD Atma Husada Mahakam terdiri dari kendaraan operasional, ambulans, dan kendaraan jabatan baik roda empat maupun roda dua dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Kendaraan Dinas Jabatan Roda EmpatTahun 2023

No	Janis/Model Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Merek / Tipe	Fungsi	Kondisi
1	Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T	KT 1951 B	2022	Toyota	Mobil Jabatan	Baik
2	Fortuner 2.7 G AT	KT 1814 BZ	2006	Toyota	Mobil Jabatan	Baik
3	New Xpander Cross AT	KT 1353 BX	2022	Mitsubishi	Mobil Jabatan	Baik
4	New Avanza 1.5G MT	KT 1042 BZ	2012	Toyota	Mobil Jabatan	Baik

No	Janis/Model Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Merek / Tipe	Fungsi	Kondisi
5	New Avanza 1.3G M/T	KT 1057 B	2012	Toyota	Mobil Jabatan	Baik
6	Kijang Innova V AT GKPNKD	KT 74	2015	Toyota	Mobil Jabatan	Baik
7	Rush 1.5S (F700RE-GMMFJ)	KT 1438 BZ	2010	Toyota	Mobil Jabatan	Baik
8	New Avanza 1.5G MT	KT 1040 BZ	2012	Toyota	Mobil Jabatan	Baik

Tabel 2. 9
Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Tahun 2023

No	Janis/Model Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Merek/ Tipe	Fungsi	Kondisi
1	Avanza 1300 G (F601RM GMDFJJ)	KT 1334 BZ	2009	Toyota	Operasional	Baik
2	Rush 1.5 G MT	KT 1761 BZ	2011	Toyota	Operasional	Baik
3	Kijang Innova G	KT 1439 BZ	2010	Toyota	Operasional	Baik
4	New Avanza 1.5G MT	KT 1049 BZ	2012	Toyota	Operasional	Baik
5	Minibus	KT 7088 B	2022	Isuzu	Operasional	Baik

Tabel 2. 10
Kendaraan Ambulans Tahun 2023

No	Janis/Model Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Merek/ Tipe	Fungsi	Kondisi
1	Mitsubishi L300 Ambulance	KT 1493 BZ	2005	Mitsubishi	Transportasi	Baik
2	Mitsubishi L300 Ambulance Jenazah	KT 9970 B	2005	Mitsubishi	Transportasi	Baik
3	Strada CR2.8 A SC GLX 4x4 MT	KT 1626 BZ	2010	Mitsubishi	Transportasi	Baik
4	Luxio 1,5 xMT S402RG-ZMX FJJ	KT 9987 BZ	2018	Daihatsu	Gawat Darurat	Baik
5	Hyundai Starex 2,5 Diesel ambulance	KT. 9962 MZ	2018	Hyundai	Gawat Darurat	Baik
6	Suzuki	KT 9854 M	2022	Suzuki	Mobil Jenazah	Baik

Tabel 2. 11
Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua Tahun 2023

No	Janis/Model Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Fungsi	Kondisi
1	Yamaha 54 (CastWell AT)	KT 3656 BZ	2013	Kendaraan Jabatan	Baik
2	Yamaha 54 (CastWell AT)	KT 3661 MZ	2013	Kendaraan Jabatan	Baik
3	Yamaha 54 (CastWell AT)	KT 3675 BZ	2013	Kendaraan Jabatan	Baik
4	Yamaha Mio M3 CW SE 88	KT 6014 BZ	2016	Kendaraan Jabatan	Baik
5	New Honda Vario	KT 2597 BK	2018	Kendaraan Jabatan	Baik
6	New Honda Vario 150 ESP	KT 2596 BK	2018	Kendaraan Jabatan	Baik

Tabel 2. 12
Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Tahun 2023

No	Janis/Model Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Fungsi	Kondisi
1	Honda	KT 4429 MZ	2003	Operasional	Baik
2	Honda NF 125 TD	KT 3618 M	2009	Operasional	Baik
3	New Honda Vario 150 ESP	KT 2598 BK	2018	Operasional	Baik

2.5.2.2 Peralatan Medis Terkalibrasi

Tabel 2. 13
Peralatan Medis Terkalibrasi Tahun 2023

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
1	Autoclave	1	Baik
2	Centrifuge	2	Baik
3	Defibrillator	3	Baik
4	Diathermy	2	Baik
5	Dental Unit	1	Baik
6	Bed Site Monitor	2	Baik
7	ECT	1	Baik
8	EEG	2	Baik
9	EKG	4	Baik
10	Infra Red	6	Baik
11	Lampu Operasi	1	Baik

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
12	Lampu Tindakan	19	Baik
13	Lampu Uv	2	Baik
14	Micropipet	10	Baik
15	Microscope	1	Baik
16	Nebulizer	5	Baik
17	P.O.S.G	1	Baik
18	Kulkas / Refrigerator	10	Baik
19	Regulator Oksigen	32	Baik
20	Rotator	1	Baik
21	RTMS	4	Baik
22	Suction Pump	5	Baik
23	Sterillissator	3	Baik
24	Stimulator	3	Baik
25	Tensi Meter/ Sphygmomanometer Aneroid	24	Baik
26	Termometer	47	Baik
27	Treadmill	4	Baik
28	Skeler	1	Baik
29	Ultrasonic Therapy	1	Baik
30	Spektrofotometer	1	Baik
31	X-Ray	1	Baik
32	Tensi Meter/ Sphygmomanometer Digital	14	Baik
33	Usg	1	Baik
34	Pulse Oxymeter	14	Baik
35	Steam Sterilizer	1	Baik
36	Syringe Pump	3	Baik
37	Infuse Pump	3	Baik
38	Kimia Klinik	3	Baik
39	Hematologi Analyzer	2	Baik
40	Ventilator	3	Baik
41	Vital Sign Monitor	5	Baik
42	Blood Pressure Monitor	7	Baik
43	Flow Meter	2	Baik
44	Mobile X-Ray	2	Baik
45	Refrigerator Jenazah 6 Pintu	1	Baik
46	Timbangan Badan	28	Baik
47	Blood Gas Analyzer	1	Baik
48	Mesin Oksigen / Oxygen Concentrator	3	Baik

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
49	Isolation Stretcher	1	Baik
50	High Flow Nasal Cannula (Hfnc)	2	Baik
51	Imunologi Analyzer	1	Baik
52	Pcr	1	Baik

2.5.2.3 Peralatan Kantor

Peralatan kantor dalam hal ini berupa meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, kursi sofa, kursi tamu, komputer/laptop, printer, meja lobi, papan tulis, proyektor LCD, televisi besar, UPS, meja rapat, set alas tulis kantor, kursi lipat, meja kerja tukang, kalkulator, dan lain-lain yang tersebar baik di ruang manajemen maupun ruang pelayanan.

2.5.2.4 Peralatan Rumah Tangga

Peralatan rumah tangga dalam hal ini untuk menunjang kegiatan pelayanan yang tersebar pada unit-unit kerja, peralatan rumah tangga dimaksud diantaranya AC, Kulkas, Trolly Makanan, peralatan memasak, tabung gas, peralatan kebersihan, peralatan listrik dan lain-lain.

2.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.6.1 Jenis Pelayanan Kesehatan

Beberapa jenis pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Medik
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut
 - 1) Klinik Psikiatri Dewasa
 - 2) Klinik Psikiatri Lansia
 - 3) Klinik Psikiatri Anak dan Remaja
 - 4) Klinik Rehabilitasi Medik
 - 5) Klinik Elektromedik
 - 6) Klinik Dokter Spesialis
 - 7) Klinik Psikologi
 - 8) Klinik Selaras (Rehabilitasi Psikososial)
 - 9) Klinik VCT
 - 10) Klinik Kesehatan Gigi

- c. Pelayanan Rawat Inap Ketergantungan NAPZA
 - 1) Rawat Inap Rehabilitasi NAPZA
 - d. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut :
 - 1) Rawat Inap Jiwa
 - 2) Rawat inap intensif (ICU)
 - 3) Rawat Inap Organik
 - 4) Rawat Inap Geriatri
 - 5) Observasi Forensik
 - 6) UPIP (Unit Perawatan Instensif Psikiatri)
 - e. Pelayanan Fisioterapi
 - f. Pelayanan Tumbuh Kembang Anak
 - g. Pelayanan Ketergantungan NAPZA
 - 1) Klinik PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon
 - 2) Klinik IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor)
 - h. Pelayanan Gangguan Tidur
 - i. Pelayanan Klinik Berhenti Merokok dan Hipnoterapi
 - j. Pusat assesment Kesehatan jiwa dan pemeriksaan Kesehatan menyeluruh
 - k. Pelayanan alat penunjang canggih (CT-Scan, EEG, ECT bermonitor, neurofeedback, neuro perifer)
2. Pelayanan Penunjang Medik
- a. Instalasi Radiologi
 - b. Instalasi Rehabilitasi
 - c. Instalasi Farmasi
 - d. Instalasi Laboratorium
 - e. Instalasi Gizi
 - f. Instalasi Kesehatan Lingkungan
 - g. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
 - h. CSSD dan Laundry
3. Layanan Unggulan:
- Terdapat layanan unggulan pada RSJD Atma Husada Mahakam yaitu :
- a. Klinik Elektromedik
 - b. ICU / HCU
 - c. Pusat ADHD Dan Gangguan Belajar
 - d. Tes MMPI Digital
 - e. Medical Check Up (MCU)

- f. Konseling Adiksi
- g. Instalasi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
- h. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
- i. Klinik Selaras (Rehabilitasi Psikososial)
- j. Rehabilitasi NAPZA
- k. Oxygen Filling Station (Pengisian Oksigen dengan Oksigen Generator)

2.6.2 Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam

Kinerja pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Indikator Kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja beberapa tahun sebelumnya.

Kinerja pelayanan yang dimaksud adalah kinerja pelayanan yang merupakan indikator pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam selama beberapa tahun sebelumnya yang diantaranya terdiri dari BOR (*Bed Occupation Rate*), TOI (*Turn Over Interval*), BTO (*Bed Turn Over*), ALOS, NDR (*Net Death Rate*) dan GDR (*gross death rate*), Indikator Kinerja Organisasi juga bisa dilihat dari ukuran kepuasan pelanggan atau masyarakat yang dilayani dan beberapa indikator lainnya

2.6.2.1 Capaian Kinerja Non Medis

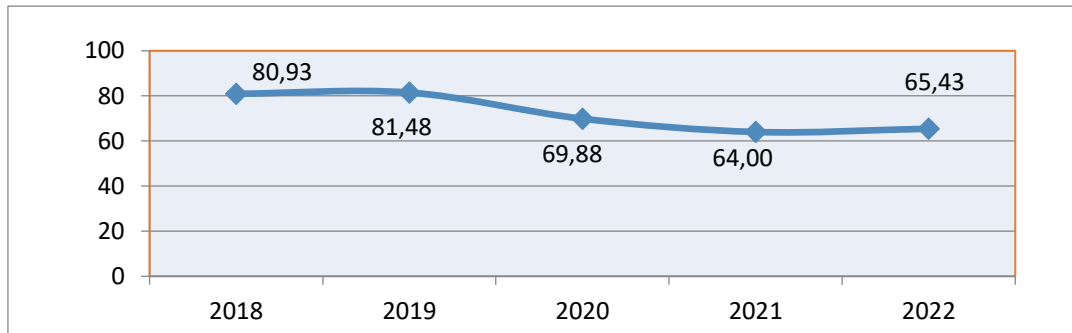
Tabel 2. 14

Capaian Kinerja Non Medis tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR DEPKES	TARGET RANHIR RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	BOR	85%	60% - 85%	60 % - 85%	60 % - 85%	60 % - 85%	60 % - 85%	60 % - 85%	60 % - 85%	80,93%	81,48%	69,91%	64,00%	66,70%	95,21	95,86	82,25	75,29	78,47
2	BTO	9	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	9,25	8,76	7,61	9,97	11,91	30,83	29,20	25,37	33,23	39,70
3	ALOS	43	35 hari	35 hari	35 hari	35 hari	35 hari	35 hari	35 hari	37,07	33,00	35,66	25,89	20,43	105,91	94,29	101,89	73,97	58,37
4	TOI	1	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	8,85	7,86	14,45	13,17	10,58	295,00	262,00	481,67	439,00	352,67
5	GDR	0,04	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	<0,045	1,71	1,74	5,52	59,63	4,41	380,00	386,67	1226,67	13251,11	980,00
6	NDR	0,02	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	1,71	1,74	4,83	37,99	3,09	684,00	696,00	1932,00	15196,00	1236,00

1. Grafik BOR

Grafik 2. 1
BOR Tahun 2018 - 2022



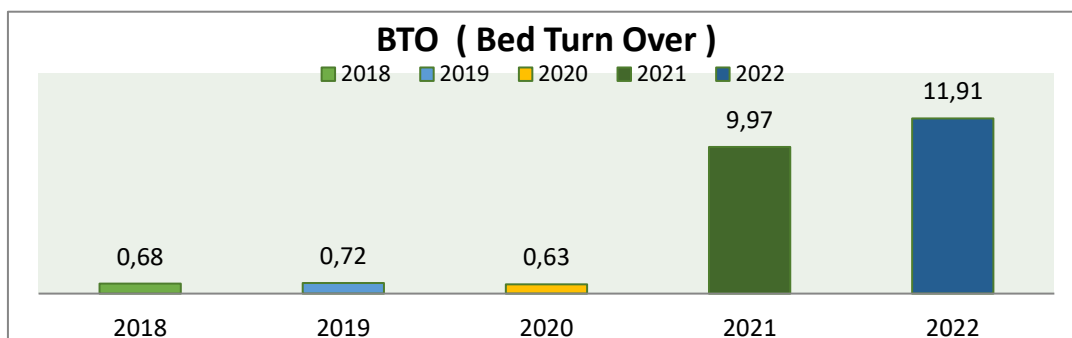
Analisa :

BOR (*Bed Occupancy Ratio* = Angka penggunaan tempat tidur) BOR menurut Huffman (1994) adalah “*the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration*”. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005). Jika kita lihat dari grafik BOR RSJD Atma Husada trend yang terjadi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan nilai BOR.

Pada tahun 2022 Nilai BOR RSJD Atma Husada Mahakam adalah 65,43%, hal ini menunjukkan bahwa gambaran dalam pemanfaatan tempat tidur dengan nilai parameter BOR yang ideal atau baik sesuai dengan nilai standar.

2. Grafik BTO

Grafik 2. 2
BTO (*Bed Turn Over*) tahun 2018 - 2022



Analisa :

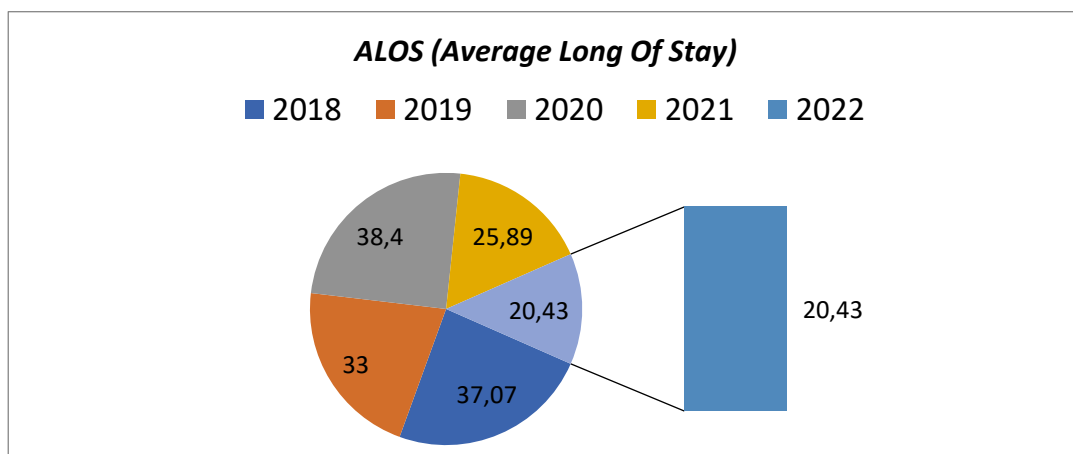
BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50

kali. Jika dilihat dari grafik diatas, pemakaian tempat tidur dalam satu tahun masih jarang bila dibandingkan dengan nilai ideal, hal ini terkait dengan hari rawat pasien gangguan jiwa yang cukup lama, sehingga frekuensi pemakaian tempat tidur pasien sangat jarang.

Makin dekat nilai BTO dengan titik sumbu (0,0), maka jumlah pasien per tempat tidur dalam periode tertentu akan semakin tinggi. Sebaliknya jika garis BTO makin menjauhi titik sumbu (0,0) maka nilai BTO akan semakin kecil. Pada tahun 2022 BTO RSJD Atma Husada Mahakam mencapai 11,91%. Meningkatnya nilai BTO mempertinggi nilai produktivitas pelayanan medis, karena semakin banyak pasien yang dirawat tanpa menambah tempat tidur atau memperluas ruangan rawat inap.

3. Grafik ALOS

Grafik 2. 3
ALOS (Average Long Of Stay) tahun 2018 - 20219



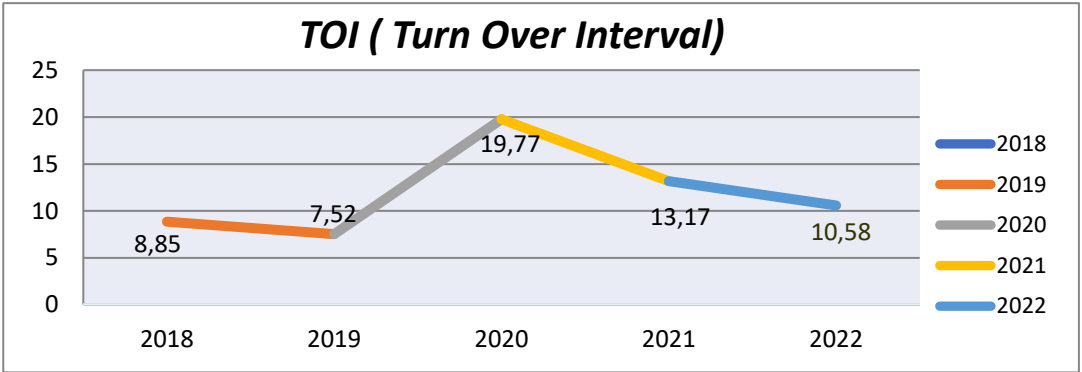
Analisa :

ALOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari, khusus untuk Rumah Sakit Jiwa ALOS yang ideal adalah 35 hari.

ALOS pada RSJD Atma Husada Mahakam cukup panjang karena kebanyakan pasien rawat inap tidak mempunyai keluarga atau keluarga tidak mau atau keluarga tidak mampu merawat pasien di rumah sehingga pasien banyak yang tertunda kepulangannya, inilah faktor yang mempengaruhi ALOS di RSJD Atma Husada Mahakam. Pada tahun 2022 Nilai ALOS menurun menjadi 20,43 hari di bandingkan tahun 2021 dengan nilai ALOS 25,89 hari.

4. Grafik TOI

Grafik 2. 4
TOI (Turn Over Interval) tahun 2018 - 2022



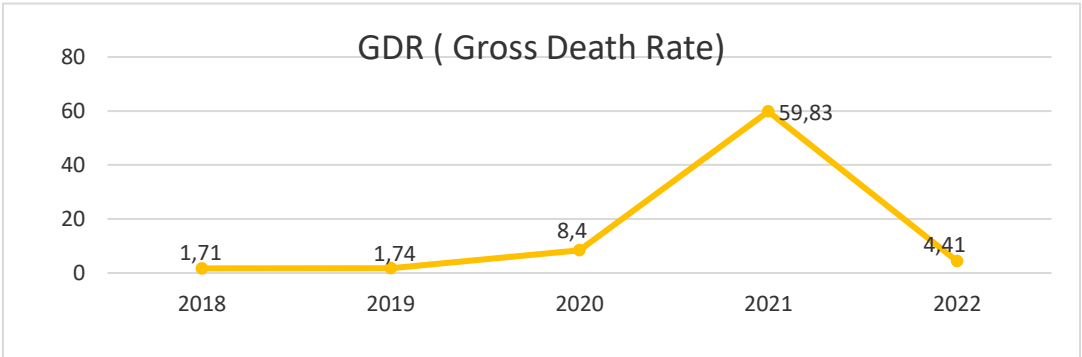
Analisa :

TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata jumlah hari tempat tidur tidak ditempati dari saat diisi hingga saat terisi berikutnya. Indikator ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya, tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1-3 hari. Semakin kecil angka TOI, berarti semakin singkat saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya. Hal ini bisa berarti tempat tidur bisa sangat produktif, apalagi jika TOI = 0 berarti tempat tidur tidak sempat kosong satu haripun dan segera digunakan lagi oleh pasien berikutnya.

Jika dilihat dari grafik TOI RSJD Atma Husada Mahakam di tahun 2022 maka ada tempat tidur yang sempat kosong selama 10,58 hari. Hal ini menunjukkan ada peningkatan dalam lama perawatan yang diberikan selama pasien dirawat di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda, dan itu juga berarti waktu tempat tidur kosong juga lama atau pasien masih jarang yang masuk pada RSJD Atma Husada Mahakam.

5. Grafik GDR

Grafik 2. 5
GDR (Gross Death Rate) tahun 2018 - 2022



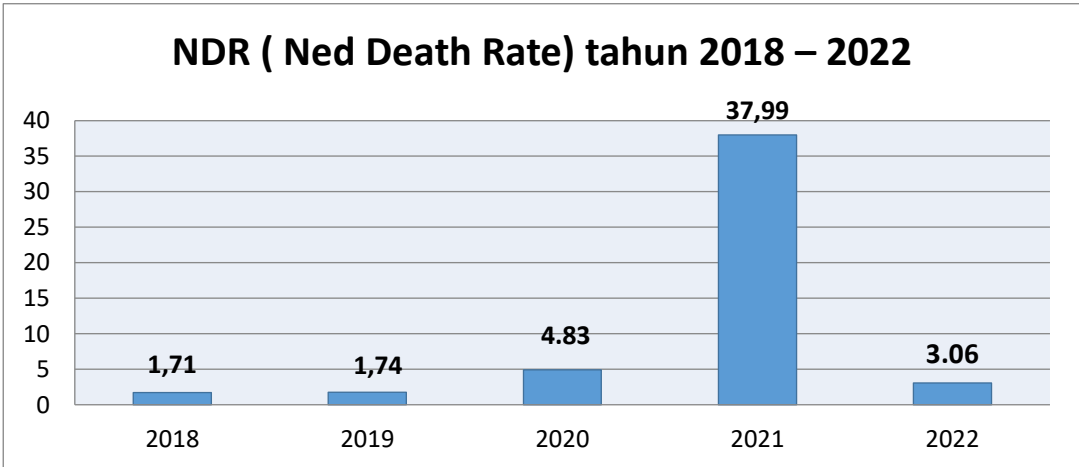
Analisa :

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Pada grafik diatas bisa kita lihat sejak tahun 2020 angka kematian pasien yang dirawat di RSJD Atma Husada Mahakam sekitar 8,4 per 1000 penderita yang keluar.

Namun pada tahun 2021 angka kematian pada RSJD Atma Husada Mahakam begitu meningkat sangat tinggi, hal ini disebabkan sejak tahun 2020 RSJD Atma Husada Mahakam ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan pandemi Covid-19 yang melayani baik pasien ODGJ maupun pasien umum. Tingkat kematian RSJD Atma Husada Mahakam pada tahun 2021 mencapai 59,83 per 1000 pasien yang keluar karena banyaknya pasien terpapar covid yang meninggal dunia karena pandemi tersebut. Dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,41 per 1000 pasien.

6. Grafik NDR

Grafik 2. 6
NDR (Ned Death Rate) tahun 2018 - 2022



Analisa :

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Pada tahun 2022 NDR RSJD Atma Husada Mahakam adalah 3,09 per 1000 penderita yang keluar.

2.7 Standar Pelayanan Minimal (Di Update bu Rahma)

Laporan Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Per Unit kerja di RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2022 Triwulan 4 (Oktober, November, Desember) dapat tergambar sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 15
Capaian SPM TW IV Tahun 2022

SPM Instalasi Rawat Jalan

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Ketersedian Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100,00%
2	Pemberian Pelayanan di Klinik Spesialis	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	Jam Buka Pelayanan Rawat Jalan	100%	100%	100%	100%	100,00%
4	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≤ 60 Menit	29,97	34,52	31,20	31,90
5	Kepuasan Pelanggan Pada Rawat Jalan	≥ 90%	92%	92%	94,00%	92,67%

Instalasi Rawat Inap

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	LENGKAP	100%	100%	100%	100%
3	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sebagai Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jam Visite Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	100%	100%	100%	100%	100%
5	Asuhan Keperawatan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemberi Pelayanan di Instalasi Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tidak ada pasien yang difiksasi > 24 jam	100%	99,70%	99,13 %	98,76%	99,20%
8	Lama Hari Perawatan Pasien Gangguan Jiwa	≤ 7 Minggu	3	2,90	3	2,97
9	Kepuasan Pelanggan di Pelayanan Rawat Inap	≥ 80 %	75,00%	71,06 %	75,69%	73,92%
10	Tidak adanya kejadian pasien yang cedera	100%	100%	100%	100,00%	100%
11	Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	100%	100%	100,00%	100%
12	Tidak adanya kejadian pasien melarikan diri	> 95 %	100%	100%	100,00%	100%
13	Tidak ada kematian disebabkan oleh sindroma neuroleptik maligna	> 95 %	100,00%	100%	100,00%	100%
14	Tidak adanya Kejadian Rawat Ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	> 95 %	73,73%	77,29 %	76,71%	75,91%
15	Tidak terjadinya pasien jatuh dari tempat tidur	100%	100%	100%	100,00%	100%
16	Tidak Terjadinya pasien jatuh di dalam kamar mandi	100%	100%	100%	100,00%	100%

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
17	Terselenggaranya pelayanan rawat inap bagi pasien tuberkulosis dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100,00%	100%
18	Ketertiban pencatatan dan pelaporan tuberkulosis dalam mendukung epidemiologi tuberkulosis	100%	100%	100%	100,00%	100%
19	Kejadian Pulang sebelum di nyatakan sembuh	≤ 5 %	0,59%	0,86%	1,52%	0,99%
20	Kematian Pasien > 48 jam	≤ 25/1000	0,00%	0%	0,00%	0%

Instalasi Rehabilitasi Psikososial

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi Pelayanan	Tersedia dokter spesialis kedokteran jiwa dan dokter umum, psikolog klinis, perawat bersertifikat dan pekerja sosial	100%	100%	100%	100,00%
2	Ketersediaan pelayanan	Minimal keterampilan dasar komunikasi, manajemen gejala, manajemen pengobatan, terapi kerja	100%	100%	100%	100,00%
3	Jam buka pelayanan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100,00%
4	Paket Pelayanan Rehabilitasi	>10 kali	24	24	24	24

Instalasi Laboratorium

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Waktu tunggu hasil pelayanan Lab. Patologi Klinik	≤ 120 menit	45,8	47,4	72,6	55,27
2	Tidak ada kejadian tertukar specimen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ekspertertisi hasil pemeriksaan lab	Dokter Spesial P.K	100	100	100	100,00
4	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab	100%	100%	100%	100%	100%

Instalasi Radiologi

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi Pelayanan Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi dan Radiografer sesuai dengan persyaratan kelas Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
2	Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Radiologi	Sesuai dengan kelas rumah sakit	100%	100%	100%	100%
3	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Thorax	≤ 3 Jam	0,6	1	0,58	0,73
4	Kerusakan Foto	≤ 2%	0%	0%	0%	0%
5	Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Label	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelaksanaan Ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	100%	0%	0%	0%	0%
7	Kepuasan Pelanggan	80	0%	0%	0%	0%

Klinik Fisioterapi

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medis	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pasien rehabilitasi medis yang drop out	< 50%	0%	11%	0%	3,67%

Instalasi Gizi

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	97%	89%	97%	94,53%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	< 20%	9,28%	13,42%	8,46%	10,39%
3	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100,00%

IGD

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi Pelayanan Gawat Darurat psikiatrik bersertifikat yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap Pelayanan IGD	5	100%	100%	100%	100%
3	Jam buka pelayanan IGD	24	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	100%	1,00	1,00	1,00	100%
5	Kematian pasien di IGD (< 8 jam)	100%	0%	0%	0%	0%
6	Kemampuan menangani life saving	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%

IPSRS

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Adanya penanggung jawab IPSRS	SK Direktur	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	50%	53%	53%	52%
3	Waktu tanggap kerusakan alat kurang dari 15 menit	≥ 80%	95,36%	96,23%	96,23%	96%
4	Ketepatan Pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan (sertifikasi peralatan/ sarana prasarana)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ketepatan waktu kalibrasi alat (Alat medis kedokteran)	100%	84,70%	86,37%	86,37%	86%
6	Alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	88,98%	91,67%	91,67%	91%

Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	SPM air limbah: pengelolaan limbah cair berbahaya sesuai dengan aturan	100	100%	100%	100%	100%
2	SPM air limbah: ketersediaan fasilitas dan peralatan rumah sakit untuk pengolahan air limbah atau limbah cair	100	100%	100%	100%	100%
3	Limbah padat: Ketersediaan fasilitas dan peralatan rumah sakit untuk	100	100%	100%	100%	100%
4	Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100	100%	100%	100%	100%
5	SPM Baku Mutu Air Limbah	jumlah sampel yang memenuhi standar baku mutu dibagi dengan jumlah seluruh sampel yang diuji Kali 100% = 100%	100%	100%	100%	100%

Instalasi CSSD dan Laundry

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Ketersediaan linen	2,5 - 3 set x jumlah tempat tidur	2,5	2,5	2,5	2,50
2	Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100%	100%	100%	100%	100%

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
3	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	Tersedia	100%	100%	100%	100%
5	Adanya penanggung jawab pelayanan laundry	Ada SK Direktur	100%	100%	100%	100%
6	Ketersediaan pelayanan laundry	Tersedia	100%	100%	100%	100%

Instalasi Pemulihan Ketergantungan NAPZA

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi pelayanan di poliklinik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jam buka pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Waktu tunggu di rawat jalan	60	50	50	50	50
5	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan	90	90%	92%	91%	91%

Perlengkapan

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Terpenuhinya SDM perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Waktu pelayanan :	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Senin s/d Kamis : Pagi 08.00-11.30 / Sore 14.00-15.30		100%	100%	100%	100%
	2. Jumat : Pagi 08.00- 11.00		100%	100%	100%	100%
4	Waktu Tunggu Pelayanan kurang dari 20 Menit	100%	100%	100%	100%	100%
5	Daftar Inventaris sesuai sesuai dengan KIR Ruang	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kepuasan Pelanggan	100%	100%	100%	100%	100%

Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI)

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	80%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan Alat Pelindung Diri	80%	100%	100%	100%	100%
3	Program Kerja PPI	100%	100%	100%	100%	100%
4	pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penggunaan APD saat melakukan Tugas	100%	95%	98%	98%	97%
6	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAIs	100%	100%	100%	100%	100%

Instalasi Rekam Medik

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	25,77%	45,50%	71,37%	47,55%
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 Menit	9,35	9,48	9,45	9,43
4	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 Menit	10,16	11,04	9,46	10,22
5	Kepuasan pasien terhadap ketepatan dan kecepatan pelayanan instalasi rekam medik	80%	85,53%	85,64%	91,04%	87,40%

Instalasi Farmasi

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	< 30 menit	13,44	12,14	12,12	12,57
2	Waktu tunggu pelayanan obat racik	< 60 menit	31,28	31,44	31,56	31,43
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	100%	100%	100%	100%
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%

Klinik Forensik Psikiatri

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi pelayanan Forensik Psikiatrik di RSJ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Ketersedian pelayanan Forensik Psikiatri di RSJ	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Lama pemeriksaan Visum et Repertum Psychiatricum	14 hari	14	14	14	14
4	Lama pemeriksaan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang terkait dengan hukum	3 hari	3	3	3	3
5	Waktu tunggu hasil pemeriksaan pelayanan Forensik Psikiatri	1 hari	1	1	1	1
6	Kepuasan pelanggan pada unit pelayanan Psikiatrik Forensik	>80 %	85	85	85	85,00 %

Instalasi Keswamas

No	Nama indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Pemberi pelayanan kesehatan jiwa	Tim tenaga kesehatan multidisiplin yang bekerja di Ins. Keswamas/PKRS	21	22	22	21,67
2	Ketersediaan upaya pelayanan kesehatan jiwa	Tim tenaga kesehatan multidisiplin yang bekerja di Ins. Keswamas/PKRS	21	22	22	21,67
3	Ketersediaan tim penanggulangan kesehatan jiwa bencana	Tim penanggulangan kesehatan jiwa bencana	1	1	1	1,00
4	Frekuensi kegiatan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat	4x dalam sebulan	21	22	22	21,67
5	Cakupan wilayah	pengunjung rawat jalan, IRNA RSJD ATMA/Kabupaten	2	2	2	2,00
6	Kepuasan pelanggan	≥ 90%	94%	93%	94%	94%

Ambulance

No	Nama Indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24	24	24	24
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30menit	30	30	30	30
3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	10	10	10	10

Instalasi Rehabilitasi Medik (Diupdate terkait satuan standar minimal)

No	Nama Indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medis	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	< 50%	0%	11%	0%	3.67%
3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	80%	80%	80%	80.00%

Instalasi Pemulasaran Jenazah

No	Nama Indikator	Standar Minimal	Okt	Nov	Des	Rata-rata
1	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	1	1	1	1

Perlu dipertajam pada analisa dimana psikososial hasilnya kurang bagus, diharapkan ada pembangunan psikososial sehingga perlu pembangunan gedung baru rehabilitasi sosial.

2.8 **Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran yang menjadi target pada Ranhir renstra RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024 -2026 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 2. 16
Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Stakeholder RSJD AHM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Konsumen RSJD AHM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Konsumen RSJD AHM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Konsumen RSJD AHM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Konsumen RSJD AHM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Konsumen RSJD AHM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsumen RSJD AHM
		Peningkatan pelayanan BLUD	Konsumen RSJD AHM
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Konsumen RSJD AHM
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSJD AHM
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Konsumen RSJD AHM
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Konsumen RSJD AHM

2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejumlah peluang dan tantangan dalam pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat harus dihadapi RSJD Atma Husada Mahakam. Sejumlah peluang dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

2.9.1 Peluang

1. Potensi prevalensi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) meningkat.
2. Kompleksitas permasalahan psikososial sebagai konsekuensi pemindahan IKN
3. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang berkualitas.
4. Komitmen pemerintah untuk *universal health coverage (UHC)*
5. Peluang pengembangan pelayanan diluar kekhususan
6. Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain (institusi pendidikan, RS, instansi terkait).
7. Adanya perkembangan dari standar mutu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan jiwa.
8. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terhadap peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit.
9. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

2.9.2 Tantangan

Terdapat beberapa tantangan penting kedepan yang perlu diperhatikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam, antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK .
2. Kurangnya perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi terhadap masalah kesehatan jiwa.
3. Kurangnya koordinasi lintas sektoral di provinsi dan kabupaten kota dalam pelayanan ODGJ
4. Masih adanya stigma masyarakat terhadap keberadaan rumah sakit jiwa yang kurang baik.

2.10 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi rumah sakit. Secara umum, penentuan strategi yang tepat bagi rumah sakit dimulai dengan mengenali *opportunity* (peluang) dan *treats* (ancaman) yang terkandung dalam lingkungan eksternal serta memahami *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) pada aspek internal rumah sakit. Dengan demikian, RSJD Atma Husada Mahakam mampu bersaing dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.10.1 Strengths (Kekuatan)

- 1. RSJD Atma Husada Mahakam adalah rumah sakit khusus kelas A dan satu-satunya di Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Memiliki SDM yang handal;
- 3. Terdapat layanan unggulan yaitu :
 - a. Klinik Elektromedik
 - b. ICU / HCU
 - c. Pusat ADHD Dan Gangguan Belajar
 - d. Tes MMPI Digital
 - e. *Medical Check Up* (MCU)
 - f. Konseling Adiksi
 - g. Instalasi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
 - h. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
 - i. Klinik Selaras (Rehabilitasi Psikososial)
 - j. Rehabilitasi NAPZA
 - k. *Oxygen Filling Station* (Pengisian Oksigen dengan Oksigen Generator)
- 4. RSJD Atma Husada Mahakam telah memiliki alat kesehatan canggih yang mendukung pelayanan baik pelayanan jiwa dan napza juga pelayanan fisik.
- 5. Prestasi yang telah diraih oleh RSJD Atma Husada Mahakam :

Tabel 2. 17
Prestasi Yang Diraih RSJD Atma Husada Mahakam

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Tanggal Penyerahan Piagam
1	KTR	Peringkat III	14 Nopember 2022
2	Budaya Kerja	Peringkat I	14 Desember 2022
3	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat II	14 Desember 2022

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Tanggal Penyerahan Piagam
4	Sakip	Peringkat IV	12 Jauari 2023
5	PMPRB	Peringkat I	12 Jauari 2023
6	Akreditasi	Paripurna Bintang V	14 Januari 2023
7	Realisasi Serapan Anggaran Tertinggi Tahun 2022	Peringkat I	24 Januari 2023

6. Inovasi yang telah dilakukan oleh RSJD Atma Husada Mahakam:
 - a. QRIS
 - b. AHM-Go
 - c. SIJENIUS
 - d. SIHATI
 - e. AERASI
 - f. SILARAS
7. RSJD Atma Husada Mahakam sedang dalam proses relokasi secara bertahap lokasi yang baru di kota Samarinda..
8. RSJD Atma Husada Mahakam berupaya untuk menjadi rumah sakit khusus kelas A pendidikan.
9. Potensi pendapatan BLUD yang cenderung meningkat melalui peluang membuka layanan umum diluar kekhususannya dan pemanfaatan aset yang ada.
10. Nilai total aset RSJD Atma Husada Mahakam per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **117.202.427.530,94**

2.10.2 Opportunity

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada pasal 65B.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan pasal 11 menyebutkan bahwa :
 - a. Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

- b. Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan lain selain kekhususannya.
 - c. Pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
 - d. Pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap.
- 3. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap peningkatan dan pengembangan layanan pada RSJD Atma Husada Mahakam melalui dukungan anggaran untuk rencana relokasi rumah sakit ke lokasi baru yang lebih strategis.
 - 4. Potensi prevalensi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) meningkat.
 - 5. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang berkualitas.
 - 6. Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain (institusi pendidikan, RS, instansi terkait).
 - 7. Adanya perkembangan dari standar mutu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan jiwa.
 - 8. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terhadap peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit.
 - 9. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

2.10.3 Waekness

- 1. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai SPM
- 2. Belum optimalnya Keselamatan pasien sesuai SPM
- 3. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan di bangsal Perawatan belum optimal
- 4. Masih ada sarana dan prasarana yang belum terpenuhi sesuai ASPAK
- 5. Implementasi SIMRS kurang optimal karena terbatasnya SDM dan Anggaran
- 6. Terbatasnya lahan untuk pengembangan layanan kesehatan jiwa

2.10.4 Threat

- 1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK .
- 2. Kurangnya perhatian stakeholder terkait terhadap masalah kesehatan jiwa.
- 3. Stigma masyarakat terhadap rumah sakit jiwa yang kurang baik.

2.10.5 Hasil Analisis SWOT

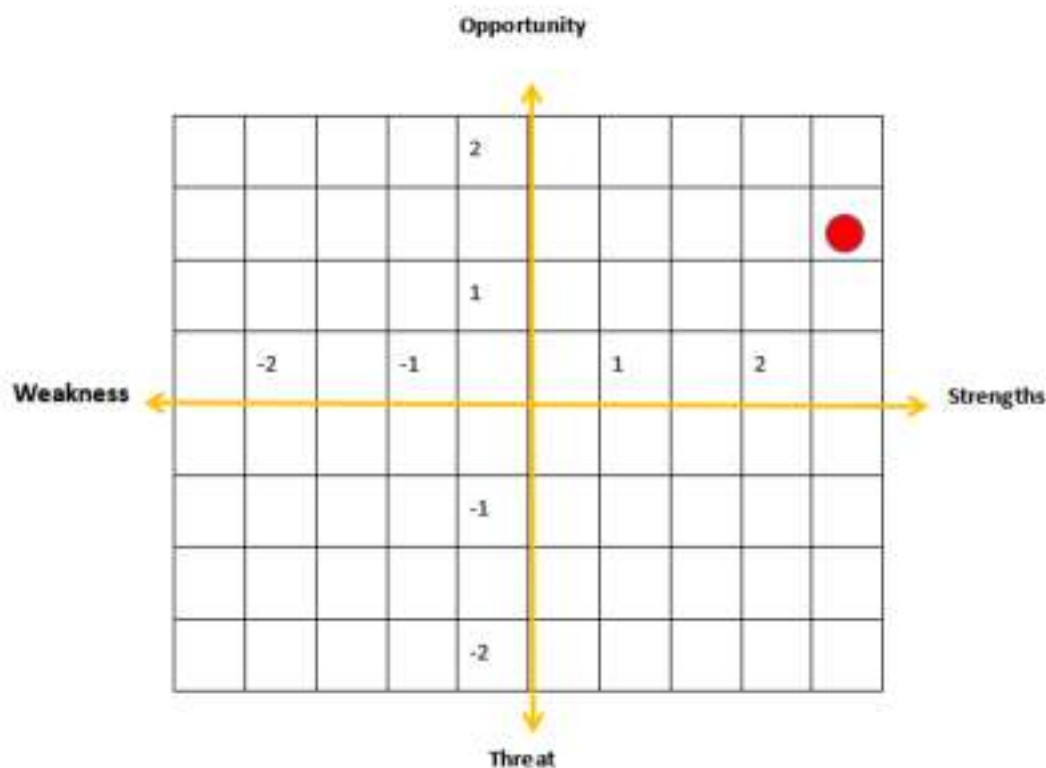
Tabel 2. 18
Hasil Analisis SWOT

INTERNAL				EKSTERNAL			
Strengths	Bobot	Rating	B x R	Opportunity	Skor	Bobot	S x B
RS Khusus Kelas A	0,14	4	0,57	Dukungan Pemerintah	0,14	4	0,55
SDM handal	0,14	4	0,57	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa	0,14	4	0,55
Layanan Unggulan	0,14	4	0,57	Kerjasama dgn pihak lain	0,14	4	0,55
Peralatan Kesehatan Canggih	0,11	4	0,43	Perkembangan dari standar mutu dan peraturan perundang-undanga	0,14	4	0,55
Prestasi	0,11	4	0,43	Komitmen Pemerintah	0,10	3	0,31
Inovasi	0,14	4	0,57	Angka prevalensi ODMK	0,10	3	0,31
Relokasi	0,11	3	0,32	Regulasi	0,10	3	0,31
Pelayanan Diluar Kekhususan	0,11	3	0,32	Teknologi Informasi	0,14	4	0,55
TOTAL	1,00	30	3,79	TOTAL	1,00	29	3,69
Weakness				Threat			
Terbatasnya lahan untuk pengembangan layanan kesehatan jiwa	0,14	-3	-0,43	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK	0,36	-2	-0,73
Sarana prasarana blm sesuai Aspak	0,11	-1	-0,11	Kurangnya perhatian stake holder terkait terhadap masalah kesehatan jiwa	0,33	-2	-0,67
Implementasi SIMRS kurang optimal	0,14	-2	-0,29	Stigma masyarakat terhadap rumah sakit jiwa	0,33	-3	-1,00
Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan napza sesuai SPM	0,11	-2	-0,21				
Belum optimalnya promosi terkait pelayanan diluar pelayanan kesehatan jiwa	0,11	-2	-0,21				
TOTAL	0,61	-10	-1,25	TOTAL	1,03	-7	-2,39

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh posisi RSJD Atma Husada Mahakam pada kuadran X (2,54) dan Y (1,30) dimana strategi yang dapat ditempuh yakni:

- 1. Memanfaatkan strength tertentu untuk menghadapi suatu threat
- 2. Memanfaatkan strength tertentu untuk menggapai opportunity
- 3. Meminimalkan atau meniadakan weakness tertentu dengan menghadapi threat tertentu
- 4. Meminimalkan atau meniadakan weakness tertentu dengan memanfaatkan opportunity tertentu.

Gambar 1. 1
Diagram Kartesius SWOT RSJD AHM



Analisis lingkungan internal menggambarkan kelas RS, SDM, layanan unggulan, alat kesehatan, prestasi, inovasi, rencana relokasi dan aset. analisis lingkungan eksternal termasuk mengidentifikasi regulasi, dukungan pemerintah, angka prevalensi ODMK, kerjasama dgn pihak lain, teknologi informasi, dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

Kondisi lingkungan eksternal dan internal RSJD Atma Husada Mahakam kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran posisi rumah sakit serta strategi pengembangannya.. Hasil analisis SWOT, diperoleh posisi RSJD Atma Husada Mahakam berada pada kuadran X (2,54) dan Y (1,30).

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah agresif sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Atma Husada Mahakam, maka organisasi perlu menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara tepat. Agar tujuan dan sasaran strategis dapat dirumuskan secara tepat, diperlukan analisis lingkungan strategis baik yang sifatnya internal dan eksternal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan strategis yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan Internal :

1. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
2. Prasarana Rumah Sakit yang belum terpenuhi sesuai ASPAK
3. Implementasi SIMRS kurang optimal karena terbatasnya SDM dan Anggaran
4. Terbatasnya lahan RSJD Atma Husada Mahakam saat ini yang menyulitkan untuk dilakukan pengembangan layanan lainnya sesuai kebutuhan
5. Standar Bangunan, Sarana dan Prasarana pada RSJD Atma Husada Mahakam belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
6. RSJD Atma Husada Mahakam berada di lingkungan yang padat penduduk dimana telah beberapa kali terjadi musibah kebakaran yang mengancam bagi pelayanan dan keselamatan pasien

3.1.2 Permasalahan Eksternal :

1. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK
2. Kurangnya perhatian instansi terkait terhadap masalah ODGJ dan ODMK

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar dan terjadi di rumah sakit serta perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam. Beberapa masalah utama akan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, disisi lain masalah utama tersebut akan memberikan dampak secara positif atau sebagai faktor pendorong. Beberapa permasalahan yang dapat

diidentifikasi sampai dengan saat ini meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu:

3.2.1 Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat padatnya penduduk terkhusus Pulau Jawa, Indonesia kini menanggulangnya dengan cara memindahkan Ibu kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur.

Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Disisi lain ada beberapa resiko dari pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa. Risiko terutama terkait dengan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Disisi lain, yang harus diperhatikan adalah penyebaran tenaga kerja yang berkecimpung untuk pembangunan proyek perpindahan IKN, yang menurut datanya 56% merupakan penduduk Pulau Jawa. Tenaga kerja yang berpindah ke wilayah IKN baru tentunya akan melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan baru, sosial budaya yang baru, dan karakteristik alam yang baru pula. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya gejala stres yang apabila berkelanjutan dan tidak mendapatkan penanganan yang cukup dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mentalnya.

Selain itu dampak lain yang harus mendapat perhatian dan perlu diantisipasi adalah kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Adanya kekhawatiran mengenai potensi terpinggirnnya masyarakat lokal menuntut adanya perencanaan yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak sosial apabila wacana pemindahan ibu kota negara benar-benar terwujud.

Kondisi tersebut dapat menjadi stressor bagi masyarakat lokal yang terdampak dan berisiko tinggi untuk mengalami ketegangan psikologis yang jika

berkelanjutan dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah **Potensi meningkatnya angka gangguan jiwa sebagai dampak pemindahan IKN.**

3.2.2 Tingkat Kemiskinan Kaltim

Sesuai data yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan rapat dengan agenda Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Ranhir renstra Perangkat Daerah tahun 2024 - 2026 pada tanggal 5 Januari 2023 disampaikan bahwa tingkat kemiskinan Kaltim lebih baik dari Nasional akan tetapi terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kaltim yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Tren tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan **meningkat.**

Kemiskinan sangat dekat dengan gangguan kesehatan mental. Bukan hanya stres dan depresi, kondisi ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma dan gangguan cemas. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ketika kesehatan mental terjaga dengan baik, maka tubuh pun dapat akan berfungsi dengan baik. Selain itu, kesehatan mental yang optimal bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Ada berbagai hal yang bisa mengganggu kondisi kesehatan mental, mulai dari kondisi lingkungan hingga ekonomi dan ternyata ada berbagai dampak dari kemiskinan pada kesehatan mental. seseorang yang mengalami kemiskinan berisiko dua kali lebih besar mengidap depresi dibandingkan mereka yang tidak mengalami masalah ekonomi. Hal ini terjadi karena kemiskinan dapat membebani kesehatan fisik maupun mental.

Tidak sedikit orang yang mengalami masalah ekonomi harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini bisa memicu tekanan pada mental sehingga orang tersebut mengalami stres. Tingkat stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu depresi yang mengganggu kesehatan mental seseorang. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan adalah **meningkatnya angka gangguan jiwa sebagai dampak tingkat kemiskinan di Kaltim**

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim

Sesuai data yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan rapat dengan agenda Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Ranhir renstra Perangkat Daerah tahun 2024 - 2026 pada tanggal 5 Januari 2023 disampaikan bahwa IPM Kaltim berada diatas Nasional namun terdapat 3 kabupaten/kota dengan IPM terendah Kaltim yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Barat. Adapun tren IPM Kaltim sejak tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat

Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan gangguan Kesehatan Jiwa mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat.

3.2.4 Aspek Sosial

Stigma dari masyarakat yang masih negatif terhadap masalah kesehatan jiwa memberikan dampak yang kurang baik untuk pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK. Masih banyaknya keluarga pasien yang kurang peduli terhadap ODMK dimana hal ini dapat dilihat dengan masih adanya pasien yang tidak dapat dipulangkan karena adanya penolakan keluarga dan masyarakat di tempat tinggal pasien atau pasien yang memang keberadaan keluarganya belum diketahui (pasien gelandangan psikotik).

Data pasien yang tidak dapat dipulangkan saat ini di RSJD Atma Husada Mahakam sebanyak 26 pasien. Selain itu juga masih adanya beberapa pasien yang dirawat di RSJD Atma Husada Mahakam yang tidak pernah dijenguk oleh keluarga walaupun keluarga bertempat tinggal di Samarinda.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa. Selain itu juga masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis penentuan isu-isu strategis di RSJD Atma Husada Mahakam, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu **Tingginya stigma masyarakat terhadap ODMK.**

3.2.5 Aspek Teknologi

Dalam lingkup kesehatan, keselamatan pasien harus menjadi target nomor satu. Untuk itu kualitas pelayanan pada pasien selalu menjadi prioritas utama di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik kesehatan maupun puskesmas. Dalam wilayah lingkup kesehatan ini, teknologi informasi kerap menjadi sorotan dan kini mengingat pentingnya peranan teknologi di segala segi kehidupan, maka teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien semakin digalakkan.

Teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien begitu penting. Salah satunya adalah teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi di rumah sakit bisa menghemat tempat maupun ruang lingkup pekerjaan para petugas medis. Petugas tidak perlu lagi mencatat di kertas/buku dan menyimpannya dalam bentuk dokumen offline. Dengan adanya sistem komputerisasi, maka data para pasien bisa tersimpan dengan aman di komputer.

Sistem komputerisasi di rumah sakit membuat pelayanan pada pasien menjadi lebih cepat. Petugas tidak perlu repot mencari data-data pasien satu-persatu dari buku atau dokumen tertulis lainnya, namun cukup membuka data pasien di komputer. Data yang dimaksud akan mudah dicari dengan cara mengetikkan *keyword* pada kolom pencarian maka data akan muncul secara otomatis. Data-data pasien juga lebih mudah ditelusuri atau dicek secara lebih terperinci sehingga meminimalisir human error. Petugas juga lebih mudah ketika perlu melakukan perubahan data pada pasien

Salah satu manfaat teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien adalah mempermudah komunikasi antar petugas medis. Petugas medis tidak perlu repot memberikan suatu dokumen milik pasien ke petugas lainnya ketika dokumen tersebut dibutuhkan namun para petugas cukup akses data di komputer. Kareena seluruh sistem informasi di rumah sakit bisa dilihat dan diakses oleh seluruh petugas medis kapan pun.

Rekam kesehatan elektronik merupakan dokumen yang sangat penting. Dokumen tersebut berisi tentang profil kesehatan pribadi milik pasien yang menggambarkan riwayat medis pasien serta catatan perkembangan kesehatan seumur hidup pasien. Termasuk di dalamnya adalah demografi pasien, permasalahan fisik dan psikis, imunisasi, data laboratorium, obat-obatan, tanda-tanda vital, laporan radiologi dan data lainnya.

RSJD Atma Husada Mahakam telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang mulai dibangun pada tahun 2017 dan terus dilakukan pengembangan/ updating sesuai dengan kebutuhan hingga saat ini. Permasalahan yang masih dirasakan terkait pemanfaatan teknologi informasi pada RSJD Atma Husada Mahakam adalah :

1. RSJD Atma Husada Mahakam telah membangun beberapa aplikasi untuk memudahkan proses pelayanan tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat belum maksimal, misalnya rumah sakit telah membuat sistem pendaftaran secara online tetapi masyarakat belum memanfaatkan sistem tersebut walaupun telah dilakukan sosialisasi.
2. Kondisi SIMRS saat ini masih perlu dilakukan *updating* terhadap fitur-fitur di dalamnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal baik oleh petugas rumah sakit maupun konsumen dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan mentransformasi dokumen rekam medik menjadi dokumen digital dan lain-lain

Untuk kondisi ini permasalahan yang dapat dirumuskan adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam oleh petugas maupun masyarakat sebagai konsumen.**

3.2.6 Aspek Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya organisasi itu sendiri merupakan sistem nilai yang mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal sosial.

Sesuai dengan surat Edaran Kementerian PAN & RB No.20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara dengan budaya kerja organisasi BerAKHLAK dan bangga membangun bangsa maka Rumah sakit khusus jiwa Daerah Atma Husada Mahakam menjadikan sebagai Budaya kerja. Kegiatan dalam membangun budaya kerja tersebut yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi kepada seluruh staff RS sekaligus melaksanakan pencanangan di tahun 2022.

Dalam rangka lebih memperkuat Budaya kerja ber AKHLAK tersebut maka dituangkan di dalam Tata Kelola RS (Hospital By Law).Tentunya dengan

serangkaian kegiatan dalam mengimplementasikan budaya kerja ber AKHLAK tersebut belum optimal seperti yang diharapkan maka perlu terus menerus dibangun.

Sebagai instansi yang memberikan pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam harus mempunyai standar yang dapat memberikan kepastian mutu. layanan. Penjagaan mutu layanan harus dilakukan terus menerus untuk diperbaiki dan berkesinambungan. Selain untuk memberikan kepastian mutu layanan maka dalam upaya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.2.7 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan. Tujuan adanya manajemen SDM di suatu instansi adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan memadai terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah upaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitasnya yang telah direncanakan serta peningkatan kemampuan atau kompetensi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa RS harus menyiapkan tenaga Kesehatan secara jumlah dan jenis harus memenuhi ketentuan. Dalam pelaksanaannya pengembangan SDM harus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan. Permasalahan yang terjadi di RS selain jumlah dan jenis yang belum memenuhi maka yang perlu menjadi perhatian adalah Diklat dengan standar 20 jam per orang per tahun.

3.2.8 Aksesibilitas yang rendah terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.

Meningkatnya masalah kesehatan jiwa memberikan dampak terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa yang juga semakin meningkat. Jangkauan pelayanan kesehatan jiwa harus dapat mencapai masyarakat yang tinggal di pelosok daerah dan bukan hanya yang berada di kota saja. Hal ini

merupakan salah satu upaya dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa. Upaya ini tidak mungkin bisa dilaksanakan jika pelayanan kesehatan jiwa hanya diberikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam saja.

Berdasarkan piramida pemberi pelayanan kesehatan jiwa seharusnya semua pihak terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa, baik formal dan non formal dan berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan jiwa yang memadai yang dapat menjangkau seluruh masyarakat belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh jumlah tenaga kesehatan jiwa masih sangat terbatas.

Masalah kesehatan jiwa sering kali bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik, sehingga tidak terdeteksi dan tidak teratasi dengan baik. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa masih kurang dan stigma terhadap gangguan jiwa masih besar, sehingga mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan jiwa, tapi banyak yang pergi ke pengobatan tradisional atau pemuka agama.

Penduduk pedesaan (rural) sulit menjangkau fasilitas kesehatan jiwa dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Adanya otonomi daerah yang membuat daerah menjadi penentu kebutuhan masing-masing, menyebabkan masalah pelayanan kesehatan jiwa belum tentu dianggap sebagai kebutuhan prioritas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dirumuskan adalah **Rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim

Didalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun tersebut terdiri dari 4 tujuan dan 11 sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 3 : Menurunnya Tingkat Pengangguran

Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing perempuan

Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

Sasaran 6 : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan

Sasaran 9 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Sasaran 10 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK

Secara lengkap uraian tujuan, sasaran, indikator beserta target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 -2026 dapat di lihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1
Tujuan, sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Kondisi Awal			Target			
				2021	2022	2023 (target)	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76.88	77.44	77.78	78.32	78.6	78.92	78.92
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.81	13.84	13.9	13.95	14.05	14.15	14.15
	2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9.84	9.92	10	10.1	10.21	10.35	10.35
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.61	74.62	74.71	74.82	74.89	74.93	74.93
	2	Prevalensi Stunting	Poin	22.8	23.9	21.4	12.83	11	10	10
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.83	5.71	5.63	5.46	5.3	5.14	5.14
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66.64	66.84	66.97	67.31	67.64	67.98	67.98
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2.55	4.48	3,5 ± 1	4,10-4,90	4,30-5,10	4,50-5,30	4,50-5,30
	2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6.54	6.31	6.19	5.78	5.67	5.55	5.55
	3	Indeks Gini	Poin	0.334	0.327	0.32	0.316	0.31	0.305	0.305
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		LPE Non Migas dan Batubara	Persen	2.81	6.11	6.45	5,90-6,70	6,20-7,00	6,40-7,20	6,40-7,20
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	1.22	0.99	0.92	0.86	0.8	0.74	0.74
	2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0.34	0.23	0.18	0.15	0.12	0.1	0.1
	3	Tingkat inflasi	Persen	2.15	5.35	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	6.46	6.84	7.37	7.43	7.79	8.14	8.14

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Kondisi Awal			Target			
				2021	2022	2023 (target)	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75.06	74.46	74.9	75	75.1	75.2	75.2
	2	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	41.96	70.68	29.33	31.05	31.89	32.03	32.03
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Poin	51.92	53.02	53.42	53.52	53.62	53.72	53.72
	2	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85.4	81.45	81.85	81.95	82.05	82.15	82.15
	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	88.84	87.59	88.07	88.17	88.27	88.37	88.37
	4	Indeks Kualitas Lahan	Poin	82.21	81.85	82.25	82.35	82.45	82.55	82.55
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	185.98	81.28	22.24	23.32	24.4	25.49	25.49
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan		Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	6.53	7.27	8.4	10.39	12.39	14.68	14.68
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,47 (B)	67,7 (B)	68,81 (B)	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82.57	84.41	84.6	85	85.5	86	86
	2	Sistem Merit	Poin	256,00	263.5	267	270	275	280	280
	3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2.22	2.11	2.55	2.9	3	3.1	3.1
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,82 (BB)	78,1 (BB)	78,25 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	5	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3 Skor 3,476	3 Skor 3,726	4 Skor 4,000	4 Skor 4,000

4.2 Tujuan dan Sasaran RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran RSJD Atma Husada Mahakam mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 karena RSJD Atma Husada Mahakam adalah merupakan unsur dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan sasaran RSJD Atma Husada Mahakam mengacu dan mendukung tujuan yang pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan SDM Berdaya Saing”** dan sasaran yang kedua yaitu **“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”**

4.2.1 Tujuan RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2024-2026

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merupakan Rumah Sakit khusus kelas A, tetapi belum menjadi Rumah Sakit pendidikan, meskipun saat ini Rumah sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam sudah melayani mahasiswa institusi pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan:

1. Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4.2.2 Sasaran RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2024-2026

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis RSJD Atma Husada Mahakam berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK

Sasaaran 1 : Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan Napza terpadu

Sasaran 3 : Optimalnya Kualitas pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian

Adapun terkait indikator dan target tujuan dan sasaran Ranhir renstra RSJD Atma Husada Mahakam dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan birokrasi yang profesinal, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK		Indeks kepuasan masyarakat	89,33	89,50	89,75	90
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,43	77,25	77,50	77,75
		Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel	indeks persepsi korupsi	13	13	13	13
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,71	74,82	74,89	74,93
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	93	93,05	98,10	98,15
		Optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan,dan Penelitian	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kompetensi pegawai	0	89,50	89,75	90

4.2.3 Program

Rsjd Atma Husada Mahakam dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan menggunakan beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.2.4 Kegiatan

Dan program - program yang telah ditetapkan RSJD Atma Husada Mahakam dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Peningkatan pelayanan BLUD
9. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
10. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
12. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

4.2.5 Sub Kegiatan

Dan untuk mencapai target kinerja pada kegiatan dicapai dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

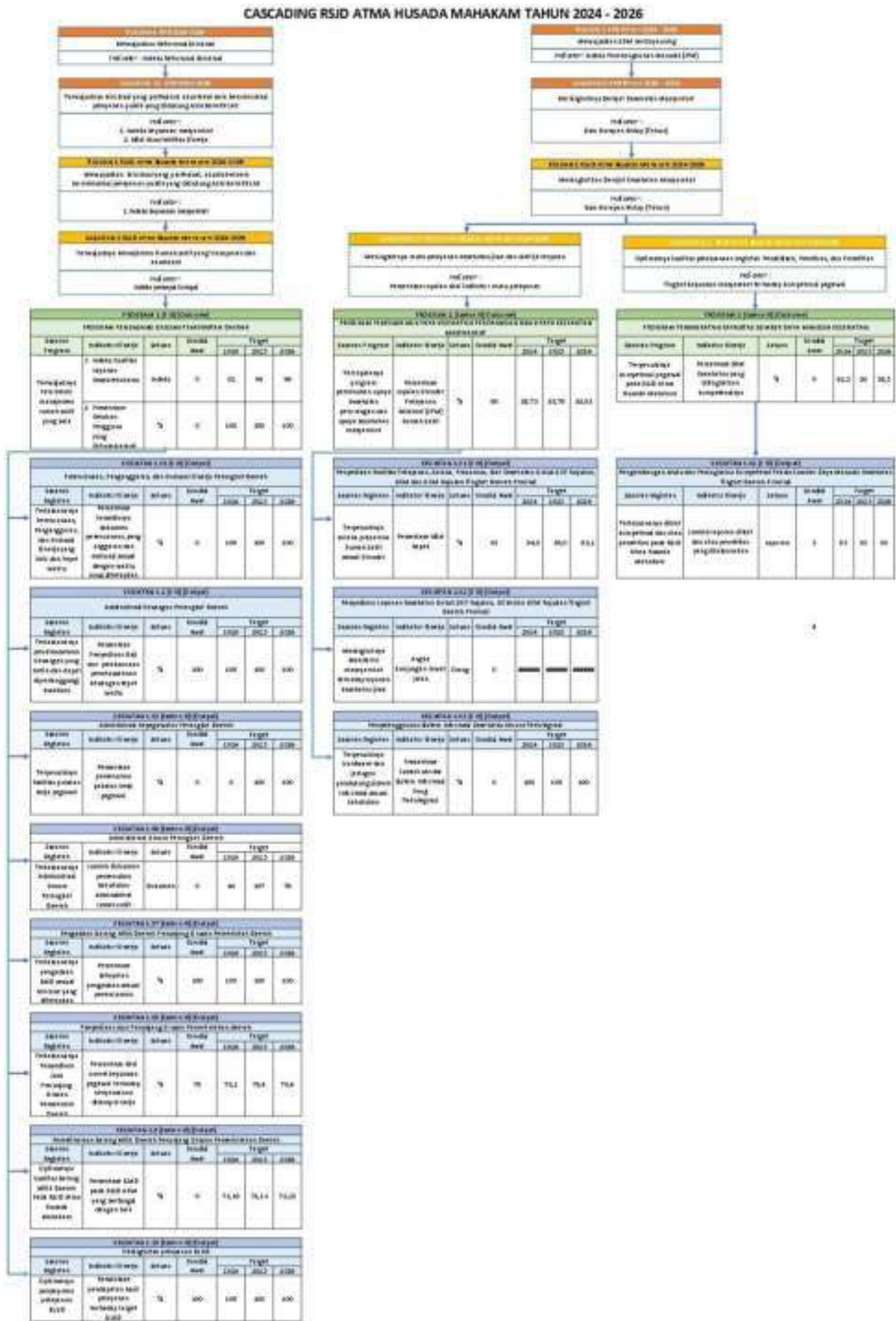
1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
22. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
23. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
24. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
25. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
26. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
27. Rehabilitas dan pemeliharaan Rumah sakit
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
29. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
30. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

4.3 Cascading Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Gambar 4.1
Cascading Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi yang akan dilaksanakan RSJD Atma Husada Mahakam untuk mencapai sasarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan upaya peningkatan pelayanan sesuai standar keselamatan pasien
2. Meningkatkan kapasitas SDM kesehatan pada RSJD AHM
3. Melaksanakan tata kelola pelayanan manajemen Rumah Sakit yang baik dan berkualitas.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Arah Kebijakan RSJD Atma Husada Mahakam tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1
Arah Kebijakan RSJD Atma Husada Mahakam

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK	- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah - Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Pelaksanaan tata kelola pelayanan manajemen rumah sakit yang baik dan berkualitas - Peningkatan sistem pembinaan sumberdaya aparatur RS. - Peningkatan sistem pengelolaan keuangan RS yang berbasis teknologi - Peningkatan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan	- Administrasi Keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan - Administrasi Umum yang tertib dan akuntabel - Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan - Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam - Meningkatkan kualitas kinerja rumah sakit - Menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			n standar pelayanan minimum [SPM] dan sistem pelayanan publik - Peningkatan transparansi penyelenggaraan penyediaan jasa dan barang RS	birokrasi yang telah ditetapkan - Meningkatkan manajemen pengelolaan aset yang baik dan transparan serta valid.
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA terpadu -	- Pengembangan upaya peningkatan pelayanan sesuai standar keselamatan pasien - Peningkatan akses masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan terstandar - Peningkatan Inovasi layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan standar.	- Pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil analisa kebutuhan - Pelaksanaan standar akreditasi, - Pemenuhan sarpras dan alkes sesuai standar , - Pelaksanaan evaluasi SOP, - Pengembangan dan Inovasi pelayanan Rumah Sakit - Menetapkan dan mengendalikan standar tata kelola manajemen yang berkualitas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan - Menyelenggarakan dan menganalisa Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik urusan kesehatan minimal satu kali per tahun - Menciptakan dan mengembangkan produktivitas dan inovasi pelayanan publik - Meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan terpadu

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	- Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Pada RSJD AHM secara aktif melalui kegiatan Pendidikan dan latihan di luar instansi. - Peningkatan kompetensi mandiri dengan target minimal 20 jam pertahun untuk masing-masing ASN - Peningkatan rekrutimen SDM yang berbasis kompetensi	- Seleksi pegawai, diklat, pendidikan berkelanjutan, - Melaksanakan inhoustrining sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM - Rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi serta mewujudkan prinsip penetapan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja secara profesional dan proporsional - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia RS melalui diklat formal dan informal

BAB VI

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang disusun dalam Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 3 (Tiga) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya di dalam proses perencanaan pembangunan di Prov. Kaltim yang dalam hal ini adalah RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim.

6.1 Rencana Program

Untuk mencapai sasaran strategis, RSJD Atma Husada Mahakam menetapkan beberapa program utama untuk dilaksanakan pada periode Ranhir renstra 2024-2026. Adapun rencana program utama yang akan dilaksanakan oleh RSJD Atma Husada Mahakam yang berkaitan dengan tujuan dan sasarannya berdasarkan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah berubah menjadi Permendagri Nomor 90 tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1
Tujuan, sasaran dan program RSJD Atma Husada Mahakam

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel sert cda berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK	Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

6.2 Kegiatan

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari program utama yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri no 90. Tahun 2019.

Tabel 6. 2
Program dan Kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam

No	Program	Kegiatan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.10	Peningkatan pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

6.3 Sub Kegiatan

Berikut ini adalah uraian kegiatan dari program utama yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 6. 3
Sub Kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumh Sakit
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

6.4 Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator kinerja organisasi, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan timur menetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk melaksanakan program pelayanan pada tahun 2023 – 2026 sebanagimana tabel berikut :

Tabel 6. 4
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	89,33	89,50	83,287,926,296	89,75	83,813,388,749	90	86,042,855,759	90		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	76,43	77,25	83,287,926,296	77,50	83,813,388,749	77,75	86,042,855,759	77,75		
Sasaran 1 : Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel	Indikator Sasaran 1 : Indeks Presepsi Korupsi	Indeks	12,99	13	83,287,926,296	13	83,813,388,749	13	86,042,855,759	13		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	0	82	83,187,926,296	84	83,713,388,749	86	85,942,855,759	86		
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	0	100	108,200,000	100	108,200,000	100	152,600,000	100		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	5	49,400,000	5	49,400,000	5	93,800,000	15		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	4	58,800,000	4	58,800,000	4	58,800,000	12		

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	%	100	100	40,909,724,796	100	40,909,724,214	100	41,761,790,209	100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	234	4732	40,523,444,796	4732	40,523,444,214	4732	41,419,310,209	14196		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	222,480,000	12	222,480,000	12	222,480,000	36		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	25	31	163,800,000	31	163,800,000	24	120,000,000	86		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai	%	0	0	0	100	458,762,500	100	1,397,713,500	100		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	2	458,762,500	3	1,397,713,500	5		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	Dokumen	0	40	946,474,600	107	1,557,751,500	76	1,014,476,750	223		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	22	31	151,252,500	28	139,638,000	28	139,031,000	87		

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	23	478,864,200	22	408,466,500	21	237,660,250	66		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	18	67,957,900	19	151,897,000	19	92,535,500	56		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	0	0	2	197,750,000	2	83,250,000	4		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	34	248,400,000	100	660,000,000	70	462,000,000	204		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	%	100	100	2,150,930,100	100	466,808,735	100	438,933,500	100		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	5	1,710,000,000	0	0	0	0	5		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	220,020,000	1	342,000,000	2		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	9	45,760,100	8	136,604,700	1	19,250,000	18		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	Unit	11	2	395,170.000	43	110,184,035	10	77,683,500	55		

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	%	78	78,2	16,847,403,800	78,4	16,857,403,800	78,6	16,857,403,800	78,6		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	2	15,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	6		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	2,041,624,200	48	2,041,624,200	48	2,041,624,200	144		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	16	14,790,779,600	16	14,790,779,600	16	14,790,779,600	48		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD pada RSJD AHM yang berfungsi dengan baik	%	0	72,19	425,193,000	72,21	554,738,000	72,23	519,938,000	72,23		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	28	1	26,831,000	1	156,376,000	1	156,376,000	3		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	33	398,362,000	34	398,362,000	35	363,562,000	102		
Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan	%	100	100	22,000,000,000	100	23,000,000,000	100	24,000,000,000	100		

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	terhadap target BLUD											
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	15	15	22,000,000,000	15	23,000,000,000	15	24,000,000,000	15		
Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indikator Tujuan 2 : Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	74,71	74,82	20,400,750,704	74,89	34,267,040,251	74,93	76,235,331,241	74,93		
Sasaran 2.1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA terpadu	Indikator Sasaran 2.1 : Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	%	92	98,05	20,400,750,704	98,10	32,963,960,251	98,15	73,943,091,241	98,15		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	%	88	93,73	19,238,670,704	93,78	32,963,960,251	93,83	73,943,091,241	93,83		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	%	85	94,80	17,773,278,106	95	32,356,202,984	95,2	72,976,115,752	95,2		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	2	6,582,120,000	4	30,166,414,520	3	69,982,573,320	9		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Unit	15	2	16,470,000	10	1,389,521,894	1	1,204,875,000	13		

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Fasilitas Layanan Kesehatan	Kesehatan yang Disediakan											
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan.	Paket	0	25	224,603,970	25	224,603,970	25	745,986,835	75		
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	99	917	309,861,161	112	70,057,000	1725	537,075,000	2.754		
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	345	345	198,061,200	345	198,061,200	345	198,061,200	1035		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumh Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumh Sakit	Unit	0	5	10,442,161,775	2	307,544,400	2	307,544,400	9		
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka kunjungan rawat jalan	Orang	0	26.319	724,589,335	28.950	498,967,657	31.845	670,330,996	87.114		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	Dokumen	326	9	724,589,335	6	498,967,657	5	670,330,996	20		

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RANHIR RENSTRA	UNIT KERJA PENANGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
	Kesehatan Jiwa (ODMK)											
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah modul sistem informasi yang terintegrasi	%	0	100	740,803,263	100	108,789,610	100	296,644,490	100		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Unit	0	4	740,803,263	4	108,789,610	4	296,644,490	12		
Sasaran 2.2 : Optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Indikator Sasaran 2.2 : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kompetensi pegawai	%	0	89,50	1,162,080,000	89,75	1,303,080,000	90	2,292,240,000	90		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	92,5	1,162,080,000	93	1,303,080,000	93,5	2,292,240,000	93,5		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan diklat dan atau penelitian yang dilaksanakan	Laporan	4	85	1,162,080,000	85	1,303,080,000	85	2,226,240,000	255		
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	11	202	1,162,080,000	208	1,303,080,000	284	2,226,240,000	694		
					103,788,677,000		118,180,429,000		162,378,187,000			

6.5 **Indikator Kinerja**

Masukan **(Input)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran **(Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil **(Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak **(Impact)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Indikator kinerja dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. 5
Sasaran, Indikator kinerja dan Program RSJD Atma Husada Mahakam

No	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
1.	Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel	indeks persepsi korupsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA terpadu	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kompetensi pegawai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja utama (IKU) 2024 – 2026

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap instansi pemerintah pasti membuat indikator kinerja utama karena ada tujuannya. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut adalah:

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi sejumlah kriteria, utamanya kriteria dari Perangkat Daerah. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Spesifik: indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. Measurable: IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable: data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. Relevant: IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.

5. Timelines: IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

Di Indonesia, ada beberapa jenis IKU yang lazim di pakai di beberapa instansi negara kita. Jenis-jenis IKU tersebut adalah:

- 1. *Input Indicator*: merupakan indikator yang menggambarkan secara ringkas seperti apa para karyawan baru di instansi tersebut, mulai dari kualitas hingga kuantitasnya.
- 2. *Process Indicator*: merupakan jenis IKU yang lazimnya dipakai sebagai acuan langkah untuk membuat sebuah jasa atau barang.
- 3. *Output Indicator*: merupakan jenis IKU yang mengukur output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan suatu instansi.
- 4. *Outcome Indicator*: adalah jenis IKU yang mengukur sejauh mana perkembangan kinerja suatu instansi. Misalnya: kuantitas dan kualitas kerja, efisiensi kerja, serta perilaku SDM atau karyawan.
- 5. *Effect Indicator*: merupakan jenis indikator kinerja utama yang mengukur seperti apa dampak positif atau negatif dari kinerja suatu instansi terhadap instansi itu sendiri, atau pihak lain yang berkaitan dengan instansi tersebut.

RSJD Atma Husada Mahakam telah melakukan tahapan dalam penysusun indikator Kinerja Utama dengan memilih dan menyandingkan seluruh indikator kinerja yang ada dan memastikan idikator tersebut merupakan indikator untuk mengukur kinerja yang menjadi core business RSJD Atma Husada Mahakam

Tabel 6. 6
Indikator Kinerja Utama RSJD Atma Husada Mahakam

No	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatn ya capaian mutu pelayanan rumah sakit	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	Capaian indikator mutu pelayanan seluruh instalasi/un it kerja yang ada dalam spm dibagi jumlah seluruh instalasi/un it kerja yang ada didalam	%	Bidang pelayanan keperawatan dan litbang	Bidang pelayana n keperawa tan dan litbang	

No	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
			indikator mutu pelayanan dikali 100%				

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 –2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan direksi dan staf RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 -2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh jajaran direksi dan staf RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, karena juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi serta akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun. Rencana Strategis ini bukan hanya sebagai administrasi saja, karena secara substansial merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean government melalui rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja (Renja) RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Tk. I
NIP. 19670530 199803 2 003

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN
RAKYAT**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai Pilkada serentak pada tahun 2024. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

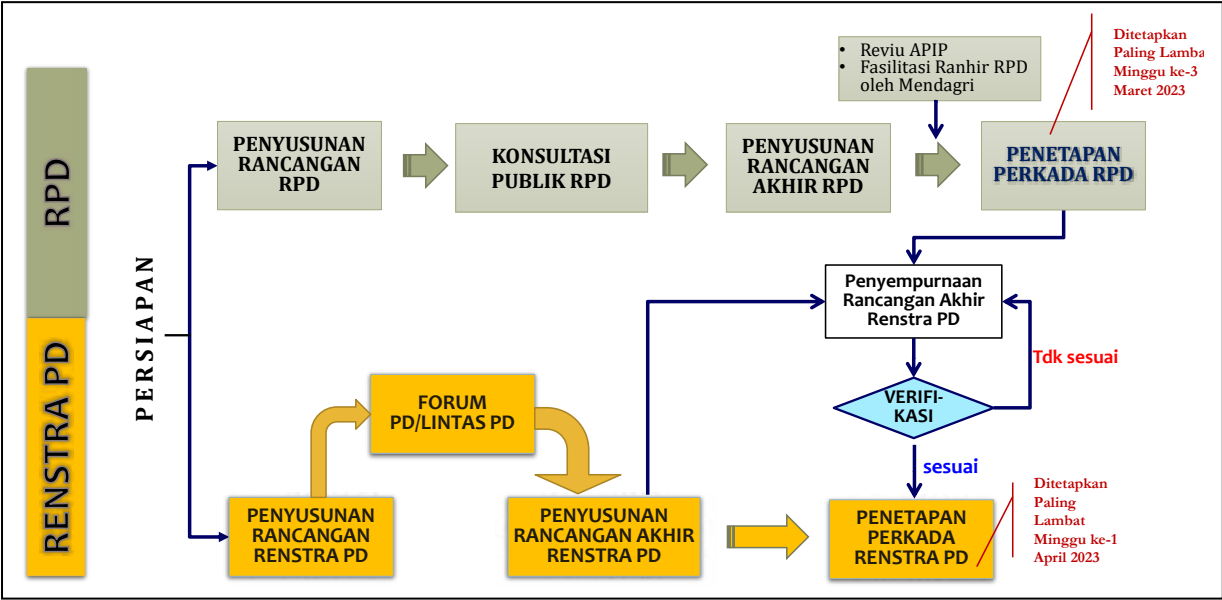
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama tertentu. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, khususnya pada tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, meliputi: Persiapan, Penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir, dan

Penetapan. Pelaksanaan tahapan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, maupun perangkat daerah di kabupaten/kota yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta berbagai pihak non pemerintahan.

Gambar 1.1.

Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD Tahun 2024-2026



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat disusun berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Substansi Renstra PD disusun selaras dengan substansi RPD, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi dinas. Selanjutnya, Renstra PD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun. Rencana kerja yang dimuat dalam Renstra perangkat daerah dilaksanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2024, 2025 dan 2026 untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah merupakan instrumen pengukuran dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. Evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan informasi evaluasi hasil Renja PD setiap tahun.

Gambar 1.2.
Keterkaitan Substansi Renstra PD dengan RPD dan Renja PD



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun sebagai pedoman kebijakan pembangunan terkait tugas dan fungsi PUPRPR Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjadi acuan kerja bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2024 sampai 2026;

3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat selama periode tahun 2024-2026; dan
5. Sebagai pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 8 (delapan) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum bab pendahuluan berisi tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dengan isi sub-bab sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, serta sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari sumber daya manusia dan aset/modal yang dimiliki untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Dalam bab ini juga diuraikan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, kelompok sasaran layanan dinas, dengan isi sub-bab sebagai berikut:

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur PD
- 2.2. Sumber daya PD

2.3. Kinerja pelayanan PD

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- Bab ini berisi identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang dipetakan berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Selain itu, dimuat juga isu-isu strategis dinas yang dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa isu internal maupun eksternal, dengan isi sub-bab sebagai berikut:
- 3.1. Permasalahan pelayanan PD
- 3.2 Isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- Bab ini berisi tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta isu-isu strategis perangkat daerah. Selain itu, pada subbab ini dimuat juga cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikator masing-masing.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Bab ini berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas PUPRPR Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Bab ini berisi uraian rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya selama periode tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- Bab ini memuat uraian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) PD; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap penting untuk pelaksanaan Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun tugas dan fungsi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keciptakaryaan;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Melihat fungsi dan tugas di atas, dalam pelaksanaan kinerjanya, Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur ; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman. Dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan permukiman;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina marga;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang cipta karya;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

- kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris yakni:

- a. Subbagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat
- b. Subbagian Perencanaan Program; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana

dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- c. Subbagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang sumber daya air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sumber daya air. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sumber daya air;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan sumber daya air;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis irigasi dan rawa;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sungai dan pantai; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sumber daya air membawahkan seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan SDA; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan sumber daya air.
- b. Seksi Irigasi dan Rawa; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengaturan irigasi dan rawa.
- c. Seksi Sungai dan Pantai; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan sungai dan pantai.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugasnya yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang bina marga melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang bina marga;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan bina marga;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jalan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jembatan dan bangunan pelengkap; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yakni:

- a. Seksi Perencanaan Bina Marga; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan bina marga.
- b. Seksi Jalan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian jalan.
- c. Seksi Jembatan dan bangunan Pelengkap; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian jembatan dan bangunan pelengkap.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang cipta karya. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang cipta karya;

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang cipta karya;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan cipta karya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tata bangunan dan lingkungan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyehatan lingkungan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yaitu:

- a. Seksi Perencanaan Cipta Karya; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta perencanaan cipta karya.
- b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman

6. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bina konstruksi melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang bina konstruksi;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengkajian usaha jasa konstruksi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan informasi dan jasa;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

- pengaturan teknis pengendalian mutu; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Konstruksi membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yaitu:

- a. Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengkajian usaha jasa konstruksi.
- b. Seksi Pemberdayaan Informasi dan Jasa; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemberdayaan informasi dan jasa.
- c. Seksi Pengendalian Mutu; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian mutu

Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan:

- a. Fungsi Pengaturan
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasakonstruksi.
- b. Fungsi Pemberdayaan
Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi
- c. fungsi pengawasan
Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Berdasarkan struktur, kelembagaan, dan pembagian tugas/fungsi tersebut di atas maka saat ini surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada Nomor : 065.4/1291/BIKON Tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur pada Bidang Bina Konstruksi, terkait proses perubahan nomenklatur seksi-seksi pada Bidang Bina Konstruksi:

- a. Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi diusulkan menjadi Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

- b. Seksi Pengendalian Mutu diusulkan menjadi Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang penataan ruang dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang penataan ruang;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan tata ruang;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yakni:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan tata ruang.
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.
- c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perumahan dan permukiman dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perumahan dan permukiman;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan perumahan dan permukiman;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perumahan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yakni:

- a. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan perumahan dan permukiman.
- b. Seksi Perumahan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perumahan.
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur yang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerjanya diatur Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

a. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya serta melaksanakan urusan penatausahaan. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- 4) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 5) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d) Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

b. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujian mutu dan standardisasi konstruksi serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian
- d. Seksi Standardisasi Konstruksi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

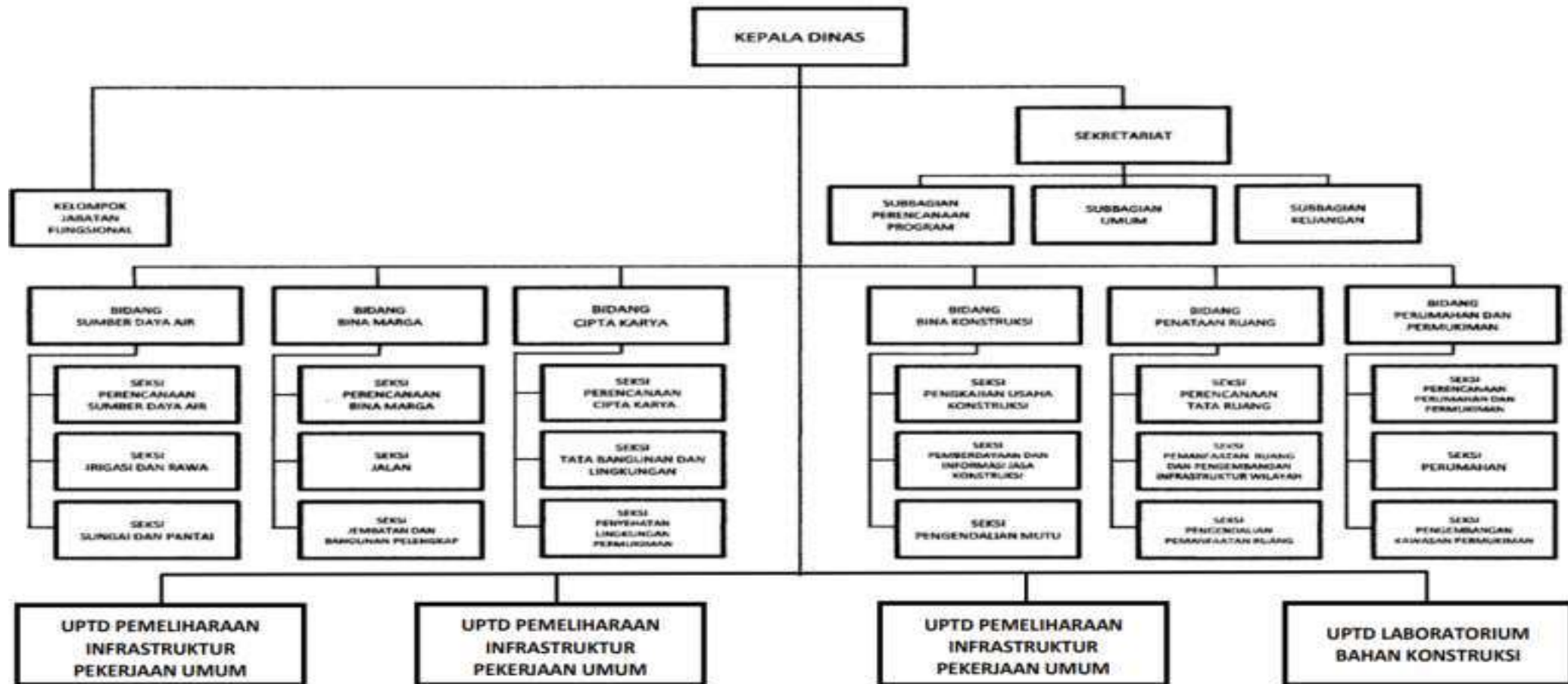
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai

dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya di mana tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 313 orang yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2022.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai Pejabat Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	8	1	9
3.	Eselon IV	20	5	25
4.	Fungsional	11	8	19
5.	Pelaksana	191	68	259
TOTAL		231	82	313

Sumber: Data kepegawaian DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021

BIDANG.	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
Sekretariat	1	40	37	3
Penataan Ruang	-	-	8	1
Bina Konstruksi	-	2	6	2
Sumber Daya Air	1	3	10	3
Bina Marga	1	14	28	3
Cipta Karya	1	3	11	1
Perumahan dan Permukiman	0	2	12	2
UPTD Lab Bahan Konstruksi	-	7	14	2
UPTD Wilayah I	-	17	15	3
UPTD Wilayah II	4	16	7	3
UPTD Wilayah III	3	13	12	2
JUMLAH	11	117	160	25
TOTAL PNS 313 ORANG				

Tabel 2.3.**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**

BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							
	SD	SLTP	SLTA	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3
Sekretariat	2	4	45	4	2	19	5	-
Penataan Ruang	-	-	-	1	-	4	4	-
Bina Konstruksi	-	-	2	-	-	6	2	-
Sumber Daya Air	-	1	5	1	-	6	4	-
Bina Marga	1	-	16	4	2	15	8	-
Cipta Karya	1	1	4	1	-	6	13	-
Perumahan dan Permukiman	-	-	2	1	-	9	4	-
UPTD Lab Bahan Konstruksi	-	-	8	1	1	9	4	-
UPTD Wilayah I	-	2	17	2	-	10	4	-
UPTD Wilayah II	2	2	15	1	-	6	4	-
UPTD Wilayah III	5	3	11	3	-	4	4	-
TOTAL	11	13	125	19	5	94	46	-
TOTAL PNS 313 ORANG								

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur didukung pula dengan sarana prasarana penunjang dalam mencapai tujuan organisasi di antaranya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Kantor Dinas, 3 (tiga) unit Kantor UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 1 (satu) unit Kantor UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
 - ✓ UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I berlokasi di Kota Balikpapan untuk melayani Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
 - ✓ UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II berlokasi di Kota Samarinda untuk melayani Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu.
 - ✓ UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III berlokasi di Kabupaten Berau untuk melayani Kabupaten Berau,

Kutim dan Bontang.

- ✓ UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berlokasi di Kota Samarinda untuk melayani 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
- b. Alat-alat berat yang dioperasikan oleh masing-masing UPTD Pemeliharaan Infrastruktur, di antaranya :
- ✓ UPTD Wilayah I : 3 unit excavator (2 mini exca, 1 exca 330), 1 unit loader, 1 unit grader, 1 unit truck crane (low power), 1 vibrator roller (4 ton), 1 compaktor sakai, 7 unit Dump Truck, 1 unit Vibrator Roller Bomag 8 Ton, 1 unit Backhoe Loader Case, 1 unit Pc 200-8, 1 unit Cutter, 1 unit Chain Saw Besar, 1 unit Chain Saw Kecil, 1 unit Tronton, 2 unit Stamper Strika, 3 unit Stamper Kodok, 2 unit Exavator, 1 unit Baby Roller, 2 unit Loader, 2 unit Grader.
 - ✓ UPTD Wilayah II : 2 unit Excavator, 4 unit Mini Excavator, 2 unit Motor Grader, 4 unit Vibrator Roller, 2 unit Backhoe Loader, 1 unit Tronton, 9 unit Dump Truck, 1 unit Traktor, 1 unit Dozer.
 - ✓ UPTD Wilayah III : 6 unit Motor Grader, 1 unit Aspal Equipment, 3 unit WHEEL Excavator, 5 unit Excavator, 3 unit Vibrator Roller, 10 unit Dump Truck, 1 unit Concrete Breaker, 4 unit Cutter, 1 unit Compressor, 1 unit Motor Grader, 1 unit Backhoe Loader, 1 unit Baby Roller, 1 unit Self Loader Truck, 4 unit Mesin Pemotong Rumput, 3 unit Stamper, 3 unit Pemotong Aspal, 1 unit AMP Mobile, 5 unit Genset, 1 unit Excavator Mini, 1 unit Crane Truck, 1 unit Asphal Mixing Plant, 1 Unit Tandam Roller (Bomag), 1 Unit Wheel Loader, 1 Unit Self Loader (Tronton)
- c. 33 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 103 unit Kendaraan Dinas Roda Dua

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari perkembangan daerah. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemajuan wilayah.

Perkembangan kinerja dinas dapat dilihat dari data dan informasi dinas selama beberapa tahun terakhir. Data dinas mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan ada sebagian kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun, namun terdapat juga beberapa yang mengalami penurunan. Beberapa kondisi layanan dinas yang memerlukan perhatian yaitu panjang jalan provinsi jalan baik, persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, luas area permukiman tertata, dan persentase luas pemukiman yang tertata. Data kinerja dinas secara rinci mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 dimuat pada tabel di bawah. Terdapat tahun tertentu yang tidak memiliki data capaian antara lain disebabkan adanya perubahan dokumen perencanaan atau kebijakan pemerintah pusat.

Tabel 2.4.

**Data Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Provinsi	Km	895,09	895,09	895,09	895,09
2	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	61,45	69,77	75,20	77,52
2	Rasio jumlah panjang jalan per jumlah penduduk	Persen	0,43	0,43	0,42	0,41
3	Panjang Jalan Provinsi	Km	895,09	895,09	895,09	895,09
	a. Jalan Baik	Km	93,74	408,38	257,03	284,86
	b. Jalan Sedang	Km	456,27	216,10	389,26	408,99
	c. Jalan Rusak	Km	195,12	101,48	126,94	104,82

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	d. Jalan Rusak Berat	Km	149,96	169,13	121,87	96,42
4	Ketersediaan Jalan Tol	Km	64,87	64,87	99,35	99,35
4	Panjang Jembatan	Meter	32709,97	33473,97	33548,97	33548,97
5	Jumlah Jembatan	Unit	2406,00	3170,00	3173,00	3173,00
6	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi					
	a. Arteri	Km	326,22	326,22	326,22	326,22
	b. Kolektor	Km	3935,91	3935,91	3935,91	3935,91
	c. Jalan Lokal	Km	4061,59	4061,59	4061,59	4061,59
	d. Jalan Lingkungan	Km	1793,58	1793,58	1793,58	1793,58
7	Panjang jalan yang memiliki fasilitas					
	a. Trotoar	Km	18,33	18,33	18,33	18,33
	b. Drainase	Km	609,57	609,57	635,28	637,90
	c. Trotoar dan Drainase	Km	627,90	627,90	653,61	656,23
	d. Sempadan Jalan	Km	870,82	870,82	870,82	870,82
8	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 ton	%	20,15	20,15	27,83	27,83
9	Panjang Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Km	0,34	0,34	0,64	0,64
10	Panjang Wilayah Rawan Longsor	Km	2,00	2,00	3,00	3,00
11	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%	16,80	16,80	21,40	21,40
12	Sisa luas area permukiman kumuh tertata	Ha	1525.47	1287.82	1190.14	1185.14
13	Luas Area Permukiman Kumuh Keseluruhan	Ha	2636.28	2636.28	2636.28	2636.28
14	Pengurangan Luas kawasan kumuh Yang Tertata	%	42.14	51.15	54.83	55.02
15	Prasarana Irigasi/Pengairan					
	a. Non Teknis	m	852203,06	852203,06	852203,06	852203,06
	b. Teknis	m	992089,33	992089,33	992089,33	992089,33
	c. Luas Irigasi	Ha	6949,37	6949,37	6949,37	6949,37
	d. Rasio Irigasi	%	39,40	39,40	39,40	39,40
	e. Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	19,18	19,18	19,18	19,18
	f. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	1332,83	1332,83	1332,83	1332,83
	g. Luas Lahan Budidaya	Ha	5476,70	5476,70	5476,70	5476,70

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	h. Luas Lahan Pertanian Yang Terlayani Jaringan Irigasi dan Pengairan	Ha	4278,37	4278,37	13878,50	13878,50
16	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi					
	a. Pasok Air Irigasi	lt/dtk	150,00	150,00	150,00	150,00
	b. Luas Lahan Terairi	Ha	38942,57	38942,57	38942,57	38942,57
	c. Pasok Irigasi Total	lt/dtk	120,00	120,00	120,00	120,00
	e. Rancangan Luas Areal	Ha	11491,00	1149,00	1149,00	1149,00
17	Jumlah PDAM	Unit	9	9	9	9
18	Luas Kawasan Pemukiman	Ha	396299,13	396299,13	396266,13	396266,13
19	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	396266,00	7274,48	7274,48	7274,48
20	Luas Rencana Peruntukan Lahan	Ha	14326,85	12808603,82	12808603,82	12808603,82
21	Realisasi RTRW	%	78,35	47,73	47,73	47,73
22	Luas Lahan Produktif	Ha	n/a	6090518,21	6090518,21	6090518,21
23	Luas Lahan Kritis	Ha	n/a	11070432,46	11070432,46	11070432,46
24	Luas Lahan Hutan Rakyat	Ha	7643,98	587,63	587,63	587,63
25	Luas Wilayah Budidaya	Ha	10395026,00	n/a	n/a	n/a
26	Luas Kawasan Lindung	Ha	2283360,00	1820425,78	1820425,78	1820425,78
27	Luas Kawasan Industri	Ha	32887,00	36386,44	36386,44	36386,44
28	Skor penyelenggaraan tata ruang	%	66,68	66,46	n/a	n/a
29	Jumlah Luas Wilayah Kekeringan	Ha	n/a	1765744,77	1765744,77	1765744,77
30	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan	Ha	4338233,00	n/a	n/a	n/a
31	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	%	7835,00	4773,00	4773,00	4773,00
32	Persentase Luas Wilayah Produktif	%	0,00	609051821,00	609051821,00	609051821,00
33	Persentase Luas Wilayah Industri	%	0,32	3638644,00	3638644,00	3638644,00
34	Persentase Luas Wilayah Kekeringan	%	0,00	176574477,00	176574477,00	176574477,00
35	Air Baku					
	a. Kapasitas air baku	lt/dtk	7,00	7922,00	8400,00	8400,00
	b. Cakupan Layanan Air Minum	%	56,84	64,53	70,78	78,00
	c. Persentase Penyediaan air baku kawasan industri	%	13,79	13,79	13,79	13,79
36	Rumah Layak Huni	Unit	16127,00	20497,00	25467,00	27972,00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
37	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1278,48	1278,48	1278,48	1278,48
38	Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan	%	54,59	62,64	67,48	69,67
39	Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	Orang	6.344	4.902	2.579	3.840
40	Presentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	%	64,87	70,11	70,11	70,11
41	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik di Wilayah I	%	52,00	58,00	65,00	65,00
42	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik di Wilayah II	%	52,00	58,00	63,00	63,00
43	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik di Wilayah III	%	52,00	58,00	60,00	60,00
44	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	73.481	72.881	71.781	70.811
45	Luas Genangan Banjir Perkotaan	Ha	664,20	641,00	477,00	400,00
46	Indikator SDGs (PUPR):					
a	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Kabupaten/Kota (Skala Kota)	7,00	7,00	7,00	7,00
b	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	2,58	2,72	2,73	4,71
c	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten/Kota	8,00	9,00	9,00	9,00
d	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana	Rencana	4,00	4,00	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
	Tata Ruang Wilayah (RTRW)					
e	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Wilayah Sungai	1,00	2,00	n/a	n/a
f	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Wilayah Sungai	1,00	4,00	n/a	n/a
g	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Lembaga	2,00	4,00	n/a	n/a
h	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DAS	4,00	4,00	n/a	n/a
i	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DAS	4,00	4,00	n/a	n/a
47	Indikator SDGs (Perkim):					
a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	56,84	64,53	70,78	78,00
b	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	41,75	47,40	n/a	n/a
c	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	80,89	80,89	79,85	81,79
d	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa / Kelurahan	83,00	83,00	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
e	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa / Kelurahan	54,00	54,00	n/a	n/a
f	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	1,60	1,62	1,65	1,86
g	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/dt	7,92	8,40	8,40	8,40

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id, diolah

Berbagai upaya dan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 sampai 2022 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja Dinas PUPR-PERA. Target dan realisasi indikator kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksanaan dari Perubahan Renstra Dinas PUPR-PERA dapat dilihat di tabel di bawah. Pada tahun tertentu terdapat indikator kinerja yang tidak lagi digunakan atau sebaliknya, terdapat indikator kinerja baru. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat dalam periode pelaksanaan Renstra PD dan adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra pada tahun 2021.

Tabel 2.5.**Tingkat Capaian Kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022**

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					TINGKAT CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi	Kawasan	2	3				2	5				100,00	166,67			
2	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	29,41	57,65	78,82	94,12	100,00	29,41	57,65	78,82	94,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase peluang kerja bagi masyarakat jasa konstruksi	%	25,00	28,00	31,29	33,27	36,06	25,88	28,55	34,36	36,51		104	92	109,81	109,7	
4	Cakupan layanan air minum	%	62,00	64,53	66,53	68,53	70,53	62,23	70,08	70,78	78,00	78,50	100	108,6	106,3	113,8	111,3
5	Luas Kawasan Kumuh	Ha	1525,47	1287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82	1525,47	1287,82	1.190,14	1.185,14		100	100	195,36	102,68	
6	Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.008,50	14.808,50	14.028,50	14.278,50	14.778,50	13.378,11	14.958,50	14.078,50	14.278,50		95,50	101,01	100,36	100	
7	Luas genangan banjir perkotaan	Ha	664	575	420	374	329	641	411	406,3	318,9		96,54	71,48	96,74	117,28	
8	Panjang pantai kritis	Km	12.933	11.733				12.966	11.738				100,26	100,04			
9	Skor penyelenggara	%	66,68	69,01	75,94	76,74	83,1	66,46	66,46	75,38	78,57		99,67	96,30	99,26	102,38	

N O	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET					REALISASI					TINGKAT CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	aan penataan ruang																
10	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungka n	Kawa san			4	5	7			4	5				100,00	100,00	
11	Tingkat kemantapan jalan provinsi	%			75,02	76,15	78,27			75,20	77,52				100,24	101,79	
12	Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata	%	n/a*	n/a*	81,45	95,16	100	n/a*	n/a*	81,45	95,16	100	n/a*	n/a*	100,00	100,00	100,00
13	Capaian akses air minum layak	%	62,00	64,53	66,53	68,53	70,53	62,23	70,08	70,78	78,00	78,50	100	108,6	106,3	113,8	111,3
14	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%			31,29	33,27				33	36,51				105,5	109,74	

Sumber: LKjIP Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 diolah

Keterangan:

*) Target Gedung dan Bangunan Lingkungan belum bisa teridentifikasi menjadi 1 indikator target, karena pada periode 2019-2020 masih terpisah ke dalam 2 (dua) indikator di 2 program

Dari data realisasi di atas, terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 terdapat 3 indikator kinerja pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 4 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Di tahun 2020, terdapat 6 indikator kinerja pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 1 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Untuk tahun 2021, terdapat 5 indikator kinerja pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 3 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Untuk tahun 2022, terdapat 3 indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi 100 persen, dan 3 indikator kinerja yang mencapai 100 persen. Trend capaian ini kemudian diprediksi akan sama di tahun 2023. Cukup baiknya tingkat capaian kinerja tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan kinerja setiap unsur/bidang Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur.

Gambaran kinerja umum per bidang Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur akan diuraikan sebagai berikut.

A. Bidang Bina Marga

Ketersediaan infrastruktur, sebagaimana diketahui bersama, sangat berpengaruh terhadap daya saing daerah. Hal ini karena tingkat daya saing diukur dari ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi daerah. Kinerja pelayanan infrastruktur dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memerhatikan beberapa indikator utama seperti kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur: konektivitas jalan dan jembatan, Sumber Daya Air, bangunan, perumahan dan permukiman, jasa konstruksi serta penataan ruang terkait ketersediaan air baku dan air bersih, jaringan irigasi, dan perumahan. Kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No.	Urusan/Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7,00	7.922	8400,00	8400,00
2	Cakupan layananAir Minum Perpipaan (%)	54,59	62,64	67,48	69,67
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni(Unit)	46722,00	42352,00	41152,00	411520,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
4	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	64,87	70,11	70,11	70,11

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan jaringan jalan dan kualitas jalan. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan Provinsi hingga tahun 2022 sesuai dengan SK Dinas PUPR-PERA yaitu sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap mencapai 77,52 persen.

Adapun konektivitas jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat - Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, konektivitas infrastruktur jalan di Kalimantan Timur masih belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama masih terbatasnya jaringan jalan dan prasarana perhubungan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Ketersediaan jalan provinsi dalam kondisi mantap juga belum mampu sepenuhnya mendukung konektivitas 8 (delapan) Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No. 1 Tahun 2016) dan pusat produksi, kawasan industri, serta outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan. Ketersediaan jaringan jalan belum mampu menjangkau seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti:

- a. Kawasan industri pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Kawasan industri pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat;
- c. Kawasan Agropolitan Regional Kutai Timur.

Adapun KSP yang memiliki infrastruktur jalan yang cukup baik namun keterhubungan dengan kawasan sentra produksi masih belum optimal sehingga menjadi salah satu permasalahan dalam menarik investasi di kawasan KSP, seperti:

- a. Kawasan industri perdagangan dan jasa di Kota Samarinda;
- b. Kawasan industri manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- c. Kawasan industri oleochemical di Maloy, Kutai Timur.
- d. Kawasan industri petrokimia berbasis migas dan kondensat Bontang; dan
- e. Kawasan industri pertanian Paser, PPU.

Infrastruktur jalan khususnya konektivitas wilayah dari dan ke kawasan industri yang merupakan KSP tersebut masih memiliki keterbatasan sehingga pengembangan KSP juga belum optimal khususnya dalam distribusi barang dan jasa, termasuk di dalamnya distribusi barang dari kawasan sentra produksi. Selain itu, kualitas jaringan jalan terbangun belum optimal yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang mencapai 408,99 km, kondisi rusak ringan mencapai 104,82 km, dan kondisi rusak berat mencapai 96,41 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.806,76 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 1.430,61 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 442,50 Km, kondisi sedang 988,11 Km, kondisi rusak ringan mencapai 278,01 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 98,14 Km.

Gambar 2.2.
Rekapitulasi Kinerja Jalan Provinsi



Tabel 2.7.
Rekapitulasi Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab. / Kota : KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2022

DD1

No	No. Ruta	Nama Rute Jalan	Kec. Tang. Mula	Panjang Rute (Km)	Lebar Rute (m)	Panjang Tipe Jenis Perbaikan (m)					Panjang Tipe Kondisi (%)								LRT Km2	Akses ke Jalan M / P / K	Kec.	
						Aspal / Paved / Macadam	Terdur / Hard / Kerikil	Terdur / Dapur Tambak	Rigit	Bak		Setang		Rusak Ringan		Rusak Berat						
										%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%				Km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	34 001 H	JL. BUNG TOMO (SAMARINDA SEBERANG)	Samarinda Seberang	2,23	10,8 - 10,4	0,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-		
2	34 002 H	JL. SURYAKANTA (SAMARINDA)	Samarinda Ulu	0,10	7,3 - 10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01	79,10	7,20	0,70	0,00	1,00	0,10	-	0	-		
3	34 003 H	J. H.A.M. RIFAZDI (SAMARINDA SEBERANG)	Lap. Jarak B	7,34	0,1 - 20	0,00	0,00	0,00	7,34	30,00	2,29	69,69	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
4	34 004 H	J. HARUN NAFIS (SAMARINDA SEBERANG)	Lap. Jarak B	4,00	0,0 - 14	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	77,29	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
5	34 005 H	JL. APT. PRANOTO (SAMARINDA SEBERANG)	Samarinda Seberang / Lap. Jarak B	1,00	10,0	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	70,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
6	34 006 H	JL. MOES HAZAN (SAMARINDA SEBERANG)	Lap. Jarak B	2,30	20,1 - 24,3	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	100,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
7	34 007 H	JL. R. SIDIHARTO (SAMARINDA)	Samarinda Ulu	1,10	14 - 14,0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
8	34 008 H	JL. S. PAMMAN (SAMARINDA)	Samarinda Ulu / Sungai Pangaj	1,10	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
9	34 009 H	J. AHMAD KHA (SAMARINDA)	Sungai Pangs	2,00	10,0 - 14,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
10	34 010 H	J. TELUK SEMI (SAMARINDA)	Sungai Pangaj	0,00	0,1 - 10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
11	34 011 H	JL. MT. HARVOND (SAMARINDA)	Sungai Pangaj / Sungai Ulu	2,00	0,0 - 10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
12	34 012 H	JL. KH. WAHID HASYIM II (SAMARINDA)	Samarinda Ulu	2,00	0,1 - 10,0	1,00	0,00	0,00	0,70	70,00	1,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
13	34 013	SP. 4 OUTER RING ROAD 'A' - BANDARA SAMARINDA (RPH)	Samarinda Ulu	10,70	7 - 11,0	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
14	34 014	SP. BATU CEMPAI - SP. 12 - SP. 4 OUTER RINGROAD (RPH)	Samarinda Ulu	10,01	0,0 - 10	0,00	0,00	0,00	10,01	70,01	0,13	17,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
15	34 015	SP. BATU CEMPAI - BATU BEDAGUNG - SP. 4 OUTER RINGROAD (RPH)	Samarinda Ulu	7,10	0,0 - 10,0	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
16	34 016	SAMARINDA - ANGLANA	Samarinda B / Sambutan / Anglana	10,00	0,0 - 10,0	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
17	34 017	SP. 3 SIBIRMA - ISUKA BADAH	Isuka Badah	10,00	0,0 - 7,0	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
18	34 018 H	JL. MULINAWAN (BALIKPAPAN)	Teluk / Balikpapan Pasar	21,10	0,1 - 14	21,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
19	34 019	RTS. BALINPAPAN - SAMARINDA SAMBOJA	Samboja	10,01	0 - 7,0	14,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
20	34 020	RTS. SAMBOJA - RTS. MUARA JAYA	Muara Jaya / Samboja	04,00	0 - 7,0	20,71	0,00	0,00	14,00	20,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
21	34 021	SAMARINDA SEBERANG - SANGA SANGA	Samarinda Seberang / Pangsang / Sanga Sanga	20,10	0 - 14	4,00	0,00	0,00	20,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
22	34 022	SANGA SANGA - GONDANG (BENTUNG)	Sanga Sanga / Muara Jaya	10,00	0 - 7	0,00	0,00	0,00	11,00	70,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
23	34 023	RTS. 30 - RTS. SAMBOJA	Samboja	7,00	0 - 0,0	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
24	34 024	RTS. 30 - RTS. SEPANG	Sepang / Sepang	00,00	0,0 - 0,1	10,00	0,00	0,00	24,14	70,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
25	34 025	SP. BENTUNG - SP. MUARA JAYA	Muara Jaya / Samboja	01,00	0,0 - 10,0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
26	34 026	RTS. 5 BUKAPAPAN - KAYANG	Kayang / Ulu / Balikpapan Bera	10,00	0,1 - 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
27	34 027	RTS. 5 BUKAPAPAN - PETUNG (PETUNG)	Petung / Petung	00,00	0 - 0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
28	34 028	JL. JALAU - JORH - PONDONG BUKU	Teluk Orong / Rute	14,40	0 - 7,0	10,00	0,00	0,00	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
29	34 029	PATUNG LEMBUHAN - SEPANG	Tenggorong Sepang / Sepang / Muara Kaman	00,71	0,0 - 0,1	20,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
30	34 030	SP. SEPANG - RTS. 5 BUKAPAPAN	Sepang / Muara Kaman	0,00	0,0 - 7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
31	34 031	SP. KALORANG - TELUKAYAN	Kalorang / Kalorang / Teluk / Teluk	20,00	0,1 - 10,0	10,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
32	34 032	TALANG REDES - TALANG	Talang / Talang / Talang	10,10	0 - 10	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
33	34 033	RTS. 5 BUKAPAPAN - SP. LAMAYAN	Teluk Bayu	0,00	7 - 10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		
A. TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI (Km)				000,00		000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00					
B. PERSENTASE JALAN (%)				000%		000%	000%	000%	000%	000%	000%	000%	000%	000%	000%	000%	000%					

Sumber: Dinas PUPR-PERA Provinsi KALIM, 2022

Berikut data jalan menurut status, jenis permukaan dan kondisinya di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.8.
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (km)

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,90	1.490,50	0,00	4,31	311,95
2	Provinsi	895,09	465,29	127,59	27,17	275,04
3	Kabupaten/ Kota	10.710,12	2608,20	2912,17	2530,64	2658,89

Sumber: Dinas PUPR-PERA Provinsi KALTIM, 2022

Tabel 2.9.
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (km)

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	438,73	995,67	179,79	96,71
2	Provinsi	284,86	408,99	104,82	96,41
3	Kabupaten/Kota	3.368,37	1.737,49	1.464,57	4.140,07
TOTAL		4.091,96	3.142,15	1.749,18	4.333,19

Sumber: DD1 Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota, 2022

Persoalan lain yang berkaitan dengan konektivitas wilayah yaitu ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kabupaten/ kota belum optimal. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan mobilisasi alat berat menjadi lebih mahal. Kota Balikpapan merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

Melihat pada material atau bahan yang digunakan dalam pembangunan jalan, mayoritas jalan di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh aspal sebesar 5.622,03 km, namun demikian masih terdapat cukup banyak jalan kerikil (3.147,23 km) dan tanah (4.194,06 km) sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Panjang Jalan Berdasarkan Material (Negara + Prov + Kab/Kota)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota	14333,67	15359,80	15359,79	15359,85	15359,85
1. Aspal	5019,23	5756,64	5622,03	5589,22	5589,22
2. Berbatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Hotmix (Aspal Beton)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Cor Beton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kerikil	3030,90	2997,74	3159,62	3147,23	3147,23
6. Tanah	3979,64	4295,27	4194,06	4194,83	4194,83
7. Lainnya	2303,90	2310,15	2384,08	2428,57	2428,57
Panjang Jalan Nasional	1703,10	1710,91	1710,90	1710,96	1710,96
1. Aspal	1351,39	1490,50	1.490,50	1428,99	1428,99
2. Kerikil	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25
3. Tanah	0,50	4,31	4,31	0,00	0,00
4. Lainnya	351,21	216,10	216,10	265,72	265,72
Panjang Jalan Provinsi	895,10	895,09	895,09	895,09	895,09
1. Aspal	608,48	581,02	529,65	475,11	475,11
2. Kerikil	94,57	8,41	132,49	141,65	141,65
3. Tanah	43,44	125,32	28,42	29,19	29,19
4. Lainnya	148,61	180,34	204,53	249,14	249,14
Panjang Jalan Kabupaten/Kota	11735,47	12753,80	12753,80	12753,80	12753,80
1. Aspal	3059,36	3685,12	3685,12	3685,12	3685,12
2. Kerikil	2936,33	2989,33	2989,33	2989,33	2989,33
3. Tanah	3935,70	4165,64	4165,64	4165,64	4165,64
4. Lainnya	1804,08	1913,71	1913,71	1913,71	1913,71

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Pada tahun 2018 dilakukan penetapan Status Jalan Provinsi Kalimantan Timur yang melalui Keputusan Gubernur No. 622/K.295/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi, yaitu sepanjang 895.09 Km. Dari perubahan panjang jalan tersebut maka kondisi mantap jalan provinsi mengalami perubahan mencapai 77,52% dan tidak mantap mencapai 22,48% di tahun 2022.

Selanjutnya, bila dilihat dari fungsinya, pemanfaatan jalan terbagi atas jalan arteri, kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dengan rincian panjang jalan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.11.
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi dan Fasilitas
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	2022	
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi						
1. Arteri	326,21	326,22	326,22	326,22	326,22	Data Jalan Nasional
2. Kolektor	1384,69	3.935,91	3.935,91	3935,91	3935,91	Data 2018 komulatif Prov& Kab/Kota
3. Jalan Lokal	1712,75	4.061,59	4.061,59	4061,59	4061,59	Data 2018 komulatif Prov & Kab/Kota
4. Jalan Lingkungan	93570,74	1.793,58	1.793,58	1793,58	1793,58	Data 2018 komulatif Prov & Kab/Kota
Panjang jalan yang memiliki fasilitas						
1. Trotoar	18,33	18,33	n/a	18,33	18,33	
2. Drainase	609,57	609,57	n/a	609,57	609,5	
3. Trotoar dan rainase	627,90	627,90	n/a	627,90	627,90	
4. SempadanJalan	870,82	870,82	n/a	70,82	870,82	

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Pembangunan infrastruktur jalan senantiasa berbarengan dengan pembangunan jembatan sebagai sarana penghubung antar wilayah yang terpisahkan oleh aliran sungai. Pembangunan jembatan selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2022 jumlah jembatan yang terbangun sebanyak 3.173 unit dengan panjang jembatan mencapai 33548,97 Km. Jumlah Jembatan yang terbangun pada ruas jalan provinsi sebanyak 131 unit dengan panjang total 6.069,55 meter (sumber: hasil inspeksi kondisi jembatan tahun 2022).

Tabel berikut menunjukkan capaian pembangunan jembatan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018- 2022.

Tabel 2.12.
Pembangunan Sarana Jembatan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Panjang Jembatan	32238,97	32709,97	33473,97	33548,97	33548,97
2. Jumlah Jembatan	2358,00	2406,00	3170,00	3173,00	3173,00

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

Guna mengantisipasi terjadinya longsor pada saat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan maka dibangun pula turap berupa dinding vertical yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah dan menahan masuknya air ke dalam lubang galian.

Tabel 2.13.
Pembangunan Turap di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Panjang Turap di WilayahJalan Penghubung dan Aliran Sungai RawanLongsor (Km)	2,00	0,34	0,34	0,64	0,64	
2. Panjang Wilayah Rawan Longsor (Km)	2,00	2	2	3,00	3,00	Data Sementara, Kubar, Kukar, kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Mahulu tidak memilikidata
3. Persentase PembangunanTurap diilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor (%)	100,00	16.80	16.80	21,40	21,40	Panjang Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor / Panjang Wilayah Rawan Longsor x100

Sumber: www.sidata.kaltimprov.go.id

B. Bidang Cipta Karya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Belum meratanya penyediaan air baku dan air bersih, menjadi faktor utama minimnya layanan SPAM di suatu wilayah. Ditambah lagi masih kurangnya prasarana dan sarana unit air baku serta unit pengolahan air kemudian mempengaruhi kapasitas distribusi dan ketersediaan layanan air minum di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur layanan dasar air minum akan meningkatkan kualitas sistem penyediaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada tahun 2021 capaian akses air minum layak mencapai 70,78%. Persentase penyediaan air baku kawasan industri di tahun 2018 masih sebesar 13,79%.

Tabel 2.14.
Penduduk Terlayani Air Minum Layak
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Air Minum Layak (%)			
		2019	2020	2021	2022
1	Balikpapan	97,63	97,84	97,84	99,25
2	Penajam Paser Utara	23,33	33,91	49,90	30,90
3	Paser	62,92	66,88	66,80	70,14
4	Bontang	77,42	79,57	81,18	83,55
5	Kutai Timur	37,08	43,28	44,20	51,73
6	Berau	73,27	73,77	72,44	82,16
7	Samarinda	82,59	80,19	79,39	87,27
8	Kutai Kartanegara	59,71	56,64	56,64	72,85
9	Kutai Barat	60,38	72,19	72,19	86,02
10	Mahakam Ulu	13,90	13,95	13,89	66,06
JUMLAH		68,97	70,08	70,78	78,00

Sumber: Data Sektor Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari tren *update* capaian per tahun masing-masing Kabupaten/Kota, maka terlihat inkonsistensi data capaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dan konsep perhitungan capaian air minum oleh masing-masing daerah dan Provinsi. Untuk capaian air minum yang terukur dengan baik, maka kedepan diperlukan penyamaan persepsi baseline data perhitungan capaian air minum, seperti penyepakatan jumlah jiwa dalam satuan Sambungan Rumah, keikutsertaan data sektor komersil dalam perhitungan capaian air minum, dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan data di atas, peningkatan capaian akses air minum layak mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, di mana pada tahun 2019 sebesar 68,97% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 70,08%, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 70,78%, dan di Tahun 2022 meningkat tajam menjadi 78,00%.. Capaian ini masih memiliki GAP sekitar 22% dari target nasional RPJMN 2024, yang mana capaian akses air minum layak untuk Provinsi Kalimantan Timur ditargetkan sebesar 100% yang terdiri dari minimal 71% akses jaringan perpipaan dan sisanya 29% akses bukan jaringan perpipaan. Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan peningkatan capaian akses air minum layak adalah dukungan kinerja layanan PDAM di Kabupaten/Kota, namun kondisinya saat ini masih dianggap belum sepenuhnya optimal hampir di seluruh Kabupaten/Kota, terutama di Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Berdasarkan tabel data cakupan layanan air minum di atas,

kabupaten yang sudah terlayani dengan cukup baik antara lain adalah Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan, namun ketiga wilayah ini masih memiliki permasalahan terkait menurunnya kapasitas/kualitas air baku, tingginya *non revenue water* (NRW) atau kehilangan air, serta belum optimalnya idle capacity yang ada dalam operasional IPA dan JDU, hal ini akan mempengaruhi keandalan SPAM dimasa yang akan datang. Secara umum, pemerataan suplai air baku dan optimalisasi layanan air minum maupun pengelolaannya perlu lebih ditingkatkan lagi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan daerah air minum (PDAM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2020 telah terdapat 9 perusahaan air minum (PDAM) dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.347 liter/detik. Pengolahan air baku melalui unit produksi PDAM di Kalimantan Timur hingga tahun 2021 telah mencapai efisiensi sebesar 87,93%.

Tabel 2.15.
Jumlah PDAM di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021

Elemen Data	Tahun			Satuan
	2019	2020	2021	
Jumlah PDAM	9	9	9	Unit
Kapasitas Produksi Potensial	7.844	8.395	9.179	(Ltr/dtk)
Kapasitas Produksi Efektif	7.091	7.347	8.071	(Ltr/dtk)
Efektivitas Produksi	90,40	87,51	87,93	(%)

Sumber: Baseline Bidang Cipta Karya, 2018-2020

Dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan keandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air) Melihat permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan capaian akses air minum untuk seluruh masyarakat, maka kedepan akan diperlukan upaya untuk pemerataan akses

terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (digambarkan dalam Tabel II.14), dan akan potensial direalisasikan dengan skema kerjasama daerah, melalui Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi.

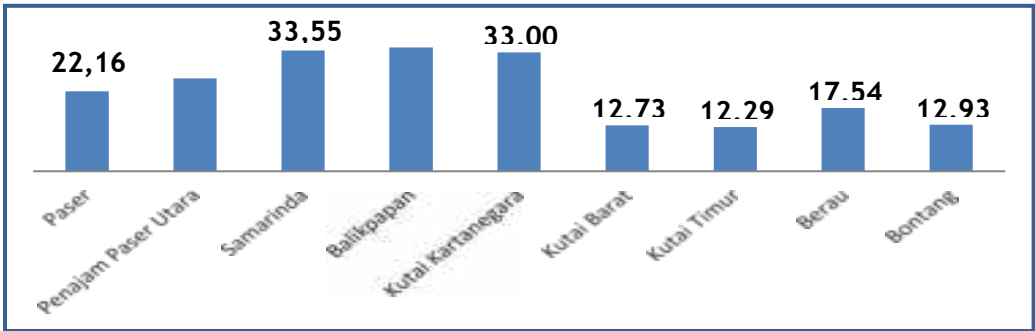
Tabel 2.16.
Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur

No	Potensi SPAM Regional	Kab/Kota YgTerlibat	Sumber Air Baku	
			Nama	Kapasitas
1	Kukar-Bontang *)	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bontang	Bendung Marangkayu	450 L/Det
2	Kutim-Bontang *)	Kab. Kutai Timur, Kota Bontang	Waduk Ex Tambang Indominco dan Sei. Mayang	250 L/Det
3	PPU – Balikpapan	Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	> 2.000 L/Det
4	Kukar – Balikpapan	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	Waduk Batu Lepek	5.000 L/Det
5	Paser – Balikpapan	Kab. Paser, Kota Balikpapan	Waduk Lambakan	12.000 L/Det
6	Paser – PPU	Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara	Sungai Telake (Longkali)	Dalam Kajian

Sumber: Data Sektoral Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Keteranga: Prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2024-2026

Untuk Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata kehilangan air (NRW) Distribusi berdasarkan data Audit BPKP Tahun 2020 di 9 PDAM yaitu sebesar 22,70 persen. Dengan NRW tertinggi berada pada 34,38 persen di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebesar 33,55 persen. NRW atau kehilangan air juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan layanan air minum menjadi tidak efisien dan optimal.

Gambar 2.3.
Gambaran Persentase Non Revenue Water (NRW)
Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 (%)



Sumber: Data Sektoral Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Selanjutnya selain mengukur kualitas bangunan perumahan, kinerja pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dapat dilihat dari akses dan kualitas sanitasi. Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik.

Tabel 2.17.
Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021
Persentase Rumah tangga yang menggunakan Jambansendiri (%)	91,34	92,49	93,33	93,53
Persentase Rumah tangga yang menggunakan Jambandengan Tangki Septik/IPAL (%)	83,78	72,68	88,80	88,78

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2021

Pada tahun 2021, sebagian besar RT telah mempunyai jamban sendiri sebesar 93,53% dari total RT keseluruhan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, proporsi RT yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebesar 88,78%.

Di samping fasilitas sanitasi, persoalan berikutnya yang dihadapi oleh Kalimantan Timur adalah belum optimalnya penanganan pesampahan. Menurut hasil FGD persoalan ini disebabkan oleh belum adanya TPA regional dan rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun belum memiliki

TPA Regional, terdapat beberapa TPA di Kabupaten Kota yang bisa dioptimalkan. Namun ada satu kabupaten yang belum memiliki TPA, yaitu Mahakam Ulu. Berikut adalah sebaran lokasi TPA dan sistem operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.18.
Sebaran Lokasi TPA dan Sistem Operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Sistem Operasional TPA	Luas TPA (Ha)
Balikpapan	Manggar	<i>Control Landfill</i>	±28
Samarinda	Bukit Pinang	<i>Open Dumping</i>	±9,5
	Sambutan	<i>Control Landfill</i>	±30
Bontang	Bontang Lestari	<i>Control Landfill</i>	±15 (aktif 6 ha)
Paser	Janju	<i>Control Landfill</i>	10,499
	Batu Sopang	<i>Control Landfill</i>	±2 (rencana menjadi 5 ha)
Penajam Paser Utara	Buluminung	<i>Control Landfill</i>	±10
Kutai Timur	Batotak	<i>Control Landfill</i>	±12
Kutai Kartanegara	Bekotok	<i>Open Dumping</i>	±4
Kutai Barat	Belau	<i>Control Landfill</i>	±15
Berau	Bujangga	<i>Control Landfill</i>	±10
Mahakam Ulu	-	-	-

Sumber: Data Sektoral Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika ditinjau dari prasarana persampahan, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Dari 11 TPA yang ada, dua diantaranya masih menggunakan sisten open dumping yaitu TPA Bukit Pinang di Samarinda dan TPA Bekotok di Kutai Kartanegara, sedangkan 9 TPA lainnya sudah menggunakan sistem Control Landfill. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, proses akhir sampah idealnya dilakukan dengan metode control landfill, sanitary landfill dan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, proses akhir sampah dengan metode open dumping harus segera diganti minimal dengan metode control landfill. Meskipun demikian, metode control landfill ini merupakan metode antara sebelum mampu menerapkan sistem sanitary landfill. Oleh karena itu, perbaikan metode pemrosesan akhir sampah perlu untuk diperbaiki terutama pada TPA yang masih menggunakan metode open dumping. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

C. Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Adapun kondisi perumahan dan kawasan pemukiman di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 2.19.
Luas Area Permukiman Tertata di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Luas area permukiman tertata	113,57	11,32	10,97	4,00	5,00	Ha
Persentase Luas Permukiman Yang Tertata	11,37	1,04	1,00	0,37	0,46	(%)

Sumber:<http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/52>, 2022

Berdasarkan data di atas, luas permukiman tertata di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 mencapai 113,57 Ha atau sebesar 11,37%. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan permukiman belum dilakukan secara tertata dengan memerhatikan tata ruang.

Tabel 2.20.
Luas Kawasan Pemukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Pemukiman Eksisting	Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman
Samarinda	12.910,00	39.156
Kutai Kartanegara	9.558,62	63.928
Bontang	3.024,09	7.775
Kutai Timur	9.906,89	79.923
Berau	5.818,32	76.643
Balikpapan	8.905,67	25.318
Penajam Paser Utara	3.342,19	27.123
Paser	3.944,22	62.298
Kutai Barat	1.359,78	11.311
Mahakam Ulu	138,94	2.790
Total	58.908,76	396.265

Sumber: RTRW Prov. Kaltim 2016-2036

Pada tahun 2017, luas kawasan peruntukan pemukiman mencapai 396.265 Ha dengan luas kawasan pemukiman eksisting sebesar 58.908,76 Ha atau 14,87 persen dari total luas kawasan peruntukan pemukiman. Sebagian besar kawasan pemukiman berada di Kota Samarinda (12.910 Ha) yang mencapai 21,9 persen dari total luas kawasan pemukiman.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun khususnya di wilayah perkotaan memberikan dampak terhadap kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh perkembangan perumahan maka akan terjadi backlog dimana seringkali angka pertumbuhan penduduk lebih besar daripada ketersediaan perumahan.

Angka *backlog* di atas merepresentasikan kebutuhan rumah untuk keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah *backlog* rumah di Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terjadi pada backlog kepemilikan maupun *backlog* penghunian. Pada tahun 2017, backlog kepemilikan mencapai 174.614 unit sedangkan *backlog* penghunian mencapai 218.648 unit. Artinya, jika dilihat kelayakan satu KK menghuni satu rumah, 23,49 dari 930.772 KK diantaranya masih menumpang. Peningkatan backlog yang terjadi setiap tahun mengindikasikan belum akses masyarakat terhadap perumahan yang belum optimal.

Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga khususnya yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya.

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah layak huni di provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak (kumuh). Ketidaklayakan rumah tersebut berupa kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah. Tantangan pemerintah dalam pengurangan backlog adalah harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih bermukim di area kumuh dan tidak layak huni.

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang

didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur teridentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan Kawasan. Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. . Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota terbaru hingga tahun 2022, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang menjadi kewenangan provinsi 203,85 ha yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.21.
Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
Paser	35,06	No. 653/KEP-332/2020
Kutai Barat	37,5	No. 413.2/K.719/2018
Kutai Kartanegara	37,51	No. 454/SK-BUP/HK/2019
Kutai Timur	0	No. 050/K.661/2015
Berau	25,79	No. 30 Tahun 2020
Penajam Paser Utara	0	No. 593.33/270/2017
Mahakam Hulu	0	No. 050.136.146/K.63/2020
Balikpapan	10,39	No. 188.45-326/2020
Samarinda	24,25	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
Bontang	33,35	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur	203,85	

Sumber: Dinas PUPR-PERA Provinsi KALTIM, 2021

Dari luasan 203,85 Ha ini, ditargetkan akan dilakukan penuntasan kumuh hingga tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Faktor lain yang menyebabkan penataan kawasan permukiman kumuh belum optimal adalah belum optimalnya perencanaan dalam penanganan kawasan kumuh.

Komponen berikutnya yang tidak terpisahkan dalam rancangan perencanaan pembangunan dan menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di kawasan permukiman adalah fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan

kebutuhan PSU Permukiman di beberapa lokasi di Kalimantan Timur berupa jalan lingkungan, drainase serta penerangan jalan umum (PJU). Area permukiman yang telah dibangun PSU dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.22.
PSU Terbangun di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022

No.	Tahun	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Lokasi yang Ditangani PSU	Total Penanganan
Jalan Lingkungan				20.213,35 m
1	2019	Samarinda	4	7.494 m
2	2019	Balikpapan	1	1.444 m
3	2020	Samarinda	3	4.884 m
4	2021	Samarinda	2	393,28 m
5	2022	Samarinda	9	5.543,07 m
Drainase				454 m
1	2020	Samarinda	1	454 m
Penerangan Jalan Umum				842 Titik
1	2022	Samarinda	4	50 Titik
2	2022	Kutai Kartanegara	3	81 Titik
3	2022	Balikpapan	6	359 Titik
4	2022	Penajam Paser Utara	10	352 Titik

Sumber: Realisasi Capaian Program PSU, 2022

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) termasuk ke dalam program penunjang di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun termasuk dalam program penunjang, program ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026 karena peningkatan PSU di lokasi permukiman masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

D. Bidang Sumber Daya Air

Salah satu sektor strategis pembangunan infrastruktur berikutnya di Kalimantan Timur adalah Sumber Daya Air. Keberadaannya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian. Dan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan air juga meningkat. Pada periode 2013-2017, pembangunan sektor Sumber Daya Air difokuskan pada 3 aspek, yakni upaya pemenuhan Kebutuhan Air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri, pembangunan jaringan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian, serta upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir. Dalam hal ini, sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang kesinambungannya sangat bergantung pada suplai air yang memadai. Pada tahun 2018, luas lahan pertanian yang

terlayani jaringan irigasi baru mencapai 15.191,5 Ha, atau 16,06 persen dari luas seluruh lahan sawah eksisting di Kaltim. Luasan tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota serta mencakup seluruh kewenangan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten seluas 94.572,92 Ha.

Tabel 2.23.
Kondisi Sawah Eksisting di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kab/Kota	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Non Irigasi (Ha)	Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	12.702	12.702
2	Kutai Barat	608	8.111	8.719
3	Kutai Kartanegara	6.071	29.921	35.992
4	Kutai Timur	2.881	6.874	9.775
5	Berau	2.831	7.654	10.485
6	Penajam Paser Utara	933	11.272	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	480
8	Balikpapan	0	250	250
9	Samarinda	294,5	3.453,5	3.748
10	Bontang	0	74	74
TOTAL KALTIM		13.618	80.791,5	94.410

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi, terdapat 8 (delapan) Daerah Irigasi permukaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan total luasan 12.060 Ha. Daerah Irigasi dan luasannya dapat dilihat pada table 2.28. Selain itu, terdapat 14 (empat belas) Daerah Irigasi rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dengan total luasan 23.000 Ha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Kondisi Daerah Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS DI (Ha)
1	Biatan	1.065
2	Labanan	1.050
3	Merancang	1.136,70
4	Semurut dan Buyung - buyung	1.089
5	Kaliorang	1.220
6	Selangkau	991,56
7	Marangkayu	1.506,75
8	Sungai Buluh	681,28
Total		12.051

Sumber: Perencanaan Sumber Daya Air 2019

Tabel 2.25.
Kondisi Daerah Irigasi Rawa di Provinsi Kalimantan Timur

NO.	KAB./KOTA	DAERAH IRIGASI RAWA	LUAS (Ha)
1	Berau	D.I.R.Rantau Pangan	1.500
2	Berau	D.I.R.Sei Kuran	1.000
3	Berau	D.I.R.Sukan Tengah	1.000
4	Berau	D.I.R.Tanjung Perengat	2.500
5	Berau	D.I.R.Urutang	2.000
6	Kutai Barat	D.I.R.Resak	1.000
7	Kutai Kartanegara	D.I.R.Sebulu	1.000
8	Kutai Timur	D.I.R.Bengalon	2.000
9	Paser	D.I.R.Laburan Lama	2.000
10	Paser	D.I.R.Padang Pangrapat	2.000
11	Paser	D.I.R.Riwang	1.500
12	Paser	D.I.R.Suliliran	1.500
13	Paser	D.I.R.Tanjung Aru	2.000
14	Paser	D.I.R.Tanjung Harapan	2.000
Total			23.000

Sumber: Perencanaan Sumber Daya Air 2019

Dari luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi tersebut, yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 43,53 persen atau seluas 5.250 Ha. Pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2018 meliputi 4 Daerah Irigasi, yaitu DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang dan DI Sungai Buluh luas daerah irigasi yang terlayani sebesar 1.573 Ha.

Dalam proses perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, integrasi memang belum dilakukan hingga posisi/lokasi spesifik. Penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya data geospasial yang akurat mengenai kondisi lahan sawah eksisting serta rencana lokasi pencetakan sawah. Penyediaan data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan agar ke depannya persoalan ini tidak menjadi penghambat Kaltim untuk meningkatkan indeks kinerja irigasi, indeks pertanian dan persentase ketersediaan beras.

Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami defisit air baku. Berdasarkan tabel neraca air baku, masing-masing kabupaten/kota kecuali Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit kebutuhan air baku pada tahun 2018, sehingga proyeksi kebutuhan air hingga tahun 2023 mengalami defisit yang semakin tinggi. Untuk itu, diperlukan infrastruktur pendayagunaan Sumber Daya Air.

Tabel 2.26.
Neraca Air Baku Tanpa Pengembangan (lt/dtk)

Kabupaten/Kota		Penyediaan Air Baku (Lt/ Dtk)	Wtp Terpas ang (Lt/Dtk)	Neraca Air Baku Tanpa Pengembangan (Lt/Dtk)						Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Paser	365	197	(78)	(88)	(94)	(103)	(111)	(120)	Defisit
2	Kutai Barat	211	197	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Defisit
3	Kutai Kartanegara	1.538	1.692	(3)	(39)	(63)	(94)	(126)	(158)	Defisit
4	Kutai Timur	365	292	(115)	(138)	(155)	(175)	(195)	(216)	Defisit
5	Berau	560	385	261	313	308	299	291	283	Surplus
6	Penajam Paser Utara	108	75	(137)	(140)	(142)	(144)	(147)	(149)	Defisit
7	Mahakam Ulu	50	50	(30)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	Defisit
8	Balikpapan	1.220	1.220	(90)	(111)	(123)	(142)	(160)	(179)	Defisit
9	Samarinda	3.064	2.633	946	914	895	868	840	795	Surplus
10	Bontang	475	330	68	62	56	50	44	40	Surplus
Jumlah		7.965	7.071	817	748	656	532	408	267	

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Defisit air baku lebih disebabkan masih kurangnya pembangunan infrastruktur pengambil air baku pada air permukaan dan semakin berkurangnya cadangan air tanah. Air permukaan adalah air yang mengalir secara berkesinambungan atau dengan terputus-putus dalam alur sungai atau saluran dari sumbernya yang tertentu, di mana merupakan bagian dari sistem sungai yang menyeluruh, meliputi air sungai, saluran, sumber, danau dan waduk. Air permukaan tersebut merupakan Sumber Daya Air potensial terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengambil air baku sudah dilakukan pada beberapa lokasi prioritas. Beberapa di antaranya telah terbangun dan sisanya belum direalisasikan. Terdapat pula beberapa prasarana yang telah terbangun namun belum dapat dioperasikan.

Tabel 2.27.
Kapasitas Air Baku, Cakupan Layanan Air Minum dan Persentase Penyediaan air baku kawasan industri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
1.Kapasitas air baku	7	7	7.922	8.400	8.400	lt/dtk
2.Cakupan Layanan Air Minum	47,59	56,84	64,53	64,53	64,53	%
3.Persentase Penyediaan air baku kawasan industri	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	%

Sumber: <http://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/dataprofil/dataku/60>, 2022

Masalah alih fungsi lahan, persampahan, pemukiman di bantaran sungai dan sistem drainase yang kurang memadai belum mendapatkan penanganan yang optimal, sehingga berdampak pada timbulnya bencana banjir di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan banjir akan mempunyai skala yang lebih besar bila parameter permasalahan yang mencakup DAS yang luas, daerah paparan banjir, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut tidak diatasi. Oleh karena itu, tercatat hampir semua kota di Kalimantan Timur pernah mengalami bencana banjir.

Tabel 2.28.
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	80
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	5
		Karangasam Besar	47
		Karangasam Kecil	22
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	28
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	0
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1.000
		Kandilo	188
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sangata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tingginya kejadian banjir tidak hanya disebabkan belum memadainya infrastruktur pengendali banjir, namun juga merupakan dampak dari masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, belum terpenuhinya ketersediaan bendali, folder dan drainase yang memadai serta banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Penyebab banjir dapat dibedakan menjadi penyebab alami dan penyebab manusia. Penyebab banjir secara alami ini sifatnya statis,

namun tetap menjadi faktor terjadinya banjir mulai dari jaman dahulu sampai saat ini dan sulit dikendalikan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Curah hujan yang tinggi, Kalimantan Timur mempunyai curah hujan tahunan yang tinggi yaitu antara 2.200- 2.400 mm/tahun.
2. Daerah rawan banjir berada pada daerah dengan topografi yang datar, dimana pada daerah ini pemukiman dan lahan usaha berkembang (Samarinda, Bontang, Sangata, Berau, Paser).
3. Daerah Aliran Sungai yang besar, sehingga debit yang dihasilkan dari daerah tangkapan air cukup besar (Mahakam, Sangatta, Kandilo, Longkali, Segah).
4. Alur sungai yang banyak mean dering (berkelok-kelok) dan dipengaruhi oleh pasang air laut. Kondisi ini akan memperlambat penurunan muka air banjir sehingga waktu kejadian banjir semakin lama.

Selain penyebab alami, banjir juga disebabkan karena ulah manusia yang sifatnya dinamis dan setiap waktu semakin meningkat dan menekan daya tampung lingkungan khususnya kemampuan alam untuk mereduksi limpasan permukaan. Adapun penyebab banjir karena kegiatan manusia/masyarakat, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Perkembangan populasi manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat, peningkatan pertumbuhan populasi ini memerlukan lahan untuk pemukiman dan lahan usaha. Pemenuhan lahan ini telah merubah bentang alam dan juga tutupan lahan. Daerah perbukitan banyak yang dipotong untuk menimbun daerah rawa, kawasan hijau atau kawasan dengan vegetasi penutup lahan yang masih bagus ditutup dengan material kedap air dan hilangnya cekungan-cekungan alam akibat sedimentasi.
2. Pola bermukim di bantaran sungai, banyak masyarakat yang bermukim di bantaran sungai sehingga menyempitkan alur sungai.
3. Tingginya erosi lahan akibat pembukaan lahan yang muaranya menjadi sedimentasi disungai, sehingga kapasitas alir sungai menjadi jauh berkurang.
4. Produksi sampah yang semakin hari semakin meningkat dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Material sampah yang masuk disungai dan saluran drainase menjadi penyebab menurunnya kapasitas alir sungai/saluran drainase.

Program Pengendalian banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah baik, Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai dengan saat ini masih kalah cepat dengan permasalahan banjir yang ada. Pengendalian banjir yang dilakukan dapat digolongkan dalam beberapa kegiatan:

1. Pemanfaatan potensi alam dan optimasi potensi alam dalam mereduksi limpasan permukaan.
2. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi, bendungan pengendali banjir, normalisasi alur sungai dan saluran drainase serta pembangunan waduk.
3. Pengendalian pengaruh pasang surut air laut kesungai-sungai utama sampai dengan drainase utama.
4. Pengendalian banjir yang bersifat non struktural, seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian banjir, pembentukan komunitas peduli sungai, peduli danau dan waduk, penyusunan peringatan dini banjir.

Beberapa program pengendalian banjir yang dilaksanakan pemerintah telah tertuang dalam kegiatan Masterplan Pengendalian Banjir pada masing-masing kabupaten/kota. Beberapa wilayah yang telah memiliki masterplan pengendalian banjir antara lain: Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Paser, dan Kab. Kutai Timur. Beberapa program pengendalian banjir secara struktural yang ada dalam masing-masing Masterplan Pengendalian Banjir antara lain, Pengembangan Bendungan dan Waduk Pengendali banjir (Bendungan Lempake, Teritip, Marangkayu, Samboja, Merancang, Bendali HM Ardans) sementara rencana bendungan pengendali banjir yang lain seperti bendungan Lambakan, bendungan Sangatta, Bendali Sukarahmat, Bendungan Kandilo, dan beberapa bendungan kecil di Kota Balikpapan.

Bendungan pada umumnya untuk mengendalikan banjir dari daerah hulu, sementara untuk pengendalian banjir di daerah tengah dengan mengembangkan kolam retensi maupun peningkatan tampungan alam seperti danau. Beberapa kolam retensi di Kota Samarinda seperti kolam retensi air hitam, Kolam Retensi Loa Hui. Sementara yang masih belum dibangun seperti kolam retensi Bengkuring, Kolam retensi Gunung Lingai, kolam retensi Rapak Dalam, kolam retensi Rapak Mahang, kolam retensi Sempaja semua berada di kota Samarinda, sedangkan yang kolam retensi Bontang, pengembangan Danau Kanaan dan depresi Kanaan ada

dikota Bontang. Di Kabupaten Paser terdapat rencana kolam retensi Kandilo; kolam retensi Teluk Bayur ada di Kab. Berau; di Kab. Kutai Timur terdapat kolam retensi Jl. Pendidikan; sementara di kota Balikpapan beberapa bendali telah dikembangkan, mulai dari bendali 1 sampai bendali 5 dan kolam retensi di DAS Ampal.

Untuk pengendalian banjir di daerah hilir dengan memperlancar aliran disaluran drainase dan juga pembenahan sistem drainase. Pengendalian pasang surut air laut masuk sungai utama dikendalikan dengan rencana mengembangkan pintu-pintu banjir yang dilengkapi dengan pompa banjir.

Pada pelaksanaan program terkait pengamanan kondisi pantai, terdapat berbagai kegiatan pengamanan pantai yang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Data Pengaman Pantai di Provinsi Kalimantan Timur

Nama Pantai	Lokasi		Tahun Pelaksanaan	Tipe Pengamanan	Panjang Penanganan (m)	Panjang pantai kritis	Luas yang sudah ditangani (Ha)	Luas yang akan ditangani (Ha)	Luas yang belum ditangani (Ha)
	Kabupaten/ Kota	Kecamatan							
Saloloang	Penajam Paser Utara	Penajam	2008	Revetment Buis Beton	500	3000	10	75	26,46
			2009	Revetment Buis Beton	467		9,34		
			2010	Revetment Buis Beton	642		12,84		
			2011	Revetment Buis Beton	500		10		
			2016	Revetment Buis Beton	318		6,36		
			2019	Revetment Buis Beton					
Tanjung Tengah	Penajam Paser Utara	Penajam	2014 -2016	Revetment Buis Beton	999	5600	19,98	140	120,02
Pejala	Penajam Paser Utara	Penajam	2013 -2015	Revetment Buis Beton	1.183	2500	23,66	174	150,34
BBU Manggar	Balikpapan	Balikpapan Timur	2012	Seawall & Buis Beton	230	3300	4,6	181,5	176,9
Manggar	Balikpapan	Balikpapan Timur	2013	Breakwater Blok Beton	68,8		1,376	66	64,624
			2016		54,6		1,092		
Sambit	Berau	Maratua	2011, 2014-2015	Tetrapoid	550	2000	11	100	89
Biduk-biduk	Berau	Biduk-biduk	2012 -2013	Revetment Buis Beton	1.478	4210	29,56	105,25	75,69
Talisayan - Dumaring	Berau	Talisayan	2017	Revetment Buis Beton	1274	1500	25,48	50	24,52
Derawan	Berau					2000		350	350
Beras Basah	Bontang	Bontang selatan	2013 -2015	Tetrapod	750	2500	15	250	235
Tanjung Harapan						5000		125	125
Bual-bual						2260		90	90
Senipah	Kutai Kartanegara	Senipah	2016	Tetrapod	72	1500	1,44	75	73,56
TOTAL					9.086	35.370	182	1.782	1.601

Sumber: Laporan Akhir Review Study Pantai Kritis se-Kaltim PT.Mettana Engineering Consultant

Posisi geografi Provinsi Kalimantan Timur member konsekuensi wilayah ini memiliki potensi Abrasi. Hingga saat ini infrastruktur pengendali abrasi belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 35.370 m garis pantai di Kaltim dalam kondisi kritis. Dari total panjang pantai kritis tersebut baru 9.086 m yang ditangani. Jika dikonversi menjadi luasan, wilayah pantai kritis yang belum tertangani mencapai 1.601 Ha.

E. Bidang Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Berikut adalah perhitungan SPM Bidang Penataan Ruang tahun 2016 - 2020 yang diperoleh dari indikator persentase tersedianya informasi mengenai RTRW Provinsi serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Tabel 2.30.

SPM Bidang Penataan Ruang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Pencapaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peta Analog					
	a. RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Rencana Rinci	0%	0%	0%	0%	0%
2	Peta Digital					
	a. RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Rencana Rinci	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa peta analog dan peta indikator pada rencana rinci adalah sebesar 0 persen karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi tidak lagi menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) sebagai rencana rinci dari RTRW Provinsi.

Adapun jika ditinjau dari Rancangan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang bahwa ketentuan tentang jenis dan/atau mutu pelayanan dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar pelayanan bidang penataan ruang mencakup standar pelayanan bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan bidang penataan ruang kabupaten/kota yang terdiri atas jenis pelayanan dan/atau mutu pelayanan. Jenis pelayanan pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang; dan/atau; dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan 5 (lima) jenis layanan yang sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2.31.
Perhitungan Kinerja Pemenuhan
Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

No	Jenis Layanan	Bobot
1	Konsultasi publik dalam penyusunan RTR dan proses persetujuan substansi	20%
2	Penyebarluasan informasi rencana tata ruang	20%
3	Pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha	20%
4	Pelayanan Pemenuhan RTH Publik	20%
5	Pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang	20%
Total Nilai		

Sumber: Rapermen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2021

Dalam upaya penyelarasan penataan ruang, pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penyelesaian produk rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kota/kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Berdasarkan peninjauan kembali (PK) RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW didapatkan penilaian dan rekomendasi RTRW P Kalimantan Timur. Berdasarkan penilaian kualitas RTRW Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 diketahui bahwa perubahan muatan materi RTRWP Kalimantan Timur sebesar 56,59 persen dan atas hal tersebut dan

sesuai kategori rekomendasi maka direkomendasikan pencabutan Peraturan Daerah tentang RTRWP Kalimantan Timur tahun 2016-2036. Penyusunan materi teknis revisi RTRWP dan draf ranperda telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut adanya rencana pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun 8 (delapan) Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur yang telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota lebih dulu sebelum ditetapkannya Perda RTRWP, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Sementara untuk Kabupaten Berau, baru menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Sehingga terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW kabupaten/kota. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu yang saat ini masih berproses untuk penetapan perda dan sudah mendapatkan Berita Acara (BA) Konsultasi evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Adanya perbedaan waktu dalam menetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota dengan Provinsi menyebabkan masih terdapat perbedaan dalam menetapkan peruntukan pola ruang. Terhadap perbedaan tersebut, perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW.

Tabel 2.32.
Progres Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tahun Perda RTRW	Tahun Pelaksanaan Revisi RTRW	Status Terakhir Proses Revisi RTRW	Status Penyusunan KLHS	Dokumen Kelengkapan persetujuan Substansi RTRW Berdasarkan PERMEN ATR/BPN 11/2021 (beri keterangan ada atau tidak ada)													Kendala dalam Penyusunan
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Samarinda	Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014	2019	Matek disusun Tahun 2019, dan saat ini sedang dalam proses melengkapi persyaratan Persub dan penyesuaian dengan PITTI	Sudah Pra Validasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah Pra Validasi	Ada	Ada	Tidak Perlu	PITTI: Jika membandingkan dengan Perda RTRW Provinsi Kaltim No. 1 Tahun 2016 maka masih terdapat banyak ketidaksesuaian, sedangkan untuk proses revisi RTRW Kota Samarinda telah menyesuaikan dengan Revisi RTRW Provinsi
Balikpapan	Nomor 12 Tahun 2012	2021-2022	Penyusunan KLHS dan Proses Mendapatkan Rekom BIG untuk Peta Dasar	Proses Penandatanganan Surat Permohonan Validasi KLHS dari Wali Kota kepada Gubernur		Ada	Ada	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Notulensi)	Belum Ada	Proses (menunggu TTD Kepala BIG)	Proses menuju pengajuan kepada Provinsi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
Bontang					Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019													
Kutai Kartanegara	Nomor 09 Tahun 2013	2013-2033	Konsultasi dengan ATR terkait materi untuk linsek	Validasi	ada	ada	Ada	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Notulensi)	ada	ada	ada	ada	proses, evaluasi	ada, SK RTRW	
Kutai Barat	Perda No. 32 Tahun 2013	2018	Perbaikan Revisi dari Provinsi, penyesuaian dengan Permen ATR 14 dan 11	Sudah Validasi (No. 660.2/980/B.I.1/DLH /2021, tanggal 7 Juni 2019 tentang Validasi KLHS Revisi	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Kurang 1 Kabupaten (Kab. Barito Utara Prov. Kalteng)	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada (Surat Rekomendasi PK RTRW dari Bupati)	kesulitan untuk mendapatkan BA peta dasar. Adanya perubahan peraturan perundangan dan dinamika pembangunan

Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tahun Perda RTRW	Tahun Pelaksanaan Revisi RTRW	Status Terakhir Proses Revisi RTRW	Status Penyusunan KLHS	Dokumen Kelengkapan persetujuan Substansi RTRW Berdasarkan PERMEN ATR/BPN 11/2021 (beri keterangan ada atau tidak ada)													Kendala dalam Penyusunan	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
				RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2040)														sehingga perlunya penyelarasan	
Kutai Timur	Perda Kutai Timur No. 1 tahun 2016	2021 - 2022	Asistensi Dasar dengan penyusunan	Peta paralel Matek	Penyusunan dokumen	Tdk ada	Ada	Ada	Ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada (SK Tim Penyusun Tahun 2021, sebelum Keluar Permen ATR No. 11 Tahun 2021)	Menunggu persetujuan peta dasar dan menunggu finalisasi rtrw propinsi kaltim
Paser	Perda Nomor 9 Tahun 2015	2020	Penyusunan materi teknis, naskah akademik, KLHS, dan Raperda	Sudah disusun, namun masih perlu perbaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDM Terbatas	
Penajam Paser Utara	Nomor 3 Tahun 2014	2020	*Perlu Penyesuaian SK Kehutanan terbaru dan peta PITTI, *Target Linsek Desember 2022 (menunggu penetapan RTRWP dan RTRW IKN)	Surat Permohonan Validasi KLH sdh ttd Bupati, SK POKJA KLHS proses	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	*Materi Teknis RTRW disusun 2020, menyesuaikan dengan Permen ATR/BPN Nomor 11 & 14 Tahun 2021. *sedang proses SK FPR. *Belum ada surat penjaminan kualitas	
Berau	Nomor 9 Tahun 2017	2022-2024	Peninjauan Kembali	belum ada	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedia	minim tenaga teknis yang mengakomodir kegiatan di Tata Ruang Kabupaten Berau	
Mahakam Ulu	Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021																		

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Keterangan :

Dokumen Kelengkapan Persetujuan Substansi Berdasarkan PERMEN ATR Nomor 11 tahun 2021

1. Berita acara kesepakatan substansi antara bupati/walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
3. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
4. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana, fakta analisis, dan album peta (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)
5. Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur
6. Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/wali kota
7. Berita acara konsultasi publik (minimal 2 (dua) kali)
8. Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
9. Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar
10. Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan
11. Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota
12. Berita Acara Pembahasan dengan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
13. Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk revisi RTRW)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 89 persen RTRW Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah memasuki masa Peninjauan Kembali RTRW, kecuali Kabupaten Berau yang belum memasuki waktu peninjauan kembali. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui progres revisi RTRW Kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu 8 (delapan) kabupaten/kota sedang dalam status revisi. Berikut merupakan proses revisi RTRW Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Tabel 2.33.
Proses Revisi RTRW Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Perda	Status	Keterangan
1.	Samarinda	2014	Revisi (2019)	Materi teknis telah disusun pada tahun 2019 oleh Pemkot Samarinda. Sedang dalam tahap evaluasi TKPRD Provinsi.
2.	Balikpapan	2012	Revisi (2017)	Materi teknis telah disusun pada tahun 2018 oleh Pemkot Balikpapan, namun belum mengajukan permohonan evaluasi kepada TKPRD Provinsi
3.	Bontang	2012	Perda (2019)	Revisi RTRW Bontang telah di-Perdakan (Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019)
4.	Kutai Kartanegara	2013	Revisi (2020)	- Revisi dilakukan melalui Bantek dari Kementerian ATR/BPN karena akan menjadi kawasan penyangga IKN - Telah dilakukan serah terima dokumen revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kementerian ATR/BPN ke Pemkab
5.	Kutai Timur	2016	Revisi (2021)	- Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Peninjauan Kembali dengan hasil RTRW Kabupaten Kutai Timur harus direvisi dengan pencabutan perda - Penyusunan dokumen materi teknis dan ranperda dilaksanakan pada tahun 2021
6.	Kutai Barat	2013	Revisi (2018)	- Dokumen materi teknis dan ranperda telah disusun pada tahun 2019 - Pada tahun 2020, Pemerintah Kutai Barat mengajukan permohonan evaluasi kepada TKPRD Provinsi - TKPRD Provinsi telah mengirimkan hasil evaluasi terhadap Revisi RTRW Kutai Barat, namun belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
7.	Paser	2015	Revisi (2021)	- RTRW Paser yang secara normatif seharusnya direvisi pada tahun 2020, diundur pada tahun 2021 - Pada tahun 2020 sementara hanya menyusun dokumen KLHS RTRW Paser

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Perda	Status	Keterangan
8.	Penajam Paser Utara	2014	Revisi (2020)	• Revisi dilakukan melalui Bantek dari Kementerian ATR/BPN karena akan menjadi kawasan penyangga IKN • Telah dilakukan serah terima dokumen revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara dari Kementerian ATR/BPN kepada Pemkab • Pemkab PPU belum mengajukan permohonan evaluasi kepada TKPRD Provinsi
9.	Berau	2017	-	• Peninjauan Kembali yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala masalah anggaran • Pada tahun 2022 akan dilaksanakan Pra Peninjauan Kembali
10.	Mahakam Ulu	Proses penetapan Perda		• Telah mendapatkan BA Rapat Konsultasi dalam penetapan Raperda dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 juni 2021 • Sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN pada tanggal 4 Februari 2021 • Sedang dalam proses perbaikan dan penyempurnaan dokumen pasca evaluasi TKPRD pada Bulan April 2021

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Selanjutnya, untuk proses pengendalian tata ruang dilakukan suatu pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang agar pemanfaatan yang dilakukan sesuai dengan tata ruang. Dengan demikian dapat diwujudkan suatu wilayah yang dapat terus berkembang secara sosial, ekonomi maupun budaya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Tata Ruang yang direncanakan. Dalam hal pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, maka dilakukan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.

Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang terhadap masing-masing aspek kinerja meliputi aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan.

Perhitungan skoring penyelenggaraan penataan ruang juga dilaksanakan dan digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk mengukur kinerja. Penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2021 telah mencapai skoring 75,38 dari target skoring 75,94. Berikut ini perhitungan

kinerja penyelenggaraan penataan ruang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.34.
Skor Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	KINERJA	Nilai	Kinerja
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG	14,20	Cukup
A	Penetapan Perda RTRW	10,00	
B	Penetapan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi dan RTR Rinci lain	5,04	
C	Penetapan Perda Arah Peraturan Zonasi	1,50	
D	Penetapan Pergub terkait Penataan Ruang	0,00	
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG	37,54	Baik
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	9,80	
B	Sosialisasi Peraturan Perundangan di bidang Penataan Ruang	8,33	
C	Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	9,09	
D	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,82	
E	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	1,00	
F	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi	3,00	
G	Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	5,00	
H	Pengembangan Kesadaran dan tanggung Jawab Masyarakat	0.50	
III	ASPEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	21,30	Baik
A.	Perencanaan Tata Ruang	10,00	
A.1	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	5,00	
A.2	Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Rinci lain	5,00	
B.	Pemanfaatan Ruang	9,20	
B.1	Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	5,52	
B.2	Realisasi program pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi	3,68	
C.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2,10	
C.1	Penerapan Arah Peraturan Zonasi	0,00	
C.2	Penerapan perizinan pemanfaatan ruang	2,10	
C.3	Penerapan pemberian insentif dan disinsentif	0,00	
C.4	Pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang	0,00	
Jumlah		75,38	Baik

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2021

Ketidaksesuaian tata ruang terjadi apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Data ketidaksesuaian tersebut didapatkan dari hasil Audit Pemanfaatan Ruang yang baru dilaksanakan di beberapa Kabupaten/ Kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (2014) dan Kota Balikpapan (2015), dengan hasil sebagai berikut:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara

- a. Sebanyak 50 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 5, yaitu penggunaan lahan eksisting **belum sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW serta izin yang ada **tidak sesuai** dengan rencana pola ruang. REKOMENDASI: Perlu didorong untuk menyesuaikan dengan peruntukan di RTRW sesuai tahapan perencanaannya dan disiapkan perizinan yang sesuai dan izin tambang yang ada harus segera dicabut.
- b. Sebanyak 18 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 2, yaitu penggunaan lahan eksisting **sudah sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW, tetapi **belum memiliki izin**. REKOMENDASI: perlu diberi sanksi karena menggunakan lahan tanpa adanya izin, dan didorong agar segera menyelesaikan perizinan.
- c. Sebanyak 18 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 4, yaitu penggunaan lahan eksisting **belum sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW, sedangkan **perizinannya sudah ada** dan **sesuai** dengan pola ruang RTRW. REKOMENDASI: kegiatan perlu segera direalisasikan sesuai dengan RTRW karena sudah ada izinnya.
- d. Sebanyak 4 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 1, yaitu penggunaan lahan eksisting, rencana pola ruang RTRW dan perizinan **telah sesuai** dan tidak terjadi overlapping, sehingga pemanfaatan ruang dapat dilanjutkan dan harus terus dipertahankan.
- e. Sebanyak 4 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 3, yaitu penggunaan lahan eksisting **sesuai** dengan rencana pola ruang dan perizinan yang dikeluarkan, namun **terjadi overlapping perizinan dengan kawasan pertambangan**. REKOMENDASI: perlu dilakukan pembatalan perizinan pertambangan, karena perizinan yang sesuai dengan pola ruang adalah perkebunan.
- f. Sebanyak 4 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 8, yaitu penggunaan lahan eksisting **tidak sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW dan **tidak memiliki izin**, sehingga perlu penyidikan dan penertiban untuk disesuaikan dengan RTRW. Apabila terbukti pelanggaran, maka harus dikenakan sanksi.

- g. Sebanyak 2 persen titik survei di Kutai Kartanegara termasuk dalam tipologi 6, yaitu penggunaan lahan eksisting **belum sesuai** dengan rencana pola ruang RTRW, sedangkan perizinannya **sudah ada tetapi ada overlapping**. REKOMENDASI: kegiatan perlu segera direalisasikan sesuai dengan RTRW karena sudah ada izinnya, sedangkan izin yang lain harus dibatalkan.

2. Kota Balikpapan

- a. Penggunaan lahan yang **telah sesuai** dengan peraturan pola ruang yang berlaku hingga tahun 2015 adalah sebesar 76.55 persen dari seluruh titik survei di Kota Balikpapan.
- b. Sebanyak 22.37 persen titik survei adalah **boleh terbatas**, yang bermaksud bahwa penggunaan lahan diperbolehkan namun penggunaannya terbatas. REKOMENDASI: penggunaannya perlu dibatasi dan adanya pengawasan yang intens terkait penggunaan lahan tersebut karena ada penggunaan lahan lain yang lebih sesuai untuk diletakkan di wilayah tersebut.
- c. Sebanyak 1.08 persen menyatakan bahwa penggunaan lahan tersebut **tidak sesuai** dengan pola ruang yang telah ditentukan. REKOMENDASI: perlu adanya tindakan berupa peninjauan perijinan yang dikeluarkan serta tindakan lainnya yang mampu meningkatkan kesadaran pengguna lahan untuk selalu menyesuaikan pembangunan yang dilakukan dengan pola ruang yang sudah ada.

3. Kabupaten Penajam

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang Kabupaten Paser, didapatkan ketidaksesuaian kondisi eksisting dengan rencana pola ruang Kabupaten Paser. Ketidaksesuaian tersebut banyak didapatkan pada pola ruang lindung yang digunakan menjadi kegiatan budidaya. Terdapat 41 titik ketidaksesuaian di Kabupaten Paser, sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 Perkebunan Sawit di Sempadan Sungai
- b. Terdapat 1 Ruang Terbuka di Budidaya Perkebunan
- c. Terdapat 9 Perkebunan Sawit di Budidaya Tanaman Pangan
- d. Terdapat 5 Perkebunan Sawit di Budidaya Holtikultura
- e. Terdapat 3 Penambangan Terbuka di Cagar Alam
- f. Terdapat 2 Perkebunan Sawit di Cagar Alam
- g. Terdapat 4 Penambangan Terbuka di Hutan Produksi

- h. Terdapat 1 Penambangan Terbuka di Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- i. Terdapat 1 Penambangan Terbuka di Hutan Produksi Tetap
- j. Terdapat 4 Bangunan Permukiman di Sempadan Sungai
- k. Terdapat 2 Bangunan Permukiman di Cagar Alam
- l. Terdapat 1 Perkebunan Sawit di Taman Hutan Raya
- m. Terdapat 2 Penambangan Terbuka di Budidaya Perkebunan
- n. Terdapat 1 Bangunan Permukiman di Budidaya Tanaman Pangan
- o. Terdapat 1 Penambangan Terbuka di Sempadan Sungai

Dari 41 titik ketidaksesuaian tersebut dibedakan menjadi tipologi B dan C. Terdapat 12 lokasi yang dikategorikan sebagai tipologi C. Sedangkan 29 lokasi lainnya dikategorikan sebagai tipologi B.

4. Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa pola ketidaksesuaian pemanfaatan ruang diantaranya adalah:

- a. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan budidaya perkebunan, antara lain:
 - 1) Kawasan budidaya perkebunan menjadi dermaga bongkar muat kayu sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 2) Kawasan budidaya perkebunan menjadi penambangan terbuka lain sebanyak 3 (tiga) lokasi
 - 3) Kawasan budidaya perkebunan menjadi tambak ikan/udang sebanyak 1 (satu) lokasi
- b. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan pantai berhutan bakau, antara lain:
 - 1) Kawasan pantai berhutan bakau menjadi perkebunan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) lokasi
 - 2) Kawasan pantai berhutan bakau menjadi perkebunan lain sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 3) Kawasan pantai berhutan bakau menjadi tambak ikan/udang sebanyak 3 (tiga) lokasi
- c. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan pantai ruang terbuka hijau, antara lain:
 - 1) Ruang terbuka hijau menjadi bangunan permukiman desa sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 2) Ruang terbuka hijau menjadi bangunan permukiman kota sebanyak 1 (satu) lokasi

- 3) Ruang terbuka hijau menjadi perkebunan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) lokasi Ruang terbuka hijau menjadi tambak ikan/udang sebanyak 1 (satu) lokasi
- d. Ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan pantai, menjadi tambak ikan/udang sebanyak 1 (satu) lokasi.
- e. Ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai, antara lain:
 - 1) Sempadan sungai menjadi bangunan permukiman desa sebanyak 2 (dua) lokasi
 - 2) Sempadan sungai menjadi bangunan permukiman kota sebanyak 1 (satu) lokasi
 - 3) Sempadan sungai menjadi tambak ikan/udang sebanyak 3 (tiga lokasi)
 - 4) Sempadan sungai menjadi kawasan budidaya peternakan sebanyak 1 (satu) lokasi
- f. Ketidaksesuaian pemanfaatan kawasan tanaman pangan lahan kering, antara lain:
 - 1) Kawasan tanaman pangan lahan kering menjadi bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran sebanyak 2 (dua) lokasi
 - 2) Kawasan tanaman pangan lahan kering menjadi penambangan terbuka lain sebanyak 1 (satu) lokasi

Dilihat dari tipologinya, mayoritas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang memiliki tipologi B atau pemanfaatan ruang tersebut telah ada semenjak belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan tipologinya, dari ke-28 titik yang terindikasi melanggar tata ruang, dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. 26 lokasi memiliki tipologi B
- b. 2 (dua) lokasi memiliki tipologi C

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan belum menyusun dokumen terkait arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, serta arahan pelanggaran sanksi sebagai kendali pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

F. Bidang Bina Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi salah satunya bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Keberhasilan kinerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya ketersediaan pendanaan, sumber daya manusia aparatur dan masyarakat jasa konstruksi. Salah satu unsur penting pada masyarakat jasa konstruksi adalah ketersediaan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang merupakan kewenangan Gubernur dan kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil) yang merupakan kewenangan bupati/walikota wajib bersertifikat dan berkompeten.

Kelembagaan sub urusan jasa konstruksi di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 yang ditunjukkan oleh jumlah perangkat daerah yang berada setingkat Eselon III baru mencapai mencapai 65 persen. Capaian tersebut meliputi perangkat daerah di Pemerintah Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kubar, Mahakam Ulu, dan Paser. Sedangkan daerah yang belum membentuk adalah Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kukar. Sementara Kabupaten Berau sudah membentuk setingkat eselon 4 tetapi saat ini sudah menjadi penyetaraan Jabatan Fungsional Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi, maka hal ini menggambarkan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan Sub Urusan Jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terbentuk di 7 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur keberdaannya diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dan signifikan bagi peningkatan alokasi dana Untuk melaksanakan kewenangan Bupati/Walikota pada Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Gambar 2.4.
Kondisi Eksisting Profil OPD Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Sebagai sarana dalam melakukan koordinasi baik terhadap pola pembinaan yang akan dilakukan atau dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada bidang jasa konstruksi yang melibatkan lintas sektor dibentuklah Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK). TPJK masih dianggap efektif untuk mendukung penuntasan masalah yang melibatkan beberapa pihak pada lintas sektor yang terkait dengan jasa konstruksi. Sampai saat ini status pembentukan TPJK telah ada di 8 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.35.
Jumlah Tenaga Ahli Dan Terampil Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018–2022

No	Intansi	S/D 2018 (Orang)		Jumlah	2019 (Orang)		Jumlah	2020 (Orang)		Jumlah	2021 (Orang)		Jumlah	2022 (Orang)		Jumlah	Total
		Ahli	Terampil		Ahli	Terampil		Ahli	Terampil		Ahli	Terampil		Ahli	Teknisi/Analisis dan Operator		
1.	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur	6.660	13.796	20.456	1.024	2.391	3.415	1.336	1.902	3.238							27.109
2.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	0	0	0	0	1.884	1.884	0	738	738	311	1.184	1.495	0	1.926	1.926	6.043
3.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	164	0	164	216	0	216	206	0	206	426	0	426	1.012
4.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Kalimantan Timur	0	0	0	0	390	390	0	528	528	0	489	489	0	572	572	1.979
5.	Balai Latihan Kerja Industri Samarinda Kementerian Ketenagakerjaan	0	234	234	0	230	230	0	182	182	0	128	128	0	518	518	1.292
6.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	0	128	128	0	261	261	0	0	0	0	261	261	0	0	0	650
	a UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	128	128	0	0	0	256
	b UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	0	0	0	0	133	133	0	0	0	0	133	133	0	0	0	266
7.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) / Tempat Uji Kompetensi (TUK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	90	323	323
8.	Rantai Pasok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75
	a Tata Logam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75
Jumlah		6.660	14.158	20.818	1.188	5.156	6.344	1.552	3.350	4.902	517	2.062	2.579	659	3.181	3.840	38.483
Total Tenaga Ahli		10.576															
Total Tenaga Teknisi/Analisis dan Operator (Terampil)		27.907															
Jumlah Total Tenaga Kerja Konstruksi		38.483															

Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Tabel 2.36.
Laporan Sertifikat Keterampilan dan Keahlian LPJKP
Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Kualifika	Jumlah
	Sertifikat Keterampilan (SKT)	
1	Kelas I (K1)	11.511
2	Kelas II (K2)	1.223
3	Kelas III (K3)	1.132
	Jumlah (1)	13.866
	Sertifikat Keahlian (SKA)	
1	Utama	237
2	Madya	3.929
3	Muda	2.494
	Jumlah (2)	6.660
	Total (1+2)	20.526

Sumber: Bina Konstruksi, 2019

Berdasarkan laporan sertifikat keterampilan dan keahlian LPJKP Tahun 2018 diketahui bahwa hingga saat ini jumlah tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikat keterampilan mencapai 13.866 orang dan tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat keahlian mencapai 6.660 orang. Dari sertifikat keahlian sebanyak 6.660 orang, terdiri dari sertifikat keahlian utama 237 orang, sertifikat keahlian madya 3.929 orang, dan sertifikat keahlian muda 2.494 orang.

Penerbitan SKA dan SKT di Kalimantan Timur status sampai dengan saat ini, jika dilihat untuk SKA Madya yang jumlahnya cukup besar yakni mencapai 59%, SKA Muda 37%, dan SKA Utama sebanyak 4% dari Keseluruhan Jumlah SKA yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk jumlah sertifikat keterampilan untuk kelas 1 masih sangat besar mencapai 83%, Kelas 2 sebesar 9%, dan Kelas 3 mencapai 8% dari total jumlah Sertifikat Keterampilan yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Timur. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat dan kompeten di Provinsi Kalimantan Timur merupakan wajib sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi.

Kondisi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di wilayah Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 38.483 orang, yang terdiri dari 10.576 untuk tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 27.907 kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil). Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat tersebut didapat dari berbagai Lembaga/Kementerian, OPD, dan unsur masyarakat lainnya serta

Lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi di wilayah Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja konstruksi diharapkan terus meningkat dan ini tugas bersama seluruh masyarakat jasa konstruksi, dan diharapkan seluruh Lembaga/Kementerian, OPD konsisten dan komitmen melaksanakan sertifikasi berdasarkan kewenangannya, karena pengguna jasa dan penyedia jasa wajib menggunakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat

Berdasarkan data BPS bahwa Jumlah angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah 105.882 orang, hampir sama dengan jumlah tenaga kerja sektor konstruksi Provinsi Kalimantan timur tahun 2022 adalah 105.395 orang, terdiri dari 7.687 Perguruan Tinggi (Kualifikasi Ahli) dan 97.708 SD s/d DIII (Kualifikasi Teknis/Ahli dan Operator Terampil). Data Tenaga Kerja Konstruksi tahun 2022 sebesar 38.483 orang, terdiri dari 10.576 orang kualifikasi ahli dan 27.907 orang kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil), GAP tenaga kerja sektor konstruksi sebesar 66.912 orang (63,49%).

Gambar 2.5.
Persentase Jumlah Tenaga Ahli dan Jumlah Tenaga Terampil
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022



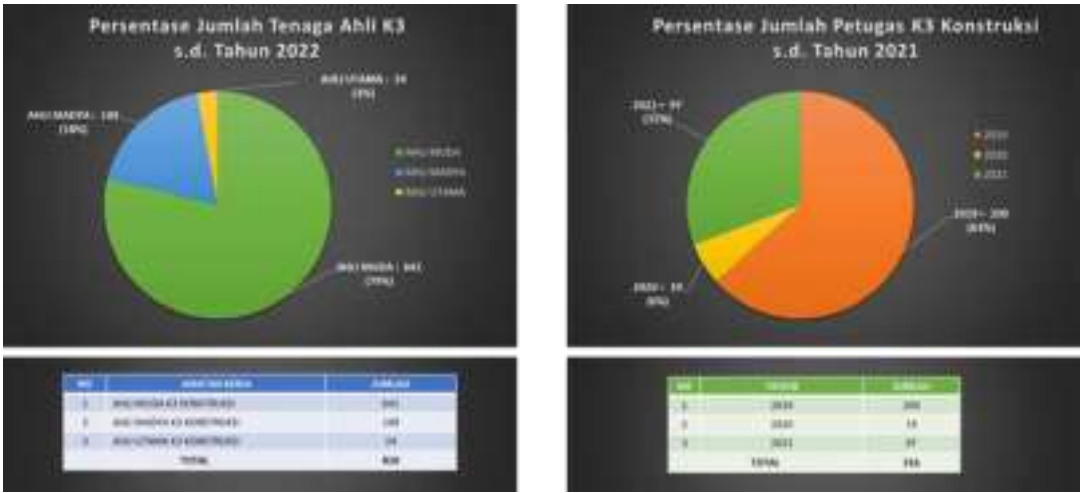
Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK, karena SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan

Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan, maka diperlukan Ahli Keselamatan Konstruksi dan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi

Pada tahun 2018 penerbitan SKA K3 Konstruksi dan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi di Kalimantan Timur terhitung masih sangat minim sekali bila dibandingkan dengan jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kalimantan Timur, di mana jumlah Ahli Muda Konstruksi sebesar 90 persen dan Ahli Madya sebesar 10% dan Ahli Utama masih belum ada di Kalimantan Timur. Kapasitas Provinsi dalam mencetak petugas K3 Konstruksi hanya berjumlah 196 orang saja yang dapat dihasilkan dari program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Gambar 2.6.
Jumlah Tenaga Ahli dan Petugas K3 Konstruksi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



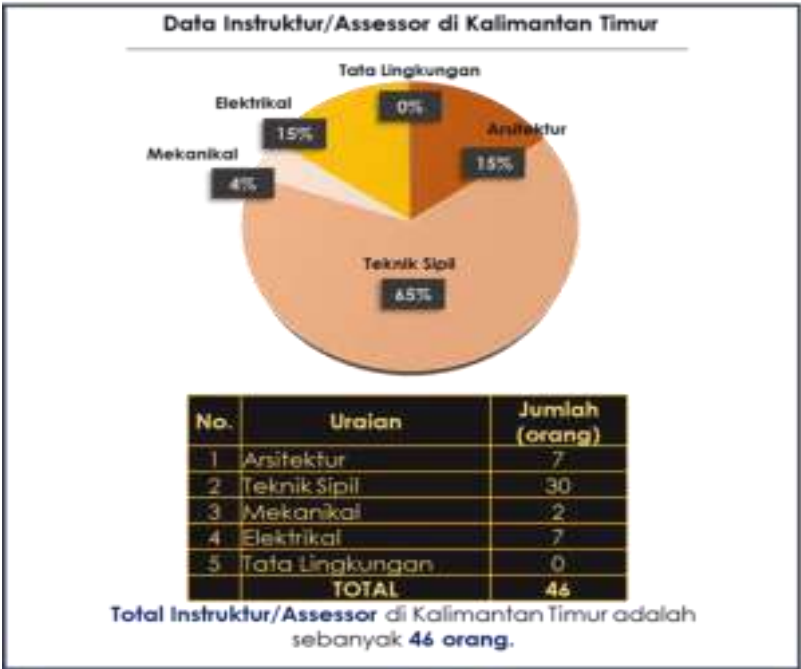
Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Kalimantan Timur merupakan keharusan sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi, hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Salah satunya adalah kewajiban Tidak terkecuali ahli K3 Konstruksi. Dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan infrastruktur (perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran) suatu

bangunan, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama semua pihak sehingga tujuan selamat untuk semua dapat tercapai, sehingga dituntut kompetensi kualifikasi ahli K3 konstruksi dan Petugas Konstruksi.

Melihat dari sisi kebutuhan, Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah tenaga ahli K3 Konstruksi sebesar 145 orang, dengan rincian kualifikasi ahli muda 130 orang dan untuk ahli madya 15 orang. Sedangkan untuk jenjang kualifikasi terampil yang sering kita sebut sebagai Petugas K3 Konstruksi, jumlah Petugas K3 konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tersebut sebesar 196 orang

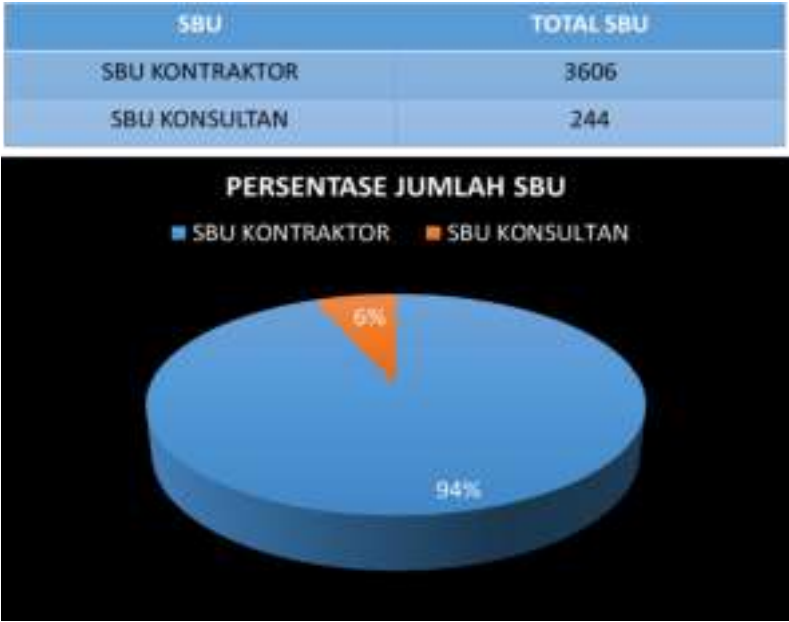
Gambar 2.7.
Ketersediaan Instruktur/Assessor di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021



Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Berdasarkan data dari LPJK bahwa Jumlah BUJK di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 2.398 Perusahaan, terdiri dari jenis badan usaha dan kualifikasi badan usaha. jenis Badan Usaha terdiri dari Jasa Konsultansi 188 BUJK dan Kontraktor 2.210 BUJK. Kualifikasi Badan Usaha terdiri dari: Besar 28 BUJK, Menengah 425 BUJK, dan Kecil 1.936 BUJK.

Gambar 2.8.
Jumlah Sertifikat Badan Usaha (SBU)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Sumber: LPJK Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Berdasarkan Jenis Badan Usaha Kontraktor mendominasi sebesar 92,16 persen dibandingkan Konsultan. Kualifikasi BUJK dari Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang ada, masih didominasi oleh SBU dengan Kualifikasi Kecil mencapai 81,04 persen, dan Kualifikasi Menengah mencapai 17,79 persen yang yang paling rendah adalah Kualifikasi besar yang hanya mencapai 1,17 persen.

Gambar 2.9.
Gambaran Klasifikasi dan Kualifikasi BUJK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018



Sumber: Bina Konstruksi, 2019

Capaian pembinaan jasa konstruksi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sampai dengan tahun 2018 berjumlah 592 Orang. Terdapat beberapa Bimbingan Teknis seperti Bimbingan Teknis Peraturan, Pelatihan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Pelatihan Hukum Kontrak, Pelatihan SMK3 Konstruksi, Pelatihan E-Procurement, Pelatihan aparatur Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Tahun 2019 sampai dengan 2022 dilakukan pembinaan melalui Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Penting Sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli, Pengawasan dan Monitoring, Workshop, Rapat Koordinasi, Forum Jasa Konstruksi.

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat tren penurunan Pembinaan SDM sektor Konstruksi di Indonesia bahkan di dunia karena mengalami pandemi COVID-2019 dan Varian Delta yang banyak memakan korban jiwa sehingga di Indonesia diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan Pembinaan yang biasa dilaksanakan bertatap muka langsung karena tidak semua SDM Aparatur memahami era digitalisasi.

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan, kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi terdiri dari Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial dan Kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (Dua Puluh) jam pelajaran dalam 1 (Satu) tahun. Pada tahun 2022 pertama kalinya Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kerja sama dengan BPSDM Kementerian PUPR sebagai wujud melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur dan diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur PUPR memiliki sertifikat dan kompeten sama dengan tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat dan berkompeten sehingga pengguna jasa dan penyedia jasa dapat melaksanakan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pembinaan jasa Konstruksi untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur PUPR di Kalimantan Timur tahun 2019-2022 melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Tenaga Ahli, sebanyak 424 Orang, pada tahun 2019 yang dilakukan

pembinaan sebanyak 139 orang pada tahun 2020 sebanyak 29 orang pada tahun 2021 sebanyak 43 orang dan terjadi kenaikan yang signifikan sebesar lebih dari 100% yaitu pada tahun 2022 jumlah SDM PUPR yang dibina sebanyak 242 orang

Tabel 2.37.
Capaian Peningkatan SDM (Aparatur dan Non Aparatur) Pada Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2019-2020 dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2021-2022

No.	Nama Kegiatan	Realisasi Jumlah Peserta (Orang)	Tahun
I.	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi		
1	Bimbingan Teknis Hukum Kontrak	30	2019
2	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (Angkatan 1 dan 2)	50	
3	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (Angkatan 3 dan 4)	59	
Jumlah		139	
II.	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	130	
1	Bimbingan Teknis Permen No. 14 Tahun 2020 / Permen No. 21/PRT/2019 / Bimtek Pengawasan	29	2020
Jumlah		29	
III.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Bina Konstruksi (PBJ & Permen PUPR 10/2021)	17	2021
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	26	
Jumlah		43	
IV.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		
1	Pembinaan K3 Konstruksi	46	2022
2	Pembekalan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	27	
3	Pembekalan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30	
4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pekerjaan Jasa Konstruksi	47	
5	Pembekalan Penyelenggaraan Rantai Pasok Konstruksi	50	
6	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	42	
Jumlah		242	
Jumlah 2019 sampai dengan 2022		424	

Sumber: Bina Konstruksi, 2022

Setiap kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi dalam melaksanakan operasionalnya harus memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK), maka dilakukan pengawasan dan monitoring tahun 2019 sampai

dengan tahun 2020 terhadap IUJK menjadi kewenangan dan tanggung jawab sub urusan jasa konstruksi di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Sub-Sektor Jasa Konstruksi termasuk kategori Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah tinggi maka tidak ada lagi penerbitan IUJK, pelaku usaha pada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia

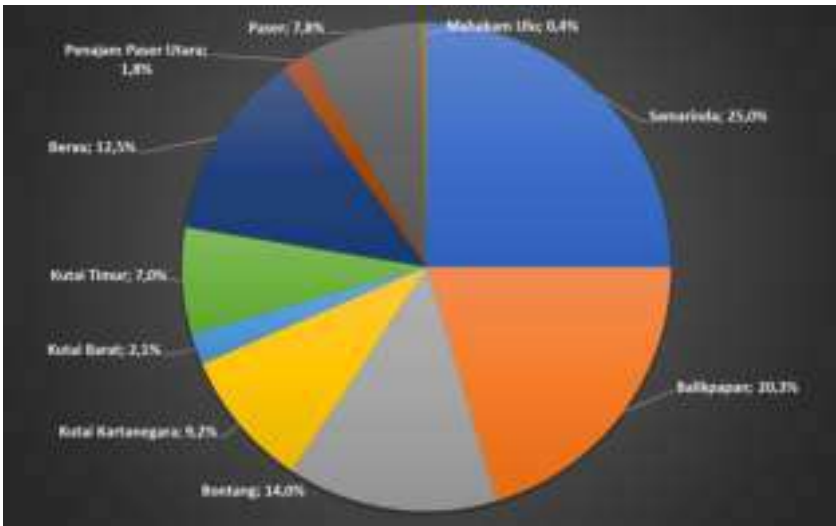
Tabel 2.38.
Hasil Monitoring IUJK ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	2019	2020
1	Kota Samarinda	278	134
2	Kota Balikpapan	115	220
3	Kota Bontang	165	65
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	76	76
5	Kabupaten Kutai Barat	7	27
6	Kabupaten Kutai Timur	40	176
7	Kabupaten Berau	72	134
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	12	17
9	Kabupaten Paser	64	64
10	Kabupaten Mahakam Ulu	1	5

Sumber: Bina Konstruksi, 2021

Komposisi penerbitan IUJK di kabupaten/kota selama kurun waktu 2019-2020 menunjukkan bahwa Kota Samarinda adalah yang terbesar dalam penerbitan IUJK yang mencapai 25 persen, Kota Balikpapan mencapai 20,3 persen, sementara kabupaten/kota lain berkisar antara 0,4–14 persen dari total jumlah IUJK yang diterbitkan sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 2.10.
Persentase IUJK ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020



Sumber: Bina Konstruksi, 2021

2.3.2. Realisasi Anggaran

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2016-2022 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Tabel 2.39.
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran Terhadap Rencana Anggaran
2019	1.544.774.267.711,74	1.169.689.898.155,72	75,72
2020	1.223.081.936.274,18	1.087.228.973.047,35	88,89
2021	1.556.506.358.294,00	1.303.329.304.098,28	83,73
2022	1.585.987.075.102,00	1.320.139.322.603,86	83,24

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPUPR-PERA Prov. Kaltim, 2019 sampai 2022

Dari tabel tersebut diatas, realisasi tertinggi sebesar 88,89 persen di tahun 2020, realisasi terendah sebesar 75,72 persen di tahun 2019.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rencana target dan anggaran untuk setiap sub kegiatan perlu disusun dengan efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran Renstra PD dan sasaran RPD yang terkait tugas dan fungsi dinas.

Sehubungan dengan realiasi anggaran dinas per tahun, maka perlu juga diketahui tingkat penyerapan anggaran program. Pada tabel di bawah disajikan informasi mengenai target dan realiasasi anggaran program Dinas PUPR-PERA periode tahun 2019-2022. Dalam tabel tersebut terdapat program yang hanya dilaksanakan pada tahun tertentu sebab adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat, selain itu adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra pada tahun 2021.

Tabel 2.40.
Target dan Realisasi Anggaran Program Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

NO.	PROGRAM	TARGET				REALISASI				TINGKAT CAPAIAN (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.795.124.000,00	16.119.883.657,50	-	-	15.285.471.100,00	14.907.004.190,00	-	-	91,01	92,48		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.814.877.150,00	9.773.057.653,00	-	-	17.753.419.698,00	9.039.489.760,80	-	-	94,36	92,49		
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	4.332.525.000,00	1.857.700.000,00	-	-	4.115.676.979,00	1.613.961.640,00	-	-	94,99	86,88		
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	941.317.500,00	1.084.128.000,00	-	-	806.995.030,00	420.702.051,00	-	-	85,73	38,81		
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	619.548.262.397,00	345.785.622.064,00	-	-	412.831.639.257,13	280.814.038.814,43	-	-	66,63	81,21		
6	Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	51.460.350.000,00	53.619.455.631,25	-	-	43.046.082.032,80	48.306.411.418,12	-	-	83,65	90,09		
7	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan	289.923.916.387,00	287.789.226.284,61	-	-	203.554.488.948,61	266.845.708.139,28	-	-	70,21	92,72		
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	195.977.580.817,74	109.489.614.652,80	106.173.593.992,00	104.329.160.525,00	140.591.772.456,19	83.009.884.974,00	88.697.136.662,83	44.652.720.298,00	71,74	75,82	83,54	42,80
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.297.172.500,00	5.392.026.496,00	7.492.280.000,00	8.578.763.700,00	5.546.232.903,00	5.084.754.765,00	6.786.010.461,00	7.772.712.791,00	88,07	94,30	90,57	90,60
10	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	3.471.800.000,00	3.023.812.500,00	-	-	3.180.923.691,00	2.667.597.716,00	-	-	91,62	88,22		
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I	53.343.177.000,00	51.956.586.213,66	-	-	53.042.344.725,00	51.749.903.975,86	-	-	99,44	99,60		
12	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II	55.110.837.480,00	57.761.942.743,00	-	-	54.830.290.039,00	57.750.257.711,00	-	-	99,49	99,98		
13	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan	32.500.000.000,00	45.328.768.320,00	-	-	31.381.176.800,00	45.283.913.000,00	-	-	96,56	99,90		

NO.	PROGRAM	TARGET				REALISASI				TINGKAT CAPAIAN (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	dan Jaringan Irigasi Wilayah III												
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	111.108.427.632,00	99.862.470.973,00	-	-	97.369.425.530,87	84.814.439.576,00			87,63	84,93
15	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	765.958.058.272,00	788.197.691.713,00	-	-	668.551.038.741,94	664.736.396.250,00			87,28	84,34
16	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	3.202.003.010,00	43.429.770.275,00	-	-	2.672.101.586,69	41.230.752.133,44			83,45	94,94
17	Program Kawasan Permukiman	-	-	43.282.908.990,00	43.919.674.978,00	-	-	38.813.473.166,16	38.635.518.094,42			89,67	87,97
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	44.981.874.700,00	167.249.167.064,00	-	-	35.787.481.546,92	136.777.317.877,00			79,56	81,78
19	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	61.650.000,00	98.270.000,00			61,65	98,27
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	1.141.298.300,00	761.160.000,00	-	-	1.009.085.482,00	709.410.460,00			88,42	93,20
21	Program Pengembangan Permukiman	-	-	134.706.700,00		-	-	40.524.150,00				30,08	
22	Program Penataan Bangunan Gedung	-	-	269.161.605.069,00	209.235.567.886,00	-	-	199.035.364.609,95	195.497.844.889,00			73,95	93,43
23	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	-	173.834.170.602,00	100.425.721.528,00	-	-	150.221.279.311,22	90.020.864.020,00			86,42	89,64
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	24.276.456.494,00	10.739.754.460,00	-	-	11.533.907.796,70	7.768.724.513,00			47,51	72,34
25	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	3.471.800.000,00	3.023.812.500,00			2.798.288.211,00	2.655.933.716,00	2.388.555.784	6.507.984.922	97,17/93,28	88,09/87,83		
26	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			5.335.166.000,00	8.278.230.000,00			2.338.555.784,00	6.507.984.922,00			81,13/44,77	96,25/78,62
27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	323.808.533,00		-	-	306.123.848,00				94,54	
28	Program Pengembangan Perumahan	-	-	-	879.942.000,00	-	-	-	800.164.180,00				90,93

Sumber: - LKjIP Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, 2020, dan 2021, diolah
- Evaluasi Hasil Renja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR-PERA bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Kelompok sasaran diartikan sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan kerja dinas. Kelompok sasaran layanan yang menjadi target dapat disajikan per bidang, sebagai berikut:

- a. Bidang Sumber Daya Air: masyarakat khususnya petani, masyarakat di sekitar sungai/danau/laut, dan masyarakat di lokasi potensi banjir, serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Bidang Bina Marga: masyarakat sebagai pengguna jalan provinsi.
- c. Bidang Cipta Karya: masyarakat penggunaan air minum, masyarakat pengguna sistem air limbah domestik, pihak yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik, pihak yang terlibat dalam pengelolaan drainase lingkungan, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan persampahan, serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Bidang Bina Konstruksi: Masyarakat jasa konstruksi terdiri asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan kerja konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi/pakar, pelaku rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi dan pemanfaat produk jasa konstruksi.
- e. Bidang Perumahan dan Permukiman: masyarakat terkait perumahan dan permukiman, pelaku usaha/swasta terkait penyediaan perumahan, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- f. Bidang Penataan Ruang: masyarakat dan pelaku usaha terkait pemanfaatan ruang dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur terkait penyusunan RTRW dan RRTR.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.5. Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan pelayanan dinas yang disajikan pada subbab ini adalah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang memiliki daya ungkit dan menjadi prioritas daerah.

Rumusan permasalahan pelayanan dinas tidak lepas dari permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan daerah pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang memiliki keterkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, yaitu: 1) masih relatif tingginya angka kemiskinan yang salah satu penyebabnya adalah masih terdapat hunian dengan kondisi tidak layak huni; dan 2) belum terpenuhinya pemerataan dan pemenuhan infrastruktur yang antara lain dipicu oleh belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa, masih rendahnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air, belum meratanya pemenuhan infrastruktur air minum, belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, dan masih terdapat kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh. Adapun masalah pokok daerah yang diturunkan ke masalah dan akar masalah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, dimuat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Permasalahan Daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026
Terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi daerah	Masih relatif tingginya angka kemiskinan	Masih terdapat hunian dengan kondisi tidak layak huni
	Belum terpenuhinya pemerataan dan pemenuhan infrastruktur	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas jalan dalam mendukung pendistribusian barang dan jasa
		Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air
		Belum meratanya pemenuhan infrastruktur air minum
		Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
		Masih terdapat kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh

Sumber: RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Masalah dan akar masalah dalam RPD yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat didukung dengan hasil identifikasi permasalahan di tingkat perangkat daerah. Adapun masalah pokok dinas adalah belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar, dan penyediaan permukiman yang layak masih belum optimal. Lebih lanjut, masalah pokok tersebut dipicu oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Belum optimalnya konektivitas & aksesibilitas terutama menuju kawasan strategis provinsi	- Kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan
		- Kelas jalan belum sesuai dengan peruntukan
		- Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik
		- Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan
		- Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan yang menghambat proses pengelolaan jalan
		- Adanya mekanisme keperdataan dalam proses pengadaan lahan dan juga untuk meminimalisir dampak pengadaan lahan pada masyarakat sehingga membutuhkan waktu, turut menyebabkan lambannya kinerja pembangunan jalan dan jembatan
		- Dinamika perkembangan transportasi yang sangat pesat dan tidak dapat segera terantisipasi
	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Belum Optimal	- Masih adanya bangunan gedung pemerintah yg belum memadai
		- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemakai bangunan gedung
		- Regulasi terkait penataan bangunan dan lingkungan serta pengelolaan prasarana dan sarana bangunan belum terlaksana dengan baik
	Masih rendahnya ketersediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air	- Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan irigasi teknis
		- Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai
		- Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan bendung/embung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		- Terbatasnya sumber air baku
		- Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan)
		- Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksisting
		- Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan irigasi
		- Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP
	Belum optimalnya dan masih rendahnya pengendalian daya rusak air	- Belum terbangunnya pengendali banjir
		- Masalah sosial dan lahan
		- Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS
		- Belum optimalnya sistem pengendali banjir
		- Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali
		- Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik
		- Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP
		- Masih rendahnya infrastruktur penanganan pantai kritis
		- Belum optimalnya penanganan pantai kritis
		- Belum terbangunnya infrastruktur penanganan pantai kritis
		- Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi
	Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal	- Rendahnya kualitas dan kuantitas dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) serta tingginya dinamika kebijakan dan regulasi pembangunan pada lingkup provinsi serta kabupaten/kota
		- Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana tata ruang antara Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota.
		- Kurangnya pemahaman publik terkait penataan ruang
		- Sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan secara maksimal
		- Rendahnya peran sistem informasi penataan ruang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penataan ruang
		- Belum adanya instrumen pengendalian yang komprehensif
		- Kurang optimalnya penertiban pemanfaatan ruang
	Masih ada penduduk yang belum mendapatkan layanan air minum layak dan aman.	- Belum adanya kelembagaan pengelola dan dokumen perencanaan infrastruktur layanan dasar SPAM Regional secara lengkap
		- Terdapat kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku yang handal untuk air minum, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas
		- Belum tersedianya prasarana yang memberikan layanan air minum curah lintas kab/kota
		- Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencapai akses universal (100%) air minum layak
		- Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan penyediaan layanan air minum dengan sistem regional tidak efisien untuk dilakukan
		- Penanganan air minum masih difokuskan untuk akses layak universal
	Belum seluruh penduduk Kaltim	- Tingkat pelayanan air limbah terpusat belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	memperoleh layanan air limbah dan sanitasi layak (terutama yang berada dalam cakupan kewenangan provinsi).	– Belum tersedianya prasarana pengolahan air limbah domestik skala regional, berikut dengan kesiapan lembaga pengelola dan perencanaan teknis yang lengkap
	Belum optimalnya Penanganan Sampah Domestik	– Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)
		– Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir).
		– Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau Reuse, Reduce dan Recycle (3R)
	Selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan tenaga kerja sektor konstruksi sebesar 66.912 orang (63,49%)	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil) kewenangan kabupaten/kota mendominasi kesenjangan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Penyediaan permukiman yang layak masih belum optimal	Masih ada penduduk yang tinggal di permukiman tidak layak yakni dengan kondisi dan kualitas lingkungan dibawah standar kelayakan	– Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu perhatian Pemerintah Provinsi
		– Sebagian besar rumah dikawasan kumuh berada di kawasan bantaran sunga - biasanya lahan merupakan milik pemerintah - warganya tidak memiliki sertifikat
		– Update SK Kumuh terjadi ditengah tahun pelaksanaan jangka menengah daerah sehingga mengganggu perhitungan capaian
		– Penanganan belum tepat sasaran, pelaksanaan penanganan kumuh bukan merupakan bagian dari aspek kumuh yang dapat mengurangi skor kekumuhan
		– Penguasaan lahan telah lebih dahulu daripada penetapan rencana tata ruang
		– Penguasaan lahan oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan yang syah
		– Ketidakjelasan kriteria penentuan luasan untuk klasifikasi kewenangan
		– Proses Pendataan yang belum sempurna
		– Keterbatasan finansial warga untuk membeli atau membangun rumah yang layak huni
		– Penerapan SPM Perumahan dapat dipenuhi pasca terjadinya bencana (setelah ada penetapan bencana provinsi). Hanya bisa dilakukan tahap-tahap sebelumnya
	Masih ada Rumah Tangga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni	– Masih terdapat warga yang tinggal di wilayah rawan bencana
		– Terdapat warga yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi
		– Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk korban bencana tingkat provinsi
		– Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk warga yang terkena relokasi program pemerintah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan isu strategis daerah dalam RPD, telaahan rencana pembangunan IKN, dan permasalahan layanan dinas.

3.2.1. Telaahan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara (Ibu Kota Nusantara) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara meliputi: a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).

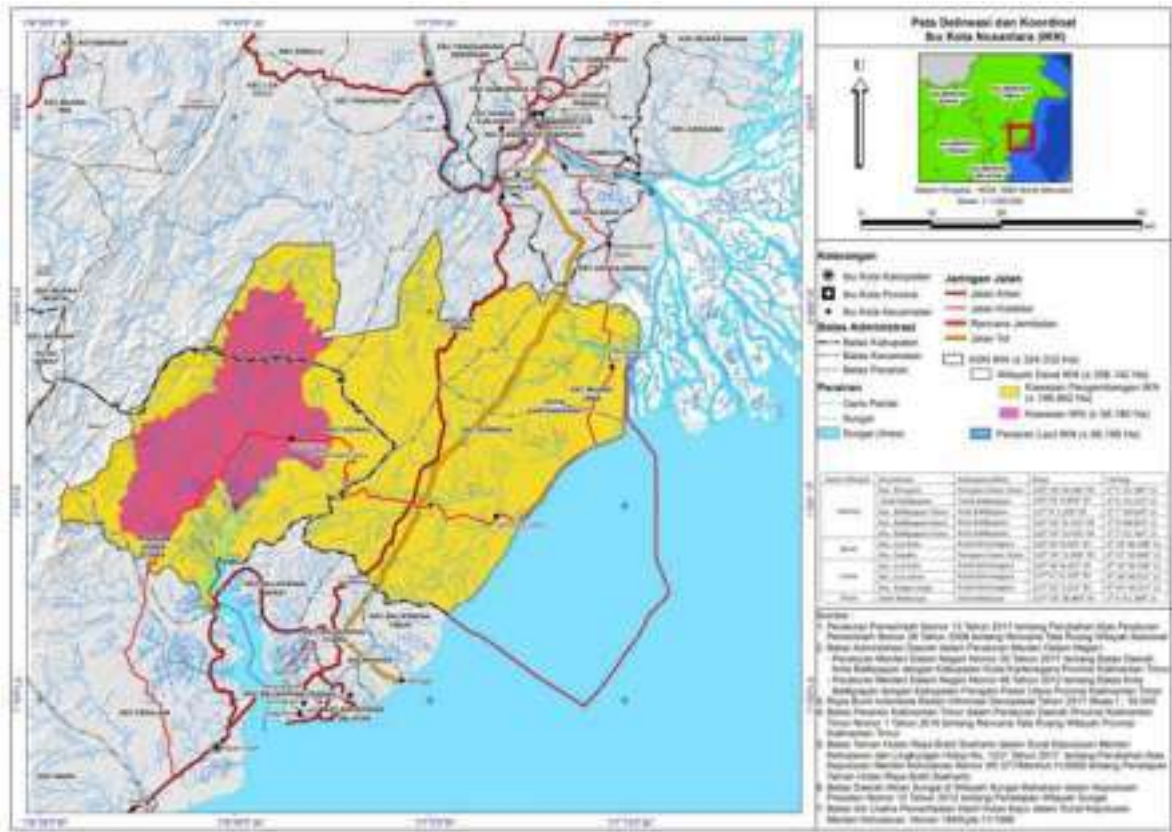
Batas wilayah Ibu Kota Nusantara yaitu:

- 1) sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- 2) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- 4) sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 256.142 hektare. Sementara Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara

memiliki luas kurang lebih 56.180 hektare, terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.1.
Peta Wilayah Ibu Kota Nusantara



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi ekonomi di IKN dan Provinsi Kalimantan Timur serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui kerjasama IKN dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kerangka implementasi kerjasama pembangunan IKN yang diarahkan oleh Pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

1. Sektor Ekonomi dan Industri
 - a. Kawasan Industri Kariangau (Kota Balikpapan).
 - b. Kawasan Industri Buluminung (Kabupaten Penajam Paser Utara).
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur).

Kerjasama: Perencanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, pelibatan masyarakat dan promosi investasi.

2. Logistik dan Konektivitas

- a. Logistik dan konektivitas antarpusat kegiatan di wilayah IKN.
- b. Simpul dan jaringan di luar wilayah IKN (Kota Balikpapan dan Samarinda).
- c. Akses jalur nasional dan internasional.

Kerjasama: Penguatan sistem logistik dan konektivitas pengembangan IKN sebagai superhub ekonomi, penguatan simpul dan jaringan tingkat regional (pintu masuk dan hub ke IKN).

3. SDM dan Ketenagakerjaan

Sarana pendidikan dan kejuruan (wilayah IKN dan daerah mitra).

Kerjasama: Penambahan sarana pendidikan dan kejuruan, pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kuantitas tenaga kerja, penguatan pendidikan tinggi di daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai klaster ekonomi yang akan dikembangkan.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Hutan lindung Sungai Wain
- b. Kawasan Ekosistem riparian Sungai Wain
- c. Kawasan Ekosistem Teluk Balikpapan
- d. Sungai Mahakam
- e. Koridor Sawa

Kerjasama: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mitra, pembagian peran dalam pemulihan ekosistem terdegradasi serta pertahanan dan peningkatan fungsi ekosistem diluar wilayah IKN, pemeliharaan kawasan ekosistem esensial.

5. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Wisata alam, religi buatan dan kuliner (Kota Samarinda)
- b. Wisata alam Pesut Mahakam (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- c. Ekowisata pertanian hulu (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Kerjasama: Pengembangan potensi pariwisata dan dapat didukung dengan konektivitas transportasi massal yang memadai.

6. Energi dan Ketenagalistrikan

- a. Smart grid (daerah mitra)
- b. Pembangkit listrik (Pulau Kalimantan)
- c. Jaringan transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans Kalimantan
- d. Produksi gas hydrogen (diluat wilayah IKN)

Kerjasama: Peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan dan produksi gas serta pembangunan sistem smart grid yang akan melalui area di daerah mitra.

7. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bidang pertanian dan perikanan (Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kerjasama: Permanfaatan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi, sarana produksi perikanan, dan peralatan pendukung lainnya untuk mendukung sektor pertanian hulu dan kebutuhan pangan.

8. Pengelolaan SDA

Wilayah intake Sungai Mahakam (Kota Samarinda dan Balikpapan)

Bendungan Batu Lepek (Provinsi Kalimantan Timur)

Kerjasama: Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi lewat pengembangan pengelolaan sumber daya air terpadu.

Pembangunan IKN tentu membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit sampai dengan beberapa tahun kedepan. Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra IKN memiliki peluang besar untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan IKN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 12.1/KPTS/Dk/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, Kualifikasi jenjang 1 – 8 dengan Klasifikasi Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elekterikal dan Tata Lingkungan. Sesuai kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kualifikasi Ahli Jenjang 7 - 8 dan Kualifikasi Teknisi/Analisis dan Operator (Terampil) pada Jenjang 1 - 6. Potensi Tenaga Kerja Lokal Kalimantan Timur yang telah bersertifikat sebanyak 38.483 dengan rincian Kualifikasi Tenaga Ahli 10.576 dan Kualifikasi Tenaga Teknisi/Analisis dan Operator (Terampil) 27.907.

Tenaga Kerja Konstruksi yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN sebanyak 745.600 orang dengan 3 (tiga) skema yaitu:

a. Skema 1 (10 : 90)

- Kebutuhan TKK Pembangunan IKN
 - Tenaga Ahli sebanyak 74.560 orang
 - Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 671.040 orang
- Ketersediaan TKK Prov. Kalimantan Timur

- Tenaga Ahli sebanyak 3.848 orang (14%)
 - Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 34.635 orang (4%)
- b. Skema 2 (15 : 85)
- Kebutuhan TKK Pembangunan IKN
 - Tenaga Ahli sebanyak 111.840 orang
 - Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 633.760 orang
 - Ketersediaan TKK Prov. Kalimantan Timur
 - Tenaga Ahli sebanyak 5.722 orang (9%)
 - Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 32.711 orang (4%)
- c. Skema 3 (20 : 80)
- Kebutuhan TKK Pembangunan IKN
 - Tenaga Ahli sebanyak 149.120 orang
 - Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 596.480
 - Ketersediaan TKK Prov. Kalimantan Timur
 - Tenaga Ahli sebanyak 7.697 orang (7%)
 - Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 30.786 orang (5%)

3.2.2. Telaahan Isu Strategis Daerah dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Isu strategis daerah yang dimuat dalam Rancangan RPD menjadi bagian penting untuk ditelaah dalam merumuskan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026. Dari sejumlah isu strategis daerah, terdapat 2 (dua) isu yaitu isu 2 dan isu 3 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Adapun kedua isu strategis tersebut, meliputi:

Isu 2: Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal

(SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

Isu 3: Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Pesatnya dinamika perkembangan transportasi menjadi tantangan bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada sudah atau belum menunjang. Oleh karena itu sangat perlu dipertimbangkan adanya pembangunan jalan baru yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peningkatan jalan dan jembatan. Hal ini sangat berkaitan dengan proses pengadaan lahan. Pengadaan lahan membutuhkan perencanaan yang sistematis, pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks.

Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor Over Load di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan meningkatkan kapasitas jalan atau membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit serta penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

Faktor cuaca ekstrim dan kondisi alam tidak jarang menjadi kendala dalam pemenuhan infrastruktur. Dampak dari cuaca ekstrim dan kondisi alam terhadap infrastruktur pekerjaan umum sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat.

3.2.3. Penetapan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, permasalahan pelayanan dinas, juga potensi, peluang dan tantangan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. Isu pembangunan IKN menjadi salah satu pertimbangan sebab pada fase awal

pembangunan IKN tentu membutuhkan dukungan dan sinergi terutama infrastruktur dengan Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas serta tugas dan fungsi dari 2 (dua) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas, maka ditetapkan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2024-2026, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi:
 - a. Peningkatan konektivitas daerah
 - b. Peningkatan infrastruktur sumber daya air
 - c. Peningkatan akses air minum dan sanitasi
 - d. Peningkatan kualitas penataan bangunan dan gedung
 - e. Peningkatan kualitas penataan ruang
 - f. Peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi
2. Peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3. Peningkatan akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026. Tujuan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk itu, Renstra Dinas PUPRPR disusun dengan tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan kewenangan pada kedua urusan tersebut dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan daerah provinsi. Lebih lanjut, penentuan tujuan dan sasaran dinas juga memerhatikan isu-isu strategis yang aktual terkait tugas dan fungsi dinas.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan 2 dan sasaran 6 serta sasaran 7 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar. Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), dengan target akhir periode mencapai 9,05.

Berdasarkan isu strategis dinas dan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimuat pada Tabel 4.1. Tujuan

Renstra diturunkan ke sasaran-sasaran sampai tahun 2026 yang menggambarkan kinerja bidang-bidang sesuai tugas dan fungsi.

Isu strategis merupakan hal yang berdaya ungkit dan penting untuk dikedepankan dalam pelayanan perangkat daerah. Isu strategis untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 menjadi penentu perumusan sasaran strategis Renstra, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Isu Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diterjemahkan kedalam sasaran Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Isu Peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman diterjemahkan kedalam sasaran Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- c. Isu Peningkatan akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah diterjemahkan kedalam sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian Tujuan **Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian** diukur dengan indikator: 1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas; dan 2) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung. Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas meliputi komponen yang diprioritas yakni jalan, sumber daya air (irigasi, air baku, dan genangan banjir), air minum, jasa konstruksi, penataan ruang, dan kawasan kumuh. Komponen-komponen ini diprioritaskan pada kurun waktu 2024-2026 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Sementara indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung meliputi komponen pantai kritis, persampahan, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pengujian bahan konstruksi, penyelenggaraan SPM Perumahan, dan penanganan PSU Permukiman.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2022	2023 (target)	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
T1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6,10	6,74	7,19	8,04	8,89	8,89
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0,40	1,56	3,41	4,98	6,85	6,85
S.1.1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas	Indeks	6,16	6,88	7,42	8,08	8,85	8,85
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung	Indeks	0,20	1,21	3,59	5,04	6,72	6,72
S.1.2	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Persen	55,02	56,84	53,03	76,87	100	100
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung	Indeks	1,45	2,26	3,00	4,93	7,37	7,37
T2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Poin	84,41	84,60	85	85,50	86	86
S.2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60,05	62,00	65,00	67,00	71,00	71,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82,09	82,09	82,20	82,44	82,70	82,70

Sumber: hasil proyeksi, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas PUPRPR Tahun 2024-2026. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra PD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Kalimantan Timur.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026 diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPD terkait infrastruktur. Strategi dan arah kebijakan RPD tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEHIJAKAN
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian		
Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Peningkatan fungsi pelayanan jalan	Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
	Peningkatan kapasitas dan kinerja daerah aliran sungai dan drainase	Pengurangan sedimentasi dan sampah pada aliran sungai dan drainase
	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jaringan irigasi	Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi
	Peningkatan kapasitas dan kinerja daerah aliran sungai dan drainase	Pengurangan sedimentasi dan sampah pada aliran sungai dan drainase
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air minum	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum (SPAM)
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana persampahan
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air limbah

TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEHIJAKAN
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar	Perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
		Penataan bangunan dan lingkungan gedung sesuai standar
	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Pemberian fasilitasi dan koordinasi penataan ruang, penyusunan kebijakan penataan ruang
		Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang, koordinasi dan sinkronisasi serta memaksimalkan fungsi sistem informasi penataan ruang
		Penyusunan kebijakan pengendalian, koordinasi serta pelaksanaan penertiban penegakan hukum
		Pelaksanaan kebijakan satu peta
	Peningkatan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
		Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		Pengawasan Teknis Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Sasaran 1.2: Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Peningkatan layanan kualitas kawasan permukiman
	Peningkatan rumah layak huni	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni terutama untuk pemenuhan SPM perumahan rakyat
	Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Peningkatan kualitas layanan PSU
Tujuan 2: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas		
Sasaran 2.1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
		Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM, serta peningkatan mutu layanan administrasi keuangan, umum, pendukung, dan sarana prasarana perkantoran
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas, maka telah dipilih strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara atau upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Lebih lanjut, arah kebijakan menjadi dasar untuk menentukan kinerja yang akan dihasilkan oleh dinas. Kinerja hasil (*outcome*) diwujudkan dalam bentuk program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kegiatan dan subkegiatan. Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sementara Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun 2024-2026, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dinas selain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD, juga ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Terdapat beberapa *major project* yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPD. *Major project* di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat diarahkan untuk mendukung sasaran 6 dan sasaran 7 yaitu Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar. Adapun *major project* dimaksud, meliputi:

- 1) Rekonstruksi jalan
- 2) Pembangunan jalan
- 3) Pembangunan Air Baku
- 4) Pembangunan SPAM Regional
- 5) Penanganan banjir perkotaan
- 6) 1000 unit/tahun Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu
- 7) Penanganan 6 kawasan kumuh di 6 Kab/Kota : Bontang (Kampung Kuala Bahari/Kampung Pesisir Kel. Tj Laut Indah, Tj Limau Kel. Gunung Elai), Balikpapan (Kampung Pesisir Kel. Klandasan Ilir), Samarinda, Kukar, Kubar dan Berau

Penentuan program dinas berdasarkan kinerja yang akan dihasilkan untuk mewujudkan sasaran strategis Renstra PD, berdasarkan strategi dan arah kebijakan. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada Tabel VI.1 Program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja dan pagu indikatif per tahun serta lokasi dari setiap sub kegiatan.

Tabel. VI. 1 Rencana Program dan Kegiatan DPUPR PERA 2024-2026

MIS I /TU JUA N	SAS ARA N	K O D E	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT UAN	DATA CAPAI AN PADA TAHUN AWAL PEREN CANAA N	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT PERA NGKA T DAER AH PEN ANGGU NG JAWA B	LOKA SI
							Tahun I		Tahun II		Tahun III		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TAR GET	PAGU (RP)	TAR GET	PAGU (RP)	TAR GET	PAGU (RP)	TAR GET	PAGU (RP)		
TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6.10	7.19	1,936,264,515,363	8.04	2,985,277,046,115.00	8.89	3,776,764,453,783	8.89	8,698,306,015,261		
				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0.40	3.41	223,548,920,630	4.98	158,175,296,800.00	6.85	181,251,301,372	6.85	562,975,518,802		
	SASARAN 1.1 : Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas	Indeks	6.16	7.42	1,785,565,671,363	8.08	2,888,927,046,115.00	8.85	3,634,764,453,783	8.85	8,309,257,171,261		
				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan	Indeks	0.20	3.59	170,449,796,800	5.04	92,175,296,800.00	6.72	111,251,301,372	6.72	373,876,394,972		

		Umum dan Penataan Ruang Prndukung												
	SUMBER DAYA AIR					360,716,477,680		172,450,000,000.00		198,950,663,667		732,117,141,347		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460	92,650,000,000	9,730	35,400,000,000.00	10,030	43,300,000,000	10,030.00	171,350,000,000		
		Panjang pantai kritis yang ditangani **	Km	0.45	2.80	95,474,500,000	0.33	27,000,000,000.00	0.63	35,193,992,882	4.71	157,668,492,882		
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239.00	94.00	77,900,000,000	60.00	54,000,000,000.00	50.00	40,100,000,000	443.00	172,000,000,000		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.40	70.00	51,041,977,680	140.00	28,483,652,400.00	210.00	44,606,670,785	210.00	124,132,300,865		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5,158.00	5,480.00	51,041,977,680	4,801.86	28,483,652,400.00	7,669.29	44,606,670,785	17,951.15	124,132,300,865		Samarinda, Bontang, Kutai Timur
		Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	0.00	6.00	77,900,000,000	3.00	54,000,000,000.00	1.00	40,100,000,000	10.00	172,000,000,000		Balikpapan, Bontang, Samarinda
		Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi	1.00	7.00	95,474,500,000	6.00	27,000,000,000.00	6.00	35,193,992,882	19.00	157,668,492,882		Berau, PPU, Balikpapan

													papa n
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	7.00	15.00	28,800,000,000	3.00	6,400,000,000.00	1.00	5,000,000,000	19.00	40,200,000,000		10 Kab Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	14.00	14.00	6,824,500,000	10.00	4,750,000,000.00	3.00	2,250,000,000	27.00	13,824,500,000		10 Kab Kota
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang terbangun	Unit	-			1.00	5,000,000,000.00	3.00	20,550,000,000	4.00	25,550,000,000		Bontang
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	-	5.00	20,550,000,000	3.00	6,600,000,000.00			8.00	27,150,000,000		Balikpapan, Bontang, Samarinda
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	-	1.00	28,550,000,000	1.00	36,000,000,000.00	1.00	14,550,000,000	1.00	79,100,000,000		Bontang
Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	-	0.20	6,550,000,000					0.20	6,550,000,000		Balikpapan
Pembangunan Seawall dan Bangunan	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	KM	0.45	2.68	82,100,000,000	0.34	22,250,000,000.00	0.63	32,943,992,882	3.65	137,293,992,882		Berau, PPU,

Pengaman Pantai Lainnya	Lainnya yang Dibangun												Balikpapan
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	5.16	5.48	42,800,000,000	4.80	25,000,000,000.00	7.67	41,123,018,385	17.95	108,923,018,385		Samarinda, Bontang, Kutai Timur
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	1.00	1.00	758,995,000	1.00	758,995,000.00	1.00	758,995,000	3.00	2,276,985,000		10 Kab Kota
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	10.00	6.00	6,855,736,980	6.00	2,097,411,700.00	6.00	2,097,411,700	18.00	11,050,560,380		Balikpapan, Samarinda, Berau
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	3.00	1.00	349,956,000	1.00	349,956,000.00	1.00	349,956,000	3.00	1,049,868,000		Berau, Kutim, Kukar, Bontang
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	1.00	1.00	277,289,700	1.00	277,289,700.00	1.00	277,289,700	3.00	831,869,100		Balikpapan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	met er	2,014.00	1,940.00	92,650,000,000	3,838.46	35,400,000,000.00	5,387.17	43,300,000,000	11,165.63	171,350,000,000		Berau , Kuka r, Paser
Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dok ume n	3.00	8.00	4,400,000,000	7.00	2,300,000,000.00	2.00	1,400,000,000	17.00	8,100,000,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2.01	1.78	83,850,000,000	2.46	26,900,000,000.00	2.91	31,700,000,000	7.16	142,450,000,000		Berau , Kuka r Paser
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	-	0.16	4,400,000,000	1.38	6,200,000,000.00	2.48	10,200,000,000	4.01	20,800,000,000		, Kuba r
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	7.82	11.15	43,650,000,000	12.76	27,566,347,600.00	14.89	35,750,000,000.00	14.89	106,966,347,600.00		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	met er	2,723.70	1,469.00	43,650,000,000	710.00	27,566,347,600.00	944.00	35,750,000,000	3,123.00	106,966,347,600		Sama rinda , Balik papa n, Kuti m

	dan Kawasan Strategis Provinsi													
	Supervisi Pembangunan/Pe- ningkatan/Rehabil- itasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Pe- ningkatan/Rehabil- itasi Sistem Drainase Perkotaan	Dok- ume- n	1.00	6.00	2,650,00 0,000	5.00	2,750,000, 000.00	5.00	2,750,00 0,000	16.0 0	8,150,000, 000		Sama rinda, Balik papa- n, Kuti- m
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Siste- m Drai- nase Perk- otaa- n	1.00	6.00	41,000,0 00,000	5.00	24,816,34 7,600.00	5.00	33,000,0 00,000	16.0 0	98,816,34 7,600		Sama rinda, Balik papa- n, Kuti- m
	BIDANG CIPTA KARYA					1,049,62 0,761,13 1		1,011,900 708,908. 00		748,145, 229,598		2,809,666 699,637		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	39.15	57.6 5	165,500, 000,000	83.4 0	193,651,6 96,848.00	100. 00	211,144, 621,588	100. 00	570,296,3 18,436		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	Unit	2.00	3.00	165,500, 000,000	5.00	193,651,6 96,848.00	3.00	211,144, 621,588	13.0 0	570,296,3 18,436		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dok- ume- n	2.00	7.00	8,220,00 0,000	4.00	5,550,000, 000.00	5.00	7,100,00 0,000	18.0 0	20,870,00 0,000		Sama rinda

Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun												
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	lt/dt	-	70.00	156,030,000,000	70.00	186,851,696,848.00	85.00	202,794,621,588	225.00	545,676,318,436		Kukar, Bontang, Kutim, Paser, PPU
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/kota	3.00	5.00	450,000,000	5.00	450,000,000.00	5.00	450,000,000	5.00	1,350,000,000		
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/kota	10.00	10.00	800,000,000	10.00	800,000,000.00	10.00	800,000,000	10.00	2,400,000,000		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	%	10.00	17.50	1,000,000,000	25.00	1,000,000,000.00	40.00	1,500,000,000.00	40.00	3,500,000,000.00		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	Dokumen	1.00	1.00	1,000,000,000	1.00	1,000,000,000.00	2.00	1,500,000,000.00	5.00	3,500,000,000.00		

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	25.00	25.00	550,000,000	25.00	500,000,000.00	25.00	500,000,000	100.00	1,550,000,000		PPU
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	1.00	1.00	450,000,000	1.00	500,000,000.00	2.00	1,000,000,000	5.00	1,950,000,000		Samarinda, Kukur
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	%	17.50	32.50	3,500,000,000	42.00	3,500,000,000.00	46.00	8,882,011,690.00	46.00	15,882,011,690.00		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	Dokumen	1.00	2.00	3,500,000,000	2.00	3,500,000,000.00	1.00	8,882,011,690.00	6.00	15,882,011,690.00		
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	25.00	25.00	1,250,000,000	25.00	750,000,000.00	25.00	500,000,000	100.00	2,500,000,000		PPU
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	1.00	3.00	2,250,000,000	2.00	2,100,000,000.00	1.00	500,000,000	7.00	4,850,000,000		Samarinda, Kukur

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun												
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab/kota	2.00	2.00		2.00	650,000,000.00	2.00	7,882,011,690	2.00	8,532,011,690		Samarinda, Kutar
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	%	-	50.00	30,000,000,000	75.00	40,000,000,000.00	100.00	40,000,000,000.00	100.00	110,000,000,000.00		
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	Kawasan	-	4.00	30,000,000,000	2.00	40,000,000,000.00	2.00	40,000,000,000.00	8.00	110,000,000,000.00		
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit		4.00	30,000,000,000	2.00	40,000,000,000.00	2.00	40,000,000,000	8.00	110,000,000,000		Samarinda, Balikpapan, Berau, Kutai, PPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan	%	11.03	59.77	809,620,761,131	83.58	753,749,012,060.00	100.00	461,618,596,320.00	100.00	2,024,988,369,511.00		

	Strategis Provinsi yang Ditangani												
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	6.00	15.00	809,620,761,131	9.00	753,749,012,060.00	6.00	461,618,596,320.00	36.00	2,024,988,369,511.00		
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	6.00	19.00	22,500,000,000	10.00	16,200,000,000.00	5.00	9,100,000,000	40.00	47,800,000,000		Samarinda, Balikpapan
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DiUbahsuaikan	Bangunan Gedung	6.00	16.00	785,470,761,876	9.00	736,249,012,060.00	5.00	450,218,596,320	36.00	1,971,938,370,256		Samarinda, Balikpapan
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kab/kota	-	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000.00	2.00	500,000,000	6.00	1,500,000,000		Samarinda
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan	Orang	-	-		-		2.00	1,000,000,000	2.00	1,000,000,000		Samarinda

Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif												
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	50.00	50.00	200,000,000	50.00	200,000,000.00	50.00	200,000,000	200.00	600,000,000		Samarinda
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	-	25.00	274,999,628	25.00	200,000,000.00	25.00	200,000,000	75.00	674,999,628		10 Kab/ Kota
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	-	5.00	274,999,628	5.00	200,000,000.00	5.00	200,000,000	15.00	674,999,628		Samarinda
Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Lisensi	1.00	2.00	400,000,000	10.00	200,000,000.00	10.00	200,000,000	23.00	800,000,000		Samarinda
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	%	16.67	50.00	40,000,000,000	66.67	20,000,000,000.00	100.00	25,000,000,000.00	100.00	85,000,000,000.00		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	Kawasan	2.00	3.00	40,000,000,000	1.00	20,000,000,000.00	2.00	25,000,000,000.00	8.00	85,000,000,000.00		

Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya												
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	2.00	1,600,000,000	2.00	3,000,000,000.00	1.00	500,000,000	5.00	5,100,000,000		Samarinda, Kukar, Berau, Paser
Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	2.00	4.00	7,500,000,000	2.00	3,800,000,000.00	3.00	4,300,000,000	11.00	15,600,000,000		Samarinda, Kukar, Berau, Paser
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	2.00	3.00	30,700,000,000	1.00	13,000,000,000.00	2.00	20,000,000,000	8.00	63,700,000,000		Samarinda, Kukar, Berau, Paser

	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab/kota	10.00	10.00	200,000,000	10.00	200,000,000.00	10.00	200,000,000	10.00	600,000,000		10 Kab/Kota
	TATA RUANG					13,500,000,000		15,000,000,000.00		20,000,000,000		48,500,000,000		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	78.57 %	83.20 %	13,500,000,000	83.90 %	15,000,000,000.00	84.94 %	20,000,000,000	84.94 %	48,500,000,000		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	%	12.51 %	13.24 %	2,200,000,000	13.35 %	3,500,000,000.00	13.52 %	4,400,000,000	13.52 %	10,100,000,000		
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	0	1	1,800,000,000	3	3,100,000,000.00	3	4,000,000,000	7	8,900,000,000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	Orang	150	100	400,000,000	100	400,000,000.00	100	400,000,000	300	1,200,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%	26.11 %	27.65 %	2,350,000,000	27.88 %	3,350,000,000.00	28.22 %	6,850,000,000.00	28.22 %	12,550,000,000.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	0	-	1	1,000,000,000.00	2	3,000,000,000	3	4,000,000,000		

Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	Peta	1	0	-	0	-	1	1,500,000,000	1 Peta	1,500,000,000		
Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	4	500,000,000	3	500,000,000.00	3	500,000,000	10	1,500,000,000		
Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	25	350,000,000	25	350,000,000.00	25	350,000,000	75	1,050,000,000		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	25.02 %	26.50 %	4,600,000,000	26.73 %	4,050,000,000.00	27.06 %	4,400,000,000.00	27.06 %	13,050,000,000.00		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan	Layanan	0	6	600,000,000	6	600,000,000.00	6	600,000,000	18	1,800,000,000		

Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	ketentuan waktu yang berlaku												
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	0	6	350,000,000	6	350,000,000.00	6	350,000,000	18	1,050,000,000		
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	0	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Penataan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	2	1,900,000,000	2	1,500,000,000.00	3	1,800,000,000	7	5,200,000,000		
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	5	1,250,000,000	4	1,100,000,000.00	4	1,150,000,000	13	3,500,000,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	14.93 %	15.8 1%	4,350,000,000	15.9 4%	4,100,000,000.00	16.1 4%	4,350,000,000.00	16.1 4%	12,800,000,000.00		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1,400,000,000	1	400,000,000.00	1	1,400,000,000	3	3,200,000,000		
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penataan ruang	Berita Acara	0	1	350,000,000	1	350,000,000.00	1	350,000,000	3	1,050,000,000		

	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasu s	0	0	-	1	800,000,000.00	0	-	1	800,000,000		
	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Kasu s	0	1	800,000,000	1	750,000,000.00	1	800,000,000	3	2,350,000,000		
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dok ume n	0	1	300,000,000	1	300,000,000.00	1	300,000,000	3	900,000,000		
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dok ume n	0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000	3	3,000,000,000		
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dok ume n	1	1	500,000,000	1	500,000,000.00	1	500,000,000	3	1,500,000,000		
	BINA MARGA					1,169,877,261,683		2,297,930,917,267.00		2,984,818,729,410		6,452,626,908,360		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	Pers en	77.52	82.09	852,477,261,683	86.23	1,583,430,917,267.00	93.53	1,759,818,729,410	93.53	4,195,726,908,360		

	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	-	1.00	317,400,000,000	2.00	714,500,000,000.00	4.00	1,225,000,000,000	4.00	2,256,900,000,000		
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	Panjang jalan dengan kondisi mantap	km	693,86	754,55 Km	852,477,261,683	792,61 Km	1,583,430,917,267.00	859,71 Km	1,759,818,729,410	859.71	4,195,726,908,360		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, PPU, Paser
	Panjang jalan baru yang terbangun	km	13,95	26 Km	317,400,000,000	43,50 Km	714,500,000,000.00	67,80 Km	1,225,000,000,000	67,80 Km	2,256,900,000,000		Samarinda, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Dokumen	33.00	25 Dokumen	22,600,000,000	30 Dokumen	25,600,000,000.00	30 Dokumen	25,600,000,000	85 Dokumen	73,800,000,000		

	Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan yang Disusun											
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	-	1 Dokumen 1,500,000,000	1 Dokumen 1,500,000,000.00	1 Dokumen 1,500,000,000.00	1 Dokumen 1,500,000,000.00	3 Dokumen 4,500,000,000				
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	895,09	895,09 KM 2,900,000,000	895,09 KM 2,900,000,000.00	895,09 KM 2,900,000,000.00	895,09 KM 2,900,000,000.00	895,09 KM 8,700,000,000				
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	13,95	14,50 KM 248,500,000,000	17,50 KM 528,500,000,000.00	24,30 KM 1,144,500,000,000.00	56,30 KM 1,921,500,000,000					
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	-	6 KM 45,000,000,000	8 KM 60,000,000,000.00	8 KM 60,000,000,000.00	22 KM 165,000,000,000					
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	48.00	57,40 KM 740,477,261,683	112 KM 1,443,430,917,267.00	126 KM 1,619,818,729,410	295,40 KM 3,803,726,908,360					
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	2.00	6 Jembatan 68,900,000,000	6 Jembatan 186,000,000,000.00	6 Jembatan 80,500,000,000.00	18 Jembatan 335,400,000,000					
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	895,09	895,09 KM 40,000,000,000	895,09 KM 50,000,000,000.00	895,09 KM 50,000,000,000.00	895,09 KM 140,000,000,000					
	BIDANG BINA KONSTRUKSI				21,500,000,000	24,993,000,000.00	25,055,000,000	71,548,000,000					
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	55.16 %	57.64 %	60.13 %	62.62 %	71,548,000,000					

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	Orang	426	150 orang	14,680,000,000	150 orang	15,950,000,000.00	150 orang	15,955,000,000	450 orang	46,585,000,000		
Penyediaan Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)	Orang	48	96	1,280,000,000	120	1,600,000,000.00	120	1,600,000,000	336	4,480,000,000		
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,000,000	1	250,000,000.00	1	250,000,000	3	600,000,000		
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)	Orang	426	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000.00	1500	6,000,000,000	4500	18,000,000,000		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	8	1,200,000,000	10	1,500,000,000.00	10	1,500,000,000	28	4,200,000,000		
Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100,000,000	1	200,000,000.00	1	200,000,000	3	500,000,000		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	426	1500	5,700,000,000	1500	6,000,000,000.00	1500	6,000,000,000	4500	17,700,000,000		

	Difasilitasi Sertifikasi (Orang)												
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)	Orang	426	1500	150,000,000	1500	200,000,000.00	1500	200,000,000	4500	550,000,000		
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)	Lembaga	6	10	150,000,000	10	200,000,000.00	10	205,000,000	30	555,000,000		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	Layanan	1	1 Layanan	750,000,000	1 Layanan	1,200,000,000	1 Layanan	1,250,000,000	3 Layanan	3,200,000,000		
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	Layanan Informasi	1	1	100,000,000	1	200,000,000.00	1	250,000,000	3	550,000,000		
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	Perangkat Pendukung	1	1	250,000,000	1	450,000,000.00	1	450,000,000	3	1,150,000,000		
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	1	1	200,000,000	1	350,000,000.00	1	350,000,000	3	900,000,000		

	yang Disediakan (Dokumen)												
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	30	60	200,000,000	60	200,000,000.00	60	200,000,000	180	600,000,000		
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	2	3 Dokumen	6,070,000,000	3 Dokumen	7,843,000,000	3 Dokumen	7,850,000,000	9 Dokumen	21,763,000,000		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	Paket Pekerjaan	53	130	1,000,000,000	150	1,300,000,000.00	175	1,300,000,000	455	3,600,000,000		
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	Bangunan Konstruksi	24	20	500,000,000	20	650,000,000.00	20	650,000,000	60	1,800,000,000		
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	Lembaga	11	11	2,300,000,000	11	3,390,000,000.00	11	3,400,000,000	33	9,090,000,000		

	Produk Jasa Konstruksi	dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)												
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	Bada n Usah a	53	100	750,000,000	100	850,000,000.00	100	850,000,000	300	2,450,000,000		
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)	Dok ume n	1	1	1,520,000,000	1	1,653,000,000.00	1	1,650,000,000	3	4,823,000,000		
	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I					44,446,432,000		64,946,432,000		70,446,432,000		179,839,296,000		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460	5,500,000,000	9,730	5,500,000,000.00	10,030.00	5,000,000,000	10,030.00	16,000,000,000		
		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km											
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239.00	94.00	2,000,000,000	60.00	2,500,000,000.00	50.00	2,500,000,000	50.00	7,000,000,000		

	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.40	70.00		140.00		210.00		210.00			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5,158.00	5,480.00	2,000,000,000	4,801.86	2,500,000,000.00	7,669.29	2,500,000,000	7,669.29	7,000,000,000		
	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	0.00	6.00		3.00		1.00		10.00			
	Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi											
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	2.00	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000.00	2.00	500,000,000	2.00	1,500,000,000		
Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang direhabilitasi	M	2.00	1,250.00	1,000,000,000	1,250.00	1,500,000,000.00	1,250.00	1,500,000,000	1,250.00	4,000,000,000		
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing sungai yang Dipelihara	KM	0.50	0.50	500,000,000	0.50	500,000,000.00	0.50	500,000,000	0.50	1,500,000,000		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	2,014.00	1,940.00	5,500,000,000	3,838.46	5,500,000,000	5,387.17	5,000,000,000	5,387.17	16,000,000,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	45.28	45.28	5,500,000,000.00	45.28	5,500,000,000.00	45.28	5,000,000,000.00	45.28	16,000,000,000		

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	11.03	59.77	550,000,000	83.58	550,000,000.00	100.00	550,000,000	100.00	1,650,000,000		
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	4.00	1.00	550,000,000	1.00	550,000,000.00	1.00	550,000,000	1.00	1,650,000,000		
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Dokumen		1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000.00	1 Dokumen	550,000,000		1,650,000,000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.52	82.09	36,396,432,000	86.23	56,396,432,000.00	93.53	62,396,432,000	93.53	155,189,296,000		
	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas											
Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	693.86	754.55	36,396,432,000	792.61	56,396,432,000.00	859.71	62,396,432,000	859.71	155,189,296,000		
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km	5.00	5.00	7,000,000,000	6.00	8,000,000,000.00	7.00	10,000,000,000	20.00	25,000,000,000		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Km	15.00	20.00	27,396,432,000	20.00	46,396,432,000.00	20.00	50,396,432,000	20.00	124,189,296,000		

	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	600.00	300.00	2,000,000.00	300.00	2,000,000.00	300.00	2,000,000.00	300.00	6,000,000.00		
	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II					55,500,000.00		76,500,000.00		82,296,000.00		214,296,000.00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460.00	5,000,000.00	9,730.00	5,000,000.00	10,030.00	5,000,000.00	10,030.00	15,000,000.00		
		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km											
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239.00	94.00	500,000.00	60.00	500,000.00	50.00	500,000.00	50.00	1,500,000.00		
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87.40	70.00		140.00		210.00		210.00			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5,158.00	5,480.00	500,000.00	4,801.86	500,000.00	7,669.29	500,000.00	7,669.29	1,500,000.00		
		Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	0.00	6.00		3.00		1.00		10.00			
		Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi											
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	1.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	1,500,000.00		Bend ali HM. Arda ns Kota Sama rinda

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	2,014.00	3,390.58	5,000,000,000	3,838.46	5,000,000,000	5,387.17	5,000,000,000	5,387.17	15,000,000,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	26 D.I.	20.00	5,000,000,000	20.00	5,000,000,000.00	20.00	5,000,000,000	20.00	15,000,000,000		Kab. Kukur
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	7.82	11.15	6,000,000,000	12.76	6,000,000,000.00	14.89	6,000,000,000	14.89	18,000,000,000		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	2,723.70	1,940.00	6,000,000,000	710.00	6,000,000,000	944.00	6,000,000,000	944.00	18,000,000,000		
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2.00	9.00	6,000,000,000	9.00	6,000,000,000.00	9.00	6,000,000,000	9.00	18,000,000,000		Sistem Jaringan Sungai Karang Asam Kecil

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.52	82.09	44,000,000,000	86.23	65,000,000,000.00	93.53	70,796,000,000	93.53	179,796,000,000		
		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas											
	Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dengan kondisi mantap		693.86	754.55	44,000,000,000	792.61	65,000,000,000.00	859.71	70,796,000,000	859.71	179,796,000,000		
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	3.00	4.50	24,714,28,981	4.00	39,122,122,900.00	4.00	32,725,935,000	4.00	96,562,286,881		Kota Samarinda dan Kab. Kutai
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	KM	10.00	10.00	9,625,070,519	11.00	19,000,000,000.00	14.00	22,000,000,000	14.00	50,625,070,519		Kota Samarinda dan Kab. Kutai
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	28.00	30.00	9,660,700,500	30.00	6,877,877,100.00	30.00	16,070,065,000	30.00	32,608,642,600		Kota Samarinda dan Kab. Kutai
	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III					56,000,000,000		76,455,000,000.00		83,247,000,000		215,702,000,000		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	8,940.00	9,460.00	7,000,000,000	9,730.00	7,000,000,000.00	10,300.00	7,000,000,000	10,300.00	21,000,000,000		

	Panjang pantai kritis yang ditangani	Km											
	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/d etik											
	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha											
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	met er	2,014.00	1,940.00	7,000,000,000	33.30	7,000,000,000	33.30	7,000,000,000	33.30	21,000,000,000		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	4 D.I	1.30	2,000,000,000	1.30	2,000,000,000.00	1.30	2,000,000,000	1.30	6,000,000,000		Kab. Berrau
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	5 D.I	32.00	5,000,000,000	32.00	5,000,000,000.00	32.00	5,000,000,000	32.00	15,000,000,000		Kab. Berrau
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	77.52	82.09	49,000,000,000	86.23	69,455,000,000.00	93.53	76,247,000,000	93.53	194,702,000,000		
	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas											
Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dengan kondisi mantap	km	693.86	754.55	49,000,000,000	792.61	69,455,000,000.00	859.71	76,247,000,000	859.71	194,702,000,000		
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	2.00	1.80	15,000,000,000	1.80	15,000,000,000.00	1.80	15,000,000,000	1.80	45,000,000,000		Kab. Berau

	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	66.00	37.00	32,000,000,000	38.00	52,455,000,000.00	40.20	59,247,000,000	40.20	143,702,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	20.00	2.00	2,000,000,000	2.00	2,000,000,000.00	2.00	2,000,000,000	6.00	6,000,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI					475,296,800		675,296,800.00		675,296,800		1,825,890,400		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi		23.09	45.21	475,296,800	71.11	675,296,800.00	99.40	675,296,800	99.40	1,825,890,400		Samarinda, Kalimantan Timur
	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	1.00	3.00	475,296,800	3.00	675,296,800.00	3.00	675,296,800	9.00	1,825,890,400		Samarinda, Kalimantan Timur
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (UPTD LBK)	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi		3.00	475,296,800	3.00	675,296,800.00	3.00	675,296,800	9.00	1,825,890,400		Samarinda, Kalimantan Timur
TUJUAN 1 : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan	Indeks	6.10	7.19	1,936,264,515,363	8.04	2,985,277,046,115.00	8.89	3,776,764,453,783	8.89	8,698,306,015,261		

			Perumahan Rakyat Prioritas												
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0.40	3.41	223,548,920,630	4.98	158,175,296,800.00	6.85	181,251,301,372	6.85	562,975,518,802		
	SASARAN 1.2 : Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman		Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	55.02	56.84	150,698,844,000	53.03	96,350,000,000.00	76.87	142,000,000,000	100.00	389,048,844,000		
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung	Indeks	1.45	2.26	53,099,123,830	3.00	66,000,000,000.00	4.93	70,000,000,000	7.37	189,099,123,830		
			BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				233,099,123,830		182,350,000,000.00		232,000,000,000		647,449,123,830		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	%	25%	33.32 %	2,099,123,830	47.89 %	26,000,000,000.00	62.46 %	30,000,000,000	62.46 %	58,099,123,830			
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Dokumen	0	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000.00	2 Dokumen	2,000,000,000	6 Dokumen	6,000,000,000			

	Relokasi Program Provinsi												
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000.00	2 Dokumen	2,000,000,000	6 Dokumen	6,000,000,000		
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	0	0 Unit	-	100 Unit	23,900,876,170	100 Unit	27,900,876,170	200 Unit	51,801,752,340		
1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	0	0 Unit Rumah	-	100 Unit Rumah	23,900,876,170.00	100 Unit Rumah	27,900,876,170	200 Unit Rumah	51,801,752,340		
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	0	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	3 Laporan	297,371,490		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	0	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830.00	1 Laporan	99,123,830	3 Laporan	297,371,490		
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	11.46	108.01 Ha	150,698,844,000	156.59 Ha	96,350,000,000	203.75 Ha	142,000,000,000	203.75 Ha	389,048,844,000		

1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Lapo ran	0	4 Lap ora n	1,761,70 6,400	4 Lap ora n	1,855,508 ,000.00	4 Lap oran	1,761,70 6,400	12 Lap oran	5,378,920 ,800		
1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Lapo ran	0	4 Lap oran	1,761,70 6,400	4 Lap oran	1,855,508, 000.00	4 Lapo ran	1,761,70 6,400	12 Lapo ran	5,378,920, 800		
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	11.46	96.5 5 Hek tar	148,937, 137,600	48.5 8 Hek tar	94,494,49 2,000	47.1 6 Hek tar	140,238, 293,600	203. 75 Hek tar	383,669,9 23,200		
1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	11.46	96.5 5 Ha	146,765, 937,600	48.5 8 Ha	94,068,09 2,000.00	47.1 6 Ha	140,238, 293,600	203. 75 Ha	381,072,3 23,200		

1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	0	5 Laporan	2,171,200,000	1 Laporan	426,400,000.00	0 Laporan	-	6 Laporan	2,597,600,000		
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	%	17.06 %	22.40 %	51,000,000,000	52.57 %	40,000,000,000.00	100 %	40,000,000,000	100 %	131,000,000,000		
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	0	10 Lokasi	51,000,000,000	6 Lokasi	40,000,000,000.00	7 Lokasi	40,000,000,000	23 Lokasi	131,000,000,000		
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	10 Lokasi	48,562,490,000	6 Lokasi	40,000,000,000.00	7 Lokasi	40,000,000,000	23 Lokasi	128,562,490,000		
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	0	8 Dokumen	2,437,510,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	8 Dokumen	2,437,510,000		

TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6,10	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks		
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0,4	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks		
	SASARAN 1.2 : Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman		Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	55.02 %	56.8 4%	29,301,1 56,000	53.0 3%	20,000,00 0,000.00	76.8 7%	20,000,0 00,000	76.8 7%	69,301,15 6,000	
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung	Indeks	1,45	2,26 Indeks		3,00 Indeks		4,93 Indeks		4,93 Indeks		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	11.46	108. 01 Ha	29,301,1 56,000	156. 59 Ha	20,000,00 0,000.00	203. 75 Ha	20,000,0 00,000	203. 75 Ha	69,301,15 6,000	
	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah		Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	11.46	96.5 5 Hek tar	29,301,1 56,000	48.5 8 Hek tar	20,000,00 0,000.00	47.1 6 Hek tar	20,000,0 00,000	203. 75 Hek tar	69,301,15 6,000	

		15 (Lima Belas) Ha													
		1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	0	1000 Unit Rumah	29,301,156,000	1000 Unit Rumah	20,000,000,000.00	1000 Unit Rumah	20,000,000,000	3000 Unit Rumah	69,301,156,000		
TUJUAN 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78.25	78.50	75,693,034,373	79.3	73,950,653,464.00	80.01	73,473,405,619	80.01	223,117,093,456		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Poin	84.60	85.00	39,502,793,503	85.5	38,111,895,561.00	86	38,175,977,906	86	115,790,666,970		
	SASARAN 2.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60.05	65.00	75,693,034,373	67	73,950,653,464.00	71	73,473,405,619	71	223,117,093,456		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82.09	82.20	39,502,793,503	82.44	38,111,895,561.00	82.7	38,175,977,906	82.7	115,790,666,970		
		SEKRETARIAT					88,249,321,176		85,901,262,325.00		84,985,659,325		259,136,242,826		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	63,731,652,845	74.60	62,894,592,245.00	77.00	62,356,233,245	77.00	188,982,478,335		

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	24,517,668,331	100.00	23,006,670,080.00	100.00	22,629,426,080	100.00	70,153,764,491		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	82.00	83.00	1,600,000,000	84.00	1,650,000,000.00	85.00	1,650,000,000	85.00	4,900,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	2.00	500,000,000	2.00	550,000,000.00	2.00	550,000,000	6.00	1,600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	4.00	200,000,000	4.00	200,000,000.00	4.00	200,000,000	12.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	4.00	200,000,000	4.00	200,000,000.00	4.00	200,000,000	12.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	4.00	200,000,000	4.00	200,000,000.00	4.00	200,000,000	12.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5.00	20.00	500,000,000	20.00	500,000,000.00	20.00	500,000,000	60.00	1,500,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	54,893,293,845	100.00	54,156,233,245.00	100.00	54,156,233,245	100.00	163,205,760,335		
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		4,452.00	52,474,605,845	4,452.00	51,737,545,245.00	4,452.00	51,737,545,245	13,356.00	155,949,696,335		Kota Samarinda
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		6.00	2,018,688,000	6.00	2,018,688,000.00	6.00	2,018,688,000	18.00	6,056,064,000		Kota Samarinda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok ume n		1.00	100,000, 000	1.00	100,000,0 00.00	1.00	100,000, 000	3.00	300,000,0 00		Kota Sama rinda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Lapo ran		1.00	100,000, 000	1.00	100,000,0 00.00	1.00	100,000, 000	3.00	300,000,0 00		Kota Sama rinda
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok ume n		1.00	100,000, 000	1.00	100,000,0 00.00	1.00	100,000, 000	3.00	300,000,0 00		Kota Sama rinda
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100. 00	300,000, 000	100. 00	300,000,0 00.00	100. 00	300,000, 000	100. 00	900,000,0 00		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok ume n	-	1.00	100,000, 000	1.00	100,000,0 00.00	1.00	100,000, 000	3.00	300,000,0 00		Kota Sama rinda
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok ume n	-	1.00	100,000, 000	1.00	100,000,0 00.00	1.00	100,000, 000	3.00	300,000,0 00		Kota Sama rinda
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapo ran	-	1.00	100,000, 000	1.00	100,000,0 00.00	1.00	100,000, 000	3.00	300,000,0 00		Kota Sama rinda
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan	%	100.00	100. 00	1,550,00 0,000	100. 00	1,400,000 ,000.00	100. 00	1,250,00 0,000	100. 00	4,200,000 ,000		

	Administrasi Kepegawaian												
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pake t		2.00	850,000,000	1.00	850,000,000.00	1.00	800,000,000	4.00	2,500,000,000		Kota Samarinda
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Oran g		200.00	300,000,000	100.00	150,000,000.00	100.00	150,000,000	400.00	600,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok ume n		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok ume n		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	oran g		50.00	200,000,000	50.00	200,000,000.00	25.00	100,000,000	125.00	500,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	3,006,925,631	100.00	2,320,000,000.00	100.00	2,200,000,000	100.00	7,526,925,631		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5.00	100,000,000	5.00	100,000,000.00	5.00	100,000,000	15.00	300,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12.00	700,000,000	12.00	500,000,000.00	12.00	500,000,000	36.00	1,700,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4.00	276,925,631	4.00	250,000,000.00	4.00	250,000,000	12.00	776,925,631		Kota Samarinda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		200.00	250,000,000	200.00	270,000,000.00	200.00	300,000,000	600.00	820,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Barang, Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12.00	280,000,000	12.00	250,000,000.00	12.00	200,000,000	36.00	730,000,000		Kota Samarinda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12.00	800,000,000	12.00	800,000,000.00	12.00	700,000,000	36.00	2,300,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	500,000,000	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000	3.00	600,000,000		Kota Samarinda
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Dokumen		1.00	100,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	300,000,000		Kota Samarinda

Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	600,000,000	100.00	700,000,000.00	100.00	600,000,000	100.00	1,900,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	14.00	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000.00	1.00	500,000,000	3.00	1,500,000,000		Kota Samarinda
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		3.00	100,000,000	5.00	200,000,000.00	3.00	100,000,000	11.00	400,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	21,510,742,700	100.00	20,686,670,080.00	100.00	20,429,426,080	100.00	62,626,838,860		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12.00	100,000,000	12.00	100,000,000.00	12.00	100,000,000	36.00	300,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12.00	2,885,206,295	12.00	2,418,437,075.00	12.00	2,161,193,075	36.00	7,464,836,445		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12.00	18,525,536,405	12.00	18,168,233,005.00	12.00	18,168,233,005	36.00	54,862,002,415		Kota Samarinda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor	%	100.00	100.00	4,788,359,000	100.00	4,688,359,000.00	100.00	4,400,000,000	100.00	13,876,718,000		

Pemerintah Daerah	yang Berfungsi dengan Baik												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	51.00	30.00	500,000,000	30.00	500,000,000.00	30.00	500,000,000	30.00	1,500,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		4.00	1,000,000,000	4.00	1,000,000,000.00	4.00	1,000,000,000	12.00	3,000,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		3.00	400,000,000	3.00	400,000,000.00	3.00	300,000,000	9.00	1,100,000,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		4.00	2,688,359,000	4.00	2,688,359,000.00	4.00	2,500,000,000	12.00	7,876,718,000		Kota Samarinda
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	-	1.00	200,000,000	1.00	100,000,000.00	1.00	100,000,000	3.00	400,000,000		Kota Samarinda
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I					5,553,568,000		5,553,568,000.00		6,053,568,000		17,160,704,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	2,609,379,527	74.60	2,609,379,527.00	77.00	3,009,379,527	77.00	8,228,138,581		
	Persentase Keluhan Pengguna	%	100.00	100.00	2,944,188,473	100.00	2,944,188,473.00	100.00	3,044,188,473	100.00	8,932,565,419		

	Layanan yang Ditindaklanjuti												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	287,480,000	100.00	287,480,000.00	100.00	287,480,000	100.00	862,440,000		Kota Balikpapan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	12.00	282,480,000	12.00	282,480,000.00	12.00	282,480,000	36.00	847,440,000		Kota Balikpapan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-		-		-		-	-	-		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-		-		-		-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-		-		-		-	-	-		

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000	100.00	60,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	30,000,000		Kota Balikpapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100.00	100.00	354,977,500	100.00	354,977,500.00	100.00	383,245,527	100.00	1,093,200,527		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	35.00	22,977,500	35.00	22,977,500.00	35.00	22,977,500	105.00	68,932,500		Kota Balikpapan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20.00	10.00	138,000,000	10.00	138,000,000.00	10.00	128,000,000	30.00	404,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kota Balikpapan

Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok ume n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	oran g	10.00	15.0 0	189,000, 000	15.0 0	189,000,0 00.00	15.0 0	227,268, 027	45.0 0	605,268,0 27		Dala m dan Luar Wilay ah Kalim antan Timu r
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100. 00	944,188, 473	100. 00	944,188,4 73.00	100. 00	1,044,18 8,473	100. 00	2,932,565 ,419		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Pake t	1.00	1.00	25,197,4 73	1.00	25,197,47 3.00	1.00	25,197,4 73	1.00	75,592,41 9		Kota Balik papa n
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pake t	3.00	3.00	161,277, 000	3.00	161,277,0 00.00	3.00	161,277, 000	9.00	483,831,0 00		Kota Balik papa n
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pake t	1.00	1.00	34,000,0 00	1.00	34,000,00 0.00	1.00	34,000,0 00	1.00	102,000,0 00		Kota Balik papa n
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dok ume n	1.00	1.00	9,600,00 0	1.00	9,600,000. 00	1.00	9,600,00 0	1.00	28,800,00 0		Kota Balik papa n

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	21.00	21.00	704,114,000	21.00	704,114,000.00	21.00	804,114,000	21.00	2,212,342,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	1.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	1.00	15,000,000		Kota Balikpapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	572,000,000	100.00	512,000,000.00	100.00	932,000,000	100.00	2,016,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	8.00	8.00	40,000,000	8.00	400,000,000.00	8.00	400,000,000	8.00	840,000,000		Kota Balikpapan
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		-		-		-		-	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	21.00	21.00	420,000,000	21.00	-	21.00	420,000,000	21.00	840,000,000		Kota Balikpapan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33.00	33.00	112,000,000	33.00	112,000,000.00	33.00	112,000,000	33.00	336,000,000		Kota Balikpapan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit								-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000	100.00	6,000,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000	1.00	30,000,000		Kota Balikpapan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36.00	36.00	180,808,080	36.00	180,808,080.00	36.00	180,808,080	36.00	542,424,240		Kota Balikpapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	1,809,191,920	12.00	1,809,191,920.00	12.00	1,809,191,920	12.00	5,427,575,760		Kota Balikpapan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	1,374,922,027	100.00	1,434,922,027.00	100.00	1,386,654,000	100.00	4,196,498,054		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	22.00	22.00	158,902,000	22.00	158,902,000.00	22.00	158,902,000	22.00	476,706,000		Kota Balikpapan

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	17.00	17.00	607,400,027	17.00	627,400,027.00	17.00	629,132,000	51.00	1,863,932,054	Kota Balikpapan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20.00	20.00	85,120,000	20.00	85,120,000.00	20.00	85,120,000	20.00	255,360,000	Kota Balikpapan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5.00	5.00	518,500,000	5.00	558,500,000.00	5.00	508,500,000	5.00	1,585,500,000	Kota Balikpapan
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	1.00	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000	Kota Balikpapan
	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II					8,979,242,500		8,194,022,500.00		8,488,460,000		25,661,725,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	5,395,092,409	74.60	4,489,772,100.00	77.00	4,226,993,255	77.00	14,111,857,764	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	3,584,150,091	100.00	3,704,250,400.00	100.00	4,261,466,745	100.00	11,549,867,236	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi	%	100.00	100.00	419,200,000	100.00	419,200,000.00	100.00	419,200,000	100.00	1,257,600,000	

	Keuangan Tepat Waktu												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	1.00	343,200,000	1.00	343,200,000.00	1.00	343,200,000	3.00	1,029,600,000		Kota Samarinda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1.00	18,000,000	1.00	18,000,000.00	1.00	18,000,000	3.00	54,000,000		Kota Samarinda
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1.00	10,000,000	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	30,000,000		Kota Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12.00	36,000,000	12.00	36,000,000.00	12.00	36,000,000	36.00	108,000,000		Kota Samarinda
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		12.00	12,000,000	12.00	12,000,000.00	12.00	12,000,000	36.00	36,000,000		Kota Samarinda
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	80,000,000	100.00	80,000,000.00	100.00	80,000,000	100.00	240,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		12.00	12,000,000	12.00	12,000,000.00	12.00	12,000,000	36.00	36,000,000		Kota Samarinda

Milik Daerah SKPD													
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		12.00	50,000,000	12.00	50,000,000.00	12.00	50,000,000	36.00	150,000,000		Kota Samarinda
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		12.00	18,000,000	12.00	18,000,000.00	12.00	18,000,000	36.00	54,000,000		Kota Samarinda
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	100.00	904,900,000	100.00	615,000,000.00	100.00	904,900,000	100.00	2,424,800,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3.00	261.00	234,900,000			261.00	234,900,000	522.00	469,800,000		Kota Samarinda
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40.00	36.00	350,000,000	30.00	295,000,000.00	36.00	350,000,000	102.00	995,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12.00	20,000,000	12.00	20,000,000.00	12.00	20,000,000	36.00	60,000,000		Kota Samarinda
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12.00	50,000,000	12.00	50,000,000.00	12.00	50,000,000	36.00	150,000,000		Kota Samarinda

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		36.00	250,000,000	30.00	250,000,000.00	36.00	250,000,000	102.00	750,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100.00	100.00	884,466,745	100.00	962,270,000.00	100.00	1,183,966,745	100.00	3,030,703,490		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00	12,500,000	1.00	12,500,000.00	1.00	12,500,000	3.00	37,500,000		Kota Samarinda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	4.00	250,500,000	2.00	125,400,000.00	4.00	300,000,000	10.00	675,900,000		Kota Samarinda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4.00	3.00	92,850,000	3.00	92,850,000.00	3.00	92,850,000	9.00	278,550,000		Kota Samarinda
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2.00	2.00	37,096,745	2.00	40,000,000.00	2.00	37,096,745	6.00	114,193,490		Kota Samarinda
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72.00	72.00	11,520,000	72.00	11,520,000.00	72.00	11,520,000	216.00	34,560,000		Kota Samarinda

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	12.00	450,000,000	12.00	650,000,000.00	12.00	700,000,000	36.00	1,800,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	15,000,000	3.00	45,000,000		Kota Samarinda
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	15,000,000	3.00	45,000,000		Kota Samarinda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	985,220,000	100.00	1,692,610,000.00	100.00	492,610,000	100.00	3,170,440,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	8.00	2.00	985,220,000	1.00	492,610,000.00	1.00	492,610,000	4.00	1,970,440,000		Kota Samarinda
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	14.00			1.00	1,200,000,000.00			1.00	1,200,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.00	2,699,683,346	100.00	2,741,980,400.00	100.00	3,077,500,000	100.00	8,519,163,746		

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	12.00	12,000,000	12.00	12,000,000.00	12.00	12,000,000	36.00	36,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	268,202,946	12.00	310,500,000.00	12.00	315,500,000	36.00	894,202,946		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	2,419,480,400	12.00	2,419,480,400.00	12.00	2,750,000,000	36.00	7,588,960,800		Kota Samarinda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	3,005,772,409	100.00	1,682,962,100.00	100.00	2,330,283,255	100.00	7,019,017,764		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	34.00	32.00	450,000,000	30.00	350,000,000.00	32.00	450,000,000	94.00	1,250,000,000		Kota Samarinda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit	23.00	38.00	1,056,172,500	38.00	660,462,100.00	39.00	1,207,783,255	115.00	2,924,417,855		Kota Samarinda
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	129.00	34.00	49,599,909	34.00	42,500,000.00	34.00	42,500,000	102.00	134,599,909		Kota Samarinda

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3.00	15.00	1,435,000,000	4.00	615,000,000.00	4.00	615,000,000	4.00	2,665,000,000		Kota Samarinda
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit		15.00	15,000,000	15.00	15,000,000.00	15.00	15,000,000	15.00	45,000,000		Kota Samarinda
	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III					6,795,000,000		6,795,000,000.00		6,503,000,000		20,093,000,000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	2,278,213,392	74.60	2,278,213,392.00	77.00	2,202,103,392	77.00	6,758,530,176		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	4,516,786,608	100.00	4,516,786,608.00	100.00	4,300,896,608	100.00	13,334,469,824		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100	473,340,000	100	473,340,000.00	100	415,840,000	100	1,362,520,000		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Bulan	1.00	383,340,000	1.00	383,340,000.00	1.00	375,840,000	3.00	1,142,520,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	60,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	Dokumen	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	60,000,000		Kab. Kutim &

Tanggapan Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan												Kab. Berau
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	60,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	40,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	32,500,000	100.00	32,500,000.00	100.00	25,000,000	100.00	90,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1.00	12,500,000	1.00	12,500,000.00	1.00	10,000,000	3.00	35,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000.00	1.00	10,000,000	3.00	40,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan	%		100.00	222,887,000	100.00	222,887,000.00	100.00	211,777,000	100.00	657,551,000		

	Administrasi Kepegawaian												
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pake t	264 Stel	2.00	140,112,000	2.00	140,112,000.00	2.00	140,112,000	6.00	420,336,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Oran g	16 Orang	10.00	45,000,000	10.00	45,000,000.00	10.00	45,000,000	30.00	135,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok ume n	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok ume n	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	oran g	-	5.00	27,775,000	5.00	27,775,000.00	3.00	16,665,000	13.00	72,215,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan	%	100.00	100.00	983,536,008	100.00	983,536,008.00	100.00	767,646,008	100.00	2,734,718,024		

	Administrasi Umum												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Bulan	3.00	34,680,500	3.00	34,680,500.00	3.00	34,680,500	9.00	104,041,500		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Unit	1.00	49,742,200	1.00	49,742,200.00	1.00	49,742,200	3.00	149,226,600		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 Bulan	4.00	61,392,500	4.00	61,392,500.00	4.00	61,392,500	12.00	184,177,500		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Bulan	2.00	52,515,808	2.00	52,515,808.00	2.00	52,515,808	6.00	157,547,424		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Bulan	2.00	57,008,000	2.00	57,008,000.00	2.00	57,008,000	6.00	171,024,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Bulan	1.00	47,000	1.00	47,000.00	1.00	47,000	3.00	141,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Bulan	12.00	708,950,000	12.00	708,950,000.00	12.00	493,060,000	36.00	1,910,960,000		Dalam dan Luar Wilayah

													Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1.00	14,200,000	1.00	14,200,000.00	1.00	14,200,000	3.00	42,600,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000	3.00	15,000,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	40,200,000	100.00	40,200,000.00	100.00	40,200,000	100.00	120,600,000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	2.00	40,200,000	2.00	40,200,000.00	2.00	40,200,000	6.00	120,600,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	3,533,250,600	100.00	3,533,250,600.00	100.00	3,533,250,600	100.00	10,599,751,800		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Bulan	12.00	21,169,200	12.00	21,169,200.00	12.00	21,169,200	36.00	63,507,600		Kab. Kutim &

													Kab. Berau
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Bulan	12.00	226,689,000	12.00	226,689,000.00	12.00	226,689,000	36.00	680,067,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Unit	1.00	1,385,200	1.00	1,385,200.00	1.00	1,385,200	3.00	4,155,600		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	65 Orang	12.00	3,284,007,200	12.00	3,284,007,200.00	12.00	3,284,007,200	36.00	9,852,021,600		Kab. Kutim & Kab. Berau
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	1,509,286,392	100.00	1,509,286,392.00	100.00	1,509,286,392	100.00	4,527,859,176		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48 Unit	47.00	100,300,000	47.00	100,300,000.00	47.00	100,300,000	141.00	300,900,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	26 Unit	26.00	802,947,300	26.00	802,947,300.00	26.00	802,947,300	78.00	2,408,841,900		Kab. Kutim & Kab. Berau

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12 Bulan	65.00	64,475,100	65.00	64,475,100.00	65.00	64,475,100	195.00	193,425,300		Kab. Kutim & Kab. Berau
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	24.00	499,299,000	24.00	499,299,000.00	24.00	499,299,000	72.00	1,497,897,000		Kab. Kutim & Kab. Berau
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6.00	42,264,992	6.00	42,264,992.00	6.00	42,264,992	18.00	126,794,976		Kab. Kutim & Kab. Berau
	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI					5,618,696,200		5,618,696,200.00		5,618,696,200		16,856,088,600		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	68.46	72.20	1,678,696,200	74.60	1,678,696,200.00	77.00	1,678,696,200	77.00	5,036,088,600		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	3,940,000,000	100.00	3,940,000,000.00	100.00	3,940,000,000	100.00	11,820,000,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100.00	100.00	220,840,000	100.00	220,840,000.00	100.00	220,840,000	100.00	662,520,000		Samarinda, Kalimantan Timur
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	1.00	1.00	120,840,000	1.00	120,840,000.00	1.00	120,840,000	3.00	362,520,000		Samarinda, Kalimantan

	Pelaksanaan Tugas ASN												Timur
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12.00	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000.00	1.00	30,000,000	3.00	90,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1.00	20,000,000	1.00	20,000,000.00		20,000,000	2.00	60,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100.00	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000.00	100.00	65,000,000	100.00	195,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.00	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan

													Timu r
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok ume n	1.00	1.00	20,000,0 00	1.00	20,000,00 0.00	1.00	20,000,0 00	3.00	60,000,00 0		Sama rinda, Kalim antan Timu r
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok ume n	1.00	1.00	20,000,0 00	1.00	20,000,00 0.00	1.00	20,000,0 00	3.00	60,000,00 0		Sama rinda, Kalim antan Timu r
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100.00	100. 00	317,856, 200	100. 00	317,856,2 00.00	100. 00	317,856, 200	100. 00	953,568,6 00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pake t	4.00	4.00	227,856, 200	4.00	227,856,2 00.00	4.00	227,856, 200	12.0 0	683,568,6 00		Sama rinda, Kalim antan Timu r
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok ume n	1.00	1.00	25,000,0 00	1.00	25,000,00 0.00	1.00	25,000,0 00	3.00	75,000,00 0		Sama rinda, Kalim antan Timu r
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok ume n	1.00	1.00	25,000,0 00	1.00	25,000,00 0.00	1.00	25,000,0 00	3.00	75,000,00 0		Sama rinda, Kalim antan Timu r
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	oran g		5.00	40,000,0 00	5.00	40,000,00 0.00	5.00	40,000,0 00	15.0 0	120,000,0 00		Dala m dan Luar

	Pendidikan dan Pelatihan												Wilayah Kalimantan Timur
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100.00	100.00	1,715,000,000	100.00	1,715,000,000.00	100.00	1,715,000,000	100.00	5,145,000,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10.00	3.00	40,000,000	3.00	40,000,000.00	3.00	40,000,000	9.00	120,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12.00	4.00	130,000,000	4.00	130,000,000.00	4.00	130,000,000	12.00	390,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	12.00	1,100,000,000	12.00	1,100,000,000.00	12.00	1,100,000,000	36.00	3,300,000,000		Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Timur
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	27.00	6.00	200,000,000	6.00	200,000,000.00	6.00	200,000,000	18.00	600,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	98.00	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000	6.00	150,000,000		Samarinda, Kalimantan

	Kantor yang Disediakan												antan Timur
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	3.00	100,000,000	3.00	100,000,000.00	3.00	100,000,000	9.00	300,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4.00	2.00	50,000,000	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000	6.00	150,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1.00	20,000,000	1.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000	3.00	60,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1.00	25,000,000	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000	3.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000.00	100.00	600,000,000	100.00	1,800,000,000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1.00	2.00	100,000,000	2.00	100,000,000.00	2.00	100,000,000	6.00	300,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	71.00	50.00	500,000,000	50.00	500,000,000.00	50.00	500,000,000	150.00	1,500,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,225,000,000	100.00	2,225,000,000.00	100.00	2,225,000,000	100.00	6,675,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	12.00	25,000,000	12.00	25,000,000.00	12.00	25,000,000	36.00	75,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	300,000,000	12.00	300,000,000.00	12.00	300,000,000	36.00	900,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	12.00	1,900,000,000	12.00	1,900,000,000.00	12.00	1,900,000,000	36.00	5,700,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100.00	100.00	475,000,000	100.00	475,000,000.00	100.00	475,000,000	100.00	1,425,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9.00	10.00	225,000,000	10.00	225,000,000.00	10.00	225,000,000	30.00	675,000,000		Samarinda, Kalimantan Timur

	Operasional atau Lapangan												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88.00	88.00	100,000,000	88.00	100,000,000.00	88.00	100,000,000	264.00	300,000,000	Samarinda, Kalimantan Timur
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.00	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000.00	1.00	150,000,000	3.00	450,000,000	Samarinda, Kalimantan Timur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab ini memuat rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tahun tahun 2024-2026. Rencana kinerja ditunjukkan dengan alat ukur atau indikator kinerja urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Penyajian indikator kinerja dinas terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sedangkan IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Baik IKU maupun IKK menjadi tolok ukur dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ditujukan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) memuat indikator tujuan dan sasaran Renstra PD sebagaimana dimuat pada Bab IV. Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang merupakan IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimuat pada Tabel 7.1.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas	Indeks	6,10	6,74	7,19	8,04	8,89	8,89
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	0,40	1,56	3,41	4,98	6,85	6,85
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas	Indeks	6,16	6,88	7,42	8,08	8,85	8,85
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung	Indeks	0,20	1,21	3,59	5,04	6,72	6,72
5	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kawasan Provinsi	Persen	55,02	56,84	53,03	76,87	100	100
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan Rakyat Pendukung	Indeks	1,45	2,26	3,00	4,93	7,37	7,37
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Poin	84,41	84,60	85	85,50	86	86
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	60,05	62,00	65,00	67,00	71,00	71,00
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82,09	82,09	82,20	82,44	82,70	82,70

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Indikator Kinerja Kunci (IKK) memuat indikator penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. IKK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat merupakan indikator kinerja kunci tingkat Outcome sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyajian seluruh IKK beserta target indikator mulai tahun 2024 sampai dengan 2026 menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPD Provinsi Kalimantan Timur, disajikan pada Tabel 7.2 di bawah.

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	47,66	58,95	70,78	82,6	94,43	94,43
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	Persen	15,08	55,29	65,29	77,06	97,65	97,65
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	57,86	61,10	61,22	62,97	64,91	64,91
4	Rasio kemantapan jalan	Persen	77,52	79,05	82,09	86,23	93,53	93,53
5	Rasio tenaga kerja konsrtuksi yang telatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	52,62	55,16	57,64	60,13	62,62	62,62
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Persen	55,02	56,84	53,03	76,87	100	100

Sumber: hasil proyeksi, 2023

7.2. Cascading Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading memberi gambaran hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Proses penyusunan *cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

Dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 menyusun rencana kinerja secara *cascading* atau berjenjang. Penjenjangan kinerja ini membentuk arsitektur kinerja mulai dari tingkat tertinggi sampai ke yang rendah yakni dari tingkat dampak (*impact*) atau dapat juga disebut *intermediate outcome* untuk tujuan dan sasaran Renstra PD, diturunkan ke kinerja hasil (*outcome*) atau *intermediate outcome* untuk program, lalu diturunkan ke kinerja hasil yang segera (*outcome*) atau *immediate outcome* untuk kegiatan, dan terakhir diturunkan ke kinerja keluaran (*output*) untuk sub kegiatan.

Gambaran penjenjangan kinerja dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ke Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel 7.3 bawah ini, yang menyajikan penjenjangan kinerja mulai dari tingkat yang paling atas yaitu tujuan dan sasaran Renstra sampai ke kinerja output untuk sub kegiatan.

Sub Kegiatan			Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		0,4 Indeks	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		6,1 Indeks	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SASARAN] Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendukung		0,20 Indeks	3,59 Indeks		5,04 Indeks		6,72 Indeks		6,72 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prioritas		6,16 Indeks	7,42 Indeks		8,08 Indeks		8,85 Indeks		8,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani		7.82%	11.15%		12.76%		14.89%		14.89%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi (SDA)	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik		2723.70 meter	1640 meter		710 meter		944 meter		944 meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		1 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	41,000,000 ,000	5 Sistem Drainase Perkotaan	24,816,347,600	5 Sistem Drainase Perkotaan	33,000,000,000	16 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		1 Dokumen	6 Dokumen	2,650,000,000	5 Dokumen	2,750,000,000	5 Dokumen	2,750,000,000	16 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD 3)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		2 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan	6,000,000,000	9 Sistem Drainase Perkotaan	6,000,000,000	9 Sistem Drainase Perkotaan	6,000,000,000	9 Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani		11.56%	59.77%		83.58%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		6 unit	15 unit		9 unit		6 unit		30 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		50 orang	50 orang	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	150	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola		0	5 Rumah Negara	274,999,628	5	200,000,000	5	200,000,000	15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)		0	25 Bangunan Gedung Negara	274,999,628	25	200,000,000	25	200,000,000	75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 52 Usulan Aspirasi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DiUbahsuaikan		6	16 Bangunan Gedung	785,470,761,876	9	736,249,012,060	5	450,218,596,320	30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang		1	2 Lisensi	400,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara		0	2 Kab/Kota	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		6	19 Dokumen	22,500,000,000		16,200,000,000	5	9,100,000,000	34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif								1,000,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi			1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

											Perumahan Rakyat
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat		55.16%	57.64%		60.13%		62.62%		62.62%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat		426 orang	1500 orang		1500 orang		1500 orang		4500 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang)		48	96	1,280,000,000	120	1,600,000,000	120	1,600,000,000	336	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)		1	1	100,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang)		426	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000	4500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		3	8	1,200,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

											Perumahan Rakyat
Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen)		1	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang)		426	1500	5,700,000,000	1500	6,000,000,000	1500	6,000,000,000	4500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang)		426	1500	150,000,000	1500	200,000,000	1500	200,000,000	4500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)		6	10	150,000,000	10	200,000,000	10	205,000,000	30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan		1 Layanan	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		3 Layanan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)		1	1	100,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

											Perumahan Rakyat
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)		1	1	250,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen)		1	1	200,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		30	60	200,000,000	60	200,000,000	60	200,000,000	180	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah NSPK yang diterapkan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi		2 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		9 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)		53	130	1,000,000,000	150	1,300,000,000	175	1,300,000,000	455	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)		24	20	500,000,000	20	650,000,000	20	650,000,000	60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)		11	11	2,300,000,000	11	3,390,000,000	11	3,400,000,000	33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		53	100	750,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen)		1	1	1,520,000,000	1	1,653,000,000	1	1,650,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi		23.09%	45.21%		71.11%		99.40%		99.40%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah NSPK yang diterapkan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi		2 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		9 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (UPTD LBK)	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk			3 Bangunan Konstruksi	475,296,800	3 Bangunan Konstruksi	675,296,800	3 Bangunan Konstruksi	675,296,800	3 Bangunan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang		78,57 %	83,20 %		83,90 %		84,94 %		84,94 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		12.51%	13.24%		13.35%		13.52%		13.52%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		0	1	1,800,000,000	3	3,100,000,000	3	4,000,000,000	7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi		150	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		26.11%	27.65%		27.88%		28.22%		28.22%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi		1	0	-	1	1,000,000, 000	2	3,000,00 0,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar		1	0	-	0	-	1	1,500,00 0,000	1 Peta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota		2	4	500,000,00 0	3	500,000,0 00	3	500,000, 000	10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota		1	1	500,000,00 0	1	500,000,0 00	1	500,000, 000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		0	1	500,000,00 0	1	500,000,0 00	1	500,000, 000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		0	25	350,000,000	25	350,000,000	25	350,000,000	75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		25.02%	26.50%		26.73%		27.06%		27.06%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0	6	600,000,000	6	600,000,000	6	600,000,000	18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		0	6	350,000,000	6	350,000,000	6	350,000,000	18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Penataan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1	2	1,900,000,000	2	1,500,000,000	3	1,800,000,000	7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		1	5	1,250,000,000	4	1,100,000,000	4	1,150,000,000	13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		14.93%	15.81%		15.94%		16.14%		16.14%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi Pelaksaaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1	1	1,400,000,000	1	400,000,000	1	1,400,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang		0	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		0	0	-	1	800,000,000	0	-	1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang		0	1	800,000,000	1	750,000,000	1	800,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		0	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi		8940 Ha	9460 Ha		9730 Ha		10030 Ha		10030 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang pantai kritis yang ditangani		0,45 Km	2,80 Km		0,33 Km		0,63 Km		4,71 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih		239 liter/detik	94 liter/detik		60 liter/detik		50 liter/detik		443 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan		87,4 Ha	70 Ha		140 Ha		210 Ha		210 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani		0 Unit	6 Unit		3 Unit		1 Unit		10 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang segmen sungai yang ditangani		5158 meter	5480 meter		4801.86 meter		7669.29 meter		17951.15 meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Pantai Kritis yang ditangani		1 Lokasi	7 Lokasi		6 Lokasi		6 Lokasi		19 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		0.5 KM	0.5 KM	500,000,000	0.5 KM	500,000,000	0.5 KM	500,000,000	0.5 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi		2 KM	1.25 KM	1,000,000,000	1.25 KM	1,500,000,000	1.25 KM	1,500,000,000	1.25 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SUB KEGIATAN] 1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	500,000,000	3 Unit	500,000,000	3 Unit	500,000,000	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (UPTD 2)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				500,000,000		500,000,000		500,000,000		
1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		7 Dokumen	15 Dokumen	28,800,000,000	3 Dokumen	6,400,000,000	1 Dokumen	5,000,000,000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		14 Dokumen	14 Dokumen	6,824,500,000	10 Dokumen	4,750,000,000	3 Dokumen	2,250,000,000	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	5,000,000,000	3 Unit	20,550,000,000	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		0 Titik	5 Titik	20,550,000,000	3 Titik	6,600,000,000	0 Titik	-	0 Titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun		0 Unit	1 Unit	28,550,000,000	1 Unit	36,000,000,000	1 Unit	14,550,000,000	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0086 Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun		0 KM	0.2 KM	6,550,000,000	0 KM	-	0 KM	-	0 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0.45 KM	2.68 KM	82,100,000,000	0.34 KM	22,250,000,000	0.63 KM	32,943,992,882	0.63 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		5.16 KM	5.48 KM	42,800,000 ,000	4.8 KM	25,000,00 0,000	7.67 KM	41,123,0 18,385	7.67 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	1 Dokumen	758,995,00 0	1 Dokumen	758,995,0 00	1 Dokumen	758,995, 000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		10 Lembaga	6 Lembaga	6,855,736, 980	6 Lembaga	2,097,411, 700	6 Lembaga	2,097,41 1,700	6 Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		3 Dokumen	1 Dokumen	349,956,00 0	1 Dokumen	349,956,0 00	1 Dokumen	349,956, 000	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		1 Lembaga	1 Lembaga	277,289,70 0	1 Lembaga	277,289,7 00	1 Lembaga	277,289, 700	1 Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik		2014 meter	1940 meter		3838.46 meter		5387.17 meter		11165.63 meter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		32 KM	32 KM	5,000,000,000	32 KM	5,000,000,000	32 KM	5,000,000,000	32 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		3 Dokumen	8 Dokumen	4,400,000,000	7 Dokumen	2,300,000,000	2 Dokumen	1,400,000,000	2 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		59.31 KM	59.08 KM	96,350,000,000	59.76 KM	39,400,000,000	60.21 KM	43,700,000,000	60.21 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi		0 KM	0.16 KM	4,400,000,000	1.38 KM	6,200,000,000	2.48 KM	10,200,000,000	2.48 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota		39.15 %	57.65 %		83.40 %		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani		2 Unit	3 Unit		5 Unit		3 Unit		13 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	800,000,000	10 Kabupaten/Kota	800,000,000	10 Kabupaten/Kota	800,000,000	10 Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0021 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		3 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	450,000,000	5 Kabupaten/Kota	450,000,000	5 Kabupaten/Kota	450,000,000	5 Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		0 Liter/Detik	70 Liter/Detik	156,030,000,000	70 Liter/Detik	186,851,696,848	85 Liter/Detik	202,794,621,588	225 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		2 Dokumen	7 Dokumen	8,220,000,000	4 Dokumen	5,550,000,000	5 Dokumen	7,100,000,000	18 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik		10.00 %	17.50 %		25.00 %		40.00 %		40.00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		25 Orang	25 Orang	550,000,000	25 Orang	500,000,000	25 Orang	500,000,000	100 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	1 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	1,000,000,000	5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota		17.50 %	32.50 %		42.00 %		46.00 %		46.00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional		1 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05.1.01.0016 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		2 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	-	2 kabupaten/kota	650,000,000	2 kabupaten/kota	7,882,011,690	2 kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		25 Orang	25 Orang	1,250,000,000	25 Orang	750,000,000	25 Orang	500,000,000	100 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		1 Dokumen	3 Dokumen	2,250,000,000	2 Dokumen	2,100,000,000	1 Dokumen	500,000,000	7 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi		0%	50%		75%		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur		0 kawasan	4 kawasan		2 kawasan		2 kawasan		8 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.07.1.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi		0 Unit	4 Unit	30,000,000,000	2 Unit	40,000,000,000	2 Unit	40,000,000,000	8 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jumlah Kawasan yang Ditata		16.67 %	50%		66.67 %		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		2 kawasan	3 kawasan		1 kawasan		2 kawasan		8 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan		10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	200,000,000	10 kabupaten/kota	200,000,000	10 kabupaten/kota	200,000,000	10 kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		2 Kawasan	3 Kawasan	30,700,000,000	1 Kawasan	13,000,000,000	2 Kawasan	20,000,000,000	8 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		2 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000,000	2 Dokumen	3,800,000,000	3 Dokumen	4,300,000,000	11 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		0 Dokumen	2 Dokumen	1,600,000,000	2 Dokumen	3,000,000,000	1 Dokumen	500,000,000	5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru		0 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan		2 Ruas Jalan		4 Ruas Jalan		4 Ruas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi		77.52%	82.09%		86.23%		93.53%		93.53%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap		693,86 Km	754,55 Km		792,61 Km		859,71 Km		859,71 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan Baru Yang Terbangun		13,95 Km	26 Km		43,50 Km		67,80 Km		67,80 Km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		91 KM	67 KM	69,021,502 ,519	69 KM	117,851,4 32,000	74,20 KM	131,643, 432,000	74,20 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		10 KM	11,30 KM	46,714,228 ,981	11,30 KM	62,122,12 2,900	11,80 KM	57,725,9 35,000	11,80 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		50 Jembatan	56 Jembatan	13,660,700,500	56 Jembatan	10,877,877,100	56 Jembatan	20,070,065,000	56 Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		33 Dokumen	25 Dokumen	22,600,000,000	30 Dokumen	25,600,000,000	30 Dokumen	25,600,000,000	85 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		0 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		895,09 KM	895,09 KM	2,900,000,000	895,09 KM	2,900,000,000	895,09 KM	2,900,000,000	895,09 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		13,95 KM	14,50 KM	248,500,000,000	17,50 KM	528,500,000,000	24,30 KM	1,144,500,000,000	56,30 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		0 KM	6 KM	45,000,000,000	8 KM	60,000,000,000	8 KM	60,000,000,000	22 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		48 KM	57,40 KM	740,477,261,683	112 KM	1,443,430,917,267	126 KM	1,619,818,729,410	295,40 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		2 Jembatan	6 Jembatan	68,900,000,000	6 Jembatan	186,000,000,000	6 Jembatan	80,500,000,000	18 Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi		895,09 KM	895,09 KM	40,000,000,000	895,09 KM	50,000,000,000	895,09 KM	50,000,000,000	895,09 KM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		0,4 Indeks	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		6,10 Indeks	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

[SASARAN] Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung		1,45 Indeks	2,26 Indeks		3,00 Indeks		4,93 Indeks		7,37 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		55.02%	56.84%		53.03%		76.87%		76.87%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan		25%	33.32 %		47.89 %		62.46 %		62.46 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		0 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000	2 Dokumen	2,000,000,000	6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	-	100 Unit		100 Unit		200 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	100 Unit Rumah	23,900,876,170	100 Unit Rumah	27,900,876,170	200 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		0 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		0 Laporan	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	1 Laporan	99,123,830	3 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		11.46 Ha	108.01 Ha		156.59 Ha		203.75 Ha		203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		12 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		0 Laporan	4 Laporan	1,761,706,400	4 Laporan	1,855,508,000	4 Laporan	1,761,706,400	12 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani		11.46 Hektar	96.55 Hektar		48.58 Hektar		47.16 Hektar		203.75 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		11.46 Ha	96.55 Ha	146,765,937,600	48.58 Ha	94,068,092,000	47.16 Ha	140,238,293,600	203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		0 Laporan	5 Laporan	2,171,200,000	1 Laporan	426,400,000	0 Laporan	-	6 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman		17.06 %	22.40 %		52.57 %		100%		100%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman		0 Lokasi	10 Lokasi		6 Lokasi		7 Lokasi		23 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05.1.01.0006 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan		0 Lokasi	10 Lokasi	48,562,490,000	6 Lokasi	40,000,000,000	7 Lokasi	40,000,000,000	23 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		0 Dokumen	8 Dokumen	2,437,510,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	8 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Mendukung Pengembangan Wilayah dan Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		0,4 Indeks	3,41 Indeks		4,98 Indeks		6,85 Indeks		6,85 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		6,10 Indeks	7,19 Indeks		8,04 Indeks		8,89 Indeks		8,89 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SASARAN] Meningkatnya kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Permukiman Pendukung		1,45 Indeks	2,26 Indeks		3,00 Indeks		4,93 Indeks		4,93 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		55.02%	56.84%		53.03%		76.87%		76.87%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		11.46 Ha	108.01 Ha		156.59 Ha		203.75 Ha		203.75 Ha	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani		11.46 Hektar	96.55 Hektar		48.58 Hektar		47.16 Hektar		203.75 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		0 Unit Rumah	1000 Unit Rumah	29,301,156 ,000	1000 Unit Rumah	20,000,00 0,000	1000 Unit Rumah	20,000,0 00,000	3000 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[URUSAN] NON URUSAN											Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[TUJUAN] Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah		84,60 Poin	85,00 Poin		85,50 Poin		86,00 Poin		86,00 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		78,25 Poin	78,50 Poin		79,30 Poin		80,01 Poin		80,01 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[SASARAN] Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		82,09 Poin	82,20 Poin		82,44 Poin		82,70 Poin		82,70 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		60,05 Poin	65,00 Poin		67,00 Poin		71,00 Poin		71,00 Poin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		70,80 Indeks	72,20 Indeks		74,60 Indeks		77,00 Indeks		77,00 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu (%)		82.00%	83.00%		84.00%		85.00%		85.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	2 Dokumen	500,000,00 0	2 Dokumen	550,000,0 00	2 Dokumen	550,000, 000	6 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	4 Dokumen	200,000,00 0	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000, 000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	4 Dokumen	200,000,00 0	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000, 000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	4 Dokumen	200,000,00 0	4 Dokumen	200,000,0 00	4 Dokumen	200,000, 000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	20 Dokumen	500,000,00 0	20 Dokumen	500,000,0 00	20 Dokumen	500,000, 000	60 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4452 orang	52,474,605,845	4452 orang	51,737,545,245	4452 orang	51,737,545,245	13356 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32 Dokumen	21 Dokumen	3,148,548,000	21 Dokumen	3,148,548,000	21 Dokumen	3,141,048,000	63 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	4 Dokumen	168,000,000	4 Dokumen	168,000,000	4 Dokumen	153,000,000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	145,000,000	12 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan	16 Laporan	196,000,000	16 Laporan	196,000,000	16 Laporan	181,000,000	48 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	15 Dokumen	147,000,000	15 Dokumen	147,000,000	14 Dokumen	142,000,000	44 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			16 Dokumen	154,500,000	16 Dokumen	154,500,000	16 Dokumen	152,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			16 Dokumen	195,000,000	16 Dokumen	195,000,000	16 Dokumen	190,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			16 Dokumen	148,000,000	16 Dokumen	148,000,000	16 Dokumen	148,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		274 Paket	47 Paket	1,475,845,700	42 Paket	1,240,945,700	46 Paket	1,425,845,700	135 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		76 orang	56 orang	533,000,000	50 orang	478,000,000	56 orang	523,000,000	162 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		200 orang	200 orang	300,000,000	100 orang	150,000,000	100 orang	150,000,000	400 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	16 Dokumen	155,000,000	16 Dokumen	155,000,000	16 Dokumen	155,000,000	48 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	15 Dokumen	180,000,000	15 Dokumen	180,000,000	15 Dokumen	180,000,000	45 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	111 orang	706,775,000	111 orang	706,775,000	84 orang	633,933,027	306 orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		19 Paket	12 Paket	222,377,973	12 Paket	222,377,973	12 Paket	222,377,973	34 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		52 Paket	21 Paket	1,040,242,200	18 Paket	715,142,200	20 Paket	889,742,200	59 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	130,000,000	4 Paket	130,000,000	4 Paket	130,000,000	12 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		40 Paket	14 Paket	538,318,131	14 Paket	511,392,500	14 Paket	511,392,500	42 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		407 Paket	210 Paket	606,642,808	210 Paket	626,642,808	210 Paket	656,642,808	630 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Barang, Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		39 Paket	20 Paket	508,104,745	20 Paket	481,008,000	20 Paket	428,104,745	58 Paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		85 Dokumen	74 Dokumen	21,167,000	74 Dokumen	21,167,000	74 Dokumen	21,167,000	220 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		69 Laporan	69 Laporan	3,763,064,000	69 Laporan	3,963,064,000	69 Laporan	3,797,174,000	165 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	5 Dokumen	554,200,000	5 Dokumen	104,200,000	5 Dokumen	104,200,000	13 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	13 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	6 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		28 unit	11 unit	1,525,220,000	10 unit	1,392,610,000	10 unit	1,392,610,000	15 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		14 unit	0	-	1 unit	1,200,000,000	0	-	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		21 unit	21 unit	420,000,000	21 unit	-	21 unit	420,000,000	21 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		110 unit	88 unit	752,200,000	90 unit	852,200,000	88 unit	752,200,000	200 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		49 Laporan	49 Laporan	168,169,200	49 Laporan	168,169,200	49 Laporan	168,169,200	145 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		84 Laporan	84 Laporan	3,860,906,321	84 Laporan	3,436,434,155	84 Laporan	3,184,190,155	180 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	1 Laporan	1,385,200	1 Laporan	1,385,200	1 Laporan	1,385,200	3 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		113 Laporan	60 Laporan	27,938,215,925	60 Laporan	27,580,912,525	60 Laporan	27,911,432,125	156 Laporan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik		100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		202 unit	141 unit	1,434,202,000	139 unit	1,334,202,000	141 unit	1,434,202,000	317 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		66 unit	81 unit	2,466,519,827	81 unit	2,090,809,427	82 unit	2,639,862,555	82 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		259 unit	211 unit	1,299,195,009	211 unit	1,292,095,100	211 unit	1,292,095,100	211 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 unit	36 unit	3,002,799,000	36 unit	2,222,799,000	36 unit	2,072,799,000	36 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	10 unit	2,688,359,000	10 unit	2,688,359,000	10 unit	2,500,000,000	10 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 unit	6 unit	42,264,992	6 unit	42,264,992	6 unit	42,264,992	6 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1 unit	17 unit	220,000,000	17 unit	120,000,000	17 unit	120,000,000	17 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan selama 3 (tiga) tahun serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas PUPRPR Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang adil dan merata.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas PUPRPR dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sangat perlu untuk mengedepankan aspek perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2024 sampai dengan 2026.
3. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Pelaksanaan Renstra akan didukung oleh berbagai pihak terkait baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Renstra ini diharapkan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

A.M Fitra Firnanda, ST. MM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renstra Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian sesuai dengan amanat Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen Perencanaan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur juga mengacu pada Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016.

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, RPJP Prov.Kaltim 2005-2025, RPD Prov. Kaltim 2024-2026, memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) RPD, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi.

Renstra merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah. Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), diamanatkan untuk menyusun Rencana Starategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tetap diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meningkatkan pelaksanaan trantibumlinmas sesuai dengan SPM selama 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

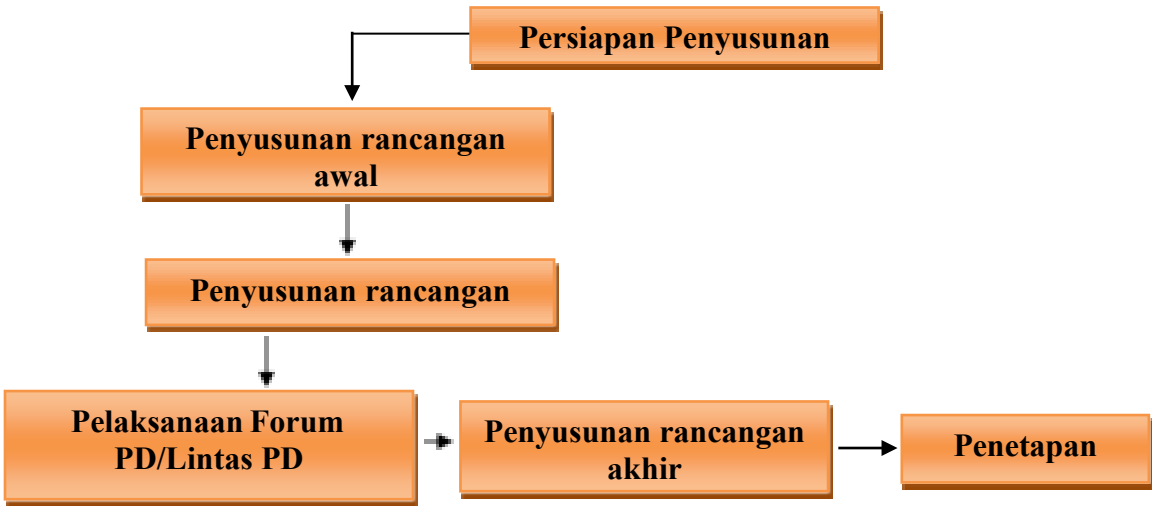
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada merealisasikan strategi pencapaian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, selain itu tuntutan untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan daerah (RPD) yang berlaku selama 3 (Tiga) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen- dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat digambarkan dalam Bagan Alur penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Timur

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Tahun 2024 -2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai tujuan dan sasaran RPD dan Renstra beserta indikatornya, kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur untuk 3 (tiga) tahun mendatang, searah dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 peraturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Secara Khusus Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur ini mempunyai tujuan :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu tiga tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan Indikator, target kinerja, perencanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tiga tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta; Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Memuat rumusan tentang : Tugas, Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah; Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja prov.Kaltim

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Penentuan Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tentang : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang : Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rumusan tentang : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan tentang : Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang menunjang RPD Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komperhensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

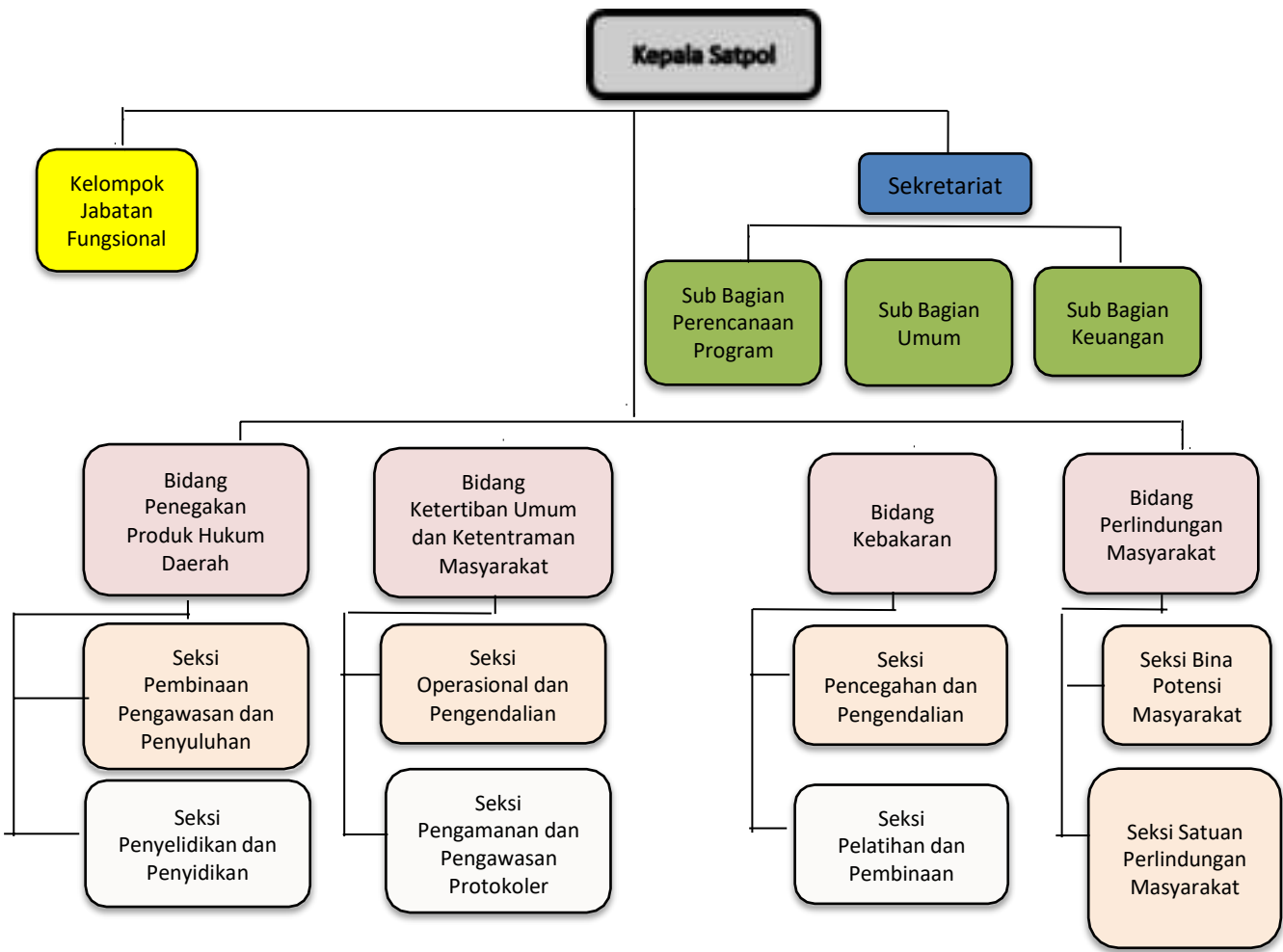
1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang penegakan produk hukum daerah;
4. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Kebakaran;

- 6. Perumusan, Perencanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang Perlindungan Masyarakat;
- 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Secara Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, seperti yang digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Gambar 2.1.3
Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural dan Pejabat Fungsional, selain Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didukung juga dengan sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi para pegawai di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki jumlah sebanyak 173 orang, dapat dilihat pada tabel 2.2.1.1 dan tabel 2.2.1.2 berikut :

Tabel 2.2.1.1
Data Pegawai Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan
Pangkat/Golongan, Gender, Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

NO	PANGKAT/GOL	ESELON			NON ESELON	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						JUMLAH
		II	III	IV		L	P	SD	SLTP	SLTA	D.3	S.1	S.2	
1	IV	1	5		1	7						1	6	7
2	III			2	26	26	2			6		22		28
3	II				35	35			1	33	1			35
4	I				1	1				1				1
5	TENAGA TEKNIS/NON TEKNIS				93	9			67	4	31			102
JUMLAH KESELURUHAN														173

Tabel 2.2.1.2
Data Pegawai ASN dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Timur
Lingkup Sekretariat dan Bidang Tahun 2022

NO	SEKRETARIAT DAN BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D.3		S.1		S.2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	KEPALA									1				1	0
2	SEKRETARIAT					9	1	1		6	1	1		17	2
3	BID. PPHD					3				6		1		10	0
4	BID. TIBUMTRANMAS			1		19				4		1		25	0
5	BID. LINMAS					5				3		1		9	0
6	BID. KEBAKARAN					3				2		2		7	0
SUB TOTAL														69	2

2.2.3 Sarana dan Prasarana Kerja

Guna mendukung pekerjaan sehari-hari tersedia saran dan prasarana kerjapendukung sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2.737	M ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 1.210 m ²
3	Halaman Apel	1	Area
4	Taman	100	m ²
5	Listrik	2	Jaringan
6	Air	1	Jaringan
7	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	2	Area
9	Ruang Rapat	1	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang
11	Sekretariat PPNS	1	Ruang
12	Sekretariat Tim PAK Jafung Pol.PP	1	Ruang
13	Ruang CS	1	Ruang
14	Komputer	36	Unit
15	Laptop	16	Unit
16	Bus	1	Unit
17	Truck Dalmas	1	Unit
18	Peralatan Dalmas	15	Set
19	Mobil Patwal	2	Unit
20	Mobil Patroli	3	Unit
21	Mobil Jabatan	4	Unit
22	Mobil Operasional	1	Unit
23	Mobil Dinas	2	Buah
24	Motor Patroli	4	Buah
25	Motor Dinas	12	Buah
26	Papan Pengumuman	1	Buah
27	Mushola	1	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi pada masing-masing bidang dan sekretariat sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Produk Hukum (PPHD)
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penegakan produk hukum daerah;
 2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama dibidang penegakan produk hukum daerah;
 3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
 4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengawasan aset milik pemerintah daerah sesuai produk hukum daerah;
 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penegakan produk hukum daerah.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian, pengamanan protokoler dan obyek vital;
 3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dan pengamanan obyek vital;
 4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasional pengendalian dan pengamanan obyek vital;
 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,
3. Bidang Kebakaran
 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan bencana kebakaran;
 2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perlindungan bencana kebakaran;
 3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran;
 4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan kebakaran;
 5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
2. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bina potensi masyarakat;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
5. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Sekretariat terdiri dari :

Secara umum mempunyai kinerja pelayanan :

1. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas
 - Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
 - Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang trantibum, PPHD, Kebakaran dan Linmas;
 - Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung SPM trantibumlinmas;
 - Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi SPM Trantibumlinmas.
2. Subbagian Umum mempunyai tugas
 - Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
 - Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
 - Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait.

3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja prov.Kaltim Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran, Program& Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit KerjaPD Penanggung jawab	Lokasi
										2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										realisasi	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan 1 Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																					
	Sasaran 1.1 Meningkatnya pelaksanaan trantibumlinmas sesuai dengan SPM																				
		1	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibumyang dapat diselesaikan	1.303.224.308	95%	100%	4.643.810.900	100%	4.568.811.200	100%	4.793.810.900	100%	4.793.810.900	Bid. Trantibum, PPHD, Linmas	Provinsi Kaltim, 10 Kab/Kota, Luar wilayah Prov. Kaltim
		1	05	02	1	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	896.730.809	1 Dokumen	4 Kasus	1.467.847.100	4 Kasus	1.517.847.100	4 Kasus	1.567.847.100	4 Kasus	1.567.847.100	Bid. Trantibum	
									Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			120 Orang	1.849.999.600	150 Orang	1.699.999.600	200 Orang	1.749.999.600	470 Orang	1.749.999.600	Bid. Linmas	

		1	05	02	1	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	418.343.691	4 Kasus	4 Kasus	1.048.778.000	4 Kasus	1.073.778.000	4 Kasus	1.098.778.000	4 Kasus	1.098.778.000		
		1	05	02	1	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.400.000	12 Laporan										
		1	05	02	1	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	114.555.314	1 Dokumen	2 Dok	377.050.900	2 Dok	402.050.900	2 Dok	427.050.900	2 Dok	427.050.900		
		1	05	02	1	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	JumlahDokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	179.926.804	1 DOkumen	2 Dok	997.594.000	2 Dok	822.594.000	2 Dok	822.594.000	2 Dok	822.594.000		
		1	05	02	1	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Dalam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja danSatuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	175.936.000	30 Orang	120 Orang	852.405.600	150 Orang	877.405.600	200 Orang	927.405.600	470 Orang	927.405.600		

								Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kapasitasnya										
		1	05	02	1	01	08	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	655.000	1 Dokumen								
		1	05	02	1	01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.914.000	2 Laporan	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200		
		1	05	02	1	02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan yang ditegakkan	252.911.000	1 Dokumen	4 Perda dan Perkada	1.045.888.150	5 Perda dan Perkada	1.070.888.450	6 Perda dan Perkada	1.195.888.150	15 Perda dan Perkada	1.195.888.150 Bid. PPHD
		1	05	02	1	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	94.303.900	2 Laporan	4 Lap	440.993.100	5 Lap	455.993.100	6 Lap	555.993.100	15 Lap	555.993.100
		1	05	02	1	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60.008.400	2 Laporan	4 Lap	239.984.500	5 Lap	247.484.500	6 Lap	267.484.200	15 Lap	267.484.200
		1	05	02	1	02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	98.598.700	2 Laporan	4 Lap	364.910.550	5 Lap	367.410.850	6 Lap	372.410.850	15 Lap	372.410.850
		1	05	02	1	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang memiliki kualitas PPNS	153.582.499	1 Dokumen	1 Orang	280.076.050	1 Orang	280.076.050	1 Orang	280.076.050	3 Orang	280.076.050 Bid. PPHD

		1	05	02	1	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	40.327.557	2 Laporan	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000	3 Lap	120.050.000		
		1	05	02	1	03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara Yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat BersamaPPNS oleh Dinas Satpol PP	113.254.942	2 Dokumen	1 Dok	160.026.050	1 Dok	160.026.050	1 Dok	160.026.050	1 Dok	160.026.050		
		1	05	04				Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	245.839.775	95%	296 Jumlah	601.450.000	222 Jumlah	625.450.000	192 Jumlah	650.450.000	192 Jumlah	650.450.000	Bid. Kebakaran	Provinsi Kaltim, 10 Kab/Kota, Luar wilayah Prov. Kaltim
		1	05	04	1	01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan non Kebakaran	245.839.775	1 Dokumen	4 dok	601.450.000	4 Dok	625.450.000	4 Dok	650.450.000	4 Dok	650.450.000	Bid. Kebakaran	
		1	05	04	1	01	01	Penyediaan Dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen InformasiDaerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	94.714.190	2 Dokumen	1 Dok	170.650.000	1 Dok	176.650.000	1 Dok	182.900.000	1 Dok	182.900.000		
		1	05	04	1	01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	83.181.795	2 Dokumen	1 Dok	151.400.000	1 Dok	157.400.000	1 Dok	163.650.000	1 Dok	163.650.000		

		1	05	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.036.000	5 Laporan	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000		
		1	05	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	12.281.652.743	1 Dokumen	100%	14.016.195.928	100%	14.016.195.928	100%	14.016.195.928	100%	14.016.195.928	Subbag Keuangan	
		1	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.011.292.743	74 Orang	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928		
		1	05	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.360.000	12 Dokumen	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000		
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3 Lap	104.752.000	3 Lap	104.752.000	3 Lap	104.752.000	3 lap	104.752.000		
		1	05	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	293.393.520	1 Dokumen	100%	772.214.100	100%	701.962.640	100%	664.252.260	100%	664.252.260	Subbag Umum	
		1	05	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	246.629.420	10 Stel										
		1	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	3 Paket	669.189.100	3 Paket	598.937.640	3 Paket	561.227.260	3 Paket	561.227.260		
		1	05	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.764.100	1 Dokumen	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000		
		1	05	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	11 Orang	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000		
		1	05	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	702.357.484	1 Dokumen	100%	1.320.184.450	100%	1.320.184.450	100%	1.330.184.450	100%	1.330.184.450	Subbag Umum	
		1	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.070.000	1 Paket	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400		

		1	05	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	231.109.500	1 Paket	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472		
		1	05	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32.793.000	4 Paket	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000		
		1	05	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.384.984	12 Dokumen	12 Lap	1.150.644.578	12 Lap	1.150.644.578	12 Lap	1.160.644.578	12 Lap	1.160.644.578		
		1	05	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	326.311.000	1 Dokumen	100%	788.553.400	100%	110.842.720	100%	138.553.400	100%	138.553.400	Subbag Umum	
		1	05	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	326.311.000	39 Unit	5 Unit	138.553.400	3 Unit	110.842.720	4 Unit	138.553.400	12 Unit	138.553.400		
								Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan			1 Unit	650.000.000	-		-					
		1	05	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	4.372.865.688	1 Dokumen	100%	5.559.009.422	100%	5.559.009.422	100%	5.559.009.422	100%	5.559.009.422	Subbag Umum	
		1	05	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	169.801.908	12 Laporan	12 lap	261.627.182	12 lap	261,627.182	12 lap	261,627.182	12 Lap	261,627.182		
		1	05	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.203.063.780	12 Laporan	12 lap	5.297.382.240	12 lap	5.297.382.240	12 lap	5.297.382.240	12 Lap	5.297.382.240		
		1	05	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	513.086.162	1 Dokumen	100%	747.266.000	100%	796.227.840	100%	796.227.840	100%	796.227.840	Subbag Umum	
		1	05	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	75.000.000		

								Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya												
		1	05	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204.238.152	21 Unit	21 unit	408.762.000	21 Unit	447.723.840	21 Unit	447.723.840	21 Unit	447.723.840		
		1	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	29.250.000	95 Unit	95 Unit	29.860.000	95 Unit	29.860.000	95 Unit		29.860.000		
		1	05	01	1	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	279.598.000	3 Unit	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000	1 Unit		248.644.000		

Adapun sasaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim Kalimantan Timur adalah meningkatnya pelaksanaan trantibumlinmas sesuai SPM. Dengan peningkatan capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima layanan dasar terhadap target dan indikator kinerja pencapaian SPM. Guna mendukung hal tersebut tentu saja diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
Capaian SPM Trantibumlinmas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang	Ket
1	Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	1. Penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuuhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Bidang Trantibum	Capaian mutu pelayanan dasar
			2. Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi		
			3. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Capaian penerima layanan dasar (standar pelayanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan perda dan perkada)
			4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Bidang Perlindungan Masyarakat	Capaian mutu pelayanan dasar (Standar Peningkatan Kapasias anggota Satpol PP dan anggota linmas
			5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia		
		2. Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	6. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Bidang PPHD	Capaian mutu pelayanan dasar

			7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur		Capaian mutu pelayanan dasar
			8. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	9. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS		Capaian mutu pelayanan dasar (Standar Peningkatan Kapasias anggota Satpol PP)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur

- **Masalah Pokok**, dalam Pencapaian keberhasilan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah:

“ **Belum Optimalnya Pelayanan Trantibumlinmas** “.

- **Masalah**, adapun permasalahan yang menyebabkan Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“ **Belum maksimalnya Penegakan Perda dan Perkada di lapangan** “

- **Akar Masalah**
 1. Kurangnya Tenaga Anggota Personil baik PPNS maupun anggota di lapangan dan ketersediannya Sarana dan Prasarana
 2. Kurangnya minat ASN Sarjana S1 untuk menjadi PPNS
 3. PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya
 4. Kurangnya peningkatan Kapasitas SDM baik PPNS, Anggota personil Satpol PP dan Satlinmas
 5. Kurangnya keterlibatan perangkat daerah pemangku Perdadadan Perkada didalam pelaksanaan aksi penegakan perda dan perkada.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visi dan misinya melalui Analisa SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :

ANALISA PENGARUH LINGKUNGAN INTERNAL :

terdiri atas kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal terdiri dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

1. Kuantitas sumber daya aparatur memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi.
3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Dukungan regulasi

b. Kelemahan

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja organisasi.
3. Belum optimalnya pengintegrasian informasi dan database
4. Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum memadai.
5. Hadirnya regulasi baru yang masih perlu pemahaman lebih dalam merumuskan suatu indikator kinerja dari program/kegiatan

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL :

Terdiri dari peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Peluang

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman baru dalam merumuskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
6. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
9. Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian dalam Negeri dengan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pol PP dan Direktorat Linmas;
10. Dukungan Legislatif dan pemerintah bagi setiap kebijakan tindakan, terhadap program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada di Kalimantan Timur.

b. Ancaman

Ancaman yang dapat teridentifikasi adalah :

1. Masih terbatasnya SDM Pegawai ASN dan Non ASN Lingkup Satpol Prov.Kaltim
2. Masih terbatasnya Tusi Satpol PP sehingga perlu dilakukan perubahan SOTK.
3. Masih terbatasnya anggaran pada pelaksanaan SPM Trantibumlinmas, tidak semua Program/Keg/Sub.Keg. mengampu layanan SPM Trantibumlinmas.
4. Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan layanan Trantibumlinmas
5. Masih terbatasnya peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas

Kunci keberhasilan yang diharapkan sebagai berikut :

- Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang
 1. Memaksimalkan Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai ASN dan Non ASN Lingkup Satpol PP Prov.Kaltim
 2. Memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan disetiap Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Kaltim
 3. Memaksimalkan pelayanan SPM Trantibumlinmas.
 4. Memaksimalkan Tenaga personil Satpol PP dan Linmas yang ada guna pencapaian layanan SPM Trantibumlinmas
 5. Meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas
- Memaksimalkan kekuatan untuk mengurangi ancaman
 1. Memaksimalkan Sumber dana untuk membiayai kegiatan Program dan kegiatan.
 2. Memberikan fasilitasi dalam hal bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, memotivasi, kepada anggota satpol PP, dibidang pelayanan SPM Trantibumlinmas.
- Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang
 1. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus yang mengikutsertakan pegawai secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.
 2. Pemutakhiran informasi data Layanan SPM Trantibumlinmas.
- Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
 1. Mengembangkan data web programming satu data berbasis database layanan SPM Trantibumlinmas dengan melakukan pemutakhiran data sebagai bahan informasi.
 2. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diberbagai bidang dalam rangka peningkatan Layanan SPM Trantibumlinmas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur permasalahan utama yang dihadapi yaitu:

“ Belum Optimalnya Pelayanan Trantibumlinmas “

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Pemetaan Daerah rawan trantibumlinmas
2. Penegakan Perda dan Perkada dengan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Tim.
3. Melakukan Evaluasi SAKIP untuk peningkatan nilai SAKIP Satpol PP Prov.Kaltim
4. Belum Optimalnya penegakan Perda dan Perkada dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP.
5. Melakukan pengamanan terhadap Aset dan dokumen pemerintah, pengawalan dan penanganan unjuk rasa
6. Kurangnya keterlibatan perangkat daerah pemangku Perda dan Perkada didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda dan Perkada
7. Melakukan Sosialisasi Penegakan perda dan perkada bersama dengan Dinas Pendidikan melalui pemilihan siswa sadar hukum dalam mengadakan kegiatan-kegiatan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum.
8. Upaya mengantisipasi Urbanisasi dampak IKN untuk penanganan PMKS, melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dengan

menagkomodir kegiatan dalam upaya penanganan trantibum.

9. Melakukan Sosialisasi terhadap pelaksanaan trantibum, penegakan produk hukum melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan.
10. Masih rendahnya peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).
11. Belum ada kajian terhadap Peta Resiko Pencegahan, penanganan Daerah Rawan Kebakaran.
12. Peningkatan anggaran dan sarana Prasarana serta peningkatan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pencegahan kebakaran, penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran guna mendukung terwujudnya penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Dalam mendukung terwujudnya penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Startegis yaitu :

- 1. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
- 2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas**

4.2 Sasaran

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- 1. Meningkatnya Pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM**
- 2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah**

Secara rinci Pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya sesuai disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 - 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TARGET RPD		
		2022	2023	2024	2025	2025
Tujuan 4 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	67,70	68,81	69,00	69,50	70,01
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN berakhlak	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran indikator kinerja. Strategi untuk mencapai tujuan sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (Strength – Oppurtunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategis adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program - program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang akan dilakukan maka dapat dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Timur dalam menyelesaikan permasalahan belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas dalam hal penegakan perda dan perkara guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatnya pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM	Optimalisasi pelaksanaan layanan terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Peningkatan pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli pengamanan dan pengawalan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Melaksanakan pemetaan daerah rawan trantibumlinmas
		Optimalisasi Penegakan Perda dan Perkada	1. Pembentukan Tim penegakan perda dan perkara bersama perangkat daerah terkait 2. Koordinasi penegakan perda dan perkara bersama perangkat daerah 3. Menambah Tenaga Anggota personil baik PPNS maupun Anggota dilapangan

		Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP dan Satlinmas	1. Melaksanakan Bimtek / Pelatihan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)
		Peningkatan penyelenggaraan penanganan dan pemetaan daerah rawan kebakaran	1. Melakukan kajian akademisi peta resiko pencegahan, penanganan daerah rawan kebakaran 2.Meningkatan anggaran dan sarana prasarana serta peningkatan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pencegahan kebakaran, penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memilik pelayanan publik berkualitas	1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Upaya memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik (SMART), dan mengacu pada Renstra. 2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	1. Melakukan kegiatan Evaluasi SAKIP Satpol PP setiap tahunnya 2. Melakukan Monitoring terhadap capaian target kinerja 3. Melakukan penilaian melalui SKM guna mengetahui mutu layanan Indeks kepuasan pengguna layanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dijabarkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

6.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
11. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
21. Pencegahan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
22. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
23. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
24. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
25. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
26. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
27. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
28. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan

Daerah dan Peraturan Gubernur

29. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
30. Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS
31. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
32. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
33. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
34. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
35. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim, perlu didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 6
Program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran, Program& Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2022	2023	2024		2025		2026	
		realisasi	target	Target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Ketenteraman Dan KetertibanUmum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1.303.224.308	95%	100%	4.643.810.900	100%	4.568.811.200	100%	4.793.810.900
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalamKab/Kota yang ditangani	896.730.809	1 Dokumen	4 Kasus	1.467.847.100	4 Kasus	1.517.847.100	4 Kasus	1.567.847.100
	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan			120 Orang	1.849.999.600	150 Orang	1.699.999.600	200 Orang	1.749.999.600
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	418.343.691	4 Kasus	4 Kasus	1.048.778.000	4 Kasus	1.073.778.000	4 Kasus	1.098.778.000

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.400.000	12 Laporan						
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	114.555.314	1 Dokumen	2 dok	377.050.900	2 dok	402.050.900	2 dok	427.050.900
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	179.926.804	1 Dokumen	2 dok	997.594.000	2 dok	822.594.000	2 dok	822.594.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	175.936.000	30 Orang	120 Orang	852.405.600	150 Orang	877.405.600	200 Orang	927.405.600
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	655.000	1 Dokumen						
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.914.000	2 Laporan	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200	2 Lap	42.018.200
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	252.911.000	1 Dokumen	4 Perda dan Perkada	1.045.888.150	5 Perda dan Perkada	1.070.888.450	6 Perda dan Perkada	1.195.888.150
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	94.303.900	2 Laporan	4 Lap	440.993.100	5 Lap	455.993.100	6 Lap	555.993.100

Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	60.008.400	2 Laporan	4 Lap	239.984.500	5 Lap	247.484.500	6 Lap	267.484.200
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	98.598.700	2 Laporan	4 Lap	364.910.550	5 Lap	367.410.850	6 Lap	372.410.850
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	153.582.499	1 Dokumen	1 Orang	280.076.050	1 Orang	280.076.050	1 Orang	280.076.050
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	40.327.557	2 Laporan	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000	1 Lap	120.050.000
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	113.254.942	2 Dokumen	1 dok	160.026.050	1 dok	160.026.050	1 dok	160.026.050
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	245.839.775	95%	296 Jumlah	601.450.000	222 Jumlah	625.450.000	192 Jumlah	650.450.000
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan rawan bencana kebakaran dan non kebakaran	245.839.775	1 Dokumen	4 dok	601.450.000	4 dok	625.450.000	4 dok	650.450.000
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	94.714.190	2 Dokumen	1 Dok	170.650.000	1 Dok	176.650.000	1 Dok	182.900.000

Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	83.181.795	2 Dokumen	1 Dok	151.400.000	1 Dok	157.400.000	1 Dok	163.650.000
Pembinaan Aparatur PemadamKebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.005.000	1 Laporan	1 Lap	94.550.000	1 Lap	106.550.000	1 Lap	119.050.000
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	66.938.790	2 Dokumen	5 Dok	184.850.000	5 Dok	184.850.000	5 Dok	184.850.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	18.769.206.697	98%	100%	6.347.562.822	100%	6.990.036.592	100%	7.027.747.272
	Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan			90 Indeks	17.907.176.278	90 Indeks	16.565.702.208	90 Indeks	16.527.991.828
Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	279.540.100	1 Dokumen	28 Dok	1.051.315.800	100 %	1.051.315.800	100 %	1.051.315.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	253.504.100	5 Dokumen	4 Dok	301.696.000	4 Dok	301.696.000	4 Dok	301.696.000
Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000
Koordinasi dan PenyusunanDokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000	1 Dok	12.965.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar			16 Dok	96.224.800	16 Dok	96.224.800	16 Dok	96.224.800

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	26.036.000	5 Laporan	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000	6 Lap	627.465.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	12.281.652.743	1 Dokumen	100 %	14.016.195.928	100%	14.016.195.928	100%	14.016.195.928
Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.011.292.743	74 Orang	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928	71 Orang	13.411.663.928
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.360.000	12 Dokumen	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000	12 Dok	349.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000	12 Lap	149.980.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3 Lap	104.752.000	3 Lap	104.752.000	3 Lap	104.752.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat komputer	293.393.520	1 Dokumen	100%	772.214.100	100%	701.962.640	100%	664.252.260
Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	246.629.420	10 Stel						
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	3 Paket	3 Paket	669.189.100	3 Paket	598.937.640	3 Paket	561.227.260
Koordinasi dan Pelaksanaan SistemInformasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	46.764.100	1 Dokumen	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000	1 Dok	21.650.000
Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	11 Orang	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000	11 Orang	81.375.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	702.357.484	1 Dokumen	100%	1.320.184.450	100%	1.320.184.450	100%	1.519.480.450
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.070.000	1 Paket	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400	1 Paket	10.842.400

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	231.109.500	1 Paket	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472	1 Paket	125.810.472
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32.793.000	4 Paket	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000	4 Paket	32.887.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.384.984	12 Dokumen	12 Lap	1.150.644.578	12 Lap	1.150.644.578	12 Lap	1.160.644.578
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	326.311.000	1 Dokumen	100%	788.553.400	100%	110.842.720	100%	138.553.400
Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	326.311.000	39 Unit	5 Unit	138.553.400	3 Unit	110.842.720	4 Unit	138.553.400
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan			1 Unit	650.000.000	-		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	4.372.865.688	1 Dokumen	100%	5.559.009.422	100%	5.559.009.422	100%	5.559.009.422
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	169.801.908	12 Laporan	12 lap	261.627.182	12 lap	261.627.182	12 lap	261.627.182
Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.203.063.780	12 Laporan	12 lap	5.297.382.240	12 lap	5.297.382.240	12 lap	5.297.382.240
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	513.086.162	1 Dokumen	100%	747.266.000	100%	796.227.840	100%	796.227.840
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204.238.162	21 Unit	21 Unit	408.762.000	21 Unit	447.723.840	21 Unit	447.273.840

Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	29.250.000	95 Unit	95 Unit	29.860.000	95 Unit	29.860.000	95 Unit	29.860.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	279.598.000	3 Unit	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000	1 Unit	248.644.000

GAMBAR 6
CASCADE KINERJA SATPOL PP PROV. KALTIM 2024 - 2026



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran/Indikator Sasaran RPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun		
			Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didkung ASN Berakhlak</i>				
	<i>Indikator</i> <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>				
	Sasaran 1 : Meningkatkan pelaksanaan Trantibumlinmas sesuai dengan SPM				
	Indikator Persentase Capaian SPMUrusan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Satpol PP dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan				
	Indikator				
	1. Nilai SAKIP Satpol PP	65	65	70	75
	2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan	85 Indeks	85 Indeks	90 Indeks	95 Indeks
	Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah				
	Indikator				
	1. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65	65	70	75
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah	85 Indeks	85 Indeks	90 Indeks	95 Indeks

BAB VIII PENUTUP

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung tujuan dan sasaran Indikator Kinerja RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Akhirnya dengan terselesaikannya Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, maka telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas serta mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026

Samarinda, Juni 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Arih Frananta Filifus Sembiring, SIP

Pembina Utama Madya
NIP. 196905262016091001

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan sebuah ancaman yang semakin serius seiring dengan kondisi bumi yang semakin memburuk, sehingga bencana dapat menimbulkan dampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun pemerintahan dan telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi dunia saat ini. Bencana alam juga menimbulkan dampak serius terhadap banyak aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Melalui kesepakatan Hyogo, Konferensi Sedunia tentang Peredaman Bencana (World Conference on Disaster Reduction) di Kobe, Hyogo, Jepang yang dihadiri 160 Negara, bersepakat untuk membuat cara pendekatan yang strategis dan sistematis secara komprehensif, untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana yang berorientasi aksi terhadap keprihatinan tentang meningkatnya dampak bencana terhadap individu, masyarakat dan pembangunan nasional.

Berdasarkan laporan World Risk Report 2022, Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana terbesar ketiga di dunia. Selain karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik, kapasitas penanganan dan literasi bencana turut menjadi faktor kerawanan tersebut. Hal itu turut tergambar dalam laporan World Risk Report 2022 yang dirilis Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum. Dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki skor Indeks Risiko Global (WRI) sebesar 41,46 pada 2021. Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketiga tertinggi secara global. Posisi Indonesia berada di bawah Filipina dan India dengan skor sebesar 46,82 poin dan 42,31 poin. Skor WRI Indonesia terbagi atas lima lingkup. Lingkup pertama berupa paparan (exposure) bencana mendapatkan skor sebesar 39,89 poin. atau masuk kategori sangat tinggi. Dari lingkup kerentanan (vulnerability), Indonesia mendapatkan skor sebesar 43,10 poin atau masuk kategori tinggi. Lingkup ini memperhitungkan jumlah pengungsi, pencari suaka, serta orang-orang yang terkena dampak

bencana alam atau konflik dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan lingkup kerawanan (susceptibility), Indonesia memiliki skor sebesar 33,48 poin atau masuk kategori tinggi. Kemudian, lingkup kurangnya kapasitas penanganan bencana di Indonesia memiliki skor sebesar 50,67 atau masuk kategori sangat tinggi. Lingkup terakhir yang diperhitungkan terkait kurangnya kapasitas adaptasi terhadap bencana. Di lingkup ini, Indonesia mendapatkan skor sebesar 47,19 poin atau masuk kategori sedang.

Dalam upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Indonesia telah berubah dari fokus terhadap tanggap bencana menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dan pencegahan untuk pengurangan risiko bencana. Kajian Risiko Bencana menjadi salah satu upaya strategis untuk menyusun rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kajian perlu disusun dalam parameter-parameter yang mengacu kepada Kerangka Aksi Hyogo (KAH). Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang merupakan penegasan atas Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah atas terjadinya bencana. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Bab I pasal 2, bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Di nyatakan pula pada Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 15 ayat 3 huruf e, bahwa urusan

penanggulangan bencana menjadi wajib bagi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, begitu pula Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disebutkan bahwa, kejadian bencana sangat mempengaruhi terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, hal ini menjadi salah satu potensi penghambat laju pembangunan nasional dalam mencapai agenda maupun prioritas dari para pemangku kepentingan, sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, maka dapat diharapkan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat serta membantu percepatan pemulihan kondisi ketahanan sosial, lingkungan, maupun ekonomi masyarakat.

Dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma pengurangan risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.24 tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dimana tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewenangan oleh BPBD dengan didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disetiap penyelenggara urusan pemerintah, maka dibutuhkan sebuah

rancangan dokumen perencanaan daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik isu-isu strategis serta arah strategi dan kebijakan, sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, telah memuat rancangan terkait 7 program Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang diantaranya pada Program Nasional No. 6 yaitu; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah serta peran berbagai pihak lainnya baik itu, Lembaga Usaha, Pihak Akademisi, Media, dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penyelenggaraan program tersebut.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sebagai upaya yang terukur dalam rangka penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus perwujudan dan peran serta BPBD Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada sub bidang kebencanaan.

Kondisi daerah provinsi Kalimantan Timur secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El-Nino yang menyebabkan kekeringan/kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan serta gangguan asap; La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi normal sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan

pangan, timbulnya hama dan penyakit.

A. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu dari 13 potensi bencana yang terjadi diwilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan sebuah bencana yang tidak hanya merusak lingkungan juga menimbulkan dampak pada kerugian secara ekonomi maupun ekologis, namun juga menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat akibat dari asap yang ditimbulkan dan bahkan mengganggu hubungan internasional. Melihat luas kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2015 sampai dengan 2019, Luas Karhutla tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan luas 2.611.411 Hektar, kemudian menurun lagi pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali dengan luasan sekitar 1.649.258 hektar atau separoh dari luasan kejadian Karhutla di tahun 2015 (data Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan). Berdasarkan laporan dari Pusat Data Pelaporan Operasional BPBD Prov. Kaltim, kejadian bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tahun 2018 sampai 2022 di Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi kedua kejadian bencana yang sering terjadi setelah kebakaran pemukiman, dengan jumlah kejadian sebanyak 714 kali.

Untuk mengantisipasi laju kerusakan hutan dan lahan akibat dari kebakaran, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif (corrective actions) untuk mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi, dan melalui Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana, yang merupakan sebuah perintah atasan kepada bawah yang bersifat Khusus (individu, konkret dan sekali-selesai) , telah memberikan tugas kepada Gubernur, sebagai komandan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan beberapa langkah kebijakan diantara adalah :

1. Menyusun Peraturan Daerah Provinsi mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
3. Mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
4. Sebagai komandan satuan tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi dengan didampingi wakil komandan satuan tugas yang terdiri dari Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
5. Memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
6. Mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
8. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Bencana Banjir

Jika menelisik dari bencana banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2018 hingga 2022, telah terjadi 631 kejadian, dimana intensitas bencana banjir yang terjadi tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang sebentar namun penyebarannya juga terjadi dalam skala yang luas, dan hampir dipastikan disetiap 10 kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami bencana tersebut terutama pada daerah-daerah yang dilintasi oleh DAS Mahakam. Kerugian akibat bencana ini jelas berimbas pada pembangunan daerah, rusaknya beberapa fasilitas umum, bahkan kerugian materil ditengah masyarakat belum lagi akan menimbulkan dampak pada kesehatan dan perekonomian. Berdasarkan data dari PUSDALOPS BPBD Provinsi Kalimantan Timur, bencana banjir yang melanda di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana, tahun 2018 sebanyak 31 kejadian bencana banjir, meliputi di 10 Kabupaten/Kota selain di kabupaten berau dan Mahakam Hulu, Tahun 2019 ada kenaikan menjadi 79 kejadian bencana banjir, hampir keseluruhan kabupaten/kota mengalami kecuali Kabupaten Mahakam Hulu, 9 Kabupaten/Kota tahun 2020 terjadi lompatan kejadian yang begitu besar dengan 135 Kejadian dan daerah yang sering mengalami bencana tersebut adalah di wilayah kota samarinda dengan 70 kejadian dan Kutai Barat sebanyak 30 Kejadian bencana banjir. Pada tahun 2021 mengalami tingkat penurunan sekitar 30 % bila dibanding dengan kejadian ditahun 2020, dengan jumlah kejadian 90 bencana banjir, namun kejadian bencana ini terjadimelingkupi di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan ditahun 2022 terjadi bencana banjir sebanyak 296 kali, dimana di tahun tersebut tingkat kejadian naik begitu besar, dan ini menjadi catatan dan perhatian bagi Kalimantan Timur terhadap penanggulangan bencana banjir dan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 10 Kabupaten/Kota yang terdampak pada bencana banjir tersebut, 3 diantaranya, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bontang dan Kabuptaen Kutai Kartanegara mengalami rata-rata diatas 40 kejadian. Ada beberapa faktor mendasar, mengapa hal tersebut bisa terjadi, selain faktor alam

seperti curah hujan yang tinggi, pasangunya air laut dan efek dari cuaca ekstrim, faktor non alam juga perlu menjadi perhatian, adalah kegagalan dalam teknologi seperti Kemampuan kapasitas bendungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam yang kurangnya memperhatikan aspek kelestarian, berkurangnya kawasan sebagai daya tampung dan meluapnya air sungai akibat dari sedimentasi atau pendangkalan sungai, termasuk juga pola hidup masyarakat yang masih rendah akan pentingnya tidak membuang sampah pada saluran air atau sungai.

C. Bencana Tanah Longsor

Bencana Tanah Longsor menempati kejadian bencana terbanyak ke 3 setelah bencana banjir. Bencana longsor merupakan salah satu bencana yang terjadi akibat dari pergerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun tersebut. Bencana ini biasanya terjadi pada lahan yang memiliki kemiringan 180° , dan Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng > 220 . Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas. Kejadian bencana menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi terutama pada daerah perkotaan, selain kerusakan atas konstruksi bangunan baik fasilitas umum dan tempat tinggal, bahkan bahaya akan jiwa manusia. Tercatat bahwa kejadian bencana tanah longsor yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber pada data laporan PUSDALOPS BPBD Prov. Kaltim, mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana ditahun 2022 telah terjadi 95 kejadian tanah longsor, Kota Samarinda dan Balikpapan merupakan wilayah yang sering terdampak. tercatat 85 kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di kedua kota tersebut. sebagai faktor yang menyebabkan adalah curah hujan yang tinggi dan penggundulan lereng untuk dijadikan lahan pertanian/kebun serta tingkat

kelerengan yang terjal yang dijadikan sebagai tempat hunian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar daerah melakukan penataan yang lebih mendalam terhadap peruntukan dan penggunaan lahan yang rentan terhadap bahaya longsor, disamping itu juga perlu melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar kawasan kali/sungai atau didaerah perbukitan untuk tidak membangun rumah di atas/bawah/bibir tebing, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, tidak menebang pohon di sekitar lereng, dan menghindari untuk pembuatan kebun di lahan yang memiliki kelerengan yang terjal.

Berkaca pada bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka pembangunan daerah yang memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan akan mengakibatkan berbagai dampak kerusakan terhadap Alam, apalagi kurangnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, pengusahaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kelestarian lingkungan, termasuk juga permasalahan sosial, masalah tenaga kerja, gagal teknologi dan lain sebagainya, pastinya menimbulkan potensi bencana, dan tidak sedikit kerugian yang sangat besar, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. oleh karena itu, paradigma tentang kebencanaan harus dipahami secara kolektif bahwa **“Bencana Merupakan Urusan Bersama”**.

Selama ini pembangunan daerah melalui beberapa aksi dari beberapa kegiatan yang masih terpisah dan tidak terfokus pada penanganan saat tanggap darurat dan ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang optimalnya pada saat penanggulangan bencana dan memberikan ketidak efektif dan efisiensinya pada saat pencegahan, penanganan dan pasca bencananya. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana, membutuhkan upaya yang terencana, terpadu dan sistematis, yang berorientasi pada pembangunan tangguh bencana.

Melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terfokus pada 7 fokus prioritas penanggulangan bencana terhadap **Perkuatan**

Kebijakan Dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi Diklat Dan Logistik, Penanganan tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, serta Pengembangan Sistem pemulihan bencana.

Dari ke 7 fokus prioritas tersebut kemudian dirincikan kedalam 71 indikator dan 68 diantaranya merupakan yang menjadi fokus bagi BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan (diluar dari bencana gunung berapi). IKD ini sendiri merupakan sebuah ukuran bagi daerah terhadap capaian kinerja dalam penanggulangan bencana dimana capaian yang dicapai tidak hanya semata hanya dihasilkan dari kinerjanya BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, namun juga merupakan capaian kinerja dari Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait menjadi sebuah prestasi atas capaian sebagaimana yang tercantum di 68 indikator tersebut. Hasil dari capaian IKD tersebut nantinya menjadi salah satu elemen bagi pemerintah untuk menghitung tingkat risiko bencana dimasing-masing tiap daerah, Jika Indeks Ketahanan Daerah yang salah satunya melingkupi atas tingkat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam tangguh menghadapi bencana, baik pada kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana meningkat, maka berdampak pada penurunan tingkat risiko bencana ditiap daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pengkajian Risiko Bencana, bahwa pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah dapat dibagi pada tingkat ketahanan kedalam 5 tingkatan, yaitu :

1. Level 1 adalah Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.
2. Level 2 adalah Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan

belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

3. Level 3 adalah Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
4. Level 4 adalah Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
5. Level 5 adalah Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

Berdasarkan atas tingkatan tersebut bahwa nilai ideal bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana diharapkan untuk bisa mencapai pada level 5, dimana tingkat keberhasilan dimulai dari penanggulangan bencana merupakan salah satu yang menjadi prioritas strategis bagi pemerintah dalam pembangunan daerah.

Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam Prioritas program penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana (Indikator HFA) adalah :

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian :
 - a. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang

- pemerintahan.
- b. Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan.
 - c. Terjalinnnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melaluipembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal.
 - d. Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan indikator :
- a. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah.
 - b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipdan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan- kerentanan utama.
 - c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko.
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; dengan indikator :
- a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst).
 - b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep- konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan.

- c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat- biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset.
 - d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dengan indikator :
- a. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya.
 - c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi.
 - d. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes).
 - e. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
 - f. Siap sedia prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, dengan indikator :

- a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya.
- b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.
- c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanismeantisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana.
- d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Untuk mengimplemtasikan tingkatan tersebut, perlu sebuah mekanisme pelaksanaan, dimana Yang menjadi Dasar Standar Pelayanan Minimal, BPBD Prov. Kaltim mengacu pada :

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 35 dan 36 bahwa Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh serta diamanatkan agar, setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana berupa Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sejalan dengan amanat tersebut urusan kebencanaan telah menjadi Standar Pelayanan Minimal.
2. Yang kedua adalah Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota. Jenis Pelayanan mencakup : Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Yang ke 3 adalah Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, peraturan ini untuk

memudahkan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan landasan hukum, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737)
7. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia No. 4828)
8. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaanpencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
13. Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2022 tentang PenanggulanganKebakaran Hutan Dan Lahan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB.
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
23. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
24. Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 adalah :

1. **Maksud :**
 - a. Menyusun dokumen rencana strategis 2024-2026 yang merefleksikan tata kelola yang baik, yaitu transparan, partisipatif dan akuntabel serta upaya mensinergikan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) terutama di bidang kebencanaan, baik secara vertikal maupun horisontal, guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah di Kaltim.
 - b. Memberikan arah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu tiga tahun kedepan.
 - c. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, melalui peningkatan kapasitas dalam melaksanakan program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.

2. Tujuan :

- a. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 3 (tiga) tahun;
- b. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan;
- c. Memberikan acuan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi terhadap perangkat pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kalimantan Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 mengacu pada Instruksi menteri dalam negeri nomor 52 Tahun 2022. yaitu terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan BPBD

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

4.2. Cascading kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi

6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pelaksana urusan pemerintahan bidang penanganan penanggulangan bencana. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi dampak bencana secara terencana terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyelenggarakan fungsi : Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik kebutuhan bencana serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas : 1. Kepala Pelaksana; 2. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum; 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar II-1 STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**



2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS, yang terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 40 Orang,
(berdasarkan tingkat pendidikan) , yaitu :
 - Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 10 Orang
 - Pendidikan Sarjana (S1) : 16 Orang
 - Diploma : 3 Orang
 - Pendidikan SLTA / SMU : 11 Orang

- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang
- 2. Pegawai Non PNS, berjumlah 49 orang, yaitu
 - Satgas Rescue Penanggulangan Bencana : 21 Orang
 - Satgas Logistik dan Peralatan : 6 Orang
 - Satgas Pusdalops, Pendidikan Sarjana : 6 Orang
 - Satgas Pusdalops, Pendidikan SLTA : 2 Orang
 - Satgas Jitupasna, Pendidikan Sarjana : 1 Orang
 - Tenaga Operator Komputer (Sarjana) : 1 Orang
 - Tenaga Administrasi (Sarjana) : 1 Orang
 - Tenaga Administrasi (SLTA) : 4 Orang
 - Operator Speed Boat (SLTA) : 1 Orang
 - Ajudan Pimpinan : 1 Orang
 - Pemelihara Kendaraan : 2 Orang

Tabel II-1. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tanggal 26 Januari 2023

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
IV	10	0	10
III	20	2	22
II	3	4	7
I	0	0	0
JUMLAH	33	6	39

JABATAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
JPT MADYA (Es.I)	0	0	0
JPT PRATAMA (Es.II)	1	0	1
ADMINISTRATOR (Es.III)	4	0	4
PENGAWAS (Es.IV)	1	0	1
PELAKSANA	18	5	23
FUNGSIONAL	9	1	10
JUMLAH	33	6	39

Tabel II-2 Data Pegawai Non ASN Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan, Tanggal 26 Januari
2023

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
S.1	14	2	16
D.IV	0	0	0
D.III	1	1	2
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	22	6	28
SLTP	2	0	2
SD	1	0	1
JUMLAH	40	9	49

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2022

2.2.2 Aset/ Modal

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Prov. Kaltim berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.

Tabel II-3 Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	30.000	M2
2	Gedung	2	Unit (2 lantai)
		3.398	M2
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Tabel II-4 Aset Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim Tahun 2022.

No	Nama Peralatan	VolumeUnit Jumlah		Sumber Perolehan		Tahun Perol ehan/Penga daan	Kelengkapan/Kondisi			Merk/T ype	Keterang an
				Jlh	Instansi		Rusak	Sedang	Baik		
I.	KENDARAAN										
1	Mobil Rescue Komando	2	Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	Mitsubi shi /Strad a	Nopol. B 9441 PSC
				1	BNPB	2018	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9648 TSC
2	Mobil Rescue	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Mitsubi shi /Strad a	Nopol. B 9186 PSC
3	Mobil Ambulance	1	Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 1089 PHX
4	Mobil Serbaguna	1	Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9348 PQU
5	Mobil Tangki Air WTP	3	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9095 PQU
				1	APBN Pusat	2007	0	1	0	Isuzu	Nopol. KT8213 BZ
				1	Kemenko Kesra	2008	0	1	0	Isuzu	Nopol. KT8267 BZ
6	Mobil Dapur Umum	2	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Mitsubi shi	Nopol. B 9083 PQU
				1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	1	0	Isuzu	Nopol. KT 8033 BZ
7	Mobil Tangki Air	2	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9128 PMA

8	Mobil Komunikasi Satelit	1	Unit	1	BNPB	2016	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9120 TMA
9	Mobil Toilet/MCK	3	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Mitsubishi /Strada	Nopol. B 9648 PSC
				1	BNPB	2012	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9744 PQU
				1	Kemenko Kesra	2007	1	0	0	Isuzu	Nopol. KT 8212 BZ
				1	Kemenko Kesra	2008	1	0	0	Isuzu	Nopol. KT 8268 BZ
10	Motor Trail	4	Unit	2	BNPB	2010	0	0	2	wasaki /K LX 150	Nopol. B 6845 PNQ, B 6846 PNQ
				2	BNPB	2013	0	0	2	wasaki /K LX 150	Nopol. B 6478 PVQ, B 6479 PVQ
11	Mobil Logpal (Panther)	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	Isuzu/ Fant her	Nopol. B 1728 PQQ
12	Mobil Pick Up L 300	1	Unit	1	BNPB	2016	0	0	1	Mitsubishi	Nopol. B 9272 TTA
13	Forklif	1	Unit	1	BNPB	2016	0	0	1	Caterpillar	
14	Mobil Dalmas	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1	Isuzu	Nopol. KT 8263 BZ
15	Motor PMK (Roda 3)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1		
16	Toilet Portable	1	Unit	1	BNPB	2018	0	0	1	Campuran	
II. HUNIAN											
1	Tenda Posko :										
	- Tenda Posko Lama	1	Unit	1	BNPB	2010	0	1	0		
	- Tenda Posko Baru	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1		
	- Tenda Posko Baru	5	Unit	5	BNPB	2015	0	0	5		
2	Tenda Pleton	10	Unit	3	BNPB	2010	2	0	1		
				4	BNPB	2011	2	0	2		
				3	APBN Pusat	2007	3	0	0		
3	Tenda Regu	6	Unit	6	BNPB	2009	6	0	0		
4	Tenda Keluarga :										
	- Tenda Keluarga Lama	20	Unit	20	BNPB	2009	9	0	11		
	- Tenda Keluarga 4x 4 m	5	Unit	5	BNPB	2010	4	0	1		
	- Tenda Keluarga Baru	20	Unit	20	BNPB	2012	0	0	20		
	- Tenda Keluarga Baru	20	Unit	20	BNPB	2015	0	0	20		
	- Tenda Keluarga Baru	2	Unit	2	BNPB	2019	0	0	2		
5	Tenda Pengungsi :			5	BNPB	2012	1	0	4		
	- Tenda	5	Unit								

	Pengungsi										
	- Tenda Pengungsi	10	Unit	10	BNPB	2015	3	0	7		
6	Tenda Kanvas	3	Unit	3	BNPB	2009	0	3	0		
7	Tenda Sekolah	2	Unit	2	BNPB	2018	0	0	2		
III. Alat Komunikasi											
1	Rig Lengkap Antena	3	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Icom	
				2	BNPB	2012	0	0	2	Icom	
2	HT	6	Unit	1	BNPB	2010	1	0	0	Icom	
3	SSB	2	Unit	2	BNPB	2012	0	0	2	Icom	
4	Repeater Link	1	Paket	1	BNPB	2014	0	0	1	Motora	
5	Sarana & Prasarana Distance Learning	1	Paket	1	BNPB	2015	0	0	1		
6	Radio Sistem Wilayah	1	Paket	1	BNPB	2016	0	1	0	Codan	
7	Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi BPBD	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Lampiran	
8	Peralatan Komunikasi Berbasis Multimedia	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Lampiran	
9	Radio Tetra	1	Paket	1	BNPB	2014	0	0	1	Lampiran	
10	Wireless	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2009	0	0	1	TOA	
11	Megaphone	2	Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2	TOA	
12	GPS	2	Unit	1	BPBD Kaltim	2009	0	0	1	Garmin	
				1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1	Garmin	
IV PERAHU											
1	Perahu Karet :										
	- Kapasitas 6 orang	1	Unit	1	BNPB	2009	1	0	0		
	- Kapasitas 8 orang	2	Unit	1	BNPB	2009	1	0	0		
				1	BNPB	2010	1	0	0		
	- Kapasitas 10 orang	3	Unit	1	BNPB	2009	1	0	0		
				1	BNPB	2010	1	0	0		
				1	BNPB	2011	1	0	0	Sillinger	
	- Kapasitas 12 orang	7	Unit	1	BNPB	2010	1	0	0		
				6	sbangpol Kaltim	2007	6	0	0		
	- Kapasitas 10 Orang (Sillinger)	2	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Sillinger	
				1	BNPB	2013	0	1	0	Sillinger	
2	Mesin, Perahu dan Speedboat:										
	- 9,8 PK	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	Tohatsu	
	- 18 PK	1	Unit	1	BNPB	2011	1	0	0	Mercury	
	- 25 PK	5	Unit	1	BNPB	2009	0	1	0	Yamaha	
				1	BNPB	2012	0	0	1	Mercury/Parsun	
				3	APBN Pusat	2007	0	0	3	Yamaha	
	- 40 PK	6	Unit	1	BNPB	2009	0	1	0	Yamaha	
				1	BNPB	2012	1	0	0	Mercury	
				1	BNPB	2013	0	0	1	Mercury	
				3	APBN Pusat	2007	0	0	3	Yamaha	

	- 15 PK	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Suzuki	
	- 30 PK	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Suzuki	
3	Perahu Polyethylene Kap. 6 org	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2		
4	Perahu Ampibhi	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	Sealegs	
5	Perahu Lipat 3,27 m	1	Unit	1	BNPB	2014	0	1	0	Portable	
6	Body speedboat (fiber)	2	Unit	1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	0	1		
				1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1		
7	Body speedboat (fiber) + Mesin Speedboat 40 PK	1	Unit	1	APBN Pusat	2009	1	0	0		
V GENSET											
1	Genset 1,2 KVA	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Honda Tropic	
2	Genset 10 KVA	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Honda Tropic	
3	Genset 5 KVA	2	Unit	2	BNPB	2013	2	0	2	Honda Tropic	
4	Genset Light Tower Portable Stamford	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	Stamford	
5	Krisbow 500 watt	2	Unit	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	1	1	Krisbow	
VI ALAT PENERANGAN											
1	Lampu Senter	10	Unit	10	BNPB	2010	10	0	0		
2	Solar Lamp (Lampu Penerangan)	7	Unit	7	BNPB	2012	0	0	7	SHS Mini	
3	Solar Handle Lamp	40	Unit	40	BNPB	2012	5	0	35	SHS	
4	Senter HID Search Light	4	Unit	2	BNPB	2011	0	0	2	Polarion	
				2	BNPB	2012	0	0	2	Polarion	
5	Lampu Multi Purpose Solar	80	Unit	80	BNPB	2015	50	0	30		
6	Lampu 400 watt	2	Unit	2	sbangpol Kaltim	2009	0	0	2	Philips	
7	Lampu (Light Tower Portable)	1	Unit	1	BNPB	2018	0	0	1	Baseligh 420x	
VII Water Treatment Portable											
		2	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
				1	BNPB	2013	0	0	1		
VIII Peralatan Lainnya :											
1	Fleksibel Tank Kap. 2000 ltr	2	Buah	2	BNPB	2011	0	2	0		
2	Fleksibel Tank Kap. 1000 ltr	2	Buah	2	BNPB	2011	0	2	0		
3	Mesin Pompa Air	1	Buah	1	BNPB	2010	0	0	1		
4	Mesin Pompa Air + Pelampung	3	Buah	3	BNPB	2013	0	0	3	Honda	
5	Velbed	183	Buah	30	BNPB	2009	0	30	0		
				8	BNPB	2010	8	0	0		
				25	BNPB	2011	0	25	0		
				50	BNPB	2012	10	0	40		
				20	BNPB	2015	5	0	15	Custo m	
				50	BPBD Kaltim	2010	25	0	25		
6	Pelampung	20	Buah	20	BNPB	2009	20	0	0		

7	Gergaji mesin (chainsaw)	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	Still	
8	Camera Under Water	1	Unit	1	BNPB	2014	0	0	1	RCU	
9	Peralatan SAR Pemukiman	1	Paket	1	BNPB	2015	0	0	1		
10	Pompa pemadam sistem busa	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Ganebo	
11	Pompa pemadam portable	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Ganebo	
12	Ransel	15	Buah	15	APBN Pusat	2007	15	0	0		
13	Kantong Tidur	15	Buah	15	APBN Pusat	2007	15	0	0		
14	Sepatu Boot	15	Psng	15	APBN Pusat	2007	15	0	0		
15	Tandu Evakuasi	10	Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	5	0	5		
16	Trolley Perahu Fiber	3	Buah	3	Kesbangpol Kaltim	2009	1	0	2		
17	Ompreng	8	Lusin	8	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	6		
18	Rice Coker 10 Kg	2	Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2		
19	Tabung Gas	2	Buah	2	sbangpol Kaltim	2009	0	0	2	12 kg	
20	Termos Nasi	5	Buah	5	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	5		
21	Compresor Super Shape	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2010	0	1	0		
22	Tempat tidur PB	3	Buah	3	BPBD Kaltim	2010	2	1	0		
23	Trolley Mesin Speed	10	Buah	10	BPBD Kaltim	2010	0	0	10	Rakitan	
24	Rak Perahu Karet	2	Buah	1	BPBD Kaltim	2010	1	0	0	Rakitan	
				1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1	Rakitan	
25	Rak Tempat Peralatan	2	Buah	2	BPBD Kaltim	2010	0	0	2	Rakitan	
26	Kursi	65	Unit	25	BPBD Kaltim	2012	5	0	20		
				40	BPBD Kaltim	2013	10	0	30		
27	Meja	7	Unit	3	BPBD Kaltim	2012	1	0	2		
				4	BPBD Kaltim	2013	2	0	2		
28	Dongkrak (kap. 2 ton)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1	Krisbow	
29	Trolley Barang	2	Unit	2	BPBD Kaltim	2013	0	0	2	Krisbow	
30	Papan tulis	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1		
31	Tandon Air (kap. 1200 ltr)	6	Unit	6	BPBD Kaltim	2013	0	0	6	Profile	
32	Peralatan scuba diving	2	Set	1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1		
				1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1		
33	Peralatan mountenering	2	Paket	1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1	Campuran	
				1	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	1	Campuran	
34	Sonar (pendeteksi benda dlm air)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1		
35	Mesin pompa karhutla (ringan)	2	Paket	2	BNPB	2016	0	0	2	Honda	
36	Mesin Pompa Apung	2	Paket	2	BNPB	2016	0	0	2	Honda	
37	Maskerr Tahan Api	100	unit	100	BNPB	2017	0	0	100		
38	Pompa Pemadam Karhutla (Fighter)	10	unit	10	BNPB	2018	0	0	10		

Sumber: Data Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Timur. khususnya dalam kinerja pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, mengarah pada Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana Pasca Bencana. Pada saat ini kondisi di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemukiman penduduk, banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menjadi bencana tahunan di Kalimantan Timur serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yakni dalam rangka Penurunan Risiko Bencana (IRB) dengan Penguatan Kapasitas Daerah (IKD) terhadap bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian pada tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, pencapaian kinerja pelayanan yang dimaksud meliputi :

1. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya melakukan edukasi dan mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas ketahanan daerah dalam mengurangi risiko bencana, pepaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta manajemen data dan informasi kebencanaan.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel II-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2022 Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana	0	61,33	0	61,33	0	100
2.	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana	87	88	75	80	86,21	90,91
3.	Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic)	75	80	60	75	80,00	93,75
4.	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	5	25	5	20	100	80,00
No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	85,00	85,00	83,33	85,00	98,04	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,00	78,37	80,00	97,96	100

Berkaca pada capaian indikator kinerja tahun 2019-2022 sebagaimana pada tabel II-5 diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator kinerja 1 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 0%, dalam hal ini program desa/kelurahan tangguh bencana tidak diselenggarakan disebabkan oleh, selain besaran anggaran yang kurang, juga di tahun tersebut, wilayah Provinsi Kaltim dilanda bencana Covid19, sehingga dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

menjadi kendala dalam penyelesaian target.

Pada tahun 2020, capaian kinerja dapat dicapai sebesar 100%, sedangkan pada indikator kinerja ke-2, untuk prosentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana, trealisasi sebesar 75 % dari target sebesar 87 persen dengan rasio capaian 86.21 %, dan ditahun 2020 target meningkat dengan capaian rasio sebesar 90.91 %. Untuk indikator ke - 3 terhadap Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic) capain rasio mengalami kenaikan di tahun 2020 dengan capaian rasio sebesar 93.75 % atau sebesar kenaikan 13,75 %, untuk Indikator ke -4 terhadap Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana capaian rasio menurun sebesar 20 %. Pada Tahun 2021 dan 2022 ada perubahan indikator yang semula berjumlah 4, dilakukan perubahan menjadi 2 indikator yakni prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan capaian rasio sebesar 100 % atau ada kenaikan capaian sebesar 1,96 % bila dibanding dengan tahun 2021, sedangkan untuk indikator Kepuasan Masyarakat, BPBD Prov. Kaltim juga mencapai kinerja sebesar 100% atau kenaikan sebesar 2,04 %.

Mengacu pada Renstra BPBD Prov. Kaltim tahun 2021-2023, penguatan kapasitas kelembagaan yang menjadi salah satu skala prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan membentuk 30 Desa Tangguh Bencana (Destana) selama 5 tahun (2019-2023). Pada tahun 2022 capaian target pembentukan Destana berhasil dibentuk berjumlah 17 Destana yang tersebar di 6 Kabupaten/kota diantaranya adalah Kota Samarinda dibentuk pada 2 kelurahan, Kota Balikpapan dibentuk pada 1 Kelurahan, Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk di 5 Desa, Kabupaten Kutai Timur dibentuk di 1 Desa, pada Kabupaten Paser dibentuk di 3 Desa, dan pada Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk di 5 Desa. Lokus pembentukan Destana yang dipilih pada suatu wilayah, selain mengacu pada level kerentanan terhadap bencana, juga diprioritaskan pada wilayah/daerah yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Pada tahun 2023, rencana pembentukan Destana tersisa 13 yang belum terbentuk, akan ditargetkan capaian realisasinya, rampung pada triwulan ke III, dimana lokus

pembentukannya berada pada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Pser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan terakhir adalah Kabupaten Berau.

Tabel II-6 Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	TAHUN PEMBENT UKAN	SUMBER BIAYA	JENIS RISIKO BENCANA
Kota Samarinda				
1.	Kelurahan Bandara	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman Dan Banjir
2.	Kelurahan Teluk Lerong Ulu	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman Dan Banjir
Kabupaten Kutai Kartanegara				
1.	Desa Muara Badak Ilir	2020	APBD Provinsi	Banjir
2.	Desa Anggana	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman
3.	Desa Sungai Meriam	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman
4.	Desa Manunggal Jaya	2022	APBD Provinsi	Puting Beliung
5.	Desa Bukit Raya	2022	APBD Provinsi	Banjir
Kabupaten Kutai Timur				
1.	Desa Kandolo	2022	APBD Provinsi	Banjir
Kabupaten Paser				
1.	Kelurahan Longikis	2022	APBD Provinsi	Banjir
2.	Desa Mendik	2022	APBD Provinsi	Banjir Dan Karhutla
3.	Desa Jemparing	2022	APBD Provinsi	Banjir
Kabupaten Penajam Paser Utara				
1.	Desa Sesulu	2022	APBD Provinsi	Banjir
2.	Desa Bangun Mulya	2022	APBD Provinsi	Kebakaran Dan Banjir
3.	Desa Rintik	2022	APBD Provinsi	
4.	Desa Sebakung Jaya	2022	APBD Provinsi	
5.	Desa Babulu Laut	2022	APBD Provinsi	
Kota Balikpapan				
1.	Kelurahan Sepinggan Raya	2022	APBD Provinsi	Banjir Dan Tanah Longsor

Sumber : BPBD Provinsi Kaltim 2022

Tabel II-7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahProvinsi	12,661,749,990	14,466,946,420	10,750,461,267	12,481,797,782	84.91	86.28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148,519,500	516,762,500	111,738,640	487,605,690	75.23	94.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,519,500	87,990,000	47,047,390	85,442,550	90.19	97.10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,000,000	193,197,500	43,478,500	185,798,900	85.54	96.17
Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	70,000,000	235,575,000	43,478,500	216,364,240	62.11	91.85
AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	9,207,283,000	9,203,133,082	7,563,483,807	7,348,345,595	82.15	79.85
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	8,895,403,000	8,961,093,082	7,332,293,807	7,115,005,595	82.43	79.40
Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	311,880,000	242,040,000	231,190,000	233,340,000	74.13	96.41
Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	20,030,000	0	18,750,000	0	93.61	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20,030,000	0	18,750,000	0	93.61	0
AdministrasiUmum Perangkat Daerah	982,200,878	2,128,758,400	980,327,646	2,098,558,320	99.81	98.58
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	45,150,000	1,252,041,400	44,282,000	1,238,366,877	98.08	98.91
Penyediaan	88,050,878	138,417,000	87,120,700	129,735,010	98.94	93.73
Bahan LogistikKantor						
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849,000,000	738,300,000	848,924,946	730,456,433	99.99	98.94
Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	1,874,165,712	1,994,658,906	1,737,103,474	1,938,786,609	92.69	97.20
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340,800,000	320,472,498	242,416,495	293,706,253	71.13	91.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,533,365,712	1,674,186,408	1,494,686,979	1,645,080,356	97.48	98.26
PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429,550,900	623,633,532	339,057,700	608,501,568	78.93	97.57

Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296,835,900	261,011,000	206,423,500	248,226,568	69.54	95.10
Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	41,315,000	52,438,000	41,265,000	52,005,000	99.88	99.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91,400,000	310,184,532	91,369,200	308,270,000	99.97	99.38
Program Penanggulanga n Bencana	3,013,732,010	4,013,345,907	2,395,860,262	3,843,054,179	79.70	95.76
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	306,175,000	1,206,580,800	271,770,910	1,168,123,438	88.76	96.81
PenyusunanKajian RisikoBencana Provinsi	306,175,000	1,206,580,800	271,770,910	1,168,123,438	88.76	96.81
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaanterhadap Bencana	1,768,692,010	1,688,002,000	1,251,255,955	1,611,735,745	71.09	95.48
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	459,850,110	0	97,063,500	0	21.11	0
Pengendalian Operasi dan	206,755,700	294,321,000	118,874,600	272,169,710	57.50	92.47
Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaanterhadap Bencana	0	0	0	0	0	0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	303,686,200	448,909,000	303,686,200	431,296,218	100.00	96.08
Penanganan PascabencanaProvinsi	422,000,000	678,360,000	394,633,341	660,683,397	93.52	97.39
PengembanganKapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	376,400,000	266,412,000	343,058,000	247,586,420	91.14	92.93
Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi Korban Bencana	838,000,000	962,731,207	792,783,397	910,225,396	94.60	94.55
Respon CepatPenanganan Darurat Bencana	443,100,000	416,212,000	416,431,764	395,387,403	93.98	95.00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	394,900,000	546,519,207	376,351,633	514,837,993	95.30	94.20
Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	100,865,000	156,031,900	80,050,000	152,969,600	79.36	98.04
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100,865,000	156,031,900	0,050,000	152,969,600	79.36	98.04

Selain rencana dan realisasi program/kegiatan, kinerja pelayanan dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga dievaluasi melalui rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Penyerapan anggaran berbasis kinerja berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis memperhatikan kepantasan penggunaan input, prinsip efisien membandingkan input atas output, sementara prinsip efektif membandingkan outcome atas output dari kegiatan yang direncanakan (Siswantara, 2011).

Tabel II-7 menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15,675,482,000 yang terbagi kedalam 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 12,661,749,990 dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 3,013,732,010. Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 13,146,321,529 atau capaian rasio sebesar 83,87 %, dimana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi capaian sebesar 84,91 % dan Program Penanggulangan bencana rasio sebesar 79.7 %. Pada Tahun 2022 anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 18,480,292,327 atau teralisasi sebesar Rp. 16,324,851,961 atau rasio capaian 88.34 % dimana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar rasio capaian sebesar 86,28 % sedangkan Rasio capaian Program Penanggulangan Bencana sebesar 95.76 %.

Dari segi capaian realisasi anggaran, ditahun 2022 BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat meralisasikannya lebih meningkat dari pada tahun 2021 walaupun tidak begitu signifikan. Di tahun 2021, wilayah provinsi kalimantan timur masih berada dalam status wilayah yang terdampak dari covid19, mungkin secara tata waktu pelaksanaan bisa menjadi penyebab belum terealisasikannya anggaran secara tepat waktu, namun di tahun 2022, status terhadap pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dilonggarkan sehingga, capaian realisasi lebih dapat ditingkatkan. Selain faktor covid 19, faktor yang ikut menjadi hambatan dalam capaian kegiatan ditahun tersebut (2021-2022) adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tata kelola dan tata laksana pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
2. Rendahnya fasilitas hubungan kerja antar instansi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di daerah
3. Anggaran yang tersedia masih belum memadai sehingga tidak maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal sub urusan kebencanaan
4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

dalam terselenggaranya penanggulangan bencana

5. Minimnya Saprasi Penanggulangan Bencana serta Alat Perlindungan Diri dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur mencakup aspek kebijakan dan teknis Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Aspek kebijakan akan dijalankan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi di BPBD Prov. Kaltim dengan fungsi administratif pemerintahan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang diimbangi baik oleh bidang dan seksi dengan porsi yang berbeda.

Pada aspek kebijakan, BPBD Prov. Kaltim bertanggungjawab mensukseskan beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebencanaan yang terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana serta layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang harus diselesaikan. Beberapa Layanan tersebut tidak sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah provinsi untuk mengeksekusi di lapangan sehingga memerlukan koordinasi dengan BPBD di Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan layanan sub urusan kebencanaan tersebut dengan mitra kerja yang ada di daerah. Koordinasi antar instansi di lingkup daerah Provinsi maupun di daerah Kab/Kota menjadi kunci utama keberhasilan dalam penerapan SPM Sub-Urusan Kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi yang perlu dilakukan adalah penyelarasan program dan pengaturan tata hubungan kerja. Dengan koordinasi yang baik maka tantangan selanjutnya yakni keterbatasan minimnya anggaran belanja daerah dapat diatasi dengan program kemitraan/bersama (*joint program*).

Begitu juga terhadap tantangan terhadap dalam belum optimalnya fungsi dari Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS) yang mempunyai fungsi yang sangat vital terhadap

ketepatan penanganan secara efektif waktu dan efisien dalam penanggulangan Bencana. Fungsi ini sekarang masih berada di dalam 2 kendali pelaksanaan, dimana secara kebutuhan anggaran berada dalam satu bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, sedangkan pelaksanaannya berada dalam kedudukan bidang Kedaruratan dan Logistik, sehingga jelas secara fungsi tingkat profesionalnya masih bergantung pada kedua bidang ini, padahal ditingkat pusat, PUSDALOPS ini menjadi sebuah wadah/pusat komando dalam pengendalian apabila terjadi bencana. Berdasarkan hal tersebut, kedepan BPBD Prov. Kaltim berkeinginan untuk mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana menjadi unit kerja BPBD Prov. Kaltim selain menjadi desiminasi informasi untuk aksi darurat, penetapan status bencana dan aktivasi posko dan juga menjadi ruang bagi kepala daerah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana (Perka BNPB No.15 Tahun 2012 tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana).

Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan tingkat Kapasitas (Capability) dan pengutan jaringan (Networking), berdasarkan konsep Penanggulangan Bencana yang efektif (Concept of effective disaster Management, Asim,2011), bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui mekanisme Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana harus menggunakan pendekatan penguatan kapasitas (capability) terkait dengan peningkatan kelembagaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta sumber daya manusia (SDM) dan penguatan jaringan (networking) melalui fasilitasi hubungan kerja sama antar lembaga/OPD, mitra dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah provinsi sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Maka Yang menjadi koreksi adalah, Indikator Kinerja Utama (IKU), seharusnya bisa melingkupi secara keseluruhan dalam fungsi pada bidang-bidang teknis kebencanaan. Maka BPBD Prov. Kaltim melakukan penyempurnaan IKU (Renstra BPBD Prov. Kaltim 2019-2023) dari Tujuannya adalah Penurunan Indeks Risiko Bencana, Sasarannya adalah Persentase Penanggulangan Bencana yang melingkupi 3 Bidang Teknis, serta Indikator Programnya adalah Persentase Pembentukan Destana. Yang menjadi target prioritas adalah Destananya,

padahal penanggulangan bencana terletak pada tingkat ketahanan daerah (IKD) dengan meningkatkan tingkat kapasitas daerahnya dalam mengurangi tingkat kerentanan pada suatu daerah dalam menghadapi bencana. Jika kita lihat dari Indikator Ketahanan Daerah, Destana adalah bagian terkecil dari 71 Indikator yang ada di IKD tersebut, maka kurang sempurna jika hanya Destana saja yang menjadi fokus prioritas. Maka kedepan BPBD Prov. Kaltim melakukan penyempurnaan/perubahan IKU nya menjadi Tujuan adalah Penurunan Indeks Risiko Bencana, Sasarannya adalah Penguatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Programnya adalah Pelayanan pada 3 Bidang Teknis dengan 3 indikator, Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Darurat dan Persentase Pemulihan Pasca Bencana. Selain itu Jaringan penguatan jaringan (networking) melalui fasilitasi hubungan kerja sama antar lembaga/OPD, mitra dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sangat penting dilakukan. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana yang ada di daerah. Bentuk penguatan jaringan terletak pada menjalin kerjasama (PKS) baik antar lingkup Provinsi dengan BPBD Kab/Kota, atau antar BPBD Kab/Kota sendiri dan BPBD dengan Mitra/Lembaga/OPD terkait/Masyarakat. PKS ini perlu dilakukan, selain sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran lintas batas juga menjadi alternatif atas keterbatasan alokasi anggaran yang berimbas pada penentuan prioritas penanggulangan bencana menjadi sebuah pilihan.

Terhadap amanah dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020, tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi sebuah tantangan baru bagi BPBD Prov. Kaltim dimana berdasarkan aman kedua, Angka 24, Gubernur dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas dan fungsi penanganan penanggulangan Bencana di Daerah, telah ditunjuk menjadi Satuan Perwakilan Komandan Satuan Tugas dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), meliputi kegiatan Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Provinsi Kalimantan Timur bahwa terdapat 13 Potensi Bencana yang menjadi

beban tanggung BPBD Prov. Kaltim, termasuk didalamnya adalah karhutla, yang merupakan salah satu bagian dari 13 potensi bencana tersebut, hal ini perlu diberikan ruang khusus dalam penanggulangannya, mengingat penanggulangan karhutla telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia dan menjadi sebuah perintah atasan kepada bawahan yang bersifat Khusus (individu, konkret dan sekali-selesai) , agar kebakaran yang terjadi di tahun 1997 dan 2015 tidak terulang, mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla bukan hanya dihitung secara materil (Kesehatan, ekonomi, sosial) tetapi juga kerusakan secara biodiversity (keanekaragaman hayati) bahkan hubungan internasional.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD di Tahun 2023 telah melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengenai Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan terhadap Peraturan Daerah No. 5 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, didasari atas Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2020, Amar Kedua, Angka 24, huruf a.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hingga saat ini BPBD Prov. Kaltim belum bisa melaksanakan secara sepenuhnya, karena terbatasnya peralatan pendukung dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dalam perencanaan kebijakan pembangunan di 3 tahun kedepan (2024-2026), BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki kelompok sasaran layanan pada arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai. BPBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi agar Penanggulangan Bencana di daerah Kalimantan Timur pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan baik, maka, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kelompok sasaran layanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah fokus pada peningkatan kapasitas

untuk penguatan ketahanan daerah di 10 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota berorientasi pada segi peningkatan performa kelembagaan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD, baik dalam lingkup tata kerja maupun tata laksana, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur yang profesional dalam melakukan penanggulangan bencana, serta penguatan net working / perjanjian kerja sama (PKS) antar BPBD maupun dengan mitra dan masyarakat dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran dan personil dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan dalam dokumen perencanaan pada umumnya merumuskan beberapa masalah yang ada dalam organisasi sekaligus sebagai bahan untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Hasil dari identifikasi masalah yang telah dipecahkan dapat menjadi tujuan dalam dokumen perencanaan strategis dengan penelusuran dan penajaman agar dapat memisahkan antara masalah pokok dan akar masalah. Pada beberapa kejadian permasalahan tidak berhasil diidentifikasi secara tepat karena ketidakmampuan dalam mengurai masalah pokok dan akar masalah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan yang jelas dalam mengurai permasalahan menjadi akar-akar masalah dan selanjutnya merumuskannya menjadi permasalahan pokok yang akhirnya menjadi tujuan pelayanan organisasi perangkat daerah.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks. BPBD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana. Guna mengukur tingkat keberhasilan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko perlu adanya analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, tidak hanya itu adanya perhitungan terkait nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang diikuti dengan situasi dan kondisi

lingkungannya juga perlu dimasukkan kedalam hasil analisis. Untuk mendapatkan hasil analisis tersebut maka perlu analisis yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman di dalam BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan yang ditemui di setiap bidang dapat dianggap sebagai akar masalah yang selanjutnya dirumuskan berdasarkan analisis penyelenggaraan layanan yang diberikan selama ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban pada setiap bidang. Dari akar masalah yang berhasil dirumuskan oleh setiap bidang, kemudian disusun satu narasi kalimat yang juga harus padat dan jelas untuk dijadikan masalah pada setiap bidang yang kemudian akan menjadi keseluruhan akar masalah BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Irisan masalah-masalah pada Bidang akan menjadi permasalahan pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati untuk diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. Permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah:

1. Kondisi alam Kalimantan Timur yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis beragam merupakan wilayah yang rawan bencana dan permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya.
2. Tingkat Penanganan Penanggulangan yang belum bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif, karena pada tingkat performa kelembagaan baik lingkup Struktur Organisasi, Standar Type, Unit Pelaksana, dan status kelayakan kantor masih kurang terutama pada sistem pengendalian operasi yang belum berfungsi sebagai pusat kendali operasi dalam penanggulangan bencana.
3. Penanganan kejadian bencana masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien.
4. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.

5. Terbatasnya prasarana sarana, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga anggaran untuk penanggulangan bencana.
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana.
7. Masih kurangnya instrumen-instrumen kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang penanggulangan bencana;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Tersedianya sumber anggaran pada setiap tahunnya;
- d. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab.

2. Kelemahan

- a. Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya ego sektoral diantara bidang-bidang;

- b. Rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang diembankan kepada bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Kurangnya sumber daya peralatan penanggulangan bencana baik dari jenis, kemampuan, kuantitas, dan kualitas;
- d. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahan iklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- e. Kompetensi SDM yang masih belum sesuai untuk tugas-tugas PB sehingga menyebabkan kualitas dan kapasitas personil yang ada tidak merata;
- f. Kurangnya lahan untuk menampung kendaraan operasional;
- g. Masih rendah pemberian penghargaan (reward) bagi sumber daya manusia yang berprestasi di bidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (punishment) dari pimpinan terhadap bawahan yang dipimpinnya bagi sumber daya manusia yang melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada bawahan;
- h. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- i. Belum optimalnya fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta masih lambatnya penyampaian laporan kepada pimpinan secara berjenjang.

3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana baik berupa manajemen kebencanaan dan penanggulangannya serta dibukanya peluang

mengikutsertakan sumber dayam manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program magang ke luar negeri untuk penanggulangan bencana;

- b. Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan stakeholder mitra penanggulangan bencana meliputi dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- c. Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan website penanggulangan bencana;
- d. Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- e. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ancaman

- a. Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- b. Beratnya medan dan susah akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- d. Masyarakat mudah terpengaruh HOAX (kemajuan teknologi)
- e. Fasilitas pendukung yang mulai beralih ke era digital
- f. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- g. Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Selain menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang, tantangan yang kedua adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas dimana tantangan tersebut mendorong BPBD Prov. Kaltim agar mampu untuk pencapaian tiap komponen terpenuhi, berkualitas dan terimplementasi dari Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja dan mendapat bobot penilaian yang maksimal. Target yang akan dicapai pada kinerja tahun 2024-2026, BPBD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam predikat BB (Sangat Baik) atau Nilai antara > 70-80 dengan implementasi bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Irisan masalah-masalah tersebut diatas, kemudian dinarasikan secara sistematis menjadi 2 (dua) permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan pokok BPBD Prov. Kaltim, serta akar masalah disajikan pada Tabel III-1.

Tabel III-1. Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim

MASALAH POKOK	
Rendahnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana (PB) dan Tingginya Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan (GALKARHUTLA) (Perka BNPB No.2 Tahun 2012 ttg Kajian Risiko Bencana dan Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla)	
MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya Sistem Tata Kerja / Laksana Penanggulangan Bencana	1. Rendahnya Tata Kelola Dan Fasilitasi Hubungan Kerjasama Antar Lembaga, Mitra Dan Masyarakat
Belum Maksimalnya Tingkat Sistem Penanganan Dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1. Rendahnya Penanggulangan Pada Tingkat Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan Dan Evakuasi Serta Pasca Bencana 2. Rendahnya Kuantitas Dan Kualitas SDM Aparatur 3. Minimnya SAPRAS Penanggulangan Bencana 4. Rendahnya Sistem Pengawasan Penanggulangan Bencana
MASALAH POKOK	
Nilai SAKIP BPBD masih dalam Katagori B atau Predikat Baik	
MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Maksimalnya Peningkatan Kinerja yang tepat sasaran dan Berorientasi Hasil	Rendahnya Sistem pengendalian internal baik secara berjenjang maupun kelola administrasi

Melihat kompleksitas kondisi masalah penaggulangan bencana, maka perlu adanya dorongan lebih kepada sinergi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik di tingkat operasional maupun koordinatif dalam penanggulangan bencana, begitu pula dengan masalah pada Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

3.2. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
2. Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

- 2.1.1 Masih kurangnya upaya dalam rangka mendorong penggunaan anggaran APBN sebagai dana pendamping kegiatan yang didanai oleh anggaran belanja APBD;
- 2.1.2 masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal perhitungan kaji cepat;
- 2.1.3 masih kurangnya SDM berupa TRC (Tim Reaksi Cepat) dalam penanganan tanggap darurat;
- 2.1.4 masih kurangnya sarana dan prasarana dalam kondisi tanggap darurat.

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- 2.1.5 Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- 2.1.6 Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
- 2.1.7 Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

- 2.1.8 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
 - 2.1.9 Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:
- 3.1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - 3.2. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
 - 3.3. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah;
 - 3.4. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung pengurangan risiko bencana yang dalam hal ini dokumen RPB, KRB, kontingensi, dan lain-lain;
 - 3.5. Belum berubahnya paradigma masyarakat menjadi pengurangan risiko bencana. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
 - 3.6. Keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
 - 3.7. Keterbatasan kapasitas sdm dan masyarakat dan menghadapi bencana serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 berdasarkan

hasil telaahan perlu adanya koordinasi dalam rangka kolaborasi dan Kerjasama Program/Kegiatan dalam Penanggulangan Bencana antara BNPB, Kementerian/Lembaga terkait bencana, Akademisi, Badan Usaha (Pentahelix) dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam perumusan program dan kegiatan. Serta penajaman terhadap indikator program dan kegiatan. Serta memberikan tanggung jawab penanganan bencana bukan hanya pada satu instansi tertentu, namun ke instansi/badan/institusi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024. Visi BNPB 2020-2024 adalah: “BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Sedangkan Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan

terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana. Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktivitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam. Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media). akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal. untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024, Tujuan BNPB adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.

- 2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
- 3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
- 4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel III-2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPB 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.	indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	indeks
4		Indeks Reformasi Birokrasi.	indeks

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
- 2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
- 3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
- 4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.

5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Untuk mencapai arah kebijakan maka BNPB menetapkan Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Risiko Bencana
2. Sasaran Strategis 2: Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak
3. Sasaran Strategis 3: Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari 4 sasaran strategis tersebut telah dikembangkan menjadi 7 sasaran program seperti tampak pada Tabel III-2 berikut ini :

Tabel III-3 Sasaran Strategis dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Meningkatnya Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan bencana
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan PB
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan BNPB Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama

Secara garis besarnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan hasil telaahan, bahwa secara garis besarnya, Rencana Strategis BNPB tahun 2020-2024, mempunyai keterkaitan erat atas rencana strategis 2024-2026 yang disusun oleh BPBD Prov. Kaltim, terutama pada sasaran strategis menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana menjadi tujuan Renstra BPBD 2024-2026 yaitu Penurunan Risiko Bencana dengan sasaran Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan berorientasi pada 7 fokus terhadap penaggulangan bencana melalui 3 (tiga) skema layanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebencanaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen

yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi - 312- Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi RTRW Provinsi Kaltim terhadap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Provinsi Kaltim. Perlu adanya sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kaltim yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan

kebijakan mengenai perencanaan pembangunan.

Terkait dengan telaahan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) berkenaan dengan risiko penurunan kualitas lingkungan hidup, KLHS Revisi RPJMD juga memotret permasalahan lingkungan hidup sesuai indikator yang bersesuaian dan berkontribusi dalam pengukuran IKLH dan terkait kebencanaan, diantaranya pada Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan), Tujuan 12 (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Beberapa hal yang menyebabkan masih kurang optimalnya dalam penanganan bencana yaitu antara lain :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing BPBD Kab/Kota di Kaltim bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kaltim;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Kaltim;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan

kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka risiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu, 1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan 2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.

BPBD Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil telaahan menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dan ketidakmampuan dalam mengintegrasikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) dengan hasil analisis risiko bencana (Peta Risiko Bencana).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2019-2023 antara lain adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1.1 Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- 1.2 Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- 1.3 Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan

masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;

1.4 Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;

1.5 Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;

1.6 Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas; Menyelesaikan rencana penanggulangan bencana yang didasarkan pada kajian risiko bencana dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

2.1 Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;

2.2 Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;

2.3 Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;

2.4 Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja

tak terduga dan dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;

- 2.5 Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
- 2.6 Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- 2.7 Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
- 2.8 Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;
- 2.9 Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- 2.10 Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan humas BNPB.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- 3.1 Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 3.2 Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 3.3 Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

Dari uraian analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategi menjadi faktor penghambat bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Penata Tata Ruang, Mitigasi, Peringatan Dini dan kesiapsiagaan.**

Belum optimalnya terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan risiko bencana, terinci sebagai berikut:

- 1.1 Belum terintegrasinya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kedalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Dokumen KRB merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian dan tingkat kerentanan pada suatu daerah, sedangkan dokumen RPB adalah dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana aksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 1.2 Belum terfasilitasi secara minimal tingkat kapasitas ketahanan dalam suatu daerah dalam penanggulangan bencana.

Kapasitas merupakan tingkat kesiapan yang dimiliki suatu daerah baik pemerintah maupun masyarakatnya.

Pengambil keputusan dan tindakan yang tepat, efektif dan efisien oleh pemerintahnya akan meminimalisir akibat dari kerugian, jika terjadi sebuah bencana dan diharapkan masyarakatnya tidak panik dalam menghadapi sebuah bencana. Tingkat kapasitas yang dimaksud meliputi :

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia, meliputi tingkat edukasi, informasi, skill atau keterampilan,
- b. Kapasitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana meliputi Alat Pelindung Diri, Saprass Penanggulangan Bencana, sistem peringatan dini, alat mitigasi bencana.
- c. Kapasitas kelembagaan meliputi, tingkat performa kelembagaan (tatakelola dan tatalaksana) yang handal.

2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Kedaruratan dan logistik dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Kaji Cepat, Status Keadaan Darurat, Penyelamatan dan Evakuasi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Pada fase tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

- 2.1 Tingkat profesionalisme yang rendah dalam melaksanakan tugas kedaruratan bencana di daerah meliputi kaji cepat, dan evakuasi terhadap kemampuan skill/keterampilan, pemahaman, dan kerjasama personil.
- 2.2 Belum optimalnya sinergi mitra kerja penanggulangan bencana antar Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

3. Belum Optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta lingkungan.

Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- 3.1 Basis data yang tidak termutakhirkan dan

teradministrasi secara reguler;

3.2 Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;

3.3 Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

3.4 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta

3.5 Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

4. Belum Optimalnya penyelenggaraan System informasi dan komunikasi PB dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap Pengumpul, Pengolah dan Penyaji/ Pendistribusian Informasi, Penerus Peringatan, Fasilitator Pengerahan Sumber Daya kebencanaan.

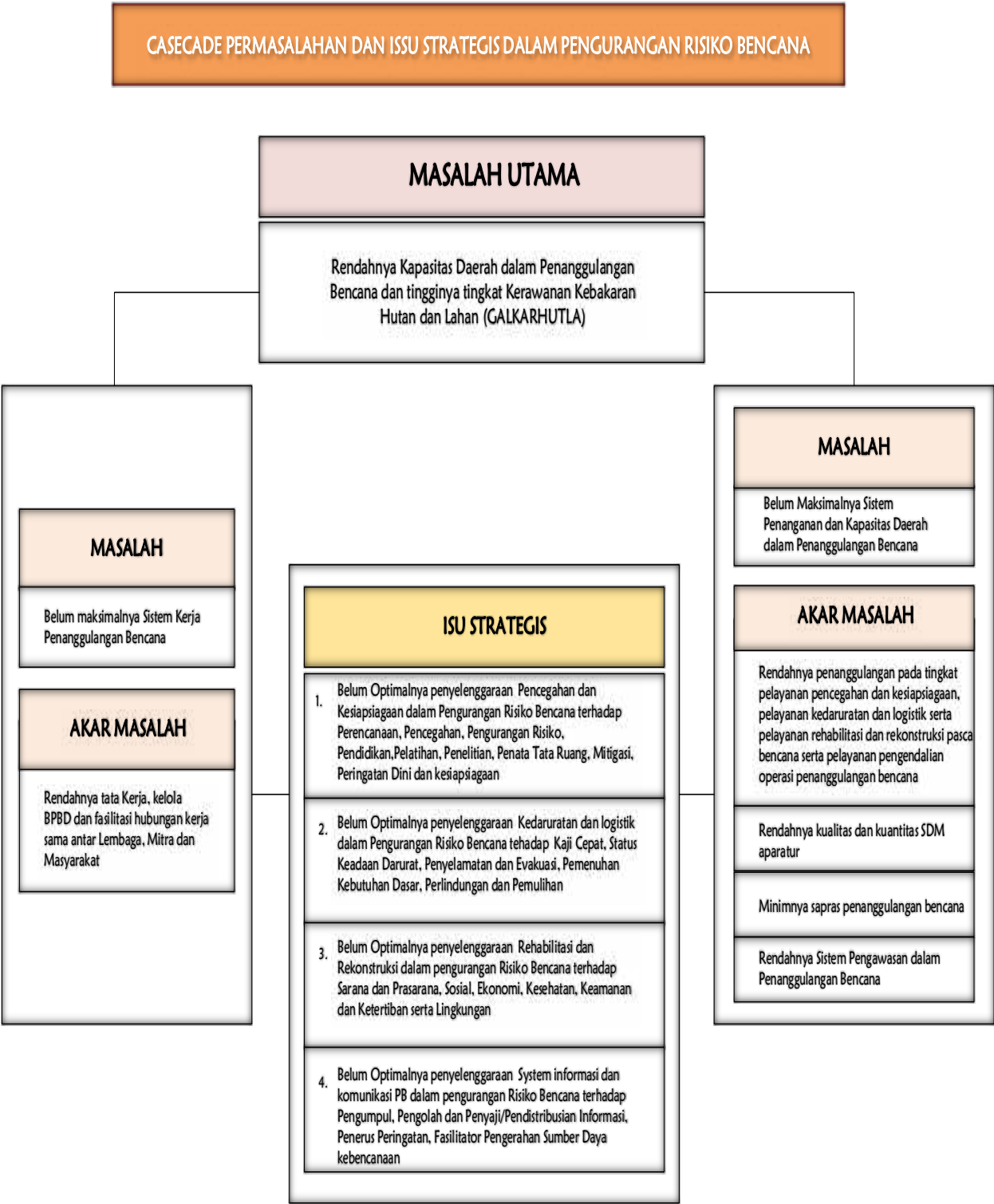
Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan system informasi terletak pada :

4.1 Status kelembagaan Pusat Pengendali Operasional (PUSDALOPS) yang belum dimiliki setiap BPBD, yang secara tata kerja belum ada namun secara tata laksana tetap dilakukan walupun belum bisa berjalan secara maksimal.

4.2 Belum memaksimalkan fungsi PUSDALOPS ini menjadi desiminasi informasi untuk aksi darurat, Penetapan status dan aktivasi Posko dan menjadi ruang rapat kepala daerah dalam penanggulangan bencana.

Adapun Permasalahan dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat di sajikan sebagaimana pada Gambar III-1 dibawah ini :

Gambar III-1 Casecade Permasalahan dan Isu Strategis dalam Pengurangan Risiko Bencana



3.5.2 Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis capaian Nilai Akuntabilitas ditahun sebelumnya dan hasil rekomendasi perbaikan, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dalam mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya dalam Kualitas Perencanaan pada Perumusan dan menetapkan perencanaan kinerja, terhadap kondisi kinerja yang kurang pada tingkat kepedulian, tingkat pemahaman serta komitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja. sistem kendali internal secara berjenjang, pemantauan secara berkala, dan analisa terhadap perbaikan perencanaan dan penganggaran.
2. Belum Optimalnya dalam Pengukuran Kinerja pada mekanisme yang baik terhadap Pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan serta pemanfaatan hasil dalam Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja.
3. Belum Optimalnya Laporan Kinerja yang disusun secara berkala dan disampaikan secara tepat waktu terhadap Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan dalam Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensif, dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya

4. Belum optimalnya dalam Evaluasi Kinerja terhadap tindak lanjut perbaikan dari penyelesaian permasalahan capaian kinerja terhadap Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti, dilakukan pendalaman, dan dilaksanakan pada seluruh pihak yang terkait.

Adapun Permasalahan dan Arah Kebijakan dalam mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas dapat di sajikan sebagaimana pada Gambar III-2 dibawah ini :

Gambar III-2 Casecade Permasalahan dan isu strategis dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang akuntabel dan memiliki layanan publik berkualitas



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, melalui upaya:

1. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi BPBD. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Lancarnya administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana.
4. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang.
5. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapiancaman dan resiko bencana.
6. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
8. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
9. Peringatan dini, mitigasi dan gladi / simulasi
10. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.
11. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik.
12. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar
13. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana
14. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan
15. Perbaikan darurat bencana.
16. Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Evakuasi dan relokasi korban bencana.
18. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.
19. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan segala kompleksitas permasalahan bencana yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

4.3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4.3.1 Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang (2024-2026) adalah dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) melingkupi **Tujuan 4** “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan **Sasaran 11** “Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel” sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel IV-1 Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Kaltim

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke		
			2024	2025	2026
1.	Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	144.47	143.47	142.47
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas pada table IV-1 yang telah di rumuskan, maka ada dua tujuan yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Pengurangan Risiko Bencana.
- Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-

risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Risiko tiap daerah berbeda-beda tergantung pada tingkat bahayanya, kerentanan dan kapasitas yang dimiliki pada suatu daerah, untuk mengukur tingkat risiko bencana maka dilakukan perhitungan indeks risiko bencana dengan menjumlahkan parameter bahaya (probabilitas dan intensitas), parameter kerentanan (Sosial, budaya, ekonomi, fasilitas dan lingkungan) dibanding dengan upaya peningkatan kapasitas pada suatu daerah (Ketahanan Daerah).

Jika berkaca pada tahun 2018, tingkat Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur berkisar pada 155.49 point atau masuk dalam katagori berisiko tinggi, dan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, indek risiko bencana sedikit mengalami penurunan 2 digit menjadi 153.28 point, dan di tahun 2022 indek risiko bencana turun secara signifikan berkisar pada penurun 6 digit menjadi 146.47 point. ini merupakan sebuah bentuk capaian kinerja atas komitmen pemerintah baik kabupaten/kota bersama dengan BPBD Prov. Kalimantan Timur serta pihak OPD terkait dalam upaya penurunan risiko bencana dengan strategi peningkatan ketahanan daerah pada 7 fokus orientasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Tingkat keberhasilan tersebut juga telah melampaui target akhir dari Rencana Strategis BPBD ditahun 2023 yang ditetapkan 150,49 Point, namun begitu, posisi tersebut tingkat risiko bencana provinsi Kaltim masih berada dalam zona Daerah yang Berisiko Tinggi.

Berdasarkan hasil rata-rata penurunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2019-2022), rata-rata penurunan indeks risiko bencana tidak kurang dari 1 point (2019-2021), walaupun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang begitu drastis hingga 6 poit, tetapi untuk penetapan target pada rencana strategis 2024-2026, BPBD Provinsi Kaltim pada Tujuan 1 Pengurangan Risiko Bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB), BPBD Provinsi Kaltim menargetkan penurunan IRB pertahun sebesar 1,0 point dan ditahun 2025 nanti, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur sudah berada dalam katagori berisiko sedang terhadap bencana antara 33 s.d 144 point.

2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Birokrasi telah memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik dan telah berperan menjadi instrumen politik praktis. Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Alokasi berbagai sumber daya publik tidak dapat berjalan tanpa adanya birokrasi. Dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas suatu pelayanan publik, maka semakin baik birokrasinya. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bergantung pada kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result Oriented government). pada peningkatan pada Kualitas Perencanaan, Pengukuran Kinerja Berjenjang dan Berkelanjutan, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal, atau output dan Outcome serta kinerja lainnya.

4.2.1. Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan sasaran rencana strategis untuk terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2024-2026 dengan 2 (dua) sasaran sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV-2 Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim

	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke		
			2024	2025	2026
	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,633	0,733	0,833
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran kinerjanya yang akan dilakukan :

1. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan idikatornya adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Kapasitas Daerah merupakan sebuah element penting untuk mengukur tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Kapasitas daerah dalam implementasi penerapannya mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya, maka tingkat kapasitas baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat, (Kelembagaan/Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Saprass Penanggulangan Bencana yang tersedia) menjadi fokus utama bagi BPBD Prov. Kaltim dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan sub kegiatan serta aktivitas yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Sebagai target peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, BPBD Prov. Kaltim, dalam menurunkan indeks risiko bencana menargetkan peningkatan

indeks Ketahanan Daerah 0,1 pertahun, dan pada tahun 2025, diharapkan indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Timur berada dalam katagori zona berisiko sedang (33-144 point). Untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas daerah, strategi yang akan dilakukan oleh BPBD Prov. Kaltim adalah dengan peningkatan kapsitas daerah di 10 Kabupaten/Kota yang terfokus pada 7 (tujuh) peningkatan penanggulangan bencana diantaranya adalah ;

a. Perkuatan pada Kebijakan Dan Kelembagaan.

Pengukuran melingkupi 2 instrumen yaitu Kebijakan yang meliputi Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana (PB), BPBD, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Forum PB, Tata ruang berbasis PB dan instrument Kelembagaan meliputi BPBD dan Forum PB.

b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu.

Pengukuran meliputi Peta Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana.

c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik.

Pengukuran melingkupi 3 instrumen yaitu Informasi yang meliputi sarana penyampaian, PUSDALOPS dan Sosialisasi, Bulan PRB, instrumen Diklat yang meliputi Pelatihan PB dan Gladi PB per ancaman, dan instrumen ketiga Logistik yang meliputi Managemen logistik Peralatan.

d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.

pengukuran melingkupi tata ruang berbasis PB, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Rumah Sakit / Puskesmas Aman Bencana, dan Desa Tangguh Bencana (Destana).

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana.

Pengukuran melingkupi 2 instrumen yaitu Pencegahan yang meliputi Gerakan PRB, Penegakan Hukum dan Restorasi Lahan Gambut, dan instrument Mitigas meliputi Bangunan Tahan Gempa Bumi, Bangunan Gelombang

Ekstrem, Revitalisasi tanggul/embung/taman kota.

f. Perkuatan Kesiapsiagaan.

Pengukuran melingkupi 2 instrumen yaitu Kesiapsiagaan yang meliputi Rencana Kontijensi per ancaman, Peringatan dini per ancaman, Rencana evakuasi per ancaman, jalur dan tempat evakuasi sementara dan instrumen kedua adalah Penanganan Darurat Penentuan status tanggap darurat, sistem komando operasi tanggap darurat, kaji cepat bencana, penyelamatan dan pertolongan korban (SAR), perbaikan darurat, dan bantuan masyarakat terjauh.

g. Penanganan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem pemulihan bencana.

Pengukuran melingkupi pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, dan pemulihan livelihood.

Gambar IV-1 Strategi Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah



2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Memperhatikan dari Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, BPBD merupakan 1 dari 10 cluster utama yang perlu ditingkatkan, dimana target pada tahun tersebut, nilai SAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 masuk dalam kategori “BAIK” (B) agar diubah menjadi “Sangat Baik” (BB) untuk mendukung nilai SAKIP Provinsi yang akan ditargetkan menjadi “Memuaskan” (A). Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2022, bahwa yang menjadi fokus bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tersebut adalah dengan meningkatkan

kinerja melalui :

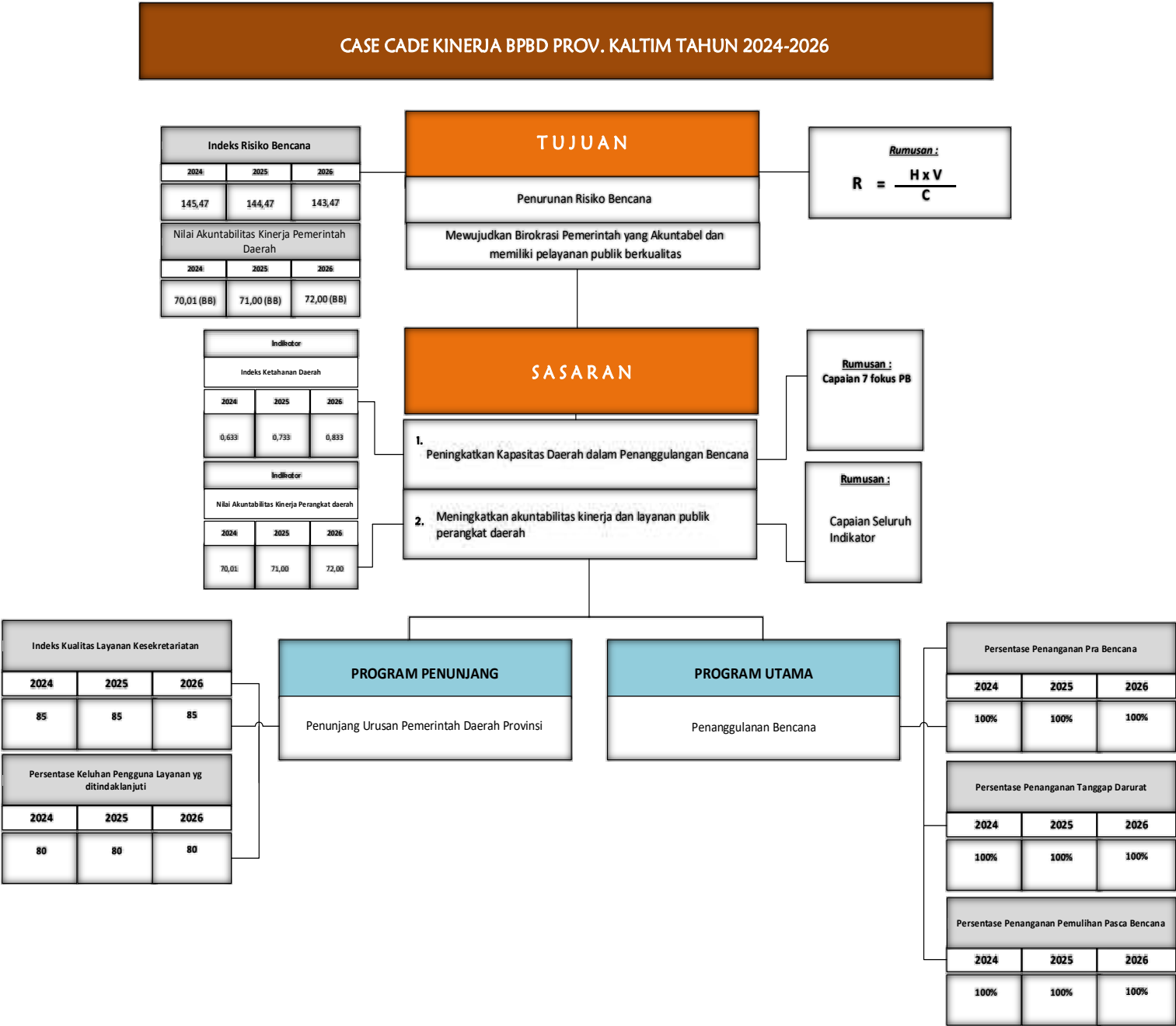
- a. Meningkatkan Kualitas perencanaan,
BPBD Prov. Kaltim menyusun dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja serta mengacu pada peraturan gubernur nomor 42 tahun 2016.
- b. Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan,
Pengukuran Kinerja melalui perumusan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja dan ini menjadi salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja, dan menjadi dasar untuk memberikan reward dan punishment kepada aparatur yang melaksanakannya.
- c. Laporan Kinerja,
Laporan kinerja memuat informasi mengenai capaian realisasi kinerja pada target yang telah ditetapkan pada kegiatan dan sub kegiatan, serta berisi informasi mengenai analisis keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian kinerja. Laporan Kinerja juga disampaikan secara tepat waktu dan sebagai dasar informasi untuk evaluasi.
- d. Evaluasi Kinerja Internal, atau output dan Outcome serta kinerja lainnya.
Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengendalian untuk memastikan tercapainya sasaran pada sebuah program, kegiatan maupun sub kegiatan. Data hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan menjadi bahan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan(ongoing), evaluasi hasil,-output-outcome (ex-post) maupun evaluasi pra-rencana(exante). Evaluasi itu sendiri menjadi dasar bagi pimpinan untuk menentukan langkah -langkah kebijakan selanjutnya.

Gambar IV-1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Layanan Publik



Untuk mewujudkan sebagaimana tujuan/sasaran yang telah ditetapkan maka ada 2 (dua) Program yang akan dijalankan ditahun 2024-2026, yaitu Program Utama adalah Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagaimana gambar IV-1 dibawah ini.

Gambar IV-2 Case Cade Kinerja Tujuan dan Sasaran



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencakup kebijaksanaan organisasi, program operasional organisasi dan kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Peningkatan SDM dengan melakukan optimalisasi pendidikan, pelatihan, bimtek.
3. Peningkatan standarisasi penyelenggaraan penanggulanganbencana.
4. Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usahadalam penanggulangan bencana.
8. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasibencana.
9. Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana.
10. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan terhadap dampak bencana.
11. Optimalisasi peran pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi dankonstruksi pada penanggulangan bencana.

Adapun langkah langkah strategi dan arah kebijakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pada Tujuan 1 (satu) “pengurangan risiko bencana” dan Tujuan 2 (dua) adalah “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas” dengan sasaran 1 “Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Benacana” dan Sasaran 2 adalah “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah” pada renstra 2024-2026 BPBD Prov. Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

5.1.1 Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Kebencanaan pada Tujuan 1 dan Sasaran 1

Langkah- langkah Strategis sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di internal Perangkat Daerah Khusus nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untukmewujudkan visi dan misi yang tertuang di RPD 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur. Langkah – langkah strategi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel V-1 :

Tabel V-1 Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Bencana

LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS	OUTPUT (CAPAIAN)
Pemetaan Daerah Rawan Bencana	▪ Tersusunya Kajian dan Peta Risiko Bencana ▪ Peta Simulasi Bencana
Membuat Perencanaan Penanggulangan Bencana	susun nya Dokumen dan Langkah-langkah sebagai berikut : ▪ RPB (Rencana PenanggulanganBencana) ▪ Rencana Mitigasi ▪ Rencana Kontijensi ▪ Renops ▪ Rencana Pemulihan Dini dan RR (Rehabilitasi dan Rekontruksi) Pascabencana
Manajemen Bencana BerbasisKomunitas	• Peningkatan KIE • Penguatan Sistem PeringatanDini • Pelatihan dan Simulasi • Penyediaan Sarpras • Penyiapan Sistem PelaporanInformasi dan Data Bencana

Keterlibatan Multipihak Dalam PB	• Alternatif Pembiayaan PB Diluar APBN/ APBD • Kerjasama Dengan Dunia Usaha • dan Akademisi
Penguatan Resiliensi Badan Penanggulangan Bencana Pada Program Penanggulangan Bencana	• Penguatan Sinergitas PB • Efisiensi Program PB

5.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, BPBD mencoba menempuh berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Keterpaduan program dan anggaran.
2. Melengkapi sarana dan prasarana.
3. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasiperundang-undangan.
4. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraanpenanggulangan bencana.
6. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.
7. Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana.
8. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.
9. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.
10. Pengkajian dan penentuan status darurat bencana.
11. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
12. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsikorban bencana.
13. Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana.
14. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
15. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Strategi dan Arah kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD Prov. Kaltim terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana dalam kurun waktu tiga tahun mendatang (2024-2026) meliputi :

1. Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Strategi : Penguatan Sistem Strategi dan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan Ketahanan Bencana di Daerah Rawan;

Kebijakan : Peningkatan Sistem dan Strategi Pencegahan Yang Andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Media, yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana;

2. Urusan Kedaruratan dan Logistik

Strategi : Penguatan Kedaruratan dan Logistik dalam koordinasi, komando dan pelaksana penanganan darurat, penguatan tata kelola logistik dan peralatan daerah;

Kebijakan : Peningkatan Layanan darurat bencana yang cepat, tepat, terkoordinasi, penyediaan logistik dan peralatan layanan darurat bencana penanggulangan bencana serta pengembangan sistem jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.

3. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Strategi : Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Kebijakan : Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas;

4. Urusan Pusat Pengendalian Operasional

Strategi : Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana

Kebijakan : Peningkatan layanan distribusi informasi, komunikasi dan koordinasi guna mendukung penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel V-2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan 1, Sasaran 1

Tujuan		Pengurangan Risiko Bencana		
Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kapasitas Daerah dalamPenanggulan n Bencana	1. Penguatan Sistem Strategidan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan ketahanan bencana didaerah rawanbencana.	1. Peningkatan sistem dan strategi pencegahan Yang andal,Inovatif, Kolaboratif danImplementatif dan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembagausaha, masyarakat, Akademisi dan media, lembaga usaha, yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	
	2. Penguatan Kedaruratan dan Logistikdalam koordinasi, Dan komandopenanganan darurat, serta Penguatan TataKelola Logistikdan Peralatan Daerah.	2. Peningkatanlayanan darurat bencana yangcepat, tepat, danterkoordinasi, Penyediaan logistik danperalatankatan layanan daruratbencana penanggulangan bencana sertapengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dankarakteristik wilayah	1. PelayananInformasi RawanBencana Provinsi	Persentase Pelayanan InformasiRawan Bencana Provinsi
	3. Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	3. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BENCANA guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas	2. PelayananPencegahan danKesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	4. Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana	4. Peningkatan layanan distribusi informasi, komunikasi dan koordinasi guna mendukung penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	5.	5.	4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

5.1.2 Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Kebencanaan pada tujuan 2 dan sasaran 2

Langkah- langkah Strategis sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pada tujuan 2 dan sasaran ke-2 sebagaimana yang tertuang pada tabel V-3 dibawah ini :

Tabel V-3 Langkah-langkah Strategis Dalam mewujudkan Birokrasi pemerintah yang Akuntabel dan memeiliki layanan pemerintah yang berkualitas

LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS	OUTPUT (CAPAIAN)
Penguatan Sistem Kendali Internal secara berjenjang dan dipantau secara berkala	▪ Tersusunya Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran	▪ Tersusun nya Perjanjian Kinerja Tk. Esselon III, Esselon IV/ yang disetarakan dan IKI Staf ▪ Tersusunnya standarisasi pemberian reward dan punishment atas capaian kinerja
Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan	Tersusunnya laporan yang berkualitas : • Capaian Kinerja Output dan Penyerapan Anggaran • Hambatan dan Permasalahan dan target kinerja tahun berikutnya
Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti	• Rekomendasi Tindak lanjut permasalahan, Tanggapan, serta bukti evident/bukti penyelesaian

5.3 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, BPBD mencoba menempuh berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Kualitas Perencanaan :

Peningkatan analisa perbaikan perencanaan dalam membangun kepedulian, pemahaman dan berkomitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja;

2. Pengukuran Kinerja :

Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja;

3. Laporan Kinerja

Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensif, dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efesiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya;

4. Evaluasi Kinerja

Peningkatan Evaluasi inetrnal dilaksanakan sesuai standar, dilakukan pendalaman, dilaksanakanpada seluruh pihak yang terkait.

Tabel V-4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan2 , Sasaran 2

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah		1. Penguatan sistem kendali internal secara berjenjang, dipantau secara berkala	1. Peningkatan analisa perbaikan perencanaan dalam membangun kepedulian, pemahaman dan berkomitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu
		2. Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawab abkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran.	2. Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/ solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		3. Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan	3. Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensip,dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya	4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor
		4. Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti	4. Peningkatan Evaluasi inetrnal dilaksanakan sesuai standar, dilakukan pendalaman, dilaksanakanpada seluruh pihak yang terkait	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor
				8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai langkah operasionalisasi strategi dan arah kebijakan maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang telah ditetapkan. Berikut program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 52 Tahun 2021, untuk menyusun RPD dan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan transisi jangka menengah daerah, simultan dengan penyusunan RKPD dan RENJA 2024.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, secara garis besar dibagi menjadi 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penanggulangan Bencana.

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini memiliki 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi bagi Sekretariat BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dengan 2 (dua) indikator kinerja adalah Indeks Kualitas Layanan dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindak lanjuti dengan masing masing target satuannya adalah persentase. Untuk menghitung capaian kedua indikator tersebut melalui 2

skema yaitu :

1. Indeks Kualitas Layanan

Indeks Kualitas layanan yang dihitung adalah melalui capaian permasing masing kegiatan dan sub kegiatan dimana setiap target yang telah ditetapkan diharapkan dapat seluruhnya dilaksanakan agar capaian persentase kualitas layanan dapat diraih secara maksimal.

2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan

Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindak lanjuti adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan yang diberikan melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.1.2 Program Penanggulangan Bencana

Program ini memiliki 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi bagi Bidang -Bidang lingkup BPBD Prov. Kaltim, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk menghitung capaian ketiga indikator tersebut melalui 3 (tiga) skema yaitu :

1. Presentase Penangana Pra Bencana.

Presentase Penangana Pra Bencana terhadap Kualitas layanan yang dihitung berdasarkan pada Jumlah persentase Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi kegiatan/sub kegiatan pra bencana dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi kaltim, meliputi kegiatan pada Layanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan 1 Sub Kegiatan, Layanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan 4 Sub Kegiatan, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan 6 Sub kegiatan. Melalui layanan tersebut BPBD Prov. Kaltim menargetkan memfasilitasi pada seluruh 10 kabupaten/kota yang berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur, agar capaian penanganan pra bencana dapai dicapai 100%.

Konsep Outcome mengukur persentase penanganan pra

Bencana dengan perhitungan persentase sbb:

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{Kab/Kota Yang terfasilitasi Penanganan Pra Bencana}}{\sum \text{Kab/Kota di Wilayah Provinsi}} \times 100\%$$

2. Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pada layanan ini BPBD Prov. Kaltim mengalokasikan anggaran sebagai bentuk antisipasi jika terjadi bencana, capaian kinerja ini harus dipahami secara terbalik dimana jika suatu layanan tidak tercapai sesuai target maka sudah dipastikan bahwa perencanaan maupun pelaksanaan, serta dan evaluasi dan pelaporan tidak berjalan sesuai yang diinginkan, berbeda dengan hal dengan layanan ini, tidak tercapainya target yang ditetapkan menjadi sebuah ukuran keberhasilan bagi daerah dalam meningkatkan ketahanan daerahnya terhadap bencana .

Layanan penanganan darurat yang mendapat fasilitas pada kegiatan/sub kegiatan Penanganan Darurat atau kejadian bencana diperuntukan bagi daerah yang mengalami bencana di provinsi kaltim meliputi kegiatan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan 3 Sub Kegiatan. Apabila kejadian bencana yang ditangani melebihi target yang ditetapkan maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan penanganannya melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) provinsi.

Konsep Outcome mengukur penanganan Tanggap Darurat dengan perhitungan persentase sbb:

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{Kab/Kota Yang terfasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana}}{\sum \text{Kab/Kota di Wilayah Provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$$

3. Presentase Pemulihan Pasca Bencana

Persentase Pemulihan Pasca Bencana dilakukan pada kabupaten/kota yang terfasilitasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pada kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana di sub kegiatan penanganan pasca

bencana provinsi. Sebagai lokus pada kegiatan ini adalah pada wilayah yang telah terjadi dampak kejadian bencana, dan disesuaikan dengan besaran pagu anggaran yang telah dialokasikan, artinya tidak semua daerah yang mengalami bencana menjadi prioritas untuk dilakukan pemulihan tetapi lebih kepada prioritas menjadi pilihan.

Konsep Outcome mengukur Pemulihan Pasca Bencana dengan perhitungan persentase sbb:

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{Kab/Kota Yang terfasilitasi Penanganan Pasca Bencana}}{\sum \text{Kab/Kota di Wilayah Provinsi dalam rencana penanganan Pasca Bencana}} \times 100\%$$

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Renstra tahun 2024–2026 berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana terangkum pada tabel VI-1 di bawah ini :

Tabel. VI-1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1 Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
1.1.2 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD
1.1.3 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
1.1.4 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
1.1.5 Penyusunan koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD
1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1 Gaji pokok dan tunjangan pegawai

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.2.7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.3.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.3.5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.4.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.4.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5.4 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor

1.6.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

1.7.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.7.4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

1.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Penanggulangan Bencana

2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

2.2.2 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

2.2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.4 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

2.2.5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.6 Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana

2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

2.3.2 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2.3.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.4.1 Penanganan Pasca Bencan Provinsi

2.4.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi

2.4.3 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah

2.4.4 Penguatan kelembagaan bencana daerah

2.4.5 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB

2.4.6 Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

2.4.7 Pelatihan keluarga tanggap bencana

6.2 Rencana Pendanaan

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Pembiayaan indikatif rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPD Prov. Kaltim 2024-2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada Tabel 6.2, sebagai berikut :

Tabel VI-2 Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ S ub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian PadaTahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi KinerjaAkhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengangg ungjawab	Lokasi
						Tahun-n (2024)		Tahun-n+1 (2025)		Tahun-n+2 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA							27,300,000,000		26,136,000,000		27,497,000,000			
I.	1. Penurunan Risiko Bencana	Peningkatan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesektarian	100	85	19,735,450,000	85	18,451,450,000	85	19,812,450,000	85	Sekretariat	Prov. Kaltim
	2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah		Indeks keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	80,46	80	564,550,000	80	564,550,000	80	564,550,000	80	Sekretariat	Prov. Kaltim
1			Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100%	1,073,494,500	100%	1,073,494,500	100%	1,073,494,500	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	6 dokumen	338,799,500	6 dokume n	338,799,500	6 dokumen	338,799,500	18 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.2			Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA	-	1 dokumen	76,430,000	1 dokumen	76,430,000	1 dokumen	76,430,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

1.3			Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan RKA	-	1 dokumen	75,760,000	1 dokumen	75,760,000	1 dokumen	75,760,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.4			Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	-	1 dokumen	3,620,000	1 dokumen	3,620,000	1 dokumen	3,620,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.5			Penyusunan koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	-	1 dokumen	3,540,000	1 dokumen	3,540,000	1 dokumen	3,540,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.6			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	5 Laporan	575,345,000	5 Laporan	575,345,000	5 Laporan	575,345,000	15 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.7			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	3 Laporan	3 Laporan	564,550,000	3 Laporan	564,550,000	3 Laporan	564,550,000	9 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100 %	100%	11,217,803,165	100%	11,295,995,165	100%	11,617,080,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.1			Gaji pokok dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	50 orang/ Bln	10,600,723,165	50 orang/ Bln	10,678,915,165	50 orang/ Bln	11,000,000,000	150 Orang	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	305,280,000	12 Dokumen	305,280,000	12 Dokumen	305,280,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

2.3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	162,500,000	12 Dokumen	162,500,000	12 Dokumen	162,500,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	-	12 Dokumen	146,300,000	12 Dokumen	146,300,000	12 Dokumen	146,300,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.5			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	-	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,000,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laopran Keuangan	-	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.7			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	-	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.1			Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

3.3			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.4			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	9,360,000	1 Dokumen	9,360,000	1 Dokumen	9,360,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.5			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100%	1,270,585,700	100%	1,270,585,700	100%	1,270,585,700	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	933 Unit	8 paket	154,503,100	8 paket	154,503,100	8 paket	154,503,100	8 paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	14 Paket	261,680,000	14 Paket	261,680,000	14 Paket	261,680,000	66 Paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.3			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 OT	143 Laporan	792,600,000	143 Laporan	792,600,000	143 Laporan	792,600,000	143 Laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.4			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	6 Dokuemn	5,225,000	6 Dokuemn	5,225,000	6 Dokuemn	5,225,000	18 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

4.5			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	2,858,400	1 paket	2,858,400	1 paket	2,858,400	3 paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.6			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	7 Paket	53,239,200	7 Paket	53,239,200	7 Paket	53,239,200	21 Paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.7			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	480,000	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
5			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
5.1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
5.2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
5.3			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	-	100%	1,854,802,000	100%	492,610,000	100%	1,532,525,165	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim

				atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
6.1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4 Unit	1,362,192,000	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
6.2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	492,610,000	1 Unit	492,610,000	2 Unit	1,532,525,165	4 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	100 %	100%	3,461,515,460	100%	3,461,515,460	100%	3,461,515,460	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
7.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	571,038,900	12 Laporan	571,038,900	12 Laporan	571,038,900	36 Laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
7.2			Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,888,886,560	12 Laporan	2,888,886,560	12 Laporan	2,888,886,560	36 Laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
7.2			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 laporan	1,590,000	1 laporan	1,590,000	1 laporan	1,590,000	3 laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	800,501,000	100%	800,501,000	100%	800,501,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim

8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	44 Unit	477,619,000	44 Unit	477,619,000	44 Unit	477,619,000	132 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
8.2			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	173 Unit	66,822,500	173 Unit	66,822,500	173 Unit	66,822,500	519 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
8.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	506 m2	1 Unit	252,942,500	1 Unit	252,942,500	1 Unit	252,942,500	3 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
8.4			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	2 unit	3,117,000	2 unit	3,117,000	2 unit	3,117,000	6 unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
II.			PROGRAM PENANGGULAN BENCANA	Presentase Penangana Pra Bencana	-	100%	2,500,000,000	100%	2,620,000,000	100%	2,620,000,000	100%	Bid PK	Prov. Kaltim
				Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	Bid. KL	Prov. Kaltim
				Presentase Pemulihan Pasca Bencana	-	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	Bid. RR	Prov. Kaltim
1			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kab/kota	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%		Prov. Kaltim

1.1			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	-	20 orang	200,000,000	20 orang	200,000,000	20 orang	200,000,000	60 orang	Bid PK	Prov. Kaltim
2			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1,800,000,000	100%	1,920.000.000	100%	1,920.000.000	100%		Prov. Kaltim
2.1			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	-	20 Orang	200,000,000	20 Orang	200,000,000	20 Orang	200,000,000	60 orang	Bid PK	Prov. Kaltim
2.2			penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12 Desa/Kel	2 kawasan	499,000,000	2 kawasan	500,000,000	2 kawasan	500,000,000	6 kawasan	Bid PK	Prov. Kaltim
2.3			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatandiri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	-	0 unit	1,000,000	60 unit	120,000,000	60 unit	120,000,000	120 unit	Bid PK	Prov. Kaltim
2.4			gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	-	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	6 Laporan	Bid PK	Prov. Kaltim
2.5			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Laporan	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	600,000,000	36 Dokumen	Bid. KL	Prov. Kaltim

2.6			Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 Orang	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	90 orang	Bid. KL	Prov. Kaltim
3			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100%	1,600,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,600,000,000	100%		Prov. Kaltim
3.1			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	10 Laporan	500,000,000	10 Laporan	500,000,000	10 Laporan	500,000,000	10 Laporan	Bid. KL	Prov. Kaltim
				Waktu Penanganan Darurat Penanganan Bencana	-	60 menit – 24 Jam		60 menit – 24 Jam		60 menit – 24 Jam		60 menit – 24 Jam		
3.2			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	398 Orang	800 Orang	800,000,000	800 Orang	800,000,000	800 Orang	800,000,000	800 Orang	Bid. KL	Prov. Kaltim
3.3			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	-	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	Bid. KL	Prov. Kaltim
4			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana	100 %	100%	3,400,000,000	100%	3,400,000,000	100%	3,400,000,000	100%		Prov. Kaltim

4.1			Penanganan Pasca Bencan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Laporan	5 Dokumen	2,000,000,000	5 Dokumen	2,000,000,000	5 Dokumen	2,000,000,000	15 Dokumen	Bid. RR	Prov. Kaltim
4.2			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	-	3 Laporan	600,000,000	3 Laporan	600,000,000	3 Laporan	600,000,000	9 Laporan	Bid PK	Prov. Kaltim
4.3			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	-	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	3 Dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.4			Penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	-	2 dok	200,000,000	2 dok	200,000,000	2 dok	200,000,000	6 dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.5			kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	-	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	3 dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.6			pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi kebencanaan	1 Aplikasi	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	3 dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.7			pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	-	60 keluarga	200,000,000	60 keluarga	200,000,000	60 keluarga	200,000,000	180 keluarga	Bid PK	Prov. Kaltim

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Capaian

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat 55 Sub Kegiatan dari 12 kegiatan dalam 2 program yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024-2026 dengan pendanaan dari dana pemerintah APBD. Beberapa kegiatan akan dirinci kembali dalam sub-kegiatan atau tahapan yang nantinya menjadi substansi dari Rencana Kerja (Renja), dan menjadi bagian dari aktivitas Bidang di BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel VII-1 Indikator Kinerja BPBD Prov. Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	Satuan
Tujuan 1 : Penurunan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point
Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Point
Tujuan 2 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Point
Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Point

Tabel VII-2 Indikator Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan
1. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	- Indeks kualitas layanan kesektarian	%
	- Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%
1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok
1.1.2 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA	Dok
1.1.3 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan RKA	Dok
1.1.4 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	Dok
1.1.5 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Dok
1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lap
1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Lap
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	%
1.2.1 Gaji pokok dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang
1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok
1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	Dok
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dok
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Dok
1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laopran Keuangan	Lap
1.2.7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Dok
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	Paket
1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang
1.3.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok
1.3.5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok

1.4 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%
1.4.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok
1.4.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok
1.4.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	%
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan	Paket
1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap
1.5.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dok
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	%
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	%
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Lap
1.7.2	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disedikan	Lap
1.7.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit
1.8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau Direhabilitasi	Unit

1.8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Presentase Penanganan Pra Bencana	%
		Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana	%
2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	%
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/KotaPembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Orang
2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	%
2.1.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah warga negara dan aparatur yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	Orang
2.1.3	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
2.1.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kesiap)	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	Unit
2.1.5	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Lap
2.1.6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Lap
2.1.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan PenangananAwal Darurat Bencana	Orang
2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%
2.3.1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Lap
		Waktu Penanganan Darurat Penanganan Bencana	Menit/Jam
2.3.2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	Lap
2.3.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	
2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%
2.4.1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PB)	Kab/Kota
2.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Lap

2.4.3	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	Dok
2.4.4	penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	Dok
2.4.5	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Dok
2.4.6	pengelolaan dan pemanfaatan SIK	Jumlah data dan informasi kebencanaan	Keluarga
2.4.7	pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	

7.2. Target Kinerja

Target capaian kinerja yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini bertujuan untuk menilai kemampuan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila tingkat capaian kinerja bisa tercapai sesuai rencana, maka Bidang-bidang memiliki kinerja yang baik dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang ada. Namun jika sebaliknya, maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur hendaknya segera melakukan evaluasi mendasar terhadap permasalahan dalam perencanaan program, kegiatan, pendanaan, sumberdaya penyelenggara pelayanan, prosedur, mekanisme pelayanan, dan hal-hal lainnya yang saling terkait dengan pencapaian target kinerja. Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini, beberapa target capaian kinerja yang berasal dari perencanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel – tabel dibawah ini :

Tabel. VII-3 Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Penurunan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	147.71	144.47	143.47	142.47	142.47

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.433	0.633	0.733	0.833	0.833
Tujuan 2 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	65,49	70,01	71,00	72,00	72,00
Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	65,49	70,01	71,00	72,00	72,00

Tabel VII-4 Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2022-2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja akhir periode
			2022	2023	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana		95%	100%	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100%	100%	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		10 dokumen	10 dokumen	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja		10 laporan	5 laporan	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		3 laporan	3 laporan	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan		12 dokumen	12 dokumen	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dokumen	12 dokumen	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja akhir periode
			2022	2023	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah barang peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor		933 Unit	25 unit	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor		12 laporan	12 laporan	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		262 OT	50 OT	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 laporan	12 laporan	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan gaji Non PNS dan BPJS		12 laporan	12 laporan	
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		100%	100%	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional		23 Unit	10 unit	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor		50 Unit	50 unit	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana		506 m2	3398 m2	
PROGRAM PENANGGULANGA BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana		82.67 %	100%	
Playanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase pelayanan pemenuhan informasi kebencanaan		100 %	100%	
Penyusunan kajian risiko bencana provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana		1 dokumen	1 dokumen	
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan pendataan, kaji cepat penanggulangan bencana dan penyebaran informasi kebencanaan		12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Pilot Drone tersertifikasi		8 orang		
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk		12 Desa / Kelurahan	13 Desa / Kelurahan	
Penanganan pasca bencana provinsi	Jumlah laporan penanganan pasca bencana		5 laporan	5 laporan	
Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah peserta pembekalan tim reaksi cepat (TRC)		30 Orang	30 orang	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat Penanggulangan bencana		100%	100%	
Respon cepat penanganan darurat bencana	Jumlah laporan respon cepat penanganan bencana		12 laporan	12 laporan	
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah laporan logistik penanggulangan bencana yang Tersedia		12 laporan	12 laporan	
	Jumlah kebutuhan logistik Penanggulangan bencana yang tersedia		398 bahan logistik		
Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan dasar penanggulangan bencana		100%	100%	
Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah pengembangan aplikasi informasi kebencanaan		1 aplikasi	1 aplikasi	

Tabel VII-5 Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD

Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
1. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	- Indeks kualitas layanan kesektariatan	100	85	85	85	85
	- Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	80,46	80	80	80	80
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	18 Dokumen
1.1.2 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.3 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan RKA	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.4 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.5 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Dokumen
1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Dokumen
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100 %	100%	100%	100%	100%
1.2.1 Gaji pokok dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	50 orang/ Bln	50 orang/ Bln	50 orang/ Bln	150 Orang
1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
1.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	100%	100%	100%	100%
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
1.3.2 Pendidikan dan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan	0	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 orang
1.3.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
1.3.5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100%	100%	100%	100%
1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	933 Unit	10 Paket	10 Paket	10 Paket	30 Paket
1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22 Paket	22 Paket	22 Paket	66 Paket
1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 OT	145 Laporan	145 Laporan	145 Laporan	435 Laporan
1.4.4 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0	6 Dokuemn	6 Dokuemn	6 Dokuemn	18 Dokumen
1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	7 Paket	7 Paket	7 Paket	21 Paket
1.4.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	100%	100%	100%	100%
1.5.1 .Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.5.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.5.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit
1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	4 Unit
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	100 %	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	12 Laporan	36 Laporan

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan			Laporan		
1.7.2 Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan
1.7.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saranadan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	23 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	132 Unit
1.8.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	173 Unit	173 Unit	173 Unit	519 Unit
1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	506 m2	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.8.4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	2 unit	2 unit	2 unit	6 unit
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Pra Bencana	0	100%	100%	100%	100%
	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	0	100%	100%	100%	100%
	Presentase Pemulihan Pasca Bencana	0	100%	100%	100%	100%
2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	0	100%	100%	100%	100%
2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	20 orang	20 orang	20 orang	60 orang
2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah warga negara dan aparatur yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	60 orang
2.2.2 penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12 Desa/Kel	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	6 kawasan
2.2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kesiap)	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	-	0 unit	60 unit	60 unit	120 unit
2.2.4 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
2.2.4 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
2.2.5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan PenangananAwal Darurat Bencana	30 Orang	30 orang	30 orang	30 orang	90 orang
2.3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	100%	100%	100%	100%
2.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
		-	60 meint - 12 Jam	60 meint - 12 Jam	60 meint - 12 Jam	60 meint - 12 Jam
2.3.2 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	398 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang
2.3.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	100%	100%	100%	100%
2.4.1 Penanganan Pasca Bencan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen
2.4.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	0	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan
2.4.3 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok
2.4.4 Penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	0	2 dok	2 dok	2 dok	6 dok
2.4.5 kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	0	1 dok	1 dok	1 dok	3 dok
2.4.6 pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi kebencanaan	1 Aplikasi	1 dok	1 dok	1 dok	3 dok
2.4.7 pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	60 keluarga	60 keluarga	60 keluarga	180 keluarga

7.3. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi menjadi pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan parapihak terkait atau para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan itu, keseriusan dalam mengimplementasikan capaian program dan/atau kegiatan akan dinilai. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berguna sebagai sarana mendapatkan penilaian objektif dari parapihak, termasuk kemungkinan mendapatkan dukungan tambahan pada pelaksanaan program dan/atau kegiatan selanjutnya dari parapihak. Upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar bagi pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim secara keseluruhan melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) yang akan menjadi masukan bagi proses telaah (review) dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim secara keseluruhan merupakan hasil kolektif dari kinerja masing-masing seksi dari ketiga bidang yang ada di BPBD Prov. Kaltim. Dengan memperhatikan indikator setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, akan dilakukan pemantauan (monitoring) secara berkala atas capaian masing-masing indikator yang telah dirumuskan.

7.3.1 Sebagai bagian siklus perencanaan strategis perangkat daerah, kegiatan pemantauan (monitoring) secara berkala merupakan hal mutlak dalam rangka pemenuhan setiap capaian yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026. Secara lebih substantif lagi, hasil pemantauan berguna untuk menilai efektifitas dan efisiensi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan tentunya menjadi alat utama dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan atau rencana pada periode selanjutnya. Pelaksanaan monitoring ditetapkan setiap Triwulan (tiga bulan) dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang diperoleh saat ini sehingga tidak terlalu terlambat jika perlu dilakukan penanganan terhadap capaian kinerja yang tidak sesuai

harapan. Data capaian dilakukan dengan menghimpun secara cermat data yang dibutuhkan untuk setiap indikator dari setiap bagian atau unit kerja sebagai para eksekutornya. Monitoring merupakan tahapan penting dalam rangka memperoleh hasil evaluasi secara obyektif dan terpercaya. Kerjasama antar Bidang sangat penting karena seringkali program/kegiatan di tingkat operasional saling komplementer.

Hasil monitoring capaian target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Timur periode 2024-2026 dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan sesuai bahkan melebihi dari target kinerja yang direncanakan serta tidak ada masalah dalam pencapaian target tersebut, sehingga realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya dapat diteruskan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

2. Belum Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan atau ditemukan masalah yang menghambat pencapaian target tersebut. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun selanjutnya bisa dilakukan setelah dilakukan perbaikan strategi kerja.

3. Tidak Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan jauh lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan karena adanya permasalahan yang sangat mendasar dan sulit diatasi meskipun dengan perbaikan strategi kinerja atau strategi lain. Pada kondisi seperti itu, program, kegiatan dan sub kegiatan hendaknya dihentikan atau dimodifikasi dengan program atau kegiatan lain yang lebih realistis untuk dilakukan pada tahun-tahun mendatang agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan waktu.

7.3.2. Evaluasi

Evaluasi kinerja merupakan penilaian prestasi yang didasarkan pada ketercapaian target yang diberikan setiap tahunnya terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kinerja yang dicapai sebenarnya sudah dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan, terutama capaian berjalan pada triwulan ke-3 dari implementasi program/kegiatan/Sub kegiatan. Hasil evaluasi kinerja ini juga dapat digunakan dalam rangka menilai (kontrak) kinerja bidang/unit kerja yang bertindak sebagai eksekutor dan aparatur pelaksanaannya. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menyebabkan rendahnya kinerja capaian berdasarkan indikator yang ditetapkan untuk setiap program dan kegiatan. Untuk itu tata waktu evaluasi tidak sesering pemantuan (monitoring) dan sifatnya lebih fleksibel. Berdasarkan data hasil capaian untuk tiap program dan indikator dan analisis penyebab rendahnya kinerja, akan dirumuskan upaya tambahan atau alternatif solusi bagi peningkatan capaian kinerja untuk tiap program dan kegiatan yang capaiannya rendah.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja implementasi Renstra ini, meskipun ada juga yang menggunakan 5 (lima) kategori. Kategori capaian kinerja dimaksud, yaitu:

1. Baik (biasanya diberikan tanda dengan warna “hijau”)

Bilamana capaian tahunannya sesuai dengan target. Meskipun demikian menyadari ada beberapa dinamika tidak terhindarkan dalam implementasi program kegiatan, tidak jarang ada yang memberi selang kelonggaran, yaitu apabila capaiannya sekitar 80-100%. (Catatan: ada juga yang memberi kategori “Memuaskan” dan diberi warna “Biru”, bila capaian melebihi atau > 100% dari target yang ditetapkan);

2. Cukup (biasanya diberikan tanda dengan warna “kuning”)

Bilamana capaian masih di bawah dari target minimal yang ditetapkan, tetapi belum dikategorikan sebagai “gagal”. Dalam persentase pada umumnya digunakan angka berkisar

antara 50% hingga 79%.

3. Tidak Baik (biasanya diberikan tanda dengan warna “merah”)

Bilamana capaian jauh dari target yang ditetapkan atau dalam persentase $< 50\%$ dari target yang ditetapkan (Catatan: ada juga yang memberikan warna “putih”, yaitu pada kegiatan yang sama sekali dengan berbagai alasan tidak/belum bisa dikerjakan pada waktu berjalan dan menuntut dievaluasi apakah harus/tetap dijalankan jika kendala yang dihadapi bersifat permanen.

TABEL VII-6 FORMULIR E-80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2019 - 2020

NO.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencana an	Target Pada Akhir Tahun Perencana an	TARGET RENSTRA DPMPD KALTIM TAHUN KE				REALISASI CAPAIAN TAHUN -				RASIO CAPAIAN TAHUN -			
							2019		2020		2019		2020		2019		2020	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani Administrasi Perkantoran			100 %	1,797,010,000	-		-	1,732,216,393	-		-	96.39	-	
				Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan PD (SKM)					85 %	2.438.806.882,50				2,265,461,030				92.89
1.1			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			12	1,797,010,000	12	2,438,806,883		1,732,216,393		2,265,461,030	-	96.39	-	92.89
				Jumlah Tenaga Pemeliharaan dan Pengamanan Alat Peringatan Dini			84 O/B											
				Jumlah Satuan Tenaga Penanggulangan Bencana			14 O/B											
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	240,820,000	-		-	240,535,600	-		-	99.88	-	
				Unit Kerja PD yang memiliki Kinerja Layanan Tepat Waktu					4	1,504,007,500				1,468,255,750				97.62
2.1			Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			12	240,820,000	12	286,907,500		240,535,600		257,893,750	-	99.88	-	89.89
2.2			Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang peningkatan sarana dan prasaran peralatan kantor					18	1,217,100,000				1,210,362,000	-	-	-	99.45
3			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			100 %	644,950,000	-		-	644,246,195	-		-	99.89	-	
				Persentase ASN yang memiliki standar Kompetensi					17,39 %	188,226,800				182,772,243				97.10

3.1			Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		14	644,950,000	16	155,426,800		644,246,195		154,737,243	-	99.89	-	99.56
				Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		30		48									
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman		12		12									
				Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		8											
3.2			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek				40	32,800,000				28,035,000	-	-	-	85.47
				Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)				53									
				Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam				12									
4			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 %	462,100,000	-	241,781,951	-	459,784,000	-	238,635,535	-	99.50	-	98.70
4.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		10	121,000,000		43,231,951		120,227,100		41,757,135	-	99.36	-	96.59
4.2			Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan		5	341,100,000		198,550,000		339,556,900		196,878,400	-	99.55	-	99.16
				Jumlah BPBD yg dilakukan penilaian		10											
				Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana		120											
5			Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana		331	2,986,520,000	442	4,008,111,345	330	460,823,261	182	3,480,598,030	99.70	15.43	41.18	86.84
5.1			Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana		10	2,986,520,000	-	-	10	460,823,261	-	-	100.00	15.43	-	-
				Jumlah bantuan operasional kejadian bencana		5	-	-	-	5	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana		11	-	-	-	11	-	-	-	100.00	-	-	-

				Jumlah Laporan Kegiatan PUSDALPOS-PB			12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia			16	-	-	-	16	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia			76	-	-	-	76	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah Peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana			120	-	-	-	120	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peserta Pelatihan Radio Alat Komunikasi			30	-	-	-	30	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peserta rapat koordinasi bidang Kedaruratan dan Logistik			50	-	-	-	50	-	-	-	100.00	-	-	-
				Kegiatan Penanganan Darurat Banjir di Samarinda (ABT)			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2			Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana			-	-	17	3,639,374,345	-	-	18	3,133,776,331	-	-	105.88	86.11
				Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana			-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100.00	-
				Jumlah operasi penanganan kejadian bencana			-	-	20	-	-	-	10	-	-	-	50.00	-
5.3			Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia			-	-	75	259,835,000	-	-	75	240,238,619	-	-	100.00	92.46
				Jumlah Peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana			-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia			-	-	100	-	-	-	19	-	-	-	19.00	-
5.4			Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta Pekan Risiko Bencana			-	-	10	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	100.00
				Jumlah peserta pelatihan SAR			-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah peserta pembekalan TRC			-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5			Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah pendataan, kaji cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan			-	-	10	104,402,000	-	-	10	102,083,080	-	-	100.00	97.78
				Jumlah laporan kegiatan pusdsalop PB			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-
				Jumlah laporan pemantauan titik panas			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-

				Jumlah laporan pemantauan EWS			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-
				Jumlah laporan kejadian bencana			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-
6			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana			88	333,800,000	12	288,579,794	88	329,044,200	6	283,023,838	-	98.58	50.00	98.07
6.1			Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Dilakukan Pembinaan Lanjutan			2	188,300,000		-	2	187,393,000	-	-	100.00	99.52	-	-
				Jumlah Peserta yang mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)			4	-		-	4	-	-	-	100.00	-	-	-
				Dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana			-	-	1	123,227,155	-	-	1	120,912,199	-	-	100.00	98.12
6.2			Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional			65	33,000,000	-	-	65	32,910,000	-	-	100.00	99.73	-	-
				Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana			9	-	-	-	9	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peserta yang mengikuti Rakornas Penanggulangan Bencana			2	-	-	-	2	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana			5	-	-	-	5	-	-	-	100.00	-	-	-
				Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana			-	-	1	79,863,000	-	-	1	76,637,000	-	-	100.00	95.96
6.3			Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana			1	112,500,000	-	-	1	108,741,200	-	-	100.00	96.66	-	-
				Kabupaten/Kota yang memperoleh informasi / peringatan dini bencana			-	-	9	71,407,139	-	-	4	71,392,139	-	-	44.44	99.98
6.4			Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim			-	-	1	14,082,500	-	-	0	14,082,500	-	-	-	100.00
7			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			42	310,150,000	5	202,348,900	42	303,882,247	3	150,910,668	100.00	97.98	60.00	74.58

			Penanggulangan Bencana Daerah															
7.1			Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		30	135,150,000	-	-		30	131,095,194	-	-	100.00	97.00	-	-
				jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		1	-	-	-		1	-	-	-	100.00	-	-	-
				Laporan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		-	-	1	60,488,900		-	-	-	60,488,900	-	-	-	100.00
				Laporan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		-	-	1	-		-	-	1		-	-	100.00	-
7.2			Pendampingan / Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Kajian kebutuhan Pasca Bencana bidang sosial ekonomi		5	175,000,000	-	-		5	172,787,053	-	-	100.00	98.74	-	-
				Laporan Kajian kebutuhan Pasca Bencana bidang fisik dan penilaian kerusakan		5	-	-	-		5	-	-	-	100.00	-	-	-
				Laporan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1	-	-	-		1	-	-	-	100.00	-	-	-
				Laporan pendampingan/supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		-	-	1	54,810,000				1	54,500,500	-	-	100.00	99.44
7.3			Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana		-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.4			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		-	-	1	87,050,000		-	-	1	35,921,268	-	-	100.00	41.27

TABEL VII-7 FORMULIR E-80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021 - 2022

NO.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan N	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan N	TARGET RENSTRA DPMPD KALTIM TAHUN KE				REALISASI CAPAIAN TAHUN -				RASIO CAPAIAN TAHUN -			
							2019		2020		2019		2020		2019		2020	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp
	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana			95	12,661,749,990	95	14,466,946,420	96.5	10,750,461,267	100	12,481,797,782	101.58	84.91	105.26	86.28
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			100	148,519,500	100	516,762,500	100	111,738,640	100	487,605,690	100.00	75.23	100.00	94.36
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			10	23,519,500	10	87,990,000	10	21,212,750	10	85,442,550	100.00	90.19	100.00	97.10
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja			5	55,000,000	10	193,197,500	5	47,047,390	10	185,798,900	100.00	85.54	100.00	96.17
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			3	70,000,000	3	235,575,000	3	43,478,500	3	216,364,240	100.00	62.11	100.00	91.85
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	9,207,283,000	100	9,203,133,082	100	7,563,483,807	100	7,348,345,595	100.00	82.15	100.00	79.85
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan			12	8,895,403,000	12	8,961,093,082	12	7,332,293,807	12	7,115,005,595	100.00	82.43	100.00	79.40
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN			12	311,880,000	12	242,040,000	12	231,190,000	12	233,340,000	100.00	74.13	100.00	96.41

			Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah			100	20,030,000		-	100	18,750,000		-	100.00	93.61		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang diadakan			75	20,030,000			75	18,750,000			100.00	93.61		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	982,200,878	100	2,128,758,400	100	980,327,646	100	2,098,558,320	100.00	99.81	100.00	98.58
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor			10	45,150,000	933	1,252,041,400	10	44,282,000	933	1,238,366,877	100.00	98.08	100.00	98.91
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12	88,050,878	12	138,417,000	12	87,120,700	12	129,735,010	100.00	98.94	100.00	93.73
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi			262	849,000,000	262	738,300,000	262	848,924,946	262	730,456,433	100.00	99.99	100.00	98.94
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	1,874,165,712	100	1,994,658,906	100	1,737,103,474	100	1,938,786,609	100.00	92.69	100.00	97.20
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	340,800,000	12	320,472,498	12	242,416,495	12	293,706,253	100.00	71.13	100.00	91.65
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS			12	1,533,365,712	12	1,674,186,408	12	1,494,686,979	12	1,645,080,356	100.00	97.48	100.00	98.26
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	429,550,900	100	623,633,532	79	339,057,700	100	608,501,568	79.00	78.93	100.00	97.57
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional			58	296,835,900	23	261,011,000	21	206,423,500	23	248,226,568	36.21	69.54	100.00	95.10
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor			64	41,315,000	50	52,438,000	64	41,265,000	50	52,005,000	100.00	99.88	100.00	99.17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			1701	91,400,000	506	310,184,532	1701	91,369,200	506	308,270,000	100.00	99.97	100.00	99.38

			atau Bangunan Lainnya															
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana			66.67	3,013,732,010	82.67	4,013,345,907	66.67	2,395,860,262	82.67	3,843,054,179	100.00	79.50	100.00	95.76
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan			100	306,175,000	100	1,206,580,800	88.76	271,770,910	100	1,168,123,438	88.76	88.76	100.00	96.81
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana			1	306,175,000	1	1,206,580,800	1	271,770,910	1	1,168,123,438	100.00	88.76	100.00	96.81
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100	1,768,692,010	100	1,688,002,000	80	1,251,255,955	100	1,611,735,745	80.00	70.74	100.00	95.48
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana			1	459,850,110			-	97,063,500			-	21.11		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan			12	206,755,700	12	294,321,000	12	118,874,600	12	272,169,710	100.00	57.50	100.00	92.47
				Jumlah Pilot Drone tersertifikasi					8			8						
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk			4	303,686,200	12	448,909,000	4	297,626,514	12	431,296,218	100.00	98.00	100.00	96.08
			Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana			3	422,000,000	5	678,360,000	3	394,633,341	5	660,683,397	100.00	93.52	100.00	97.39
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)			30	376,400,000	30	266,412,000	30	343,058,000	30	247,586,420	100.00	91.14	100.00	92.93
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana			100	838,000,000	100	962,731,207	100	792,783,397	100	910,225,396	100.00	94.60	100.00	94.55
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana			12	443,100,000	12	416,212,000	12	416,431,764	12	395,387,403	100.00	93.98	100.00	95.00
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia			12	394,900,000	12	546,519,207	12	376,351,633	12	514,837,993	100.00	95.30	100.00	94.20

				Jumlah Kebutuhan logistik Penanggulangan becnana yang tersedia					398					398				
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100	100,865,000	100	156,031,900	79.36	80,050,000	100	152,969,600	79.36	79.36	100.00	98.04
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan			1	100,865,000	1	156,031,900	1.00	80,050,000	1	152,969,600	100.00	79.36	100.00	98.04

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, bersamaan dan sekaligus mempedomi kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku penanggulangan bencana di Kalimantan Timur melanjutkan rencana di tahun 3 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan masa transisi jangka menengah daerah, simultan dengan penyusunan RKPD dan RENJA 2024 yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang tertera didalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target penanggulangan bencana. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas;
2. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026;
3. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen Renstra dengan Rencana Kerja BPBD, setiap bidang wajib menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA)BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

kabupaten/Kota;

4. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana, sebagai subyek pelaksana setiap kebijakan serta program dan kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Pelaksana melalui bidang bidang lingkup BPBD Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana secara berkala;
6. Peran serta perangkat daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal dalam penanggulangan bencana.

Semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Mei 2023

KEPALA PELAKSANA,

Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 199803 1 006

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan Kemiskinan bukan hanya sekadar berapa Jumlah dan Persentase Penduduk berkaitan dengan Miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan Keparahan dari Kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah Penduduk Miskin, kebijakan Pengentasan Kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.

Adapun kondisi Umum terkait Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur pada Bulan Maret 2022 sebanyak 236,25 ribu (6,31 persen). Pada September 2021 sebanyak 233,13 ribu (6,27 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 3,12 ribu orang (secara persentase turun 0,04 persen poin);
2. Selama Maret 2022 – September 2021, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 1,74 persen, yaitu dari Rp. 703.223,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp. 728.208,- per kapita per bulan pada Maret 2022;
3. Periode bulan Maret 2022 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,037 pada keadaan bulan September 2021 menjadi 0,989 pada keadaan bulan Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,231 menjadi 0,226 pada periode yang sama;
4. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,327. Angka ini mengalami penurunan 0,004 jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,331;
5. Distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2022 sebesar 21,46 persen. Hal ini berarti distribusi pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,21 dan untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,46 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Semakin jauh dari angka nol, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) semakin melebar.

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di perdesaan juga mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase. Selama periode Maret 2022 – September 2021 penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0.06 persen. Tetapi Penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan yang kecil yaitu sebesar 0.01 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2022 dan September 2021 masing-masing sebesar 9,64 persen dan 9,63 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,80 persen pada bulan Maret 2022 dan 4,74 persen pada bulan September 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanganan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723));
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997, Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Penyelenggaraan Kualitas Anak;
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Stndar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tetang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nmr);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 59).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dalam Aspek Ekonomi Wilayah Tujuan 2 (dua) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Sasaran 6 (enam) yaitu Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat;
2. Menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2024-2026.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Rencana Kerja Tahunan).
4. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur baik Tahunan maupun 3 (tiga) Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini menguraikan tentang Latar Belakang, Potensi dan Permasalahan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Dokumen lainnya.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROV. KALTIM

BAB ini menguraikan tentang kondisi Internal, Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan serta Tugas dan Fungsi Dinas.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB ini menguraikan dan mengidentifikasi tentang permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB ini menguraikan tentang program dan kegiatan Pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur .

BAB VII PENUTUP

BAB ini memuat kaidah pelaksanaan atas Keberadaan dan Fungsi Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani Permasalahan Sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

- a. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Timur;
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penanganan, Pemberdayaan PMKS;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang Ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala

Bidang, 5 (lima) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional Tertentu Seperti yang digambarkan pada bagan Struktur Organisasi di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Adapun yang menjadi uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- d. Penyiapan Bahan Koordinasi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Hukum dan Kehumasan Serta Pengaduan Masyarakat;
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akutansi Keuangan;
- f. Pelaksanaan Tugas Lainnya yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Pemberdayaan Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Pemberdayaan Kepahlawanan,

- Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- e. Penyiapan Bahan-Bahan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Peran Keluarga dan Penyuluhan Sosial;
- g. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- a. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pendataan komunitas adat terpencil serta melakukan pengkajian komunitas adat terpencil;
- b. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, mempunyai tugas melakukan perencanaan program pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, Menyelenggarakan program atau kegiatan pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, menyusun laporan pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan mempersiapkan bahan koordinasi program pemberdayaan kelembagaan serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakwanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Anak, Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Napza, Serta Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Kesejahteraan Anak;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia;
- f. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- a. Seksi Kesejahteraan Anak dan lansia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kesejahteraan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban kerusuhan dan pengungsi serta melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi lanjut usia;

- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi tuna sosial dan korban napza;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Pencegahan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Serta Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Penyusunan Pedoman Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial;
- d. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pencegahan Dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- e. Penyiapan Bahan Pembinaan, Bimbingan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- f. Penyiapan Bahan Pembinaan, Pengendalian dan Pengaturan Teknis Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikososial;
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, melakukan pertolongan dan penyelamatan korban shelter logistik, evaluasi dan pendampingan psikolososial, serta form keserasian sosial dengan kearifan lokal;
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas menyusun perencanaan serta menyelenggarakan program / kegiatan program jaminan sosial keluarga, menyusun laporan kegiatan jaminan sosial keluarga serta melakukan koordinasi program kegiatan jaminan sosial keluarga.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Program Penanganan Fakir Miskin;
- c. Memverifikasi dan Memvalidasi Data Calon Penerima Bantuan Program Penanganan Fakir Miskin di Perkotaan, Pedesaan Serta Daerah Pesisir dan Pulau Terluar.

Bidang Penanganan fakir Miskin, membawahkan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Penanganan Fakir Miskin.

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, mempunyai tugas penanganan jumlah keluarga miskin perkotaan melalui pelatihan KUBE perkotaan;
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaaan, mempunyai tugas penanganan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan KUBE perdesaan;
- c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah pesisir dan pulau terluar, mempunyai tugas penanganan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan KUBE Daerah pesisir dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 (lima) unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 92 tahun 2016 masing-masing sebagai berikut:

- a. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.
 - Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar;
 - Fungsi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Penyusunan Rencana Teknis Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar.
 - Daya Tampung 110 Orang.
- b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma.
 - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dalam pola Perlindungan dan Penyantunan bagi Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus;

- Fungsi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma penyusunan rencana teknis operasional Kesejahteraan Sosial Anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional Kesejahteraan Sosial Anak, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Anak;
- Daya tampung 80 anak.

c. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- Daya tampung 80 anak.

d. UPTD Panti Sosial Bina Remaja.

- Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Remaja Terlantar;
- Fungsi UPTD Panti Sosial Bina Remaja Penyusunan Rencana Teknis Operasional Kesejahteraan Remaja Terlantar, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kesejahteraan Remaja Terlantar, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Remaja Terlantar;
- Daya Tampung Sebanyak 75 Orang.

- e. UPTD Panti Sosial Gelandangan dan Pengemis.
 - Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
 - Daya Tampung 35 Orang.
- f. UPTD Panti Sosial Penyandang Disabilitas.
 - Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar;
 - Daya Tampung 20 Orang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD adalah Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Tenaga Perawat.

- Pekerja Sosial : 7 Orang
- Penyuluh Sosial : 2 Orang
- Perawat : 2 Orang

2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD. Jumlah sumber daya manusia yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 162 orang dan tenaga kontrak sebanyak 193 orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

a. Berdasarkan Usia

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD sebanyak 162 orang. Laki-laki sebanyak 111 orang atau 68,51% dan perempuan sebanyak 51 orang atau 31,49%.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Jumlah				Jumlah
	26-35	36-45	46-55	>55	
Pria	3	44	44	21	111
Wanita	1	24	16	9	51
Jumlah	4	68	60	30	162

b. Berdasarkan Pendidikan

Dari 162 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD dengan latar belakang pendidikan SD sebanyak 4 orang atau (2,5%), SMP sebanyak 7 orang (4,3%), SLTA sebanyak 73 orang (45.1%), D.I-IV sebanyak 10 orang (6,2%) S.I sebanyak 54 orang (33,3%), S.II sebanyak 14 orang (8,6%) dan S.III sebanyak 0 orang (0,0%).

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jenis Kelamin	Jumlah							Jumlah
	SD	SMP	SLTA	D. I - IV	S.I	S.II	S.III	
Pria	4	5	53	6	34	10	0	111
Wanita	0	2	20	4	20	4	0	51
Jumlah	4	7	73	10	54	14	0	162

c. Berdasarkan Eselon

Dari 162 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD yang menempati jabatan eselon II sebanyak 0 orang atau (0,0%), eselon III sebanyak 10 orang atau (6,2%), eselon IV sebanyak 17 orang atau (10,5%), jumlah keseluruhan eselon adalah 28 orang atau (17,3%), Pejabat Funsgsional sebanyak 22 orang atau (13,6%) dan non eselon sebanyak 112 orang atau (69,1%).

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

	Jumlah	Jumlah
--	--------	--------

Jenis Kelamin	I	II	III	IV	Jumlah Eselon	Fungsional	Non Eselon	
Pria	0	1	6	13	20	12	80	112
Wanita	0	0	4	4	8	10	32	50
Jumlah	0	1	10	17	28	22	112	162

d. Berdasarkan Agama

Berdasarkan agama dari sejumlah 162 orang Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan UPTD yang beragama Islam sebanyak 154 orang (95,1%) dan yang bergama Kristen protestan sebanyak 6 orang (3,7%) serta yang bergama Kristen Katolik sebanyak 2 orang (1,2%) .

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

Jenis Kelamin	Jumlah					Jumlah
	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	
Pria	106	5	1	0	0	111
Wanita	48	1	1	0	0	51
Jumlah	154	6	2	0	0	162

2.2.2. Asset / Modal Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dalam upaya mendukung Tugas dan Fungsi Dinas Sosial perlu ada Asset/Modal yang dimiliki, diantaranya asset Lahan/Tanah, Bangunan, Alat Mesin dan lain-lain.

Tabel 2.5. Data Asset/Modal Lahan/Tanah Dinas Sosial Prov. Kaltim

No	Uraian	Luasa (M2)
1	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	3.328
2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	22.85
3	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	50.8
4	UPTD Panti Sosial Anak Harapan	8.48

5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	27.975
6	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	20.5

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Sosial, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin guna memenuhi kebutuhan dasar PMKS.

Dalam Rencana Program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Program indikator dari tiap-tiap kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin serta UPTD yang ada di lingkup dinas Sosial Provinsi Kalimantan timur, adapun Program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel. 2.6. (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun (%) ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan sosial, pelatihan keterampilan UEP melalui KUBE				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100	100	100	100	100
2	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	95%	95%		200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	100	100	100	100	0
3	Jumlah lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Bantuan Sosial	65%	65%		270	270	270	270	270	270	270	200	270	0	100	100	74	100	0
4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Bantuan Sosial	100%	100%		300	300	300	300	300	300	300	200	300	0	100	100	67	100	0
5	Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial				20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	100	100	100	100	0
6	Jumlah Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	100%	100%		18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	100	100	100	100	0
7	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSBR)				60	60	60	60	60	75	75	75	60	0	125	125	125	100	0
8	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi / Korban Traficcing yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSKW)				0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	100	100	100	0
9	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSAAD)				80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	100	100	100	100	0
10	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (UPTD PSAAH)				80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	100	100	100	100	0
11	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti (PSTWNP)				110	110	110	110	110	110	110	110	110	0	100	100	100	100	0
12	Jumlah Fasilitasi Manajemen usaha Bagi Keluarga Fakir Miskin/ UEP WRSE				0	0	40	40	40	0	0	40	40	0	0	0	100	100	0
13	Jumlah Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial, Penanganan Korban Bencana, Pasca Bencana, Pemulangan dan Permukiman Orang Terlantar	100%	100%		1518	1518	1518	1518	1518	1755	1942	1130	2500	0	116	128	74	165	0
14	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pelatihan teknis dan fungsional				103	103	103	103	103	103	103	103	103	0	100	100	100	100	0

Tabel. 2.7 (T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	(x Rp. 1000)					(x Rp. 1000)											
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Reaslisasi
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR																	
- Belanja Operasi	48,852,915,000	54,317,939,485	61,155,937,205	71,409,609,021	68,860,051,372	42,278,846,854	47,869,457,893	54,250,663,661	54,250,663,661	-	86.54	88.13	88.71	75.97	-		
- Belanja Modal	1,024,231,000	2,334,862,000	2,097,644,700	12,572,958,650	4,075,504,820	1,014,231,000	2,323,742,750	2,081,479,018	2,081,479,018	-	99.02	99.52	99.23	16.56	-		
JUMLAH	49,877,146,000	56,652,801,485	63,253,581,905	83,982,567,671	72,935,556,192	43,293,077,854	50,193,200,643	56,332,142,679	56,332,142,679	-	92.78	93.83	93.97	46.26	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.4.1. Analisa Renstra K/L

2.4.1.1. Visi dan Misi Kemensos RI

Visi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”** dengan misi : **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”** dengan tujuan : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

2.4.1.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemensos RI

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya good governance Kementerian Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - b. Opini BPK Atas Laporan Keuangan.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang professional dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan yang Tersertifikasi;
 - b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi;
 - c. Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga Dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.

3. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Penurunan Penduduk Miskin;
 - b. Persentase Penurunan Penduduk Rentan.

2.4.1.3. Program Prioritas Kementerian Sosial

Adapun Program Prioritas Kementerian Sosial di Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Program Sembako;
3. Serta program-program lainnya yang menjadi program Kementerian Sosial RI.

2.4.2. Analisa Renstra Kabupaten/Kota

Sesuai dengan visi dan misi masing Pemerintah Kabupaten/Kota maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyelaraskan visi dan misi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur dan Kementerian Sosial RI, yang pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelayanan sosial.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota, pemerintah dalam hal ini instansi sosial Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan-kebijakan yang secara umum terdiri dari :

1. Pengembangan Model Kelembagaan Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Perlindungan Sosial;
2. Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pelindungan Sosial dan Hukum Bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Tuna Sosial;

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS;
4. Membangun Kerja Sama Kemitraan Antara Pengusaha Dan Kelompok Usaha Fakir Miskin Serta Meningkatkan Kemampuan (*Capacity Building*) Bagi Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lain;
5. Meningkatkan Pelayanan Psikososial dan Pembangunan Pusat Pelayanan Krisis (Trauma Center) Bagi PMKS, Termasuk Korban Bencana Alam Dan Sosial.

Selain pendekatan kebijakan tersebut diatas penyediaan data PMKS yang akurat juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota.

2.4.3. Analisa Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi Kalimantan Timur sebagai Provinsi terluas di Indonesia dengan sumber kekayaan SDA yang melimpah menjadi modal tersendiri dalam melaksanakan pembangunan namun disisi lain kondisi tersebut tidak diiringi dengan pemerataan penduduk, pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai sehingga masih menyebabkan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya hidup, sulitnya akses transportasi dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

a. Analisa Telaahan RTRW.

Kebijakan penataan ruang yang ditetapkan melalui RT RW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu didukung dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD.

Demikian pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur yang secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW karena ketentuan tersebut akan sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa hal yang perlu di cermati dengan adanya dokumen RTRW ini adalah sebagai berikut:

- Perlunya perhatian pemerintah Kabupaten/Kota khususnya penetapan lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada dikawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi;
- Penetapan Kampung Siaga Bencana (KSB) agar benar-benar berada pada daerah rawan Bencana Alam/Sosial.

b. Analisa Telaahan KLHS

Dalam melaksanakan pelayanan sosial pada masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka kajian lingkungan hidup strategis menjadi perhatian penting dalam Renstra Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur, karena tujuan dari pelayanan sosial adalah peningkatan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu sendiri, oleh

karena itu maka pemetaan lokasi-lokasi pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kampung Siaga Bencana (KSB) ataupun panti-panti sosial harus dikembangkan dengan pola sinergitas dengan alam sekitarnya serta mengedepankan kearifan lokal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Perencanaan pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Renstra Provinsi Kaltim telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan sosial dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Tiap Bidang dan UPTD Berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Rehabilitasi Sosial	a. Belum optimalnya sinergitas program-program penyelenggaraan rehabilitasi sosial;	Kurangnya sinergitas penanganan rehabilitasi sosial antara kab/kota dan provinsi	Beberapa penanganan rehabilitasi sosial tidak dapat disinergikan antara kab/kota dan provinsi	Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial pada berbagai sektor dan level (Kab/Kota & Prov.) masih belum optimal
	b. Program dan kegiatan terkait bantuan sosial belum sepenuhnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);	Kurang maksimalnya penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	Masih ditemukannya data penerima bantuan sosial yang belum akurat	Pemutahiran data di Kab/Kota tidak dilakukan secara berkala
	c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti belum optimal;	Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti sesuai SPM belum optimal	Kurangnya SDM dan minimnya sarana dan sarana pendukung	Belum maksimalnya Sumber Daya Aparatur dan ketersediaan sarana/prasarana rehabilitasi sosial didalam panti (Pemerintah dan LKS Panti swasta)

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Pemberdayaan Sosial	a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum maksimalnya sosialisasi ke masyarakat terkait kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Belum maksimalnya penyusunan program sosialisasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat
	b. Rendahnya partisipasi Lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan kesejahteraan sosial;	Belum optimalnya partisipasi LKS untuk penanganan Kesejahteraan Sosial	Kurang nya kapasitas SDM yang menjadi pengurus LKS	Kurang nya pembinaan peningkatan kapasitas SDM LKS melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKS
	c. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Kurangnya pemanfaatan dan pendayagunaan PSKS maka menyebabkan data DTKS kurang valid dan penanganan masalah kesejahteraan sosial kurang optimal	Kurang nya kapasitas SDM dan lemahnya koordinasi antara sesama PSKS dan Pemerintah serta ke LKS yang ada	Kurangnya perhatian pemerintah dari segi anggaran untuk peningkatan kapasitas PSKS dan untuk kesejahteraan PSKS sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap PSKS atau pilar-pilar sosial.
	d. Rendahnya keterlibatan dunia usaha (CSR) Kessos dalam penanganan Kesejahteraan Sosial.	Rendahnya keterlibatan dunia usaha (CSR) maka mengurangi peranan dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Kurangnya penegasan sanksi atau punishment terhadap dunia usaha yang tidak mengeluarkan dana CSR nya pada masyarakat	Regulasi yang ada belum cukup kuat karna tidak di berikan sanksi bagi pelanggar aturan untuk peran CSR sehingga bisa memaksimalkan peran dunia CSR dalam penanganan masalah kessos.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Verifikasi dan Validasi belum maksimal ditingkat Kab/Kota sehingga Pemberian Bantuan Sosial tidak tepat sasaran	1. Verifikasi dan Validasi Data Penerima yang tidak update. 2. DTKS belum menjadi dasar pemberian bantuan sosial.	1. Sering terjadi pergantian Petugas/operator verifikasi dan validasi Data ditingkat Kabupaten dan Kota 2. Minimnya informasi tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	1. Sistem perekrutan Petugas/operator verifikasi dan validasi Data yang mumpuni pada kabupaten/kota belum terpenuhi.(kurang) 2. Kurangnya Sosialisasi tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ditingkat Provinsi,Kab/Kota /Kecamatan dan Kelurahan
	Perlunya peningkatan keberdayaan berusaha bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah graduasi.	1. Keberdayaan berusaha masih mengandalkan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan dana yang kecil tanpa alternative pihak lain / swasta/perusahaan 2. Validitas data KPM yg berusaha masih minim	1. Jumlah besaran bantuan KUBE dan UEP untuk berusaha sudah ditetapkan secara aturan penganggaran Pemerintah Daerah. 2. Informasi Data KPM penerima bantuan berusaha tidak update ditingkat pemerintah daerah kab/kota	1. KUBE dan UEP untuk berusaha tidak dapat bersaing dalam pasar. 2. Tidak ada Pengawasan KUBE dan UEP yang telah diberikan bantuan berusaha oleh Pemerintah Daerah

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	Perlunya akselerasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Data pilah penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan tidak tersedia.	Perolehan Data penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan terkendala masalah teknis.	Pemerintah Daerah Belum diberikan akses melalui teknis aplikasi untuk memperoleh/memperbaiki data PBI Jaminan Kesehatan.
	Ketersediaan peralatan Dapur umum Lapangan dan kelengkapannya belum terpenuhi	Kejadian kebencanaan bersifat tidak terprediksi/tidak pasti yang berdampak pada alokasi anggaran terkait kebencanaan.	Minimnya informasi oleh Pemerintah Daerah mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait kebencanaan .	Standar Pelayanan Minimal (SPM)terkait kebencanaan belum menjadi pedoman dalam penanganan Kebencanaan di Daerah.
Bidang Penanganan Fakir Miskin	a. Belum optimalnya penanganan Fakir Miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis / luas wilayah;	Sulitnya pelaksanaan kegiatan verifikasi data penerima program penanganan fakir miskin serta sulitnya akses internet khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar	a. Luasnya jangkauan wilayah pesisir dan pulau terluar di wilayah prov.Kaltim dan masih terdapatnya blankspot di beberapa daerah tersebut. b. Dukungan sarana dan prasarana masih kurang sehingga diperlukan dana sharing dengan Dinas sosial Kab/kota untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.	Masih banyak warga kategori miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terjangkau program penanganan fakir miskin, terutama wilayah pesisir dan pulau terluar oleh karena itu agar program penanganan fakir miskin dan menjangkau seluruh wilayah perlu didukung dana dan anggaran yang memadai.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	b. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyaluran bantuan non tunai menjadi tunai pada program sembako;	a. Kurangnya koordinasi dan informasi dari Kemensos RI ke Dinas Sosial Prov Kaltim terkait penyaluran bantuan sosial program sembako yang disalurkan di Kab/kota, saat ini kementerian langsung menginformasikan kepada PT.POS maupun HIMBARA terkait kegiatan penyaluran bantuan. b. Kurangnya informasi terkait penyaluran bantuan sosial program sembako melalui PT Pos dan Himbara c. Tidak mendapat BNBA bagi calon penerima bantuan program sembako untuk dilakukan evaluasi realisasi penyaluran	PT Pos Indonesia maupun Himbara menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada kementerian sosial RI tanpa memberikan tembusan kepada Dinas Sosial Prov.Kaltim.	Kurangnya koordinasi Kementrian Sosial RI dan Himbara dalam menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan program sembako, mengakibatkan terkendalanya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas sosial provinsi kalimantan Timur.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	c. Sulitnya akses DTKS pada tingkat pusat (Kementerian);	Aplikasi SIKS-NG yang berisi DTKS tidak dapat mengakses BNBA (by name by address) dan hanya dapat mengakses jumlah komulatif warga miskin di kab/kota yang masuk ke dalam DTKS sehingga apabila Dinas Sosial Prov.Kaltim memerlukan BNBA (by name by address) Pemerintah provinsi kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Prov.Kaltim bersurat kepada Pusdatin Kementrian Sosial RI dengan di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur.	Kementrian sosial RI saat ini masih memperbaiki aplikasi SIKS-NG (Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial -Next Generation) sehingga belum dapat melayani permintaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Data terakhir yang diterima oleh Dinas Sosial Prov Kaltim adalah DTKS periode 25 November 2021	Angka kemiskinan di kalimantan Timur bergerak secara dinamis dan mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat, kementrian sosial RI merilis DTKS melalui aplikasi SIKS-NG secara periodik (per Bulan) dan DTKS dapat berubah sementara itu Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan sebagai data penerima program bantuan sosial di tingkat pusat daerah dan Kab/kota.

Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
	d. Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota.	Kurangnya maksimalnya pendampingan dalam program pemberian bantuan sosial kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dalam memotivasi KPM untuk mandiri dalam berusaha, sehingga usaha yang dijalani kurang berkembang	Belum adanya dana sharing dari dinas sosial Kab/kota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi penerima program bantuan KUBE dan WRSE dalam menjalankan usahanya agar lebih maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.	Perlunya dukungan anggaran (dana Sharing) dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Kab/kota untuk memberikan pendampingan terhadap KPM penerima bantuan dalam mengembangkan usaha.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
1	a. Belum optimalnya sinergitas program-program penyelenggaraan rehabilitasi sosial; b. Program dan kegiatan terkait bantuan sosial belum sepenuhnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti belum optimal;	1 Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2 Perlunya peningkatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berbasis data.	Ketersediaan Data 1 PMKS Program-program 2 Inovatif dalam penanganan PMKS Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam 3 rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersedianya sarana dan prasarana 4 pendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1 Dukungan Pemerintah Pusat dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam hal verifikasi & validasi data 2 Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam hal penanganan PMKS 3

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
2	a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	3 Bantuan sosial yang berbasis Perlindungan Sosial Keluarga masih menjadi model dalam penanganan PMKS;	5 Ketersediaan SOP Pelayanan dan sistem monev berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	4 Koordinasi yang berkesinambungan dengan berbagai sektor terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	b. Rendahnya partisipasi Lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan kesejahteraan sosial;	4 Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;	6 Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
	c. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	5 Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya;	7 Tersedianya penganggaran yang cukup dalam penanganan PMKS	

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
3	a. Verifikasi dan validasi belum maksimal ditingkat Kab/Kota sehingga Pemberian Bansos tidak tepat b. Perlunya peningkatan keberdayaan berusaha bagi KPM yang telah graduasi. c. Perlunya akselerasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Pemprov & Kab/Kota d. Ketersediaan peralatan Dapur umum Lapangan dan kelengkapannya belum terpenuhi	6 Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PMKS baru;		

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
4	a. Belum optimalnya penanganan Fakir Miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis / luas wilayah; b. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan penyaluran bantuan non tunai menjadi tunai pada program sembako; c. Sulitnya akses DTKS pada tingkat pusat (Kementerian);			

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
	d. Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota.			

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diatas, maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatur dan PSKS);
2. Peningkatan sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan unit kerja penganggaran (Bappeda, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah, DPRD.);
3. Peningkatan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait;
4. Pemanfaatan data Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara optimal;
5. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penanganan PMKS.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2024 - 2026 permasalahan pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tertanganinya PMKS sebanyak 36 % per- 3 (tiga) tahun	▪ Luasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial	▪ Tingginya migrasi PMKS ▪ Belum lengkap nya (PERDA) yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial	▪ Kewenangan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS
2.	36% PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengurus dirinya sendiri, mampu menjalin relasi sosial yang harmonis, memiliki kemandirian ekonomi, melaksanakan peran sosial, mampu berfungsi secara fisik, mampu menghadapi situasi kritis dan mampu berintegrasi sosial	▪ Terbatasnya sarana dan prasarana ▪ Kurangnya kuantitas/jumlah personil SDM Kesejahteraan Sosial ▪ Belum proporsionalnya alokasi anggaran kesejahteraan sosial	▪ Kesenjangan keahlian dan keterampilan penduduk local dan pendatang ▪ Lemahnya koordinasi lintas sector terhadap pelayanan PMKS	▪ Ketersediaan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial ▪ Program-program kesejahteraan sosial yang adaptable.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tertanganinya PMKS sebanyak 36% per tiga tahun	▪ Luasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial	▪ Tingginya migrasi PMKS ▪ Belum lengkap nya (PERDA) yang mengatur tentang kesejahteraan Sosial	▪ Kewenangan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS
2.	36% PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengurus dirinya sendiri, mampu menjalin relasi sosial yang harmonis, memiliki kemandirian ekonomi, melaksanakan peran sosial, mampu berfungsi secara fisik, mampu menghadapi situasi kritis dan mampu berintegrasi sosial	▪ Terbatasnya sarana dan prasarana ▪ Kurangnya kuantitas/jumlah personil SDM Kesejahteraan Sosial ▪ Belum proporsionalnya alokasi anggaran kesejahteraan sosial	▪ Kesenjangan keahlian dan keterampilan penduduk local dan pendatang ▪ Lemahnya koordinasi lintas sektor terhadap pelayanan PMKS	▪ Ketersediaan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial ▪ Program-program kesejahteraan sosial yang adaptable.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kampung Siaga Bencana	Keterbatasan anggaran	Luasnya jangkauan pelayanan	Komitmen kepala daerah

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kampung Siaga Bencana	Daerah rawan bencana yang tersebar luas	Program CSR belum berjalan dengan baik	Komitmen Kepala Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Perlunya peningkatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berbasis data;
3. Bantuan sosial yang berbasis Perlindungan Sosial Keluarga masih menjadi model dalam penanganan PMKS;
4. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;

5. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PMKS baru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan) serta sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tiap perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran Pada Tahun Ke -		
					2024	2025	2026
1.	Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12	12	12
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86.10	86.60	87.10

Tabel 4.2. Program, Sasaran Program dan Target Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	TERLAKSANANYA LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	4 PSKS	36%	64%	100%
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	15 Dok	15 Dok	15 Dok
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah izin PUB melalui aplikasi online yang tertata dengan baik dan sesuai aturan	-	15 Dok	15 Dok	15 Dok
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	4 PSKS	4 PSKS
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	-	40 Orang	40 Orang	40 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Menigkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	-	10 Keluarga	10 Keluarga	10 Keluarga
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	237 Lembaga	237 Lembaga	237 Lembaga

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	-	5.31%	5.40%	5.80%
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Terlaksananya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	28 Orang	7.700 Orang	7.700 Orang	7.700 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar Permakanan per orang sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 Orang	7.630 Orang	7.630 Orang	7.630 Orang
Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi Yang Dipulangkan ke Daerah Asal	28 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	20 Dok	20 Dok	20 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Terlaksanya PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	110 Orang	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Meningkatnya Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang
Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Terlaksananya PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Meningkatnya Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya orang yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Terlaksananya PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Meningkatnya Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Terlaksananya peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	75 Orang	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Meningkatnya Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	75 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minima Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	35 Orang	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti (UPTD PSKW-HM)	Meningkatnya PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Pemulangan Ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	-	100 %	100 %	100 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (UPTD DISABILITAS)	Meningkatnya Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial (UPTD DISABILITAS)	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial (UPTD DISABILITAS)	-	30	50	50
Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Penyediaan Sandang	Terlaksananya Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terlaksananya Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	30	50	50
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	30	50	50

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	440 Orang	12,936 Orang	12,936 Orang	12,936 Orang
Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	18 Orang	18 Orang	18 Orang
Pengangkatan Anak Antar WNI	Terlaksananya pengangkatan Anak oleh Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang
Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	3 Orang	3 Orang	3 Orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	440 Orang	12,918 Orang	12,918 Orang	12,918 Orang
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi	-	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan data, Monev dan Rapat Koordinasi	440 Orang	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga	3.105 Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	2.500 Orang	100 %	100 %	100 %
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	2.500 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	2.500 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tangga Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	2.500 Orang	1,000 Orang	1,000 Orang	1,000 Orang
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewngn Prov	-	1,000 Orang	1,000 Orang	1,000 Orang
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	900 Orang	900 Orang	900 Orang
Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya palayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	-	600 Orang	600 Orang	600 Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terlaksananya Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 TMP	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksannya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinsos)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	3 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Lap	2 Lap	2 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	2 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang	165 Orang	165 Orang	165 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	-	4 Lap	4 Lap	4 Lap
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan yang disusun pada kegiatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3 Dok	3 Dok	3 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	200 Unit	250 Unit	300 Unit
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	TerlaksananyaIndeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersusunnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	312 Unit	322 Unit	327 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	305 Unit	315 Unit	320 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	35 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	53 Unit	73 Unit	84 Unit	95 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
(UPTD PSPAD)						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Tersusunnya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeulair	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Terlaksananta Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang sediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	39 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananta Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	26 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	100 %	82%	84%	86%
	Terlaksannya Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100 %	100 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersusunnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	312 Unit	322 Unit	327 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	3 Unit	6 Unit	6 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	1 Unit	305 Unit	305 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Strategi pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS dalam Panti Pemerintah dan Panti Swasta
		2. Meningkatkan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka peningkatan ketahanan sosial	▪ Terselenggaranya proses adopsi anak untuk mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			▪ Peningkatan kualitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana	Meningkatkan Bantuan bagi Korban Pasca Bencana Alam dan Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok masyarakat dan dunia usaha	▪ Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan rekomendasi dalam rangka izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) ▪ Peningkatan Kualitas SDM dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
		5. Meningkatkan nilai-nilai Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasana dalam rangka menjunjung akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan terjabar secara terperinci dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 Tahun mendatang yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
- e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program ini terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2024-2026, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada sasaran RPD yakni Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sampai pada level 12 %. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut maka ditetapkan 6 (enam) program yang merupakan program pendukung.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pembinaan pengelolaan administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, mengembangkan sumber daya manusia aparatur agar dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS yang dituangkan dalam kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini merupakan program yang diarahkan pada upaya penggalan pendayagunaan, dan pengembangan potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial (PSKS), yang berasal dari kalangan masyarakat melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Pelayanan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini merupakan program anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, pemberian bantuan kepada para penyandang disabilitas, pemberian bantuan kepada eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit lainnya melalui kegiatan di dalam dan luar panti melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Pemulasaraan;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.

4. Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal;

5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

- Penyediaan Permakanan;
- Pemulangan ke Daerah Asal;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini merupakan Program pemberian bantuan bagi keluarga fakir miskin melalui KUBE dan UEP WRSE dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program ini mempunyai kegiatan serba sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

- Penyediaan Permakanan;
- Pengangkatan Anak Antar WNI;
- Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal.

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan Penanganan dan Penanggulangan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial, program ini mempunyai kegiatan serba sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- Pelayanan Dukungan Psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini merupakan pengelolaan, rehabilitasi taman makam pahlawan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

Tabel. 6.1 (Tabel. TC. 27) Rencana Program dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	4 PSKS	36%	1,402,683,180	64%	2,264,821,498	100%	3,126,303,649	100%	6,793,808,327	Bidang Pemberdayaan Sosial		
		1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	15 Dokumen	100,000,000	15 Dokum en	250,000,000	15 Dokum en	400,000,000	15 Dokum en	750,000,000			
		1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	15 Dokumen	100,000,000	15 Dokum en	250,000,000	15 Dokum en	400,000,000	45 Dokum en	750,000,000			
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	1,302,683,180	4 PSKS	2,014,821,498	4 PSKS	2,726,303,649	4 PSKS	6,043,808,327			
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	-	40 Orang	184,122,300	40 Orang	302,534,530	40 Orang	422,787,983	40 Orang	909,444,813			
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	105 Orang	630,844,280	105 Orang	893,928,708	105 Orang	1,183,321,579	105 Orang	2,708,094,567			
		1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	10 Keluarga	284,424,050	10 Keluarg a	494,846,455	10 Keluar ga	674,331,101	10 Keluarg a	1,453,601,606			
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	237 Lembaga	203,292,550	237 Lembag a	323,511,805	237 Lemba ga	445,862,986	237 Lembag a	972,667,341			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	36%	5.31 %	21,216,722,409	5.4 %	23,338,394,650	5.8%	25,672,234,115	5.8 %	70,227,351,174	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial Panti	28 Orang	7.700 Orang	21,216,722,409	7.700 Orang	23,338,394,650	7.700 Orang	25,672,234,115	23.100 Orang	70,227,351,174	
		1.06.04.1.05.05	Penyediaan Permakanan	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Provinsi	28 Orang	7630 Orang	16,144,000,000	7630 Orang	17,758,400,000	7630 Orang	19,534,240,000	22.890 Orang	53,436,640,000	
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS kewenangan Provinsi yang dipulangkan ke daerah asal	28 Orang	70 Orang	425,000,000	70 Orang	467,500,000	70 Orang	514,250,000	210 Orang	1,406,750,000	
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	20 Dok	4,647,722,409	20 Dok	5,112,494,650	20 Dok	5,623,744,115	60 Dok	15,383,961,174	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	110 Orang	100%	3,281,612,070	100%	3,609,773,277	100%	4,341,878,275	100%	11,233,263,622	UPTD PSTW-NP
		1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	110 Orang	126 Orang	3,281,612,070	126 Orang	3,609,773,277	126 Orang	4,341,878,275	126 Orang	11,233,263,622	
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	2,579,934,500	126 Orang	2,837,927,950	126 Orang	2,800,000,000	126 Orang	8,217,862,450	
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	28,248,000	126 Orang	31,072,800	126 Orang	93,500,880	126 Orang	152,821,680	
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	93,778,300	126 Orang	103,156,130	126 Orang	310,406,173	126 Orang	507,340,603	
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	162,529,070	126 Orang	178,781,977	126 Orang	537,971,222	126 Orang	879,282,269	
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	336,270,000	126 Orang	369,897,000	126 Orang	500,000,000	126 Orang	1,206,167,000	
		1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	110 Orang	126 Orang	80,852,200	126 Orang	88,937,420	126 Orang	100,000,000	126 Orang	269,789,620	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	2,563,000,000	100%	2,819,300,000	100%	3,101,230,000	100%	8,483,530,000	UPTD PSPAD
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	2,563,000,000	80 Orang	2,819,300,000	80 Orang	3,101,230,000	80 Orang	8,483,530,000	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	1,766,600,000	80 Orang	1,943,260,000	80 Orang	2,137,586,000	80 Orang	5,847,446,000	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	543,290,000	80 Orang	597,619,000	80 Orang	657,380,900	80 Orang	1,798,289,900	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	80 Orang	83,490,000	80 Orang	91,839,000	80 Orang	101,022,900	80 Orang	276,351,900	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	84,810,000	80 Orang	93,291,000	80 Orang	102,620,100	80 Orang	280,721,100	
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	80 Orang	84,810,000	80 Orang	93,291,000	80 Orang	102,620,100	80 Orang	280,721,100	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	2,650,957,000	100%	2,650,957,000	100%	3,027,127,750	100%	8,329,041,750	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 Orang	80 Orang	2,650,957,000	80 Orang	2,650,957,000	80 Orang	3,027,127,750	80 Orang	8,329,041,750	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	1,843,457,000	80 Orang	1,843,457,000	80 Orang	2,209,677,750	80 Orang	5,896,591,750	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	348,000,000	80 Orang	348,000,000	80 Orang	348,000,000	80 Orang	1,044,000,000	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	80 Orang	80 Orang	199,500,000	80 Orang	199,500,000	80 Orang	209,450,000	80 Orang	608,450,000	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	110,000,000	80 Orang	110,000,000	80 Orang	110,000,000	80 Orang	330,000,000	
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	80 Orang	80 Orang	150,000,000	80 Orang	150,000,000	80 Orang	150,000,000	80 Orang	450,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	75 Orang	100%	1,726,377,346	100%	1,864,487,534	100%	2,013,646,537	100%	5,604,511,417	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	75 Orang	105 Orang	1,726,377,346	105 Orang	1,864,487,534	105 Orang	2,013,646,537	105 Orang	5,604,511,417	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	60 Orang	105 Orang	706,036,500	105 Orang	762,519,420	105 Orang	823,520,974	105 Orang	2,292,076,894	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	105 Orang	114,933,600	105 Orang	124,128,288	105 Orang	134,058,551	105 Orang	373,120,439	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	24,937,200	105 Orang	26,932,176	105 Orang	29,086,750	105 Orang	80,956,126	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	726,462,046	105 Orang	784,579,010	105 Orang	847,345,331	105 Orang	2,358,386,387	
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	105 Orang	154,008,000	105 Orang	166,328,640	105 Orang	179,634,931	105 Orang	499,971,571	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	35 Orang	100%	576,609,000	100%	734,011,000	100%	797,411,000	100%	2,108,031,000	UPTD PSKW-HM
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan Napza didalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PSKW-HM)	35 Orang	35 Orang	576,609,000	35 Orang	734,011,000	35 Orang	797,411,000	35 Orang	2,108,031,000	
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	313,830,000	35 Orang	448,645,000	35 Orang	483,509,000	35 Orang	1,245,984,000	
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	220,000,000	35 Orang	242,000,000	35 Orang	266,200,000	35 Orang	728,200,000	
		1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	5,874,000	35 Orang	6,461,000	35 Orang	7,107,000	35 Orang	19,442,000	
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	10 Orang	36,905,000	10 Orang	36,905,000	10 Orang	40,595,000	35 Orang	114,405,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PANTI DISABILITAS)	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	80 Orang	100%	867,217,170	100%	1,754,038,887	100%	2,754,038,887	100%	5,375,294,944	UPTD DISABILITAS
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (UPTD DISABILITAS)	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISBAILITAS)	-	30 Orang	867,217,170	50 Orang	1,754,038,887	50 Orang	2,754,038,887	130 Orang	5,375,294,944	
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	-	30 Orang	688,375,000	50 Orang	1,007,712,500	50 Orang	2,007,712,500	130 Orang	3,703,800,000	
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	-	30 Orang	139,285,000	50 Orang	353,213,500	50 Orang	353,213,500	130 Orang	845,712,000	
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	-	30 Orang	9,984,000	50 Orang	210,982,400	50 Orang	210,982,400	130 Orang	431,948,800	
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	-	30 Orang	25,573,170	50 Orang	38,130,487	50 Orang	38,130,487	130 Orang	101,834,144	
		1.06.04.1.02.08	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	30 Orang	4,000,000	50 Orang	144,000,000	50 Orang	144,000,000	130 Orang	292,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang memiliki Usaha Ekonomoi Produktif (UEP)	440 Orang	12,936 Orang	18,375,516,000	12,936 Orang	20,165,409,860	12,936 Orang	21,001,947,346	38,808 Orang	59,542,873,206	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	18 Orang	658,711,000	18 Orang	924,585,000	18 Orang	1,197,040,000	54 Orang	2,780,336,000			
		1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	15 Orang	508,711,000	15 Orang	659,585,000	15 Orang	715,540,000	45 Orang	1,883,836,000			
		1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	-	3 Orang	150,000,000	3 Orang	265,000,000	3 Orang	481,500,000	9 Orang	896,500,000			
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	440 Orang	12.918 Orang	17,716,805,000	12.918 Orang	19,240,824,860	12.918 Orang	19,804,907,346	38.754 Orang	56,762,537,206			
		1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Provinsi	-	3,105 Keluarga	12,955,000,000	3,105 Keluarg a	13,999,985,000	3,105 Keluar ga	14,189,983,500	9,315 Keluarg a	41,144,968,500			
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan data, Monev dan Rapat Koordinasi	440 Orang	3,105 Keluarga	2,261,805,000	3,105 Keluarg a	2,740,839,860	3,105 Keluar ga	3,014,923,846	9,315 Keluarg a	8,017,568,706			
		1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi	-	500 Orang	2,500,000,000	500 Orang	2,500,000,000	500 Orang	2,600,000,000	1.500 Orang	7,600,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	2.500 Orang	100 %	11,986,306,500	100 %	13,112,807,150	100 %	13,703,430,865	100 %	38,802,544,515	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	2.500 Orang	17,870 Orang	11,986,306,500	17,870 Orang	13,112,807,150	17,870 Orang	13,703,430,865	53,610 Orang	38,802,544,515	
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	2.500 Orang	17,870 Orang	7,077,752,000	17,870 Orang	9,004,676,200	17,870 Orang	9,184,486,820	17,870 Orang	25,266,915,020	
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	2.500 Orang	1,000 Orang	405,000,000	1,000 Orang	482,900,000	1,000 Orang	531,190,000	3,000 Orang	1,419,090,000	
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat pennampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	-	1,000 Unit	1,971,021,500	1,000 Unit	2,120,729,050	1,000 Unit	2,332,801,955	3,000 Unit	6,424,552,505	
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	900 Orang	1,100,365,500	900 Orang	494,054,000	900 Orang	543,459,400	2,700 Orang	2,137,878,900	
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	-	600 Orang	1,432,167,500	600 Orang	1,010,447,900	600 Orang	1,111,492,690	1,800 Orang	3,554,108,090	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 TMP	1 Lokasi	637,332,310	1 Lokasi	1,337,715,541	1 Lokasi	1,707,487,095	1 Lokasi	3,682,534,946	Bidang Pemberdayaa n Sosial		
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1 Lokasi	637,332,310	1 Lokasi	1,337,715,541	1 Lokasi	1,707,487,095	1 Lokasi	3,682,534,946			
		1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dok	1 Dokumen	296,332,310	1 Dokum en	455,215,541	1 Dokum en	519,987,095	1 Dokum en	1,271,534,946			
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Makam	185,000,000	1 Makam	390,000,000	1 Makam	595,000,000	1 Makam	1,170,000,000			
		1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Tenaga pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1 Laporan	156,000,000	1 Lapora n	492,500,000	1 Lapora n	592,500,000	1 Lapora n	1,241,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1.06.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	100 %	82%	46,416,830,431	84%	45,473,288,414	86%	49,647,550,043	86%	141,537,668,888	Bidang Sekretariat
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	2,829,067,350	3 Lap	1,219,480,718	3 Lap	1,466,954,753	15 Lap	5,495,502,821	
		1.06.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	7 Dok	2,479,067,350	7 Dok	869,480,718	7 Dok	916,954,753	7 Dok	4,265,502,821	
		1.06.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	10,000,000	
		1.06.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 Dok	250,000,000	2 Dok	250,000,000	2 Dok	350,000,000	6 Dok	850,000,000	
		1.06.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Lap	100,000,000	5 Lap	100,000,000	5 Lap	200,000,000	15 Lap	400,000,000	
		1.06.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Lap	10,000,000	2 Lap	10,000,000	2 Lap	10,000,000	4 Lap	10,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	2 Lap	2 Lap	33,993,070,889	2 Lap	37,684,005,334	2 Lap	38,613,205,600	2 Lap	110,350,281,823	Bidang Sekretariat
		1.06.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	165 Orang	165 Orang	29,519,460,417	165 Orang	31,991,714,338	165 Orang	32,491,300,055	165 Orang	94,002,474,810	
		1.06.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	2 Dok	4,373,610,472	2 Dok	5,592,290,996	2 Dok	5,821,905,545	6 Dok	15,787,807,013	
		1.06.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	30,000,000	
		1.06.01.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	30,000,000	
		1.06.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	4 Lap	100,000,000	4 Lap	100,000,000	4 Lap	300,000,000	12 Lap	500,000,000	
		1.06.01.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	6 Dok	30,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-	1 Lap	30,000,000	1 Lap	30,000,000	1 Lap	30,000,000	3 Lap	90,000,000	Bidang Sekretariat
		1.06.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	3 Dok	30,000,000	
		1.06.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	3 Dok	30,000,000	
		1.06.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	3 Lap	30,000,000	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	3 lap	3 lap	172,000,000	3 lap	172,600,000	3 lap	660,230,000	9 lap	1,004,830,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	162 Stell	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	300,000,000	3 Paket	500,000,000	
		1.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	250,000,000	6 Dok	350,000,000	
		1.06.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3 Dok	10,000,000	3 Dok	10,000,000	3 Dok	10,000,000	9 Dok	30,000,000	
		1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	12,000,000	5 Orang	12,600,000	5 Orang	100,230,000	5 Orang	124,830,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Lap	5 Lap	2,496,358,880	5 Lap	2,623,176,825	5 Lap	3,628,131,556	15 Lap	8,747,667,261	Bidang Sekretariat
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	167,903,450	1 Paket	176,298,623	1 Paket	285,113,554	4 Paket	629,315,627	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	342,674,200	1 Paket	359,807,910	1 Paket	577,798,306	4 Paket	1,280,280,416	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	324,111,150	1 Paket	340,316,708	1 Paket	557,332,543	4 Paket	1,221,760,401	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Lap	1 Lap	1,601,670,080	1 Lap	1,686,753,584	1 Lap	2,047,887,153	4 Lap	5,336,310,817	
		1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (laporan)	-	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	150,000,000	3 Dok	250,000,000	
		1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	3 Dok	30,000,000	
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	3 Lap	4,650,707,912	3 Lap	1,382,618,867	3 Lap	1,806,051,131	9 Lap	7,839,377,910	
		1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	1 Unit	4,050,707,912	1 Unit	1,013,973,574	1 Unit	1,113,973,574	3 Unit	6,178,655,060	
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	250,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	200,000,000	3 Paket	550,000,000	
		1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35 Unit	30 Unit	350,000,000	30 Unit	268,645,293	30 Unit	492,077,557	90 Unit	1,110,722,850	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap	2 Lap	562,830,300	2 Lap	590,471,815	2 Lap	919,495,406	2 Lap	2,102,797,521	Bidang Sekretariat
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	1 Lap	66,556,600	1 Lap	69,884,430	1 Lap	173,378,652	3 Lap	309,819,682	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	1 Lap	486,273,700	1 Lap	510,587,385	1 Lap	736,116,754	3 Lap	1,732,977,839	
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	1 Lap	10,000,000	3 Lap	30,000,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Lap	4 Lap	1,782,795,100	4 Lap	1,870,934,855	4 Lap	2,523,481,597	4 Lap	6,177,211,552	
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5 Unit	5 Unit	77,161,700	5 Unit	81,019,785	5 Unit	185,070,774	15 Unit	343,252,259	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	5 Unit	33,330,000	5 Unit	34,996,500	5 Unit	96,746,325	15 Unit	165,072,825	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	200 Unit	825,746,900	250 Unit	867,034,245	300 Unit	1,110,385,957	750 Unit	2,803,167,102	
		1.06.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	3 Unit	30,000,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	826,556,500	1 Unit	867,884,325	1 Unit	1,111,278,541	3 Unit	2,805,719,366	
		1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	3 Unit	30,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	-	82 %	3,645,162,930	84%	4,019,678,723	86 %	4,060,519,725	86 %	11,425,361,378	UPTD PSTW-NP
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	2,125,968,240	1 Lap	2,338,565,064	1 Lap	2,201,293,900	3 Lap	6,665,827,204	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	2,125,968,240	1 Dok	2,338,565,064	1 Dok	2,201,293,900	3 Dok	6,665,827,204	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	59,980,690	1 Keg	65,978,759	1 Keg	72,576,635	3 Keg	198,536,084	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	59,980,690	1 Paket	65,978,759	1 Paket	72,576,635	3 Paket	198,536,084	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	774,959,320	4 Keg	852,454,752	4 Keg	937,701,027	12 Keg	2,565,115,099	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,565,010	1 Paket	18,221,511	1 Paket	20,043,662	3 Paket	54,830,183	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	504,909,130	1 Paket	555,400,043	1 Paket	610,940,047	3 Paket	1,671,249,220	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32,385,180	3 Paket	35,623,198	3 Paket	39,186,318	9 Paket	107,194,696	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	221,100,000	1 Lap	243,210,000	1 Lap	267,531,000	4 Lap	731,841,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	269,916,680	2 Lap	296,908,348	2 Lap	326,599,183	6 Lap	893,424,211	UPTD PSTW-NP
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	263,161,800	1 Lap	289,477,980	1 Lap	318,425,778	3 Lap	871,065,558	
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	6,754,880	1 Lap	7,430,368	1 Lap	8,173,405	3 Lap	22,358,653	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	312 Unit	514,338,000	322 Unit	565,771,800	327 Unit	622,348,980	661 Unit	1,702,458,780	
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	122,545,500	6 Unit	134,800,050	6 Unit	148,280,055	18 Unit	405,625,605	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	305 Unit	171,792,500	315 Unit	188,971,750	320 Unit	207,868,925	640 Unit	568,633,175	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	266,200,000	3 Unit	728,200,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kuantitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA) dan Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	82 %	2,575,436,000	84 %	2,842,980,000	86 %	3,137,277,000	86 %	8,255,693,000	UPTD PSPAD
					-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1,381,561,192	1 Lap	1,519,717,312	1 Lap	1,671,689,044	3 Lap	4,572,967,548	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1,381,561,192	1 Lap	1,519,717,312	1 Lap	1,671,689,044	3 Lap	4,572,967,548	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Keg	2 Keg	193,500,000	2 Keg	212,850,000	2 Keg	234,135,000	6 Keg	640,485,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	64,500,000	1 Paket	70,950,000	1 Paket	78,045,000	3 Paket	213,495,000	
		1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	35 Orang	43 Orang	129,000,000	50 Orang	141,900,000	60 Orang	156,090,000	60 Orang	426,990,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	442,867,108	4 Keg	487,154,218	4 Keg	535,868,639	12 Keg	1,465,889,965	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11,000,550	1 Paket	12,100,605	1 Paket	13,310,666	3 Paket	36,411,821	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	140,370,230	1 Paket	154,407,253	1 Paket	169,847,979	3 Paket	464,625,462	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9,016,328	3 Paket	9,918,360	3 Paket	10,909,194	9 Paket	29,843,882			
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	282,480,000	1 Lap	310,728,000	1 Lap	341,800,800	3 Paket	935,008,800			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	329,200,000	2 Lap	362,120,000	2 Lap	398,332,000	6 Lap	1,089,652,000	UPTD PSPAD
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	1 Lap	2,200,000	1 Lap	2,420,000	1 Lap	2,662,000	3 Lap	7,282,000	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	327,000,000	1 Lap	359,700,000	1 Lap	395,670,000	3 Lap	1,082,370,000	
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Unit	3 Unit	105,000,000	4 Unit	115,500,000	5 Unit	127,050,000	12 Unit	347,550,000	
		1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	105,000,000	4 Unit	115,500,000	5 Unit	127,050,000	12 Unit	347,550,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	53 Unit	73 Unit	223,307,700	84 Unit	245,638,470	95 Unit	270,202,317	252 Unit	739,148,487	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	154,942,700	4 Unit	170,436,970	5 Unit	187,480,667	12 Unit	512,860,337	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70 Unit	68,365,000	70 Unit	75,201,500	70 Unit	82,721,650	210 Unit	226,288,150	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	-	82 %	3,015,917,000	84 %	3,011,323,000	86 %	3,261,379,250	86 %	8,988,619,250	UPTD PSAAH
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,882,849,500	3 Lap	5,298,449,500	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,707,800,000	1 Lap	1,882,849,500	3 Lap	5,298,449,500	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	150,917,000	1 Keg	150,917,000	1 Keg	165,000,000	3 Keg	466,834,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	150,917,000	1 Paket	150,917,000	1 Paket	165,000,000	3 Paket	466,834,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	512,200,000	4 Keg	507,606,000	4 Keg	508,606,000	12 Keg	1,528,412,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	60,000,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	3 Paket	450,000,000	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23,000,000	1 Paket	18,406,000	1 Paket	18,406,000	3 Paket	59,812,000	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	319,200,000	1 Lap	319,200,000	1 Lap	320,200,000	3 Lap	958,600,000	
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	2 Unit	75,500,000	2 Unit	75,500,000	2 Unit	85,388,750	6 Unit	236,388,750	
		1.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	55,500,000	1 Unit	55,500,000	1 Unit	61,188,750	3 Unit	172,188,750	
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan	1 Unit	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	24,200,000	3 Unit	64,200,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	299,500,000	3 lap	299,500,000	3 lap	307,535,000	9 Lap	906,535,000	UPTD PSAAH
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	6,000,000	1 Lap	6,000,000	1 Lap	7,260,000	3 Lap	19,260,000	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	200,000,000	1 Lap	200,000,000	1 Lap	200,000,000	3 Lap	600,000,000	
		1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	93,500,000	1 Lap	93,500,000	1 Lap	100,275,000	3 Lap	287,275,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	37 Unit	32 Unit	370,000,000	32 Unit	370,000,000	32 Unit	412,000,000	96 Unit	1,152,000,000	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	110,000,000	8 Unit	110,000,000	8 Unit	110,000,000	24 Unit	330,000,000	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	60 Unit	180,000,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	200,000,000	4 Unit	200,000,000	4 Unit	242,000,000	12 Unit	642,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	-	82 %	2,715,062,654	84 %	2,838,495,466	86 %	2,971,810,463	86 %	8,225,368,583	UPTD PSBR
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	3 Lap	3,816,469,440	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	1 Lap	1,272,156,480	3 Lap	3,816,469,440	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	1 Keg	91,699,560	1 Keg	99,035,525	1 Keg	106,958,367	3 Keg	297,693,452	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	91,699,560	1 Paket	99,035,525	1 Paket	106,958,367	1 Paket	297,693,452	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	756,607,478	4 Keg	817,136,394	4 Keg	882,506,984	12 Keg	2,456,250,856	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64,225,332	1 Paket	69,363,359	1 Paket	74,912,428	3 Paket	208,501,119	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	282,182,900	1 Paket	304,757,532	1 Paket	329,138,135	3 Paket	916,078,567	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26,013,006	1 Paket	28,094,364	1 Paket	30,341,591	3 Paket	84,448,961	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	384,186,240	1 Lap	414,921,139	1 Lap	448,114,830	3 Lap	1,247,222,209	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 lap	2 lap	166,560,136	2 lap	179,884,947	2 lap	194,283,942	6 Lap	540,729,025	UPTD PSBR
		1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	10819008	1 Lap	11684529	1 Lap	12619291	3 Lap	35,122,828	
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	155741128	1 Lap	168200418	1 Lap	181664651	3 Lap	505,606,197	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	39 Unit	59 Unit	528,039,000	59 Unit	570,282,120	59 Unit	615,904,690	177 Unit	1,714,225,810	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	89,002,800	6 Unit	96,123,024	6 Unit	103,812,866	18 Unit	288,938,690	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50 Unit	73,481,040	50 Unit	79,359,523	50 Unit	85,708,285	150 Unit	238,548,848	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	3 Unit	3 Unit	365,555,160	3 Unit	394,799,573	3 Unit	426,383,539	9 Unit	1,186,738,272	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	-	82 %	1,179,931,000	84 %	1,136,996,000	86 %	1,244,292,000	86 %	3,261,219,000	UPTD PSKW-HM
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	300,000,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	1 Lap	747,752,000	1 Lap	822,527,000	1 Lap	904,779,000	3 Lap	2,475,058,000	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Lap	1 Lap	747,752,000	1 Lap	822,527,000	1 Lap	904,779,000	3 Lap	2,475,058,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Keg	4 Keg	228,520,000	4 Keg	251,371,000	4 Keg	276,506,000	12 Keg	756,397,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,154,000	1 Paket	5,669,000	1 Paket	6,235,000	3 Lap	17,058,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49,126,000	1 Paket	54,038,000	1 Paket	59,441,000	3 Lap	162,605,000	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	174,240,000	1 Lap	191,664,000	1 Lap	210,830,000	3 Lap	576,734,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW -HM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	64,478,000	3 lap	64,478,000	3 lap	64,478,000	9 Lap	193,434,000	UPTD PSKW -HM
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	64,478,000	1 Lap	64,478,000	1 Lap	64,478,000	3 Lap	193,434,000	
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW -HM)	Tersedinya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	26 Unit	31 Unit	239,181,000	31 Unit	263,098,000	31 Unit	263,007,000	93 Unit	765,286,000	
		1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	31,735,000	5 Unit	34,908,000	5 Unit	38,398,000	15 Unit	105,041,000	
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25 Unit	42,446,000	25 Unit	46,690,000	25 Unit	51,359,000	75 Unit	140,495,000	
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	165,000,000	1 Unit	181,500,000	1 Unit	173,250,000	3 Unit	519,750,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target			Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PANTI DISABILITAS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	-	82%	10,000,000	84%	1,208,800,000	86%	1,207,480,000	86%	2,426,280,000	UPTD DISABILITAS		
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	2,000,000	100 %	3,200,000	100 %	4,520,000	100 %	9,720,000			
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000			
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	101,000,000	1 Dok	101,000,000	3 Dok	203,000,000			
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	-	1 Keg	1,000,000	1 Keg	101,000,000	1 Keg	101,000,000	3 Keg	203,000,000			
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000			
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	-	4 Keg	4,000,000	4 Keg	404,000,000	4 Keg	404,000,000	12 Keg	812,000,000			
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000			
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000			
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	1,000,000	3 Paket	101,000,000	3 Paket	101,000,000	9 Paket	203,000,000			
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	4 Lap	203,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PANTI DISABILITAS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PANTI DISABILITAS)	-	82%	10,000,000	84%	1,208,800,000	86%	1,207,480,000	86%	2,426,280,000	UPTD DISABILITAS
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	-	100 %	2,000,000	100 %	3,200,000	100 %	4,520,000	100 %	9,720,000	
		1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000	
		1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	101,000,000	1 Dok	101,000,000	3 Dok	203,000,000	
		1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	-	1 Keg	1,000,000	1 Keg	101,000,000	1 Keg	101,000,000	3 Keg	203,000,000	
		1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	-	4 Keg	4,000,000	4 Keg	404,000,000	4 Keg	404,000,000	12 Keg	812,000,000	
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	1,000,000	3 Paket	101,000,000	3 Paket	101,000,000	9 Paket	203,000,000	
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	4 Lap	203,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Resntra		Lokasi		
						2024		2025		2026		Target			Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-	1 Paket	1,000,000	1 Paket	101,000,000	1 Paket	101,000,000	3 Paket	203,000,000	UPTD DISABILITAS		
		1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeulair yang disediakan	-	1 Unit	1,000,000	1 Unit	101,000,000	1 Unit	101,000,000	3 Unit	203,000,000			
		1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	2 Lap	2,000,000	2 Lap	202,000,000	2 Lap	202,000,000	6 Lap	406,000,000			
		1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000			
		1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	1,000,000	1 Lap	101,000,000	1 Lap	101,000,000	3 Lap	203,000,000			
		1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PANTI DISABILITAS)	Tersedianya Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	-	3 Unit	3,000,000	312 Unit	303,000,000	317 Unit	303,000,000	629 Unit	609,000,000			
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1,000,000	6 Unit	101,000,000	6 Unit	101,000,000	13 Unit	203,000,000			
		1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit	1,000,000	305 Unit	101,000,000	305 Unit	101,000,000	611 Unit	203,000,000			
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1,000,000	1 Unit	101,000,000	1 Unit	101,000,000	3 Unit	203,000,000			
JUMLAH KESELURUHAN							125,444,673,000		134,786,478,000		147,381,564,000		406,112,715,000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPD Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur, maka indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 7.1

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1,69	12	12	12	12
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,40	86,10	86,60	87,10	87,10

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 7.2

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti	95,47	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti	64,97	100	100	100	100
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti	100	100	100	100	100
5	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Dararut Bencana Provinsi	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 maka akan menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahunan maupun 3 (tiga) tahunan yang berorientasi pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada umumnya dan Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada khususnya.

Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan pada periode Renstra tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan Program/Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para stakeholder.

Samarinda, Juli 2023

Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680814 199403 1 012

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Muhammad Yusuf, S.E., M.Si.	Sekretaris	
2.	Robby Irawan, S.E.	Kasubbag PP	

**RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Peningkatan Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas juga diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal.

Secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder (baik internal maupun eksternal). Renbcana tersebut disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, seluruh komponen yang dimiliki dalam suatu organisasi bekerja sama dalam mebuat perencanaan strategis mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Rencana strategis bagi setiap perangkat daerah merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah bagi berjalannya organisasi

Sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Perannya semakin strategis dalam konteks upaya perubahan fundamental perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus dikelola secara tepat sebagai salah satu motor dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Renstra Dinas ini memiliki hubungan secara sinergis dengan dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantu meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM- Nasional);
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN);
 - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga non Departemen (RENJA-KL);
 - e. Dokumen Perencanaan Nasional lainnya yang terkait dengan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Hubungan dengan urusan desentralisasi melalui asas otonomi meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-

Daerah);

- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD);
- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD);
- e. Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang terkait dengan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.;

Perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang masa jabatan gubernurnya berakhir Tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Menyusun dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2024 – 2026 secara

bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Yang Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004No. 5, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 131, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025; perda baru 2022
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1679)
;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban

Kepala Dinas atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 1(satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah untuk:

1. Menjelaskan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya diurus ketenagakerjaan dan transmigrasi.).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan terdiri dari 8 (delapan) bab. Pokok bahasan serta susunan garis besar setiap bab adalah sebagai berikut.

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan dan membahas tentang: latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Menguraikan dan membahas tentang: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan.

2. BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3. BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan dan membahas tentang: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,

Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

4. BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan dan membahas tentang: Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024- 2026 dan Cascade Kinerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur.

5. BAB 5 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan dan membahas tentang mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

6. BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan dan membahas tentang: rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan dan membahas tentang: penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran OPD tahun 2024- 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

8. BAB 8 PENUTUP

Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut:

A Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

a. Tugas Pokok :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan Tenaga Kerja;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja;
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Sekretariat membawahkan Sub bagian-sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

C Bidang Pengembangan Tenaga Kerja :

Bidang Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai Tugas adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan tenaga kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengembangan tenaga kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan informasi bursa kerja dan penempatan tenaga kerja; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pembinaan dan Pengawasan :

Bidang Pengawasan mempunyai Tugas adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pembinaan dan pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis norma kerja;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penegakkan hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta

pengembangan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jamnan sosial tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis syarat kerja peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jaminan sosial pengupahan;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Transmigrasi :

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koorindasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang transmigrasi;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang transmigrasi;

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyiapan permukiman dan fasilitasi perpindahan transmigrasi;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat transmigrasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. UPTD. BLKI :

UPTD Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pov Kaltim terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu

: meliputi :

- 1). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan, Kelas A;

dan

- 2). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang, Kelas A;

a. Tugas

UPTD. BLKI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelatihan kerja industri.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD. BLKI Balikpapan dan Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut;

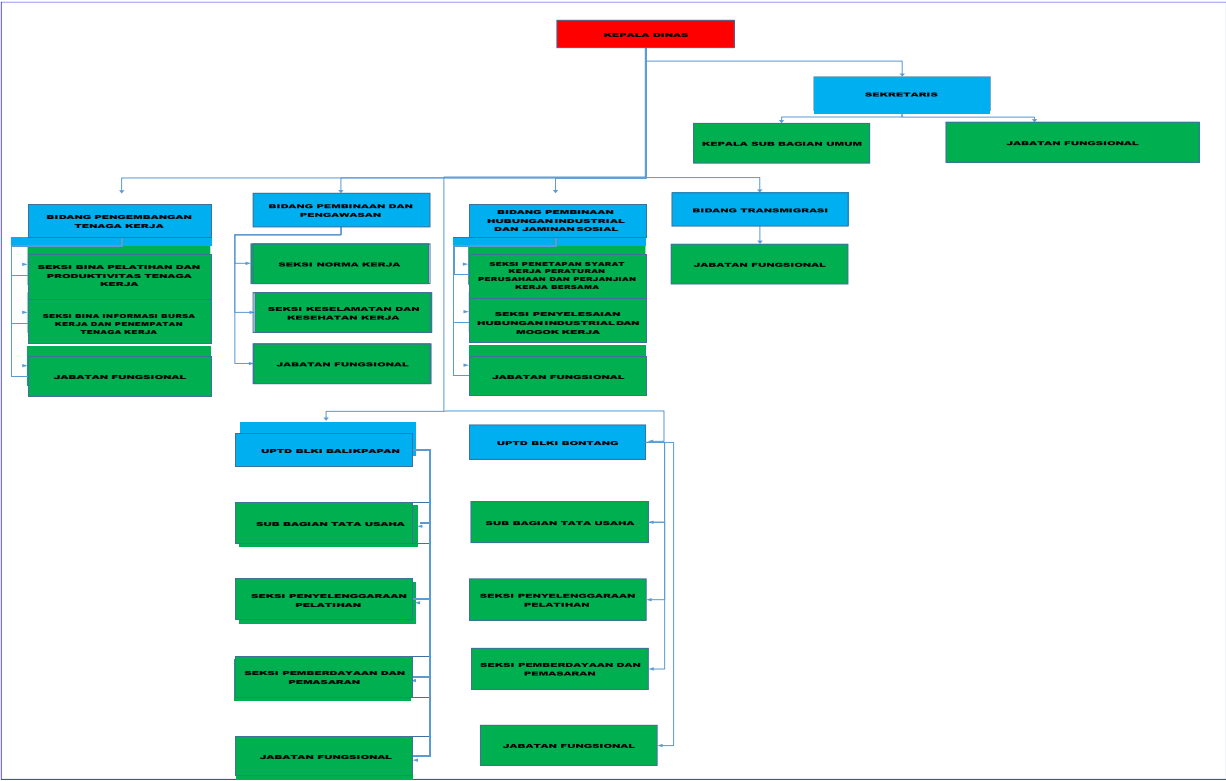
1. Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kerja industri;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan kerja industri;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja industri;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 58 tahun 2016 sebagai berikut :

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sumber: Subbag Umum (STO TMT 1 Februari 2023)

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur didukung personil/pegawai sejumlah 144 orang (data Sub Bag Umum Kepegawaian per Februari 2023). Daftar jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.1. sebagai berikut :

TABEL 2.1
SUMBER DAYA APARATUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	ASN	JABATAN TINGGI PRATAMA	ADMINISTRATOR	PENGAWAS	JUMLAH	FUNGSIONAL	PELAKSANA	CPNS	NON ASN	JUMLAH
1	Dinas	1			1					1
	Sekretariat		1	1	2	1	12	-	24	39
	Bid. Pengembangan TK		1	2	3	1	8	-	9	21
	Bid. HI dan Jamsos		1	2	3	5	3	-	6	17
	Bid. Pengawasan		1	2	3	49	14	-	5	71
	Bid. Transmigrasi		1	0	1	3	8	-	7	19
2	BLKI Balikpapan		1	3	4	8	6	-	8	26
3	BLKI Bontang		0	3	3	3	2	-	12	20
JUMLAH		1	6	13	20	70	53	-	71	214

Sumber: Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023)

Jumlah ASN = 143
Jumlah NON ASN = 71

Tabel 2.2
Rekapitulasi ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
kalimantan Timur

No	ASN	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma III	SLT A	SLT P	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14
1	Dinas	1		1				1					
2	Sekretariat	9	6	1	6	8		1	5	3	5	1	
3	Bid. Pengembangan TK	9	3	2	5	5		2	4		6		
4	Bid. HI dan Jamsos	7	4	3	6	2		3	6		2		
5	Bid. Pengawasan	40	26	9	52	5		11	47	2	6		
6	Bid. Transmigrasi	8	4	1	7	4		2	5	1	4		
7	BLKI Balikpapan	13	5	1	10	6	1	1	6	6	5		
8	BLKI Bontang	7	1		5	3			5	3			
TOTAL		94	49	18	91	33	1	21	78	15	28	1	0

Sumber: Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023)

Jumlah ASN = 143

Tabel 2.3
Kebutuhan Jabatan Fungsional
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

N O	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	BUDGETING	KEBUTUHAN (JAB FNGSIONAL)	KEKURANGA N
1	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama	0	2	-2
2	Pengawas Ketengakerjaan Ahli Madya	7	24	-17
3	Pengawas Ketengakerjaan Ahli Muda	36	57	-21
4	Pengawa Ketenagakerjaan Ahli Pertama	6	29	-23
5	Pengantar Kerja Ahli Madya	0	4	-4
6	Pengantar Kerja Ahli Muda	0	3	-3
7	Pengantar Kerja Ahli Pertama	0	4	-4
8	Mediator Hubungan Industrail Ahli Madya	2	3	-1
9	Mediator Hubungan ndustrial Ahli Muda	2	2	0
10	Mediator Hubungan ndustrial Ahli Pertama	1	5	-4
11	Instruktur Ahli Madya (Balikpapan)	1	10	-9
12	Instruktur Ahli Muda (Balikpapan)	0	16	-16
13	Instruktur Ahli Pertama (Balikpapan)	3	24	-21
14	Instruktur Penyelia (Balikpapan)	0	1	-1
15	Instruktur Mahir (Balikpapan)	0	3	-3
16	Instruktur Terampil (Balikpapan)	1	3	-2
17	Instruktur Ahli Muda (Bontang)	0	16	-16
18	Instruktur Ahli Pertama (Bontang)	1	24	-23
19	Instruktur Penyelia (Bontang)	2	2	0
20	Instruktur Mahir (Bontang)	1	3	-2
21	Instruktur Terampil (Bontang)	2	3	-1
22	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	0	2	-2
23	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2	2	0
24	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	0	3	-3
25	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	2	0
26	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	3	-3
27	Perencana Ahli muda	1	2	-1
28	Perencana Ahl Pertama	0	1	-1
29	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1
30	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	-1
31	Arsiparis Penyelia	0	1	-1
32	Arsiparis Mahir	0	1	-1
33	Arsiparis Terampil	0	1	-1

Sumber Data: Sub. Bagian Umum Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim

Tabel 2.4
Rekapitulasi Non ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi kalimantan Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan TMT 28 Februari 2023

No	NON ASN	Jenis Kelamin		Pendidikan					
		L	P	Pasca Sarjana	Sarjana	Diplo ma	SMA/S MK	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Column1	Column2	Column3	Column4	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14
1	Sekretariat	13	11		13	3	7	1	
2	Bid. Pengembangan TK	5	4		5	2	2		
3	Bid. HI dan Jamsos	2	4		5	1			
4	Bid. Pengawasan	3	2		3		2		
5	Bid. Transmigrasi	2	5		6	1			
6	BLKI Balikpapan	1	7		3	5			
7	BLKI Bontang	5	7		9		3		
TOTAL		31	40	0	44	12	14	1	0

Sumber: Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023)

Jumlah NON ASN = 71

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jalan Kemakmuran No. 2, Telp. 0541-743131, 767242, 767241 Fax. 0541 – 735973 Samarinda, dengan keadaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans Prov. Kaltim

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah Kantor DisnakertransProv.Kaltim	7.675 m2 bikin terbilang
2	Luas Bangunan dan Gedung	1.760 m2
3	Bangunan Lantai 1 terdiri dari:	
	a. Gedung	1 Unit
	b. Mushola	1 Unit
	c. Gudang	1 Unit
	d. Aula	1 Unit
	e. Halaman Parkir Roda 2 dan 4	1 Unit
4	Bangunan Lantai 2	1 Unit Gedung
5	Alat Angkutan:	
	a. Kendaraan Roda 4 (Empat)	24 Unit
	b. Kendaraan Roda 2 (Dua)	47 Unit

Data Subbag Umum TMT 31 Desember 202

UPTD. BLKI Balikpapan terletak di Jalan Sepinggian Baru No. 31 , Telpon / *Call Center* 08115988854, dengan keadaan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. BLKI Balikpapan

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah Kantor Disnakertrans Prov.Kaltim	2874 m2
2	Luas Bangunan dan Gedung	4892 m2
3	Bangunan Lantai 1 terdiri dari:	
	a. Gedung	3 Unit

	b. Mushola	1 Unit
	c. Gudang	1 Unit
	d. Aula	1 Unit
	e. Halaman Parkir Roda 2&4	2 Unit
	f. Kelas	11 unit
	g. Workshop	4 unit
4	Bangunan Lantai 2 terdiri dari:	
	a. Gedung untuk asrama	1 Unit
5	Alat Angkutan:	
	a. Kendaraan Roda 4	2 Unit
	b. Kendaraan Roda 2	2 Unit

Data Subbag TU UPTD. BLKI Balikpapan TMT 31 Desember 2022

UPTD. BLKI Bontang terletak di Jalan Prestasi, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang , dengan keadaan sarana dan prasarana per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. BLKI Bontang

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah Kantor Disnakertrans Prov.Kaltim	4.425 Ha
2	Luas Bangunan dan Gedung	34.106 m2
3	Bangunan Lantai 1 terdiri dari:	
	a. Gedung	1 Unit
	b. Mushola	1 Unit
	c. Gudang	1 Unit
	d. Aula	1 Unit
	e. Halaman Parkir Roda 2&4	1 Unit
	f. Kelas	10 Unit
	g. Workshop	10 Unit
4	Bangunan Lantai 2 terdiri dari:	
	a. Gedung	4 Unit
5	Alat Angkutan:	
	a. Kendaraan Roda 4	1 Unit
	b. Kendaraan Roda 2	1 Unit

Data Subbag TU UPTD. BLKI Bontang TMT 31 Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.8
T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2019-2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Targe SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat Pengangguran terbuka	-	-	-	7,64 %	7,01	6,38	5,75	5,11	6,09	6,87	6,83	5,71	-	98,45	99,86	98,92	99,30	-
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	-	-	-	29,41%	0,27	33,14	35	40	34,61	4,80	26,04	53,12	-	94,80	95,47	92,90	100	-
3	Persentase Penempatan tenaga kerja	-	-	-	50%	51	52	53	54	48,95	75	79,07	68,43	-	98,95	76	72,91	100	-
4	Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	-	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	83	86,15	-	-	100	100	100	100	-
5	Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	150	-	-	-	-	100	-
6	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	-	-	-	100%	100	100	100	100	100	83	100	100	-	100	83	100	100	-
7	Tersusunnya Kawasan Transmigran	-	-	-	3 Kimtrans	3	1	1	1	1	1	1	1	-	98	98	100	100	-

Berdasarkan tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 6,65 persen pertahun;
- 2. Persentase penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 53,12 persen hal ini karena tingkat pengangangguran terbuka menurun, dan masyarakat kondisi ekonomimulai membaik pasca pandemic covid 19;

3. Presentase penempatan tenaga kerja dari tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi cenderung menurun karena belum mendapatkan data yang lebih sinkron dari kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja binaan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, dan juga terkendalanya syarat yang diperlukan oleh industri atau perusahaan industri yang mengharuskan pencari kerja untuk mempunyai sertifikat kompetensi serta pencari kerja lebih mengutamakan domisili lokasi kerja;
4. Indikator Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan pada tahun 2022 mengalami perubahan yaitu Persentase Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dalam hal ini kondisi penyelesaian kasus dan pelanggaran norma ketenagakerjaan cenderung meningkat menjadi 377 perusahaan atau sebesar 150 persen;
5. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 besarnya berfluktuasi cenderung meningkat sebesar 100 persen;
6. Tersusunnya Kawasan Transmigran berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat yang kongkuren pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, pemukiman transmigrasi yang difasilitasi penetapannya adalah satu pemukiman transmigrasi (kimtrans) yaitu Desa Kladen, Kabupaten Paser.

Tabel 2.9
T-C.24 Pencapaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86.70%	93%	3,444,939,784	91%	3,471,656,519	-	-	-	-	-	-
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	1,775,508,636	100 unit	1,337,252,115	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													
2.01.15	Program Peningkatan	Persentase lulusan	80%	76%	6,619,526,900	75%	2,508,912,452	-	-	-	-	-	-
	Kualitas dan Produktivitas	pelatihan yang terserap											
	Tenaga kerja	dipasar kerja											
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	27%	2,366,996,250	25%	1,088,666,779	-	-	-	-	-	-
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%	100%	2,118,122,885	100%	1,102,602,000	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	0%	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawas	120 Perusahaan	169 Perusah an	2,428,220,690	250 Perusah an	1,328,960,644	-	-	-	-	-	-
2.01.29	Program Peningkatan Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi	Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya	80%	0%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatka	70%	0%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi													
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0 kimtrans	4 kimtrans	1,231,433,380	4 kimtrans	413,977,686	-	-	-	-	-	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja												
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	76%	43,742,697,913	81%	42.145.237.145	81%	-
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN Tenaga Kerja	Tercapainya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	70%	0	70%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Balikpapan)	0	0	0	0	0	85%	3,436,148,964	85%	2,153,293,108	61,72%	-
		Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan (BLKI Bontang)	0	0	0	0	0	85%	2,136,148,964	85%	836,233,500	15,93%	-
		Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	0	0	0	0	0	70%	204,132,915	70%	832,889,618	90%	-
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	31%	2,378,629,500	31%	716,846,853	31%	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	20%	1,375,437,984	20%	1,230,701,850	100%	-
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang dibina dan diawasi	0	0	0	0	0	150 Perusahaan	1.083.792.000	250 Perusahaan	1,156,729,361	377 Perusahaan	-
		Perusahaan yang dibina dan diawasi (UPTD Pengawasan)	0	0	0	0	0	20 Perusahaan	499,981,992	20 Perusahaan	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	kondisi kerja awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)	target	realisasi (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi													
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0	0	0	0	0	1 kimtrans	263,010,000	1 kimtrans	237,604,642	1 kimtrans	-
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Masyarakat Transmigrasi Mandiri	0	0	0	0	0	1 kimtrans	200.000.000	1 kimtrans	174,211,448	1 kimtrans	-
3.32.02	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kesepakatan bersama dengan provinsi lain	0	0	0	0	0	1 kimtrans	150,000,000	1 kimtrans	205,255,447	1 kimtrans	-

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.4.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibagi berdasarkan kelompok sasaran layanan bidang- bidang dan BLKI yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat kelompok sasaran layanannya adalah semua ASN dan tenaga honor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bidang Pengembangan kelompok sasaran layanannya adalah tenaga kerja, pencari kerja, pengusaha, Lembaga Pelatihan Kerja, peserta pelatihan, perusahaan kategori UKM, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) kabupaten/kota;
3. Bidang Hubungan Industrial kelompok sasaran layanannya adalah pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, Pengusaha, Asosiasi Pengusaha;
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan kelompok sasaran layanannya adalah pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/buruh, advokat/pengacara, Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);
5. Bidang Transmigrasi kelompok sasaran layanannya adalah warga transmigran;
6. BLKI Bontang dan BLKI Balikpapan kelompok sasarannya adalah Penduduk Usia Kerja yang berusia 18 tahun keatas, tenaga kerja, pencari kerja.

2.4.2. Ketenagakerjaan

a) Kondisi Ekonomi

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mencapai Rp 439.087.521,74, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 440.676.356,22. Selama tahun 2018 – 2022 hampir semua sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2018 – 2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,201,129.7	33,396,193	33,020,515	32,963,90	33,649,34
B	Pertambangan dan Penggalian	217,605,409.0	233,762,252	223,064,386	227,952,68	235,949,04
C	Industri Pengolahan	97,499,086.0	96,824,493	94,146,617	96,180,24	99,651,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	261,803.1	284,529	317,498	324,79	337,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	228,060.5	235,440	247,872	258,26	278,10
F	Konstruksi	33,718,900.6	35,682,996	35,228,575	36,949,56	39,887,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,652,600.1	27,025,570	27,276,566	28,222,67	30,137,13
H	Transportasi dan Pergudangan	14,099,444.0	14,264,272	13,466,985	13,684,59	15,301,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,127,096.1	4,340,117	4,109,293	4,184,89	4,577,47
J	Informasi dan Komunikasi	7,405,133.1	7,795,537	8,338,484	9,002,58	9,712,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,817,469.1	6,966,068	7,137,990	7,320,02	8,012,39
L	Real Estate	4,227,269.2	4,316,689	4,351,113	4,290,18	4,397,87
M,N	Jasa Perusahaan	896,169.5	914,125	889,670	911,55	960,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,019,417.5	8,252,790	7,925,152	8,108,53	8,727,05
P	Jasa Pendidikan	6,835,424.0	7,036,310	7,250,319	7,420,37	7,679,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,693,003.4	2,864,486	3,428,051	3,858,13	4,048,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,536,070.4	2,326,151	2,548,785	2,664,41	2,851,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		464,823,485.4	486,712,236	472,864,886	484,297,35	506,158,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		356,177,217.3	381,225,539	372,332,766	-	-

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Dorongan investasi di Kalimantan Timur diharapkan dapat menggerakkan kesembilan sektor ekonomi agar dapat tumbuh dan menimbulkan *multiplier effect* yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

b) Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Pada tahun 2022 Penduduk Usia Kerja di Kalimantan Timur sebanyak 2.665.909 orang.

Tabel 2.11
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi
Kalimantan Timur, Tahun 2018-2022

JENIS KELAMIN	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki	1.409.619	1.429.619	1.450.313	1.460.472	1.409.619
Perempuan	1.256.290	1.299.925	1.324.858	1.335.975	1.256.290
JUMLAH	2.665.909	2.729.544	2.775.171	2.796.447	2.665.909

Sumber : BPS Prov. Kaltim.

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 67,46 persen dari tahun sebelumnya 65,50 persen.

Tabel 2.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

JENIS KELAMIN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki	82,49	83,04	81,52	84,21
Perempuan	45,35	47,17	47,96	49,13
JUMLAH	64,99	65,96	65,50	67,46

Sumber : BPS Prov. Kaltim

d) Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Selama periode Tahun 2018-2022 angkatan kerja menurut jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 1.232.928 orang. Angkatan kerja laki-laki mengalami kenaikan sejumlah 2.997 orang pada tahun 2021-2022. Angkatan kerja perempuan mengalami penurunan sejumlah 36.556 orang pada tahun 2021-2022. Secara kumulatif angkatan kerja di Provinsi Kalimantan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan 33.559 orang.

Tabel 2.13
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki	1.162.847	1.187.224	1.182.286	1.229.931	1.232.928
Perempuan	569.751	613.217	635.394	656.430	619.874
<i>Sumber : BPS Prov. Kaltim.</i>		1.800.441	1.817.680	1.886.361	1.852.802

Sumber : BPS Prov. Kaltim

e) Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

e.1.) Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur menurut lapangan usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.11. Pada Tahun 2022 penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur terbesar adalah bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Berturut-turut kemudian disusul oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan & perikanan, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor listrik gas dan air serta sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.14
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA *)	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
1	325.013	346.768	356.951	349.451
2	140.279	123.059	113.079	130.564
3	128.721	105.416	118.065	131.400
4	10.706	10.455	4.666	7.544
5	13.181	9.376	9.497	9.333
6	99.938	108.493	113.086	105.395
7	348.786	373.658	391.633	350.429
8	91.424	85.867	95.671	104.347
9	123.917	121.228	140.700	132.798
10	11.231	15.185	16.111	10.973
11	23.196	21.302	13.928	20.760
12	7.126	5.948	8.007	8.776
13	50.699	35.932	56.786	55.065
14	112.369	113.818	96.430	111.964
15	95.272	97.502	102.689	100.599
16	29.424	36.164	42.350	42.318
17	82.199	82.625	78.248	75.204
JUMLAH	1.693.481	1.692.796	1.757.897	1.746.920

Sumber : BPS Prov. Kaltim

*) Keterangan:

- 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
- 2. Pertambangan dan penggalian
- 3. Industri pengolahan
- 4. Listrik, gas dan air
- 5. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
- 6. Konstruksi
- 7. Perdagangan besar dan eceran, repaasi dan perawatan mobil dan sepedamotor
- 8. Transportasi dan Pergudangan
- 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10. Informasi dan Komunikasi
- 11. Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12. Real Estate
- 13. Jasa Perusahaan
- 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 15. Jasa Pendidikan
- 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17. Jasa Lainnya

e.2.) Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan

Penduduk yang bekerja dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatannya yang terbagi kedalam 7 jenis jabatan seperti terlihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.15
Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

STATUS PEKERJAAN*)	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Berusaha Sendiri	317.197	363.703	367.367	364.128	418.152
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	148.012	154.138	187.578	201.760	147.138
Berusaha dibantu buruh tetap	62.669	74.760	58.252	72.410	58.511
Buruh/Karyawan/Pegawai	906.878	911.487	836.504	845.892	915.189
Pekerja bebas di pertanian	19.848	18.406	18.887	18.000	68.255
Pekerja bebas di Non Pertanian	40.961	42.274	51.759	58.202	
Pekerja tidak dibayar	122.720	128.713	172.449	197.505	139.675
JUMLAH	1.618.285	1.693.481	1.692.796	1.757.897	1.746.920

Sumber : BPS Prov. Kaltim

f) Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.16
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2022

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki	72.875	71.566	85.707	88.278	63.118
Perempuan	41.438	35.394	39.177	40.186	42.764
JUMLAH	114.313	106.960	124.884	128.464	105.882

Sumber : BPS Prov. Kaltim

TABEL 2.17 PENGANGGURAN
UMUR 17 TAHUN KE ATAS MENURUT
PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2022	2021	2020	2019	2018
Tidak/Belum Pernah Sekolah+Tidak/Belum Tamat SD	7.736	4.967	16.740	6.220	2.933
Sekolah Dasar	9.405	14.433	13.785	8.551	8.957
SMP	13.987	13.586	39.333	13.328	14.226
SMA Umum	33.560	34.771	33.711	32.323	33.334
SMA Kejuruan	27.672	37.403	6.550	25.384	31.287
Diploma I/II/III	3.094	5.662	876	4.270	6.734
Universitas	7.851	14.714	13.113	14.999	12.443
Total	103.305	125.536	124.108	105.075	109.914

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2022

TABEL 2.18
ANGKATAN KERJA KALIMANTAN TIMUR MENURUT PELATIHAN
BERSERTIFIKAT, 2018-2022

		Sakernas Agustus				
		2022	2021	2020	2019	2018
Pernah Mengikuti Pelatihan dan Mendapat Sertifikat	Ya	498.626	345.817	415.304	354.785	294.434
	Tidak	1.354.176	1.500.730	1.402.376	1.445.656	1.437.475
	Total	1.852.802	1.846.547	1.817.680	1.800.441	1.731.909

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2022

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Tingkat penempatan pencari kerja di pasar kerja masih rendah	1.1. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan	1.1.1 tidak seimbangnya rasio jumlah fungsional produktivitas dengan jumlah tenaga kerja yang perlu ditingkatkan produktivitasnya, 1.1.2 belum optimalnya Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 1.1.3 Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga kerja 1.1.4 Belum optimalnya kolaborasi dengan sektor-sektor terkait seperti industri, Pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1.2. Belum optimalnya penempatan lulusan pelatihan kerja yang telah mendapatkan pelatihan	1.2.2.Belum maksimalnya sosialisasi dan pemasaran program pelatihan dan kepada masyarakat, dunia usaha/idustri dan dunia pendidikan 1.2.3.Masih terbatasnya modul dan standar- standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan 1.2.4.Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan 1.2.5.Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja belum optimal dilakukan 1.2.6.Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan sektor swasta belum optimal dilakukan
	1.3.Belum optimalnya penempatan pencari kerja di pasar kerja	1.3.1.Tidak seimbangnya rasio jumlah fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja dengan jumlah pencari kerja yang membutuhkan fasilitasi penempatan 1.3.2.Link and Match pencaker dengan pasar kerja masih rendah 1.3.3.Pasar kerja yang tersedia memerlukan kompetensi teknis yang belum dimiliki pencaker yang tersedia 1.3.4.Terbatasnya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja bisa menggunakan webinar, zoom dll 1.3.5. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja dan perusahaan belum optimal dan efektif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		1.3.6. Belum optimalnya pendataan AK1 1.3.7. Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan
2. Kualitas hubungan industrial yang belum optimal 3. Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan umum dan norma K3 di tempat kerja	2.1. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur skala Upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) masih perlu ditingkatkan 3.1. Belum optimal ditaatinya norma ketenagakerjaan dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja	2.1.1. Tidak seimbangnya rasio jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan 2.1.2. Pemahaman terkait dengan syarat kerja belum sepenuhnya dipahami baik oleh pekerja maupun perusahaan 2.1.3. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial (LKS Bipartit) 2.1.4. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh akan pentingnya PP/PKB, struktur skala upah 2.1.5. Perbedaan kepentingan antar pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh 3.1.1. Tidak seimbangnya rasio jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang diperiksa dan diawasi 3.1.2. Tidak seimbangnya rasio jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ketenagakerjaan dengan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan 3.1.3. Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas dengan banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau sehingga lokasi/letak perusahaan-perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur juga banyak yang berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4. Belum optimalnya fasilitasasi penetapan kawasan transmigrasi	4.1. Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi yang masih belum ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi	4.1.1. regulasi dan sumber daya manusia yang masih minim
5. Belum optimalnya pelaksanaan penataan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi	5.1. Pemenuhan penataan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi tergantung pada ketersediaan sumber dana dan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat	5.1.1. Pemenuhan daya tampung dalam penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi alokasi pembiayaan dan kuota yang belum maksimal
6. Belum optimalnya Kegiatan Pelatihan bagi warga transmigran	6.1. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi warga transmigran harus disesuaikan dengan potensi daerah penempatan	6.1.1. Masih terjadi ketidak sinkronan regulasi terkait urusan transmigrasi dan masih belum optimalnya ketrampilan warga transmigran.
7. Belum optimalnya pendataan pelaksanaan kegiatan fasilitasi sarana prasarana pada kawasan transmigrasi	7.1. Masih belum memenuhi standar kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan	7.1.2. Masih kurangnya Ketersediaan sarana Prasarana pada kawasan transmigrasi

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Terkait

3.2.1 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan lembaga vertikal bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, di mana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama ini didukung sejumlah indikator kinerja program sebagai berikut:

- Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan.
- Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.
- Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya.
- Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.
- Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3.
- Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
- Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
- Indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.

- Persentase usulan kebijakan ketenagakerjaan tahun sebelumnya yang diimplementasikan
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik. Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu:
- Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan,dan Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh sub-indikator kinerja program sebagai berikut: Indeks dan Nilai Evaluasi PMPRB, Persentase temuan yang ditindaklanjuti, nilai evaluasi SAKIP, Nilai Kinerja mitra kerja pengawasan internal, tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah (termasuk *whistle blowing system*), Indeks kepuasan layanan data dan informasi ketenagakerjaan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Kementerian Ketenagakerjaan

Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. belum optimalnya tingkat produktivitas tenaga kerja	1.1. tidak ada ASN Fungsional Produktivitas 1.2. Belum optimalnya Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 1.2 Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga kerja 1.3 Belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga kerja	Komitmen semua ASN Disnakertrans Prov. Kaltim untuk mendukung RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 yang terkait ketenagakerjaan

Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		1.4. Belum optimalnya kolaborasi dengan sektor-sektor terkait seperti Pendidikan dan industry yang mendukung peningkatan produktivitas	
	2. Belum optimalnya penempatan lulusan pelatihan kerja yang telah mendapatkan pelatihan	2.1.Minimnya kuantitas dan kualitas SDM ASN terhadap tupoksinya 2.2. Minimnya kuantitas dan kualitas instruktur pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas dan kualitas pelatihann yang menjadi kurang maksimal 2.3. Belum maksimalnya sosialisasi dan pemasaran program pelatihan dan kepada masyarakat, dunia usaha/idustri dan dunia Pendidikan 2.4. Masih terbatasnya modul dan standar- standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan 2.5.Dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan 2.6.Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja belum optimal dilakukan 2.7. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan sektor swasta belum optimal dilakukan	

Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	3. Belum optimalnya penempatan pencari kerja di pasar kerja	3.1. Penempatan tenaga kerja terdidik pada sektor formal belum optimal 3.2. Link and Match pencaker dengan pasar kerja masih rendah 3.3. Pasar kerja yang tersedia memerlukan kompetensi teknis yang belum dimiliki pencaker yang tersedia 3.4. Terbatasnya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja 3.5. Minimnya kuantitas Fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja sehingga pelayanan penempatan kerja kurang optimal 3.5. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja dan perusahaan belum optimal dan efektif 3.6. Dukungan personel pendataan tenaga kerja yang kurang memadai	
	4. Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur skala Upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) di perusahaan	4.1. Masih perlu ditingkatnya pembinaan dan sosialisasi dari erkait syarat-syarat kerja sperti sosialisasi terkait PP/PKB, SUSU/ Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) 4.2. rasio mediator hubungan industrial tidak sebanding dengan jumlah perusahaan	

Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		4.3. Pemahaman terkait dengan syarat kerja belum sepenuhnya dipahami baik oleh pekerja maupun perusahaan 4.4.Masih banyak pekerja yang tidak memahami aturan ketenagakerjaan 4.5. Kelembagaan hubungan industrial (LKS Bipartit) di perusahaan- perusahaan belum optimal 4.6. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh akan pentingnya PP/PKB, Struktur Skala Upah 4.7. Perbedaan kepentingan antar pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh 4.8. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja/buruh atau SP/SB terkait pentingnya peran LKS Bipartit di perusahaan	
	5. Belum optimalnya ditaatinya norma ketenagakerjaan (norma wajib lapor ketenagakerjaan, waktu kerja waktu istirahat, pengupahan, kebebasan berserikat, pekerja perempuan dan anak) dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja	5.1. Rasio jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Provinsi Kaltim	

Sasaran Renstra Kemenaker 2020-2024	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		5.2. Rasio jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan penyidikan terhadap pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang memiliki sanksi pidana	
		5.3. Masih banyak pengusaha- pengusaha yang kurang kooperatif untuk menyerahkan data-data ketenagakerjaan yang diminta oleh pengawas ketenagakerjaan	
		5.4. Masih ada pengusaha- pengusaha yang tidak kooperatif untuk menerima pengawas ketenagakerjaan	
		5.5. Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang sangat luas dengan banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau sehingga lokasi/letak perusahaan- perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur juga banyak yang berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan.	

3.2.2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga merupakan lembaga vertikal bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Strategis 2020- 2024 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi,

1. Tercapainya Kinerja Tatalaksana di lingkungan Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
2. Tersedianya Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB;
3. Tersedianya Fasilitas Legalitas Tanah dalam Kawasan Transmigrasi;
4. Tersedianya Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat SKP;
5. Tersedianya Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Sasaran Strategis Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun 2020 -2024

yaitu :

1. Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dimana bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disusun mengacu ke Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sasaran Strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi dan terwujudnya konektivitas intra dan antar Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan antar kawasan Transmigrasi,
2. Tercapainya indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang berkembang mandiri dan berdaya saing, indeks perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dari cukup berkembang menjadi berkembang, indeks perkembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dari 7 KPB menjadi 12 KPB.
3. Terlaksananya kebijakan dan regulasi pengembangan kawasan transmigrasi,

- 4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi sumber daya aparatur dan masyarakat di Kawasan Transmigrasi,
- 5. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan di Kawasan Transmigrasi,
- 6. Terwujudnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan di Kawasan Transmigrasi,
- 7. Terwujudnya pengembangan ekonomi dan investasi di KawasanTransmigrasi,
- 8. Terwujudnya fasilitasi pengelolaan aset di Kawasan Transmigrasi.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sasaran Renstra Kemendes 2021-2026	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Direktorat Perencanaan			
1. Tercapainya Kinerja Tatalaksana di lingkungan Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;	Penyelesaian permasalahan di kawasan transmigrasi yang belum optimal	1. Mandatori terhadap pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ada NSPK dalam penyelenggaraan Transmigrasi	
2. Tersedianya Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB;		2. Ketersediaan Data dan Peta Ketransmigrasian belum lengkap	
3. Tersedianya Fasilitasi Legalitas Tanah dalam Kawasan Transmigrasi;		3. Masih kurangnya jumlah SDM di Bidang Transmigrasi	
4. Tersedianya Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat SKP;		4. Masih terbatasnya keterampilan SDM di Bidang Transmigrasi terutama terkait Pemetaan	
5. Tersedianya Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		5. Sinergi baik antara K/L terkait di pusat maupun antara pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi masih lemah	
Sasaran Renstra Kemendes 2021-2026	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi			
1. Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).		6. Permasalahan tidak selalu timbul di internal OPD, melainkan sebagian permasalahan dikarenakan kondisi dilapangan yang melibatkan pihak masyarakat	
2. Tersedianya kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dimana bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disusun mengacu ke Dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.		7. Belum terbitnya SK HPL yang menjadi persyaratan pengurusan penerbitan SHM dan adanya oknum lahan transmigran oleh masyarakat lokal, tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan dan tumpang tindih lahan dengan kawasan huta	
Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi		8. Belum Maksimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait	
1. Terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi dan terwujudnya konektivitas intra dan antar Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan antar kawasan Transmigrasi,		9. Refocusing Anggaran untuk mendukung program kegiatan bidang transmigrasi 10. Refocusing Kuota Penempatan Transmigran	
2. Tercapainya indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang berkembang mandiri dan berdaya saing, indeks perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dari cukup berkembang menjadi berkembang, indeks perkembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dari 7 KPB menjadi Berdaya Saing		11. Masih terbatasnya keterampilan masyarakat transmigrasi untuk berwirausaha	

Sasaran Renstra Kemendes 2021-2026	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi			
3. Terlaksananya kebijakan dan regulasi pengembangan kawasan transmigrasi,		12. Masalah SDM yang belum memiliki ketrampilan dalam pemanfaatan SDA yang tersedia	
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi sumber daya aparatur dan masyarakat di Kawasan Transmigrasi,			
5. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan di Kawasan Transmigrasi,			
6. Terwujudnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan di Kawasan Transmigrasi,			
7. Terwujudnya pengembangan ekonomi dan investasi di awasanTransmigrasi,			
8. Terwujudnya fasilitasi pengelolaan aset di Kawasan Transmigrasi			

3.4. Isu-isu Strategis

Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis ke depan yaitu :

1. Kurangnya penciptaan lapangan kerja;

Walaupun Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sudah dibawah rata-rata TPT Nasional yakni TPT Nasional 5,86% dan TPT Kaltim 5,71% per Agustus 2022, sehingga lebih rendah 0,15% dari rata-rata TPT Nasional, akan tetapi peluang untuk kesempatan kerja masih rendah, dikarenakan berdasarkan data jumlah Perusahaan di Kaltim sebanyak 17.822 perusahaan dan nilai investasi masuk ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang tahun 2022 mencapai Rp.

57,76 triliun tetap tidak bisa mendongkrak angka penempatan tenaga kerja di Kaltim khususnya.

2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Program produktivitas tenaga kerja dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, pengembangan teknologi dan sistem kerja yang lebih efisien, efektif, dengan mempertahankan atau meningkatkan mutu/kualitas kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja tersebut.

3. Penempatan pencari kerja di pasar kerja dalam negeri masih perlu ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 jumlah pencari kerja di Provinsi Kaltim Tahun 2021, 2022, berturut-turut adalah 22.358 orang,

47.254 orang. Jumlah lowongan kerja pada tahun 2021, 2022 berturut-turut adalah 5035, 16.433. Penempatan pencari kerja pada tahun 2021, 2022 berturut-turut adalah 3.531, 12.334. Berdasarkan data tersebut penempatan pencari kerja di pasar kerja di Provinsi Kalimantan Timur masih tergolong rendah.

Hal tersebut antara lain disebabkan karena jumlah lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dengan kata lain masih kurangnya lapangan kerja yang tersedia, keterbatasan kualifikasi pendidikan dan keahlian, persaingan dengan tenaga kerja dari luar provinsi Kalimantan Timur.

Untuk penempatan di pasar kerja dari kegiatan pemagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mengalami kendala belum adanya sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Profesi, sehingga perlu direncanakan uji kompetensi bagi peserta yang telah menyelesaikan

4. Penempatan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan BLKI (Balai Latihan Kerja Industri) masih perlu ditingkatkan

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 peserta pelatihan di BLKI Balikpapan adalah 352 orang , 320 orang. Jumlah peserta pelatihan yang lulus dan kompeten di BLKI Balikpapan berturut turut tahun 2021, 2022

adalah 426 orang, 458 orang dan yang ditempatkan adalah 426 orang, 387 orang. Sedangkan untuk BLKI Bontang jumlah peserta pelatihan yang lulus dan kompeten tahun 2021, 2022 berturut-turut adalah 223 orang, 253 orang dan yang ditempatkan adalah 217 orang, 52 orang. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 jumlah lowongan kerja dari sembilan sektor berturut-turut adalah 15.576 lowongan dan 4.857 lowongan. Melihat perbandingan jumlah peserta lulusan pelatihan yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja maka dapat disimpulkan bahwa penempatan peserta lulusan pelatihan BLKI masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan jumlah instruktur teknis dan keterbatasan sarana dan prasana pelatihan yang ada di kedua BLKI tersebut.

Tantangan dunia ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, masih diwarnai oleh ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Keterbatasan jumlah Asesor serta keterbatasan tersedianya tempat uji kompetensi menjadi hambatan untuk memenuhi permintaan sektor industri terkait sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Tipe 2 (LSP P2) di BLKI Disnakertrans Provinsi Kaltim.

LSP P2 mirip dengan LSP P1, tetapi dijalankan oleh suatu departemen pemerintah tertentu yang membutuhkan SKK Khusus dari departemen itu sendiri untuk dijadikan landasan edukasi dan sertifikasi internal mereka. LSP P2 dibentuk oleh dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan jaringan UPT yang melakukan program sertifikasi kompetensi dapat diterbitkan oleh UPT yang membentuknya dengan UPT-UPT yang lain cukup sebagai tempat uji kompetensi (TUK). LSP P2 dapat menggunakan SKK-NI maupun SKK-Khusus.

5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan ASN Fungsional Instruktur di BLKI-BLKI, Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial

Kurangnya ASN fungsional di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mempengaruhi kemampuan dinas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dapat menghambat proses pelayanan

6. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Masih Perlu Dimaksimalkan

Ada beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan perusahaan belum maksimal, yaitu

- a. Jumlah ASN Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang secara kuantitas masih kurang sedangkan lokasi perusahaan- perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur banyak berada di lokasi lokasi terpencil dan sulit dijangkau sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan menjadi tidak maksimal.
- b. Masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif untuk memberikan data-data ketenagakerjaan yang diminta oleh pengawas ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan.
- c. Masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif untuk menerima pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan.

7. Perusahaan-perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak Masih Perlu Ditingkatkan

Perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak adalah perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dapat dilihat dari kepatuhan perusahaan terhadap ada tidaknya Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama

(PKB), ada tidaknya Struktur Skala Upah, terdaftar atau tidaknya pekerja di perusahaan tersebut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

8. Perlunya Peningkatan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi Dokumen

Rencana Kawasan Transmigrasi yang masih belum ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi menjadi salah satu masalah dalam program perencanaan kawasan transmigrasi. Penetapan menjadi kawasan transmigrasi menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya bisa bersikap menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

9. Belum optimalnya percepatan pemenuhan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi dan masih perlu peningkatan daya saing sumber daya manusia pada kawasan transmigrasi

Belum optimalnya percepatan pemenuhan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi disebabkan pemenuhan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sepenuhnya tergantung pada ketersediaan sumber dana dan kouta yang diberikan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya bersifat menunggu dan tidak memiliki kewenangan penuh. Untuk meningkatkan daya saing sumber

daya manusia pada kawasan transmigrasi diperlukan pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari para transmigran.

8. Perwujudan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan yang masih perlu lebih diperhatikan

Untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan, hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah kegiatan fasilitasi sarana prasarana pada kawasan transmigrasi yang perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas sehingga memenuhi standar kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi kewilayahan.

Bab 4 | TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum;
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah misi pertama **yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.** Misi RPJPD tersebut sesuai dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Revolusi Mental dan Pembangunan Berkebudayaan.**

Isu strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yang berkaitan dengan Aspek Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026 adalah **Peningkatan daya saing sumber daya manusia.**

Tujuan 1 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing** dengan indikator tujuan 1 RPD 2024-2026 adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Sasaran 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026 adalah **Menurunnya Tingkat Pengangguran** dengan Indikator Sasaran adalah **Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**.

Tujuan 4 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah **Mewujudkan Reformasi Birokrasi** dengan indikator tujuan 4 Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran 11 **Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 maka tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dijabarkan seperti dibawah ini.

4.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1. Menurunkan Tingkat Pengangguran,** dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**.
- 2. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK,** dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;**

4.1.2. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan;
- b. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Pembinaan Warga Transmigrasi;
- c. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel TC 2.25 Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Tujuan dan Sasaran Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Realisasi			Target RPD		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
TUJUAN 1 RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2026, “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing” , dengan Indiktor " Indeks Pembangunan Manusia "								
Sasaran 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, “Menurunnya Tingkat Pengangguran" dengan Indikator, “Tingkat Pengangguran Terbuka “								
1. Tujuan : Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			6,83%	5,71`%	5,46%	5,30%	5,14%
Sasaran :								
1.Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan	1.1. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	1.1.1. Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih dan bersertifikasi kompetensi (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) / Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) x 100				75%	80%	85%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Realisasi			Target RPD		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
	1.2.Persentase Kabupaten/Ko ta Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.2.1. Jumlah Kab/Kota Yang Telah Dibina/ Jumlah Kabupaten Kota x 100				75%	80%	85%
	1.3. Peningkatan Perusahaan Lintas Kabupaten/Ko ta Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	1.3.1. (Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x)- Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n (x-1) / Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n (x-1) x 100				10%	12,12%	13,51%
	1.4. Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	1.4.1.Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 pada akumulasi tahun n/ Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar WLKP Online pada tahun n x 100				16,83%	33,33%	42,10%
2. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitasi Pembinaan Warga Transmigrasi	2.1.Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya	2.1.1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi penetapannya				1 Kawasan Trans migrasi	1 Kawasan Trans migrasi	1 Kawasan Trans migrasi
	2.2. Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya	2.2.1. Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya				1 Kimtrans	1 Kimtrans	1 Kimtrans

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran OPD, sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Selengkapnya relasi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersaji pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026	Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran	1.1.Menurunkan Tingkat Pengangguran	1.1.1. Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan	1.1.1.1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.1.1.1.1. Meningkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Yang dibina dan difasilitasi agar dapat menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro
					1.1.1.1.2. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten/Kota mengikuti pelatihan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro
				1.1.1.2. Meningkatkan Kompetensi, Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi , Koordinasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pengembangan Pelatihan	1.1.1.2.1.Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan kepada para pencari kerja sehingga memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pasar kerja,
					1.1.1.2.2. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara kontinu dan komprehensif sehingga memperoleh sertifikat kompetensi
					1.1.1.2.3.Peningkatan Kerjasama dengan Perusahaan untuk memberikan kesempatan magang atau kerja bagi lulusan BLKI.

No	Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026	Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran	1.1. Menurunkan Tingkat Pengangguran	1.1.1. Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan	1.1.1.3. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri serta Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, Optimalisasi Fungsi Pengantar Kerja dan Penyelenggaraan Model-Model Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (Bursa Kerja Online/BKO, Job Market Fair/ JMF).	1.1.1. 3.1. Meningkatkan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					1.1.1.3.2. Meningkatkan peran Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
					1.1.1.3.3. Meningkatkan Promosi Pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, termasuk informasi tentang kualifikasi dan kriteria yang dibutuhkan untuk posisi tersebut melalui informasi pasar kerja (JMF /Job Market Fair) , Bursa Kerja Online)
					1.1.1.3.4. Mendorong lulusan Balai Latihan Kerja Industri untuk berwirausaha
					1.1.1.3.5. Monitoring dan Evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja dalam negeri

No	Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026	Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran	1.1.Menurunkan Tingkat Pengangguran	1.1.1. Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan	1.1.1.4. Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk menciptakan Hubungan Industrial yang Kondusif dan Harmonis, serta Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Koordinasi dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi/Kab/Kota, Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit, Mendorong Perusahaan dalam Kepesertaan Jaminan Sosial dan Pengembangan Data dan Informasi Hubungan Industrial dalam Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.	1.1.4.1. Menjaga dan Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif untuk Menciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Harmonis 1.1.4.2. Meningkatkan Penguatan dan Pengelolaan Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan fokus penetapan sistem pengupahan yang berkeadilan, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesahan peraturan perusahaan, 1.1.4.3. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
				1.1.1.5. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan serta Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan dan Norma Keselamatan dan Kesehatan	1. 1.1.5.1. Meningkatkan Koordinasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan
					1.1.1.5.2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan dengan dilakukan secara berkesinambungan

No	Tujuan/Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026	Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Sasaran OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim	Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan SDM Berdaya Saing/Menurunnya Tingkat Pengangguran	1.1. Menurunkan Tingkat Pengangguran	1.1.2. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Pembinaan Warga Transmigrasi	1.1.2.1. Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Transmigrasi	1.1.2.1.1 Meningkatkan kawasan transmigrasi baru yang difasilitasi penetapannya
					1.1.2.1.2. Meningkatkan satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya
					1.1.2.1.3. Meningkatkan daya saing transmigran
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi /Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	2.1. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	1.1.3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1.3.1. Mengajukan usulan kebutuhan ASN Fungsional Instruktur Kejuruan Teknis BLKI Balikpapan dan Bontang, ASN Fungsional Produktivitas, fungsional pengantar kerja, Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	1.1.3.1.1.. Peningkatan rasio jumlah ASN fungsional sebanding dengan objek yang menjadi sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				1.1.3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur	1.1.3.2.1. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik dan aparatur Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur
				1.1.3.3. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	1.1.3.3.1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan (target dan sasaran yang jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu.

Bab

6

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan

dalam rangka menunjang Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka ada beberapa indikator yang mengacu tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja merupakan acuan kerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja untuk menetapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran, yang kemudian disajikan dalam dokumen tahunan dan penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan kuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2024-2026. Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penyajian dari hal tersebut di atas dapat dituangkan dalam table 1.19 tabel T-C. 27 sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Realisasi			Target RPD		
			2020	2021	2022	2024	2025	2026
TUJUAN 4 RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2026, “MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI”, dengan indikator “ Indeks Reformasi Birokrasi”								
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK dengan indikator, “ Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “ Nilai Akuntabilitas Kinerja”								
2. Tujuan : “Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					B (60)	B (60,50)	B (60,50)
Sasaran :								
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi		77,9		85	85,5	86
	1.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50,35 (CC)	55,54 (CC)		60, 05 (B)	60, 10 (B)	60,15 (B)

Bab 7

KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rensta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun kedepan (2024- 2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal			Target			Kondisi Akhir
			2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	(%)	60	60	90	90	90	90	90
2.	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	(%)	0,66	51	50	50	50	50	55
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(%)	7,23	7.512,81	7	7,00	7,00	7,00	7,50
4.	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	(%)	94,76	20,52	20	20	20	20	21
5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(%)	70,31	26,1	27,20	27,20	27,60	28,10	28
6.	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan-undangan Bidang Ketenagakerjaan	(%)	100	86,26	85	85,00	85	86	86

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA
UTAMA

1.	Perangkat Daerah	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
2.	Jabatan	: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
3.	Tugas	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
4.	Fungsi	1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah 2. Perencanaan, pemerintahan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi 3. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan tenaga kerja 4. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan 5. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja 6. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis transmigrasi 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas 9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan	1.1. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	Mewujudkan Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sehingga dapat bersaing di dunia kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih dan bersertifikat kompetensi (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) / Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih (Bidang Pengembangan & UPTD BLKI) x 100	Bid. Pengembangan, BLKI Bpn, BLKI Bontang	Disnakertrans Prov. Kaltim
		1.2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terwujudnya pembinaan kepada Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Dibina/ Jumlah Kabupaten Kota x 100	Lap. Sekretariat dan Bid. Pengembangan	Disnakertrans Prov. Kaltim
		1.3. Peningkatan Perusahaan Lintas Kab Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja agar tercapai peningkatan produktivitas dan keberlangsungan kerja bagi pekerja	Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x) - Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n (x-1) / Jumlah Perusahaan Lintas Kab/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Pada Tahun n(x-1) x 100	Laporan Bidang Hub. Industrial	Disnakertrans Prov. Kaltim

		1.4.Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Mengukur Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 pada akumulasi tahun n/ Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar WLKP Online pada tahun n x 100	Laporan Bidang Pengawasan	Disnakertrans Prov. Kaltim
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitasi Pembinaan Warga Transmigrasi	2.1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya	Terwujudnya penetapan kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya	Laporan Bidang Transmigrasi	Disnakertrans Prov. Kaltim
		2.2.Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya	Terwujudnya permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya	Laporan Bidang Transmigrasi	Disnakertrans Prov. Kaltim
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Bidang Sekretariat	Disnakertrans Prov. Kaltim

		3.2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabiloitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	NilaiAkuntabilitas Kinerja Isntansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	Laporan Bidang Sekretariat	Disnakertrans Prov. Kaltim
--	--	---	--	--	----------------------------------	-------------------------------

Bab 8 | PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, khususnya dalam mendukung meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam arti luas serta pembangunan sektor pendukung lainnya sebagai prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah [RENJA OPD] dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan dapat semakin meningkat dan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kepala Dinas,

A

ROZANI ERAWADI, SH., M.Si
Pembina Utama Madya NIP.
19710124 199703 1 007

Tabel 6.1
Tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 – 2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
					TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik Yang Didukung ASN Berakhlak	Indikator Tujuan 1 : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				57.029.451. 000		60.338.356. 000		64.354.781. 000	
Sasaran 1 : Meningkatn ya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 Indeks	82,00 Indeks	43.397.438. 250	84,00	44.670.218. 800	86,00	48.496.468. 100	
	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Persentase Keluhan Pengguna Ynag Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100.000.00 0	100 persen	100.000.00 0	100 persen	100.000.00 0	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.01	Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	2.449.905.1 00	10 Dokumen	2.503.662.0 18	10 dokumen	2.920.905.0 00	
		1.1.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dok	1.936.649.5 00	3 Dok	1.936.649.5 68	3 Dok	1.800.000.0 00	Perencanaan
		1.1.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	150.000.00 0	Perencanaan
		1.1.01. 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	70.000.000	Perencanaan
		1.1.01. 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	177.780.20 0	2 Laporan	177.780.25 0	2 Laporan	150.000.00 0	Perencanaan

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	335.475.40 0	5 Laporan	389.232.20 0	5 Laporan	750.905.00 0	Perencanaan
		1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	33.305.884. 810	1 Dokumen	34.173.873. 142	1 Dokumen	34.070.620. 200	Umum
		1.1.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orng/Bln	190 Orng/Bln	32.444.637. 810	190 Orng/Bln	33.272.626. 142	190 Orng/Bln	33.259.373. 200	Umum
		1.1.02. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.00 0	1 Dokumen	520.000.00 0	1 Dokumen	550.000.00 0	Umum
		1.1.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.490.000	1 Laporan	27.490.000	1 Laporan	27.490.000	Umum
		1.1.02. 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	310.032.00 0	1 Laporan	330.032.00 0	1 Laporan	210.032.00 0	Umum
		1.1.02. 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	23.725.000	1 Dokumen	23.725.000	1 Dokumen	23.725.000	Umum
		1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.00 0	1 Dokumen	470.000.00 0	1 Dokumen	775.000.00 0	Umum
		1.1.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	190 Paket	190 Paket	190.000.00 0	190 Paket	200.000.00 0	190 Paket	200.000.00 0	Umum

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.05. 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	300.000.00 0	Umum
		1.1.05. 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	5 Orang	150.000.00 0	6 Orang	160.000.00 0	6 Orang	150.000.00 0	Umum
		1.1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	5 Orang	50.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	125.000.00 0	Umum
		1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.919.094.7 00	1 Dokumen	1.725.000.0 00	1 Dokumen	1.568.000.0 00	Umum
		1.1.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.000.000	5 Paket	25.000.000	5 Paket	35.000.000	Umum
		1.1.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	500.000.00 0	34 Paket	300.000.00 0	34 Paket	350.000.00 0	Umum
		1.1.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	314.094.70 0	15 Paket	250.000.00 0	15 Paket	50.000.000	Umum

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.000.000	12 Paket	75.000.000	12 Paket	98.000.000	Umum
		1.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	25 Dokumen	75.000.000	30 Dokumen	85.000.000	Umum
		1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	900.000.000	Umum
		1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Umum
		1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	295.000.000	1 Dokumen	2.225.000.000	Umum
		1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	4 Unit	200.000.000	Umum
		1.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	-	1 Unit	75.000.000	Unit	850.000.000	Umum
		1.1.07.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	900.000.000	Umum

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangunan Lainnya yang Disediakan								
		1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	275.000.000	Umum
		1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.226.183.640	1 Dokumen	4.337.683.640	1 Dokumen	4.641.140.900	Umum
		1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	8.500.000	Umum
		1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan.	12 Laporan	481.905.800	12 Laporan	491.905.800	12 Laporan	482.640.900	Umum
		1.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	950.000.000	Umum
		1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	3.668.277.840	12 Laporan	3.768.277.840	12 Laporan	3.200.000.000	Umum
		1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	961.370.000	1 Dokumen	1.265.000.000	1 Dokumen	2.395.802.000	Umum

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	55.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	75.000.000	Umum
		1.1.09. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	16 Unit	196.370.000	16 Unit	200.000.000	16 Unit	270.000.000	Umum
		1.1.09. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2 Unit	50.000.000	3 Unit	150.000.000	4 Unit	250.000.000	Umum
		1.1.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	300.000.000	Umum
		1.1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	560.000.000	2 Unit	550.000.000	2 Unit	1.000.802.000	Umum
		1.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	500.000.000	Umum
Tujuan 2. Menurunkan Tingkat	Indikator Tujuan 2. Tingkat		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota Yang Difasilitasi	90 Persen	30 Persen	1.000.000.000	70 Persen	1.000.000.000	100 Persen	1.000.000.000	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penganggura n	Pengangguran Terbuka			Menyusun Rencana Tenaga Kerja								
Sasaran 2.1. Meningkatn ya capaian Kinerja Ketenagaker jaan	Indikator Sasaran 2.1.1 Persentase Kabupaten/K ota Yang Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	2.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	9 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000.0 00	8 Dokumen	1.000.000.0 00	9 Dokumen	1.000.000.0 00	
		2.1.01. 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Daerah Makro	9 Dokumen	7 Dokumen	750.000.00 0	8 Dokumen	750.000.00 0	8 Dokumen	850.000.00 0	Perencanaan
		2.1.01. 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten Kota Yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	0 Orang	30 Orang	250.000.00 0	35 Orang	250.000.00 0	40 Orang	150.000.00 0	Perencanaan
	Indikator Sasaran 2.1.2. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	62 Persen	65.00 Persen	2.243.647.8 00	66.50 Persen	2.592.783.8 00	67.00 Persen	3.307.283.0 00	
		3.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 %	59 Orang	1.960.924.0 00	60 Orang	2.117.500.0 00	61 Orang	2.847.000.0 00	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja
		3.1.01. 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 Orang	320 Orang	1.890.924.0 00	352 Orang	2.000.000.0 00	400 Orang	2.700.000.0 00	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.1.01. 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	10 Lembaga	15 Lembaga	70.000.000	20 Lembaga	117.500.000	25 Lembaga	147.000.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		3.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK yang terakreditasi	Laporan	10 Laporan	70.000.000	15 Laporan	220.480.000	20 Laporan	220.480.000	
		3.1.02. 1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	10 LPK	70.000.000	15 LPK	220.480.000	20 LPK	220.480.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		3.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	127.080.000	1 Laporan	127.080.000	
		3.1.03. 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000	23 Perusahaan	127.080.000	25 Perusahaan	127.080.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		3.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan	112.723.800	1 Laporan	127.723.800	1 Laporan	112.723.000	
		3.1.04. 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga	Dokumen	1 Dokumen	112.723.800	1 Dokumen	127.723.800	1 Dokumen	112.723.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kerja di Tingkat daerah								
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	31 Persen	27.10 Persen	2.525.764.900	27.60 Persen	2.607.752.900	28.10 Persen	2.755.000.000	
		5.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	180 Orang	702.744.000	270 Orang	770.000.000	360 Orang	1.400.000.000	
		5.1.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	240 Orang	70.000.000	285 Orang	100.000.000	330 Orang	200.000.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		5.1.01.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	180 Orang	150.000.000	270 Orang	150.000.000	360 Orang	200.000.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		5.1.01.3	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	10.000 Orang	100.000.000	12.000 Orang	120.000.000	14.000 Orang	200.000.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		5.1.01.4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	160 Orang	382.744.000	180 Orang	400.000.000	200 Orang	800.000.000	Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
		5.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	15 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000	16 Lembaga	100.000.000	17 Lembaga	250.000.000	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		5.1.02. 1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000	16 Lembaga	100.000.00 0	17 Lembaga	250.000.00 0	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja
		5.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	2 Event	1.700.980.9 00	2 Event	1.657.752.9 00	2 Event	1.005.000.0 00	
		5.1.03. 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja
		5.1.03. 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	Orang	50.000 Orang	198.228.00 0	55.000 Orang	150.000.00 0	60.000 Orang	200.000.00 0	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja
		5.1.03. 3	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	220 Orang	1.457.752.9 00	230 Orang	1.457.752.9 00	240 Orang	750.000.00 0	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	20 Orang	20 Orang	72.040.000	30 Orang	80.000.000	40 Orang	100.000.00 0	
		5.1.05. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA,	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	20 Orang	72.040.000	30 Orang	80.000.000	40 Orang	100.000.00 0	Bidang Pengembang an Tenaga Kerja

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
	Indikator Sasaran 2.1.3 Peningkatan Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	65.00 Persen	2.762.600.050	72.00 Persen	2.762.600.500	80.00 Persen	2.346.029.900	
		7.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	0 SK	100 SK	670.658.750	105 SK	670.659.200	110 SK	405.607.500	
		7.1.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	40 Perusahaan	377.842.400	50 Perusahaan	377.842.400	60 Perusahaan	148.968.900	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.01.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	40 Perusahaan	202.922.550	50 Perusahaan	202.923.000	60 Perusahaan	136.989.900	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.01.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	Laporan	1 Laporan	89.893.800	1 Laporan	89.893.800	1 Laporan	119.648.700	Bidang Hubungan Industrial

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek								
		7.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	40 Perusahaan	790.516.500	50 Perusahaan	790.516.500	60 Perusahaan	1.052.186.000	
		7.1.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 Perkara	1 Perkara	274.500.900	1 Perkara	274.500.900	1 Perkara	498.469.000	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	10 Perkara	127.309.800	10 Perkara	127.309.800	10 Perkara	169.449.500	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.02.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi & Serikat Pekerja	10 Asosiasi & Serikat Pekerja	189.509.800	20 Asosiasi & Serikat Pekerja	189.509.800	25 Asosiasi & Serikat Pekerja	119.137.600	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	7 Lembaga	199.196.000	8 Lembaga	199.196.000	10 Lembaga	265.129.900	Bidang Hubungan Industrial

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 SK	10 SK	1.301.424.800	10 SK	1.301.424.800	10 SK	888.236.400	
		7.1.03.1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	634.079.700	1 Surat Keputusan	634.079.700	1 Surat Keputusan	638.236.400	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.03.2	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK	9 Surat Keputusan	9 Surat Keputusan	517.345.100	9 Surat Keputusan	517.345.100	10 Surat Keputusan	100.000.000	Bidang Hubungan Industrial
		7.1.03.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10.000 Orang	10.000 Orang	150.000.000	11.000 Orang	150.000.000	12.000 Orang	150.000.000	Bidang Hubungan Industrial
	Indikator Sasaran 2.1.4 Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	2.51 Persen	17.64 Persen	3.500.000.000	18,23 Persen	3.500.000.000	19.41 Persen	3.050.000.000	
		8.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	0 Perusahaan	3800 Perusahaan	3.500.000.000	4000 Perusahaan	3.500.000.000	4060 Perusahaan	3.050.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
		8.1.01.1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di	90 Perusahaan	320 Perusahaan	1.700.000.000	325 Perusahaan	1.700.000.000	339 Perusahaan	1.500.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)								
		8.1.01. 2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	1 Kasus	600.000.00 0	1 Kasus	600.000.00 0	1 Kasus	650.000.00 0	Bidang Pengawasan Ketenagaker jaan
		8.1.01. 3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	90 Perusaha n	520 Perusaha an	1.200.000.0 00	530 Perusaha an	1.200.000.0 00	547 Perusaha an	900.000.00 0	Bidang Pengawasan Ketenagaker jaan
Sasaran 2.2. Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Fasilitas Pembinaan Warga Transmigras i	Indikator Sasaran 2.2.1 Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmig rasi	477.054.00 0	1 Kawasan Transmig rasi	1.005.000.0 00	1 Kawasan Transmig rasi	1.850.000.0 00	
		2.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	477.054.00 0	1 Dokumen	1.005.000.0 00	1 Dokumen	1.850.000.0 00	
		2.1.01. 1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.00 0	1 Dokumen	200.000.00 0	1 Dokumen	550.000.00 0	Bidang Transmigrasi
		2.1.01. 2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	119.196.00 0	1 Kawasan	355.000.00 0	1 Kawasan	500.000.00 0	Bidang Transmigrasi

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penetapan Kawasan Transmigrasi		Transmig rasi		Transmig rasi		Transmig rasi		
		2.1.01.3	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 Hektar	10.947,55 hektar	180.000.000	277.645,24 Hektar	200.000.000	2.719.82 Hektar	500.000.000	Bidang Transmigrasi
		2.1.01.4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	77.858.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Bidang Transmigrasi
	Indikator Sasaran 2.2.2 Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	545.791.300	1 Kawasan Transmigrasi	1.100.000.000	1 Kawasan Transmigrasi	1.000.000.000	
		4.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi		1 Dokume	545.791.300	1 Dokume	1.100.000.000	1 Dokume	1.000.000.000	
		4.1.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	128.598.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Bidang Transmigrasi

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.1.01. 2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Bidang Transmigrasi
		4.1.01. 3	Pemindahan dan Pempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Dearah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	10.000.000	70 Kepala Keluarga	200.000.000	70 Kepala Keluarga	200.000.000	Bidang Transmigrasi
		4.1.01. 4	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0 Orang	40 Orang	100.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	Bidang Transmigrasi
		4.1.01. 13	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran Yang Mendapat layanan Kesehatan	Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	100.000.000	10 Kepala Keluarga	150.000.000	10 Kepala Keluarga	100.000.000	Bidang Transmigrasi
		4.1.01. 18	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi	1 Lokasi	197.193.300	2 Lokasi	150.000.000	3 Lokasi	100.000.000	Bidang Transmigrasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	100 Persen	100 Persen	477.154.700	100 Persen	1.000.000.000	100 Persen	450.000.000	
		6.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan,	1 Dokumen	1 Dokumen	477.154.700	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	450.000.000	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan								
		6.1.01. 1	Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	327.154.70 0	60 Kepala Keluarga	600.000.00 0	60 Kepala Keluarga	250.000.00 0	Bidang Transmigras i
		6.1.01. 2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Di kembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Pemukima n	1 Satuan Pemukim an	150.000.00 0	1 Satuan Pemukim an	400.000.00 0	1 Satuan Pemukim an	200.000.00 0	Bidang Transmigras i

**UPTD Balai
Latihan Kerja
Industri
Balikpapan**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGE T	(RP)	TARGE T	(RP)	TARGE T	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Tujuan 1 : Mewujudka n Birokrasi Yang Profesional , Akuntabel serta Berorienta si Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLA K"	Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan					28.466.509. 000		30.268.575. 000		28.538.557. 000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
"Sasaran 1 : Meningkat nya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilit as Kinerja	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (UPTD BLKI Balikpapan)	77 Indeks	82 Indeks	5.373.509.0 00	84 Indeks	6.398.575.0 00	86 Indeks	5.898.557.0 00	UPTD BLKI BALIKPAP AN

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGE T	(RP)	TARGE T	(RP)	TARGE T	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perangkat Daerah"												
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.000.000	100.00 Persen	100.000.000	100.00 Persen	100.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		1 Dokum en	557.000.000	1 Dokum en	710.032.000	1 Dokum en	810.032.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.02. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Orang/Bula n	1 Dokum en	407.000.000	1 Dokum en	500.000.000	1 Dokum en	500.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.02. 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Dokum en	150.000.000	1 Dokum en	210.032.000	1 Dokum en	310.032.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokum en	30.000.000	1 Dokum en	130.000.000	1 Dokum en	180.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	24 Paket	24 Paket	30.000.000	24 Paket	30.000.000	24 Paket	30.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.05. 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	-	5 Orang	100.000.000	5 Orang	150.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi	Laporan	1 Dokum en	1.462.486.4 00	1 Dokum en	2.122.486.4 00	1 Dokum en	1.762.486.4 00	UPTD BLKI BALIKPAP AN

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGE T	(RP)	TARGE T	(RP)	TARGE T	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Umum Perangkat Daerah								
		1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.556.500	12 Paket	8.556.500	12 Paket	8.556.500	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	488.869.400	6 Paket	488.869.400	6 Paket	588.869.400	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	350.060.500	12 Paket	350.060.500	12 Paket	350.060.500	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	95.000.000	12 Paket	175.000.000	12 Paket	195.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Lapora n	500.000.000	12 Lapora n	1.080.000.000	12 Lapora n	600.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1 Dokum en	860.000.000	1 Dokum en	350.000.000	1 Dokum en	270.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	0 Unit	1 Unit	70.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	70.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGE T	(RP)	TARGE T	(RP)	TARGE T	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lapangan yang Disediakan								
		1.1.07. 9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	500.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	290.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokum en	1.909.139.1 00	1 Dokum en	2.071.056.6 00	1 Dokum en	2.026.038.6 00	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Lapora n	5.000.000	12 Lapora n	7.000.000	12 Lapora n	9.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	390.641.500	12 Lapora n	390.641.500	12 Lapora n	390.641.500	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.08. 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Lapora n	304.350.000	12 Lapora n	410.000.000	12 Lapora n	335.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0 Laporan	1 Lapora n	1.209.147.6 00	1 Lapora n	1.263.415.1 00	1 Lapora n	1.291.397.1 00	UPTD BLKI BALIKPAP AN

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGE T	(RP)	TARGE T	(RP)	TARGE T	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kantor yang Disediakan								
		1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokum en	654.883.500	1 Dokum en	1.115.000.0 00	1 Dokum en	950.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	55.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	75.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.09. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	49.883.500	2 Unit	65.000.000	2 Unit	75.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	0 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	300.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		1.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	285.000.000	1 Unit	200.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGE T	(RP)	TARGE T	(RP)	TARGE T	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				yang Dipelihara / Direhabilitasi								
	Indikator Sasaran 2.1.2. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi		3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	61.72 Persen	75.00 Persen	22.993.000. 000	76.50 Persen	23.770.000. 000	78.00 Persen	22.540.000. 000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		3.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten		75 Persen	22.993.000. 000	80.00 Persen	23.770.000. 000	85 Persen	22.540.000. 000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		3.1.01. 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	160 Orang	1040 Orang	21.900.000. 000	1040 Orang	22.900.000. 000	1040 Orang	21.500.000. 000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		3.1.01. 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	20 Lembaga	15 Lembag a	250.000.000	20 Lembag a	250.000.000	25 Lembag a	270.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN
		3.1.01. 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	0 Unit	5 Unit	843.000.000	5 Unit	620.000.000	5 Unit	770.000.000	UPTD BLKI BALIKPAP AN

UPTD BALAI
LATIHAN KERJA
INDUSTRI
BONTANG

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
					TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudk an Birokrasi Yang Profesional , Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLA K	Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				27.705.998. 000		19.673.490. 000		20.768.383. 000	UPTD BLKI Bontang
Sasaran 1 : Meningkat nya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	Indeks	82.00 Indeks	6.648.881.9 50	84.00 Indeks	6.903.567.9 50	86.00 Indeks	6.603.567.9 50	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	100.000.000	
		1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		1 Dokumen	1.142.940.45 0	1 Dokumen	1.242.940.00 0	1 Dokumen	1.242.940.00 0	
		1.1.02. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bu lan	1.142.940.45 0	12 Orang/Bu lan	1.242.940.00 0	12 Orang/Bul an	1.242.940.00 0	
		1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		1 Dokumen	81.800.000	1 Dokumen	81.800.000	1 Dokumen	81.800.000	
		1.1.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	0 Paket	20 Paket	81.800.000	20 Paket	81.800.000	20 Paket	81.800.000	
		1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	847.733.100	1 Dokumen	880.019.100	1 Dokumen	880.019.100	
		1.1.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	99.274.100	12 Paket	99.274.100	12 Paket	99.274.100	
		1.1.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	40.795.000	6 Paket	59.745.000	6 Paket	59.745.000	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.244.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	
		1.1.06. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.420.000	12 Paket	21.000.000	12 Paket	21.000.000	
		1.1.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000	
		1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	3.092.408.850	1 Dokumen	3.214.508.850	1 Dokumen	2.914.808.850	
		1.1.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000	12 Laporan	22.000.000	12 Laporan	22.000.000	
		1.1.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	423.600.000	12 Laporan	546.000.000	12 Laporan	546.000.000	
		1.1.08. 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	853.868.850	1 Laporan	853.568.850	1 Laporan	553.868.850	
		1.1.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0 Laporan	12 Laporan	1.792.940.000	12 Laporan	1.792.940.000	12 Laporan	1.792.940.000	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kantor yang Disediakan								
		1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	1.583.999.55 0	1 Dokumen	1.584.300.00 0	1 Dokumen	1.584.000.00 0	
		1.1.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	54.000.000	1 Unit	54.000.000	1 Unit	54.000.000	
		1.1.09. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
		1.1.09. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
		1.1.09. 9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi ilitasi	0 Unit	1 Unit	549.699.550	1 Unit	750.000.000	1 Unit	420.000.000	
		1.1.09. 10	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	380.000.000	1 Unit	210.000.000	1 Unit	380.000.000	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
				yang Dipelihara / Direhabilitasi								
		1.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	370.300.000	1 Unit	340.300.000	1 Unit	500.000.000	
	Indikator Sasaran 2.1.2. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi		3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	31 Persen	75.00 Persen	20.957.116.0 50	77.00 Persen	12.669.922.0 50	77.00 Persen	14.064.815.0 50	
			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten		75 Persen	20.957.116.0 50	80 Persen	12.669.922.0 50	85 Persen	14.064.815.0 50	
		3.1.01. 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	160 Orang	512 Orang	8.061.045.25 0	672 Orang	10.486.042.8 00	832 Orang	12.777.314.8 00	
		3.1.01. 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1 Lembaga	15 Lembaga	239.367.500	20 Lembaga	239.367.500	25 Lembaga	239.367.500	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	KONDISIO NAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.1.01. 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	15 Unit	12.656.703.3 00	18 Unit	1.944.511.75 0	20 Unit	1.048.132.75 0	

Tabel 6.1
Tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 - 2026

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISIOINAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				57,029,451,000		60,338,356,000		64,354,781,000	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatatan	0 Indeks	82.00 Indeks	43,397,438,250	84.00 Indeks	44,670,218,800	86.00 Indeks	48,496,468,100	
	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100.00 Persen	100.00 Persen	100,000,000	100.00 Persen	100,000,000	100.00 Persen	100,000,000	
		1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	2,449,905,100	10 Dokumen	2,503,662,018	10 Dokumen	2,920,905,000	
		1.1.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1,936,649,500	3 Dokumen	1,936,649,568	3 Dokumen	1,800,000,000	Perencanaan
		1.1.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	Perencanaan
		1.1.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	70,000,000	Perencanaan
		1.1.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	177,780,200	2 Laporan	177,780,250	2 Laporan	150,000,000	Perencanaan
		1.1.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	335,475,400	5 Laporan	389,232,200	5 Laporan	750,905,000	Perencanaan
		1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	33,305,884,810	1 Dokumen	34,173,873,142	1 Dokumen	34,070,620,200	
		1.1.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	190 Orang/ Bulan	32,444,637,810	190 Orang/ Bulan	33,272,626,142	190 Orang/ Bulan	33,259,373,200	Umum
		1.1.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	520,000,000	1 Dokumen	550,000,000	Umum
		K1.1.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27,490,000	1 Laporan	27,490,000	1 Laporan	27,490,000	Umum

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISIONAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.1.07.9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0Unit	1 Unit	500,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0Unit	1 Unit	290,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	1,909,139,100	1 Dokumen	2,071,056,600	1 Dokumen	2,026,038,600	-
		1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	9,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	12 Laporan	390,641,500	12 Laporan	390,641,500	12 Laporan	390,641,500	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	12 Laporan	304,350,000	12 Laporan	410,000,000	12 Laporan	335,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0Laporan	1 Laporan	1,209,147,600	1 Laporan	1,263,415,100	1 Laporan	1,291,397,100	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	654,883,500	1 Dokumen	1,115,000,000	1 Dokumen	950,000,000	-
		1.1.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1Unit	1 Unit	55,000,000	1 Unit	65,000,000	1Unit	75,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2Unit	2 Unit	49,883,500	2 Unit	65,000,000	2Unit	75,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0Unit	1 Unit	150,000,000	1 Unit	500,000,000	1Unit	300,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	200,000,000	1Unit	300,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		1.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1Unit	1 Unit	300,000,000	1 Unit	285,000,000	1Unit	200,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
	Indikator Sasaran 2.1.2. Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	61,72Persen	75.00 Persen	22,993,000,000	76.50 Persen	23,770,000,000	78.00 Persen	22,540,000,000	-
		3.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten		75 Persen	22,993,000,000	80.00 Persen	23,770,000,000	85 Persen	22,540,000,000	-
		3.1.01.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	160Orang	1040 Orang	21,900,000,000	1040 Orang	22,900,000,000	1040Orang	21,500,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		3.1.01.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	20Lembaga	15 Lembaga	250,000,000	20 Lembaga	250,000,000	25Lembaga	270,000,000	UPTD BLKI Balikpapan
		3.1.01.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	0Unit	5 Unit	843,000,000	5 Unit	620,000,000	5Unit	770,000,000	UPTD BLKI Balikpapan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISIONAL	2024		2025		2026		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				27,705,998,000		19,673,490,000		20,768,383,000	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran 1: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	Indeks	82.00 Indeks	6,648,881,950	84.00 Indeks	6,903,567,950	86.00 Indeks	6,603,567,950	
	Indikator Sasaran 2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100 Persen	100,000,000	100 Persen	100,000,000	
		1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		1 Dokumen	1,142,940,450	1 Dokumen	1,242,940,000	1 Dokumen	1,242,940,000	
		1.1.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Orang/ Bulan	1,142,940,450	12 Orang/ Bulan	1,242,940,000	12 Orang/ Bulan	1,242,940,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		1 Dokumen	81,800,000	1 Dokumen	81,800,000	1 Dokumen	81,800,000	
		1.1.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	0 Paket	20 Paket	81,800,000	20 Paket	81,800,000	20 Paket	81,800,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	847,733,100	1 Dokumen	880,019,100	1 Dokumen	880,019,100	
		1.1.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	99,274,100	12 Paket	99,274,100	12 Paket	99,274,100	UPTD BLKI Bontang
		1.1.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	40,795,000	6 Paket	59,745,000	6 Paket	59,745,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40,244,000	12 Paket	50,000,000	12 Paket	50,000,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17,420,000	12 Paket	21,000,000	12 Paket	21,000,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	650,000,000	12 Laporan	650,000,000	12 Laporan	650,000,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	3,092,408,850	1 Dokumen	3,214,508,850	1 Dokumen	2,914,808,850	
		1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	22,000,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	423,600,000	12 Laporan	546,000,000	12 Laporan	546,000,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	853,868,850	1 Laporan	853,568,850	1 Laporan	553,868,850	UPTD BLKI Bontang
		1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	1,792,940,000	12 Laporan	1,792,940,000	12 Laporan	1,792,940,000	UPTD BLKI Bontang
		1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	1,583,999,550	1 Dokumen	1,584,300,000	1 Dokumen	1,584,000,000	

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Struktur Organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengampu tiga urusan yaitu 1) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta 3) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hal ini tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui : 1) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Namun demikian Kinerja Pembangunan Responsif Gender masih perlu diupayakan peningkatannya karena Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Timur Tahun 2022 baru mencapai 86.61. Sedangkan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Tahun 2021 mencapai 66,64.

Masih terdapat adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Hal yang menjadi permasalahan dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender adalah masih tingginya Budaya patriarki dilingkungan masyarakat Kaltim, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan masih masih belum optimal. Adanya kesenjangan gender dalam pembangunan SDM terkait akses, partisipasi, manfaat dan

kontrol dalam pembangunan ditunjukkan dengan rendahnya capaian IPG Kaltim masih dibawah capaian IPG Nasional demikian juga dengan capaian IDG Kaltim yang juga masih cukup rendah, hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah terkait dengan masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditandai dengan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kepedulian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, serta belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak terutama kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berakibat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah.

Kebijakan Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana. Pengendalian Penduduk bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Upaya pengaturan Kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana saat ini dengan capaian Cakupan Keluarga Berencana aktif Tahun 2018 sebesar 73.50 %, masih banyak masyarakat belum sadar untuk ber KB, untuk angka perkawinan anak di tahun 2021 mencapai angka 1.089 mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 1.159 anak di Kalimantan Timur dan pada era perkembangan informasi yang terbuka saat ini peningkatan ketahanan keluarga menjadi sangat berat lagi upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah, dan 3) Kebijakan Administrasi Kependudukan merupakan upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan , mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta penyajian data kependudukan skala provinsi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data kependudukan yang akurat tercapai

99,70 dari total target 100 %, masih ada masyarakat belum tercatat dalam administrasi kependudukan karena pemahaman terhadap manfaat data kependudukan serta keterjangkauan akses pencatatan masih ada dengan berbagai alasan tidak hanya karena demografi. Pembangunan 3 (urusan) tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu disusun rencana kerja yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2024 – 2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan Pemerintahan konkuren, tidak terkait pelayanan dasar yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pamanantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur (DKP3A) dalam mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya DKP3A Provinsi Kalimantan Timur maka disusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai Pasal 272 mengamankan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam rancangan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai Renstra berisi tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; *dan* (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dalam hal ini RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, Renstra BKKBN Tahun 2020-2024; di tingkat provinsi yakni RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Alur dan tahapan penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam bagan alur. Penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan isu strategis yakni **“Peningkatan daya saing sumber daya manusia”** yang akan menjadi prioritas garapan antara lain akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang merupakan tindaklanjut dari Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kondisi dan potensi daerah.

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) didalamnya memuat capaian kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri 86 tahun 2017, disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembangunan dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana termuat Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 pada tujuan 1 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”

I. 2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
2. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
11. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No.123);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
16. Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
19. Peraturan Mneteri Dalam negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Cara perencanaan pengendalian Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur;
27. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan data dan sistem informasi gender dan anak;

I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun (Tahun 2024-2026) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

I. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang rencana program perangkat daerah untuk lima tahun kedepan

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu kepada RPD

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Dasar Pembentukan

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

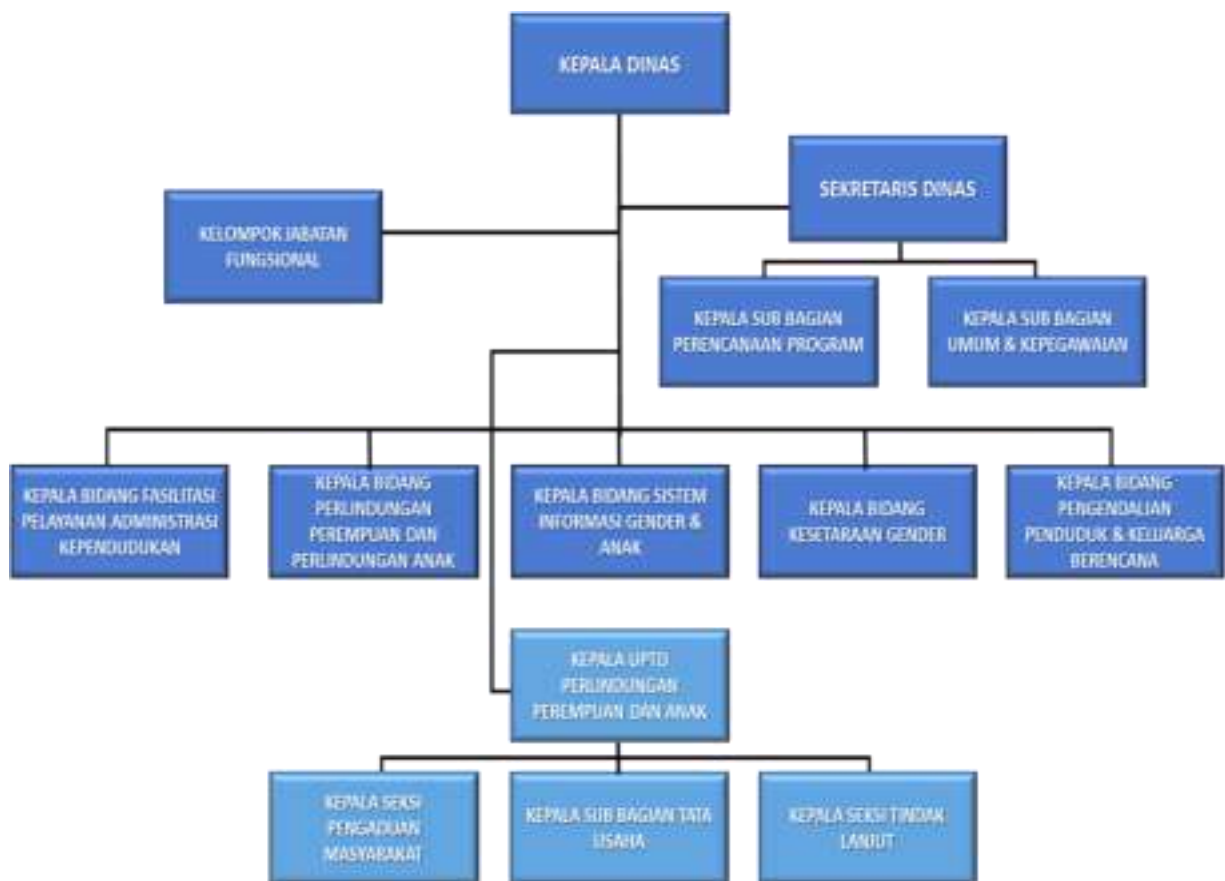
B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur



C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan & pencatatan sipil;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan

pemeliharaan, hukum dan kehumasanserta pengaduan masyarakat;

- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pendaftaran penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pencatatan sipil; Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis monitoring, evaluasi dan dokumentasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tumbuh kembang anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sistem data gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sistem Data Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan gender. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kualitas keluarga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban

II. 2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 74 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 53 orang dan Non ASN 21. Pegawai ASN terdiri dari 21 orang Laki-Laki dan 32 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SLTA Sederajat	5	3	7	0	15
2.	D3	1	2	1	1	5
3.	S1	8	17	16	5	46
4.	S2	4	10	0	0	14
5.	S3	0	0	0	0	0
Total		18	32	24	6	53

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	4	1	5
2.	Golongan III	11	24	35
3.	Golongan IV	3	7	10
Total		18	32	53

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

B. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung A & Halaman	√	√	1
2.	Gedung B	√	√	1
3.	Kendaraan Roda 4	√		8
4.	Kendaraan Roda 2	√		5

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

Sedangkan kondisi aset berupa peralatan dan mesin sebagai penunjang operasional dengan jumlah aset sebesar Rp.5.749.134.985,- sesuai penutupan neraca per 31 Desember 2022.

Tabel 2.4

Jumlah Aset DKP3A

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Aset Tetap	5.749.134.985.00
2.	Tanah	0.00
3.	Peralatan dan Mesin	5.063.358.485.00
4.	Gedung dan bangunan	0.00
5.	Jalan irigasi dan Jaringan	661.033.000
6.	Aset Tetap Lainnya	24.743.500.00
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	0.00
8.	Aset lainnya	0.00
Nilai (RP)		4.720.574.925

Keterangan : Data per 31 Desember 2022

II. 3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan DKP3A merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari kinerja capaian indikator dan kinerja anggaran yang selengkapnnya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	-	-	-	56.70	56.71	65.63	65.64	65.70	65.65	65.54	66.64	66.64	-	115.7 %	115.8%	101.5%	101.5%	-
2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	-	-	-	76	82	88	90	90	70	82	90	90	-	94%	100%	98%	100%	-
3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	-	-	-	48	62	50	60	70	37	62	47.98	64	-	89%	100%	98.02%	96%	-
4	Rasio KDRT (%)	-	-	-	0.06	0.054	0.048	0.042	0.038	0.023	0.024	0.029	0.018	-	0.39%	0.44%	0.60%	0.43%	-
5	Kampung KB	-	-	-	160	175	299	315	330	160	175	299	236	-	100%	100%	100%	74.9%	-

Tabel 2.6

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.233.400.000	1.695.314.000	2.031.477.083	1.161.798.352	1.588.854.297	1.825.409.181	94.19.	93.72.	89.86.	1.653.397.028	1.525.353.943
Pemeliharaan Peralatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	295.175.000	1.956.826.000	1.035.400.000	294.639.066	1.806.544.210	988.306.632	99.82.	92.32.	95.45.	1.095.800.333	1.029.829.969
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	373.950.000	540.000.000	330.000.000	371.724.835	502.525.170	325.868.410	99.4.	93.06.	98.75.	414.650.000	400.039.472
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.500.000	54.000.000	-	50.937.447	30.731.200	-	87.07.	56.91.	-	37.500.000	27.222.882
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	384.500.000	248.360.000	134.000.000	382.249.810	212.073.114	122.171.365	99.41.	85.39.	91.17.	255.620.000	238.831.430
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	50.500.000	118.700.000		49.842.500	114.537.170		98.7.	96.49.	-	84.600.000	82.189.835
Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	170.900.000	276.780.000	78.900.000	160.529.100	267.924.240	70.050.000	93.93.	96.8.	88.78.	175.526.667	166.167.780
Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	-	-	102.900.000	-	-	87.253.000	-	-	84.79.	34.300.000	29.084.333
Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	197.500.000	82.650.000	-	197.385.000	70.901.969	-	99.94.	85.79.	-	93.383.333	89.428.990
Advokasi Perlindungan Perempuan	166.000.000	170.750.000	-	160.461.484	163.953.000	-	96.66.	96.02.	-	112.250.000	108.138.161
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	117.525.000	472.375.000	-	110.703.632	378.977.887	-	94.2.	80.23.	-	196.633.333	163.227.173
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	70.030.000	112.750.000	-	68.155.900	96.612.200	-	97.32.	85.69.	-	60.926.667	54.922.700
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	260.700.000	262.700.000	-	244.144.160	246.777.300	-	93.65.	93.94.	-	174.466.667	163.640.487
Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	169.500.000	158.900.000	51.237.500	167.447.158	140.202.200	50.505.015	98.79.	88.23.	98.57.	126.545.833	119.384.791
Advokasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	171.950.000	252.590.000	-	170.930.041	239.795.338	-	99.41.	94.93.	-	141.513.333	136.908.460
Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	154.000.000	210.070.000	61.312.500	153.922.400	190.431.458	58.775.148	99.95.	90.65.	95.86.	141.794.167	134.376.335
Penyuluhan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam Membangun Keluarga di Bidang Ekonomi	58.500.000	47.500.000	-	54.435.000	46.678.000	-	93.05.	98.27.	-	35.333.333	33.704.333
Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nila Nilai Luhur	73.400.000	305.765.000	-	72.900.000	288.920.500	-	99.32.	94.49.	-	126.388.333	120.606.833

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak	121.500.000	319.500.000	-	114.856.540	307.122.945	-	94.53.	96.13.	-	147.000.000	140.659.828
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.671.072.000	1.671.072.000	328.353.000	1.642.869.948	1.557.348.812	318.879.669	98.31.	93.19.	97.11.	1.223.499.000	1.173.032.810
Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	2.188.320.000	-		2.128.242.354	-	-	97.25.	-	729.440.000	1.064.121.177
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	526.750.000	-	-	96.272.355	-	-	18.28.	175.583.333	32.090.785
Tumbuh Kembang Anak	-	-	328.125.000	-	-	302.215.277	-	-	92.1.	109.375.000	100.738.426
Perlindungan Anak	-	-	96.062.500	-	-	78.405.050	-	-	81.62.	32.020.833	26.135.017
Perlindungan Perempuan	-	-	114.975.000	-	-	105.085.082	-	-	91.4.	38.325.000	35.028.361
Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	-	-	141.150.000	-	-	132.474.000	-	-	93.85.	47.050.000	44.158.000
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	-	-	139.500.000	-	-	137.649.957	-	-	98.67.	46.500.000	45.883.319
Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	-	-	119.610.000	-	-	116.423.122	-	-	97.34.	39.870.000	38.807.707
Data dan Informasi Anak	-	-	75.500.000	-	-	74.721.128	-	-	98.97.	25.166.667	24.907.043
Informasi dan Partisipasi	-	-	47.875.000	-	-	45.946.424	-	-	95.97.	15.958.333	15.315.475
Data dan Informasi Gender	-	-	33.250.000	-	-	25.545.840	-	-	76.83.	11.083.333	8.515.280
Pengendalian Penduduk	-	-	145.250.000	-	-	111.895.675	-	-	77.04.	48.416.667	37.298.558
Kualitas Keluarga	-	-	106.762.500	-	-	67.535.100	-	-	63.26.	35.587.500	22.511.700
Keluarga Berencana	-	-	110.950.000	-	-	87.954.382	-	-	79.27.	36.983.333	29.318.127
Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	-	-	3.653.150.000	-	-	3.344.993.090	-	-	91.56.	1.217.716.667	1.114.997.697
Bina Aparatur Pendaftaran Pencatatan Sipil	-	-	60.632.500	-	-	44.094.700	-	-	72.72.	20.210.833	14.698.233
Monitoring Evaluasi Dokumentasi	-	-	116.862.500	-	-	99.962.385	-	-	85.54.	38.954.167	33.320.795
Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	240.800.000	330.250.000	-	226.652.200	313.071.430	-	94.12.	94.8.	-	190.350.000	179.907.877
Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	77.400.000	95.900.000	-	74.754.500	83.862.600	-	96.58.	87.45.	-	57.766.667	52.872.367
JUMLAH	6.116.802.000	11.571.072.000	9.969.985.083	5.931.339.073	10.776.087.394	8.718.391.987				9.247.486.361	8.857.376.489

Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.075.375	312.000.000	633.120.000	369.694.491	296.058.533		81.42	94.89		466.398.458	332.876.512
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.344.839.000	10.066.815.169	10.609.000.521	7.890.221.225	9.286.057.484		84.43	92.24		10.006.884.897	8.588.139.355
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	573.320.000	707.306.500	-	540.222.006		0.00	94.23		426.875.500	270.111.003
Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.167.624	2.576.398.294	2.122.979.400	938.989.590	2.564.038.523		94.93	99.52		1.896.181.773	1.751.514.057
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	724.225.000	534.482.000	-	695.924.000		0.00	96.09		419.569.000	347.962.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.137.648.540	2.235.083.296	2.750.611.360	1.736.289.915	2.106.436.602		81.22	94.24		2.374.447.732	1.921.363.259
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.571.183.635	335.494.000	1.161.906.500	1.163.129.305	306.350.787		74.03	91.31		1.022.861.378	734.740.046
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	300.000.000	654.998.600	950.000.000	228.408.016	640.314.445		76.14	97.76		634.999.533	434.361.231
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	250.000.000	459.242.000	350.000.000	199.212.509	452.934.003		79.69	98.63		353.080.667	326.073.256
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	449.325.201	442.401.400	400.000.000	370.885.826	430.906.065		82.54	97.40		430.575.534	400.895.946
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179.310.000	455.590.000	741.300.000	152.191.138	378.662.731		84.88	83.11		458.733.333	265.426.935
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563.359.625	262.044.000	1.154.504.000	252.098.905	220.652.367		44.75	84.20		659.969.208	236.375.636
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	205.425.000	76.806.000	74.596.000	175.853.725	71.411.000		85.60	92.98		118.942.333	123.632.363
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000	742.050.000	692.400.000	477.025.547	725.594.679		95.41	97.78		644.816.667	601.310.113

Uraian Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	59.575.000	952.594.000	235.000.000	54.093.000	905.813.420		90.80	95.09		415.723.000	479.953.210
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	8.315.425.000	150.936.000	196.400.000	1.803.730.870	142.433.661		21.69	94.37		2.887.587.000	973.082.266
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	212.820.000	336.000.000	194.855.200	208.038.935		77.94	97.75		266.273.333	201.447.068
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	225.000.000	733.680.000	880.000.000	194.024.198	338.577.298		86.23	46.15		612.893.333	266.300.748
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	4.680.000.000	2.020.368.599	624.150.000	3.951.600.510	1.909.243.870		84.44	94.50		2.441.506.200	2.930.422.190
Pelayanan Pencatatan Sipil	170.000.000	222.203.000	278.000.000	115.369.284	220.953.230		67.86	99.44		223.401.000	168.161.257
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.476.175.000	574.462.401	498.000.000	1.091.734.499	569.345.532		73.96	99.11		849.545.800	830.540.016
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	150.000.000	271.200.000	1.277.400.000	138.996.176	269.767.212		92.66	99.47		566.200.000	204.381.694
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	150.000.000	594.359.980	877.500.000	123.791.749	572.418.059		82.53	96.31		540.619.993	348.104.904
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60.000.000	192.875.000	953.300.000	53.751.858	90.322.678		96.09	98.68		35.391.667	72.037.268
JUMLAH	2.580.509.000	5.841.966.739	9.037.956.281	1.775.947.536	4.042.477.120					9.153.477.340	2.909.212.328

Kinerja pelayanan DKP3A dapat dinikmati oleh publik dan menjadi bahan laporan dalam pencapaian kinerja meliputi beberapa bidang, yaitu:

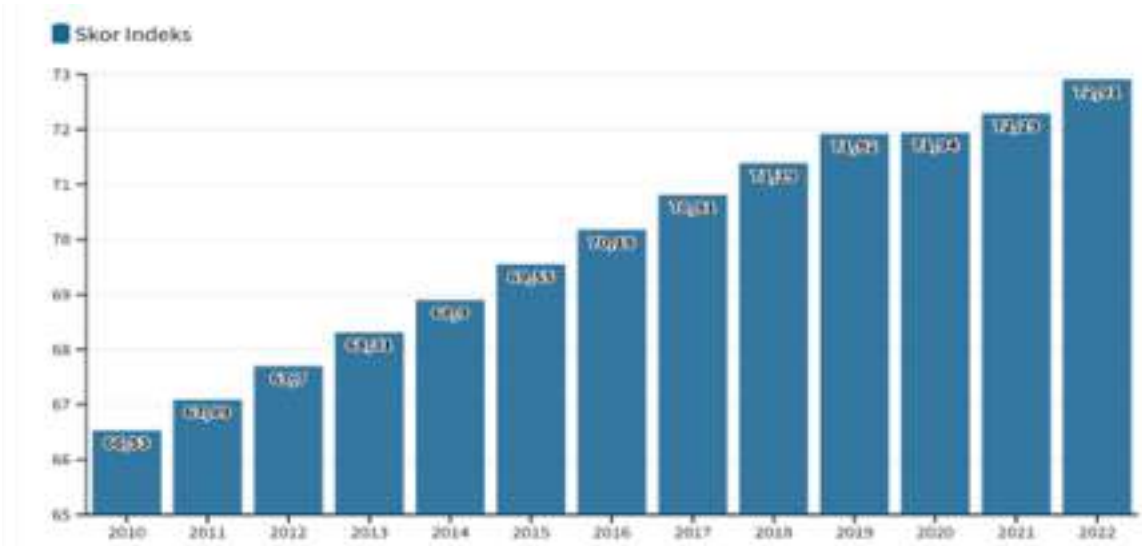
1. Bidang Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan capaian kesetaraan gender dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah laki-laki dan perempuan. IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat per penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

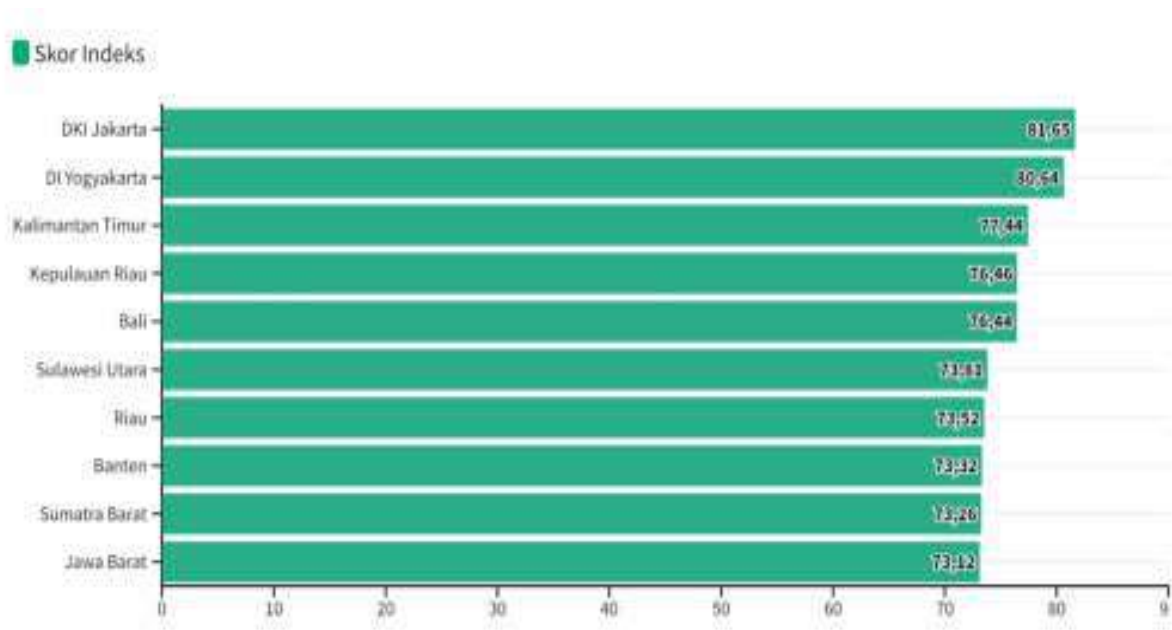
Untuk IPM terpilah laki-laki mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Menurut data BPS – Statistik Indonesia IPM Kaltim menduduki 3 besar dari 34 Provinsi dengan indeks 77.44 setelah DKI dengan indeks 81.65 dan Yogyakarta dengan indeks 80,64 sementara indeks IPM Nasional sebesar 72,91

Gambar 2.2
Tren Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2010-2022



Sumber : BPS Indonesia

Gambar 2.3
10 Provinsi dengan IPM Tertinggi di Indonesia Tahun 2022



Sumber : BPS Indonesia

Sementara untuk IPM terpilah laki – laki menduduki peringkat ketiga dengan indeks 81.86 setelah DKI Jakarta dengan indeks 83.87 dan Yogyakarta 82.99 sedangkan untuk IPM perempuan Kaltim menduduki peringkat ke 7 dari 34 Provinsi dengan capaian indeks 69,69 pada tahun 2020 dan 70,14 di tahun 2019. Adapun capaian indeks IPM terpilah perempuan DKI mencapai 79,17 di tahun 2020 dan mengalami kenaikan 0,01 dari capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian IPM laki-laki dan perempuan di Kaltim terdapat kesenjangan, dapat dilihat dari capaian indeks 81,32 di tahun 2020, sementara IPM perempuan pada tahun yang sama ada pada indeks 69,69, terjadi kesenjangan indeks sebesar 11, 63

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”

Gambar 2.4

Peta IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”. Kondisi kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.8

Tabel kesenjangan IPM terpilah kaltim

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2020	2019	2020	2019
INDONESIA	69.19	69.18	75.98	75.96
DKI JAKARTA	79,17	79,16	83,66	83,58
KALIMANTAN TIMUR	69,69	70,14	81,32	81,58
Paser	55,1	55,38	77,44	77,55
Kutai Barat	64,27	64,7	76,63	77,17
Kutai Kartanegara	62,36	62,63	79,04	79,14
Kutai Timur	59,79	60,36	78,4	78,89
Berau	69,46	69,74	79,28	79,31
Penajam Paser Utara	65,74	65,91	76,1	76,44
Mahakam Ulu	59,81	60,28	73,86	74,52
Kota Balikpapan	76,33	76,45	85,14	85,22
Kota Samarinda	75,29	75,48	84,34	84,42

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2020	2019	2020	2019
Kota Bontang	73,77	73,84	84,92	85,15

Sumber Data : BPS Kaltim tahun 2021

Memperhatikan data diatas masih terdapat kesenjangan laki-laki dan perempuan pada proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan. Kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami kendala. Ditandai oleh penurunan angka IPM sebesar 0,48 persen, setelah sebelumnya tumbuh positif sebesar 1,03 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, status pembangunan manusia di Kalimantan Timur berada pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan status pada tahun sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender, IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun capaian IPG Kaltim dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9
Capaian IPG Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2020	2021	2022
INDONESIA	91,06	91,07	90,99
DKI JAKARTA	94,63	94,71	94,7
KALIMANTAN TIMUR	85.70	85.95	86.61
Paser	71.15	71.19	71.98
Kutai Barat	83.87	84.28	84.62
Kutai Kartanegara	78.90	79.12	79.80
Kutai Timur	76.26	76.40	77.11
Berau	87.61	87.76	87.76
Penajam Paser Utara	86.39	86.57	86.63
Mahakam Ulu	80.98	81.65	82.32
Kota Balikpapan	89.65	89.83	89.96
Kota Samarinda	89.27	89.27	89.75
Kota Bontang	86.87	87.12	87.52

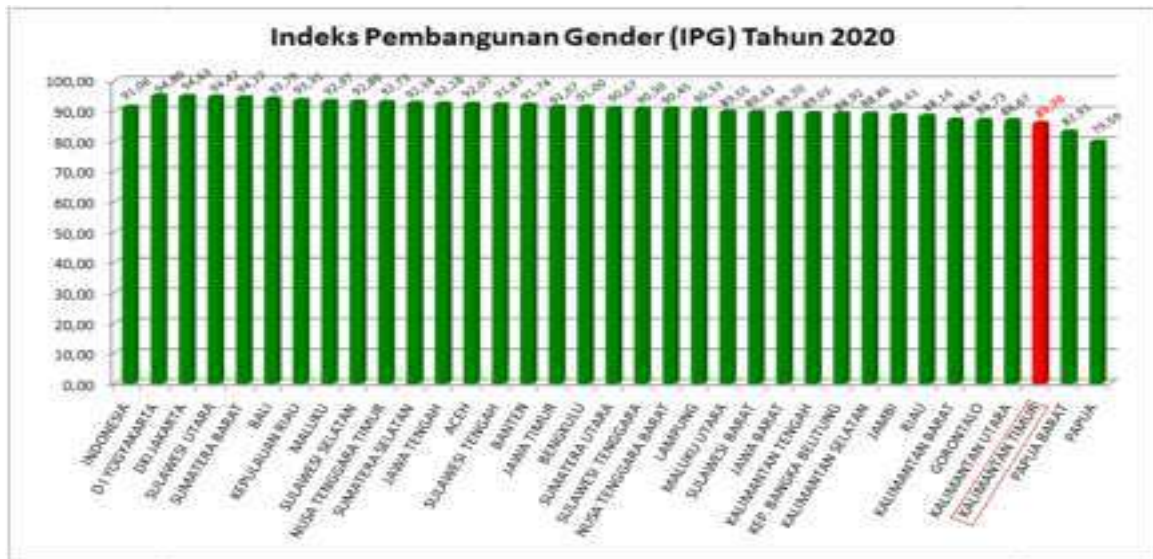
Sumber data : BPS Kaltim tahun 2022

Memperhatikan data diatas, capaian indeks Kaltim berada di bawah indeks nasional, dibandingkan dengan DKI Jakarta, Kaltim perlu melakukan percepatan pembangunan gender terkait adanya IKN. Posisi Kaltim berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai dengan misi pertama gubernur Kalimantan timur yaitu berdaulat dalam peningkatan SDM yang berakhlak mulia terutama perempuan pemuda dan disabilitas. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 2.5

Grafik posisi capaian IPG KALTIM secara nasional tahun 2020



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IPG berdasarkan pada beberapa komposit meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Pendapatan. Capaian komposit sumbangan pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timur mengalami kesenjangan yang cukup tajam dibanding Sumbangan Perkapita Laki - Laki Kalimantan Timur. Namun untuk ketiga komposit lainnya AHH, RLS dan HLS capaian angka perempuan telah dapat melampaui angka capaian Laki laki. Tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan capaian komposit IPG 2021

No	Komposit	Kaltim (2021)	DKI Jakarta (2020)	Indonesia (2020)
----	----------	---------------	--------------------	------------------

		L	P	L	P	L	P
1.	Angka harapan Hidup (AHH)	72.79	76.51	71,01	74.08	69.59	73.46
2.	Rata rata lama Sekolah (RLS)	10.23	9.42	11.15	10.76	8.90	8.07
3.	Harapan lama Sekolah (HLS)	13.80	13.88	13.00	12.94	12.93	13.04
4	Pengeluaran Pendapatan	18.560	7.161	22.614	16.742	15.463	9.004

Sumber data :BPS Kaltim tahun 2021

Memperhatikan tabel diatas khususnya kondisi kesenjangan pengeluaran perkapita bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk menetapkan program dan kegiatan sekaligus penganggaran agar hasil dari kegiatan dapat mendorong capaian IPG Kalimantan Timur. Selain IPG capaian indikator kesetaraan gender lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu indikator yang melihat pemberdayaan perempuan pada peranan dan partisipasi di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Posisi capaian IDG Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan 0,11 dan pada tingkat nasional capaian IDG ini pun mengalami kenaikan 0,33 sebagai pembanding menuju IKN, berikut disertakan data IDG DKI Jakarta, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,02. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.6

Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2023

Capaian IDG meliputi komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11

Capaian Komposit IDG Kalimantan Timur tahun 2021

No.	Komposit	Kalimantan Timur		DKI Jakarta		Nasional	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	20.37	20.00	21.70	20.75	21.89	21.74
2.	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	45.37	49.78	49.29	48.60	49.99	48.65
3.	Sumbangan Pendapatan Perempuan	24.05	24.02	38.36	38.34	37.22	37.17

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2023

Pada Tabel diatas dapat terlihat bahwa pada dua komposit yaitu Ketelibatan perempuan di parlemen Capaian Kalimantan Timur pada komposit tersebut masih dibawah rata-rata DKI Jakarta dan Nasional, demikian pula dengan komposit sumbangan pendapatan perempuan masih jauh dibawah capaian nasional dan DKI Jakarta, Namun pada komposit perempuan sebagai tenaga profesional Capaian Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 yakni sebesar 49.78 berada diatas capaian DKI Jakarta dan Nasional yang mengalami penurunan, hal ini menempatkan IDG Kaltim berada pada posisi di 32 dari 34 provinsi se Indonesia.

Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan berbasis gender digunakan strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya (1) kelembagaan (2) komitmen (3) kebijakan (4) Data pilah (5) Metode (6) partisipasi masyarakat (7) SDM dan anggaran. Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi PUG melalui penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan rumusan sebagai berikut :

Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim
berbasis ARG

Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim

x 100 %

Sedangkan Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai

Pelaku Ekonomi Perempuan di Prov. Kaltim

Jumlah Pelaku Ekonomi Prov. Kaltim

x 100 %

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu persentase pelaku ekonomi perempuan dengan rumusan :

2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan Gender adalah Tindak Kekerasan, perdagangan orang, korban pornografi, dll.

Bentuk tindak kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, ekonomi. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai bentuk pemenuhan hak korban bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 623 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 551 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam Grafik berikut :

Gambar 2.7

Grafik jumlah kasus kekerasan perempuan Kaltim tahun 2019 – 2022



Sumber data :Simfoni PPPA Update data per 31 Desember 2022

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk pelanggaran hak anak adalah kekerasan terhadap anak berikut data kekerasan anak tahun 2022. Berdasarkan data simfoni tahun 2022 terdapat jumlah kekerasan pada anak 347 kasus, tertera dalam Grafik berikut :

Gambar 2.8

Grafik jumlah kekerasan tahun 2022



Sumber data :Simfoni PPPA

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa

kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Cacat Fisik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Mental Jiwa	Cacat Fisik Mental	Cacat Lainnya
1	PASER	9	16	47	141	1	4
2	KUKAR	55	74	79	296	3	23
3	BERAU	8	12	45	204	3	7
4	KUBAR	12	16	23	124	2	67
5	KUTIM	33	35	45	172	3	30
6	PPU	14	3	13	54	1	3
7	MAHAKAM ULU	6	2	7	26	2	11
8	BALIKPAPAN	54	20	158	499	7	64
9	SAMARINDA	24	39	127	653	1	16
10	BONTANG	26	16	43	225	-	11
JUMLAH		241	233	587	2394	23	236

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

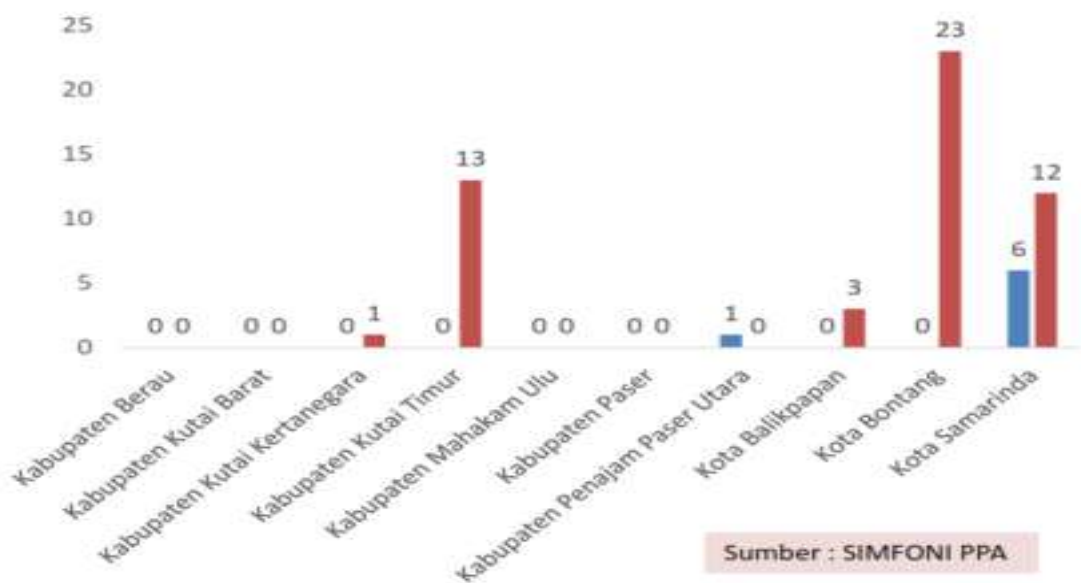
Disabilitas/Kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas,

khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasannya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Berikut data korban kekerasan difabel kaltim tahun 2020

Gambar 2.10

Grafik Korban Kekerasan Difabel



Sumber data :Simfoni PPPA

Persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal aksesibilitas, akomodasi layak, tapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan. Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Rasio KDRT dengan rumusan :

Jumlah KDRT se-Kaltim

Jumlah Rumah Tangga Se-Kaltim

x 100 %

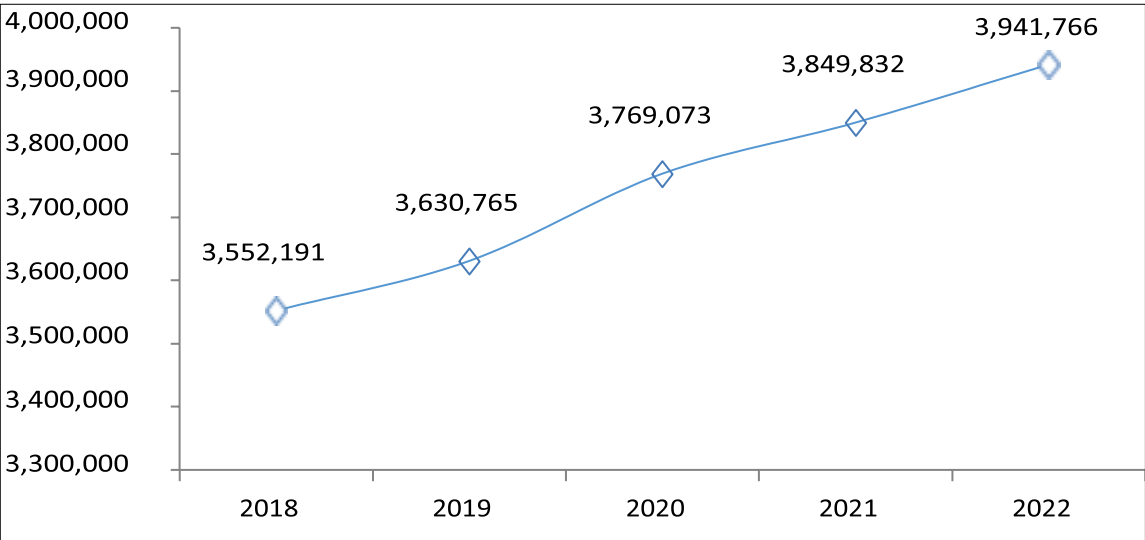
1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk

Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.

Gambar 2.11

Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

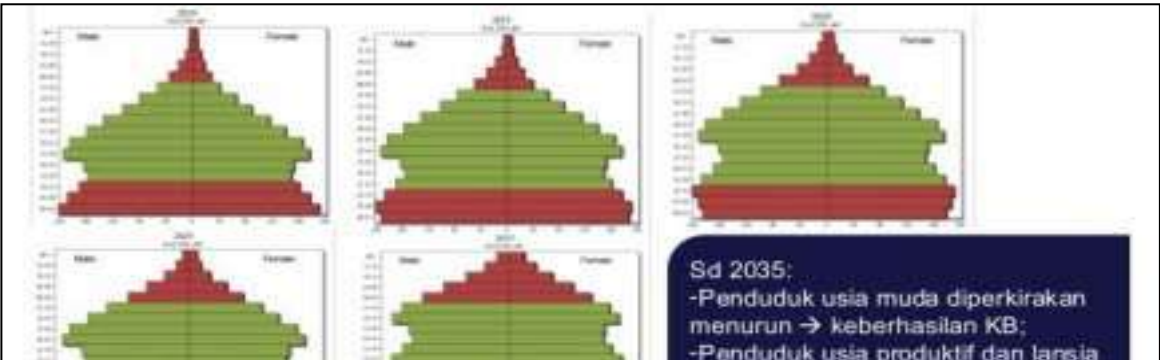


Sumber: DKP3A Provinsi Kaltim, 2023

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan Pemerintah di bidang kependudukan. Pengendalian kependudukan dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana, yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat kelahiran tertentu di masa yang akan datang. Penduduk atau rakyat adalah aset utama dari suatu negara yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masalah penduduk akan berdampak pada lahirnya masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Kondisi Proyeksi Penduduk Kaltim dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.12

Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 - 2035



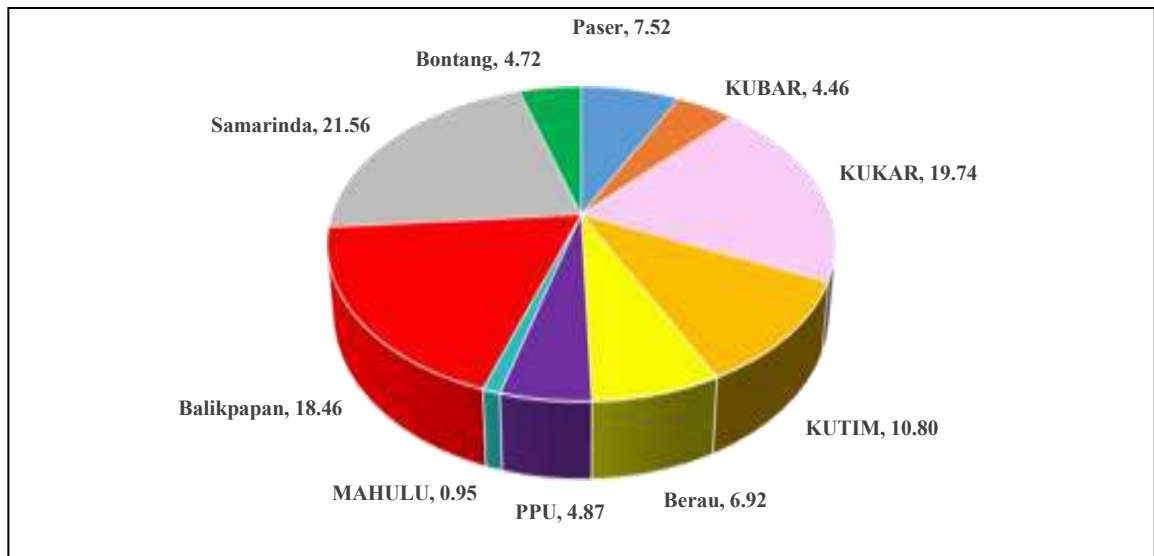
Sumber data : BPS RI

Grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk angkatan kerja lebih banyak dari pada penduduk anak dan lansia. Sehingga penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll memerlukan kebijakan yang strategis dan menjadi kebutuhan utama.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).

Gambar 2.13

Data Distribusi Penduduk menurut Kab/ Kota di Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber: DKP3A Provinsi Kaltim, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.

Jumlah sebaran penduduk yang kurang merata dengan masih terpusat pada kawasan pemerintahan, berdampak pada kualitas hidup, kerusakan hutan dan lahan, sumber daya air, pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan lain-lain. Sebaran penduduk yang kurang merata juga akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu diperlukan proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat diperlukan. Berikut GDPK Kaltim tahun 2020 sebagai panduan dalam kerangka berpikir guna mencapai pembangunan kependudukan.

Gambar 2.14

Pilar GDPK Kaltim



Sumber data : DKP3A Kaltim

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Hingga 2045, diproyeksikan pertumbuhan penduduk Kaltim setiap lima tahun meningkat rata-rata 4,41%. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur diprediksi mencapai 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Lima tahun kemudian meningkat 5,86% menjadi 3,9 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,8 perempuan. Pada 2030, jumlah penduduknya meningkat 5,02% menjadi 4 juta jiwa. Hingga 2045 penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat 5,8% dari

lima tahun sebelumnya. Secara rinci, penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih 3,8 ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2,25 juta dan perempuan sebanyak 2,24 juta. Sementara laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebanyak 1,93 diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,25% per tahun. Hal tersebut memerlukan antisipasi dini berupa implementasi GPK dan pelaksanaan teknis dalam Program KB secara terintegrasi.

Pelayanan Kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dalam mencapai pembangunan kependudukan.

3. Sistem Informasi Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Sistem data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data anak adalah data kondisi anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur.

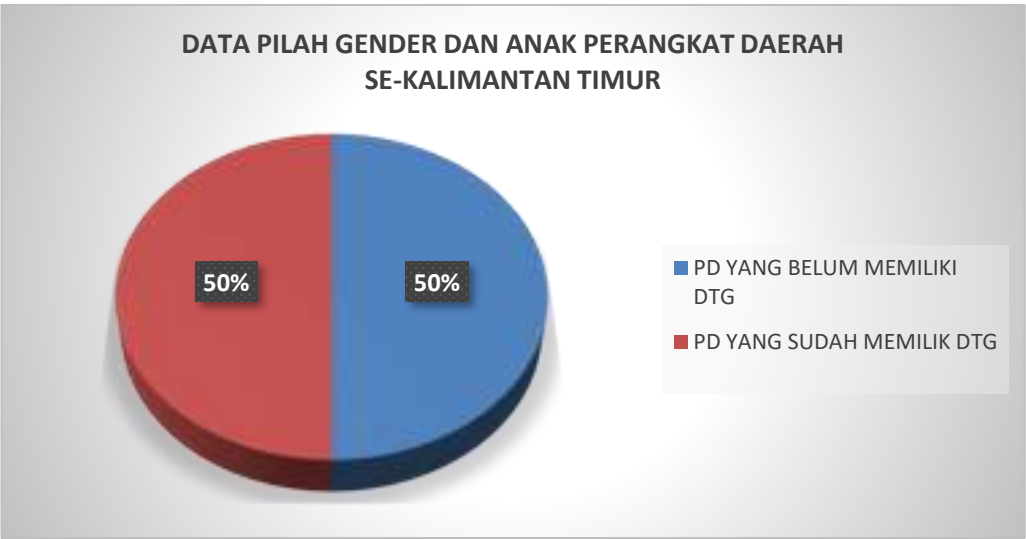
Untuk terwujudnya persamaan pandangan tentang data gender dan anak, serta memudahkan berkomunikasi diperlukan mekanisme sistem data gender dan anak. Antara lain : 1) Indikator dan jenis data yang dibutuhkan, 2) Pengumpulan data, 3) Metode pengumpulan dan alur data, 4) Periode pengumpulan data, 5) Penerima Manfaat.

Data Terpilah Gender (DTG) merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan merupakan bagian penting dari proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). DTG merupakan indikasi awal ada atau tidaknya sebuah kesenjangan. Hal ini bisa menjadi basis kajian lebih dalam terkait kesenjangan yang ada. DKP3A sebagai fasilitator DTG dan Diskominfo Provinsi Kaltim sebagai wali data mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi DTG Perangkat Daerah yang diperlukan guna penyusunan kebijakan Program Kegiatan yang responsif gender.

Data Terpilah Anak merupakan Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih. 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan 5) perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi

Dari 34 perangkat daerah yang merupakan kelompok Kerja (POKJA) Data Terpilah yaitu wadah komunikasi di Provinsi Kaltim untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender, terdapat 50% Perangkat Daerah yang sudah memiliki DTG, tertera dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2.15
Data Pilah Gender Perangkat Daerah



Sumber data : DKP3A Kaltim

Berikut tabel data jumlah penduduk perempuan kepala keluarga, salah satu kelompok data gender yang digunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait pelaku

usaha ekonomi perempuan dan program kegiatan lainnya.

Tabel 2.13
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota
Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREMPUAN	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
1	PASER	143.127	16.063
2	KUTAI KARTANEGARA	372.942	43.271
3	BERAU	128.167	14.581
4	KUTAI BARAT	83.403	9.912
5	KUTAI TIMUR	198.349	22.909
6	PENAJAM PASER UTARA	92.544	11.045
7	MAHAKAM ULU	17.398	2.347
8	KOTA BALIKPAPAN	355.888	52.266
9	KOTA SAMARINDA	417.411	55.844
10	KOTA BONTANG	89.704	10.358
JUMLAH		1.898.933	238.596

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja pelayanan pemanfaatan data gender dan anak maka digunakan formula perhitungan capaian program SIGA sebagai berikut :

Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim Yang
Memanfaatkan Data Gender

Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim

x 100 %

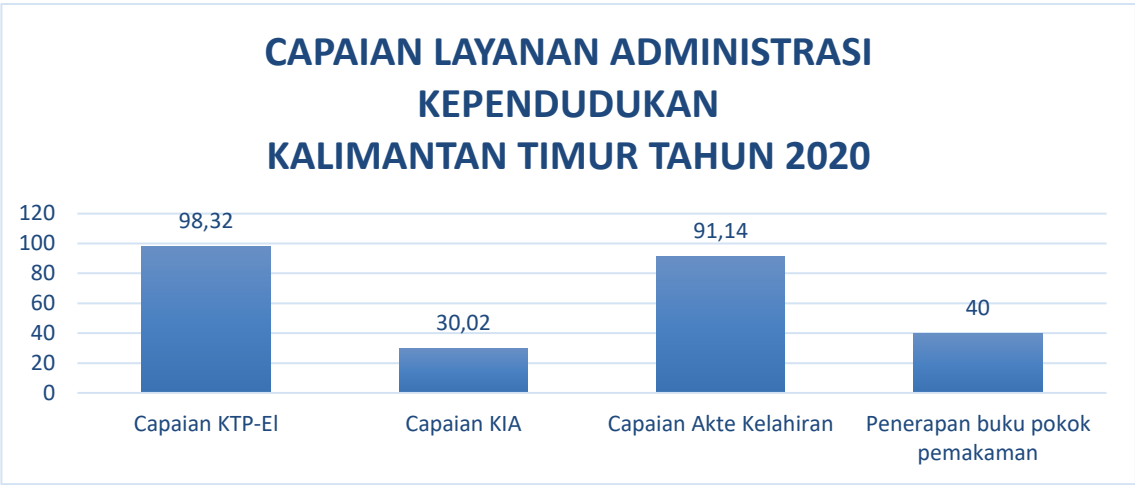
4. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun jenis administrasi pelayanan kependudukan meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Berikut capaian layanan kinerja administrasi kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kegiatan terkait pemenuhan hak sipil penduduk Kaltim.

Gambar 2.16

Grafik capaian layanan administrasi kependudukan



Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berguna sebagai bahan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Demikian pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan maka telah dilakukan berbagai Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk dapat menggunakan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan. Berikut keadaan PKS dan akses Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Tabel 2.14

Tabel Perjanjian Kerjasama dan Akses di Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	PKS S/D 31 Des 2020	Akses DWH S/D 31 Des 2020	PKS S/D 31 Jan 2021	Akses DWH S/D 31 Jan 2021
1	Provinsi	7	4	7	4
2	Kutai Kartanegara	28	4	28	4
3	Balikpapan	10	9	10	9
4	Kutai Timur	14	1	14	1
5	Samarinda	12	8	12	8
6	Berau	5	0	5	0
7	Paser	20	1	20	1
8	Bontang	9	9	9	9
9	Kutai Barat	9	1	9	1
10	Mahakam Ulu	0	0	0	0
11	PPU	5	1	5	1

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Salah satu kelompok data yang memenuhi hak akses yang digunakan oleh berbagai sektor adalah keadaan jumlah penduduk Kaltim seperti tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.15

Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin				Jumlah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
	L	%	P	%				
Paser	153.455	52	143.127	48	296.582	10	139	5
Kukar	405.154	52	372.942	48	778.096	20	193	44
Berau	144.720	53	128.167	47	272.887	13	100	10
Kutai Barat	92.207	53	83.403	47	175.610	16	190	4
Kutai Timur	227.438	53	198.349	47	425.787	18	139	2
PPU	99.423	52	92.544	48	191.967	4	30	24
Mahulu	19.920	53	17.398	47	37.318	5	50	-
Balikpapan	371.777	51	355.888	49	727.665	6	-	34
Samarinda	432.306	51	417.411	49	849.717	10	-	59
Bontang	96.433	52	89.704	48	186.137	3	-	15
Jumlah	2.042.833	52	1.898.933	48	3.941.766	105	841	197

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja layanan administrasi kependudukan maka digunakan formula perhitungan capaian Presentase

penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim Yang Memanfaatkan Data Kependudukan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Kaltim}} \times 100 \%$$

5. Pelayanan Kesekretariatan

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan DKP3A. Diharapkan 2024 mencapai kepuasan 95%. Adapun kegiatan meliputi ;
 - a. Pelaksanaan Adminisrasi Perkantoran dengan indikator kondisi gedung kantor beserta operasional dapat berjalan optimal.
2. Program peningkatan sarana dan parasarana Aparatur dengan indikator sampai pada tahun 2023 enam unit perangkat daerah memiliki kinerja pelayanan tepat waktu. Adapun kegiatan meliputi:
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Keleengkapan Sarana dan prasarana mendukung unit kerja dapat mendukung operasional dengan tepat waktu.
3. Program Penyusunan Dokumen Perencana, pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah dengan indikator Akuntabilitas Kinerja DKP#A, Adapun kegiatan meliputi :
 - a. Penyusunan laporan pengendalan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator laporan kinerja tepat waktu.
 - b. Rakor Bidang Pemberdayaab Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator adanya rekomendasi PPPA.
 - c. Forum RKP Bidang PPPA, Pengendalian penduduk dan KB serta Pelayanan Administrasi kependudukan.
 - d. Pameran hasil Karya perempuan bidang pembangunan.
4. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah, dengan kegiatan meliputi :
 - a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

II. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisisnya, yaitu dengan menggunakan metode *SWOT Analysis* (*strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis*). Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A Prov. Kaltim pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.
- b. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, meliputi Gugus Tugas PTPPO, P2TP2A, UPPKS, PATBM, PUSPA, Pokja PUG.
- c. Konsep patriarki terkadang masih mengerdilkan peran perempuan. Banyak pekerjaan perempuan dalam sektor informal masih dianggap tidak bernilai ekonomi atau bernilai ekonomi rendah karena masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan bukan utama
- d. Bonus Demografi dalam penyediaan lapangan kerja perempuan, pengendalian penduduk pendatang menjadi kelompok termarginal menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Masih adanya gap antara meningkatnya jumlah korban dan keluarga korban yang telah mampu membuka suara dengan ketersediaan lembaga yang menangani serta antara kualitas kekerasan yang semakin beragam dengan kualitas penanganan
- f. Adanya gap antara keluasan cakupan wilayah dengan sistem penanganan dengan efektif, cepat dan sinergis.

- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- i. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas anak, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- j. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
- k. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun Pusat, sehingga terganggu Pencetakan dokumen, Perekaman dan pengiriman data hasil perekaman, validasi hingga verifikasi data atas dugaan identitas ganda.
- l. Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan
- m. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mempengaruhi adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
- n. Letak Geografis yang tidak memungkinkan dalam Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah serta adanya pengaruh kemajuan dibidang teknologi informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dokumen Kependudukan
- o. Integrasi data kependudukan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah
- p. Adanya tugas kewenangan Provinsi dalam program pengendalian penduduk dan KB.

- q. Aksesibilitas yang masih rendah terhadap pelayanan KB.
- r. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga pemahaman terhadap Program Bangga Kencana masih kurang
- s. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi
- t. Mobilitas Penduduk membutuhkan percepatan penyelenggaraan administarsi pelayanan penduduk.

B. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisanya, yaitu dengan menggunakan metode *SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis)*. Identifikasi tantangan DKP3A Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Adanya mandat dalam UU no 23 tahun 2014, PP no 18 tahun 2016 untuk melakukan pengembangan organisasi menjadi Organisasi Perangkat daerah yang lebih teknis
- b. pemberdayaan perempuan di masyarakat sudah nyata terlihat di bidang pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik dan lain-lain.
- c. Organisasi Pemerhati perempuan dan anak di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra kerja memberi dukungan dalam pelaksanaan PUG.
- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Meningkatnya daya saing UMKM di Indonesia dimana 56% pelakunya adalah perempuan yang dianggap memiliki potensi dan karakter yang dikenal telaten, mandiri, dan pantang menyerah. Terutama bagi perempuan milenial yang hampir secara keseluruhan memiliki sifat dinamis, optimis, semangat dalam bekerja, memiliki ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- g. Terbentuknya UPTD PPA di Kalimantan Timur memberikan dorongan lebih kuat lagi bagi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- h. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- i. Adanya jejaring kerja lintas sektor dan multi program untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah prov Kalimantan Timur.
- j. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika (TI) dengan pengoprasian SIAK sampai dengan ditingkat Kecamatan dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid sebagai dasar Penentuan Kebijakan.
- k. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung akan mempermudah pemberian pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang cepat, murah, dan mudah serta akurat.
- l. Ketersediaan anggaran/dana dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan akan mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dalam pengurusan penerbitan surat keterangan dan dokumen kependudukan yang berbasis teknologi informasi.
- m. Tersedianya Data Base Kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan terdeteksi terkait adanya mobilisasi penduduk (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)
- n. Peran keluarga berencana mendorong bonus demografi tadi menjadi *power*, dengan banyaknya penduduk Indonesia harus berkualitas
- o. Ketersediaan instrumen regulasi memberikan daya dorong untuk penguatan program dan kegiatan di bidang pengendalian

penduduk, Keluarga Berencana serta Kesejahteraan dan Ketahanan keluarga

- p. Kewenangan untuk melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

III. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja.
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - d. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai sumber daya pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - e. Belum optimalnya penggunaan SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik.
 - f. Capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - a. Masih belum ditemukannya kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan
 - b. Belum optimalnya upaya mengatasi terjadinya ketimpangan kesetaraan gender.
 - c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan namun relatif rendah dibandingkan dengan kondisi ideal dan daerah lain.
 - d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - e. Masih terbatasnya ruang akses bagi perempuan di sektor formal (di tempat-tempat bekerja yang teregistrasi) walaupun pada faktanya kesetaraan gender berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
 - g. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.

- h. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

3. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- b. Belum optimalnya upaya diseminasi terkait hak asasi perempuan yang dilakukan secara efektif dalam mengurangi jumlah korban akibat KDRT.
- c. Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
- d. Budaya patriarkhis yang masih ada dimasyarakat sangat tidak menguntungkan posisi perempuan sebagai korban tindak kekerasan.
- e. Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.

4. Permasalahan Perlindungan Anak:

- a. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- b. Maraknya kasus tindak kekerasan terhadap anak maupun kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti penelantaran anak, kriminalisasi anak dan anak jalanan.
- d. Semakin meningkatnya angka perkawinan dini yang dilakukan oleh anak pada rentang usia 11-13 tahun yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi akibat belum siapnya pasangan baik secara fisik dan psikologis.
- e. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
- f. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)

5. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:

- a. Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
- b. Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas

anak.

- c. Belum semua Puskesmas dan sekolah termasuk kategori Puskesmas dan sekolah ramah anak
 - d. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan dan pendamping/pekerja sosial, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak
 - e. Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
6. Permasalahan Sistim Informasi Gender dan Anak.
- a. Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
 - b. Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - c. Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - d. Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
 - e. Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.
7. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
- a. Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.
 - b. Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
 - c. Belum optimalnya upaya meningkatkan pengetahuan, akses pelayanan KB dan dukungan keluarga dalam mempengaruhi upaya penurunan angka Unmet Need di Kaltim.
 - d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pembentukan kampung KB di Kaltim

- e. Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.
 - f. Belum optimalnya upaya edukasi/Pendidikan kepada masyarakat khususnya pasangan pra nikah, tentang agaman, reproduksi, dan keluarga berencana.
8. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- a. Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
 - b. Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan implementasi SIAK dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait.

Tabel 3.1
Masalah dan akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pemenuhan hak anak belum optimal di seluruh Kab/Kota	Masih terdapat Kab/Kota yang belum memenuhi kategori KLA	Kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan KLA
			Kurangnya dukungan dari pemerintah, swasta, masyarakat dan media terhadap keberhasilan KLA
			Belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur terampil yang mendukung keberhasilan KLA
2	Masih rendahnya tingkat kepedulian terhadap perlindungan perempuan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan perempuan	Kurangnya pemahaman tentang perlindungan perempuan
			Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan
3	Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan	penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan belum optimal
			Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga
			Masih adanya stigma kasus

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			kekerasan merupakan privasi
			Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
4	Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga	masih kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga	Kurangnya pemahaman terhadap ketahanan keluarga
			Kesenjangan antar pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
		kurangnya fleksibilitas peran dalam keluarga	Masih rendahnya pemahaman tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Kurangnya latih kepekaan dan kepedulian terhadap anggota keluarga
5	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kab/Kota belum maksimal	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan masyarakat belum maksimal
			Penduduk pendatang dari luar daerah banyak yang tidak melapor
			layanan online di Kab/Kota belum terstandar
		Pengurusan dokumen kependudukan masih lambat	Sarana peralatan disdukcapil banyak yang tidak mendukung aplikasi terbaru
			Minimnya pelayanan adminduk jemput bola di Kab/Kota
6	Ketersediaan data terpilah yang benar dan akurat masih kurang maksimal.	Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan agar responsif terhadap pemenuhan hak anak.	SDM disdukcapil khususnya yang berstatus ASN masih terbatas
		Data terpilah yang akuntabel sangat bermanfaat untuk melihat permasalahan dalam pembangunan dan akhirnya dapat mengidentifikasi isu tentang perempuan	Pemahaman tentang data terpilah gender dan anak masih kurang dipahami oleh perangkat daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		dan anak, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan menyusun program pembangunan yang responsif gender	
7	Budaya patriarki yang masih tinggi dilingkungan masyarakat Kaltim, sehingga partisipasi perempuan dalam.pembangunan. masih masih belum optimal.	Adanya kesenjangan gender dalam pembangunan SDM terkait akses,partisipasi ,manfaat dan kontrol dalam pembangunan. hal ini bisa dilihat dari rendahnya capaian IPG kaltim masih dibawah capaian IPG Nasional, berada diurutan ke 32 dari 34provinsi. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Capaian IDG Kaltim yang masih dibawah nasional di urutan ke 25 dari 34 provinsi.	Implementasi PUG di seluruh kabupaten.kota belum sesuai dengan prasyarat yang ditentukan, dari 10kabupaten kota 5 kabupaten kota telah memenuhi prasyarat PUG dan lima kabupaten kota lainnya belum memenuhi prasyarat PUG meliputi kebijakan , komitmen,kelembagaan, data pilah, partisipasi masyarakat,metoda, sumberdaya dan anggaran.

III. 2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke pada tiga tahun depan, bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam lainnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Peningkatan daya saing artisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaran gender ditandai dengan daya saing perempuan dalam ekonomi, politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang tertera dalam RPD Prov Kalimantan Timur periode 2024-2026. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai urusan

pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan pada tugas fungsi dan kewenangan dengan mengacu pada RPD yang ditentukan yaitu Tujuan ke-1 dan Tujuan ke-4. Capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sangat dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan faktor pendukung. Berikut analisa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
Tujuan 1	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing						
1.	Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing perempuan	1.	Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor	1.	OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program dan Kegiatan	1.	Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana
						2.	Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur menjadi pedoman seluruh penentu kebijakan
		2.	Dokumen perencanaan penganggaran belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG	2.	Lembaga PUG DKP3A belum berperan sesuai tugas fungsi	2.	Eksistensi Tim Driver PUG telah memberikan daya dorong bagi optimalisasi implementasi PUG
		3.	Ketimpangan Gender masih menjadi masalah dalam peningkatan kesetaraan gender di daerah	3.	belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan	3.	Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel
		4.	Pengeluaran perkapita perempuan jauh di bawah laki-laki, disebabkan sebagian besar perempuan hanya terserap di sektor informal, keterampilan terbatas, upah kerja minim, TPAK yang rendah, dan		Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas tenaga	4.	belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor			
			Penghambat		Pendorong	
			akses teknologi informasi yang terbatas		kerja, disperidakop, Perbankan, Dll).	
		5.	Perempuan di legislatif belum mencapai kuota yang digariskan dalam regulasi	5.	Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer	5. Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatk an keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
		6.	Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar	6.	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	6. Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif
		7.	Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A	7.	belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan	7. Pergub No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan data dan informasi Gender dan Anak
		8.	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT	8.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8. Pergub No. 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD PPA pelaksana layanan korban kekerasan
		9.	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	9.	Implementasi Peraturan Perundangundangan belum optimal	9. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hokum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
		10.	Meningkatnya angka pernikahan pada usia anak	10	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	10 Eksistensi peran PUSPAGA
		11.	Database kependudukan yang belum akurat	11	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan sah	11 Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
					(masih banyak dokumen kependudukan ganda)		sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
		12	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	12	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	12	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah
					Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi Program KB		
					Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat		
					Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB		
					Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin		
Tujuan 4	MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI” (indikator “ Indeks Reformasi Birokrasi“)						
2.	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK				a. Belum mempunyai Gedung baru b. Makin tingginya perdagangan manusia, bukan saja antar Negara namun sudah merambah antar daerah; c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;		A. Komitmen yang tinggi Di dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, semua pimpinan dan karyawan harus mempunyai komitmen yang tinggi, kejujuran, ketulusan hati, kepribadian yang

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			d. Masih tingginya kekerasan terhadap anak; e. Masih rendah pemahaman Orang tua dan masyarakat terhadap pemenuhan hak anak; Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	teguh dan bermoral tinggi dalam mencapai visi, misi yang sudah ditetapkan. B. Kerja sama yang baik Kompak dan dapat bekerjasama merupakan modal utama untuk menjalankan semua kegiatan dan program kita, juga tidak meninggalkan prinsip koordinasi dan sinronisasi dan sinergitas. C. Transparan dan akuntabel Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dengan prinsip keterbukaan dan trasparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. D. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.

Tugas dan Kewenangan DKP3A Prov Kalimantan Timur dalam mencapai Tujuna/Sasaran, bertumpu pada Tujuan ke-1 dan Tujuan ke-5. Tujuan ke-1 yaitu **“Mewujudkan SDM yang berdaya saing”** dengan mengacu pada :

1. Meningkatnya Daya Saing Perempuan

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan strategi Pembangunan berbasis PUG adalah dengan adanya Peraturan Daerah Prov Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembangunan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dikuatkan dengan adanya Kelompok Kerja PUG Prov Kalimantan Timur yang bertugas untuk mendorong pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsife Gender agar pembangunan lebih terarah kepada kesetaraan Gender

Jurang Kesenjangan pembangunan di Kalimantan Timur nampak dengan memb andingkan capaian IPM dan IPG serta IDG. Indeks pembangunan Manusia (IPM) Prov Kalimantan Timur berada pada peringkat 3 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai 76.88, hal tersebut tidak diiringi dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menempati urutan 31 dari 34

Provinsi sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) , yaitu menempati ranking ke 29 dari 34 seluruh Provinsi di Indonesia.

Salah satu komposit indikator yang berkaitan terhadap kesenjangan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Timur adalah adanya ketertinggalan dalam aspek ekonomi, hasil data pada tabel berikut adalah gambaran pada dua tahun terakhir capaian pada pengeluaran perkapita laki laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kesenjangan ini menggambarkan proses pembangunan di bidang ekonomi belum mengakomodir karakteristik perempuan di dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.

Perempuan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan di Indonesia karena perempuan berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga. Potensi ini akan muncul ketika perempuan menjadi pelaku usaha ekonomi, menjadi wirausaha. Seperti yang kita ketahui bersama sebanyak 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia dimotori oleh perempuan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan dari semua itu harus optimal agar anak mendapatkan hak-hak yang memang dibutuhkan. Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup/perilaku orang-orang dewasa, menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak ramah anak. Padahal

kerentanan pada anak dapat mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Hal tersebut menjadi masalah yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tiga tahun terakhir sampai bulan November 2018 tindak kekerasan pada anak mengalami penurunan (tabel 11), Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merespon perlindungan anak, terutama pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban kekerasan diwujudkan melalui program Prioritas yaitu Program Penurunan Perkawina Usia Anak.

Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Anak yang memasuki perkawinan pasti mengalami putus sekolah karena syarat untuk bersekolah usia 18 tahun tidak menikah. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia anak mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak harus bekerja untuk menafkahi keluarga, karena bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga berdampak pada pendapatan upah yang rendah. Kondisi ini dapat memicu terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuangkan kepedulian terhadap Perlindungan Anak dengan mengacu pada Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) meliputi 1) Hak sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan 5) Perlindungan Khusus. Penyelenggaraan kebijakan-kebijakan dan program-program pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh diletakkan di atas empat prinsip dengan yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan d) penghargaan terhadap pandangan anak.

III. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI SERTA RENSTRA BKKBN 2020-2024

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor			
				Penghambat	Pendorong		
Tujuan 1	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing						
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	1.	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100	1.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal	1.	Adanya komitmen daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
		2.	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	2.	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	2.	PUG telah diimplementasikan kedalam perencanaan Pembangunan di Kaltim
		3.	Kesetaraan gender (gender equality) merupakan permasalahan lintas sector (crosscutting issues) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari kab/kota sampai dengan provinsi	3.	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	3.	Meningkatnya Patisipasi lembaga pemerintah, masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
						4.	Terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan (masyarakat) yang concern dan bermitra dengan DJKP3A dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			4. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan;	5. Telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di beberapa daerah
		1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlah kasus KDRT 2. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan	1. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan	1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait 2. Adanya media daring dan luring untuk pencegahan kekerasan
		3. Masih adanya jumlah kasus perdagangan orang khususnya perempuan	3. Kurangnya pemahaman hukum tentang kekerasan pada perempuan dan anak	3. Keberadaan UPTD PPA sebagai unit pelayanan terhadap Korban kekerasan
		4. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran	4. Masih rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan di masyarakat	4. Tersedia layanan pengaduan baik online, hotline maupun manual
		5. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	5. Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	5. Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
		6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak	6. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum	6. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan kabupaten/kota Layak Anak

No.	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			berhadapan dengan hukum (ABH).Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	adanya regulasi daerah tentang penurunan angka Perkawinan Usia Anak	
		7.	Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas	7. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang berperan	7. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak melalui Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah
		8.	Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)		
		9.	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan		
		10.	Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak		

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil. Adapun sasaran Kemendagri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
2	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional			

Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Tingginya pertumbuhan penduduk Prov. Kaltim 0.56 dari data statistik 2018	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pascasalin metode konsumsi jangka panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/ bidang di seluruh wilayah
2	Meningkatnya Kontrasepsi (CPR)			
3	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	Tingginya pernikahan pada anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	

III. 4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah, pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki kaitan langsung. Namun jelas dipahami bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Pemerintah yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan Pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pembangunan yang komperhensif dan menyeluruh dimana manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa melihat batasan daerah dimana seluruh masyarakat merupakan subjek dan obyek pembangunan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai dokumen yang dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan dinamika perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Telaahan RTRW ditujukan untuk dapat mengidentifikasi implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Berdasarkan identifikasi tersebut, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsi pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/program (KRP).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, tujuan dilakukannya telaahan KLHS adalah untuk mengidentifikasi apakah ada program atau kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KHLHS.

Dengan demikian bahwa pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pembangunan yang tidak menyentuh aspek lingkungan hidup secara langsung, namun hasil pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berdampak terhadap lingkungannya.

III. 5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah
2. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO yang perlu ditingkatkan
3. Masih belum optimalnya upaya Pengendalian Penduduk dan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana serta upaya perwujudan ketahanan keluarga
4. Peningkatan akurasi Database kependudukan
5. Semakin marak dan tingginya tingkat perkawinan usia anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun 2024-2026. Tujuan disesuaikan dengan 3 (tiga) urusan yang diampu DKP3A Prov. Kaltim melalui 6 (enam) tujuan meliputi:

- 1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
- 2. Meningkatkan Daya Saing Perempuan
- 3. Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur
- 4. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
- 5. Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
- 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi :

- 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak
- 2. Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi
- 3. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim
- 4. Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak
- 5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana
- 6. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Rincian Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sesuai dengan RPD Prov. Kaltim adalah:

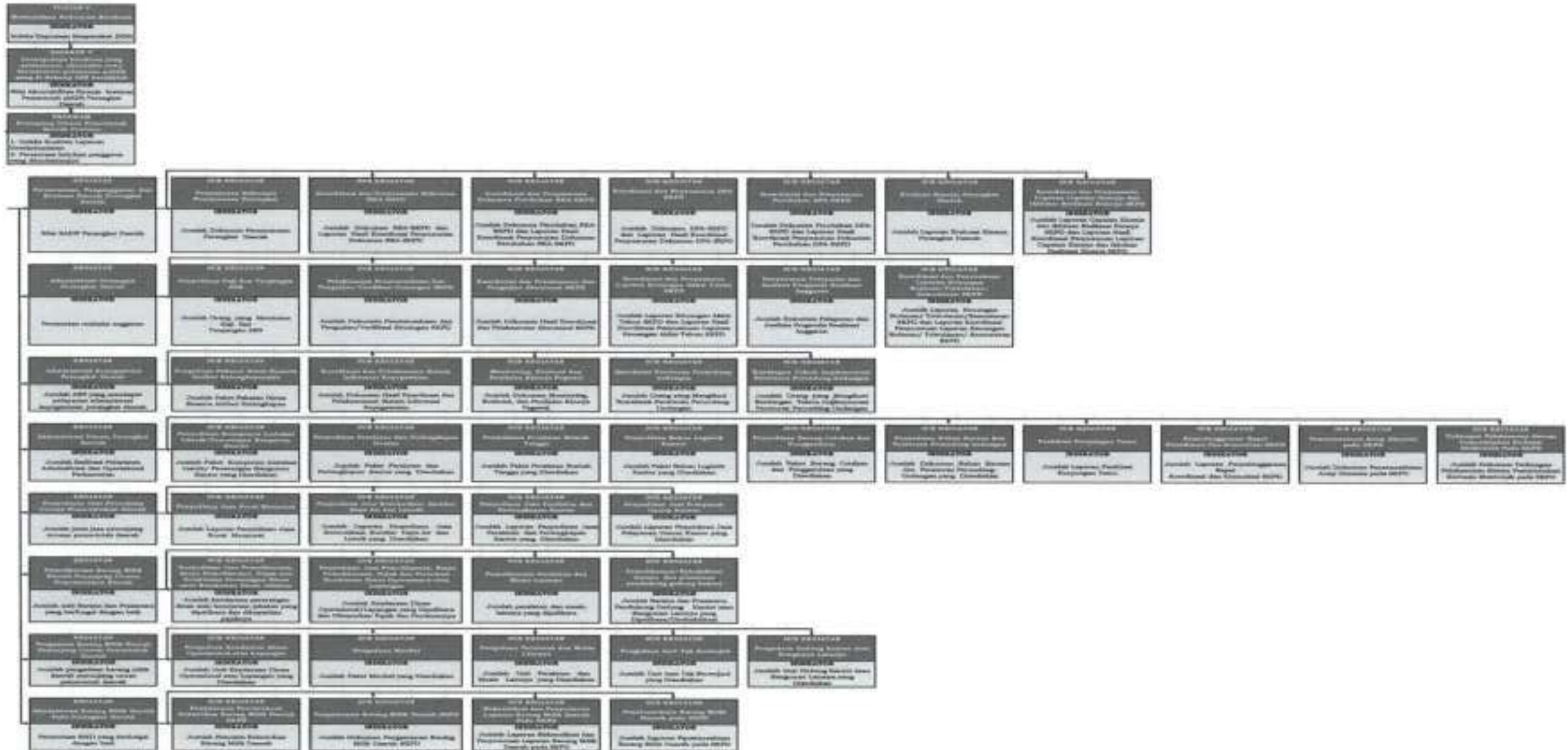
Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-				Ket
					2022	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	96	97	98	99		
		Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70.46	70.50	71.00	71.50		
2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,89	67,31	67,64	67,98		
		Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lembaga PEKKA	0	2	2	2		
			Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	0	400	300	300		
3	Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur		Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.018	0.030	0.025	0.020		
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	24.96	23.46	23.23	23.11		
4	Meningkatkan ketersediaan		Persentase Peningkatan	%	65	75	80	85		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-				Ket
					2022	2024	2025	2026		
	data gender dan anak yang berkualitas		ketersediaan data gender dan anak							
		Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	65	75	80	80		
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana		Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	2.18	2.10	2.10	2.10		
		Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.33	2.53	2.63	2.73		
6	Meningkatkan Kuaitas Pelayanan Adminsitiasi Kependudukan		Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.3	99.4	99.5	99.6		
			Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	50	60	70	80		
			Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98	98,5	99	99.5		
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100	100		

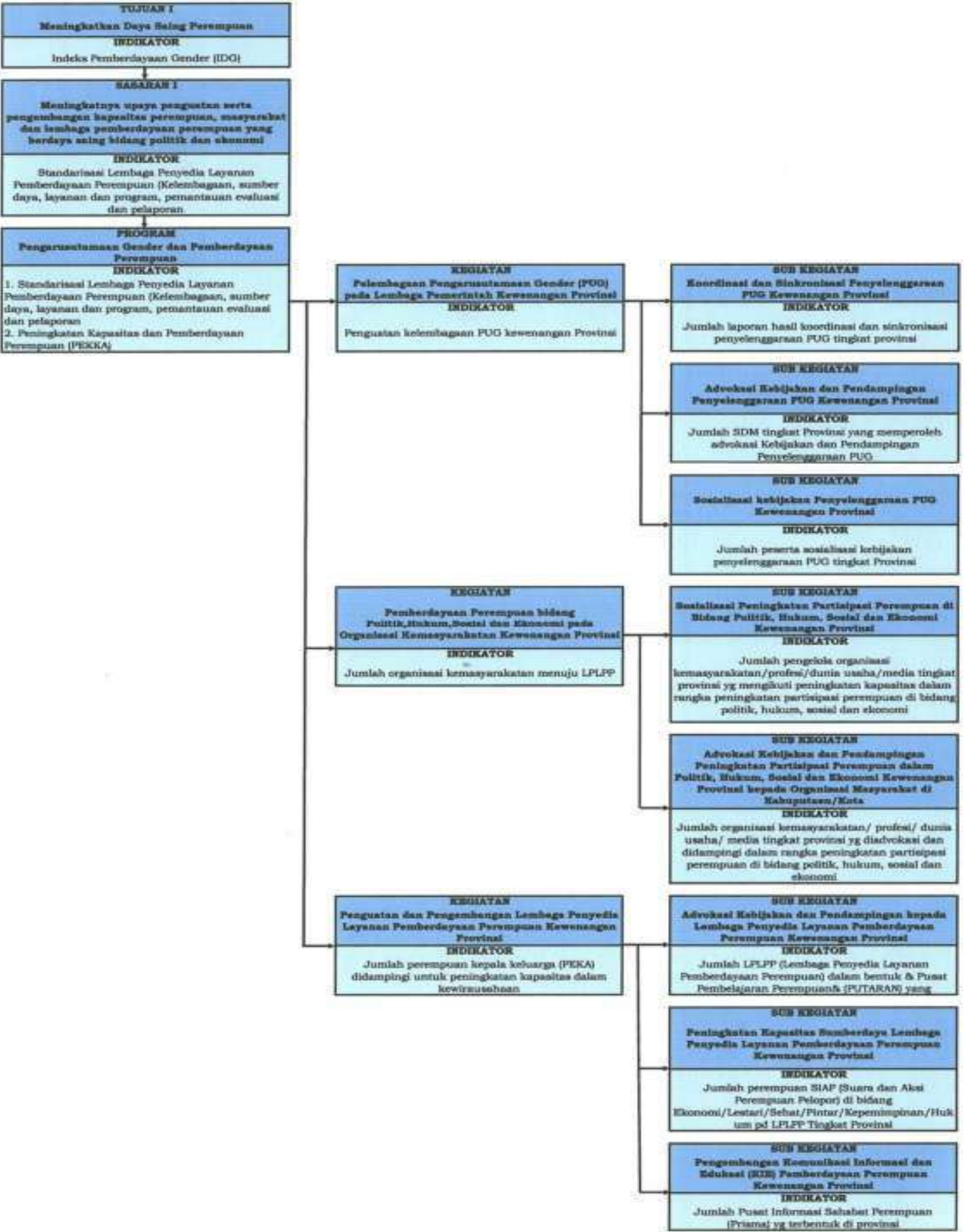
Gambar 4.1
Cascading Sekretariat DKP3A Prov. Kaltim

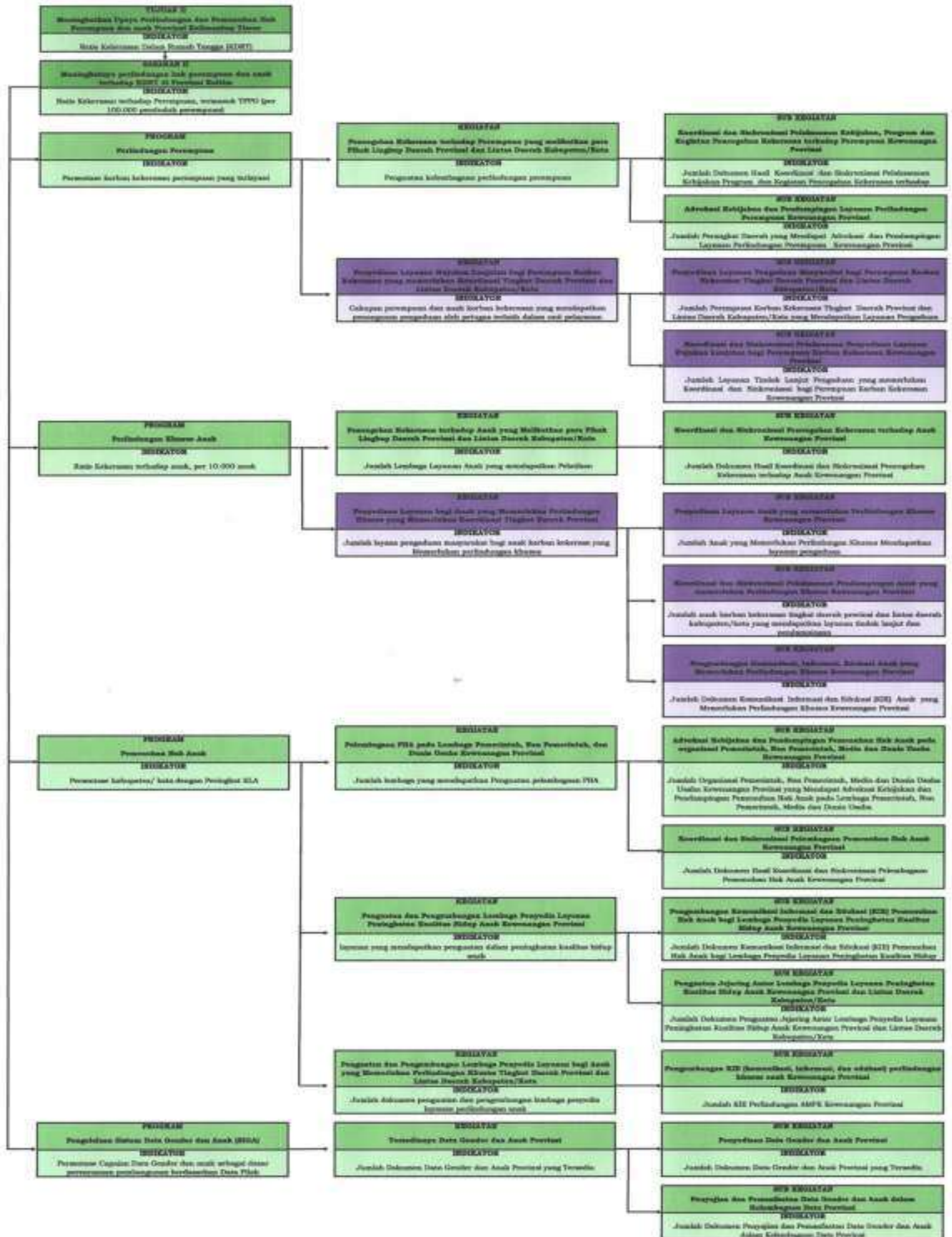


Gambar 4.2

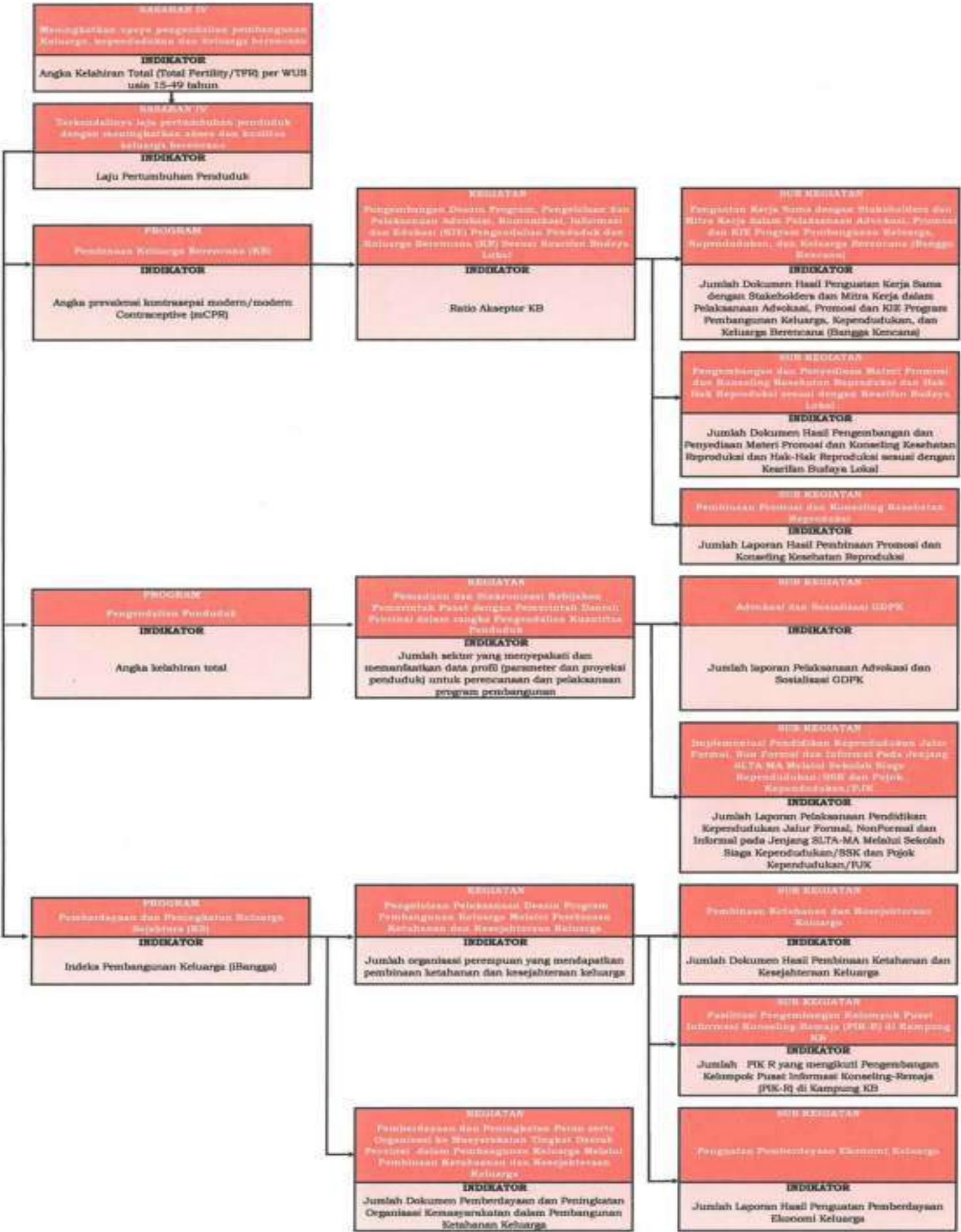
Cascading Bidang Kesetaraan Gander DKP3A Prov. Kaltim

Gambar 4.3



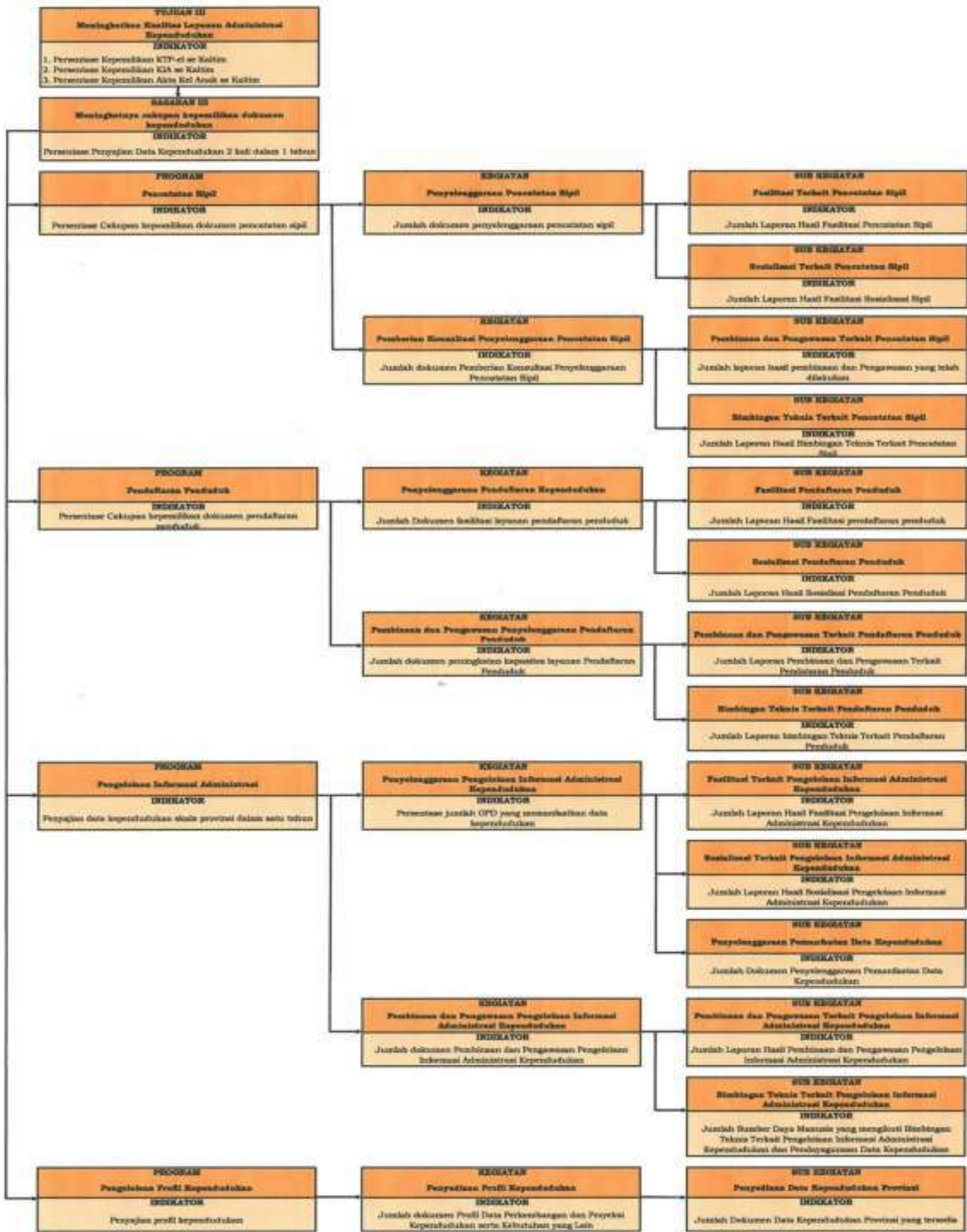


Gambar 4.4
Cascading Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKP3A
Prov. Kaltim



Gambar 4.5

Cascading Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan DKP3A
Prov. Kaltim



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan TimurTahun 2024-2026

TUJUAN 4 RPD ; Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
SASARAN 11 RPD ; Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur	1.Peningkatan standar kualitas pelayanan publik dan aparaturnya DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
		2.Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	2.Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasasarn yang jelas, terukur) dan partisipatif serta tepat waktu.
			3.Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.
TUJUAN 1 RPD :			
Mewujudkan SDM yang berdaya saing			
SASARAN 4 RPD :			
Meningkatkan Daya Saing Perempuan			
Meningkatnya daya saing perempuan	Meningkatkan upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
			2.Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
			3.Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
			4.Pemberdayaan gender antar wilayah
Meningkatnya Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan anak Provinsi	Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Mengoptimalkan upaya Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.Penyusunan Regulasi, Kebijakan dan Penegakan Peraturan
			2.Peningkatan perlindungan perempuandan anak serta pemenuhan hak anak dengan fokus mitigasi terjadinya

Kalimantan Timur			kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pelaporan data pilah gender dan anak	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA
Meningkatnya upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1.Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			2.Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
		Mewujudkan Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	3.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Adminsitasi Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Pengelola Layanan Adminsitasi Kependudukan	4.Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
			1.Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola layanan Adminduk
			2.Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang Layanan Adminduk
			3.Akurasi data Kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan/pagu yang bersifat indikatif. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DKP3A tertera pada table 6.1.

Rencana program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk tiga tahun kedepan dibuat secara bertahap. Program kegiatan sampai dengan tahun 2026 adalah 12 program dan 29 kegiatan dan 89 sub kegiatan. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menetapkan program-program ini, DKP3A membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dalam menetapkan program program tersebut terdapat program prioritas yang diselenggarakan oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal yaitu **“Program Pengarusutamaan Gender”** pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagaimana memenuhi amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Tabel 6.1

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja,Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								NON URUSAN				20.841.194.000		24.059.255.000		22.555.118.000		67.455.567.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	2	08	01				[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	77 indeks	82 indeks	20.741.194.000	84 indeks	23.959.255.000	86 indeks	22.455.118.000	86 indeks	67.155.567.000	DKP3A	Prov. Kaltim
									Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01		[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.46%	70,50%	760.000.000	71,00%	860.000.000	71,50%	860.000.000	71,50%	2.480.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	150.000.000	6 dokumen	200.000.000	3 dokumen	200.000.000	12 dokumen	550.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	145.000.000	2 dokumen	145.000.000	2 dokumen	145.000.000	6 dokumen	435.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	3 dokumen	45.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	6 dokumen	45.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	01	1	01	05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	3 dokumen	45.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	06	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	170.000.000	3 laporan	170.000.000	3 laporan	170.000.000	9 laporan	510.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	01	07	[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	250.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	3 laporan	850.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02		[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	93.04%	94.00%	10.687.057.000	94.50%	11.078.000.000	95.00%	11.078.000.000	95.00%	32.843.057.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	45 orang/bulan	10.587.057.000	45 orang/bulan	10.850.000.000	45 orang/bulan	10.850.000.000	45 orang/bulan	32.287.057.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	03	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	2 dokumen	60.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000	24 dokumen	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	3 laporan	145.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	01	1	02	07	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	35.000.000	18 laporan	78.000.000	18 laporan	78.000.000	52 laporan	191.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	02	08	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	6 dokumen	60.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03		[KEGIATAN] Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	-	-	-	92.00%	175.000.000	95.00%	175.000.000	95.00%	350.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	2 dokumen	50.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	02	[SUB KEGIATAN] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	05	[SUB KEGIATAN] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	8 laporan	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	03	06	[SUB KEGIATAN] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	4 laporan	100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05		[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	70 orang	80 orang	1.150.000.000	82 orang	1.470.000.000	86 orang	1.470.000.000	86 orang	4.090.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	02	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	216.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	9 paket	1.016.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	01	1	05	04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	2 dokumen	140.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	05	[SUB KEGIATAN] Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	10	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 orang	85 orang	784.000.000	85 orang	700.000.000	85 orang	700.000.000	85 orang	2.184.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05	11	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	150.000.000	12 orang	200.000.000	12 orang	200.000.000	34 orang	550.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	05		[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	109 unit	111 unit	3.121.000.000	113 unit	3.726.000.000	117 unit	3.726.000.000	117 unit	10.573.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	3 paket	135.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6 paket	210.000.000	6 paket	300.000.000	10 paket	300.000.000	22 paket	810.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	2 paket	20.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	2 paket	20.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	06	05	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	6 paket	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	01	1	08		[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	4 jenis jasa	2.974.204.800	4 jenis jasa	3.227.000.000	4 jenis jasa	3.227.000.000	4 jenis jasa	9.428.204.800	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	15.350.800	1 laporan	17.000.000	1 laporan	17.000.000	3 laporan	49.350.800	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	458.854.000	1 laporan	700.000.000	1 laporan	700.000.000	3 laporan	1.858.854.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	1 laporan	110.000.000	3 laporan	320.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	08	04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2.400.000.000	1 laporan	2.400.000.000	1 laporan	2.400.000.000	3 laporan	7.200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09		[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	85 unit	86 unit	1.148.932.200	87 unit	835.000.000	88 unit	869.118.000	88 unit	2.853.050.200	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	10.203.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	50.203.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09	02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	24 unit	250.000.000	25 unit	250.000.000	26 unit	250.000.000	26 unit	750.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	01	1	09	06	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	60 unit	60.000.000	60 unit	65.000.000	60 unit	70.000.000	60 unit	195.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	01	1	09	11	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	828.729.200	1 unit	500.000.000	1 unit	529.118.000	1 unit	1.857.847.200	DKP3A	Prov. Kaltim
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				18.259.296.000		10.730.000.000		8.785.000.000		37.774.296.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	2	08	02				[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	-	400 orang	12.459.543.000	300 orang	2.055.000.000	300 orang	1.985.000.000	1000 orang	16.499.543.000	DKP3A	Prov. Kaltim
			08	02	1	01		[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	10 lembaga	10.859.543.000	10 lembaga	670.000.000	10 lembaga	620.000.000	30 lembaga	12.149.543.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 laporan	1 laporan	10.459.543.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	330.000.000	3 laporan	11.139.543.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	190.000.000	3 dokumen	640.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	02	1	01	04	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	200 orang	30 orang	150.000.000	35 orang	120.000.000	35 orang	100.000.000	100 orang	370.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	02		[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	1 lembaga	600.000.000	1 lembaga	500.000.000	1 lembaga	480.000.000	3 lembaga	1.580.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 orang	430 orang	300.000.000	450 orang	250.000.000	450 orang	230.000.000	1330 orang	780.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 lembaga	2 lembaga	300.000.000	2 lembaga	250.000.000	2 lembaga	250.000.000	6 lembaga	800.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	03		[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	-	400 orang	1.000.000.000	300 orang	885.000.000	300orang	885.000.000	1000 orang	2.770.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	02	1	03	01	[SUB KEGIATAN]Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	-	1 lembaga	300.000.000	1 lembaga	250.000.000	1 lembaga	250.000.000	3 lembaga	800.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	03	02	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat /Pintar/Kepemimpinan /Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	-	300 orang	500.000.000	300 orang	450.000.000	300 orang	450.000.000	900 orang	1.400.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	02	1	03	03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	-	1 unit	200.000.000	1 unit	185.000.000	1 unit	185.000.000	3 unit	570.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	2	08	03				[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	24.96%	23.46%	1.556.925.600	23.24%	3.025.000.000	23.00%	2.000.000.000	23.00%	6.581.925.600	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	01		[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	10 lembaga	956.925.600	10 lembaga	1.925.000.000	10 lembaga	1.387.500.000	10 lembaga	4.269.425.600	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	3 dokumen	350.000.000	3 dokumen	800.000.000	3 dokumen	556.250.000	9 dokumen	1.706.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	03	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	10 Perangkat Daerah	606.925.600	10 Perangkat Daerah	1.125.000.000	10 Perangkat Daerah	831.250.000	30 Perangkat Daerah	2.563.175.600	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1		02	[KEGIATAN] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	70%	75%	600.000.000	80%	1.100.000.000	85%	612.500.000	85%	2.312.500.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	-	30 orang	300.000.000	40 orang	500.000.000	50 orang	256.250.000	120 orang	1.056.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	03	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	40 layanan	300.000.000	50 layanan	600.000.000	60 layanan	356.250.000	150 layanan	1.256.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06				[PROGRAM] PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/kota layak anak	90%	90%	1.117.500.000	90%	1.800.000.000	100%	1.100.000.000	100%	4.017.500.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	JJumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	10 lembaga	667.500.000	10 lembaga	1.200.000.000	10 lembaga	848.125.000	10 lembaga	2.715.625.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	06	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	30 perangkat daerah	667.500.000	30 perangkat daerah	900.000.000	30 perangkat daerah	528.125.000	30 perangkat daerah	2.095.625.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	320.000.000	1 dokumen	620.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1		02	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	10 lembaga	450.000.000	10 lembaga	600.000.000	10 lembaga	251.875.000	10 lembaga	1.301.875.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	02	03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	-	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	420.000.000	1 kegiatan	131.250.000	3 kegiatan	851.250.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	06	1	02	04	[SUB KEGIATAN] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	180.000.000	1 kegiatan	120.625.000	3 kegiatan	450.625.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	07				[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4.36%	4.07%	2.056.962.400	3.88%	2.800.000.000	3.69%	2.600.000.000	3.69%	7.456.962.400	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	07	1	01		[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	750.000.000	1 lembaga	1.000.000.000	1 lembaga	900.000.000	3 lembaga	2.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
								Daerah Kabupaten/Kota													
		2	08	07	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	1 dokumen	750.000.000	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	900.000.000	3 dokumen	2.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	07	1		02	[KEGIATAN] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	60 layanan	75 layanan	600.000.000	80 layanan	800.000.000	85 layanan	800.000.000	85 layanan	2.200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	07	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	-	30 orang	300.000.000	40 orang	400.000.000	50 orang	400.000.000	120 orang	1.100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	07	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	-	30 orang	300.000.000	50 orang	400.000.000	60 orang	400.000.000	140 orang	1.100.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	08	07	1		02	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan a	1 Dokumen	1 Dokumen	706.962.400	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	900.000.000	3 Dokumen	2.606.962.400	DKP3A	Prov. Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	08	07	1	02	03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	706.962.400	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	900.000.000	3 dokumen	2.606.962.400	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	2	08	05				[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Data Gender dan anak	70%	75%	1.068.365.000	80%	1.050.000.000	85%	1.100.000.000	85%	3.218.365.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	05	1		01	[KEGIATAN] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	20 data	1.068.365.000	20 data	1.050.000.000	20 data	1.100.000.000	20 data	3.218.365.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	05	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 dokumen	2 dokumen	718.365.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	750.000.000	6 dokumen	2.168.365.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	08	05	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	350.000.000	6 dokumen	1.050.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.708.118.000		2.420.000.000		2.495.000.000		6.623.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
Meningkatkan Kuaitas Pelayanan Adminsitiasi Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2	12	02				[PROGRAM] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	69.86%	70%	800.000.000	80%	805.000.000	90%	830.000.000	90%	2.435.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1		02	[KEGIATAN] Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	405.000.000	1 dokumen	430.000.000	3 dokumen	1.235.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	12	02	1	02	01	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	230.000.000	3 lapaoran	635.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 lapaoran	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	03		[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	3 dokumen	1.200.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	02	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03				[PROGRAM] PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	100%	458.118.000	100%	810.000.000	100%	815.000.000	100%	2.083.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	01		[KEGIATAN] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 dokumen	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	405.000.000	2 dokumen	405.000.000	6 dokumen	1.010.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	205.000.000	3 laporan	510.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	01	02	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	500.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	03		[KEGIATAN] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 dokumen	2 dokumen	258.118.000	2 dokumen	405.000.000	2 dokumen	410.000.000	6 dokumen	1.073.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	03	01	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	138.118.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	210.000.000	3 laporan	553.118.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	03	1	03	02	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	1 laporan	120.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	3 laporan	520.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	12	04				[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali	450.000.000	2 kali	805.000.000	2 kali	850.000.000	2 kali	2.105.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		01	[KEGIATAN] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	26%	27%	270.000.000	28%	605.000.000	29%	630.000.000	29%	1.505.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		01	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	505.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		01	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	210.000.000	1 laporan	500.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		01	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	210.000.000	3 dokumen	500.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		03	[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	3 dokumen	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		03	[SUB KEGIATAN] Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	90.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000	3 laporan	300.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	12	04	1		03	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	40 orang	40 orang	90.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	110.000.000	120 orang	300.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
									Pendayagunaan Data Kependudukan												
		2	12	05	1	01		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian profil kependudukan									-			
		2	12	05	1	01		[KEGIATAN] Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									-			
		2	12	05	1	01	01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi yang tersedia												
		2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.006.858.000		2.200.000.000		1.850.000.000		6.056.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2	14	02				[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total	2.18%	2.10%	600.000.000	55%	500.000.000	60%	550.000.000	60%	1.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	14	02	1	01		[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	5 sektor	600.000.000	5 sektor	500.000.000	5 sektor	550.000.000	5 sektor	1.650.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	
		2	14	02	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	3 laporan	825.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	14	02	1	01	08	[SUB KEGIATAN] Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, NonFormal dan Informal pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	3 laporan	825.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03				[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	55.5%	67.98%	500.000.000	68.42%	650.000.000	68.87%	800.000.000	68.87%	1.950.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03	1	01		[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76%	0.76%	500.000.000	0.76%	650.000.000	0.76%	800.000.000	0.76%	1.950.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03	1	01	05	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-	1 daerah	200.000.000	1 daerah	250.000.000	1 daerah	300.000.000	1 daerah	750.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	03	1	01	07	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	-	1 daerah	150.000.000	1 daerah	200.000.000	1 daerah	250.000.000	1 daerah	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	14	03	1	01	08	[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	600.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04				[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56.72 indeks	63.46 indeks	906.858.000	65.54 indeks	1.050.000.000	67.62 indeks	500.000.000	67.62 indeks	2.456.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	01		[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	4 organisasi	700.000.000	4 organisasi	700.000.000	4 organisasi	400.000.000	12 organisasi	1.800.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	01	03	[SUB KEGIATAN] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	900.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	01	08	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	-	1 organisasi	350.000.000	1 organisasi	350.000.000	1 organisasi	200.000.000	3 organisasi	900.000.000	DKP3A	Prov. Kaltim
		2	14	04	1	02		[KEGIATAN] Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahaanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	20%	30%	206.858.000	40%	350.000.000	50%	100.000.000	50%	656.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	14	04	1	02	02	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 laporan	1 laporan	206.858.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	100.000.000	3 laporan	656.858.000	DKP3A	Prov. Kaltim
												42.815.466.000		39.409.255.000		35.685.118.000		117.909.839.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.

Pembangunan 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan.ditujukan untuk mendukung pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan

dan sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96	97	98	99
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	70.46	70.50	71.00	71.50
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	66,89	67,31	67,64	67,98
4	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lembaga PEKKA	0	2	2	2
5	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	0	400	300	300
6	Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.018	0.030	0.025	0.020
7	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	24.96	23.46	23.23	23.11
8	Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	%	65	75	80	85
9	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	65	75	80	80
10	Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	2.18	2.10	2.10	2.10
11	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.33	2.53	2.63	2.73
12	Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.3	99.4	99.5	99.6
13	Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	50	60	70	80
14	Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98	98,5	99	99.5
15	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%	Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga, Akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, Dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga	Administrasi kependudukan Kab/Kota, Direktorat jenderal kependudukan & catatan sipil Kemendagri	Penyajian Data Kependudukan : Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun X 100 2 Kali
						Rasio Kepemilikan E-KTP : Jumlah perekaman E-KTP X 100 Jumlah wajib KTP
						Rasio Kepemilikan KIA : Jumlah anak yang memiliki KIA X 100 Jumlah anak 0-17 tahun
						Rasio Kepemilikan IKD : Jumlah penduduk yang memiliki IKD X 100 Jumlah wajib KTP
2	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan hak anak di Prov. Kaltim	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	%	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Simfoni PPPA	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan : Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan X 100 Jumlah penduduk perempuan
		Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)	%			Rasio Kekerasan Terhadap Anak : Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi Provinsi dan didampingi X 100 Jumlah penduduk anak

3	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada perangkat daerah	%	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender hasil partisipasi, manfaat dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Data gender dalam pembangunan merupakan mandat RPJMN, RPJMD yang dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh perangkat daerah	Simfoni PPPA	Persentase Data Terpilah Gender dan Anak : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memberikan data terpilah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$
4	Meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga (PEKA) yang terstandarisasi	Jumlah lembaga	Melakukan standarisasi terhadap kelompok/perkumpulan masyarakat perempuan kepala rumah tangga agar terstandarisasi sesuai ketentuan penilaian dari Kementerian PPPA	E-Infoduk	Jumlah lembaga PEKA Kabupaten/Kota
		Jumlah PEKA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Orang	Jumlah anggota kelompok/perkumpulan perempuan kepala rumah tangga yang akan dibina dan diarahkan dalam pengembangan usaha dalam memperoleh legalitas berusaha (NIB)	E-Infoduk	Jumlah anggota PEKA yang memiliki NIB
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim	BKKBN	$r = \left\{ \frac{P_t}{P_0} \times \frac{(1)}{t} - 1 \right\} \times 100$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_0)$ $r = \text{laju pertumbuhan penduduk}$ $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun } t$ $P_0 = \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar}$ $t = \text{selisih tahun } P_t \text{ dengan } P_0$ $P_t = \text{Jumlah penduduk pada tahun ke } t$ $P_0 = \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)}$ $B \text{ (birth)} = \text{Jumlah kelahiran selama periode } 0 - t$ $D \text{ (death)} = \text{Jumlah Kematian selama periode } 0 - t$ $M_0 = \text{Jumlah migrasi keluar selama periode } 0 - t$ $M_i = \text{Jumlah migrasi masuk selama periode } 0 - t$

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama tiga tahun yakni Tahun 2024-2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, untuk DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama tiga tahun yakni Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang serta UPTD pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang serta UPTD pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, Juli 2023

Kepala,

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT

Pemina Utama Muda

NIP. 19651215 198601 2 002

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan digabung menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari arah dan kebijakan strategis RPD 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu pada pembangunan nasional bidang pertanian seperti tercantum dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Pertanian (K/L) Tahun 2020 – 2024.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2025 untuk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
2. Sasaran 3 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi
3. Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara (%)

Pembangunan di bidang pangan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Agenda utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta penganekaragaman pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna

menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Rencana Strategis (Renstra) disusun guna menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan menjaga fokus pencapaian sasaran periode 3 (tiga) tahun ke depan serta melakukan review berdasarkan evaluasi setiap tahun, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai acuan kerja penyelenggaraan pembangunan di pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun ke depan dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun.
2. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan periode 2024 – 2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya.
4. Menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program / kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah / lapangan.
5. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sehingga memberikan kontribusi bagi perwujudan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

6. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, berisi gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra K/L dan Renstra; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi Strategi dan Arah Kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

BAB VI. Rencana Program, berisi Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan, berisi Indikator Kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB VIII. Penutup, berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu :

“ Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan “

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

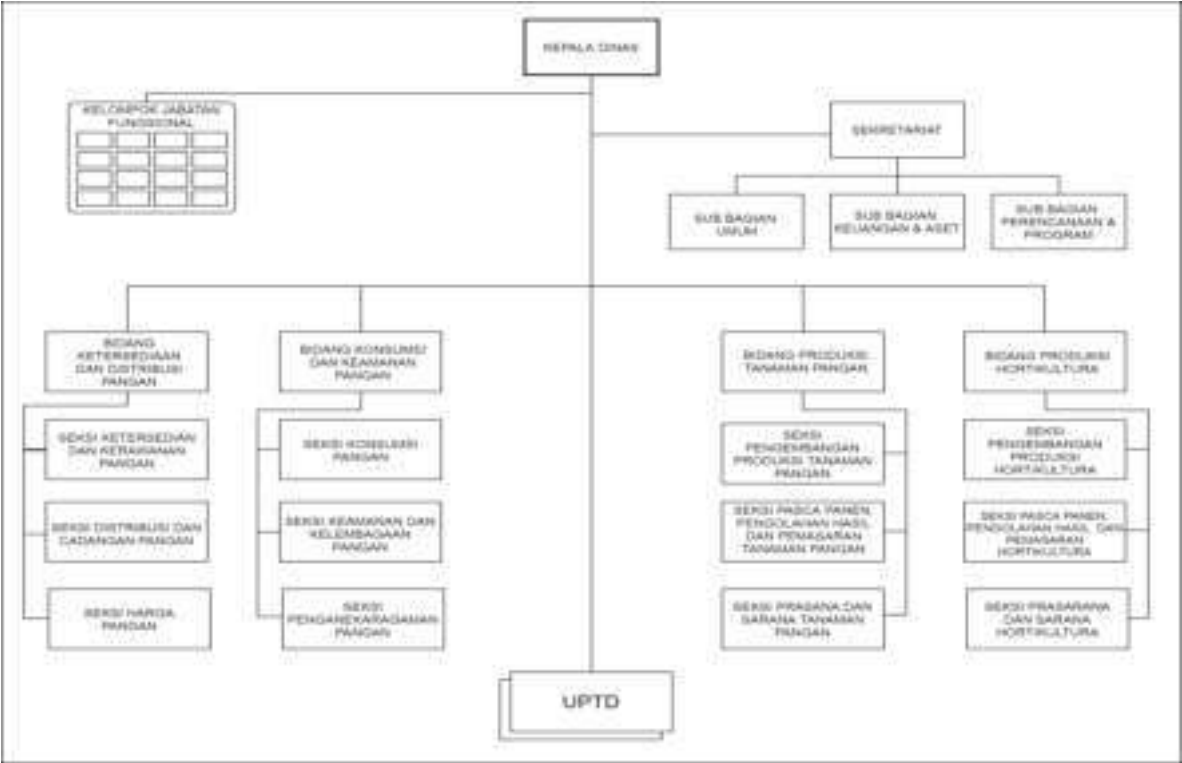
- a. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pengembangan tanaman pangan;
- c. Pengembangan hortikultura;
- d. Penataan prasarana pertanian tanaman pangan;
- e. Penataan prasarana pertanian hortikultura;
- f. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- h. Pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis pertanian;
- i. Pembinaan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- j. Pembinaan distribusi dan cadangan pangan;
- k. Pembinaan harga pangan;
- l. Pembinaan konsumsi pangan;
- m. Pembinaan keamanan dan kelembagaan pangan;
- n. Pembinaan panganekaragaman pangan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- q. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur.

**Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut

Tabel 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c. Seksi Harga Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan

- b. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan
- c. Seksi Penganekaragaman Pangan
- 5. Bidang Produksi Tanaman Pangan :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan
- 6. Bidang Produksi Hortikultura :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura
 - b. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a. UPTD – Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 - b. UPTD – Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura
 - c. UPTD – Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Hortikultura
 - d. UPTD – Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Tenaga Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
 - b. Tenaga Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT)
 - c. Tenaga Fungsional Penyuluh
 - d. Tenaga Fungsional Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

Tabel 2.2

Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Prov. Kaltim

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
Kepala Dinas	a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura; b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura; c. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DinasPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang tanaman pangan dan hortikultura dan kelompok jabatan fungsional serta unit kerja lainnya di lingkungan Dinas; e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan public di Lingkungan Dinas; f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;dan i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sekretaris	a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura, ketersediaan dan konsumsi pangan serta prasarana dan sarana; b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan; d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

	e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganeekaragaman pangan; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganeekaragaman pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganeekaragaman pangan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganeekaragaman pangan; e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan

	serta penganekaragaman pangan; f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, keamanan pangan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan	a. Penyiapan bahan koordinasi, kebijakan dan perumusan perencanaan pengembangan produksi, perbenihan, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan; b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan teknis dan pelaporan statistic tanaman pangan; c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan; d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan tanaman pangan; e. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembiayaan dan investasi dibidang tanaman pangan; f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan prasarana dan sarana tanaman pangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
Kepala Bidang Produksi Hortikultura	a. Penyiapan bahan koordinasi, kebijakan dan perumusan perencanaan pengembangan produksi, perbenihan, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura; b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan teknis dan pelaporan statistik hortikultura; c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura; d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan hortikultura; e. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembiayaan dan investasi dibidang hortikultura;

	f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan prasarana dan sarana hortikultura; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Penyusunan rencana teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional proteksi tanaman pangan dan hortikultura; c. Pelaksanaan pelayanan teknis proteksi tanaman pangan dan hortikultura; d. Pelaksanaan pengujian proteksi tanaman pangan dan hortikultura; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proteksi tanaman pangan dan hortikultura; f. Pengelolaan urusan ketatausahaan; g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Penyusunan rencana teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan; e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	a. Penyusunan rencana teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan dan pengembangan sumber daya

	manusia pertanian; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan; e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Penyusunan rencana teknis operasional balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai benih induk tanaman pangan dan hortikultura; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan; e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak terlepas dari dukungan sumberdata manusia pertanian, sumberdaya alam termasuk air, lahan, komoditas beserta sarana dan prasarana.

Sumberdaya aparatur (petugas) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Adapun jumlah PNS/ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 218 orang yang terdiri dari a) Pejabat Struktural sebanyak 18 orang yang meliputi 1 pejabat eselon II, 5 pejabat eselon III, 11 pejabat eselon IV serta 10 Fungsional yang disetarakan. Komposisi PNS/ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

a. Pejabat Struktural dan Non Struktural :

- i. Esselon II : 1 orang
- ii. Esselon III : 11 orang
- iii. Esselon IV : 12 orang
- iv. Fungsional Yang Disetarakan : 10 orang
- v. Non Struktural : 128 orang

b. Pejabat Fungsional :

- I. Penyuluh Pertanian : 3 orang
- II. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT – PHP) : 39 orang
- III. Pengawas Benih Tanaman : 16 orang
- IV. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) : 4 orang
- V. Statisi Ahli Pertama : 1 orang
- VI. Widyaiswara : 3 orang

Selain tenaga PNS/ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Sumber Daya Manusia Pertanian juga berada di Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

Tabel 2.3
Tenaga Penyuluh di Kabupaten/Kota

NO	INSTANSI	PNS	CPN S	P3 K	THL / APB N	CPN S	APBD/ TK2D/PT T	TOTA L
1	BPTP	11		0	0	0	0	11
2	Paser	60		17	0	0	21	98
3	Kutai Barat	67	3	0	9		87	166
4	Kutai Kartanegara	138		27	0	0	0	165
5	Kutai Timur	131	2	22	5		112	272
6	Berau	33		16	0	0	0	49
7	Penajam Paser Utara	41		11	0	0	13	65
8	Mahakam Hulu	11		0	0		32	43
9	Kota Balikpapan	10		2	1	0	0	13
10	Kota Samarinda	24		5	0	0	0	29
11	Kota Bontang	3		1	0	0	0	4
	JUMLAH	532	5	101	15	0	265	918

Tabel 2.4
Tenaga POPT di Kabupaten/Kota

NO	INSTANSI	THL/ APBN	THL/ APBD	TOTAL
1	Paser	4	1	5
2	Kutai Barat	4	0	4
3	Kutai Kartanegara	11	2	13
4	Kutai Timur	1	0	1
5	Berau	3	0	3
6	Penajam Paser Utara	5	0	5
7	Mahakam Hulu	0	0	0
8	Kota Balikpapan	1	0	1
9	Kota Samarinda	3	0	3
10	Kota Bontang	0	0	0
	JUMLAH	32	3	35

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan. Ke depan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur akan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi PNS/ASN melalui pendidikan dan pelatihan baik kerjasama dengan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah maupun instansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana / Aset

Ketersediaan sarana dan prasarana adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Tanah	2.303	M2
	2 Gedung	2.917	M2 (1 gedung dengan 2 lantai)
	3 Listrik	1	Jaringan
	4 Air	1	Jaringan
	5 Telepon	1	Jaringan
	6 Area Parkir	2	Area
	7 Ruang Rapat	2	Ruang
	8 Ruang Arsip	2	Ruang
	9 Perpustakaan	1	Ruang
	10 Ruang CS	1	Ruang
	11 Komputer	49	Unit
	12 Laptop	44	Unit
	13 Printer	78	Unit
	14 Scanner	7	Unit
	15 Note Book	65	Unit
	16 Tablet PC	10	Unit
	17 Mobil Dinas	2	Unit
	18 Mobil Operasional	7	Unit
	19 Motor Dinas	92	Unit
	20 Kantin	1	Ruang
	21 Website	1	Buah
	22 Papan Pengumuman	1	Buah
	23 Mushola	1	Unit
	24 Alat Kantor dan rumah Tangga	714	Unit
	25 Peralatan olahraga	2	Unit
	26 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	49	Unit
	27 Alat Kedokteran dan Kesehatan	11	Unit
	28 Alat Laboratorium	20	Unit
2)	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Tanah		
	2 Gedung	1	Area
	3 Taman	1	Area
	4 Listrik	1	Jaringan
	5 Air	1	Jaringan
	6 Telepon	1	Jaringan
	7 Area Parkir	2	Area

	8 Ruang Rapat	1	Ruang
	9 Ruang Arsip	1	Ruang
	10 Komputer	4	Unit
	11 Laptop	10	Unit
	12 Printer	12	Unit
	13 Scanner	1	Unit
	14 Mobil Dinas	1	Unit
	15 Mobil Operasional	2	Unit
	16 Motor Dinas	25	Unit
	17 Kantin	1	Area
	18 LED Display	3	Unit
	19 Mushola	1	Area
	Alat Laboratorium		
	20 Mini Soil Devider	1	Unit
	21 Vacuum Sealer	1	Unit
	22 Desikator Besar	1	Unit
	23 Analitical Balance	1	Unit
	24 Seed Devider	1	Unit
	25 Seedtrier	3	Unit
	26 Waterbath	1	Unit
	27 Laminar Flow	1	Unit
	28 PH Meter	1	Unit
	29 Micropipete Adjustable 100-1000 μ l	1	Unit
	30 Micropipete Fixed 5000 μ l	1	Unit
	31 Thermometer Digital	1	Unit
	32 Oven	1	Unit
	33 Cinometer	1	Unit
	34 Germinator Elektrik	1	Unit
3)	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Gedung	1	Unit
	2 Laboratorium	1	Unit
	3 Pos Jaga	2	Unit
	4 Tempat Parkir	1	Area
	5 PC	31	Unit
	6 Laptop	19	Unit
	7 Note Book	9	Unit
	8 Printer	39	Unit
	9 Genset	2	Unit
	10 Sepeda Motor	12	Unit
	11 Alat Bengkel dan Alat Ukur	10	Unit
	12 Alat Kantor dan rumah Tangga	287	Unit
	13 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21	Unit
	14 Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	Unit
	15 Alat Laboratorium	14	Unit
	16 Drone	1	Unit
	17 Cover Survensace CCTV System	1	Unit
	18 Jalan dan jembatan	1	Unit
4)	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1 Tanah	40,25	Ha
	2 Gedung	24	Unit
	3 Lantai Jemur	6	Unit
	4 Mess	2	Unit

	5	Sumur Bor	3	Unit
	6	Saluran irigasi (Sprinkle)	3	Blok
	7	Saluran Irigasi (Sawah)	4	Blok
	8	Los Bayangan	2	Unit
	9	Screen House	8	Unit
	10	Taman	2	Buah
	11	Listrik	2	Jaringan
	12	Air	1	Jaringan
	13	Telepon	2	Jaringan
	14	Area Parkir	2	Area
	15	Ruang Rapat	2	Ruang
	16	Ruang CS	1	Ruang
	17	Komputer	6	Unit
	18	Laptop	12	Unit
	19	Printer	7	Unit
	20	Scanner	1	Unit
	21	Mobil Dinas	1	Unit
	22	Mobil Operasional	5	Unit
	23	Motor Dinas	18	Unit
	24	Website	1	Buah
	25	Papan Pengumuman	2	Unit
	26	Mushola	2	Unit
	27	Laboratorium	2	Unit
5)	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian			
	1	Tanah	12,5	Ha
	2	Gedung	1	Unit
	3	Ruang Kerja Widyaiswara dan Penyuluh	1	Unit
	4	Gedung Aula/Ruang Pertemuan	1	Unit
	5	Ruang Kelas	4	Unit
	6	Ruang Kelas IT	1	Unit
	7	Ruang Perpustakaan	1	Unit
	8	Gedung Arsip	1	Unit
	9	Gedung Penyimpanan	1	Unit
	10	Gedung Pengolahan Hasil Pertanian	1	Unit
	11	Ruang Asrama (6 Kamar)	7	Unit
	12	Gedung Guest House (4 Kamar)	1	Unit
	13	Ruang Makan (Kapasitas 100 orang)	1	Unit
	14	Ruang Poli Klinik Kesehatan	1	Unit
	15	Mushola	1	Unit
	16	Rumah Dinas Kepala UPTD	2	Unit
	17	Rumah Dinas	10	Unit
	18	Rumah Penjaga Kebun	3	Unit
	19	Green House	2	Unit
	20	Kandang Ternak Sapi	1	Unit
	21	Kolam Ikan	4	Kolam
	22	Gazebo	4	Unit
	23	Lahan Praktek	5	Ha
	24	Traktor Roda 4	1	Unit
	25	Hand traktor/traktor roda 2	2	Unit
	26	Cultivator	1	Unit
	27	Mobil Dinas/Operasional	7	Unit

28	Motor Dinas	30	Unit
----	-------------	----	------

Sumber : Data Inventarisasi Simda (2023)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kinerja pelayanan Perangkat Dinas (PD) dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan PD sebagai penjabaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dinas Pertanian bisa di ukur indikator kinerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6

Evaluasi Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)			0,52	0,53	0,63	0,64	0,65	0,56	0,63	0,54	0,43	-	107,69	118,87	85,71	67,19	
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) - (%)			80	85				80	85				100,00	100,00			
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)			12	12				12	12				100,00	100,00			
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)			8	8				8	8				100,00	100,00			
Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia (Unit)			21	20				21	20				100,00	100,00			
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)			12	12				12	12				100,00	100,00			
Persentase ASN yang memiliki standar			80	85				80	85				100,00	100,00			
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)			5	5				5	5				100,00	100,00			
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)			28	30				28	30				100,00	100,00			
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (%)			80	80				80	80				100,00	100,00			
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)			10	10				10	10				100,00	100,00			
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)			4	4				4	4				100,00	100,00			
Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani (Desa)			418	416				418	416				100,00	100,00			
Data ketersediaan dan kerawanan pangan (Laporan)			4	4				4	4				100,00	100,00			
Jumlah cadangan beras provinsi (Ton)			285	325				373,6	195,42				131,09	60,13			
Informasi harga pangan yang tersedia (Laporan)			3	3				3	3				100,00	100,00			
Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan yang dibina (Kelompok)			74	79				74	79				100,00	100,00			
Jumlah laporan PPH konsumsi pangan (Laporan)			1	1				1	1				100,00	100,00			
Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan (Jenis)			7	9				7	9				100,00	100,00			
Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)			5	7				5	7				100,00	100,00			
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)			233.020	240.245				346,78	339				0,15	0,14			
Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)			2,16	2,16									0,00	0,00			
Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi (Unit)			10	15				10	15				100,00	100,00			
Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (Kelompok Tani)			135	135				135	135				100,00	100,00			
Jumlah Produksi Padi (Ton)			422.354	464.589				253.813,37	262,43				60,09	0,06			
Luas tanam padi (Ha)			23.000	24.000				23.000	24.000				100,00	100,00			
Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi (Hari/Ha)			10	9				10	9				100,00	100,00			
Peningkatan indeks pertanaman (IP)			1,2	1,4				1,2	1,4				100,00	100,00			
Jumlah Desa yang dibina (Desa)			696	711				696	711				100,00	100,00			
Jumlah penyuluh yang dibina (Orang)			693	703				693	703				100,00	100,00			
Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih (Orang)			150	150				150	150				100,00	100,00			

Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat (%)			80	81			80	81				100,00	100,00			
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat (Ton)			24	30			24	30				100,00	100,00			
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat (Batang)			5.000	5.500			5.000	5.500				100,00	100,00			
Luas Lahan yang dilayani Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)			150	165			150	165				100,00	100,00			
Jumlah sertifikatLabel benih unggul (Label)			5.000	5.000			5.000	5.000				100,00	100,00			
Jumlah rekomendasi produsen benih yang dikeluarkan (Rekomendasi)			20	25			20	25				100,00	100,00			
Luas Serangan OPT (Ha)			6.165	6.139			6.165	6.139				100,00	100,00			
Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT (Ha)			23.000	24.000			23.000	24.000				100,00	100,00			
Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani (Unit)			71	72			71	71				100,00	98,61			
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian				80	81	82		80	85,56				100,00	105,63		
Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24	24	24		24	24				100,00	100,00		
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5	5	5		5	5				100,00	100,00		
Jumlah dokumen RKA-SKPD				1	1			5	1				500,00	100,00		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1		-								
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1		-	-							
Jumlah dokumen DPA-SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1		-	-							
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1		-	-							
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD						1		-	-							
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				3	3			3	3				100,00	100,00		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3		-	-							
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12	12	12		12	12				100,00	100,00		
Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12	12	12		12	12				100,00	100,00		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12	12	231/12		12	12				100,00	100,00		
Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12	12	12		12	12				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1		-	-							
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1		-	-							
Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan				3	3			3	3				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						3		-	-							
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				18	18			18	18				100,00	100,00		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						18		-	-							
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1	1	1		1	1				100,00	100,00		
Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik						1		-	-							
Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1		-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai				181	181	181		181	181				100,00	100,00		
Jumlah pakaian dinas yang tersedia				362	362			362	362				100,00	100,00		
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya						1		-	-							
Jumlah orang yang mengikuti bimtek				15	15			10	13				66,67	86,67		
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						15		-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12	12	12		12	12				100,00	100,00		
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				150	150			150	246				100,00	164,00		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						1		-	-							
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12	12			12	12				100,00	100,00		
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan						4		-	-							
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12	12			12	12				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12		-	-							
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				5	5			5	5				100,00	100,00		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5		-	-							
Jumlah aplikasi yang dikelola				2	2			2	2				100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1		-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah				1	1	1		1	1				100,00	100,00		
Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun				1	1			1	1				100,00	100,00		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1		-	-							
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				20	20			20	20				100,00	100,00		
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						20		-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah				12	12	12		12	12				100,00	100,00		
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan				3.500	3.500			3.715	3.626				106,14	103,60		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1		-	-							

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12	12				12	12				100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan							1			-	-						
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran					12	12				12	12				100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1			-	-						
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	12	12			12	12				100,00	100,00	
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara					2	2				2	2				100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							2			-	-						
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					28	28				28	28				100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya							28			-	-						
Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana					12	12				12	12				100,00	100,00	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							3			-	-						
Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1	1				1	1				100,00	100,00	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1			-	-						
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana					12	12				12	12				100,00	100,00	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							4			-	-						
Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi					89	90	91			82,6	85,9				92,81	95,44	
Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan					94	96,2	97,5			98,41	98,11				104,69	101,99	
Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan					8	12	12			8	12				100,00	100,00	
Informasi harga pangan yang tersedia					3	3				3	3				100,00	100,00	
Jumlah laporan neraca bahan makanan					1	1				1	1				100,00	100,00	
Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan							2			-	-						
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan					3	3				3	3				100,00	100,00	
Pemantapan Stok, Pasokan Pangan dan Harga Pangan							1			-	-						
Jumlah pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan					1	3				1	3				100,00	100,00	
Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan							1			-	-						
Cadangan Pangan yang tersedia					175	210	210			195,42	222,42				111,67	105,91	
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi					1	14				1	14				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi							14			-	-						
Jumlah beras untuk cadangan pangan provinsi yang diadakan					175	210				0	222,42				0,00	105,91	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi							2			-	-						
Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dipelihara					175	210				195,42	172,42				111,67	82,10	
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara							210			-	-						
Jumlah Media Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1	1	1			1	1				100,00	100,00	
Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan					1	12	13			1	12				100,00	100,00	
Jumlah promosi pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal					1	1				1	1				100,00	100,00	
Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal							1			-	-						
Jumlah pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman					1	1				1	1				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)							1			-	-						
Jumlah laporan analisis PPH konsumsi					1	1				1	1				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Per Kapita Per Tahun							1			-	-						
Jumlah Desa Rawan Pangan					39	45	50			39	45				100,00	100,00	
Laporan FSVa dan SKPG					1	3	3			1	3				100,00	100,00	
Jumlah rapar koordinasi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan					4	3				4	3				100,00	100,00	
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan							1			-	-						
Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani					15	10	10				8				0,00	80,00	
Jumlah rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan					3	3				3	3				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi							1			-	-						
Jumlah CFP yang disalurkan ke kabupaten/kota					20	100				20	100				100,00	100,00	
Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1			-	-						
Persentase pangan aman di kalimantan timur					90	91	92			90	91				100,00	100,00	
Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar					15	16	17			15	16				100,00	100,00	
Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan/bimtek dan sertifikasi profesi					3	4	5			3	4				100,00	100,00	
Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina							1			-	-						
Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan					9	11				9	11				100,00	100,00	
Jumlah Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							11			-	-						
Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan					5	6					3				0,00	50,00	
Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							1			-	-						
Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota					6	1				6	1				100,00	100,00	
Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							1			-	-						
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan					1	1	1			1	1				100,00	100,00	
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian					80	81	82			81	82				101,25	101,23	
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	12	12			12	12				100,00	100,00	
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					12	12	12			12	12				100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							4			-	-						
Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai					-	136	136			-	132				0,00	97,06	
Jumlah pakaian dinas yang tersedia						132				-	132				0,00	100,00	
Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut dan Kelengkapannya						-	1			-	-						
Jumlah orang yang mengikuti Bimtek						6				-	6				0,00	100,00	
Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							6			-	-						
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	12	12			12	12				100,00	100,00	
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia					50	40	-			50	40				100,00	100,00	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							1			-	-						
Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	12	-			12	12				100,00	100,00	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1			-	-						
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12	12	-			12	12				100,00	100,00	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							2			-	-						
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah					12	12	-			12	12				100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12			-	-						
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah					5	5	5			5	5				100,00	100,00	
Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia					5	5	-			5	5				100,00	100,00	

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia						5				-	-							
Jumlah Bangunan yang tersedia					-	5	-			-	5					0,00	100,00	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					-	-	5			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan					50	50	-			50	50					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1			-	-							
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan							1			-	-							
Jumlah bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia					-	12	-			-	12					0,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1			-	0							
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1			-	-							
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					6	6	-			6	6					100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							6			-	-							
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							3			-	-							
Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1	1	-			1	1					100,00	100,00	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1			-	-							
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana					12	-	-			12	-					100,00	0,00	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							-				-							
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian					80	81	82			80	81					100,00	100,00	
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia					25	28	-			25	28					100,00	100,00	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							1			-	-							
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah					5	5	-			5	5					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							5			-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah					5	5	5			5	5					100,00	100,00	
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana					5	5	-			5	5					100,00	100,00	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							5			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Surat masuk dan Keluar yang di kendalikan					50	50	-			50	50					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1			-	-							
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan							1			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1			-	-							
Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1			-	-							
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara					7	7	-			7	7					100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							7			-	-							
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian					80	81	82			80	81					100,00	100,00	
Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1			-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai					24	24	24			24	24					100,00	100,00	
Jumlah Pegawai yang di Evaluasi dan dilakukan Penilaian Kinerja					17	17	-			17	17					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai							1			-	-							
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek					7	7	-			7	7					100,00	100,00	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							7			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia					60	60	-			60	60					100,00	100,00	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							1			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1			-	-							
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							3			-	-							
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							3			-	-							
Jumlah makan / minum tamu					240	320	-			240	320					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							4			-	-							
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah					12	6	-			12	6					100,00	100,00	

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6			-	-							
Jumlah aplikasi yang dikelola				2	2	-			2	2					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1			-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah				31	31	31			31	30					100,00	96,77	
Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia				31	31	-			31	30					100,00	96,77	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia						31			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikendalikan				100	100	-			100	100					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan						1			-	-							
Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1			-	-							
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				38	38	-			38	38					100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya						38			-	-							
Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5			-	5							
Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1			-	-							
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian				80	81	82			80	81					100,00	100,00	
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1			-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai				85	85	85			85	85					100,00	100,00	
Jumlah pakaian dan atribut karyawan UPTD PTPH				85	85	-			85	85					100,00	100,00	
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						1			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1			-	-							
Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1			-	-							
Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan kantor				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						4			-	-							
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						5			-	-							
Jumlah makan / minum tamu					250	-				250					0,00	100,00	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						4			-	-							
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3			-	-							
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah				3	4	2			3	4					100,00	100,00	
Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia				3	4	-			3	4					100,00	100,00	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2			-	-							
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikendalikan				50	50	-			50	50					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1			-	-							
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan						1			-	-							
Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				12	12	-			12	12					100,00	100,00	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1			-	-							
Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12	12	12			12	12					100,00	100,00	
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1	1	-			1	1					100,00	100,00	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1			-	-							
Jumlah bangunan yang direhab dan pemeliharaan rutin bangunan kantor				1	1	-			1	1					100,00	100,00	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1			-	-							
1. Jumlah produksi padi				271.356	279.681	289.846			244.425,39	239.425,39					90,08	85,61	
2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura				273.070	283.592	292.383			428,39	316,98					0,16	0,11	
1. Peningkatan produktivitas padi				3,7	3,7	3,7			3,6	3,62					0,01	0,01	
1. Produktivitas Tanaman Hortikultura				22	22,19	22,37			22,34	23,77					101,55	107,12	
Jumlah benih hortikultura yang diadakan				50.000	40.000	45.000			50.000	40.000					100,00	100,00	
Jumlah benih padi yang disediakan				175.000	200.000	212.500			175.000	200.000					100,00	100,00	
Jumlah herbisida hortikultura yang diadakan				400	750	1.000			400	750					100,00	100,00	
Jumlah hormon hortikultura yang diadakan				500	1.000	2.000			500	1000					100,00	100,00	
Jumlah pupuk tanaman pangan yang diadakan				350.000	400.000	425.000			350.000	1.113.980					100,00	278,50	
Jumlah alsintan hortikultura yang diadakan				18	10	10			18	10					100,00	100,00	
Jumlah alsintan tanaman pangan yang diadakan				10	15	17			10	15					100,00	100,00	
Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian						2			-	-							
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian hortikultura				10	10	10			10	10					100,00	100,00	
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan				10	9	9			10	9					100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Paredaran Sarana Petanian						2			-	-							
1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan				7.100	8.000	8.500			7.000	8.000					98,59	100,00	

2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura					6	7	7				6	7				100,00	100,00	
1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan					226	226	228				226	464				100,00	205,31	
2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitas hortikultura					6	7	7				6	7				100,00	100,00	
Luas pengembangan kawasan hortikultura					220	110	120				220	110				100,00	100,00	
Luas tanam padi					7.100	8.000	8.500				7.000	8.000				98,59	100,00	
Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian							2				-	-						
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura					80	120	160				80	120				100,00	100,00	
Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan					80	60	60				80	60				100,00	100,00	
Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura					3	3	3				3	3				100,00	100,00	
Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan					4	4	4				4	4				100,00	100,00	
Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian							2				-	-						
Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura					1	1	-				1	2				100,00	200,00	
Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan					3	3	-				3	3				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani							2				-	-						
Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura					1	1	-				1	1				100,00	100,00	
Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan					3	3	-				3	3				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani							2				-	-						
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura					1	1	-				1	1				100,00	100,00	
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan					3	3	-				3	3				100,00	100,00	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							2				-	-						
Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat					82	82	82				82	82				100,00	100,00	
Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat					900	920	940				900	920				100,00	100,00	
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman Hortikultura yang bersertifikat					18.000	20.000	-				18.000	20.000				100,00	100,00	
Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura							1				-	-						
Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat					18	18	-				18	18				100,00	100,00	
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran							1				-	-						
Jumlah yang dilakukan Renovasi					1	-	-				1					100,00	0,00	
Jumlah prasarana yang di renovasi					1	-	-				1					100,00	0,00	
Jumlah UPTD yang dilakukan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan T anaman Pangan dan Sarana Pendukungnya					1	-	-				1					100,00		
Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi							-											
1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina					85	330	441				85	333				100,00	100,91	
2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina					4	4	4				4	4				100,00	100,00	
Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat					520	486	456				520	801				100,00	164,81	
Jumlah penyuluh yang di bina					435	366	-				436	366				100,23	100,00	
Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat					85	120	-				85	120				100,00	100,00	
Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan							150				-	-						
Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian					97	210	291				97	210				100,00	100,00	
Jumlah informasi pertanian tersampaikan					1	4	-				1	4				100,00	100,00	
Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian							1				-	-						
Jumlah petani yang mengikuti bimtek					97	210	-				97	210				100,00	100,00	
Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan							7				-	-						
Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaks anakan					7	6	6				7	6				100,00	100,00	
Jumlah kelembagaan korporasi yang terbentuk					1	1	-				1	1				100,00	100,00	
Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi							1				-	-						
Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan					120	100	-				100	100				83,33	100,00	
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi							3				-	-						
Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi					193	219	249				193	219				100,00	100,00	
Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi					70	77	78				70	110				100,00	142,86	
Jumlah sertifikat/label benih unggul					75	80	-				75	80				100,00	100,00	
Jumlah Sertifikat Benih							85				-	-						
Jumlah produsen benih hortikultura yang terawasi					25	30	-				25	30				100,00	100,00	
Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura							1				-	-						
Jumlah produsen benih tanaman pangan yang terawasi					55	60	-				55	60				100,00	100,00	
Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran							1					-						
Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi					3	3	3				3	3				100,00	100,00	
Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan					3	3	-				3	3				100,00	100,00	
Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai							1				-	-						
Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk					30	40	50				30	40				100,00	100,00	
Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi					20	20	20				20	20				100,00	100,00	
Jumlah kios pertanian yang diawasi					20	30	-				20	30				100,00	100,00	
Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian							1				1	1						
Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan					35	37	40				35	37				100,00	100,00	
Jumlah Pos Agens Hayati yang dikembangkan di PPAH					3	4	-				3	4				100,00	100,00	
Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme							1				-	-						
Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara					1	1	1				1	1				100,00	100,00	
Jumlah luasan bangunan LPHP yangelihara					10.000	10.000	10.000				10.000	10.000				100,00	100,00	
Jumlah sarana dan prasarana LPHP yang diadakan					1	2	-				1	2				100,00	100,00	
Jumlah Laboratorium yang Dibangun dan Dipelihara							2				-	-						
Luas penanganan OPT DPI					15.000	20.000	30.000				14.879	20.000				99,19	100,00	
Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI					1.000	1.200	1.500				1.000	1.200				0,10	0,10	
Gerakan Pengendalian OPT yang dilakukan					12	15	-				12	15				100,00	100,00	
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan							6.150				-	-						
Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim					2	5	-				2	5				100,00	100,00	
Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani							1.000				-	-						

Tabel 2.7
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2019 – 2022

Provinsi.	Tahun	Tanaman Pangan (%)	Hortikultura (%)
Kalimantan Timur	2019	-1,52	3,91
	2020	4,64	0,44
	2021	-4,72	0,76
	2022	-14,80	-6,33



Tabel 2.8
Data Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2019 – 2022

Provinsi.	Tahun	Tanaman Pangan (Indeks)	Hortikultura (Indeks)
Kalimantan Timur	2019	102,16	104,59
	2020	101,18	105,29
	2021	95,28	106,07
	2022	92,90	112,35

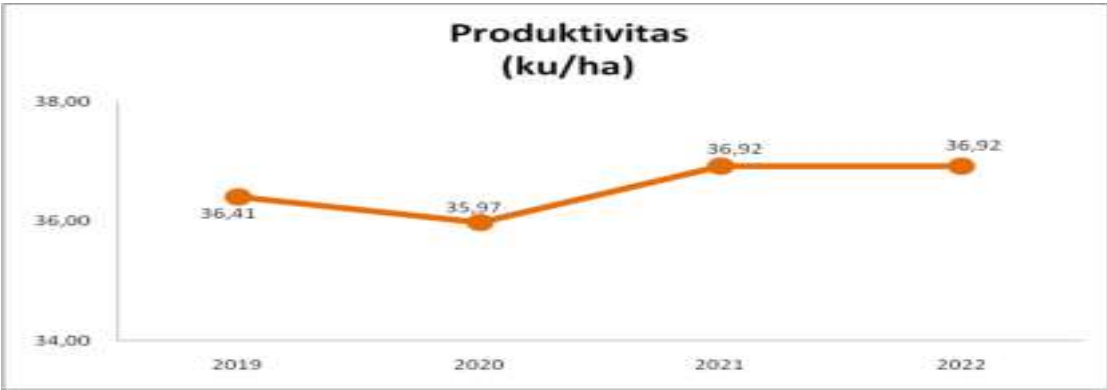
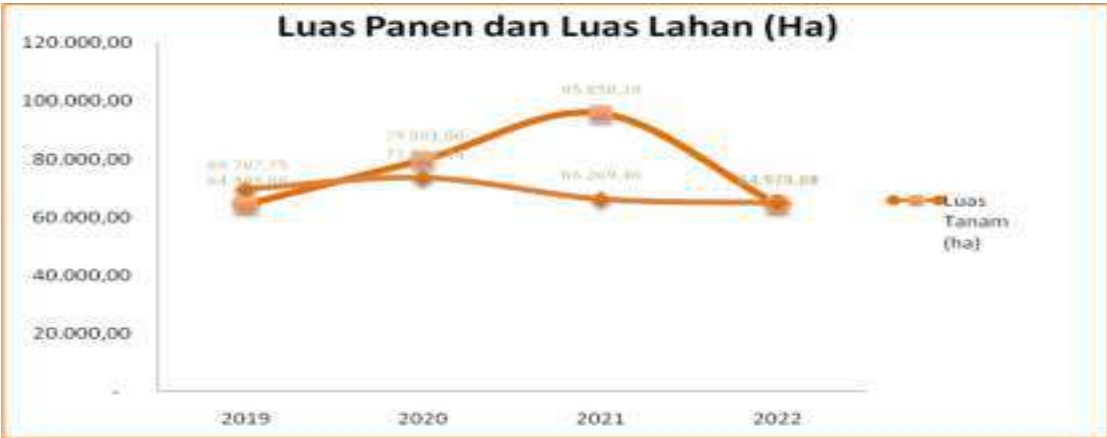


Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 – 2022 (Tabel 2.7) dimana setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan yang cenderung pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada bidang tanaman pangan maupun hortikultura. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan hingga 4,64% pada tanaman pangan namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan kembali. Pada Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019 – 2022 (Tabel 2.8) data tanaman pangan dari tahun ke tahun menurun hingga 10% yang pada tahun 2019 pada indeks 102,16 menjadi 92,90 pada tahun 2022 hal ini terjadi pada bidang tanaman pangan dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya wabah pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh besar dalam masyarakat. Berbanding terbalik dengan hortikultura, data nilai tukar petani pada tahun 2019 – 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana di tahun 2019 pada indeks 104,59 menjadi 112,35 pada tahun 2022.

Tabel 2.9

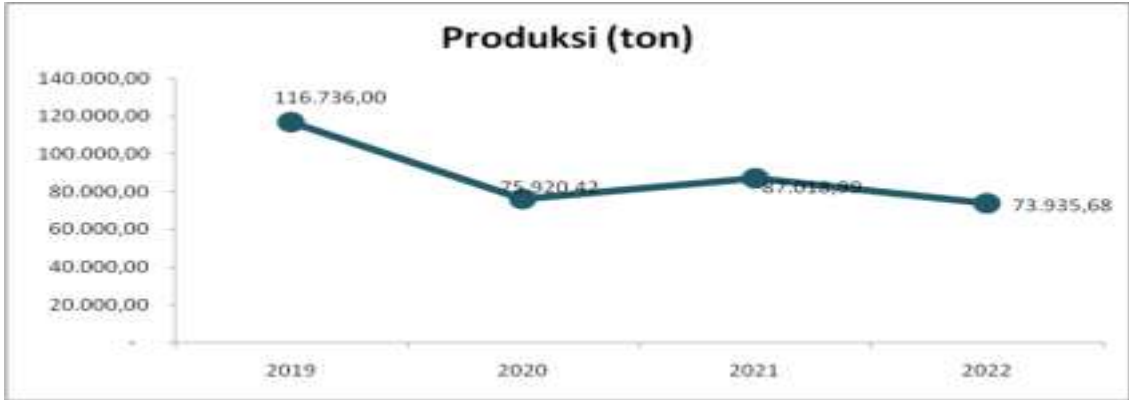
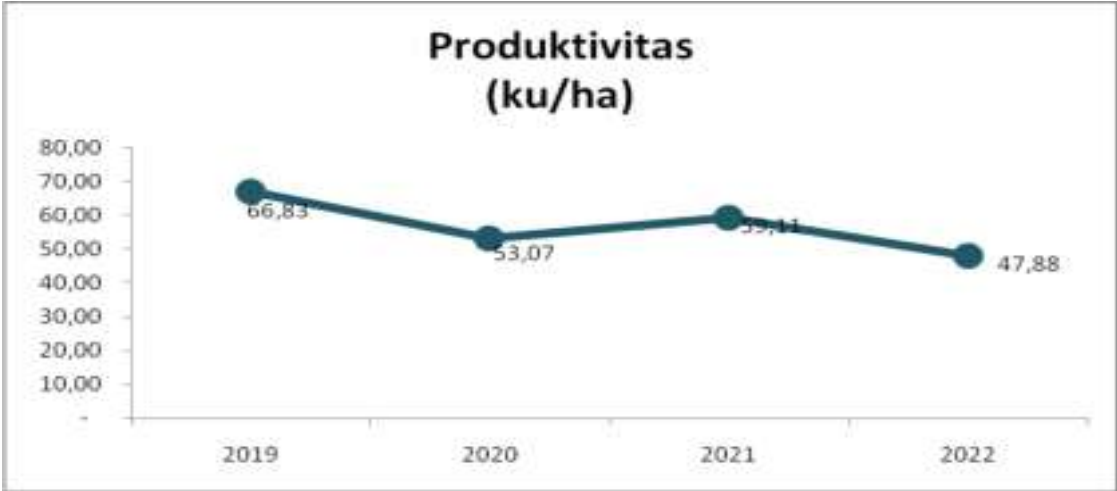
Produksi Tanaman Pangan (Padi) dan HortikulturaTahun 2019 – 2022

Provinsi	Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)	Produksi Beras (ton)
Kalimantan Timur	2019	64.499,00	69.707,75	36,41	253.818,37	146.877,61
	2020	79.801,00	73.568,44	35,97	262.434,52	151.863,46
	2021	95.858,20	66.269,46	36,92	244.677,96	142.321,38
	2022	64.533,61	64.970,00	36,92	239.425,34	139.266,10



Tabel 2.10
Data Produksi dan Produktivitas Jagung
Tahun 2019 - 2022

Provinsi	Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
Kalimantan Timur	2019	17.466,40	66,83	116.736,00
	2020	14.304,70	53,07	75.920,42
	2021	14.721,10	59,11	87.018,99
	2022	15.442,20	47,88	73.935,68



Tabel 2.11
Data Produksi dan Produktivitas Hortikultura
Tahun 2019 - 2022

Provinsi.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Kalimantan Timur	2019	23.791,47	346.776,74
	2020	23.157,45	339.372,22
	2021	30.568,76	428.390,38
	2022	13.333,43	351.782



Tabel 2.12
Data Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi
Tahun 2019 - 2022

Provinsi.	Tahun	PPH Ketersediaan	PPH Konsumsi
Kalimantan Timur	2019	98,50	85
	2020	98,30	85,9
	2021	98,42	82,6
	2022	98,11	85,9



2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, pada masing-masing program dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019 - 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada					Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.942.441.600	7.877.566.878				5.620.256.824	7.380.854.311				0,95	0,94	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.028.907.250	3.057.020.440				4.840.787.594	2.831.486.693				0,96	0,93	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.528.550.000	1.617.002.500				2.372.369.639	1.557.935.632				0,94	0,96	-	-	-	-	-
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1.194.282.344	950.975.000				1.097.605.226	919.033.050				0,92	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4.157.491.656	1.608.875.000				4.077.204.701	1.562.534.007				0,98	-	-	-	-	-	-
Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	1.250.000.000	1.268.375.000				1.247.431.612	1.198.710.127				1,00	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	3.020.600.000	2.104.738.680				3.018.999.250	2.103.265.300				1,00	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	11.721.580.000	11.244.512.500				10.744.508.230	9.320.835.041				0,92	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	655.550.000	458.034.350				613.326.511	376.316.830				0,94	-	-	-	-	-	-

Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.907.112.500	555.975.000				2.789.351.098	517.647.180				0,96	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	4.897.210.900	1.554.920.000				4.551.792.010	1.485.274.000				0,93	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	4.985.800.000	5.043.587.800				4.055.158.999	4.843.213.800				0,81	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			59.412.392.959	62.848.976.212				53.848.112.792	57.448.742.068		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			3.664.254.906	3.202.024.900				2.899.200.637	3.016.621.714		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penanganan Kerawanan Pangan			1.389.094.624	1.477.899.800				890.611.559	1.350.343.515		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Pengawasan Keamanan Pangan			823.486.365	1.194.487.600				703.122.338	1.162.055.327		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			27.761.787.000	46.197.098.000				21.528.500.019	41.341.760.168		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			10.369.960.500	3.742.256.987				8.029.355.967	3.531.727.349		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Penyuluhan Pertanian			6.149.929.725	3.616.662.000				4.787.423.236	3.522.700.804		#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			848.540.921	594.518.000				784.544.750	562.898.950		-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan	37.415.724.094	36.384.821.000				32.122.420.864	30.268.603.562				-	0,83	-	-	-	-	-
Total	85.705.250.344	73.726.404.148	110.419.447.000	122.873.923.499		77.151.212.558	64.365.709.533	93.470.871.298	111.936.849.895		0,90	0,87	0,85	0,91			

Pada tabel 2.13 diatas dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur untuk rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2019, hampir semua program realisasinya baik, dimana realisasinya berkisar antara 80% – 90%.

Untuk tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 rasio antara realisasi dan anggaran dari seluruh program yang dilaksanakan telah mencapai angka 80% keatas dari target anggaran yang sudah ditentukan. Faktor pendorong yang mendukung tercapainya realisasi yaitu perencanaan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan, tersedianya SDM yang terampil dan kompeten serta adanya sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Dari sisi produksi dan produktivitas komoditas prioritas tanaman pangan dan hortikultura memiliki tantangan dan peluang masing-masing. Sampai dengan tahun 2023 rata-rata capaian kinerja untuk mencapai ketersediaan beras (periode Renstra 2024 - 2026) baru mencapai 49,06 %, hal ini menyebabkan tingkat produksi belum memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kaltim, dari 10 Kabupaten/Kota yang ada, hal ini disebabkan antara lain peningkatan produksi padi/beras lebih kecil dibanding jumlah penduduk Kalimantan Timur, sehingga untuk mencukupinya Provinsi Kalimantan Timur masih mendatangkan beras dari luar Provinsi.

Terkait dengan Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 ada 9 (sembilan) sasaran startegis yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Bahwa dari sembilan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini menjadi faktor pendorong jajaran Dinas dan Perangkat Daerah terkait untuk bekerjasama, sinergis mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI.

Terkait dengan Renstra Kabupaten/Kota bahwa dari 10 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang menjadi Sentra Pengembangan Kawasan Padi yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser, Berau, dan Kota Samarinda. Sentra Pengembangan Jagung di Kab. Berau, Kukar, Kutim. Sentra Pengembangan Kawasan Hortikultura ada 8 (delapan) yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser, Berau, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRW) Tahun 2016-2036 bahwa luas kawasan tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.096 Ha. Data LBS 2019 Kalimantan Timur seluas 40.405,70 Ha, mengalami koreksi pada tahun 2020 menjadi 39.513,96 Ha (4,57 %).

Menteri Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Permentan Nomor : 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dan Kepmentan Nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan Penyusunan Master Plan Kawasan Pertanian Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis Korporasi Petani. Kedepan Master Plan ini harus ditindaklanjuti dengan Penyusunan Action Plan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang fokus pengembangannya pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. keberadaan Master Plan dan Action Plan ini kelak akan menjadi faktor penentu dalam pendanaan kegiatan dan alokasi program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 2.14

Luas Baku Sawah Nasional Kaltim Per-Kecamatan Tahun 2019 – 2020

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Ha	
			2019	2020
1	Balikpapan		135,6	34,71
		Kec. Balikpapan Timur	135,6	34,71
2	Berau		1919,0	1860,39
		Kec. Biatan	102,7	149,08
		Kec. Gunung Tabur	583,6	511,07
		Kec. Sambaliung	616,7	444,33
		Kec. Tabalar	290,6	359,30
		Kec. Talisayan	60,9	42,97
		Kec. Tanjung Redeb	4,0	
		Kec. Teluk Bayur	260,5	249,46
		Segah		104,18
3	Bontang		65,2	12,18
		Kec. Bontang Selatan	62,4	12,18
		Kec. Bontang Utara	2,8	
4	Kutai Barat		171,9	2206,70
		Kec. Barong Tongkok	44,0	57,44
		Kec. Bongan	103,6	87,52
		Kec. Long Iram	16,9	219
		Kec. Muara Pahu	2,9	231,96
		Kec. Nyuatan	4,6	
		Mook Mnor Bulatn		259,15
		Penyinggahan		168,35
		Siluq Ngurai		2,88
		Tering		1180,40
5	Kutai Kartanegara		18757,4	15305,15
		Kec. Anggana	725,5	744,37
		Kec. Kembang Janggut	38,4	2,9
		Kec. Kenohan	1085,5	
		Kec. Kota Bangun	1412,8	907,55
		Kec. Loa Janan	95,5	372,90
		Kec. Loa Kulu	3050,9	2685,83
		Kec. Loajanan	355,0	
		Kec. Marangkayu	1461,6	1473,81
		Kec. Muara Badak	129,2	59,96
		Kec. Muara Jawa	184,3	123,89
		Kec. Muara Kaman	1429,0	1424,13
		Kec. Muara Muntai	9,6	1,35
		Kec. Muara Wis	112,6	37,16
		Kec. Samboja	1086,0	726,32
		Kec. Sanga-Sanga	332,0	222,41
		Kec. Sebulu	1469,5	1194,92
		Kec. Tabang	29,9	22,61
		Kec. Tenggarong	1359,5	1585,86
		Kec. Tenggarong Seberang	4390,5	3719,17
6	Kutai Timur		2638,8	2784,82
		Kec. Bengalon	60,3	148,73
		Kec. Busang	6,5	8,24
		Kec. Kaliorang	758,4	701,15
		Kec. Karangan	113,3	109,29
		Kec. Kaubun	715,4	726,84
		Kec. Kombeng	223,4	238,74
		Kec. Long Mesangat	198,6	181,21
		Kec. Muarabengkal	54,6	53,73
		Kec. Muarawahau	0,7	14,90

		Kec. Rantau Pulung	234,6	167,79
		Kec. Sandaran	10,7	10,69
		Kec. Sangatta Selatan	56,6	132,76
		Kec. Sangkulirang	16,3	68,86
		Kec. Teluk Pandan	189,3	205,33
		Muara Ancalong		1,98
		Telen		14,60
7	Mahulu		24,4	79,42
		Kec. Long Hubung	24,4	79,42
8	Paser		7062,3	6577,61
		Kec. Kuaro	331,9	70,35
		Kec. Longikis	448,3	414,66
		Kec. Longkali	3779,5	3208,66
		Kec. Muara Balengkong	1373,3	
		Kec. Paser Balengkong	148,0	1659,92
		Kec. Tanah Grogot	981,3	
		Tana Paser		1224,03
9	Penajam Paser Utara		8672,5	9233,88
		Kec. Babulu	6544,1	7002,26
		Kec. Penajam	1081,0	1018,54
		Kec. Sepaku	477,0	625,27
		Kec. Waru	570,4	587,80
10	Samarinda		1958,5	1322,87
		Kec. Loa Janan Ilir	283,1	233,14
		Kec. Palaran	488,4	360,97
		Kec. Samarinda Seberang	8,8	7,42
		Kec. Samarinda Ulu	3,5	
		Kec. Samarinda Utara	834,6	450,29
		Kec. Sambutan	340,1	265,69
		Sungai Kunjang		3,15
		Sungai Pinang		2,20
	Total		41405,7	39417,73

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ke depan

Tugas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa dalam 3 (tiga) tahun ke depan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta penganeekaragaman pangan melalui peningkatan produksi, produktifitas, mutu produk dan nilai tambah untuk menuju ketahanan pangan

khususnya beras, peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas, terukur dan berkelanjutan.

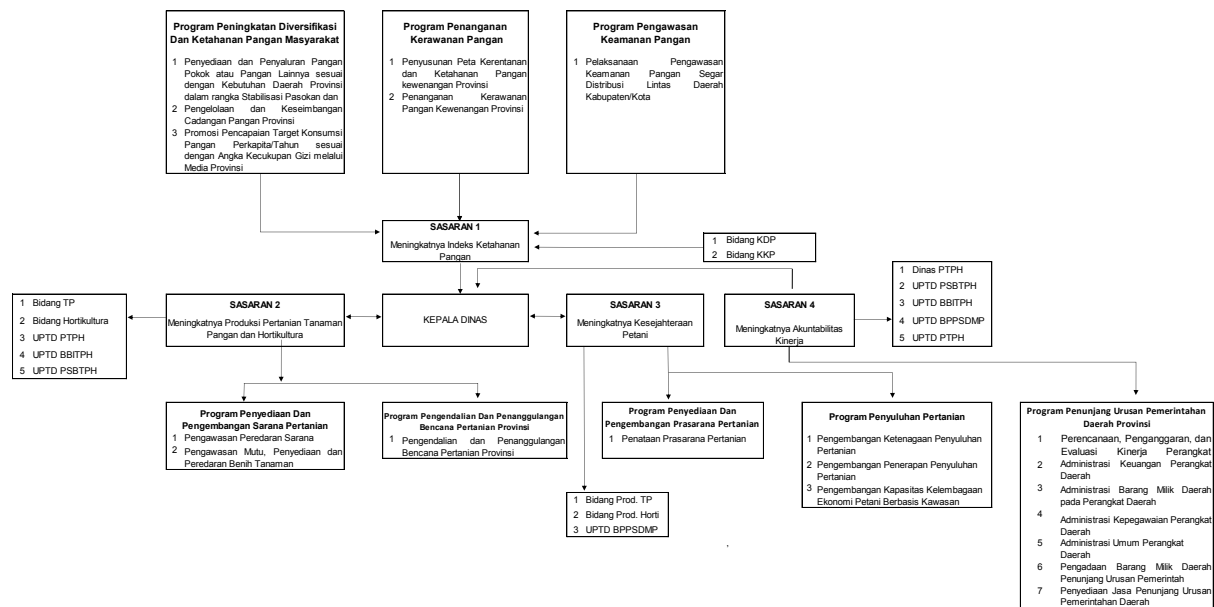
Sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya, seperti pemanfaatan Sistem Pelaporan TEPRA, Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, Provinsi Kalimantan Timur terus dipacu mengingat hasil kerja Perangkat Daerah sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan aparaturnya.

Terorganisirnya data dan informasi pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pembangunan sektor terkait lainnya. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan segala upaya untuk menjamin produk pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang mampu berdaya guna dan berdaya hasil bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

2.7. Hubungan Internal dan Eksternal

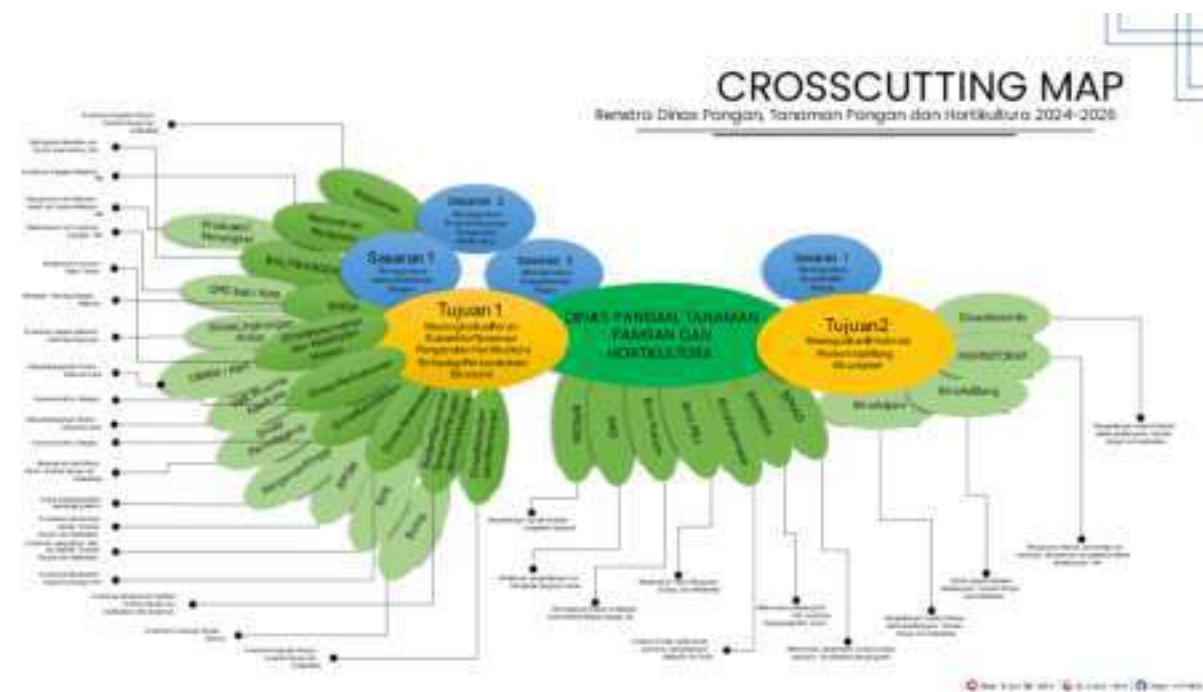
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai kinerja yang ideal. Dalam pelaksanaan kinerja program dan kegiatan di dalam hubungan internal sangat diperlukan sekali. Adapun hubungan kerja internal Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.15
Crosscutting internal Dinas Pangan, TPH Prov Kaltim



Untuk hubungan dengan pihak lain Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.16
Crosscutting External Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PANGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi
Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk melakukan identifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor – faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan di pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa mendatang antara lain :

1. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat dan penanggulangan Inflasi masih kurang

Kurangnya ketersediaan sumber karbohidrat membuat masyarakat banyak yang sulit untuk mendapatkannya dimana akhirnya terjadi inflasi, untuk itu diperlukan beberapa kegiatan untuk menanggulangi inflasi dengan cara gelar pasar murah dengan melibatkan beberapa stakeholder.

2. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan diluar sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun tapi juga semakin sempitnya luas garapan usahatani. Tantangan untuk menghadapi ini bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian yang ada dengan memaksimalkan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten / kota terkait LP2B.

3. Masih rendahnya produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura

Tingginya biaya produksi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura menjadi salah satu akar permasalahannya yang harus dicarikan solusi dalam meningkatkan produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta perlunya penggunaan atau ketersediaan benih unggul yang bermutu dan bersertifikat untuk mengurangi gangguan dalam

usaha tani komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta menyiapkan pangan untuk IKN.

4. Keberagaman konsumsi pangan masyarakat yang masih rendah
Meningkat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan keberagaman konsumsi pangan, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilitasi harga pangan dan meningkatkan cadangan pangan; mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
5. Lemahnya akses distribusi dan stabilisasi pasokan pangan
Panjangnya rantai distribusi membuat kurang lancarnya rantai pasokan pangan, oleh sebab itu perlunya menjaga kelancaran rantai pasokan pangan dimana perlunya melibatkan interaksi disektor pertanian mulai dari petani, benih, pupuk, pabrik pengolahan, pengiriman hingga pedagang dan tersedianya bahan pokok strategis dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan masyarakat.
6. Kualitas pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura masih rendah
Sarana pertanian untuk pasca panen yang saat ini untuk meningkatkan nilai tambah masih sangat rendah. Tantangan yang dihadapi bagaimana meningkatkan hasil pasca panen petani dengan menyediakan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan petani untuk meningkatkan hasil produksinya dengan baik.
7. Makin berkurangnya Sumberdaya Manusia Pertanian
Dengan meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat tani dipasar regional dan pasar global, petani dituntut merubah pola pikir dan perilaku dari petani tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis maka jumlah dan kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), Pengawas Benih

Tanaman (PBT) perlu ditingkatkan melalui pendidikan/pelatihan dan penerimaan pegawai/petugas pertanian baru.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; sehingga dapat ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut :

- 1. Cadangan Pangan Provinsi belum optimal
- 2. Diversifikasi Konsumsi pangan masih rendah
- 3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal
- 4. Mendukung gerakan pengendalian inflasi
- 5. Mendukung penanganan kemiskinan dan stunting
- 6. Ketersediaan benih unggul bersertifikat masih kurang
- 7. Pemenuhan pangan untuk IKN belum optimal
- 8. Akses infrastruktur pertanian masih kurang
- 9. Penanganan serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang belum optimal
- 10. Penguatan data pangan berbasis geospasial belum optimal
- 11. Akses petani terhadap teknologi dan informasi masih terbatas
- 12. Akses pemasaran hasil produksi masih terbatas
- 13. Biaya produksi tinggi
- 14. Kelembagaan petani yang belum optimal

Tabel 3.1

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat ketahanan pangan kaltim yang masih belum optimal	Ketersediaan pangan yang belum optimal	ketersediaan pangan sumber karbohidrat dan penanggulangan inflasi masih kurang
		pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal belum optimal
		diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih rendah
		penanganan kemiskinan dan stunting yang masih kurang
	Akses distribusi	akses pangan pada kondisi tertentu terbatas

	dan stabilisasi pasokan pangan masih lemah	panjangnya rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan
Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang	alih fungsi lahan pertanian bertambah
	Kurangnya infrastruktur pendukung	jaringan irigasi terbatas
	Rendahnya daya saing produk TPH	penerapan teknologi pertanian belum optimal
		ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam daerah masih kurang
Tingkat kesejahteraan petani masih belum optimal	Tingginya biaya produksi TPH	mahalnya harga pupuk dan pemenuhan pangan untuk IKN yang masih kurang
	Sdm pertanian berkurang	berkurangnya minat generasi muda dibidang usaha tani
Tingkat akuntabilitas kinerja belum maksimal	Belum optimalnya kualitas tata kelola internal	masih rendahnya pengukuran pelaksanaan dokumen perencanaan yang ditetapkan
		pengelolaan barang milik daerah belum optimal
		kapasitas pegawai masih kurang
ISU STRATEGIS		
Ketahanan Pangan Kaltim	Peningkatan produksi dan produktivitas TPH	Kesejahteraan petani TPH
1. Cadangan pangan provinsi belum optimal	1. Ketersediaan lahan usaha tani berkurang	1. Akses petani terhadap teknologi dan informasi masih terbatas
2. Akses pangan yang belum merata	2. Ketersediaan benih unggul bersertifikat masih kurang	2. Akses pemasaran hasil produksi masih terbatas
3. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah	3. Akses petani terhadap pupuk masih terbatas	3. Biaya produksi tinggi
4. Pengawasan keamanan pangan belum optimal	4. Akses infrastruktur pertanian masih	4. Kelembagaan petani yang belum optimal
		5. Pemenuhan pangan

5. Mendukung gerakan pengendalian inflasi	kurang	untuk IKN belum optimal
6. Mendukung penanganan kemiskinan dan stunting	5. Penanganan serangan OPT dan dampak perubahan iklim belum optimal 6. Penguatan data pangan berbasis geospasial belum optimal	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024). RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, potensi perekonomian yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati. Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi teknologi informasi

berbasis bahan fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioengineering yang mampu menghasilkan biomasa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan. Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (Biorevolution). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, (2) meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, (3) terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, (4) termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian (5) tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, (6) terkendalinya penyebaran organism pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit hewan, (7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (8) terselenggaranya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, serta (9) terkelolanya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai fungsinya tersebut. SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Selain itu sektor – sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian tenaga kerja terutama di pedesaan dan pesisir.

Dampak perubahan iklim menjadi sangat penting untuk di antisipasi dalam rangka pemanfaatan data curah hujan untuk kepentingan pengaturan pola tanam. Diperlukan kerjasama secara berkelanjutan dengan BMKG sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap data iklim.

Isu – isu strategis KLHS yang terkait sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian), perubahan iklim, penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, kesejahteraan rakyat, pertanian dan ketahanan pangan.

3.4 Program Unggulan

Program unggulan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah Pengembangan kawasan hortikultura dengan komoditi : Pisang (Kutai Timur, Paser dan Kutai Kartanegara dan Berau). Program unggulan diatas sangatlah penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di kawasan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 3.2

Program Unggulan Dinas Pangan, Tanaman dan Hortikultura
Tahun 2024 2026

NO	KOMODITI	PROVINSI / KABUPATEN	LUAS PANEN (Ha)			Target Produksi (ton)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	PISANG	KUTAI TIMUR	60	100	120	4.500	7.500	9.000
		KUTAI KARTANEGARA	30	50	60	2.250	3.750	4.500
		PASER	40	70	100	3.000	5.250	7.500
		BERAU	20	30	70	1.500	2.250	5.250
	Jumlah		150	250	350	9.750	16.500	21.000

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu : Tujuan (2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Sasaran (5) Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi , Indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (%), maka Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan :

1. Meningkatkan peran subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi

Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan

Indikator : - Nilai Akuntabilitas Kinerja (Poin)

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)

Sasarannya adalah :

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

RPD

Tujuan 2
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
Indikator :
Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sasaran 5
Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi
Indikator :
Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara



RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal		Target		
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan peran subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara	Meningkatnya indeks ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	77,5	77,65	77,85	77,95	78,05
Indikator :	Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi Tanaman Pangan (Ton)					
LPESubsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)		- Padi	239,435	289,846	239.505	239.580	239.680
2024 2025 2026		- Jagung	73,936	73.986	74.186	74.686	75.686
Tanaman Pangan 0,70 0,80 0,94	Meningkatnya kesejahteraan petani	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	351782	292,383	369.371	387.840	407.232
Hortikultura 129 127 188		Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Indeks)					
		- tanaman pangan	92,90	92,95	93,00	93,06	93,12
		- hortikultura	112,35	112,55	112,75	113	113,25
Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat						
Indikator :		1 Akuntabilitas Kinerja (Poin)	64,10	64,10	70,02	72,25	74,00
1 Akuntabilitas Kinerja (Poin)							
2024 2025 2026		2. Kepuasan Masyarakat (Poin)	88,56	82,00	88,58	88,65	88,80
78,50 79,30 80,01							
2. Kepuasan Masyarakat (Poin)							
2024 2025 2026							
85,00 85,50 86,00							

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan (2) "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas" dan menjalankan Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu pada sasaran (5) "Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi". Tujuan yang ingin dicapai yaitu 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan, Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja melalui strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN (2)	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas		
SASARAN (5)	Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		
INDIKATOR	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (%)		
TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
[TUJUAN] 1 Meningkatkan Peran subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi	LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)		
[SASARAN] 1.1 Meningkatnya indeks ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan (indeks)	1. Penguatan Diversifikasi Pangan 2. Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan 3. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 3. Peningkatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi 4. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 5. Penyediaan Cadangan Pangan
[SASARAN] 1.2 Meningkatnya produksi tanamn pangan dan hortikultura	[Indikator] 1 Produksi tanman pangan - Padi (ton) - Jagung (ton)	1. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian 2. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura 2. Peningkatan Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan
	[Indikator] 2 Produksi Tanaman Hortikultura (ton)		

			Mikro Organisme 4. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
[SASARAN] 1.3 Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Indeks) - Tanaman Pangan - Hortikultura	1. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Peningkatan Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan Penataan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Peningkatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 3. Peningkatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan pertanian 4. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Ekonomi Petani Berbasis Korporasi
[TUJUAN] 2 Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan	[Indikator] 1 Nilai akuntabilitas Kinerja (Poin)		
	[Indikator] 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)		
[SASARAN] 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	[Indikator] 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	1. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Ketatalaksanaan	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan

	[Indikator] 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)		Keuangan 3. Peningkatan Kualitas Penanganan Aset 4. Peningkatan Kualitas SDM ASN
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, maka langkah – langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi Daerah :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilitas Pasokan Pangan dan Harga Pasar
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - c. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Penataan Prasarana Pertanian

7. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
- b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Dari program diatas yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian

Program di atas disusun berdasarkan tupoksi Perangkat Daerah yang merupakan acuan bagi penyusunan Program Kesekretariatan, Bidang dan UPTD lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada periode 3 (tiga) tahun ke depan (2024 - 2026). Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dan untuk tahun 2024-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat		TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					112.124.646.000		112.624.146.000		113.135.641.000	
		02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.000.000.000		7.070.000.000		7.140.350.000	
		01:00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					68.334.646.000		70.381.793.000		70.522.513.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,45	82	61.334.646.000	82,7	61.189.793.000	83,4	61.258.163.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	1.640.000.000	100	1.864.853.000	100	1.878.853.000	
		2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	90	90	1.139.136.000	90	1.175.253.000	90	1.192.273.000	
		2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	800.000.000	5	821.117.000	5	821.117.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	8.800.000	2	8.800.000	2	8.800.000	Samarinda
		2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	8.800.000	2	8.800.000	2	8.800.000	Samarinda
		2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	93.960.000	4	93.960.000	4	93.960.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	227.576.000	4	242.576.000	4	259.596.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	91,20	91,25	54.466.185.680	91,27	54.611.000.000	91,40	54.711.000.000	
		2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	220	200	53.700.185.680	187	53.800.000.000	179	53.900.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	450.000.000	12	495.000.000	12	495.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan dokumen tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	150.000.000	18	150.000.000	18	150.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	Samarinda

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	%	45	45,5	92.250.000	45,7	97.250.000	48	102.250.000	
		2.09.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	47.250.000	1	52.250.000	1	57.250.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	85	85	285.000.000	85	358.000.000	85	366.000.000	
		2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	17	100.000.000	19	108.000.000	20	116.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	90	1.135.000.000	90	1.347.853.000	90	1.349.853.000	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	150	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30	20.000.000	32	20.000.000	35	20.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14	25.000.000	16	25.000.000	18	25.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	177	830.000.000	187	1.042.853.000	197	1.044.853.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	4	85.000.000	4	85.000.000	6	85.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	90	90	1.969.220.000	90	1.446.835.680	90	1.385.185.680	
		2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	4	1.669.220.000	6	675.000.000	6	675.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80	300.000.000	60	771.835.680	70	710.185.680	Samarinda
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	90	90	2.970.854.320	90	2.982.854.320	90	2.994.854.320	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	470.000.000	1	482.000.000	1	494.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.465.854.320	1	2.465.854.320	1	2.465.854.320	Samarinda

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	90	90	917.000.000	90	1.035.600.000	90	1.035.600.000	
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	16	175.000.000	16	175.000.000	17	175.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	28	375.000.000	28	375.000.000	28	375.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	72	150.000.000	73	150.000.000	73	150.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6	150.000.000	4	268.600.000	3	268.600.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	10	52.000.000	10	52.000.000	13	52.000.000	Samarinda
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	96,8	97,6	1.100.000.000	97,75	1.220.000.000	97,8	1.250.000.000	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	85,9	86,3	2.175.000.000	86,5	2.200.000.000	86,7	2.230.000.000	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan	12	12	600.000.000	12	670.000.000	12	700.000.000	
		2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	kegiatan	4	4	125.000.000	5	150.000.000	6	170.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	laporan	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Laporan	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	%	86,95	88,83	500.000.000	92,07	550.000.000	96,61	550.000.000	
		2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	222,42	300	150.000.000	300	200.000.000	12	200.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	0	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Media	3	3	2.175.000.000	3	2.200.000.000	3	2.230.000.000	
		2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	855.562.500	1	862.500.000	1	867.250.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi. Edukasi. dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	4	4	668.920.000	4	670.000.000	4	680.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	650.517.500	1	667.500.000	1	682.750.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	0	0	300.000.000	0	215.000.000	0	220.000.000	
				Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	Kecamatan	1	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	Laporan	1	1	300.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000	
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	2	300.000.000	2	215.000.000	2	220.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	Kecamatan	10	10	2.100.000.000	10	2.100.000.000	10	2.100.000.000	
		2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	84	85	1.325.000.000	86	1.335.000.000	87	1.340.350.000	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Dokumen	15	16	1.325.000.000	18	1.335.000.000	20	1.340.350.000	
		2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	11	157.800.000	12	158.840.000	13	159.396.400	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4	130.247.500	5	131.230.500	6	131.756.405	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Yang Dibina	Dokumen	1	1	581.012.500	1	585.397.500	1	587.743.475	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Paket	1	1	340.002.500	1	342.719.500	1	344.173.095	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kab/Kota	Laporan	1	1	115.937.500	1	116.812.500	1	117.280.625	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					4.200.000.000		4.222.000.000		4.224.000.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	3.616.580.000	82	3.616.580.000	82,8	3.615.960.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	583.420.000	100	605.420.000	100	608.040.000	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	115.680.000	100	115.680.000	100	115.680.000	
		2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	115.680.000	12	115.680.000	12	115.680.000	Loa Janan/Rempanga

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	295.900.000	100	295.900.000	100	295.900.000	
		2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	61.000.000	1	61.000.000	1	61.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	12	234.900.000	18	234.900.000	22	234.900.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	342.500.000	100	342.500.000	100	342.500.000	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	320.000.000	12	320.000.000	12	320.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	
		2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3	330.000.000	3	330.000.000	3	330.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	2.440.920.000	100	2.462.920.000	100	2.465.540.000	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	228.920.000	1	250.920.000	1	253.540.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	1	2.200.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	575.000.000	100	575.000.000	100	574.380.000	
		2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	250.000.000	2	250.000.000	2	249.380.000	Loa Janan/Rempanga
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	Loa Janan/Rempanga

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					2.650.500.000		2.685.000.000		2.690.000.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	2.227.579.850	82	2.240.520.840	82,8	2.232.722.040	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	422.920.150	100	444.479.160	100	457.277.960	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	85	90	88.560.000	90	88.560.000	90	88.560.000	
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	88.560.000	1	88.560.000	1	88.560.000	Samarinda
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	90	203.523.600	90	224.644.600	90	231.406.800	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	16.323.600	1	10.044.600	1	19.006.800	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	187.200.000	1	214.600.000	1	212.400.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	90	90	59.700.810	90	1.870.000	90	54.444.400	
		2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	59.700.810	1	1.870.000	2	54.444.400	Samarinda
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	95	95	1.687.814.390	95	1.652.252.400	95	1.694.289.000	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	15.958.550	1	13.396.560	1	16.433.160	Samarinda
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	169.438.000	1	169.438.000	1	169.438.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	34.000.000	1	37.000.000	1	40.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.468.417.840	1	1.432.417.840	1	1.468.417.840	Samarinda
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	90	90	610.901.200	90	717.673.000	90	621.299.800	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	9	121.877.200	9	110.092.000	9	121.877.000	Samarinda		
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	489.024.000	1	607.581.000	1	499.422.800	Samarinda		
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.950.000.000		1.950.000.000		1.965.825.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	1.631.608.000	82	1.619.730.000	82,8	1.634.305.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	318.392.000	100	330.270.000	100	331.520.000	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	91,20	91,25	81.000.000	91,27	81.000.000	91,40	81.000.000	
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	81.000.000	1	81.000.000	1	81.000.000	Samarinda

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	85	85	156.120.000	85	127.492.000	85	132.520.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	25	156.120.000	26	127.492.000	27	132.520.000	
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	90	151.400.000	90	158.100.000	90	159.600.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	50	3.500.000	55	4.500.000	60	5.000.000	
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	5.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	16.000.000	12	16.500.000	12	16.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	7	122.400.000	8	126.600.000	8	126.600.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	90	90	90.000.000	90	92.000.000	90	87.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	31	32	90.000.000	33	92.000.000	34	87.000.000	
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	90	90	1.101.824.160	90	1.107.002.160	90	1.106.752.160	Samarinda
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	4.000.000	1	4.500.000	1	4.000.000	
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	162.992.000	1	167.670.000	1	167.920.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	934.832.160	1	934.832.160	1	934.832.160	Samarinda
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	90	90	369.655.840	90	384.405.840	90	398.952.840	Samarinda
		2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	66.614.000	13	66.614.000	13	66.614.000	
		2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	70.000.000	12	75.000.000	12	72.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	12	12	233.041.840	12	242.791.840	12	260.338.840	Samarinda
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	01:00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					3.302.250.000		3.323.250.000		3.325.000.000	
		02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,1	81,5	2.461.000.000	82	2.411.000.000	82,8	2.415.000.000	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	841.250.000	100	912.250.000	100	910.000.000	
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	86,00	88,00	85.000.000	88,00	85.000.000	88,00	85.000.000	
		2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	82,00	83,80	290.000.000	83,00	290.000.000	83,00	290.000.000	

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	10	90.000.000	10	90.000.000	10	90.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	80,00	81,05	666.250.000	82,35	737.250.000	83,55	735.000.000	
		2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	75.000.000	7	75.000.000	5	75.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15	12.150.000	12	12.150.000	12	12.150.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	2.100.000	16	2.100.000	17	2.100.000	Samarinda
		2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	4	542.000.000	4	613.000.000	4	610.750.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	78,00	80,00	150.000.000	83,50	198.000.000	84,00	200.000.000	
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	8	150.000.000	9	198.000.000	10	200.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	88,50	88,80	1.625.000.000	88,95	1.625.000.000	89,07	1.625.000.000	
		2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	88,00	89,85	486.000.000	88,60	388.000.000	88,75	390.000.000	
		2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	86.000.000	1	88.000.000	1	90.000.000	Samarinda
		2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	400.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Samarinda
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	03:27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					30.047.250.000		30.319.250.000		30.653.450.000	
		01:00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					21.200.000.000		21.345.000.000		21.493.450.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35	35,5	11.950.000.000	35,7	12.020.000.000	35,9	12.062.700.000	
				Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	36,84	39,29	6.050.000.000	41,57	6.125.000.000	48,84	6.195.750.000	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Ha	8.500	8.750	11.950.000.000	9.000	12.020.000.000	9.250	12.062.700.000	
				Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura	Ha	709,25	809	6.050.000.000	840	6.125.000.000	860	6.195.750.000	

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Tanaman Pangan Pendukung Pertanian	Laporan	2	2	13.948.901.250	2	14.300.338.570	2	14.472.088.570	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Dokumen	2	2	2.451.098.750	2	2.352.098.750	2	2.293.798.750	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	1	1	1.600.000.000	1	1.492.562.680	1	1.492.562.680	
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Kesejahteraan Petani		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	36,37	41,39	1.750.000.000	41,76	1.750.000.000	41,81	1.780.000.000	
				Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	26	34,0	1.450.000.000	43,0	1.450.000.000	52,0	1.455.000.000	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	Unit	5	6	1.750.000.000	7	1.750.000.000	7	1.780.000.000	
				Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura	Unit	1	2	1.450.000.000	3	1.450.000.000	3	1.455.000.000	
		3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	2	1.200.773.500	2	1.200.773.500	2	1.206.776.500	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	2	2	133.002.600	2	133.002.600	2	135.657.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	2	2	133.321.600	2	133.321.600	2	135.976.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	2	331.720.000	2	331.720.000	2	341.720.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	120	150	1.069.623.300	250	1.069.623.300	350	1.072.320.500	
		3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.550.000	
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	2	131.559.000	3	131.559.000	3	132.000.000			

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.000.000.000		2.040.000.000		2.100.000.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	11,20	11,55	700.000.000	11,95	740.000.000	13,07	800.000.000	
				Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	%	20,00	30,33	1.300.000.000	50	1.300.000.000	66,67	1.300.000.000	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	Ha	920	935	2.000.000.000	960	2.040.000.000	985	2.100.000.000	
		3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	19000	20000	1.300.000.000	21000	1.300.000.000	21500	1.300.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	18	18	700.000.000	20	740.000.000	22	800.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					2.849.500.000		2.865.000.000		2.915.500.000	
		03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	75	77	2.849.500.000	80	2.865.000.000	80	2.915.500.000	
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	Orang	250	270	2.183.590.000	300	2.198.400.000	330	2.230.500.000	
		3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	29	17	785.000.000	20	835.000.000	20	885.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	210	270	1.398.590.000	300	1.363.400.000	330	1.345.500.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Laporan	7	7	425.000.000	9	446.600.000	9	585.000.000	
		3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	3	265.000.000	2	206.600.000	3	265.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	7	6	160.000.000	9	240.000.000	12	320.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkat kapasitasnya	Unit	4	9	240.910.000	11	220.000.000	13	100.000.000	
		3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	3	4	170.910.000	5	150.000.000	6	50.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	50.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah

TUJUAN	Sasaran	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							2024		2025		2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.300.000.000		1.332.500.000		1.349.500.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	%	97	98	1.300.000.000	98	1.332.500.000	99	1.349.500.000	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	173	195	1.237.474.962	215	1.269.849.712	217	1.286.849.712	
		3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	92	95	526.506.640	95	551.802.006	95	538.715.432	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	82	100	710.968.322	120	718.047.706	120	748.134.280	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	Varietas	3	3	62.525.038	3	62.650.288	3	62.650.288	
		3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)	3	3	62.525.038	3	62.650.288	3	62.650.288	Kabupaten/Kota
Meningkatkan Peran Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	01:00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.697.750.000		2.736.750.000		2.795.000.000	
		03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	%	24	32	495.000.000	36	510.000.000	40	515.000.000	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	Kios	30	40	220.000.000	45	225.000.000	50	230.000.000	
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk. Pestisida. Alsintan. dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	30	40	220.000.000	45	225.000.000	50	230.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	Laporan	7	10	275.000.000	11	285.000.000	11	285.000.000	
		3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Agens Hayati Yang Dikembangkan	Laporan	2	10	275.000.000	11	285.000.000	11	285.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT	%	72	75,8	2.202.750.000	75,9	2.226.750.000	76	2.280.000.000	
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	Ha	20.045	15.050	2.202.750.000	15.155	2.226.750.000	15.260	2.280.000.000	
		3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	20000	15000	2.042.750.000	15100	2.056.750.000	15200	2.100.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah
		3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	45	50	160.000.000	55	170.000.000	60	180.000.000	Kabupaten/Kota, Luar Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi Perangkat Daerah. Selain itu sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan tolok ukur kinerja pada target tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome. Indikator tujuan dan sasaran menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam rencana Rencana Strategis tahun 2024-2026. Adapun IKU dan target pertahun disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Peran Subsektor Tanaman Pangan Dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara							
	LPE Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	%						
	- Tanaman Pangan		-14,80	0,65	0,70	0,80	0,94	0,94
	- Hortiklutura		-6,33	0,90	1,29	1,27	1,88	1,88
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan							
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,50	77,65	77,85	77,95	78,05	78,05
	Meningkatnya Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura							
	Produksi Tanaman Pangan							
	- Produksi padi	Ton	239,435	289,846	239,505	239,580	239,680	239,680

	- Produksi jagung	Ton	73,936	73,986	74,186	74,686	75,686	75,686
	Produksi tanaman hortikultura	Ton	351,782	292,383	369,371	387,840	407,232	407,232
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani							
	Nilai tukar petani (NTP) Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks						
	- Tanaman Pangan		92,90	92,95	93,00	93,06	93,12	93,12
	- Hortikultura		112,35	112,55	112,75	113,00	113,25	113,25
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas							
	Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
	Kepuasan masyarakat	Poin	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat							
	Akuntabilitas kinerja	Poin	64,10	64,10	70,02	72,25	74,00	74,00
	Kepuasan masyarakat	Poin	88,56	82,00	88,58	88,65	88,80	88,80

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan yang disebut juga Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrument pengukuran kinerja penyelenggaraan yang menjadi kewenangan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 memuat indikator yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan dinas yang menjadi kewenangan dengan mengacu pada IKK outcome yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah. Indikator tersebut menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan. Indikator Kinerja Kunci dan target Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Cadangan Pangan Provinsi (CPP)							
		%	59,83	86,95	88,83	92,07	96,61	96,61
2	Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertanian (Padi)							
		Ton / Ha	3,63	3,65	3,65	3,66	3,67	3,67

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Diharapkan juga RENSTRA ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 yang disusun melalui berbagai tahapan. Setelah RPD tahun 2024 – 2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun hal – hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) yang merujuk pada table 4.1 pada BAB IV Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome) yang merujuk pada table 6.2 pada Bab VI Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Pejabat eselon IV, pejabat fungsional yang disetarakan dan aparatur di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) yang merujuk pada table 6.2 pada Bab VI Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang – kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahun dan realisasinya melalui DPA – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA – Dinas pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja sekaligus dijadikan instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, bilamana diperlukan sesuai hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan renstra seperlunya.

Pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA 3 (tiga) tahun ke depan disadari bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, namun demikian bukanlah pula satu kemustahilan. Dengan tekad kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas semua jajaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, diyakini semua harapan

dan cita-cita pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan perencanaan pembangunan bidang pangan dan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang multi dimensi. Namun demikian, bukan hal baru manakala setiap pelaksanaan pembangunan senantiasa dibarengi dengan meningkatnya permasalahan yang akan memengaruhi kualitas lingkungan hidup, mulai dari degradasi lingkungan, pencemaran, emisi GRK hingga efek perubahan iklim global. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, guna mengatasi berbagai isu permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sebuah rencana aksi yang berkelanjutan, sistematis dan strategis dalam upaya melakukan perlindungan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana aksi ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah.

Proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan perencanaan yang matang untuk setiap tahap dan bidangnya disertai dengan pengendalian dan evaluasi setiap saat guna menyempurnakan dan mengembangkan perencanaan pembangunan yang ada. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien serta

mampu mencapai sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur secara baik dan bertanggungjawab agar tetap lestari untuk mendukung perikehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur serta makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, hijau dan indah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di daerah; dan

- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, segala bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur harus diselenggarakan dengan asas: kehati-hatian; pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; kompensasi pencemaran dan kerusakan lingkungan; kemanfaatan; keadilan; kelestarian dan keberlanjutan; transparan, partisipatif, dan akuntabel; keserasian dan keseimbangan; kearifan lokal; keterpaduan; dan keanekaragaman hayati.

Penyusunan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berkonsekuensi pada pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru yang menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka seluruh perangkat daerah menyusun rencana strategis dan berpedoman pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi urusan lingkungan hidup berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-

2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dimana keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam menjalankan rencana pembangunan bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya renstra ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Adapun proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, revidi Renstra kementerian/lembaga dan Renstra PD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini memuat, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup guna mencapai target kinerja menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja PD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPD Provinsi Kalimantan Timur di lingkup PD Dinas Lingkungan Hidup sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di

Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor untuk mewujudkan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 berdasarkan kepada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan LembaranNegeraRepublik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHKSetjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selaras dengan tujuan pembangunan urusan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan gambaran umum tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode lima tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur beserta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya;
4. Menentukan indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama tiga tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya; dan
5. Menjadi dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menjelaskan tentang tugas, fungsi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, serta cascading kinerja.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja dan target keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 secara umum dinilai cukup berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Namun demikian, berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu periode tersebut menimbulkan berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Tentunya hambatan dan tantangan tersebut perlu ditelaah dan dianalisis secara seksama dengan memerhatikan keselarasan terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur dan realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, analisis tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dan analisis berbagai peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas urusan lingkungan hidup telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan, yaitu :

1. Biro Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
(Tahun 1974-1997)

2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tingkat I Kalimantan Timur (Tahun 1998)
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 1999-2000)
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2001-2007)
5. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2008-2016)
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2017-sekarang)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang tata lingkungan;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang penataan & peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi:

1. Sekretariat;
2. Bidang Tata Lingkungan;
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
5. Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas LH;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, dan 4 (empat) Kepala Bidang dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur



Mengacu kepada struktur organisasi di atas, uraian tata kerja, tugas pokok dan fungsi setiap elemen pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penaaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaran urusan kesekretariatan;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Lingkungan Hdup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, kehumasan serta pengaduan masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi tiga subbagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- 1) Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang lingkungan hidup;
 - b. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup; dan
 - c. Menyusun pelaporan kegiatan lingkungan hidup.
 - 2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan kehumasan; dan
 - c. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan; dan
 - c. Verifikasi administrasi keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan
- Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian

serta pengembangan teknis di bidang tata lingkungan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang tata lingkungan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kajian dampak lingkungan hidup;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian inventarisasi RPPLH dan KLHS.
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kajian dampak lingkungan hidup.
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemeliharaan lingkungan hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sampah;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis limbah B3;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan fasilitas teknis; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan sampah;
 - 2) Seksi Limbah B3, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian limbah B3; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan fasilitas teknis.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemantauan lingkungan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencemaran lingkungan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pemantauan lingkungan;
 - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
6. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penegakan hukum lingkungan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- 2) Seksi Penegakan Hukum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- a) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
- b) Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)
- c) Penyuluh Lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Birokrasi, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka telah terjadi perubahan jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yaitu dilakukan penyetaraan jabatan pengawas (esselon IV) ke dalam jabatan fungsional dengan dilakukan pelantikan pada tanggal 30 Mei 2022. Seluruh jabatan kepala seksi, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi jabatan fungsional.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi jabatan fungsional Perencana. Serta Kepala Seksi berubah menjadi jabatan fungsional Pedal dan PPLH. Untuk jabatan pengawas yang masih ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Sub Bagian Umum.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Motor penggerak utama keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu

mengoperasionalkan dan mengendalikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur seperti modal, teknologi, kekayaan alam dan lain sebagainya secara bijaksana, efektif dan efisien. Berdasarkan data Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur per Januari 2023 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan berjumlah 110 (Seratus sepuluh) orang yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) PNS, 45 (empat puluh lima) non PNS dan 8 (delapan) Satpam. Jumlah keseluruhan pegawai tersebut terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) laki-laki dan 43 (empat puluh tiga) perempuan. Adapun pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersusun dari SDM yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur, Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin			Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kepala Subbag Umum	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Pejabat Struktural	4	3	7	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-
Pejabat Fungsional	16	11	27	8	19	-	-	10	17	-	-	-	-
Fungsional Pedal	8	5	13	4	9	-	-	7	6	-	-	-	-
Fungsional Pengawas LH	4	2	6	3	3	-	-	2	4	-	-	-	-
Fungsional Penyuluh LH	2	4	6	1	5	-	-	1	5	-	-	-	-
Fungsional Perencana	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Pelaksana	13	10	23	1	18	4	-	2	12	-	9	-	-
Jumlah PNS	33	24	57	15	38	4	-	19	29	-	9	-	-
Tenaga Honorer Teknis	26	19	45	-	-	-	-	-	39	-	6	-	-
Satpam	8	-	8	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2
Jumlah Pegawai	67	43	110	15	38	4	-	19	69	-	18	2	2

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
				JF Arsiparis Pertama	-	1						1				
				JF Arsiparis Penyelia	-	1										1
				JF Arsiparis Mahir	-	1								1		
				JF Arsiparis Terampil	-	1						1				
				JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	-	1									1	
				JF Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	-	1						1				
				JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	-	1										1
				JF Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	-	1								1		
				JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	-	1						1				
				JF Pranata Komputer Muda	-	1									1	
				JF Pranata Komputer Pertama	-	1						1				
				JF Pranata Komputer Penyelia	-	1										1
				JF Pranata Komputer Mahir	-	1								1		
				JF Pranata Komputer Terampil	-	1						1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
				Analisis Kinerja	1	1										
				Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	1										
				Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	-	1						1				
				Penyusun Laporan Keuangan	1	1					1					1
				Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2						2				
				Bendahara	1	1										
				Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	2						2				
				Pengelola Bahan Perencanaan	-	1						1				
				Pengelola Program dan Kegiatan	-	1						1				
				Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	1					1				
				Pengelola Gaji	-	1						1				
				Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	-	2						2				
				Pranata Barang dan Jasa	-	1						1				
				Verifikator Keuangan	-	1						1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
				Pengadministrasi Kepegawaian	1	3						2				
				Pengadministrasi Umum	2	3	1					2				
				Pengadministrasi Keuangan	1	2						1				
				Pengadministrasi Persuratan	1	2						1				
				Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1										
				Kepala Bidang Bidang Tata Lingkungan	1	1										
				JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	2	3						1				
				JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	2	9						7				
				JF Analisis Kebijakan Muda	-	1										1
				JF Analisis Kebijakan Pertama	-	2						2				
				JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	-	2						2				
				Analisis Lingkungan Hidup	1	2						1				
				Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	-	2						2				
				Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	-	1						1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
				Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	-	1						1				
				Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	-	1						1				
				Penelaah Dampak Lingkungan	1	1				1					1	
				Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	-	1						1				
				Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	-	1						1				
				Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	-	1						1				
				Pengadministrasi Umum	1	2						1				
				Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	1										
				JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	3	3	1					1				
				JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	1	6						5				
				JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	1	2								1		
				JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	1	2						1				
				JF Analisis Kebijakan Muda	-	1										1
				JF Analisis Kebijakan Pertama	-	2						2				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
					Analisis Lingkungan Hidup	-	3					3				
					Penyuluh Lingkungan Hidup	1	1	1					1			
					Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	-	1					1				
					Pengelola Lingkungan	2	2									
					Petugas Pengambil Contoh	-	1					1				
					Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1	1					1			
					JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	4	5									1
					JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	-	5					5				
					JF Analisis Kebijakan Muda	-	1									1
					JF Analisis Kebijakan Pertama	-	2					2				
					Analisis Lingkungan Hidup	1	4					3				
					Penyuluh Lingkungan Hidup	-	1					1				
					Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	-	2					2				
					Pengelola Informasi Lingkungan	-	1					1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
					Pengelola Lingkungan	1	1									
					Pengadministrasi Umum	1	2				1	1				1
					Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	1									
					JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	2	5					1				2
					JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	1	8					7				
					JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	1	2	1				1				1
					JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	-	3					3				
					JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	2	2									
					JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	2	4					2				
					JF Analis Kebijakan Muda	-	1									1
					JF Analis Kebijakan Pertama	-	2					2				
					Analisis Pengaduan Masyarakat	-	1					1				
					Analisis Permasalahan Hukum	-	3					3				
					Penyuluh Lingkungan Hidup	-	1					1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan					Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
							Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
							2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
				Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	1	2						1				
				Pengelola Lingkungan	-	2						2				
				Pengadministrasi Umum	1	2	1					2				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Melihat jumlah sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, kedepan dirasa penting untuk dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan akhirnya dalam rangka upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan.

Berdasarkan Hasil Analisis Pegawai, disebutkan bahawa proyeski pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup memerlukan 188 orang pegawai, dimana saat ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai 105 orang.

Maksud dari peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh setiap aparatur Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini perlu dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Adapun peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

2.2.2.Aset/Modal

Dalam rangka penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ke depan, sangat penting untuk dilakukan penilaian kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara optimal, efisien dan efektif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 18, Samarinda, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, didukung pula oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasaranayang berfungsi dengan baik seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3
Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
	Tanah Dan Bangunan						
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung Utama Kantor,	5	unit	5			
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Unit	3			
3	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	4	Unit	4			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
4	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Unit	1			
5	BangunanTempat Ibadah Lain-lain	1	Unit	1			
6	BangunanTempat Pertemuan Lain-lain	1	Unit	1			
7	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	1			
8	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	2	Unit	1			1 Sudah Dihapus
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	Unit	1			
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Unit	1			
11	Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Permanen	1	Unit				1 Tidak terdata dalam aset
12	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	Unit	1			
13	Bangunan Menara Air	1	Unit	1			
14	BangunanTempat alat pemantau kualitas air otomatis online	1	Unit	1			
	Sub Total	24		22			
	Kendaraan						
1	Kendaraan Roda 4	21	Unit	18		2	1 dihibahkan ke masjid Melak.
2	Kendaraan Roda 2	15	Unit	15			
	Sub Total	36		33	0	2	1
	Mebeler						
1	Rak-rak Penyimpanan	3	Unit	-			3 Tidak terdata dalam Aset
2	Lemari besi	9	Unit	9			
3	Rak Besi/Metal	4	Unit	4			
4	Rak Kayu	3	Unit			3	
5	Filling Besi/Metal	31	Unit	31			
6	Brand Kas	2	Unit	1		1	
7	Lemari Kayu	4	Unit			4	
8	Meja Kayu	12	Unit	12			
9	Kursi Besi/Metal	3	Unit				3 Tidak terdata dalam Aset
10	Meja Rapat	7	Unit	7			
11	Meja Telpo	1	Unit	1			
12	Kursi Rapat	121	Unit	121			
13	Kursi Tangan	3	Unit	3			
14	Meja Komputer	4	Unit			4	
15	Sofa	7	Unit	7			
16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	1			
17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit	10			
18	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9	Unit	9			
19	Kursi eksekutif	1	Unit	1			
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Unit	8			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
	Sub Total	243		225	0	12	6
	Mesin						
1	Mesin Ketik Manual	8	Unit				
2	Mesin Penghitung Uang	2	Unit				
3	Mesin Absensi	1	Unit				
4	Mesin Potong Rumput	3	Unit				
5	Mesin Cetak Listrik Elektronik	2	Unit				
6	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit				
7	Genset	2	Unit				
8	Mesin Penyedot Air	1	Unit				
9	Compresor Unit	1	Unit				
10	Ac Unit	20	Unit				
	Sub Total	41					
	Elektronik						
1	Sound System	5	Unit				
2	Camera Film/Zoom	2	Unit				
3	Personal Komputer Lain-lain	2	Unit				
4	Sotfware Aplikasi	1	Unit	1			
5	PC Unit	5	Unit	5			
6	Lap Top/Notebook	53	Unit	47		6	
7	Personal Komputer Lain-lain	3	Unit	3			
8	Printer	32	Unit	32			
9	CPU	2	Unit			2	
10	Monitor	3	Unit			3	
11	Scanner	1	Unit			1	
12	Plotter	1	Unit			1	
13	External	2	Unit	2			
14	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3	Unit	1		2	
15	Proyektor + Attachment	5	Unit			5	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	26	Unit	2		24	
17	Power Amplifier	3	Unit	3			
18	Chairman/Audio Conference	1	Unit	1			
19	Peralatan Studio Visual Lain-lain	26	Unit	26			
20	Camera Electronic	14	Unit			14	
21	Telephone dan/atau Fax	76	Unit			76	
22	Antena UHF Portable	1	Unit			1	
23	Video Camera dan Recorder	1	Unit			1	
24	Mixer	4	Unit	4			
25	Stabilizer	6	Unit	6			
26	TV Monitor	2	Unit	2			
27	Operating Table + Overhead Light	1	Unit			1	
28	Personal Komputer	16	Unit	16			
29	Sound Level Meter	1	Unit			1	
30	Kabel Listrik	7	Unit		7		

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
31	Layar	1	Unit	1			
32	Flask	9	Unit	9			
33	Printer	6	Unit	6			
34	Tape Recorder	3	Unit			3	
35	Handycam	5	Unit			5	
36	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Pake t			1	
37	Echo Sounder	1	Unit	1			
38	Komputer server	1	Unit	1			
39	Komputer dekstop	1	Unit	1			
40	Drone	1	Unit	1			
41	CCTV monitor	1	Set	1			
42	Speaker aktif	1	Unit	1			
	Sub Total	336		181	7	148	
	Alat Pengujian						
1	pH Meter	2	Unit	2			
2	Global Positioning System	5	Unit	5	-	-	-
3	Alatukurlainnya (Horiba/U-52G)	1	Unit	-	-	-	1 Tidak Terdaftar Dalam Aset
4	Alat Ukur Kedalaman Air	1	Unit	1	-	-	
5	Alat Uji Gas Buang	1	Unit	1			
6	Alat Ukur Kadar Air	2	Unit	2			
7	Alat pemantau kualitas air otomatis online	1	Unit	1			
	Sub Total	13		12	0	0	1
	Peralatan Kantor						
1	Alat PemeliharaTanaman lain-lain	2	Unit	-		2	
2	White Board	2	Unit	2		-	
3	Alat Kantor Lainnya	15	Unit				15 Tidak terdata
4	Foto Gubernur dan Wagub	2	Unit	2			
5	Sablon	1	Unit				1 Tidak terdata dalam Aset
6	Tangga Alumunium	1	Unit			1	
7	Alat RumahTanggal Lain-lain	1	Unit			1	
8	Gorden	5	Pake t			5	
9	Karpet	1	Pake t			1	
10	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	4	Unit			4	
11	Alat Pemadam Kebakaran	17	Unit			17	
12	Pot Plastik	2	Unit			2	
13	Bendera Merah Putih	2	Unit	2			
14	InstalasiBersih Lain-lain	1	Unit	1			
15	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	Unit			1	
16	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	Unit			1	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
17	Ilmu Pengetahuan Umum	2	Unit				2 Tidak tedata dalam aset
18	Alat Olah Raga Lainnya (lain-lain)	1	Unit	1			
	Sub Total	61		8	0	35	18
	TOTAL	754		512	10	203	29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Melihat keseluruhan data di atas, perlu menjadi perhatian penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terkait pemeliharaan aset yang dimiliki. Selain itu, jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, ketersediaan sarana prasarana yang rata-rata dalam kondisi baik, juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Diharapkan faktor keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi penghambat bagi penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat perlu dilakukan pembangunan Gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup yang baru sebagai pelengkap sarana dan prasarana pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Daya tampung dan daya dukung lingkungan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas yang disebabkan oleh terjadinya pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya yang semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity*. Untuk mengantisipasi menurunnya daya dukung lingkungan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain penetapan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah masih perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasinya selama kurun waktu periode 2019-2023.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Adapun, tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, adalah : Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK).

Selanjutnya pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sasaran : Menurunnya Emisi GRK.

Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. IKU digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menunjukkan tingkat capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan emisi dari BAU				26,3%	26,89%	27,75%	28,50 %	29,33%	25,18%	50,72%	41,96%	70,73%		0,95	1,88	1,51	2,48	
2	Jumlah penurunan emisi				12,181 Jt ton CO2eq	12,941 Jt ton CO2eq	13,818 Jt ton CO2eq	14,667 Jt ton CO2eq	15,558 Jt ton CO2eq	9,944 ton CO2eq	22,042 ton CO2eq	20,897 Jt ton CO2eq	36,401 jt ton CO2eq		0,81	1,88	1,51	2,48	
3	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)						53,75	53,80	53,85	77,09	53,70	51,92	53,02				0,96	0,98	
4	Indeks kualitas udara (IKU)						89,11	89,16	89,21	89,42	89,06	88,84	87,59				0,99	0,98	
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)						79,81	79,86	79,91	72,12	79,76	82,21	81,85				1,03	1,25	
6	Indeks Kualitas air laut (IKAL)						83,56	83,61	83,66	NA	83,51	85,4	81,45				1,02	0,97	
7	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah						100%	100%				100%	100%				1,0	1,0	
8	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD						100%	100%				100%	100%				1,0	1,0	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
9	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)						40%	45%				31,56%	51,01%				0,78	1,13	
10	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi						100%	100%				66,67%	89,02%				0,66	0,89	
11	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH						50%	100%				50%	100%				1,0	1,0	
12	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup						52%	52%				200%	100%				3,8	1,92	
13	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan						66,66%	83,31 %				95%	117,36 %				1,4	1,4	
14	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan						100%	100%				100%	100%				1,0	1,0	
15	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada						74%	74%				78,43%	87,02%				1,0	1,19	
16	Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup						85,30	85,35				84,08	82,13				98,57	0,96	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim

Dari tabel diatas, capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tujuan : “Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline” dengan capaian 70,73%; dengan rasio capaian sebesar 2,48%;

Sasaran : “Menurunnya emisi gas rumah kaca” dengan capaian 36,401 jt ton CO₂eq; dengan rasio capaian sebesar 2,48%

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dikategorikan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata 116,3%.

Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang ditetapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, mengacu pada misi ke- 4 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu “*Berdaulat Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*”, melalui Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sasaran Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Capaian Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN Ke-5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	78,81	75,25	75,06	74,46		1,04	0,99	0,98	0,97	
2	Sasaran ke-15 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penurunan emisi dari BAU	26,3%	26,89%	27,75%	28,50%	29,33%	25,18%	50,72%	41,96%	70,73%		0,95	1,88	1,51	2,48	

Sumber: Data Diolah Dari Capaian RPJMD Provinsi Kaltim

Dari data tersebut realisasi capaian IKLH semakin menurun sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Tetapi nilai IKLH tahun 2022 sebesar 74,46 masuk dalam katagori BAIK. Dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur masih baik.

Untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari BAU tahun 2022 sebesar 70,73% dari target 28,50%. Dapat disimpulkan bahwa upaya Provinsi Kalimanta Timur dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sudah sangat baik.

2.3.3 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021.

Tabel. 2.6. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,45	22,48	24,83	22,23
2	Pengukuran Kinerja	25%	11,56	11,56	12,50	17,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,69	10,69	10,69	10,88
4	Evaluasi Kinerja	10%	0	3,13	2,54	5,37
5	Capaian Kinerja	20%	13,44	14,38	15,38	11,50
	Nilai Hasil Evaluasi		58,14	62,23	65,93	67,47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

2.3.4. Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018 dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menurut kelompok belanja sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Urusan lingkungan hidup	10.376.548.000	10.868.602.000	11.980.100.000	11.789.589.200	12.950.851.000	9.051.066.194	8.935.075.844	8.307.801.150	10.200.198.578,00		0,87	0,82	0,69	0,87		0,25	0,14
Penunjang urusan pemerintahan	18.894.148.000	12.339.807.365	20.304.935.000	72.928.758.410	28.992.512.000	15.869.236.796	11.244.410.404	15.855.730.880	59.365.185.709,25		0,84	0,91	0,78	0,81		4,91	3,03
TOTAL	29.270.696.000	23.208.409.365	32.285.035.000	84.718.347.610	41.943.363.000	24.920.302.990	20.179.486.248	24.163.532.030	69.565.384.287,25		0,85	0,87	0,75	0,82		2,65	1,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Secara umum realisas anggaran dikategorikan baik dengan persentase rata-rata di atas 80%. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari anggaran anggaran yang disediakan dipergunakan dengan optimat..

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan jenis layanan yang diberikan Dinas lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, maka kelompok masyarakat yang menerima layanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
I	Bidang Tata Lingkungan		
1	Penerbitan Persetujuan Formulir Kerangka Acuan - AMDAL	Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Amdal	Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
2	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) - Dokumen Andal dan RKL- RPL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
3	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) - Dokumen Adendum Andal dan RKL- RPL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
4	Penerbitan Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) – UKL-UPL	Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
5	Penerbitan Surat Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Surat Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
6	Penerbitan Surat Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Surat Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
			Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
7	Penerbitan Surat dan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten dan Kota	Surat dan Berita Acara Hasil Verifikasi RPPLHD	Pemerintah Kabupaten/Kota
8	Penerbitan Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	Surat Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Pemerintah Kabupaten/Kota
II	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur	Izin Pengelolaan Limbah B3	Pengumpul limbah B3, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3
2	Penerbitan Rekomendasi Gubernur untuk Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional	Pengumpul limbah B3, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3
3	Penerbitan Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3	PemrakarsaYaitu Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengumpulan Dengan Tujuan Untuk Mengumpulkan Limbah B3 Sebelum di Kirim Ketempat Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang akan dilaksanakan
III	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
1	Penerbitan Persetujuan teknis	Persetujuan teknis Pembuangan	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
	Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi	dan/atau pemanfaatan air limbah	bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
2	Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi	Surat Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
3	Penerbitan Persetujuan Teknis Pemanfaatan dan Pengumpulan Air Limbah Kelapa Pabrik Sawit	Standar Teknis Pemanfaatan dan Pengumpulan Air Limbah Kelapa Pabrik Sawit	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
IV	Bidang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
1	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dokumen Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengadu Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan
2	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Dokumen Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Pengadu Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan
3	Peningkatan Kapasitas ASN/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Sertifikat	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH)
4	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Sekolah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah Yang Mengikuti Program Adiwiyata
5	Penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi	SK Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi	Sekolah Yang Mengikuti Penilaian Adiwiyata
6	Verifikasi Usulan Penerima	Surat Usulan Penerima	Sekolah Yang Mengikuti Penilaian Adiwiyata

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	
7	Verifikasi Usulan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional	Surat Usulan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional	1) Perintis Lingkungan 2) Pengabdian Lingkungan 3) Penyelamat Lingkungan 4) Pembina Lingkungan
V	Sekretariat		
1	Pemberian Informasi Tentang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Informasi Tentang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada media elektronik	Masyarakat Umum
2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sertifikat keikutsertaan Aparatur mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
3	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan	Sarana dan prasarana penunjang layanan	Masyarakat Umum dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Setiap rencana pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat haruslah direncanakan dengan sebaik mungkin. Untuk memudahkan perumusan rencana pembangunan, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap segala tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sedangkan peluang adalah

kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023, secara umum teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

A. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan periode 2019–2023, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur baik dari faktor internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup, kepadatan penduduk, serta laju pembangunan sehingga berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya hayati;
2. Terjadinya peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
3. Rendahnya komitmen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terpadu untuk lintas sektor;
6. Meningkatnya pembukaan lahan;
7. Menurunnya kualitas lingkungan;
8. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;
9. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur;
10. Semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia;

11. Kalkulasi nilai lingkungan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh;
12. Belum sinkron dan padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan.

B. Peluang

Adapun berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan di atas, yaitu:

1. Keberhasilan pembangunan 2019-2022, yang menjadi modal dalam pelaksanaan pemenuhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang terus dilengkapi dengan aturan turunannya;
3. Adanya penataan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
4. Adanya jejaring kerjasama dengan *stakeholders* meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup, perguruan tinggi, masyarakat, pemuka agama dan penanggung jawab usaha/kegiatan serta komunitas masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan dan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan;
6. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim;
7. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
8. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklamasi dan Keanekaragaman Hayati;
9. Bertambahnya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup; dan

10. Adanya berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dengan cukup baik dan berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, Keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kedepan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kelestarianragam hayati dari setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan tidak pernah berkurang, baik populasi maupun nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kedepan pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi mendatang bahwa pada saatnya nanti, setiap sumber daya alam dan hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi mendatang akan memanfaatkannya. Berpijak pada pemahaman ini maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus mampu meyakinkan para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, diantaranya melalui perumusan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup yang terstruktur dan jelas pelaksanaannya.

Setiap rencana pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan rencana pembangunan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan untuk dicarikan solusi

inovatif terbaik dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka pemanfaatan setiap peluang yang ada secara optimal guna mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam eksekusi rencana yang telah dirumuskan sehingga bukan manfaat yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar. Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi dan penetapan isu strategis dapat dilihat dari lingkungan-lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau instansi di luar organisasi. Dinamika regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun nasional. Sedangkan lingkungan internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan suatu keharusan guna mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi inovatif terbaik.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Tujuh permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kalimantan Timur yang menjadi prioritas pembangunan sebagaimana dipaparkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni:

1. Belum meratanya nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur;
2. Meningkatnya kemiskinan
3. Struktur ekonomi yang belum sesuai dengan karakteristik Sosial/Ekonomi-Demografi;
4. Laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah regional Kalimantan dan Nasional
5. Kerentanan kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan di semua sektor.
6. Belum terpenuhinya kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung konektivitas kawasan sentra produksi dan pusat industri (intradan inter)
7. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintahan

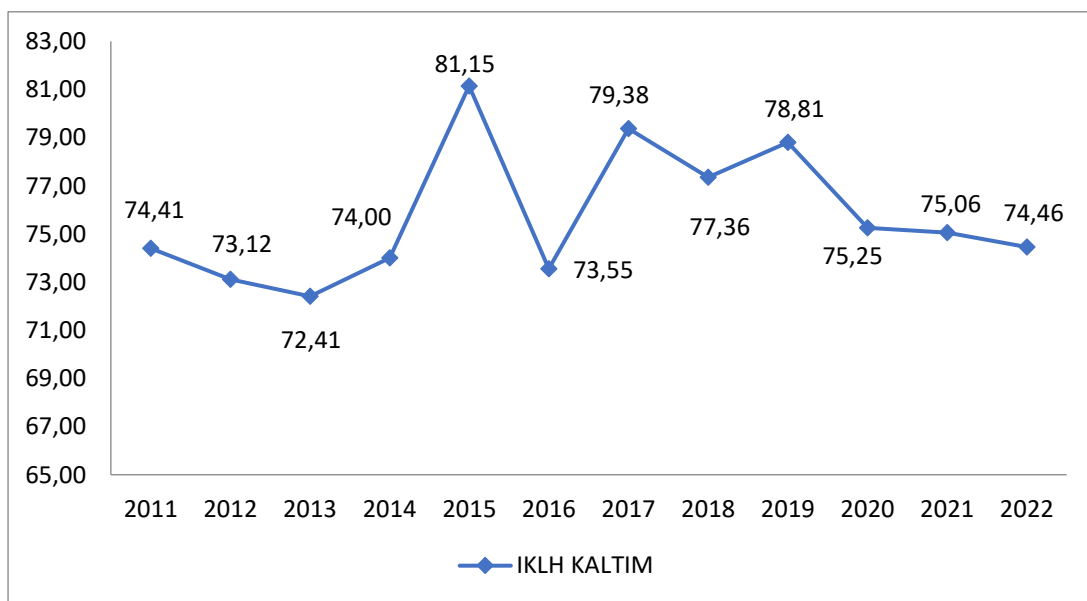
Dari ketujuh permasalahan utama tersebut, permasalahan utama yang harus dituntaskan oleh Kalimantan Timur terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yakni “Kerentanan

kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan di semua sektor”. Hal ini kemudian menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun kebijakan pembangunan lingkungan hidup periode 2024-2026, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, yang dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait makin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur. Jika melihat kepada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur meskipun saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, namun demikian, untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur masih menemui kendala dan permasalahan yang harus segera dicarikan solusi inovatifnya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang kian kompleks seperti pencemaran air, udara, tanah, pengelolaan sampah, dan limbah B3. Keadaan ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat emisi gas rumah kaca yang menyebabkan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan.

Secara umum, kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, badai dan bencana alam lain. Faktor manusia disebabkan oleh aktivitas manusia seperti misalnya deforestasi dan degradasi hutan, pertambangan, pembukaan lahan, kegiatan industri, rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, air dan tanah.

Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan indeks kualitas lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang menurun yakni sebesar 73,35 pada tahun 2016 dan menjadi 74,46 pada tahun 2022.



Gambar 3.1 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat pada tabel berikut.

Perlu dipertajam dengan memasukkan isu strategis, masalah pokok, masalah dan akar masalah

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah Pada Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Rendahnya perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS 2. Belum optimalnya kajian dampak lingkungan hidup. 3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	2. Belum efektifnya upaya pengelolaan sampah dan limbah B3	1. Belum optimalnya kegiatan penanganan sampah di darat serta pesisir dan laut 2. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3 3. Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota
	3. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	1. Belum maksimalnya frekuensi dan penentuan titik pemantauan lingkungan 2. Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air 3. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pengelolaan mutu udara 4. Masih tingginya tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut
	4. Meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 2. Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi 3. Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional yang didapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi tersebut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi yang sebelumnya perhitungan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Mulai tahun 2020 , indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu ; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks

Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level Kabupaten / Kota. Indikator untuk menghitung IKLH Kabupaten / Kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH Provinsi dan Nasional. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH Kabupaten / Kota terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Hasil dari pemantauan kualitas air yang telah dilakukan tahun 2022 pada 10 (Sepuluh) Kabupaten / Kota, di beberapa sungai yaitu Sungai Mahakam, Sungai Segah, Sungai Kelay, Sungai Karang Mumus, Sungai Bontang, Sungai Kedang Kepala, Sungai Belayan, Sungai Santan, Sungai Boh, Sungai Sepaku, Sungai Kasungai dan Manggar Besar, menunjukkan kondisi kualitas air rata- rata data Indeks Pencemar (IP) atau status mutu air yaitu 3,06 (cemar ringan). Parameter IKA (pH,DO,BOD,COD, TSS, NO₃-N, T-Phosphat dan Fecal Coli ,yang belum memenuhi baku mutu pada pemantauan yang dilakukan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur yaitu didominasi dengan parameter yaitu TSS, DO, COD, BOD. T-Phosphat dan Fecal Coliform.

Sedang hasil pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler yang dilakukan pada 10 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dengan masing-masing Kabupaten / Kota mewakili kawasan transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri, masih menunjukkan pada kategori Baik, mengingat dari semua parameter untuk kualitas udara masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, parameter pengukuran kualitas udara ambien yaitu SO₂ dan NO₂, adapun yang perlu menjadi perhatian atau diwaspadai adalah bahan pencemar yang didominasi dari kawasan transportasi yang dihasilkan sebagian besar SO₂,dan NO₂ dari kendaraan bermotor.

Materi lain yang saat ini berada di udara adalah *particulatematter* (PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, mengingat dari data kesehatan di Kalimantan Timur untuk penyakit ISPA diketemukan di seluruh kab/kota Se-Kaltim.

Kebakaran hutan masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur namun sudah dapat diminimalisir akan tetapi perubahan tutupan lahan ini kemungkinan menjadi akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta lahan krisis akibat pengelolaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan yang kesemuanya akan memberikan dampak terhadap jasa layanan ekosistem salah satunya adalah penataan pola ruang yang tidak terkendali, akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan terhadap kepunahan. Lebih lanjut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKU, IKA, IKL, IKAL Provinsi
Kalimantan Timur 2011 – 2022

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Lahan	IKLH
2022	87.59	53.02	81.45	81.85	74,46
2021	88,84	51,92	85,40	82,21	75,06
2020	89,06	53,70	83 ,51	79,76	75,25
2019	89,42	77,09	-	72,12	78,81
2018	83,36	57,73	-	87,59	77,36
2017	88,87	57,69	-	88,54	79,38
2016	80,20	55,29	-	82,26	73,55
2015	96,20	77,90	-	72,30	81,15
2014	83,96	54,80	-	80,93	74,00

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Lahan	IKLH
2013	84,79	48,67	-	80,93	72,41
2012	83,94	51,39	-	81,31	73,12
2011	87,35	50,88	-	82,36	74,41

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Pada tahun 2019 timbulan sampah di Kaltim sebanyak 655.383,04 ton. Adapun sampah yang ditanganisebanyak 290.856,78 ton atausebesar 44%, dan pengelolaan sampah sebesar 60,27%. Sedangkan pada tahun 2022 dengan meningkatnya jumlah penduduk maka timbulan sampah juga mengalami peningkatan yaitu 771.748,21 ton dengan sampah yang ditangani cukup meningkat signifikan dibanding 2019 yaitu 536.287,33 persen atau 69%. Adapun pengelolaan sampah meningkat sebesar 87,02%.

Tabel 3.3
Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Tahun	Timbulan	Pengurangan Sampah (Ton)	%	Penanganan Sampah (Ton)	%	Pengelolaan Sampah (Ton)	%
2019	655.383,04	104.145,31	16%	290.856,78	44%	395.002,09	60,27%
2020	596.402,68	98.770,17	17%	252.473,17	42%	351.243,34	58,89%
2021	735.295,99	133.723,36	18%	520.768,56	71%	654.491,92	89,01%
2022	771.748,21	135.320,70	18%	536.287,33	69%	671.608,03	87,02%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Pada tahun 2019 persentase limbah B3 yang dikumpulkan sebesar 28,66%. Limbah B3 yang dihasilkan mengalami kenaikan pada tahun 2021-2021 dikarenakan dampak pandemik Covid-19, terutama dari fasilitas pelayanan Kesehatan, yaitusebesar 226.659 ton pada tahun 2020 dan 222.690 tahun 2022 dengan persentase limbah B3 yang dikumpulkan tahun 2020 sebesar 20,68% dan 2021 seebesar 33,84%. seiring dengan berkurangnya dampak pandemi COVID-19 tahun 2022, limbah B3 yang dihasilkan mengalami penurunan sebesar 167.890 ton dan yang dikumpulkan sebesar 88.099,49 ton dengan persentase 52,47%

Tabel 3.4
Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Kalimantan Timur

TAHUN	DIHASILKAN (TON)	DIKUMPULKAN (TON)	PERSENTASE
2018	148.885,43	42.664,66	28.66%
2019	220.291,63	61.157,68	27.76%
2020	226.659,70	46.876,68	20.68%
2021	222.690,75	75.365,79	33.84%
2022	167.890,50	88.099,49	52.47%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dalam rangka pelayanan penerbitan rekomendasi izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ persetujuan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup memproses permohonan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Rekomendasi ini diberikan untuk syarat mendapatkan izin berusaha yang merupakan kewenangan provinsi.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Dokumen Lingkungan Yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Dokumen	2019	2020	2021	2022
Amdal dan Adendum Andal RKL-RPL	11	15	18	10
UKL-UPL	5	8	12	15
DELH	3	2	1	1
DPLH	2	2	1	3
Perubahan Persetujuan Lingkungan	8	2	6	5
Total	29	29	38	34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang menjadi

kewenangan provinsi. Pengawasan ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) setiap tahun.

Tabel 3.6
Data Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Pengawasan	2018	2019	2020	2021	2022
Usaha/kegiatan	17	35	33	51	82

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Data pengaduan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan jumlah aduan, baik pengaduan lingkungan hidup maupun non lingkungan hidup.

Tabel 3.7
Data Pengaduan yang Masuk Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Tahun	Jenis Pengaduan		Jumlah
	Pengaduan LH	Pengaduan Non LH	
2012	34	3	37
2013	28	1	29
2014	22	0	22
2015	25	2	27
2016	22	5	27
2017	27	13	40
2018	32	8	40
2019	40	6	46
2020	53	9	62
2021	33	1	34
2022	24	2	26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan pembinaan dan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan yang diberikan untuk jenis penghargaan Kalpataru dan Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.8
Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan
(1)	(2)	(3)
1	Masyarakat Hukum Adat Mului	Kalpataru Nasional (Kategori Penyelamat Lingkungan)
2	Herry Wijaya (Kota Balikpapan)	Kalpataru Provinsi (Kategori Perintis Lingkungan)
3	Widodo (Kota Balikpapan)	Kalpataru Provinsi (Kategori Perintis Lingkungan)
4	Muhammad Mansur (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Kalpataru Provinsi (Kategori Penyelamat Lingkungan)
5	Andika Yohantoro (Kabupaten Kutai Timur)	Kalpataru Provinsi (Kategori Penyelamat Lingkungan)
6	Suwaji (Kota Bontang)	Kalpataru Provinsi (Kategori Penyelamat Lingkungan)
7	Sekolah Dasar Tunas Budi Luhur Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
8	Sekolah Dasar Negeri 015 Balikpapan Tengah	Sekolah Adiwiyata Provinsi
9	Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Auliya 1 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan
10	Sekolah Dasar Negeri 009 Balikpapan Timur	Sekolah Adiwiyata Provinsi
11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
12	Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
13	Sekolah Menengah Pertama Wiyata Mandala Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
14	Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
15	Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Auliya Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
16	Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Redep	Sekolah Adiwiyata Provinsi
17	Sekolah Dasar Negeri 021 Tanjung Redep	Sekolah Adiwiyata Provinsi
18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Talisayan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
19	Sekolah Dasar Negeri 009 Bontang Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
20	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Loa Janan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
22	Sekolah Dasar Negeri 001 Teluk Pandan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
23	Sekolah Dasar Negeri 015 Bengalon	Sekolah Adiwiyata Provinsi
24	Sekolah Dasar Dharma Utama Wahau	Sekolah Adiwiyata Provinsi
25	Sekolah Menengah Pertama Dharma Utama Wahau	Sekolah Adiwiyata Provinsi
26	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sangatta Utara	Sekolah Adiwiyata Provinsi
27	Sekolah Dasar Negeri 023 Long Ikis	Sekolah Adiwiyata Provinsi
28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuaro	Sekolah Adiwiyata Provinsi
29	Sekolah Dasar Negeri 020 Penajam	Sekolah Adiwiyata Provinsi

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan
30	Sekolah Dasar Negeri 028 Penajam	Sekolah Adiwiyata Provinsi
31	Sekolah Dasar Negeri 010 Sepaku	Sekolah Adiwiyata Provinsi
32	Sekolah Dasar Kristen Cita Hati Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
33	Sekolah Dasar Negeri 023 Samarinda Utara	Sekolah Adiwiyata Provinsi
34	Sekolah Dasar Negeri 002 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
35	Sekolah Dasar Negeri 004 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
36	Sekolah Dasar Negeri 008 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
37	Sekolah Dasar Negeri 009 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
38	Sekolah Dasar Negeri 012 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
39	Sekolah Dasar Islam Terpadu Sebulussalam Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
40	Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
41	Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
42	Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
43	Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
44	Sekolah Dasar Negeri 013 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
45	Sekolah Dasar Negeri 017 Sungai Kunjang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
46	Sekolah Dasar Terpadu Madina Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
47	Sekolah Dasar Negeri 019 Palaran	Sekolah Adiwiyata Provinsi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan

kawasan hutan dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Mengacu pada catatan yang ada, terdapat lebih dari 1.200 jenis tumbuhan hidup pada kawasan konservasi di Kalimantan Timur. *Terdapat setidaknya 80% jenis burung (sekitar 380 jenis) di Pulau Kalimantan dan sekitarnya (Borneo) bias ditemukan di Kalimantan Timur.* Selain itu juga terdapat lebih dari separuh jenis mamalia Borneo (sekitar 80 jenis) ditemukan di Kalimantan Timur. Mamalia tersebut diantaranya adalah 11 dari 13 jenis primata Borneo, termasuk Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan satwa endemik Kalimantan yaitu bekantan (*Nasalis larvatus*). Puluhan jenis reptilia termasuk Buaya muara (*Crocodylus porosus*), 25 jenis katak, kemudian 195 jenis kupu-kupu, serta ratusan jenis serangga dan satwa lainnya yang belum teridentifikasi bisa ditemukan di Kalimantan Timur (menlhk.go.id)

Berdasarkan data dan kewenangan di tingkat provinsi dan sesuai kondisi yang ada maka dilakukan identifikasi lebih dalam terkait permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan ini yang akan menjadi dasar penyusunan program urusan lingkungan hidup. Lebih lanjut permasalahan lingkungan hidup diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9
Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Terjadinya penurunan kualitas air, air laut, udara dan lahan	1. Belum optimalnya upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Belum optimalnya upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Belum optimalnya upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Belum optimalnya upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	2. Belum optimalnya perencanaan lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya pendampingan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab./Kota 2. Belum tersusunnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD / RPD / RPJMD
	3. Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) di luar kawasan hutan dan Taman Keanekaragaman hayati
	4. Belum optimalnya Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
	5. Belum optimalnya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	lingkungan hidup	
	7. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Belum optimalnya hasil dari Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
	8. Banyaknya Pengaduan Lingkungan Hidup	Banyaknya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	9. Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya Penanganan Sampah darat dan laut
	10. Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	1. Belum optimalnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Belum optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Belum optimalnya Pengelolaan administrasi barang milik daerah 4. Belum optimalnya Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 5. Belum optimalnya pengadaan barang milik daerah 6. Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		urusan pemerintah daerah 7. Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah

Melihat urgensinya berbagai permasalahan lingkungan hidup tersebut yang harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pelaksana pembangunan bidang lingkungan hidup. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mengantisipasi dampak negatif dari kerusakan lingkungan sering kali terkendala oleh banyak faktor yang turut menjadi penyebab hadirnya berbagai permasalahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup antar pemangku kepentingan
4. Belum terbitnya aturan daerah urusan lingkungan hidup sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur
6. Belum dipahaminya secara optimal peraturan lingkungan hidup oleh pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3
8. Meningkatnya emisi gas rumah kaca di Provinsi Kalimantan Timur
9. Menurunnya keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Timur

Lebih lanjut, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sering kali masih memiliki potensi konflik yang tinggi karena kuatnya anggapan bahwa lingkungan adalah milik publik yang berjangka Panjang dimana didalamnya terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Secara garis besar, konflik lingkungan dapat dikategorikan sebagai konflik peninggalan masa lalu dan konflik di era reformasi. Pada konflik masa lalu, permasalahan biasanya menyangkut masalah perebutan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dan pihak yang berkepentingan seperti pemerintah dan pengusaha. Adapun konflik di era reformasi lebih kompleks lagi, karena konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau pengusaha tetapi juga konflik antar sektor dalam pemerintahan, konflik antar pengusaha dan konflik antar masyarakat. Beberapa potensi konflik lingkungan yang muncul terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam antara lain:

- (1) Belum adanya konsep distribusi yang adil antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah terhadap penguasaan potensi sumber daya alam.
- (2) Peraturan yang diterapkan belum berorientasi pada peningkatan peran masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, bahkan cenderung diamputasi.
- (3) Ketidakpastian hukum bahkan terjadinya kriminalisasi terhadap pengusaha daerah oleh aparat penegak hukum sehingga keberadaan pengusaha daerah semakin terpojok bahkan sampai menimbulkan trauma untuk berusaha.
- (4) Hambatan birokrasi baik tingkat pusat maupun daerah belum memberikan kemudahan bagi pengusaha daerah untuk berusaha dan berkiprah dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (5) Timbulnya konflik antara pengusaha dan masyarakat sebagai akibat dari pengelolaan lahan oleh swasta yang sering kali tidak memerhatikan para pemangku adat.

Dari berbagai uraian di atas, secara umum berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur dapat diidentifikasi dalam dokumen RPPLH sebagai berikut :

- (1) Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- (2) Dampak yang Diakibatkan Perubahan Iklim
- (3) Dampak yang Diakibatkan Kegiatan Pertambangan Batubara
- (4) Ancaman terhadap Kawasan Karst Sangkulirang- Tanjung Mangkalihat
- (5) Ancaman terhadap Kawasan 3 Danau (Jempang, Semayang, Melintang)
- (6) Ancaman terhadap Kawasan Teluk Balikpapan
- (7) Pencemaran terhadap Air Sungai Mahakam
- (8) Ancaman terhadap Kawasan Delta Mahakam

Pemanfaatan ruang di Kalimantan Timur untuk pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlawanan : pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk modal pelaksanaan pembangunan harus mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyepakati dan mendeklarasikan sebagai Provinsi Hijau harus dapat mengimplementasikan berbagai aksi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan, dimana pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang ada di Kalimantan Timur.

Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrument kebijakan lingkungan meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan , kemampuan , kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada upaya perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan salah satunya adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan oleh RPPLH Nasional yaitu ketersediaan air dan pangan. RPPLH ini memuat rencana tentang :

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Dalam dokumen RPPLH juga memuat tentang target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan besaran dan/atau ukuran kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai selama kurun waktu 30 tahun.

Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup atau disingkat IKLH. Parameter dan besaran bobot dari masing-masing indikator serta metoda analisis dan perhitungan untuk menentukan IKLH dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirinci untuk setiap 5 (lima) tahun, disajikan dalam tabel seperti berikut:

Tabel 3.10
Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tmur Tahun 2019 – 2048

NO	Indikator	Target IKLH
----	-----------	-------------

		2019-2023	2023- 2028	2028 - 2033	2033- 2038	2038 - 2043	2043 - 2048
1	IKA	73,33	73,33	74,33	75,33	76,33	77,33
2	IKU	88,87	88,87	89,87	89,87	90,87	91,87
3	IKL	67,48	67,48	70,48	70,48	71,48	72,48
4	IKLH	76,15	76,15	77,45	78,95	79,95	80,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Penyusunan rencana pelaksanaan untuk setiap periode 10 tahun wajib mengikuti skenario pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sepuluh tahunan sebagai berikut :

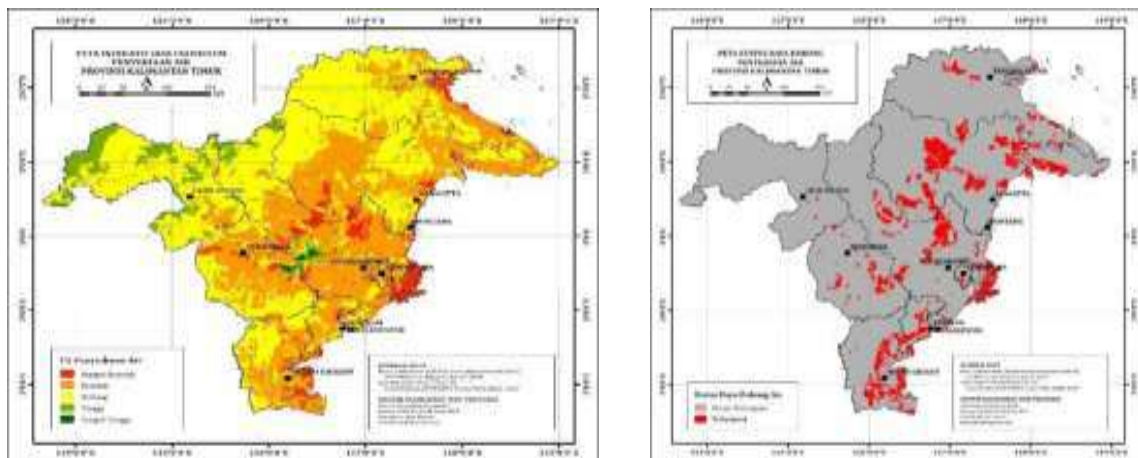
- Pada 10 tahun pertama dititik beratkan pada upaya-upaya menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, terlihat dari nilai IKLH yang harus kita pertahankan dalam kategori kualitas lingkungan yang kondisinya baik, sehingga Kalimantan Timur masih berkesempatan untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat.
- Pada 10 tahun kedua dititik beratkan pada upaya-upaya memperbaiki kualitas jasa lingkungan hidup, nilai IKLH untuk periode ini sudah mulai naik dengan harapan upaya perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan semakin meningkat.
- Pada 10 tahun ketiga dititik beratkan pada upaya-upaya pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan ayat (5), pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), untuk itu RPPLH menjadi pedoman dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam. Ketidakadilan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berujung pada konflik sosial masih sering terjadi, hal ini akan berpotensi mempertajam ketidakpastian pengelolaan SDA dan kondisi

lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia terutama untuk isu ketersediaan air dan pangan.

Berikut disampaikan kondisi indikatif jasa ekosistem dan status daya dukung penyediaan air di Provinsi Kalimantan Timur yang menggambarkan daya dukung lingkungan yang ada saat ini, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 3.2
Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan status daya dukung Penyediaan Air
Provinsi Kalimantan Timur



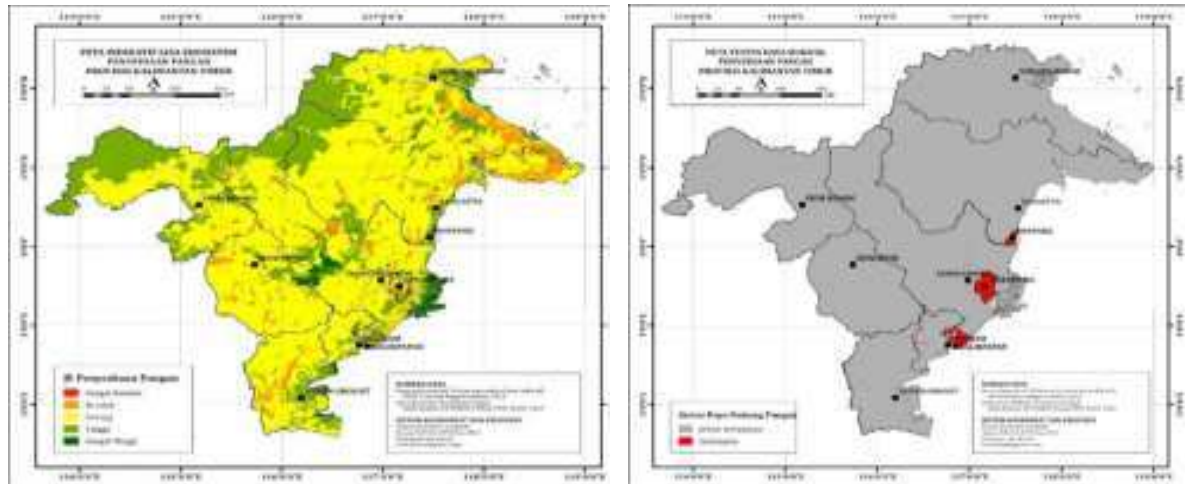
Adapun arahan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan di Kalimantan Timur adalah

1. Perlu dilakukan analisis lanskap agroforestry meliputi: daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir;

2. Membagi DAS menjadi beberapa jenis tipe tutupan penggunaan lahan (Kawasan lindung, konservasi, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, permukiman);
3. Menginventarisir seluruh kegiatan eksisting pada daerah hulu, tengah dan hilir yang diindikasikan memberikan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air;
4. Mengembangkan pemanfaatan SDA dan kegiatan pengelolaan lahan sesuai dengan fungsi kawasan dan dipadusarasikan dengan kegiatan eksisting;
5. Mengembangkan kegiatan pengelolaan di daerah hulu, tengah dan hilir DAS, meliputi: reboisasi dan rehabilitasi lahan-lahan kritis, konsolidasi lahan, relokasi permukiman di pinggir sungai, memperindah estetika kawasan, pengerukan lumpur di sungai (drainase di perkotaan), pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air, konservasi sempadan sungai pada titik-titik rawan longsor, dan penanaman vegetasi.

Untuk kondisi indikatif jasa ekosistem dan status daya dukung penyediaan pangan di Kalimantan Timur disajikan dalam gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.3
Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan status Daya Dukung Penyediaan Pangan
Provinsi Kalimantan Timur



Arahan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilakukan melihat kondisi di atas sebagaimana disampaikan di peta, maka untuk tiga (3) kota yang ada di Kalimantan Timur yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang memiliki status yang sudah terlampaui sedangkan tujuh (7) kabupaten yang lain yaitu Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara dan Paser menjadi kabupaten yang harus menyediakan pangan (memberikan manfaat/pemberi manfaat) bagi ketiga kota yang akan menerima manfaat (Samarinda, Balikpapan dan Bontang) diatas untuk itu harus dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Penerapan struktur pekarangan perkotaan (system agroforestri modern) untuk mendukung ketahanan pangan di Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
2. Pengembangan kota sesuai jasa dan komoditas unggulan yang mendukung kabupaten sekitar sebagai pemberi manfaat

Sedangkan bagi kabupaten yang ada di Kalimantan Timur arahan untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya antara lain adalah melakukan penerapan struktur pekarangan pedesaan (system agro forestry tradisional) untuk mendukung ketahanan pangan.

Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan

wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah dilakukan dengan ditetapkan berbagai peraturan untuk dijadikan pedoman dalam tata kelola lingkungan. Dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terdapat instrumen lingkungan sesuai dengan pasal 14 Undang-undang No 32 Tahun 2009, dimana salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS wajib disusun untuk dokumen RTRW, RPJP, RPJMD, RTR Kawasan Strategis Provinsi, RZ WP-3-K, Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi, Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi dan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di tingkat provinsi atau lintas kab/kota. Penyusunan KLHS telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Adapun muatan yang harus ada dalam KLHS antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Effisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggungjawab tugas dan fungsinya untuk lingkungan hidup memiliki tugas untuk mevalidasi KLHS yang telah disusun oleh kab/kota, dimana validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik , hal ini sesuai dengan *pasal 25* Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2016 .

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang

- terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya :

- ✓ Indikator indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 66,56 (2019) sampai 69,74 (2024);

- ✓ Penurunan GRK yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah sebesar 17,54% (2024)
- ✓ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) meningkat dari 50,9 POIN (2019) sampai 70 poin (2024)
- ✓ Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyajikan faktor penghambat dan faktor pendorong identifikasi permasalahan terkait Renstra Kementerian dan Kehutanan sebagai berikut.

Tabel 3.11

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Sasaran jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
		Penghambat	Pendorong
a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. c. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.	- Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup - Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur - Kurang optimalnya kinerja kelembagaan di bidang lingkungan hidup.	- Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. - Kurang jelasnya pembagian tugas & wewenang dalam menanggulangi pencemaran. - Belum ditetapkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. - Belum optimalnya pengembangan kerjasama dan	- Terbitnya Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatnya potensi investasi di daerah. - Meningkatnya koordinasi antar sektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
		Penghambat	Pendorong
	- Belum komprehensifnya sistem informasi dan dokumen lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat.	kemitraan	

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis serta keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang. Pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan, di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memperhatikan KLHS. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah yang secara garis besar terbagi menjadi menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan yang di atasnya tidak

boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi. Adapun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dengan adanya wilayah IKN yang berdampingan dengan Provinsi Kalimantan Timur, telah merubah pola ruang dan memberi dampak terhadap penggunaan ruang. Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang dimana wilayah IKN Nusantara seluas 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara menjadi 15.339.121 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.441.082 ha dan wilayah laut mencapai 2.898.039 ha.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan analisis spasial untuk mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pengembangan pelayanan urusan lingkungan hidup beserta arahan lokasi pengembangannya. Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur

sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 adalah Mewujudkan mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN, yang akan diwujudkan melalui penetapan serangkaian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu faktor penghambat maupun pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disajikan dalam table berikut.

Tabel 3.12

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Telaahan Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas	a. mengembangkan PKN, PKW, dan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa; b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara	a. Penggunaan sumber daya alternatif yang kurang optimal. b. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air ataupun udara. c. Belum adanya konsep distribusi yang adil untuk masyarakat dan pengusaha daerah terhadap penguasaan potensi sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.	a. Terbitnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan c. Terdapat alokasi anggaran yang cukup untuk perlindungan lingkungan hidup (terdapat peningkatan investasi di bidang

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	c. mengembangkan Kawasan Permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana d. permukiman berbasis air sebagai pusat kegiatan Masyarakat lokal dengan dukungan infrastruktur Kawaasan Permukiman yang handal e. mengembangkan Kawasan Permukiman nelayan yang terintegasi dengan pariwisata yang ramah lingkungan	d. Peraturan dan perundangan yang diterapkan belum berorientasi pada peningkatan peran masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam, bahkan cenderung diamputasi. e. Ketidakpastian hukum bahkan terjadinya kriminalisasi terhadap pengusaha daerah oleh aparat penegak hukum sehingga keberadaan pengusaha daerah semakin terpojok bahkan sampai menimbulkan trauma untuk berusaha f. Hambatan birokrasi baik tingkat pusat maupun daerah belum memberikan kemudahan bagi pengusaha daerah untuk berusaha dan berkiprah dalam pengelolaan sumber daya alam. g. Belum mantapnya penegakan hukum menyangkut illegal logging, illegal fishing dan illegal mining. h. Sering terjadinya banjir, tanah longsor dan asap akibat	lingkungan hidup) d. Meningkatnya koordinasi antarsektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. e. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua	a. mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia b. mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan daerah Provinsi		
3. pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan	a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antarsistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian,		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN

Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
seluruh daerah Provinsi	perikanan, dan pertambangan. b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara c. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan d. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan membuka keterisolasian e. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antar pulau f. mengembangkan alur pelayaran di Perairan Pesisir untuk mendukung	kebakaran hutan dan lahan. i. Meningkatnya pencemaran udara, tanah dan air. j. Penerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih lemah k. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara. l. Masih rendahnya pengetahuan atau pun kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan. m. Kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup. n. Belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh o. Masih kurangnya data dan informasi yang terkait PSDAL. p. Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah	

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	pelayaran nasional dan internasional g. mengembangkan jaringan energi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri pengolahan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir h. mengembangkan jaringan kelistrikan melalui energi baru dan terbarukan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna meningkatkan daya saing investasi di Wilayah darat dan Perairan Pesisir j. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah k. mengembangkan jaringan prasarana SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan		
4. pelestarian kawasan berfungsi lindung	a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat e. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung geologi f. melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya g. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove		
5. pelestarian kawasan berfungsi	a. mempertahankan dan melestarikan kawasan		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir	konservasi di Wilayah darat b. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau Kecil c. melindungi dan melestarikan alur migrasi biota Laut d. memadukan dan menselaraskan rencana Pola Ruang di Wilayah darat dan Perairan Pesisir yang berfungsi konservasi		
6. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat	a. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hulu agro perkebunan yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi b. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi c. mengembangkan kawasan peruntukan industri hulu agro,		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	industri aneka, dan industri pangan dari kegiatan kehutanan, perikanan, dan kelautan d. mensinergikan kawasan peruntukan industri dengan kawasan budi daya lainnya, kawasan lindung, dan alur migrasi biota Laut e. mengelola pencemaran di kawasan peruntukan industri		
7. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	a. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan b. mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan c. mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	dukung dan daya tampung lingkungan		
8. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru	a. mengembangkan kawasan industri pengolahan kelautan perikanan b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya d. mengembangkan kawasan perikanan budi daya		
9. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya	a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan b. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan/atau batubara		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	d. mensinergikan kawasan pertambangan dengan kawasan budi daya lainnya, kawasan lindung, dan alur migrasi biota Laut		
10. pengembangan kawasan budi daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan hutan produksi b. mengembangkan kawasan pariwisata yang kreatif di Wilayah darat, Perairan Pesisir, dan Pulau Kecil c. mengembangkan KSP		
11. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana	a. mengembangkan jalur evakuasi bencana, Ruang evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana b. memberdayakan kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana		
12. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan		

Tujuan : Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	keamanan untuk menjaga fungsinya c. mengembangkan kawasan lindungdan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan		

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, diolah

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Tabel 3.13

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis KLHS berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Jadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perizinan berbasis lahan b. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup c. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan efisiensi pemanfaatan SDA d. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan penurunan emisi GRK e. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait keanekaragaman	- Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup - Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur - Kurang optimalnya kinerja kelembagaan di bidang lingkungan hidup. - Belum komprehensifnya sistem informasi dan dokumen lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat.	- Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. - Kurang jelasnya pembagian tugas & wewenang dalam menanggulangi pencemaran. - Belum ditetapkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. - Belum optimalnya pengembangan kerjasama dan kemitraan	- Terbitnya Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatnya potensi investasi di daerah. - Meningkatnya koordinasi antar sektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

No	Hasil KLHS terkait tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hayati	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

4. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap isu-isu pembangunan Provinsi Kalimantan Timur serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Peningkatan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur. Dengan segala kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah dengan tutupan hutan yang luas beserta keanekaragaman biotanya maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran ini juga merupakan pemandu arah bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaanya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya sekaligus untuk mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPD

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanan bidang lingkungan hidup.

Transformasi pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dari semula berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dan hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan dan social dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya daerah berbasis agroindustri dan energy ramah lingkungan melalui ekonomi hijau maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi hal yang niscaya. Membangun keterkaitan hulu dan hilir dari berbagai komoditas unggulan dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis agroindustri serta penggunaan dan penerapan energy ramah lingkungan sangat dibutuhkan saat ini, termasuk pula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian, memiliki peran sangat sentral bagi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berperspektif perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur (beserta seluruh perangkat daerah) dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Perbaikan dalam layanan bidang lingkungan hidup secara serempak bersama seluruh Perangkat Daerah pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri karena menjembatani partisipasi masyarakat (jika direspons dengan baik) melalui akses, inovasi, dan kolaborasi semua Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berpijak pada pemahaman tersebut, secara teknis kerangka

logis layanan pada dasarnya dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu: (1) pelayanan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas layanan publik; dan (2) pelayanan terhadap masyarakat dimana lingkungan dan segala kenakeragaman hayatinya merupakan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang apabila tidak dijaga, dilindungi dan dilestarikan akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh seluruh makhluk hidup sekarang dan masa mendatang.

Adapun kerangka logis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersebut merujuk pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 khususnya untuk aspek lingkungan hidup dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Aspek Lingkungan Hidup

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,46	75,00	75,10	75,20
	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	70,68	31,05	31,89	32,03
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,02	53,52	53,62	53,72
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,45	81,95	82,05	82,15
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,59	88,17	88,27	88,37
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	81,85	82,35	82,45	82,55
Tujuan 4: Mewujudkan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,70 (B)	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,57	85,0	85,5	86,0
	Sistem Merit	Poin	263,5	270	275	280
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,11	2,9	3,0	3,1
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3 Skor 3,476	3 Skor 3,726	4 Skor 4,000

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran aspek lingkungan yang lebih spesifik sekaligus penyelarasannya dengan tujuan dan sasaran RPD.

Lebih lengkap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan indikator Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi 2022	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	indeks	53,02	53,52	53,62	53,72	53,72
	Indeks Kualitas Air Laut	indeks	81,45	81,95	82,05	82,15	82,15
	Indeks Kualitas Udara	indeks	87,59	88,17	88,27	88,37	88,37
	Indeks Kualitas Lahan	indeks	81,85	82,35	82,45	82,55	82,55
Sasaran 1 :	Persentase penurunan	%	4	5	6	7	7

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi 2022	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	beban pencemaran dan kerusakan lingkungan						
Sasaran 2 : Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi lingkup kewenangan propinsi	%	96,44	97	98	98	98
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	indeks	82,57	85,0	85,5	86,0	86,0
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	poin	67,47 (B)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	74,00 (BB)	74,00 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	82,13	84,0	84,5	85,0	85,0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun strategi dan kebijakan sebagai langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026).

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dengan memerhatikan permasalahan dan isu strategis serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau yang rendah emisi.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		2. Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) di luar kawasan hutan dan Taman Keanekaragaman hayati
		4. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
		7. Peningkatan pengelolaan persampahan	Penanganan Sampah darat dan laut
	2. Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	8. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Pengelolaan administrasi barang milik daerah 4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 5. Pengelolaan Administrasi Umum 6. Pengadaan Barang Milik Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					50.812.247.000		51.812.247.000		58.827.556.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					9.062.247.305		9.362.247.305		13.078.109.750	
	Indeks Pencemaran	indeks	3,06	≤5 (Terce mar Ringan)	6.562.247.305	≤5 (Terce mar Ringan)	6.662.247.305	≤5 (Terce mar Ringan)	10.178.109.750	≤5 (Terce mar Ringan)
	Indeks Standar Pencemar Udara	indeks	49	48 (baik)	2.500.000.000	47 (baik)	2.700.000.000	46 (baik)	2.900.000.000	46 (baik)
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	6.428.109.750	100	6.928.109.750	100	9.128.109.750	100
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanak an terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	186	216	2.400.000.000	216	2.800.000.000	216	3.800.000.000	648

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	dokumen	2	2	4.028.109.750	2	4.128.109.750	2	5.328.109.750	6
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	%	81	81	1.400.000.000	81	1.484.137.555	83	2.200.000.000	83
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	NA	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6
Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	255	275	1.200.000.000	275	1.284.137.555	300	2.000.000.000	300

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	%	NA	40	1.234.137.555	45	950.000.000	50	1.750.000.000	50
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	784.137.555	3	500.000.000	3	1.300.000.000	9
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	9	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	27
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan	%	100	100	2.000.000.000	100	2.400.000.000	100	3.250.000.000	100

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pembangunan dan wilayah									
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	%	100	100	1.225.018.000	100	1.000.000.000	100	1.550.000.000	100
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	dokumen	1	1	315.018.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	dokumen	1	1	231.663.500	1	500.000.000	1	1.050.000.000	1
Sub Kegiatan Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	dokumen	1	1	678.336.500	0	-	0	-	1
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan	%	100	100	774.982.000	100	1.400.000.000	100	1.700.000.000	100

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Lingkungan Hidup Strategis									
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	1	653.982.000	1	950.000.000	1	1.150.000.000	1
Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	1	1	121.000.000	1	450.000.000	1	550.000.000	1
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	Ha	532,134	532	850.000.000	627	1.150.000.000	1.159	2.300.000.000	1.159
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi	%	NA	30	850.000.000	60	1.150.000.000	100	2.300.000.000	4

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	keanekaragaman hayati									
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	500.000.000	1
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	60	60	200.000.000	60	200.000.000	60	550.000.000	180
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	0	0	-	1	200.000.00	1	750.000.00	1
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAY	persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh	%	51,01	51,5	700.000.000	52,0	800.000.000	52,5	1.100.000.000	52,5

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
A DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)									
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	usaha	23	24	700.000.000	25	800.000.000	26	1.100.000.000	26
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	4	300.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	12
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Dokumen	2	7	400.000.000	7	450.000.000	7	700.000.000	21

Program/Ke giatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satua n	Kon disi Awa 1	2024		2025		2026		Kondi si Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	dengan Pemerintah pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya									
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	%	36,4	40	2.730.000.000	55	2.850.000.000	75	3.300.000.000	75
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan	%	62,5	65,0	2.730.000.000	67,5	2.850.000.000	70,0	3.300.000.000	70,0

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	oleh Pemerintah Provinsi									
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	34	48	800.000.000	46	800.000.000	52	1.200.000.000	146
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	25	35	150.000.000	35	150.000.000	35	200.000.000	35
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	82	125	1.780.000.000	130	1.900.000.000	140	1.900.000.000	140

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/ lembaga yang meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	kelompok/ lembaga	100	110	2.000.000.000	120	2.000.000.000	130	2.000.000.000	130
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	%	45	47,5	2.000.000.000	50	2.000.000.000	55	2.000.000.000	55
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	53	133	2.000.000.000	135	2.000.000.000	140	2.000.000.000	408

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	%	84	84,42	850.000.000	84,42	850.000.000	84,42	1.100.000.000	84,42
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	%	10	15	850.000.000	20	850.000.000	25	1.100.000.000	25
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	46	60	850.000.000	65	850.000.000	70	1.100.000.000	195

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	100	100	2.050.000.000	100	2.050.000.000	100	2.150.000.000	100
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	%	100	100	2.050.000.000	100	2.050.000.000	100	2.150.000.000	100
Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	10	15	350.000.000	15	350.000.000	115	350.000.000	45
Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	11	8	600.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	24

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
kewenangan Provinsi										
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Pengaduan	15	20	1.100.000.000	20	1.100.000.000	20	1.200.000.000	60
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	%	87,02	88	2.449.999.695	89	2.549.999.695	90	2.549.999.695	90
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	%	69,49	71	2.449.999.695	70	2.549.999.695	70	2.549.999.695	70
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di	Dokumen	3	3	2.149.999.695	3	2.249.999.695	3	2.249.999.695	9

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
sampah di kabupaten/kota	kabupaten/kota									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					28.120.000.000		27.800.000.000		27.999.446.555	
	Indeks Kualitas Layanan Keskretariat an	indeks	87,76	88,0	19.420.000.000	88,5	19.300.000.000	89,0	19.499.446.555	89,0
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	8.700.000.000	100	8.500.000.000	100	8.500.000.000	100
Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	1.500.000.000	100	1.100.000.000	100	1.199.446.555	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	500.000.000	3	600.000.000	2	600.000.000	7
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	6
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	dokumen	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	4	600.000.000	4	100.000.000	4	199.446.555	12
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	%	100	100	15.700.000.000	100	16.200.000.000	100	16.600.000.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	826	831	14.500.000.000	831	15.000.000.000	831	15.400.000.000	2.493
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	dokumen	1	1	498.430.000	1	498.430.000	1	498.430.000	3

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
n Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN									
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	dokumen	2	2	636.120.000	2	636.120.000	2	636.120.000	6
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	3
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	60.750.000	2	60.750.000	2	60,750.000	6
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	6

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	%	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	110	230	200.000.000	230	200.000.000	230	200.000.000	690

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kelengkapannya										
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3
Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	60
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	100	100	2.700.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6
Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	paket	4	5	670.000.000	4	470.000.000	4	470.000.000	13

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan									
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	12
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	30
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	98	100	1.745.000.000	100	1.745.000.000	100	1.745.000.000	300
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	100	-	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit	31	-	-	2	100.000.000	1	50.000.000	3

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Atau Lapangan	yang disediakan									
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	10	-	-	5	100.000.000	7	150.000.000	20
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	%	100	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	36
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	4.250.000.000	12	4.250.000.000	12	4.250.000.000	36
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	62,62	63	1.470.000.000	67	1.050.000.000	71	750.000.000	71

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan	30	28	380.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6	54	200.000.000	54	250.000.000	54	300.000.000	54
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	70.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	820.000.000	1	350.000.000	-	-	2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi. Selain itu, system tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaga sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indicator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah

sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat tercapai. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang. Indikator dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur bidang lingkungan. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024–2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2026
Indeks Kualitas Air	Indeks	Rumus $IP_j = \text{Indeks pencemaran bagi peruntukkan } j$ $C_i = \text{konsentrasi parameter } i \text{ (hasil pengukuran)}$ $L_j = \text{Baku mutu parameter } i \text{ bagi peruntukkan } j$ $M = \text{maksimum, } A = \text{average (rata-rata)}$ $IP_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{L_j} \right)^2}{M}}$ Mentransformasikan nilai Indeks Pencemaran (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase Status Mutu Air yang didapatinya. Pembobotan : a) Memenuhi baku mutu =70 b) Tercemar ringan = 50 c) Tercemar sedang = 30 d) Tercemar berat = 10	53,52	53,62	53,72
Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	Rumus $IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i, n : Jumlah parameter kualitas air laut	81,95	82,05	82,15

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Icu - 0,1) \right) \quad Icu = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\%$	88,17	88,27	88,37
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan}$ Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal)}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal)}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLB_Bakar)}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar)}{Luas\ FBEG}$	82,35	82,45	82,55
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	Perencanaan Kinerja 30% + Pengukuran Kinerja 25% + Pelaporan Kinerja 15% + Evaluasi Kinerja 10% + Capaian Kinerja 20%	78,50	79,30	80,01 (A)

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2026
Perangkat Daerah			(BB)	(BB)	
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	85,0	85,5	86,0

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi	indeks	$IKLH \text{ Provinsi} = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	75,00	75,10	75,20
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	%	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	97	98	98

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2026
Pemerintah Daerah Provinsi					
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan = $\frac{(\text{Persentase penurunan beban pencemaran} + \text{Persentase penurunan kerusakan lingkungan})}{2}$	5	6	7
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi lingkup kewenangan propinsi	%	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi $\frac{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	97	98	98

Tabel 7.2
Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Timur

Tahun 2024-2026

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	Poin	Indeks Pencemaran Air melalui persamaan: $Ipj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2M + (Ci/Lij)^2R}{2}}$ Dimana Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IPj : Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ : (Ci/Lij, C2/L2j,...) (Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)Rata-rata : nilai rata-rata dari Cij/Lij
		Indeks Standar Pencemar Udara	Poin	Penyampaian hasil ISPU dari stasiun pengukur. Hasil pengukuran 24 jam rata-rata konsentrasi udara

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
				nyata ambien untuk masing-masing parameter.
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	$\frac{\text{Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang direncanakan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Adaptasi Perubahan Iklim				
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	%	$\frac{\text{Jumlah usahad an/atau kegiatan yang memenuhi baku air limbah dan emisi}}{\text{Jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dipantau kinerja pengendalian pencemaran air dan udaran}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	laporan	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	lokasi	
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	%	$\frac{\text{Jumlah Luas kerusakan lingkungan base line} - \text{Jumlah Luas kerusakan lingkungan tahun berjalan}}{\text{Jumlah beban pencemaran base line}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi lintas kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Termuatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan	%	Jumlah kebijakan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup yang direkomendasi

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
		pembangunan dan wilayah		kan masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah ----- ----- x 100% Jumlah kebijakan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup yang dibuat/disusun
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Strategis yang direncanakan	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	%	Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH ----- ----- x 100% Jumlah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup terhadap dokumen RPPLH
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Provinsi	Tersusunnya dokumen RPPLH Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	dokumen	
Sub Kegiatan Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Terlaksananya Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	dokumen	
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersusunnya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang wajib disusun}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	dokumen	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA	Terlaksananya pengelolaan kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman	Ha	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
MAN HAYATI (KEHATI)	hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan	hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola		
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	%	$\frac{\text{Luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang teridentifikasi}}{\text{Luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang dikelola}} \times 100 \%$
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang dikelola	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terlaksanannya pengendalian B3 dan limbah B3	persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	%	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah}}{\text{Jumlah total limbah B3 yang dihasilkan}} \times 100\%$
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksanannya pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	Usaha	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan/atau Penimbunan	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	dokumen	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan usaha yang wajib diawasi}} \times 100\%$
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	%	$\frac{\text{Jumlah sanksi administratif yang dicabut}}{\text{Jumlah sanksi administratif yang ditetapkan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	dokumen	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas	Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat	orang	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Lingkungan Hidup		menjadi Fungsional PPLHD		
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksanannya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran masyarakat/ lembaga untuk menjaga lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	kelompok/ lembaga	Kelompok masyarakat/ lembaga yang mengalami peningkatan jenjang/kelas sertifikat/ penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksanannya bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga/ lembaga terkait lingkungan hidup	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	%	Jumlah Pengusulan Tahun Berjalan – Jumlah Pengusulan Data Tahun 2022 (149 usulan / baseline) ----- ----- x 100%

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
				Jumlah Pengusulan Tahun 2022 (149 usulan / baseline)
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan	%	$\frac{\text{Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan}}{\text{Jumlah masyarakat / lembaga pendidikan/ dunia usaha yang telah dilakukan pembinaan}} \times 100\%$
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam	entitas	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Penghargaan Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Penerima Penghargaan Tahun 2022}}{\text{Jumlah penghargaan / baseline}}$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
		rangka PPLH di tingkat Provinsi		$\frac{\text{Jumlah Penerima Penghargaan Tahun 2022 (47 penghargaan / baseline)}}{\text{100\%}} \times$
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselesaikannya pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan}}{\text{100\%}} \times$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
				kewenangan provinsi yang diterima/terregistrasi
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Ditindaklanjutinya pengaduan di bidang PPLH	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan/atau sengketa yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan dan/atau sengketa yang diterima/terregistrasi}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	
Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Terlaksanannya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang	pengaduan	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Hidup tingkat Provinsi		ditindaklanjuti/ditangani		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksanannya pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tercapainya penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Terlaksanannya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	dokumen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksanannya layanan kesekretariatan dan tindak lanjut keluhan pengguna layanan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	poin	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan, adalah komposit dari : 1) Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (bobot 40%) 2) Persentase realisasi anggaran bobot 30%) 3) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
				pelatihan (bobot 25%) 4) Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (bobot 5%)
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keluhan pengguna layanan yang diterima}} \times 100\%$
Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan yang wajib disusun}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanyanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penatausahaan keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Laporan keuangan yang diselesaikan}}{\text{jumlah Laporan keuangan yang wajib disusun}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Terlaksannya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	
Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang telah ditatausahakan}}{\text{Jumlah barang milik daerah yang wajib ditatausahakan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dokumen	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan kepegawaian	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian}}{\text{Jumlah Pegawai Seluruh}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	
Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	$\frac{\text{Jumlah peralatan, perlengkapan, barang cetakan, dan bacaan yang disediakan}}{\text{Jumlah seluruh}} \times 100\%$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
				$\frac{\text{Jumlah peralatan, perlengkapan, barang cetakan, dan bacaan yang direncanakan sesuai RUP}}{\text{-----}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersediannya barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang diadakan}}{\text{-----}} \times 100\%$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Pemerintah Daerah				Jumlah barang milik daerah yang direncanakan sesuai RUP
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan jasa kantor	Presentase pelayanan jasa kantor	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan jasa kantor yang disediakan}}{\text{Jumlah pelayanan jasa kantor yang wajib disediakan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total barang milik daerah}} \times 100\%$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas.

8.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun kedepan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap

pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPD tahun 2024-2026 ditetapkan dalam peraturan daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD.

Setelah rancangan akhir Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun rancangan rencana kerja.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;

2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Lingkungan Hidup tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup; dan
6. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Dinas Lingkungan Hidup periode berikutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGANHIDUP
PROVINSIKALIMANTANTIMUR

E.A. RAFIDDIN RIZAL

Pembina Utama Madya

NIP. 196503091996031004

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH DESA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renstra PD mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen Perencanaan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra dan juga perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Daerah Prov. Kaltim 2024 - 2026, memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Resntra PD, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs), memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

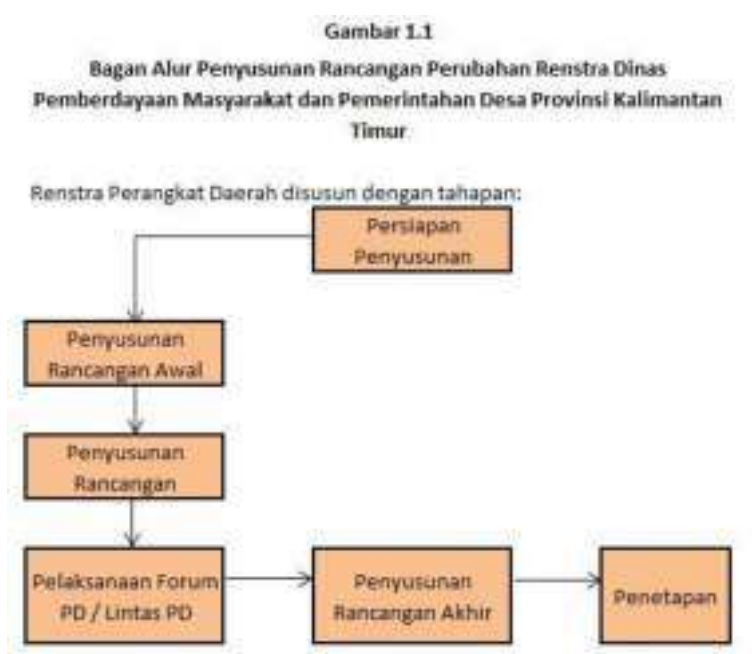
Renstra merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya. Renstra PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renstra DPMPD Prov. Kaltim sampai tahun 2026 tetap diarahkan untuk mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun selama 3 (tiga) Tahun kedepan dengan status mandiri. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah DPMPD Prov. Kaltim mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menerjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat digambarkan dalam Bagan Alur penyusunan Rancangan Akhir Rensrta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim Tahun 2024 - 2026 didasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 - 2026 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk tiga tahun mendatang, searah dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 peraturan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan

Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara Khusus Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ini mempunyai tujuan :

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program lima tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang :
Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta; Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang :
Tugas, Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan; Kinerja Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan tentang :
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Penentuan Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tentang :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan tentang :
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rumusan tentang :
Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (yang mengacu kepada peraturan terbaru)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan tentang :

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang menunjang RDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026.

**BAB
VII
PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Secara khusus tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
- Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan.
- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan sosial budaya masyarakat.

- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan;
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - Seksi Pembangunan Desa;
 - Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.
5. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan

2.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 74 pegawai yang terdiri dari :

- ASN : 37 Orang

- Non ASN : 44 Orang

Tabel 2.2.1
Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan
Gender Tahun 2022

No		Jumlah PNS	
1	Menurut Pangkat/Golongan		Jumlah (orang)
	a.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	b.	Pembina Tingkat I (IV/b)	4
	c.	Pembina (IV/a)	6
	d.	Penata Tingkat I (III/d)	10
	e.	Penata (III/c)	1
	f.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
	g.	Penata Muda (III/a)	1
	h.	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
	i.	Pengatur (II/c)	0
	j.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
	k.	Pengatur Muda (II/a)	1
	l.	Juru Tk.I (I/d)	0
		Jumlah	37
2	Menurut Tingkat Pendidikan		Jumlah (orang)
	a.	Doktor (S3)	0
	b.	Pasca Sarjana (S2)	11
	c.	Sarjana (S1)	20
	d.	Diploma (D3)	1
	e.	SLTA	5
	f.	SLTP	0
	g.	SD	0
		Jumlah	37
3	Menurut Gender		Jumlah (orang)
	a.	Laki-Laki	17
	b.	Perempuan	20
		Jumlah	37

Tabel 2.2.1
Data ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan
Gender Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S2	S1	D1-D3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kasubbag	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Jafung	6	6	5	7	-	-	4	8	-	-	-	-
Jlh PNS NON-	8	9	-	13	4	-	-	11	1	5	-	-
STRUKTURAL												
Jlh Honor/PTT	26	18	-	-	-	-	2	27	3	11	2	-
Jlh PNS + Non PNS	43	38	11	22	4	0	13	47	4	16	2	-

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri dan lingkungannya.

- Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 1. Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan.
 2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
 3. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa.
 4. Pengelolaan keuangan Desa/Kampung (ADD/ADK), Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan.
 5. Peraturan desa/kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
 6. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa.
 7. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
 8. Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.
 9. Sosialisasi Regulasi Tentang Pemerintahan Desa.
 10. Lomba Desa dan Kelurahan.
 11. Fasilitasi Penataan Kode Desa dan Kelurahan.
 12. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
 13. Fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa/kampung dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

14. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan desa/kampung dan kelurahan, serta data pengelolaan keuangan desa/kampung.
- Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
 1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
 3. Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
 4. Mengumpulkan dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat perdesaan sesuai dengan kewenangan lokal.
 5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sektor masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
 6. Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa.
 7. Melaksanakan rekrutmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa.
 8. Melakukan kajian terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis)
 9. Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 10. Melakukan pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan.
 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan.
 12. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan.
 13. Melakukan pembinaan dan pengembangan Informasi desa dan kelurahan.
 14. Melakukan Pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan data profil

desa/kampung dan kelurahan, sistem informasi posyandu, data informasi perkembangan desa.

15. Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 1. Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
 4. Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
 5. Fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, penyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS).
 6. Pembinaan dan peningkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu.
 7. Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 8. Memfasilitasi pelaksanaan PMT-AS dan pelaksanaan PMT-AS dan penyelenggaraan perlombaan pelaksana PMT-AS terbaik.
 9. Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat.
 10. Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan PKK.
 11. Memberikan Pembinaan dan Fasilitasi Kampung KB.
 12. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi.
 13. Memberikan pembinaan dan fasilitasi pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian

adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

14. Memberikan fasilitasi pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG).
- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 1. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
 2. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan usaha ekonomi masyarakat.
 3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan TTG.
 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan.
 5. Membuat pedoman pelaksanaan program/kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG.
 6. Memperkuat pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan (pertanian, aquakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat.
 7. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa.
 8. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 9. Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan.
 10. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil.
 11. Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.
 12. Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan.
 13. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.

14. Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes).
15. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).
16. Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui gelar Teknologi Tepat Guna.
17. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
18. Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna.
19. Fasilitasi Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Sekretariat terdiri dari :

Secara umum mempunyai kinerja pelayanan :

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
 2. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 3. Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 4. Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Subbagian Umum mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

3. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
 2. Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.

Tabel 2.3.1
Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur 2021 - 2023

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD (%)		Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2021	2022	2023	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat		Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	30	35	30	35	-	
			Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30	30	30	30	-	

		Desa yang telah melaksanakan Penataan	7	7	7	7	-	
		Desa Berkembang	30	30	27	38	-	
		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100%	100	86	87	-	

Tabel 2.3.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD						
				2021		2022		2023	
				Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi (Rp)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				19.898.636.000	-	23.300.000.000	-	21.000.000.000
02:13:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	-	100%	14.496.914.174	100%	16.187.988.237	100%	14.474.499.468

02:13:04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	Desa	30 Desa	1.699.649.500	35 Desa	2.698.564.625	45 Desa	1.793.722.922
02:13:05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal dan Sangat tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	Desa	30 Desa	3.019.466.000	30 Desa	3.046.866.625	30 Desa	3.186.589.573
02:13:02	Program Penataan Desa	Kabupaten yang telah	Kabupaten	7 Kab	83.700.000	7 Kab	85.168.000	7 Kab	100.000.000

		melaksanakan penataan desa							
02:13:02	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa Berkembang	Desa	30 Desa	598.906.326	30 Desa	1.281.412.513	30 Desa	1.445.188.037

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026, dimana penetapan indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari Renstra Kab/Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan PD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kab/Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, ketidakberadaan organisasi perangkat daerah di Kota sehingga Tugas pokok dan fungsi PD Pemberdayaan masyarakat dan desa diampui oleh bagian lain di pemerintah daerah kota di Kalimantan Timur. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

b. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dengan strategi peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan;
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapat desa tertinggal di Kalimantan Timur	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui BUMDes
		Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik	Masih rendahnya Kompetensi SDM desa dan anggota BPD, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kemasyarakatan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemsayarakat desa dan lembaga adat
		Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMDes
			Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkatdaerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih tertuang dalam RPJPD periode 2005 - 2025 dan RPJMD 2019 - 2023 sebagai berikut yaitu: "**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**".

Berdaulat :

1. Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Kemudian sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur terkait erat dengan tujuan “**MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS**” (core Bisnis DPMPD Prov. Kaltim), dan dengan sasaran “**MENINGKATNYA KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN**”

Tabel 3.2.1

Telaahan Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana pembangunan Daerah 2024 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal		Target RPD Kaltim 2024 - 2026		
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989	n/a	0,94	0,917	0,894
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226	n/a	0,215	0,209	0,204
Terwujudnya Birorasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	n/a	85	85,50	86
Terwujudnya birokrasi yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	78,10	n/a	78,50	79,30	80,01
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal		Target RPD Kaltim 2024 - 2026		
		2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024 (Rp)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	19.508.492.596	-	13.403.647.800	15.340.888.130	16.926.376.943
		0,732	-	0,7622	0,7778	0,7937

Meningkatkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang profesional	Indeks Kepuasan masyarakat	87	n/a	88	89	90
Mewujudkan birorasi yang akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	68,47	n/a	68,75	69,00	69,25

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk

dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Isu permasalahan nasional yang bisa berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat antara lain sebagian besar kantong kemiskinan terletak di wilayah pedesaan. Ketimpangan pembangunan antar provinsi. Terjadi gap yang lebar antar desa, dimana desa-desa di kawasan timur menyumbang proporsi kemiskinan yang begitu besar. Jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di pulau Papua, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Bali. Permasalahan lain adalah Sebaran penduduk, desa-kota. Urbanisasi tinggi dan kecenderungan meningkat tajam hingga tahun 2035. Relasi desa-kota dalam mata rantai produksi tidak seimbang. Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan pasar bahan olahan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan serta pembangunan desa dan pembangunan berbasis kawasan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Timur dari yang semula bergantung pada ekonomi berbasis migas dan pertambangan (*unrenewable*) menuju kepada industri berbasis pertanian (*renewable*). Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan dan daya dukung lingkungan.

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan program/kegiatan, maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan provinsi untuk lebih mendukung tujuan pembangunan Nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah provinsi dengan dukungan penataan ruang.
2. Mengembangkan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian yang dapat diperbaharui dan sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah.
3. Mewujudkan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat perdesaan.

4. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kalimantan Timur, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi.

Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur** sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, Kalimantan Timur masih menyisakan 17 desa tertinggal yang harus di tuntaskan.
- Konsep One Village One Product (OVOP) adalah konsep yang sedang berkembang di negara-negara ASEAN, dimana setiap desa menetapkan satu produk unggulan yang memiliki keunikan dan daya saing di pasar domesik dan internasional.
- Masih banyak desa yang belum memanfaatkan teknologi informasi (website dan media sosial) untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

- Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi <http://prodeskel.kemendagri.go.id/>, masih terdapat 171 desa dan kelurahan di provinsi kalimantan timur yang belum pernah melakukan input data prodeskel.
- Masih banyak desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi, jaringan internet dan blankspot di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terhambat dalam pengisian data-data pembangunan.
- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan desa yang selalu dinamis
- kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa
- sering terjadi konflik terkait batas antar desa
- rentang kendali pelayanan kepada masyarakat di desa menjadi tidak maksimal
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa
- belum optimalnya peningkatan kapasitas bumdes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa
- Belum optimalnya pendaftaran badan hukum Bumdes di desa berkembang dan tertinggal
- Belum optimalnya masyarakat miskin ekstrim yang dilibatkan dalam usaha Bumdes
- Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan bukan kayu di Desa yang memiliki tutupan hutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan.

TUJUAN

Dalam mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan Startegis yaitu

- Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
- Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional
- Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yaitu

- Meningkatkan Kemandiran Ekonomi Desa
- Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional
- Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel

Secara rinci pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya sesuai disajikan dalam Tabel 4.1.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	REALISASI		TARGET RENSTRA 2024 - 2026		
1	TUJUAN : Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin (Core Bisnis DPMPD Kaltim)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,989	n/a	0,94	0,917	0,9
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,226	n/a	0,215	0,209	0,2
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	n/a	85	85,50	86
3	Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,10	n/a	78,50	79,30	80,01
1	SASARAN : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Indeks Desa Membangun	0,732	-	0,7622	0,7778	0,7937
2	Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	n/a	88	89	90
3	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68,47	n/a	68,75	69,00	69,25

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

INDIKATOR	2024	2025	2026
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,94	0,917	0,894
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,215	0,209	0,204

INDIKATOR	2024	2025	2026
Indeks Desa Membangun	0,7622	0,7778	0,7937

TUJUAN
Meningkatnya
Keberdayaan Ekonomi
Perdesaan

SASARAN
Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Desa

RDP KALTIM TAHUN 2024-2026

Peningkatan rata rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan

RENSTRA 2024 2026

FORMULASI : Perhitungan 3 Komposit dalam Indeks Desa Membangun

PROGRAM 1			
PROGRAM PENATAAN DESA			
INDIKATOR	2024	2025	2026
persentase desa yang difasilitasi penataan desahnya	1,31	2,14	5,11

PROGRAM 2			
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Persentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38	2,97	3,57

PROGRAM 3			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25	35	45

PROGRAM 4			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	2,75	3,25	3,75

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026



Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026



Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

PROGRAM 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

KEGIATAN
Pemberdayaan Lembaga
keMasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Provinsi serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama Berada di Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Desa dan Kelurahan yang mampu menyediakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	25	27	30

Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1

Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	30	35	40

Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30	35	40

Facilitasi Penyediaan Sarana & Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan	3	4	5

Facilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1	1	1

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Dokumen Hasil identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	1	1

Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	1	1	1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	30	35	40

Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1

Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	2024	2025	2026
INDIKATOR			
Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	1	1

Keterangan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

PROGRAM PENUNJANG (SEKRETARIAT)



KEGIATAN			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3

KEGIATAN			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35	35	35

Cascading Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Tahun 2024 - 2026

KEGIATAN			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	1	1	1

KEGIATAN			
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25	25	25

KEGIATAN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150	150	150

KEGIATAN			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	3	3

KEGIATAN			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	2

KEGIATAN			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
INDIKATOR	2024	2025	2026
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (Strength-Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategis adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Fasilitas Penataan Desa
- Peningkatan Kerjasama Antar Desa
- Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
- Meningkatkan Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan			
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin;			
yang dimaksud adalah meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin menuju diatas garis kemiskinan. Memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi melalui intervensi program/kegiatan pemerintah dalam mendorong usaha ekonomi kerakyatan untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan ekstrim di daerah melalui usaha-usaha ekonomi seperti usaha pertanian dalam arti luas, pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa	Peningkatan Fasilitasi Penataan Desa	Meningkatkan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan. Pengisian Jabatan. Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
		Peningkatan Kerjasama Antar Desa	Meningkatkan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

			Pemerintahan Desa
		Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Professional	Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang Profesional	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel	Mewujudkan Birokrasi yang akuntabel		

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dijabarkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

6.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

B Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
11. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
12. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah

c. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
14. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

15. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
16. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
18. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
19. Monitoring. Evaluasi. Dan Penilaian Kinerja Pegawai
20. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
29. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel
32. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
34. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
35. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
37. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

42. Identifikasi. Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
43. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
44. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
45. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
46. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
47. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
48. Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
49. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
50. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
51. Fasilitasi Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
52. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
53. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
54. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
55. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
56. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
57. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
58. Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
59. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

60. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
61. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
62. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
63. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
64. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
65. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga. Warga. Dan Kelompok Masyarakat
66. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 6.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025		2026		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR										37.521.029.000	40.396.976.000		47.250.622.000	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	Indeks	82	21.300.469.200	84	21.589.175.870	86	22.851.089.429	
						Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti	Presentase	100		100		100		
X	XX	1	1.01		Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.282.251.000	3	1.084.000.000	3	1.100.000.485	
X	XX	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
X	XX	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
X	XX	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	

X	XX	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000
X	XX	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	582.251.000	1	434.000.000	1	450.000.485
X	XX	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	ASN	35	9.854.968.200	35	9.854.968.200	35	9.854.968.200
X	XX	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	8.852.980.000	35	8.852.980.000	35	8.852.980.000
X	XX	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	357.360.000	1	357.360.000	1	357.360.000
X	XX	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	62.000.000	1	62.000.000	1	62.000.000
X	XX	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
X	XX	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000
X	XX	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
X	XX	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	270.998.200	18	270.998.200	18	270.998.200
X	XX	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	6.630.000	1	6.630.000	1	6.630.000
X	XX	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	1	77.500.000	1	85.250.000	1	93.775.000

X	XX	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000
X	XX	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	17.500.000	1	19.250.000	1	21.175.000
X	XX	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000
X	XX	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	25	891.500.000	25	936.650.000	25	1.030.315.000
X	XX	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	66.500.000	2	73.150.000	2	80.465.000
X	XX	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	600.000.000	1	621.500.000	1	683.650.000
X	XX	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	150.000.000	1	159.500.000	1	175.450.000
X	XX	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	75.000.000	25	82.500.000	25	90.750.000
X	XX	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	Buah	150	3.149.445.000	150	3.173.500.000	150	3.490.850.000
X	XX	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Lomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	65.000.000	3	71.500.000	3	78.650.000
X	XX	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	120.000.000	3	132.000.000	3	145.200.000
X	XX	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	135.000.000	3	148.500.000	3	163.350.000
X	XX	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	700.000.000	5	715.000.000	5	786.500.000
X	XX	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	150.000.000	3	165.000.000	3	181.500.000
X	XX	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.864.445.000	1	1.815.000.000	1	1.996.500.000
X	XX	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000

X	XX	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000
X	XX	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	607.409.354	3	528.672.459	3	762.432.012
X	XX	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	28.427.177	1	31.269.895	1	34.396.884
X	XX	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	28.427.177	1	31.269.895	1	34.396.884
X	XX	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000
X	XX	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	200.555.000	15	81.132.669	15	270.138.244
X	XX	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	3.527.395.646	2	3.880.135.211	2	4.268.148.732
X	XX	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000
X	XX	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	560.000.000	1	616.000.000	1	677.600.000
X	XX	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000
X	XX	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.461.395.646	1	2.707.535.211	1	2.978.288.732
X	XX	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	unit	20	1.910.000.000	20	2.046.000.000	20	2.250.600.000
X	XX	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	120.000.000	6	132.000.000	6	145.200.000

[illegible]

2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	%	2,38	2.916.912.000	2,97	3.265.000.000	3,57	4.574.104.063
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Kab/Kota	10	2.916.912.000	10	3.265.000.000	10	4.574.104.063
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.235.912.000	3	2.515.900.000	3	3.750.094.063
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	1	91.000.000	1	100.100.000	1	110.110.000
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	590.000.000	1	649.000.000	1	713.900.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	Presentase	25	6.156.522.300	35	7.052.650.080	45	9.112.915.088
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal.	Desa	212	6.156.522.300	296	7.052.650.080	378	9.112.915.088
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	1	54.772.800	1	60.250.080	1	66.275.088
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	2	1.517.749.500	2	1.850.000.000	2	3.400.000.000

2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	700.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	167	75.000.000	185	82.500.000	205	90.750.000
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	45	700.000.000	50	770.000.000	55	847.000.000
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	45	425.000.000	50	467.500.000	55	514.250.000
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	3	1.234.000.000	3	1.457.400.000	3	1.593.140.000
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	700.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	%	2,75	6.617.125.500	3,25	7.807.150.050	3,75	9.861.213.420

2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	Desa	23	6.617.125.500	27	7.807.150.050	30	9.861.213.420
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1.610.083.000	1	2.103.003.300	1	3.720.251.995
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	787.509.000	1	866.259.900	1	952.885.890
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna).Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	30	342.540.000	35	376.794.000	40	414.473.400
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. Dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	3	500.000.000	4	550.000.000	5	605.000.000

2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1.036.000.000	1	1.336.000.000	1	1.336.000.000
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	47.000.000	1	51.700.000	1	56.870.000
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	2.203.993.500	1	2.424.392.850	1	2.666.832.135
2	13	05	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, Dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, Dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30	30.000.000	35	33.000.000	40	36.300.000
2	13	05	1.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	30	30.000.000	35	33.000.000	40	36.300.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RDP Tahun 2024 – 2026

No.	Sasaran/Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa				
	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	0,7622	0,7778	0,7937
2	Meningkatkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan ASN yang profesional				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	89	90
3	Mewujudkan birokrasi yang akuntabel				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68,47	68,75	69,00	69,25

Tabel 7.1.2

Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Untuk Kepala DPMPD Kaltim)

No.	Indikator	Kondisi Awal RDP (2022)	Target Sasaran		
			2024	2025	2026
1	persentase desa yang difasilitasi penataan desa nya	1,31	1,31	2,14	5,11
2.	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	1,78	2,38	2,97	3,57
3.	Presentasi Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal.	10	25	35	45
4.	Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	1,92	2,75	3,25	3,75
5	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	77	82	84	86
6	Presentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 Tahun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otononom Baru.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Samarinda, Juli 2023
Kepala,

Anwar Sanusi, S.Pd.,M.Pd
Pembina atama Muda
NIP 19650906 198903 1 010

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor.

Kondisi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur saat masih belum stabil dan saat ini diperparah oleh dampak ekonomi global yang diprediksi akan mengalami resesi global, kenaikan harga BBM sehingga angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan lemahnya kemampuan berkompetisi dalam skala global perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga secara bertahap dan sistematis dapat ditangani. Kegiatan pembangunan bidang perhubungan mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong upaya pemerataan dan laju pembangunan daerah.

Upaya menggali potensi sumber daya yang ada di berbagai daerah, pengembangan sentra-sentra produksi dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar tentunya harus didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi wilayah menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, termasuk bidang perhubungan harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan, sehingga akan mampu membangun sinergi bagi upaya memacu laju pembangunan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Provinsi harus mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan program pembangunan, yang kemudian dijabarkan pada masing-masing sektor dan atau lembaga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Secara yuridis formal, integrasi RENSTRA Pembangunan dalam skala Nasional dan

Daerah ini telah tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, disusun mengacu pada keselarasan program-program prioritas yang mendukung upaya penyelesaian program strategis nasional yang termuat di Renstra Kementerian Perhubungan RI dan keterkaitan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat konsep, kebijakan dan program pembangunan bidang Perhubungan.

Mengingat kegiatan pembangunan bidang perhubungan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA harus memberi ruang yang cukup bagi partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kemampuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat tetap terjaga.

Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 86 Tahun 2017, Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan SKPD, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan hasil evaluasi Renstra lima tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 -2026 disusun berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan aturan turunannya;
18. Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) adalah menyelaraskan agenda perencanaan pembangunan bidang Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Akhir Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur untuk rentang waktu implementasi perencanaan tahun 2024 – 2026.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan bidang perhubungan ;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan Bidang Perhubungan ;
3. Mengakomodasikan seluruh aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum ;
4. Menetapkan hasil kegiatan penelitian ini sebagai kebijakan pembangunan Bidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Menyelaraskan dengan dinamika perubahan yang terjadi pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 tahun 2022, sistematika Penulisan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota, juga memuat dasar hukum, maksud dan tujuan Renstra Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sekaligus Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Startegis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan/sasaran pada tahun berjalan sampai dengan lima tahun kedepan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang, juga akan menjelaskan relevansi dan konsistensi untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (*multiplier effect*) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu secara effect langsung (*direct effect*) dan effect tidak langsung (*indirect effect*) memberikan stimulus dan manfaat ekonomi (*economic benefit*) yang tinggi. Demikian juga sebaliknya harus mampu mengeliminasi dampak samping operasional transportasi jalan yang dapat menimbulkan beban dan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*).

Oleh karenanya didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan ditetapkan sebagai bagian kegiatan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Kalimantan Timur, yaitu dalam hal pencapaian perwujudan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit usaha dan lembaga - lembaga ekonomi.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan di Bidang Perhubungan

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, maka pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kewenangan:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi;
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi;
- f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi;
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. Penetapan kawasan perKotaan untuk pelayanan angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi dan perKotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perKotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam Trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang Melayani trayek antarKota dalam daerah Provinsi serta Angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi;

2. Sub Urusan Bidang Pelayaran, Kewenangan :

- a. Penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;

- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar - daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional;
- c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan;
- d. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kab/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi;
- e. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi.
- f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
- g. Penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan besertamuatannya pada lintas penyebrangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul regional;
- i. Pembangunan, Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul regional;
- j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul regional;
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;

- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- o. Penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingansendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional.

3. Sub Urusan Bidang Perkeretapian, Kewenangan :

- a. Penetapan rencana induk perkeretapian Provinsi ;
- b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kab/Kota;
- c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 daerah Kab/Kota dalam Provinsi ;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi ;
- e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi ;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretapian pada jaringan jalur perkeretapian Provinsi ;
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Merujuk Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016, Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- 4 Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Struktur Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
 - Subbag Umum
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Lalu Lintas Jalan
 - Seksi Angkutan Jalan
 - Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana
3. Bidang Pelayaran
 - Seksi Kepelabuhanan
 - Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
 - Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
4. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian
 - Seksi Perkeretaapian
 - Seksi Lingkungan Perhubungan
 - Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan
5. UPTD Terminal Type B
 - Subbag Tata Usaha
 - Seksi Operasional I
 - Seksi Operasional II

2.1.2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu 2 Kasubbag yaitu Kasubbag Perencanaan, Program & Keuangan dan Kasubbag Umum dengan tugas sebagai berikut :

A). Tugas Sub. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

B). Tugas Sub. Bagian Umum

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2.1.2.2. Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang LLAJ dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian lalu lintas jalan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas Jalan pada jalan – jalan Provinsi dan mengusulkan kebutuhan pada jalan - jalan Nasional.

B) Tugas Seksi Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan jalan.

C) Tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.1.2.3. Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayaran

1. Tugas

Melaksanakan koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyiapan penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut wilayah laut Provinsi, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan

Provinsi, dan penetapan lintas penyeberangan dalam Provinsi, serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayaran dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepelabuhanan.

B) Tugas Seksi Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

C) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.

2.1.2.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

1. Tugas

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian di Kabupaten / Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil, Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perkeretaapian.

B) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Lingkungan Perhubungan.

C) Tugas Seksi Keterpaduan Moda & Teknologi Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan.

2.1.2.5. UPTD Terminal

1. Tugas

Pembinaan, bimbingan, pengendalian pengawasan dan operasional terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, Melakukan monitoring dan evaluasi operasional UPTD Terminal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam operasional dan pengendalian terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Paser Penajam Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau.
- b. Mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Terminal dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD Terminal Type B dibantu 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat diselesaikan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.

5. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tanggadan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan dan tertib administrasi.
6. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas dan evaluasi selanjutnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

B) Seksi Operasional Wilayah I

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah I

berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah I di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau.
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

C) Seksi Operasional Wilayah II

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah II diKab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar);
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2022 seluruhnya sebanyak 81 Orang ASN dan 85 Orang Non ASN.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	

1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	13	7	-	22
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	6	3	-	11
4	Bidang Pelayaran	2	5	3	-	10
5	Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	2	4	1	-	7
6	UPTD Terminal	2	8	19	-	29
7	Tenaga Non ASN	-	-	-	-	85
Jumlah		11	36	33	0	166

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishub Kaltim, Desember 2022

2.2.2 Aset yang dikelola

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Neraca Aset Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2022

No	Nama Barang	Nilai (Rp.)
	ASET TETAP	
1.	Tanah	71.295.943.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	53.973.356.137,00
3.	Gedung dan Bangunan	51.923.394.141,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.957.814.373,00
5.	Aset Tetap Lainnya	823.035.125,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	91.658.615.944,00
7.	ASET LAINNYA	453.366.089.306,67

Aset Dinas Perhubungan terdiri dari aset yang ada di Dinas Perhubungan, UPTD Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau.

Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

No	Jenis/Merk Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembua tan	Kondisi
A	KENDARAAN R 4			
1	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1042 BZ	2021	Baik
2	Toyota Veloz	KT 1396 B	2022	Baik
3	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1716 BZ	2011	Baik
4	Mitsubhisi Expander	KT 1775 B	2022	Baik
5	Toyota Hilux	KT 8486 BZ	2021	Baik
6	Toyota INOVA	KT 1337 BZ	2010	Baik
7	Isuzu Touring 541 LM 25 Long	KT 1907 BZ	2003	Rusak Ringan
8	Suzuki Mega Carry Extra / Pick Up	KT 8879 BZ	2012	Rusak Ringan
9	Suzuki AVP SGX	KT 1564 BZ	2010	Baik
10	Toyota Kijang STD	KT 1273 BZ	2001	Rusak Berat
11	Ford Everest 2,5 XLT	KT 1369 BZ	2004	Baik
12	Mitsubhisi L200 Double Cabin	KT 8336 BZ	2005	Baik
13	Mitsubhisi L200 Double Cabin	KT 1902 BZ	2003	Rusak Berat
14	Ford Ranger SGL	KT 8473 BZ	2004	Rusak Berat
15	Isuzu TBR 541 LM 25 Long	KT 2369 BZ	2003	Rusak Ringan
16	Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
17	Toyota Avanza	KT 1540 BZ	2008	Baik
18	Toyota Avanza	KT 1015 BC	2005	Baik
19	Toyota Kijang STD	KT 2408 BZ	2001	Rusak Berat

B	KENDARAAN R2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Rusak Berat
2	Sepeda Motor/Honda CB15A1RRF	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 D	KT 4102 MZ	2005	Baik
4	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4698 MZ	2008	Baik
5	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
6	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NC11B1C	KT 4818 MZ	2009	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3934 B	2010	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3935 B	2010	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3932 B	2010	Baik
11	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
12	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
13	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3245 M	2011	Baik
14	Sepeda Motor/Honda ACB2J22B03	KT 6396 MZ	2002	Baik

15	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
16	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
17	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
18	Sepeda Motor/Honda ACB2J22B03	KT 6379 MZ	2012	Baik
19	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
20	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
21	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
22	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
23	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5700 B	2020	Baik
24	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik
25	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2309 B	2021	Baik
26	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2317 B	2021	Baik
27	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2324 B	2021	Baik
28	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2386 B	2021	Baik
29	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2372 B	2021	Baik
30	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2284 B	2021	Baik

Sumber

Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 19 kendaraan roda empat dan 30 kendaraan roda dua kendaraan dengan kondisi seperti tabel diatas.

Tabel. 2.5

Luas Bangunan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M²)	JML LANTAI	LUAS KESELURUHAN (M²)
1	Bangunan Induk	2,950	2	5,900
2	Gedung Koperasi	180	1	180
3	Gedung Dharma Wanita	419	1	419
4	Musholla	157	1	157
5	Kantin lama	32	1	32
6	Bangunan baru	202	2	404
	LUAS KESELURUHAN			7,092

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 m².

Untuk komposisi peralatan dan perlengkapan kantor utama yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.6.
Komposisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas
Perhubungan Prov. Kalimantan Timur

No	Jenis Asset	Jumlah/ Satuan	Lokasi	Ket
1	Personal Komputer	86 Unit	Samarinda	
2	Printer	79 Unit	Samarinda	
3	Laptop	32 Unit	Samarinda	
4	AC	51 Unit	Samarinda	
6.	Genset	1 Unit	Samarinda	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2022

Sedangkan unit usaha di Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih operasional adalah Koperasi Panca Citra Dishub dengan kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Nomor : SK. 860/0219/KPN-Dishub/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019-2022 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	83	83	83	84	84	85	83	87	85	88	-
Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	Izin	180	180	180	190	190	200	250	250	107	300	-
Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-
Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	40	40	40	45	45	50	75	100	88	100	-
Jumlah Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Penetapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	%	80	80	80	90	90	95	88.02	97	97	97.5	-

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	%	75	75	75	78	78	81	81	83	0	93.34	-
Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	0	0	0	0	0	20	20	50	50	80	-
Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api	Penetapan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	846	683	570	598	448	512	418	427	195	342	-
Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	30	40	40	50	50	60	60	70	75.23	80	-
Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	Perencanaan	0	1	1	2	2	2	2	5	5	4	-
Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000	650.000	301083	700.000	377.969	750.000	-

Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRL	%	60	70	0	75	0	80	0	85	47.36	100	-
Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	Izin Andalalin	0	0	0	0	0	10	0	20	20	30	-
Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	40	42.5	42.5	50	50	55	41.25	75	75	85	-
Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	Unit	15	15	0	20	0	27	0	18	0	20	-
Jumlah Penetapan Kawasan	Penetapan	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	-
Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	Penetapan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	Izin	100	24	24	24	24	24	50	24	25	24	-
Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	Izin	10	10	10	10	10	10	20	10	11	10	-
Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	Trayek	35	35	0	35	0	35	0	35	35	35	-

Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan (DINAS PERHUBUNGAN)	Angka	100	100	79.22	100	79.68	100	95.52	100	95.75	100	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peringkat	69	72.32	72.32	72.4	71.28	72.7	70.11	75	-	75.5	-
Tercapaiannya Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	20	30	30	32	32	35	35	38	38	40	-
Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	30	35	35	40	40	45	45	50	50	60	-
Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	70	80	80	85	85	90	90	95	95	100	-

Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	5	25	25	30	30	35	35	40	40	50	-
Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	10	10	10	15	15	20	20	25	25	30	-

B. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun Tahun Berjalan 2019-2022 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023	
				Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i
1	Prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara	%	25	30	31,55	32	17	33	20	34	33.74	35	-
2	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	50	50	50,49	60	68,63	70	89.49	80	95.81	85	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100	100	79.22	100	79.68	100	84.80	100	85.48	100	-

2.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi (2016-2020) berfungsi mengukur persepsi masyarakat Kalimantan Timur terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Timur. Metode pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi dititik beratkan pada pola layanan 7 Terminal Type B se- Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan dengan variable IKM sebagai berikut : 1). Persyaratan pelayanan; 2). sistem, mekanisme dan prosedur, 3). Waktu penyelesaian, 4). Biaya/tarif, 5). Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6). Kompetensi pelaksana, 7). Perilaku pelaksana, 8). Sarana dan prasarana, 9). penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan hasil IKM pertahun sebagai berikut :

- 1). Tahun 2018 : 76,60
- 2). Tahun 2019 : 79,22
- 3). Tahun 2020 : 79,68
- 4). Tahun 2021 : 80,21
- 5). Tahun 2022 : 81,08

Trend Indeks Layanan Transportasi cenderung mengalami peningkatan dikarenakan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan/kebijakan seiring dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Tahun 2020 variabel unsur pelayanan yang dinilai adalah persyaratan pelayanan, system mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan. (Sumber : Hasil survey SKM Dishub, 2020).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2018 s/d 2022

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	76,06	79,22	79,68	80,21	81,08

Sumber : Dishub Prov. Kaltim

Dari tabel diatas dapat diketahui Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil

tersebut setelah diolah data mendapatkan nilai 81,08% (B) dengan kategori Baik.

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2023 s/d 2026

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	82,00	83,00	84,00	85,00

Sumber :Dishub Prov. Kaltim

2.3.3. Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi (Sasaran Strategis I RENSTRA (2019 – 2023))

Pergerakan sarana transportasi yang ada pada wilayah Kalimantan Timur Tahun 2022 mengalami sedikit perbaikan dari tahun 2021, baik transportasi darat, laut maupun udara hal ini dikarenakan kebijakan PPKM pada sektor transportasi yang dampaknya secara signifikan meningkatkan Pergerakan Sarana Transportasi dan adanya peraturan/kebijakan protokol kesehatan di Transportasi Umum jumlah pergerakan sarana sudah mulai mulai berangsur longgar dan sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Hal demikian dapat dilihat dari realisasi capaian persentase pergerakan sarana transportasi yang hampir menacapai target capaian yang ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	34	33,74	99,24

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	$6=((5/4)-1)*100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	20%	33,74%	68,7%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pergerakan sarana transportasi mengalami peningkatan dari tahun 2021, kenaikan ini cukup signifikan seiring PPKM yang berangsur-angsur longgar sehingga aktivitas masyarakat kian membaik dan kembali normal.

I. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis I (Pertama)

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2021 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy;
- Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan;
- Pembinaan Badan usaha;
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran;
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran.

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Terminal Tipe B) memiliki Nilai 81,08 dengan kategori Baik.

II. Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi.

- ### **1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi**
- diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana

pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif;

2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum);
3. Melakukan pengintegrasian antar stake holder perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam untuk meningkatkan ekonomi Kaltim;
4. Pemberlakuan dan sosialisasi yang rutin tentang Protokol Kesehatan yang ketat di semua sektor transportasi.

III. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program Pengelolaan Pelayanan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;
2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas;
4. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kasus	427	195	45.66%	Kabid LLAJ	APBD
	b. Program Pengelolaan Perkeretaapian:								
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	700000	377969	54%	Kepala UPTD	APBD	
	1. Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.								
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	Perencanaan	1	100%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD		
	c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):								
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Bus Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	Penetapan	1	0	0%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD	
	1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (UPTD Terminal);								

2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Dishub);

3. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dishub).

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Pengelolaan Pelayaran		Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87%	85%	97.70%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASD	Izin	250	107	41.80%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	1	1	100%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	100	88	88%	Kabid Pelayaran	APBD
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	%	97%	97%	100%	Kabid Pelayaran	APBD
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	50	50	100%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	Penetapan	1	0	0%	Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	99.24	91.66	7.58

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 7,58%.

2.3.4. Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Sasaran Strategis II RENSTRA 2019-2023)

Hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 123,14% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2019 – 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	Persentase (%)	80	98,51	123,14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2020
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6=((5/4)-1)*100
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	89.49%	98.51%	10.08%

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis II (Kedua)

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor / Rampcheck
(Angkutan Orang dan Barang).

Kendaraan yang Diperiksa	Tahun		
	2021	2022	Akhir RPJMD
Angkutan Umum	203	102	250
Angkutan Barang	385	357	400
Jumlah	588	459	650
Persentase		70,61%	

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampchek (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 102 kendaraan jenis angkutan umum dan 357 kendaraan jenis angkutan barang. Diketahui total hasil kendaraan yang telah di rampcheck pada tahun 2022 berjumlah 459 kendaraan dan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 70.61%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselamatan jalan yang terpasang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Prasarana	Tahun			
	Awal 2021	2022	Jumlah Terpasang Data Awal 2021+ 2022	Akhir RPJMD (2023)
Rambu	5.880	105	5.985	16.000
Marka	291.635	50.008	341.643	2.237.725
Pagar	5.628	-	5.628	89.509
LPJU	35	62	97	235
Persentase	12,93%		25,06%	100%

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2022 untuk rambu berjumlah 105 unit, Marka jalan 50.008 m², LPJU 62 unit. Sehingga jika

disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) mencapai 25,06%.

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

PRASARANA TERMINAL	TAHUN
	2022
Batu Ampar	83
Sungai Kunjang	83
Lempake	83
Timbau	77
Penajam	62
Paser	58
Bontang	62
Sangatta	45
Berau	68
Persentase	69%

4. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata angka kasus laka lantas di beberapa Kab/Kota mengalami penurunan, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Polresta Samarinda	225	170	109	96	87	78
2	Polres Balikpapan	179	132	88	47	56	26
3	Polres Bontang	76	92	55	56	31	20
4	Polres Kukar	296	152	40	77	78	28
5	Polres Kutim	59	50	34	23	19	6
6	Polres Kubar	55	48	103	22	29	9

7	Polres Berau	85	100	27	55	23	9
8	Polres Paser	149	80	71	41	53	0
9	Polres PPU	69	44	43	31	42	19
	JUMLAH	1.193	868	570	448	418	195

I. Alternatif Solusi/Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan.

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten.
3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui:
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN;
 - b) Mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat.

II. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
3. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
4. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Provinsi;

	5. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Provinsi;	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Wilayah Operasinya Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan	Izin	10	11	110%	Kabid LLAJ	APBD
	6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jalan Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	Trayek	35	35	100%	Kabid LLAJ	APBD
	7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;								

8. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	427	195	154.33%	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	70	75.23%	107.47%	Kabid LLAJ	APBD
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	%	85	47.36	55.71%	Kabid LLAJ	APBD
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Izin andalalin yang di Keluarkan	Izin Andalalin	20	20	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	75	75	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	Penetapan	1	0	0%	Kabid LLAJ	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang Dikeluarkan	Izin	24	25	104.17%	Kabid LLAJ	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	123,14	91,56	31,58

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 31.58 %.

2.3.5. Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Sasaran Strategis III RENSTRA 2019-2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	100	85,48	85,48

Hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis III memiliki realisasi 85.48.

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga) Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6=((5/4)-1)*100
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	%	84,80%	85,48%	0,80%

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 3

(Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 0,80%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis III (Ketiga)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan).

1. Hasil Survei Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan.

No.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi				
	Tahun 2018 (IKLI)	Tahun 2019 (SKM)	Tahun 2020 (SKM)	Tahun 2021 (SKM)	Tahun 2022 (SKM)
1.	76,6	79,22	79,68	80,21	81,08

Hasil SKM Tahun 2022

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 81,63
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 81,03
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 81,72
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 80,71
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 80,74
6. Terminal Paser memiliki nilai : 80,83
7. Terminal Berau memiliki nilai : 80,95

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Terminal Tipe B) memiliki Nilai **81,08 dengan kategori Baik.**

Dari tabel dan capaian SKM di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 76.6 sedangkan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada 7 (Tujuh) Terminal Tipe B di Provinsi

Kalimantan Timur dengan populasi masing-masing 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai **81,08 (B)**.

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan dan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Selain melakukan survei kepuasan masyarakat pada Terminal Tipe B Prov. Kaltim, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (terkait pelayanan), antara lain:

- Layanan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan kartu pengawasan (KP)
- Layanan peremajaan/penggantian dan penambahan kendaraan
- Layanan penerbitan surat keputusan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
- Layanan penerbitan surat izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM)
- Layanan penerbitan surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (SIUJPT)
- Layanan izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau
- Layanan izin pengoperasian angkutan penyeberangan
- Layanan kartu pengawasan izin trayek ASDP

Hasil IKLI dan SKM Pada Dinas Perhubungan

No	Indeks Kepuasan Layanan sesuai standar pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	
	IKM TAHUN 2021	IKM TAHUN 2022
NILAI IKM	95.52	95.75

Untuk mencapai capaian sasaran strategis 3 dinas perhubungan membagi bobot Indeks Kepuasan Masyarakat

sebesar 70% untuk IKM UPTD Terminal dan 30% untuk IKM Dinas Perhubungan sehingga diperoleh hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar **85,48** dari target **100**.

I. Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan atau sarana dan prasarana yang ada di setiap Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Prov. Kaltim seperti Kamar Mandi (WC Umum) yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum;
2. Perlu adanya peningkatan penyusunan survei kepuasan masyarakat dengan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap matang atau lebih berpengalaman agar pengolahan data yang didapat bisa lebih akurat dan lebih matang dengan demikian maka dapat membantu instansi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Khususnya UPTD Terminal Tipe B dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan.

II. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 3 adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab	Ket
Dinas Perhubungan									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	95,75	95,75%	Sekretaris	APBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	75	73,05	97,40%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	38	38	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	50	50	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	95	95	100%	Kasubbag Umum	APBD

UPTD Terminal									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	81,08	81,08%	Kepala UPTD Terminal	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	85,48	88,18	-2,7

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai -2,7 %.

2.3.6 Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2022 dapat melebihi Target Indikator Tujuan.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur	Jumlah Penumpang Yang Terlayani	6.000.000 Orang dan 337.000.000 Ton	8.513.323 Orang dan 513.031.229 Ton

	dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	(Orang) dan Jumlah Barang (Ton)		
--	--	---------------------------------	--	--

2.3.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, pada level program selanjutnya, kinerja dinas di analisa pengelolaan pendanaan pelayanan dinas melalui Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. (TC.24)
Anggaran dan Reaslisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,176,256,226	24,566,657,510	30,504,412,600	25,383,422,694	22,176,256,226	24,566,657,510	27,164,069,670	22,317,564,662	100.00%	100.00%	89.05%	87.92%	6.05%	1.17%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	705,082,650	1,390,503,686	1,169,533,800	782,468,500	705,082,650	1,390,503,686	1,124,248,189	750,887,448	100.00%	100.00%	96.13%	95.96%	16.07%	14.95%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,581,154,642	14,106,413,676	17,160,759,824	16,044,902,049	13,581,154,642	14,106,413,676	14,738,638,120	13,603,062,115	100.00%	100.00%	85.89%	84.78%	6.34%	0.21%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,276,668,544	315,388,413	753,000,000	206,475,000	1,276,668,544	315,388,413	539,289,413	203,127,751	100.00%	100.00%	71.62%	98.38%	-3.04%	-22.21%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,698,665,419	1,791,785,503	1,571,020,000	1,853,157,000	2,698,665,419	1,791,785,503	1,520,654,271	1,846,701,739	100.00%	100.00%	96.79%	99.65%	-9.32%	-9.10%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,124,081,500	1,537,111,600	391,958,500	999,639,800	1,124,081,500	1,537,111,600	373,429,000	910,739,520	100.00%	100.00%	95.27%	91.11%	39.09%	34.97%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,851,199,417	4,750,685,182	5,696,265,976	4,216,268,155	1,851,199,417	4,750,685,182	5,386,643,585	3,834,147,089	100.00%	100.00%	94.56%	90.94%	50.18%	47.06%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939,404,054	674,769,450	3,761,874,500	1,280,512,190	939,404,054	674,769,450	3,481,167,092	1,168,899,000	100.00%	100.00%	92.54%	91.28%	121.12%	107.10%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,842,880,567	6,985,828,303	15,524,035,275	14,634,422,056	11,842,880,567	6,985,828,303	13,607,106,951	13,615,817,387	100.00%	100.00%	87.65%	93.04%	25.16%	17.94%
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5,560,983,650	5,575,782,700	12,472,569,175	8,861,547,066	5,560,983,650	5,575,782,700	11,152,432,285	8,333,432,207	100.00%	100.00%	89.42%	94.04%	31.67%	25.00%
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	526,859,649	940,080,225	1,000,000,000	1,530,650,000	526,859,649	940,080,225	900,410,830	1,425,420,538	100.00%	100.00%	90.04%	93.13%	45.96%	44.17%
2.3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	1,632,410,000	-	-	-	1,496,567,652	-	-	-	91.68%		
2.4	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-	-	81,750,000	-	-	-	78,052,900	-	-	-	95.48%		
2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	989,414,701	333,612,300	846,000,000	586,758,000	989,414,701	333,612,300	617,326,460	566,229,942	100.00%	100.00%	72.97%	96.50%	18.89%	3.49%
2.6	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4,175,267,804	87,254,078	455,999,900	98,332,000	4,175,267,804	87,254,078	407,096,488	89,846,009	100.00%	100.00%	89.28%	91.37%	82.09%	63.57%
2.7	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	817,606,000	-	-	-	709,225,440	-	-	-	86.74%		
2.8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	579,823,263	-	533,313,700	545,528,990	579,823,263	-	344,356,900	502,459,131	100.00%	-	64.57%	92.10%	-48.85%	-27.04%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10,531,500	49,099,000	216,152,500	228,800,000	10,531,500	49,099,000	185,483,988	218,668,568	100.00%	100.00%	85.81%	95.57%	237.43%	220.63%
2.10	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	251,040,000	-	-	-	195,915,000	-	-	-	78.04%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,498,922,280	617,900,036	12,124,942,825	3,390,803,000	2,498,922,280	617,900,036	7,319,264,313	3,090,171,936	100.00%	100.00%	60.37%	91.13%	571.66%	317.16%
3.1	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	521,328,983	103,952,775	750,000,000	625,370,000	521,328,983	103,952,775	669,150,250	617,867,024	100.00%	100.00%	89.22%	98.80%	174.93%	151.99%
3.2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	722,508,000	-	-	-	647,613,070	-	-	-	89.63%		
3.3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	153,355,800	370,379,825	332,000,000	424,800,000	153,355,800	370,379,825	300,694,000	421,839,210	100.00%	100.00%	90.57%	99.30%	53.04%	54.33%
3.4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1,213,654,997	143,567,436	10,314,317,825	1,618,125,000	1,213,654,997	143,567,436	5,719,990,433	1,402,852,632	100.00%	100.00%	55.46%	86.70%	2303.94%	1240.18%
3.5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	610,582,500		728,625,000	-	610,582,500		629,429,630	-	100.00%		86.39%			
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3,916,217,841	3,743,158,790	499,052,300	396,237,000	3,916,217,841	3,743,158,790	128,058,658	381,143,479	100.00%	100.00%	25.66%	96.19%	-37.23%	32.21%
4.1	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3,916,217,841	3,743,158,790	499,052,300	396,237,000	3,916,217,841	3,743,158,790	128,058,658	381,143,479	100.00%	100.00%	25.66%	96.19%	-37.23%	32.21%

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,477,721,351	2,149,716,105	2,256,359,734	3,082,135,205	1,477,721,351	2,149,716,105	2,119,307,282	2,783,899,127	100.00%	100.00%	93.93%	90.32%	29.01%	25.14%
5.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198,070,075	139,833,700	254,355,000	434,101,707	198,070,075	139,833,700	233,843,660	424,801,197	100.00%	100.00%	91.94%	97.86%	41.05%	39.83%
5.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,845,750	316,470,400	151,840,000	179,865,000	14,845,750	316,470,400	145,179,900	110,525,500	100.00%	100.00%	95.61%	61.45%	666.05%	651.24%
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873,891,926	1,693,412,005	1,820,164,734	2,236,764,248	873,891,926	1,693,412,005	1,716,163,472	2,036,760,160	100.00%	100.00%	94.29%	91.06%	41.38%	37.93%
5.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,913,600	-	30,000,000	231,404,250	390,913,600	-	24,120,250	211,812,270	100.00%	-	80.40%	91.53%	285.67%	339.08%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1,016,718,500	89,807,600	1,783,640,266	4,152,247,706	1,016,718,500	89,807,600	1,497,423,994	3,585,436,029	100.00%	100.00%	83.95%	86.35%	642.57%	538.55%
6.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1,016,718,500	89,807,600	1,783,640,266	4,152,247,706	1,016,718,500	89,807,600	1,497,423,994	3,585,436,029	100.00%	100.00%	83.95%	86.35%	642.57%	538.55%
	Jumlah	42,928,716,765	38,153,068,344	62,692,443,000	51,039,267,661	42,928,716,765	38,153,068,344	51,835,230,868	45,774,032,620	100.00%	100.00%	82.68%	89.68%	-18.59%	-11.69%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (2021 – 2022)

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PERHUBUNGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.504.412.600,-	27.140.800.460,-	88.97	25.383.422.694,-	22.317.564.662,-	87.92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.169.533.800,-	1.124.248.189,-	96.13	782.468.500,-	750.887.448,-	95.96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.200.000,-	378.186.092,-	94.26	370.043.500,-	369.676.880,-	99.90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	374.333.800,-	365.235.772,-	97.57	31.534.500,-	26.652.000,-	84.52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	234.300.000,-	227.836.625,-	97.24	211.083.500,-	206.178.500,-	97.68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.700.000,-	152.989.700,-	95.8	169.807.000,-	148.380.068,-	87.38
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.160.759.824,-	14.738.638.120,-	85.89	16.044.902.049,-	13.603.062.115,-	84.78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.160.759.824,-	14.738.638.120,-	85.89	16.044.902.049,-	13.603.062.115,-	84.78

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	753.000.000,-	539.289.413,-	71.62	206.475.000,-	203.127.751,-	98.38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	343.750.000,-	333.332.550,-	96.97	132.675.000,-	130.500.000,-	98.36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	409.250.000,-	192.049.863,-	50.33	73.800.000,-	72.627.751,-	98.41
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.571.020.000,-	1.520.654.271,-	96.79	1.853.157.000,-	1.846.701.739,-	99.65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000,-	23.960.500,-	99.84	49.997.500,-	49.870.000,-	99,74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.600.000,-	69.514.250,-	99.88	180.000.000,-	179.500.000,-	99.72
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177.420.000,-	177.395.325,-	99.99	200.077.500,-	200.064.850,-	99.99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.000.000,-	1.249.784.196,-	96.14	1.423.082.000,-	1.417.266.889,-	99.59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.958.500,-	373.429.000,-	95.27	999.639.800,-	910.739.520,-	91.11

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.558.500,-	116.480.000,-	88.54	342.000.000,-	307.400.000,-	89.88
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.400.000,-	256.949.000,-	98.67	657.639.800,-	603.339.520,-	91.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.696.265.976,-	5.386.643.585,-	94.56	4.216.268.155,-	3.834.147.089,-	90.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.280.000,-	8.935.550,-	35.35	13.160.000,-	10.679.800,-	81.15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.164.770.200,-	2.926.218.534,-	92.46	796.816.969,-	624.939.126,-	78.43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.506.215.776,-	2.451.489.501,-	97.82	3.406.291.186,-	3.198.528.163,-	93.90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.761.874.500,-	3.481.167.092	92.54	1.280.512.190,-	1.168.899.000,-	91.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.545.000,-	73.855.000,-	99.07	120.280.000,-	117.594.750,-	97.77

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.046.500,-	103.721.000,-	89.38	263.977.300,-	253.507.300,-	96.03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	385.424.000,-	384.687.000,-	99.81	204.350.000,-	204.241.200,-	99.95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.185.859.000,-	2.918.904.092,-	91.62	691.904.890,-	593.555.750,-	85.79
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.524.035.275,-	13.607.106.951,-	87.65	14.634.422.056,-	13.615.817.387,-	93.04
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12.472.569.175,-	11.152.432.285,-	89.42	8.861.547.066,-	8.333.432.207,-	94.04
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	12.272.569.175,-	10.991.568.385,-	89.56	7.098.494.066,-	6.756.576.989,-	95.18
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	200.000.000,-	160.863.900,-	80,43	1.763.053.000,-	1.576.855.218,-	89.44
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.000.000.000,-	900.410.830,-	90.04	1.530.650.000,-	1.425.420.538,-	93.13
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1.000.000.000,-	900.410.830,-	90.04	1.530.650.000,-	1.425.420.538,-	93.13

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	1.632.410.000,-	1.496.567.652,-	91.68
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	76.900.000,-	74.028.545,-	96.27
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-	-	-	1.555.510.000,-	1.422.539.107,-	91.45
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-	-	-	81.750.000,-	78.052.900,-	95.48
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	-	-	-	81.750.000,-	78.052.900,-	95.48
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	846.000.000,-	617.326.460,-	72.97	586.758.000,-	566.229.942,-	96.50
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,-	20.990.000,-	83.96	75.805.000,-	73.695.880,-	97.22
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50.750.000,-	50.136.800,-	98.79	79.100.000,-	79.047.380,-	99.93

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	202.000.000,-	95.394.600,-	47.23	205.036.000,-	203.453.870,-	99.23
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	568.250.000,-	450.805.060,-	79,33	226.817.000,-	210.032.812,-	92.60
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	455.999.900,-	407.096.468,-	89,28	98.332.000,-	89.846.009,-	91.37
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	455.999.900,-	407.096.468,-	89,28	98.332.000,-	89.846.009,-	91.37
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	817.606.000,-	709.225.440,-	86.74
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	693.330.000,-	615.939.000,-	88.84
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	-	-	124.276.000,-	93.286.440,-	75.06

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	533.313.700,-	344.356.900,-	64.57	545.528.990,-	502.459.131,-	92.10
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	71.958.700,-	70.400.000,-	97.83	286.502.000,-	272.939.685,-	95.27
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	461.355.000,-	273.956.900,-	59.38	259.026.990,-	229.519.446,-	88.61
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	216.152.500,-	185.483.988,-	85,81	228.800.000,-	218.668.568,-	95.57
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000,-	18.240.000,-	72.96	81.700.000,-	79.996.947,-	97.92
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	191.152.500,-	167.243.988,-	87.49	147.100.000,-	138.671.621,-	94.27

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	251.040.000,-	195.915.000,-	78.04
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	251.040.000,-	195.915.000,-	78.04
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12.124.942.825,-	7.319.264.313,-	60.37	3.390.803.000,-	3.090.171.936,-	91.13
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	750.000.000,-	669.150.250,-	89.22	625.370.000,-	617.867.024,-	98.80
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	393.650.000,-	371.359.750,-	94.34	149.917.000,-	148.421.413,-	99.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	356.350.000,-	297.790.500,-	83.57	475.453.000,-	469.445.611,-	98.74

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-	722.508.000,-	647.613.070,-	89.63
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	722.508.000,-	647.613.070,-	89.63
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	332.000.000,-	300.694.000,-	90.57	424.800.000,-	421.839.210,-	99.30
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.900.000,-	64.156.400,-	98,85	188.600.000,-	187.666.390,-	99.50

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	267.100.000,-	236.537.600,-	88.56	236.200.000,-	234.172.820,-	99.14
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.314.317.825,-	5.719.990.433,-	55.46	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.333.079.825,-	2.561.643.818,-	40.45	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.981.238.000,-	3.158.346.615,-	79.33	-	-	-
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.314.317.825,-	5.719.990.433,-	55.46	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.333.079.825,-	2.561.643.818,-	40.45	1.618.125.000,-	1.402.852.632,-	86.70
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.981.238.000,-	3.158.346.615,-	79.33	-	-	-
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	728.625.000,-	629.429.630,-	86.39	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	499.052.300,-	128.058.658,-	25.66	396.237.000,-	381.143.479,-	96.19
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	499.052.300,-	128.058.658,-	25.66	396.237.000,-	381.143.479,-	96.19
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	409.634.300,-	45.576.555,-	11.13	186.743.000,-	177.569.196,-	95.09
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	89.418.000,-	82.482.103,-	92.24	209.494.000,-	203.574.283,-	97.17
JUMLAH	58.652.443.000,-	48.218.499.592,-	82.21	43.804.884.750,-	39.404.697.464	89.96

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
UPTD TERMINAL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.256.359.734,-	2.119.307.282,-	93.93	3.082.135.205,-	2.783.899.127,-	90.32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.355.000,-	233.843.660,-	91.94	434.101.707,-	424.801.197,-	97.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000,-	5.610.500,-	71.93	58.385.207,-	57.485.000,-	98.46
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,-	16.323.750,-	90.69	26.965.000,-	26.812.650,-	99.44
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.555.000,-	43.013.750,-	98.76	82.303.500,-	75.083.500,-	91.23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.000.000,-	168.895.660,-	91.29	266.448.000,-	265.420.047,-	99.61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.840.000,-	145.179.900,-	95.61	179.865.000,-	110.525.500,-	61.45
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000,-	95.366.000,-	96.33	63.124.000,-	-	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.840.000,-	49.813.900,-	96.65	116.741.000,-	110.525.500,-	94.68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.820.164.734,-	1.716.163.472,-	94.29	2.236.764.248,-	2.036.760.160,-	91.06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000,-	1.350.000,-	69.23	10.760.000,-	6.060.200,-	56.32

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.800.000,-	75.160.854,-	61.71	226.507.140,-	80.345.190,-	35.47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.696.414.734,-	1.639.652.618,-	96.65	1.999.497.108,-	1.950.354.770,-	97.54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,-	24.120.250,-	80.40	231.404.250,-	211.812.270,-	91.53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	15.794.250,-	5.147.270,-	32.59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,-	24.120.250,-	80.40	215.610.000,-	206.665.000,-	95.85
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.783.640.266,-	1.497.423.994,-	83.95	4.152.247.706,-	3.585.436.029,-	86.35
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.783.640.266,-	1.497.423.994,-	83.95	4.152.247.706,-	3.585.436.029,-	86.35
Pembangunan Gedung Terminal	574.765.266,-	525.113.200,-	91.36	900.386.090,-	798.356.333,-	88.67

Uraian	TAHUN					
	2021			2022		
Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1.208.875.000,-	972.310.794,-	80.43	3.251.861.616,-	2.787.079.696,-	85.71
Jumlah II	4.040.000.000,-	3.616.731.276,-	89.52	7.234.382.911,-	6.369.335.156,-	88.04
Jumlah I + II	62.692.443.000,-	51.835.230.868,-	82.68	51.039.267.661	45.774.032.620	89.68

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target Realisasi 1 Tahun	Persentase Capaian	Realisasi Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	95,75%	95,75%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Hasil Evaluasi Sistem AKIP	75%	73,05%	97,40%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan; Renja (2 Dokumen), SKM (2 Dokumen), Studi Gender Statistik (1 Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran; RKA (1 Dokumen), DPA (1 Dokumen), Laporan Rakornis (1 Dokumen), Laporan Forum PD (1 Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD; Laporan Monev (2 Dokumen), Laporan TEPPRA (12 Dokumen), Laporan Angkutan Lebaran (1 Dokumen), Laporan Natal dan Tahun Baru (1 Dokumen)	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (4 Triwulan)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	38%	38%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Dishub beserta Perlengkapannya	145 Stel	145 Stel	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Kualifikasi ASN Perhubungan	65 Pegawai	65 Pegawai	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	434 Unit	434 Unit	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	180 Paket	180 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	200000 Lembar	200000 Lembar	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	65 Kali	65 Kali	100%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	50%	50%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	72 Unit	72 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	5300 Surat	5300 Surat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	95%	95%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 Unit	4 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	20 Unit	20 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157 Unit	157 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 kasus	195 kasus	154,33%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	70%	75,23%	107,47%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang dipasang perlengkapan jalan	120 Km	120 Km	100%
		Terpasangnya LPJU Solar Sell di Jalan Provinsi	61 Buah	62 Buah	102%
		Terpasangnya Rambu Jalan di Jalan Provinsi	105 Buah	105 Buah	100%
		Terpasangnya Marka Jalan di Jalan Provinsi (ABT)	50008 Meter	50008 Meter	100%
		Terpasangnya Paku Jalan di Jalan Provinsi (ABT)	5014 Buah	5014 Buah	100%
		Pengadaan Drone (ABT)	1 Set	1 Set	100%
		Pengadaan HT (ABT)	10 Unit	10 Unit	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara berupa Rambu Jalan/Pagar Pengaman Jalan/Marka Jalan,	8030 Meter	8030 Meter	100%
		Operasional CCTV	2 Bulan	2 Bulan	100%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	5 Perencanaan	5 Perencanaan	100%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Rencana	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kepatuhan Rekomendasi MRLL	85%	47,36%	55,71%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi MRLL yang dikeluarkan	10 Rekomendasi	4 Rekomendasi	40%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penegakan Hukum di Jalan Provinsi	7 Lokasi	5 Lokasi	71,43%

	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	20 Izin Andalalin	20 Izin Andalalin	100%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Andalalin	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	75%	75%	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	2 unit	2 unit	100%
		Laporan Audit PKB	1 Terminal	1 Laporan	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang Memenuhi Standar Kelaikan	7 Terminal	7 Terminal	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi Angkutan Umum yang Memiliki Kompetensi	30 Pengemudi	30 Pengemudi	100%
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	100%
		Jumlah Forum dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	1 Penetapan	0 Penetapan	0%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan yang di sosialisasikan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan Trayek	1 Penetapan	0 Penetapan	0%
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kajian Akademis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba	200 Orang	200 Orang	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	25 Izin	104,17%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin Trayek Angkutan Orang yang Diproses Tepat Waktu	24 Izin	25 Izin	104,17%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	- Jumlah Badan Usaha Angkutan Umum yang Dibina	24 Badan Usaha	25 Badan Usaha	104,17%
		- Pemilihan Abdiyasa Teladan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		- Pemilihan Wahana Tata Nugraha	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Surat Izin	11 Surat Izin	110%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek Angkutan Taksi yang Diproses Tepat Waktu	10 Surat Izin	11 Surat Izin	110%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Taksi Yang Dibina	40 Badan Usaha	13 Badan Usaha	32,50%
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek yang telah ditetapkan besaran Tarif	35 Trayek	35 Trayek	100%
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen analisis yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87%	85%	97,70%
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	250 Izin	107 Izin	42,80%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Trayek ASDP yang Diproses Tepat Waktu	250 Izin	107 Izin	42,80%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	- Jumlah Badan Usaha/Perorangan ASDP yang Dibina	75 Badan Usaha	69 Badan Usaha	92%
		- Jumlah Kapal yang di Rampcheck	50 Unit Kapal	39 Unit Kapal	78%
		- Jumlah Pengadaan Alat Keselamatan (APAR)	51 Buah	51 Buah	100%
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Pelayanan Penyebrangan Kariangau	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	100 Izin	88 Izin	88%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Diproses Tepat Waktu	50 Izin	88 Izin	176%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Jasa Pelayaran Angkutan Laut yang Dibina	150 Badan Usaha	153 Badan Usaha	102%

	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	97%	97%	100%
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Studi Kepelabuhanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	50%	50%	100%
	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/Trase Kereta Api	1 Penetapan	0 Penetapan	0%
	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana yang di Sosialisasikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target Realisasi 1 Tahun	Persentase Capaian	Realisasi Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	81,08%	81,08%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Unit	60 Unit	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	124000 Eksemplar	131977 Eksemplar	106,43%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	10 Kali	23 Kali	230%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	40%	20%	50%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	12 Unit	12 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan	25 Surat	20 Surat	80%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	25%	25%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	5 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	7 Unit	7 Unit	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 kasus	195 kasus	154,33%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	umlah Penumpang Terminal yang Terlayani	700000 Orang	377969 Orang	54%
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarpras Terminal Tipe B yang Dikembangkan	5 Terminal	5 Terminal	100%

Catatan :

Pada periode 2019-2022 terdapat perubahan Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Semula (kurun waktu 2019 – 2020) :

- a. Jumlah Program : 4 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan

2. Menjadi (kurun waktu 2021 – 2022) :

- a. Jumlah Program : 4 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 22 Kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 49 Sub Kegiatan

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim selama periode 2019 – 2020 adalah 53,98% pada tahun 2019 dan 90,06% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 82,68% dan pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 89,68%. Realisasi cukup baik dicapai oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dimana pendanaan pada program prioritas yang merupakan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan menjadi faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran, permasalahan pekerjaan fisik di lapangan sangat mempengaruhi daya serap anggaran sehingga diperlukan manajemen proyek yang baik untuk dapat meningkatkan daya serap anggaran.

Realisasi anggaran pada program – program bersifat kontrak atau pihak ketiga masih perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkannya, KPA dan PPTK mempunyai peran penting untuk dapat merencanakan dan merealisasikan dengan baik kegiatannya sesuai target realisasi yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan agar dapat ditindaklanjuti sehingga dapat mempercepat daya serap anggaran pada pelaksanaan Renstra selanjutnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**2.4.1 Kelompok Sasaran Layanan**

Untuk pelaporan SPM Bidang Perhubungan sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa Bidang Perhubungan sudah tidak termasuk dalam urusan dasar hanya urusan wajib, dan dengan terbitnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan pusat dan daerah khusus

untuk sektor Perhubungan lebih terfokus kepada Sektor Transportasi Darat, Laut dan SDP sedangkan untuk kewenangan Sektor Transportasi Udara seluruhnya menjadi kewenangan Pusat.

1. Transportasi Darat

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yang meliputi kegiatan: Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Pagar Pengaman Jalan dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas LLAJ	Jumlah Terpasang					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	5	6	7	8	8	
1	Rambu Jalan	350 bh	356 bh	130 bh	1.333 bh	1.392 bh	105 bh
2	Marka Jalan	-	-	-	42.25	42.5	50.008
3	Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	1	1.2	-
4	CCTV/LPJU	-	38 unit	-	10	25	62
Terhitung mulai Tahun 2013 s/d Tahun 2015 terdapat juga							
6	Paku Jalan					6.173	5.014
7	Alat Timbang Kendaraan						
Jalan, yang merupakan penerapan Penegakan Hukum dari							

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban lalu lintas angkutan kendaraan batubara dan kelapa sawit menyangkut jam operasi dan kapasitas muat.

Tahun 2016 s/d 2021 anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan khusus batubara dan kelapa sawit, tidak dialokasikan lagi mengingat volume lalulintas kendaraan angkutan batubara di ruas jalan provinsi maupun nasional sudah berkurang akan tetapi seiring dengan kembali meningkatnya angkutan batubara dan kelapa sawit maka pada tahun 2022 dan 2023 pengendalian angkutan khusus batubara dan kelapa sawit kembali di tegakkan seiring dengan target nasional *Zero Over Dimension Over Loading (ODOL)* pada tahun 2023.

Data kendaraan yang terindikasi *Over Dimension Over Loading* (ODOL) pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Kendaraan yang Diperiksa	Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pelanggaran	Jumlah Kendaraan yang Tidak Melakukan Pelanggaran	Jumlah Tilang	Jumlah Kendaraan Melanggar ODOL	Ket.
1	3 s.d. 4 Februari 2022	Kawasan Industri Poros Kariangau Balikpapan	76	35	41	35	19	
2	29 s.d. 30 Mare 2022	Km. 13 Pintu Masuk Tol Balikpapan - Samarinda	91	61	30	39	26	
3	1 s.d. 2 September 2022	Simpang Muara Badak Kab. Kukar	220	46	174	46	39	
4	8 s.d. 9 September 2022	Kaliorang/Kaubun Kab. Kutai Tmur	81	35	56	34	28	
5	29 s.d. 30 September 2022	Simpang Janju Tanah Grogot Kab. Paser	160	49	111	39	18	
6	20 s.d. 21 September 2022	Samboja Muara Jawa Kab. Kukar	88	43	45	38	23	
7	27 s.d. 28 Oktober 2022	Talisayan Kab. Berau	89	33	56	25	22	
	JUMLAH		809	302	513	256	175	

Pada Tahun 2022 kegiatan Penegakan Hukum terhadap kendaraan barang umum yang terindikasi *Over Dimension Over Loading* dilaksanakan di 9 Lokasi berbeda dengan rata – rata 115 kendaraan angkutan umum barang yang diperiksa di setiap lokasi dan jumlah kendaraan angkutan umum barang yang terbukti *Over Dimension Over Loading* (ODOL) adalah 175 Unit atau 25 % dari sampel yang diperiksa. Untuk jenis pelanggaran lainnya adalah kendaraan angkutan umum barang yang status KIR / Uji Kendaraan Bermotor yang mati atau tidak diperpanjang atau belum melakukan Uji Kendaraan Bermotor di PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) di Kab/Kota.

Adapun data kendaraan yang terindikasi *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sementara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	LOKASI	NO. KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	MERK KENDARAAN	KELEBIHAN MUATAN (KG)	JUMLAH KENDARAAN YANG DIPERIKSA	KETERANGAN
1	16 February 2023	BALIKAPAPAN LAMARU	KT 8872 YR	TRUCK		8,220	69 UNIT	OVERLOAD
			KT 8094 LU	TRUCK		13,780		OVERLOAD DAN KIR MATI
			KT 8875 AO	DT	MITSUBISHI	11,800		OVERLOAD DAN KIR MATI
			KT 8195 ZU			14,240		OVERLOAD
			KT 8110 ZU	DT		8,220		OVERLOAD

4	14 April 2023	TANAH GROGOT JANJU	KT 8374 AB	PICK UP	MITSUBISHI	20,801	124 UNIT	OVERLOAD
			KT 8649 YT	FUSO	MITSUBISHI	12,300		OVERLOAD
			KT 8018 EF	FUSO	MITSUBISHI	9,380		OVERLOAD
			KT 8519 NL	FUSO	MITSUBISHI	10,640		OVERLOAD
			KT 8443 YJ	FUSO	MITSUBISHI	12,620		OVERLOAD
			KT 8519 NL	DT	FUSO	10,460		OVERLOAD
			DA 8074 FF	TRUCK				KIR MATI
			5-0004 NA	PICK UP				KIR MATI

Pada Tahun 2023 kegiatan Penegakan Hukum terhadap kendaraan barang umum yang terindikasi *Over Dimension Over*

Loading baru dilaksanakan di 2 Lokasi berbeda dengan jumlah kendaraan yang sudah diperiksa adalah 432 unit dan rata – rata 216 kendaraan angkutan umum barang yang diperiksa di setiap lokasi dengan hasil jumlah kendaraan angkutan umum barang yang terbukti *Over Dimension Over Loading (ODOL)* adalah 102 Unit atau 24 % dari sampel yang diperiksa. Untuk jenis pelanggaran lainnya adalah kendaraan angkutan umum barang yang status KIR / Uji Kendaraan Bermotor yang mati atau tidak diperpanjang atau belum melakukan Uji Kendaraan Bermotor di PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) di Kab/Kota.

Program peningkatan pelayanan angkutan, meliputi kegiatan yang bersifat pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat operator dan pengguna jasa transportasi jalan, telah dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan yang berlokasi di Kab/Kota di Kalimantan Timur.

Bidang Perhubungan Darat, selain melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD, juga terdapat kegiatan yang mengacu kepada tupoksi berupa penerbitan ijin dan sertifikat terkait pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu :

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Perpanjangan Ijin Operasional						
2	Perpanjangan Kartu Pengawasan	990 bh	788 bh	978 bh	83 bh	666 bh	76 bh
3	Ijin Insidentil	6 bh	9 bh	5 bh	2 bh	25 bh	0 bh
4	Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) Produksi Karoseri	Mulai Tahun 2015 penerbitan ijin dikelola oleh Badan					

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan untuk Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) Produksi Karoseri Dinas Perhubungan hanya mengeluarkan surat rekomendasi.

2. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)

Terkait kegiatan rutin bidang yang bersifat pelayanan kepada masyarakat pemilik usaha angkutan SDP, maka Dinas Perhubungan melalui Bidang SDP pada tahun 2019 telah menerbitkan 36 rekomendasi perijinan yang meliputi :

No.	Uraian Perijinan / Sertifikat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	8
1	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau (BBM) ke Hulu Sungai Mahakam						25 bh
2	Ijin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM / BEG di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau						19 bh
3	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau						
4	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Sungai	62 bh	69 bh	64 bh	20 bh	456 bh	258 bh
5	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan						2 bh
6	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi	20 bh	20 bh	15 bh	16 bh	19 bh	13 bh
7	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7	57 bh	23 bh	11 bh		4 bh	
8	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Kapal/Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi GT<7					14 bh	
9	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Sungai Danau Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi >7GT						217 bh
10	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi >7GT						9 bh
11	Kartu Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/Speedboat Dalam Kota/Kab Dalam Provinsi <7GT						1 bh
10	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 7 s/d 35	25 bh	22 bh	21 bh			
10	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 35 s/d 50	29 bh	11 bh	11 bh			
11	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 50 s/d 150	27 bh	36 bh	35 bh			
12	Pengujian Kapal secara berkala di Perairan Daratan GT 150 s/d 300	-	2 bh	2 bh			
Jumlah			220 bh	183 bh	36 bh	493 bh	544 bh

3. Transportasi Udara

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 kewenangan Bidang Transportasi Udara telah beralih ke Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Stake Holder terkait untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Udara.

4. Keterkaitan Prasarana Transportasi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda No.1 Tahun 2023 :

Dukungan layanan transportasi pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut pertumbuhan ekonomi :

No	KSN/KSP	Prasarana	Keterangan
1	Kawasan Samarinda	Terminal Tipe B Sungai Kunjang, Lempake, Terminal Tipe A Samarinda Seberang, Bandara APT. Pranoto, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Palaran, Dermaga Sungai Kunjang, Dermaga Pasar Pagi/Samarinda Seberang	Dishub Prov. Kaltim, Dishub Kota Samarinda UPBU, Pelindo IV, KSOP, BPTD Wil. XVII
2	Kawasan Sanga-Sanga	Fasilitas Kelengkapan Jalan Provinsi	Dishub Prov. Kaltim
3	Kawasan Muara Jawa	Terminal Handil, Fasilitas Kelengkapan Jalan Provinsi	Dishub Prov. Kaltim
4	Kota Balikpapan	Terminal Tipe A Batu Ampar, Bandara SAMS Balikpapan, Penyeberangan Kariangau, TPK Kariangau	BPTD Wil. XVII, Angkasa Pura I, Pelindo IV
5	Kawasan Industri Bontang	Terminal Tipe B Bontang, Bandara Khusus Bontang	Dishub Prov. Kaltim, Badak NGL
6	Kawasan Industri Kab. Kukar	Terminal Tipe B Timbau Tenggarong	Dishub Prov. Kaltim
7	Kawasan Industri Maloy Kab. Kutim	Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Sangkulirang	Maloy Batuta Trans Kalimantan
8	Kawasan Industri Buluminung Kota Balikpapan dan Kab. PPU	Penyeberangan Penajam	PT. ASDP, Dishub Kab. PPU

2.4.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan :

1. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang berada diantara perairan ALKI II;
2. Keberagaman Sumber Daya Alam Kalimantan Timur yang beraneka ragam, yang memungkinkan lahirnya inovasi-inovasi di Bidang Perhubungan;
3. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang proporsional karena masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemampuan yang sangat signifikan untuk dikembangkan;
4. Penyebaran penduduk di Kalimantan Timur yang tidak merata, sehingga sangat memerlukan kesinambungan dan integrasi sektor transportasi kewilayahan;
5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur;
6. Kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur;
7. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur;
8. Kemajemukan tersedianya sarana dan prasarana di Kalimantan Timur;
9. Lemahnya pelaksanaan regulasi Bidang Perhubungan di Daerah;
10. Minimnya Regulasi/Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Bidang Perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara;
11. Kurang optimalnya tingkat konsistensi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
12. Reharmonisasi Regulasi antara Pusat dan Daerah;
13. Pengembangan Pelabuhan Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) menjadi peluang Pendapatan;
14. Menjadikan Kaltim Berdaulat di Bidang Perhubungan;
15. Sinkronisasi Konektivitas ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Tantangan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda No.1 Tahun 2023 :

1. Konektivitas dan aksesibilitas terhadap Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Sarana dan prasarana sistem jaringan jalan (terminal penumpang/barang & jembatan timbang), sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan bandar udara umum dan bandar udara khusus;
3. Integrasi antar moda transportasi untuk mendukung konektivitas antar jaringan dan konektivitas ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Peluang Pengembangan Pelayanan :

1. Keinginan dan cita cita Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk mengintegrasikan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah;
2. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur yang dominan konsumtif, sehingga memacu pelayanan transportasi yang harus merata dan mencukupi;
3. Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan yang berkeinginan untuk menambah kemampuan kompetensi keteknisan;
4. Sumber Daya Alam yang melimpah sangat memungkinkan untuk mendapat alokasi anggaran pembangunan Bidang Perhubungan secara proporsional
5. Peningkatan kebutuhan informasi dan teknologi, memacu untuk senantiasa berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan;
6. Kondisi semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Timur;
7. Tingkat kepedulian masyarakat Kalimantan Timur yang tinggi, akan pentingnya pemenuhan fasilitas perhubungan baik moda darat, laut dan udara
8. Peningkatan pelayanan transportasi darat yang bersifat missal dan ramah lingkungan untuk angkutan barang dan orang;

9. Komitmen para pengambil keputusan terkait dengan SDGs dan Pengarustamaan Gender (PUG);
10. Adanya upaya harmonisasi regulasi oleh para pengambil kebijakan;
11. Adanya upaya penyelarasan program-program prioritas yang mendukung percepatan pembangunan Kawasan Khusus baik Kawasan Industri, Pusat Industri, Pusat Pemukiman dan Daerah Perbatasan, Pedalaman dan tertinggal;
12. Dukungan Project Prioritas Pembangunan Transportasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kab. Penajam Paser Utara dari Pemerintah Pusat.

D. Peluang Pengembangan Pelayanan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda No.1 Tahun 2023 :

1. Arah perencanaan pembangunan yang telah selaras dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Telah adanya sarana dan prasarana transportasi yang menunjang aktivitas pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
3. Perencanaan dan pembangunan simpul – simpul transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) yang telah berjalan sesuai rencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU TRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan, CCTV jalan;
- b. Masih adanya kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan;
- c. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
- f. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
- h. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
- i. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP;
- j. Inflasi daerah yang diakibatkan terhambatnya arus angkutan orang dan barang

2. Bidang Pelayaran

- a. Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelaikan berlayar untuk kapal – kapal angkutan SDP;
- b. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi terkait regulasi penanganan kapal – kapal SDP;

- c. Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal – kapal yang berlayar di laut dan SDP;
- d. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS SDP;
- f. Kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan SDP;
- g. Masih adanya fasilitas dermaga sungai dan penyeberangan yang kurang layak dan tidak memadai sehingga perlu peningkatan/perbaikan sesuai dengan perkembangan transportasi saat ini;
- h. Kurangnya konektivitas angkutan laut dan SDP ke tujuan wisata daerah;
- i. Belum optimalnya pelaksanaan SOP penanganan kapal – kapal Angkutan SDP di Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Masih adanya pelabuhan yang belum diserahkan pengelolaannya sesuai kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Rendahnya kesadaran Badan Usaha Kepelabuhanan, angkutan dan jasa terkait angkutan diperairan untuk melaporkan setiap kegiatan usahanya;
- l. Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan Bidang Pelayaran di Kalimantan Timur.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
- b. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
- c. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga SDP;
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/Dermaga SDP di Kaltim;

- f. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se-Kaltim;
- g. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
- h. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. UPTD Terminal Type B

- a. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
- f. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Tipe B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
- g. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Type B di Kalimantan Timur;
- h. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
- i. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
- j. Belum adanya regulasi tentang legalitas aset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi;
- k. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat.

3.1.2 Identifikasi Potensi Kewilayahan

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai beberapa potensi untuk dikembangkan antara lain :

1. Wilayah Bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Timur dapat dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan, kehutanan dan pertanian bagi komoditi ekspor karena memiliki pangsa

pasar yang luas dan nilai ekonomis tinggi. Komoditas tersebut meliputi hasil perkebunan tanaman keras, hasil hutan tanaman industri.

2. Wilayah Bagian Selatan dan Utara selain Kelapa Sawit dan Batu Bara, juga berpotensi dikembangkan wisata laut serta kawasan perikanan.
3. Sebagai kelengkapan dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah bagian Utara Prov. Kaltim ini, perlu dikembangkan beberapa prasarana perhubungan sebagai berikut :
 - a. Pelabuhan Laut Internasional Maloy Teluk Golok yang berlokasi di Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur yang berfungsi sebagai outlet/inlet bagi komoditas Batu Bara (Miang Besar) ; komoditas CPO / kelapa sawit dan turunannya (Teluk Golok) ; Ekspor Import untuk Cargo (Teluk Golok) ; Penumpang (Maloy eksisting) ; komoditi perikanan (di Bual-Bual).
 - b. Pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan terutama palm oil industry, yang dapat menampung hasil; perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yaitu pembangunan pelabuhan di Karingau (TPK) dan Pelabuhan Buluminung Kab. Penajam Paser Utara.
 - c. Industri semen Kalimantan Timur, untuk memasok kebutuhan semen di Provinsi Kalimantan Timur serta Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara akan dibangun Pelabuhan Laut di Teluk Sulaiman Kab. Berau.
 - d. Pengembangan jaringan jalan baru yang dapat lebih luas mengakses ke sentra-sentra produksi hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah timur dengan pusat industri pengolahannya yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Buluminung, yang dimaksudkan juga untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi wilayah kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

- e. Pengembangan Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau lebih difokuskan pada kegiatan arus barang dan penumpang dari Pulau Jawa atau daerah lain serta untuk menampung arus kegiatan dari wilayah belakang Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pembukaan jalur penerbangan nusantara lainnya atau ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Selainitu juga dilakukan pengembangan jalur penerbangan reguler intra kalimantan bagi 3 (tiga) Bandar Udara lainnya yaitu : Bandara Maratua di Kab. Berau (Destinasi Wisata Pulau Derawan dan sekitarnya) ; Bandara Melalan di Kab. Kutai Barat dan rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kab. Mahakam Ulu.
- g. Pengembangan intermoda transportasi regional kalimantan antara moda angkutan sungai, laut, kereta api, jalan raya dan udara. Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana transportasi adalah pengembangan sistem jaringan prasarana atau simpul strategis yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai struktur tata ruang yang meliputi sistem jaringan transportasi jalan, sungai, Penyebarangan, laut, dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul pengembangan transportasi yang direncanakan dapat menunjang pengembangan wilayah secara keseluruhan.

3.1.3 Identifikasi Tujuan Berdasarkan Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Pengembangan angkutan massal pada lintas Samarinda-Balikpapan ; Samarinda - Bontang - Sangatta - Berau (Kawasan SAMBOSABE)
- b. Meningkatkan kapasitas seat penumpang (dari MPU ke bus sedang/besar);
- c. Mengembangkan trayek angkutan bus Bandara APT. Pranoto Samarinda ke pusat-pusat bangkitan penumpang dan atau pusat-pusat industri;

- d. Mengembangkan pelayanan daerah terisolasi dengan angkutan perintis;
- e. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Provinsi;
- f. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, pagar pengaman dan lain-lain) pada ruas jalan Provinsi;
- g. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
- h. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi teknis dan tenaga PPNS Jalan;
- i. Tersedia Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Menurunnya angka kecelakaan baik kategori ringan, sedang dan atau berat;
- k. Tersedianya dokumen rencana induk/master plan LLAJ Prov. Kaltim;
- l. Menurunnya tingkat pelanggaran (ODOL) angkutan barang di jalan;
- m. Terpenuhinya pelayanan angkutan umum AKDP guna mendukung mobilitas masyarakat di Kalimantan Timur
- n. Terpenuhinya SPM angkutan umum AKDP di Kaltim;
- o. Terwujudnya sistem manajemen keselamatan (SMK) operator angkutan umum AKPD di Kaltim;
- p. Menurunnya tingkat kecelakaan angkutan di Jalan Provinsi;
- q. Terbangunnya terminal Type B di masing-masing Kab/Kota di Kalimantan Timur;
- r. Tercapainya target Capaian Kinerja Kepuasan Masyarakat pengguna Terminal type B di Kalimantan Timur
- s. Mendukung IKN;

2. Bidang Pelayaran

- a. Peningkatan pelayanan trayek angkutan penumpang dan barang pada daerah yang masih terisolasi dan pelayanan trayek angkutan barang;
- b. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

- c. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Kaltim;
- d. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- e. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- f. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- g. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi.
- h. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan;
- i. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan;
- j. Terpenuhinya standar keselamatan kapal yang berlayar diperairan daratan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- k. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT;
- l. Terbangunnya dermaga sungai Aji Imbut Kab. Kutai Kertanegara;
- m. Terbangunnya dermaga sungai Muara Kaman Kab. Kutai Kertanegara;
- n. Terbangunnya Dermaga Sungai Tabang Kab. Kutai Kertanegara;
- o. Peningkatan Pelabuhan Sungai Melak Kab. Kutai Barat;
- p. Peningkatan Pelabuhan Sungai Tering Kab. Kutai Barat;

- q. Peningkatan Pelabuhan Sungai Ujoh Bilang Kab. Mahulu;
- r. Peningkatan Pelabuhan Sungai Long Pahangai Kab. Mahakam Hulu;
- s. Peningkatan Pelabuhan Sungai Senaken Tana Paser;
- t. Peningkatan Pelabuhan Sungai Meridan di PPU;
- u. Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Kab. Kutai Timur;
- v. Terlaksananya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan oleh Pemerintah Daerah;
- w. Mendukung IKN.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Terbangunnya jaringan trase Kereta Api Umum dan Barang di Kalimantan Timur;
- b. Terbangun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- c. Tersedianya System Informasi Manajemen Keterpaduan Moda/antar moda di Kalimantan Timur;
- d. Terintegrasinya layanan terminal type di Kalimantan Timur secara on line;
- e. Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional;
- f. Beroperasinya secara optimal pelabuhan pengumpan regional di Kalimantan Timur;
- g. Tersedianya dokumen lingkungan di Pelabuhan Pengumpan Regional dan Terminal Type B se- Kalimantan Timur;
- h. Mendukung IKN.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Kategori	Masalah Utama		Masalah		Akar Masalah		Isu Strategis
1	2	3		4		5		6
1.	Lalu Lintas Jalan	1.	Ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan yang belum optimal di jalan Provinsi (Pengadaan perlengkapan jalan yang kurang, dan yang habis umur teknis/rusak)	1.	Kurangnya ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan	1.	Belum terpenuhinya kebutuhan pengadaan perlengkapan fasilitas keselamatan pada ruas jalan provinsi (meliputi rambu jalan, marka jalan, paku jalan, pagar pengaman jalan, cermin, deliniator, RPPJ, lampu penerangan jalan dan CCTV yang memenuhi persyaratan teknis)	Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi darat
	Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan	2.	Tingginya pelanggaran operasional kendaraan angkutan barang (ODOL), penggunaan crossing jalan oleh perusahaan tambang/perkebunan sawit dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi MRLL di jalan provinsi	1.	Kurangnya kepatuhan pengguna jalan dan pelaku usaha terhadap manajemen rekayasa lalu lintas	1.	Kurangnya sosialisasi dan pengawasan MRLL dan andalalin di jalan Provinsi serta pengawasan Perda tentang jalan tambang dan sawit	
		1.	Kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan yang melibatkan angkutan umum (angkutan orang dan barang umum) di jalan Provinsi dan inflasi daerah yang tinggi	1.	Kendaraan yang tidak berkeselamatan (ODOL) dari luar dan dalam daerah Kaltim	1.	Belum optimalnya pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan	
				2.	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum/barang AKDP	1.	Banyaknya kendaraan barang dari luar Kaltim yang beroperasi di Kaltim dan kurang tertibnya dalam mengurus uji kendaraan bermotor secara berkala dan perizinannya	
				3.	Kesadaran masyarakat terkait keselamatan ber-lalu lintas yang masih rendah	1.	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa	
				4.	Inflasi daerah yang mengakibatkan angkutan orang atau barang melakukan over loading	1.	Tingginya biaya operasional angkutan orang atau barang sehingga diperlukan subsidi ongkos angkut	
		2.	Jumlah pengguna angkutan umum yang semakin menurun	1.	Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dan angkutan sewa khusus (online) sebagai moda transportasi utama	1.	Fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum yang tidak menarik masyarakat (terminal, armada dan akses ke terminal)	
						2.	Layanan angkutan umum yang tidak dapat diandalkan dalam ketepatan waktu	
						3.	Angkutan sewa khusus (online) yang memberikan banyak kemudahan dan belum adanya	
			Belum optimalnya pelayanan dan pembangunan sektor		Prasarana perhubungan		skema Buy The Service untuk angkutan perkotaan	
		1.	perhubungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan pengguna transportasi	1.	masih ada yang belum memiliki dokumen lingkungan dan dokumen teknis sesuai peraturan	1.	Panjangnya tahapan untuk memenuhi semua dokumen lingkungan dan dokumen teknis lainnya	
							Masih terbatasnya implementasi	

4.	Sumber Daya Manusia	1.	Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	1.	Belum adanya peta kompetensi SDM	1.	Belum optimalnya pelatihan peningkatan kompetensi SDM PNS dan Non PNS	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja ASN
				2.	Belum adanya penambahan ASN	1.	Belum adanya proses perekrutan ASN baru	
					Belum optimalnya			

3.1.4 HASIL TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapat diuraikan arah kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Arah Kebijakan Rencana Strategis 2020-2024
Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Optimalisasi simpul transportasi eksisting • Pembangunan simpul transportasi baru • Pembagian komoditi barang ekspor impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia • Reaktivasi jalur moda transportasi • Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia • Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana,	• Penguatan Jaringan Transportasi Eksisting • Perluasan jaringan layanan transportasi • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda • Pembangunan fasilitas alih moda dan multi moda • Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi • Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan PSN • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi

		perbatasan, terluar, dan terpencil • Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local • Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi	• Penyiapan kompetensi keahlian professional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia • Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda • Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial?
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	• Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi • Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi • Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan • Penguatan skema pendanaan pengembangan system	• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP • Dukungan terhadap transportasi ramah

		transportasi perkotaan • Mendukung kinerja logistic nasional	lingkungan gender, difabel, dan lansia • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi • Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (Buy The Service) • Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat) • Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestic • Pengembangan sistem informasi logistic (e-logistic) • Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland • Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri • Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	• Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkotaan, KIR <i>online</i>, <i>travel data recording</i> • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan	• Penegakan hukum • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan • Pembatasan usia saran prasarana transportasi • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi

		transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi • Control kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian • Pengembangan system informasi terkait security awareness di setiap lokasi simpul utama transportasi • Pemenuhan SDM keselamatan dan keamanan transportasi darat, KA, Laut, Udara	• Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan • Edukasi keselamatan transportasi • Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	• Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang	• Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi • Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi keputusan atau peraturan menteri perhubungan

		transportasi yang telah ditetapkan	• Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam keputusan atau peraturan menteri perhubungan • Peningkatan EST (Environmentally Sustainable Transportation) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar
			• Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	• Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi • Pembentukan SDM yang berkarakter dan berintegrasi • Peningkatan relevansi dan daya saing lembaga diklat SDM transportasi • Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi	• Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni • Peningkatan <i>Link and Match</i> SDM Transportasi • Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan • Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti • Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai agama • Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara • Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi disektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi • Peningkatan kualitas dan pengembangan penelitian (<i>Research & Development</i>) • Transformasi kelembagaan Balai/UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN • Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga

			pendidikan dan pelatihan SDM transportasi
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	• Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.	• Menghitung Nilai Indeks berkelanjutan (<i>sustainability index</i>) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan <i>feedback</i> bagi peningkatan kualitas sistem transportasi • Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor transportasi Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	• Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan	• Melakukan reviu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu • Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi • Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Dinas Perhubungan • Pengembangan sistem e-monev untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan • Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)

8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	• Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di Dinas Perhubungan • Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten • Penyempurnan SOP layanan transportasi • Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Dinas Perhubungan • Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT • Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronis regulasi antar lembaga • Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian	• Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Dinas Perhubungan • Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi • Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil • Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi • Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung <i>smart city</i> pada kota besar dan metropolitan Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Dinas Perhubungan
----	---	--	---

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan.

Tabel. 3.3.
Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan
Peserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Belum adanya pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia	Perlu dilakukan pengoptimalan simpul transportasi eksisting dalam penguatan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi dan belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi dan memaksimalkan layanan angkutan massal diperkotaan
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan,	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi dan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan,	Terus meningkatkan penanganan gangguan keselamatan transportasi dengan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan,

		pengendalian dan pelayanan	pengendalian dan pelayanan	pengendalian dan pelayanan
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan dengan adanya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan dengan melakukan penelitian di bidang perhubungan yang berkualitas
6.	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda serta adanya pengoptimalan penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

		pada sektor transportasi di daerah	pada sektor transportasi di daerah	pada sektor transportasi di daerah
7.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Perlunya meningkatkan pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerja dinas perhubungan	Kurang maksimalnya pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan terhadap kinerjadinas perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	Perlunya mewujudkan <i>good governance</i> dalam bidang pelayanan perhubungan dan kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan dan kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan melakukan pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi

3.1.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036 telah dilaksanakan peninjauan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Ulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Ulu	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.	Pembangunan terminal penumpang Tipe Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3.	Pembangunan terminal penumpang Terpadu di Ibukota Provinsi	Belum terbangunnya terminal penumpang terpadu di Ibukota Provinsi Kaltim	Belum terbangunnya terminal penumpang Terpadu di Kota Samarinda	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4.	Pengembangan dan peningkatan Terminal Type B Sei Kunjang, Lempake, Sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B Sei Kunjang, Lempake, Sangatta,, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B Sei Kunjang, Lempake, Sangatta,, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan	Terus ditingkatkannya fasilitas pelabuhan penyeberangan di

	penyeberangan antar dan atau dalam provinsi	penyeberangan di Prov. Kaltim	penyeberangan di Provi.Kaltim	Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota antar dan atau dalam Provinsi	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya jangsan angkutan penyeberangan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat
7.	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Kaltim	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur
8.	Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Terus ditingkatkannya prasarana pelabuhan di Maloy
9.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan
10.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Lok Tuan Kota Bontang
11.	Pembangunan dan	Belum optimalnya	Belum optimalnya	Terus ditingkatkan pembangunan dan

	pengembangan pelabuhan pengumpul Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	pemb. dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur
12.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Redeb, Mantaritip dan rencana Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan pelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritip dan Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Belum optimalnya pemb. dan pengembangan pelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritip dan Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kabupaten Berau
13.	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam Prov. Kaltim	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai dan Danau pada Alur Pelayaran Sungai Mahakam
14.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu
15.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahakam Hulu	Belum Optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahulu	Belum Optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoh Bilang Kab. Mahulu
16.	Pembangunan dan pengembangan	Belum optimalnya pembangunan	Belum optimalnya pembangunan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan

	Bandara Datah Dawai Kab. Mahakam Hulu	dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu	dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu	Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu
17.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian berupa pembangunan jalan kereta api dan rencana pembangunan stasiun kereta api	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya pembangunan sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur
18.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kawasan Perkotaan Kota Balikpapan	Belum tersediannya Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Belum tersediannya Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkannya pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan
19.	Pengembangan sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder)	Belum tersediannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan	Belum tersediannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan	Terus dikembangkannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan

3.1.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merujuk pada Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim dan Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan kedalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 2024-2026 terhadap rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup mendasari adanya keinginan dan semangat untuk melakukan perubahan dalam

penyusunan cita-cita lima tahun kedepan dalam RENSTRA 2024-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dengan adanya percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *good governance*.
2. Mendasari terjadinya dinamika perekonomian Regional, domestik maupun global yang mengharuskan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa diharuskan siap menghadapi perubahan serta memperhatikan keberadaan Kalimantan Timur yang berada di wilayah AKLI II yang sangat berpotensi untuk menjadi beranda depan dalam pembangunan Indonesia Wilayah Tengah. Dimana hal ini mengharuskan Kalimantan Timur mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya Provinsi yang maju, untuk itu dipandang perlu untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, oleh karena itu melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 telah diterbitkan MP3EI Tahun 2011-2025, yang akan memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, khususnya Regional Kalimantan Timur.
3. Adanya beberapa kejadian bencana alam (banjir, jalan putus dan longsor) yang masih melanda wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan isu strategis yang perlu dimunculkan mengingat berbagai bencana tersebut cukup berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan prasarana transportasi, terutama yang berada di kawasan rawan bencana.
4. Adanya kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional melalui Inpres No.9 Tahun 2000 mengamanahkan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk megintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana dan program sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan, dengan prediksi program yang terindikasi berpotensi berdampak pada Isu Strategis KLHS Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP;
2. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan;
3. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara.

Dari 3 (tiga) Program tersebut yang paling berpotensi terindikasi berdampak pada Isu Strategis KLHS adalah Program pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara.

1. Mitigasi dampak program terhadap aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan

Program	Dampak program terhadap aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Transportasi Darat : a. Mempengaruhi terjadinya konversi lahan produktif yang ada di sisi kanan kiri jalan b. Meningkatkan pencemaran lingkungan (sampah, udara) disekitar terminal yang berakibat pada meningkatnya vector penyakit	a. Kajian lingkungan untuk pembangunan terminal beserta fasilitas penunjang b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan
	Transportasi Laut, Sungai & Danau : a. Mengganggu ekosistem pantai, laut, sungai dan danau b. Meningkatkan abrasi disisi kanan kiri pelabuhan c. Meningkatkan pencemaran lingkungan	a. Kajian lingkungan untuk pembangunan pelabuhan, terminal khusus dan TUKS b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan c. Mempertimbangkan pengendalian ekosistem pantai,

	d. Dapat memicu meningkatnya pemukiman yang tidak teratur disekitar, pelabuhan terminal yang berakibat pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat e. Mengurangi luas wilayah tangkapan nelayan tradisional	laut, sungai dan danau
	Transportasi Udara : a. Memicu alih fungsi lahan disekitar bandara b. Meningkatkan kebisingan c. Daerah resapan air berkurang sehingga run off meningkat d. Pembatasan kawasan terbangun di sekitar bandara	a. Kajian lingkungan untuk pembangunan bandara beserta fasilitas penunjangnya b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan c. Pembuatan zoning regulation untuk kawasan permukiman di sekitar bandara

2. Mitigasi dampak program terhadap aspek pelayanan infrastruktur dan daya saing

Program	Dampak program terhadap aspek pelayanan infrastruktur dan daya saing	Mitigasi Dampak
Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Dapat memicu meningkatnya permukiman baru yang tidak teratur disekitar terminal, pelabuhan terminal khusus, dan Bandara	Pembuatan zoning regulation untuk kawasan permukiman disekitar terminal, pelabuhan dan terminal khusus dan Bandara

3. Mitigasi dampak program terhadap aspek social ekonomi dan kesehatan masyarakat

Program	Dampak program terhadap aspek social ekonomi dan kesehatan masyarakat	Mitigasi Dampak
---------	---	-----------------

Pembukaan dan peningkatan transportasi darat, laut, sungai, danau dan udara	Meningkatnya kerentanan sosial	a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat b. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
---	--------------------------------	--

Berdasarkan identifikasi perkiraan dampak negative yang ditimbulkan oleh program prioritas diatas, terkait dengan upaya meminimalisir dampak negative terhadap Isu KLHS Prov. Kalimantan Timur, upaya dan rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya mitigasi secara terencana dan terkendali, melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;
2. Melakukan kajian lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang, baik tata ruang pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan :
 - a. Peraturan dan mekanisme izin pinjam pakai, jika rencana kegiatan (Non kehutanan) berada pada kawasan budidaya kehutanan (KBK);
 - b. Tidak termasuk dalam area yang dilarang sesuai SK Menteri Kehutanan No. 608.
3. Dalam skala proyek, pembangunan fisik dari program-program tersebut harus mempunyai kajian lingkungan
4. Terkait dengan pelayanan infrastruktur dan daya saing, maka harus memperhatikan :
 - a. Peraturan Daerah No : 10 Tahun 2012
 - b. Pengetatan perizinan pembangunan pelabuhan. Terminal, Bandara beserta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan;
 - b. Pengkajian lokasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas

Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- a. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi;
- c. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pelayaran (pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan).

- a. Pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan/dermaga;
- b. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya penguatan sektor ekonomi daerah dan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi khususnya untuk aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara komprehensif dari sisi pemenuhan infrastruktur, keselamatan dan pembinaan badan usaha.

3. Peningkatan pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian.

- a. Peningkatan kemudahan dan kenyamanan pelayanan antarmoda merupakan tuntunan dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang efektif dan efisien;

- b. Peningkatan pelayanan antarmoda di Kalimantan Timur guna mewujudkan antarmoda yang terintegrasi dengan pemadu moda dimulai dengan perencanaanyang matang sehingga dapat diperoleh informasi simpul – simpul transportasi yang terintegrasi dan memadai.

4. Peningkatan pelayanan terminal.

- a. Pengelolaan Terminal Tipe oleh Pemerintah Provinsi merupakan amanat UU 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Pelayanan terminal menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam tugas dan fungsinya sehingga peningkatan pelayanan terminal wajib dilakukan dengan strategi peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B.

5. Peningkatan kinerja pelayanan ASN perhubungan dan akuntabilitas kinerja.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor perhubungan dan pembenahan peraturan/kebijakan/ regulasi di sektor perhubungan adalah faktor penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sektor perhubungan;
- b. Peningkatan kualifikasi teknis dan kompetensi SDM perhubungan;
- c. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada empat komponennya yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dimana Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mendukung Aspek Ekonomi Wilayah pada Tujuan 2 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” yang didukung oleh Sasaran 7 yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar” dengan pengertian adalah pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi (termasuk infrastruktur dasar) meliputi *public utilities*, telekomunikasi, sanitasi (air minum, air limbah domestik dan persampahan), pekerjaan umum (jalan, bendungan, irigasi, drainase, dan sektor transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang/bandar udara) dan ketenagalistrikan dan Tujuan 4 yaitu “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung dengan ASN BerAKHLAK” yang didukung Sasaran 11 yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas Dengan ASN yang Profesional” dengan pengertian pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik dan Sasaran 12 yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel” dengan pengertian meningkatkan birokrasi yang transparan dan berintegritas.

4.1.1. Tujuan

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Kalimantan Timur.

Metadata Tujuan 1:

- Kualitas Infrastruktur adalah Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi (Keselamatan dan Kelancaran Jalan Provinsi, Konektivitas Angkutan AKDP dan Perizinan Angkutan & Trayek) serta Konektivitas Angkutan Laut & SDP dan Perizinan Angkutan & Trayek);

- Ketersediaan Infrastruktur adalah Pembangunan Fisik sektor transportasi (Fasilitas Keselamatan Jalan, Terminal Tipe B, Pelabuhan/Dermaga, Kereta Api dan Bandar Udara) yang menunjang aktivitas ekonomi.

Indikator :

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan.

Metadata Indikator :

Indeks Kualitas Infratraktur (IKLI) Perhubungan adalah Pembobotan dari Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan; Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP; dan Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian.

Tujuan 2 :

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Metadata Tujuan 2:

- Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel adalah birokrasi yang transparan dan berintegritas;
- Pelayanan Publik yang Berkualitas adalah pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik.

Indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah.

Metadata Indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

4.1.2. Sasaran

Sasaran Tujuan 1 :

Untuk memastikan pencapaian tujuan 1 yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur sebagai berikut :

“Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat - pusat perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur”.

Metadata Sasaran:

- Konektivitas adalah tingkat keterhubungan wilayah dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi; Aksesibilitas adalah kenyamanan atau kemudahan untuk mencapai suatu lokasi melalui sistem jaringan transportasi; Berkualitas adalah tersedianya infrastruktur, lancarnya pergerakan angkutan umum serta kemudahan perizinan; dan berkeselamatan adalah kelaikan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator :

Rasio Konektivitas Provinsi.

Metadata Indikator :

Pembobotan dari rasio konektivitas darat, laut & SDP, udara dan kawasan perkotaan di Kaltim

Sasaran Tujuan 2 :

Untuk memastikan pencapaian tujuan 2 yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur sebagai berikut :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah”.

Metadata Sasaran:

- Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;

- Layanan Publik Perangkat Daerah adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi atau perangkat daerah lain yang mempunyai kepentingan pada perangkat daerah itu, sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Indikator :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Metadata Indikator :

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan di Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dinas perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 (TC.25)
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)
1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Kalimantan Timur		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	72	80	85	90
	1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat - pusat perekonomian di Wilayah Kalimantan Timur	Rasio Konektivitas Provinsi (Angka)	0,816	0,846	0,864	0,882

2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Angka)	78,10	78,50	79,30	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	84,41	85,00	85,50	86,00
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	73	76	77	78
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	81	83	85	87

Ultimate Outcome/Tujuan :
Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

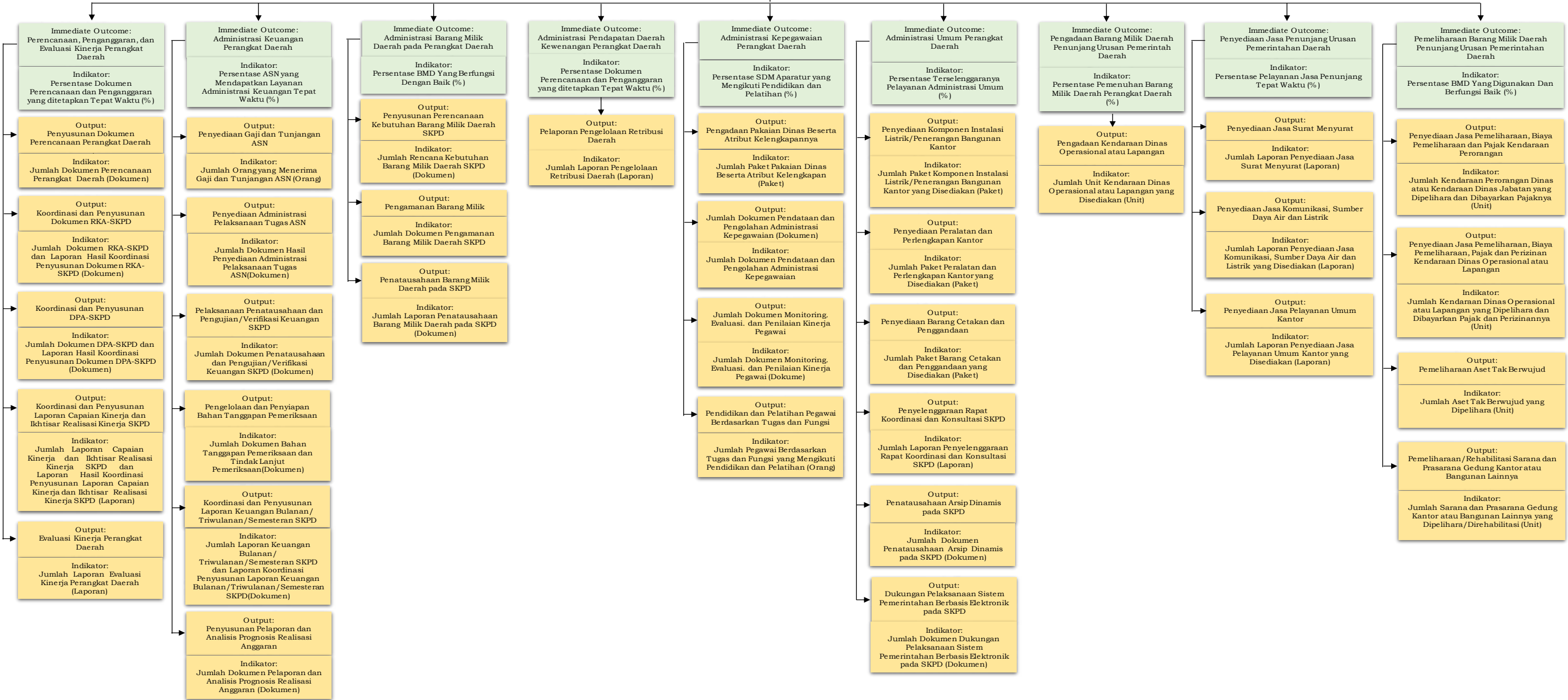
Indikator :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Angka)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Angka)

Ultimate Outcome/Sasaran :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

Indikator :
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)

Intermediate Outcome :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Indikator :
Indeks Kualitas Layanan kesekretariatan (Indeks)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan :

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat;
2. Mendukung pengendalian inflasi daerah dari sektor transportasi;
3. Menyediakan dokumen lingkungan perhubungan;
4. Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B;
5. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan serta konektivitas ke tujuan wisata daerah;
6. Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi untuk mendukung IKN;
7. Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah serta sinergitas pemenuhan kebutuhan SDM.

5.1.2. Kebijakan Perangkat Daerah :

1. Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan;
2. Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan dan kelancaran distribusi angkutan orang dan barang dengan subsidi ongkos angkut;
4. Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan;
5. Membangun/Mengembangkan terminal tipe B;
6. Meningkatkan koordinasi untuk P3D dan meningkatkan sarana prasarana pelabuhan laut/dermaga dan SDP;
7. Meningkatkan kualitas layanan angkutan laut dan SDP serta konektivitas ke tujuan wisata daerah;
8. Mengembangkan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pepadu moda serta mendukung konektivitas transportasi ke IKN dan tujuan wisata daerah;

9. Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah;
10. Meningkatkan kompetensi SDM, pemenuhan SDM serta mutu pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur;
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KINERJA	PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat	1	Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan	Menurunnya Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Mendukung pengendalian inflasi daerah dari sektor transportasi	2	Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu sarana angkutan jalan		
	3	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan dan kelancaran distribusi angkutan orang dan barang dengan subsidi ongkos angkut;		
	4	Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan	Menurunnya Kejadian Kecelakaan per 1000 Keberangkatan AKDP	
Menyediakan dokumen lingkungan perhubungan	5	Membangun/ Mengembangkan terminal tipe B		
Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B				
Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan serta konektivitas ke tujuan wisata daerah	1	Meningkatkan koordinasi untuk P3D dan meningkatkan sarana prasarana pelabuhan laut/dermaga dan SDP	Meningkatnya Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	2	Meningkatkan kualitas layanan angkutan laut dan SDP serta konektivitas ke tujuan wisata daerah		

Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi untuk mendukung IKN	1	Mengembangkan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana pepadu moda serta mendukung konektivitas transportasi ke IKN	Tersedianya Penetapan Kebijakan Jaringan Perkeretaapian	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja	1	Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah serta sinergitas pemenuhan kebutuhan SDM	2	Meningkatkan kompetensi SDM, pemenuhan SDM serta mutu pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur		
	3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024 – 2026, rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebanyak 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yaitu :

Dinas Perhubungan :

Program Manajerial :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Penyusunan RENSTRA

- Penyusunan Dokumen Tatahan Transportasi Wilayah Kalimantan Timur

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Prioritas :

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Pengadaan dan Pemasangan Rambu, Marka, Paku Jalan, Pagar Pengaman Jalan, Zona Selamat Sekolah, Opsional CCTV di Jalan Provinsi.

2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
 - Penyusunan DED, UKL-UPL Terminal Tipe B Kutai Barat dan Terminal Tipe B Penajam Paser Utara

2.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - Rekomendasi teknis MRLL, Andalalin dan Study Lalu Lintas Harian ruas jalan provinsi
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

- Pelaksanaan penegakan hukum kendaraan angkutan barang umum yang terindikasi *Over Dimensi dan Over Loading*

2.4 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
 - Pembinaan pengemudi kendaraan bermotor
 - Pemilihan pelajar pelopor
 - Sosialisasi berkendara yang berkeselamatan ke sekolah menengah atas
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - Audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan
 - Forum keselamatan angkutan jalan
 - Inspeksi keselamatan (ramp check)
 - Studi Rencana Aksi Keselamatan (RAK)
 - Pengawasan dan koordinasi terminal tipe B

- 3) Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pengawasan dan koordinasi Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- 2.5 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
 - Monitoring dan evaluasi angkutan barang dan tarif angkutan
 - 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Studi subsidi angkutan perintis
 - Pelaksanaan subsidi ongkos angkut
- 2.6 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
 - Studi pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema Buy The Services di Kota Samarinda dan Balikpapan dan pelaksanaannya
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
 - Sosialisasi Studi pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema Buy The Services di Kota Samarinda dan Balikpapan dan pelaksanaannya
- 2.7 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Penerbitan pertimbangan teknis dan kartu pengawasan angkutan orang dalam trayek
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
 - Pemilihan abdi yasa teladan
 - Penilaian penghargaan Wahana Tata Nugaraha (WTN)
 - Penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan bidang perhubungan
- 2.8 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
 - Pengawasan dan pengendalian angkutan orang tidak dalam trayek
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai

wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Penerbitan pertimbangan teknis angkutan orang tidak dalam trayek

III. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan

- 1) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Penerbitan pertimbangan teknis dan kartu pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan
 - Inspeksi keselamatan (ramp check) angkutan sungai danau dan penyeberangan
 - Pengadaan life jacket, APAR dan Life Buoy

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
 - Forum Keselamatan Pelayaran
- 3.2 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
 - Studi jaringan trayek angkutan sungai danau Kalimantan Timur
 - Studi Tarif angkutan sungai danau Kalimantan Timur
 - Studi jaringan trayek angkutan penyeberangan Kalimantan Timur
 - Monitoring tarif ASDP

3.3 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Penerbitan pertimbangan teknis dan sertifikat standar badan usaha jasa terkait angkutan di perairan
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

- Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan usaha jasa terkait angkutan di perairan

3.4 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

- Studi subsidi ongkos angkut di perairan Kalimantan Timur
- Studi FS dan SID dermaga di casacade 3 danau
- Studi DED rehabilitasi dermaga melak
- Studi potensi pengelolaan pelabuhan Mantaritip
- Studi DED rehabilitasi dermaga Sungai Kunjang
- Studi kelayakan dermaga kapal klotok (Balikpapan Baru dan Penajam Paser Utara)
- Studi DED rehabilitasi dermaga Ujoh Bilang Mahakam Ulu dan Long Bagun

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

4.1 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

- Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Prov. Kaltim
 - Studi kelayakan penyelenggaraan perkeretaapian
 - Studi FS trase 1 perkeretaapian
 - Studi trase perkeretaapian
- 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
- Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Prov. Kaltim dan kelayakan penyelenggaraan perkeretaapian

UPTD Terminal :

Program Manjerial :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Prioritas :

II. Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B

2.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

- 1) Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - Review design terminal Sungai Kunjang

- Pembangunan terminal Sangatta
- Pembangunan terminal Sungai Kunjang
- Revitalisasi terminal Timbau Tenggarong
- 2) Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B
 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terminal
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B
 - Pemenuhan SDM operator terminal
- 4) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - Pembangunan terminal Paser

Pada bagian ini ditampilkan secara rinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, seperti tabel berikut :

Tabel. 6.1 (TC.27)
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

TABEL 6.1 (T-C.27)																			
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR																			
Misi/Tujuan		Sasaran		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Misi 3	: Berdaulat dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan																		
Tujuan 1	: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Di Kalimantan Timur	Sasaran 1	: Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas perhubungan yang berkualitas dan berkeselamatan ke pusat-pusat perekonomian di wilayah Kalimantan Timur			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	75	84	21.871.000.000	87	71.514.000.000	91	18.619.000.000	91	112.004.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
						Rasio Konektivitas Provinsi (Angka)	0,816	0,846	21.871.000.000	0,864	71.514.000.000	0,882	18.619.000.000	0,882	112.004.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
									17.596.000.000		66.751.000.000		13.856.000.000		98.203.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur		
				2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	195	175	6.000.000.000	165	6.000.000.000	155	6.000.000.000	155	18.000.000.000				
						Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	74	82	7.704.000.000	86	56.859.000.000	90	3.964.000.000	90	68.527.000.000				
						Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan (Angka)	0,008	0,006	3.892.000.000	0,005	3.892.000.000	0,004	3.892.000.000	0,004	11.676.000.000				
						2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan (%)	75	80	4.200.000.000	82	4.200.000.000	85	4.200.000.000	85	12.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	5181	2243	4.200.000.000	2243	4.200.000.000	2243	4.200.000.000	6729	12.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (%)	44	53	850.000.000	58	850.000.000	60	850.000.000	60	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	5	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	3	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (%)	44	53	7.704.000.000	58	56.859.000.000	60	3.964.000.000	60	68.527.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2	2	6.000.000.000	1	50.000.000.000	1	760.000.000	3	56.760.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi (Orang)	0	10	104.000.000	10	104.000.000	10	104.000.000	30	312.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
						2.15.02.1.03.00010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1	1	1.500.000.000	1	6.655.000.000	1	3.000.000.000	1	11.155.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi (Dokumen)	4	4	890.000.000	4	890.000.000	4	890.000.000	12	2.670.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	20	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	30	1.200.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	5	4	490.000.000	4	490.000.000	4	490.000.000	12	1.470.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji (%)	75	72	910.000.000	74	910.000.000	76	910.000.000	76	2.730.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2	2	220.000.000	3	320.000.000	3	320.000.000	8	860.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2	10	600.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30	1.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				
		2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	9	90.000.000	9	90.000.000	9	90.000.000	27	270.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur				

					2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia (Unit)	0	15	1.235.000.000	17	1.235.000.000	20	1.235.000.000	20	3.705.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2 15 02 1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	0	15	1.135.000.000	17	1.135.000.000	20	1.135.000.000	20	3.405.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia (Dokumen)	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	3	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan (Unit)	25	100	635.000.000	120	635.000.000	130	635.000.000	130	1.905.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	25	100	300.000.000	120	300.000.000	130	200.000.000	130	800.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	2	4	335.000.000	4	335.000.000	4	435.000.000	12	1.105.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan (Unit)	11	300	322.000.000	310	322.000.000	325	322.000.000	325	966.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	40	4	172.000.000	4	172.000.000	4	172.000.000	12	516.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	11	300	150.000.000	310	150.000.000	325	150.000.000	325	450.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur

				2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP (Angka)	0,85	0,96	3.425.000.000	0,98	3.913.000.000	1	3.913.000.000	1	11.251.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan (Unit)	107	100	350.000.000	105	350.000.000	110	350.000.000	110	1.050.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	107	100	200.000.000	105	200.000.000	110	200.000.000	110	600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia (Dokumen)	1	2	900.000.000	2	850.000.000	1	850.000.000	5	2.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi (Dokumen)	1	2	900.000.000	2	850.000.000	1	850.000.000	5	2.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan (Badan Usaha)	100	60	275.000.000	65	275.000.000	70	275.000.000	70	825.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	88	60	125.000.000	65	125.000.000	70	125.000.000	70	375.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
				2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Laporan)	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur

					2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi (Unit)	0	1	1.900.000.000	2	2.438.000.000	3	2.438.000.000	3	6.776.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun (Unit)	0	2	1.900.000.000	2	2.438.000.000	2	2.438.000.000	6	6.776.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	0	40	850.000.000	45	850.000.000	55	850.000.000	55	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian (%)	0	40	850.000.000	45	850.000.000	55	850.000.000	55	2.550.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
Tujuan 2 :	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Sasaran 2 :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Angka)	78,10	78,50	28.190.000.000	79,30	28.190.000.000	80,01	28.690.000.000	80,01	85.070.000.000	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
							Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	84,41	85,00		85,50		86,00		86,00			
							Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	73	76	28.190.000.000	77	28.190.000.000	78	28.690.000.000	78	85.070.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	81	83		85		87		87			
										28.190.000.000		28.190.000.000		28.690.000.000		85.070.000.000		
					2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	65	70	18.475.000.000	74	18.475.000.000	76	18.975.000.000	76	55.925.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
							Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	9.715.000.000	100	9.715.000.000	100	9.715.000.000	100	29.145.000.000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
					2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu (%)	80	84	1.082.000.000	92	1.082.000.000	92	1.582.000.000	92	3.746.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	3	400.000.000	3	400.000.000	4	900.000.000	10	1.700.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	6	540.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	4	152.000.000	4	152.000.000	4	152.000.000	12	456.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	60	900.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	89	93	15.420.000.000	94	15.420.000.000	95	15.420.000.000	95	46.260.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	84	88	14.600.000.000	90	14.600.000.000	90	14.600.000.000	90	43.800.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	681.600.000	12	681.600.000	12	681.600.000	36	2.044.800.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	28.400.000	12	28.400.000	12	28.400.000	36	85.200.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
					2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	36	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda

				2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	70	91	95.000.000	92	95.000.000	93	95.000.000	93	285.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	15	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah (%)	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	9	9	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	27	120.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	38	17	230.000.000	20	388.000.000	25	310.000.000	25	928.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	-	1	158.000.000	1	80.000.000	2	238.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orange)	65	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	45	450.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	87	91	1.941.000.000	92	2.135.000.000	93	2.003.000.000	93	6.079.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	180	6	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	12	900.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	24	450.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.291.000.000	12	1.292.000.000	12	1.303.000.000	36	3.886.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	50.000.000	2	208.000.000	2	50.000.000	6	308.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	100.000.000	2	135.000.000	2	150.000.000	6	385.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (%)	50	65	352.000.000	70	-	75	210.000.000	75	562.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	2	352.000.000	0	-	2	210.000.000	4	562.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (%)	100	100	4.417.000.000	100	4.417.000.000	100	4.417.000.000	100	13.251.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	36	75.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	992.000.000	12	992.000.000	12	992.000.000	36	2.976.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.400.000.000	12	3.400.000.000	12	3.400.000.000	36	10.200.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda

				2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)	70	91	768.000.000	92	768.000.000	93	768.000.000	93	2.304.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	450.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	7	180.000.000	7	190.000.000	7	190.000.000	7	560.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Unit)	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	24.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	158	413	430.000.000	413	420.000.000	413	420.000.000	413	1.270.000.000	Dinas Perhubungan	Samarinda
				UPTD TERMINAL													
				2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	42	60	755.000.000	63	755.000.000	70	755.000.000	70	2.265.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	24	75.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	18	750.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	21	240.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	36	1.200.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (%)	20	50	75.000.000	60	75.000.000	70	75.000.000	70	225.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	9	225.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu (%)	100	100	2.735.000.000	100	2.735.000.000	100	2.735.000.000	100	8.205.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	36	27.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	36	378.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	36	7.800.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)	25	30	280.000.000	40	280.000.000	50	280.000.000	50	840.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	11	105.000.000	UPTD Terminal	Samarinda
				2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	77	245.000.000	87	245.000.000	97	245.000.000	97	735.000.000	UPTD Terminal	Samarinda

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel. 7.1 (TC.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
(Indikator Kinerja Utama (IKU))

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)	72	80	85	90	90
2	Rasio Konektivitas Provinsi (Angka)	0,816	0,846	0,864	0,882	0,882
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	73	76	77	78	78
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	81	83	85	87	87

Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Formulasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks) :

$$IKLI_{Dishub} = \frac{(Bobot1_{LLAJ} \times nTarget1_{LLAJ}) + (Bobot2_{LLAJ} \times nTarget2_{LLAJ}) + (Bobot3_{Pelayaran} \times nTarget_{Pelayaran}) + (Bobot4_{Kereta Api} \times nTarget_{Kereta Api})}{100}$$

Keterangan :

Bobot1 _{LLAJ}	=	Bobot Indikator 1 sektor LLAJ sebesar (65%)
Bobot2 _{LLAJ}	=	Bobot Indikator 2 sektor LLAJ sebesar (10%)
Bobot _{Pelayaran}	=	Bobot Indikator sektor Pelayaran sebesar (20%)
Bobot _{Kereta Api}	=	Bobot Indikator sektor Perkeretaapian sebesar (5%)
nTarget1 _{LLAJ}	=	Target Capaian Indikator 1 sektor LLAJ tahun ke-n
nTarget2 _{LLAJ}	=	Target Capaian Indikator 2 sektor LLAJ tahun ke-n
nTarget _{Pelayaran}	=	Target Capaian Indikator sektor Pelayaran tahun ke-n
nTarget _{Kereta Api}	=	Target Capaian Indikator sektor Perkeretaapian tahun ke-n

2. Formulasi Rasio Konektivitas Provinsi (Angka) :

$$KT_{Prov} = (KT_{DP} \times WT_{DP}) + (KT_{LSD} \times WT_{LSD}) + (KT_U \times WT_U) + (KT_P \times WT_P)$$

Keterangan :

KT_{Prov} = Rasio Konektivitas Provinsi

KT_{DP} = Rasio Konektivitas Transportasi Darat (KTDP) = (Jumlah Kawasan Strategis Provinsi, Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Perbatasan yang telah diberi subsidi , dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan DIBANDINGKAN Jumlah Kawasan Strategis Provinsi, Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Perbatasan yang telah diberi subsidi , dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan) (semua berjumlah 19 Kawasan berdasarkan RTRW Katim) Angka Rasio adalah 1 s/d 0. Dimana: 1 = seluruh lokasi yang ditetapkan TELAH terlayani; 0 = seluruh lokasi yang ditetapkan BELUM terlayani.

KT_{LSDP} = Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan SDP (KTLSDP) = Jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut, sungai dan danau DIBANDINGKAN dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut *) sesuai dengan Sub Lampiran A1 dan Sub Lampiran A5 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah sebanyak 13 pelabuhan laut dan 50 dermaga sungai danau Angka Rasio adalah 1 s/d 0. Dimana: 1 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut TELAH terlayani; 0 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut BELUM terlayani.

KT_U = Rasio Konektivitas Transportasi Udara (KTU) = Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri + Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis + Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP Perintis) DIBANDINGKAN (Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 166 Tahun 2019 + Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU) yaitu ada 10 Bandara (niaga dan perintis) (APT Pranoto, SAMS, Melalan, Tanjung Bara, Kalimantan, Maratua, Datar Dawai, Ujoh Bilang, Paser, Uyang Lahai).

KT_P = Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan (KTP) = Jumlah kawasan perkotaan prioritas yang telah dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan DIBANDINGKAN Jumlah kawasan perkotaan prioritas Apabila dalam 1 kota sudah ada layanan sistem angkutan umum massal (SAUM) perkotaan maka dihitung = 1 ; Apabila dalam 1 kota belum ada layanan sistem angkutan umum massal (SAUM) maka dihitung = 0 ; 3 Kawasan Perkotaan Prioritas (Samarinda, Balikpapan, Bontang) berdasarkan RTRW Kaltim.

WT_{DP} = Bobot konektivitas transportasi darat & penyeberangan (35,7%)

WT_{LSD} = Bobot konektivitas transportasi laut & sungai danau (35,7%)

WT_U = Bobot konektivitas transportasi udara (25%)

WT_P = Bobot konektivitas transportasi perkotaan (3,6%)

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah adalah nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan di Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan penerapan penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel. 7.2 (TC.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Program Perangkat Daerah
(Indikator Kinerja Kunci (IKK))

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	195	175	165	155	155
2	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP (%)	74	82	86	90	90
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan (Angka)	0,008	0,006	0,005	0,004	0,004
4	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP (%)	0,85	0,91	0,96	0,98	0,98
5	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	0	40	45	55	55
6	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	62	70	74	76	76
7	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100

Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

1. Jumlah kecelakaan di jalan Provinsi merupakan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di ruas – ruas jalan provinsi dimana datanya didapat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

2. Formulasi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP :

$$P_{llakdp} = a \left(\frac{\sum Trayek_{eksisting}}{Trayek_{kebutuhan}} \times 100 \right) + b(Rata - Rata \text{ Bobot Pemenuhan SPM Terminal}) + c((1 - (Rata - Rata \text{ V/C ratio}) \times 100)) + d \left(\frac{Kejadian \text{ Kecelakaan}_{jalan \text{ Prov.}}}{Kejadian \text{ Kecelakaan}_{jalan \text{ Kaltim}}} \times 100 \right)$$

Keterangan :

P_{llakdp} = Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP

a = Bobot Rasio Trayek AKDP (60%)

b = Bobot Pemenuhan SPM Terminal Tipe B (20%)

c = Bobot Rata – Rata V/C Ratio Ruas Jalan Provinsi (10%)

d = Bobot Rasio Kejadian Kecelakaan di Jalan Provinsi (10%)

3. Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan adalah kejadian kecelakaan Angkutan Umum AKDP dan Perintis di Kalimantan Timur setiap 1000 (seribu) keberangkatan.

4. Formulasi Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP :

$$KT_{SDP} = \frac{\sum Trayek \text{ SDP}_{eksisting}}{Trayek \text{ SDP}_{kebutuhan}}$$

Keterangan :

KT_{SDP} = Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP

Trayek $SDP_{eksisting}$ = Jumlah Trayek SDP yang ada

Trayek $SDP_{kebutuhan}$ = Jumlah Trayek SDP yang dibutuhkan

5. Formulasi Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian :

$$P_{KBJP} = \frac{\sum \text{Dokumen}_{eksisting}}{\text{Dokumen}_{kebutuhan}} \times 100$$

Keterangan :

P_{KBJP} = Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian

$\text{Dokumen}_{eksisting}$ = Jumlah Dokumen yang dibuat berupa Dokumen Hasil Studi dan Penetapan Gubernur (Pergub/SK Gub)

$\text{Dokumen}_{kebutuhan}$ = Jumlah Dokumen yang dibutuhkan

6. Formulasi Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan :

$$\text{Indeks}_{Sekt} = (P_{renca} \times \text{Bobot}_{renca}) + (P_{keuangan} \times \text{Bobot}_{keuangan}) + (P_{SDM} \times \text{Bobot}_{SDM}) + (P_{Sarpras} \times \text{Bobot}_{Sarpras})$$

Keterangan :

Indeks_{Sekt} = Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan

P_{renca} = Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu

$P_{keuangan}$ = Persentase realisasi anggaran

P_{SDM} = Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

$P_{Sarpras}$ = Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik

Bobot_{Renca} = Bobot sub komponen perencanaan (40%)

$\text{Bobot}_{keuangan}$ = Bobot sub komponen keuangan (30%)

Bobot_{SDM} = Bobot sub komponen SDM (25%)

$\text{Bobot}_{Sarpras}$ = Bobot sub komponen Sarpras (5%)

7. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti :

$$P_{layanan} = \frac{\text{Keluhan Layanan}}{\text{Keluhan Layanan Ditindak Lanjuti}} \times 100$$

Keterangan :

$P_{layanan}$ = Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti

Keluhan Layanan = Keluhan Layanan yang masuk terkait pelayanan publik di Dinas Perhubungan

Keluhan Layanan Ditindak Lanjuti = Keluhan Layanan yang masuk terkait pelayanan publik di Dinas Perhubungan yang ditindaklanjuti

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan :

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 menggambarkan perencanaan 3 (tiga) tahun kedepan sebagai langkah pedoman pentahapan rencana indikatif program, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan referensi dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan untuk pemantauan serta evaluasi kinerja pelayanan dan rencana pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur yang fungsinya sebagai pedoman dalam penjabaran program kerja 3 (tiga) Tahun sebagai instrument pencapaian Sasaran dan Tujuan RPD 2024 – 2026.

8.2. Saran :

1. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman dalam pengukuran kinerja Tahunan;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Dokumen Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Indikator Kinerja IKK;
- 4 Untuk keselarasan dan sinergitas pencapaian Tujuan dan Sasaran dan dalam upaya mengimbangi kedinamisan tuntutan masyarakat, Dokumen Renstra dapat dilakukan review menyesuaikan kebijakan Pimpinan Daerah.

Samarinda, Mei 2023

KEPALA DINAS



YUDHA PRANOTO, S.E.
NIP. 196408172010061001

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat UU No. 10 Tahun 2016 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada November 2024, untuk daerah yang masa berlaku RPJMD akan berakhir di tahun 2023, diamanatkan menyusun RPD dan RENSTRA PD Tahun 2024-2026. Dokumen RPD akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui PERKADA.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Diskominfo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo tahun 2024 – 2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika, dan Statistik.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 2 bahwa rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; maka dalam penyusunan Rancangan RENJA ini Diskominfo berupaya untuk melaksanakan amanat seperti yang tertulis tersebut.

1.1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja SKPD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

1.1.2 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD

Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, hingga perencanaan pada tataran SKPD adalah Renja SKPD. Penyusunan RPJMD

dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

1.1.4 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L

Setiap tahun selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun Dalam kaitan dengan sistem keuangan, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.1.5 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/kota

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja kabupaten/Kota dilakukan pada saat Forum Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi yang mencakup :

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai :
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.

- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi publik.
- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, dapat tercapai untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/Kota tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kominfo.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Akhir RENJA Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .
- n. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- o. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2.4/6353/ Bapp-II tanggal 13 April 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) menjadi Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024
- p. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 000.7.2.4/11609/Bapp-II tanggal 14 Juli 2023 tentang Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai pedoman PD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2024 sesuai

dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Awal RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.

b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan akhir RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2024.

e. Bab V Penutup

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023, Faktor Penyebab Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu), dan Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra - Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada . Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dengan mempercepat pelaksanaan fisik dan memperketat pengawasan di lapangan.

Dalam rangka mencapai target serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rancangan awal rencana kerja tahun 2024 terdapat 5 program dan 14 kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				87.730.375.101	83,881,219,719	96.91	93,799,568,805.00	31,005,660,111.00	32.53%
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		80 %		37.429.086.750	36,998,053,535	98.85	37,401,617,500.00	14,884,111,389.00	20.61%
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	80 %		37.429.086.750	36,998,053,535	98.85	37,401,617,500.00	14,884,111,389.00	20.61%
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	90 Peserta		146.640.000	140,197,476	95.61	299,040,000.00	34,789,863.00	11.63%
2	16	2	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan	300 Peserta		171.900.000	171,900,000.	100	887,860,400.00	460,000.00	0.05%

						Aspirasi Publik melalui Media Komunikasi Publik								
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Media Center		146.970.000	137,611,380	93.63	447,028,000.00	57,955,000.00	12.96%
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	53 PD		362.972.000	106.310.000	100	3,717,120,300.00	150,476,160.00	4.04%
2	16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	110 Dialog		29.509.440.000	105.782.500	84.29	17,409,291,500.00	5,957,189,326.00	34.21%
2	16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	50 Perangkat Daerah		3.350.864.500	359,047,025	98.92	7,550,000,000.00	7,172,155,651.00	94.99%
2	16	2	1.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Kerjasama		218.592.000	29,450,525,393	99.80	430,000,000.00	57,875,510.00	13.45%
2	16	2	1.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	6 Kegiatan		427.178.000	418,531,900	97.98	1,356,541,000.00	429,182,119.00	31.63%
2	16	2	1.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1900 Liputan		136.200.000	109,632,550	80.49	261,734,300.00	27,668,675.00	10.57%
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45 Orang		207.136.000	200,937,320	97.01%	340,000,000.00	123,899,461.00	36.44%
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	85 Sengketa		2.272.190.250	2,015,186,189	88.69	2,000,000,000.00	622,079,433.00	31.10%
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Laporan		479.004.000	470,528,559	98.23	2,703,002,000.00	250,380,191.00	9.26%
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		3.15 Indeks		7.362.108.000	7,203,081,824	97.84	19,579,510,680.00	4,812,378,47.00	24.57%

2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		80%		3.371.487.200	3,317,757,537	98.41	7,043,814,000.00	701,760,258.00	9.96%
2	16	03	1.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi								
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	20 Sub Domain		350.886.000	350,139,437	99.79	1,641,111,500.00	465,037,658.00	28.33%
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	90%		3.020.601.200	2,967,618,100	98.25	5,402,702,500.00	236,722,600.00	4.38%
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	70%		3.990.620.800	3,885,324,287.	97.36	12,535,696,680.00	4,110,618,089.00	32.79%
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.15 Indeks		872.756.000	862,395,734	98.81	1,978,426,000.00	259,989,158.00	13.14%
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Kegiatan		130.533.500	113,131,375	86.67	789,323,000.00	96,237,000.00	12.19%
2	16	03	1.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	90% OPD		2.194.471.800	2,153,633,367	98.14	3,789,996,080.00	732,291,861.00	19.32%
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	90%		93.900.000	83,635,800	89.07	437,996,800.00	12,790,300.00	2.92%

2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Kegiatan		55.892.500	55,125,960	98.63	134,492,500.00	99,387,100.00	73.89%
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	90% Layanan		138.220.000	133,665,151	96.70	660,237,000.00	24,639,100.00	3.73%
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	2 Aplikasi							
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	90% Layanan		126.537.500	120,558,100	95.27	12,535,696,680.00	72,547,312.00	19.82%
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas									
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	6 Kegiatan		274.808.000	260,424,800	94.77	4,379,280,500.00	2,812,736,258.00	64.22%
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)									
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur	70% OPD		1.255.639.500	1,770,972,461	99.08	3,801,721,068.00	1,708,309,342.00	44.93%
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	70% OPD		1.255.639.500	1,770,972,461	99.08	3,801,721,068.00	1,708,309,342.00	44.93%

2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	1 Dokumen		224.871.500	223,866,700	99.55	520,207,500.00	130,377,066.00	25.06%
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	15 Orang		115.200.000	114,369,200	99.28	286,080,000.00	146,158,976.00	51.09%
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	1 Dokumen		318.130.000	313,326,500.	98.49	942,418,668.00	652,163,500.00	69.20%
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Kegiatan		502,409,000	500,816,161	99.68	751,776,500.00	44,551,200.00	5.92%
2	20	02	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	1 Kegiatan		626,863,000	618,593,900	98.68	1,301,238,400.00	735,058,600.00	56.48%
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	III (Indeks)		340.267.000	314,614,535	92.46	1,458,486,750.00	274,518,797.00	18.82%
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	III (Indeks)		269.467.000	244,387,950	90.69	1,206,955,550.00	207,833,897.00	17.21%
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen		68.418.000	57,796,100	84.47	89,560,000.00	0.00	0%

2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	30 Orang		56.064.000	51,892,900	92.56	406,561,300.00	166,028,097.00	40.83%
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	10 Informasi		80.964.000	77,858,950	96.16	470,704,250.00	22,798,400.00	4.84%
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	100%		64.021.000	56,840,000	88.78	240,130,000.00	19,007,400.00	7.91%
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Kegiatan		70.800.000	70,226,585.	99.19	251,531,200.00	66,684,900.00	26.51%
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Kegiatan		70.800.000	70,226,585.	99.19	251,531,200.00	66,684,900.00	26.51%
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				40.811.439.851	37,594,497,364	92.12%	33,058,232,807.0	9,326,342,236.00	28.21%
2	16	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				304.740.000,	282,326,322	92.64	401,661,000	166,827,160.00	41.53%
2	16	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200.760.000	185,996,000	92.65	119,900,000	108,331,600.00	90.35%
2	16	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				103.980.000	96,330,322	92.64	281,761,000	58,495,560.00	20.76%
2	16	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.307.088.790	10,332,960,415	77.65	12,350,162,412	5,152,422,708.00	41.71%

2	16	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.830.808.790	9,874,320,415	76.96	11,526,942,412	4,807,455,908.00	41.70%
2	16	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				476.280.000	458,640,000	96.30	823,220,000	344,966,800.00	41.9%
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi BMD pada SKPD	12 Bulan		3.750.000	0	0	0	0	0%
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 Laporan		3.750.000	0	0	0	0	0%
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				159.630.000	159,599,000	99.98	514,021,000	27,490,500.00	5.34%
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 Stel		48.000.000	111,599,000	99.97	295,071,000	0.00	0%
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 Orang		111.630.000	48,000,000	100	218,950,000	27,490,500.00	12.55%
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.311.857.000	1,310,301,815	99.88	1,719,193,815.	694,504,709.00	40.39%
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		9.078.000	9,077,500	99.99	19,370,800	19,338,000.00	99.83%
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan		21.432.000	20,052,000	93.56	81,155,300	21,945,000.00	27.04%
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah laporan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan		90.400.000	90,337,150	99.93	129,713,200	51,289,425.00	39.54%
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		1.190.947.000	1,190,835,165	99.99	1,488,954,515	601,932,284.00	40.42%
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.361.427.500	21,266,916,800.	99.56	12,716,613,200	793,355,000.00	6.23%
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit		1.370.072.000.	1,335,410,000.	97.47	900,513,500	611,300,000.00	67.88%
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	1 PD		367.564.000.	364,046,000	99.04	665,972,500	0.00	0%

2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 Unit		19.623.791.500	19,567,460,800	99.71	8,181,377,200	182,055,000.00	2.22%
2	16	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							2,968,750,000	0.00	0%
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 Bulan		3.356.452.761	3,297,290,588	98.24	4,488,257,080	2,279,074,804.00	50.77%
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan		10.740.000	7,881,000	73.38	12,398,400.00	5,397,500.00	43.53%
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan		357.805.241,	346,350,916	96.80	467,885,400	195,824,104.00	41.85%
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		39.400.000	38,170,000	96.88	157,660,000	50,946,000.00	32.31%
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan		2.948.507.520	2,904,888,672	98.52	3,850,313,280	2,026,907,200.00	52.64%
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	12 Bulan		1.006.493.800,	945,102,424	93.90	868,324,300	212,667,355.00	24.49%
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan		277.341.800,	257,672,224	92.91	316,285,900	66,417,355.00	20.99%
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Bangunan		398.452.000,	395,000,000	99.13	199,838,400	0.00	0%
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		330.700.000	292,430,200	88.43	352,200,000	146,250,000.00	41.52%

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset., dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat..
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan dibantu:

- 1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;

2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, dengan dibantu:

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika., dengan dibantu:

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.

- 2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
- 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

- 1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial;
- 2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi;
- 3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 113 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 62 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2023

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya/ IV-d	S2	1	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	1	-
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	4	2	2

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah	Pria	Wanita
4	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2	1	1	-
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	1	-
5	Jabatan Fungsional	Pembina/ IV-a	S2	4	4	-
		Penata Tk. I / III-d	S2	5	4	1
			S1	5	3	2
		Penata / III-c	S2	1	-	1
			S1	1	1	-
		Penata Muda Tk. I / III-b	S1	3	1	2
		Pengatur / II.c	D3	2	1	1
6	Jabatan Pelaksana	Penata Tk. I / III-d	S1	2	1	1
		Penata /IIIc	S1	4	3	1
			D3	1	-	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	4	2	2
			SMA	3	3	-
		Penata Muda/ III-a	SMA	2	2	-
		Pengatur Tk. I/ II-d	SMA	3	2	1
		Pengatur/ II-c	D3	1		1
			SMA	2	1	1
		Pengatur Muda Tk.I/ II-b	SMA	1	1	-
Jumlah				52	35	17

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel T-C.30

No	Indikator	SPM / Standar nasional	ikk Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2) 2022	Tahun 2024 (thn n-1) 2023	Tahun 2024 (thn n) 2025	Tahun 2024 (thn n+1) 2025	Tahun 2024 (thn n-2) 2022	Tahun 2024 (thn n-1) 2023	Tahun 2024 (thn n) 2025	Tahun 2026 (thn n+1) 2025	
1	Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Dokumen Pergub pengelolaan media	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 300.000.000	
2	Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Dokumen yang berisikan rekomendasi isu strategis, isu terindikasi krisis (jasa pihak ke tiga)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 800.000.000	Rp. 750.000.000	
3	Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Dokumen yang di rekomendasi isu terkait kewenangan Pemda (jasa pihak ke tiga)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 300.000.000	Rp. 350.000.000	
4	Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Konten yang dihasilkan dalam bentuk audio, visual dan keduanya serta pemilihan kanal media yang digunakan berupa media daring, media online, media cetak, media penyiaran (radio dan televisi)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.400.000.000	

5	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Kerjasama dengan Media cetak, media online, media penyiaran (TV, Radio)	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 4.500.000.00 0	Rp. 4.700.000.00 0	
6	Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		permohonan informasi dan hibah KPID sebesar tujuh miliar	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 5.300.000.00 0	Rp. 4.650.000.00 0	
7	Layanan Hubungan Media		Jumpa Pers dan gathering	-	-	12 Layanan	12 Layanan	-	-	Rp. 1.500.000.00 0	Rp. 1.050.000.00 0	
8	Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Penyelenggaraan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Balikpapan, dan Pembinaan KIM di Kabupaten/ Kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 750.000.000	Rp. 800.000.000	
9	Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		Dokumen Strategi Komunikasi Krisis untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Tim Komunikasi Krisis	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp.300.000.0 00	Rp. 350.000.000	
10	Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		Peningkatan kompetensi pranata humas melalui Bimbingan Teknis	-	-	30 Orang	30 Orang	-	-	Rp. 350.000.000	Rp. 200.000.000	
11	Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Jumlah sengketa informasi yang dimediasi dan diselesaikan lewat sidang adjudikasi non litigasi melalui Komisi Informasi Prov. Kaltim	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 3.000.000.00 0	Rp. 2.500.000.00 0	
12	Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		Berpartisipasi dalam pameran pembangunan Provinsi Kaltim, seperti Kaltim expo dan Pameran Kaltim Fair, serta mengikuti pameran di luar daerah dalam rangka Pekan Informasi Nasional atau sejenisnya.	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 650.000.000	Rp. 700.000.000	
	Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Pengadaan untuk publikasi berupa Videowall, Videotron	-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	Rp. 300.000.000	Rp. 250.000.000	

13	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		sosialisasi, workshop dan koordinasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
14	Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Sosialisasi, pelatihan dan monev Pengelolaan aplikasi pendukung SPBE	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 750.000.000	Rp. 750.000.000	
15	Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Bandwidth, sewa FO, Jaringan Metro, internet desa Intra Pemerintah Daerah	-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	Rp. 7.000.000.000	Rp. 7.000.000.000	
16	Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan, sertifikasi, monitoring evaluasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.250.000.000	
17	Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, monitoring evaluasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000	
18	Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		Bandwidth data centre, pemeliharaan, pembelian server dan perangkat pendukungnya, sewa tenaga ahli, audit dan sertifikasi Data Centre	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 6.100.000.000	Rp. 5.900.000.000	
19	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, monitoring evaluasi, Pengembangan API	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 750.000.000	Rp. 750.000.000	
20	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	
21	Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi,	-	-	37 PD	37 PD	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	

	dan Sinkronisasi Data dan Informasi		monitoring evaluasi, Pengembangan API									
22	Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		1. Dashboard analitik (data warehouse) 2. Management Knowledge 3. JDIH 4. Template Website PPID terintegrasi 5. DS 6. Simain	-	-	6 Aplikasi	6 Aplikasi	-	-	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000	
23	Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	-	1 Layanan	1 Layanan	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	
24	Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, monev	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	
25	Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		sosialisasi, workshop, pelatihan, bimtek, sertifikasi dan koordinasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp.3.100.000.000	Rp. 600.000.000	
26	Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		sosialisasi, bimtek, sertifikasi dan koordinasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	
27	Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, monitoring evaluasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
28	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1. Buku Profil Data Statistik Sektoral (IKK Urusan Statistik) 2. Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 700.000.000	Rp. 1.000.000.000	

			3. Buku Indikator Strategis Pembangunan Kalimantan Timur 4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Perpusnas, Bappenas, BPS, LPI									
29	SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		1. Bimtek/Diklat terkait peningkatan SDM Pengelola Statistik Sektoral (Internal Bidang Statistik kurang lebih 8 Orang) 2. Biaya Kontribusi antara 10 - 15 Juta peorang.	-	-	8 Orang	10 Orang	-	-	Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000	
30	Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		1. Survei SKM terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi Provinsi Kalimantan Timur 2. Survei Pendataan Akses Internet, Komputer, Telekomunikasi/HP di Rumah Tangga di Kalimantan Timur 3. Survei Pendataan Sekolah berinternet dan Bersinyal di Kalimantan Timur 4. Survei pengumpulan Data Persepsi Kepentingan TIK dalam Kehidupan sehari-hari. Ket: Dalam Satu kali survei membutuhkan biaya sebesar 100-200 juta tergantung jumlah enumerator dan sampel yang dibutuhkan dalam sekali survei 5. Coaching Metadata untuk Produsen Data Prov. Kaltim	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.300.000.000	

			6. Coaching Metadata untuk Walidata dan Produsen Data Kab/Kota Se-Provinsi Kaltim. Ket : Sesuai dengan Pergub Kaltim No.48 Tahun 2021 tentang Satu Data									
31	Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		1. Kajian ilmiah terkait penyelenggaraan statistik sektoral 2. Roadmap penyelenggaraan statistik sektoral. 3. Sosialisasi sistem informasi E-walidata untuk Produsen Data. 4. Sosialisasi Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral 5. Pembentukan Tim Pembinaan Statistik Sektoral 6. Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS).	-	-	37 PD	37 PD	-	-	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.200.000.000	
	Infrastruktur Statistik		1. Collocation Server untuk kebutuhan DRC. 2. Manage Service Server dan Aplikasi Portal Satu Data Kaltim 3. Pembangunan Sistem Informasi Metadata Kalimantan Timur. 4. Coaching Portal Satu Data Berbasis CKAN. 5. Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektoral. 6. Pembentukan Tim Operator Produsen Satu Data Kalimantan Timur.	-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	Rp. 19500.000.000	Rp. 2.100.000.000	

			7. Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Satu Data Kaltim.									
32	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		Pergub, Surat Edaran, Instruksi Gubernur	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
33	Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan, sertifikasi, audit	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Rp. 550.000.000	Rp. 600.000.000	
34	Laporan Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		mitigasi, sosialisasi, pelatihan, bimtek sertifikasi, koordinasi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Rp. 500.000.000	Rp. 550.000.000	
35	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan, sertifikasi, audit	-	-	37 PD	37 PD	-	-	Rp. 350.000.000	Rp. 400.000.000	
36	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan, sertifikasi, audit	-	-	37 PD	37 PD	-	-	Rp. 300.000.000	Rp. 350.000.000	

Adapun pencapaian urusan bidang Kominfo tahun 2024 dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan masyarakat, maka dalam Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan:

1. Penyediaan jaringan layanan informasi yaitu
 - Sewa bandwidth teresterial
 - Sewa Link Fiber Optic
2. Media Center merupakan tempat untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial;
3. Pada tahun 2024 untuk publikasi dilaksanakan pembuatan leaflet, baliho, dan spanduk.
4. Dalam rangka mempublikasikan informasi tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024 Diskominfo Provinsi Kaltim secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda. Acara dialog interaktif di TVRI dilakukan setiap hari Rabu sedangkan untuk RRI setiap hari Selasa dengan nara sumber dari OPD dilingkungan Pemprov. Kaltim, Akademisi, LSM, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
5. Pada tahun 2024 setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin dilakukan pendokumentasian.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim direncanakan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran yang digunakan sebagai sarana publikasi baik kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sendiri maupun capaian pembangunan secara keseluruhan. Di tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yaitu 2 kegiatan pameran di dalam daerah).

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun isu strategis pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah
- c. Blankspot yang masih terjadi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kaltim tahun 2024-2026 yang akan ditetapkan.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai

dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengembangan infrastuktur TIK dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi didaerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- a. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- b. Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- c. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- d. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai mana tertera dalam tabel berikut ini:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur
Tabel T-C.31

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				85.609.692.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				85.609.692.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 indeks	33.424.088.696	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu)	100 Persen	1.180.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu)			
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan .	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	230.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	230.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	13.525.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)			
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / Bulan	12.300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000,00						
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	1 Dokumen	825.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan, Kelurahan.	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan, Kelurahan.	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	150.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
2	16	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	1.250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)			
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	350.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000						
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi.	1 Dokumen	150.000.000						

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan, Kelurahan	dan Penilaian Kinerja Pegawai								
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	300.000.000						
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	300.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	4.040.428.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah			
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	129.713.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan			
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.			290.715.300						
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	6.494.263.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor			
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.393.263.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
2	16	01	1.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.184.396.696	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	564.396.696	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	1.300.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	600.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2	16	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	300.000.000						
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Prasarana Gedung Kantor			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan, Kelurahan.	yang Dipelihara/Direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya	Kecamatan, Kelurahan.	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60%	19.750.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah			
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80%	21.185.603.304	Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1 Dokumen	500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik			
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	800.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	1 Dokumen	1.500.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media			
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	4.500.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
												Komunikasi Publik			
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	5.300.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik			
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	1.500.000.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media			
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	750.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	300.000.000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis			
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	30 Orang	350.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya			
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	3.000.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	2.085.603.304	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan			
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Paket	300.000.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80%	23.600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100%	7.950.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim			
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	200.000.000			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi			
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	750.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Paket	7.000.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										Pemerintah Daerah					
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80%	15.650.000.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim			
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.250.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	800.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	1 Paket	6.100.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola			
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	750.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/ Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/ Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/ Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 Perangkat Daerah	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/ Kota Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	6 Aplikasi	1.500.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pemerintahan Berbasis Elektronik		Elektronikyang dikembangkan			Pemerintahan Berbasis Elektronik		Berbasis Elektronikyang dikembangkan			
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 Layanan	500.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah			
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	250.000.000			Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City			
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.100.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief	Kabupaten/ Kota,	Jumlah Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen	400.000.000			Jumlah Dokumen			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Information Officer (GCIO)	Kecamatan, Kelurahan.	Government Chief Information Officer (GCIO)					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2	16	03	1.02	12	Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	200.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Ketersediaan Daftar Data Pada Portal Satu Data	80%	5.500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Ketersediaan Daftar Data Pada Portal Satu Data			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80%	5.500.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur			
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	8 Orang	300.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi			
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	1.100.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun			
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas	Kabupaten/ Kota,	Jumlah perangkat daerah yang mendapat	37 PD	1.500.000.000	Peningkatan Kapasitas	Kabupaten/ Kota,	Jumlah perangkat			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kelembagaan Statistik Sektoral	Kecamatan, Kelurahan.	pelatihan statistik sektoral dari BPS			Kelembagaan Statistik Sektoral	Kecamatan, Kelurahan.	daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS			
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	1.900.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	1.900.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah			
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian	100%	1.600.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		untuk pengamanan informasi			Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		persandian untuk pengamanan informasi			
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan			
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	550.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis	1 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi			

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Elektronik dan Non Elektronik			Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	37 Perangkat Daerah	350.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi			
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	80%	300.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi			
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	37 Perangkat Daerah	300.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi			

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- e. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- f. Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- g. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- h. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat wilayah Kalimantan Timur adalah kurangnya informasi akibat kurang terjangkaunya daerah-daerah tersebut dengan fasilitas informasi yang ada. Wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar merupakan pengunungan yang tertutup oleh hutan lebat. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara telekomunikasi dan telematika bila sarana yang digunakan menggunakan frekuensi radio. Sinyal frekuensi radio tidak bisa menembus bukit atau hutan yang lebat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (*blank spot*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi “corong” terdepan dalam memberikan kualitas informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengharuskan bekerja sama dengan instansi terkait seperti TVRI, RRI, dan lembaga penyiaran lainnya. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas diharapkan bukan lagi dalam artian terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi akan tetapi menjangkau seluruh elemen pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan informasi mengenai stabilitas sosial, politik, dan keamanan; peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah; serta kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas sehingga kebutuhan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk tahun 2022. Adapun rencana program yang dimaksud sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100%	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu (dokumen)	3 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan .	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Laporan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	53 Orang	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	50 Orang	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60%	
	Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80%	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1 Dokumen	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	

	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	1 Dokumen	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	
	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	
	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	
	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	30 Orang	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	1 Dokumen	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Paket	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	80%	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100%	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Paket	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80%	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	1 Paket	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 Perangkat Daerah	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	6 Aplikasi	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 Layanan	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Ketersediaan Daftar Data Pada Portal Satu Data	80%	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	8 Orang	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	37 PD	
	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100%	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	

	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	37 Perangkat Daerah	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	80%	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	37 Perangkat Daerah	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai suatu sistem yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh beberapa subsistem yang masing-masing dilaksanakan oleh satu PD. Seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saling berinteraksi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali informasi keluaran dari suatu PD akan diolah lebih lanjut oleh PD lainnya untuk menghasilkan informasi yang strategis, sehingga dengan demikian, aliran informasi dari satu PD ke PD lainnya harus dapat dijamin terlaksananya serta kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas keseharian pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam mewujudkan pembangunan/ pengembangan TIK yang terintegrasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan sinergi implementasi TIK dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan tujuan agar:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
- c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selain aspek-aspek di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1. Kebijakan dan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan

berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.

3. Teknologi.

Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

- a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman.
- b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian.
- c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya.

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, karena di masa depan. informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

4. Informasi dan edukasi/*e-literacy*.

Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain juga disebabkan oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.

5. Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah *Software Illegal/Bajakan*. Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi

lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (software) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan software yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukannya kebijakan yang berorientasi pada objek sasaran yang akan di capai. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebaran serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
- c. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diperlukan adanya tindakan nyata berupa program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2024 kegiatan yang diusulkan meliputi 5 program, 14 kegiatan dan 74 sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 1.1. Pengelolaan Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 1.1.2. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
 - 1.1.3. Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 1.1.4. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media

- 1.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 1.1.6. Pelayanan Informasi Publik
 - 1.1.7. Layanan Hubungan Media
 - 1.1.8. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 1.1.9. Manajemen Komunikasi Krisis
 - 1.1.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik
 - 1.1.11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah
 - 1.1.12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas
 - 1.1.13. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 2.1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2.1.1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
 - 2.1.2. Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 2.1.3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 2.2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah
 - 2.2.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 2.2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 2.2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 2.2.4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 2.2.5. Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 2.2.6. Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik
 - 2.2.7. Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- 2.2.8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 2.2.9. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
- 2.2.10. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 2.2.11. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- 2.2.12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
 - 3.1.1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
 - 3.1.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 3.1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 3.1.5. Pengembangan Infrastruktur
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 4.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
 - 4.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - 4.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi

- 4.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 5.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 5.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 5.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5.1.4. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - 5.1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
 - 5.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 5.2.4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 5.2.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 5.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 5.3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 5.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 5.4.3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5.4.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 5.4.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 5.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 5.5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
 - 5.5.5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.6.2. Pengadaan Mebel
 - 5.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 5.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 5.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 5.8.2. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 5.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.
 - 5.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NAMA PERANGKAT DAERAH : DISKOMINFO**

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				85.609.692.000	APBD			91.136.931.000
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				85.609.692.000				91.136.931.000
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		100 indeks	33.424.088.696			100 indeks	35,636,931,000

2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu)		100 Persen	1.180.000.000			100 Persen	1,050,000,000
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan .	1 Dokumen	200.000.000			1 dokumen	100,000,000
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	1 Dokumen	230.000.000			1 Laporan	250,000,000
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	1 Laporan	200.000.000			1 Dokumen	200,000,000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	230.000.000			1 Laporan	200,000,000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	300.000.000			1 Laporan	300,000,000
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	100 Persen	13.525.000.000			100 Persen	13,620,000,000
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	53 orang / Bulan	12.300.000.000			53 Orang/Bulan	12,000,000,000
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	180,000,000
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	825.000.000			1 Dokumen	180,000,000
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Laporan	180,000,000

2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	180,000,000
2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	900,000,000
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		100 Persen	150.000.000			100 Persen	150,000,000
2	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50,000,000
2	16	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50,000,000
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	50,000,000
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)		100 Persen	1.250.000.000			100 Persen	1,200,000,000
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	350.000.000			1 Paket	400,000,000
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150,000,000
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150,000,000
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan	50 Orang	300.000.000			74 Orang	200,000,000
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	50 Orang	300.000.000			50 Orang	300,000,000
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daaerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah		100 %	4.040.428.500			100 Persen	3,356,646,300

2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	20.000.000			1 Paket	30,000,000
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 paket	100.000.000			1 Paket	135,931,000
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	129.713.200			1 Paket	150,000,000
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	3.500.000.000			1 Dokumen	290,715,300
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	100 Persen	6.494.263.500			100 Persen	6,710,284,700
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	2 Unit	1.393.263.500			2 Unit	500,000,000
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	1,250,000,000
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	Unit	5.000.000.000	APBD		100 Unit	4,959,284,700
2	16	01	1.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Unit	1.000.000	APBD		1 Unit	1,000,000
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	100 Persen	5.184.396.696	APBD		100 Persen	7,900,000,000
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	20,000,000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	600.000.000	APBD		1 Laporan	600,000,000
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	564.396.696	APBD		1 Laporan	2,900,000,000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	4.000.000.000	APBD		1 Laporan	4,380,000,000

2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	100 Persen	1.300.000.000	APBD		100 Persen	1,650,000,000
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	7 Unit	600.000.000	APBD		9 Unit	750,000,000
2	16	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 unit	300.000.000	APBD		1 Unit	200,000,000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	200,000,000
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Unit	500.000.000	APBD		1 Unit	500,000,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah		60%	19.750.000.000	APBD		70%	22,000,000,000
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas		80%	21.185.603.304			85%	22,000,000,000
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500,000,000
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	800.000.000	APBD		1 Dokumen	850,000,000
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	300.000.000			1 Dokumen	400,000,000
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	1.500.000.000	APBD		1 Dokumen	1,500,000,000

2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	4.500.000.000	APBD		1 Dokumen	4,900,000,000
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	5.300.000.000	APBD		1 Dokumen	5,750,000,000
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	12 Layanan	1.500.000.000	APBD		12 Layanan	1,750,000,000
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	750.000.000	APBD		1 Dokumen	850,000,000
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	400,000,000
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	30 Orang	350.000.000	APBD		30 Orang	500,000,000
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	3.000.000.000	APBD		1 Dokumen	3,250,000,000
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	2.085.603.304	APBD		1 Dokumen	750,000,000
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	300.000.000	APBD		1 unit	600,000,000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik		80%	23.600.000.000	APBD		82%	25,400,000,000
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	100%	7.950.000.000			100%	9,150,000,000

2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Domain	200.000.000	APBD		1 Domain	300,000,000
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	750.000.000			1 Dokumen	850,000,000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	7.000.000.000			1 Paket	8,000,000,000
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim		80%	15.650.000.000			85%	16,250,000,000
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	1.250.000.000			1 Dokumen	1,500,000,000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 dokumen	800.000.000	APBD		1 dokumen	800,000,000
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Paket	6.100.000.000	APBD		1 Paket	6,800,000,000
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	750.000.000	APBD		1 Dokumen	750,000,000
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	37 Perangkat Daerah	500.000.000	APBD		37 Perangkat Daerah	500,000,000

2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	6 Aplikasi	1.500.000.000	APBD		6 Aplikasi	2,500,000,000
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Layanan	500.000.000	APBD		1 Layanan	500,000,000
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	350,000,000
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	3.100.000.000			1 Dokumen	1,650,000,000
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	400.000.000	APBD		1 Dokumen	400,000,000
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	200,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.						
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Daftar Data Pada Portal Satu Data	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	80%	5.500.000.000			85%	6,000,000,000
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	80%	5.500.000.000			85%	6,000,000,000
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	700.000.000			1 Dokumen	1,000,000,000

					Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral							
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	8 Orang	300.000.000			10 Orang	400,000,000
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	1.100.000.000			1 Dokumen	1,300,000,000
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	37 PD	1.500.000.000			37 PD	1,200,000,000
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	2 Unit	1.900.000.000			2 Unit	2,100,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	3 Tingkat	1.900.000.000			Tingkat 3	2,100,000,000
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	100%	1.600.000.000			100%	1,750,000,000
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	200,000,000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	550.000.000			1 Laporan	600,000,000

2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	1 Laporan	500.000.000			1 Laporan	550,000,000
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	37 Perangkat Daerah	350.000.000			37 Perangkat Daerah	400,000,000
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	80%	300.000.000			85%	350,000,000
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan.	37 Perangkat Daerah	300.000.000			37 Perangkat Daerah	350,000,000

BAB.V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan berpedoman pada Renstra PD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang nantinya akan di usulkan ke BAPPEDA Provinsi Kaltim.

Dipandang dari sisi anggaran sampai dengan tahun 2024 jumlah anggaran Diskominfo relatif terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan target untuk mengejar berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi percepatan perubahan dan perkembangan di bidang teknologi informasi yang meliputi perangkat hardware, software dan jaringan infrastruktur, peningkatan SDM TIK. Disamping itu kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti TVRI, RRI, dan Komisi Informasi Provinsi anggarannya masih melekat di Diskominfo Prov. Kaltim sehingga Diskominfo membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dengan peningkatan anggaran dari tahun 2023 ke tahun 2024 diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan percepatan stabilitas dalam bidang komunikasi di daerah-daerah yang masih minim serta banyak kendala.

Samarinda, Juli 2023

Kepala

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680805 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024; (2) Evaluasi capaian RKPD dan Renja DPMPTSP Provinsi Kaltim sampai dengan tahun 2022; (3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022; (4) Isu- isu strategis yang berkembang terkait penanaman modal; (5) Kebijakan nasional; (6) Regulasi yang berlaku; dan (7) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah

1.2. Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 diantaranya yaitu :

1. -undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. n Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. n Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. n Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. n Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. n Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. n Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. n Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. n Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. n Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. n Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. n Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. n Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

19. n Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
20. i Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. d dan Tujuan

Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai pedoman penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026;
2. Meningkatkan seluruh potensi sumber daya Kalimantan Timur secara optimal untuk mempercepat pembangunan secara berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, yaitu :

1. Sebagai Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Kineja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026;
2. Mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran kinerja dalam upaya melaksanakan proses perijinan, promosi potensi, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan PMA/PMDN serta pelayanan perizinan usaha di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Penulisan Renstra

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 ini mengacu

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 8 (delapan) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMMD. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP MPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi dilaunching pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun

2016 tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas :

1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

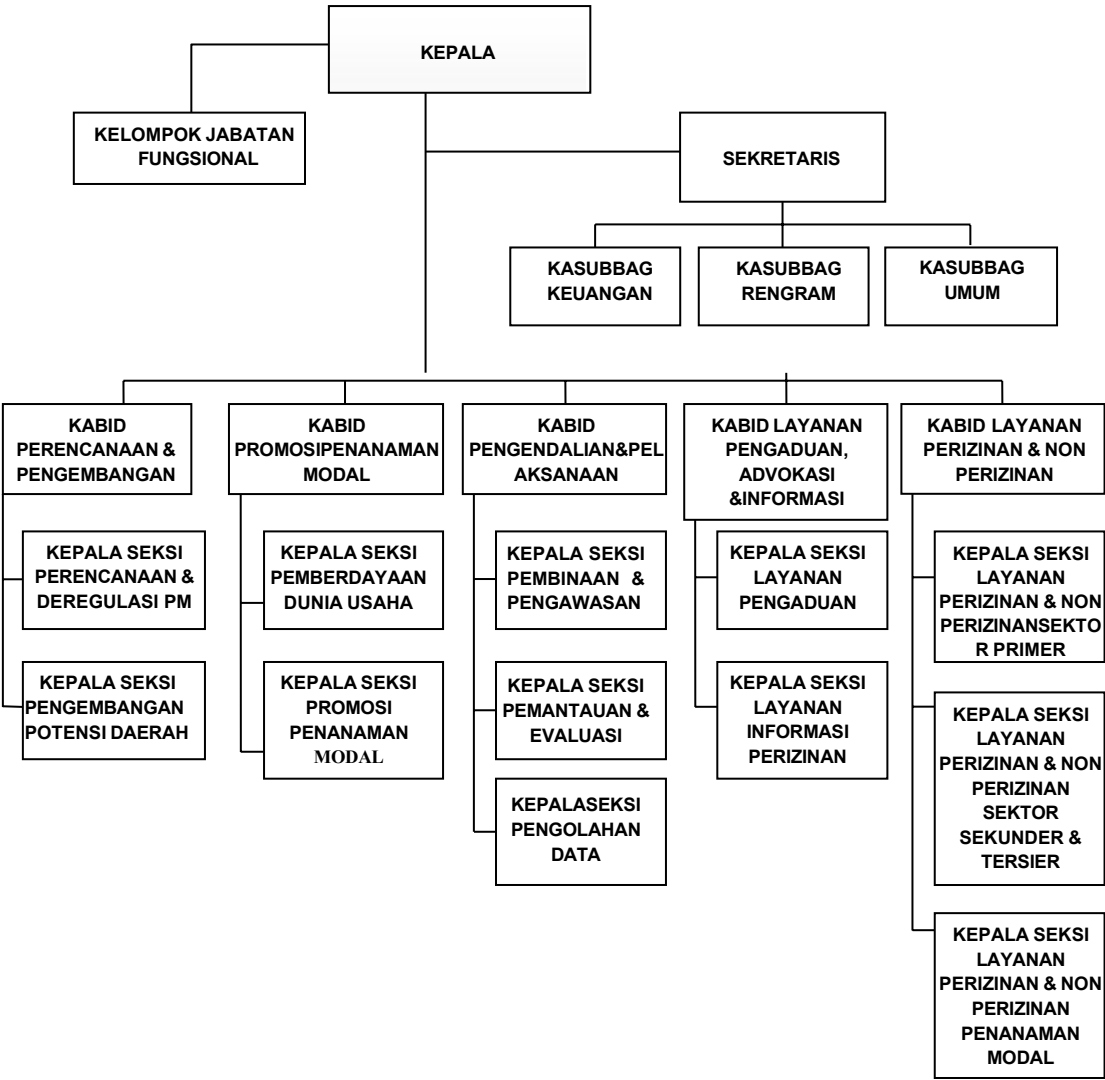
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi Daerah.
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 - a. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pemberdayaan Dunia Usaha.
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Seksi Pengolahan Data.
6. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
 - a. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer;

- b. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier;
 - c. Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- 7. Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Layanan Pengaduan;
 - b. Kepala Seksi Layanan Informasi Perizinan.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Mei 2023 sebanyak 34 orang PNS dan 59 orang pegawai Non PNS.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				
		Pria	Wanita	IV	III	II	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1				
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	3	3	6				6				
3	Kasubbag & Pejabat Fungsional	5	7	2	10			2	10			
4	Pelaksana	9	6		11	4			9	3	3	
Jumlah PNS		18	16	9	21	4		9	19	3	3	
Jumlah Non PNS		34	25					5	38	2	12	2
Jumlah PNS + Non PNS		52	41	9	21	4		14	57	5	15	2

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 m² di Jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional BPPMD Prov. Kaltim melalui pengadaan sampai dengan tahun 2023, secara umum dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sarana Pendukung Operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Tanah	2.895	M2
2	Ruang Rapat	3	Ruang
3	Ruang Kerja Pejabat Struktural	8	Ruang
4	Ruang Arsip	1	Ruang
5	Ruang Audio Visual	1	Ruang
6	Ruang Mushola	1	Ruang
7	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
8	Ruang Gudang Barang	2	Ruang
9	Kantin	1	Ruang
10	Taman	1	Ruang
11	Kendaraan Roda 2/Motor	20	Unit
12	Kendaraan Roda 4/Mobil	13	Unit
13	Meja Rapat	26	Unit
14	Kursi Rapat	138	Unit
15	Lemari	100	Unit
16	Filling Kabinet	27	Unit
17	CCTV	12	Set
18	Mesin Fotocopy	4	Unit
19	Air Conditioner	61	Unit
20	Televisi	12	Unit
21	Faximili	1	Unit
22	Laptop	30	Unit
23	Printer	80	Unit
24	UPS	25	Unit
25	Scanner	15	Unit
26	Mesin Tik	15	Unit
27	Microphone Wireless	4	Unit
28	Speaker	2	Unit
29	Subwofer	2	Unit
30	Keyboard	3	Unit
31	Equalizer	1	Unit
32	Hard Disk	7	Unit
33	Recorder	2	Unit
34	LCD Projector/Infocus	5	Unit
35	Mesin Absensi	1	Unit
36	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
37	Hardisk Eksternal	10	Unit
38	Recorder	2	Unit
39	Sound System	4	Unit
40	Monitor	8	Unit
41	Komputer	86	Unit

42	Kamera	6	Unit
43	Telepon	10	Unit
44	CPU	17	Unit
45	Microphone	38	Unit
46	Sofa & Meja Tamu	9	Unit
47	Mesin Pengancur Kertas	3	Unit

Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal, 2023

2.2.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Prov. Kaltim

Berikut beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Provinsi Kaltim diantaranya sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Sekretariat

- a. Analisis Beban Kerja
- b. Analisis Jabatan
- c. Cuti Tahunan
- d. Kenaikan Gaji Berkala
- e. Kenaikan Pangkat Pegawai
- f. Peminjaman Asset Milik Negara
- g. Pengadaan Barang / Jasa
- h. Perbaikan Sarana Kantor
- i. Surat Keluar melalui Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)
- j. Surat Masuk melalui Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)
- k. Surat Keluar
- l. Surat Masuk
- m. Perencanaan Anjab dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai
- n. Penyusunan Pengukuran Kinerja
- o. Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI)
- p. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- q. Penyusunan LKjIP/LAKIP
- r. Penyusunan LPPD
- s. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- t. Penyusunan RENSTRA
- u. Penyusunan RENJA
- v. Penyusunan RKA-DPA
- w. Pengumpulan Data Kinerja
- x. Penyusunan Peta Proses Bisnis

- y. Penyusunan Peta Lintas Fungsi
- z. Penyusunan Rencana Kegiatan
- aa. Penyeleggaran Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
- bb. Penyeleggaran Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- cc. Pembayaran Gaji Pegawai
- dd. Pembayaran Ganti Uang (GU)
- ee. Pembayaran LS Barang dan Jas
- ff. Pembayaran Tambahan Penghasilan
- gg. Penyusunan Neraca
- hh. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
- ii. SPJ
- jj. Penyelenggaraan Rapat yang Melibatkan Perangkat Daerah Teknis (Eksternal)
- kk. Penyelenggaraan Rapat Internal
- ll. Penyusunan Rencana Kegiatan
- mm. Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimtek / FGD / Workshop / Forum
- nn. Usulan Perjalanan Dinas
- oo. Pengarsipan Dokumen

2. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM)

- a. Kajian Potensi Peluang Investasi dan Peta Potensi Investasi
- b. Pengembangan Potensi Daerah
- c. Penyusunan Keputusan Gubernur
- d. Penyusunan Peraturan Gubernur
- e. Penyusunan Peraturan Daerah

3. Standar Operasional Prosedur Bidang Promosi dan Penanaman Modal (P2M)

- a. Koordinator Penyelenggara Pameran
- b. Mengikuti Pameran Dalam / Luar Daerah / Luar Negeri
- c. Penjajakan Kerjasama Penanaman Modal
- d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal
- e. Rencana Tindaklanjut Kerjasama Penanaman Modal
- f. Tindaklanjut Kerjasama PM

4. Standar Operasional Prosedur Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan (DALAK)

- a. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Permintaan
- c. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Pemantauan Dan Pengawasan
- d. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis
- e. Pemantauan Proses Pelayanan Perizinan
- f. Verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- g. Konsultasi Virtual Masalah Penanaman Modal (Kolosal)
- h. Helpdesk Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal
- i. Pengawasan Rutin Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- j. Pengawasan Insidentil Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- k. Pencabutan Perizinan Berdasarkan Permohonan
- l. Pencabutan Perizinan Berdasarkan Pelanggaran
- m. Pencabutan Perizinan Berdasarkan Putusan Pengadilan
- n. Rekomendasi Pencabutan Perizinan

5. Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (LP2N)

- a. Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (OSS-RBA)
- b. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan (OSS-RBA)
- c. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan melalui E-PTSP
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha

perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota

- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota
- g. Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)
- h. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi Di Bawah 2000 M2) (PBPHH) melalui E- PTSP
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar melalui E-PTSP
- j. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Rakyat (PPKH-UPR) melalui E-PTSP
- k. Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP) melalui E-PTSP
- l. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) melalui E-PTSP
- m. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui E-PTSP
- n. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (REKOM PPKH) melalui E-PTSP
- o. Rekomendasi / Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) melalui E-PTSP
- p. Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (OSS-RBA)
- q. Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup melalui E-PTSP
- r. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH melalui E-PTSP
- s. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) melalui E-PTSP
- t. Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) melalui E-PTSP
- u. Perizinan Berusaha Sektor ESDM (OSS-RBA)
- v. Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) melalui E-PTSP

- w. Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) melalui E-PTSP
- x. Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) melalui E-PTSP
- y. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)
- z. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian (OSS-RBA)
- aa. Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (OSS-RBA)
- bb. Perizinan Berusaha Sektor PUPR (OSS-RBA)
- cc. Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi melalui E-PTSP
- dd. Pelayanan Izin Pengalihan Alur Sungai melalui E-PTSP
- ee. Pelayanan Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi melalui E-PTSP
- ff. Perizinan Berusaha Sektor Transportasi (OSS-RBA)
- gg. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan) melalui E-PTSP
- hh. Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau (KPIT) melalui E-PTSP
- ii. Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing / Perlintasan Jalan melalui E-PTSP
- jj. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan (OSS-RBA)
- kk. Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) melalui E-PTSP
- ll. Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) melalui E-PTSP
- mm. Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta melalui E-PTSP
- nn. Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta melalui E-PTSP
- oo. Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta melalui E-PTSP
- pp. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)
- qq. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS-RBA)
- rr. Perizinan Berusaha Sektor Sosial (OSS-RBA)
- ss. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang melalui E-PTSP
- tt. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah melalui E-PTSP

uu. Izin Berusaha Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam melalui E-PTSP

6. Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan (YANDU)

- a. Layanan Informasi Perizinan
- b. Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

1. Peningkatan kualitas layanan

Peningkatan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan, karena masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan ini dapat di upayakan oleh DPMPTSP melalui prinsip keterbukaan, efektifitas dan efisiensi serta mengedepankan supermasi hukum. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur harus mengutamakan prinsip tersebut dalam hal mengeluarkan ijin investasi terhadap para investor, agar investasi yang dilakukan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan Kualitas Layanan” ditunjukkan dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara **tingkat kepentingan** (Harapan) terhadap **tingkat kepuasan** / kinerja atau hasil yang dirasakan (Kenyataan). Bila kenyataan jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan akan menjadi tidak tertarik (tidak puas) pada penyedia jasa yang bersangkutan, dan begitu pula sebaliknya, jika terdapat pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka organisasi akan mendapatkan berbagai manfaat terutama dari sisi kelayakan pelanggan. Salah satu alat untuk memantau kekuatan masing- masing proses bisnis/pelayanan publik adalah dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu dengan cara melakukan pengukuran secara periodik persepsi dan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh organisasi, sehingga dapat dilihat perkembangan peningkatan pelayanan yang terjadi.

Sesuai dengan visi, misi dan kebijakan DPMPTSP Prov. Kaltim dan dalam rangka program peningkatan mutu pelayanan terhadap para pelanggan secara lebih baik dan efektif, maka DPMPTSP Prov. Kaltim berkomitmen untuk melakukan pengukuran kepuasan para pelanggan / investor. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan memastikan independensi kegiatan, maka telah ditunjuk pihak ketiga / konsultan (MIM Consulting) untuk mengembangkan suatu kuesioner Pelanggan (**Pelanggan Satisfaction Survey**) dan melaksanakan kegiatan pengukuran / survei kepuasan secara berkelanjutan kepada para pelanggan PTSP BPMPTSP Prov. Kaltim, yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk memantau secara konsisten tingkat kepuasan pelanggan.

Kuesioner tersebut mencakup kinerja organisasi (Tingkat Kepuasan) selama ini beserta harapan (Tingkat Kepentingan) dari para pelanggan / investor terhadap pelayanan jasa yang diberikan terkait produk dan pelayanan dari PTSP DPMPTSP Prov. Kaltim sebagai salah satu bagian pada lingkup Bidang Pelayanan Perijinan (Pelayanan Publik). Secara keseluruhan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN PERIODE Januari – Juni 2020 adalah sebesar 82,88% menurun sebesar 1,98% dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada 84,86%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim.

Secara keseluruhan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN periode Juli - Desember 2020 adalah sebesar 90,86% meningkat sebesar 7,98% dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada 82,88%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan

DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh DPMPTSP Prov. Kaltim Hasil survey INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN untuk tahun 2020 adalah sebesar 86,77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan DPMPTSP Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

2. Peningkatan realisasi investasi

Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang menunjukan ke arah membaik di tahun 2017 berkorelasi positif terhadap rasio investasi. Indikasinya adalah membaiknya rasio realisasi investasi terhadap rencana investasi PMA dan PMDN tahun Target realisasi investasi tahun 2020 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 21,30 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2020 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 8,23 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp7,30 Triliun (1.666 proyek) dan realisasi PMA sebesar US\$. 64,66 Juta atau sebesar Rp 931,33 Miliar (227 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV 2020 sebesar Rp 8,23 Triliun mengalami penurunan sebesar 26,44% dibandingkan Triwulan IV 2019 sebesar Rp 10,40 Triliun. Capaian realisasi investasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember) tahun 2020 sebesar Rp 31,38 Triliun mengalami penurunan sebesar 11,90% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 35,62 Triliun. Tahun 2020 realisasi investasi sebesar Rp 31,38 Triliun atau 147,31% dari target realisasi investasi tahun 2020 Rp 21,30 Triliun

a. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2022 mencapai **Rp 39,59 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 6.706; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan

Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi. Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 14,68 Triliun atau 37,08% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar Rp 10,56 Triliun atau 26,68% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 3,42 Triliun atau 8,65%

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling besar sebanyak 13.379 orang (33,66% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (17,95% dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 7.725 orang (19,43% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 7 orang (17,95% dari total tenaga kerja asing), dan Kota Samarinda sebanyak 4.946 orang (3,21% dari total tenaga kerja Indonesia). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember tahun 2022 sebanyak 39.792 orang.

Tabel 2.3 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	1.850	14.681.981.500.000	3.073	3
2	Kutai Kartanegara	719	10.564.907.700.000	7.725	7
3	Kutai Timur	685	3.428.929.900.000	13.379	7
4	Kutai Barat	158	2.631.773.800.000	1.900	-
5	Berau	408	2.619.004.000.000	4.653	4
6	Paser	281	1.616.947.700.000	2.184	5
7	Samarinda	1.845	1.270.879.500.000	4.946	2
8	Pemaijan Paser Utara	221	1.253.095.900.000	846	11
9	Bontang	531	1.243.154.100.000	718	-
10	Mahakam Hulu	18	284.958.900.000	329	-
TOTAL		6.706	39.595.633.000.000	39.753	39

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DIPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan

b. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2022 menunjukkan subsektor Pertambangan mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 15,01 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 37,91%.

Subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 14,91 Triliun atau 37,67%. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 3,65 Triliun atau 9,22%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling besar yaitu 16.310 orang atau 41,03% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 17 orang atau 43,59% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu 11.491 orang atau 28,91% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 5,13% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Industri Makanan yaitu 3.427 orang atau 8,62% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 5,13% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.

Tabel 2.4. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I SEKTOR PRIMER					
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	537	4.824.002.200.000	10.345	-
2	Kelutanan	167	73.973.600.000	555	-
3	Perikanan	7	500.000	3	-
4	Pertambangan	535	5.839.330.300.000	3.915	0
II SEKTOR SEKUNDER					
1	Industri Makanan	259	671.841.300.000	903	2
2	Industri Tekstil	2	2.000.000	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	87	5.996.000.000	141	-
5	Industri Kertas & Percetakan	13	5.000.000	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	99	15.145.338.400.000	557	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	7	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	21	2.351.000.000	11	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, BAHAN MEKANIS & PERALATAN	16	10.300.000	2	-
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	22	39.500.000	3	-
11	Industri Alat Elektronik & Transportasi lainnya	68	9.221.800.000	38	-
12	Industri Lainnya	73	5.200.500.000	11	-
III SEKTOR TERSIER					
1	Listrik, Gas dan Air	106	298.896.000.000	84	-
2	Konstruksi	1.029	113.413.700.000	435	-
3	Perdagangan & Reparasi	3.810	295.260.000.000	1.194	-
4	Hotel & Restoran	359	55.384.800.000	89	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	651	1.503.072.300.000	1.303	0
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkotaan	151	840.351.300.000	124	-
7	Jasa Lainnya	1.220	589.690.800.000	1.823	5
TOTAL		9.291	30.297.382.700.000	21.596	19

Sumber: Diolah dari data BKPM RI DPMPPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan

c. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2022 mencapai US\$ 1,266 Juta atau sebesar Rp 18,48 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 1.005 yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 630,92 Juta atau sebesar Rp 9,21 Triliun (49,83% dari total realisasi PMA), terdiri atas 143 proyek PMA. Kabupaten Kutai Barat menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 193,18 Juta atau sebesar Rp 2,84 Triliun (15,67% dari total realisasi PMA), atas 58 proyek PMA. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 180,41 Juta atau sebesar Rp 2,58 Triliun (14,25%), atas 138 proyek PMA. Persentase kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 8,61% hingga 0,03%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 6.110 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 48 orang, kemudian Kabupaten Kutai Timur dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.032 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 290 orang, disusul Kabupaten Berau dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.941 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 3 orang.

Tabel 2.5. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TK A
1	Kutai Timur	143	630.925.934	3.032	290
2	Kutai Barat	58	198.435.493	2.029	22
3	Kutai Kartanegara	138	180.418.484	6.110	48
4	Paser	43	109.068.584	50	0
5	Balikpapan	332	51.882.790	1.296	10
6	Berau	79	49.370.489	2.941	3
7	Samarinda	150	32.437.995	419	11
8	Penajam Paser Utara	24	9.866.000	131	0
9	Mahakam Hulu	16	3.808.000	238	0
10	Bontang	22	8.000	1	0
TOTAL		1.005	1.266.221.770	16.247	384

Sumber: Diolah dari data BKPM/RI, DPMP/PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
• Kurs US\$ terhadap Rp., 1 US\$ = Rp 14.150,-

d. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 515,91 Juta (Rp 7,40 Triliun) atau sebesar 40,74% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 216,01 Juta (Rp 3,09 Triliun) atau 17,06% dan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar US\$. 190,01 Juta (Rp 2,72) atau 15,01%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2022. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 8.379 orang atau 51,57% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 34 orang atau 8,85% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Pertambangan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 4.300 orang atau 26,47% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 45 orang atau 11,72% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Industri Makanan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.054 orang atau mencapai 6,49% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 6 orang atau 1,56% tenaga kerja asing pada subsektor ini.

Tabel 2.6 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROY EK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
I	SEKTOR PRIMER				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan	173	190.013.892	8.379	34
2	Keluturan	23	37.276.491	88	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	151	515.919.940	4.300	45
II	SEKTOR SEKUNDER				
1	Industri Makanan	133	98.108.592	1.054	6
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alan Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	9	1.811.899	115	3
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	29	40.176.592	29	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	3	136.400	4	-
8	Industri Mineral Non Logam	6	216.016.282	739	255
9	Industri Logam Dasar, br. Logam, Bukan Mesin & Peralatan	30	93.934.693	416	30
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	14	1.967.500	353	2
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	10	10.091.596	24	-
12	Industri Lainnya	3	-	-	-
III	SEKTOR TERSIER				
1	Listrik, Gas dan Air	6	-	-	-
2	Konstruksi	4	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	201	9.497.500	119	-
4	Hotel & Restoran	56	3.682.299	63	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	57	16.726.698	205	9
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	22	6.288.898	40	-
7	Jasa Lainnya	70	6.574.500	319	-
TOTAL		1.005	1.266.221.779	16.247	384
Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSP Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalim					
• Kurs US\$ terhadap Rp... 1 US\$ = Rp 14.150,-					

e. Akumulasi Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan pada Tahun 2022 (Januari-Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 57,76 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 39,59 Triliun atau 68,54 % dari total realisasi investasi, dengan 6.706 proyek dan PMA sebesar Rp 18,17 Triliun atau 31,46% dari total realisasi investasi, dengan 1.005 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2022 telah mencapai angka 106,97%, dengan total proyek sebanyak 7.711 proyek. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 39.792 orang atau 68,54% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 39.753 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 39 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 16.631 orang atau 31,46% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 16.247 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 384 orang.

Tabel 2.7. Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan I - Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	39.595.633.000.000	6.706	39.792
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	1.226.221.770	1.005	16.631
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	18.170.282.398.995		
TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2		57.765.915.398.995	7.711	56.432

Keterangan : *) Dikonversikan pada kurs Rp 14.400,-/US\$

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2022 menempati **urutan ke-5**, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Riau. Sedangkan untuk PMA berada di **urutan ke-10**, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah masyarakat, khususnya yang memiliki kegiatan usaha baik dalam bentuk perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha

2.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				% Peningkatan /Penurunan
			2019	2020	2021	2022	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-6*100%)
1	Peningkatan realisasi investasi	Rp (Triliun)	22,31	25.14	31,64	35,35	11.74
2	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Skor	86,79	86,70	89,69	89,41	-0,31

Sumber : Dokumem LKjIP DPMPTSP Provinsi Kaltim Tahun 2019 - 2022

Berdasarkan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Jika pada tahun 2020 nilai dari IKM adalah 86,70% mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan nilai IKM 89,69% dan menurun pada tahun 2022 dengan nilai IKM 89,41%. Sedangkan berdasarkan nilai investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2019 nilai investasi sebesar 22,31 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan pada 3 tahun berikutnya, yaitu sebesar 25,14 triliun pada tahun 2020; 31,64 triliun pada tahun 2021 kemudian sebesar 35,35 triliun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami rata – rata peningkatan investasi sebesar 11,74% dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	Rp221.000.000	Rp1.390.075.000	Rp1.760.000.000	Rp1.625.219.524	Rp189.448.200	Rp334.935.000	Rp1.354.323.701	Rp1.348.465.701	85,72	24,09	76,95	82,97	1.249.073.631	806.793.150,50
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Rp509.400.000	Rp705.000.000	Rp2.599.703.000	Rp1.610.282.000	Rp478.219.000	Rp288.939.000	Rp1.069.577.836	Rp1.514.309.436	93,88	40,98	41,14	94,04	1.356.096.250	837.761.318,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp532.600.000	Rp1.579.500.000	Rp1.690.013.950	Rp1.348.200.000	Rp531.570.000	Rp1.449.615.000	Rp1.599.410.641	Rp1.328.355.585	99,81	91,78	94,64	98,53	1.287.578.488	1.227.237.806,50
Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Rp131.910.000	Rp776.775.000	Rp560.000.200	Rp425.477.000	Rp95.597.500	Rp399.780.000	Rp497.062.784	Rp365.089.465	72,47	51,47	88,76	85,81	473.540.550	339.382.437,25
Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Rp662.800.000	Rp1.896.000.000	Rp1.360.000.000	Rp1.743.540.000	Rp598.493.375	Rp712.161.800	Rp1.163.915.687	Rp1.633.953.441	90,30	37,56	85,58	93,71	1.415.585.000	1.027.131.075,75

sumber : hasil proyeksi, 2023

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Berdasarkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun sebelumnya, berikut identifikasi permasalahan yang perlu diperhatikan :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan terkait Capaian Kinerja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi pada capaian realisasi investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Iklim investasi sektor non migas dan batubara masih belum cukup optimal, termasuk belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi)	Sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi non migas dan non batu bara dari DPMPTSP Kab/Kota Se - Kaltim
			Penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal hingga status kepemilikan lahan yang tumpang tindih menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur
		Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kaltim	Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain
			Masih kurangnya profil atau ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi yang siap untuk ditawarkan, sehingga calon investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap

			bisnisnya
			Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal
			Belum meratanya dan lemahnya daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal	Banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban penyampaian LKPM
2	Tingginya tuntutan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan
		Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan aplikasi SP4N Lapor yang digunakan sebagai sarana pengaduan satu pintu sesuai amanat KEMENPAN-RB.
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mencari informasi melalui kanal media elektronik yang tersedia
3	Rendahnya Predikat atau Nilai SAKIP	Belum optimalnya penerapan SAKIP, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja	Keterbatasan SDM, khususnya PNS di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
			Kurangnya pemahaman

			SDM dalam melakukan penyusunan perencanaan maupun laporan kinerja
--	--	--	---

Sumber : hasil analisis, 2023

3.2. Isu Strategis

Permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan bersama dengan beberapa hal lain menjadi input untuk perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan periode tahun 2024-2026. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan;
2. Isu internasional;
3. Isu atau kebijakan nasional;
4. Isu atau kebijakan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Telaahan RPJMD/RPD daerah sekitar.

Isu strategis dapat digambarkan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

1. Optimalisasi Iklim investasi sektor non migas dan batubara;
2. Peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi);
3. Penyelenggaraan ketersediaan lahan yang clean and clear;
4. Integrasi promosi investasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia sesuai kebutuhan investasi;
6. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur Penunjang Investasi;
7. Optimalisasi kepatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM;

8. Regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan;
9. Perubahan SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program DPMPTSP Provinsi Kaltim. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran yang ditetapkan juga mempertimbangkan evaluasi hasil capaian RKPD dan Renja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2022, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

4.1 Tujuan

Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara

Yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara horizontal adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (diluar sektor non-migas dan batubara) seperti sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, PTPH), sektor industri dan sektor pariwisata. Sedangkan yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara vertikal adalah mendorong penganekaragaman pengolahan komoditas-komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (tidak hanya dipasarkan dalam bentuk produk mentah).

Indikator : Pertumbuhan Nilai Investasi pada Capaian Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)

2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas terhadap Pelayanan Perizinan

Tujuan ini dimaksudkan untuk penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu

meberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya pelaku usaha.

Indikator : Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel

Yang dimaksud adalah meningkatkan birokrasi yang transparan dan berintegritas serta profesionalisme aparatur perangkat daerah

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)

4.2 Sasaran

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yaitu:

Sasaran pertama :

Terwujudnya capaian realisasi investasi berdasarkan lapangan usaha sektor Non Pertambangan dan Galian

Indikator : Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Batubara (triliun rupiah)

Sasaran kedua :

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan (nilai IKM)

Sasaran ketiga :

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD (nilai AKIP)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Program untuk Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

1. Program untuk Tujuan dan Sasaran 1, *Terwujudnya capaian realisasi investasi berdasarkan lapangan usaha sektor Non Pertambangan dan Galian* tahun 2024 - 2026 :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;
 - c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Program untuk Tujuan dan Sasaran 2, *Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan* tahun 2024 - 2026 :
 - a. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
3. Program Prioritas untuk Tujuan dan Sasaran 3, *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD* tahun 2024 - 2026 :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Casecading

Integrasi antara masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam penentuan tujuan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 dapat dilihat dalam tabel 4.1

Sedangkan untuk tujuan, sasaran, outcome, output dan indikator Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada Lampiran II, casecading kinerja Rencana Strategis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

Tabel 4.1 Integrasi antara Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah dalam Penentuan Tujuan, Program dan Kegiatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Program	Kegiatan
1	Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi pada capaian realisasi investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Iklim investasi sektor non migas dan batubara masih belum cukup optimal, termasuk belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk unggulan (hilirisasi)	Sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi non migas dan non batu bara dari DPMPTSP Kab/Kota Se - Kaltim	1. Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
			Penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal hingga status kepemilikan lahan yang tumpang tindih menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur			
			Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Provinsi belum terhubung dengan baik seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain			
		Masih kurangnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kaltim	Masih kurangnya profil atau ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi yang siap untuk ditawarkan, sehingga calon investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya		b. Program Promosi Penanaman Modal	2) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang			

			dilakukan belum maksimal			
			Belum meratanya dan lemahnya daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi			
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal	Banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban penyampaian LKPM		c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	Tingginya tuntutan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha	Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas terhadap Pelayanan Perizinan	d. Program Pelayanan Penanaman Modal	4) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi Perizinan dan Non Perizinan			
		Belum optimalnya data dan informasi yang bisa diakses oleh pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan aplikasi SP4N Lapor yang digunakan sebagai sarana pengaduan satu pintu sesuai amanat KEMENPAN-RB.		e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5) Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mencari informasi melalui kanal media elektronik yang tersedia			

3	Rendahnya Predikat atau Nilai SAKIP	Belum optimalnya penerapan SAKIP, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja	Keterbatasan SDM, khususnya PNS di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel	f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 9) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 11) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 12) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kurangnya pemahaman SDM dalam melakukan penyusunan perencanaan maupun laporan kinerja			

						13) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--	--	--	---

Sumber : hasil analisis, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1. Strategi Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan sasaran dan tujuan. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi pencapaian dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada, yaitu:

1. Kekuatan DPMPTSP Provinsi Kaltim:
 - a. Komitmen pimpinan;
 - b. Kerjasama yang baik dengan instansi terkait;
 - c. Penyediaan fasilitas / insentif daerah
 - d. Pengawasan, supervisi dan monitoring evaluasi
 - e. SDM yang kompeten
 - f. Penerapan digitalisasi dalam pelayanan
2. Kelemahan:
 - a. Realisasi investasi sektor non migas dan batubara belum optimal
 - b. Pola promosi investasi belum terintegrasi dengan baik
 - c. Minimnya data dan/atau informasi peluang investasi
 - d. Belum optimalnya komitmen perizinan
 - e. Keterbatasan jumlah SDM
 - f. Sarana dan prasarana yang belum optimal

3. Peluang
 - a. Penetapan IKN
 - b. Tersedianya Kawasan Industri;
 - c. Keamanan daerah yang kondusif;
 - d. Dukungan anggaran
 - e. Kerjasama regional dan internasional;
 - f. Upaya ketersediaan lahan yang clean and clear
4. Ancaman
 - a. Minimnya kesadaran pelaku usaha melaporkan LKPM
 - b. Kemudahan berinvestasi di daerah lain;
 - c. Infrastruktur pendukung investasi yang belum optimal
 - d. Minimnya keterbatasan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
 - e. Ketidakpastian peruntukan lahan;
 - f. *Issue* dampak kerusakan lingkungan

Strategi Kebijakan yang perlu diterapkan agar dapat melakukan seluruh kegiatan secara optimal dan mampu merealisasikan seluruh program berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meminimalkan kelemahan dan ancaman yang timbul, maka perlu melakukan strategi yang tepat yaitu :

1. Peningkatan peminatan investasi dan kegiatan berusaha di kawasan industri
2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik
4. Penguatan dan pengembangan SDM yang profesional dan akuntabel

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pengembangan investasi yang diupayakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan strategi promosi dan kegiatan promosi di kawasan industri
2. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di kawasan industri
3. Pengawasan realisasi investasi
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single Submission (OSS)
5. Peningkatan kualitas pelayanan izin non OSS (e-PTSP)
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang melayani
7. Pengembangan media informasi pelayanan yang memadai
8. Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksana kegiatan

Tabel 5.1 Keterkaitan Sasaran RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan 2 RPD : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas			
Sasaran 5 RPD : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi Sektor Non Migas dan Non batubara	Terwujudnya capaian realisasi investasi berdasarkan lapangan usaha sektor Non Pertambangan dan Galian	Peningkatan peminatan investasi dan kegiatan berusaha di kawasan industri	Peningkatan strategi promosi dan kegiatan promosi di kawasan industri
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di kawasan industri
			Pengawasan realisasi investasi
Tujuan 4 RPD : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Sasaran 11 RPD : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK			
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas terhadap Pelayanan Perizinan	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik	Peningkatan kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single Submission (OSS)
			Peningkatan kualitas pelayanan izin non OSS (e-PTSP)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penguatan dan pengembangan SDM yang profesional dan	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur yang melayani

	SKPD	akuntabel	Pengembangan media informasi pelayanan yang memadai
			Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksana kegiatan

Sumber : hasil analisis, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN

SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tabel 6.1 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang siap ditawarkan (Dokumen IPRO)	0	0	2	2	2
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi Yang Direncanakan (Potensi Investasi)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	1	1	1	2	3

Penanaman Modal Daerah Provinsi	Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)					
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1	2	2	3	4

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang siap ditawarkan (Dokumen IPRO), kondisi awal di tahun 2022 adalah 0 dokumen IPRO, target 2023 masih 0 dokumen IPRO. Pada tahun 2024, target 2 dokumen IPRO, tahun 2025 target 2 dokumen IPRO dan tahun 2026 target 2 dokumen IPRO dengan kondisi akhir di tahun 2026 adalah 6 Dokumen IPRO. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya di tahun 2024 - 2026 adalah :

a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Memiliki indikator potensi investasi yang direncanakan (potensi investasi). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 2 potensi investasi, target 2023 3 potensi investasi. Pada tahun 2024, target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00. Tahun 2025 target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 2 potensi investasi dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan telah tersusun 6 peta potensi investasi sektor non migas dan non batubara. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
Indikator: Jumlah peraturan daerah (perda) rencana umum penanaman modal daerah provinsi
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
Indikator: Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

2. Program Promosi Penanaman Modal

Tabel 6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Promosi Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Promosi Penanaman Modal	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur Pada Sektor Non Migas Dan Non Batubara (Minat)	9	10	11	12	13
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	10	11	11	12	13
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	4	5	5	5	6
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	6	6	6	7	7

Sumber : hasil proyeksi, 2023

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kepeminatan investasi di Kalimantan Timur pada sektor non migas dan non batubara (minat), kondisi awal di tahun 2022 adalah 9 Minat, target 2023 10 Minat. Pada tahun 2024, target 11 Minat, tahun 2025 target 12 Minat dan tahun 2026 target 13 Minat dengan kondisi akhir di tahun 2026 adalah 36 minat. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya di tahun 2024 - 2026 adalah:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah kegiatan promosi (kegiatan). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 10 kegiatan promosi, target 2023 11 kegiatan promosi. Pada tahun 2024, target 11 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 2.600.000.000,00. Tahun 2025 target 12 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 13 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000,00. Kondisi akhir di 2026 diharapkan 36

kegiatan promosi telah dilaksanakan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 6.3 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA - PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)	101,02	100	100	100	100
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melaporkan (Laporan)	1.582	1.590	1.598	1.614	1.629
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)	7.711	7.788	7.788	7.865	7.942
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)	276	400	400	400	400
Sub Kegiatan Penyelesaian	Jumlah penyelesaian permasalahan dan	102	105	50	60	70

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator persentase realisasi investasi PMA - PMDN (%) pada sektor non migas dan non batubara. Kondisi awal di tahun 2022 adalah 101,02%, target 2023 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target realisasi investasi PMA - PMDN (%) pada sektor non migas dan non batubara adalah 100% tiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM (Laporan). Kondisi awal di tahun 2022 adalah 1.582 laporan, target 2023 1.590 laporan. Pada tahun 2024, target 1.598 LKPM dengan pagu anggaran Rp 2.700.000.000,00. Tahun 2025 target 1.614 LKPM dengan pagu anggaran Rp 3.100.000.000,00 dan tahun 2026 target 1.629 LKPM dengan pagu anggaran Rp 3.600.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan 4.841 laporan telah disampaikan oleh pelaku usaha. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengawasan Penanaman Modal
Indikator: Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)
- 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Indikator: Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)
- 3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Indikator: Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 6.4 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pelayanan Dan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan Yang Tepat Waktu (%)	101,02	100	100	100	100
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan (izin & non izin)	7.473	5.000	5.000	5.100	5.200
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (dokumen)	6	7	7	9	12
Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	9	10	10	10	10
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	99	100	100	110	120

Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	3	4	4	5	6
---	--	---	---	---	---	---

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pelayanan Dan Penanaman Modal memiliki 2 (dua) indikator, yaitu persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu (%) dan persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk kedua indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu dan persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti adalah 100% setiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Memiliki indikator jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin & non izin). Kondisi awal di tahun 2022 jumlah izin dan non izin yang diterbitkan adalah 7.473 izin dan non izin dan target 2023 adalah 5.000 izin dan non izin. Pada tahun 2024, target 5000 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 2.750.000.000,00. Tahun 2025 target 5000 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 3.436.262.000,00 dan tahun 2026 target 5200 izin dan non izin dengan pagu anggaran Rp 4.269.090.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026 diharapkan sejumlah 15.200 izin dan non izin telah diterbitkan. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (dokumen) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

Indikator: Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi (pelaku usaha)

2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi

Indikator: Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)

3) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Indikator: Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)

4) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Indikator: Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 6.5 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan (%)	100	100	100	100	100
Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian Data terhadap Informasi (data)	182	195	200	210	230

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen)	6	6	6	7	8
---	--	---	---	---	---	---

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki indikator persentase pemenuhan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 hingga kondisi akhir di tahun 2026 target persentase pemenuhan layanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan adalah 100% setiap tahunnya. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah :

a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

Memiliki indikator penyajian data terhadap informasi (data). Kondisi awal tahun 2022 182 data, target 2023 195 data. Pada tahun 2024, target 200 data dengan pagu anggaran Rp 600.000.000,00. Tahun 2025 target 210 data dengan pagu anggaran Rp 800.000.000,00 dan tahun 2026 target 230 data dengan pagu anggaran Rp 1.000.000.000,00. Kondisi akhir di tahun 2026, target 640 data yang disajikan. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator: Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen).

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program penunjang urusan pemerintah daerah memiliki indikator indeks kualitas layanan kesekretariatan (indeks). Kondisi awal di tahun 2022 91 indeks, target 2023 91 indeks. Pada tahun 2024 target 91 indeks, 2025 92 indeks, dan target kondisi akhir di tahun 2026 93 indeks. Adapun Kegiatan dan Pendanaannya adalah:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Memiliki indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024 Target 100% dokumen yang ditetapkan tepat waktu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00. Pada tahun 2025, target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 725.000.000,00., Pada kondisi akhir di tahun 2026, target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 725.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)

Tabel 6.6 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahDaerah Provinsi	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	5	5
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5	5	5

Sumber: hasil proyeksi, 2023

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Memiliki indikator persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 13.815.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 16.035.000.000,00 dan kondisi akhir tahun 2026 target 100%

- dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.294.250.000,00. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Indikator: Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)
 - 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
 - 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
Indikator: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Tabel 6.7 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 2

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/Bulan)	37	40	40	50	60
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85	85	85	85	85

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000	1000	1000	1000	1000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1

Sumber: hasil proyeksi, 2023

c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Memiliki indikator jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (orang). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 1 orang. Pada tahun 2024, target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00. Tahun2025 target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00 dan kondisi akhir pada tahun 2026 target 1 orang dengan pagu anggaran Rp 16.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Indikator: Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah (Orang)
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
Indikator: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)
- 3) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen).

Tabel 6.8 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 3

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah (Orang)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	24	24	24

Sumber: hasil proyeksi, 2023

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Memiliki indikator persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 435.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 465.000.000,00 dan kondisi akhir pada tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 435.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
Indikator: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
Indikator: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
- 3) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
Indikator: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)

4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang).

Tabel 6.9 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 4

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100	100	100	100	100
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6	6	1	3	3
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	9	9	9	9

Sumber: hasil proyeksi, 2023

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Memiliki indikator jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (laporan). Kondisi awal tahun 2022 387 laporan dan target 2023 adalah 417 laporan. Pada tahun 2024, target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.789.000.000,00. Tahun 2025 target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.789.000.000,00 dan tahun 2026 target 439 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.689.000.000,00 dengan kondisi akhir di tahun 2026 1.317 laporan. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
- 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
Indikator: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen).

Tabel 6.10 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 5

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	387	439	439	439	439
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	2

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120	120	120	120	120
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248	270	270	270	270
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	33	33	33	33	33

Sumber : hasil proyeksi, 2023

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Memiliki indikator jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (unit/tahun). Kondisi awal tahun 2022 87 unit/tahun dan target 2023 adalah 87 unit/tahun. Pada tahun 2024, target 87 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 975.000.000,00. Tahun 2025 target 87 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 4.975.000.000,00 dan tahun 2026 target 0 unit/tahun dengan pagu anggaran Rp 0,00. Kondisi akhir di tahun 2026 adalah 174 unit. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel;
Indikator: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit).

Tabel 6.11 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 6

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	87	87	87	87	0
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	84	84	84	84	0

Sumber: hasil proyeksi, 2023

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memiliki indikator jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (laporan). Kondisi awal tahun 2022 86 laporan dan target 2023 adalah 86 laporan. Pada tahun 2024, target 86 laporan dengan pagu anggaran Rp 4.426.262.000,00. Tahun 2025 target 86 laporan dengan pagu anggaran Rp 6.860.000.000,00 dan tahun 2026 target 85 laporan dengan pagu anggaran Rp 5.000.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan).

Tabel 6.12 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 7

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	86	86	86	86	85
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	48	48	48
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	36	36	36	36

Sumber: hasil proyeksi, 2023

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Memiliki indikator persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%). Kondisi awal tahun 2022 dan target 2023 untuk indikator tersebut adalah 100%. Pada tahun 2024, target 100% dengan pagu anggaran Rp 1.100.000.000,00. Tahun 2025 target 100% dengan pagu Rp 1.490.000.000,00 dan tahun 2026 target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.250.000.000,00. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Indikator: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
- 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
Indikator: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit).

Tabel 6.13 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 8

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (satuan)	Kondisi awal		Target		
		2022	2023 (target)	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	91	92	93	93
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	29	29	29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125	125	125	250	250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	1	1
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0	5	5

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

Sumber : hasil proyeksi, 2023

6.2. Rencana Pagu Anggaran

Adapun pagu anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 berdasarkan Program tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.14 Rencana Pagu Anggaran DPMPTSP

No.	Program	Pagu Anggaran (Rupiah)		
		2024	2025	2026
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.700.000.000	3.100.000.000	3.300.000.000
2	Program Promosi Penanaman Modal	2.600.000.000	3.100.000.000	3.300.000.000
3	Pogram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.700.000.000	3.100.000.000	3.600.000.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.750.000.000	3.436.262.000	4.269.090.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.956.262.000	28.855.000.000	21.909.250.000

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Untuk rincian rencana tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan pendanaan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Lampiran Tabel Kerangka Pendanaan, Indikator dan Target pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 - 2026 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja merupakan faktor kunci yang paling utama dan terpenting dalam mengukur keberhasilan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran yang direncanakan.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026 yaitu :

1. **Nilai realisasi investasi pada sektor non migas dan non batubara**, dengan satuan indikator Triliun Rupiah. Kondisi awal di tahun 2022 realisasi investasi non migas dan non batubara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 35,35 triliun rupiah, target 2023 35,67 triliun rupiah. Pada tahun 2024, target realisasi investasi non migas dan non batubara adalah 36,06 triliun rupiah,

tahun 2025 37,24 triliun rupiah, dan kondisi akhir di tahun 2026 sebesar 38,25 triliun rupiah.

Pengukuran realisasi investasi dilakukan melalui rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha dan hasil tersebut akan dipublikasikan oleh Kementerian Investasi / BKPM RI melalui *Press Release*.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan**, dengan indikator Nilai IKM. Kondisi awal di tahun 2022 nilai IKM DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah 89,41; target 2023 86,00. Pada tahun 2024, target nilai IKM adalah 90,10; target 2025 90,84; dan kondisi akhir di tahun 2026 target sebesar 91,60.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dilakukan melalui e-PTSP dengan cara merekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diisi oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

3. **Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD**, dengan indikator Nilai AKIP. Kondisi awal di tahun 2022 nilai AKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah 62,18; target 2023 63,50. Pada tahun 2024, target nilai AKIP adalah 65,00; target 2025 68,00; dan kondisi akhir di tahun 2026 target sebesar 71,00.

Pengukuran Nilai AKIP dilakukan melalui Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi awal		Target		
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026
1.	Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batubara	Triliun (Rp)	35,35	35,67	36,06	37,14	38,25
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	89,41	86,00	90,10	90,84	91,60
3.	Nilai AKIP SKPD	Nilai AKIP	62,18	63,50	65,00	68,00	71,00

Sumber : Hasil proyeksi, 2023

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar sektor Penanaman Modal. IKK Outcome untuk DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah Persentase peningkatan investasi di provinsi. Sedangkan untuk IKK output dalah sebagai berikut:

1. Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan
2. Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara
3. Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara
4. Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu
5. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti

6. Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan

Adapun Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi awal		Target			Kondisi Akhir
				2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
IKK Outcome									
1	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Batubara	%	$= \frac{(\sum \text{investasi tahun } n - \sum \text{investasi tahun } n-1) \text{ di Provinsi}}{\sum \text{investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi}} \times 100\%$	40,29	40,79	41,29	42,29	43,29	43.29
IKK Output									
1	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	Dokumen IPRO yang disusun dalam 1 tahun	0	0	2	2	2	6
2	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	Jumlah Laporan Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur	9	10	11	12	13	36
3	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	%	$\frac{\text{Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara}}{\text{Target Investasi Non Migas dan Non Batu bara}} \times 100\%$	101,02	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	$\frac{\text{Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Izin dan Non Izin yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}}{\text{Jumlah target pengaduan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100

6	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	%	$\frac{\text{Pemahaman masyarakat terhadap alur perizinan}}{\text{Jumlah publikasi yang terbit}} \times 100\%$					100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks		IKLS	Bobot	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	(Bobot*Target Kegiatan)	91	91	91	92	93	93
	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu		0.4	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100	40								
	Persentase realisasi anggaran		0.3	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	30								
	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		0.25	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	67	16.7								
	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		0.05	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100	5.0								
	Jumlah IKLS						92							

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi kebijakan serta program kegiatan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah selama tiga tahun ke depan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyusunan Renstra yang diupayakan mencakup keseluruhan elemen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam memberikan arah kebijakan dan pelaksanaan kinerja selama tiga tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah disusun sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja keras seluruh staf DPMPTSP .

Semoga penyusunan Renstra DPMPTSP Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat memberikan manfaat sebagai pedoman atau referensi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan transparan, serta selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Samarinda, Juli 2023
Kepala Dinas,

Puguh Harjanto, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197908101998021001

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Akhir
					2023	2024		2025		2026		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							31.306.262.000		42.391.262.000		37.378.340.000	
Tujuan 1 : Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi sektor Non Migas dan Non Batubara			Pertumbuhan Nilai Investasi Pada Capaian Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)	11,74%	2,00%	2,00%		3,00%		3,00%		8 %
	Sasaran 1 : Terwujudnya Capaian Realisasi Investasi Berdasarkan Lapangan Usaha Sektor Non Pertambangan dan Galian		Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (Triliun)	35.35 Triliun	35.67 Triliun	36.06 Triliun		37.14 Triliun		38.25 Triliun		38.25 Triliun
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan (Dokumen IPRO)	0 Dokumen IPRO	0 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	2 Dokumen IPRO	3.100.000.000	2 Dokumen IPRO	3.300.000.000	6 Dokumen IPRO
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan (Potensi Investasi)	2 (Potensi Investasi)	2 (Potensi Investasi)	2 (Potensi Investasi)	2.700.000.000	2 (Potensi Investasi)	3.100.000.000	2 (Potensi Investasi)	3.300.000.000	6 Peta Potensi
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	2 Dokumen	700.000.000	3 Dokumen	700.000.000	6 Dokumen
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000	3 Dokumen	2.400.000.000	4 Dokumen	2.600.000.000	9 Dokumen
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (Minat)	9 Minat	10 Minat	11 Minat	2.600.000.000	12 Minat	3.100.000.000	13 Minat	3.300.000.000	36 Minat
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	10 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	2.600.000.000	12 Kegiatan	3.100.000.000	13 Kegiatan	3.300.000.000	36 Kegiatan
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000	5 Dokumen	1.350.000.000	6 Dokumen	1.400.000.000	16 Dokumen
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000.000	7 Dokumen	1.750.000.000	7 Dokumen	1.900.000.000	20 Dokumen
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara (%)	101,02%	100%	100%	2.700.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.600.000.000	100 Persen
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (Laporan)	1.582 Laporan	1.590 Laporan	1.598 Laporan	2.700.000.000	1.614 Laporan	3.100.000.000	1.629 Laporan	3.600.000.000	4.841 Laporan
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	7.711 Kegiatan Usaha	7.788 Kegiatan Usaha	7.788 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	7.865 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	7.942 Kegiatan Usaha	1.200.000.000	23.595 Kegiatan Usaha

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Akhir
					2023	2024		2025		2026		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	276 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	700.000.000	400 Pelaku Usaha	800.000.000	400 Pelaku Usaha	1.000.000.000	1.200 Pelaku Usaha
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	102 Kegiatan Usaha	105 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	60 Kegiatan Usaha	1.200.000.000	70 Kegiatan Usaha	1.400.000.000	180 Kegiatan Usaha
Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas Terhadap Perizinan			Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	-0.31%	-0.31%	0,81%		0,82%		0,83%		0,83%
	Sasaran 2 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	89.41 Nilai IKM	86.00 Nilai IKM	90.10 Nilai IKM		90.84 Nilai IKM		91.60 Nilai IKM		91.60 Nilai IKM
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu (%)	100%	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.656.262.000	100%	3.389.090.000	100%
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	700.000.000	100 %	780.000.000	100 %	880.000.000	100 %
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan (Izin & Non Izin)	7473 Izin & Non Izin	5000 Izin dan Non Izin	5000 Izin dan Non Izin	2.750.000.000	5000 Izin dan Non Izin	3.436.262.000	5200 Izin dan Non Izin	4.269.090.000	15200 Izin dan Non Izin	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	550.000.000	9 Dokumen	750.000.000	12 Dokumen	1.100.000.000	28 Dokumen	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	9 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	700.000.000	10 Pelaku Usaha	780.000.000	10 Pelaku Usaha	880.000.000	30 Pelaku Usaha	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	99 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	500.000.000	110 Pelaku Usaha	700.000.000	120 Pelaku Usaha	900.000.000	330 Pelaku Usaha	
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	3 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	5 Kegiatan Usaha	1.206.262.000	6 Kegiatan Usaha	1.389.090.000	15 Kegiatan Usaha	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Pengguna Layanan (%)	100%	100%	100%	600.000.000	100%	800.000.000	100%	1.000.000.000	100%	

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Akhir
					2023	2024		2025		2026		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi (Data)	182 Data	195 Data	200 Data	600.000.000	210 Data	800.000.000	230 Data	1.000.000.000	640 Data
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000	7 Dokumen	800.000.000	8 Dokumen	1.000.000.000	21 Dokumen
Tujuan 3 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)	78,10 (BB)	78,10 (BB)	78,50 (BB)		79,30 (BB)		88,01 (A)		88,01 (A)
	Sasaran 3 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) SKPD (Nilai AKIP)	62.18 Nilai AKIP	63,50 Nilai AKIP	65.00 Nilai AKIP		68.00 Nilai AKIP		74.00 Nilai AKIP		74.00 Nilai AKIP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91 Indeks	91 Indeks	91 Indeks	19.956.262.000	92 Indeks	28.855.000.000	93 Indeks	21.909.250.000	93 Indeks
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100%	100	100	500.000.000	100	725.000.000	100	725.000.000	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	5	5	200.000.000	5	325.000.000	5	325.000.000	15 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3 Laporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	5	5	150.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100%	100	100	10.715.000.000	100	12.535.000.000	100	12.794.250.000	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/Bulan)	37 Orang/Bulan	40	40	10.000.000.000	50	11.720.000.000	60	11.879.250.000	60 Orang/Bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85 Dokumen	85	85	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	255 Dokumen
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000 Dokumen	1000	1000	210.000.000	1000	310.000.000	1000	410.000.000	3000 Dokumen
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3 Laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3 Dokumen

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Akhir
					2023	2024		2025		2026		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah (Orang)	1 Orang	1	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1 Orang
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3 Dokumen
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3 Dokumen
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24 Laporan	24	24	14.000.000	24	14.000.000	24	14.000.000	72 Laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100%	100	100	435.000.000	100	465.000.000	100	435.000.000	100 Persen
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6 Paket	6	1	300.000.000	3	330.000.000	3	300.000.000	7 Paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3 Dokumen
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1 Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3 Dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 Orang	9	9	85.000.000	9	85.000.000	9	85.000.000	27 Orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana (Laporan)	387 Laporan	417	439	1.789.000.000	439	1.789.000.000	439	1.689.000.000	1.317 Laporan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	6 Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	6 Paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	12	12	310.000.000	12	310.000.000	12	210.000.000	36 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120 Dokumen	120	120	20.000.000	120	20.000.000	120	20.000.000	360 Dokumen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248 Laporan	270	270	1.368.000.000	270	1.368.000.000	270	1.368.000.000	810 Laporan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	33 Dokumen	33	33	50.000.000	33	50.000.000	33	50.000.000	99 Dokumen
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Tahun)	87 Unit/Tahun	87	87	1.275.000.000	87	4.975.000.000	0	-	174 Unit
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3 Paket	3	3	200.000.000	3	2.200.000.000	0	-	6 Paket
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	84 Unit	84	84	1.075.000.000	84	2.775.000.000	0	-	168 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana (Laporan)	86 Laporan	86	86	4.426.262.000	86	6.860.000.000	85	5.000.000.000	257 Laporan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2 Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6 Laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 Laporan	48	48	450.000.000	48	800.000.000	48	800.000.000	144 Laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2 Laporan	2	2	346.262.000	2	2.000.000.000	1	100.000.000	5 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	36	36	3.620.000.000	36	4.050.000.000	36	4.090.000.000	108 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	100%	100	100	800.000.000	100	1.490.000.000	100	1.250.000.000	100 Persen

KERANGKA PENDANAAN, INDIKATOR DAN TARGET PADA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
					2023	2024		2025		2026		
					Target	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	29 Unit	29	29	350.000.000	29	350.000.000	29	350.000.000	29 Unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125 Unit	125	125	250.000.000	250	640.000.000	250	400.000.000	625 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0 Unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1 Unit
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	0	-	5	300.000.000	5	300.000.000	5 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0 Unit	0	0	-	0	-	0	-	0 Unit

Sumber : Hasil Proyeksi, 2023

CASCADE KINERJA DPMPTSP PROV. KALTIM 2024-2026

TUJUAN 1:			
Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi pada Nilai Investasi sektor Non Migas dan Non Batubara			
Pertumbuhan Nilai Investasi Pada Capaian Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara (%)			
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2,00%	3,00%	3,00%	

SASARAN 1:			
Terwujudnya Capaian Realisasi Investasi Berdasarkan Lapangan Usaha Sektor Non Pertambangan dan Galian			
Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Non Batubara (Triliun)			
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
36,27 Triliun	36,90 Triliun	37,53 Triliun	

PROGRAM				
PROGRAM PENGEMBANGAN DALAM PENANAMAN MODAL				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Potensi Investasi yang dikembangkan (Potensi Investasi)	2	2		
KEGIATAN				
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Potensi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan (Buku)	2	2	2	
SUB-KEGIATAN				
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Perencanaan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1 Dk	2 Dk	3 Dk	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi (Dokumen)	2 Dk	3 Dk	4 Dk	

PROGRAM				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN MODAL				
Indikator	2024	2025	2026	
Kepemilikan Investasi di Kalimantan Timur (Mnag)	11	12	13	
KEGIATAN				
Penyertakan Promosi Penanaman Modal yang Mendapat Kesempatan Daerah Provinsi				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Kegiatan Promosi (kegiatan)	11 kpg	12 kpg	13 kpg	
SUB-KEGIATAN				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kesempatan Provinsi				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Perencanaan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	5 Dk	5 Dk	6 Dk	
SUB-KEGIATAN				
Pelibatan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kesempatan Provinsi				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	6 Dk	7 Dk	7 Dk	

PROGRAM				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase Peningkatan Investasi PMA-PMDN (%)	2%	2%	2%	
KEGIATAN				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Mendapat Kesempatan Daerah Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan LUPM (Laporan)	1.598 Laporan	1.614 Laporan	1.620 Laporan	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	778 Kpg Usaha	785 Kpg Usaha	792 Kpg Usaha	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	105 Kpg Usaha	110 Kpg Usaha	115 Kpg Usaha	

PROGRAM				
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase Penyediaan Perizinan (%)	100%	100%	100%	
KEGIATAN				
Penanaman Modal yang Memuat Kebijakan Peraturan Perundangan Unggulan Merdeka Peningkatan Daerah Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yg diterbitkan (Zon & Non Zon)	5000 Izin & Non Izin	5000 Izin & Non Izin	5200 Izin & Non Izin	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik Kesempatan Daerah Provinsi (Pelaku Usaha)	100 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	
SUB-KEGIATAN				
Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	4 Kpg. Usaha	5 Kpg. Usaha	6 Kpg. Usaha	
SUB-KEGIATAN				
Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perizinan dan Non Perizinan				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	10 Orang	10 Orang	10 Orang	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Fasilitas/Infrastruktur Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Fasilitas/Infrastruktur Daerah Kesempatan Daerah Provinsi (Kegiatan Usaha)	9 Kpg. Usaha	9 Kpg. Usaha	12 Kpg. Usaha	

PROGRAM				
PROGRAM PENGELOMPOKAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase Layanan Informasi yang dimanfaatkan pengguna layanan (%)	100%	100%	100%	
KEGIATAN				
Usaha Pengkajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Pengujian data terhadap informasi (Data)	200 Data	210 Data	230 Data	
SUB-KEGIATAN				
Pengolahan, Pengujian dan Pemertahanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Cekang dan Dimanfaatkan (Dokumen)	6 Dk	7 Dk	8 Dk	

KEGIATAN				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	
SUB-KEGIATAN				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Penyusunan DPR-DAK				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen DPR-DAK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPR-DAK	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
SUB-KEGIATAN				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
KEGIATAN				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase ABR yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100%	100%	100%	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	40	50	60	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85	85	85	
SUB-KEGIATAN				
Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1000	1000	1000	
SUB-KEGIATAN				
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemerkaan				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerkaan dan Tindak Lanjut Pemerkaan (Dokumen)	1	1	1	
SUB-KEGIATAN				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1	
SUB-KEGIATAN				
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	

KEGIATAN				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah orang pengurusan dan inventaris barang milik daerah (orang)	1 Orang	1 Orang	1 Orang	
SUB-KEGIATAN				
Penyusunan/Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	
SUB-KEGIATAN				
Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	
SUB-KEGIATAN				
Pemertasaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Laporan Pemertasaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	24	
KEGIATAN				
Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Persentase SKPD Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100%	100%	100%	
SUB-KEGIATAN				
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Akibat Kelangkaannya (Paket)	6	6	6	
SUB-KEGIATAN				
Pendataan dan Penghasilan Administrasi Kepegawaian				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Penghasilan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	
SUB-KEGIATAN				
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1	
SUB-KEGIATAN				
Pendataan dan Pelaksanaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
INDIKATOR	2024	2025	2026	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	9	9	

KEGIATAN				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang dihasilkan (Laporan)	48	48	48	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	
SUB-KEGIATAN				
Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Undangan				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	120	120	120	
SUB-KEGIATAN				
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPTD				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPTD (Lokasi)	225	225	225	
SUB-KEGIATAN				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPTD				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPTD (Dokumen)	33	33	33	
KEGIATAN				
Pengadaan Barang Hiti Canggih Perungkungan Umum Pemerintah Daerah				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah unit pengadaan barang modal untuk sarana dan prasarana (Unit/Harta)	17	17	17	
SUB-KEGIATAN				
Pengadaan Mobil				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Paket Mobil yang Disediakan (Paket)	3	3	0	
SUB-KEGIATAN				
Pengadaan Perabotan dan Mesin Lampu				
Indikator	2024	2025	2026	
Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lampu yang Disediakan (Unit)	81	81	42	

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dari data demografis Indonesia tahun 2019, pemuda merupakan bagian terbesar dari total penduduk Indonesia yakni mencapai kurang lebih 27 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah (*the low income group*), yang dalam katagori ekonomi diterminologikan sebagai orang-orang miskin. Kemiskinan ini dari sudut pandang pendidikan, mengakibatkan para pemuda tidak dapat melanjutkan pendidikan (*drop-out*) yang berujung pada kualitas SDM pemuda rendah dan sulit bersaing dalam kompetisi pasar kerja baik nasional maupun internasional.

Jumlah pemuda yang cukup dominan dalam populasi penduduk Indonesia bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan bisa destruktif. Dalam kaitan inilah, diperlukan pemberdayaan (*empowering*) bagi pemuda agar memiliki keunggulan daya saing dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Populasi penduduk Kalimantan Timur 3,77 juta jiwa (*Sumber hasil SP2020, BPS Kaltim*) dan 70,28 % dari jumlah penduduk Kaltim adalah dalam kategori usia produktif (15-64), sehingga Kalimantan Timur masih termasuk dalam masa bonus demografi. Adapun jumlah pemuda (16-30) adalah 958.698 (*Sumber : Data Dukcapil Tahun 2021*) dengan rincian 465.262 jiwa (laki-laki) dan 493.346 jiwa (perempuan). Hal ini merupakan sesuatu kekuatan dan potensi yang luar biasa apabila mendapat perhatian semua pihak agar bisa menumbuhkan pemuda yang kreatif, produktif dan memiliki berbudi pekerti baik dapat membawa Provinsi Kalimantan Timur menuju kemandirian dan kemajuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan Bangsa dan Negara Indonesia menuju Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Oleh karena itulah pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang mempelopornya. Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui **penyadaran**, **pemberdayaan**, dan **pengembangan** sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Perlu diketahui bersama bahwa saat ini yang masih menjadi isu nasional adalah lapangan dan kesempatan kerja, dalam perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan domain dengan capaian

terendah dibandingkan dengan domain lainnya sehingga permasalahan global ini perlu penanganan serius tidak hanya pada pemerintah pusat tapi juga sampai pada pemerintah daerah. Berdasarkan Data IPP tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan perhatian khusus pada domain ini karena nilai indeksinya paling rendah di antara semua domain.

Salah satu tantangan pada domain ini adalah tingkat pengangguran pemuda yang relatif tinggi (15,21%). Meskipun trennya menurun, tingkat pengangguran pemuda di provinsi ini masih lebih tinggi daripada angka nasional (13,47%). Tantangan berikutnya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan, yakni turunnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 77,25% menjadi 70,55%. Penurunan ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat kelima terendah untuk indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah angka perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi (11,54%) dan sedikit lebih tinggi daripada angka nasional.

Pada data lain juga disampaikan Kalimantan Timur dengan Pemuda Wirausaha sebesar 0,10% dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,71% (*BPS Kaltim Tahun 2022*).

Di sisi lain, penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, holistik, serta berkesinambungan. Kemudian mengelolanya secara profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, standarisasi, akreditasi, serta sertifikasi.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Setelah sukses masuk dalam 10 (sepuluh) besar pada PON XX tahun 2021, Kaltim selanjutnya akan semakin giat melakukan pembinaan para atlet berprestasi dengan tujuan menjadikan Kaltim sebagai lumbung atlet berprestasi wilayah timur Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya atlet Kaltim masuk dalam squad Merah Putih dalam ajang *Sea Games*, *Asian Games* bahkan pada *Olympic Games*. Tidak hanya sampai disitu tapi Provinsi Kaltim siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional bahkan Internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dan sebagai tindak kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga menjadi suatu acuan dalam menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan harus menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk penyelarasan antara RPJMN 2020-2024, RPD 2024-2026 dan RPJPD yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga disusun guna penyesuaian kebijakan nasional dan daerah akibat dari penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan isu strategis lainnya.

Dengan Rancangan Renstra 2024-2026 Dispora Provinsi Kalimantan Timur ini, maka diharapkan dapat mewujudkan iklim kepemudaan dan keolahragaan yang baik dengan memperhatikan indikator-indikator makro yang disesuaikan kembali dengan tingkat relevansi saat ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan Rancangan Renstra 2024-2026 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Renstra ini juga menjadikan sejumlah regulasi lainnya sebagai landasan hukum pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

8. Undang – Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan.
31. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
32. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
33. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.1.2/635/SK-DISPORA PROG/2023, tanggal 10 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Tahun 2024-2026;
34. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.1.2/ /SK-DISPORA PROG/2023, tanggalMei 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Tahun 2024-2026

1.3. Hubungan Antardokumen

Hubungan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan Renstra merupakan kesatuan sistem pembangunan yang

diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antar urusan dari pusat sampai ke daerah.

1. Hubungan Antara Renstra dengan RPJMD dan RPJPN dan RPJMN

Renstra memedomani RPD untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

2. Hubungan Antara Renstra dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 telah berpedoman pada Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Berbagai evaluasi Renstra periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Renstra dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Renja. Sasaran tahunan dan arah kebijakan Renstra harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam Renja. Program pembangunan kepemudaan yang sejatinya adalah program prioritas Dispora Prov.Kaltim dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu Renja ke Renja tahap berikutnya.

3. Hubungan Antara Renstra Dispora Kaltim dengan Renstra Kemenpora dan Renja Dispora Prov. Kaltim

Dokumen Renstra Dispora Kaltim menjadi lebih lengkap jika karena keterhubungan antar dokumen saling mengisi dan bersinergi antara pencapaian pemerintah pusat tentunya harus didukung oleh daerah dalam mewujudkan program kepemudaan dan keolahragaan yang berkesinambungan, diantaranya adalah pencapaian IPP Nasional yang merupakan hasil kontribusi masing-masing daerah.

4. Hubungan Antara Renstra Dispora Kaltim dengan Renstra Dispora Kab/Kota

Merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur dalam misi satu “Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan , pemuda dan penyandang disabilitas”, dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan ke-1 : Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing.
- Sasaran ke-5 : Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas
- Strategi : Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha.
- Kebijakan 1 : Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi.
- Kebijakan 2 : Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas.

Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

5. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program selama 3 (tiga) tahun.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggungjawab yang diemban sesuai tugas dan fungsi utama Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan visi dan misi serta arah kebijakan Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan pada jangka menengah dengan rencana kerja tahunan.
3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan beserta alokasi penganggaran indikatif.

4. Menyediakan panduan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang tenaga kerja dengan semua pihak pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
5. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagaimana berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPORA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Startegis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pada pembentukannya bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan PD teknis yang membawahi urusan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa *stake holder* sebagai mitra kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur melalui pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi keolahragaan yang berpedoman pada peraturan dan undang – undang yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana berikut :

2.1.1. Tugas Pokok :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

2.1.2. Fungsi

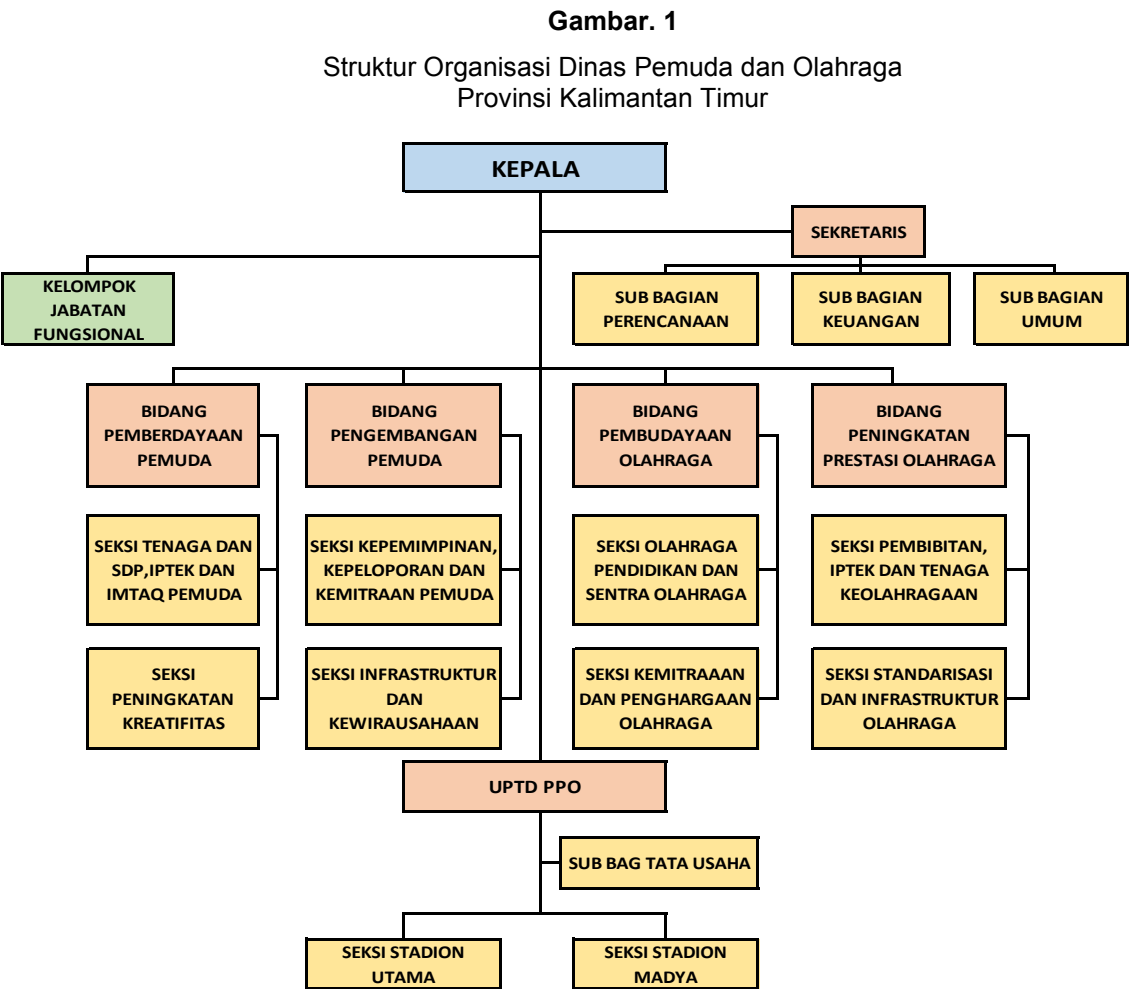
Adapun Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- 6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;

- 7) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :



Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 6 (enam) orang eselon III, 18 (delapan belas) orang eselon IV yang meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
 - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
- d. Bidang Pengembangan Pemuda
 - Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layana Khusus
 - Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
 - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- g. Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Utama dan Madya, dan
 - Kepala Tata Usaha
 - Seksi Stadion Utama
 - Seksi Stadion Madya
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

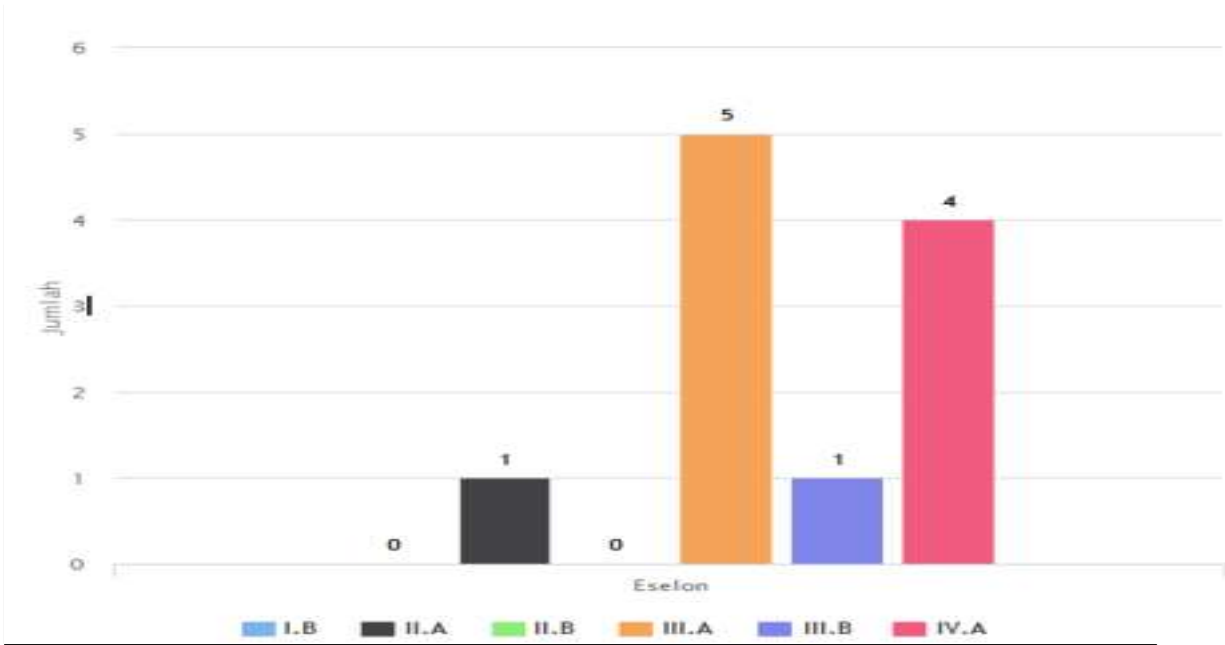
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Perangkat Daerah yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Januari 2023 adalah sebagai berikut :

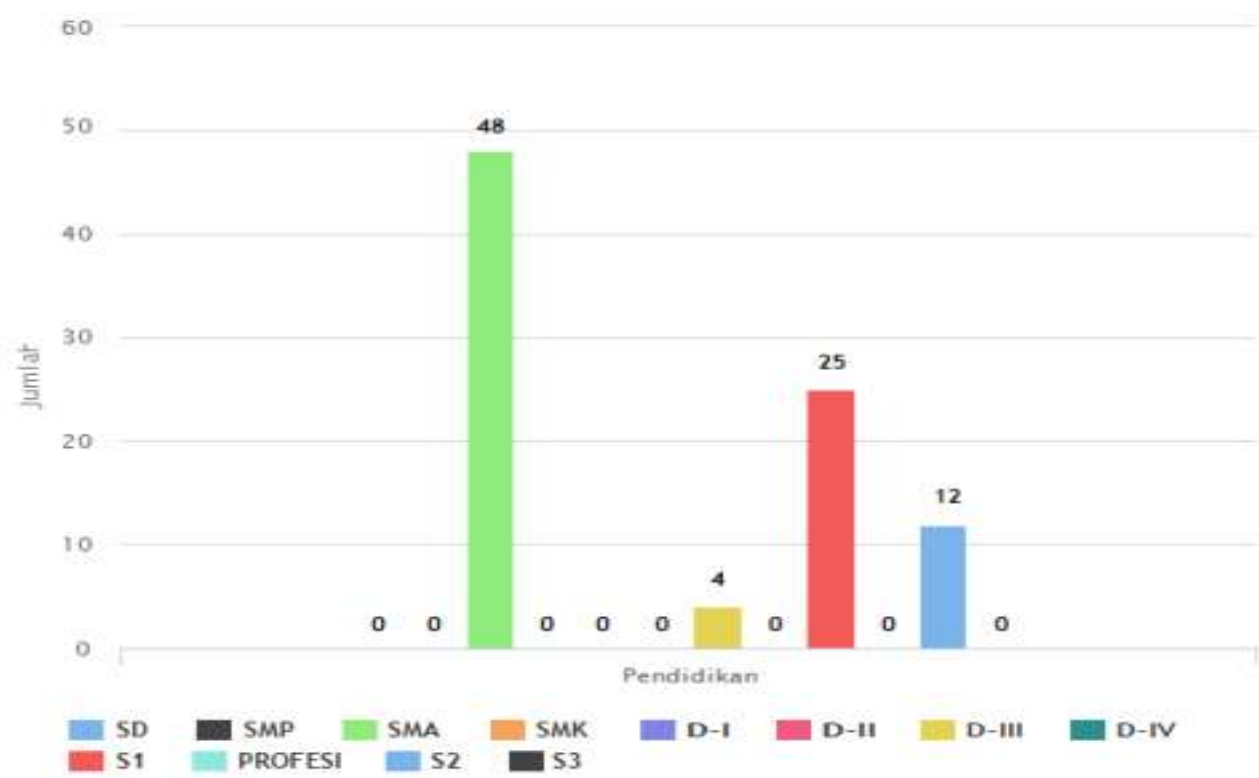
Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Jabatan	laki - laki	Perempuan	Golongan				Pendidikan					
			IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Bidang	4	0	4		0	0	4	0	0	0	0	0
Kepala UPTD	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Sub Bagian	1	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Kepala Seksi	8	5	5	8	0	0	5	8	0	0	0	0
Kepala TU	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Staf PNS	63	19	0	19	44	0	2	17	2	44	0	0
Staf Non PNS	149	48	0	0	0	0	5	50	11	142	23	11
Jumlah PNS	62	26	12	31	44	0	14	29	2	44	0	0
Jumlah Non PNS	149	48	0	0	0	0	5	25	3	103	23	11
Jumlah PNS + Non PNS	211	74	12	31	44	0	19	54	5	147	23	11

Grafik 1. Berdasarkan Eselon

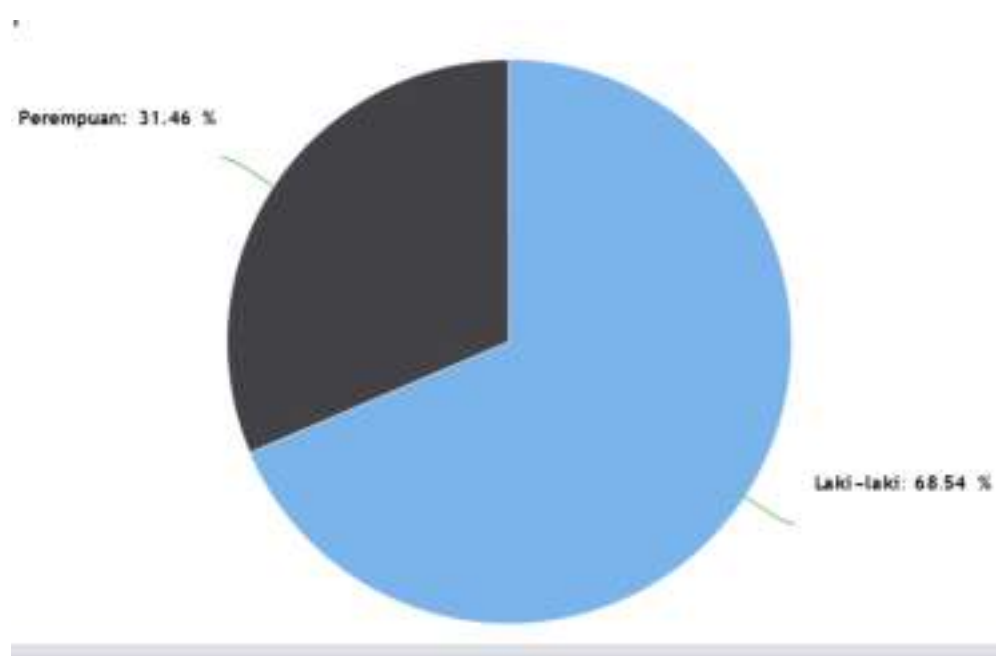


Grafik 2. Berdasarkan Golongan Pendidikan

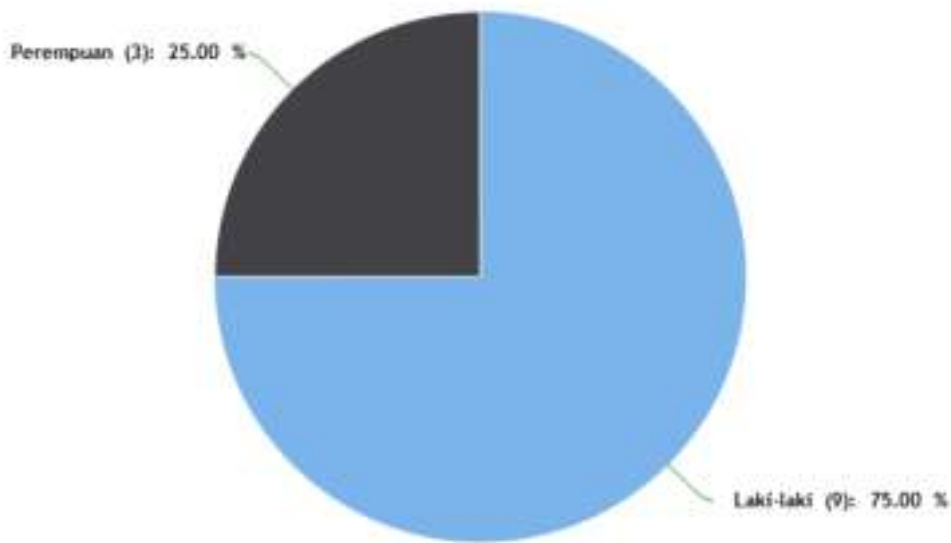


(Sumber: BKD Kaltim)

Grafik 3. Berdasarkan Gender



Grafik 4. Berdasarkan Golongan IV



(Sumber: BKD Kaltim)

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Kerja adalah merupakan unsur yang mendukung SDM dalam proses pembangunan, roda pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	TANAH	4400	M2
2	GEDUNG*	1	UNIT
3	LISTRIK	2	JARINGAN
4	AIR	2	JARINGAN
5	TELEPON	3	LINE (1 FAX)
6	INTERNET	3	JARINGAN
7	AREA PARKIR	3	AREA
8	AULA	1	RUANG
9	RUANG RAPAT	2	RUANG
10	RUANG ARSIP	1	RUANG
11	KOPERASI	1	UNIT
12	KANTIN	1	UNIT
13	TAMAN LUAR	1	AREA
14	LOBBY	1	AREA
15	FRONT OFFICE	1	UNIT
16	INFORMASI PUBLIK	1	RUANG
17	MUSHOLLA	1	RUANG
18	TOILET WANITA	4	RUANG
19	TOILET PRIA	4	RUANG
20	RODA 2 OPERASIONAL	10	UNIT
21	RODA 4 OPERASIONAL	12	UNIT
22	KOMPUTER	88	UNIT
23	MEJA	140	UNIT
24	KURSI ESSELON	25	UNIT
25	KURSI HADAP	50	UNIT
26	SOFA TAMU	5	SET
27	MESIN ABSEN	3	UNIT

2.2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.

3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional sampai sampai saat ini belum ada pedoman Penetapan Angka Kredit (PAK).
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga tahun periode tahun 2019-2023 diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan kepramukaan di berbagai bidang pembangunan sejumlah 15.200 orang yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan antar Negara, Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS, Peningkatan IMTAQ Kepemudaan, Jambore Pemuda Daerah, Peningkatan Kecakapan Hidup Pemuda, Pengikatan Kapasitas Organisasi Pemuda, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Penyelenggaraan Kepramukaan.
2. Meningkatnya wawasan pemuda kader kewirausahaan yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan sejumlah 2000 orang.
3. Prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional dan internasional antara lain peringkat 6 besar PON XX di Papua, Peringkat 3 (tiga) POPWIL di Kalimantan Timur dan selaku tuan rumah pelaksana, PEPARNAS 2021 di Papua dengan memperoleh peringkat ke 15 (lima belas) serta mengikuti pelaksanaan FORNAS tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan.
4. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di bidang keolahragaan khususnya pada persiapan menghadapi PON 2021 di Papua dengan melakukan kerjasama dengan SKOI Kaltim dan KONI Kaltim selaku mitra Dispora Kaltim dalam peningkatan prestasi olahraga. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya atlet muda potensial yang ikut berlaga pada ajang 4 (empat) tahunan tersebut.
5. Meningkatnya apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga modern dengan penyelenggaraan kompetisi olahraga tradisional yaitu : hadang, terompah, galah, gasing, sumpit dan lain – lain. Dengan menggandeng mitra KORMI Kaltim guna memasyarakatkan olahraga massal untuk menyehatkan masyarakat Kalimantan Timur.

Tabel. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Periode Renstra 2021-2023
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	95	95	95	88,83	89	-	93,51	93,68	-
2	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	0,65	0,85	1,09	0,13	0,88	-	20,00	104	-
3	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	-	-	66,6	70	80	20,59	71,74	-	30,92	102	-
4	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	6,15	7	8	6,15	10	-	100	143	-

Tabel. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispora Periode Renstra 2021-2023
Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN (DPPA) PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -			RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	AGRN	REAL
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.364.038.232	32.919.430.203	40.201.368.385	18.976.666.757	29.652.253.262	-	84,85	90,08	-	0,35	0,56
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.296.260.000	9.484.029.000	20.360.000.000	1.792.358.399	8.942.326.376	-	78,06	94,29	-	2,14	3,99
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	110.683.770.000	122.166.524.305	123.241.127.900	110.343.037.714	120.431.597.843	-	99,69	98,58	-	0,06	0,09
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000	3.500.000.000	5.050.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000	-	100,00	100	-	0,89	1,33
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	11.509.463.000	26.021.849.631	48.183.043.360	9.481.990.466	24.151.628.702	-	82,38	92,81	-	1,06	1,55
JUMLAH		148.353.531.232	194.091.833.144	237.035.539.647	142.094.053.336	186.677.806.189	-	89,00	95,15	-	0,90	1,50

Melihat tabel di atas gambaran alokasi anggaran mengalami pertambahan setiap tahunnya di periode Renstra sebelumnya, diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur dan belanja langsung rutin atau operasional kantor, hal ini sejalan dengan kebijakan devisit anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melemahnya kemampuan keuangan daerah pada periode tersebut mengakibatkan penyesuaian target indikator kinerja perangkat daerah, dengan demikian rasio anggaran maupun rasio realisasi sebagian besar menunjukkan kinerja yang menurun atau kurang baik begitun pula dengan rata-rata pertumbuhan baik disisi anggaran maupun disisi realisasi menunjukkan hasil yang kurang baik.

Realisasi dan target yang tergambar dalam matrik merupakan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada suatu analisis yang mencermati peluang, dan tantangan secara bersama-sama, mengenai hal-hal pokok yang ada dilingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan meliputi faktor peluang dan tantangan, sebagai berikut :

A. Peluang

- 1) Pemuda sebagai harapan bangsa
- 2) Peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan
- 3) Tumbuhnya kewirausahaan pemuda
- 4) Adanya peran serta unsur-unsur terkait dan masyarakat
- 5) Adanya kesadaran masyarakat berolahraga
- 6) Adanya pengembangan olahraga
- 7) Adanya kompetensi dalam olahraga
- 8) Adanya persaingan prestasi keolahragaan
- 9) Olahraga menjadi sebuah industri
- 10) Banyaknya kegiatan olahraga

B. Tantangan

- 1) Kurangnya dukungan dana pemerintah.
- 2) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi.
- 3) Belum banyaknya wadah pengembangan pemuda.
- 4) Belum maksimalnya instansi yang menaungi kepemudaan.
- 5) Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari manfaat berolahraga.
- 6) Belum memasyarakatnya sekolah olahraga.
- 7) Kurangnya dukungan pihak ketiga.
- 8) Kurangnya biaya perawatan gedung dan fasilitas.
- 9) Adanya persaingan pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi.
- 10) Banyaknya sarana olahraga yang dikelola pihak swasta

11) Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN)

Melalui analisis tersebut strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal untuk mendayagunakan untuk kepentingan masa depan, karena berdasarkan kepada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam merumuskan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan, namun dalam hal ini kita akan mengambil permasalahan yang paling serius atau yang paling perlu diperhatikan antara lain :

1. Permasalahan pada bidang kepemudaan yaitu adalah rendahnya minat pemuda di Kalimantan Timur dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi *leader* atau pelopor dalam bidang pembangunan dan rendahnya kemampuan penerapan Informasi Teknologi dalam berbagai bidang, sehingga pemuda kita kurang bersaing dengan pemuda dari luar Kalimantan Timur.
2. Saat ini bangsa Indonesia umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur sedang menghadapi perubahan dan pergeseran nilai – nilai hidup yang juga dihadapi oleh pemuda diantaranya sikap individualitas, budaya materialistis, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta terkikisnya dan terpuruknya nilai moral, sebagian pemuda sibuk mementingkan pribadinya, kurang peduli pada lingkungan dan berbagai masalah perkembangan pembangunan sekitarnya misalnya tidak sedikit kini pemuda dihadapkan pada berbagai persoalan, di antaranya kurang tersedianya SDM Pemuda yang trampil pada bidang tertentu, kurang berfungsi secara optimal Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Penyandang Disabilitas, semakin mengentalnya jiwa individualisme yang mengabaikan kepentingan masyarakat, materialistik, dan juga pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal cinta tanah air Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa **Peran pemuda belum terlibat secara nyata dalam membangun kemandirian daerah.**

Pembangunan Kepemudaan di Kalimantan Timur perlu dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui 1). **Penyadaran.** Penyadaran kepemudaan berupa gerakan

pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko (Pasal 22). 2). **Pemberdayaan.** Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda (Pasal 24). Dan ke 3). **Pengembangan.** Pengembangan dibagi tiga yaitu Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa **Kepemimpinan**, **Kewirausahaan** dan **Kepeloporan** pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, dengan mengacu pada koridor pembangunan nasional kepemudaan.

3. Permasalahan pada bidang keolahragaan yaitu adalah pembinaan dan pengembangan olahraga baik prestasi maupun olahraga masyarakat belum optimal, sehingga para atlet kita masih pada level menengah belum mampu menembus level tertinggi baik secara nasional maupun internasional.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Bahwa untuk mencapai maksud dari slogan “[Membangun Kaltim Untuk Nusantara](#)” diperlukan wujud nyata dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung pencapaian pada tujuan pertama pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu : “[Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing](#)”. Pada tujuan ini dapat dijabarkan sebagai perwujudan kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka dibutuhkan berbagai upaya strategi guna mewujudkan pemerataan taraf pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh tujuan pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang

berhubungan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat desa dan daya saing angkatan kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Visi dalam Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah : “[Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong](#)”.

Adapun Renstra Dispora Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Renstra Kemenpora RI, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau dari upaya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dalam pengelolaan RTRW, Dispora Prov.Kaltim secara tidak langsung terkait dan atau berhubungan dalam hal pengelolaan RTRW secara keseluruhan, dimana lembaga Dispora Prov.Kaltim berfungsi sebagai faktor pendukung atau penunjang dalam pemenuhan sumber daya manusia di daerah yang kompeten dalam pengelolaan RTRW tersebut. Adapun dari implikasi langsung Rencana Tata Ruang Wilayah, lokasi dan letak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, belum

sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, karena bangunan yang ada sekarang merupakan Gedung Pusdiklat Olahraga yang memang diperuntukan untuk keperluan penelitian pengembangan olahraga yang menjadi satu dalam Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim I Samarinda. Gedung Pusdiklat yang sementara digunakan sebagai kantor telah mengalami perubahan baik dari segi fisik interior maupun eksterior guna memenuhi kebutuhan sebuah kantor pemerintahan yang refresentative dalam melayani masyarakat.

Penempatan ruang-ruang didalamnya tidak terintegritas dengan baik karena bentuk dasar bangunan yang tidak dapat dirubah atau dikembangkan lagi.

Selanjutnya, untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2013 Dispora Prov.Kaltim mendapat persetujuan dari kepala daerah untuk ditetapkan lokasi pembangunan kantor baru, karena terkendala pada faktor sosial masyarakat yang sangat rentan, maka rencana pembangunan kantor tangguhkan mengingat permasalahan banjir sekitar Stadion Madya Sempaja Samarinda, khususnya lokasi tangkapan air yang direncanakan akan dibangun perkantoran. Oleh karena itu Dinas PUPRPERA, sudah melakukan analisa dan ditetapkan bahwa pembangunan kantor akan dapat dikerjakan atau direncanakan kembali jika permasalahan banjir disekitar kawasan sudah dapat ditangani dengan baik.

3.5. Penentuan Isu-isu Startegis

Adapun isu – isu strategis yang dikedepankan adalah :

1. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat perekonomian masyarakat yang masih cenderung belum kembali normal pasca pandemi Covid-19, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
2. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
3. Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XX 2021 dan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada multi even *Asian Games* dan *Olimpiade* yang juga semakin menurun serat masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum professional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi.
4. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan dicanangkannya perencanaan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun agar pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dapat dilaksanakan lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Adapun Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan”

Penetapan tujuan ini diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 khususnya pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) yaitu **Mewujudkan SDM Berdaya Saing**

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam 1 (satu) periode dari tahun 2024 – 2026.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh perangkat daerah sebagai berikut : ***“Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda”***

Sasaran ini diharapkan dapat mendukung dalam pencapaian sasaran ke- 3 (dua) dari tujuan ke-1 (satu) dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

Tabel. 5.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1,12	1,14	1,16

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah **Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga**. Upaya yang dilakukan dalam strategi pelayanan kepemudaan secara konkrit memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan secara sistematis, sinergis dan berkelanjutan. Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

- a. Peningkatan dan penguatan literasi dikalangan generasi muda.
- b. Peningkatan wawasan pemuda dalam berwirausaha dengan mendukung produk lokal.
- c. Membuka ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kepemudaan.
- d. Peningkatan dan penguasaan IT dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- e. Peningkatan dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Arah kebijakan 1 : Peningkatan peran pemuda dalam berorganisasi dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk mengaktualisasikan diri.

Arah kebijakan 2 : Pengembangan wirausaha berbasis teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Arah kebijakan 3 : Pengembangan Literasi Digital di kalangan Pemuda.

Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dengan Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga SDP, IPTEK dan IMTAQ, Jambore pemuda, Kreativitas Pemuda; serta Pengembangan Kepemudaan meliputi Kepaskibrakaan, Kewirausahaan, kecakapan hidup dan kepramukaan, kegiatan pemuda difabel dengan penggunaan Informasi Teknologi.

Arah kebijakan 4 : Peningkatan kualitas pembinaan olahraga prestasi sampai pada tingkat terendah.

Arah kebijakan 5 : Mengajak masyarakat untuk menggemari olahraga.

Peningkatan aktivitas keolahragaan pada masyarakat melalui pemassalan olahraga melalui olahraga Masyarakat, Rekreasi dan Tradisional, dan pengembangan Sarpras keolahragaan sebagai sarana penunjang akan meningkatkan prestasi olahraga.

Tabel. 6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Slogan : Membangun Kaltim Untuk Nusantara			
Tujuan ke satu : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya daya saing generasi muda	Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan peran pemuda dalam berorganisasi dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk mengaktualisasikan diri.
			Pengembangan wirausaha berbasis teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman.
			Pengembangan Literasi Digital di kalangan Pemuda.
			Peningkatan kualitas pembinaan olahraga prestasi sampai pada tingkat terendah.
			Mengajak masyarakat untuk menggemari olahraga.
		Reformasi Birokrasi Pemerintah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Dengan IT
			Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
			Deregulasi Kebijakan
			Penyederhanaan Organisasi
			Perbaikan Tata Laksana
			Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, RPD 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024, maka program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami penyesuaian berdasarkan beberapa hal diatas adalah sebagai berikut :

Untuk pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun dapat kami sampaikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel. 7

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan				Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1,09%	1,12 %	239.907.867.000	1,14 %	254.611.874.000	1,16 %	239.509.298.000	1,16 %	239.509.298.000	Dispora	Kaltim
				Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	6,75%	7 %		7 %		8,77 %		8,77 %		Dispora	Kaltim
	Meningkatnya daya saing generasi muda			Persentase daya saing generasi muda	1,23%	1,24 %	155.258.867.000	1,26 %	199.923.874.000	1,28 %	182.531.298.000	1,28 %	182.531.298.000	Dispora	Kaltim
				Nilai SAKIP Dispora	62,01	63,25 Skor	84.649.000.000	64,51 Skor	54.688.000.000	65,54 Skor	56.978.000.000	65,54 Skor	56.978.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	89	90 Indeks	60.149.000.000	91 Indeks	29.688.000.000	92 Indeks	31.478.000.000	92 Indeks	31.478.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95%	95 %	635.000.000	95 %	635.000.000	95 %	635.000.000	95 %	635.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	400.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	60.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95%	95 %	16.451.000.000	95 %	16.471.000.000	95 %	17.021.000.000	95 %	17.021.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	88 Orang/Bulan	15.500.000.000	88 Orang/Bulan	15.500.000.000	88 Orang/Bulan	16.000.000.000	88 Orang/Bulan	16.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12 Dokumen	480.000.000	12 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	550.000.000	12 Dokumen	550.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12 Dokumen	40.500.000	12 Dokumen	40.500.000	12 Dokumen	40.500.000	12 Dokumen	40.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12 Dokumen	30.500.000	12 Dokumen	30.500.000	12 Dokumen	30.500.000	12 Dokumen	30.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95	95 %	150.000.000	95 %	160.000.000	95 %	170.000.000	95 %	170.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95	95 %	960.000.000	95 %	497.000.000	95 %	857.000.000	95 %	857.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	3 Paket	600.000.000	3 Paket	122.000.000	3 Paket	467.000.000	3 Paket	467.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	50 Orang	260.000.000	50 Orang	260.000.000	50 Orang	260.000.000	50 Orang	260.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88	88 Orang	40.000.000	88 Orang	45.000.000	88 Orang	50.000.000	88 Orang	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88	88 Orang	40.000.000	88 Orang	45.000.000	88 Orang	50.000.000	88 Orang	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	95 %	4.859.750.000	95 %	5.190.000.000	95 %	5.640.000.000	95 %	5.640.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4 Paket	1.500.000.000	5 Paket	1.750.000.000	6 Paket	2.000.000.000	6 Paket	2.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4 Paket	600.000.000	4 Paket	650.000.000	4 Paket	700.000.000	4 Paket	700.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	4 Paket	200.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	2 Paket	100.000.000	3 Paket	150.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	85 Laporan	1.700.000.000	95 Laporan	1.750.000.000	114 Laporan	1.800.000.000	114 Laporan	1.800.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1 Dokumen	159.750.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95	95 %	30.701.250.000	95 %	80.000.000	95 %	450.000.000	95 %	450.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	10	6 Unit	1.710.000.000	0 Unit	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	1 Unit	641.250.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4 Paket	200.000.000	0 Paket	-	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8	8 Unit	150.000.000	5 Unit	80.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	150.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	28.000.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	95 %	3.500.000.000	95 %	3.500.000.000	95 %	3.500.000.000	95 %	3.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	95 %	2.892.000.000	95 %	3.155.000.000	95 %	3.205.000.000	95 %	3.205.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	18 Unit	100.000.000	18 Unit	100.000.000	18 Unit	100.000.000	18 Unit	100.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100	100 Unit	512.000.000	100 Unit	800.000.000	100 Unit	850.000.000	100 Unit	850.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	1 Unit	50.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.109.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.109.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	4 Unit	800.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				155.258.867.000		199.923.874.000		182.531.298.000		182.531.298.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,10%	0,26 Persen	10.125.000.000	0,37 Persen	24.938.000.000	0,42 Persen	32.845.500.000	0,42 Persen	32.845.500.000	Dispora	Kaltim
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	8,12%	9,70 Persen	11.350.000.000	10,43 Persen	22.500.000.000	11,47 Persen	25.000.000.000	11,47 Persen	25.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01	Penyadaran.Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480	5480 Orang	19.475.000.000	6350 Orang	44.438.000.000	12920 Orang	52.845.500.000	12920 Orang	52.845.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.1	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	630	630 Orang	2.750.000.000	1500 Orang	8.550.000.000	2000 Orang	10.491.500.000	2000 Orang	10.491.500.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.2	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3500	3500 Orang	11.350.000.000	3500 Orang	22.500.000.000	5000 Orang	25.000.000.000	5000 Orang	25.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.3	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600	600 Orang	1.250.000.000	600 Orang	8.513.000.000	4920 Orang	9.854.000.000	4920 Orang	9.854.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.5	Perencanaan. Pengadaan. Pemanfaatan. Pemeliharaan. dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7	7 Unit	100.000.000	7 Unit	250.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.2.1.01.6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	20	20 Dokumen	750.000.000	20 Dokumen	2.000.000.000	30 Dokumen	3.000.000.000	30 Dokumen	3.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	4	4 Dokumen	2.275.000.000	4 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	1.000.000.000	10 Dokumen	1.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.01.9	Peningkatan Kepemimpinan. Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	750	750 Orang	1.000.000.000	750 Orang	2.125.000.000	1000 Orang	2.500.000.000	1000 Orang	2.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150	150 Orang	2.000.000.000	150 Orang	3.000.000.000	300 Orang	5.000.000.000	300 Orang	5.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.2.1.02.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	150	150 Orang	2.000.000.000	150 Orang	3.000.000.000	300 Orang	5.000.000.000	300 Orang	5.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping Medali	100 Keping Medali	124.590.297.400	135 Keping Medali	140.235.874.000	135 Keping Medali	111.435.798.000	135 Keping Medali	111.435.798.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24	24 Orang	4.500.000.000	24 Orang	9.500.000.000	24 Orang	12.500.000.000	24 Orang	12.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	2	2 Unit	3.000.000.000	3 Unit	7.500.000.000	4 Unit	10.000.000.000	4 Unit	10.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	10	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.3.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765	765 Orang	10.590.297.400	765 Orang	15.800.000.000	715 Orang	30.500.000.000	715 Orang	30.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	9	9 Dokumen	4.590.297.400	9 Dokumen	5.000.000.000	11 Dokumen	17.000.000.000	11 Dokumen	17.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1	1 Dokumen	3.000.000.000	2 Dokumen	5.000.000.000	3 Dokumen	10.000.000.000	3 Dokumen	10.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.02.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	765	765 Orang	3.000.000.000	765 Orang	5.800.000.000	715 Orang	3.500.000.000	715 Orang	3.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630	630 Orang	10.500.000.000	630 Orang	67.000.000.000	630 Orang	20.195.187.800	630 Orang	20.195.187.800	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.2	Pemusatan Latihan Daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2	2 Pelatda	3.000.000.000	1 Pelatda	2.500.000.000	1 Pelatda	2.223.175.800	1 Pelatda	2.223.175.800	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430	430 Orang	3.000.000.000	430 Orang	12.500.000.000	430 Orang	10.472.012.000	430 Orang	10.472.012.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200	200 Orang	3.000.000.000	200 Orang	50.000.000.000	200 Orang	5.000.000.000	200 Orang	5.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.03.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	2.000.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	1	1 Orang	99.000.000.000	3 Orang	47.935.874.000	3 Orang	48.240.610.200	3 Orang	48.240.610.200	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04.1	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	4	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	1.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	1 Dokumen	3.000.000.000	3 Dokumen	41.935.874.000	3 Dokumen	43.240.610.200	3 Dokumen	43.240.610.200	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	3	3 Dokumen	94.000.000.000	3 Dokumen	3.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.3.1.04.4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	2	2 Organisasi	1.000.000.000	2 Organisasi	2.000.000.000	2 Organisasi	2.000.000.000	2 Organisasi	2.000.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	1 Organisasi	9.193.569.600	1 Organisasi	12.250.000.000	1 Organisasi	13.250.000.000	1 Organisasi	13.250.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.4.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3500 Org	4000 Orang	9.193.569.600	4500 Orang	12.250.000.000	4750 Orang	13.250.000.000	4750 Org	13.250.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.4.1.01.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	40	40 Laporan	9.193.569.600	40 Laporan	12.250.000.000	50 Laporan	13.250.000.000	50 Laporan	13.250.000.000	Dispora	Kaltim
		UPTD PPO													
		2.19.1	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80%	82 %	24.500.000.000	84 %	25.000.000.000	86 %	25.500.000.000	86 %	25.500.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	95 %	2.304.206.400	95 %	2.340.472.500	95 %	1.611.437.000	95 %	1.611.437.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1 Paket	410.101.800	1 Paket	426.871.000	1 Paket	437.973.000	1 Paket	437.973.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.006.644.900	1 Paket	243.644.400	1 Paket	243.644.400	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1 Paket	104.736.900	1 Paket	108.278.700	1 Paket	111.314.500	1 Paket	111.314.500	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1 Paket	80.367.700	1 Paket	82.327.900	1 Paket	84.680.100	1 Paket	84.680.100	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	1 Paket	20.500.000	1 Paket	21.100.000	1 Paket	21.700.000	1 Paket	21.700.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12 Laporan	688.500.000	12 Laporan	695.250.000	14 Laporan	712.125.000	14 Laporan	712.125.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95	95 %	140.000.000	95 %	263.379.400	95 %	350.000.000	95 %	350.000.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1 Unit	140.000.000	1 Unit	263.379.400	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	Dispora	Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	95 %	9.347.162.300	95 %	9.406.119.200	95 %	9.316.019.200	95 %	9.316.019.200	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	3.824.498.200	12 Laporan	3.838.480.900	12 Laporan	3.838.480.900	12 Laporan	3.838.480.900	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1 Laporan	543.971.300	1 Laporan	549.105.500	1 Laporan	528.822.600	1 Laporan	528.822.600	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1 Laporan	4.978.692.800	1 Laporan	5.018.532.800	1 Laporan	4.948.715.700	1 Laporan	4.948.715.700	Dispora	Kaltim
		2.19.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	95 %	12.708.631.300	95 %	12.990.028.900	95 %	14.222.543.800	95 %	14.222.543.800	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1 Unit	105.969.200	1 Unit	108.036.900	1 Unit	110.104.500	1 Unit	110.104.500	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1 Unit	18.706.300	1 Unit	19.071.300	1 Unit	19.345.000	1 Unit	19.345.000	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	4 Unit	3.500.000.000	4 Unit	3.512.864.500	4 Unit	3.512.864.500	4 Unit	3.512.864.500	Dispora	Kaltim
		2.19.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4 Unit	9.083.955.800	4 Unit	9.350.056.200	4 Unit	10.580.229.800	4 Unit	10.580.229.800	Dispora	Kaltim

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemuda dan keolahragaan adalah penjabaran dari sasaran dan program pemuda dan keolahragaan yang telah ditetapkan dalam rancangan akhir rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Bidang Urusan Pemuda dan Keolahragaan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel. 8

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	1,09 %	1,12%	1,14%	1,16%	1,16%

Semangat dari Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga ini adalah agar didapatkan potret persoalan secara lebih jelas dan komprehensif dan secara tepat pula menempatkan peran dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peta persoalan kemandirian pemuda di Indonesia. *Positioning* yang jelas ditengah-tengah pelbagai persoalan pemuda akan amat membantu untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 merupakan program kerja dalam pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan pemuda dan membangun masyarakat olahraga, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, kemandirian, kepemimpinan yang berakhlak mulia serta berprestasi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Kebijakan dan program Renstra ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPD 2024-2026.

Dalam operasionalisasi pembangunan kemandirian pemuda terkait dengan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional bidang pemuda dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan

terkoordinasi antar *stake holder* dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah.

Seluruh unsur penyelenggara pembangunan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan baik dalam hubungannya dengan kerangka regulasi, maupun dalam kerangka anggaran, diharuskan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas serta keterpaduan dan sinkronisasi yang sinergi, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab, tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi dan keunggulan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemajuan kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur.

Samarinda, April 2023

Kepala,

H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19670817 199203 1 017

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan merupakan amanat Undang undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Semangat kerja perpustakaan sebagai sebuah lembaga pelayanan informasi dan pengetahuan masyarakat, mewajibkan sebuah relasi harmonis antara perpustakaan, pemerintah, masyarakat, dan unsur stakeholders lainnya. Hal itu tercantum pada Bab II UU No. 43/2007 tentang hak, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak yang tergabung dalam proses relasi tersebut. Paling tidak ada tiga pihak yang saling terkait dalam misi mengembangkan organisasi pelayanan publik perpustakaan tadi, yaitu masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat harus dikembangkan dan didayagunakan agar dapat mendorong tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat sebagai ciri masyarakat pembelajar serta dapat mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat di perpustakaan.

Kemudian Arsip sebagai Identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan melalui penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan baku sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip merupakan referensi utama bagi masyarakat ilmiah, sebagai sumber sejarah, sebagai bukti otentik dan sebagai sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen. Oleh karena itu bahan pustaka dan arsip harus menjadi pilar bagi masyarakat intelektual dalam mewujudkan kegemaran masyarakat dan tertib arsip.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 sangat berbeda dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan diberlakukannya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021, dimana didalam permendagri nomor 90 tahun 2019 banyak terjadi penyesuaian terhadap program dan kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan serta perubahan target target indikator yang sesuai dengan program dan kegiatan tersebut.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Timur sebagai leading sektor di Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar wajib membuat rencana strategis maupun rencana/program kerja pengembangan lembaga (organisasi perangkat daerah) secara proporsional dan implementatif yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 dan juga visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan bidang perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa dan menumbuhkan kembangkan minat serta kegemaran membaca melalui perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 yang berbunyi Pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Dalam bidang kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, serta mendinamiskan sistem kearsipan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Kearsipan dengan melakukan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan serta pengelolaan

arsip sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan untuk Penyelenggaraan kearsipan (Pasal 6); Pembinaan kearsipan (Pasal 7-8); Pengelolaan kearsipan (Pasal 9); Sistem Kearsipan Daerah (SKD); Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) (Pasal 14); Pembentukan Unit dan lembaga kearsipan (Pasal 16, 17, 22, 23); Pengembangan SDM Kearsipan (Pasal 29-30); Penyediaan Prasarana dan Sarana (Pasal 31-32); Perlindungan dan penyelamatan arsip baik di dalam maupun di luar negeri; Penyelamatan arsip dari Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan (Pasal 35); Sosialisasi Kearsipan (Pasal 36); Kerjasama (Pasal 37); Pendanaan (Pasal 38).

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2024-2026, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025, Selain itu, dokumen RENSTRA disusun dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
- E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- F. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- G. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- I. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

- M. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- N. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- O. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- P. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- R. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- S. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- T. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
- U. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangn Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- V. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- W. Keputusan Presiden 105/2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- X. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Y. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 Tahun 2002 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- Z. Keppres Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

- Å. Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa / Kelurahan;
- Ä. Keputusan Kepala LAN Republik Indonesia No.194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi Dan Sertifikasi Lembaga Diklat PNS
- Ö. Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- AA. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6/2005 tentang Pedoman Perlindungan Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
- BB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- CC. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepustakawanan;
- DD. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.78a Tahun 2011 tentang Penetapan Enam (6) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Untuk Dikembangkan Menjadi Centre Of Excellent Layanan Perpustakaan Dan Informasi Budaya Lokal;
- EE. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- II. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025
- JJ. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur;
- KK. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- LL. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- JJ. Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- KK. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- LL. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
- MM. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembenahan Arsip Konvensional/Tekstual arsip inaktif dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- NN. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Persuratan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- OO. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Peralatan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- PP. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- QQ. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang memiliki Nilai Guna Sekunder;
- RR. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- SS. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Statis dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- TT. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- UU. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- VV. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- WW. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- XX. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Asset Negara/Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- YY. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keasmanan dan Akses Arsip Dinamis di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- ZZ. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan arsip statis bagi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Peorangan di Provinsi Kalimantan Timur;
- ÅÅ. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur;
- ÄÄ. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Statis Meida Non Tekstual di Provinsi Kalimantan Timur;
- ÖÖ. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- AAA. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- BBB. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan Pejabat Fungsional Arsiparis PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- CCC. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografik dan Kearsitekturan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- DDD. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan Arsip Daerah untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024, pada masa transisi tersebut Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur tetap diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis dengan periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan mengacu kepada Permendagri 90 tahun 2019 Permendagri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah agar lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.
2. Menyempurnakan sasaran dan meningkatkan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.
3. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
6. Mengupayakan Rencana Strategis ini dijadikan acuan dalam penganggaran program/kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra Perubahan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perubahan Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- A. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- B. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- C. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- D. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- E. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

A. Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya adalah penggabungan dari dua lembaga yaitu Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok yang berbeda. Adapun tugas pokok dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan undang undang no 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 serta dituangkan ke dalam Perda No.9 Tahun 2016 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

B. Fungsi

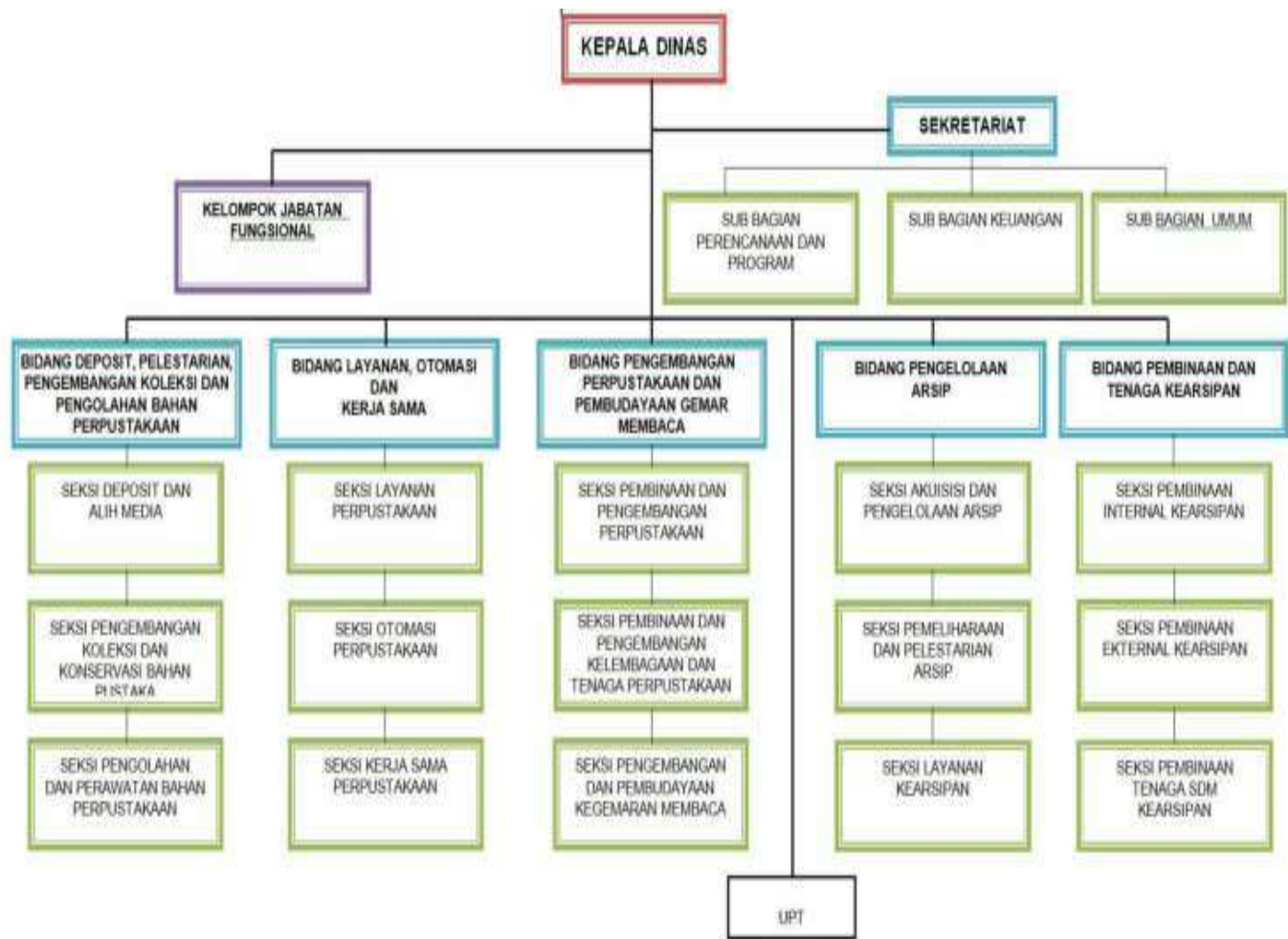
Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan kearsipan;
3. Perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan perpustakaan dan kearsipan;

- 4. Melaksanakan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- 5. Melaksanakan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, bahan rujukan berupa Indek, Bibliografi Subyek, Abstrak, dan Literatur Skunder lainnya;
- 6. Melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam daerah;
- 7. Melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan dengan institusi terkait;
- 8. Melaksanakan pembinaan kerjasama di bidang perpustakaan dan kearsipan, dokumentasi, dan informasi dengan badan atau instansi lain;
- 9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim



Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan, otomasi, dan kerjasama perpustakaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Rincian tugas Sekretaris adalah :

1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan pemeliharaan, hukum, dan kehumasan pengaduan masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris juga membawahi subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris. Adapun sub bagian tersebut adalah :

a. Sub Bagian Perencanaan Program

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

b. Sub Bagian Umum

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

c. Sub Bagian Keuangan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

3. Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis di bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Rincian tugas Kepala Bidang adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi, dan pengolahan bahan perpustakaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dibidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi, dan pengolahan bahan perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis deposit dan alih media;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengembangan koleksi dan konservasi bahan perpustakaan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan dan perawatan bahan perpustakaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala bidang juga membawahi seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Adapun seksi-seksi tersebut adalah:

- a. Seksi Deposit dan Alih Media.

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian deposit dan alih media.

- b. Seksi Pengembangan Koleksi dan Konservasi Bahan Perpustakaan.

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan koleksi dan konservasi bahan perpustakaan.

- c. Seksi Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan.

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengolahan dan perawatan bahan perpustakaan.

4. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang layanan, otomasi, dan kerjasama perpustakaan, Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Rincian tugas Kepala Bidang adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan otomasi, dan kerjasama perpustakaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang layanan otomasi, dan kerjasama perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan perpustakaan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis otomasi perpustakaan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perpustakaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan budang tugas dan fungsinya.

Kepala bidang juga membawahi seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Adapun seksi-seksi tersebut adalah :

a. Seksi Layanan Perpustakaan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penetapan layanan perpustakaan

b. Seksi Otomasi Perpustakaan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian otomasi perpustakaan

c. Seksi Kerjasama Perpustakaan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerjasama perpustakaan.

5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Rincian tugas Kepala Bidang adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan perpustakaan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan tenaga perpustakaan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan pembudayaan kegemaran membaca; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan budang tugas dan fungsinya.

Kepala bidang juga membawahi seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Adapun seksi-seksi tersebut adalah:

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Bertugas melakukan penguympulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan perpustakaan

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan tenaga perpustakaan

c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

6. Bidang Pengelolaan Arsip;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengelolaan arsip. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Rincian tugas Kepala Bidang adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan arsip;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dibidang pengelolaan arsip.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuisisi dan pengelolaan arsip;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemeliharaan dan pelestarian arsip;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis layanan kearsipan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan budang tugas dan fungsinya.

Kepala bidang juga membawahi seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Adapun seksi-seksi tersebut adalah:

a. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian akuisisi dan pengelolaan arsip.

b. Seksi Pemeliharaan dan Pestaarian Arsip

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pemeliharaan dan pelestarian arsip.

c. Seksi Layanan Kearsipan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan kearsipan.

7. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan tekbnis di bidang kearsipan dan tenaga kearsipan. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Rincian tugas Kepala Bidang adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dibidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis internal kearsipan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis eksternal kearsipan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga sumber daya manusia kearsipan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan budang tugas dan fungsinya.

Kepala bidang juga membawahi seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. Adapun seksi-seksi tersebut adalah:

a. Seksi Pembinaan Internal Kearsipan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian internal kearsipan.

b. Seksi Pembinaan Eksternal Kearsipan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian eksternal kearsipan.

c. Seksi Pembinaan Tenaga SDM Kearsipan

Bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tenaga SDM kearsipan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingklat keterampilan dan keahliannya, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Adapun tenaga fungsional tertentu yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a. Fungsional Pustakawan.
- b. Fungsional Arsiparis.
- c. Fungsional Pranata Komputer.

2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

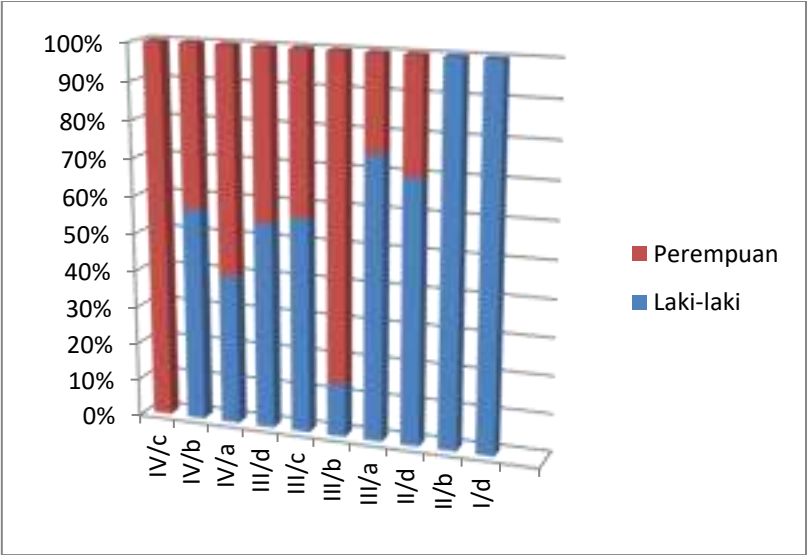
A. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tercatat 90 orang. Perincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan
(Per Desember 2022)

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan				
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Struktural	5	1	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Fungsional	20	27	12	34	1	-	10	25	9	3	-	-
Pelaksana	17	5	-	8	13	1	1	3	-	16	2	-
Jml PNS	42	33	18	42	14	1	17	28	9	19	2	-
Jml Honor/PTT	28	12	-	-	-	-	-	20	5	15	-	-
Jml PNS + Honor PTT	70	45	-	-	-	-	17	48	14	34	2	-
Jumlah	115		75					115				

Gambar 2
Grafik Persentase PNS Berdasarkan Kualifikasi Golongan



Tabel 2.2
Jumlah Pejabat Struktural
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim
(Per Desember 2022)

JABATAN	Pangkat/Gol	GENDER		TOTAL
		LAKI	PEREMPUAN	
ESELLON II	IV/b	1		1
ESELLON III	IV/b	3	1	4
ESELLON IV	IV/a	1		1
TOTAL		5	1	6

Tabel 2.3
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim
(Per Desember 2022)

Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Perencana			2
Perencana Ahli Muda	2	-	2
Pustakawan			26
Pustakawan Ahli Madya	1	3	4
Pustakawan Ahli Muda	5	9	14
Pustakawan Ahli Pertama	2	2	4
Pustakawan Penyelia	1	-	1
Pustakawan Mahir	1	1	2
Pustakawan Terampil	-	1	1
Arsiparis			16
Arsiparis Ahli Madya	1	1	2

Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Arsiparis Ahli Muda	2	4	6
Arsiparis Penyelia	2	3	5
Arsiparis Mahir	2	1	3
Pranata Komputer			3
Pranata Komputer Mahir	1	2	3
Total	20	27	47

Tabel 2.4
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim
(per bulan Desember 2022)

JABATAN	GENDER		TOTAL
	LAKI	PEREMPUAN	
Doktor (S3)	-	-	-
Magister (S2)	7	10	17
Sarjana (S1)	16	12	28
Diploma	3	6	9
SLTA	14	5	19
SLTP	2	-	2
SD	-	-	-
TOTAL	42	33	75

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim
(per bulan Desember 2022)

JABATAN	GENDER		TOTAL
	LAKI	PEREMPUAN	
Pejabat Struktural	5	1	6
Pejabat Fungsional	20	27	47
Pejabat Pelaksana	17	5	22
TOTAL	42	33	75

B. Fasilitas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga publik yang juga bergerak dalam jasa layanan perpustakaan dan kearsipan memiliki sarana dan prasarana dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dan bahan pustaka,sarana dan prasarana tersebut terbagi di dalam 2 gedung yang berbeda, Untuk gedung utama yang khusus melayani bidang perpustakaan terletak di jalan Ir.H.Juanda No.04 Samarinda atau lebih dikenal dengan sebutan Gedung Juanda dan Gedung utama yang

khusus melayani dibidang kearsipan terletak di Jl. Bung Tomo No.130, Sungai Keledang, Samarinda Seberang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Bung Tomo.

Gambar 3
Peta Lokasi Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Tabel 2.6
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim
(Per Tahun 2021)

Sarana dan Prasana	Gedung Juanda	Gedung Bung Tomo
Gedung	1 Gedung 3 lantai	1 Gedung Kantor 2 lantai dan 1 gedung Depo Arsip 4 Lantai
Baliho / Media Informasi	3 stand	
Running Text	1 unit	1 unit
Kotak Pengaduan	1 unit	
Kendaraan		
Mobil Keliling	4 unit	7 unit
Mobil Operasional	1 unit	2 unit
Mobil Jabatan	1 unit	1 unit
Mobil Dinas	3 unit	3 unit
Kendaraan Roda 2	16 Unit	11 unit
Website	1	1
Email	1	1
Callcenter		

1. Ruang layanan yang representatif terdiri dari :

- a. Ruang Layanan Koleksi Anak-Anak
- b. Ruang Layanan Koleksi Digital dan Layanan IT
- c. Koleksi CD/DVD
- d. Layanan akses internet
- e. Layanan database on-line
- f. Layanan koleksi umum
- g. Layanan koleksi rujukan (referensi)
- h. Layanan koleksi deposit Kaltim
- i. Layanan terbitan berkala (majalah, surat kabar, jurnal dll)
- j. Audio visual untuk pemutaran film, CD dan DVD
- k. Diskusi/seminar/ pertemuan
- l. Corner iKaltim

2. Sarana Penelusuran Informasi terdiri dari :

- a. Katalog on-line (OPAC = On-Line Public Access Catalogue)
- b. Bibliografi Nasional dan Daerah
- c. Katalog Induk Nasional dan Daerah
- d. Abstrak (sari karangan)

3. Fasilitas Lainnya

- a. Computer client dan hotspot: untuk akses internet dan akses koleksi CD/DVD
- b. Armada Mobil Perpustakaan Keliling
- c. Foto Copy: Melalui fasilitas ini koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim dapat dicopy sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan yang berlaku pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim.
- d. Klinik Pustakawan: Fasilitas ini merupakan sarana komunikasi dan informasi kepustakawanan
- e. Ruang display buku baru
- f. Mushola, kantin, toko koperasi, dan toilet
- g. Pojok CSR (sarana bantuan dari beberapa pihak ketiga)

C. Pendayagunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari produk jasa layanan.

Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Layanan Sirkulasi

Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.

2. Layanan Referensi

Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.

3. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital on-line melalui aplikasi iKaltim, layanan koleksi digital off-line melalui aplikasi smrt tube dan koleksi edutainment dalam format VCD/DVD.

4. Layanan Wisata Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukasi.

5. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent

6. Layanan Informasi Koleksi Terbaru

Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Badan Perpustakaan Prov. Kaltim.

7. Bimbingan Pemakai

Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.

8. Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA)

9. Pembuatan Sistem Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

10. Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif

11. Pembuatan SOP Kearsipan

Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

12. Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

13. Pembenahan/Penataan Arsip/Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembenahan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

14. Penyimpanan Arsip/Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks, dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24 jam untuk

Magnetic Tape, Catridge, CD-Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital

15. Perawatan Arsip/Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip/dokumen tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip/dokumen serta pengujian arsip konvensional

16. Reproduksi Arsip/Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

17. Alih Media Arsip/Dokumen

layanann alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

18. Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

19. Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Kalimantan Timur dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan infomasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip.

Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi.

20. Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti: Boks arsip, rak arsip, folder, guide, microfiche dll.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

A. Kinerja Pelayanan Urusan Perpustakaan

Mengacu pada terminologi yang dipergunakan dalam konteks Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan sebagai jenis perpustakaan umum.

Karakteristik yang melekat pada jenis perpustakaan umum termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah konten koleksi dan masyarakat yang mendayagunakan koleksi yang ada bersifat majemuk dan heterogen. Dengan kata lain orientasi layanan Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada semua segmen masyarakat sehingga orientasi koleksi bahan pustaka yang disediakan juga diarahkan pada semua cakupan subyek/disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh semua kelompok pengguna.

Berdasarkan statistik pendayagunaan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka pemustaka (pengguna) dapat dikategorikan sebagai berikut :

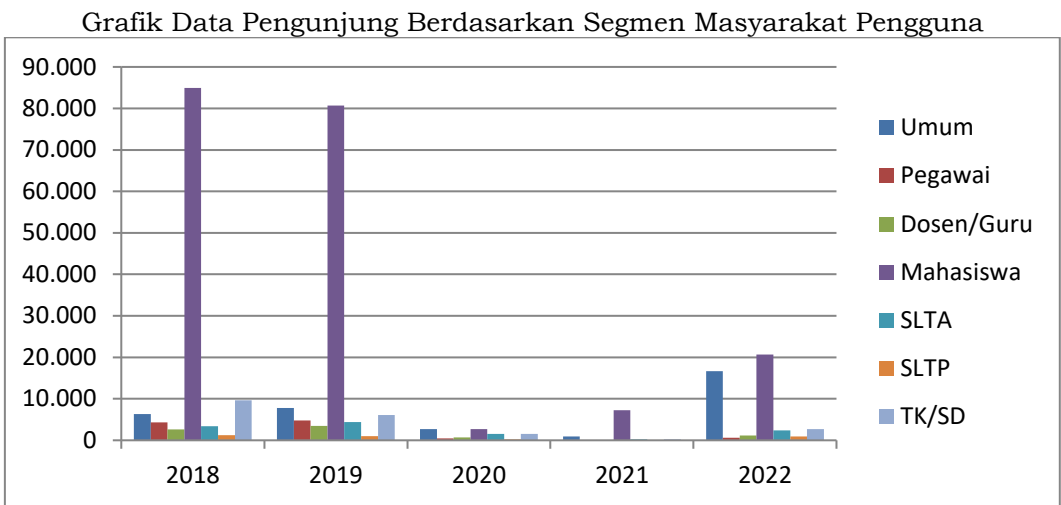
- 1. Anak-anak pra sekolah (Play Group dan TK)
- 2. Pelajar (Tingkat SD s/d SLTA)
- 3. Mahasiswa
- 4. Pegawai Negeri/Swasta
- 5. Umum (Ibu Rumah Tangga)
- 6. Guru dan Dosen

Adapun data pendayagunaan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Perovinsi Kalimantan Timur kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2014 - 2018) dideskripsikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.7
Data Pengunjung Berdasarkan Segmen Masyarakat Pengguna
Periode Tahun 2018 s/d 2022

No .	Segmen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umum	6.286	7.763	2.706	914	16.644
2	Pegawai	4.348	4.814	496	109	606
3	Dosen/Guru	2.622	3.462	687	100	1.128
4	Mahasiswa	84.900	80.722	26.671	7.227	20.664
5	SLTA	3.373	4.370	1.579	212	2.405
6	SLTP	1.232	1.012	211	60	932
7	TK/SD	9.679	6.130	1.552	194	2.703
	Jumlah	112.440	108.273	33.902	8.816	45.082

- Sumber Buku Tamu elektronik (tidak termasuk pengunjung perpustakaan keliling dan online



Gambar 5
Grafik Data Jumlah Pengunjung Onsite

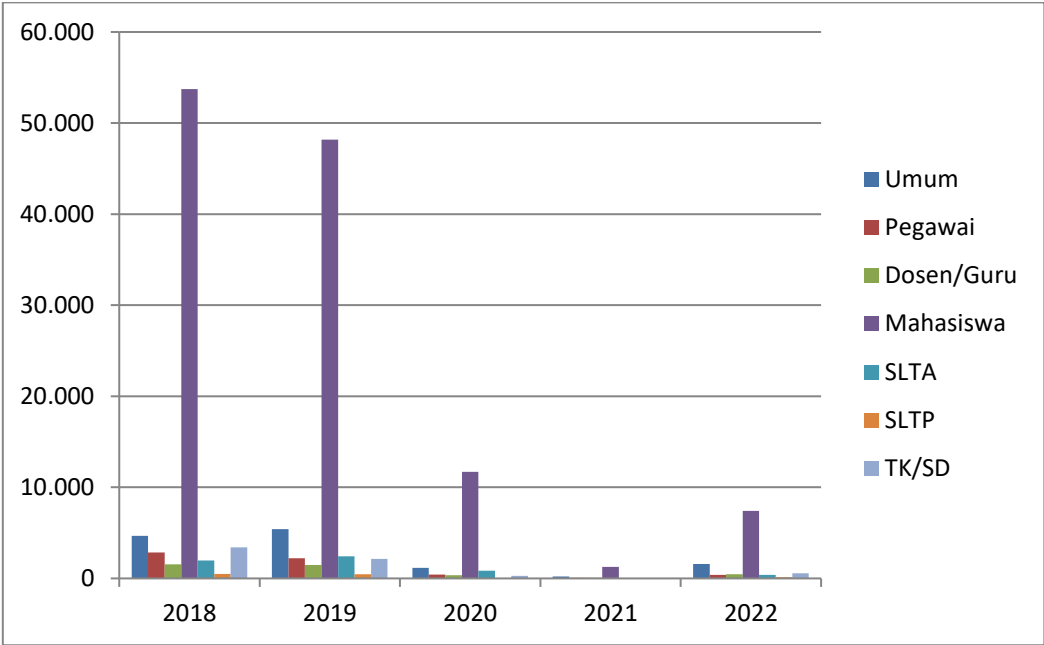


Tabel 2.8
Data Peminjam Berdasarkan Profesi
Periode Tahun 2018 s/d 2022

No .	Segmen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umum	4.675	5.402	1.167	222	1.591
2	Pegawai	2.848	2.230	429	69	397
3	Dosen/Guru	1.534	1.479	355	59	445
4	Mahasiswa	53.744	48.193	11.699	1.256	7.409
5	SLTA	1.979	2.414	846	21	392
6	SLTP	493	458	49	10	130
7	TK/SD	3.393	2.133	293	29	575
Jumlah		68.666	62.309	14.838	1.666	10.939

- Sumber Dbase Inlislite (tidak termasuk pengunjung perpustakaan keliling dan online)

Gambar 6
Data Peminjam Berdasarkan Profesi

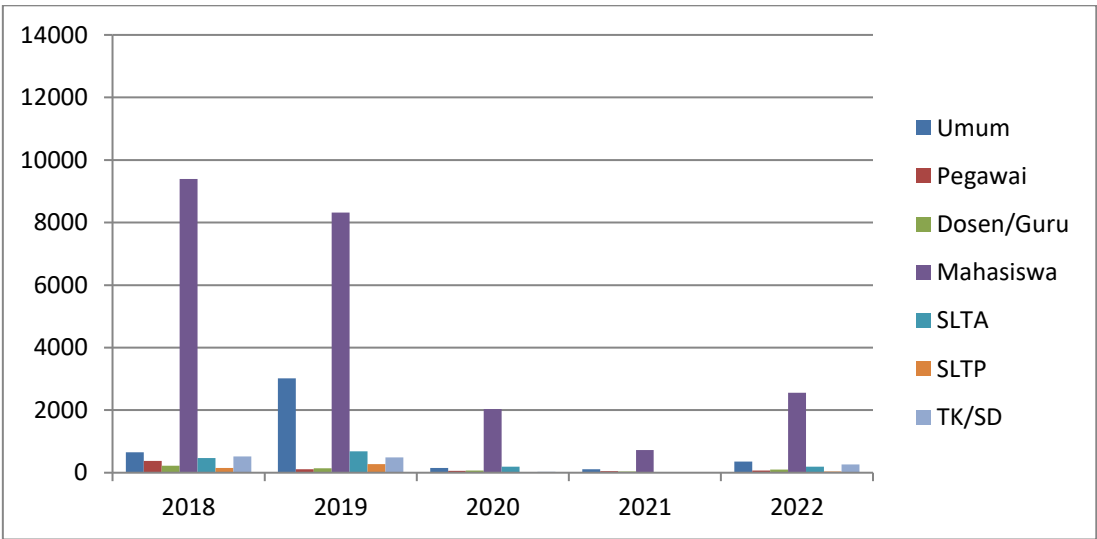


Tabel 2.9
Data jumlah anggota baru dan perpanjangan berdasarkan profesi
Tahun 2018 Sampai dengan 2022

No.	Segmen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umum	655	3.019	149	114	359
2	Pegawai	382	109	59	45	69
3	Dosen/Guru	226	140	69	38	99
4	Mahasiswa	9.393	8.315	2.032	729	2.559
5	SLTA	466	686	195	14	189
6	SLTP	155	274	11	10	37
7	TK/SD	522	493	33	19	262
Jumlah		11.799	13.036	2.548	969	3.574

Sumber Dbase Inlislite (tidak termasuk perpustakaan keliling dan Pengguna online)

Gambar 7
Data jumlah anggota baru dan perpanjangan berdasarkan profesi

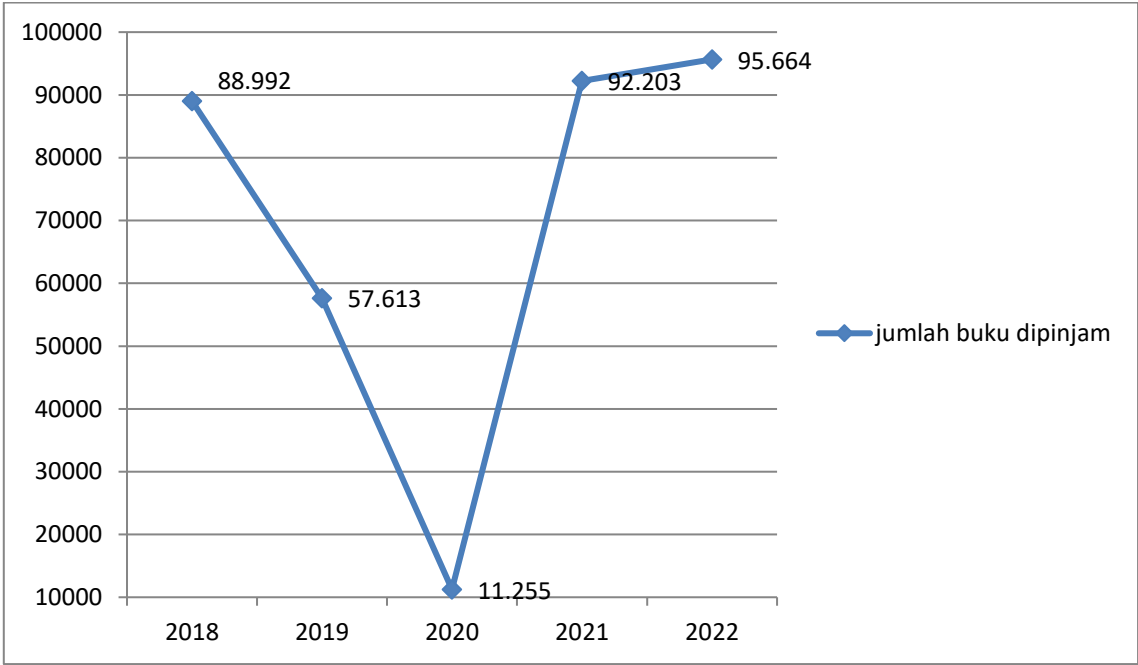


Tabel 2.10
Data Buku dipinjam berdasarkan Klasifikasi DDC
Periode Tahun 2018 s/d 2022

No.	Klasikasi Buku (Disiplin Ilmu)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Karya Umum (000)	2.761	1.793	470	3.459	3.764
2	Filsafat (100)	5.039	2.968	812	8.662	8.930
3	Agama (200)	16.591	8.531	2.169	17.624	18.116
4	Ilmu-ilmu Sosial (300)	28.693	17.821	2.549	18.303	19.442
5	Bahasa (400)	2.669	1.915	337	3.172	3.239
6	Ilmu-ilmu Murni (500)	6.780	4.396	955	5.279	5.366
7	Ilmu Terapan (600)	15.274	10.903	2.302	18.796	19.356
8	Kesenian dan Olah Raga (700)	1.106	613	185	2.530	2.650
9	Kesusastraan (800)	1.726	1.131	194	3.713	3.912
10	Geografi/Sejarah (900)	1.020	658	257	3.622	3.768
11	Fiksi	7.105	4.520	800	6.318	6.397
12	Bacaan kanan-kanak	228	2.364	225	725	724
Jumlah		88.992	57.613	11.255	92.203	95.664

Sumber Dbase Inlislite (tidak termasuk perpustakaan keliling dan Pengguna online)

Gambar 8
Grafik Jumlah Buku Yang Dipinjam



Dari data yang tersaji di atas menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan terhadap kunjungan *onsite* perpustakaan, namun hal tersebut disebabkan oleh karena adanya dinamika dalam penggaran pada pemerintah daerah yang berdampak pada recofussing anggaran sehingga layanan perpustakaan hanya dilakukan pada jam kerja, selain itu dampak dari pandemic yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

melalui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah menutup total aktifitas kunjungan pemustaka perpustakaan hingga tahun 2021, dan di alihkan kebutuhan informasi pemustaka ke layanan elektronik yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti aplikasi iKaltim, Pustaka Borneo, website perpustakaan maupun media media sosial lainnya.

B. Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan

Adapun jenis pelayanan dibidang kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Layanan Peminjaman Arsip dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip serta Layanan Jasa Kearsipan. Layanan arsip dan penerbitan naskah sumber arsip adalah bentuk pemberian layanan peminjaman fisik maupun informasi arsip bagi para pengguna arsip sedangkan layanan jasa kearsipan adalah bentuk layanan yang diberikan bersifat teknis seperti layanan jasa pembenahan arsip, layanan jasa penyimpanan arsip, layanan jasa alih media arsip dan layanan jasa lainnya dibidang kearsipan.

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan baik di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Untuk mensukseskan gerakan sadar arsip yang sudah dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan pembinaan kepada OPD Provinsi maupun LKD kabupaten/kota dalam hal kearsipan, adapun yang sudah dibina meliputi :

OPD Provinsi Kalimantan Timur :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2. DPRD Provinsi Kalimantan Timur
3. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Timur
6. Baltbangda Provinsi Kalimantan Timur
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
8. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
9. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
10. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
11. Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur
12. Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
13. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

LKD kabupaten/kota:

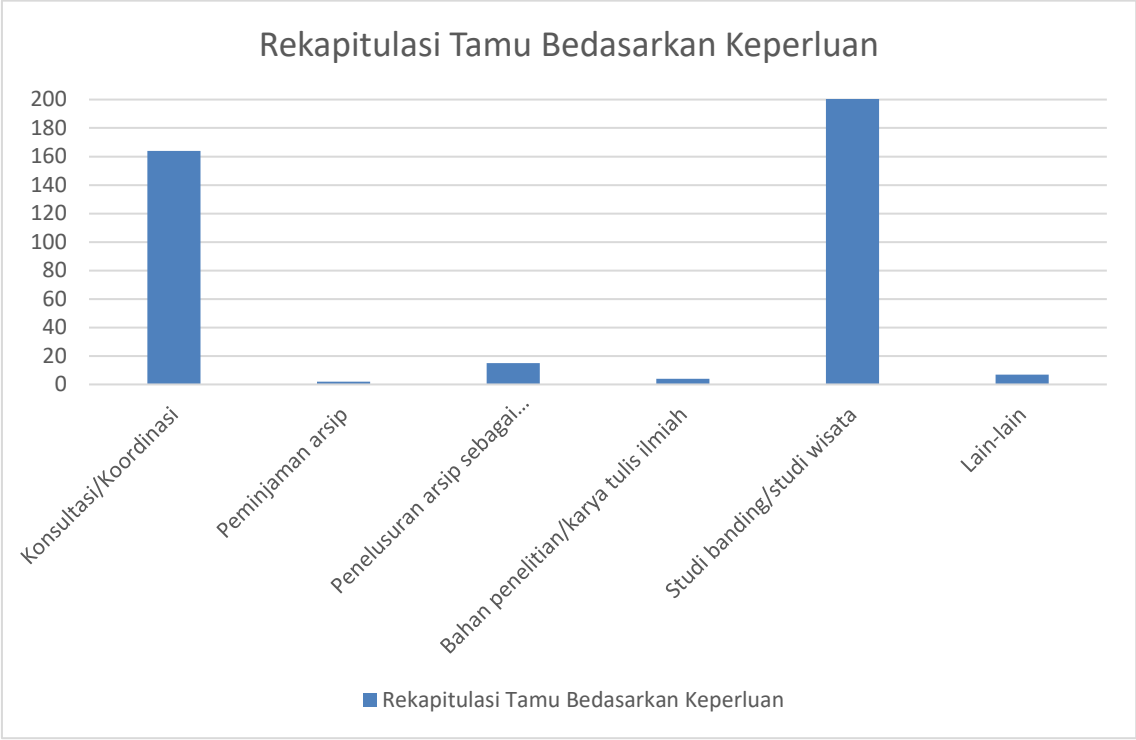
1. Dinas Kearsipan Kota Samarinda
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kutai Kartanegara
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kutai Timur
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Barat
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Balikpapan
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Berau
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Penajam Paser Utara
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Paser
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang

Tabel 2.11
Rekapitulasi Tamu Berdasarkan Keperluan
Tahun 2021

No.	Jenis Keperluan	Jumlah Pengunjung
1	Konsultasi/Koordinasi	164
2	Peminjaman arsip	2
3	Penelusuran arsip sebagai pembuktian	15
4	Bahan penelitian/karya tulis ilmiah	4
5	Studi banding/studi wisata	312
6	Lain-lain	7

* Sumber bidang layanan Kearsipan

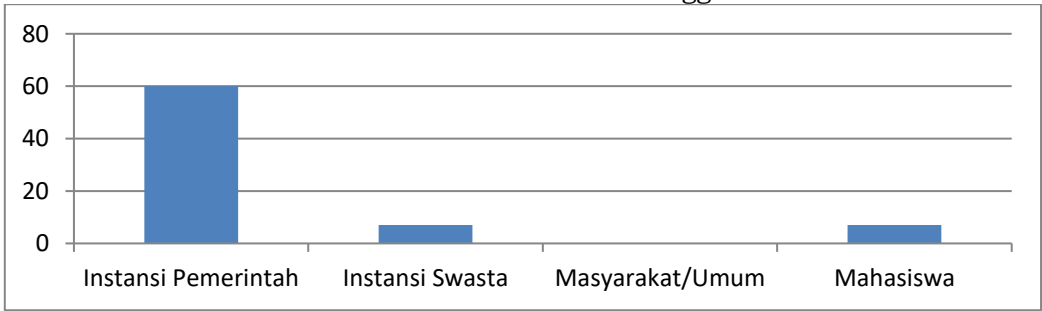
Gambar 9
Rekapitulasi Tamu Berdasarkan Keperluan



Tabel 2.12
Rekapitulasi Tamu Berdasarkan Pengguna
Tahun 2018

No.	Jenis Pengunjung/Pengguna Arsip	Jumlah
1	Instansi Pemerintah	60
2	Instansi Swasta	7
3	Masyarakat/Umum	0
4	Mahasiswa	7

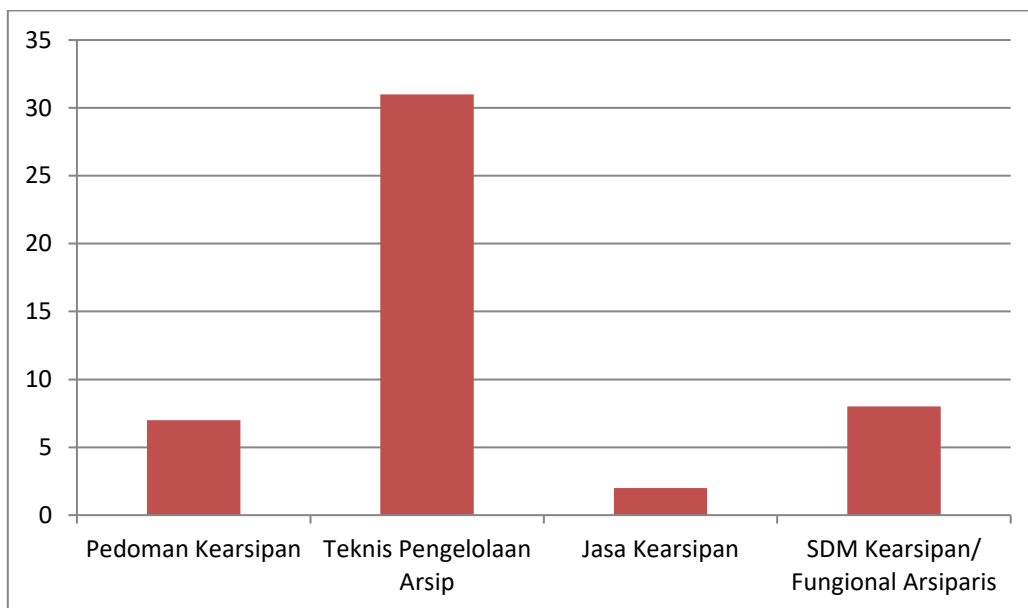
Gambar 10
Grafik Tamu Berdasarkan Pengguna



Tabel 2.13
Rekapitulasi Tamu Berdasarkan Jenis Konsultasi/Koordinasi
Tahun 2018

No.	Jenis Konsultasi/Koordinasi	Jumlah
1	Pedoman Kearsipan	7
2	Teknis Pengelolaan Arsip	31
3	Jasa Kearsipan	2
4	SDM Kearsipan/ Fungional Arsiparis	8

Gambar 11
Rekapitulasi Tamu Berdasarkan Jenis Konsultasi/Koordinasi



Pada sektor Akusisi Arsip dan Pengelolaan arsip Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan, bahwa lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diperoleh dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan.

Pengelolaan arsip statis oleh lembaga kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis yang bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip statis sebagai memori kolektif dan identitas bangsa yang disimpan pada lembaga kearsipan harus dipelihara dengan baik agar dapat bertahan lama atau lestari, sehingga senantiasa dapat digunakan oleh publik untuk berbagai kepentingan, seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta penyebaran informasi.

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Penyelenggara Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur yang salah satu fungsinya melaksanakan Pengelolaan Arsip baik di *Record Centre* / Unit Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di Depot Arsip Lembaga Kearsipan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penambahan khasanah arsip statis melalui Akusisi Arsip baik melalui kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip OPD yang dilikuidasi maupun melalui kegiatan Penyusutan Arsip. Seperti diketahui Akuisisi Arsip adalah proses penambahankhasanah Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah

Akuisisi arsip sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dengan cara menarik fisik arsip yang bernilai tinggi dari pencipta arsip atau dapat juga dengan cara memberikan penghargaan melalui imbalan dan/atau ganti rugi terhadap arsip yang diserahkan sepanjang arsip yang diserahkan benar-benar milik otoritas pribadi/perseorangan, kelompok, lembaga swasta serta masyarakat dan bukan arsip yang dikategorikan sebagai arsip negara. Dalam hal tertentu, jika dianggap urgen dan mengkhawatirkan terhadap keberadaan fisik arsip sehingga mengancam kelestarian arsip, akuisisi dapat dilakukan dengan cara menghimpun informasi-informasi penting dari pencipta arsip saat arsip-arsip diciptakan sejak awal kegiatan dilakukan. Adapun akuisisi arsip yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Data Arsip Hasil Akuisisi

OPD / Organisasi/ BUMD/BUMN	Jumlah Box	Jumlah (berkas)	Kategori Arsip	Tahun Akuisisi	Kegiatan	Keterangan
Biro Umum	28	1128	Statis	Akuisisi th 2014		
Arsip Foto	2	257	Statis	Akuisisi th 2014		
Sub Bag Umum Badan Arsip		51	Statis	Akuisisi th 2014		
Arsip Foto		34	Statis	Akuisisi ANRI th 2016		
Arsip Tekstual		7	Statis	Akuisisi ANRI th 2016		
Peta		6	Statis	Akuisisi ANRI th 2016		
Arsip Tekstual Biro Keuangan		33	Statis	Akuisisi th 2016		

OPD / Organisasi/ BUMD/BUMN	Jumlah Box	Jumlah (berkas)	Kategori Arsip	Tahun Akuisisi	Kegiatan	Keterangan
Kumpulan SK Gubernur		6	Statis	Akuisisi th 2016		
Biro Perbatasan	5	68	Statis	Akuisisi th 2017	Perlindungan & penyelamatan arsip	Likuidasi
BPK2DT	218	3484	Statis	Akuisisi th 2017	Perlindungan & penyelamatan arsip	Likuidasi
Dinas Perkebunan	22	714	Statis	Akuisisi th 2018	Penyusutan	
BPKAD (eks biro Keuangan)	13	136	Statis	Akuisisi th 2018	Penyusutan	
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26	878	Statis	Akuisisi th 2018	Penyusutan	
Biro Ekonomi	11	424	Statis	Akuisisi th 2018	Penyusutan	
Biro Pemerintahan	6	491	Statis	Akuisisi th 2018	Penyusutan	
Jumlah	301	7717				

Secara umum pengertian Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian Arsip Dinamis dan Arsip Statis. Adapun Pengelolaan Arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Pengelolaan arsip dinamis inaktif OPD dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan Pengelolaan Arsip Statis. Adapun jumlah arsip inaktif yang ditata kembali sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Data Arsip berdasarkan Kategori Arsip

OPD / Organisasi/ BUMD/BUMN	Jumlah Box	Jumlah (berkas)	Keterangan
ARSIP STATIS			
BP-7	1	50	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
KANWIL DEP. PERTANIAN	2	21	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DEPDIBUD	2	45	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DEPSOS	1	23	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
TUGUB UTARA	1	42	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
TUGUB SELATAN	2	88	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
KANWIL TRANSMIGRASI	2	110	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
BIRO BANGDA	11	112	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
BIRO PEMERINTAHAN	6	433	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DEP. PU	1	60	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
KANWIL DEP. PARIWISATA	2	119	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
BIRO UMUM	3	318	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014

OPD / Organisasi/ BUMD/BUMN	Jumlah Box	Jumlah (berkas)	Keterangan
SETDA	13	947	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
SALINAN KEP. GUB KALTIM TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH	22	2727	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	3	18	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
ITWIL	3	58	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DPRD	25	285	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
BAPPEDA	16	187	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
BALITBANGDA	1	41	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DISTAMBEN	8	197	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
DISNAKERTRANS	14	234	Hasil Verifikasi 2013 s/d 2014
ARSIP DINAMIS INAKTIF			
Biro Keuangan	3508	36442	
Departemen Pertanian	324	25087	
Tugub Utara	57	4107	
Kanwil Transmigrasi	23	2000	
Dep.Perindag	207	16195	
Kanwil Pariwisata	116	6810	
Dep. Sosial	8	710	
BKD	432	18859	

Sedangkan pada sektor Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Preservasi arsip statis (Pemeliharaan dan Pelestarian) dilakukan untuk menghadapi masalah yang serius karena kerusakan yang disebabkan oleh berbagai factor perusak. Sumber kerusakan arsip statis dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor perusak internal dapat disebabkan oleh penyusun bahan dasar arsip itu sendiri diantaranya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan bahan dasar arsip (misal lignin dan alum rosin), dan penggunaan tinta yang bersifat asam.

Faktor perusak eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan tempat arsip statis disimpan seperti suhu dan kelembaban yang tidak stabil, sinar ultraviolet, dan polusi udara; hama perusak arsip statis seperti jamur/kapang, serangga, dan binatang pengerat, serta factor manusia seperti ketidakpedulian ketika menangani arsip dan pencurian. Oleh karena itu dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan dari berbagai factor perusak arsip, baik yang bersumber dari faktor internal dan eksternal diperlukan suatu

tindakan preservasi arsip statis (preventif dan kuratif) yang sesuai dengan kaidah, standar preservasi arsip statis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak. Preservasi ditinjau dari tindakannya terdiri atas preservasi preventif dan preservasi kuratif.

Preservasi preventif (Pemeliharaan) adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip. Adapun jumlah arsip yang dilakukan pemeliharaan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Preservasi preventif
Data Arsip Yang telah difumigasi

No	Instansi	Jumlah	Fumigasi	Ket
1	Itwil	794 berkas	2017	Daftar arsip dlm tahapan penyusunan
2	BPKP2DT	3484 berkas	2017	
3	Daerah Istimewa Kutai		2018	
4	Kerajaan Belanda		2018	
5	Peta Pertambangan	9.8 meter linear	2018	
6	Foto		2018	
7	Arsip ORLA		2018	

Preservasi kuratif (Pelestarian) adalah preservasi yang bersifat perbaikan/perawatan terhadap arsip yang mulai/sudah rusak atau kondisinya memburuk, sehingga dapat memperpanjang usia arsip. Adapun jumlah arsip yang dilakukan pelestarian dengan cara melaminasi dengan menggunakan kertas conqueror dan tissue jepang sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Preservasi kuratif Perbaikan dan Perawatan Arsip

No	Series	Medio Tahun	Jumlah	Ket
1	Kerajaan Belanda	1940-1950	1544 lembar	laminasi
2	Pemerintah Daerah Istimewa Kutai	1950	333 lembar	laminasi

Secara keseluruhan pencapaian kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2017 adalah :

1. Mengembangkan aplikasi untuk membaca buku secara digital oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal dengan iKaltim dan telah diresmikan di luncurkan pertama kali oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 30 Juli 2016.
2. Pengembangan layanan digital lainnya berupa Katalog Induk Online Kaltim atau yang lebih di kenal Kaltimlib dan layanan Center of excellence atau layanan perpustakaan dan informasi budaya local Kalimantan yang bisa diakses masyarakat melalui akses internet
3. Pemanfaatan Gedung Depo Arsip dengan empat tingkat di gedung bung tomo.
4. Pembinaan perpustakaan kabupaten kota dengan pemberian stimulant berupa buku, rak buku, perangkat computer dan mobil perpustakaan keliling
5. pengadaan pengadaan bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan bahan pustaka terbaru.
6. Peningkatan jumlah anggota jaringan perpustakaan digital sebanyak 17 unit
7. Jumlah pengunjung perpustakaan yang terdeteksi oleh buku tamu elektronik sebanyak 147.436 orang pertahun
8. Tersedianya bahan pustaka sebanyak 71.304 judul / 196.616 eksemplar dan ebok iKaltim sebanyak 3.007 judul / 58.694 copy
9. Jumlah Anggota perpustakaan sebanyak 15.116 orang
10. Peningkatan jumlah pemeliharaan dan perawatan arsip
11. Peningkatan keterampilan tenaga fungsional pustakawan, arsiparis dan pranata komputer untuk mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan dan kearsipan sebanyak 47 orang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

A. Tantangan

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Dalam hasil pendataan BPS jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 3.8 juta jiwa, meningkat menjadi 0,84% dari tahun 2020. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2021 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (21,83%),

yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (19,26%) dan Kota Balikpapan (18,26%). Sisanya, 40,65% penduduk tersebar di tujuh kabupaten/kota lainnya. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2013 tidak banyak berubah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Paser	275.452	277.602	1,75	0,58
Kutai Barat	172.288	173.982	2,02	0,74
Kutai Kartanegara	729.382	733.626	1,48	0,44
Kutai Timur	434.459	449.161	5,27	2,53
Berau	248.035	252.648	3,20	1,39
Penajam Paser Utara	178.681	180.657	2,18	0,83
Mahakam Ulu	32.513	32.969	2,58	1,05
Balikpapan	688.318	695.287	2,06	0,76
Samarinda	827.994	831.460	1,26	0,31
Bontang	178.917	180.843	2,15	0,81
Kalimantan Timur	3.766.039	3.808.235	2,13	0,84

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022 Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Keseluruhan jumlah masyarakat Kalimantan Timur yang begitu besar merupakan pemustaka potensial (**potential user**) yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil (**actual user**) diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan potret peningkatan kualitas hidup. Peningkatan IPM menunjukkan keberhasilan dalam usaha pembangunan manusia. IPM Kalimantan Timur selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan IPM tahun 2015 adalah 73,82 dan di tahun 2016 naik menjadi 74,17. Usaha untuk meningkatkan IPM berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat. Jika masyarakat memiliki kegemaran membaca, mereka akan mendapat banyak informasi yang benaryang dapat mempengaruhi pola pikir dan kemampuannya sehingga program-program pemerintah apa pun yang

dilaksanakan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi akan berhasil. Keberhasilan tersebut akan tercermin dalam peningkatan IPM Kalimantan Timur.

B. Peluang

Perkembangan jumlah penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan pada tahun 2025 sebesar 3.879.508 jiwa. Berdasarkan standar pelayanan dan pengelolaan yang ada, maka perlu diantisipasi serta diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana/prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah staf pengelola, sesuai dengan rasio ideal yang ada. Agar proses pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik sesuai dengan standar ideal/normal yang berlaku Proyeksi angka IPM yang terus meningkat di Kalimantan Timur dari 73,82 pada tahun 2015 meningkat menjadi 74,17 pada tahun 2016. Angka tersebut termasuk dalam kelompok Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, sehingga dibutuhkan dukungan penyediaan sarana, prasarana serta fasilitas pendukung terkait yang memadai, sesuai dengan kualitas hidup manusia/penduduk Indonesia yang terus membaik untuk menuju kepada kondisi ideal dengan IPM diatas 90 selaras dengan IPM negara-negara maju. Jumlah orang yang melek huruf di Kalimantan Timur dan angka partisipasi sekolah dari data-data yang ada menunjukkan selaluterjadi peningkatan. Kondisi ini memerlukan suatu persiapan khusus terkait penyediaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung yang dibutuhkan, terutama dari sisi kualitas SDM. Peningkatan jumlah ketersediaan informasi baik berupa peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain, bahan terekam seperti CD/DVD maupun bahan yang tersedia secara dalam jaringan internet dapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan kepastakawanan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari Perangkat Daerah-Perangkat Daerah serta membuka/membina perpustakaan yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan.

Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap Perangkat Daerah. Dengan banyaknya perpustakaan yang dibuka, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustakabaik terbitan dalam maupun luar negeri untuk menambah koleksi. Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih banyak dan berkualitas.

Tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga diidentifikasi melalui analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yaitu;

1. Kekuatan

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Adanya kewenangan penyusunan Rencana dan Program Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
- c. Semakin meningkatnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

2. Kelemahan

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- b. Belum optimalnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan lembaga kearsipan.
- c. Belum optimalnya peran dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab/kota.
- d. Terbatasnya Kompetensi SDM di Bidang Kearsipan
- e. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum lengkap

3. Peluang

- a. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah perpustakaan dan unit pengelola kearsipan di Kalimantan Timur yang membutuhkan pengembangan dan pembinaan
- b. Perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi
- c. Berkembangnya IT untuk akses perpustakaan dan kearsipan
- d. Banyaknya koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan.

4. Ancaman

- a. Berkembangnya kompetitor yang bergerak dibidang penyediaan bahan pustaka dan kearsipan

- b. Gerakan minat baca dan masyarakat sadar arsip belum tumbuh secara baik
- c. Belum optimalnya kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang undangan perpustakaan dan kearsipan
- d. Luas wilayah sebaran pemustaka
- e. Perubahan regulasi yang menyangkut kelembagaan maupun penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- f. Tidak tegasnya sanksi hukum terhadap orang yang menghilangkan arsip.

C. Analisis Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut di atas.

Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat mempunyai peran dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan bahan pustaka terkait ilmu murni, ilmu terapan, sastra dan literatur lainnya. Seiring dengan adanya transformasi perpustakaan dalam rangka menyesuaikan diri dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka perpustakaan nantinya tidak hanya sekedar melayani melayani pinjam buku dan internet saja, melainkan aktif menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder lain. Adapun kegiatan yang bisa dilaksanakan di perpustakaan berupa pelatihan berbagai macam keterampilan ataupun sosialisasi/penyuluhan berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadikannya mandiri dan sejahtera.

Sedangkan pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah melalui penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan dapat dapat mendorong terwujudnya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih.

Dilihat dari tingkat pengukuran kinerja dari tahun sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim sangat fokus terhadap peningkatan minat baca dan sadar arsip Indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		82 Indek		82 Indek	83 Indek	84 Indek	-	-	-	-	-	-
2	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti		95%		95%	96%	97%	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		35 Indek		35 Indek	40 Indek	45 Indek	-	-	-	-	-	-
4	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)		46 Skor		46 Skor	47 Skor	48 Skor	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"		5 OPD/LK D		5 OPD/LKD	7 OPD/LKD	9 OPD/LKD	-	-	-	-	-	-
6	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional] Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		76 %		76 %	77 %	78 %	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2019 - 2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	27.201.573.000	39.796.096.636	27.685.777.000	-	-	24.450.112.471	38.238.165.093	-	-	-	89,88	96,09	-	-	
BRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	#####	38.408.346.036	25.955.777.000	-	-	23.629.738.948	36.923.586.430	0	-	-	89,84	96,13	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	24.047.773.000	24.724.192.785	23.364.835.515	-	-	21.612.342.642	23.423.905.670	0	-	-	89,87	94,74	-	-	
Berencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	231.796.242	387.555.000	250.000.000	-	-	231.752.511	387.044.650	0	-	-	99,98	99,87	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	83.573.501	128.764.000	934.961.620	-	-	83.565.202	128.607.187	-	-	-	99,99	99,88	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	57.010.500	223.391.000	197.149.500	-	-	56.999.767	223.116.463	-	-	-	99,98	99,88	-	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	91.212.241	35.400.000	257.798.400	-	-	91.187.542	35.321.000	-	-	-	99,97	99,78	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	18.943.972.108	17.303.188.903	17.421.004.000	-	-	17.040.421.371	16.229.839.717	0	-	-	89,95	93,80	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	18.522.968.108	16.693.174.903	15.880.661.652	-	-	16.698.187.980	15.643.276.571	-	-	-	90,15	93,71	-	-	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	307.604.000	557.214.000	452.880.000	-	-	228.865.000	533.875.269	-	-	-	74,40	95,81	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	61.200.000	22.200.000	61.449.600	-	-	61.187.494	22.136.906	-	-	-	99,98	99,72	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	52.200.000	30.600.000	79.449.600	-	-	52.180.897	30.550.971	-	-	-	99,96	99,84	-	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	60.600.000	26.400.000	60.600.000	-	-	60.565.503	26.116.600	0	-	-	99,94	98,93	-	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	60.600.000	26.400.000	60.849.600	-	-	60.565.503	26.116.600	-	-	-	99,94	98,93	-	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	133.239.850	22.200.000	133.239.850	-	-	122.209.011	21.955.200	0	-	-	91,72	98,90	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	84.378.000	-	91.020.000	-	-	73.565.000	-	-	-	-	87,19	-	-	-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	48.861.850	22.200.000	87.849.600	-	-	48.644.011	21.955.200	-	-	-	99,55	98,90	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.860.291.200	2.766.321.227	1.810.291.200	-	-	1.759.369.340	2.729.817.068	0	-	-	94,57	98,68	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	34.892.000	35.892.000	30.600.100	-	-	34.765.250	35.811.500	-	-	-	99,64	99,78	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	506.154.700	1.552.851.020	6.078.239.180	-	-	468.840.700	1.528.715.150	-	-	-	92,63	98,45	-	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	100.000.000	70.001.000	10.030.400	-	-	99.941.750	69.950.600	-	-	-	99,94	99,93	-	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	50.000.000	110.642.207	2.567.040.000	-	-	49.998.500	103.593.232	-	-	-	100,00	93,63	-	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	51.840.000	51.840.000	51.000.000	-	-	51.065.300	48.300.000	-	-	-	98,51	93,17	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1.117.404.500	945.095.000	1.057.928.760	-	-	1.054.757.840	943.446.586	-	-	-	94,39	99,83	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.226.409.600	2.420.584.065	2.498.090.115	-	-	1.826.155.858	2.260.686.979	0	-	-	82,02	93,39	-	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	27.740.000	27.740.000	14.690.000	-	-	25.070.250	27.604.500	-	-	-	90,38	99,51	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	716.077.475	638.571.425	700.346.400	-	-	387.931.659	527.783.099	-	-	-	54,17	82,65	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	1.482.592.125	1.754.272.640	10.907.682.542	-	-	1.413.153.949	1.705.299.380	-	-	-	95,32	97,21	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	591.464.000	1.797.943.590	1.191.610.350	-	-	571.869.048	1.768.445.456	0	-	-	96,69	98,36	-	-	
Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	164.624.000	275.503.900	199.512.300	-	-	146.224.318	250.435.346	-	-	-	88,82	90,90	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	319.590.000	1.379.159.690	945.663.800	-	-	318.401.000	1.374.791.610	-	-	-	99,63	99,68	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	107.250.000	143.280.000	67.479.600	-	-	107.243.730	143.218.500	-	-	-	99,99	99,96	-	-	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	2.253.800.000	13.684.153.251	2.590.941.485	-	-	2.017.396.306	13.499.680.760	0	-	-	89,51	98,65			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.707.701.000	3.382.019.061	2.340.941.485	-	-	1.501.374.567	3.297.990.055	0	-	-	87,92	97,52			
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	-	-	-	198.566.961	410.933.100	-	-	0	183.643.508	-	-	-	-	92,48			
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	257.744.000	1.531.625.000	1.683.000.000	-	-	256.709.599	1.481.750.134	-	-	-	99,60	96,74			
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	-	-	99.800.000	201.750.000	195.211.000	-	-	99.570.750	196.661.145	-	-	-	99,77	97,48			
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	-	-	29.850.000	-	-	-	-	28.219.552	-	-	-	-	94,54	-			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	62.107.000	808.900.000	145.000.000	-	-	61.847.936	801.829.223	-	-	-	99,58	99,13			
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	958.000.000	279.127.100	499.999.600	-	-	851.830.198	278.850.313	-	-	-	88,92	99,90			
Pengembangan Perpustakaan Deposit	-	-	126.600.000	16.000.000	116.000.208	-	-	126.571.032	15.165.000	-	-	-	99,98	94,78			
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	-	-	173.600.000	346.050.000	5.889.049.400	-	-	76.625.500	340.090.732	-	-	-	44,14	98,28			
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	-	-	546.099.000	10.302.134.190	250.000.000	-	-	516.021.739	10.201.690.705	0	-	-	94,49	99,03			
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	-	50.299.000	1.900.795.000	1.277.685.000	-	-	47.011.750	1.882.382.074	-	-	-	93,46	99,03			
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	-	-	495.800.000	8.401.339.190	144.000.000	-	-	469.009.989	8.319.308.631	-	-	-	94,60	99,02			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	900.000.000	1.387.750.600	1.730.000.000	-	-	820.373.523	1.314.578.663	0	-	-	91,15	94,73			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	859.891.300	1.319.983.600	1.480.000.000	-	-	780.389.523	1.247.221.722	0	-	-	90,75	94,49			
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	-	-	405.833.500	454.342.300	680.000.000	-	-	368.101.286	418.156.049	0	-	-	90,70	92,04			
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	-	-	405.833.500	454.342.300	685.999.400	-	-	368.101.286	418.156.049	-	-	-	90,70	92,04			
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-	228.691.300	185.578.000	300.000.000	-	-	203.961.458	184.841.005	0	-	-	89,19	99,60			
Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-	-	228.691.300	185.578.000	309.365.900	-	-	203.961.458	184.841.005	-	-	-	89,19	99,60			
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	-	-	225.366.500	680.063.300	500.000.000	-	-	208.326.779	644.224.668	0	-	-	92,44	94,73			
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	-	-	131.200.000	480.468.300	298.079.300	-	-	126.018.048	448.341.382	-	-	-	96,05	93,31			
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	-	-	94.166.500	199.595.000	194.000.000	-	-	82.308.731	195.883.286	-	-	-	87,41	98,14			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	40.108.700	67.767.000	250.000.000	-	-	39.984.000	67.356.941	0	-	-	99,69	99,39			
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	40.108.700	67.767.000	250.000.000	-	-	39.984.000	67.356.941	0	-	-	99,69	99,39			
Pendaftaran, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	-	-	40.108.700	67.767.000	242.521.500	-	-	39.984.000	67.356.941	-	-	-	99,69	99,39			

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis, dalam hubungannya dengan pengembangan bidang perpustakaan dan kearsipan, disesuaikan dengan wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan pendidikan dan pemukiman padat penduduk. Idealnya tiap-tiap wilayah di kecamatan diharapkan ada 1 (satu) perpustakaan umum yang dibangun dekat dengan pusat pemerintahan atau wilayah pendidikan atau pemukiman penduduk. Wilayah yang belum dibangun perpustakaan, secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling. Untuk itu diperlukan armada mobil perpustakaan keliling yang cukup. Kemudian untuk wilayah perkotaan, di beberapa sudut yang strategis dapat dibangun taman bacaan atau sudut baca agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

B. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Kalimantan Timur sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan atas kondisi real yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengembangan dan pembinaan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dengan memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Kalimantan Timur sebagai berikut

A. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan belum berjalan secara optimal

Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk memberdayakan semua jenis perpustakaan tidak dapat berjalan secara optimal karena terdapat faktor-faktor penghambat, seperti :

1. Jumlah perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebanyak 2.049 Perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan, namun yang sudah dilakukan akreditasi atau sudah sesuai pengelolaannya dengan Standar Nasional perpustakaan sebanyak 218 Perpustakaan atau sebesar 10,63%, hal ini masih dapat dikatakan jauh dari harapan bahwa perpustakaan masih banyak yang mengelola perpustakaannya belum sesuai SNP .
2. Perpustakaan Umum Kab/Kota sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan berbagai jenis perpustakaan di daerah belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

B. Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Terbatas

Substansi tugas yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur difokuskan pada lima aspek, yaitu;

1. Pengembangan Perpustakaan, Sumberdaya Manusia dan Pembudayaan Kegemaran Membaca,
2. Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, baik koleksi umum maupun koleksi yang memiliki kandungan isi mengenai kearifan lokal (heritage)
3. Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan,
4. Pengelolaan Arsip, dan
5. Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan.

Kelima aspek tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena masih terkendala oleh rendahnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan SDM di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyangkut hal-hal berikut:

1. Jumlah tenaga pembina perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan yang akan dibina. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki tenaga pembina sebanyak 26 orang (tenaga fungsional pustakawan termasuk penyetaraan struktural eselon IV ke Fungsional). Tenaga arsiparis sebanyak 16 (tenaga fungsional pustakawan termasuk penyetaraan struktural eselon IV ke Fungsional) orang dan fungsional pranata komputer sebanyak 3 orang, sedangkan jumlah perpustakaan yang perlu dibina sebanyak 2.049 unit
2. Kemampuan teknis SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim dalam hal perawatan dan pelestarian koleksi bahan perpustakaan masih sangat terbatas.
3. Rasio jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim dengan jumlah pemustaka yang berkunjung dan mendayagunakan jasa layanan perpustakaan sangat tidak seimbang. Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim yang bertugas pada sektor layanan berjumlah 23 orang termasuk pejabat fungsional pustakawan, sedangkan jumlah pemustaka yang berkunjung pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebanyak 220.856 orang.
4. Kemampuan staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim dalam bidang aplikasi teknologi informasi, khususnya dalam hal aplikasi layanan perpustakaan digital masih sangat terbatas

sehingga berdampak pada terbatasnya aplikasi teknologi informasi yang dimanfaatkan di perpustakaan.

C. Upaya Pengembangan Koleksi Deposit Belum Optimal

Salah satu fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prop. Kaltim adalah sebagai perpustakaan deposit yang bertugas untuk menghimpun, mengolah, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/swasta dan perorangan dalam wilayah Kalimantan Timur.

Tugas dan tanggungjawab tersebut secara tegas telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1990, PP No. 70/1991 dan PP No. 23/1999. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala, seperti :

1. Masih rendahnya kesadaran instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menyerahkan hasil karyanya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
2. Karya cetak, khususnya naskah kuno (manuskrip) yang dimiliki oleh perorangan di daerah Kabupaten/Kota sangat sulit dikumpulkan karena adanya anggapan bahwa naskah kuno atau manuskrip tersebut merupakan harta warisan dan bernilai *magic*.

D. Minat Baca dan Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan masih rendah

Minat baca dan apresiasi masyarakat di Kalimantan Timur terhadap perpustakaan dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya animo masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan umum Kab/Kota serta belum membudayanya aktivitas membaca di tengah-tengah masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan minat baca untuk semua elemen masyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan.

E. Layanan Kearsipan

1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana layanan kearsipan berbasis TIK
2. Beragamnya sasaran layanan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

3. Perlu adanya standarisasi layanan prima untuk kearsipan berbasis TIK
4. Perlunya disusun kajian kerjasama layanan jasa kearsipan (layanan system kearsipan. Layanan pembenahan arsip. Layanan penyimpanan, layanan pemeliharaan, dan layanan pengendalian arsip).
5. Perlunya disusun prosedur tetap Layanan Kearsipan.
6. Memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan khazanah arsip yang dikelola
7. Perlunya penyediaan jasa reproduksi arsip baik arsip kertas maupun non kertas.

F. Pembinaan Kearsipan

1. Penyelenggaraan Tata Kelola Kearsipan yang belum terpadu pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Besarnya pemenuhan kebutuhan Tenaga Fungsional Arsiparis dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
3. Belum terpenuhinya standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis dan para Pengelola Arsip Perangkat Daerah
4. Perlu regulasi yang lengkap tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dari mulai penciptaan arsip sampai dengan penyusutan arsip
5. Perlu adanya regulasi mengenai pengelolaan Arsip-arsip Aset Daerah
6. Kurangnya kualitas SDM dibidang pengembangan Sistem Kearsipan
7. Belum tersedianya Master Plan Pengembangan Sistem Kearsipan Provinsi
8. Perlu dibangunnya Sistem Monitoring berbasis TIK untuk pengendalian kearsipan

G. Akuisisi dan Pengelolaan Arsip

1. Kurang lengkapnya koleksi arsip yang bernilai sejarah dan khasanah budaya Kalimantan Timur
2. Perlu regulasi mengenai pengelolaan arsip vital dan dokumen penting serta pelestariannya
3. Belum terlaksanakannya akuisisi dan pengelolaan arsip-arsip yang menyangkut asset daerah

4. Perlu adanya standarisasi pengelolaan arsip yang terukur dan pelaksanaan Alih Media berbasis TIK yang handal untukantisipasi perubahan media arsip dan perlakuan terhadap arsip media baru.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pemnyimpanan arsip menurut jenis media arsipnya, peralatan, perawatan dan pemeliharaan arsip.

C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kegiatan Kepala Daerah

Tingkat kemajuan masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung pengetahuan budaya,pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya dilakukan melalui peningkatan ketersediaan informasi,sarana dan prasarana penunjang minat baca masyarakat. Seiring dengan hal tersebut maka harus dilakukan pengembangan kualitas dan kuantitas layanan, SDM keputakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata, serta mendayagunaan perpustakaan. Dalam rangka Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien,efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan perpustakaan dengan cara mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM dan Sarana prasarana kearsipan.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005–2025, maka visi dan misi Kalimantan Timur dalam RPJPD adalah:

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan “

Misi :

- 1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.**
- 2.Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;**

- 3. **Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;**
- 4. **Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan**
- 5. **Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.**

Berdasarkan pada visi dan misi dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan **misi ke 3 yaitu Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.**

Core business yang diemban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan layanan kepada masyarakat, maka di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), keterkaitan RENSTRA yang disusun dengan RPD Prov. Kalimantan Timur yaitu mendukung tujuan 4, yaitu **“Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”**. Dengan sasaran **“Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”**.

Tabel 3.1
Keterkaitan RENSTRA dan RPD Kaltim

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

Bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih nantinya akan menyesuaikan dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Telaahan RENSTRA K/L.

A. Telaahan RENSTRA Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten Kota.

Berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka Visi yang diemban adalah

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau dampak, tujuan yang akan dicapai yaitu:

“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024 ”,

Sedangkan sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator:

Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.

Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Dalam melaksanakan misi tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mensinergikan program kegiatan melalui pemberian bantuan/stimulan berupa sarana perpustakaan kepada pemerintah kabupaten/kota, desa/kelurahan, pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan supervisi, monitoring dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

B. Telaahan RENSTRA Arsip Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2020-2024 maka Visi ANRI adalah Mewujudkan Visi

“ Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang akan Dicapai Pada Tahun 2025”

Visi ini mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun meliputi sebagai berikut :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai perauran perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sasaran jangka menengah adalah:

1. “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan. Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
2. “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan. Ketiga indeks di atas, yaitu indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, indeks ketersediaan arsip, dan indeks pelayanan informasi kearsipan untuk selanjutnya menjadi indeks yang bersifat terpadu dalam pengukuran tingkat kematangan atau kinerja kearsipan K/L/D.
4. “Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi: <i>Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan</i>				
No	Misi dan Program RPJPD 2005-2025	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI 3. 3.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	- SDM fungsional kearsipan dan fungsional pustakawan masih sangat terbatas - Penyediaan bahan bacaan dan promosi perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat - Penyediaan informasi kearsipan belum maksimal. - Dukungan Pemerintah Daerah terhadap urusan perpustakaan dan urusan kearsipan masih kurang - Gedung perpustakaan yang sudah tidak memadai	- Masih kurangnya minat ASN tenaga fungsional bidang kearsipan dan fungsional pustakawan dan masih minimnya dukungka OPD dalam menyediakan formasi tersebut dalam instansi masing masing - Kondisi geografis, - Perhatian pemerintah akan keberadaan perpustakaan masih sangat kurang, - Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan - Terbatasnya anggaran - Minimnya dukungan OPD terhadap Pentingnya Arsip - Minimnya pengguna Informasi dalam memanfaatkan layanan kearsipan	- SDM fungsional Arsiparis dan Fungsional Pustakawan sangat dibutuhkan oleh SKPD / Lembaga/Organisasi - Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kab./Kota dalam memberikan perhatian kepada perpustakaan - Membuka kerjasama dengan OPD dalam hal pengelolaan arsip - Masyarakat pengguna informasi berhak Mendapatkan informasi kearsipan secara cepat dan akurat
	Program - Pembinaan Perpustakaan - Pengelolaan Arsip - Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip			

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Urusan Perpustakaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	Jumlah Koleksi yang kurang memadai,serta proses Pengadaan koleksi yang lama, serta kurangnya pengelolaan padaperpustakaan masyarakat	Anggaran kurang memadai,Layanan paket koleksi untuk masyarakat belum memadai.SDM pustakawan kurang.	a. Perpustakaan stasioner sudah ada di 10 (sepuluh)wilayah kota b. Perlunya Perpustakaan tingkat Kelurahan dan kecamatan untuk ikut berperan.
2	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Belum terintegrasinya aplikasi dalam satu sistem, perlunya interoperability atau satu gateway system dalam mewadahi semua perkembangan aplikasi	SDM IT belum memadai,budaya kerja IT belum sempurna	Sudah tersedianya perpustakaan digital (iKaltim)
3	Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan.	Jumlah titik layanan perpustakaan dan tenaga pustakawan dan teknis kurang memadai, Kecilnya alokasi anggaran untuk pengembangan Kompetensi Pegawai	Luasnya jangkauan layanan yang akan dilayani	a. Terciptanya CPTA dan program diklat tenaga teknis IT b. ISO untuk manajemen mutu layanan
4	Peningkatan kualitas SDM perpustakaan	Masih kurangnya SDM di bidang perpustakaan	Masih rendahnya minat ASN untuk masuk kedalam jabatan fungsional Pustakawan	Dilaksanakannya diklat diklat pustakawan dan diklat diklat tenaga perpustakaan, serta

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				penjaringan tenaga fungsional melalui Inpassing
5	Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia.	Perlunya reward dan punishment bagi penerbit yang berprestasi dalam mematuhi UU dan Perda KCKR, dan belum refresentatifnya sarana dan prasarana pelestarian koleksi	a. Belum semua Penerbit mematuhi regulasi KCKR b. Belum adanya kebijakan tentang Konsep Perpustakaan sbg local culture agen	a. TelahTerhimpunnya koleksi tentang Kalimantan b. Telah tersedia layanan khusus koleksi Kalimantan

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Kearsipan

No	Sasaran Jangka Menengah RenstraK/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	Jumlah anggaran yang kurang memadai,serta masih kurangnya tenaga arsiparis arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	Anggaran kurang memadai, SDM Arsiparis kurang.	Penjaringan tenaga Arsiparis melalui mekanisme Inpassing
2	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum terintegrasinya aplikasi dalam satu sistem, perlunya interoperability atau satu gateway system dalam mewadahi semua perkembangan aplikasi	SDM IT belum memadai,budaya kerja IT belum sempurna	Telah disediakannya aplikasi berbasis IT yang di sediakan oleh ANRI
3	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Tenaga IT untuk mengadopsi system yang telah dibuat masih kurang	Kurangnga tenaga IT untuk mengoperasikan sistem dimaksud	Telah dilaksanakannya diklat untuk pelaksanaan sistem tersebut untuk tingkat kearsipan provinsi
4	Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan	Kurangnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan kearsipa	Masih rendahnya kesadaran tentang tertib arsip	Dilaksanakannya Bimbingan dan konsultasi urusan kearsipan
5	Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia.	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menyerahkan arsip yang bersifat sejarah kepada pemerintah	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam usaha penyelamatan dokumen penting	Terbentuknya record center Terbangunnya Data Center
6	Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional dilingkungan lembaga aparatur Negara	Pembinaan terhadap unit kearsipan di Perangkat Daerah/UKPD belum optimal	Belum adanya arsiparis pada Perangkat Daerah/UKPD	Adanya keberlanjutan penyelenggaraan Pengembangan wawasan kearsipan, Diklat, dan Bimtek Kearsipan
7	Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern.	Belum lengkapnya regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelamatan arsip	Penyerahan Dokumen dalam usaha penyelamatan dokumen penting masih sedikit	Telah adanya Regulasi wajib serah arsip (pergub No.79/2005), Pengelolaan Arsipstatis (Pergub. No.91/2010). Pelaksanaan kegiatan akuisisi untuk menambah khazanah arsip statis

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing	Masih Rendahnya Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Minimnya jumlah perpustakaan sesuai SNP, jumlah SDM pengelola yang terbatas, serta kondisi koleksi yang masih belum memadai	Masyarakat berhak Menerima layanan/fasilitas dari pemerintah
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Kurangnya lembaga/ perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar baku	Masih belum optimalnya penganggaran untuk pengelolaan arsip pada Lembaga/ perangkat daerah serta pemenuhan SDM pengelola kearsipan yang masih belum terlaksana	Adanya perhatian pemerintah daerah melalui perda dan surat edaran yang dikeluarkan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat / stakeholder terkait	Pembenahan semua jenis pelayanan dan sarana prasarana

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.

Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan (tahun 2024-2026), Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak mempengaruhi kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis, dalam hubungannya dengan pengembangan bidang perpustakaan dan kearsipan, disesuaikan dengan wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan pendidikan dan pemukiman padat penduduk. Idealnya tiap-tiap wilayah di kecamatan diharapkan ada 1 (satu) perpustakaan umum yang dibangun dekat dengan pusat pemerintahan atau wilayah pendidikan atau pemukiman penduduk. Wilayah yang belum dibangun perpustakaan, secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling. Untuk itu diperlukan armada mobil perpustakaan keliling yang cukup. Kemudian untuk wilayah perkotaan, dibeberapa sudut yang strategis dapat dibangun taman bacaan atau sudut baca.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Sejalan dengan diterbitkannya undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dituangkan kedalam peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah serta diakomodir didalam perda Provinsi Kalimantan Timur no 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Timur,

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya adalah terdiri dari dua instansi yang terpisah yaitu Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Arsip Daerah Kalimantan Timur. Perlu dilakukannya pembenahan pembenahan organisasi pasca penggabungan dari dua instansi tersebut. Sejalan dengan Reformasi birokrasi yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis.

A. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan Nomor. PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Kaltim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya

Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran

serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan.

Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agarkinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

B. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu

dilakukan. E-Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gawai dewasa ini. E-Library memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan. Merujuk dari perkembangan teknologi tersebut maka lahirlah iKaltim, sebuah sarana membaca yang memudahkan para pemustaka untuk membaca di manapun dan kapan saja. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Demikian pula hal berbicara tentang kearsipan peraturan perundangan tentang kearsipan masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap Perangkat Daerah. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap Perangkat Daerah, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih, seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakuisisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap Perangkat Daerah bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedangkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja

hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD.Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga pemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.

Jika setiap Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai. Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilai guna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

C. Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno (Manuskrip)

Berdasarkan hasil survei/riset UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Sementara itu, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hanya setingkat di atas Botswana (61).

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistik lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu

Pemanfaatan layanan perpustakaan baru sebatas masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh secara geografis dari pusat

kota seperti masyarakat urban, masyarakat pedesaan, perbukitan, maupun daerah perbatasan dan tertinggal lainnya masih termarginalisasi dalam akses sumber-sumber bacaan dan informasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu (1) daya beli masyarakat yang rendah terhadap bahan bacaan, (2) jumlah terbitan nasional terbatas setiap tahun, disamping pendistribusian yang tidak merata menjangkau komunal masyarakat, (3) keinginan atau minat masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan membaca dan menulis, serta (4) perpustakaan dalam memfasilitasi kebutuhan membaca belum tersedia secara maksimal.

Instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan perpustakaan serta diversifikasi layanan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap bacaan dan sumber informasi lainnya dapat diakses dengan cepat dan murah. Kebutuhan minimal perpustakaan di masyarakat ditinjau dari aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan memerlukan kurang lebih 794.023 perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekarang ini belum representatif. Salah satunya perpustakaan sekolah baru mencapai 5.74% yang memiliki perpustakaan. Sedangkan perpustakaan masyarakat (perpustakaan kecamatan/desa/kelurahan/rumah ibadah) baru mencapai 0.28% yang memiliki perpustakaan.

D. Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, maka telah ditetapkan perpustakaan sebagai pengampu Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Sehubungan dengan itu, sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar bagi daerah otonom dalam hal pelayanan publik yang menunjang keberhasilan di bidang pendidikan maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, khususnya kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah terbentuk 9 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 10 Kab/Kota yang ada. Perincian

Kab/Kota yang telah membentuk dan yang belum membentuk Perpustakaan Umum Kab/Kota dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data Perpustakaan Umum Kab/Kota di Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Kelembagaan Perpustakaan Umum	
		Telah Membentuk	Belum
1	Samarinda	√	
2	Balikpapan	√	
3	Bontang	√	
4	Kutai Kartenagara	√	
5	Kutai Timur	√	
6	Kutai Barat	√	
7	Paser	√	
8	Berau	√	
9	Penajam Pasir Utara	√	
10	Mahakam Ulu	√	

Tabel 3.7
Data Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kab/Kota di Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Kelembagaan Kearsipan	
		Telah Membentuk	Belum
1	Samarinda	√	
2	Balikpapan	√	
3	Bontang	√	
4	Berau	√	
5	Kutai Kartenagara	√	
6	Kutai Timur	√	
7	Kutai Barat	√	
8	Paser	√	
9	Penajam Paser Utara	√	
10	Mahakam Ulu		√

Sedangkan untuk kearsipan sendiri sudah terbentuk 9 (sembilan) lembaga kearsipan daerah di kabupaten kota di Kalimantan Timur, kelembagaan kearsipan dan Perpustakaan ada yang bergabung dan ada juga yang terpisah, sedangkan di kabupaten Mahakam Ulu belum terbentuk Lembaga kearsipan.

Pengembangan perpustakaan di daerah mengalami stagnasi disebabkan lembaga Perpustakaan dan kearsipan Kab/Kota sebagian besar digabung dengan lembaga kearsipan dan dokumentasi. Dari 10 Perpustakaan Umum Kab/Kota terdiri atas :

1. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 1 unit,
2. Kantor Perpustakaan Umum 1 unit,
3. Dinas Kearsipan Kota 1 unit
4. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 7 unit dan
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebanyak 2 unit.

Hasil Rivew terhadap Perpustakaan Kabupaten/Kota tingkat minat baca belum berjalan dengan baik dikarenakan alokasi anggaran pembangunan perpustakaan di daerah kurang memadai dan lemahnya dukungan otoritas daerah terhadap kebijakan akselerasi perpustakaan dan minat baca oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur masih terus berusaha bersinergi dengan kabupaten kota melalui kegiatan pemberian bantuan bahan pustaka dan kegiatan bimbingan konseling kearsipan melalui dana pemerintah pusat yang di berikan melalui Dekonsentrasi

E. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan

Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas buku koleksi pustaka.

Pada saat ini, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki koleksi umum sejumlah 95.292 judul (208.214 eksemplar). Koleksi Deposit yang merupakan hasil dari Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (KCKR) sebanyak 17.061 eksemplar dan 451 keping. Sayangnya, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya buku baru yang dihasilkan oleh penerbit.

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku berkualitas bagi masyarakat. Lain hal Khasanah arsip statis yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari masa kolonial yang berbahasa Belanda, masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa Republik, masa Orde Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip tersebut terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film, video, VCD/DVD, Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip Elektronik. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan di setiap organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung karena lembaga

kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip dari lembaga-lembaga melalui akuisisi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, melalui pembangunan Perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dilihat dari:

- A. adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
- B. adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- C. adanya keterkaitan dan konsistensi antara Pembuat Kebijakan, Pengawasan (Auditor), pelaksanaan (Operator) dan Masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya; serta
- D. integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra Perangkat Daerah). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPD 2024-2026.

Mengacu pada visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, tujuan yang ingin dicapai adalah:

“Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal”

Berangkat dari rumusan tujuan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2024-2026, sebagai berikut :

- a. *“Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing”*
- b. *“Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar”*
- c. *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah”*

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal	Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (INDEK)	35	40	45
			Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)	46	47	48
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5	7	9
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	67	67,5	70,01
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,50	83,00	83,50

Dari tabel di atas dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal, yaitu :

- a. Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saing
Tolak ukur dalam indikator tujuan yang dipergunakan adalah
 - Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), tujuan indikator tersebut untuk melihat sedemikian sehingga mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota

perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) yaitu tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

Metode perhitungan dengan menggunakan survey dan kajian Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan tolak ukur jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan baik secara onsite atau kunjungan secara langsung maupun secara online melalui layanan e-library maupun web dan media media sosial lainnya Metode perhitungan dengan menggunakan sumber database buku tamu dan statistic.

- b. Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar

Dalam urusan kearsipan, indikator yang dipergunakan untuk mencapai tujuan adalah Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah di Kalimantan Timur Yang Menjalankan Standar Penyelenggaraan Kearsipan, dengan tolak ukur Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik".

Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kearsipan Yang Sesuai Standar dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah dan LKD yang Menyelenggarakan Kearsipan Sesuai Standar, tolak ukur yang dipergunakan yaitu jumlah perangkat daerah dan Lembaga kearsipan daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kearsipan dan memperoleh kategori "B".

- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Dalam urusan pelayanan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan indikator yang akan di capai yaitu Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu instansi pemerintah yang memiliki orientasi

pelayanan untuk umum selain dengan stake holder terkait. Sehingga indikator yang dipergunakan yaitu:

- Nilai AKIP perangkat daerah
- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 4.1
Cascading Tujuan Sasaran, Program, dan Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana 2022	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang bersih dan handal	Indeks Pembangunan Berbangsa dan Berkeadilan (IPBB) Literasi Masyarakat	34,26	33	40	43	Program Peningkatan Kearsipan	Indeks Pembangunan Berbangsa dan Berkeadilan (IPBB) Literasi Masyarakat (IPBB)	35	40	45	Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan secara online dan Offline	Jumlah Perpustakaan Yang Dibuka Sesuai dengan SAP
							Nilai Ketersediaan Kemudahan Masyarakat (TKM)	40	47	48		
						Program Peningkatan Arsip	Jumlah OPD dan LKD yang Mempunyai Nilai Penghargaan Kearsipan Kategori "Baik"	5	7	9	Peningkatan Gencar Membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Peningkatan Gencar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
							Jumlah OPD dan LKD yang Mempunyai Nilai Penghargaan Kearsipan Kategori "Baik"	5	7	9		
Meningkatkan Pengabdian dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Nilai Pengabdian Kearsipan	87,96	70	71	72	Program Peningkatan dan Penguatan Arsip	Tingkat keberhasilan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, dan bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pukul 40 dan Pukul 150 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76	77	78	Peningkatan Arsip Statis yang telah dibuatkan arsip digital dan arsip fisik	Peningkatan Arsip Statis yang telah dibuatkan arsip digital dan arsip fisik
							Tingkat keberhasilan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, dan bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pukul 40 dan Pukul 150 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76	77	78		
						Program Peningkatan dan Penguatan Arsip	Tingkat keberhasilan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, dan bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pukul 40 dan Pukul 150 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76	77	78	Peningkatan Arsip Statis yang telah dibuatkan arsip digital dan arsip fisik	Peningkatan Arsip Statis yang telah dibuatkan arsip digital dan arsip fisik
							Tingkat keberhasilan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, dan bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pukul 40 dan Pukul 150 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76	77	78		

Tujuan	Indikator Tujuan	Kendali 2022	2024	2025	2026	Program	Indikator Program	2024	2025	2026	Kegiatan	Indikator Kegiatan
											Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berakut Provinsi Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dengan kabupaten, dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Adu Media yang Diakut oleh Lembaga Keartian Provinsi Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang Pencanaan, Pengorganiran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Manajemen Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangggulan dan Penanganan arsip akibat bencana Jumlah arsip yang diutamakan bagi perangkat daerah yang digabung dengan kabupaten, dan Jumlah Penilaian Arsip Statis dan adu media yang diakukan Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NAD Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diakukan sesuai subDU Persentase realisasi anggaran Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,71	82,3	83	83,5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai ASIP perangkat daerah	80 Indeks	82 Indeks	84 Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Indeks Kualitas Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kualitas Layanan Pengguna Layanan Yang Dididatlanjuti
	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,5	83	83,5	Indeks Kepuasan Masyarakat		95 %	96 %	97 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Manajemen Keuangan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan bahwa perpustakaan adalah sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung Kalimantanb dalam mendukung pendidikan nasional, perpustakaan berperan untuk mencetak manusia yang beriman serta sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, memiliki daya saing dan mampu memberikan kontribusinya dalam pembangunan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, disusun atas dasar permasalahan dan isu-isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.

A. Strategi pendekatan eksternal

Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut :

1. Implementasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang langsung menyentuh rakyat melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah

2. Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peran perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi / daerah.

B. Strategi pendekatan internal

Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui perencanaan dan koordinasi integratif kepada seluruh bidang bidang teknis yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dalam mengimplementasikan program kerja
2. Memobilisasi sumberdaya internal serta mengembangkan jaringan informasi dan sistem komputerisasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi terhadap berbagai sumber data dan kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas kerja.

Mengacu pada **strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023** agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (*dual track strategy*). Untuk lebih jelas akan dijabarkan dala table sebagai berikut.

Tabel 5.1
Analisis SWOT
Strategi S-O

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (STRENGHT)
	1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan Kearsipan 2. Adanya kewenangan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. 3. Semakin meningkatnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
Peluang (OPPERTUNITY)	STRATEGI S-O
1. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah perpustakaan dan unit pengelola kearsipan di Kaltim yang membutuhkan pengembangan dan pembinaan	1. Optimalisasi program pegembangan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta gerakan sadar tertib arsip
2. Perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi	2. Peningkatan kuantitas dan kualitas koleksi bahan perpustakaan
3. Banyaknya koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan	

Tabel 5.2
Analisis SWOT
Strategi W-O

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kelemahan (WEAKNESSES)
	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan 2. Belum optimalnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan lembaga kearsipan. 3. Belum optimalnya peran dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab/kota
Peluang (OPPURTUNITY)	STRATEGI W-O
1. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah perpustakaan dan unit pengelola kearsipan di Kaltim yang membutuhkan pengembangan dan pembinaan 2. Perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi 3. Banyaknya koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan	1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM perpustakaan dan kearsipan melalui pendidilkan Formal dan Informal 2. Peningembangan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK 3. Penguatan peran dan fungsi Dinas Perpustakaan/Kearsipan Kab/Kota dalam mendukung program pembinaan perpustakaan dan kearsipan

Tabel 5.3
Analisis SWOT
Strategi S-T

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (STRENGHT)
	1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan Kearsipan 2. Adanya kewenangan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. 3. Semakin meningkatnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
Ancaman (THREATS)	STRATEGI S-T
1. Berkembangnya kompetitor yang bergerak dibidang penyediaan bahan pustaka dan kearsipan 2. Gerakan minat baca dan masyarakat sadar arsip belum tumbuh secara baik 3. Belum optimalnya kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang undangan perpustakaan dan kearsipan	1. Peningkatan kerjasama pengembangan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan para kompetitor 2. Optimalisasi kegiatan sosialisasi undang undang perpustakaan dan kearsipan

Tabel 5.4
Analisis SWOT
Strategi W-T

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kelemahan (WEAKNESSES)
	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan 2. Belum optimalnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan lembaga kearsipan. 3. Belum optimalnya peran dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab/kota
Ancaman (THREATS)	STRATEGI W-T
1. Berkembangnya kompetitor yang bergerak dibidang penyediaan bahan pustaka dan kearsipan 2. Gerakan minat baca dan masyarakat sadar arsip belum tumbuh secara baik 3. Belum optimalnya kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang undangan perpustakaan dan kearsipan	1. Pengembangan kerjasama pembinaan tenaga perpustakaan dan Kearsipan 2. Peningkatan peran dan dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota dalam meningkatkan kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan undang undang perpustakaan dan kearsipan

Dengan memperhatikan hasil analisis SWOT tersebut dapat diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk menghasilkan 8 (delapan) rumusan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan supervisi dan pembinaan perpustakaan dan lembaga kearsipan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan/Kearsipan Kab/Kota di wilayah Kalimantan Timur
2. Mengoptimalkan kampanye budaya baca dan masyarakat sadar arsip bekerjasama dengan semua elemen masyarakat
3. Menyelamatkan fisik dan kandungan informasi bahan pustaka lokal dan bahan kearsipan yang memiliki nilai histories untuk didayagunaan dalam mendukung penelitian dan pembangunan.
4. Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan kearsipan melalui pengembangan layanan berbasis teknologi informasi
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan dan SDM Perpustakaan secara keseluruhan untuk menunjang kualitas layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang akan ditempuh melalui :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi angka pengangguran
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 - c. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
2. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur perlu didukung dengan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan

pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur :

a. Kebijakan bidang perpustakaan:

- 1) Pembinaan kepada semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan
- 2) Pengembangan perpustakaan melalui penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan; peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; pembentukan perpustakaan desa / kelurahan; dan kerjasama dan kemitraan, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- 3) melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- 4) Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, terutama pelestarian koleksi lokal dan muatan lokal Kalimantan Timur
- 6) Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat

b. Kebijakan bidang kearsipan

- 1) Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi : Menyusun peraturan/pedoman sistem kearsipan; Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital;
- 2) Optimalisasi pelatihan-pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip

- 3) Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi : Akuisisi arsip statis baik di instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol/ Ormas, Swasta maupun Perorangan; Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis; Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif
- 4) Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti : Pameran arsip; Promosi jasa kearsipan, Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan; Pelayanan informasi arsip
- 5) Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik; pembentukan posko pelayanan publik untuk bahan pustaka maupun arsip; melakukan debirokratisasi dan deregulasi dalam meningkatkan pelayanan publik

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-waktu mendatang:

- A. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- B. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitas dari pihak pemerintah
- C. Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
- D. Dinas Perpustakaan dan kearsipan provinsi diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat
- E. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan daerah

F. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi pusat informasi penting se Kalimantan Timur yang menyediakan informasi bersejarah yang berguna bagi penelusuran penulisan kesejarahan.

Tabel T.C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan minat baca dan budaya literasi Masyarakat Kalimantan Timur serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib dan handal	Terwujudnya Budaya Literasi untuk meningkatkan kualitas Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaya Saling	Mengoptimalkan program dan kegiatan supervisi dan pembinaan perpustakaan dan lembaga kearsipan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan/Kearsipan Kab/Kota di wilayah Kalimantan Timur Daerah. Mengoptimalkan kampanye budaya baca dan masyarakat sadar arsip bekerjasama dengan semua elemen masyarakat. Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan kearsipan melalui pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.	Pembinaan kepada semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca Pengembangan perpustakaan melalui penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan; peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; pembentukan perpustakaan desa / kelurahan; dan kerjasama dan kemitraan, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
		Menyelamatkan fisik dan kandungan informasi bahan pustaka lokal dan bahan kearsipan yang memiliki nilai histories untuk diidagunakan dalam mendukung penelitian dan pembangunan.	Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, terutama pelestarian koleksi lokal dan mustan lokal Kalimantan Timur.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan dan SDM Perpustakaan secara keseluruhan untuk menunjang kualitas layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.	Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Standar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta profesionalisme pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Meningkatkan kualitas layanan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan secara tepat waktu
			Pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan
			Meningkatkan Kualitas layanan administrasi keuangan, administrasi Umum dan Kepegawaian.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan prioritas yang telah diuraikan pada Bab IV dan Bab V, dan juga perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada tahun 2021 sampai dengan periode Renstra berakhir semua program dan kegiatan yang telah disusun pada Renstra sebelumnya berubah dan dirumuskan kembali rencana, program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode tahun 2024-2026 sebagai berikut:

6.1 Rencana Program

Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Rencana Strategis sebagai dampak dari perubahan nomenklatur seperti dijelaskan diatas dilakukan untuk 3 (tiga) tahun kedepan yaitu tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi program:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- B. Program Pembinaan Perpustakaan
- C. Program Pengelolaan Arsip
- D. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Rencana tiga (3) tahun kedepan sebagaimana dijabarkan dalam 4 program tersebut diatas akan direalisasikan dalam bentuk kegiatan tahunan seperti tercantum dalam lampiran tabel I.

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sasaran dari program ini yaitu peningkatan kualitas layanan kesekretariatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah kualitas penyerapan anggaran dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kualitas SDM aparatur yang berdaya saing.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang operasional perangkat daerah.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah pemenuhan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah pemeliharaan barang milik daerah yang menunjang operasional Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pembinaan Perpustakaan, sasaran dari program ini adalah meningkatkan pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat untuk membangun masyarakat yang cerdas yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan pengembangan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
- Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengembangan Perpustakaan Deposit
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

b) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah peningkatan kegemaran membaca untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas.

Sub Kegiatan yang mendukung meliputi:

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi

C. Program Pengelolaan Arsip, dengan sasaran meningkatkan pengelolaan arsip Perangkat Daerah yang sesuai standar dalam rangka pelestarian arsip yang otentik yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengelolaan arsip dinamis OPD/LKD untuk mewujudkan tertib arsip Perangkat Daerah.

- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
- Penyusutan Arsip Dinamis
- Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis

b) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah pengelolaan arsip statis OPD untuk meningkatkan khasanah arsip daerah.

- Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
- Akuisisi Arsip Statis

c) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi. Sasaran kegiatan ini adalah pemanfaatan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dalam penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah.

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

D. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, sasaran program ini adalah peningkatan kualitas sumber informasi arsip yang dikelola sebagai bahan informasi yang berkualitas tinggi yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan penilaian, penetapan, dan pemusnahan arsip Perangkat Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.
 - Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
- b) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah pengelolaan arsip yang terdampak bencana sesuai standar.
 - Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana
 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
- c) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran dari kegiatan ini adalah pengelolaan arsip Perangkat Daerah yang telah digabung dan atau dibubarkan sesuai dengan standar kearsipan.
 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota

- d) Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi. Sasaran dari kegiatan ini adalah penilaian arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola Lembaga Kearsipan Provinsi.
 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
- e) Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang. Sasaran kegiatan ini adalah pengelolaan arsip statis yang dinyatakan hilang sesuai prosedur dan standar kearsipan.
 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dituju terkait pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun dalam perubahan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi :

- 1) Masyarakat Kalimantan Timur sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan dan kearsipan
- 2) Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
- 3) Perpustakaan Khusus/Instansi
- 4) Perpustakaan Sekolah
- 5) Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 6) Lembaga Kearsipan Daerah
- 7) Pengelola/pustakawan/arsiparis pada semua jenis perpustakaan dan kearsipan
- 8) Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim
- 9) Kalangan dunia usaha
- 10) Instansi terkait lainnya

6.4 Pendanaan Indikatif

Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan perubahan rencana kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2024-2026. Kebutuhan pendanaan secara indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan serta sub kegiatan selama periode 2024-2026 diuraikan melalui tabel berikut :

TABEL T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim

Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20		
			URUSAN PEMERINTAHAN WATIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-		44.446.499.000		35.748.759.000		37.958.945.000		37.958.945.000	DPKD			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		-									DPKD			
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	79 Indek	80 Indek	31.121.499.000	82 Indek	27.908.759.000	84 Indek	28.715.944.350	84 Indek	28.715.944.350	DPKD			
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindak lanjuti	94 %	95 %		96 %		97 %		97 %					
2	23	01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	17 Dokume n	950.000.000	17 Dokume n	950.000.000	17 Dokume n	1.000.000.000	17 Dokume n	1.000.000.000	DPKD			
2	23	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	350.000.000	10 Dokumen	350.000.000	10 Dokumen	350.000.000	10 Dokumen	350.000.000	DPKD			

Kode			Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7 5 Laporan	8 350.000.000	9 5 Laporan	10 350.000.000	11 5 Laporan	12 350.000.000	17 5 Laporan	18 350.000.000	19 DPKD	20				
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	DPKD					
2	23	01	1.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,09 %	98 %	18.650.000.000	98 %	18.650.000.000	98 %	18.650.000.000	98 %	18.650.000.000	DPKD					
2	23	01	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	18.000.000.000	94 Orang/Bulan	18.000.000.000	94 Orang/Bulan	18.000.000.000	94 Orang/Bulan	18.000.000.000	DPKD					
2	23	01	1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	DPKD					
2	23	01	1.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	DPKD					
2	23	01	1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	DPKD					

Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Rp		Rp		Rp		Rp			
				Target		Target		Target		Target			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	80 %	82 %	100.000.000	85 %	100.000.000	90 %	100.000.000	90 %	100.000.000	DPKD	
2 23 01 1.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	DPKD	
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	416.919.000	100 %	484.378.000	100 %	534.378.000	100 %	534.378.000	DPKD	
2 23 01 1.05	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	84.378.000	1 Paket	84.378.000	1 Paket	84.378.000	1 Paket	84.378.000	DPKD	
2 23 01 1.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	182.541.000	3 Dokumen	225.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	DPKD	
2 23 01 1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	150.000.000	15 Orang	175.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	DPKD	

Kode		Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah							
											Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					2	23	01	1.06	3	4	5	6	7	8			9	10
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	3.551.840.000	100 %	2.276.840.000	100 %	2.776.840.000	100 %	2.776.840.000	DPKD		
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	5 Paket	50.000.000	DPKD		
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.000.000.000	5 Paket	500.000.000	5 Paket	850.000.000	5 Paket	850.000.000	DPKD		
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	75.000.000	20 Paket	100.000.000	20 Paket	100.000.000	20 Paket	100.000.000	DPKD		
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	10 Paket	75.000.000	DPKD		
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	51.840.000	7 Dokumen	51.840.000	7 Dokumen	51.840.000	7 Dokumen	51.840.000	DPKD		
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.300.000.000	2 Laporan	1.500.000.000	2 Laporan	1.650.000.000	2 Laporan	1.650.000.000	DPKD		

Kode		Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Peningkat	Lokasi		
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
											Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20				
2	23 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.227.740.000	100 %	3.730.000.000	100 %	3.727.740.000	100 %	3.727.740.000	DPKD					
2	23 01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	27.740.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	27.740.000	2 Laporan	27.740.000	DPKD					
2	23 01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	950.000.000	1 Laporan	950.000.000	1 Laporan	950.000.000	1 Laporan	950.000.000	DPKD					
2	23 01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.250.000.000	1 Laporan	2.750.000.000	1 Laporan	2.750.000.000	1 Laporan	2.750.000.000	DPKD					
2	23 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.225.000.000	100 %	1.717.541.000	100 %	1.926.986.350	100 %	1.926.986.350	DPKD					
2	23 01	1.09	0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	DPKD					
2	23 01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.650.000.000	2 Unit	1.100.000.000	2 Unit	1.300.000.000	2 Unit	1.300.000.000	DPKD					

Kode		Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah									
											Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	50 Unit	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
											50 Unit	225.000.000	50 Unit	267.541.000	50 Unit	276.986.350	50 Unit	276.986.350	DPKD	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		34,16 Indeks		35 Indeks	6.900.000.000	40 Indeks	3.000.000.000	45 Indeks	3.540.000.000	45 Indeks	3.540.000.000	DPKD	
							Nilai Keganaran Membaca Masyarakat (TGM)		46,27 Skor		46 Skor		47 Skor		48 Skor					
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP		59 Perpustakaan		60 Perpustakaan	5.150.000.000	70 Perpustakaan	750.000.000	85 Perpustakaan	850.000.000	85 Perpustakaan	850.000.000	DPKD	
							Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite		209500 Orang		230000 Orang		240000 Orang		250000 Orang					
							Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan		2600 Eksemplar		2600 Eksemplar		3100 Eksemplar		3350 Eksemplar					
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya		28 Perpustakaan		30 Perpustakaan	1.200.000.000	50 Perpustakaan	1.000.000.000	75 Perpustakaan	1.350.000.000	75 Perpustakaan	1.350.000.000	DPKD	

Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung jawab	Lokasi		
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3			6			7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
2 23 02 1.01 0003	Pengembangan Keluasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	500 Eksemplar	1.050.000.000	600 Eksemplar	300.000.000	300.000.000	600 Eksemplar	300.000.000	600 Eksemplar	300.000.000	600 Eksemplar	300.000.000	DPKD	
2 23 02 1.01 0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibuka sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	0 Perpustakaan	200.000.000	12 Perpustakaan	350.000.000	400.000.000	15 Perpustakaan	400.000.000	15 Perpustakaan	400.000.000	15 Perpustakaan	400.000.000	DPKD	
2 23 02 1.01 0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Putakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Putakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	500.000.000	75 Orang	550.000.000	600.000.000	75 Orang	600.000.000	75 Orang	600.000.000	75 Orang	600.000.000	DPKD	
2 23 02 1.01 0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	400.000.000	5 Layanan	550.000.000	650.000.000	5 Layanan	650.000.000	5 Layanan	650.000.000	5 Layanan	650.000.000	DPKD	
2 23 02 1.01 0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang dikembangkan	5 Perpustakaan	100.000.000	5 Perpustakaan	100.000.000	100.000.000	5 Perpustakaan	100.000.000	5 Perpustakaan	100.000.000	5 Perpustakaan	100.000.000	DPKD	
2 23 02 1.01 0009	Pengadaan dan Pengembangan Bahan Putaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dibeli dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman Koleksi Perpustakaan	2697 Eksemplar	1.000.000.000	2900 Eksemplar	1.100.000.000	1.300.000.000	3000 Eksemplar	1.300.000.000	3000 Eksemplar	1.300.000.000	3000 Eksemplar	1.300.000.000	DPKD	

Kode		Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
2	01	02	03	04	05	06	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	17	18	19	20
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	DPKD	
2	01	02	03	04	05	06	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.00						

Kode			Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Provinsi yang dikembangkan	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20		
						Perpustakaan	33	3	3	550.000.000	6	600.000.000	9	700.000.000	9	700.000.000	9	DPKD		
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Banda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Banda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	5	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	DPKD		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Menperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5	5	5	5.800.000.000	7	2.310.000.000	9	2.390.000.000	9	2.390.000.000	9	DPKD		
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	70 %	70 %	70 %	3.550.000.000	80 %	60.000.000	85 %	70.000.000	85 %	70.000.000	85 %	DPKD		
2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17	17	17	3.450.000.000	17	1.230.000.000	17	1.300.000.000	17	1.300.000.000	17	DPKD		
2	24	02	1.01	0004	Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah dsusun	0	2000	2500	50.000.000	2500	150.000.000	1250	70.000.000	1250	70.000.000	1250	DPKD		

Kode		Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pungjung jawab		Lokasi			
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
														Target	Rp					Target	Rp
3		4		5		6		7	8	9	10	11	12	17	18	19	20				
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	0 Berkas	2262 Berkas	50.000.000	2500 Berkas	60.000.000	3000 Berkas	70.000.000	3000 Berkas	70.000.000	DPKD					
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuahkan sarana bantu temu fisik	95,05 %	96 %	250.000.000	96,5 %	750.000.000	97 %	820.000.000	97 %	820.000.000	DPKD					
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyempurnaan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	0 Arsip	100 Arsip	50.000.000	200 Arsip	50.000.000	300 Arsip	70.000.000	300 Arsip	70.000.000	DPKD					
2	24	02	1.02	0005	Akuisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	512 Arsip	250 Arsip	200.000.000	300 Arsip	700.000.000	350 Arsip	750.000.000	350 Arsip	750.000.000	DPKD					
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	3 %	5 %	2.000.000.000	6 %	1.500.000.000	7 %	1.500.000.000	7 %	1.500.000.000	DPKD					
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui IDKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui IDKN	1012 Pengguna	1100 Pengguna	700.000.000	1150 Pengguna	750.000.000	1200 Pengguna	750.000.000	1200 Pengguna	750.000.000	DPKD					
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	2 Laporan	1.300.000.000	2 Laporan	750.000.000	2 Laporan	750.000.000	2 Laporan	750.000.000	DPKD					

Kode			Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	74,84 %	76 %	625.000.000	77 %	2.530.000.000	78 %	3.313.000.650	78 %	3.313.000.650	DPKD	
2	24	03	Pemusnahan Arsip dilindungi Penseritah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas	5000 Berkas	150.000.000	5200 Berkas	500.000.000	5400 Berkas	663.000.650	5400 Berkas	663.000.650	DPKD	
2	24	03	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2860 Arsip	5000 Arsip	75.000.000	5200 Arsip	300.000.000	5400 Arsip	313.000.650	5400 Arsip	313.000.650	DPKD	
2	24	03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2860 Berkas	2000 Berkas	75.000.000	2100 Berkas	200.000.000	2200 Berkas	350.000.000	2200 Berkas	350.000.000	DPKD	

Kode			Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
2	24	03	1.02	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20				
				Perfindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penauggulan dan Pensaangan arsip akibat bencana	0 Kegiatan	5 Kegiatan	80.000.000	6 Kegiatan	205.000.000	7 Kegiatan	300.000.000	7 Kegiatan	300.000.000	DPKD					
2	24	03	1.02	0001	Jumlah Arsip yang dilakukan Evaluasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	1000 Arsip	45.000.000	1200 Arsip	30.000.000	1400 Arsip	150.000.000	1400 Arsip	150.000.000	DPKD					
2	24	03	1.02	0002	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	1000 Arsip	35.000.000	1200 Arsip	175.000.000	1400 Arsip	150.000.000	1400 Arsip	150.000.000	DPKD					
2	24	03	1.03		Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	13940 Arsip	105.000.000	13940 Arsip	775.000.000	13940 Arsip	1.200.000.000	13940 Arsip	1.200.000.000	DPKD					
2	24	03	1.03	0001	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendaftaran, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1 Daftar	3 Daftar	35.000.000	5 Daftar	350.000.000	6 Daftar	550.000.000	6 Daftar	550.000.000	DPKD					

Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung jawab	Lokasi
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	35.000.000	3 Arsip	175.000.000	3 Arsip	300.000.000	3 Arsip	300.000.000	DPKD	20	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	0 Arsip	35.000.000	10 Arsip	250.000.000	10 Arsip	350.000.000	10 Arsip	350.000.000	DPKD		
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1000 Arsip	185.000.000	1300 Arsip	500.000.000	1300 Arsip	500.000.000	1300 Arsip	500.000.000	DPKD		
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Pendataan Autentifikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentifikasi Arsip yang Ditilai dan Ditebitkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	35.000.000	300 Arsip	200.000.000	300 Arsip	200.000.000	300 Arsip	200.000.000	DPKD		

Kode			Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
3			4		5		Target		Rp		Target		Rp		17		18		19		20	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Ath Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Ath Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	150.000.000	1000 Arsip	300.000.000	1000 Arsip	300.000.000	1000 Arsip	300.000.000	1000 Arsip	300.000.000	DPKD					
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	650.000.000	DPKD							
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	35.000.000	10 Arsip	200.000.000	10 Arsip	200.000.000	10 Arsip	200.000.000	DPKD							
2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Ath Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Ath Media yang dinyatakan Hilang	1000 Arsip	35.000.000	1500 Arsip	250.000.000	1750 Arsip	300.000.000	1750 Arsip	300.000.000	DPKD							
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	35.000.000	5 Arsip	100.000.000	7 Arsip	150.000.000	7 Arsip	150.000.000	DPKD							

Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Periode rencana	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Penangkil Daerah Per anggilng Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3				Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah											
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
				Indeks Kualitas Layanan Kualitas/Layanan	79,21 Indeks	13.752.428.000,0 0	82 Indeks	13.820.716.000,0 0	84 Indeks	15.280.184.000,0 0	84 Indeks	Disas Perpus sasaran dan Kategori Daerah		
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Didokumentasikan	62 %	10.736.013,00	96 %	10.888.043,00	67 %	10.396.780.250,0 0	97 %	Disas Perpus sasaran dan Kategori Daerah		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan capaian kinerja dalam suatu organisasi. Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan jika indikator tersebut akan diterapkan dalam pemberian rekomendasi pada program yang dijalankan. Kriteria indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok organisasi meliputi : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan.

Mengingat program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik, maka indikator kinerja pada masing-masing unit program tidak sama.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah. Indikator-indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu :

1. Indikator Masukan (Input)

Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya

2. Indikator Proses (Process)

Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator ini menunjukkan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator ini menunjukkan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Setelah menentukan semua indikator kinerja yang berkaitan, tahap selanjutnya adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator

kinerja yang telah ditentukan. Salah satu aspek dari setiap usaha yang dilakukan adalah apakah usaha tersebut akan berhasil diselesaikan (sukses) untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Rumusan program/kegiatan yang baik harus memiliki kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time). Untuk memenuhi kriteria tersebut perlu dikembangkan indikator kinerja yang terukur dan dapat mencapai target dari masing-masing program.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Keterkaitan Renstra dan RPJPD dan RPJMN Provinsi Kalimantan Timur

			RENSTRA 2024-2026		
RPJPD	RPJMN	Tujuan RPD	Penetapan Indikator Kinerja	Program Prioritas	Indikator Program
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Tujuan 4: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayan Publik	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (INDEK)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
			Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)
			Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik" Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
			Nilai AKIP perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (indeks)

			RENSTRA 2024-2026		
RPJPD	RPJMN	Tujuan RPD	Penetapan Indikator Kinerja	Program Prioritas	Indikator Program
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov.Kaltim
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode (TARGET)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
		2022	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (INDEK)	34,16	35	40	45	45
2	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Skor)	46,27	46	47	48	48
3	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	3	5	7	9	9
4	Nilai AKIP perangkat daerah	65,50	67	67,5	70,01	70,01
5	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,50	83	83,50	83,50

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holders) perpustakaan guna mengakomodir kepentingan masyarakat melalui akselerasi pembangunan perpustakaan dan budaya baca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan di bidang perpustakaan diperlukan sumber daya dan dana yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan arah dan pedoman pengembangan perpustakaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, kebijakan maupun program/kegiatan yang terukur sebagai indikator kinerja pada pencapaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sector ekonomi yang memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sector kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan juga agenda nawa cita, dimana aspek kemaritiman menjadi pondas pembangunan Indonesia. Hal ini sesuai sejalan dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dimana pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan.

Sejarah kejayaan bahari di Indonesia pernah terukir melalui kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada. Laut sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi terhormat dalam percaturan perdagangan, ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan bahkan sampai saat ini kearifan-kearifan tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan tetap bertahan.

Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis bahwa sektor Kelautan dan Perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Timur, mengingat sumberdaya kelautan dan perikanannya sangat berpotensi. Meski demikian kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan pembudidaya ikan masih cukup tinggi.

Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara konsisten menyelaraskan berbagi program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan dan memperluas lapangan pekerjaan serta mengurangi kemiskinan.

Pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dasar perencanaan pembangunan nasional agar terjadi sinkronisasi, integrasi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi, integrasi dan keselarasan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, matang, relevan dan konsisten pada masing-masing jenjang agar hasil akhir pembangunan dapat terwujud secara efektif dan efisien sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Dalam perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 (sembilan) agenda Prioritas NAWACITA yang wajib dilaksanakan untuk pengembangan subsektor kelautan dan perikanan, mencakup 2 (dua) Agenda Prioritas, yaitu : (1) **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional** dengan sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan industrialisasi berbasis komoditas kelautan dan perikanan, dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perikanan seperti udang windu, kepiting, ikan segar dan ikan olahan serta mendorong industrialisasi di pedesaan; dan (2) **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari ikan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan industri rumah tangga. Adapun peningkatan pangan ini didukung oleh Program Nasional GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).

Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggunji, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara

optimal efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah **bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan**. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor kelautan dan perikanan agar mampu eksis dan unggul dalam menghadapi perubahan ekonomi global, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya melaksanakan perubahan secara berkelanjutan menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang bersolusi, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks, diantaranya melalui penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 ini. Tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja setiap elemen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih terarah, efektif dan efisien dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak terbarui menjadi sumber daya alam terbarui termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan berbagai peningkatan produktivitas serta penurunan emisi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, tambahan Lembaga-Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Izin Trayek dan Tarif Izin Usaha Perikanan;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor xx Tahun 202x tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2024-2026 adalah sebagai dasar bagi setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan subsektor kelautan dan perikanan periode 2024-2026 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan) provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2024-2026 adalah :

Mengetahui capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang.

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan subsektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan periode 2024-2026.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, dan
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta Sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menyajikan hasil identifikasi permasalahan pelayanan dan Isu-Isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Serta memuat Cascading Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, serta Indikator masing-masing.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Di bab ini paling sedikit memuat tentang strategi, arah kebijakan RPD dan *major project* guna mewujudkan tujuan dan sasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, target dan pagunya.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerahnya, termasuk pula dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perangkat daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan demikian memiliki tugas untuk membantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, khususnya di subsektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor pangan. Sebagai pengelola subsektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor kelautan dan perikanan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor kelautan dan perikanan saat ini dan perencanaan pengembangan subsektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta upaya pencapaian Tema Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* secara kontinyu dan konsisten disetiap tahun program kegiatannya. Upaya tersebut membuahkan hasil sebagaimana terlihat dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 yang menunjukkan perkembangan cukup baik, meski masih terdapat beberapa poin penting yang harus dipercepat progres pencapaiannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur harus memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan

ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Adapun gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan identifikasi terhadap tantangan dan peluang (struktur dan gestur tanah, cuaca, iklim, masyarakat, hingga fenomena sosial ekonomi yang terus berubah) untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perjalanan kinerjanya hingga saat ini memiliki sejarah perkembangan organisasi yang cukup panjang. Adapun dasar pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:
 - a. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Kasi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).
 - b. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Kasi Reklamasi dan Jasa Kelautan).
 - c. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Kasi Konservasi Kelautan dan Perikanan).
- 4. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Kasi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan).
 - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Kasi Pengendalian Penangkapan Ikan).
 - a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Kasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan).
- 5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Kasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan).

- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Kasi Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan).
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Kasi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan).
6. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
- a. Analis Akuakultur Ahli Muda (Kasi Perikanan Budidaya).
 - b. Analis Akuakultur Ahli Muda (Kasi Usaha Perikanan Budidaya).
 - c. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).
7. Jabatan Fungsional

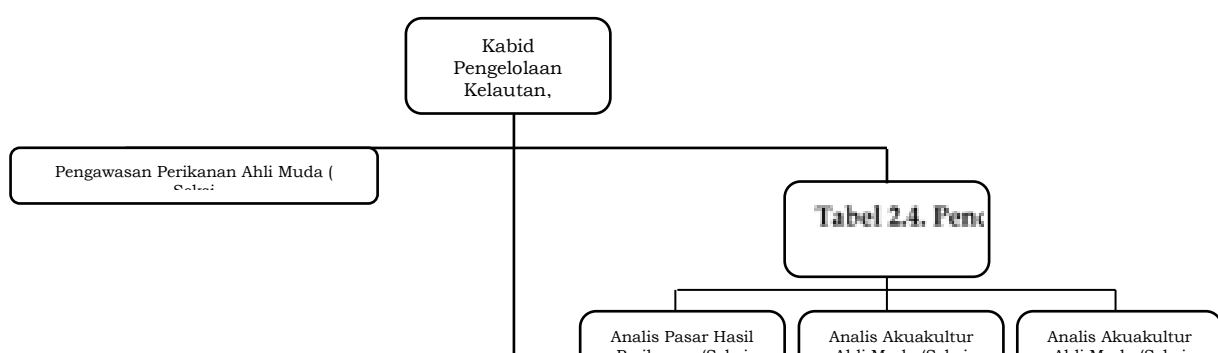
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari:

- a. UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Laut Manggar (BBSPAPAL).
- b. UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Laut Sebulu (BBSPAPAL).
- c. UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan (PMHP).

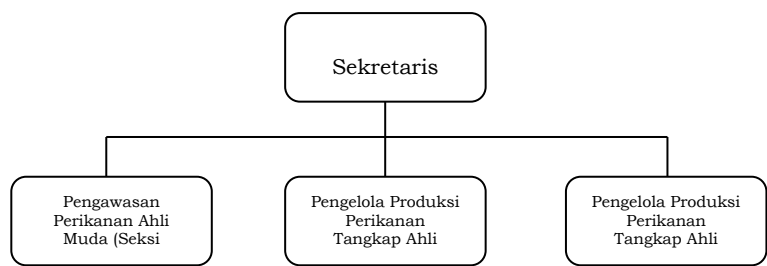
Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 dan Nomor 100 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



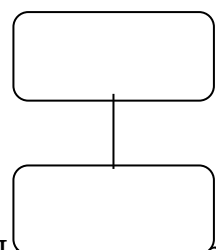
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur



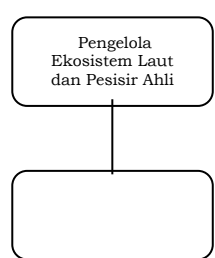
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SPAPAL) Manggar



Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SPAPAL) Sebulu



Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Samarinda



a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

b. Sekretaris

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum;

1. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, RKA, DPA, DIPA, LAKIP, dan menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan UPTD dan lain sebagainya.
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan, meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran.

2. Tugas Sub Bagian Umum:

Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.

c. Bidang Pengelolaan Kelautan, Peisisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan pencadangan kawasan konservasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
- c. Pelaksanaan penyiapan penataan batas kawasan konservasi;
- d. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kawasan konservasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K);
- f. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis lokasi reklamasi;
- g. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis pelaksanaan reklamasi;

- h. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis lokasi perairan pesisir;
- i. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis biofarmakologi laut;
- j. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis bioteknologi laut;
- k. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis wisata bahari;
- l. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis pemanfaatan air laut selain energi;
- m. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis lokasi dan pertimbangan teknis pengelolaan benda muatan kapal tenggalam (BMKT);
- n. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Membawahkan:

- a. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).
 - b. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan).
 - c. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan).
1. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dan pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil.
 2. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis lokasi reklamasi, pelaksanaan reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi.
 3. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi.

d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- f. pelaksanaan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Membawahkan:

- a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan).
- b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan).

- c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan).

1. Tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

2. Tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, penerbitan buku kapal, penerbitan tanda daftar kapal perikanan (TDKP) ukuran sampai dengan 7 (tujuh) GT, perjanjian kerja laut (PKL) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan (P2KP) kapal ukuran 7 sampai 30 GT.

3. Tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

e. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya Dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;

- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan Membawahkan:

- a. Analis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Perikanan Budidaya).
- b. Analis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Usaha Perikanan Budidaya).
- c. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).

1. Tugas Analis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Perikanan Budidaya):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.

2. Tugas Analis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Usaha Perikanan Budidaya):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

3. Tugas Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), penguatan daya saing produk perikanan.

f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);
- b. Pelaksanaan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;

- c. Pelaksanaan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan penyiapan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan penyiapan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan penyiapan penerbitan surat laik operasi untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Membawahkan:

- a. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan).
- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).
- c. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan).

1. Tugas Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.

2. Tugas Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

3. Tugas Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.

g. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, pembinaan, pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD

Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pengambilan contoh, pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir dari unit pengolahan hasil perikanan dalam rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan;
- b. Membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerjanya ;
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap mutu hasil perikanan yang didistribusikan/dipasarkan ;
- e. Sepengetahuan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengkajian teknis-teknis pengolahan dan menyampaikan kepada unit-unit pengolahan ;
- f. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit atau satuan kerja pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan di Kabupaten/Kota dan milik Pemerintah maupun Swasta ;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B, Membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan.
1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

h. **Kepala UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B**

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, pembinaan, standarisasi mutu benih, produksi benih dan induk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian mutu benih dan produksi benih
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B, Membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Tawar (SAT) Sebulu.

- 1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Tawar (SAT) Sebulu:

Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum dan keuangan.

- i. **Kepala UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SAPAL) Manggar.**

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, pembinaan, standarisasi mutu benih, produksi benih dan induk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian mutu benih dan produksi benih
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar Membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar.
- b. Seksi Standarisasi Mutu Benih UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar.
- c. Seksi Produksi Benih dan Induk UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar.
- 1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar:

Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum dan keuangan.

2. Tugas Seksi Standarisasi Mutu Benih UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar:

Standardisasi mutu benih dan calon induk.

3. Tugas Seksi Produksi Benih dan Induk UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar:

Melaksanakan dan menerapkan teknologi pembenihan dan produksi calon induk ikan air payau dan air laut.

j. **Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor kelautan dan perikanan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan asset/modal yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022, jumlah keseluruhan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 224 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat*) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 140 (*Seratus Empat Puluh*) orang dan Pegawai

Honorer/PPT sebanyak 84 (*Delapan Puluh Empat*) orang, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 2.1 Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim

Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	L	P	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
ASN	78	51	45	55	36	13	1	28	34	8	44	9	5
Pegawai Honorer/PTT	100	33	-	-	-	-	-	2	34	2	31	-	64
Jumlah ASN + Honorer	178	84	45	55	36	13	1	30	68	10	75	9	69

Sumber: LKjIP 2022

Data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis.

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjangn dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sarana pembangunan subsektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan nelayan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, baik itu yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
01.01.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung		
01.01.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	42.253	M2
02.02.01	Alat-Alat Besar Darat		
02.02.01.011	Mesin Proses	4	Unit
02.02.02	Alat-Alat Besar Apung		

Kode Barang	Jenis/Nama Barang	Banyaknya	Satuan
02.02.02.05	Mesin Proses Apung	4	Unit
02.02.03	Alat-Alat Bantu		
02.02.03.03	Compressor	5	Unit
02.02.03.04	Electric Generating Set	4	Unit
02.02.03.05	Pompa	153	Unit
02.02.03.06	Mesin Bor	1	Unit
02.02.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	1	Unit
02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor		
02.03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18	Unit
02.03.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Unit
02.03.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3	Unit
02.03.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	127	Unit
02.03.01.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	Unit
02.03.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor		
02.03.02.01	Angkutan Barang	2	Unit
02.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor		
02.03.03.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	1	Unit
02.03.03.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	14	Unit
02.03.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
02.03.04.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	5	Unit
02.04.01	Alat Bengkel Bermesin		
02.04.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	3	Unit
02.04.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	1	Unit
02.04.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	2	Unit
02.04.01.04	Perkakas Bengkel Service	4	Unit
02.04.01.09	Perkakas Pabrik Es	44	Unit
02.04.02	Alat Bengkel Tak Bermesin		
02.04.02.08	Peralatan Tukang-Tukang Besi	6	Unit
02.04.02.012	Peralatan Bengkel Keramik	15	Unit
02.04.03	Alat Ukur		
02.04.03.01	Alat Ukur Universal	12	Unit
02.04.03.08	Alat Ukur/Pembanding	16	Unit
02.04.03.09	Alat Ukur Lainnya	2	Unit
02.04.03.010	Alat Timbangan/Blora	8	Unit
02.05.01	Alat Pengolahan		
02.05.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	Unit
02.05.01.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	9	Unit
02.05.01.06	Alat Prosesing	2	Unit
02.05.01.07	Alat Pasca Panen	1	Unit
02.05.01.08	Alat Produksi Perikanan	100	Unit
02.05.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
02.05.02.03	Alat Penyimpanan	51	Unit
02.05.02.05	Alat Penangkap Ikan	18	Unit
02.06.01	Alat Kantor		
02.06.01.01	Mesin Ketik	42	Unit
02.06.01.02	Mesin Hitung/Jumlah	1	Unit
02.06.01.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	7	Unit
02.06.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	140	Unit
02.06.01.05	Alat Kantor Lainnya	46	Unit
02.06.02	Alat Rumah Tangga		
02.06.02.01	Meubelair	1154	Buah

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
02.06.02.02	Alat Pengukur Waktu	4	Buah
02.06.02.03	Alat Pembersih	40	Buah
02.06.02.04	Alat Pendingin	207	Unit
02.06.02.05	Alat Dapur	86	Buah
02.06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	299	Buah
02.06.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah
02.06.03	Peralatan Komputer		
02.06.03.01	Server Komputer	12	Unit
02.06.03.02	Personal Komputer	213	Unit
02.06.03.03	Peralatan Komputer Mainframe	6	Unit
02.06.03.04	Peralatan Mini Komputer	61	Unit
02.06.03.05	Peralatan Personal Komputer	24	Unit
02.06.03.06	Peralatan Jaringan	18	Buah
02.06.04	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
02.06.04.01	Meja Kerja Pejabat	166	Buah
02.06.04.02	Meja Rapat Pejabat	8	Buah
02.06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	194	Buah
02.06.04.07	Lemari dan Arsip Pejabat	46	Buah
02.07.01	Alat Studio		
02.07.01.01	Peralatan Studio Visual	66	Buah
02.07.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	66	Buah
02.07.01.04	Peralatan Cetak	1	Buah
02.07.02	Alat Komunikasi		
02.07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	38	Buah
02.07.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	16	Buah
02.07.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Buah
02.07.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	20	Buah
02.07.03	Peralatan Pemancar		
02.07.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	2	Unit
02.07.03.06	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	Unit
02.07.03.015	Peralatan Microvawe	1	Unit
02.08.01	Alat Kedokteran		
02.08.01.01	Alat Kedokteran Umum	12	Unit
02.08.01.02	Alat Kedokteran Gigi	7	Unit
02.08.01.07	Alat Farmasi	10	Unit
02.08.01.08	Alat Kedokteran Bedah	7	Unit
02.09.01	Unit-Unit Laboratorium		
02.09.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air	62	Unit
02.09.01.02	Alat Laboratorium Microbiologi	66	Unit
02.09.01.03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	6	Unit
02.09.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan	4	Unit
	Konstruksi		
02.09.01.07	Alat Laboratorium Aspal Cat dan kimia	2	Unit
02.09.01.08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	2	Unit
02.09.01.010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, listrik	13	Unit
02.09.01.012	Alat Laboratorium Umum	45	Unit
02.09.01.013	Alat Laboratorium Umum A	6	Unit
02.09.01.014	Alat Laboratorium Kedokteran	5	Unit
02.09.01.015	Alat Laboratorium Microbiologi	16	Unit
02.09.01.016	Alat Laboratorium Kimia	17	Unit
02.09.01.017	Alat Laboratorium Microbiologi A	1	Unit
02.09.01.018	Alat Laboratorium Patologi	33	Unit
02.09.01.019	Alat Laboratorium Immunologi	1	Unit

Kode Barang	Jenis/Nama Barang	Banyaknya	Satuan
02.09.01.020	Alat Laboratorium Hematologi	104	Unit
02.09.01.021	Alat Laboratorium Film	1	Unit
02.09.01.022	Alat Laboratorium Makanan	4	Unit
02.09.01.024	Alat Laboratorium Farmasi	3	Unit
02.09.01.028	Alat Laboratorium Proses Peleburan	1	Unit
02.09.01.029	Alat Laboratorium Pasir	7	Unit
02.09.01.037	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	18	Unit
02.09.01.038	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	3	Unit
02.09.01.043	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	20	Unit
02.09.01.046	Alat Laboratorium Pertanian	8	Unit
02.09.01.047	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	23	Unit
02.09.01.048	Alat Laboratorium Pertanian B	8	Unit
02.09.01.050	Alat Laboratorium Energi Surya	2	Unit
02.09.01.053	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	2	Unit
02.09.01.054	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	10	Unit
02.09.01.056	Alat Laboratorium Geofisika	1	Unit
02.09.01.058	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	3	Unit
02.09.01.061	Laboratorium Kearsipan	20	Unit
02.09.01.063	Alat Laboratorium Lainnya	37	Unit
02.09.01.064	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	51	Unit
02.09.02	Alat Peraga		
02.09.02.03	Bidang Studi : IPA Dasar	33	Unit
02.09.02.04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	5	Unit
02.09.02.05	Bidang Studi : IPA Menengah	9	Unit
02.09.02.10	Bidang Studi : Kesenian	1	Unit
02.09.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
02.09.03.01	Analytical Instrument	1	Unit
02.09.03.02	Instrument Probe/Sensor	1	Unit
02.09.03.03	General Laboratory Tool	4	Unit
02.09.03.05	Glassware Plastic/Utensils	1	Unit
02.09.03.06	Laboratory Safety Equipment	3	Unit
02.09.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		
02.09.04.04	Recorder Display	3	Unit
02.09.04.05	System/Power Supply	1	Unit
02.09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan		
02.09.05.04	Meteorological Equipment	2	Unit
02.09.06	Radiation Application and Non Destructive testing Laboratory (BATAM)		
02.09.06.03	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	4	Unit
02.09.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
02.09.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7	Unit
02.09.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1	Unit
02.09.07.04	Laboratorium Lingkungan	12	Unit
02.09.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	16	Unit
02.09.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
02.09.08.07	Permesinan:Model Ship Workshop	1	Unit
02.10.02	Persenjataan Non Senjata Api		
02.10.02.01	Alat Keamanan	5	Buah
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
03.11.01.01	Bangunan Gedung Kantor	1534,92	M2
03.11.01.02	Bangunan Gudang	243,65	M2
03.11.01.03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	97,59	M2
03.11.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	396	M2

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
03.11.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	96,10	M2
03.11.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	19	M2
03.11.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63,12	M2
03.11.01.010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
03.11.01.011	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		
03.11.01.013	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	107,90	M2
03.11.01.014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	60	M2
03.11.01.019	Bangunan Gedung Perpustakaan		
03.11.01.021	Bangunan Gedung		
	Terminal/Pelabuhan/Bandar		
03.11.01.027	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2165,07	M2
03.11.01.028	Bangunan Sarana Publik	35	M2
03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
03.11.02.02	Rumah Negara Golongan II		
03.11.02.04	Mess/Wisma	277,17	M2
03.11.02.012	Bangunan Rumah Sederhana	40	M2
04.13.01	Jalan		
04.13.01.04	Jalan Desa	2100	M
05.17.03	Barang-Barang Perpustakaan		
05.17.03.01	Peta	10	Peta

Sumber: LKjIP 2022

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Pengembangan produksi kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur dikelola berdasarkan jenis usaha yang terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, usaha budidaya ikan di laut, air tawar dan payau. Adapun potensi kelautan dan perikanan yang menunjang pengembangan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1.Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3 Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

URAIAN	POTENSI
Jumlah Pulau Berpenghuni	22 pulau
Jumlah Pulau Belum Berpenghuni	190 pulau
Luas Wilayah Laut/Perairan Pesisir	2,963,582.41 ha
Panjang Garis Pantai	3,894.27 km
Alur Laut	68,404.39 ha
Kawasan Konservasi	473,919 ha
Kawasan Pemanfaatan Umum	2,421,259.03 ha
Kawasan Strategis Nasional Tertentu	387,360.04 ha
Perikanan Tangkap	
– Laut (Kapal)	22.018 unit
– Perairan Umum (Kapal)	23.660 unit
Perairan Umum	
– Sungai, Danau dan Rawa	2.235.770 ha
– Payau	200.000 ha
Perikanan Budidaya	
– Tambak	82.735,0 ha
– Kolam	3.986,1 ha
– Karamba	12.581,1 ha
– Budidaya Sawah	13,0 ha
– Budidaya laut/pantai	3.210,5 ha

Potensi Sumberdaya perikanan tangkap khususnya di wilayah perairan selat Makassar Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah dikategorikan dalam kondisi padat tangkap, sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah perairan Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali Provinsi Kalimantan Timur termasuk WPP-RI 713 yang masih belum dikelola secara optimal.

2.3.2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Perairan laut Provinsi Kalimantan Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, rumput laut, mutiara, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis

kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Adapun Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Mangrove

Perlindungan hutan mangrove pada wilayah estuaria sangat penting luas hutan Mangrove Kalimantan Timur 244.437 ha, karena selain mempunyai fungsi ekologis juga ekonomis. Secara ekologis hutan mangrove adalah sebagai penghasil sejumlah besar detritus dari serasah, daerah asuhan (*nursery ground*), mencari makan (*feeding ground*) dan sebagai tempat pemijahan (*spawning ground*). Secara fisik, hutan mangrove dapat berperan sebagai filter sedimen yang berasal dari daratan melalui sistem perakarannya dan mampu meredam terpaan angin badai. Secara ekonomis, dalam konservasi hutan mangrove juga akan diperoleh nilai ekonomis sangat tinggi. Nilai ekonomi total rata-rata sekitar Rp 37,4 juta/ha/tahun yang meliputi manfaat langsung (kayu mangrove), manfaat tidak langsung (serasah daun, kepiting bakau, nener bandeng ikan tangkap dan ikan umpan), *option value* dan *existence value*. Upaya konservasi tersebut juga mempunyai nilai dampak positif terhadap sosial-ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah estuaria, yaitu mampu memberikan beberapa alternatif jenis mata pencaharian dan pendapatan.

b. Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan karang tepi. Penyebarannya meliputi Perairan Balikpapan, Bontang, Berau, dan beberapa lokasi di pantai Kalimantan Timur. Terumbu karang adalah ekosistem yang produktif karena merupakan *fishing ground* ikan karang. Akibat cara penangkapan ikan yang destruktif, terumbu karang di Provinsi Kalimantan Timur banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah provinsi telah mulai melakukan rehabilitasi dengan menanam keranjang-keranjang beton sebagai tempat tumbuh atau perlindungan terumbu karang.

c. Padang Lamun

Ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, luas Padang Lamun Kalimantan Timur 13.119 Ha, terbagi menjadi 3 (tiga) kategori; sehat

(Tutupan > 60%) = 6.413,29 Ha (48,89%), Kurang Sehat (30-59,9%) = 6.283,92 Ha (47,90%), Tidak Sehat (<29,9%)=421,83 Ha (3,22%), sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun banyak tumbuh pada daerah relative tenang dan terdapat gugusan karang didepan sebagai penghalang. Tumbuh pada kedalaman 1-6 m dengan substrat pasir halus, pasir lumpur ataupun bercampur dengan sedikit pecahan karang. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama hewan duyung. Awalnya menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan terumbu karang harena sebelum zat-zat halus dan berbahaya menuju permukaan terumbu karang terlebih dahulu disaring oleh padang lamun, selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup terumbu karang padang lamun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat di manfaatkan sebagai bahan makanan dari alam.

Fungsi padang lamun:

1. Sebagai tempat berkembangbiaknya ikan- ikan kecil dan udang.
2. Sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi.
3. Sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut.
4. Bahan baku pupuk.
5. Bahan baku kertas.

d. Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari

Provinsi Kalimantan Timur diketahui memiliki kurang lebih 210 pulau-pulau kecil, berada di Paser (5), Penajam Paser Utara (34), Balikpapan (11), Berau (44), Kutai Kartanegara (59), Kutai Timur (29), Kutai Barat (16), Bontang (12). Dari 190 pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 11,58% pulau. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Derawan, Maratua, dll. Selain potensi wisata taman laut kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah lokasi wisata bahari di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dikembangkan.

d. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kawasan pesisir di Provinsi Kalimantan Timur rawan terjadi konflik nelayan serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang (*trawl*), pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak, potas, pengambilan terumbu karang dan penebangan mangrove dll. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki 1 (*satu*) PPNS dan 1 (*satu*) Polsus yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan melihat luasan wilayah perairan Provinsi Kalimantan Timur maka jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan perlu ditingkatkan secara kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk menjadi PPNS. Disamping itu di Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk 48 kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif yang tersebar di Kabupaten /Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas), Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.

2.3.3. Capaian Indikator Kinerja

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya (2019-2023), sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber: LKjIP 2022

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023*																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2022	Target IKK 2022	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	-	-	80	80	81	82	83	84	80	81	82.0	89.4	-	100.00	100.00	100.00	107.71	-
2	Produksi perikanan tangkap (Ton)	8.42 Juta Ton	162,593	152,027	152,027	155,516	158,938	162,593	182,730	152,233	167,042	173,996	177,514	-	100.14	107.41	109.47	109.18	-
3	Produksi perikanan budidaya (Ton)	18.44 Juta Ton	164,441	154,956	154,956	158,055	161,216	164,441	178,961	155,000	160,244	160,240	162,115	-	-	-	-	98.59	-
4	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor) (Milyar Ekor)	-	-	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7		100.00	96.30	100.00	93.10	-
5	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	-	-	65,000	65,000	70,000	1,232,000	2,264,000	3,797,000	53,206	32,000	732,500	2,075,000	-	81.86	45.71	59.46	91.65	-
6	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	-	-	4	4	4	2	3	4	5	4	2	3	-	125.00	100.00	100.00	100.00	-
7	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan (Sampel)	-	-	200	200	210	220	230	240	200	240	239	310	-	100.00	100.00	108.64	134.78	-
8	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%))	47	32	35.28	35.28	37.07	40.74	44.82	47.06	36.87	37.1	40.75	41.39	-	104.51	100.00	100.02	92.35	-
9	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektifn (Ha)	24.2 Juta Ha	-	1	1	1	289,048	297,806	297,806	1	1	289,048	293,031	-	100.00	100.00	100.00	98.40	-

Keterangan :
NSPK : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
IKK : Indikator Kinerja Kunci
*) format sesuai tabel T.C.23 Permendagri 86 Tahun

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, pencapaian indikator kinerja banyak yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat tercapai pada akhir periode.

2.3.4. Produksi Kelautan dan Perikanan

Produksi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

No	Kegiatan	2018 (ton)	2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)
A.	Perikanan Tangkap	158,098.7	152,233	167,042	173,996	177,514
	1. Tangkap Laut	113,975.5	113,164	124,172	129,341	131,956
	2. Tangkap Perairan Umum	44,123.2	39,069	42,870	44,655	33,866
B.	Perikanan Budidaya	117,059.3	155,000	160,244	160,240	162,115
	1. Budidaya Tambak	60,368.2	67,063	69,331	69,329	70,141
	2. Budidaya Kolam	4,363.9	3,783	3,911	3,911	3,957
	3. Budidaya Karamba	43,294.8	67,466	69,748	69,746	70,562
	4. Budidaya Laut/Pantai	9,031.6	6,165	6,373	6,373	6,447
	5. Budidaya Sawah	3.7	10,523	10,880	10,879	11,007
	Kaltim	275,157.1	307,233	327,286	334,236	339,629

2.3.5. Konsumsi Ikan

Nilai konsumsi ikan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6. Angka Konsumsi Makan Ikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Peningkatan/ Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	¹⁴ Rumus (13-12)/12
1	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	48	50	52	54	56	48	52,28	53,18	54,42	56,39	0,16

Sumber: LKjIP 2022

2.3.6. Ekspor Hasil Perikanan

Nilai dan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Angka Ekspor Hasil Perikanan

NO	TAHUN	NILAI EKSPOR (USD)
1.	2018	35.850.000
2.	2019	36.030.000
3.	2020	32.754.794
4.	2021	76.948.510
5.	2022	37.402.441

Sumber: LKjIP 2022

2.3.7. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan di Indonesia. Apabila NTN/NTPi lebih dari 100 maka menurut teori nelayan/pembudidaya ikan seharusnya mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi atau pendapatan nelayan/pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya. Hal ini menunjukkan pula bahwa perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan/pembudidaya ikan masih lebih tinggi dari harga kebutuhan hidup sehari-hari. Seharusnya dengan tingkat perkembangan harga ikan yang lebih baik dari harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga nelayan/pembudidaya ikan, dapat memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraaannya. Akan tetapi biasanya harga ikan yang tinggi cenderung berkaitan dengan tingkat produktivitas yang rendah sehingga menyebabkan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Secara logika dengan harga ikan yang tinggi, maka nelayan/pembudidaya ikan dapat meraup lebih banyak pendapatan. Namun hal itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil nelayan/pembudidaya ikan saja terutama yang memiliki armada dan alat penangkapan yang lebih modern. Sebaliknya bagi nelayan/pembudidaya ikan tradisional, kenaikan harga tidak bisa dinikmati karena terbatasnya kapasitas barang modal yang rentan terhadap pengaruh cuaca. Bahwa korelasi Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan dengan produksi ikan dan harga ikan adalah berbanding lurus. Dengan semakin meningkatnya produksi dan harga ikan maka NTN/NTPi akan meningkat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya dengan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Samarinda, sedangkan indikator tingkat kesejahteraan nelayan maupun pembudidayaan ikan diperoleh dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur.

Tabel. 2.8. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	% Peningkatan / Penurunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 Rumus (8-7)/7
1.	Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya	NTN	115,20	114,29	102,57	101.77	97.13	-0,66

Angka BPS Kaltim

2.3.8. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan yang terdapat pada RPD Tahun 2024-2026. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini merupakan tahun keempat RPJMD Kalimantan Timur. Pembanding capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada Tahun 2021.

Tabel. 2.9. Hasil Evaluasi Akuntailitas Kinerja

No 1	Komponen Yang Dinilai 2	Bobot 3	Nilai 2017 4	Nilai 2018 5	Nilai 2019 6	Nilai 2020 7	Nilai 2021 8
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,54	19,68	20,01	20,82	21,42
2	Pengukuran Kinerja	25%	13,44	13,44	13,75	14,38	15,31
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,98	10,88	11,10	11,33	11,33
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,88	4,25	4,46	4,59	5,83
5	Capaian Kinerja	20%	8,13	11,12	11,00	11,00	11,42
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja		53,97 Cukup	59,37 Cukup	60,32 Baik	62,11 Baik	65,30 Baik

Sumber: LHE Inspektorat Kaltim

Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Dalam perencanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan indikator kinerja dengan kriteria yang sesuai dengan tugas pokok fungsi per bidang dengan memiliki sasaran yang sesuai dengan tindak lanjut evaluasi Inspektorat Provinsi, satuannya dapat diukur dan dikontrol serta menjadi ukuran keberhasilan kinerja instansi.
- Koordinasi dengan Biro Pembangunan Daerah melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK), Biro Organisasi melalui Pelaporan Triwulanan dengan input data capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Aplikasi SIAKIP dan Bappeda Provinsi Kaltim melalui Laporan

Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Renja. selain telah dilakukan guna review penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, hal ini dilakukan untuk menggali dan memperoleh informasi guna penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan tata cara penyusunan laporan kinerja.

- c. Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengukuran kinerja atas capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, data dilaporkan secara berjenjang berdasarkan indikator kinerja eselon III dan IV dan dapat mengindikasikan tujuan, sasaran dan hasil program/kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Untuk mempermudah proses pengukuran kinerja serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam suatu kegiatan, Indikator Kinerja Utama dalam Renstra DKP Provinsi Kaltim telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan baik APBN dan APBD.

2.3.9. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian tema pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan, tabel dibawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. *(Terlampir Realisasi Anggaran)*

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui 6 Program, 41 Kegiatan, 108 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran APBD setelah perubahan sebesar **Rp. 97,589,991,747,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 83,151,933,172,-** dengan persentase capaian sebanyak **85,21%**. Sedangkan untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 25,055,870,223,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 19,348,033,522,-**. Sedangkan anggaran APBN tahun 2020 dengan 6 program dan 68 kegiatan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 1.758.723.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.748.542.232,-** dengan persentase capaian sebanyak **99,42%**.

Tabel. 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim (sesuai tabel T-C.24 Permendagri 86/2021)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS DAN UPTD)	36,651,420,279	36,950,828,753	40,216,697,000	47,158,498,797	48,691,412,075	31,092,698,917	31,983,800,341	35,424,974,012	39,826,622,074	11,496,812,757	84.83	86.56	113.53	118.41	423.52	0.08	(0.10)
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	3,312,885,000	1,431,225,000	3,629,995,000	3,986,235,800	4,296,458,400	2,965,431,551	1,236,487,890	3,449,833,835	3,855,107,558	734,327,702	89.51	86.39	105.22	103.40	585.09	0.14	(0.08)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	17,156,600,680	3,401,375,000	21,616,945,000	25,808,566,657	23,868,165,500	15,416,842,418	2,926,020,901	17,179,335,544	21,251,309,706	2,299,386,894	89.86	86.02	125.83	121.44	1,038.02	0.20	(0.07)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (DINAS DAN UPTD)	6,753,910,000	5,041,956,000	10,755,360,000	14,813,520,593	11,008,291,134	6,253,664,003	4,221,468,707	10,503,571,175	13,172,435,724	750,481,430	92.59	83.73	102.40	112.46	1,466.83	0.19	(0.03)
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,132,570,050	1,211,904,500	3,300,000,000	3,874,920,000	3,735,029,400	1,942,425,300	1,083,730,757	2,761,498,727	3,298,339,288	702,777,281	91.08	89.42	119.50	117.48	531.47	0.21	(0.01)
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (DINAS DAN UPTD)	371,544,000	146,165,000	1,409,000,000	1,948,249,900	1,942,504,500	304,710,500	133,693,800	899,538,999	1,748,118,822	407,269,544	82.01	91.47	156.64	111.45	476.96	0.42	0.26
TOTAL		66,378,930,009	48,183,454,253	80,927,997,000	97,589,991,747	93,541,861,009	57,975,772,689	41,585,202,396	70,218,752,292	83,151,933,172	16,391,055,608							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

1. Atasi pengangguran, karena di Kalimantan Timur jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang.
2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan.
4. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.
5. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.
6. Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) dan WPP 716 (Laut Sulawesi).
7. Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang belum merata.
8. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk bahan baku industri.
9. Tuntutan Penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan.

b. Peluang meliputi :

1. Dukungan Pemerintah pada sub sektor kelautan dan perikanan semakin besar.
2. Teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang.
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi;
4. Makin bertambahnya pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Kelautan dan perikanan merupakan bidang yang vital dalam perekonomian bangsa Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah memperhatikan dan mengembangkan kelautan dan perikanan menjadi sektor yang strategis untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat lokal. Adapun isu-isu dan problematikanya seharusnya dapat diselesaikan secara seksama dengan melibatkan semua komponen agar dapat diselesaikan secara cepat dan cermat. Peluang perkembangan kelautan dan perikanan Indonesia adalah adanya potensi pengembangan terkait sumber daya dan teknologi serta prospek pengembangan terkait dengan pasar internasional dan domestik. Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan kelautan dan perikanan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dibagi menjadi 4 (empat) **ASPEK**: (1) Sumber Daya Manusia; (2) **Ekonomi Wilayah**; (3) Lingkungan Hidup; (4) Tata kelola pemerintahan; dari keempat aspek tersebut sektor kelautan dan perikanan masuk pada poin 2 (dua) dalam hal dimaksud tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan produksi, pengawasan sumber daya, pengelolaan ruang laut dan peningkatan daya saing produk serta pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik

migas maupun non migas. Perkembangan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal. Tetapi pada kenyataannya, sektor kelautan dan perikanan masih mempunyai beberapa permasalahan, antara lain budidaya ikan yang masih terbatas pada komoditas utama/konvensional, usaha penangkapan dan budidaya ikan masih diusahakan secara sederhana/tradisional, produktivitas perikanan umumnya masih dibawah potensi, mutu produksi kelautan dan perikanan yang masih rendah karena kurang didukung oleh unit pengolahan yang efisien dan terbatas, serta belum optimalnya kelembagaan nelayan/pembudidaya/pengolah hasil perikanan. Jika dipetakan secara lebih rinci akar masalah dan masalah pokoknya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah “Belum Terwujudnya Peran Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan secara Ekonomis, Ekologis dan Sosial-Budidaya”.

Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai indikasi permasalahan yang ada disetiap unit kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Satu diantara kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sektor kelautan dan perikanan secara baik dan akuntabel menjadi satu diantara permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan kelautan dan perikanan yang lebih berkualitas, Dinas Kelautan dan Perikanan masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencanaan yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur.

Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan kerjasama sinergis (dan pembagian kerja)

antar pengampu kepentingan yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*) dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan nelayan/pembudidaya/pengolah perikanan masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan “**belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Kelembagaan yang menjamin keberpihakan kepada pelaku usaha perikanan masih lemah.
- b. Masih lemahnya kelembagaan pengembangan komoditas dan pemasaran perikanan.
- c. Pengembangan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha belum optimal
- d. Data dan informasi bidang kelautan dan perikanan belum berkembang
- e. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana prasarana.

2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap

Satu diantara tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta memperbaiki mutu hasil perikanan. Diharapkan dari peningkatan tersebut akan meningkatkan pendapatan, memperbesar perdagangan antar pulau dan ekspor serta memperluas kesempatan kerja. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan mengalami perkembangan yang semakin pesat dan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan, ekonomi lokal dan timbulnya *multiplier effect* secara sektoral maupun spasial baik nasional, regional maupun lokal.

Dalam pengembangan produksi perikanan budidaya, Kalimantan Timur

masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional, dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap adalah disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil. Melihat kondisi ini diperlukan percepatan pengembangan industri perikanan di daerah. Untuk percepatan ini pengembangan ini perlu dukungan pemerintah maupun swasta. Deregulasi juga dinilai perlu sehingga pemerintah diminta tidak hanya mengedepankan hukuman, dimana agar optimalisasi sumber perikanan tangkap bisa tercapai.

Ketersediaan dalam penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal. Sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan BBM yang tepat bagi kapal-kapal ikan dikarenakan sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasional terkait dengan dokumen kapal yang valid. Alokasi yang diberikan untuk SPDN (*Solar Package Dealer Nelayan*) seringkali sudah habis dipertengahan bulan, terkait dengan musim melaut nelayan. Skema pembelian BBM oleh nelayan, umumnya BBM dibeli oleh juragan yang selanjutnya menyuplai paket BBM dan sembako kepada nelayan. Dinamika ketersediaan BBM ini juga menjadi satu diantara permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas perikanan.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan **“belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya ketersediaan bibit dan benih unggul

- b. Belum optimalnya penanggulangan terhadap hama dan penyakit ikan serta jaringan irigasi tambak
- c. Kecenderungan peningkatan harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya
- d. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil
- e. Regulasi/aturan penangkapan ikan yang selalu berubah-ubah
- f. Ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan masih belum sesuai kebutuhan

3. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan perdagangan produk hasil kelautan dan perikanan. Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumber daya yang dimiliki dan arah kebijakan pembangunan, Kalimantan Timur memiliki prospek untuk mengembangkan agribisnis kelautan dan perikanan, sayangnya agribisnis yang ada belum berdaya saing. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi pemutar roda ekonomi daerah menggantikan sektor tambang.

Dalam era otonomi daerah, komoditas kelautan dan perikanan memerlukan komitmen pemerintah daerah agar mampu bersaing di pasar internasional. Pelaku bisnis merupakan institusi yang menjembatani kebijakan makro dan regional atau antara kebijakan sektor/subsektor dan antar daerah penghasil untuk dioperasionalkan. Tata kelola sistem dan usaha agribisnis kelautan dan perikanan Kalimantan Timur saat ini masih belum digarap dengan maksimal. Satu diantara kendala utama adalah infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih jauh dari kata bagus, hal ini membuat industri hilir urung diminati oleh investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur. Selain itu kurangnya tenaga penyuluh perikanan juga menjadi kendala dalam pengelolaan sistem agribisnis. Penyuluh perikanan merupakan ujung tombak di lapangan karena memiliki fungsi fasilitator, mediator dan pemberdayaan masyarakat.

Nelayan/pembudidaya selaku utama di sektor kelautan dan perikanan belum mendapat kemitraan yang baik dengan pelaku usaha/pengolah produk hasil perikanan. Sesungguhnya hal ini penting dilakukan sebagai langkah memudahkan pemasaran hasil komoditi kelautan dan perikanannya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi kelautan dan perikanan akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli, sehingga hasil komoditi kelautan dan perikanan terjamin pemasarannya. Selama ini banyak permasalahan yang terjadi ditingkat pelaku utama

(nelayan/pembudidaya) karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya. Sulitnya pemasaran ini bukan hanya dikarenakan dukungan infrastruktur yang belum tersedia dengan baik, juga disebabkan karena para nelayan/pembudidaya belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dilakukan khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi kelautan dan perikanan dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan **“belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan
- b. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern
- c. Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- d. Minimnya kerjasama bidang usaha perikanan
- e. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang
- f. Mutu produk hasil perikanan yang masih rendah
- g. Tenaga pendamping perikanan belum diberdayakan secara optimal
- h. Kecukupan jumlah Penyuluh Perikanan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja

4. Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi

Pemanasan global (*global warming*) merupakan peningkatan temperatur atmosfir bumi akibat meningkatnya intensitas efek rumah kaca (*green house effect*) pada atmosfir bumi. Peningkatan intensitas efek rumah kaca tersebut disebabkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti *Green House Gas* (GHG). Pemanasan global antara lain berdampak pada perubahan iklim global berupa pergeseran peta iklim secara global, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai dan kenaikan permukaan laut yang banyak menimbulkan kerugian dan mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Kondisi ini menyebabkan banyak hambatan pengembangan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Timur. Isu pemanasan global sepatutnya dapat diatasi apabila ada koordinasi antara pemerintah daerah, pusat dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Pengelolaan kawasan konservasi kelautan dan perikanan khususnya kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis yang menyerupai fungsi ekologis hutan, maka kawasan mangrove perlu dikategorikan sebagai hutan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di Kalimantan Timur. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan **“belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Makin besarnya luas lahan kritis akibat pembukaan usaha perikanan
- b. Masih banyaknya lahan budidaya khususnya tambak yang ditelantarkan setelah pembukaan hutan mangrove
- c. Belum terintegrasi tata ruang wilayah laut dan darat, agar pengembangan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan peruntukan yang disusun berdasarkan karakteristik wilayah tanpa mengorbankan keberntingan lingkungan
- d. Belum tersedianya sistem perhitungan dan pengelolaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena

keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Kalimantan Timur yang berpotensi mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Selain itu praktik-praktik (*Illegal Unreported and Regulated*) IUU Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716, baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing menyebabkan kerugian baik aspek sosial, ekologi/lingkungan maupun ekonomi.

Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa wilayah penangkapan ikan terjadi penurunan stok ikan, mengacu pada Permen KP nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Disisi lain kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur masih lemah, seiring dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan perikanan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi.

Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan dalam penanggulangan kegiatan *IUU Fishing*.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan “**ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan**”dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan
- b. Belum optimalnya pengawasan *Illegal Unreported dan Unregulated Fishing*
- c. Masih terjadi konflik sosial antar nelayan andon dan pelaku usaha non perikanan
- d. Makin maraknya kegiatan *Illegal Unreported dan Unregulated Fishing*

Dari analisa diatas, permasalahan yang dihadapi Dinas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kendala Utama (Strategis)			
1.	Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	Belum optimalnya produksi perikanan hasil tangkapan	a. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil b. Regulasi/aturan penangkapan ikan yang selalu berubah-berubah c. Ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan masih belum sesuai kebutuhan d. Kepatuhan terhadap perijinan perikanan tangkap masih minim
2.		Belum optimalnya produksi budidaya perikanan	a. Penanggulangan terhadap hama dan penyakit ikan masih lemah b. Kerusakan jaringan irigasi tambak akibat sedimentasi c. Tingginya harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya perikanan d. Pengembangan komoditas budidaya unggulan belum maksimal e. Kelembagaankelompok pembudidaya (SDM dan Bimtek) belum optimal f. Sarana dan Prasarana Budidaya belum optimal
3.	Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah	Belum optimalnya pengembangan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan	a. Rendahnya konsumsi makan ikan b. Sistem promosi pasar belum berinovasi dan modern c. Promosi kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			(GEMARIKAN) belum optimal
4.	Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan belum optimal	Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi	a. Makin besarnya luas lahan kritis akibat pembukaan usaha perikanan b. Masih banyaknya lahan budidaya khususnya tambak yang telah dibiarkan setelah pembukaan hutan mangrove c. Belum adanya kejelasan konsep tata ruang wilayah agar pengembangan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan peruntukan yang disusun berdasarkan karakteristik wilayah tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan d. Belum tersedianya sistem perhitungan dan pengelolaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5.	Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan	Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan	a. Minimnya sarpras dan SDM untuk operasional pengawasan terhadap <i>IUU Fishing</i> dan <i>Destructive Fishing</i> b. Terjadinya konflik sosial antara nelayan andon dan pelaku usaha non perikanan d. Kurangnya edukasi terhadap para pelaku perikanan akan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan e. Lemahnya tata kelola pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan (pembudidaya, nelayan dan pengolahan hasil perikanan) f. Speed boat yang ada belum bisa menjangkau seluruh area

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pengawasan yaitu sampai 12 mil g. Jumlah pengawas yang masih kurang
6.	ya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah	um optimalnya mutu produk hasil perikanan	a. Pengawasan mutu produk hasil perikanan masih kurang b. Masih banyaknya UKM hasil perikanan yang belum memiliki SKP c. Penerapan mutu produk hasil perikanan belum berkembang
7.	Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui peningkatan produksi perikanan (budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan unggulan (udang windu) dan ikan air payau/laut	a. Pengembangan sarpras dan komoditas benih unggulan belum maksimal b. Keterbatasan jumlah pasokan benih unggul daerah c. Ketergantungan induk unggulan dari daerah lain
8.		Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan yang spesifik	a. Pengembangan sarpras dan komoditas benih spesifik belum maksimal b. Keterbatasan jumlah pasokan benih lokal
Kendala Penunjang (Operasional Perkantoran)			
9.	Belum optimalnya pelayanan, penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan yang kompetensi dan	Belum optimalnya kualitas pelayanan perkantoran	a. Masih rendahnya pelayanan administrasi perkantoran b. Dukungan dana operasional perkantoran masih rendah
10	sarana, prasarana yang belum memadai serta kualitas akuntabilitas kinerja belum maksimal	Belum optimalnya sarana dan prasarana ASN	a. Masih rendahnya infrastruktur sarana prasarana ASN b. Kualitas fasilitas ruang kerja/arsip yang belum memadai
11.		Belum optimalnya kualitas sumber daya ASN	a. Masih rendahnya dukungan dana pengembangan SDM b. Perlunya peningkatan IPTEK SDM c. Rendahnya disiplin budaya kerja
12.		Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja PD	a. Data dan informasi bidang pembangunan kelautan dan perikanan belum berkembang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			b. Capaian kinerja program/ kegiatan belum maksimal

3.2. Slogan, Tema dan Prioritas Pembangunan

Sesuai RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, Slogan Pembangunan **“MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA”**, sedangkan Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. 2024:

Peningkatan daya saing sdm dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

2. 2025:

Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing.

3. 2026:

Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN

Upaya pencapaian Tema tersebut, ada 8 (delapan) Prioritas Pembangunan, berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
- 3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;**
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Dari tema pembangunan di atas tampak jelas bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan berhubungan dengan prioritas pembangunan ketiga. Berkaitan dengan prioritas pembangunan tentang pengembangan ekonomi kerakyatan,

Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu mendefinisikan bagaimana produktivitas kelautan dan perikanan dapat dikembangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dengan pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) kelautan dan perikanan akan memberikan daya dukung dalam meningkatkan daya saing produk yang berimbas pada perekonomian daerah. Dengan disiplin yang tinggi agar kelautan dan perikanan juga dirasakan oleh masyarakat maka keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam prioritas pembangunan ketiga pada RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Dengan pemanfaatan yang optimal, baik pemanfaatan sebagai bahan baku energi terbarukan maupun sebagai produk mentah dengan tanpa meninggalkan keseimbangan lingkungan akan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

3.3. Telahaan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Visi

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) yaitu dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)** yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)** yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)** yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-perundangan, serta tugas KKP yang dimandatkan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pokok**

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke-4 serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-6 dan ke-7 serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-6 dan ke-7 serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. **Kebijakan Lintas Bidang**

- a. Pengarusutamaan Gender.
- b. Pembangunan Kewilayahan.
- c. Adaptasi Perubahan Iklim.
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan menjadi satu daintara ujung tombak penciptaan *blue economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

a. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan menjadi satu daintara ujung tombak penciptaan *blue economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

1. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi daratan seluas 12,73 Juta Ha terdiri dari 10 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak Malaysia
2. Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan minapolitan, kampung budidaya dan *Major Project* meliputi:

- Peruntukan Perikanan Tangkap (Kota Samarinda) sesuai Perda Kota Samarinda No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda 2014-2034
- Peruntukan Perikanan Tangkap (Kabupaten Kutai Kartanegara) sesuai SK Bupati No.234/SK-BUP/HK/2011
- Peruntukan Pengembangan Kampung Budidaya (Berau dan Kutai Kartanegara) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 47 Tahun 2021 tentang Kampung Budidaya
- Peruntukan *Major Project* Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya (Berau, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).

3. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi :

- Pengembangan komoditas utama perikanan meliputi ikan laut dan ikan perairan umum daratan adalah (a). Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Sungai Pinang di Kota Samarinda; (b). Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Barat dan Balikpapan Selatan di Kota Balikpapan; (c). Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara di Kota Bontang; (d). Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; (e). Kecamatan Penajam dan Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara; (f). Kecamatan Derawan, Talisayan, Maratua, Biduk-Biduk dan Batu Putih di Kabupaten Berau; (g). Kecamatan Tanjung Harapan di Kabupaten Paser; (h). Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi PPI Manggar di Kota Balikpapan, PPI Selili di Kota Samarinda, PPI Tanjung. Limau di Kota Bontang, PPI Api-Api di Kabupaten Penajam Paser Utara, PPI Sambaliung di Kabupaten Berau, PPI Sengata di Kabupaten Kutai Timur.

4. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi pengembangan komoditas utama perikanan meliputi ikan air laut dan ikan air tawar serta rumput laut adalah (a). Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara; (b). Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat di Kota Balikpapan; (c). Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Tenggarong, Loa Kulu, Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Kaman, Sebulu, Tabang, Loa Janan, Tenggarong Seberang dan Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara; (d) Kecamatan Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Muara Samu, Paser Balengkong, Tanah Grogot dan Tanjung Harapan di Kabupaten

Paser; (e). Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat di Kota Bontang; (f). Kecamatan Batu Putih, Biantan, Biduk-Biduk, Derawan, Gunung Tabur, kelay, Maratua, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, Tj. Redeb dan Teluk Bayur di Kabupaten Berau; (g). Kecamatan Batu Ampar, Bengalon, Busung, Kaliorang, Karangan, Kaubun, Kong Beng, Long Masengat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangata Utara, Sangata Selatan, Sangkulirang, Telen dan Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Timur; (h). Kecamatan Barong Tongkok, Bentian Besar, Bongan, Damai, Jempang, Laham, Linggang Bigung, Long Apari dan Long Bagun di Kabupaten Kutai Barat; (i) Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang dan Sungai Pinang di Kota Samarinda; (j). Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung dan Laham di Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau.
6. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi :
 - Menjaga kelestarian, rehabilitasi dan revitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang.
 - Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
 - Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri.
 - Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil.
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan.
 - Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 - Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai

dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan dimasa yang akan datang. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di pedesaan dan pesisir.

Isu-isu strategis KLHS yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); perubahan iklim; penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam; belum optimalnya pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; kesejahteraan rakyat; pertanian dan ketahanan pangan. Dalam proses penyusunan KLHS, implementasi program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah berkontribusi untuk menjawab isu-isu KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (2) Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur; (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (5) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan poin 2 (dua) **Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.**

a. Isu Lingkungan

Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkan tindakan rehabilitasi atau konservasi dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil
- *Over fishing* akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat
- Pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan
- Masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove

b. Isu Kebijakan

Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Lemahnya implementasi suatu peraturan terkait perlunya pembatasan perijinan baru kapal ikan di atas 6 GT
- Ketersediaan petugas syahbandar perikanan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja

Masih perlunya penyesuaian dalam hal implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Lemahnya implementasi terkait kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik

c. Isu Kelembagaan

Isu yang teridentifikasi adalah :

- Penguatan kelembagaan masyarakat/pemberdayaan kelompok masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Konflik antar nelayan (nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/nasional)
- Rendahnya pemahaman hukum sektor kelautan dan perikanan serta penegakannya.
- Perlunya penguatan kapasitas UPT Pusat, UPT Provinsi/Kab/Kota, serta Balai Riset.
- Perlunya penguatan kapasitas kelompok usaha bidang kelautan dan perikanan
- Optimalisasi tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan di Kalimantan Timur.

d. Isu Infrastruktur

Pada isu kelompok infrastuktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi dan distribusi hasil tangkapan, tidak efisiennya proses produksi dan distribusi hasil tangkapan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup :

- Minimnya sarana dan prasarana di wilayah kepulauan.
- Restrukturisasi armada perikanan tangkap.
- Belum optimalnya fungsi dan peran Pelabuhan Perikanan.

e. Isu Ketahanan Pangan

Isu ini muncul mencakup di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan

produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama, mengingat sumberdaya ikan di laut teritorial sebagai komoditas utama perikanan tangkap sedang mengalami penurunan stok. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Harga komoditas fluktuatif.
- Tingginya harga pakan berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya, terutama budidaya air tawar.
- Masalah kawasan pesisir sudah rusak dan disebabkan penggalian pasir yang bersifat masif untuk itu sulit dikembangkan usaha kegiatan budidaya perikanan.
- Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan pemasaran.
- Menurunnya kualitas mutu benih dan induk ikan yang beredar di masyarakat.
- Masih rendahnya minat pelaku usaha budidaya/Pokdakan untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan *food safety* dan jaminan mutu.
- Kurangnya kepatuhan/ketaatan penerapan standarisasi jaminan mutu di UPI, khususnya skala UMKM.
- Masih terbatasnya bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan.
- Maraknya alih fungsi lahan terutama untuk budidaya perikanan.
- Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu.

f. Isu Pendanaan

Isu kelompok pendanaan didominasi oleh sumber dana dalam mengatasi permasalahan dalam perikanan adalah :

- Belum optimalnya sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).
- Identifikasi potensi sumber dana dari Pemerintah Pusat (APBN/DAK) untuk mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan.
- Adanya dukungan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari kebijakan subsidi.
- Identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya dari swadaya masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, pemerintah telah menetapkan cetak biru kebijakan kelautan Indonesia 2021-2025 yang berbasis pada konsep

ekonomi biru (*blue economy*). Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Timur adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan berdasarkan penerapan konsep *blue economy*. Konsep *blue economy* berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Dengan kata lain, *blue economy* tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari, konsep *blue economy* selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah melalui transformasi sektor kelautan dan perikanan.

Transformasi utama dari penerapan *blue economy* meliputi lima kebijakan prioritas yaitu :

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota;
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pembersihan sampah plastik melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Melalui kebijakan prioritas tersebut, maka penyelarasan akselerasi program terobosan perlu dilakukan adalah implementasi program yang mendukung semua pengelolaan kelautan dan perikanan yang berbasis ekologi dan keberlanjutan.

Blue Economy sejalan dengan *Blue Carbon* dimana Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 54.716 km dan luas perairan lautnya sekitar 5,8 juta kilometer. Luasnya perairan laut Indonesia memberikan berkah potensi *blue carbon* Indonesia mencapai 3,4 giga ton (GT) atau 17% dari *blue carbon* dunia.

Blue carbon tersebar dalam ekosistem mangrove, hutan bakau dan padang lamun. Pelestarian ekosistem ini akan memberikan manfaat penyerapan emisi karbon.

Manfaat Blue Carbon Secara umum seharusnya dapat dipahami bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh kita tentu akan menghasilkan residu secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan, tentu kita secara alamiah akan menghasilkan karbon dan secara alamiah pula karbon tersebut akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ekosistem karbon biru merupakan penyerap karbon paling efektif

dibandingkan ekosistem lain. Lingkungan pesisir berperan besar dalam menyelamatkan umat manusia bahkan bumi dari dampak perubahan iklim yang kian memburuk. Pelestarian ekosistem karbon biru menjadi solusi alami terbaik sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang dipicu oleh efek rumah kaca atau peningkatan jumlah CO₂ dan beberapa gas lain, menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Kondisi tersebut menjadi pemicu mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem baik akibat kebakaran dan kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut sehingga daratan akan tenggelam. Beberapa efek rumah kaca tersebut tentu sangat merugikan dan berbahaya apabila tidak segera diperbaiki. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir baik hutan mangrove, bakau, lamun, lahan gambut dan rawa asin dapat memberi manfaat untuk mencegah erosi, melindungi perumahan warga ketika pasang surut, badai dan banjir ketika menghantam, menangkap polutan yang kerap ada di udara dan perairan, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup yang terkhusus berada di wilayah pesisir. Selain itu, ekosistem karbon biru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber ekonomi dengan memberikan servis ekologi. Pengelolaan daerah pesisir dapat menjadi daya tarik dan berpotensi wisata yang menarik pengunjung Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memperluas kawasan konservasi laut sampai dengan 30% dari total kawasan perairan Indonesia. Salah satu hal inilah menjadikan Kalimantan Timur juga merupakan paru-paru dunia, yang mana perannya sangat penting dalam program penurunan emisi karbon. Kalimantan Timur memiliki luas laut 4,54 juta Ha yang terdiri dari 109.832 Ha merupakan pengelolaan perikanan budidaya dan 3.854 Ha wilayah penangkapannya serta didukung pula dengan 217.302 Ha luas lahan hutan bakau/mangrove.

Manfaat *Blue Carbon* Secara umum seharusnya dapat dipahami bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh kita tentu akan menghasilkan residu secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan, tentu kita secara alamiah akan menghasilkan karbon dan secara alamiah pula karbon tersebut akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ekosistem karbon biru merupakan penyerap karbon paling efektif dibandingkan ekosistem lain. Lingkungan pesisir berperan besar dalam menyelamatkan umat manusia bahkan bumi dari dampak perubahan iklim yang kian memburuk. Pelestarian ekosistem karbon biru menjadi solusi alami terbaik sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang dipicu oleh efek rumah kaca atau peningkatan jumlah CO₂ dan beberapa gas lain, menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Kondisi tersebut

menjadi pemicu mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem baik akibat kebakaran dan kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut sehingga daratan akan tenggelam. Beberapa efek rumah kaca tersebut tentu sangat merugikan dan berbahaya apabila tidak segera diperbaiki. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir baik hutan mangrove, bakau, lamun, lahan gambut dan rawa asin dapat memberi manfaat untuk mencegah erosi, melindungi perumahan warga ketika pasang surut, badai dan banjir ketika menghantam, menangkap polutan yang kerap ada di udara dan perairan, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup yang terkhusus berada di wilayah pesisir. Selain itu, ekosistem karbon biru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber ekonomi dengan memberikan servis ekologi. Pengelolaan daerah pesisir dapat menjadi daya tarik dan berpotensi wisata yang menarik pengunjung

Konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dibagi menjadi 4 (empat) aspek, terdiri dari; Sumber Daya Manusia, Ekonomi Wilayah, Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pemerintahan, dari keempat aspek tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai salah satu upaya penting guna mewujudkan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sub sektor Kelautan dan Perikanan, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (2) Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur; (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (5) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan menindaklanjuti perwujudan tema tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Adapun Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPD 2024-2026 yang menjadi perwujudan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai tema pembangunan adalah :

Prioritas Pembangunan 3 : Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan

Langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Ketiga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan “**Tujuan Renstra**” untuk pelaksanaan pembangunan tiga tahun kedepan dengan mengambil sasaran pelaksanaan yang menjadi kewenangannya dalam RPD tahun 2024-2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

<u>Tujuan Renstra DKP Prov Kaltim :</u> 1. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas 2. Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mewujudkan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa Sasaran untuk terwujudnya kemandirian ekonomi melalui sektor Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

- SASARAN** :
- 1. Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - 2. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan
 - 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

**Hubungan DKP Prov Kaltim dalam mendukung
Tema dan Prioritas Pembangunan Pemprov Kaltim**

SLOGAN PEMBANGUNAN

“MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA”

Tema Pembangunan Kaltim

2024	2025	2026
Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan	Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing	Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN



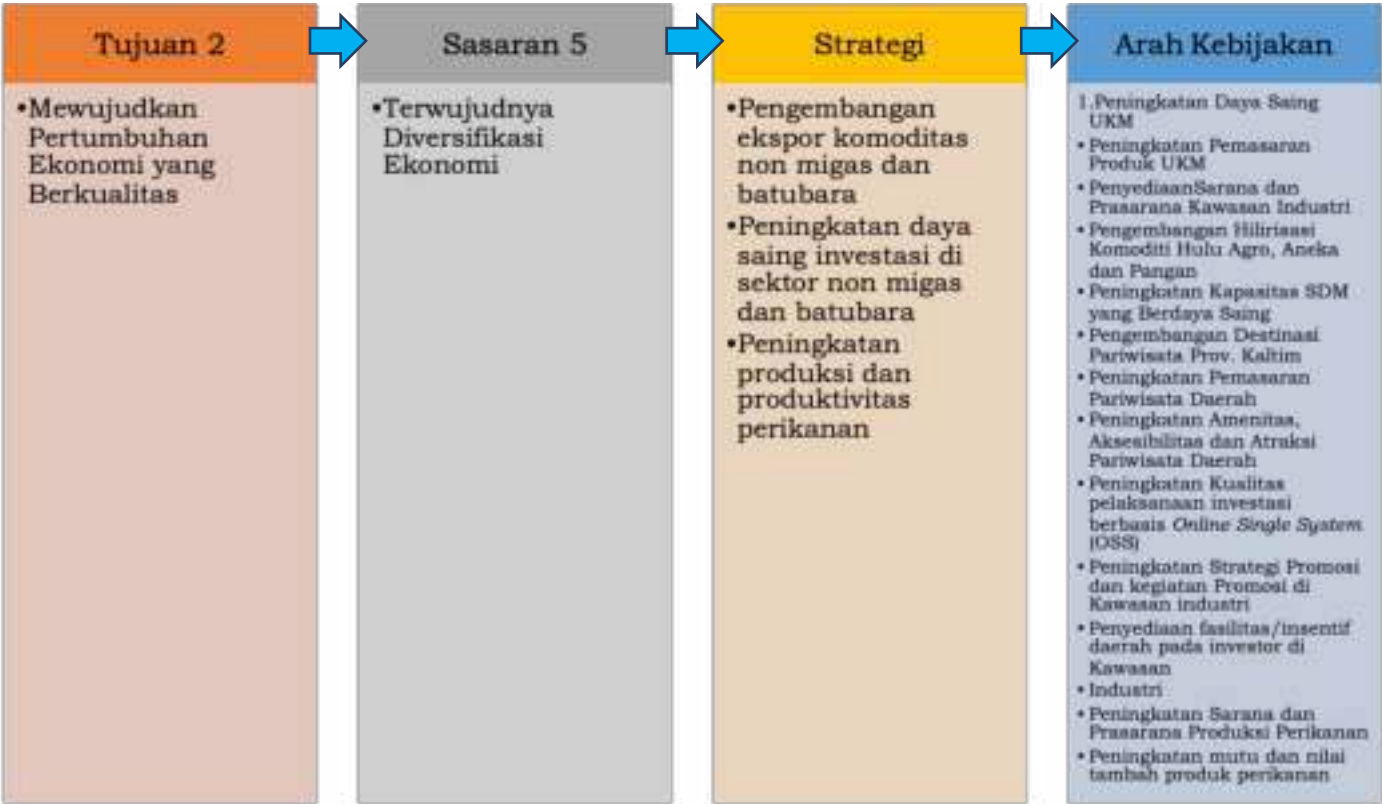
Prioritas Pembangunan RPD 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama. |
|--|

Dari diagram diatas untuk menjamin terwujudnya Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan prioritas pembangunan ketiga untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta kondisi potensi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan. Pemanfaatan secara optimal Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan tujuan utama agar meningkatnya kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta diselesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel dapat terwujud. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan diarahkan untuk menciptakan kondisi pemungkin dan menyelesaikan permasalahan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim selama kurun waktu tiga tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perikanan dalam kerangka pelaksanaan RPD 2024 -2026 khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Gambar 5. Tujuan 2, Sasaran 5, Strategi dan Arah Kebijakan



Secara tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur juga berperan dalam pencapaian Tujuan 4 RPD sebagai berikut:

Gambar 6. Tujuan 4, Sasaran 11, Strategi dan Arah Kebijakan



Dalam mencapai tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan tujuan dan sasaran yang akan diambil. Strategi digunakan untuk mencapai tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya bidang kelautan dan perikanan, dan kebijakan diambil dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan pada Bab V.

Adapun pernyataan dari tujuan dan sasaran RPD Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim (sesuai tabel T-C.25 Permendagri 86/2017)

Tujuan/Sasaran RESNTRA	Indikator	Target			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	4.50	4.70	4.90					
1.Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Produksi Perikanan (Ton)	390,000	396,000	402,000	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	190,000	195,000	200,000
	2. Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)	100	100	100	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	200,000	201,000	202,000
						Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4,181,000	4,393,750	4,612,500
						Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Ekor)	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	59.83	59.9	60	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan)	7	11	15
						Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	70	80	90
2.Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	327,819.31	327,819.31	330,814.88	Program pengelolaan kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	75,45	77.12
	Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pelaku Usaha)	280	290	300	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	100	100	100
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)	78.50	79.30	80.01					
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	85	85.50	86					
3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin)	85	85.50	86	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
					Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4

Tujuan/Sasaran RESNTRA	Indikator	Target			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
					Daerah (UPTD PMHP)	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPALSEBULU)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100

Dalam rangka melaksanakan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur RPD 2024-2026, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*major project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026 tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* di DKP yaitu Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting dan Rajungan) yang berlokasi di 6 (enam) Kabupaten/Kota; Berau; Penajam Paser Utara; Paser; Bontang; Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dalam pelaksanaannya, *major project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta Direktif Kepala Daerah. Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersinergi antara DKP Provinsi dengan DKP Kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

Adapun *major project* Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan

No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume (Ton)		
			2024	2025	2026
1	Berau	Udang	900		
		Rumput laut	-		
		Bandeng	943		
		Kepiting	593.90		
		Rajungan	286.10		
		Jumlah	2,723		
2	Penajam Paser Utara	Udang	360		
		Rumput laut	7,676		
		Bandeng	462		
		Kepiting	24.8		

No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume (Ton)		
			2024	2025	2026
		Rajungan	17.4		
		Jumlah Total	8,540.2		
			11,263.2		
3	Paser	Udang		1,955	
		Rumput laut		2,777	
		Bandeng		7,260	
		Kepiting		101.8	
		Rajungan		108.7	
4	Bontang	Udang	Jumlah	12,203	
		Rumput laut		2	
		Bandeng		4,206	
		Kepiting		5	
		Rajungan		-	
				443.9	
		Jumlah Total	4,657		
			16,859		
5	Kutai Kartanegara	Udang			27,211
		Rumput laut			10,503
		Bandeng			5,877
		Kepiting			411.6
		Rajungan			30.6
6	Kutai Timur	Udang	Jumlah	44,033.20	
		Rumput laut			24
		Bandeng			109
		Kepiting			13
		Rajungan			104.2
		Jumlah Total		250.20	
				44,283.40	
	Total		11,263.20	16,859	44,283.40

Cascading Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Cascading Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK Indikator: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas Indikator: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah Indikator: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat an (Indeks)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi Indikator: LPE Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan Indikator:	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
						Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
			1. Produksi Perikanan (Ton) 2. Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)			Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat
						Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan
								Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
						Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai,	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
						Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia
								Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan
									Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana
						Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) (Dinas)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
								Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat
								Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Unit Teknis Air Payau

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
								Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (milyar ekor) (UPTD. Manggar)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab
								Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar
					Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Jumlah Prasarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
					Tawar (Ekor) (UPTD. Sebulu)		Payau/Laut /Tawar	Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar
								Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Indikator: 2. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan) (Dinas)	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
								Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

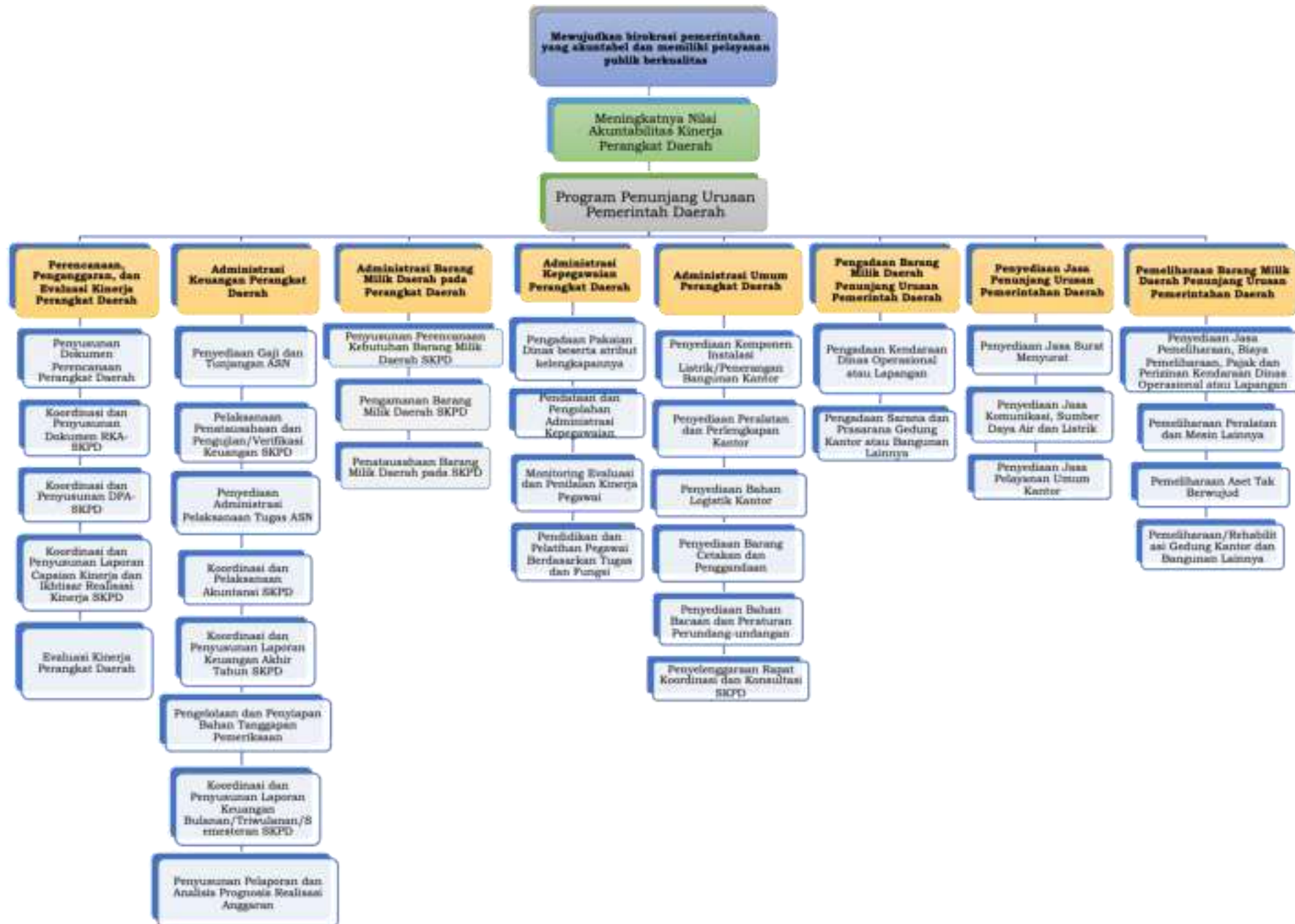
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						Menengah dan Besar	Skala Menengah dan Besar		
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas
								Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir
					Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%) (UPTD. PMHP)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
			Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan Indikator:	Program pengelolaan kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Kawasan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
								Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
			1. Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)		yang berlaku (%)			Penetapan dari Pemerintah Pusat	
								Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi
								Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
						Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomenda si Perizinan Pemanfaata n Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi
								Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan
								Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan
								Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan
								Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
								Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
								Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			2. Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan (%)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
								Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha

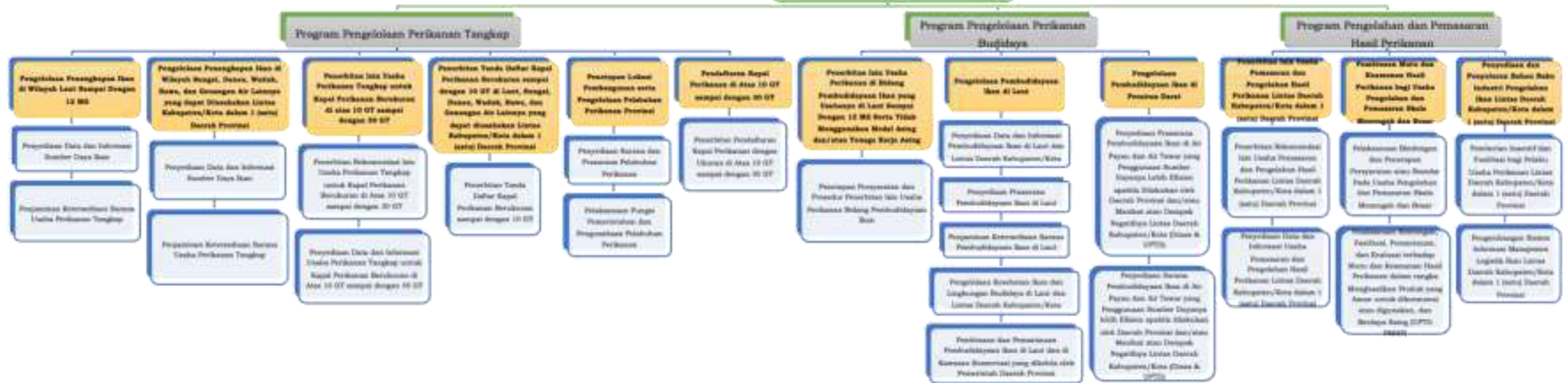
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
			(Pelaku Usaha)					Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
								Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif
						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
								Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

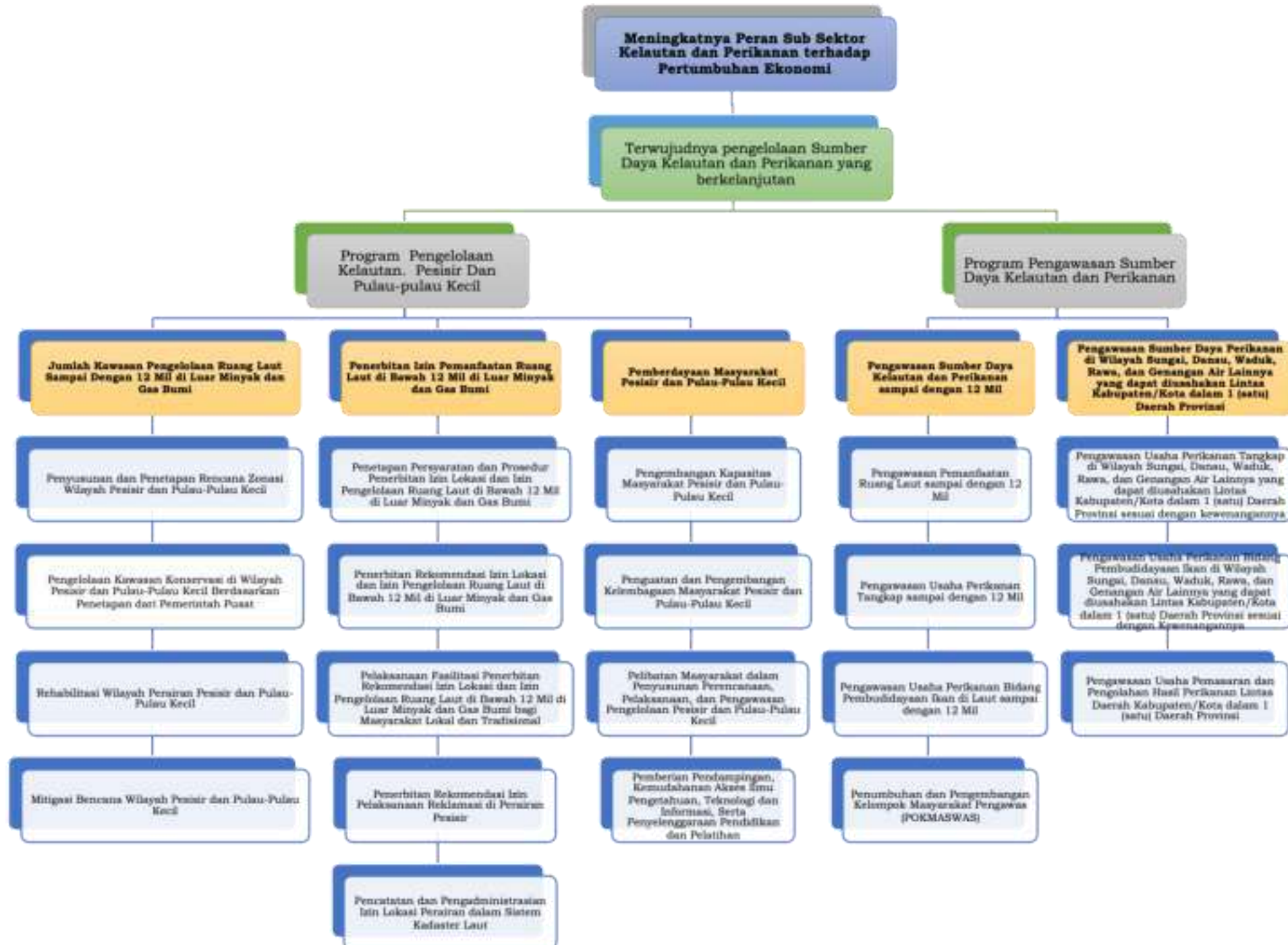
Gambar 7. Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan



Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memainkan peran yang sangat penting dalam rangka mendukung transformasi ekonomi sebagai jalan keluar atas permasalahan dan kesadaran untuk melakukan perubahan dalam pembangunan ekonomi yang selama ini bergantung pada eksploitasi SDA yang terbarukan. Adapun komoditas unggulan Kelautan dan Perikanan berupa ikan dan udang memiliki potensi hilirisasi industri pengolahan yang potensial untuk dikembangkan, selain itu perikanan juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan serta menurunkan intensitas emisi karbon yang berpengaruh terhadap perbaikan lingkungan (budidaya ramah lingkungan/ *silvofishery*, rehabilitasi mangrove dan terumbu karang).

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur adalah pembangunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *Blue Economy* sebagai terjemahan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Transformasi perekonomian ini dalam pelaksanaannya diharapkan mampu menjawab permasalahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakni: permasalahan penurunan kualitas perekonomian kerakyatan yang berkeadilan dan permasalahan pengelolaan lingkungan khususnya kawasan konservasi perairan dalam upaya menurunkan emisi karbon.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu 2024-2026. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor kelautan dan perikanan.

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan guna mencapai tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan rencana strategis dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara

untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Strategi untuk mencapai Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan, yaitu yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perangkat daerah maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas analisis permasalahan dan isu strategis di seputar layanan serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan dalam RPD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan capaian transformasi perekonomian menuju *Blue Economy*.

Adapun Strategi pembangunan yang diambil dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan beserta penjabaran dari arah kebijakan yang akan dikerjakan, dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, yang menjadi harapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah

meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun penjabaran hubungan antara tema dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan DKP Prov. Kaltim (sesuai tabel T-C.26 Permendagri 86/2017)

SLOGAN PEMBANGUNAN :		“Membangun Kaltim untuk Nusantara”		
TEMA PEMBANGUNAN KALTIM:	2024		2025	2026
	Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan		Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing	Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN
PRIORITAS PEMBANGUNAN III:		Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan		

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap	1. Meningkatkan pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan 2. Mengendalikan kegiatan penangkapan ikan 3. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan 4. Meningkatkan sarpras fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan
			2. Peningkatan produksi perikanan budidaya	1. Meningkatkan pengembangan perikanan budidaya 2. Meningkatkan pengembangan usaha perikanan budidaya
			3. Peningkatan kualitas Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Peningkatan kualitas hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	1. Meningkatkan kualitas pengujian mutu terhadap produk hasil perikanan 2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan mutu hasil perikanan
			5. Peningkatan Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1. Meningkatkan kualitas mutu benih Udang/Ikan Air Laut 2. Meningkatkan penyediaan jumlah benih Udang/Ikan Air Laut 3. Meningkatkan fasilitasi sarpras perbenihan air laut/air payau
			6. Peningkatan Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	1. Meningkatkan kualitas mutu Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar 2. Meningkatkan penyediaan jumlah benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar
		Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	1. Meningkatkan pendayagunaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Meningkatkan reklamasi dan minat investor terhadap jasa kelautan 3. Meningkatkan pelestarian kawasan konservasi kelautan dan perikanan
			2. Peningkatan Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penangkapan ikan 2. Meningkatkan pengawasan terhadap pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3. Melakukan tindak penanganan terhadap pelanggaran kelautan dan perikanan
2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu 2. Peningkatan Realisasi Anggaran	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran 2. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen RKA-SKPD 3. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen DKA-SKPD 4. Meningkatkan kualitas laporan penyusunan capaian kinerja 5. Meningkatkan kualitas laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 1. Meningkatkan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Meningkatkan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Meningkatkan kualitas Pelaksana Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan 4. Meningkatkan kualitas Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Meningkatkan kualitas penyusunan kualitas Laporan Keuangan Akhir SKPD 6. Meningkatkan kualitas Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 7. Meningkatkan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				8. Meningkatkan kualitas Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			3. Peningkatan kualitas Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	1. Meningkatkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Meningkatkan kualitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Meningkatkan kualitas Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			4. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	1. Meningkatkan kualitas Pakaian beserta atribut kelengkapannya 2. Meningkatkan kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Meningkatkan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			5. Peningkatan kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	1. Meningkatkan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Meningkatkan penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Meningkatkan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				5. Meningkatkan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan pemda
			6. Peningkatan kualitas pemenuhan BMD	Meningkatkan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarpras
			7. Peningkatkan kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu	1. Meningkatkan kualitas Surat yang diadministrasikan 2. Meningkatkan penyediaan komunikasi, air dan listrik 3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kantor (Teknis dan Non Teknis)
			8. Peningkatan kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik	1. Meningkatkan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarpras 2. Meningkatkan penyediaan pemeliharaan peralatan kantor 3. Meningkatkan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4. Meningkatkan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarpras

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “hasil akhir” Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan dan mengelola komoditas perikanan yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya (Tabel 5.1), langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun.

Adapun rencana program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator target kinerja utama dan rencana beberapa kegiatan beserta indikator target kinerja individu, diuraikan sesuai perkiraan pendanaan sampai dengan tahun 2026. Penetapan rencana disertai juga dengan lokus pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 s/d tahun 2026 dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DKP Prov. Kaltim

Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	177514 Ton	190000 Ton	195000 Ton	200000 Ton	200000 Ton	9,700,000,000	8,250,000,000	8,500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	162114 Ton	200000 Ton	201000 Ton	202000 Ton	202000 Ton	8,209,895,361	8,103,195,000	10,500,774,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	4 Produk Olahan	7 Produk Olahan	11 Produk Olahan	15 Produk Olahan	15 Produk Olahan	1,723,064,000	1,463,064,000	1,510,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	70%	72.97%	75.45%	77.12%	77.12%	6,726,502,000	6,093,202,000	7,262,183,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	59.09%	100%	100%	100%	100%	3,299,287,000	3,299,287,000	3,340,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3000000000 Ekor	1000000000 Ekor	1100000000 Ekor	1200000000 Ekor	1200000000 Ekor	4,994,285,850	3,194,285,850	3,194,285,850	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	3797000 Ekor	4181000 Ekor	4393750 Ekor	4612500 Ekor	4612500 Ekor	1,675,718,640	1,732,379,140	1,624,210,400	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	60%	70%	80%	90%	90%	500,949,831	243,296,074	240,351,240	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	89,4 Indeks	90,4 Indeks	91,4 Indeks	92,4 Indeks	92,4 Indeks	37,820,820,000	37,497,028,000	37,812,028,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Kelautan dan Perikanan)	100%	100%	100%	100%	100%	4,873,393,600	5,097,185,600	5,032,397,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89,4 Indeks	90,4 Indeks	91,4 Indeks	92,4 Indeks	92,4 Indeks	1,020,338,800	1,020,338,800	1,020,338,800	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	928,985,750	928,985,750	928,985,750	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89,4 Indeks	90,4 Indeks	91,4 Indeks	92,4 Indeks	92,4 Indeks	3,455,275,360	3,335,164,860	3,515,758,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	1,070,150,000	1,133,600,000	1,061,175,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	89,4 Indeks	90,4 Indeks	91,4 Indeks	92,4 Indeks	92,4 Indeks	993,966,249	730,341,277	733,163,120	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	537,790,559	559,069,649	559,192,640	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,970,000,000	1,775,000,000	1,780,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	620,000,000	620,000,000	650,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	195 Rekomendasi	180 Rekomendasi	185 Rekomendasi	190 Rekomendasi	190 Rekomendasi	1,300,000,000	870,000,000	875,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	417 Dokumen	810 Dokumen	820 Dokumen	830 Dokumen	830 Dokumen	1,760,000,000	1,885,000,000	2,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3 Pelabuhan Perikanan	6 Pelabuhan Perikanan	6 Pelabuhan Perikanan	6 Pelabuhan Perikanan	6 Pelabuhan Perikanan	3,000,000,000	3,025,000,000	3,060,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	0 Rekomendasi	10 Rekomendasi	15 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	50,000,000	75,000,000	135,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	3,999,895,361	3,852,146,000	5,550,900,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,010,000,000	4,051,049,000	4,749,874,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	650,000,000	650,000,000	685,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	31 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	773,064,000	513,064,000	525,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	3,142,302,000	2,509,602,000	3,343,532,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi	6 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	2,090,000,000	2,090,000,000	2,120,200,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	17 Kelompok Masyarakat	17 Kelompok Masyarakat	1,494,200,000	1,493,600,000	1,798,451,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100%	100%	100%	100%	100%	2,098,104,180	2,098,104,180	2,126,669,500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	1,201,182,820	1,201,182,820	1,213,330,500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3000000000 Ekor	1000000000 Ekor	1100000000 Ekor	1200000000 Ekor	1200000000 Ekor	4,994,285,850	3,194,285,850	3,194,285,850	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3797000 Ekor	4181000 Ekor	4393750 Ekor	4612500 Ekor	4612500 Ekor	1,675,718,640	1,732,379,140	1,624,210,400	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	60%	70%	80%	90%	90%	500,949,831	243,296,074	240,351,240	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1,880,000,000	1,880,000,000	1,950,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	25,150,000,000	25,150,000,000	25,250,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20%	20%	20%	20%	20%	315,000,000	315,000,000	315,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	20%	20%	20%	20%	964,820,000	735,000,000	1,185,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	2,344,643,600	2,463,435,600	2,343,647,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pemenuhan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	1,300,000,000	1,201,028,000	891,028,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	9,428,750,000	9,533,750,000	9,588,750,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	1,311,000,000	1,316,000,000	1,321,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	98,760,000	98,760,000	98,760,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	20%	20%	20%	20%	91,873,000	91,873,000	91,873,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	654,426,200	654,426,200	654,426,200	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	687,194,750	687,194,750	687,194,750	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	417,070,600	417,070,600	417,070,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	99,280,000	99,280,000	99,280,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	20%	20%	20%	20%	231,201,000	231,201,000	231,201,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	886,750,000	950,200,000	877,775,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pemenuhan BMD	0%	100%	100%	100%	100%	599,000,000	242,500,000	50,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1,634,737,600	1,634,737,600	1,634,737,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	1,074,456,760	1,310,846,260	1,683,940,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase realisasi anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	69,480,000	69,480,000	69,480,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	20%	20%	20%	20%	405,293,639	137,563,407	139,251,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	412,535,175	433,610,765	427,465,465	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pemenuhan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	21,615,000	22,695,750	23,830,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	497,338,504	497,542,004	503,810,295	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	125,494,490	128,519,000	128,519,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	87 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	2,820,000,000	1,625,000,000	1,630,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.02.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	6 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	500,000,000	500,000,000	525,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	125,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.03.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	195 Dokumen	180 Dokumen	185 Dokumen	190 Dokumen	190 Dokumen	650,000,000	435,000,000	435,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	195 Rekomendasi	180 Rekomendasi	185 Rekomendasi	190 Rekomendasi	190 Rekomendasi	650,000,000	435,000,000	440,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	417 Dokumen	810 Dokumen	820 Dokumen	830 Dokumen	830 Dokumen	1,760,000,000	1,885,000,000	2,000,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	800,000,000	800,000,000	825,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2,200,000,000	2,225,000,000	2,235,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	10 Rekomendasi	15 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	50,000,000	75,000,000	135,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	75 Orang	70 Orang	80 Orang	90 Orang	90 Orang	450,000,000	450,000,000	475,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	60 Dokumen	80 Dokumen	90 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	780,000,000	780,000,000	780,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1,818,536,361	1,670,787,000	3,320,900,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut										
3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	600,000,000	600,000,000	615,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	351,359,000	351,359,000	360,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2,910,000,000	2,951,049,000	3,649,874,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	580,000,000	575,000,000	605,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30 Rekomendasi	11 Rekomendasi	12 Rekomendasi	13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	70,000,000	75,000,000	80,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	773,064,000	513,064,000	525,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	107,000,000	107,000,000	110,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha	5 Ha	6 Ha	7 Ha	7 Ha	372,000,000	372,000,000	377,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	2 Ha	293.030,78 Ha	327.819,31 Ha	327.819,31 Ha	327.819,31 Ha	2,395,302,000	1,762,602,000	2,586,532,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	268,000,000	268,000,000	270,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.02.0005 Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	444,000,000	444,000,000	450,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	676,000,000	676,000,000	685,200,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	450,000,000	450,000,000	460,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	420,000,000	420,000,000	425,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	461,200,000	461,200,000	465,500,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6 Orang	90 Orang	90 Orang	120 Orang	120 Orang	442,000,000	449,722,000	602,915,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	175,000,000	175,000,000	177,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Orang	60 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	416,000,000	407,678,000	553,036,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	18 Kelompok	18 Kelompok	18 Kelompok	18 Kelompok	239,250,000	239,250,000	242,907,500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	15 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	371,055,000	371,055,000	373,246,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	30 Dokumen	153 Dokumen	153 Dokumen	153 Dokumen	153 Dokumen	652,282,500	652,282,500	662,256,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	835,516,680	835,516,680	848,260,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	18 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	501,050,320	501,050,320	502,438,250	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	15 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	387,367,500	387,367,500	393,269,250	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	312,765,000	312,765,000	317,623,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2,220,000,000	420,000,000	420,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2,774,285,850	2,774,285,850	2,774,285,850	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	638,839,500	695,500,000	587,322,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,036,879,140	1,036,879,140	1,036,888,400	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	500,949,831	243,296,074	240,351,240	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	275,000,000	275,000,000	300,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	655,000,000	655,000,000	700,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	700,000,000	700,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	23,350,000,000	23,350,000,000	23,450,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	135,000,000	135,000,000	135,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	60 Orang	300,000,000	465,000,000	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	135,000,000	135,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	135,000,000	135,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	394,820,000	-	415,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,891,235,600	1,984,901,600	1,835,113,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	28,240,000	33,240,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	51,886,000	56,886,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	195,908,000	200,908,000	205,908,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150,000,000	160,000,000	170,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	32,500,000	37,500,000	42,500,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	900,000,000	801,028,000	891,028,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	400,000,000	400,000,000	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000,000	2,600,000,000	2,650,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28,750,000	33,750,000	38,750,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	161,000,000	166,000,000	171,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	550,000,000	550,000,000	550,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,760,000	98,760,000	98,760,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	91,873,000	91,873,000	91,873,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	554,349,600	554,349,600	554,349,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,032,000	4,032,000	4,032,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,741,500	10,741,500	10,741,500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27,156,150	27,156,150	27,156,150	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8,146,950	8,146,950	8,146,950	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	412,635,200	412,635,200	412,635,200	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	272,322,000	272,322,000	272,322,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,237,550	2,237,550	2,237,550	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	215,746,650	215,746,650	215,746,650	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	101,323,950	101,323,950	101,323,950	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,280,000	99,280,000	99,280,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	231,201,000	231,201,000	231,201,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	564,000,000	696,500,000	621,660,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	55,500,000	55,500,000	55,500,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	196,750,000	125,450,000	125,450,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45,500,000	47,750,000	50,165,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	8 Unit	2 Unit	8 Unit	8 Unit	99,000,000	130,000,000	50,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	500,000,000	112,500,000	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,451,337,600	1,451,337,600	1,451,337,600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	182,400,000	182,400,000	182,400,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	6 Unit	7 Unit	7 Unit	880,516,760	1,126,906,260	1,500,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	49,780,000	49,780,000	49,780,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	144,160,000	134,160,000	134,160,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	69,480,000	69,480,000	69,480,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	405,293,639	137,563,407	139,251,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	351,648,000	369,230,400	359,745,170	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,016,000	2,116,800	2,434,320	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18,129,500	19,035,975	19,035,975	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,035,800	5,287,590	5,500,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	31,200,750	32,760,000	34,800,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4,505,125	5,180,000	5,950,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	21,615,000	22,695,750	23,830,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	372,083,120	372,083,120	372,083,120	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	121,185,384	121,185,384	127,240,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,070,000	4,273,500	4,487,175	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	60,494,490	63,519,000	63,519,000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
TOTAL							87,530,423,000	82,680,423,000	86,834,844,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan dengan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perencana sekaligus penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 (Tabel T-C.28)

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Target			Kondisi Kinerja Akhir
				2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PMHP)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPALSEBULU)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Target			Kondisi Kinerja Akhir
				2024	2025	2026	
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	177,514	190,000	195,000	200,000	200,000
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	162,114	200,000	201,000	202,000	202,000
		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (ekor)	3,000,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	3,797,000	4,181,000	4,393,750	4,612,500	4,612,500
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan)	4	7	11	15	15
		Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	60	70	80	90	90
8	Program pengelolaan kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	70	72,97	75,45	77.12	77.12
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	59.09	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung indikator sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi indikator tujuan atau sasaran yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan ditargetkan mencapai nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat 70 sampai akhir periode, yang diharapkan akan berkontribusi pada indikator sasaran RPD yaitu nilai akuntabilitas provinsi Kalimantan timur.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya peningkatan perekonomian Kalimantan Timur yang berkelanjutan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan Permendagri Nountuk klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 tentang hasil verifikasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dab Keuangan Daerah.

8.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan sub program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selaku lembaga yang diberikan kewenangan bidang kelautan dan perikanan adalah memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat meningkatkan ekonominya serta menjaga sumberdaya agar lestari dan berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Timur dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 bersifat fleksibel dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Kaltim tahun 2024-2026.

Setelah rancangan akhir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel 4.1 pada Bab IV Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) yang merujuk pada tabel 6.1 pada Bab VI Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) yang merujuk pada tabel 6.1 pada Bab VI Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja sekaligus dijadikan instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sehingga Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabarab dari tujuan, sasaran dan

program tahun 2024-2026 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPD Provinsi Kaimantan Timur.

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pariwisata adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tupoksi PD dan disusun dengan berpedoman kepada RPD Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif yang berpedoman pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK) . Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis, adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden No 142 Tahun 2018 Tentang Rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018 – 2025;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037;
21. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
22. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/0378/B-PPEPD-Bapp/2023 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
24. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.Maksud

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk maksud:

Sebagai gambaran pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur secara komprehensif bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya yang dapat menjadi acuan selama 2 tahun periode 2024-2026.

1.3.2.Tujuan

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan tujuan untuk :

Mensinergikan bersama seluruh stakeholder terhadap rencana pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur periode 2024-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (Delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Isu Strategis

Pada bagian ini dikemukakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

4.2. Cascading Kinerja PD

Berisi tujuan, sasaran, outcome, output dan indikator masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini diuraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kalimantan Timur

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian usaha jasa pariwisata;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan karya seni budaya;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan ; dan
 - c. Subbagian Umum
- 3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata:
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- 4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
 - a. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seksi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - b. Seksi pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata; dan
 - c. Seksi kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seksi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
 - b. Seksi pengembangan ruang kreasi; dan
 - c. Seksi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel 1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim
(berdasarkan Perda Prov. Kaltim No. 1/2021 dan Pergub Kaltim No.19/2021)



2.2 SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2023 sebanyak 82 orang pegawai yang terdiri atas 39 orang pegawai ASN dan 43 orang pegawai Non ASN yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Gender
 - 1) Pegawai ASN
 - Pria : 26 Orang
 - Wanita : 13 Orang
 - 2) Pegawai Non ASN
 - Pria : 21 Orang
 - Wanita : 22 Orang
- b. Klasifikasi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan
 - Pejabat Eselon II : 1 orang
 - Pejabat Eselon III : 3 orang
 - Pejabat Eselon IV : 1 orang
 - Pejabat Pelaksana : 19 orang
 - Pejabat Fungsional : 15 orang
- c. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

Tabel 2

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	ASN	Non ASN
1	S.2	6	2
2	S.1	17	19
3	D.IV	1	-
4	D.III	5	4
5	D.II	1	-
6	SMA/SMK	7	17
7	SMP	2	1
JUMLAH		39	43
		82	

PERMASALAHAN SUMBER DAYA :

- a. Kuantitas/Jumlah sumber daya manusia /pegawai proporsional dengan beban kerja tidak proporsional dan tingkat kemampuan teknis/ ketrampilan sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal

- ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran serta kemampuan berbahasa asing;
- b. Kualitas sumber daya manusia banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
 - c. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan waktu percepatan

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Prov. Kaltim didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Gedung Kantor

Prasarana gedung kantor yang ditempati oleh Dinas Pariwisata Kaltim merupakan gedung milik Pemprov Kaltim. Luas tanah 2058,012 M2, dengan luas bangunan gedung Lt.1 699, 008 M2; Lt.2 698,490 M2; Lt.3 542,934 M2, atau sekitar 1940,432 M2 total luasan gedungnya.

b) Jaringan Internet dan Telepon PABX

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari kantor Dinas Pariwisata telah di-sambungkan dengan fasilitas komunikasi yang berupa sambungan telepon PABX sejumlah 12 (dua belas) titik sambungan yang menghubungkan antar ruangan dan antar bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pariwisata, dan 6 (enam) sambungan SLJJ, Sedangkan untuk keperluan komunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan data/informasi melalui jaringan internet maupun intranet telah disambungkan jaringan internet sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sambungan desk-top dan 7 (tujuh) titik *hot-spot*.

Perlu diperhatikan kembali jaringan – jaringan telpon untuk efisiensi, karena tidak semuanya dimanfaatkan maksimal.

c) Meubelair

Jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja-kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Pariwisata, meja komputer , almari, *filling cabinet*, meja-kursi rapat, dan meja-kursi tamu.

d) Komputer/Mesin Ketik

Jumlah komputer yang dimiliki untuk mendukung tugas dan fungsi ada 25 unit, printer 16 (enam belas) unit, scanner 4 (empat) unit dan jumlah mesin ketik manual sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi rusak sehingga seringkali memerlukan perawatan lebih.

e) Sarana mobilitas

Mengingat tugas dan fungsinya berupa rapat koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten, memantau pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi – tugas pembantuan – dana alokasi khusus, memantau pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta pembinaan di pemerintah kota maupun kabupaten, maka diperlukan sarana transportasi yang berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Kendaraan roda 2 (dua) operasional yang dimiliki sebanyak 2 (dua) unit dan roda 4 sebanyak 8 unit.

PERMASALAHAN

- a. Sarana dan prasarana gedung perkantoran layak, hanya saja masih perlu peningkatan pengadaan ruang untuk masyarakat dapat mengakses informasi Pariwisata Kalimantan Timur.
- b. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag (Mobile Computer/Laptop dll) masih kurang dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga kinerja aparatur belum optimal;

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Kinerja pelayanan PD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi belanja langsung tidak sesuai dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (hal ini disesuaikan kemampuan APBD). Diharapkan tahun-tahun berikutnya belanja langsung ke masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Timur maupun melalui PD dan stakeholders lainnya terus meningkat. Sedangkan pelaksanaan program/ kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang sudah tertera dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur (2024-2026) diharapkan realisasi/capaian

kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jikalau kondisi Provinsi Kalimantan Timur setidaknya terwujud aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas stakeholders pariwisata maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Timur berjalan baik dan lancar.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk mengimplementasikan program/kegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya terhadap pelayanan masyarakat. Usaha ini disamping untuk mendorong/meningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan (sadar wisata) juga sebagai kepedulian terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap lingkungan.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 4 program strategis yang hal ini Sesuai pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan;

Berdasarkan keempat program tersebut dengan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan stakeholders terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPD Kalimantan Timur maupun RIPPARDA Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja lainnya seperti Jumlah Desa Wisata, jumlah Kelompok Sadar Wisata dapat mencapai target sesuai diharapkan, sedangkan satu (1) indikator kinerja yang tidak pernah tercapai adalah indikator Lama Tinggal Wisatawan/ Length of Stay .

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

1. Bappeda Prov. Kalimantan Timur
2. Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kalimantan Timur

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur
6. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalimantan Timur
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Timur
9. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Timur
11. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Timur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kondisi/ aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kaltim

Permasalahan pembangunan pada sektor Pariwisata adalah sebagai berikut :

Permasalahan Pokok :

"Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah"

Dalam mengembangkan suatu destinasi agar layak/siap jual perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya Attraction (Atraksi/Daya Tarik), Accesability (Aksesibilitas), Amenities (Amenitas/Fasilitas), dan Ancillary (Kelembagaan). Aspek-aspek ini harus terpenuhi guna terwujudnya destinasi wisata yang berkembang dan siap jual.

Belum berkembangnya destinasi pariwisata di Kalimantan Timur ini akhirnya berimbas pada belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laporan BPS Provinsi Kaltim, PDRB Kaltim 2017 Menurut Lapangan Usaha (dalam milyar rupiah) Pertambangan dan Penggalian menempati urutan pertama sebesar 274.361,57, selanjutnya Industri Pengolahan sebesar 112.988,76, dan Konstruksi 47.802,42. Sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5.489,50 yang sebagai representasi perkembangan pariwisata menempati urutan ke-11 dari total APBD Total PDRB Kaltim 592.502,52 atau 0,93% dari struktur APBD Provinsi Kaltim.

Namun catatan ini masih belum mencerminkan kontribusi pariwisata terhadap struktur APBD secara utuh, karena variabel yang dicatat hanya berdasarkan penyediaan akomodasi dan makan minum sedangkan variabel untuk bidang pariwisata sangat kompleks, seperti

biaya konsumsi yang dikeluarkan wisatawan, sektor pertanian perkebunan dan kelautan yang men-support pariwisata, kedai makanan atau warung yang berada disekitar wisatawan sebagai dampak dari aktifitas pariwisata belum terhitung secara data.

Kesimpulannya potensi sumbangan sektor pariwisata terhadap stuktur APBD Kaltim masih optimis lebih dari catatan yang disampaikan.

Permasalahan Umum :

A. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata

Akar Permasalahan :

1. Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun dan yang sudah ada belum dikembangkan secara maksimal.
2. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi.
3. Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata.
4. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.

B. Belum Optimalnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Akar Permasalahan :

1. Belum maksimalnya Kerjasama dan sinergi antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)
2. Belum optimalnya promosi paket wisata

C. Belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Akar Permasalahan :

1. Belum optimalnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif, sebagai pendukung daya tarik wisata.
2. Belum maksimalnya pengembangan ekosistem/penguatan jejaring pelaku Ekonomi Kreatif
3. Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif
4. Kurangnya perlindungan hasil karya dari pelaku ekonomi kreatif seperti hak cipta, merk dan paten.
5. Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.

D. Belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Masih Rendahnya Jumlah Komunitas Pelaku Kreatif/Creative Hub, Kabupaten/Kota dan Desa Kreatif.
2. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi.
3. Kurangnya Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
4. Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi.
6. Kurangnya Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
7. Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 akan berfokus pada 2 lokus yakni :

1. Pengembangan Danau Kaskade Mahakam (Jempang, Semayang, dan Melintang) yang berlokasi di Kawasan Strategis Provinsi (KSPP) 3 : Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.
2. Pengembangan Biduk-biduk dan Maratua yang berlokasi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) 1 : Derawan – Biduk-biduk dan sekitarnya.

A. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PADA LOKUS DANAU KASKADE MAHAKAM

Dalam melakukan pengembangan destinasi wisata di Danau Kaskade Mahakam yang berlokasi di KSPP 3, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yaitu :

- a. Terbatasnya aksesibilitas;
- b. Ketersediaan air bersih;
- c. Ketersediaan jaringan listrik;
- d. Lemahnya blankspot jaringan;
- e. Ketersediaan toilet umum;
- f. Ketersediaan pengelolaan limbah dan sampah;
- g. Terbatasnya peningkatan SDM.

B. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PADA LOKUS BIDUK-BIDUK DAN MARATUA

a. Terbatasnya aksesibilitas;

Perjalanan wisatawan untuk mencapai Biduk-biduk dan Maratua tidak mudah, akses yang masih sulit karena wisatawan harus melalui perjalanan laut dan udara. Sehingga biaya yang dikeluarkan sangat besar.

b. Amenitas yang tersedia cukup mahal;

Biaya untuk sewa penginapan dan sewa kapal untuk berkeliling menjelajahi pulau tergolong sangat tinggi.

c. Ketersediaan listrik;

Listrik di Pulau Maratua masih mengandalkan tenaga diesel yang menghabiskan banyak bahan bakar.

d. Pembangunan infrastruktur yang belum berjalan lancar;

Keterbatasan anggaran dan permasalahan status kawasan yang menjadikan upaya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan daerah tujuan wisata belum berhasil.

e. Terbatasnya kualitas SDM masyarakat;

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, serta pemanfaatan teknologi yang tidak maksimal sehingga pengembangan di Pulau Maratua masih tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Rumusan permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan		Akar masalah
1	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara	1	Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun/dikembangkan secara maksimal.
			2	Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi.
			3	Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata.
			4	Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.
		Belum Optimalnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5	Belum maksimalnya kerjasama dan sinergi antara stakeholder pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)
			6	Belum optimalnya promosi paket wisata.
		Belum optimalnya Penanganan Ekonomi Kreatif	7	Belum optimalnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata.
			8	Belum maksimalnya pengembangan ekosistem atau penguatan jejaring pelaku ekraf.
			9	Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif.
			10	Kurangnya perlindungan hasil karya dari pelaku
			11	

				ekraf (Hak Cipta, Merk, dan Paten) Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif
		Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 13 14 15 16 17 18	Masih rendahnya jumlah komunitas pelaku kreatif/creative hub, Kab/Kota dan desa kreatif. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi. Kurangnya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha. Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi Kurangnya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.2. Isu Strategis

- A. Pengembangan destinasi ekowisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- B. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis PD yang dihadapi serta menjawab tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran sesuai dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Indikator tujuan tersebut adalah “Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata [%].

Hal ini tidak bisa terlepas dari peranan semua stakeholder yang mempengaruhi aktifitas kepariwisataan di destinasi pariwisata dimaksud seperti masyarakat sekitar obyek wisata dan kelompok sadar wisata, peranan pemerintah daerah, para tour n’ travel dan biro perjalanan, swasta dan para investor, para komunitas wisata, perhimpunan – perhimpunan wisata baik perhimpunan hotel restoran, perhimpunan organisasi angkutan darat, perhimpunan pramuwisata dan lain-lainnya. Para stakeholders ini harus terkoneksi secara baik rencana pengembangan destinasinya.

B. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

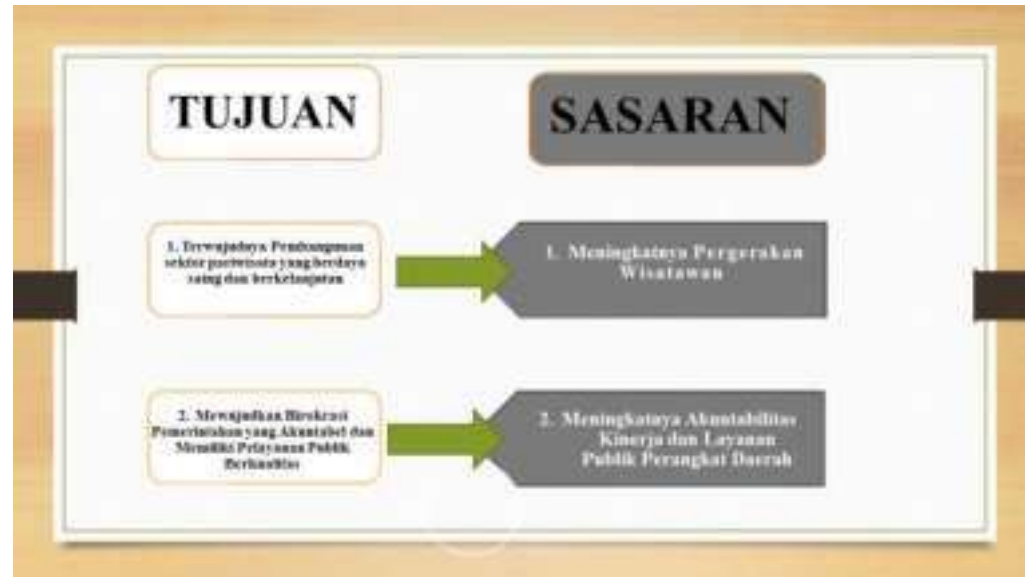
Sesuai dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 maka ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- 1) Meningkatnya Pergerakan Wisatawan;
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dengan indikator Sasaran :

- 1) Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara [orang]
- 2) Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKM)

4.2. Cascading Kinerja PD



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan.

5.1 STRATEGI

Sesuai kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi KALIMANTAN TIMUR 5 Tahun (2019 – 2023) maka untuk **mewujudkan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan** perlu strategi sebagai berikut :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
2. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah
3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
5. Pembangunan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Daerah

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan maka perlu ditetapkan kebijakan umum adalah peningkatan peran budaya sebagai basis pengembangan kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh inovasi, penguatan/penajaman pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata, melalui:

A. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

1. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah
2. Pembangunan Daya Tarik Wisata
3. Pembangunan Aksesibilitas
4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

B. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

1. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
2. Penguatan Struktur Industri Pariwisata
3. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
4. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
5. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

C. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

1. Pengembangan Pasar Wisatawan

2. Pengembangan Citra Pariwisata
 3. Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 4. Pengembangan Promosi Pariwisata
- D. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan
 2. Pembangunan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 3. Penelitian Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 4. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif
 5. Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif
- E. Pembangunan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Daerah
1. Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 2. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam dan Luar Negeri
 3. Pengembangan Standarisasi dan Praktik Usaha yang Baik (*Best Practice*) untuk Usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif
 4. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Program Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi Wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, untuk meningkatkan ekonomi daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah maka guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan, melalui kebijakan peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan

daerah berbasis masyarakat dengan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta sinergitas antar pelaku wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPD 2019 - 2023 menurut urusan pemerintahan (*yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019*). Adapun program-program tersebut terangkum dalam program dan Kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; [3.26.01]

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; [3.26.02]

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

C. Program Pemasaran Pariwisata; [3.26.03]

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; [3.26.04]

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
- 2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; [3.26.05]

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

6.2 Pendanaan Indikatif

Indikasi rencana program prioritas Dinas Pariwisata berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi SKPD jangka menengah. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 4 hanya yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur.

Tabel 4
RENCANA PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM
DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR APBD (MURNI)
TAHUN 2024-2026

NO	PROGRAM KERJA	KERANGKA PENDANAAN		
		2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.707.000.000	16.707.000.000	17.146.920.000
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10.673.000.000	10.225.000.000	10.570.000.000
3	Program Pemasaran Pariwisata	4.900.000.000	3.500.000.000	3.700.000.000
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5.720.000.000	5.218.000.000	5.450.000.000
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.500.000.000	5.250.000.000	5.478.080.000
JUMLAH		43.500.000.000	40.900.000.000	42.345.000.000

Catatan : Anggaran tahun 2023 dalam pelaksanaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kalimantan Timur

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur pada tahun 2023, maka diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dimana secara bersamaan seluruh kepala OPD diperintahkan untuk membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Renstra PD mendukung Tujuan 2 dari RPD yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, Sasaran 5 yaitu “Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi”. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD ini, dalam penyusunan Renstra PD Dinas Pariwisata merumuskan 2 tujuan, yakni :

- 1. “Terwujudnya Pembangunan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, sasaran 1 “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata”.**
- 2. “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas”, sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah”.**

Urusan Bidang Pariwisata dalam RPD 2024-2026 secara detail diuraikan sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Informasi tentang pembagian kawasan pariwisata berdasarkan RIPPARDA

Tabel 5

Rumusan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)

Pembagian Kawasan Pariwisata DPP, KPPP, dan KSPP Provinsi Kalimantan Timur		
Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP)	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)
DPP 1 Tanjung Sebelah – Bontang dan sekitarnya	KPPP 1 Sungailia – Bontang dan sekitarnya	KSPP 1 Dumai – Pulau Duluk dan sekitarnya KSPP 2 Sungailiang – Mangkuhat dan sekitarnya (Kutai Tera dan Berau)
DPP 2 Samarinda – Saruh Grogot dan sekitarnya	KPPP 2 Samarinda – Balikpapan – Penujan Saruh Grogot dan sekitarnya KPPP 3 Ujung Dabang – Long Negeri – Long Pakuang dan sekitarnya	KSPP 3 Samarinda – Tenggarrang – Tenggarrang dan sekitarnya

Pengembangan destinasi yang akan dilakukan pada tahun 2024-2026 adalah:

Tahun Anggaran 2024 :

- a. Penyusunan masterplan dan DED KSPP 3 (Samarinda-Tenggarrang-Tj. Isuy dan Sekitarnya). Perkiraan Pagu 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000
- b. Pembangunan fisik hasil masterplan dan DED KPPP 2 (Kawasan IKN). Perkiraan Pagu 2.500.000.000 s/d 3.000.000.000 di :
 - Penajam Paser Utara 2 Titik : Mangrove Mentawir dan Mangrove Kampung Baru/Pantai Tj. Jumlahi
 - Kutai Kartanegara (Samboja) 2 Titik : Sungai Hitam Lestari dan Bukit Bengkirai
 - Paser 2 Titik : Paser Mayang dan Kampung Warna Warni/Goa Tengkorak

- Balikpapan : Mangrove Graha Center dan Kampung Kang Bejo Manggar

Tahun Anggaran 2025:

- a. Penyusunan masterplan dan DED KSPP 1 (Derawan-Biduk-biduk dan sekitarnya). Perkiraan Pagu 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000
- b. Pembangunan fisik hasil masterplan dan DED KSPP 3 (Samarinda-Tenggarong-Tj. Isuy dan sekitarnya). Perkiraan Pagu 3.500.000.000 s/d 4.000.000.000 di :
 - Samarinda 2 Titik : Kampung Ketupat dan Pampang
 - Kutai Kartanegara 6 Titik : Kedang Ipil, Kampung Putak, Desa Pela, Desa Semayang, Desa Melintang dan Desa Enggelam
 - Kutai Barat 2 Titik : Tj. Isuy dan Tj. Jan

Tahun Anggaran 2026 :

- a. - Penyusunan masterplan dan DED KSPP 2 (Sangkulirang-Mangkalihat dan sekitarnya). Kutai Timur dan Berau
- Penyusunan masterplan dan DED KPPP 1 (Sangatta-Bontang dan sekitarnya). (Penyusunan Masterplan Perkiraan Pagu 2.500.000.000 s/d 3.000.000.000)
- b. Pembangunan Fisik hasil masterplan dan DED KSPP 1 (Derawan-Biduk-biduk dan Sekitarnya.) Perkiraan Pagu 3.500.000.000 s/d 4.000.000.000 di :
 - Berau : Derawan dan sekitarnya. (P. Derawan, P. Maratua, P. Sangalaki, P. Kakaban)
: Biduk-biduk dan sekitarnya (P. Kaniungan, Teluk Sumbang, Giring-giring, Labuan Cermin, Telaga Biru, Air Panas Tembudan.

2. Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

- a. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
- b. Penguatan Struktur Industri Pariwisata
- c. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
- d. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
- e. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

- 3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
 - a. Pengembangan Pasar Wisatawan
 - b. Pengembangan Citra Pariwisata
 - c. Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - d. Pengembangan Promosi Pariwisata
- 4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
 - a. Penguatan Organisasi Kepariwisataan
 - b. Pembangunan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - c. Penelitian Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - d. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif
 - e. Peningkatan Pembiayaan bagi Usaha Ekonomi Kreatif
- 5. Pembangunan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Daerah
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
 - b. Peningkatan Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam dan Luar Negeri
 - c. Pengembangan Standarisasi dan Praktik Usaha yang Baik (*Best Practice*) untuk usaha Ekonomi Kreatif dan Karya Kreatif
 - d. Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Program :

- 1. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara (Orang)
- 2. Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKM)

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir Rencana
		2023	2023	2024	2025	2026	2026	
	Tujuan 1: "Terwujudnya Pembangunan Sektor Pariwisata yang Berdosa Saing dan Berkelanjutan" - Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (% - (zila BPS)	9,16	9,17	9,18	9,20	9,22	9,22	
	Sasaran 1: "Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata" - Peningkatan Jumlah Pergerakan Wisatawan * Nusantara (orang) * Mancanegara (orang)	6.312.215 6.286.708 18.507	2.210.000 2.300.000 10.000	6.918.000 6.900.000 18.000	7.288.000 7.118.000 19.000	7.620.400 7.600.000 20.400	7.620.400 7.600.000 20.400	
	Tujuan 2: "Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas" - RPD Sapoea 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat) 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	78,30 84,41	78,35 84,68	78,36 85	79,30 85,50	80,01 86	80,01 86	
	Sasaran 2: "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah" 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai/Predikat) 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	68,26 66,19	69 69	70 68,30	72 68,30	75 68,40	76 68,40	

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas
Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) & INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH								
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. Indikator Kinerja Utama:								
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	(%)	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85
II. Indikator Kinerja Utama:								
1	Peningkatan Jumlah Pengeluaran Wisatawan (Orang)	Orang	6.302.218	2.310.000	6.948.000	7.298.000	7.830.400	7.830.400
	- Nusantara		6.295.788	2.300.000	6.940.000	7.290.000	7.820.000	7.820.000
	- Mancanegara		16.507	10.000	18.000	18.000	20.400	20.400
III. Indikator Kinerja Kunci (IKK)								
No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kabupaten	(%)	17,53	11,3	4	5	8	8
2	Peningkatan pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(%)	67,47	88	88	70	71	72
3	Tingkat hunian akomodasi	(%)	12,38	13,80	13,30	14,40	15,60	15,50
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	(%)	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

N O	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDIS I AKHIR RENST RA	KETERANGAN
					TARGE T	PAGU (RP)	TARGE T	PAGU (RP)	TARGE T	PAGU (RP)		
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariata n (%)		81	14.713.920.0 00	81	14.713.920.0 00	81	14.846.920.0 00	81	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang difasilitasi (%)		100	1.993.080.00 0	100	1.993.080.00 0	100	2.300.000.00 0	100	
	X.XX.1.1. 01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)		90	1.000.000.00 0	90	1.000.000.00 0	90	1.000.000.00 0	90	Kegiatan ini ditujukan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	6	

	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	
	X.XX.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)		82	9.056.920.000	82	9.056.920.000	82	9.056.920.000	82	Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran Gaji dan tunjangan ASN dan penatausahaan keuangan
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39	8.500.000.000	39	8.500.000.000	39	8.500.000.000	39	
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	556.920.000	12	556.920.000	12	556.920.000	12	

	X.XX.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	Kegiatan ini ditujukan untuk pengelolaan SDM aparatur seperti bimtek, dan penilaian kinerja
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	
	X.XX.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		12	1.993.080.000	12	1.993.080.000	12	2.300.000.000	12	Kegiatan ini diperuntukkan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (perjalanan dinas) serta dukungan pelaksanaan SPBE (pengadaan aplikasi)

	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	1. Travo Ballast 2. Baterai Alkali AA 3. Baterai Alkaline AAA 4. Isolasi Listrik 5. Kabel Pemutus Arus 6. Kabel NYM 7. Bohlam LED 12 watt 8. Bohlam LED 19 watt 9. Lampu Sorot LED 100 watt 10. Lampu TL LED Warna Putih 11. MCB Schneider Mg Domae Kap 20 Amper 12. MCB Schneider Mg Domae Kap 16 Amper 13. Stater Lampu TL s 1c 14. Steker Kontak 16. Uninterruptible Power Supply (UPS)
--	----	--	--	--	----	------------	----	------------	----	------------	----	--

	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11	530.000.000	20	530.000.000	20	530.000.000	20	1. Isi APAR 2. Kertas dan Cover 3. Tinta Toner 4. Bahan Kebersihan Kantor 5. Souvenir Cinderamata 6. Printer 7. Penguat Sinyal Internet (ORBIT TELKOMSEL) 8. Karangan Bunga 9. Seminar Kit 10. Pakaian Sipil Harian dan Korpri 11. Rak Arsip 12. Bahan Bakar Minyak dan Non Subsidi dan Diesel
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan		12	230.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000	3	

	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12	200.000.000	10	200.000.000	11	200.000.000	11	1. Kotak Arsip 2. Kertas NCR 3. Cetak Lembar Disposisi 4. Kertas Kop 5. Fotocopy 6. Jilid 7. Map Dinas 8. Amplop Dinas 9. Banner 10. Spanduk
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90	1.003.080.000	110	1.003.080.000	110	1.310.000.000	110	
	X.XX.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)		12	4.467.000.000	12	4.467.000.000	12	4.600.000.000	12	Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran internet, listrik, telepon, air, belanja gaji non PNS, satpam dan tenaga kebersihan
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		12	310.000.000	12	310.000.000	12	310.000.000	12	1. Sumber Daya Air 12 Bulan 2. Jasa Komunikasi 12 Bulan

			yang Disediakan									3. Listrik 12 Bulan
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8	719.186.080	8	719.186.080	8	719.186.080	8	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	3.437.813.920	12	3.437.813.920	12	3.570.813.920	12	Honorarium Non ASN, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dan Cleaning Service Selama 12 Bulan
	X.XX.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik (%)		80%	140.000.000	50,50 %	140.000.000	51%	140.000.000	51%	Kegiatan ini diperuntukkan untuk pemeliharaan software/aplikasi, serta sarana dan prasarana gedung kantor

01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34	140.000.000	34	140.000.000	34	140.000.000	34	1. Pemeliharaan Genset 2. Pemeliharaan Alat/Inventaris Kantor 3. Pemeliharaan AC 4. Pemeliharaan jaringan intranet 5. Pemeliharaan PC/Laptop 6. Pemeliharaan Printer/Mesin Fotocopy 7. Pemeliharaan Gedung Kantor 8. Perbaikan Jaringan Listrik Kantor dan krendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 29 unit
----	---	--	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	---

2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembang an Pariwisata yg difasilitasi / Jumlah DTW (Daya Tarik Wisata) Pengembang an Pariwisata yang di targetkan di fasilitasi selama 3 tahun x 100	30%	10.673.000.0 00	63%	10.225.000.0 00	100%	10.570.000.0 00	100%	
	3.26.02.1. 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola (Lokasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang dikelola / Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata yang di targetkan untuk dikelola selama 3 tahun x 100	33,33	3.100.000.00 0	66,67	3.000.000.00 0	100	2.900.000.00 0	100	
	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		4	1.600.000.00 0	4	1.500.000.00 0	4	1.500.000.00 0	4	Explore Destinasi Wisata Alam di Kutim

	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)		2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.400.000.000	2	pembuatan dan pengadaan sarpras di KPPP Pembuatan Photo Selfi Gunung Boga Pembuatan Tracking Mangrove di KWW Pengadaan Perahu Wisata di Malahing Pengadaan Perahu Karet dan kelengkapan di Mahulu
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	Jumlah Kawasan Strategis yang dikelola / jumlah Kawasan Strategis di targetkan untuk dikelola selama 3 tahun x 100	100	4.523.000.000	100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	

04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4	3.950.000.000	4	3.427.000.000	4	3.627.000.000	4	Penyusunan masterplan dan DED KSPP3 (Samarinda – Tenggarong – Tanjung Isuy dan sekitarnya.) Penahanan gulma/gelombang di depan kedai dan homestay desa Semayang. Penyusunan masterplan dan DED KSPP2 (Sangkulirang – Mangkalihat dan sekitarnya. (Kutai Timur dan Berau)) Lanjutan Pembuatan Tracking Pulau Kaniungan Penyusunan masterplan dan DED KSPP1 (Derawan – Biduk-Biduk dan sekitarnya.)
06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3	573.000.000	3	573.000.000	3	573.000.000	3	(Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona) PPU, Paser dan Balikpapan (Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona) Kukar, Mahulu dan Kubar (Sosialisasi

												Sadar Wisata dan Sapta Pesona) Berau, Bontang, Samarinda dan Balikpapan
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola (%)	Jumlah Destinasi yang Dikelola / Jumlah Destinasi yang ditargetkan untuk dikelola selama 3 tahun x 100	100	2.450.000.000	100	2.475.000.000	100	2.650.000.000	100	
	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	4	1.175.000.000	4	Pembuatan Photo Selfi Gunung Boga Explore Destinasi Wisata Alam di Paser Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepariwisata di Paser Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepariwisata di PPU Pembuatan panggung di DTW Sawah Pembuatan Toilet Bersih

												Konsultasi keluar daerah Konsultasi Dalam daerah Pengadaan Perahu Wisata di Pulau Besing Toliet Umum Kampung Ketupat Samarinda Sebrang
	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		1	350.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	Panji-panji keberhasilan pariwisata 10 Kab/Kota Panji-panji keberhasilan pariwisata 10 Kab/Kota Panji-panji keberhasilan pariwisata 10 Kab/Kota

	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	- Lomba Pokdarwis (10 Kab/Kota) - Jambore Balikpapan (Pengadaan Laptop untuk Pokdarwis) 10 Kab/kota - Lomba Pokdarwis (10 Kab/Kota) - Jambore Bontang (Pengadaan Laptop untuk Pokdarwis) 10 Kab/kota - Lomba Pokdarwis (10 Kab/Kota) - Jambore Kukar (Pengadaan Laptop untuk Pokdarwis) 10 Kab/kota
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan (%)	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan / Jumlah Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata x 100	5	600.000.000	5	750.000.000	5	820.000.000	5	

03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	Focus Group Discussion Profilling Investasi Pariwisata di Kota Bontang Focus Group Discussion Profilling Investasi Pariwisata di Kota Balikpapan Focus Group Discussion Profilling Investasi Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur
04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - Kota Samarinda - Kab. Berau Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - Kab. PPU - Kab. Paser Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata - Kab. Kutai Barat - Kab. Mahulu

	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi		3	200.000.000	3	250.000.000	3	270.000.000	3	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - Kota Samarinda - Kota Balikpapan - Kab. Kutai Kartanegara Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - Kota Balikpapan - Kab. Paser - Kota Bontang Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata - Kota Balikpapan - Kota Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan - (Hari) Nusantara		1,65	4.900.000.000	1,65	3.500.000.000	1,65	3.700.000.000	1,65	
			Nusantara			2.950.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
			Mancanegara		2,70	1.950.000.000	2,70	1.500.000.000	2,70	1.700.000.000	2,70	

	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana (%)	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana / Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan x 100	100	4.900.000.000	100	3.500.000.000	100	3.700.000.000	100	Potecast, Sosial Media, Website, Pameran
	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		6	1.130.916.700	7	1.080.916.700	8	1.000.000.000	8	1. Bali Beyond Travael Fair (BBTF) 2. Pameran Unggulan Nusantara 3. Pameran kaltim Expo 4. Pameran Explore Borneo 5. Pembuatan Video Promosi Produk Wisata kaltim 6. Publication Tourism Kalimantan
	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		4	1.460.000.000	8	760.000.000	8	800.000.000	8	1. Tourism Exhibition and Table Top East kalimantan 2. Famtrip Paradise Of East 3. Table Top Meeting 4. Publikasi Kepariwisataaan

03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri		8	693.829.500	11	693.829.500	12	800.000.000	12	1. Penguatan Jaringan Jurnalistik dan Informasi Pariwisata 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Website 3. Updating Berita Pariwisata Berbasis Website dan Sosial Media 4. Pemutahiran Data dan Informasi Pariwisata 5. Perhitungan Jumlah Wisatawan 6. Fasilitasi Informasi Pariwisata 7. Bincang-bincang Pariwisata 8. Koordinasi dan Konsultasi data dan Informasi pariwisata
04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		5	1.615.253.800	6	965.253.800	7	1.100.000.000	7	1. Kegiatan Kerjasama Pariwisata 2. Duta wisata dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 3. Pelayanan TIC Kaltim (Bali dan Samarinda)

												4. Rakernis Bidang Pemasaran Pariwisata 5. Mice (Meeting Incentive Convention Exhibition)
4	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%)	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang / Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pembinaan x 100	75%	5.720.000.000	88%	5.218.000.000	100%	5.450.000.000	100%	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik / jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia x 100	50%	2.905.000.000	84%	3.005.000.000	100%	3.150.000.000	100%	
	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Layanan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1	155.000.000	2	255.000.000	2	255.000.000	2	1. Penyediaan Sarana Prasarana Pelaku Kreatif di Kabupaten / kota 2. Penyediaan Sarana

												Prasarana Penunjang Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur
	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik		14	2.500.000.00 0	16	2.500.000.00 0	18	2.500.000.00 0	18	Event Unggulan : 1. Visit Kaltim Fest 2. Festival Kemilau 3. Pekan kreatif Kalimantan Timur 4. Pesona Kaltim Fest 5. Event Produk Kreatif Unggulan (10 Kab/Kota) 6. Kaltim Film Festival (KFF) 7. Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif 8. Fasilitas Kesenian event- event daerah 9. Dukungan Penyelenggaraa n Event Kabupaten / Kota 10. Launching Kalender Event Kalimantan Timur 11. Lomba Sub Sektor Ekonomi Creative Kalimantan Timur

												12. Pembuatan Video / Film
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		10	250.000.000	10	250.000.000	10	395.000.000	10	1. Sarasehan Pelaku Ekonomi Kreatif 2. Pelaksanaan Up dating data Pelaku Ekraf 10 Kab/Kota 3. Rapat Kerja Bidang Pengembangan Ekonomi kreatif

	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan / Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang diunggulkan x 100	60%	2.815.000.000	80%	2.213.000.000	100%	2.300.000.000	100%	
	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif		1	500.000.000	1	400.000.000	1	487.000.000	1	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Creative Hub
	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Media On Line
	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		4	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	1. fasilitasi pencatatan Hak kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekraf
	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	1. Rencana Aksi Terhadap Talanpekda dan Kontribusi Sektor Ekraf 2. Rencana aksi pengembangan

												sub sektor ekonomi kreatif potensial
	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		10	1.970.000.000	10	1.468.000.000	10	1.468.000.000	10	1. Monitoring Pelaksanaan Event di 10 Kab/Kota 2. Pendampingan Event di 10 Kab/Kota 3. Kurasi Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi (%)	Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi / Jumlah SDM yang Mengikuti Ujian Sertifikasi x 100	33%	5.500.000.000	66%	5.250.000.000	100%	5.478.080.000	100%	100 % dari 639 jumlah pelaku yang dikembangkan
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya / Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang	31%	4.900.000.000	64%	4.700.000.000	100%	4.900.000.000	100%	

				mengikuti Peningkatan Kapasitas x 100								
	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya		140	460.000.000	140	460.000.000	140	460.000.000	140	- Bimtek Pengelolaan RM/resto (PPU, Berau) - Bimtek MICE (BPN, Berau)
	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		150	1.500.000.000	170	1.400.000.000	200	1.500.000.000	200	- Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekraf dalam Pengelolaan Desa Wisata (KSPP I dan KPP 2 {IKN}) - FGD Kemitraan Desa Wisata (KSPP I dan KPP 2 {IKN})
	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan		120	560.000.000	120	560.000.000	120	560.000.000	120	- Bimtek Homestay tingkat lanjutan (3 danau) - Pelatihan Penyajian Kuliner (3 danau) - Pelatihan Pramuwisata

												Minat Khusus (Kukar, Kubar)
	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		60	780.000.000	90	780.000.000	90	780.000.000	90	- Sertifikasi Pemandu Selam (Berau) - Sertifikasi Receptionist/Room Attendant (BPN, Smd)
	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	- Fasilitasi Penggiat Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion dan Seni Pertunjukan dari (Kawasan 3 Danau, KSPP I dan KPP 2)
	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		80	1.000.000.000	80	900.000.000	80	1.000.000.000	80	- Pelatihan Kuliner Kreatif bagi Pelaku EKRAF - Pelatihan Menggambar Motif Batik (Kawasan 3 Danau, KSPP I dan KPP 2)
	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	- FGD Pemetaan SDM Pariwisata Kaltim (SMD)

	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya (%)	Jumlah Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya / Jumlah Pelaku Ekraf yang Mengikuti Pelatihan, Bimtek, dan Pendampingan Ekraf x 100	33%	600.000.000	66%	550.000.000	100%	578.080.000	100%	
	01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		80	600.000.000	8	550.000.000	8	578.080.000	8	- Pelatihan Dasar Barista (Kawasan 3 Danau, KSPP I)
	JUMLAH					43.500.000.000		40.900.000.000		42.345.000.000		

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kalimantan Timur, RPD Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI (Teknis). Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran tujuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kalimantan Timur dengan sumber dana yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI.

Rencana Strategis yang telah disusun ini, diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan di Kalimantan Timur, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan

Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 – 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan yang semakin meningkat/ maju dalam rangka mewujudkan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah.

Kepala Dinas,

Drs. Ahmad Herwansyah, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680204 198803 1 003

RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga akan berakhir. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Petanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050- -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai dasar bagi setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholders dalam melaksanakan program dan kegiatan subsektor perkebunan periode 2024–2026 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekebun Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

- a) Menentukan arah dan memberikan pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan bagi para pelaku pembangunan perkebunan;
- b) Menjadi pedoman penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif;
- b) Menjamin konsistensi pencapaian target indikator kinerja utama serta target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan;
- c) Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan antar level pemerintahan;
- d) Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- e) Menjamin komitmen pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan pembangunan perkebunan; dan
- g) Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yakni terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerahnya, termasuk dukungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perangkat daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, khususnya di subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Dengan demikian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor perkebunan saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor perkebunan di masa yang akan datang.

Sebagai bagian dari elemen pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 - 2023 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, dimana setiap elemennya memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan.

Dalam perjalanan kinerjanya hingga saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejarah perkembangan organisasi yang cukup panjang. Sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



Peraturan Gubernur Kalimantan Timur NomorTahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok **Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.** Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan kebun;
- Pembinaan kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- Pembinaan dan pengelolaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan;

- f) Pembinaan dan pengelolaan Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki susunan organisasi. Adapun struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



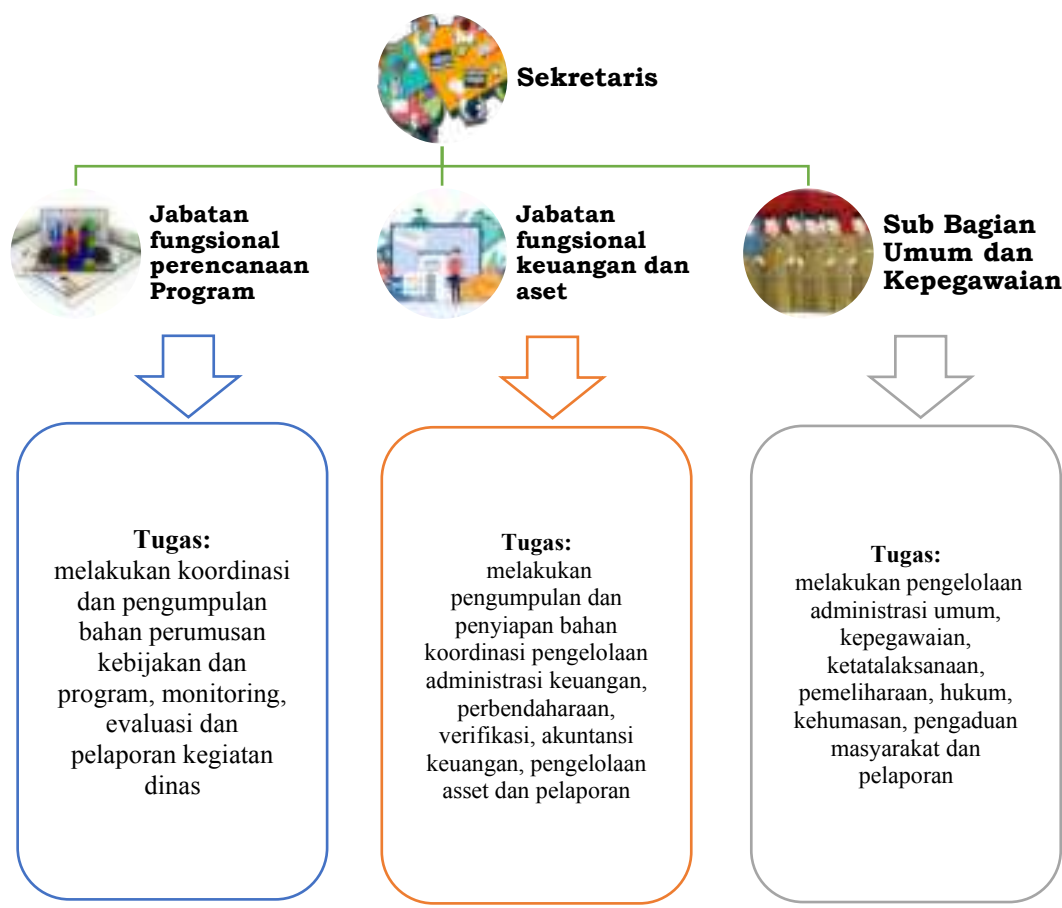
Berdasarkan struktur organisasi di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas dibantu oleh:

a. Sekretaris

Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Perkebunan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, pengaduan masyarakat, dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

	Mengkoordinasikan rencana program dan anggaran		Pengelolaan data dan informasi
	Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat		Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
	Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara		Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

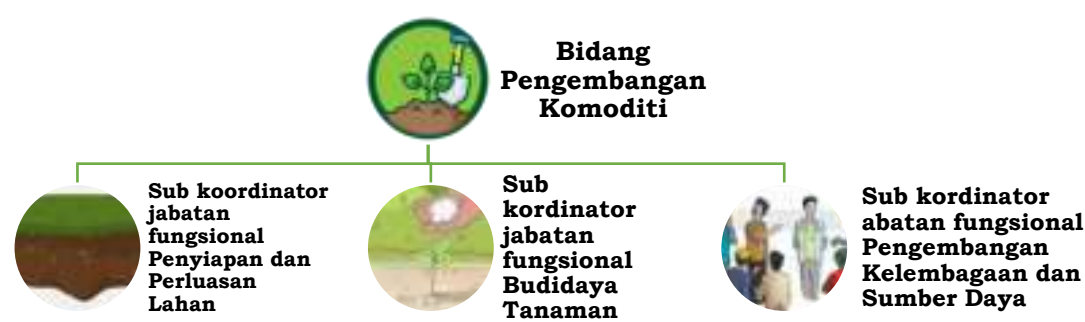


b. Bidang Pengembangan Komoditi

Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas pokok bidang pengembangan komoditi adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan teknis bidang pengembangan komoditi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai fungsi :



Bidang pengembangan komoditi membawahi 3 (tiga) sub kordinator yang masing-masing dipimpin oleh seorang sub kordinator jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi.



- (1) Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Komoditi (Penyiapan dan Perluasan Lahan) mempunyai uraian tugas:
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perluasan lahan dalam wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan perluasan lahan dalam provinsi;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perluasan lahan tingkat provinsi dan neraca sumber daya kebun provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka perluasan status dan fungsi lahan di wilayah provinsi.
- (2) Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Komoditi (Budidaya Tanaman) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi budidaya tanaman;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis budidaya tanaman;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;
 - d. Menyiapkan bahan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;
 - e. Menyiapkan kebutuhan dan penyediaan bahan tanaman, pupuk, pestisida dan alsintan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Pembinaan Usaha) Mempunyai uraian tugas :
- a. Menganalisis dan mengevaluasi permohonan ijin terhadap kesesuaian lahan, pola ruang dalam RTRWP dan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan Usaha dan sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha perkebunan;
 - d. Memproses advis teknis untuk penerbitan rekomendasi perijinan usaha perkebunan;
 - e. Memfasilitasi investasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

c. Bidang Usaha

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang usaha memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang usaha. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjalankan fungsi:



Bidang Usaha membawahi 3 (tiga) Kelompok Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.



- (1) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Pembinaan Usaha) Mempunyai uraian tugas :
- a. Menganalisis dan mengevaluasi permohonan izin terhadap kesesuaian lahan, pola ruang dalam RTRWP dan perencanaan makro pembangunan perkebunan;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan Usaha dan sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lahan oleh pelaku usaha perkebunan;
 - d. Memproses advis teknis untuk penerbitan rekomendasi perijinan usaha perkebunan;
 - e. Memfasilitasi investasi dan mendorong pelaku usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Penanganan Konflik Usaha) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan penanganan konflik usaha;
 - b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan konflik usaha;
 - c. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi penanganan konflik;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian konflik usaha;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Usaha (Pembinaan Kebun Kemitraan) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kebun kemitraan;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan kebun kemitraan;
 - c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi pihak terkait dalam pembinaan kebun kemitraan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perlindungan, penilaian dan konversi kebun kemitraan.
 - e. Melakukan perhitungan dan penetapan harga komoditas perkebunan untuk kebun kemitraan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Bidang Pengolahan dan Pemasaran adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengolahan dan pemasaran. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :



Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi 3 (tiga) Kelompok Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.



- (1) Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Pengolahan Pasca Panen) mempunyai uraian tugas ;
 - a. Menyiapkan standar teknis pengolahan hasil perkebunan;
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha pengolahan pasca panen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap sistem mutu produk olahan hasil perkebunan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke unit pengolahan hasil;
 - e. Mengusulkan perolehan sertifikat indikasi geografis pada varietas perkebunan;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

- (2) Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Bimbingan Usaha) mempunyai uraian tugas ;
 - a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan;
 - b. Menfasilitasi kemitraan usaha pengolahan hasil perkebunan terhadap akses pasar dan permodalan;
 - c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan hasil perkebunan;
 - d. Mengumpulkan data dan informasi potensi dan peluang usaha pengolahan hasil perkebunan;
 - e. Memproduksi olahan hasil komoditi perkebunan;
 - f. Menyebarluaskan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perkebunan;
 - g. Memberikan bimbingan teknis teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

- (3) Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan dan Pemasaran (Promosi dan Pemasaran) mempunyai uraian tugas ;
 - a. Memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, dan stakeholder lainnya;

- b. Menyediakan dan mengelola informasi pasar serta menumbuhkembangkan pusat-pusat pemasaran dan promosi komoditas perkebunan;
- c. Melakukan pembinaan penyediaan dan pengembangan promosi melalui pengamatan pasar;
- d. Memasarkan olahan hasil komoditi perkebunan;
- e. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

e. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang perkebunan berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perkebunan Berkelanjutan melaksanakan fungsi :



Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi 3 (tiga) Kelompok Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.



(1) Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan Berkelanjutan (Pengendalian Kebakaran Kebun) mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran kebun ;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan investigasi serta pengendalian kebakaran kebun;
- c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dalam pengendalian kebakaran kebun;
- d. Melakukan koordinasi penanganan kebakaran lahan kebun dengan instansi terkait;
- e. Melakukan analisa data dan informasi penyebaran titik panas maupun keadaan iklim dalam pengendalian kebakaran kebun;
- f. Meningkatkan peran Brigade Kebakaran Kebun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- g. Menyiapkan bahan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur pengendalian kebakaran kebun;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

(2) Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan Berkelanjutan (Mitigasi Emisi dan Rumah Kaca) mempunyai uraian tugas :

- a. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam melaksanakan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
 - b. Mengidentifikasi dan mengukur keberhasilan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
 - c. Mempromosikan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis yang terkait dengan kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
 - e. Memberikan bimbingan kepada usaha perkebunan dalam memanfaatkan hasil ikutan produk perkebunan untuk pengembangan energi baru terbarukan;
 - f. Menyiapkan laporan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca pada usaha perkebunan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan Berkelanjutan (Konservasi Lahan dan Air) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan kebijakan terkait prinsip-prinsip konservasi lahan dan air;
 - b. Mengidentifikasi, menginventarisasi dan melindungi kawasan-kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada usaha perkebunan;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan konservasi lahan dan air;
 - d. Mendorong upaya penerapan sistem usahatani konservasi terpadu;
 - e. Melakukan pembinaan pengembangan irigasi, drainase dan embung pada usaha perkebunan;
 - f. Menyiapkan penyusunan database kegiatan konservasi lahan dan air; dan
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

g. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program, dan melaksanakan urusan ketatausahaan dengan menyelenggarakan fungsi:



UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu:

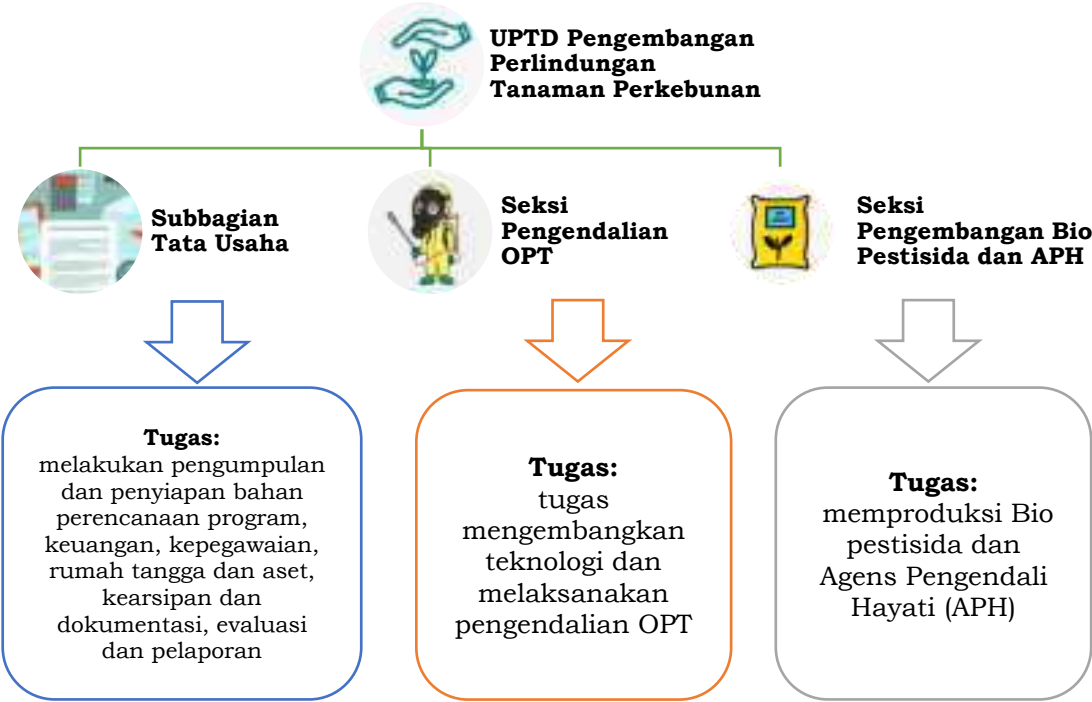


h. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 14, UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:



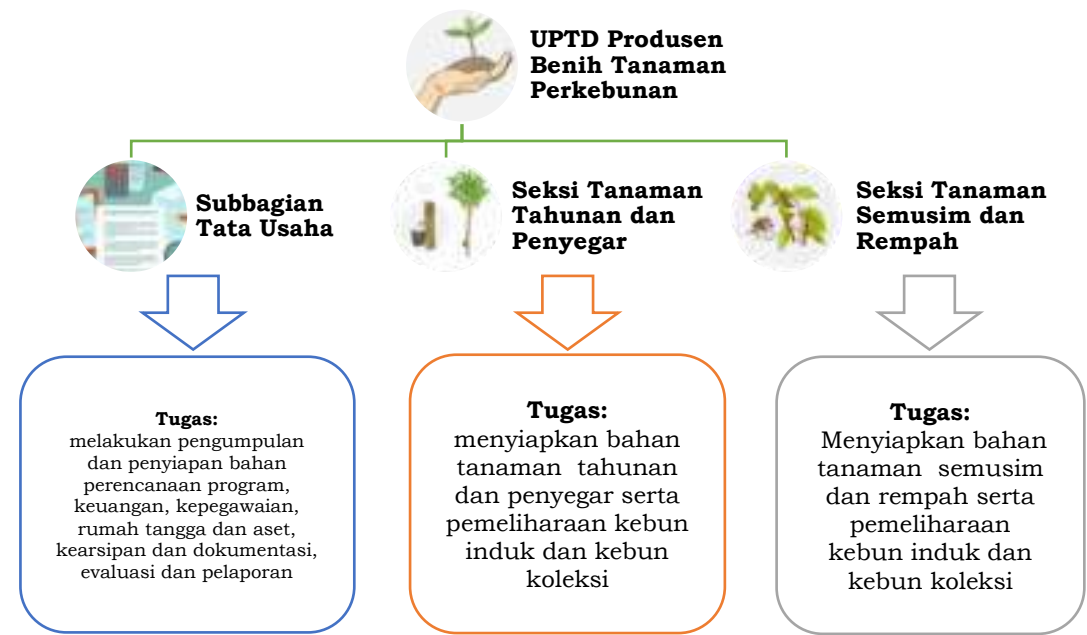
i. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 25, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu menyiapkan bahan tanam perkebunan dan pemantauan, evaluasi program

kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP), yaitu:



Perencanaan yang terintegrasi/program kolaborasi atau yang disebut juga cross cutting program menjadi salah satu penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Terkait hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun cross cutting program yaitu perencanaan yang terintegrasi sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022, jumlah keseluruhan SDM Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang, dimana 45 (empat puluh lima) PNS Laki-laki dan 32 (tiga puluh dua) PNS perempuan, dan pegawai honorer/PPT sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yang terbagi 19 (Sembilan belas) laki-laki dan 24 (dua puluh empat) perempuan. Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Komposisi Kepegawaian
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-3	S-2	S-1	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
PNS	45	32	14	46	17	0	0	15	38	0	24	0	0
Pegawai Honor/PT T	19	24	0	0	0	0	0	0	41	0	2	0	0
Jumlah PNS + Honor	64	56	14	46	17	0	0	15	79	0	26	0	0

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (2022)

Data komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis, mengingat sebagian besar SDM berpendidikan sarjana. Namun demikian dengan semakin besarnya tuntutan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan mengharuskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga setiap aparatur kedepannya diharapkan akan memiliki kualifikasi dan spesifikasi khusus di bidang pertanian (khususnya subsektor perkebunan) sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dan UPTD agar tercipta suasana

profesionalitas dalam bekerja. Disamping itu diperlukan pengisian pegawai baru untuk menggantikan yang memasuki usia pensiun.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan (pekebun). Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, baik itu yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
	Tanah		
1	Tanah	463.664	m ²
	Gedung, Bangunan dan ruangan		
1	Gedung	1 9 1.755,25	Unit (Bertingkat) Unit (Tidak Bertingkat) m ²
2	Pos Jaga	2	Unit
3	Area Parkir	3	Area
4	Ruang Rapat	6	Ruang
5	Ruang Arsip	1	Ruang
6	Gudang	1	Ruang
7	Koperasi	1	Buah
8	Taman Dalam	7	Area
	Peralatan dan Mesin		
	Alat Besar		
1	Diesel Pile Driver	3	Unit
2	Mesin proses lainnya	1	Unit
3	Pompa air	8	Unit
	Komputer		

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	P.C Unit	98	Unit
2	Laptop	67	Unit
3	Note Book	95	Unit
4	Tablet PC	5	Unit
5	Personel komputer lainnya	4	Unit
6	Scanner (peralatan mini komputer)	16	Unit
7	Peralatan mini komputer lainnya	2	Unit
8	Monitor	2	Unit
9	Printer	138	Unit
10	Scanner	16	Unit
11	Peralatan personel komputer lainnya	9	Unit
12	Server	1	Unit
13	Router	1	Unit
14	Peralatan jaringan lainnya	2	Unit
	Alat Kantor		
1	Mesin ketik manual standard	6	Unit
2	Mesin ketik listrik	6	Unit
3	Mesin hitung elektrik	3	Unit
4	Mesin fotocopy lainnya	1	Unit
5	Camera CCTV	24	Unit
6	Alat Pengancur Kertas	2	Unit
7	Mesin absensi	4	Unit
8	LCD Projector/Infocus	8	Unit
9	Mesin pemotong rumput	15	Unit
10	Mesin vacuum clenaer	1	Unit
11	A.C Window	32	Unit
12	A.C Split	56	Unit
13	Televisi	22	Unit
14	Camera Elektronik	14	Unit
15	Computer Compatible	4	Unit
16	UPS	44	Unit
17	Dispenser	4	Unit
18	Display	4	Unit
19	Equalizer	1	Unit

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
20	Faximile	2	Unit
21	Handy Cam	11	Unit
23	Handy Talky	4	Unit
24	Layar Film	5	Unit
25	Loudspeaker	71	Unit
26	Mesin Fotocopy	1	Unit
27	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
28	Mesin Ketik Manual	1	Unit
29	Mesin Pengering	1	Unit
30	Mesin Penghalus	1	Unit
31	Mesin Penghisap Debu	1	Unit
32	Mesin Proses Lain-Lain	1	Unit
33	Mic Conference	31	Unit
34	Microphone	14	Unit
35	Mixer PVC	1	Unit
36	Overhead Projector	1	Unit
37	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit
40	Peralatan studio Visual Lain	3	Unit
41	Pesawat Telephone	14	Unit
42	Power Amplifier	1	Unit
43	Power Supply	1	Unit
44	Server	1	Unit
45	Sound System	1	Unit
46	Teletype Scanner	1	Unit
48	Video Monitor	1	Unit
49	Video Tape Recorder Portable	2	Unit
50	Wireless	2	Unit

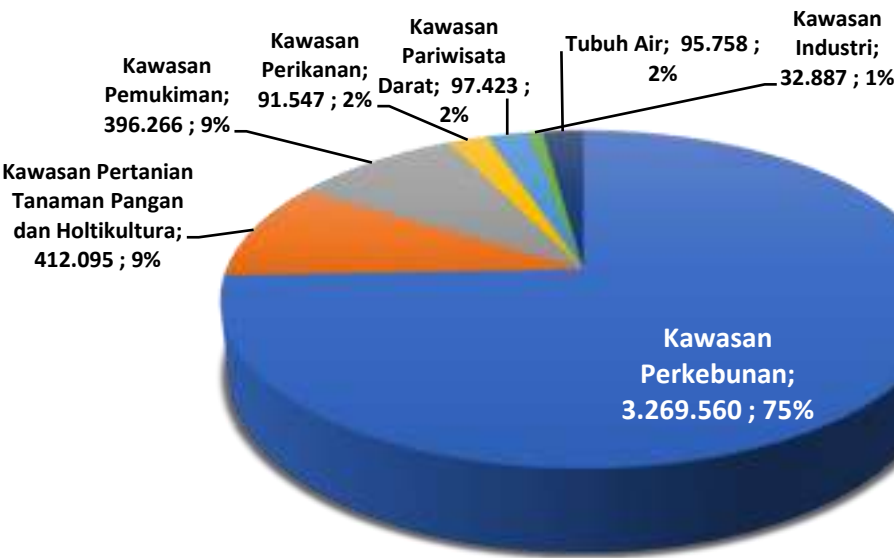
Sumber: Daftar Aset Tetap Aset lainnya 2022

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencukupi kebutuhan. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah komputer (PC dan Notebook) dengan jumlah pegawai, jumlah perangkat komputer sebanyak 193 buah dengan jumlah pegawai 64 orang sehingga telah memenuhi kebutuhan pegawai. Fasilitas printer juga tersedia pada setiap subbidang/subbagian. Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar

perolehannya adalah di bawah tahun 2015. Banyak aset seperti komputer dan printer masa manfaatnya sudah lebih 5 tahun sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara data dengan kondisi di lapangan sehingga masih dibutuhkan pengadaan dan penggantian alat pengolah data yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan datang.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan-kawasan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Areal Penggunaan Lain (APL) Provinsi Kalimantan Timur

Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun subsektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas ± 5,6 Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas ± 4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ± 2,8 Juta Ha.

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2022 terdapat ±2,7 Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas ±1,2 Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah diidentifikasi melalui citra satelit, baru ±650 Ribu Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya HGU, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ±907 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2022 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pelayanan (performance results) dengan perjanjian kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada RPJMD periode 2019-2023 subsektor perkebunan memainkan peran langsung yang penting dalam mengemban amanah untuk mensukseskan visi dan misi Gubernur terpilih dengan sasaran sebagai berikut:



Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka capaian indikator kinerja utama pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 periode 2019-2022, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 Periode 2019-2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkean	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	17.544	17.405	18.773	17.288	19.087	16.951,83	20.493	17.388
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	43	61	48	63	53	62	58	80
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	89	84.81	92	124,59	108	151,04	110	162.66

Sumber: Angka sangat sementara BPS Prov. Kaltim tahun 2020

**) Sumber: angka sementara sekretariat ISPO

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan pada tahun 2022 rata-rata keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan berdasarkan angka sangat-sangat sementara triwulan IV pada tahun 2022 mencapai 17.388 Miliar Rupiah (84,85%) dari target 20.493 Miliar Rupiah.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan adalah penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,36 Juta Ton menjadi 17,02 Juta Ton di tahun 2022 (berdasarkan angka sementara tahun 2022) atau turun 340.711 Ton (-1,96%) dari tahun 2021. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,27 juta ton TBS menjadi 16,94 juta ton TBS atau turun 339.097 ton TBS (-1,96%) dari tahun 2021.

Penurunan produksi komoditi perkebunan tersebut terjadi akibat kenaikan harga pupuk, kelangkaan pupuk di tahun 2022 dan kurangnya kegiatan intensifikasi (pemupukan) semenjak pandemi covid-19 yang berimbas pada penurunan aktivitas pekebun. Selain itu penghapusan pupuk subsidi untuk beberapa komoditi mulai 1 Juli 2022, adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO) serta intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 baru dirasakan hasilnya tahun selanjutnya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi komoditi perkebunan pada tahun 2022.

Namun demikian capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mencapai 4,21% dari target 5,2% atau 80,96% (Sumber BPS Kaltim angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022). Sedangkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pertanian dalam arti luas terus mengalami peningkatan dari 58,61 % di tahun 2021 menjadi 59,80% di tahun 2022 atau meningkat 2,03%.

Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan produksi komoditi perkebunan di tahun berikutnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan komoditi perkebunan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya dan penanganan hama/penyakit. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013 - 2022



*Data sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

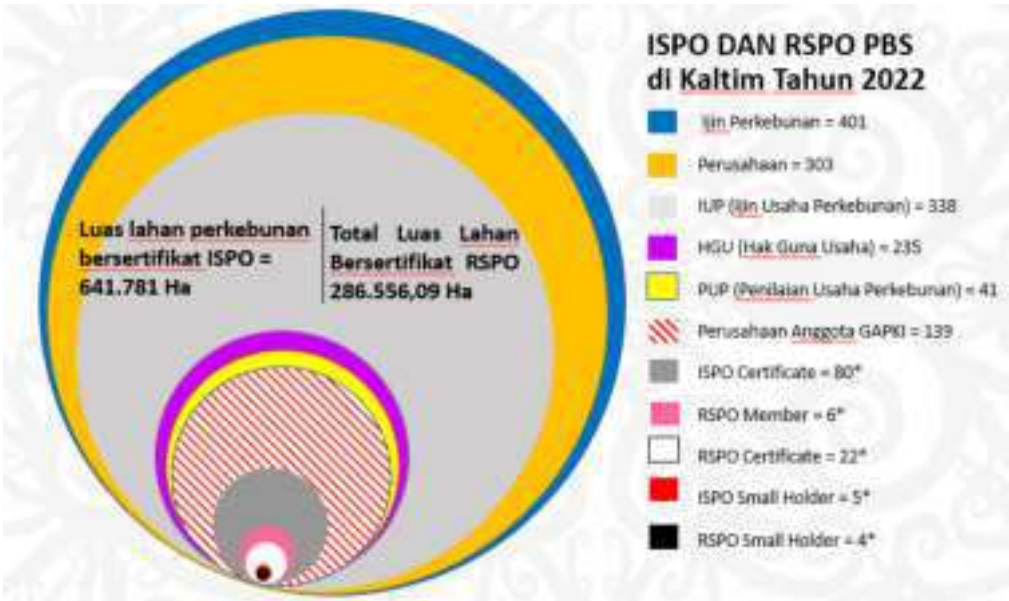
** Data angka sangat sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

*** Data angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022 (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 2.3 Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022

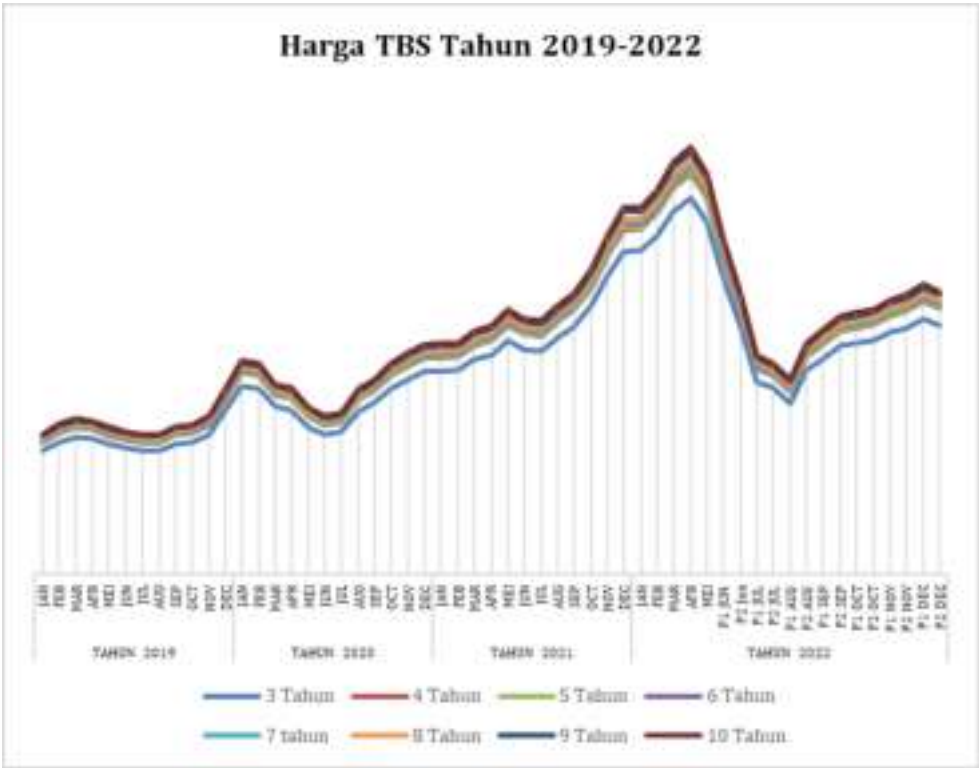
- b. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 137,93% yakni sebanyak 80 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dengan luas 641.781 Ha atau 27,15% dari total IUP tahun 2022 seluas 2.364.017 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO". Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri.



Gambar 2.4
Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Tahun 2022

- b. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2022 sebesar 162,66 atau mencapai 147,87%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini didorong oleh membaiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) selama tahun 2021 hingga 2022. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2022:

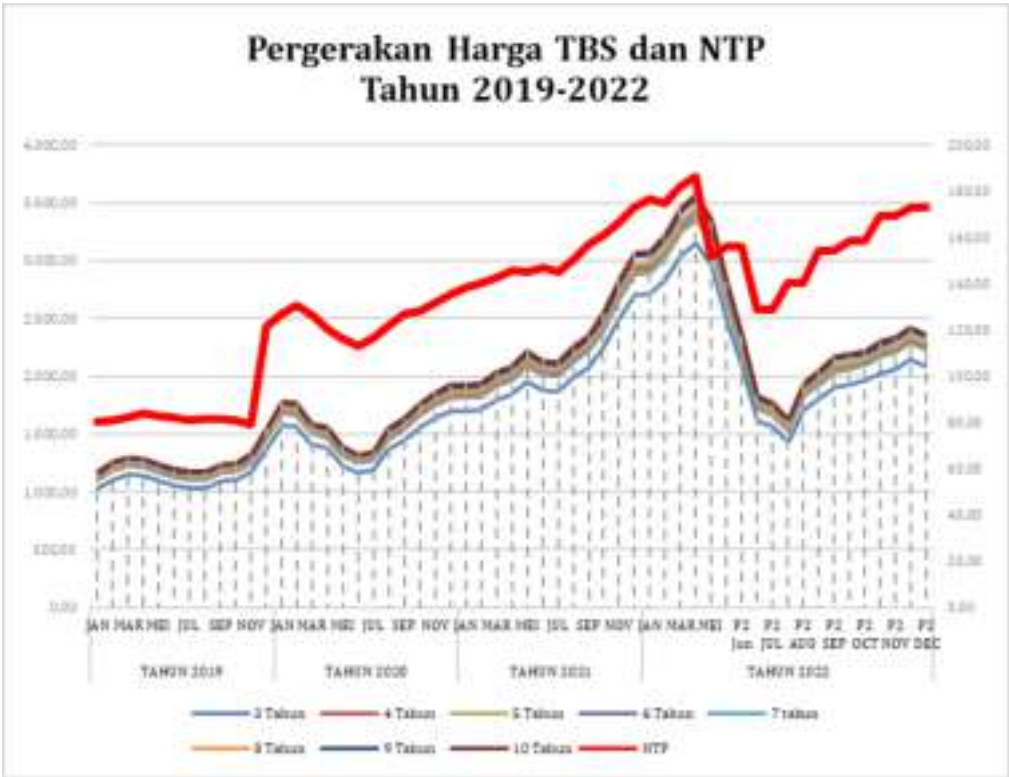


Gambar 2.5 Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari tahun 2019 hingga Desember 2022



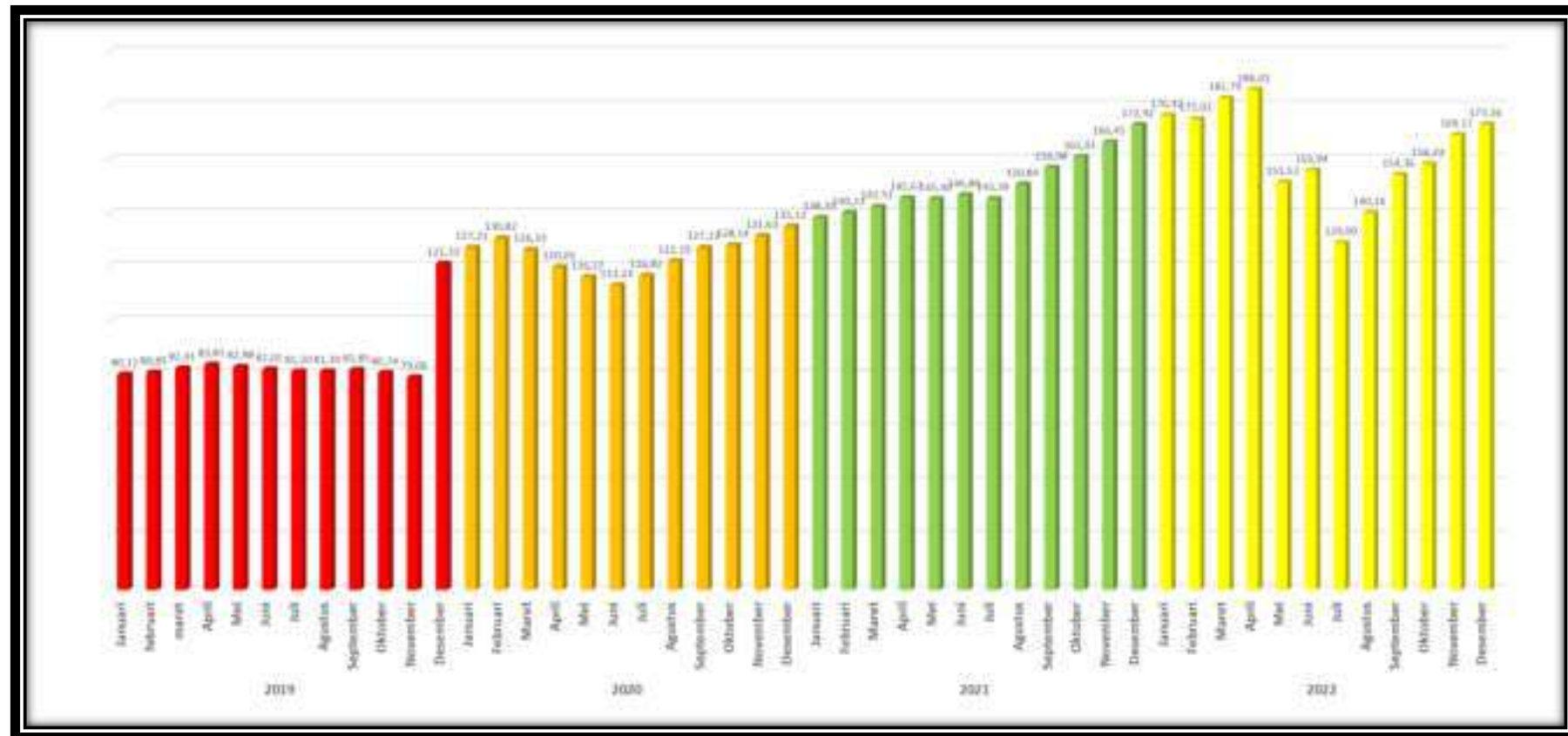
Gambar 2.6. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 terus membaik walaupun sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II mencapai Rp. 1.769,76 dan bulan Agustus periode II mencapai Rp. 1.628,21. Dimana harga tertinggi selama tahun 2022 pada bulan April yaitu mencapai Rp. 3.577,69. Dan NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 129% dan Agustus mencapai 140,16% serta NTP tertinggi terjadi pada bulan April mencapai 186,01%. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan NTP perkebunan rakyat berbanding lurus dengan pergerakan harga TBS. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2022 terlihat pada grafik berikut:



Gambar 2.7. Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Sedangkan perkembangan NTP tanaman perkebunan rakyat dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.8 Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No.	Sasaran Strategis	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Ket
					2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah		Kontribusi lapangan usaha subsektor perkebunan terhadap PDRB	Persentase	4,33	4,94	4,97	4,45	
		Meningkatnya PDRB subsektor perkebunan	Nilai produk lapangan usaha subsektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	17.370	17.288	16.951,83	17.388	
		Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Perusahaan	62	72	62	80	
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Pekebun	Persentase	84,81	124,59	151,04	162,66	

Pada tahun 2019, rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 110,14 %. Capaian sasaran yang belum tercapai adalah meningkatnya kesejahteraan pekebun yang diukur dari rata-rata dalam 1 tahun NTP sub sektor perkebunan yaitu sebesar 84,81 (95,29%), sedangkan capaian sasaran yang paling tinggi adalah jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebesar 141,86%. Belum tercapainya kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dimana nilai produk sub sektor perkebunan terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.037,23 Miliar Rupiah atau 6,76% dari 15.324,15 Miliar Rupiah pada tahun 2017 dan menjadi 16.361,38 Miliar Rupiah pada tahun 2018, namun data tersebut belum bisa menggambarkan capaian sasaran strategis 1 (Satu) yaitu meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan pada tahun 2019. Hal ini karena data yang dirilis oleh BPS merupakan data sangat sementara 2018. Sedangkan capaian sasaran strategis 3 (Tiga) yaitu meningkatnya kesejahteraan pekebun belum mencapai target (95,29%). Hal ini disebabkan sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur 88% didominasi oleh komoditi kelapa sawit. Dimana sampel dalam perhitungan NTP lebih banyak menggambarkan harga TBS. Pada tahun 2019 harga TBS mengalami penurunan yaitu di Bulan Januari-Oktober 2019. Penurunan harga komoditi sawit tersebut berakibat pula pada penurunan NTP.

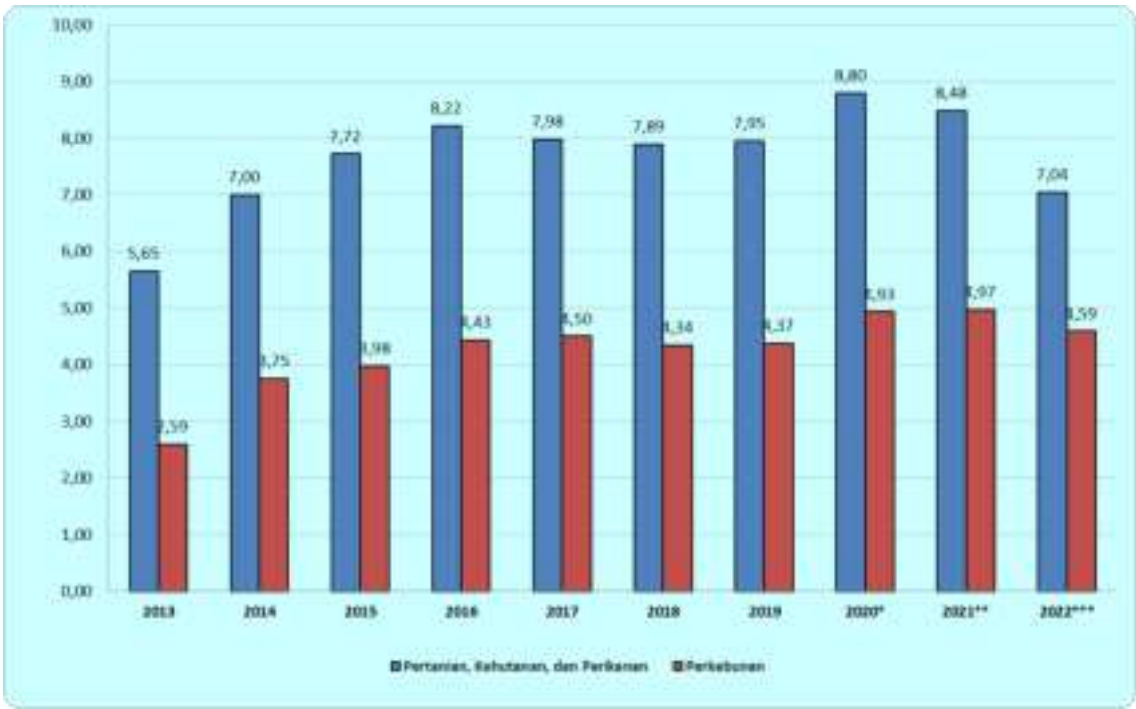
Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mencapai 122,76%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan mencapai 82,84% yakni sebesar 15.552 Miliar Rupiah pada Triwulan III tahun 2020.
2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 150% yakni sebanyak 72 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Terdapat penambahan 10 perusahaan dari capaian tahun sebelumnya.
3. Sasaran ketiga: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan rata-rata NTP sebesar 124,59 atau mencapai 135,42%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi.

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 115,22%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan pada tahun 2021 mencapai 16.952 Miliar Rupiah (88,81%) dari target 19.087 Miliar Rupiah. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,92 jt Ton menjadi 17,46 Juta Ton di tahun 2021 (berdasarkan angka sementara 2021) atau turun 331.041 Ton (-1,86%) dari tahun 2020. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,72 juta ton TBS menjadi 17,37 juta ton TBS atau turun 346.746 ton TBS (-1,94%) dari tahun 2020. Selain itu terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 berimbas pada penurunan suply dan demand CPO yang berakibat pula pada penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan lockdown. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2021.
2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 116,98% yakni sebanyak 62 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dengan luas 523.601,39 Ha atau 21,94% dari total IUP tahun 2021 seluas 2.386.496 Ha. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".
3. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2021 sebesar 151,04 atau mencapai 139,85%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh tingginya harga TBS selama tahun 2021.

Berikut perkembangan kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2022.



Gambar 2.9
Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Kalimantan Timur
Tahun 2013-2022

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat perkembangan pemanfaatan lahan perkebunan dan produksi sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam dan Produksi Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
Pemanfaatan Lahan					
1	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	3.269.561	3.269.561	3.269.561	3.269.561
2	Lahan yang telah dibebani ijin perkebunan				
	a.Luas (Ha)	2.729.118	2.888.609	2.748.708	2.751.698
	b.Jumlah Ijin	367	405	401	401
3	IUP				
	a.Luas (Ha)	2.548.880	2.524.537	2.386.496	2.364.017
	b.Jumlah Ijin	335	340	338	338
4	HGU				
	a.Luas (Ha)	1.181.639	1.257.804	1.223.531	1.235.804
	b.Jumlah Ijin	200	217	229	235
5	IUP yang belum HGU				
	a.Luas (Ha)	1.367.240	1.266.733	1.162.965	1.128.213
	b.Jumlah Ijin	135	123	109	103

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
Pemanfaatan Lahan					
6	Ijin lokasi yang tidak ada progres(Ha)				
	a.Luas (Ha)	213.340	363.749	362.687	388.156
	b.Jumlah Ijin	32	65	63	63
7	Lahan yang belum dimanfaatkan(Ha)	731.336	732.667	885.334	907.814
8	Lahan yang belum dibebani ijin dikurangi luas kebun non sawit (Ha)	436.799	362.989	499.797	496.807
Realisasi Tanam dan Produksi					
1	Luas Komoditas Perkebunan	1.389.372	1.540.728	1.538.274	1.538.274
2	Luas Tanam Sawit	1.227.665	1.378.136	1.374.543	1.374.543
3	Luas Tanam Kebun Inti	894.329	938.930	1.005.691	933.349
4	Luas Tanam Kebun Rakyat/Plasma (Ha)	255.446	439.206	373.479	371.479
5	Luas Tanam Non Sawit (Ha)	161.707	162.592	163.731	163.731
6	Persentase Luas Plasma saat ini (Permentan 98 Tahun 2013 Pasal 15)	20,92	21,26	22.01	22,11
7	Produksi				
	a.TBS (Ton)	18.426.434	17.723.864	17.375.224	17.277.404
	b.Kernel (Ton)	815.352	816.760	602.142	602.142
	c.CPO (Ton)	4.038.405	3.899.250	3.763.789	3.715.612
	d.Rendemen (%)	21,92	22,38	22.91	22,91
8	a.Jumlah Pabrik Minyak Sawit	89	93	97	97
	b.Kapasitas Terpasang (Ton)	5.035	5.215	5.347	5.347
	c.Kapasitas Terpakai (Ton)	4.469	4.649	4.652	4.652

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2022)

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, terutama dalam masa desentralisasi fiskal dan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot (%)	Nilai 2021	Nilai 2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	27,55	21,60
2	Pengukuran Kinerja	20	18,75	15,40
3	Pelaporan Kinerja	10	12,22	8,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	5,73	14,80
5	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja	20	11,88	13,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,12	73,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022 di atas, pencapaian sasaran strategis dalam penetapan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2022 secara umum belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah minat masyarakat terhadap komoditi yang dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh, stabilitas harga, aspek pemasaran serta kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit serta pengaruh perubahan iklim, pandemi covid 19.

Selain itu, jika dilihat dari kondisi ekonomi bidang pertanian subsektor perkebunan di Kalimantan Timur tiga tahun terakhir secara konsisten mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai titik negatif pada tahun 2020 dalam posisi minus, hal ini juga terjadi pada subsektor tanaman perkebunan yang mengalami perlambatan hingga mencapai 0,47%. Penurunan LPE sektoral terjadi cukup signifikan dimana pada tahun 2020 subsektor tanaman perkebunan tumbuh sebesar 3,14% dan menjadi 0,47% dalam kurun waktu 5 tahun. Demikian pula, produksi tanaman perkebunan unggulan, utamanya komoditi non sawit, masih belum mengalami peningkatan produksi bahkan cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan sudah mulai optimal pada tahun 2022, dimana capaiannya mengindikasikan kesejahteraan pekebun telah mengalami peningkatan yang signifikan. Lambatnya regenerasi tenaga kerja pada sektor pertanian, menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan potensi SDM sektor pertanian khususnya pertanian tanaman perkebunan. Hasil analisis ini kedepan menjadi pekerjaan rumah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk diselesaikan, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Unit PD
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)			4,34	5,10	5,40	5,00	5,20	5,30	4,34	4,94	4,97	4,59	-	85,10	91,48	99,40	88,27	-	Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD PBP, UPTD PBTP, Bidang Usaha
Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)			16.361,00	17.544,00	18.773,00	19.087,00	20.493,00	21.997,00	17.405,00	17.288,00	16.951,83	17.388,00	-	99,21	92,09	88,81	84,85	-	Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD PBP, UPTD PBTP, Bidang Usaha
Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)			38,00	43,00	48,00	53,00	58,00	63,00	61,00	63,00	62,00	80,00	-	141,86	131,25	116,98	137,93	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
NTP Perkebunan Rakyat (%)			88,50	89,00	92,00	108,00	110,00	112,00	84,81	124,59	151,04	162,54	-	95,29	135,42	139,85	147,76	-	Bidang Pengembangan Komoditi dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	80,00	83,00	-	-	-	89,71	88,45	-	-	-	112,14	106,57	-	-	-	Sekretariat
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	5,00	5,00	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	Sekretariat
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	20,00	20,00	-	-	-	74,07	20,00	-	-	-	370,35	-	-	-	-	Sekretariat
Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)			58,83	63,00	68,00	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	80,00	83,00	-	-	-		82,03	-	-	-	-	98,83	-	-	-	UPTD PBP
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	3,00	3,00	-	-	-		3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	UPTD PBP
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	UPTD PBP
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	80,00	83,00	-	-	-	78,00	86,16	-	-	-	97,50	-	-	-	-	UPTD P2TP
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	UPTD P2TP
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	UPTD P2TP
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			-	-	83,00	-	-	-	-	83,05	-	-	-	-	103,81	-	-	-	UPTD PBTP
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			-	-	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	UPTD PBTP
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			-	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	UPTD PBTP
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	89,00	89,09	-	-	-	103,49	100,10	-	Sekretriati
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)		-	-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	82,39	83,59	-	-	-	95,80	93,92	-	UPTD PBP

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	84,00	89,10		-	-	97,67	100,11	-	UPTD P2TP
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)			-	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	87,13	87,08		-	-	101,31	97,84	-	UPTD PBTP
Produksi komoditas perkebunan (Ton)			13.249.959,00	15.288.465,00	16.812.938,00	-	-	-	14.145.414,00	16.809.560,00	-	-	-	92,52	99,98	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
a. Kelapa Sawit (Ton TBS)			13.164.310,00	15.197.504,00	16.717.254,00	-	-	-	14.067.789,00	16.717.254,00	-	-	-	92,57	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
b. Karet (Ton)			63.510,00	70.533,00	74.060,00	-	-	-	59.917,00	70.682,00	-	-	-	84,95	95,44	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
c. Kelapa (Ton)			13.647,00	12.105,00	12.468,00	-	-	-	8.591,00	12.468,00	-	-	-	70,97	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
d. Kakao (Ton)			2.435,00	3.006,00	3.307,00	-	-	-	2.360,00	3.307,00	-	-	-	78,51	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
e. Lada (Ton)			6.057,00	5.317,00	5.849,00	-	-	-	6.757,00	5.849,00	-	-	-	127,08	100,00	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Kelompok tani pengendalian hama terpadu yang handal (Kel. Tani)			19,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Jumlah petugas dan tenaga teknis yang terampil (Orang)			60,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Gabungan Kelompok Tani yang mandiri (Gapoktan)			-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)			80,00	75,00	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	133,07	-	-	-	-	UPTD PBTP
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)			80,00	-	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD PBTP
Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)			4,00	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)			5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.486.546,00	-	-	-	-	124,33	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)			5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.486.546,00	-	-	-	-	124,33	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah benih yang beredar (benih)			2.825.176,00	-	2.905.176,00	-	-	-	-	6.749.812,00	-	-	-	-	232,34	-	-	-	UPTD PBP
Produksi komoditas perkebunan (Ton)			-	-	-	17.136.849,15	18.126.490,20	18.313.874,25	-	-	17.363.298,00	17.022.588,00		-	-	101,32	93,91	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit) (Ton TBS)			-	-	-	17.036.402,00	18.020.894,00	18.197.504,00	-	-	17.375.224,00	-		-	-	101,99	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (karet) (Ton)			-	-	-	77.763,00	81.651,00	90.000,00	-	-	70.010,00	-		-	-	90,03	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa) (Ton)			-	-	-	12.479,00	12.500,00	12.853,00	-	-	10.164,00	-		-	-	81,45	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (kakao) (Ton)			-	-	-	3.771,00	4.368,00	5.000,00	-	-	2.180,00	-		-	-	57,81	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (lada) (Ton)			-	-	-	6.434,00	7.077,00	8.517,00	-	-	4.173,00	-		-	-	64,86	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Produksi Komoditi Perkebunan (pala) (Ton)			-	-	-	0,15	0,20	0,25	-	-	0,15	-		-	-	100,00	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)			-	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	34,00	36,00		-	-	113,33	120,00	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Luas kebun yang dibangun (Ha)			-	-	-	1.425.580,00	1.462.645,00	1.500.674,00	-	-	1.551.343,00	1.575.966,00		-	-	108,82	107,75	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)			-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00		-	-	100,00	100,00	-	Bidang Pengembangan Komoditi dan Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil
Jumlah benih yang beredar (Benih)			-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.121.600,00	6.550.000,00		-	-	102,03	109,17	-	UPTD PBP
Persentase konflik yang berhasil ditangani (%)			5,30	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-		100,00	-	-	1,00	-	Bidang Usaha
Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-		100,00	-	-	8,00	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Sertifikat Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)			98,00	32,00	35,00	-	-	-	30,00	-	-	-		93,75	-	-	11,00	-	Bidang Usaha
Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)			400,00	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-		100,00	-	-	18,00	-	Bidang Usaha
Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)			5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-		100,00	-	-	20,00	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)			-	40,00	-	-	-	-	80,00	-	-	-		200,00	-	-	23,00	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)			30,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	-	-		100,00	-	-	25,00	-	UPTD P2TP
Jumlah Bio Pesticida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)			2.500,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-		100,00	-	-	27,00	-	UPTD P2TP
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)			2.085.338.000,00	-	1.087.534.440,00	-	-	-	-	996.352.513,00	-	-		-	91,62	-	29,00	-	UPTD P2TP
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)			-	-	-	4,08	4,07	4,04	-	-	6,73	7,92		-	-	164,99	194,74	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)			-	-	-	35,00	35,00	35,00	-	-	41,00	36,00		-	-	117,14	102,86	-	Bidang Usaha
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)			-	-	-	1.047.138.860,00	916.648.000,00	774.940.000,00	-	-	1.044.792.912,00	889.438.167,00		-	-	99,78	97,03	-	UPTD P2TP
Persentase Produk yang memiliki sertifikat (%)			20,00	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-		100,00	-	-	-	-	UPTD PBP
Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)			5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-		100,00	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil
Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)			5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-		100,00	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil
Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)			-	-	2,00	-	-	-	-	1,00	-	-		-	50,00	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil
Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)			-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00		-	-	100,00	100,00	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)			-	-	-	75,00	80,00	85,00	-	-	92,32	94,08		-	-	123,09	117,60	-	UPTD PBTP

2.3.2. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian Tujuan Dinas Perkebunan. Tabel 2.12 di bawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022.

Pada tahun 2019, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 48.353.749.900,- dengan total realisasi sebesar Rp. 43.339.221.907,- atau 89,75 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.697.169.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.376.592.868,- atau 84,21% dari pagu dan Belanja Langsung Rp. 33.656.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.022.629.039,- atau 92,17 % dari pagu.

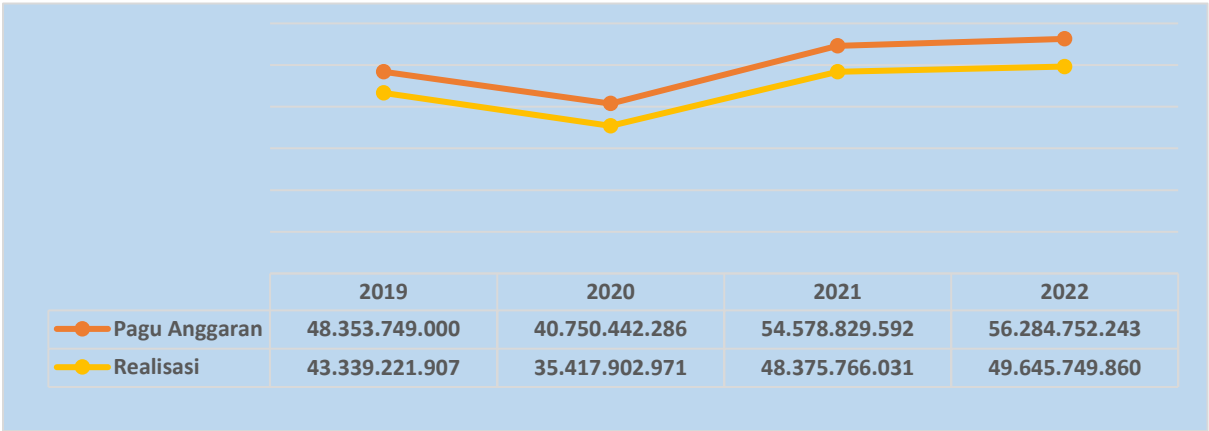
Pada tahun 2020, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 65.442.861.280,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.631.612.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 51.811.249.280,-. Namun pada bulan Maret 2020 telah terjadi kejadian luar biasa akibat pandemi covid-19 sehingga pada bulan April 2020 Belanja Langsung mengalami rasionalisasi sebesar 50% menjadi Rp. 39.536.962.598,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.631.612.000,- dan Belanja Langsung menjadi Rp. 25.905.350.598,-. Dan pada bulan Oktober 2020 Dinas Perkebunan mendapat anggaran biaya tambahan sebesar Rp. 1.181.150.000,- sehingga alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan menjadi Rp. 40.750.442.285,50 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.540.612.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 26.209.830.285,50,- dengan total realisasi sebesar Rp. 35.417.902.971 atau 86,91 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.789.708.535,- atau 81,08% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.628.294.436,- atau 90,15%.

Pada tahun 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 54.524.471.000,- terdiri dari program penunjang sebesar Rp. 26.546.275.000,- dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000,-. Dan melalui mekanisme perubahan APBD 2021 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang

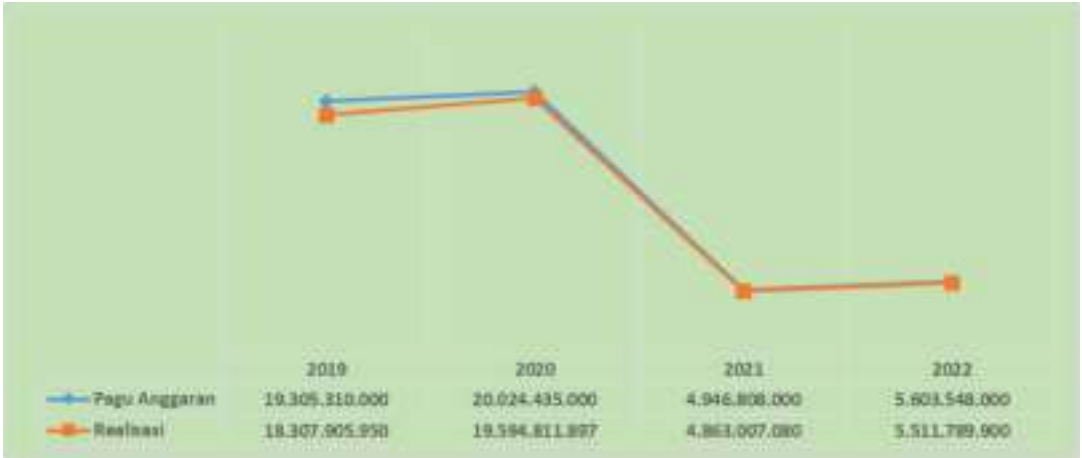
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan menjadi Rp. 54.578.829.592,- (bertambah Rp. 54.358.592,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 26.600.933.592,- dan program pembangunan sebesar Rp. 27.978.196.000,-, dengan total realisasi sebesar 48.375.766.031,- (88,64%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 23.838.334.677,- (89,62%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.537.431.354,- (87,70%)

Pada tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 53.940.555.342,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 25.353.633.342,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.586.922.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menjadi Rp. 56.284.752.243,- (bertambah Rp. 2.344.196.901,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 27.365.880.243,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.918.872.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 49.645.749.860,- (88,20%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 25.632.820.123,- (93,67%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.012.929.737,- (83,04%).

Pagu anggaran yang bersumber dari APBN dari tahun 2019 - 2022 mengalami penurunan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp. 19.305.310.000,- dan pada tahun 2022 turun menjadi Rp. 5.603.548.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran yaitu pada tahun 2019 mencapai 94,83 % dan tahun 2022 mencapai 98,36 %.



Gambar 2.10
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBD
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022



Gambar 2.11
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2022

Anggaran dan realisasi pendanaan tergambar dalam tabel 2.14 dan 2.15 berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		Unit PD
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	15.143.720.000	10.387.335.000	-	-	-	13.586.851.900	8.602.374.400	-	-	-	0,90	0,83	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	275.800.000	491.400.000	-	-	-	263.047.000	464.349.800	-	-	-	0,95	0,94	-	-	-	-	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	542.400.000	475.065.000	-	-	-	526.185.650	472.311.200	-	-	-	0,97	0,99	-	-	-	-	-	Bidang Usaha
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	148.450.000	-	-	-	-	138.693.780	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-	-	Bidang Usaha
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	1.053.000.000	-	-	-	-	1.023.424.269	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	216.910.500	-	-	-	-	198.103.550	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	395.800.000	-	-	-	-	385.982.223	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	228.075.000	-	-	-	-	221.709.300	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Program Konservasi Lahan dan Air	247.750.000	-	-	-	-	241.406.900	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	355.775.000	-	-	-	-	308.165.900	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	339.425.000	-	-	-	-	311.943.300	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Komoditi
Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	295.575.000	-	-	-	-	294.194.700	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	Bidang Usaha

Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	347.250.000	-	-	-	-	343.599.806	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Pengendalian Kebakaran Kebun	271.500.000		-	-	-	259.085.330	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	Bidang Perkebunan Berkelanjutan
Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	626.260.000		-	-	-	607.515.100	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	UPTD PBP
Program pengujian dan sertifikasi benih	401.105.000		-	-	-	398.387.750	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	UPTD PBP
Program Pengendalian OPT	461.284.000		-	-	-	441.927.196	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	425.060.000		-	-	-	419.858.951	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Program penyediaan bahan tanaman	1.495.388.000		-	-	-	1.334.604.850	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-	UPTD PBTP
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	844.330.000	-	-	-	-	830.746.200	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-	-	Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	-	341.960.000	-	-	-	-	339.673.600	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	UPTD PBP
Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	-	734.305.000	-	-	-	-	668.396.892	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-	-	UPTD P2TP
Program Penyediaan Bahan Tanaman	-	1.435.142.168	-	-	-	-	1.388.963.500	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	UPTD PBTP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	26.600.633.592	27.365.880.243		-	-	23.838.334.677	25.632.820.123		-	-	0,90	0,94				Sekretariat UPTD PBP UPTD P2TP UPTD PBTP

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	10.569.000.000	14.810.658.000		-	-	9.377.021.965	11.156.061.775		-	-	0,89	0,75			Bidang Pengembangan Komoditi
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	10.337.196.000	7.129.202.000				8.638.333.304	6.037.862.000				0,84	0,85			Bidang Pengembangan Komoditi
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	2.438.000.000	2.085.877.500		-	-	2.211.933.926	2.041.859.335		-	-	0,91	0,98			Bidang Perkebunan Berkelanjutan UPTD P2TP
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	784.000.000	584.700.000		-	-	772.764.300	583.449.050		-	-	0,99	1,00			Bidang usaha
Program Penyuluhan Pertanian	-	-	3.850.000.000	2.163.897.000		-	-	3.537.377.859	2.131.689.820		-	-	0,92	0,99			Bidang Pengembangan Komodit Bidang PPH
Total	23.270.527.500	14.709.537.168	54.578.829.592	56.284.752.243		21.304.687.455	12.766.815.592	48.375.766.031	49.645.749.860		0,92	0,87	0,89	0,88			

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kelompok Belanja Tahun 2019-2022

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I.	APBN								
1.	Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05)								
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	1.802.180.000	565.580.000	509.988.000	596.704.000	1.767.575.400	550.273.750	506.163.100	594.215.300
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	7.367.763.000	8.215.875.000	1.963.416.000	2.205.070.000	6.951.158.825	8.082.568.641	1.925.340.440	2.161.679.650
	Jumlah Satker (05) DK+TP	9.169.943.000	8.781.455.000	2.473.404.000	2.801.774.000	8.718.734.225	8.632.842.391	2.431.503.540	2.755.894.950
	Dana TP Mandiri Kabupaten Berau	965.424.000	1.386.180.000	-	-	870.437.500	1.293.478.000	-	-
	Dana TP Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara	-	1.075.345.000	-	-	-	1.035.649.115	-	-
	Jumlah APBN	19.305.310.000	20.024.435.000	4.946.808.000	5.603.548.000	18.307.905.950	19.594.811.897	4.863.007.080	5.511.789.900
II.	APBD								
	- Belanja Tidak Langsung	14.697.169.900	14.540.612.000	1.5747.274.750	15.898.973.878	12.376.592.868	11.789.608.535	23.838.334.677	14.621.495.914
	- Belanja Langsung	33.656.580.000	26.209.830.286	38.831.554.842	40.385.778.365	31.022.629.039	23.628.294.436	24.537.431.354	35.024.253.946
	- Belanja Daerah	48.353.749.000	40.750.442.286	54.578.829.592	56.284.752.243	43.339.221.907	35.417.902.971	48.375.766.031	49.645.749.860
	Jumlah APBD	48.353.749.000	40.750.442.286	54.578.829.592	56.284.752.243	43.339.221.907	35.417.902.971	48.375.766.031	49.645.749.860

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyusun kebijakan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan segala tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat strategi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

1. Dalam aspek ketersediaan dan pemanfaatan SDA perkebunan memiliki tantangan dan peluang antara lain :
 - Meningkatnya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke non perkebunan;
 - Ketersedian kebun sumber benih bina dan non bina masih terbatas di Kalimantan Timur;
 - Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan
 - Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
 - Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif
2. Dalam aspek SDM, memiliki tantangan dan peluang antara lain :
 - Kompetensi dan keterampilan pelaku usaha perkebunan masih terbatas;
 - Kurangnya tenaga teknis lapangan yang terampil;
 - Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Pengawas OPT masih kurang, sehingga berdampak terhadap lemahnya pengawasan kualitas benih dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu;

3. Dalam aspek Kebijakan, memiliki tantangan dan peluang antara lain :
 - Masih adanya peraturan perundang undangan yang terkait pembangunan sub sektor perkebunan belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya;
 - Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak clear dan clean
 - Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik
 - Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal
 - Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
 - Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
 - Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
 - Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru;
 - Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Dalam aspek Sarana-prasarana, antara lain: kuantitas serta kualitas ketersediaan sarana-prasarana teknis budidaya dan pengolahan hasil perkebunan masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan;
5. Dalam aspek teknologi, antara lain: pengembangan teknologi budidaya, teknologi pembenihan dan teknologi pengolahan hasil masih belum optimal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur
6. Dalam aspek kelembagaan, antara lain: Sebagian besar kelembagaan petani baik poktan, gapoktan, maupun asosiasi, belum tertata dengan baik dari segi Status kelembagaan, manajemen, sarana-prasarana dan permodalan.

7. Dalam aspek administrasi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya mekanisme pengelolaan kegiatan agar mencapai target kinerja secara optimal, efektif dan efisien.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Secara garis besar, pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur terdiri dari pekebun dan perusahaan perkebunan. Kemudian perusahaan perkebunan dapat dibedakan: 1) Perusahaan Perkebunan Besar Negara, 2) Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PMDN dan PMA), dan 3) Koperasi. Adanya perbedaan kemampuan teknis dan finansial di antara para pelaku usaha tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam memperebutkan lahan yang akan digunakan untuk melakukan usaha perkebunan. Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah melalui kebijakan yang memberikan perhatian pada perkebunan rakyat sangat diperlukan, agar usaha perkebunan secara keseluruhan dapat berjalan berdasarkan asas efisiensi dan asas berkeadilan secara bersamaan. Bila tidak demikian, maka akan timbul ketimpangan pada usaha perkebunan yang akan mendorong semakin tajamnya ketimpangan ekonomi dan sosial sehingga kemudian dapat memicu terjadinya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Bila hal ini terjadi maka keberlanjutan usaha perkebunan secara keseluruhan dapat terganggu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sektor perkebunan memegang peran kunci dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, dalam pembangunan sektor perkebunan dihadapkan pada permasalahan dan isu-isu yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta global. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari permasalahan tersebut akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta Ha peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin usaha perkebunan yang diterbitkan 2.75 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,54 juta Ha, termasuk 1,37 juta Ha kelapa sawit. Masih terdapat 1.95 juta Ha areal ijin perkebunan yang belum ditanami.

Sektor perkebunan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik migas maupun non migas. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal.

Berbagai permasalahan diatas menyebabkan **“Sub sektor perkebunan belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong keselarasan dan keseimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**. Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian tentang perkebunan yang lebih luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan antara lain : (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) untuk meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) untuk memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pembangunan ekonomi nasional sampai dengan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat sebagai dampak pandemi COVID-19. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dilaksanakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sektoral untuk lebih berdaya saing melalui pengembangan produk, hilirisasi dan industrialisasi sehingga titik tumpu pembangunan di Kalimantan Timur dapat dengan seimbang dilaksanakan selain menyediakan bahan baku tetapi mampu menumbuhkembangkan industri yang dapat bersaing secara regional maupun global.

Secara umum, usaha perkebunan strategis dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, dan menguasai lahan yang luasnya mencapai 573,210 hektar. Akan tetapi produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, seperti produktivitas kopi yang hanya 0,25 ton/ha; kakao 0,61 ton/ha, karet 1,29 ton/ha ; lada 0,88 ton/ha. Hal ini terjadi diantaranya akibat tanaman tua, benih asalan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) yang masih rendah.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh sub sektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 65,20% (4,21% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Tentunya benih yang disediakan harus merupakan benih yang bermutu, yaitu baik dan benar. Dengan demikian, dalam penyediaan benih tersebut selain kegiatan produksi harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan yang kuat yang dijalankan sejak proses produksi; distribusi; dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan bibit untuk para petani semakin penting

dilakukan oleh program pemerintah mengingat sebagian besar pekebun merupakan petani kecil yang sebagian besar hanya mengelola kebun kurang dari satu hektar. Dengan luasan kebun sebesar tersebut, umumnya para petani tidak memiliki surplus yang cukup untuk membiayai peremajaan kebun. Sebagian besar penghasilan mereka hanya diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; penanganan OPT yang tepat dan cepat serta peningkatan Sumber Daya Manusia Pekebun baik secara jumlah dan kapabilitas.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target-target pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lingkungan usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan para investor dalam menanamkan modalnya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Demikian halnya perkebunan memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di Kalimantan Timur bahwa sektor perkebunan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani, yaitu penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam komoditi perkebunan, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan; penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar tetap menjaga harga produk hasil perkebunan.

Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas, yang perlu pula dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi manajemen

usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil perkebunannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Dengan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



2. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian tentang perkebunan yang lebih luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan antara lain : (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) untuk meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) untuk memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam rangka akselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target-target pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lingkungan usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan para investor dalam menanam modalnya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Demikian halnya perkebunan memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di Kalimantan Timur bahwa sektor perkebunan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani, yaitu penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam komoditi perkebunan, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan; penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk

turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar tetap menjaga harga produk hasil perkebunan.

Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas, yang perlu pula dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi; manajemen usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil perkebunannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

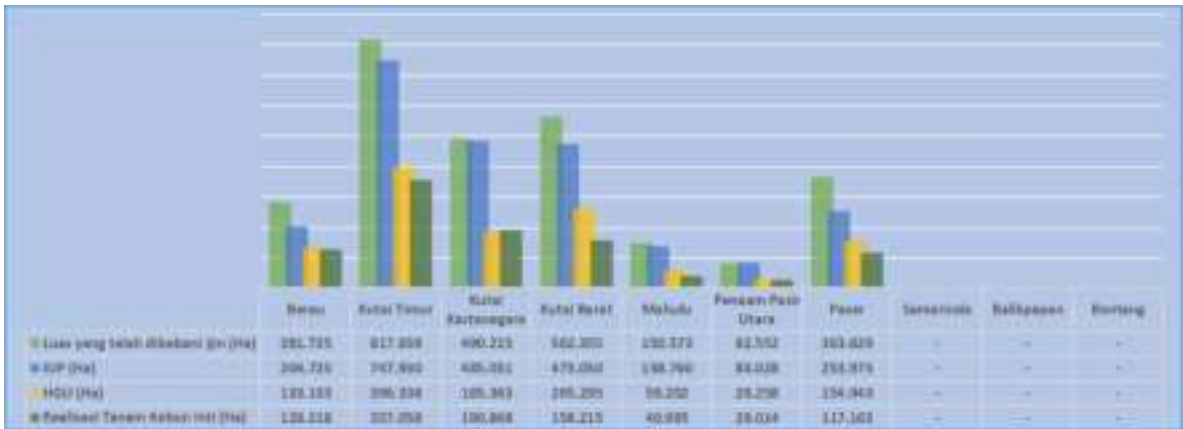
Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,75$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,54$ Juta Ha atau 53,47% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada $\pm 46,53$ % luas wilayah

izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2022, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 401 ijin seluas 2.751.698 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.364.017 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2022 adalah 1.374.543 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya, Data diatas menunjukan bawa terdapat 1,12 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2022)

Gambar 3.1
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2022 oleh Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan

Dari data di atas kita dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakefisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Di samping itu ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai ± 88,47% lahan di Kalimantan Timur, namun

ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Dengan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



3. Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan perkebunan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang dapat berperan lebih besar pada upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur melalui berbagai aksi mitigasi yang dapat dilakukan mulai dari pengelolaan kebun hingga industri pengolahan produk minyak sawit (Crude palm oil/CPO).

Kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan kebun dimulai dari kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan penggunaan pupuk yang efisien. Sedangkan kegiatan pada industri pengolahan produk minyak sawit dilakukan dengan pengelolaan limbah padat maupun cair yang dihasilkan, kegiatan penangkapan gas metan (methane capture) serta pemanfaatan limbah untuk penyediaan energi terbarukan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan perkebunan

kelapa sawit yang rendah emisi sebagai bagian dari aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Timur.

Kegiatan pemupukan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap timbulnya emisi GRK yaitu sebesar 92.53%. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan substitusi penggunaan pupuk tersebut dengan pupuk organik. Dalam memproduksi 1 ton CPO, dihasilkan 450 hingga 700 m³ limbah cair dan 210 kg janjang kosong. Limbah cair dan janjang kosong ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik dapat berasal dari limbah sawit dengan menggunakan decomposer dengan bahan baku yang berasal dari limbah sawit. Pembuatannya dapat dilakukan di lahan sawah yang sedang diberakan, dapat juga dilakukan di lahan kering terbuka. Pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk dapat berpotensi mereduksi emisi GRK yang dihasilkan sebesar 0.015 TCO₂eq/T TBS atau setara dengan 17.03% sementara pemanfaatan janjang kosong berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 0.029 TCO₂eq/T TBS atau setara dengan 33.98%. Upaya –upaya tersebut telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan penurunan emisi tahun 2022 mencapai 7.92 Juta Ton CO₂eq.

Pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Pengembangan biodiesel ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan rendah karbon. Untuk itu pemerintah Kalimantan Timur berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai salah satu upaya pengurangan emisi GRK serta menyambut transisi energi melalui Fasilitasi pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi terbarukan sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri.

Pemanasan global (global warming), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik secara lokal, regional, nasional dan global. Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk

meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan “**meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:



4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Permenpan-RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aspek-aspek tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa karakter integritas sangat bertentangan dengan karakter korupsi. Integritas merupakan suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Sedangkan korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Karakter dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

Disadari pula bahwa keterlibatan seluruh pegawai di dalam mewujudkan budaya kerja dalam rangka perbaikan layanan sekaligus perang terhadap korupsi mutlak diperlukan. Integritas setiap pegawai adalah faktor penting yang sangat menentukan. Proses layanan merupakan suatu sistem di mana para pegawai sebagai komponen penggeraknya. Layanan yang mudah, cepat,

transparan serta bebas dari KKN tidak akan tercapai tanpa dukungan setiap komponen terkait yang memegang teguh nilai-nilai integritas. Adanya tindakan yang bertentangan dengan komitmen layanan oleh sebagian kecil komponen saja yang tidak berintegritas merupakan suatu hal yang memalukan dan tentunya sangat menciderai komitmen yang telah terbangun, sekaligus berpotensi merusak tatanan sistem layanan yang berjalan.

Hal lain yang juga sangat berperan di dalam penguatan integritas adalah adanya role model, yaitu seseorang/person sebagai teladan/panutan. Kepala kantor tentunya memiliki peran yang sangat sentral sebagai role model ini, karena disamping sebagai pemimpin yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya kerja untuk perbaikan layanan, juga bertanggung jawab untuk mempraktikkannya sehingga dari praktik tersebut dapat dilihat sebagai suatu wujud yang nyata dari implementasi nilai-nilai integritas dan patut untuk diikuti serta dicontoh oleh seluruh pegawai. Disadari bahwa sesering apapun upaya penanaman nilai-nilai integritas dan pembangunan budaya kerja yang dilakukan oleh seorang pemimpin namun bilamana pemimpin itu sendiri tidak mencontohkan implementasinya atau bahkan melakukan pelanggaran nilai-nilai integritas yang sudah ditanamkan maka justru akan menimbulkan suatu pertentangan batin, dan ketidakpercayaan dari para pegawai/staf terhadap pemimpinnya sendiri karena menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan pada diri pemimpin tersebut.

Peran sebagai role model ini juga perlu dijalankan oleh para pejabat struktural di bawah kepala dinas, yaitu para kepala bidang, kepala seksi atau kepala sub bagian, mengingat pada level unit terkait pejabat dimaksud merupakan pemimpin bagi bidang/seksi/subbagian masing-masing. Dalam posisinya tersebut, maka pejabat dimaksud juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada pegawai di unit masing-masing, melalui pembinaan langsung sekaligus memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai integritas. Kombinasi antara penanaman pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas dalam pembangunan budaya kerja serta peran role model tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”** dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



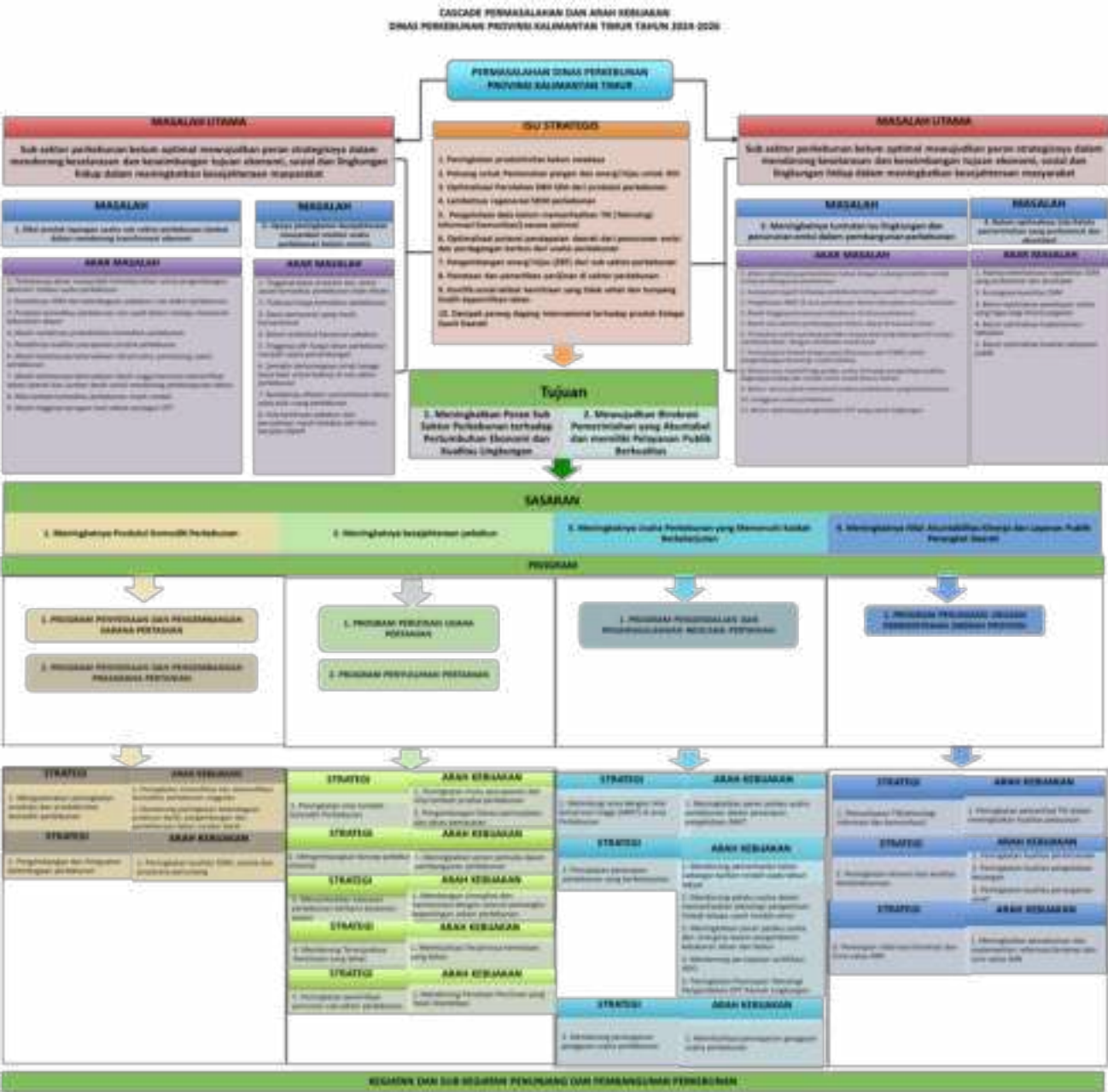
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 – 2023

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub sektor perkebunan belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong keselarasan dan keseimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi	a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan untuk pengembangan ekonomi melalui usaha perkebunan b. Rendahnya SDM dan kelembagaan pekebun/ sub sektor perkebunan c. Produksi komoditas perkebunan non sawit belum mampu memenuhi kebutuhan ekspor d. Masih rendahnya produktivitas komoditas perkebunan e. Rendahnya kualitas pascapanen produk perkebunan f. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung usaha perkebunan g. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun h. Nilai tambah komoditas perkebunan masih rendah i. Masih tingginya kerugian hasil akibat serangan OPT
2		Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata	a. Tingginya biaya produksi dan rantai pasok komoditas perkebunan tidak efisien b. Fluktuasi harga komoditas perkebunan c. Akses pemasaran yang masih konvensional d. Belum terbentuk korporasi pekebun e. Tingginya alih fungsi lahan perkebunan menjadi usaha pertambangan f. Semakin berkurangnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di sub sektor perkebunan g. Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan h. Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif
3		Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan perkebunan	a. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan cadangan karbon rendah untuk pembangunan perkebunan b. Kampanye negatif terhadap perkebunan kelapa sawit masih terjadi c. Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara konsisten d. Masih tingginya kerawanan kebakaran di lahan perkebunan e. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan f. Perubahan sudut pandang perilaku masyarakat yang dipengaruhi budaya membuka lahan dengan membakar masih kuat g. Gangguan usaha perkebunan h. Pemanfaatan limbah kelapa sawit (Biomassa dan POME) untuk pengembangan Bioenergi masih terbatas i. Reward atau insentif bagi pelaku usaha terhadap pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi masih belum merata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			j. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan k. Belum optimalnya pengendalian OPT yang ramah lingkungan
4		Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM yang profesional dan akuntabel b. Kurangnya kuantitas SDM c. Belum optimalnya penetapan sanksi yang tegas bagi kinerja pegawai d. Belum optimalnya implementasi kebijakan b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

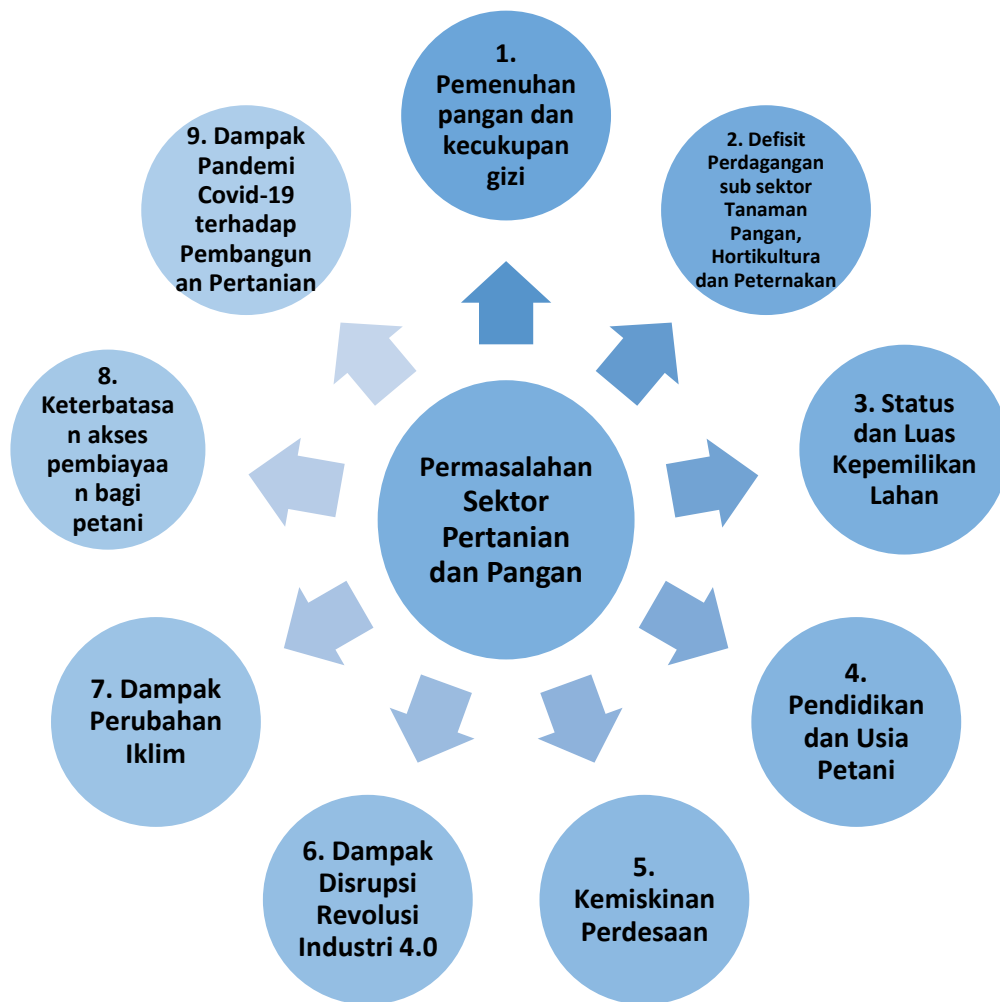
Berikut cascade permasalahan yang disusun sampai dengan program untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur :



Gambar 3.2
Cascade Permasalahan dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2024 -2026

3.2. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut:



Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan di dalam negeri serta hubungan antar negara. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:



Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **"Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia"**.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah:



Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:



Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 agenda pembangunan nasional di antaranya adalah :



Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

- a) **Arah kebijakan 1:** Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis; b) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; c) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan; d) Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan; e) Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI; f) Memperpendek rantai pasok; g) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; h) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan i) Inovasi pertanian bioindustry.
- b) **Arah kebijakan 2:** Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan

wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan pemasaran dan investasi; b) Penerapan standarisasi dan mutu hasil; c) Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan; d) Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian; e) Penguatan sistem perkarantina; f) Digitalisasi dan percepatan perikanan; dan g) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.

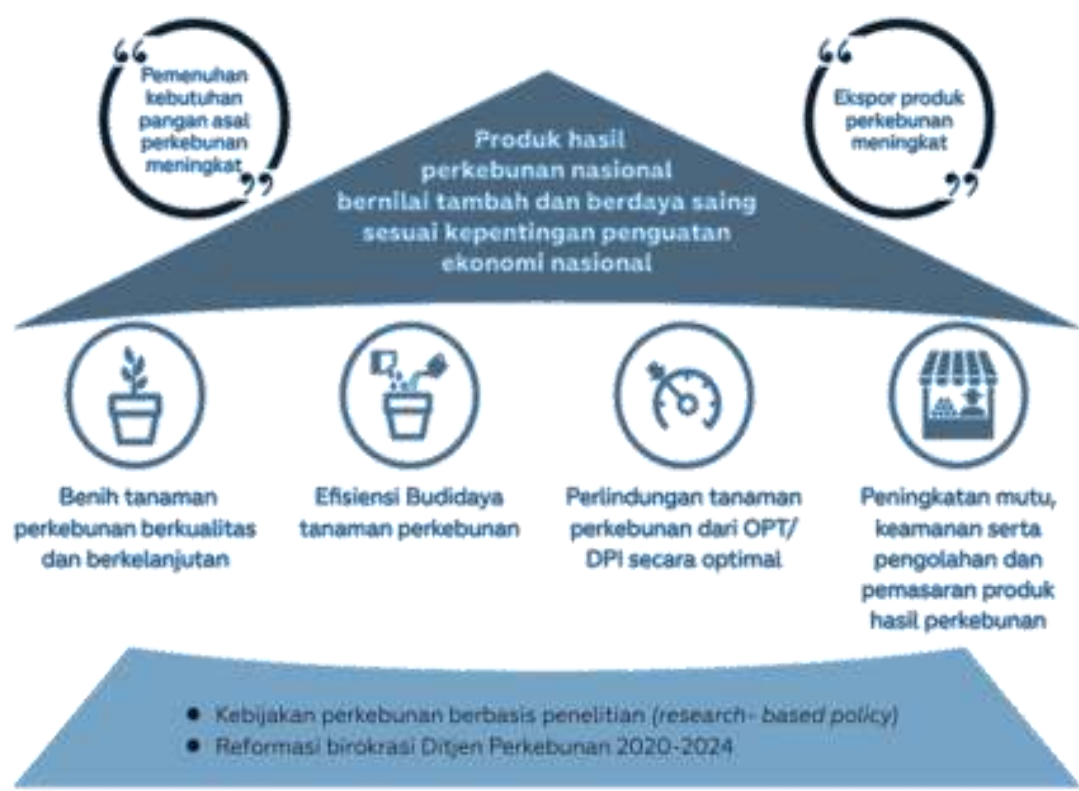
- c) **Arah kebijakan 3:** Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastuktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; b) Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan; c) Pengembangan Mekanisasi Pertanian; d) Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; e) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan f) Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.

- d) **Arah kebijakan 4:** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi: a) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; b) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi

Muda Pertanian; c) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi; d) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; e) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan f) Penguatan kelembagaan petani.

e) **Arah kebijakan 5:** Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi: a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan Good Agricultural Practice (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Sedangkan pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi

Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:



Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur selama rentang waktu 2019-2023 hingga di tingkat Kabupaten/Kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

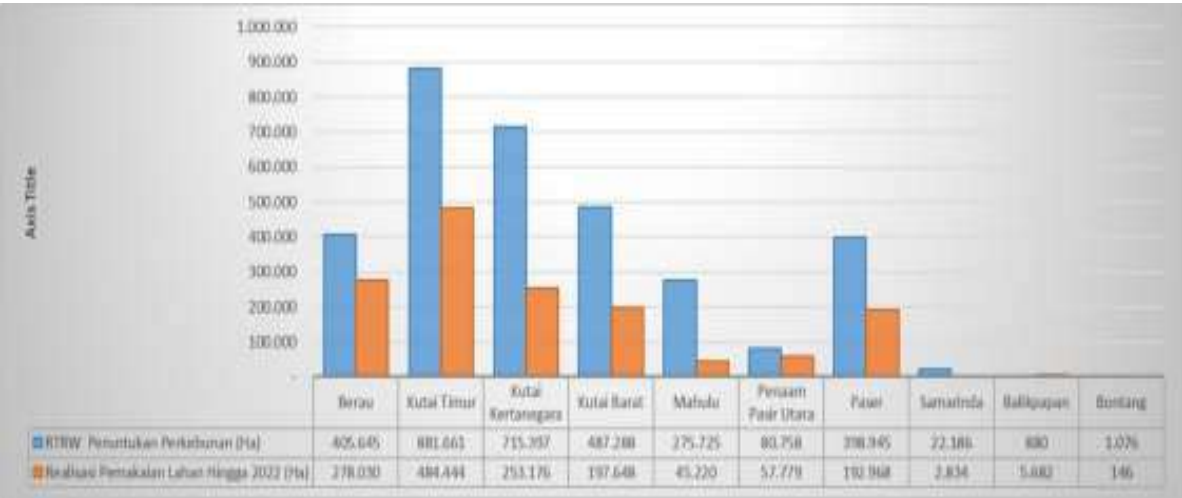
Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan untuk pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)

Gambar 3.3
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan
Subsektor Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Timur

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perkebunan dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur yang maju dan berkeadilan berbasis sektor perkebunan, pertambangan, dan industri yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk sub sektor perkebunan yaitu pengembangan kawasan perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya telah ada (dua) strategi yang dipersiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut yaitu:

- a. Mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan lada sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. Mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan dan strategi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan sub sektor perkebunan terutama perangkat daerah seperti Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan program utama sub sektor perkebunan yaitu:

1. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, peningkatan fungsi, dan pemertahanan kawasan perkebunan rakyat; dan
2. Kawasan pertanian meliputi program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan program penyuluhan pertanian.

Dalam hubungan dengan alokasi ruang, sub sektor perkebunan diarahkan pada pola ruang kawasan budidaya dengan peruntukannya pada:

- a. Kawasan perkebunan rakyat yang memiliki luas 372.413 Ha. Kawasan ini berada dan tersebar di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Paser; dan
- b. Kawasan pertanian yang memiliki luas kurang lebih 3.459.527 hektar. Kawasan ini berada dan tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu: Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Balikpapan, Samarinda,

dan Bontang. Pola ruang pada kawasan pertanian ini dimanfaatkan sebagai kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Idealnya bahwa pada wilayah dengan pola ruang kawasan budidaya seluruhnya berada di luar kawasan hutan atau berada di areal penggunaan lain (APL). Namun demikian, masih ada areal-areal tertentu yang merupakan kawasan hutan pada saat revisi tata ruang ini dipersiapkan. Nantinya areal tersebut diusulkan perubahannya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan pemanfaatan ruangnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan perkebunan rakyat yang memiliki luas 372.413 Ha.kawasan Peruntukan Pengembangan Budidaya Perkebunan	Rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan	Kapasitas kelembagaan masyarakat pada wilayah pengembangan perkebunan belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pengembangan komoditi perkebunan
2.	Kawasan pertanian yang memiliki luas kurang lebih 3.459.527 Ha	Terjadinya konflik pemanfaatan lahan di beberapa perusahaan besar swasta/negara	Belum adanya kesepakatan dengan masyarakat sekitar konsesi perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam menetapkan kawasan budidaya perkebunan besar	Adanya komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi, turut serta secara aktif mendampingi dan memotivasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di Kabupaten

Dengan melihat tabel 3.2 diatas, terlihat bahwa dalam pengembangan pengelolaan perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dan benar antara pemerintah daerah, masyarakat Kalimantan Timur, dan stakeholder. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan pengelolaan struktur ruang wilayah untuk perkebunan masih terjadi tumpang tindih dan penegakkan hukum perijinan lahan belum ditegakkan serta masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua stakeholder Kalimantan Timur.

Telaah Pola Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang jangka menengah hanya didasarkan pada Pola Ruang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Peruntukan Pola Ruang		Kegiatan yang diperbolehkan untuk Sub Sektor Perkebunan Dengan Syarat
A. Kawasan Lindung		
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan pertanian diperbolehkan jika sudah terlebih dahulu sebelum perda	
- Kawasan perlindungan setempat	Kawasan perkebunan rakyat dan kawasan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah	
- Kawasan lindung geologi	Kawasan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah	
- Kawasan cagar budaya	Kawasan pertanian yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya	
- Kawasan ekosistem mangrove	Kawasan pertanian	
B. Kawasan Budidaya		
- Kawasan hutan produksi	Kawasan pertanian diperbolehkan jika sudah terlebih dahulu sebelum perda	
- Kawasan perikanan	Kegiatan integrasi atau tumpang sari antara perkebunan, peternakan yang mendukung fungsi kawasan perikanan	

Dengan melihat tabel diatas (Tabel 3.2 dan 3.3) melalui rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada pengkayaan Sumberdaya Alam. Melihat pola ruang saat ini, pola ruang memberikan dukungan penuh pada pengembangan areal tanaman. Dengan program pemanfaatan ruang yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangan Kalimantan Timur *green*. Dengan melihat tabel 3.2 terlihat pada struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat dapat terlihat, mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan SDA semaksimal dan seoptimal mungkin dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat Kalimantan Timur. Sehingga dengan pola ruang sesuai dengan tabel 3.3 diatas, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Instansi terkait dan *stakeholder* dapat mengembangkan dan

membangun Kalimantan Timur (*green economy*) yang terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Disbun Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan	• Tata ruang wilayah prov. kaltim yang belum selesai sampai saat ini • Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan pada daerah pengembangan perkebunan	• Perubahan pola ruang mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta. • Inkonsistensi pengambil kebijakan oleh stekholder dalam pemberian ijin usaha	• Dinas Perkebunan Prov. Kaltim mendorong untuk mempercepat proses review data tata ruang provinsi • Dinas perkebunan prov. kaltim dalam pembangunan perkebunan akan mensosialisasikan

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Adanya kabupaten dalam pemberian perijinan untuk ijin usaha perkebunan tanpa rekomendasi dari Gubernur - Data base peta dasar, peta tematik dan potensi pengembangan perkebunan belum lengkap dan akurat	- Ketersediaan data dan informasi pendukung belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pengembalian keputusan dalam pemberian ijin - Kurang tersedianya peta citra landsat resolusi tinggi sebagai peta dasar	- sesuai dengan peraturan menteri pertanian No. 98 tahun 2013 - Tersedianya <i>one map, one police</i> yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG)
2.	Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan	Perlu penetapan kawasan konservasi bernilai tinggi didalam konsesi usaha perkebunan oleh kepala daerah	Belum semua jasa usaha perkebunan memahami keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi diperkebunan	Bimbingan teknis serta menetapkan mengenai keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, terlihat jelas bahwa daya dukung dan daya pengembangan perkebunan dalam masyarakat Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masih kurang.

Selain itu, ketegasan dan penegakkan hukum dalam hal pemberian ijin ataupun produk hukum lainnya belum disosialisasikan dan ditegakkan secara jelas. Sehingga pengembangan dan pengelolaan sektor perkebunan belum optimal.

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur di PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disarikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pengembangan perkebunan 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem	Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah kebijakan rencana dan program yang menjadi focus dalam KLHS dalam pengembangan perkebunan melalui	- Pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan - Pemantapan lahan budidaya perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui usaha budidaya - Peningkatan kapasitas	- Peningkatan pemanfaatan daya dukung lahan kritis untuk pengembangan perkebunan berbasis pemberdayaan masyarakat - Perencanaan makro untuk pembangunan perkebunan

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Efisiensi pemanfaatan lahan 5. Tingkat kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi untuk tingkat provinsi dilihat dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum	kelembagaan, hukum melalui Permentan, Perda/ Pergub • Revitalisasi pembangunan perkebunan secara berkesinambungan • Perlindungan dan konservasi pemanfaatan lahan-lahan kritis untuk pembangunan perkebunan	• Konservasi untuk HCV pada perkebunan besar untuk perlindungan keanekaragaman hayati • Peningkatan kualitas perencanaan • Peningkatan usaha budidaya perkebunan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai dengan kearifan lokal
Sisitem budidaya perkebunan yang rentan terhadap perubahan iklim	Memperhatikan isu-isu global tentang pembangunan perkebunan yang berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan	Optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian	Konservasi sumberdaya hayati dan penurunan emisi GRK

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.5) dapat terlihat aspek – aspek kajian dalam KLHS, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu dengan pengembangan kawasan perkebunan provinsi yang ditinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum. Dalam aspek kajian KLHS ini menandai bahwa pemanfaatan dan peningkatan dalam areal tanaman serta pemeliharannya menjadi landasan dalam pengoptimalan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya perkebunan. Aspek kajian KLHS ini sangat mendukung dalam memberi keseimbangan kegiatan manusia dengan alam. Dengan hal ini, aspek KLHS sangat memberi pengaruh pada kondisi tanam yang akan memengaruhi hasil tanaman/perkebunan. Sehingga secara beruntun akan menimbulkan dampak pada sector-sektor lainnya. Dengan demikian, pemenuhan aspek pada KLHS ini sangat mendukung dalam pengembangan Program Kaltim Hijau (*green economy*).

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Petani swadaya mengelola lebih dari 40 persen dari perkebunan kelapa sawit. Rata-rata produksi petani swadaya adalah dua sampai tiga hektar per tahun. Jumlah ini kurang dari setengahnya bila dibandingkan dengan perkebunan komersial. Ini berarti terdapat peluang yang potensial untuk meningkatkan hasil panen atau produktivitas petani swadaya. Dengan demikian, pasokan kelapa sawit yang tersedia akan meningkat, pendapatan petani swadaya dari kebun yang sama naik, dan kebutuhan untuk membuka lahan baru dapat dikurangi. Bagaimana cara mewujudkan peningkatan produksi petani swadaya ini merupakan hal yang sedang diperjuangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu solusi yang dapat ditempuh ialah dengan membangun kemitraan antara perkebunan besar dan pembeli kelapa sawit, dengan kelompok petani swadaya. Program pembinaan petani kelapa sawit di Kalimantan Timur ini menyalurkan berbagai jenis skema kredit untuk membantu petani memperoleh bibit berkualitas, pupuk dan dukungan infrastruktur kebun, pelatihan, bantuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan meningkatkan status lahan.

Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) akan meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur sebesar 47,7 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Sementara sektor kemiskinan sudah berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2020 sebesar 6,64 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 10,19 persen. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja akan semakin meningkat, bukan hanya di Kaltim, namun juga regional Kalimantan bahkan nasional. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan energi hijau berbasis kelapa sawit. Upaya dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi crude palm oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit sampai tahun 2020 sebanyak 3,89 juta ton. Namun, masih ditemui kendala dalam mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit. Sementara komoditas lainnya, seperti kakao, aren, lada, dan kelapa dalam, dirasa belum mencukupi aspek produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan ibu kota negara baru.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Di sektor perkebunan upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Perjanjian Paris 2015 menjadi tonggak bersejarah munculnya kesepakatan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandatangani oleh 197 negara. Setiap negara berkewajiban menurunkan emisi GRK yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) guna mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius pada 2030. Dalam proposal NDC, Indonesia menyanggupi pengurangan emisi karbon sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.

Salah satu instrumen untuk mengurangi emisi GRK adalah perdagangan karbon. Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit). Dalam hal ini, pembelinya adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas ketentuan. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO₂).

Pendapatan dari perdagangan karbon diperoleh dari berbagai sektor, baik kehutanan, pertanian, maupun energi. Perdagangan karbon dipercaya bakal memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian. Dengan asumsi harga kredit karbon sekitar US\$ 5 per ton, maka potensi pendapatan Indonesia dari perdagangan karbon tiga aset tersebut mencapai US\$ 565,9 miliar atau setara Rp 8.000 triliun. Ada pula data lain yang menyebut bahwa Indonesia diperkirakan menyumbang 75-80% kredit karbon dunia. Dengan peran tersebut, perdagangan karbon dapat berkontribusi setidaknya US\$ 150 miliar bagi perekonomian Indonesia.

Ada sejumlah mekanisme yang berlaku dalam perdagangan karbon. Pertama adalah cap and trade, yakni perdagangan karbon antar-pelaku usaha lintas sektor. Mereka yang memproduksi emisi lebih dari batas (cap), wajib membeli kelebihanannya kepada mereka yang memproduksi emisi lebih rendah dari batas tersebut. Kedua adalah carbon offset atau pengimbangan. Dalam

sistem ini, pihak yang memproduksi emisi lebih besar dari baseline, bisa membeli kelebihan emisi tersebut kepada mereka yang menyediakan usaha penyerapan karbon.

Perdagangan karbon ke depan diharapkan dapat mendorong masuknya investasi hijau, yang pada gilirannya mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kita juga bisa menginisiasi penggalangan dana global yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon untuk investasi hijau.

Dengan perdagangan karbon, pemerintah di setiap negara dapat memantau jumlah emisi karbon atau gas rumah kaca secara lebih akuntabel dan transparan. Sebab, jumlah emisi dan potensi penyerapannya terukur dengan standar yang telah ditetapkan. Alhasil, jumlah kredit karbon yang beredar di pasar karbon pun bakal membantu dalam mengontrol besarnya emisi karbon yang dilepas ke atmosfer.

Indonesia yang selama ini dijuluki paru-paru dunia seyogianya mampu mengoptimalkan potensi besar perdagangan karbon ini. Di masa depan, perdagangan karbon bakal menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru yang menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari sektor perkebunan difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri perkebunan, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah perkebunan, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Pengembangan ekonomi produktif dilakukan dengan tetap menjaga kawasan-kawasan di wilayah perkebunan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT).

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun ke depan, meliputi :



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang fluktuatif dan kurang berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*).

Dalam konteks mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui diversifikasi ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Sektor pertambangan dan penggalan serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Disatu sisi subsektor perkebunan memiliki potensi untuk mengurangi dominasi sumber ekonomi ekstraktif dari migas dan batubara.

Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya rget unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO₂e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO₂e pada target conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi.

Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 menurunkan emisi GRK dari tingkat baseline dengan melakukan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim baik di sektor energi, perubahan tutupan dan penggunaan lahan, pertanian, dan limbah sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Birokrasi memiliki peran utama dalam sistem pemerintahan, selama masa orde baru hingga saat ini, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan. Selain itu, birokrasi telah berperan dalam menopang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi dan distribusi. Birokrasi sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.

Berbagai kebijakan dan aturan mengenai pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas sebenarnya sudah ada, yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik, dan peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta beberapa peraturan menteri PANRB lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun pada praktek dilapangan, fungsi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ditengarai masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia usaha, masih ditemukan adanya keluhan masyarakat dan dunia usaha mengenai kinerja pelayanan publik dari birokrasi, baik pusat maupun daerah. masih ditemukan adanya pelayanan publik yang berbelit-belit, transfarasi dan akuntabilitas pelayanan publik yang kurang jelas, perizinan usaha belum sepenuhnya memenuhi harapan dari dunia usaha dan lain-lain yang mengindikasikan buruknya kualitas dari pelayanan publik.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan publik itu sendiri, diantaranya faktor individu birokrat penyelenggara pelayanan, faktor organisasi penyelenggara pelayanan dan faktor sistem dalam penyelenggara pelayanan publik.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta diselesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel dapat terwujud. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan diarahkan untuk menciptakan kondisi pemungkin dan menyelesaikan permasalahan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu tiga tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RPD 2024 -2026 khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Secara tidak langsung Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga berperan dalam pencapaian Tujuan 4 RPD sebagai berikut :



Berdasarkan analisis diatas maka ditetapkan visi Dinas Perkebunan tahun 2024 - 2026 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera”** dengan 3 misi, yaitu:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan dalam mewujudkan transformasi ekonomi;
2. Meningkatkan Peran Sub sektor perkebunan dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel.

Visi dan misi tersebut ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Maka ditetapkan bahwa untuk mencapai visi dan misi tersebut dicapai dengan sasaran:

- a) Meningkatnya produksi komoditi perkebunan dengan indikator produksi komoditi perkebunan (ton)
- b) Meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan indikator Nilai Tukar Petani perkebunan rakyat (%)
- c) Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO (sustainable palm oil) (pelaku usaha)
- d) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah dengan indikator :
 - Nilai SAKIP perangkat daerah (nilai/predikat)
 - Indeks kepuasan pengguna layanan perangkat daerah (indeks)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maka selanjutnya indikator tujuan dan sasaran beserta target tahun 2024 - 2026 dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Target Akhir
						2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7))	(8)	(9)	(10)
1. Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan	LPE Sub Sektor Perkebunan (%)			2,44	-	3	3,5	4	4
		Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	19.207.272	18.313.874,25	22.303.000	23.628.000	24.953.000	24.953.000
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat (%)	162.54	112	135	140	145	145
	Persentase penurunan emisi GRK sektor lahan dari Business Usual (BAU) (%)			5,55	6,63	7,71	8,79	9,88	9,88
		Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Kaidah Berkelanjutan	Jumlah pelaku usha yang mendapatkan sertifikasi SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)	94	63	100	105	110	110
2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)			84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)			78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Target Akhir
						2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perangkat Daerah (Indeks)	88,20	92	89	90	91	91
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	73,40	74	77,5	78,5	80,5	80,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIYAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra sehingga strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD). kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dalam mensukseskan **Aspek Ekonomi Wilayah** melalui **Tujuan ke 2** Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas** melalui **Sasaran 5** yakni **Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi** serta **Aspek Lingkungan Hidup** melalui **Tujuan ke 3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** melalui **Sasaran 9** yaitu **Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan** serta **Tujuan 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi** melalui **Sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK** perlu dirumuskan Strategi dan Kebijakan sektor perkebunan secara konkrit dan lugas dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan baik internal, eksternal dan global.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu 2024 - 2026. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor perkebunan.



Gambar 5.1
Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, strategi dan kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan perbaikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak pembangunan perkebunan

Perkebunan Berkelanjutan sesuai Perda Prov. Kaltim No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan



Pasal 28 ayat 1

Prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi

Pelaksanaan Strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi Strategi dan Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan. Selain itu, untuk menguatkan sub sektor perkebunan sebagai sub sektor unggulan dalam rangkaian transformasi ekonomi.

Tabel 5.1.
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	1. Mengutamakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	1. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan unggulan 2. Mendorong peningkatan kelembagaan produsen benih, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih
		2. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang
	2. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	1. Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	1. Peningkatan mutu pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan 2. Pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran
		2. Mengembangkan konsep pekebun milenial	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan
		3. Menumbuhkan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan
		4. Mendorong terwujudnya kemitraan yang sehat	Memfasilitasi terjalinnya kemitraan yang sehat
		5. Peningkatan penertiban perijinan sub sektor perkebunan	Mendorong penataan perizinan yang telah diterbitkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Meningkatkan Usaha Perkebunan Yang Memenuhi Kaidah Keberlanjutan	1. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area Perkebunan	Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT
		2. Percepatan penerapan perkebunan yang berkelanjutan	1. Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat 2. Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi 3. Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun 4. Mendorong percepatan sertifikasi ISPO 5. Peningkatan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
		3. Mendorong penanganan gangguan usaha perkebunan	Memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas lingkungan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1. Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi)	1. Peningkatan pemanfaat TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan 2. Peningkatan kualitas SDM
		2. Peningkatan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan	1. Peningkatan kualitas perencanaan 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 3. Peningkatan kualitas penanganan asset
		3. Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN	Meningkatkan pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi dan Core value ASN

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Berdasarkan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III
Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Mengutamakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan unggulan Mendorong peningkatan kelembagaan produsen benih, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih			
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang			
	2. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	Peningkatan mutu pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan Pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran			
			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan			
		Mengembang-kan konsep pekebun milenial				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III
		Menumbuhkan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan			
		Mendorong terwujudnya kemitraan yang sehat	Memfasilitasi terjalinnya kemitraan yang sehat			
		Peningkatan penertiban perijinan sub sektor perkebunan	Mendorong penataan perizinan yang telah diterbitkan			
	3. Meningkatkan Usaha Perkebunan Yang Memenuhi Kaidah Keberlanjutan	Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area Perkebunan	Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT			
		Percepatan penerapan perkebunan yang berkelanjutan	Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III
			Mendorong percepatan sertifikasi ISPO Peningkatan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan			
		Mendorong penanganan gangguan usaha perkebunan	Memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan			
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas lingkungan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi)	Peningkatan pemanfaat TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan Peningkatan kualitas SDM			
		Peningkatan efisensi dan kualitas ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas perencanaan Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Peningkatan kualitas penanganan asset			
		Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN	Meningkatkan pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi dan Core value ASN			

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan terus dijaga konsistensinya untuk menerapkan strategi dan kebijakan serta target indikator yang telah dijelaskan dalam bab 4 dan 5 terdahulu, yang seluruhnya dirancang secara berjenjang dan terintegrasi antara strategi dan antar program kegiatan yang ditujukan untuk memastikan peran subsektor perkebunan dapat dijalankan serta tujuan pembangunan yang digambarkan dengan target dan indikator dapat dicapai melalui penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dirubah dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah menyebabkan penggunaan nama program di semua daerah bersifat generik untuk semua PD, dengan demikian tidak bisa mengakomodasi secara tepat redaksi nama program dan kegiatan dengan isu strategis serta masalah yang harus diselesaikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat apalagi bila dihubungkan dengan penggunaan indikator yang dipilih sesuai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi menggunakan pendekatan pencapaian indikator target yang lebih dapat menggambarkan permasalahan yang akan di selesaikan secara konkrit berdasarkan strategi yang bersesuaian dan secara berjenjang ditujukan untuk mencapai 4 target indikator utama yaitu:



Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan mengamanahkan pembangunan perkebunan wajib memenuhi prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan yaitu pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Oleh karena itu perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan prinsip tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor perkebunan agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur. Maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merancang program, kegiatan dan sub kegiatan berorientasi hasil untuk menyelesaikan permasalahan, berdampak langsung kepada masyarakat melalui pendekatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit, inovatif, partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi hulu hilir.

Dalam mencapai aspek ekonomi, secara umum program/kegiatan yang dilakukan berorientasi pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan diprioritaskan pada upaya perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi serta peremajaan tanaman perkebunan, dilandasi oleh strategi diversifikasi tanaman perkebunan pada non sawit serta penggunaan lahan bercadangan karbon rendah.

Upaya peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama perkebunan rakyat secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan pekebun. Oleh karena itu faktor harga komoditas perkebunan yang baik menjadi kata kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha perkebunan. Untuk memastikan diperolehnya harga yang baik di tingkat pekebun kegiatan peningkatan produksi tersebut secara paralel disertai dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun yang diarahkan pada usaha perkebunan berbasis korporasi petani melalui kegiatan fasilitasi pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran, melakukan fasilitasi kemitraan yang sehat, membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan.

Aspek pengelolaan lingkungan pada usaha perkebunan bisa digunakan sebagai payung untuk memastikan keberlanjutan produksi dan menjawab isu-isu negatif pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu setiap usaha perkebunan harus memenuhi kaidah berkelanjutan dan menerapkan prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk mempercepat realisasi pembangunan kebun yang berkelanjutan melalui peningkatan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT, mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat dan mendorong pemanfaatan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit serta meningkatkan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun guna percepatan sertifikasi ISPO.

Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values ASN 'Berakhlak' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' pada tanggal 27 Juli 2021. Core values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core values ASN diimplementasikan dalam kata "Berakhlak" yang merupakan akronim dari 'berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif'. Kemudian, employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan "bangga melayani bangsa". Core values Berakhlak dilatarbelakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu core values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.



"BerAKHLAK" diterjemahkan Dinas Perkebunan dengan mewujudkan birokrasi yang akuntabel yang diukur melalui nilai SAKIP yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahunnya, melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas penanganan aset dan SDM.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tersebut diatas sangat berkaitan langsung dengan masyarakat dan menyerap setidaknya 60% - 70% anggaran pembangunan yang dialokasikan pada Dinas perkebunan.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja program/kegiatan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program/kegiatan melalui:



Untuk mempercepat, mempermudah dan memperbesar hasil dan dampak positif kegiatan, maka pendekatan lain yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan sinergi dan kolaborasi serta mendorong partisipasi aktif stakeholder lain (OPD, asosiasi dan perusahaan perkebunan, perhotelan serta mitra pembangunan) dalam pelaksanaan kegiatan. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dengan mitra pembangunan dengan prinsip kedaulatan dan berorientasi pada persamaan tujuan dan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang terdapat dalam dokumen renstra ini. FCPF-Carbon Fund, sebagai mekanisme insentif berdasarkan kinerja penurunan emisi, menjadi salah satu bagian dari program REDD+. Program ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang dilakukan secara bersama oleh KLHK beserta UPTnya, Pemprov Kaltim beserta perangkat

daerah berbasis lahan, Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Desa, Swasta, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya. Program FCPF-Carbon Fund dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan proses pengukuran capaian pada tahun 2022 dan 2024, serta pemberian insentif pada tahun 2023 dan 2025. Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) adalah fasilitas insentif penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Bank Dunia dengan skema pembayaran berbasis kinerja.



Sebelum dilakukannya kolaborasi program kegiatan, maka antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan mitra pembangunan, dilakukan penyusunan rencana kerja bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan ini Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang melakukan program kerjasama Proyek Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dengan durasi 2020 - 2023 bekerja sama antara Yayasan Solidaridad Network Indonesia. Adapun lokus kegiatan berada pada level Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Berau. Proyek ini fokus pada Peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan dan pendapatan petani untuk dapat terlibat bersama-sama dengan perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan sebagai upaya

pengurangan emisi di subsektor perkebunan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di daerah secara inklusif.

Disamping pelaksanaan kolaborasi yang berdasarkan perjanjian Kerjasama, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dengan mitra pembangunan dan asosiasi seperti GAPKI dan Asosiasi pekebun rakyat lainnya termasuk juga dengan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagai bagian dari rantai pasok pemasaran.

Pengelompokan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan beserta masing masing indikatornya dapat di jelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya peran sub sektor Perkebunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	Mengutamakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan unggulan Mendorong peningkatan kelembagaan produsen benih, pengembangan dan pemeliharaan kebun sumber benih			
			Pengembangan dan Penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang			
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	Bid. Pengembangan Komoditi
					<i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)</i>	
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	<i>UPTD PBP</i>
					<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)</i>	
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	<i>UPTD PBTP</i>
					<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan</i>	<i>Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)</i>	
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	<i>Bidang Pengembangan Komoditi</i>
					<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)</i>	
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	
					Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	
	<i>Meningkatnya kesejahteraan pekebun</i>	<i>NTP perkebunan rakyat (%)</i>	Peningkatan nilai tambah komoditi Perkebunan	Peningkatan mutu pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan Pengembangan literasi permodalan dan akses pemasaran			
			Mengembang-kan konsep pekebun milenial	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan perkebunan			
			Menumbuhkan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh pemangku			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				kepentingan sektor perkebunan			
			Mendorong terwujudnya kemitraan yang sehat dan penanganan gangguan usaha perkebunan	Memfasilitasi terjalannya kemitraan yang sehat dan penanganan gangguan usaha perkebunan Mendorong penataan perizinan yang telah diterbitkan			
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	<i>Bidang Usaha</i>
					<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)</i>	
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	<i>Bidang Pengembangan Komoditi & Bidang Pengolahan dan pemasaran</i>
						Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	
					<i>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian</i>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						<i>ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	
					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	
					<i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)</i>	
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	
					Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	
					<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i>	<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	
					Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	
					Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	
	<i>Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)</i>	Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area Perkebunan	Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT			
			Percepatan penerapan perkebunan yang berkelanjutan	Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				pada kebun rakyat Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun Mendorong percepatan sertifikasi ISPO			
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	<i>Bidang Perkebunan Berkelanjutan</i>
					<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)</i>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	
					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	<i>UPTD P2TP</i>
					<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)</i>	
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai/Predikat) 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi)	Peningkatan pemanfaat TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan Peningkatan kualitas SDM			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perangkat daerah (Indeks)					
			Peningkatan efisensi dan kualitas ketatalaksanaan	Peningkatan kualitas perencanaan Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Peningkatan kualitas penanganan asset			
			Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN	Meningkatkan pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi dan Core value ASN			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	<i>Sekretariat</i>
						Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	
					<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)</i>	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	
					<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)</i>	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	
					<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase retribusi perkebunan (%)</i>	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	
					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	
					Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ynag disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	<i>UPTD PBP</i>
						Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						undangan yang disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ynag disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	UPTD P2TP
						Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)</i>	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						dan Listrik yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	<i>PBTP</i>
						Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	
					<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)</i>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	
					<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator dan pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun tergambar pada tabel 6.2 dimana pada kondisi awal tahun perencanaan (2022) masih terdapat data yang tidak tersedia, hal ini disebabkan oleh karena indikator tersebut merupakan indikator baru sehingga data tidak tersedia pada tahun 2022 dan 2023. Berikut Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Dinas Perkebunan									
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
[TUJUAN] Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan									
[SASARAN] Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan									
[PROGRAM] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6592223 Benih	6000000 Benih	6000000 Benih	6000000 Benih	18000000 Benih	1.054.463.000	1.075.860.000	1.041.260.000	Dinas Perkebunan
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	94,08%	95,00%	96,50%	98,00%	98,00%	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	Dinas Perkebunan
Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,26%	25,36%	25,41%	25,46%	25,46%	19.552.056.400	20.287.620.260	17.158.809.300	Dinas Perkebunan
[PROGRAM] 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
Luas Kebun yang dibangun	24623 Ha	50702 Ha	49000 Ha	50000 Ha	149702 Ha	600.000.000	650.000.000	700.000.000	Dinas Perkebunan
[SASARAN] Meningkatnya kesejahteraan pekebun									
[PROGRAM] 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	27,39%	40,59%	55,45%	70,30%	70,30%	1.626.421.100	1.436.242.850	1.566.399.000	Dinas Perkebunan

Program	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
(UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))									
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	85,56 Indeks	85,87 Indeks	86,20 Indeks	87,20 Indeks	87,20 Indeks	744.616.700	756.819.700	756.819.700	Dinas Perkebunan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100%	100%	100%	100%	100%	987.254.300	953.654.300	988.254.300	Dinas Perkebunan
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))									
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	74,37 Indeks	79,00 Indeks	83,75 Indeks	88,38 Indeks	88,38 Indeks	1.105.854.800	1.105.854.800	1.106.854.800	Dinas Perkebunan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100%	100%	100%	100%	100%	717.083.000	717.083.000	716.083.000	Dinas Perkebunan
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))									
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	77,25 Indeks	80,00 Indeks	82,75 Indeks	85,50 Indeks	85,50 Indeks	1.866.775.000	3.676.009.000	3.176.009.000	Dinas Perkebunan
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100%	100%	100%	100%	100%	754.754.000	745.520.000	745.520.000	Dinas Perkebunan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3.228.702.000	2.239.416.600	2.719.654.800	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	16.110.447.400	17.514.388.930	16.113.597.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	0%	75%	75%	75%	75%	65.750.000	61.200.000	62.600.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Persentase retribusi perkebunan	61,21%	100%	100%	100%	100%	8.900.000	8.900.000	8.900.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14,28%	35,71%	59,52%	83,33%	83,33%	654.050.000	655.255.000	887.442.800	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.123.282.100	2.224.067.790	2.050.805.900	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	39 Jenis	2.684.056.820	3.850.675.702	2.309.632.120	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4.095.538.520	4.613.016.372	4.266.378.520	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	90%	90%	90%	90%	1.471.778.260	1.164.212.586	1.510.913.260	Dinas Perkebunan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))									
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
[KEGIATAN] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	165,64%	100%	100%	100%	100%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0%	59%	62%	66%	66%	183.600.000	183.600.000	183.600.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	527.171.100	493.571.100	528.171.100	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	6 Jenis	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	667.823.900	667.823.900	667.823.900	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	55%	50%	50%	50%	213.316.000	225.519.000	225.519.000	Dinas Perkebunan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	65%	70%	75%	75%	124.006.000	124.006.000	124.006.000	Dinas Perkebunan
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))									
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
[KEGIATAN] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100,37%	100%	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	40%	50%	60%	60%	77.067.000	89.911.500	112.978.500	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	388.734.000	379.500.000	379.500.000	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	0 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	6 Jenis	15 Jenis	1.149.465.000	2.663.057.500	2.399.990.500	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	754.100.000	754.100.000	754.100.000	Dinas Perkebunan

Kegiatan	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
[KEGIATAN] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	0%	60%	65%	70%	70%	117.203.000	400.000.000	140.000.000	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Dinas Perkebunan										Dinas Perkebunan
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
[TUJUAN] Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan										
[SASARAN] Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan										
[PROGRAM] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
[KEGIATAN] 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian										
3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	19.552.056.400,00	20.287.620.260,00	17.158.809.300,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman										
3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	0 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	6 laporan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Dinas Perkebunan

[illegible]

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	1.626.421.100,00	1.436.242.850,00	1.566.399.000,00	Dinas Perkebunan
[PROGRAM] 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										
[KEGIATAN] 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian										
3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	135 Orang	60 Orang	40 Orang	40 Orang	140 Orang	1.074.912.500,00	589.379.100,00	997.243.300,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian										
3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	91 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	63 Kelompok	829.446.000,00	829.446.000,00	829.446.000,00	Dinas Perkebunan
3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1.330.733.700,00	1.228.300.440,00	1.583.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan										
3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	1.120.166.000,00	1.052.182.600,00	1.165.000.000,00	Dinas Perkebunan
3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	670.921.000,00	670.921.000,00	551.406.000,00	Dinas Perkebunan

[illegible]

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
memiliki Pelayanan Publik Berkualitas										
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (Dinas Perkebunan)										
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
[KEGIATAN] X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	18 Laporan	504.461.700,00	840.809.800,00	967.314.400,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	498.521.900,00	424.115.700,00	398.521.900,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	2.025.718.400,00	774.491.100,00	1.153.818.500,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen	29.500.000,00	30.500.000,00	20.800.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	9.150.000,00	12.400.000,00	23.500.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen	27.100.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	15 Orang	15 Orang	23 Orang	53 Orang	464.000.000,00	452.200.000,00	697.392.800,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Perkebunan

[illegible]

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	60 Unit	170.720.000,00	190.000.000,00	170.720.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	960.865.000,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	21 Unit	23 Unit	23 Unit	67 Unit	340.193.260,00	374.212.586,00	340.193.260,00	Dinas Perkebunan
[SASARAN] Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))										
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
[KEGIATAN] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30 Orang	183.600.000,00	183.600.000,00	183.600.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	342.000.000,00	308.400.000,00	342.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	7.756.800,00	7.756.800,00	7.756.800,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	7.744.000,00	7.744.000,00	7.744.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	51.936.000,00	51.936.000,00	51.936.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	113.678.800,00	113.678.800,00	114.678.800,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	4.055.500,00	4.055.500,00	4.055.500,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	207.740.700,00	207.740.700,00	207.740.700,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	323.400.000,00	323.400.000,00	323.400.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	131.683.200,00	131.683.200,00	131.683.200,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perkebunan

[illegible]

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	18 Orang	93.960.000,00	93.960.000,00	93.960.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	55.611.500,00	55.611.500,00	55.611.500,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	274.800.000,00	274.800.000,00	274.800.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	21.151.000,00	21.151.000,00	21.151.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	39.088.000,00	39.088.000,00	39.088.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	9.081.300,00	9.081.300,00	9.081.300,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	20 Unit	10 Unit	8 Unit	38 Unit	210.090.720,00	144.762.720,00	98.188.320,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	383.097.600,00	448.425.600,00	495.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	178.912.800,00	178.912.800,00	178.912.800,00	Dinas Perkebunan

[illegible]

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))										
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
[KEGIATAN] X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	84.960.000,00	84.960.000,00	84.960.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang	21 Orang	77.067.000,00	89.911.500,00	112.978.500,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	244.234.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	8 Unit	112.965.000,00	302.965.000,00	128.700.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit	-	2.360.092.500,00	2.271.290.500,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	1.036.500.000,00	-	-	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	388.080.000,00	388.080.000,00	388.080.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	258.720.000,00	258.720.000,00	258.720.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	102.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Dinas Perkebunan
[KEGIATAN] X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dinas Perkebunan

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	OPD
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9 Unit	80.000.000,00	340.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Perkebunan
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	5 Unit	12.203.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Dinas Perkebunan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

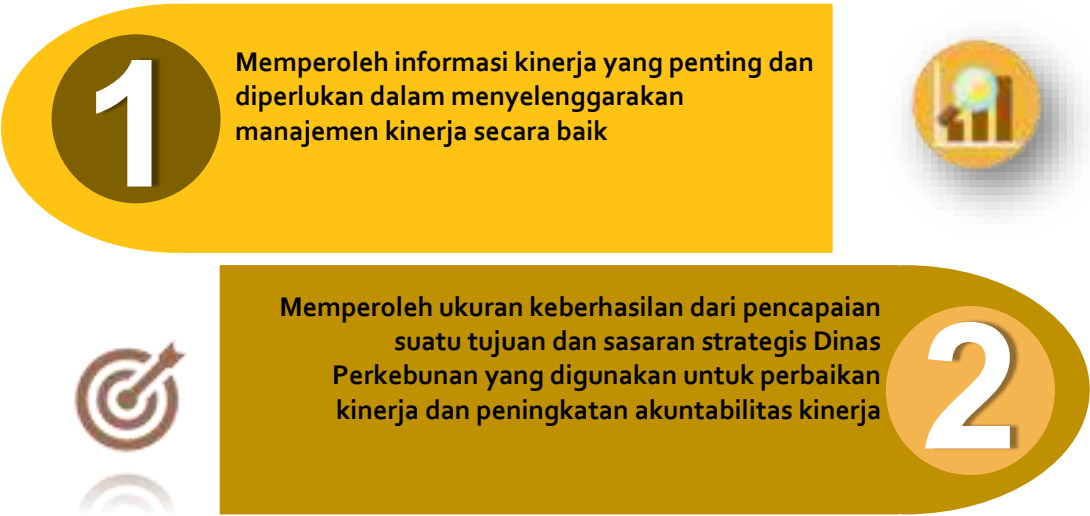
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat segera diketahui dan diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman tujuan dan Sasaran RPP yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (tiga tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan. RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu :



Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
LPE Sub sektor perkebunan (%)	2,44	3	3,5	4	4
Persentase penurunan emisi GRK sektor lahan dari Business usual (BAU)(%)	5,55	7,71	8,79	9,88	9,88
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	84,41	85	85,50	86	86
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Poin)	78,10	78,50	79,30	80.01	80,01
Produksi komoditi perkebunan (Ton)	19.207.272	22.303.000	23.628.000	24.953.000	24.953.000
NTP perkebunan rakyat	162,54	135	140	145	145
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)	94	100	105	110	110
Nilai SAKIP Perangkat daerah (Nilai/Predikat)	76,12	77,5	78,5	80,5	80,5
Nilai Kepuasan Penggunaan Layanan Perangkat Daerah (indeks)	88,20	89	90	91	91
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Dinas Perkebunan	73.08	78,93	84,88	90,83	90,83
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) Dinas Perkebunan	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) UPTD PBP	85,56	85,87	86,20	87,20	87,20
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) UPTD PBP	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) UPTD P2TP	74,37	79	83,75	88,38	88,38
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) UPTD P2TP	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) UPTD PBTP	77,25	80	82,75	85,5	85,5

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	
Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%) UPTD PBTP	100	100	100	100	100
Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,26	25,36	25,41	25,46	25,46
Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (Benih)	6.592.223	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	94,08	95	96,5	98	98
Luas kebun yang dibangun (Ha)	24.623	50.702	49.000	50.000	149.702
Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	5,15	11,15	23,03	34,55	34,55
Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan (%)	15,38	26,50	52,99	79,49	79,49
Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	117	100	100	100	100
Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	36,37	55	60	65	65
Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	27,39	40,59	55,45	70,30	70,30

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan dan memastikan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dilakukan secara konsisten dan sistematis dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan usaha perkebunan yang inklusif berbasis kerakyatan.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perkebunan sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur yang terlibat dalam usaha membangun perkebunan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama, sinergi dan kolaborasi dari semua pihak demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga sangat bergantung dari ketersediaan anggaran untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa akan mengembangkan diri dan berusaha menjadi OPD yang gesit dan lincah dalam menghadapi tuntutan dan tantangan pembangunan di Kalimantan Timur kedepan. Beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Perkebunan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Perkebunan akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Perkebunan dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan periode berikutnya.

Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel 4.1 pada Bab IV Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perkebunan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas

Pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan setiap tahun melalui DPA-Dinas Perkebunan;

Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat digunakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 Kabupaten/Kota, dengan luas wilayah daratan menjadi 12.734.692 Ha atau 127.345,92 km². Jumlah penduduk Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 3.941.766 jiwa dengan kepadatan 30,95 jiwa/km², rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,98% selama lima Tahun sejak Tahun 2018-2022. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata, porsi terbesar berada di Samarinda (21,56%), selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (19,74%), Balikpapan (18,46%), Kabupaten Kutai Timur (10,80%), Kabupaten Paser (7,52%), Kabupaten Berau (6,92%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Bontang (4,72%), Kabupaten Kutai Barat (4,46) dan Kabupaten Mahakam Ulu (0,95%). Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan komoditas ternak seperti daging, telur dan susu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pencapaian PDRB Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian. Data PBRD Kalimantan Timur Tahun 2022 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 55,79%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar 8,48% menjadi 6,51%. Dari angka tersebut perolehan PDRB bidang pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan kemudian perikanan, kehutanan, hortikulturan, peternakan, serta tanaman pangan. Kontribusi sub sektor peternakan berada pada kisaran 0,32% namun jika dilihat dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan dengan kontribusi paling besar berasal dari daging ayam, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sub sektor peternakan Tahun 2022 sebesar 1.94% dengan rata-rata per Tahun dari Tahun 2019 sampai 2022 sebesar 1,98%.

Indikator ekonomi lainnya seperti, laju inflasi mengalami kenaikan pada Tahun 2022 mencapai 5,35% disebabkan kenaikan

biaya produksi seperti biaya produksi seperti biaya pakan dan biaya perawatan dapat meningkatkan harga jual sapi dan daging ayam boiler karena biaya produksi yang tinggi dan permintaan pasar yang tinggi dapat mempengaruhi kenaikan harga jual sapi dan daging ayam boiler. Sedangkan angka indeks Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan peternak. Pada Tahun 2022 Nilai Tukar Petani Peternakan mengalami peningkatan sebesar 108,76 daripada Tahun 2021 sebesar 103,82

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima Tahun (2020-2024), yaitu :1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; 5) Transformasi Ekonomi.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani/peternak dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 4) Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan 5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Fokus kegiatan yang dilakukan kementerian pertanian yaitu pada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional ; 2) Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian ; 3) Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian; 4)

Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian; 5) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan juga mengacu dan menelaah Renstra kementerian pertanian.

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik dan peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

” Korporasi Peternak wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan Yang Berdaulat, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”

Korporasi peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewan yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai produsen utama produk

peternakan seperti daging, susu, dan telur, korporasi peternakan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan asal hewan di dalam negeri, serta menghasilkan produk-produk yang dapat diekspor ke luar negeri.

Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan populasi, produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi :

1. Mendorong Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan;
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktifitas Ternak;
3. Peningkatan Produksi dan Produksi Pakan Ternak;
4. Pemberdayaan Potensi Komoditas Ternak Lokal
5. Peningkatan Status Kesehatan Hewan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Mutu Obat Hewan
7. Peningkatan Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak
8. Peningkatan Pemenuhan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
9. Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan
10. Peningkatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dan Kesejahteraan Hewan
11. Pengembangan Kawasan Peternakan
12. Penguatan Kemudahan dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan
13. Peningkatan Peran Swasta dan Usaha Peternakan Rakyat
14. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Kelembagaan Peternakan
15. Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan
16. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktifitas
17. Penguatan Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap Tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya secara sistematis segala usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukr hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pada dasarnya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026 .

Selanjutnya RENSTRA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- (1). Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- (2). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
- (3). Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
- (4). Undang-undang No. 18 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (5). Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur;
- (6). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- (7). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- (8). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

- (9). Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- (10). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11). Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (13). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- (14). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
- (15). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- (16). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

- (17). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- (18). Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 3 (Tiga) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Untuk menentukan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan

penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- (1). Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga Tahun dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur
- (2). Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder serta masyarakat peternakan di Kalimantan Timur
- (3). Tersusunnya berbagai Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan, yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dalam kurun waktu satu sampai lima Tahun.
- (4). Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- (5). Renstra ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menguraikan lingkungan intern yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, kinerja pelayanan publik serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementrian Pertanian dan Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, terakhir tentang penentuan isu-isu strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam waktu lima Tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur lima Tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pertanian Urusan Peternakan

Bab ini menyajikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

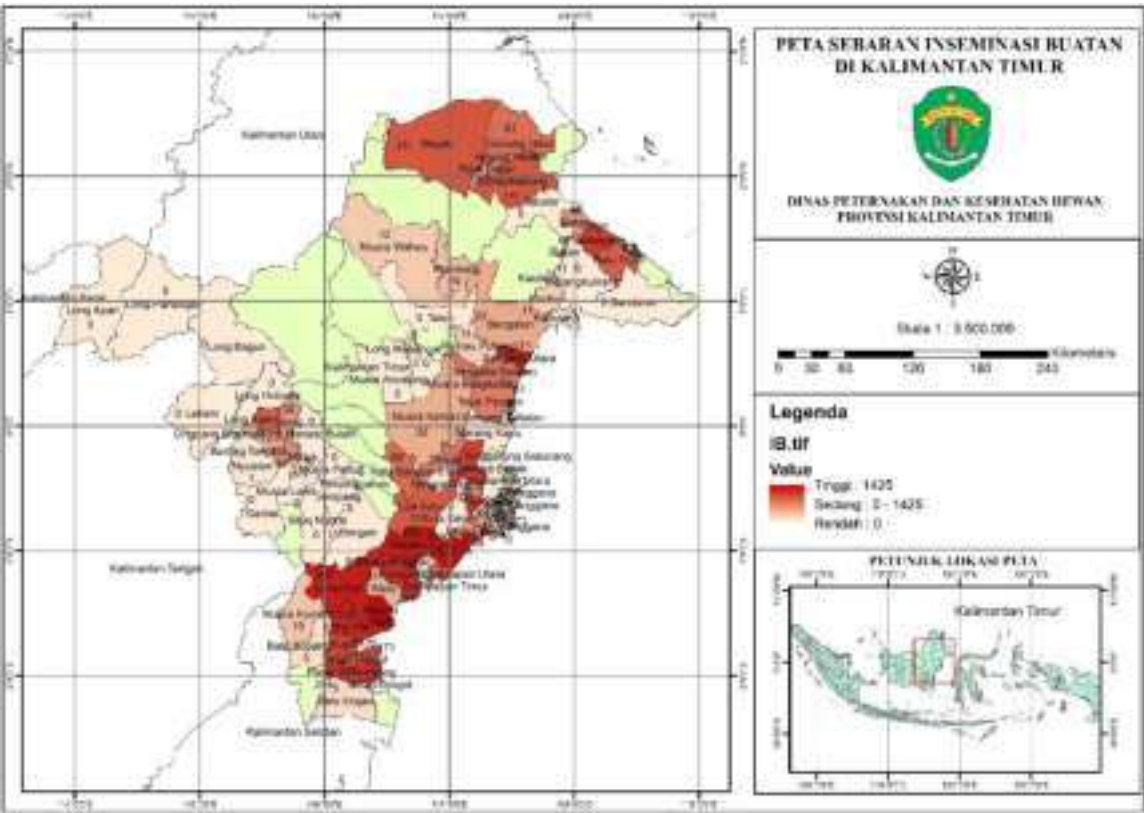
Bab ini memuat ringkasan singkat serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (Tiga) Tahun ke depan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Aspek Geografi

Secara geografis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terletak pada koordinat 00°29'34,3"S 117°08'41,5"E. Pelayanan langsung kepada masyarakat peternak meliputi pelayanan teknis, fasilitasi, pembinaan dan dukungan regulasi. Beberapa pelayanan teknis tergambar dalam sebaran spasial sebagai berikut:

2.1.1 Peta Sebaran Inseminasi Buatan di Kalimantan Timur

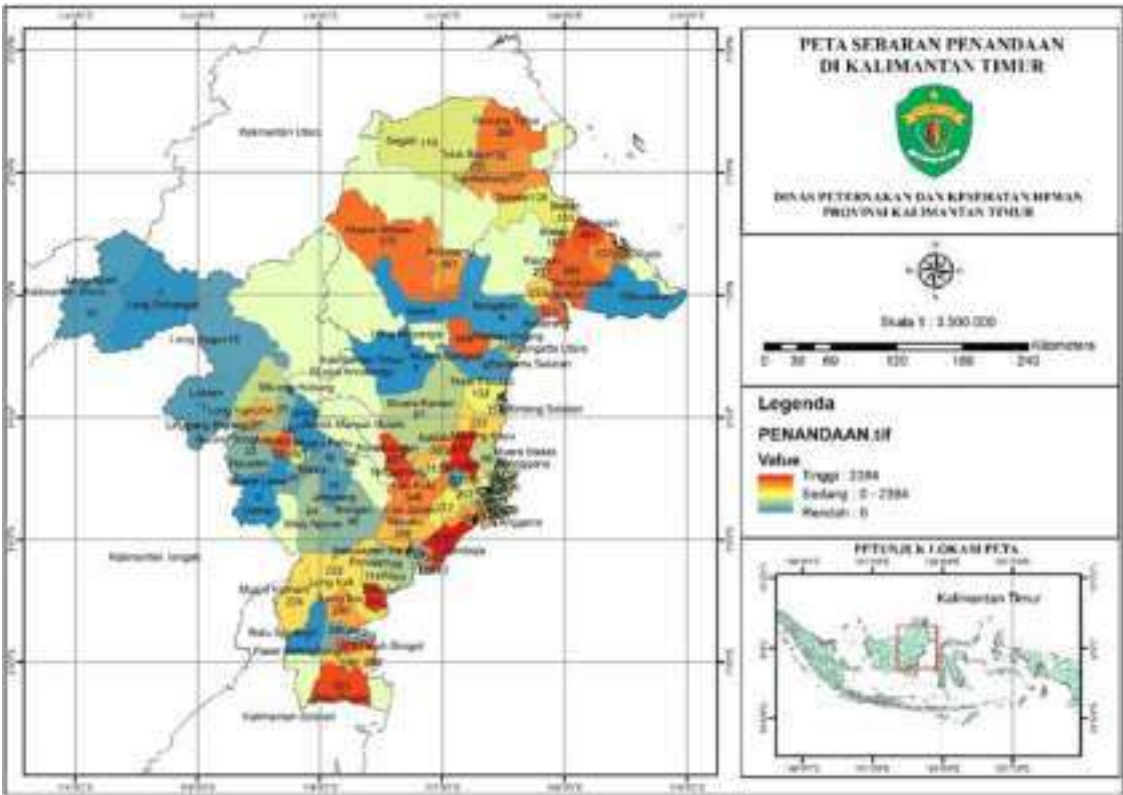


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki program inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan di wilayah tersebut. Inseminasi buatan adalah proses pembuahan telur secara buatan dengan memasukkan sperma jantan ke dalam rahim betina dengan menggunakan teknik khusus. Terdapat 86 wilayah kecamatan yang melakukan program inseminasi buatan yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur.

Program inseminasi buatan ini dilaksanakan oleh petugas-petugas yang telah terlatih dan terampil dalam melakukan proses inseminasi buatan. Dalam program ini, Dinas bekerja sama dengan para peternak untuk memfasilitasi proses inseminasi buatan bagi hewan ternak mereka. Inseminasi buatan memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi peternakan, antara lain dapat meningkatkan produktivitas ternak, meningkatkan kualitas genetik ternak, serta dapat membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh proses perkawinan secara alami.

Dalam menjalankan program inseminasi buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para peternak mengenai pentingnya menjaga kesehatan ternak dan tata cara merawat ternak yang baik dan benar.

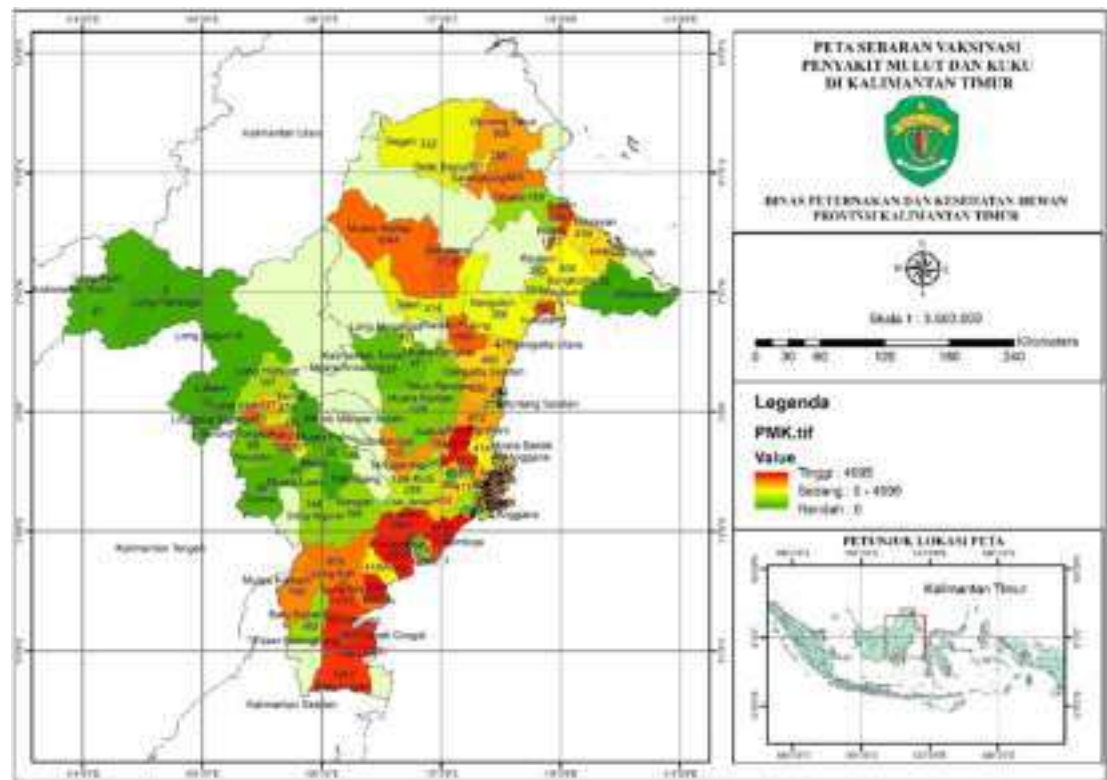
2.1.2 Peta Sebaran Pelaksanaan Identifikasi Ternak (Penandaan) di Kalimantan Timur



Penandaan hewan merupakan salah satu tugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 86 wilayah kecamatan yang telah melakukan penandaan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Penandaan hewan dilakukan dengan memberikan tanda pada hewan yang menunjukkan

status kesehatan hewan tersebut, seperti tanda vaksinasi, tanda hasil pemeriksaan kesehatan, atau tanda identitas pemilik hewan. Penandaan hewan bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit hewan, dan memudahkan pelacakan hewan jika terjadi masalah kesehatan hewan atau permasalahan hukum terkait hewan tersebut. Penandaan hewan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dan terampil dalam melakukan tindakan tersebut, dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.3 Peta Sebaran Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku di Kalimantan Timur

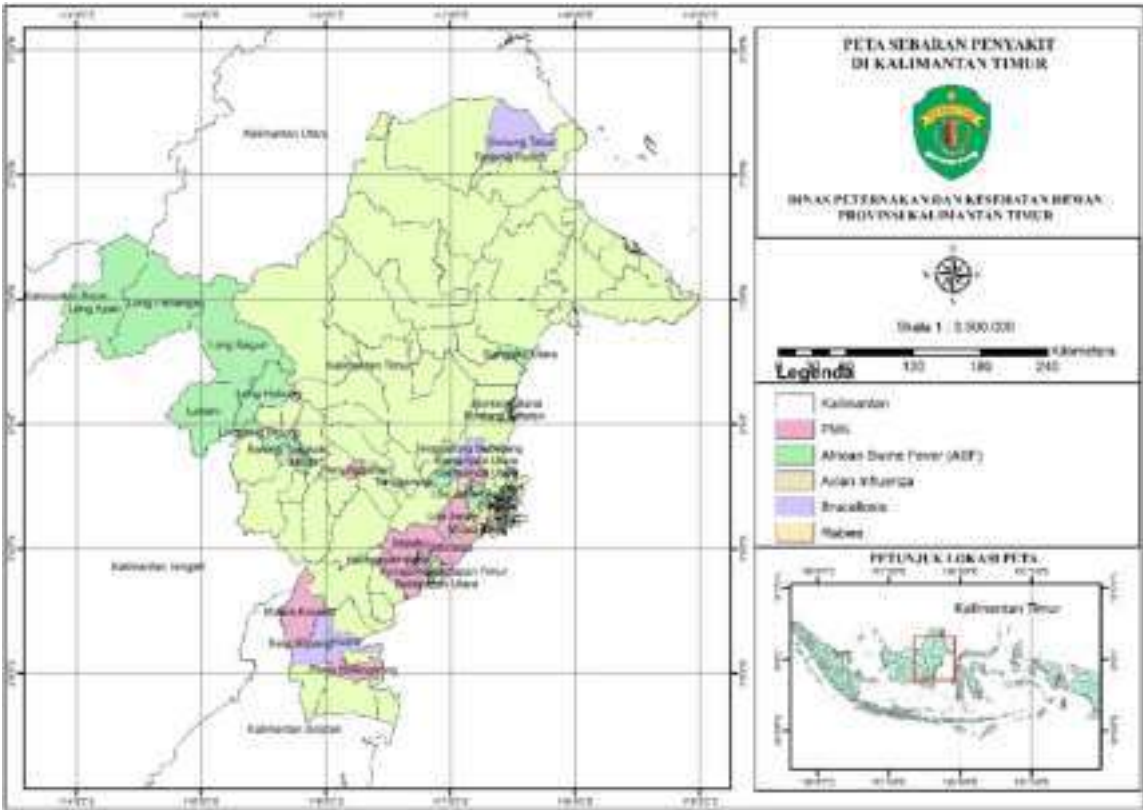


Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh virus PMK yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung atau melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Terdapat 86 wilayah kecamatan yang dilakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur

Apabila terjadi kasus PMK di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, seperti karantina hewan, pemusnahan hewan yang terinfeksi, dan pemberian

vaksinasi massal pada hewan yang belum terinfeksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke daerah lain dan melindungi kesehatan hewan serta masyarakat yang terkait dengan kegiatan peternakan.

2.1.4 Peta Sebaran Penyakit Menular di Kalimantan Timur



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Namun, secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di setiap wilayah bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan penyakit menular pada hewan, seperti penyakit rabies, penyakit avian influenza, dan sebagainya serta melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui vaksinasi, karantina, dan tindakan sanitasi yang ketat di fasilitas peternakan dan pasar hewan.

Terdapat 10 kecamatan yang terdeteksi Penyakit Mulut dan Kuku, 11 kecamatan yang terdeteksi penyakit African Swine Fever (ASF), 5 kecamatan yang terdeteksi penyakit Avian Influenza, 5 kecamatan yang terdeteksi penyakit Brucellosis dan 1 kecamatan yang terdeteksi penyakit Rabies.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas berisi tentang pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

2.2.2 Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- (1). Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan;
- (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (9). Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

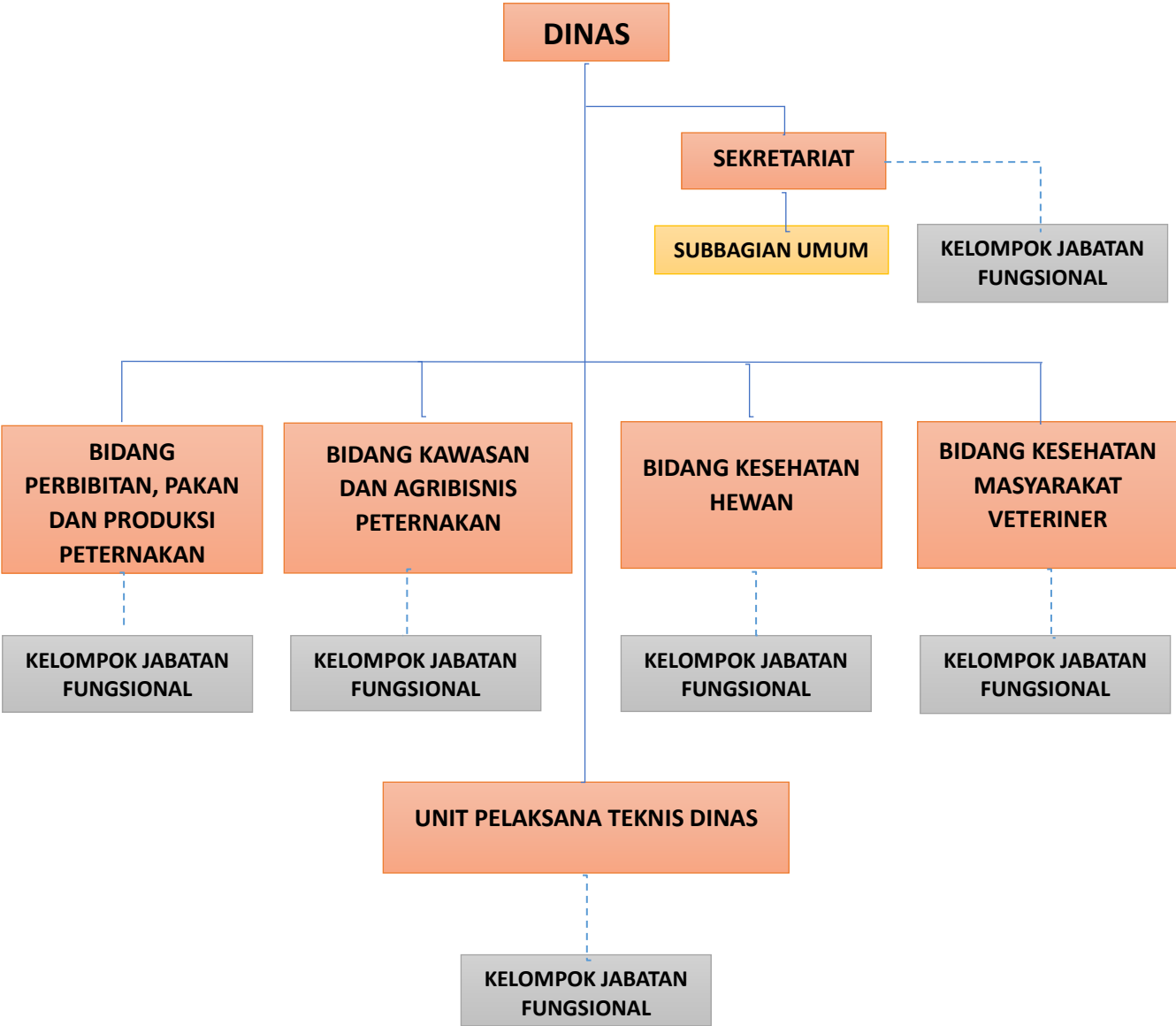
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - c. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar bagan. 1 berikut



Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan serta pengolahan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

1. Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan membawahkan

2. Bidang Kawasan dan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang Kesehatan Hewan. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan
4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - d. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan Tugas dan Fungsinya

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan'
 - d. Seksi penyidikan dan pengujian penyakit peternakan
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
 - f. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bgaian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala UPTD Seksi-seksi di masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior sebagai Ketua ketua kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
7. Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempuntai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh gubernur atas usul Kepala Dinas

2.3 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

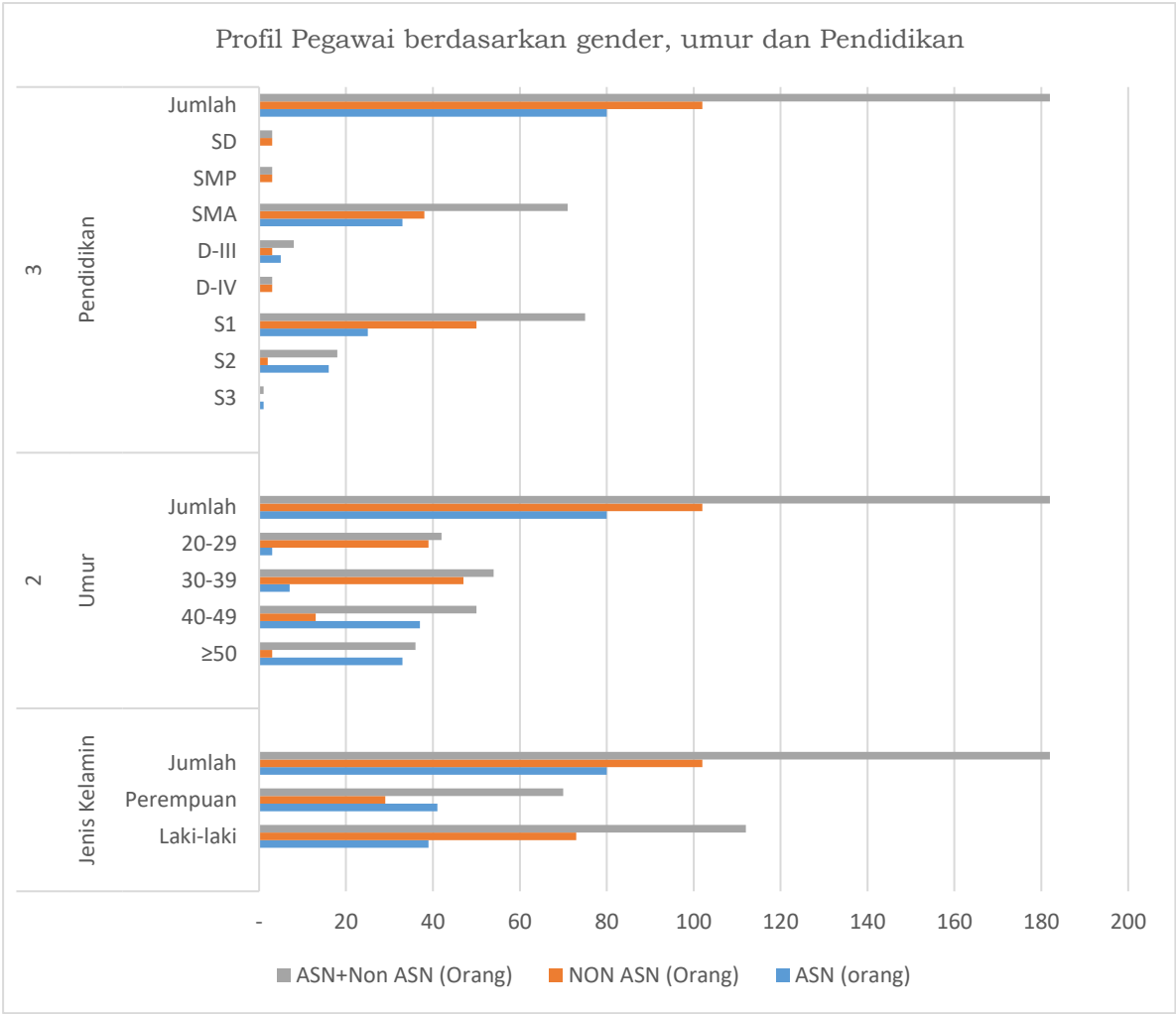
Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 182 orang terdiri dari 80 orang ASN (PNS) dan 102 orang Non ASN yang terdistribusi di lingkup Kantor Dinas dan UPTD.

Kondisi umum sumberdaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilihat dari aspek gender, aspek umur, aspek pendidikan dan jenis jabatan yang diampu adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 1. Profil Pegawai Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Kodisi Per 31 Desember 2022

NO	KATEGORI	ASN (orang)	NON ASN (Orang)	JUMLAH (Orang)
1	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	39	73	112
	Perempuan	41	29	70
	Jumlah	80	102	182
2	Umur			
	≥50	33	3	36
	40-49	37	13	50
	30-39	7	47	54
	20-29	3	39	42
	Jumlah	80	102	182
3	Pendidikan			
	S3	1	-	1
	S2	16	2	18
	S1	25	50	75
	D-IV	-	3	3
	D-III	5	3	8
	SMA	33	38	71
	SMP	-	3	3
	SD	-	3	3
	Jumlah	80	102	182
4	Jenis Jabatan			
	Struktural	14	-	14
	Fungsional	18	-	18
	Pelaksana	48	102	150
	Jumlah	80	102	182
5	Eselon			
	II.A	1	-	1
	III.A	5	-	5
	III.B	2	-	2
	IV.A	6	-	6
	Jumlah	14	-	13
6	Golongan/Pangkat Ruang			
	IV/b	5	-	5
	IV/a	8	-	8
	III/d	20	-	20
	III/c	3	-	3
	III/b	13	-	13
	III/a	12	-	12
	II/d	10	-	10
	II/c	5	-	5
	II/b	4	-	4
	Jumlah	80	-	80

Sumber: Laporan Tahun 2022 Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2. Profil pegawai Dinas Peternakan dan kesehatan hewan

2.3.2 Sumber Daya Aset atau Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah Kantor	3,272	m2
2	Gedung Kantor	3	Unit (@2 Lantai)
3	Gedung Klinik Hewan	1	unit
4	Taman	1,113	m2
5	Listrik	3	Jaringan
6	Air	2	Jaringan
7	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	3	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	2	Ruang
11	Koperasi	1	Buah
12	Perpustakaan	1	Ruang
13	Ruang CS	0	Ruang
14	PC	55	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
15	Note book	25	unit
16	Laptop	24	Unit
17	AC	57	unit
18	Ruang Obat	1	Ruang
19	Ruang Persediaan/Laktasi	1	Ruang
20	Mobil Dinas Ess	6	Unit
21	Mobil operasional	11	Unit
22	Motor Dinas	45	Unit
23	Kantin	1	Buah
24	Website	1	Buah
25	Papan Pengumuman	2	Buah
26	Mushola	1	Unit
27	Aplikasi	4	buah
28	Brankas	11	buah
29	Genset	1	unit
30	Printer Multifungsi	2	Buah

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Tabel 3. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah	686.4	m2
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 309 m2
3	Klinik Hewan	0	Ruang
4	Taman	10	m2
5	Listrik	41,500	KVA
6	Air	1	Jaringan
7	Telepon	1	Line
8	Internet	2	Line
9	Area Parkir	1	Area
10	Ruang Rapat	1	Ruang
11	Ruang Pengujian Lab	7	Ruang
12	Ruang Kepala UPTD	1	Ruang
13	Ruang Staff	4	Ruang
14	Ruang Arsip	1	Ruang
15	Koperasi	0	Buah
16	Perpustakaan	0	Ruang
17	Ruang CS	1	Ruang
18	Pos Pengamanan	1	Ruang
19	Komputer PC	6	Unit
20	Laptop	11	Unit
21	Ruang Cuci Alat	1	Ruang
22	Ruang Tunggu	1	Ruang

No	Uraian	Volume	Satuan
23	Ruang Media/ Reagen/Sampel	2	Ruang
24	Ruang Persediaan/Gudang	1	Ruang
25	Ruang Pengadaan	0	Ruang
26	Mobil Dinas	1	Unit
27	Mobil operasional	3	Unit
28	Motor Dinas	2	Unit
29	Dapur/Pantry	1	Buah
30	Website	1	Buah
31	Papan Pengumuman	1	Buah
32	LED Display/Running Text	1	Buah
33	Papan iklan/ Baliho	1	Buah
34	Mushola	1	Unit
35	File Arsip	2	Buah
36	Printer Multifungsi	7	Buah
37	Kandang Observasi	1	Kandang

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Tabel 4. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tractor lainnya	1	Unit
2	Mesin Proses lainnya	1	Unit
3	Portable Generating Set	1	Unit
4	Pompa Air	12	Unit
5	PC Unit	21	Unit
6	Laptop	14	Unit
7	Notebook	2	Unit
8	CPU (Peralatan mainframe)	1	Unit
9	Hard disc	1	Unit
10	Monitor	1	Unit
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	Buah
12	Alat Bantu Produksi lainnya	1	Unit
13	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Unit
14	Truck + attachment	1	Unit
15	Pickup	1	Unit
16	Sepeda Motor	9	Unit
17	Mesin Kompresor	1	Buah
18	Neraca Halus + Lemari Kapasitas 500 gram	1	Buah
19	Neraca Dengan Digital Display	1	Buah
20	Alat Timbangan/Biara lainnya	2	Buah
21	Traktor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)	1	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
22	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	1	Unit
23	Alat Panen Lainnya	1	Unit
24	Oven	2	Unit
25	Alat Laboratorium Lainnya	4	Unit
26	Alat Processing Lainnya	1	Unit
27	Alat Pencacah Hijauan	1	Unit
28	Stick Pengukur Sapi	1	Unit
29	Container	1	Unit
30	Alat Peternakan Lainnya	3	Unit
31	Mesin Ketik Manual Portable (11- 13 Inchi)	1	Buah
32	Lemari Besi/Metal	6	Buah
33	Lemari Kayu	22	Buah
34	Rak Kayu	5	Buah
35	Filling Cabinet Besi	3	Buah
36	Brandcash	2	Buah
37	Lemari Kaca	6	Buah
38	CCTV - Camera Control Television System	8	Unit
39	White Board	1	Buah
40	LCD Projector	1	Buah
41	Papan Tulis	1	Buah
42	Alat Kantor Lainnya	2	Buah
43	Meja Kerja Kayu	50	Buah
44	Kursi Besi/Metal	28	Buah
45	Kursi Kayu	17	Buah
46	Meja Rapat	20	Buah
47	Tempat Tidur Besi	2	Buah
48	Tempat Tidur Kayu	35	Buah
49	Meja Resepsionis	1	Buah
50	Meja Bundar	1	Buah
51	Meja Makan Besi	7	Buah
52	Kursi Rapat	40	Buah
53	Kursi Tamu	6	Buah
54	Kursi Putar	4	Buah
55	Kursi Biasa	26	Buah
56	Meja Komputer	2	Buah
57	Meubelair Lainnya	1	Buah
58	Jam Elektronik	2	Buah
59	Mesin Pemotong Rumput	11	Unit
60	Mesin Cuci	1	Unit
61	Alat Pembersih Lainnya	2	Unit
62	Lemari Es	7	Unit
63	A.C Window	19	Unit
64	A.C Split	17	Unit
65	Kipas Angin	17	Buah
66	Kompor Gas (Alat Dapur)	3	Buah
67	Televisi	8	Buah
68	Amplifier	1	Buah
69	Sound System	1	Buah

No	Uraian	Volume	Satuan
70	Wireless	1	Buah
71	Mic Conference	17	Buah
72	Camera Video	1	Buah
73	Camera Film	1	Buah
74	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah
76	Water Filter	1	Buah
77	Tangga Aluminium	1	Buah
78	Dispenser	4	Buah
79	Mimbar/Podium	1	Buah
80	Handy Cam	1	Buah
81	Alat Pemanas Ruangan	1	Buah
82	Home Theater	1	Buah
83	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Buah
84	Alat Pembantu Kebakaran	2	Buah
85	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	Buah
86	Meja Kerja	21	Buah
87	Kursi Kerja	5	Buah
88	Power Supply Microphone	2	Buah
89	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Buah
90	Video Tape Recorder Stationer	1	Buah
91	Layar Film/Projector	2	Buah
92	Camera Digital	1	Buah
93	Camera Conference	1	Buah
94	Handy Talky (HT)	1	Buah
95	Facsimile	1	Buah
96	Unit Transceiver HF Transportable	1	Buah
97	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	1	Buah
98	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2	Unit
99	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
100	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit
101	Microscope	1	Unit
102	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
103	Timbangan/Neraca	2	Unit
104	Refrigerator	1	Unit
105	Alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	Unit
106	Aquadestilator	1	Unit
107	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	1	Unit
108	Alat laboratorium patologi lainnya (dst)	1	Unit
109	Mesin Printing	1	Unit
110	Cervix Dilatator	6	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
111	Container N2 Cair (Alat Laboratorium Pertanian)	2	Unit
112	Disk Mill	1	Unit
113	Neraca Analitis Kalibrator	1	Unit
114	Alat Laboratorium Lainnya	17	Unit
115	Generator Set	2	Unit
116	Mikroskop	1	Unit
117	Tanah	504.607,00	m2
118	Gedung Kantor Permanen	100	m2
119	Gedung Tertutup Permanen	36	m2
120	Bengkel/Hanggar Darurat	12	m2
121	Gedung Laboratorium Permanen	162,50	m2
122	Rumah Sakit Hewan	24,00	m2
123	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	80,00	m2
124	Gedung Pendidikan Permanen	120,00	m2
125	Gedung Pertemuan Lain-lain	30,00	m2
126	Gedung Pos Jaga Permanen	12,00	m2
127	Bangunan Untuk Kandang	1.317,00	m2
128	Rumah Negara Golongan (II dan III) Tipe A Permanen	127,00	m2
129	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	519,17	m2
130	Flat/Rumah Lain-lain	30	m2

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

2.4 Kondisi umum Subsektor Peternakan Dan Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap Tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, susu dan telur.

Tabel 5. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S a p i	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613	-1,95
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68	-11,31
3	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490	1,33
4	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.552	-3,09
5	Domba	439	590	635	694	642	9,97
6	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839	-12,71
7	Kuda	97	102	95	143	95	-0,52
8	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873	3,21
9	Ayam Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217	6,15
10	Ayam Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191	-2,03
11	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564	2,01
12	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931	-13,53
13	Puyuh	66.593	65.808	79.222	94.339	88.143	7,26
14	Merpati	4.027	4.776	5.015	5.375	5.678	8,97
15	Itik Manila	42.851	42.890	52.823	64.178	67.608	12,08

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan itik manila) serta aneka ternak (kelinci, puyuh dan merpati).

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar sejak Tahun 2018 - 2022 untuk sapi sebesar -1,95%, dan Kerbau 1,33%. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil Tahun 2018-2022 untuk kambing sebesar -3,09%, domba 9,97%, dan babi -12,71%. Untuk ternak unggas rata-rata pertumbuhan populasi paling tinggi ada pada Itik Manila sebesar 12,08%.

Pertumbuhan dan perkembangan populasi juga diikuti pertumbuhan/perkembangan Rumah Tangga Usaha Peternak (RTUP) pada masing-masing komoditas ternak. Sumberdaya manusia peternakan (Peternak) yang mengusahakan peternakan juga mengalami pasang surut baik pada beberapa komoditas (Rumah Tangga usaha Peternak), tergambar pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Tahun 2013 dan Tahun 2018 pada masing-masing komoditas peternakan

No	Komoditas	Rumah Tangga Usaha Peternakan (RT)		2013 to 2018	
		2013	2018	Growth	%
1	Kerbau	753	364	↘	-51.66%
2	Sapi Perah	2	0	↘	-100.00%
3	Sapi Potong	19,777	17,772	↘	-10.14%
4	Babi	4,477	4,150	↘	-7.30%
5	Domba	13	62	↗	376.92%
6	Kambing	4,438	6,353	↗	43.15%
7	kuda	3	5	↗	66.67%
8	Itik	7,142	3,153	↘	-55.85%
9	Itik Manila	3,384	5,031	↗	48.67%
10	Ayam Lokal	35,391	48,865	↗	38.07%
11	Ayam Ras Pedaging	1,105	954	↘	-13.67%
12	Ayam Ras Petelur	79	183	↗	131.65%
13	Lainnya	568	388	↘	-31.69%
TOTAL		77,132	87,280	↗	13.16%

Sumber: (Ditjenak-Keswan, 2023)

Sumber daya manusia (SDM) kelompok peternak memiliki peran yang penting dalam pembangunan peternakan, SDM kelompok peternak merupakan salah satu aset kunci yang harus diperhatikan. Investasi dalam pengembangan SDM kelompok peternak dapat membawa dampak positif

yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan peternakan secara keseluruhan.

Tabel 7. Kelompok Peternak berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Komoditas						Jumlah Kelompok Per Kab/Kota
		Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam	Itik	
1.	Balikpapan	17	-	-	-	-	1	18
2.	Berau	104	-	2	-	-	1	107
3.	Bontang	11	1	-	1	-	-	13
4.	Kutai Barat	85	-	2	3	10	4	104
5.	Kutai Kartanegara	646	5	23	4	15	12	705
6.	Kutai Timur	242	-	10	-	5	1	258
7.	Mahulu	13	-	1	4	2	-	20
8.	Paser	318	-	5	-	4	5	332
9.	PPU	204	-	5	-	12	1	222
10.	Samarinda	113	-	6	-	3	-	122
TOTAL		1,753	6	54	12	51	25	1,901

Sumber: Laporan Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Tabel 8. Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	50,288	51,426	52,857	46,316	49,607
2	Sapi Perah	-	10	2	14	2
3	Kerbau	243	387	301	327	433
4	Kuda	-	-	2	2	2
5	Kambing	49,264	45,906	45,155	59,881	63,876
6	Domba	9	160	388	373	170
7	Babi	22,952	29,562	30,003	37,741	32,700
8	Ayam Buras	6,853,754	6,558,623	6,652,808	6,742,366	6,877,214
9	Ayam Petelur	527,716	426,847	609,497	734,243	748,928
10	Ayam Pedaging	60,005,201	61,097,909	53,462,549	54,723,734	55,818,209
11	Itik	124,489	127,342	127,377	130,632	133,244
12	Kelinci	10,642	6,644	8,123	7,097	7,238
13	Puyuh	59,934	59,227	71,300	84,905	86,603
14	Merpati	5,034	5,970	6,269	6,719	6,853
15	Itik Manila	25,711	25,734	31,694	38,507	39,277

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Pemotongan terbanyak Tahun 2022 terdapat pada komoditas ayam pedaging dengan jumlah Pemotongan 55.818.209 ekor. Bila dibandingkan Tahun 2018, Pemotongan ternak yang

mengalami peningkatan terdapat pada, ayam petelur, itik, puyuh, merpati, Kerbau, Babi dan itik manila. Sedangkan Pemotongan ternak yang mengalami penurunan adalah sapi, ayam pedaging, kuda, domba, dan Kelinci.

Pertumbuhan negatif pada komoditas ternak besar (ruminansia) dapat dipengaruhi akibat adanya pemotongan sapi betina, dimana sapi betina merupakan "Mesin produksi/pabrik" dalam menghasilkan anak/keturunan sehingga populasi dapat bertambah dan berkembang, berikut data pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur.

Tabel 9. Data Pemotongan sapi lokal tercatat di Kalimantan Timur Tahun 2022

Pemotongan Ternak							
No	Kab./Kota	Kerbau		Sapi			Total
		betina tidak produktif	jantan	sapi betina produktif	sapi betina tidak produktif	sapi jantan	
1	Balikpapan	-	-	-	199	3,509	3,708
2	Berau	-	1	-	944	1,276	2,221
3	Bontang	-	-	-	58	2,805	2,863
4	Kutai Barat	-	-	-	-	965	965
5	Kutai Kartanegara	1	-	-	40	987	1,028
6	Kutai Timur	-	4	-	11	2,366	2,381
7	Paser	-	-	-	-	1,131	1,131
8	Penajam Paser Utara	-	-	1	14	388	403
9	Samarinda	-	-	-	2	6,880	6,882
Jumlah		1	5	1	1,268	20,307	21,582

Sumber: Laporan Bidang Kesmavet, DPKH

Tabel 10. Data Pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No.	Kab/Kota	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Balikpapan	199	80	33	29
2	Berau	944	831	839	568
3	Bontang	58	20	5	18
4	Kutai Barat	-	-	-	3
5	Kutai Kartanegara	40	60	33	5
6	Kutai Timur	11	-	1	-
7	Mahulu	-	-	-	-
8	Paser	-	-	-	-
9	Penajam Paser Utara	15	-	2	29
10	Samarinda	2	5	5	16
TOTAL		3,288	3,016	2,939	2,690

Sumber: Laporan Bidang Kesmavet, DPKH

Tabel 11. Perkembangan Harga Komoditas Ternak dan Produk Ternak Tahun 2018-2022

NO	KOMODITAS	SATUAN	TAHUN (Rp)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	Kg/BH	41.926	44.203	41.520	58.000	58.000
2	Kambing	Kg/BH	50.579	49.200	44.268	115.000	115.000
3	Ayam Kampung	Ekor	80.000	85.463	85.463	150.000	150.000
4	Ayam Broiler	Ekor	20.954	45.375	44.222	40.498	50.000
5	Telur Ayam Ras	Butir	1.306	1.731	1.717	1.900	1.900
6	Telur Ayam Kampung	Butir	2.167	2.650	2.652	2.500	2.500
7	Telur Itik	Butir	2.500	3.111	3.111	3.000	3.000
8	Daging Sapi	Kg	119.769	131.435	131.528	133.733	150.000
9	Daging Kambing	Kg	131.111	152.500	152.500	250.000	250.000

Sumber: Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa harga semua komoditas mengalami peningkatan sekaligus penurunan secara bersamaan hal ini karena bervariasinya permintaan akan komoditas ternak di Kalimantan Timur setiap Tahunnya. Harga komoditas peternakan seperti daging, susu, dan telur, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar, suplai produksi, biaya produksi, persaingan industri, serta faktor-faktor. Peningkatan harga pakan juga dapat mempengaruhi harga komoditas peternakan, karena pakan merupakan biaya terbesar dalam produksi ternak. Jika harga pakan naik, maka biaya produksi juga akan naik dan hal ini dapat mempengaruhi harga jual produk sehingga harga komoditas peternakan sangat dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan di pasar. Pada industri ruminansia besar, masih mengandalkan usaha peternakan rakyat yang belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan pengelolaan pakan belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur terkait pengawasan lalu lintas ternak perlu ditingkatkan untuk mengendalikan penyebaran penyakit hewan dan agar dapat menghasilkan kualitas serta keamanan produk yang terjamin.

Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi kesenjangan ketersediaan dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari luar Kalimantan Timur. Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi untuk memenuhi pasar luar Kalimantan Timur dengan penambahan sarana Rumah Potong Unggas (RPU).

Pemasukan ternak dari luar daerah berfungsi untuk menutupi kesenjangan ketersediaan pada beberapa komoditas ternak yang mengalami

kekurangan. Pemasukan ternak dari luar daerah selain berdampak untuk pemenuhan kebutuhan, juga berdampak terhadap keseimbangan harga komoditas antar daerah. Pemasukan ternak dari luar daerah dilakukan dengan tetap melakukan pengawasan terhadap resiko masuknya penyakit, berikut data pemasukan ternak dari luar daerah ke dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 12. Pemasukan ternak dari Provinsi Kalimantan Selatan melalui jalur darat (Checkpoin) Tahun 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 (ekor)

Pemasukan Ternak Pada Bulan-	Ayam Potong		Ayam Buras		Itik	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Januari	17,740	253,081	600	3,725	-	-
Februari	13,420	573,651	-	3,725	-	-
Maret	15,465	-	-	-	-	-
April	9,310	-	650	-	-	-
Mei	68,192	-	1,941	-	1,113	-
Juni	84,100	-	2,320	-	850	-
Juli	197,806	-	8,370	-	2,589	-
Agustus	20,053	-	-	-	-	-
September	218,746	-	13,289	-	-	-
Oktober	161,197	-	7,620	-	924	-
November	175,032	-	14,200	-	2,010	-
Desember	184,930	-	17,700	-	2,010	-
Total	1,168,013	828,755	66,690	7,450	9,496	-

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Pemasukan ternak dari luar daerah secara keseluruhan melalui jalur udara/jalur darat pada masing-masing komoditas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pemasukan ternak dari Tahun 2019-2022

No.	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	45,715	48,238	39,573	49,101	50,611	43,871
2	Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
3	Kerbau	11	11	378	-	-	9
4	Kuda	42	15	-	-	-	57
5	Kambing	47,631	54,774	53,661	32,481	62,761	32,657
6	Domba	-	-	139	355	-	-
7	Babi	-	-	2,609	6,254	-	-
8	Ayam Buras	266,470	376,000	980,112	226,778	96,507	237,500
9	DOC Ayam Petelur	433,790	724,966	597,180	788,522	487,800	512,900
10	DOC Ayam Pedaging	1,714,242	1,090,840	1,735,309	1,186,639	965,178	1,158,800
11	I t i k	26,080	22,760	98,456	12,262	6,509	25,946
12	Kelinci	-	-	377	-	-	-
13	Puyuh	26,900	51,160	50,600	79,915	44,000	32,400
14	Merpati	-	-	287	-	-	-

15	Itik Manila	-	-	5,498	-	-	-
Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur							

Dinamika populasi ternak di Kalimantan Timur begitu dinamis, pada berbagai komoditas mengalami pertumbuhan positif dan beberapa komoditas juga mengalami pertumbuhan negatif. Dinamika populasi ternak selain dipengaruhi pemotongan, pemasukan, pengeluaran dan produksi/produktifitas. Faktor kesehatan hewan dalam produksi/produktifitas menjadi faktor yang dalam perkembangan terakhir menjadi perhatian yang serius mengingat kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ) semakin meningkat terutama penyakit yang baru terjadi/masuk ke wilayah Kalimantan Timur, berikut data kejadian PHMS Tahun 2022:

Tabel 14. Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis Tahun 2019-2022 (Kasus)

No.	PHMSZ	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	PMK	-	-	-	123
2	Brucellosis	-	106	-	84
3	Jembrana	7	26	-	-
4	Hog Cholera	-	-	-	-
5	Asf	-	-	784	1,344
6	Rabies	1	2	1	1
7	AI	-	488	5	77
8	LSD	-	-	-	-
TOTAL		8	622	790	1,629

Sumber: Laporan Tahunan Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022.

Kesehatan hewan menjadi faktor penting terhadap keberhasilan produksi, dalam pelaksanaan penyelidikan dan penelusuran kasus penyakit hewan diperlukan peran laboratorium kesehatan hewan yang memadai. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet memiliki peran penting dalam pemantauan, diagnostik, dan penelitian berbagai penyakit hewan. Berikut adalah ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Tabel 15. Ruang Lingkup Uji Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Tahun 2023

No.	Ruang Lingkup Uji	No.	Ruang Lingkup Uji
1	Pemeriksaan Patologi anatomi	21	Uji E coli (KIT)
2	Uji Pullorum	22	Uji Coliform (KIT)
3	Uji HA-HI Avian Influenza	23	Uji TPC
4	Uji HA-HI ND	24	Uji PCR identifikasi spesies babi
5	Uji Identifikasi Ulas Darah	25	Uji PCR identifikasi spesies kucing

No.	Ruang Lingkup Uji	No.	Ruang Lingkup Uji
6	Uji Identifikasi Telur Cacing	26	Uji PCR identifikasi spesies tikus
7	Uji seller Rabies	27	Uji rapid identifikasi spesies babi
8	Uji FAT Rabies	28	Uji formalin (konvensional)
9	Uji Elisa Rabies	29	Uji formalin (KIT)
10	Uji PCR AI	30	Uji Borax
11	Uji PCR Jembrana	31	Uji Nitrit (KIT)
12	Uji PCR IBH	32	Uji Rodhamin B
13	Uji Elisa Jembrana	33	Uji Methanil yellow
14	Uji Elisa BVD	34	Uji Pembusukan
15	Uji Elisa IBR		
16	Uji Elisa PMK		
17	Uji PCR ASF		
18	Uji Elisa ASF		
19	Uji Salmonella		
20	Uji Staphylococcus (KIT)		

Sumber: Laporan Tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pembangunan peternakan tidak terlepas dengan kawasan yang digunakan untuk aktifitas budidaya/usaha peternakan, ketersediaan kawasan yang peruntukannya terfokus akan memberikan beberapa kemudahan diantaranya adalah:

1. Kejelasan tentang status lahan/kawasan akan memudahkan dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana peternakan serta pengendalian lingkungan.
2. Kawasan peternakan yang ditetapkan, pemerintah dan otoritas terkait dapat menerapkan regulasi, kebijakan, dan standar yang lebih baik untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan peternakan. Hal ini meliputi perizinan, persyaratan sanitasi, perlindungan lingkungan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, praktik peternakan dapat diawasi dan dikontrol secara lebih efektif.
3. Mempermudah mengelola risiko dan konflik antara kegiatan peternakan dengan kegiatan lain di sekitarnya. Dalam kawasan tersebut, dapat dilakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini membantu mengurangi risiko pencemaran lingkungan, konflik antara peternakan dengan pemukiman penduduk, serta memastikan adanya keselarasan antara kegiatan peternakan dan sektor lainnya.
4. Kawasan peternakan yang terencana, perhatian dapat diberikan pada keamanan pangan dan kesehatan hewan. Kegiatan pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih terfokus untuk memastikan produksi hewan yang sehat, kualitas pangan yang baik, dan pencegahan

penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Kawasan peternakan yang terpisah juga membantu mengisolasi dan mengendalikan penyakit hewan yang mungkin muncul.

Melalui pendekatan pembangunan peternakan berbasis kawasan, dapat terjadi pengelolaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih berkelanjutan, kesehatan hewan yang lebih terjamin, dan peningkatan produktivitas dalam sektor peternakan, berikut pemanfaatan kawasan untuk aktifitas peternakan dari Tahun 2019-2022;

Tabel 16.Pemanfaatan Kawasan untuk aktifitas peternakan (Hektar)
Tahun 2019-2022

NO.	KAB. /KOTA	TAHUN				JUMLAH (Ha)
		2019	2020	2021	2022	
1	Samarinda	0.00	0.00	0.00	3.91	3.91
2	Balikpapan	0.00	0.00	0.00	7.82	7.82
3	Berau	0.00	4.00	21.25	35.17	60.42
4	Bontang	0.00	0.00	4.25	3.91	8.16
5	Kutai Barat	39.99	8.00	12.75	15.63	76.38
6	Kutai Kartanegara	0.00	12.00	21.25	50.81	84.06
7	Kutai Timur	79.99	0.00	17.00	19.54	116.53
8	Mahakam Ulu	0.00	8.00	0.00	7.82	15.82
9	Penajam Paser Utara	39.99	8.00	12.75	11.72	72.47
10	Paser	39.99	8.00	12.75	35.17	95.92
JUMLAH (unit)		199.97	48.00	102.00	191.50	541.47

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis ekonomi suatu wilayah atau Daerah, PDRB memiliki peran penting dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan suatu daerah. Pengukuran PDRB subsektor peternakan diukur untuk digunakan sebagai ukuran dinamika aktifitas ekonomi pada subsektor peternakan, yang menjadi bagian pada sektor pertanian arti luas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya PDRB subsektor peternakan diantaranya adalah populasi ternak, jumlah Pemotongan ternak, pemasukkan dan pengeluaran ternak serta harga komoditas produk peternakan.

Tabel 17. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
----	----------------	------	------	------	------	------

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,147.99	51,899.65	53,455.32	59,089.40	64,891.73
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	33,332.64	34,634.13	36,303.77	41,015.03	45,619.74
a	Tanaman Pangan	1,348.27	1,366.80	1,459.16	1,380.06	1,417.70
b	Tanaman Hortikultura	2,132.56	2,289.80	2,349.30	2,400.91	2,562.58
c	Tanaman Perkebunan	27,584.36	28,541.94	29,979.19	34,639.52	38,839.90
d	Peternakan	2,001.57	2,150.80	2,219.29	2,288.29	2,473.65
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	265.88	284.78	296.84	306.25	325.92
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,431.07	7,312.20	6,989.51	7,230.44	7,488.49
3	Perikanan	9,384.29	9,953.32	10,162.05	10,843.93	11,783.51

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka BPS, 2023

Kontribusi subsektor peternakan pada Tahun 2022 mengalami penurunan 18,18 persen dengan peningkatan nilai milyar rupiah sebesar 64.891,73 M. Kontribusi sektor peternakan terbesar ada di Tahun 2020 yaitu sebesar 0,37 persen sementara untuk kontribusi terendah ada di Tahun 2022 yang memberikan kontribusi sebesar 0,27 persen subsektor peternakan.

Sedangkan rata-rata kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (milyar rupiah) yang diberikan dari subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sebesar 5,46 % tiap Tahun. Untuk kontribusi terbesar ada di Tahun 2022 yaitu sebesar 8,10%, sementara untuk kontribusi terendah ada di Tahun 2021 yang memberikan kontribusi sebesar 3,11%.

Tabel 18. Distribusi Presentase PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.95	8.8	8.48	7.04
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.31	5.97	5.89	4.95
a	Tanaman Pangan	0.21	0.24	0.2	0.15
b	Tanaman Hortikultura	0.35	0.39	0.34	0.28
c	Tanaman Perkebunan	4.37	4.93	4.97	4.22
d	Peternakan	0.33	0.37	0.33	0.27
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.04	0.05	0.04	0.04
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.12	1.15	1.04	0.81

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
3	Perikanan	1.53	1.67	1.56	1.28

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka BPS, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. LPE subsektor peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) Peningkatan produksi daging, susu, telur, atau produk lain yang dihasilkan dari peternakan, (2) Nilai tambah yaitu selisih antara nilai produksi dan biaya input, keuntungan peternak, upah pekerja, dan biaya operasional lainnya (3) Jumlah Ternak (populasi) (4) Tingkat investasi dalam infrastruktur peternakan, teknologi, dan peralatan (5) Pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan.

Tabel 19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur (persen) 2019-2022

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.78	-0.98	-0.08	1.96
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.23	-0.36	-0.98	1.97
a	Tanaman Pangan	-1.52	4.35	-4.48	-1.74
b	Tanaman Hortikultura	3.91	0.54	0.92	-0.45
c	Tanaman Perkebunan	5.92	-0.9	-1.13	2.44
d	Peternakan	3.8	1.5	0.66	1.94
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	3.77	0.63	-0.43	0.92
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-3.15	-6.28	-0.88	-0.86
3	Perikanan	4.35	0.68	3.32	3.68

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka BPS, 2023

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2019-2023 dapat diuraikan berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA (2019-2023)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS RENSTRA	TARGET PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kesejahteraan peternak	NTP Peternakan	104	104.5	102	103	104	110.94	101.65	104.27	108.04	110.20	106.67	97.27	102.23	104.89	105.96
2	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	Produksi Daging (Ton)	82,811.60	85,479.70	73,274.74	74,740.23	76,235.08	79,262.43	80,917.96	75,811.96	74,461.03	75,950.25	95.71	94.66	103.46	99.63	99.63
		Produksi Telur (Ton)	11,786.10	12,058.60	14,148.65	14,290.14	14,433.04	11,083.30	11,386.32	13,181.14	14,834.64	15,131.33	94.04	94.42	93.16	103.81	104.84

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka penjelasan pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah

PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian, sehingga subsektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaannya sebagian masih bergantung kepada impor. Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah mencapai 0,37 pada Tahun 2023 merupakan angka tertinggi jika dibandingkan 5 Tahun sebelumnya, kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah paling rendah berada pada Tahun 2022 dengan nilai 0,28. Struktur PDRB sektor pertanian luas mencapai 8,77% dari total PDRB. Pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, harga, dan biaya. Peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak bersinergi dengan peningkatan kontribusi PDRB sub sektor peternakan. Pada Tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

2. NTP (Nilai Tukar Petani)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwan NTP Peternakan Nilainya diatas 100, yang paling tinggi berada pada Tahun 2019 dengan nilai 110,94 dan yang terendah berada di Tahun 2020 yaitu 101,65. Jika NTP di atas

100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

3. Produksi Daging

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi sehingga mengandalkan kepada pasokan impor, baik dalam bentuk sapi hidup atau daging.

Dari tabel.4 dapat dilihat trend produksi daging meningkat setiap Tahunnya. Produksi terendah berada di Tahun 2022 dengan jumlah produksi daging mencapai 74.461,03 Ton dan yang paling tinggi Tahun 2020 mencapai 80.917,96 Ton. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap Tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur.

4. Produksi Telur

Dari tabel.4 dapat dilihat trend produksi telur mengalami fluktuatif, produksi telur terendah mencapai 11.083,3 Ton pada Tahun 2019 dan produksi telur tertinggi mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022. Pandemi covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga konsumsi kebutuhan protein beralih ke telur dengan harga yang lebih terjangkau.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai Kinerja utama diatas dari Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

2.4.2 Evaluasi Capaian Program Tahun 2019-2020

1. Program Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tahun 2019-2020 berturut-turut yaitu 123,57 dan 102,98. NTUP mengalami penurunan karena perhitungan dasar Tahun mengalami perubahan untuk Tahun 2019 ke bawah menggunakan dasar tahu 2010=100, dan untuk Tahun 2020 ke atas menggunakan dasar Tahun 2018=100. Namun walaupun NTUP mengalami penurunan nilai NTUP masih di atas 100 artinya pendapatan yang diterima peternak lebih besar dari biaya usaha yang dikeluarkan untuk beternak. Indeks harga yang diterima petani sub sektor peternakan/peternak berasal dari empat komoditas, yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ternak.

Mini ranch yang teregister merupakan indikator baru mulai Tahun 2019. Miniranch Tahun 2019 yang difasilitasi sebanyak 5 unit mini ranch, Tahun 2020 sebanyak 12 unit miniranch, Tahun 2021 sebanyak 24 unit mini ranch, Tahun 2022 sebanyak 49 unit mini ranch dan Tahun 2023 sebanyak 30 unit mini ranch. Sistem Miniranch mini-ranch akan lebih efektif dan efisien sebab peternak tidak perlu menyiapkan makanan dan proses pengembangbiakan sapi akan berjalan secara kawin alam, sehingga peternak lebih hemat dalam hal biaya dan tenaga.

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

Pada Tahun 2019, Angka kelahiran sapi terealisasi sebesar 17,49% dari target 20%, angka kelahiran sapi Tahun 2020 terealisasi sebesar 20,1% dari target 20%, angka kelahiran sapi Tahun 2021 terealisasi sebesar 19% dari target 20,5% dan angka kelahiran sapi Tahun 2022 terealisasi sebesar 21% dari target 21%. Tahun 2019, jumlah kelahiran sapi Tahun 2019 sebanyak 20.146 ekor, namun ada kematian ternak sebanyak 2.229 ekor (1,87%).

Pada Tahun 2019, Calving Interval (CI) terealisasi 19 bulan dari target 18 bulan, Tahun 2020 CI terealisasi 18 bulan dari target 18 bulan, Tahun 2021 CI terealisasi 17 bulan dari target 17 bulan dan Tahun 2022 CI terealisasi 17 bulan dari target 17 bulan. Maka dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 jarak beranak tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Waktu CI menggambarkan

kemampuan induk sapi menghasilkan pedet dalam suatu ukuran waktu. Faktor yang mempengaruhi jarak beranak adalah post partum estrus (PPE), post partum mating (PPM), dan S/C. Penyebab CI menjadi panjang karena terlambatnya kawin pasca melahirkan, kawin berulang dan kegagalan memelihara kebuntingan hingga lahir. Semakin lama PPE dan PPM serta tingginya nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Capaian program ini adalah Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana pada Tahun 2019 terealisasi 5 unit miniranch dari target 5 unit miniranch dengan capaian 100%, Tahun 2020 35 unit miniranch dari target 35 unit mini ranch. Kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana terdapat di 1).Kutai Kartanegara (kelompok banteng perjuangan, kampung muhur, kec.muara begai), 2).PPU (kelompok sumber rejeki, kel.saloloang, kec.penajam), 3).Paser (kelompok gawi bersama, desa saing prupuk, kec.batu engau), 4).Kutai Timur 2 (dua) kompartemen yaitu kelompok sumber mulyo (desa manunggal jaya, kec.rantau pulung) dan kelompok sumber rejeki (desa manunggal jaya, kec.rantau pulung).

4. Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet

Capaian program (outcome) ini adalah Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%) terealisasi sebesar 11% dari target 11% dengan capaian 100%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan produksi daging dan populasi di Kalimantan Timur diperlukan surveilans pemeriksaan penyakit hewan dan produk pangan asal hewan melalui pengambilan sampel penyakit hewan dan produk pangan asal ternak..

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah sampel penyakit asal hewan yang diuji dari Tahun 2019-2020 yaitu 8.520 dan 15.058 yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Sampel penyakit hewan aktif adalah sampel penyakit

hewan yang diambil berdasarkan ketersediaan anggaran sedangkan jumlah sampel penyakit hewan yang pasif adalah sampel penyakit hewan yang diambil sesuai permintaan konsumen. Sampel penyakit hewan terdiri dari serum darah sapi, darah sapi, serum darah ayam, feses sapi, ulas darah sapi, darah ayam, swab kloaka, cadaver anjing, dan serum darah anjing.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah sampel produk asal hewan yang diuji dari Tahun 2019-2020 yaitu 2.185 dan 2.548 yang tersebar di 9 kabupaten/kota kecuali Mahakam hulu/. Sampel pangan asal hewan yaitu adonan, bakso, bintang laut, burger, daging ayam, daging bebek, daging kerbau, daging domba, daging sapi, daging babi, kikil, hati ayam, nuget, prime shank cut, sarang wallet, sosis, siomay, sempolan, dan usus ayam.

5. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

Capaian program (outcome) ini adalah persentase produksi bibit ternak berkualitas pada Tahun 2019 terealisasi 9,8% dari target 10% dan Tahun 2020 terealisasi 6,6% dari target 9,8%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan populasi sapi di Kalimantan Timur.

2.4.3 Evaluasi Capaian Program Tahun 2021-2022

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program (outcome) ini adalah angka kelahiran sapi. Capaian pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Tahun 2021 yaitu 92,68% atau 19% setara 22.885 ekor dari target 20%. Sedangkan capaian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pada Tahun 2022 yaitu 100% atau 21% setara 25.294 ekor dari target 21%. Permasalahan yang di hadapi Tahun 2019:

- a. Terjadinya replanting kelapa sawit di wilayah Kab. Paser berdampak pada terjualnya sapi betina $\pm$ 2.000 ekor ke wilayah kalsel, wilayah lokal Kalimantan Timur dan dipotong, sehingga angka kelahiran sapi

- menjadi lebih lama dari yang kawin alam ± 1 Tahun menjadi IB $\pm 1,5$ Tahun
- b. Terjadinya kasus penyakit brucellosis di wilayah Kutai Kartanegara
 - c. Perubahan komposisi antara sapi jantan dan betina karena masuknya sapi pejantan untuk penggemukan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program (outcome) ini adalah Jumlah mini ranch yang ter-register. Capaian pada program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu 100% atau jumlah mini ranch yang ter-register sebanyak 24unit mini ranch dari target 24unit mini ranch. Sedangkan Capaian pada Tahun 2022 jumlah mini ranch yang ter-register sebanyak 49unit dari target 49unit mini ranch.
 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 Capaian program (outcome) ini adalah Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dan Peningkatan penerapan system jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV). Pada Tahun 2021 Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular mencapai 50% dari target 50% dengan capaian 100%. Untuk indikator yang kedua yaitu peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) terealisasi sebesar 12% dari target 12% atau capaiannya 100%.). Pada Tahun 2022 Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular mencapai 60% dari target 60% dengan capaian 100%. Untuk indikator yang kedua yaitu peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) terealisasi sebesar 13% dari target 13% atau capaiannya 100%
 4. Program Penyuluhan Pertanian
 Capaian program (outcome) ini adalah persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha. Pada Tahun 2021 adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha mencapai 25% dari target 25% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2022 adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang

mempunyai izin usaha mencapai 50% dari target 50% dengan capaian 100%

5. Program Penyuluhan Pertanian

Capaian program (outcome) ini adalah Cakupan binaan kelompok ternak. Pada Tahun 2021 adalah Cakupan binaan kelompok ternak mencapai 43% dari target 43% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2022 adalah Cakupan binaan kelompok ternak mencapai 44% dari target 44% dengan capaian 100%

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam Juta Rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam Juta Rupiah)					PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN KE (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN TAHUN	REALISASI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim (Gabungan)	46,903	46,634	59,945	49,294	63,476	43,150	42,071	48,439	44,885	10,935	92.00	90.22	80.81	91.06	17.23	7.86	(29.05)
	Belanja Tidak Langsung	13,880	14,990	-	-	-	12,911	12,687	-	-	-	93.02	84.64	-	-	-	7.99	(1.73)
	Belanja Langsung	33,023	31,645	59,945	49,294	63,476	30,239	29,384	48,439	44,885	10,935	91.57	92.86	80.81	91.06	17.23	17.75	(22.45)
2	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim (Provinsi)	36,191	39,723	49,233	43,217	54,501	33,562	35,616	40,253	39,047	8,755	92.74	89.66	81.76	90.35	16.06	10.78	(28.53)
	Belanja Tidak Langsung	13,880	14,990	-	-	-	12,911	12,687	-	-	-	93.02	84.64	-	-	-	7.99	(1.73)
	Belanja Langsung	22,311	24,733	49,233	43,217	54,501	20,651	22,929	40,253	39,047	8,755	92.56	92.70	81.76	90.35	16.06	25.02	(19.31)
3	UPTD Laboratorium Keswan Dan Kesmavet	2,160	2,885	3,743	2,890	3,517	2,139	2,736	3,615	2,802	1,270	99.01	94.86	96.59	96.94	36.12	12.96	(12.21)
	Belanja Langsung	2,160	2,885	3,743	2,890	3,517	2,139	2,736	3,615	2,802	1,270	99.01	94.86	96.59	96.94	36.12	12.96	(12.21)
4	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	8,552	4,027	6,600	3,187	5,458	7,449	3,719	4,570	3,037	910	87.10	92.36	69.24	95.28	16.67	(10.62)	(40.88)
	Belanja Langsung	8,552	4,027	6,970	3,187	5,458	7,449	3,719	4,570	3,037	910	87.10	92.36	65.57	95.28	16.67	(10.62)	(50.38)

Keterangan: Realisasi 2023 per 30 April

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga Tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2024 – 2026.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya manusia

Dalam kurun waktu 2011-2022 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti

website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang.

d. Konsistensi penganggaran

Renstra yang telah disusun sudah memuat rencana penganggaran dalam satu periode lima Tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten penggaran tersebut dipenuhi sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.
- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang

komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal

- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan Pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kalimantan Timur bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efesiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat.

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton)

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	10,961.24	12,444.65	10,694.27	9,924.65	7,091.87
2	K e r b a u	1,360.47	1,667.58	2,391.48	3,346.89	61.18
3	Kuda	0.18	0.63	1.81	1.36	0.29
4	Kambing	745.89	693.59	826.10	877.53	783.33

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
5	Domba	8.32	11.07	36.25	15.32	5.19
6	Babi	1,400.94	1,803.70	1,830.40	2,302.49	2,348.23
7	Ayam Buras	4,798.66	4,592.02	4,657.96	4,720.67	4,815.08
8	Ayam Petelur	452.21	365.77	522.29	629.19	641.77
9	Ayam Pedaging	63,028.77	69,243.31	60,372.41	65,702.56	54,830.23
10	I t i k	392.71	499.28	644.86	115.38	104.43
11	Kelinci	6.32	3.95	4.82	4.21	4.30
12	Puyuh	6.76	6.19	7.48	8.92	9.05
13	Merpati	1.05	1.25	1.31	1.40	1.43
14	Itik Manila	26.87	26.89	33.12	40.24	41.04
Jumlah		83.190,37	91.359,87	82.024,57	87.690,81	70.737,42

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Pada Tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 Ton dibandingkan dengan Tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 Ton. Apabila dibanding dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,68% dan di Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 12.444,65 Ton atau sebesar 11,9%. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 Ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan sosial yang berdampak pada sektor peternakan dan keterbatasan pasokan daging serta kenaikan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah. Meskipun konsumsi daging mengalami penurunan pada Tahun 2020 hal ini kemungkinan bersifat sementara dan bisa kembali meningkat setelah pandemi berakhir dan perekonomian pulih kembali.

Berdasarkan data konsumsi daging pada tabel diatas dimulai Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 Tahun terakhir mencapai 69.243,31 Ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kalimantan Timur.

Pemenuhan konsumsi daging dalam rangka pembangunan IKN

Peningkatan kebutuhan daging pada pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- (1) Melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan daging yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi penghitungan

terhadap jumlah penduduk yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara, pertumbuhan populasi yang diharapkan, preferensi konsumsi daging, serta kebutuhan daging untuk sektor-sektor tertentu seperti konstruksi dan tenaga kerja.

- (2) Peningkatan produksi dalam daerah (lokal Kalimantan Timur), yaitu dengan mendorong peningkatan produksi daging dalam daerah dari peternak-peternak lokal, termasuk peternakan sapi, kambing, domba, dan ayam, untuk meningkatkan jumlah ternak yang diproduksi. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui program-program pengembangan peternakan, peningkatan teknologi peternakan, pemenuhan pakan berkualitas, dan pengelolaan kesehatan hewan yang baik.
- (3) Peningkatan produktifitas perlu juga dilakukan, hal ini dapat dicapai melalui seleksi genetik yang baik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif, penerapan teknologi pertanian yang modern, penggunaan pakan berkualitas tinggi, serta penerapan praktik pengelolaan yang efisien.
- (4) Kerjasama dengan peternak lokal menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan daging. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan peternak lokal, memberikan bantuan teknis, dukungan pembiayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal dalam memproduksi daging yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan.
- (5) Diversifikasi sumber protein selain daging, penting juga untuk mendorong diversifikasi sumber protein, termasuk sumber protein nabati, untuk mengurangi tekanan terhadap sektor peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian vertikal, pengembangan tumbuhan protein alternatif, serta promosi pola makan yang seimbang.

Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan daging untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu diperhatikan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, peternak, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan pemenuhan kebutuhan.

Tabel 23. Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton)

Komoditas	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
S a p i	7,091.87	7,304.63	7,636.99	7,866.10	8,102.08	14,207.04
K e r b a u	61.18	63.02	65.88	67.86	69.89	122.56
Kuda	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.58
Kambing	783.33	806.83	843.54	868.85	894.91	1,569.23
Domba	5.19	5.35	5.59	5.76	5.93	10.40
Babi	2,348.23	2,418.68	2,528.73	2,604.59	2,682.73	4,704.18
Ayam Buras	4,815.08	4,959.53	5,185.19	5,340.75	5,500.97	9,645.98
Ayam Petelur	641.77	661.02	691.10	711.83	733.19	1,285.65
Ayam Pedaging	54,830.23	56,475.14	59,044.76	60,816.10	62,640.58	109,840.64
I t i k	104.43	107.56	112.46	115.83	119.31	209.20
Kelinci	4.30	4.43	4.63	4.77	4.91	8.61
Puyuh	9.05	9.32	9.75	10.04	10.34	18.13
Merpati	1.43	1.47	1.54	1.59	1.63	2.86
Itik Manila	41.04	42.27	44.19	45.52	46.89	82.21
Total	70,737.42	72,859.54	76,174.65	78,459.89	80,813.69	141,707.29

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diolah

Tabel 24. Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)

No	Jenis Telur	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam Buras	2,926.55	2,800.53	2,840.75	3,084.63	3,177.17
2	Ayam Petelur	8,137.38	6,581.97	9,398.44	9,435.03	9,718.08
3	I t i k	1,366.89	1,398.21	1,398.57	1,434.34	1,477.37
4	Puyuh	67.92	67.12	80.81	96.23	99.11
5	Itik Manila	235.25	235.47	290.00	352.34	362.91
Jumlah		12,734.00	11,083.30	14,008.57	14,402.56	14,834.64

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Struktur konsumsi telur pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 jumlah konsumsi telur mencapai 12.734,00 Ton. Pada Tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan mencapai 11.083,30 Ton. Kemudian naik signifikan atau mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022.

Pemenuhan konsumsi telur dalam rangka pembangunan IKN

Telur merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, kaya nutrisi, praktis, dan terjangkau. Kelebihan ini menjadikan telur sebagai komoditas peternakan yang penting dalam pemenuhan pangan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan dan gizi masyarakat.

Telur menjadi pilihan komoditas peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan IKN, diman telur memiliki kelebihan sebagai berikut:

- 1. Sumber protein yang berkualitas
- 2. Nutrisi yang lengkap, Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin (A, D, E, B12, riboflavin), mineral (zat besi, seng, selenium), asam lemak sehat, kolin, dan antioksidan.
- 3. Harga terjangkau,
- 4. Fleksibilitas dalam penggunaan, Telur dapat digunakan dalam berbagai cara dalam makanan dan masakan. Fleksibilitas ini memungkinkan variasi dalam pola makan dan memenuhi preferensi masyarakat.
- 5. Daya tahan yang baik (Daya simpan)
- 6. Sumber energi yang baik

Tabel 25. Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN

Jenis Telur	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
Ayam Buras	1,588.59	1,636.25	1,710.70	1,788.53	1,869.91	4,354.90
Ayam Petelur	23,532.14	24,238.10	25,340.94	26,493.95	27,699.43	64,510.06
It i k	1,314.86	1,354.31	1,415.93	1,480.35	1,547.71	3,604.50
Puyuh	59.47	61.25	64.04	66.96	70.00	163.03
Itik Manila	322.99	332.68	347.82	363.64	380.19	885.43
Total	26,818.05	27,622.59	28,879.42	30,193.43	31,567.23	73,517.92

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diolah

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Daya tampung ternak mengacu pada kapasitas produksi maksimal dari suatu kawasan atau peternakan. Pernyataan bahwa daya tampung ternak masih tinggi dapat diartikan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan populasi ternak pada suatu kawasan atau peternakan. Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkubanan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya peternakan berbasis korporasi.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis,

Data populasi ternak mulai Tahun 2016-2020 tercatat kenaikan dengan rasio 1,54% untuk Sapi, 1,72% untuk Kambing, 12,93% untuk Domba, 10,76% untuk Kuda, 16,97% untuk ayam petelur, 1,96% untuk Itik, 14,49% untuk Iti Manila. Kerbau 2,26%, Ayam buras 2,08% dan Puyuh 9,91% disamping kenaikan ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan seperti Babi sebesar -0,12%, Sapi Perah sebesar -8,24%, Kelinci sebesar -8,96%. Perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	117,504	119,485	119,974	121,290	108,613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kerbau	6,157	6,194	6,552	6,539	6,490
4	Kambing	66,378	67,892	69,929	68,997	58,552
5	Domba	439	590	635	694	642
6	Babi	78,968	82,546	83,652	76,292	45,839
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Ayam Buras	4,569,169	4,372,415	4,435,205	4,815,976	5,183,873
9	Ayam Petelur	1,055,432	853,693	1,218,994	2,263,835	1,340,217
10	Ayam Pedaging	66,672,445	67,886,566	59,402,832	55,877,917	61,412,191
11	Itik	248,978	254,683	254,749	261,263	269,564
12	Kelinci	14,189	8,859	10,830	9,462	7,931
13	Puyuh	66,593	65,808	79,222	94,339	88,143
14	Merpati	4,027	4,776	5,015	5,375	5,678
15	Itik Manila	42,851	42,890	52,823	64,178	67,608

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada Tahun 2018-2022 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 77 unit. Selain itu telah tumbuh upgrade kandang tertutup dari kandang terbuka dalam budidaya ayam potong mencapai 45%.

5. Kontribusi peran dalam pengurangan kasus stunting

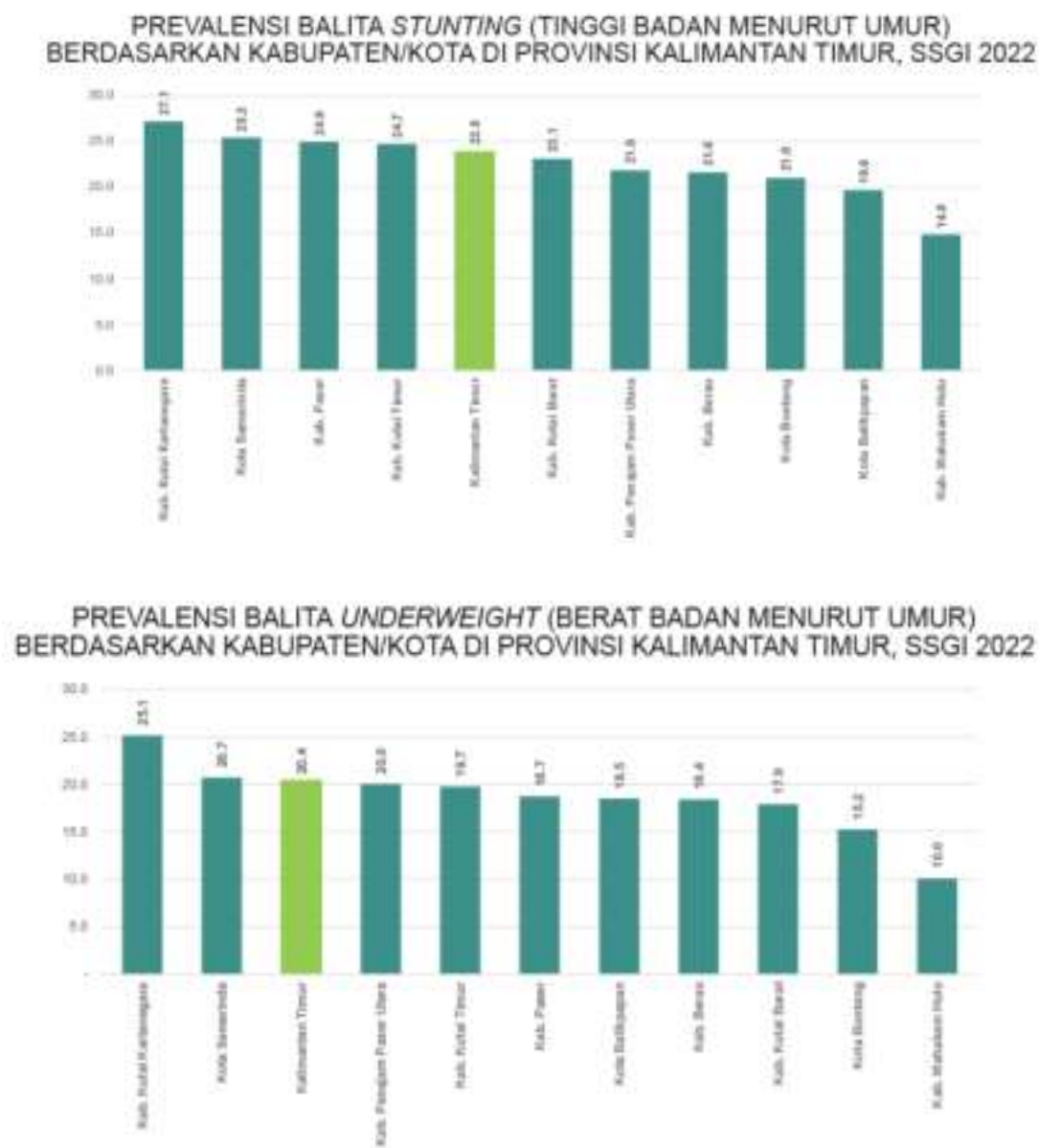
Peran peternakan dalam penanganan kasus stunting pada anak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:

a) *Sumber Protein Berkualitas*, Peternakan menyediakan sumber protein berkualitas tinggi seperti daging, susu, dan telur. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-

anak. Konsumsi protein yang cukup membantu memperbaiki status gizi anak yang mengalami stunting dan mendorong pertumbuhan linier yang optimal.

- b) *Asupan Zat Gizi Mikro*, Produk hewani seperti susu dan telur mengandung zat gizi mikro penting seperti zat besi, kalsium, vitamin B12, dan vitamin A. Kekurangan zat gizi mikro ini dapat menyebabkan stunting pada anak. Dengan memperoleh sumber makanan hewani yang kaya zat gizi mikro melalui peternakan, anak-anak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
- c) *Diversifikasi Pangan*, Peternakan dapat membantu dalam diversifikasi pangan, yaitu memperluas variasi makanan yang tersedia bagi anak-anak. Dengan memiliki peternakan yang beragam, seperti peternakan ayam, kambing, sapi, atau ikan, keluarga dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan hewani yang memberikan nutrisi yang berbeda. Diversifikasi pangan penting untuk memastikan asupan gizi yang seimbang dan mengatasi kekurangan nutrisi yang mungkin menyebabkan stunting.
- d) *Ketersediaan Pangan Lokal*, Peternakan lokal dapat meningkatkan ketersediaan pangan hewani di wilayah tersebut. Ini akan mengurangi ketergantungan pada impor makanan hewani dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi keluarga dengan anggaran terbatas. Ketersediaan pangan lokal yang baik memungkinkan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang lebih segar dan berkualitas.
- e) *Edukasi dan Pengetahuan Gizi*, Peternakan dapat berperan sebagai agen pendidikan dan memberikan informasi tentang manfaat gizi dan pentingnya makanan hewani dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Peternak dapat memberikan edukasi tentang nutrisi yang baik, praktik peternakan yang sehat, serta pentingnya asupan gizi yang seimbang dalam mengatasi stunting. Dengan meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat, peternakan berkontribusi pada kesadaran akan penting.

Angka prevalensi kasus stunting di Kalimantan Timur Tahun 2022 sebanyak 23,9% dengan distribusi Kabupaten/Kota sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3. Grafik Prevalensi Balita Stunting Kalimantan Timur Tahun 2022

6. Kontribusi peran dalam pengurangan kemiskinan
- Peran peternakan dalam penanganan kemiskinan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:
- a) *Peningkatan Pendapatan*, Peternakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Dengan memiliki peternakan yang berkelanjutan dan produktif, keluarga peternak dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari penjualan produk hewani, seperti daging dan telur. Pendapatan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrim dengan memberikan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

- b) *Pangan dan Keamanan Gizi*, Peternakan dapat menyediakan sumber makanan hewani yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Konsumsi protein dan zat gizi mikro yang cukup dari produk hewani membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan keluarga. Selain itu, peternakan juga dapat membantu dalam diversifikasi pangan dengan menyediakan berbagai jenis makanan, yang membantu dalam mengatasi kekurangan nutrisi dan mencapai keamanan pangan yang lebih baik.
- c) *Pemberdayaan Ekonomi*, Peternakan dapat memberikan kesempatan pemberdayaan ekonomi kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dengan melibatkan keluarga dalam kegiatan peternakan, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola peternakan dengan efisien. Selain itu, melalui koperasi peternakan atau asosiasi peternak, keluarga dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, memperoleh harga yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memasarkan produk peternakan.
- d) *Pemberdayaan Perempuan*, Peternakan dapat memberikan peluang pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Perempuan sering kali terlibat dalam kegiatan peternakan, seperti pemeliharaan ternak, produksi makanan, atau pengolahan produk hewani. Melalui keterlibatan aktif dalam peternakan, perempuan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi mereka, memperoleh keahlian baru, dan memperkuat peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

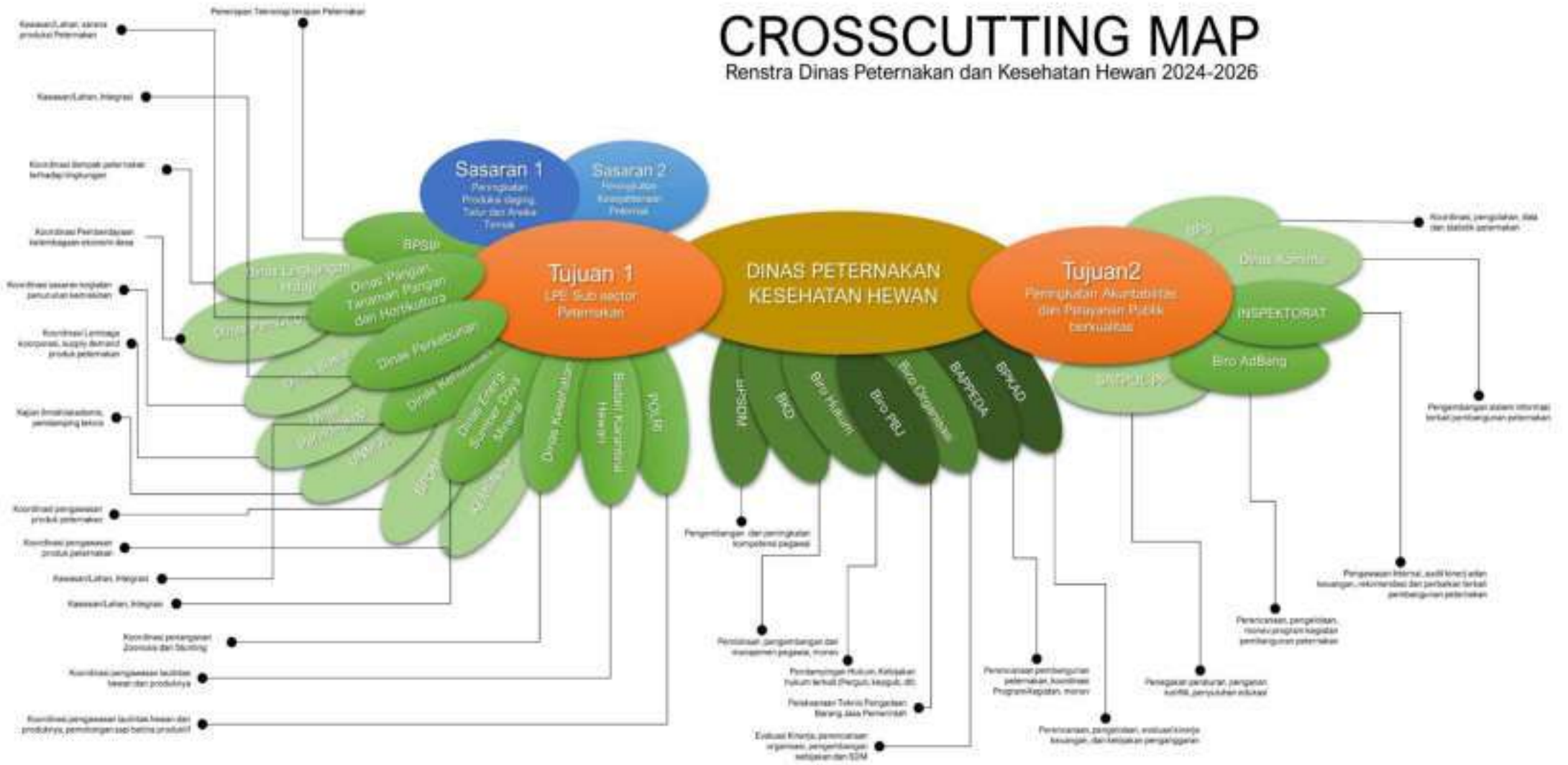
2.6 Crosscutting Map

Dinas Peternakan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak dapat berperan sebagai *single fighter*, namun diperlukan koordinasi fungsi dengan perangkat dinas lain atau bisa disebut menjalankan fungsi "crosscutting" yang mempengaruhi berbagai sektor keberhasilan pembangunan peternakan. Mendorong dan mengedepankan kolaborasi dan koordinasi antara departemen atau bagian yang berbeda terkait pelaksanaan program kegiatan teknis/nonteknis peternakan.

Crosscutting dalam dinas peternakan dan kesehatan hewan dapat berupa urusan terkait:

- i. Kesehatan Hewan: Kesehatan hewan melibatkan berbagai aspek, termasuk pemantauan penyakit hewan, vaksinasi, kebersihan, dan pengendalian penyakit. Ini melibatkan kerjasama antara departemen yang bertanggung jawab atas pemantauan kesehatan hewan, vaksinasi, pengobatan, serta praktisi hewan dan pemilik ternak.
- ii. Keamanan Pangan: Keamanan pangan melibatkan pengawasan dan pengendalian kualitas dan keamanan produk peternakan seperti daging, susu, dan telur. Ini melibatkan kerjasama antara departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan pangan, pemilik peternakan, dan pihak terkait dalam rantai pasokan pangan.
- iii. Kebijakan Pertanian: Dalam mengembangkan kebijakan pertanian, dinas peternakan perlu berkolaborasi dengan departemen pertanian, peneliti pertanian, dan organisasi petani untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan industri peternakan yang seimbang.
- iv. Pembangunan Pedesaan: Dinas peternakan juga terlibat dalam pembangunan pedesaan karena peternakan seringkali merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat pedesaan. Ini melibatkan koordinasi dengan dinas-dinas lain yang bertanggung jawab atas infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam semua aspek ini, crosscutting menjadi penting untuk memastikan kerjasama dan sinergi antara departemen dan pihak terkait yang berbeda agar tujuan dan kebijakan peternakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien, peta fungsi crosscutting antar Perangkat Dinas dan Internal Dinas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Crosscutting Map antar Perangkat Dinas

TUJUAN 1
Meningkatkan peran subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi non MIGAS dan Batubara Indikator: <i>LPE Sub sektor Peternakan (%)</i>

Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan
Memiliki Pelayanan Publik berkualitas
Indikator: Nilai SAKIP dan IKM

Persentase penurunan kejadian
dan jumlah kasus penyakit hewan

- Produksi Daging (Ton)
- Produksi Telur(Ton)
- Produksi Aneka Ternak (Ton)
- NTP (Skor)

INDIKATOR

Indek Kepuasan Layanan Keseekretariatan
Terdiri :

- % dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu
- % Realisasi anggaran
- % SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi
- % Sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik

BIDANG PERBIBITAN, PAKAN DAN PRODUKSI

BIDANG KESMAVET

INDIKATOR

- Tersedianya 50 kawasan pemanfaatan untuk peternakan
- Unit usaha/kelp, yang melakukan integrasi (unit/kelp, %)
- Akses pembiayaan (Rupiah, %)
- Jumlah Investasi (Rupiah, %)
- Jumlah Keluarga Miskin teraslitasi (KK, %)
- Peran swasta (Perusahaan, %)
- Jumlah peternak milenial (Orang, %)
- Jumlah DKT (unit, absolut),
- Jumlah Petugas/peternak yang dilatih (orang, absolut)
- Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice (%)
- Jumlah Komoditas: potensi pengelauran (jenis komoditas)
- Nilai pengeluaran komoditas (Rupiah, %)
- Nilai komoditas organik yang siap untuk peternakan yang dipromosikan (%)
- Jumlah unit usaha pengalangan hasil peternakan yang menerapkan cara produksi pangan yang baik/CP/ PB (unit)
- Jumlah Unit pengolahan pupuk asal KOHE (Unit),
- % peningkatan Jumlah pupuk asal KOHE yang terjual (ton, %),
- Jumlah Biogas (Unit)
- Rasio SD komoditas/ produk peternakan (dokumen analas), Kebijakan pengendalian (dokumen kebijakan),
- Ketersediaan Data Informasi pasar (harian, absolut)

- Calving Rate (%)
- Calving Interval (Bulan)
- Akseptor IB (%)
- Jumlah bibit sapi ber-SKLB (%)
- pembudidaya unggas lokal (%)
- Jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar (%)
- pembudidaya Ayam Ras (%)
- Upgrade Closed house dan Bank Pakan
- Jumlah Pengadaan Ternak (Indukan/Bibit)
- Jumlah identifikasi bahan baku pakan (Jenis)
- Jumlah unit pengolahan pakan mini (unit)
- Luasan HPT (Ha)
- Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) (Unit usaha)

INDIKATOR

- ↳ Wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALITING)
- ↳ Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ (Unit Usaha Peternakan Sapi, %)
- ↳ Jumlah unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman (unit, %)
- ↳ Tingkat kesembuhan GANGREP (ekor, %)
- ↳ Jumlah pelayanan kesehatan hewan (ekor, %)
- ↳ Kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan (Frekuensi, %)
- ↳ Resiko masuknya PHMSZ (%)

INDIKATOR

- konsumsi Pangan asal ternak balita stunting (Gram/hari, %)
- pengetahuan Masyarakat thd zoonosis (Score, Sampling, %)
- Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan hygiene sanitasi (%),
- Mutu dan keamanan produk hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) (%)
- ketaatan pemenuh persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan (Frekuensi, %)
- Jumlah pemotongan ternak sapi betina produktif (%)
- Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan (%)

UPTD PT HPT

INDIKATOR

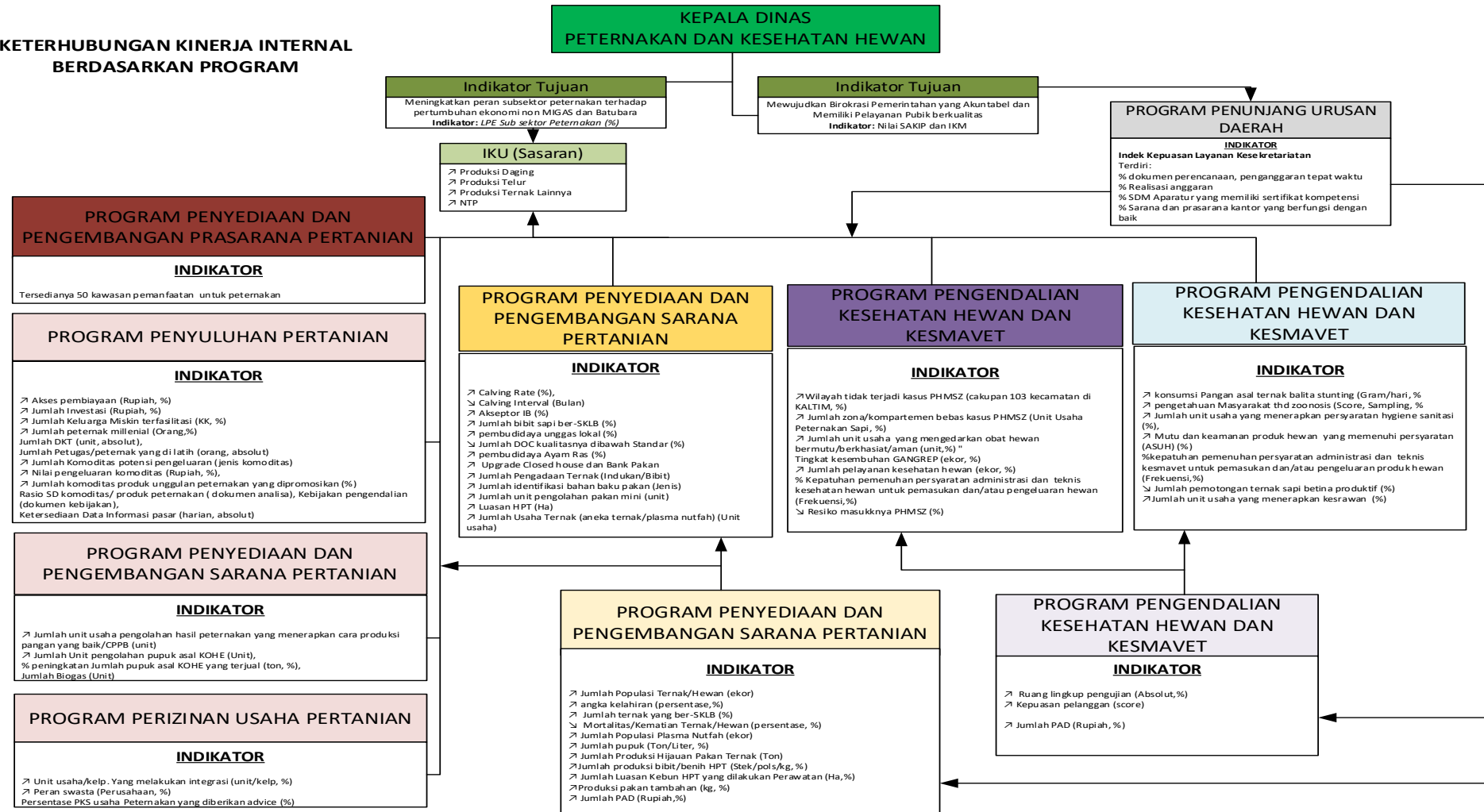
- ↗ Jumlah Populasi Ternak/Hewan (ekor)
- ↗ angka kelahiran (persentase, %)
- ↗ Jumlah ternak yang ber-SKLB (%)
- ↘ Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan (persentase, %)
- ↗ Jumlah Populasi Plasma Nuttall (%)
- ↗ Jumlah pupuk (Ton/Liter, %)
- ↗ Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton)
- ↗ Jumlah produksi bibit/benih HPT (Stek/poli/kg, %)
- ↗ Jumlah Luasan Kebun HPT yang dilakukan Perawatan (Ha, %)
- ↗ Produksi pakan tambahan (kg, %)
- ↗ Jumlah PAD (Rupiah, %)

UPTD LAB KESEHATAN
HEWAN DAN KESMAVET

INDIKATOR

- Ruang lingkup pengujian (Absolut,%)
- Kepuasan pelanggan (score)
- Jumlah PAD (Rupiah, %)

KETERHUBUNGAN KINERJA INTERNAL BERDASARKAN PROGRAM



Gambar 5. Keterhubungan Kinerja Internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan kondisi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan sasaran yang ingin dicapai dalam 3 (Tiga) Tahun ke depan, maka diperlukan suatu analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja pembangunan peternakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “ *Belum Optimalnya peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*”, sehingga akar masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Masalah Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Pembangunan Peternakan di Provinsi Kalimantan Timur

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	a. Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan , Produksi Dan Produktifitas Ternak Rendah	1.Reproduksi ternak belum optimal 2.Mutu Genetik ternak rendah 3.Ketersediaan Ternak Dasar (Sapi Betina Produktif) belum mencukupi 4.Penerapan GBP dan GFP belum optimal
	b. Efisiensi Produksi Rendah, Harga Pokok produksi Tinggi	1.Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal
	c. Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai	1.Bahan baku pakan terbatas dan harganya mahal 2.Terbatasnya produksi pakan penguat lokal (konsentrat), dan masih dipasok dari luar daerah 3.Produksi Hijauan Pakan ternak rendah 4.Luas Lahan Hijauan Pakan Ternak terbatas
	d. Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal	1.Potensi ternak lokal belum dimanfaatkan secara maksimal 2.Potensi produksi aneka ternak belum optimal 3.Minimnya komoditas unggulan peternakan
	e. Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	1.Masih terjadi kasus PHMS dan zoonosis 2.Belum adanya penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit
	f. Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal	1.Banyaknya peredaran obat hewan yang Mutu, khasiat dan keamanan tidak memadai 2.Banyaknya kasus Gangguan reproduksi pada sapi betina 3.Pelayanan kesehatan hewan belum optimal
	g. Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal	1.Belum tertibnya Lalu lintas Hewan/ Ternak yang masuk atau keluar wilayah Provinsi KALIMANTAN TIMUR 2.Belum adanya analisa Risiko Penyakit Hewan, terhadap hewan yang masuk ke wilayah KALIMANTAN TIMUR
	h. Layanan Laboratorium Keswan Dan Kesmavet	Lingkup dan pelayanan pengujian laboratorium belum memadai dengan situasi

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini	terkini (Penyakit hewan dan atau keamanan produk pangan asal hewan)
i.	Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat	1.Terjadi kasus stunting pada balita di Kalimantan Timur 2.Pemahaman Masyarakat tentang penyakit zoonosis masih rendah
j.	Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal	1.Pengawasan keamanan pangan asal hewan belum optimal 2.Belum tertibnya laulintas produk asal hewan
k.	Pemotongan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur	1.Masih banyaknya Pemotongan sapi betina, yang diindikasi masih produktif 2.Kasus kesejahteraan Hewan belum mendapatkan atensi/perhatian secara hukum
l.	Terbatasnya Kawasan Peternakan	1.Belum adanya penetapan kawasan peternakan di kabupaten/kota 2.Area budidaya ternak yang semakin terbatas
m.	Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah	1.Usaha peternakan masih dianggap usaha "High Risk" sehingga sulit mendapatkan kepercayaan pembiayaan 2.Bunga Bank Tinggi masih berat untuk diakses usaha peternakan
n.	Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah	Minat usaha peternakan masih rendah, baik pengusaha maupun level masyarakat
o.	Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah	1.Minimnya regenerasi peternak 2.Rendahnya kualitas SDM Peternak 3.Sering terjadi permasalahan sistem kemitraan 4.Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisnis
p.	Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi	1.Nilai tambah produk peternakan masih rendah 2.Kebutuhan pupuk asal KOHE meningkat, potensi Energi Baru Terbarukan belum optimal 3.Fluktuasi Harga komoditas peternakan akibat tidak seimbangnya supply Demand

Secara rinci permasalahan sub sektor peternakan diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 *Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan, Produksi Dan Produktifitas Ternak Rendah*

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut.

Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk

didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminasia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminasia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan kambing mengalami tren penurunan pada masing-masing -1,95%, -11,31% dan -3,09%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 9,97%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam buras, ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 3,21%, 6,15%, 2,01% dan 12,08%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -2,03%.

Penurunan tren pertumbuhan komoditas ruminasia, terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti manajemen reproduksi ternak yang ada belum optimal, Mutu Genetik ternak rendah, Jumlah Ternak Dasar (Sapi Betina Produktif) sebagai pabrik produksi pedet belum mencukupi. Peternak belum sepenuhnya menerapkan Good Breeding Practice (GBP) dan Good Farming Practice (GFP) yang dijadikan acuan dalam usaha pembibitan, budidaya ternak dan tentunya penurunan tren komoditas ruminasia ini akibat terjadinya wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kalimantan Timur, peningkatan tren pada komoditas domba menunjukkan bahwa komoditas domba bersifat lebih adaptif pakan dan penyakit, sehingga banyak diminati oleh peternak, pertumbuhan populasi dengan berbagai komoditas di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel.2.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pemotongan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg

- b. Rata-rata berat hidup sapi (Non BX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).
- c. Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28.84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- d. Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- e. Calving interval rata- rata 19,6 bulan
- a. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16-17 bulan.

Peningkatan tren komoditas non ruminasia terjadi akibat prospek usaha komoditas ini secara umum menguntungkan, namun secara manajemen usaha/bisnis perlu adanya dorongan/interfensi dalam bentuk upaya peningkatan usaha, pengolahan produk, pembiayaan dan pemasaran.

3.1.2 Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal

Introduksi teknologi maupun inovasi dalam bidang peternakan harus terus diupayakan untuk disosialisasikan kepada para petani dan peternak. Berbagai informasi teknologi dan inovasi terbaru yang telah dikembangkan hendaknya dapat diterapkan pada mitra (petani dan peternak) secara penuh dan berkelanjutan. Penerapan teknologi yang tepat dapat menjawab masalah Harga pokok Produksi (HPP) ternak di Kalimantan Timur. Meningkatnya Harga Pokok Produksi Ayam Pedaging Tahun 2012 hanya 13.500 /kg sedangkan Tahun 2022 menjadi 23.500 /kg atau naik 74%. (PINSAR, 2022) menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing produk peternakan di Kalimantan Timur.

Teknologi yang diterapkan untuk menekan HPP dapat berupa penerapan penggunaan kandang tertutup (Closed House System), Inovasi penggunaan bahan pakan baru seperti maggot, penggunaan pakan fermentasi dan teknologi Bank Pakan. Budidaya ayam padaging dan ayam petelur dipelihara menggunakan kandang sistem open house

dan closed house, saat ini di teknologi pemeliharaan dengan kandang closed house di Kalimantan Timur sebanyak 45%, sehingga perlu didorong untuk peningkatan penerapan teknologi pada sistem budidaya pada level peternak.

3.1.3 Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400 Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijauan mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

Terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengembangan pakan ternak, diantaranya adalah:

1. Variabilitas musim di Kalimantan Timur yang memiliki iklim tropis cenderung mempengaruhi produksi hijauan pakan ternak. Variabilitas musim, termasuk periode kekeringan dan musim hujan yang ekstrem, dapat mempengaruhi ketersediaan hijauan pakan dan kualitasnya.
2. Pemilihan varietas dan spesies hijauan pakan yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah Kalimantan Timur menjadi penting, sehingga perlu adanya penelitian dan pengembangan varietas hijauan yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat serta memberikan nilai gizi yang baik untuk ternak.
3. Penerapan teknik budidaya hijauan pakan yang tepat menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hijauan.

Di Kalimantan Timur, penggunaan teknologi pertanian yang modern, seperti sistem pengairan, pemupukan yang tepat, dan manajemen gulma yang baik, dapat membantu mengatasi permasalahan ini.

3.1.4 Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Permasalahan potensi komoditas ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Timur menjadi persoalan yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan potensi ternak lokal di Indonesia. Sehingga, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kurangnya akses pasar. Beberapa komoditas ternak lokal belum memiliki akses pasar yang luas sehingga peternak tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Keterbatasan teknologi dan informasi. Peternak seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal yang mereka miliki.
4. Tidak adanya dukungan keuangan. Peternak kecil dan menengah seringkali kesulitan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan bisnisnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat. Konsumen belum sepenuhnya menyadari potensi dan nilai dari komoditas ternak lokal sehingga masih lebih memilih komoditas ternak impor.

Kalimantan Timur memiliki potensi ternak lokal seperti Kerbau Kalimantan Timur (Kerbau kalang), Rusa Sambar, Ayam Nunukan dan Aneka Ternak, yang belum di manfaatkan dan di eksplorasi secara maksimal agar dapat menjadi usaha peternakan yang menguntungkan. Aneka ternak yang juga menjadi potensi adalah budidaya Burung Walet, Kelinci dan Lebah Kelulut. Setiap jenis ternak tersebut memiliki

keunggulan dan layak untuk dikembangkan dalam mendukung diversifikasi usaha peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3.1.5 Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau dan antar wilayah juga harus dikendalikan melalui sistem lalulintas ternak yang efektif.

Beberapa penyakit hewan menular strategis yang menjadi permasalahan di Kalimantan Timur meliputi:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (FMD): Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada peternakan sapi dan kerbau karena dapat menyebabkan kematian atau menurunkan produktivitas ternak.
- b. Penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi,
- c. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Jembrana, brucellosis
- d. Newcastle Disease (ND): Penyakit ini menyerang unggas, terutama ayam, dan dapat menyebabkan kematian yang signifikan, berdampak pada industri peternakan ayam di Kalimantan Timur.

Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Beberapa zoonosis yang menjadi permasalahan di Kalimantan Timur adalah:

- a. Leptospirosis: Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Leptospira* yang dapat ditularkan melalui air atau tanah yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Infeksi manusia dapat menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan gangguan ginjal.

- b. Rabies: Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Rabies merupakan penyakit yang fatal dan dapat menular ke manusia jika tidak ditangani dengan baik.
- c. Avian Influenza (AI): Penyakit ini juga dikenal sebagai flu burung dan disebabkan oleh virus influenza tipe A. Infeksi manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi dan dapat menyebabkan penyakit parah atau bahkan kematian.

Keterbatasan tenaga medis/ paramedik, dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut, penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di Kalimantan Timur memerlukan kerjasama antara pemerintah, peternak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi pengawasan penyakit yang ketat, vaksinasi hewan yang tepat, pemantauan kesehatan hewan yang baik, edukasi tentang pencegahan penyakit, serta peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan dan tenaga medis. Pemerintah daerah juga dapat mendorong program-program penanggulangan dan pengendalian penyakit serta memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif.

3.1.6 Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa.

Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medik dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada di setiap kecamatan.

3.1.7 Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya

penyakit hewan dari luar sehingga Kalimantan Timur menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab Karantina Pertanian, sedangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan prov. Kalimantan Timur hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat ijin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak. Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point. Kegiatan penguatan chek point di perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus baik SDM teknis, Sarana prasarana dan penguatan sistem.

3.1.8 Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan kualitas hasil peternakan baik yang bersifat zoonosis dan non zoonosis yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan Analisa hasil uji laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer.

Kondisi perkembangan kasus kejadian penyakit hewan saat ini begitu pesat, Seperti contoh Penyakit Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Diseases* (LSD), kedua penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi sehingga dalam menentukan uji penyakit ini harus secara cepat dan akurat, sehingga segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan prosedur tetap. Dengan kondisi tersebut maka perlu peningkatan pelayanan dalam hal penambahan ruang lingkup uji

maupun pengembangan sistem/metode pengujian sehingga deteksi penyakit akan lebih cepat dan akurat.

3.1.9 Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (ASUH) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan asal hewan meningkat saat masa pandemic Covid-19, mulai dari daging dan telur ayam, daging sapi yang termasuk ke dalam pangan asal hewan. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, pangan asal hewan berpotensi dapat membahayakan manusia dan kemungkinan terkontaminasi cemaran biologis, kimia, dan zat yang membahayakan sangat tinggi.

Kesadaran tentang pentingnya kebutuhan protein hewani juga perlu didorong untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada anak/balita kasus stunting. Stunting memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan balita. Adapun dampak jangka pendeknya yaitu meningkatnya angka kesakitan dan kematian, dan adanya risiko bagi balita stunting menderita berbagai penyakit infeksi. Sementara dampak jangka panjangnya yaitu menurunnya kemampuan kognitif, dan rendahnya Intelligence Quotion (IQ) dan kapasitas fisik.

Kementrian Kesehatan menyatakan "bahwa protein hewani adalah instrumen gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah stunting pada anak", (<https://promkes.kemkes.go.id/protein-hewani-cegah-stunting>), kontribusi sub sektor peternakan sangat diperlukan dalam penanganan kasus stunting, selain itu dilakukan untuk upaya mewujudkan keamanan pangan di Kalimantan Timur adalah dengan menerapkan pola pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, halal), yaitu pangan yang bebas dari kontaminasi berbahaya (kontaminasi fisik, kimia atau biologis), memiliki nilai gizi yang tinggi, tidak tercampur bahan lain, dan diolah berdasarkan syariat Islam sehingga halal untuk dikonsumsi.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan ASUH adalah:

1. Kurangnya edukasi dan informasi. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi dan informasi yang memadai tentang konsumsi pangan ASUH. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan program

- edukasi dan informasi tentang keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi dari sumber hewan.
2. Mitos dan kepercayaan yang salah. Beberapa masyarakat masih memiliki mitos atau kepercayaan yang salah tentang cara memilih dan mempersiapkan pangan asal hewan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi.
 3. Keterbatasan akses. Di beberapa daerah, akses terhadap pangan ASUH yang berkualitas masih terbatas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, keterbatasan distribusi, atau faktor ekonomi.

3.1.10 Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkannilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab./Kota yang ada di Provinsi

Kalimantan Timur. Surveillance pangan asal ternak terhadap cemaran mikroba, Bahan kimia dan spesies babi Tahun 2022 berturut-turut 57,23% dengan jumlah 636 sampel, 3% dengan jumlah 933 sampel, dan 1,23% dengan jumlah 486 sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pangan asal ternak perlu mendapatkan perhatian dalam keamanannya.

3.1.11 Pemotongan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur

Sapi Betina Produktif merupakan sapi betina yang dinyatakan normal organ reproduksi/ peranakan yang dinyatakan oleh dokter hewan atau petugas peternakan. Sesuai dengan Dasar Hukum Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Akibat Pemotongan sapi Betina produktif adalah terhentinya aktifitas produksi pedet (anak sapi) untuk regenerasi selanjutnya, Pemotongan sapi betina produkif mengakibatkan penurunan populasi secara signifikan. Pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur termasuk relatif tinggi, walaupun masih perlu di konfirmasi apakah sapi tersebut sudah tidak produktif atau masih produktif.

Tingginya Pemotongan sapi betina ini perlu dilakukan verifikasi bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif, dan dicarikan solusi atas ketersediaan stok sapi tersebut. Jika larangan Pemotongan ternak betina produktif tetap dilanggar maka ada sangsi hukumnya dan ini berlaku pula untuk Pemotongan ternak ruminansia kecil dengan ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pasal 86.

3.1.12 Terbatasnya Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan terkait alokasi kawasan peternakan yang

memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya alokasi kawasan peternakan di Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya dukungan pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah Kota/Kabupaten, maka alokasi kawasan peternakan akan terbatas.
2. Keterbatasan lahan yang tersedia. Di Kalimantan Timur, lahan menjadi faktor pembatas dalam alokasi kawasan peternakan yang memadai. Jika lahan tidak cukup, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kawasan peternakan yang memadai, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal. Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan wilayah komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam alokasi kawasan peternakan, termasuk dukungan dana dan infrastruktur.
2. Memprioritaskan kawasan peternakan yang strategis. Dalam alokasi kawasan peternakan, penting untuk memprioritaskan kawasan yang strategis untuk mengoptimalkan produksi hewan ternak.
3. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kawasan peternakan yang memadai. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kawasan peternakan yang memadai,

diharapkan dapat mempercepat alokasi kawasan peternakan yang optimal di Kalimantan Timur.

4. Mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersedia. Pemanfaatan lahan yang tepat dan optimal dapat membantu memperluas alokasi kawasan peternakan yang tersedia.
5. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan peternakan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat akan membantu meningkatkan alokasi kawasan peternakan yang memadai di Kalimantan Timur.

3.1.13 Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah

Akses pembiayaan untuk usaha peternakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan akses pembiayaan dalam usaha peternakan antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Banyak peternak yang tidak mengetahui produk pembiayaan yang tersedia untuk usaha peternakan sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan.
2. Ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan yang ketat dari lembaga pembiayaan seringkali sulit dipenuhi oleh para peternak, terutama bagi peternak yang baru memulai usahanya.
3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset yang cukup besar, dan hal ini seringkali menjadi kendala bagi peternak yang belum memiliki aset yang cukup besar.

3.1.14 Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah

Keterlibatan swasta dalam pembangunan peternakan di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang masih perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan swasta antara lain:

1. Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan.
2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya layanan pendukung, seperti listrik, air, dan jalan yang baik, seringkali menjadi kendala bagi para investor swasta.
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Tanpa adanya data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, para investor swasta cenderung enggan untuk berinvestasi.

Perusahaan peternakan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 unit di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah:

1. Memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta. Pemerintah dapat memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta, seperti pembebasan pajak, keringanan biaya lahan, dan sebagainya.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan pendukung, seperti memperbaiki jalan, menambah kapasitas listrik dan air, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut.
3. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Pemerintah dapat menyediakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, seperti data tentang populasi ternak, ketersediaan pakan ternak, dan sebagainya, yang dapat

digunakan oleh para investor swasta dalam membuat keputusan investasi.

4. Membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Dengan membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan di Kalimantan Timur.
5. Mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk peternak lokal. Pemerintah dan swasta dapat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk peternak lokal agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha ternaknya, sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor swasta.

3.1.15 Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah

Masalah kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan yang masih rendah merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan antara lain:

1. *Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai.* Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan. Namun, kurangnya fasilitas dan program pelatihan dan pendidikan yang memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
2. *Rendahnya kualitas kemampuan manajemen peternakan.* Masalah manajemen peternakan yang buruk dapat menghambat perkembangan peternakan dan menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
3. *Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai.* Dukungan kelembagaan yang memadai, seperti asosiasi peternak atau kelompok tani, dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendukung pengembangan peternakan. Namun, kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai dapat menghambat perkembangan peternakan dan mengurangi kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

Penurunan jumlah RTUP pada beberapa komoditas ternak menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat usaha terhadap komoditas tersebut dengan berbagai alasan diantaranya adalah minat generasi peternak terhadap usaha peternakan yang turun, kasus penyakit hewan, kelayakan usaha dan permasalahan terbatasnya lahan usaha untuk peternakan.

3.1.16 Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik lokal maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

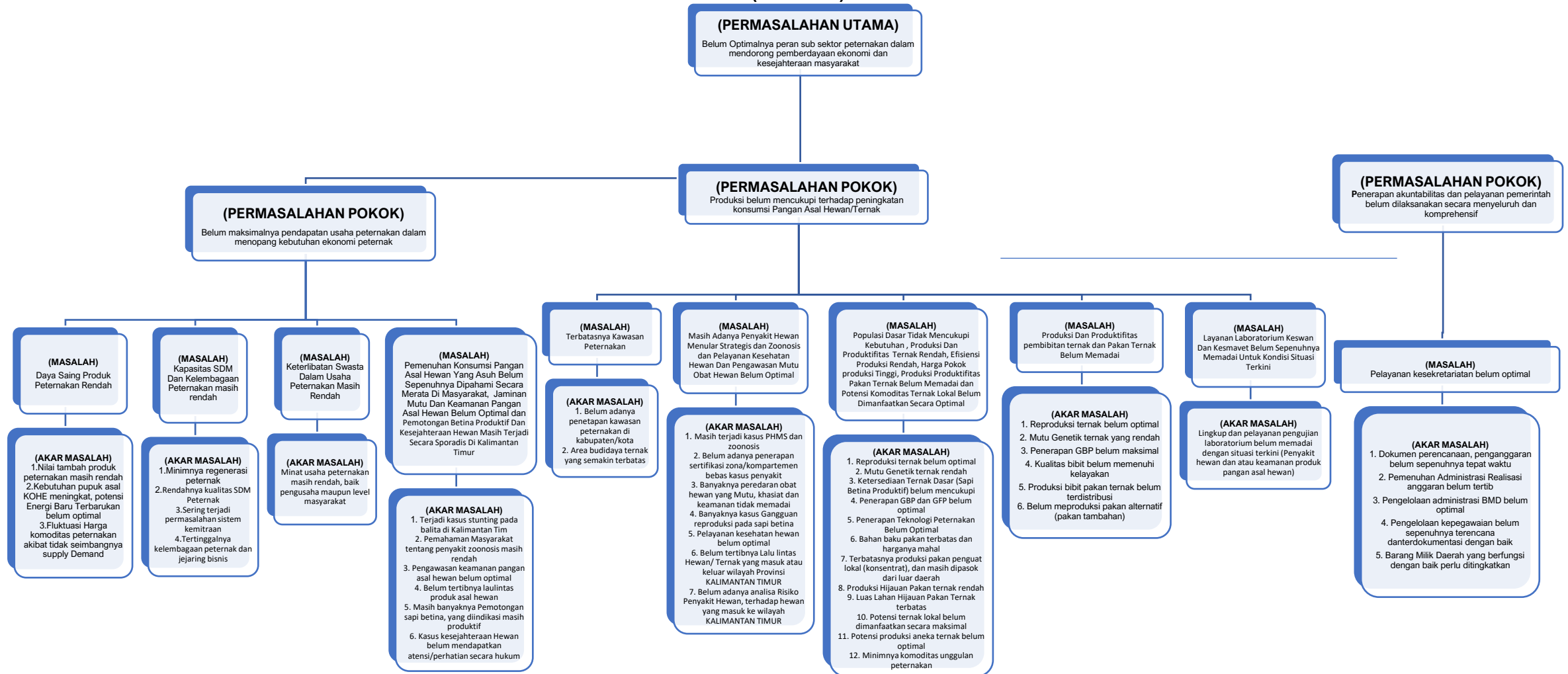
Masalah fluktuasi harga komoditas ayam potong yang dapat memicu inflasi merupakan permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia, mengingat konsumsi ayam potong cukup tinggi di masyarakat Kalimantan Timur yaitu 79% dari total konsumsi daging. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas ayam potong antara lain:

1. *Faktor musim dan cuaca.* Harga ayam potong dipengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca, seperti peningkatan permintaan pada saat perayaan hari besar atau cuaca buruk yang mengganggu produksi peternakan ayam.
2. *Kenaikan harga pakan ternak.* Harga pakan ternak yang tinggi dapat membuat biaya produksi peternakan ayam meningkat dan berdampak pada kenaikan harga ayam potong.
3. *Kondisi kesehatan ternak.* Jika ada wabah penyakit ternak atau kondisi kesehatan ternak yang buruk, produksi ayam potong bisa menurun dan harga ayam potong bisa naik.
4. *Ketergantungan terhadap impor.* Indonesia masih mengimpor ayam potong dalam jumlah yang cukup besar. Jika terjadi kenaikan harga ayam potong di pasar internasional, maka harga ayam potong di dalam negeri juga bisa naik.

Untuk mengetahui secara mendalam dan detail maka diperlukan informasi Supply demand yang memadai akurat dan terpercaya, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Kolaborasi antar perangkat Dinas terkait pengendalian inflasi dan kenaikan harga sangat diperlukan, dengan lebih mendalam memahami kondisi stok barang, produksi lokal, pemasukkan dari luar daerah dan rantai distribusi yang menyebabkan dan faktor kenaikan harga.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi, untuk kemudian diklasifikasikan dan dianalisa dengan menggunakan sistem "pohon masalah", dengan metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan akar permasalahan yang dihadapi dalam suatu konteks atau situasi. Metode ini sangat membantu dalam pemahaman mendalam tentang masalah yang ada serta membantu merumuskan solusi yang tepat. Pohon masalah ini lazim untuk perencanaan program atau proyek, kebijakan publik, dan pengembangan strategi, pohon masalah dapat dilihat pada gambar berikut:

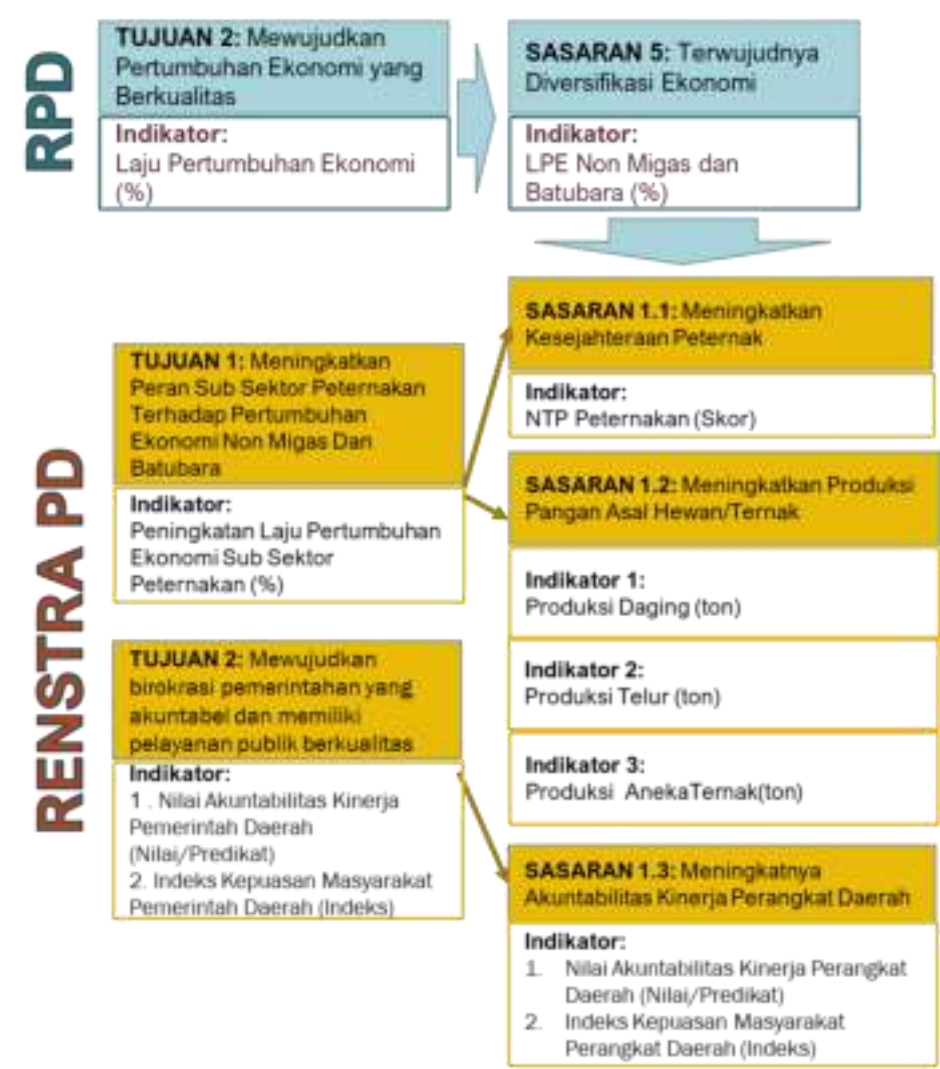
POHON MASALAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Panduan)



Gambar 6. Pohon Masalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari misi RPJPD 2005-2025, agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, keterkaitan dan keselarasan rencana strategis Dinas Peternakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Keterkaitan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dalam Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan tentunya terdapat hal-hal yang mendorong dan menghambat, faktor pendorong dan penghambat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28.Telaahan RPD Provinsi kalimantam Timur dengan Renstra Dinas
Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

RPD	Penghambat	Pendorong
Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sasaran 5 : Terwujudnya diversifikasi ekonomi	a. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah b. Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah c. Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal d. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal e. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal f. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal	a. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016. b. Integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/pd.300/8/2014 c. Tersedianya lahan eks tambang yang telah direklamasi dan revegetasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tmur Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengendalian Pemotongan betina produktif.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Renstra Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian Republik Indonesia

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :” **Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern**”.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan

pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat. Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi padarantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan sertap engendalian dan penanggulangan zoonosis. P roduk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antarlain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya

manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 29. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak						
Peningkatan Produksi daging (%)	4480,8 ribu ton	0,4	0,85	1,2	1,24	1,28
Peningkatan Produksi susu (%)	994,54 ribu ton	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Peningkatan Produksi telur (ribu ton)	5.355,62 ribu ton	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16
SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan						
Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%)	US\$ 744,3 ribu	15	15	20	25	30
SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak						
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	80	81,5	82	82,5	83	83,5
SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan yang sesuai kebutuhan						
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana peternakan (%)		85	87	90	92	95
SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan						
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	80	80,5	80,5	81	81
SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia						
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus)	122	122	120	118	116	114
SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	22,01	32,3	32,75	33,5	34	35,5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert [1-4])	3,4	3,37	3,44	3,51	3,55	3,58
SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas						
Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH

Tabel 30. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.	a. Populasi dan Produktivitas ternak/pakan rendah	a. Ketersediaan lahan eks tambang, integrasi sapi sawit, dan lahan perhutanan social
2.	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.	b. Daya saing produk peternakan masih rendah	b. Teknologi peternakan yang sudah cukup maju dan modern
3.	Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak	c. Kawasan Peternakan belum optimal	c. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
4.	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	d. Kalimantan Timur belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	d. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia
5.	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	e. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal	e. Pangsa Pasar produk peternakan meningkat
6.	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	f. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal	f. Kesadaran global tentang keamanan pangan (<i>food safety</i>), <i>bio security</i> dan kesejahteraan hewan
		g. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah	g. Tersedianya sarana pelatihan bagi SDM peternakan

3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Adapun Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2020-2024 adalah **“Prasarana dan Sarana Pertanian berkualitas dan berkesinambungan yang dimanfaatkan dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan luas panen”**

Untuk mencapai Visi tersebut Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- Optimasi pemanfaatan Alsintan pra-panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan
Misi ini menekankan pada pemanfaatan Alsintan untuk seluruh komoditas pertanian yang merata sesuai dengan kawasan pertanian Nasional. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi Petani. Optimasi pemanfaatan Alsintan merujuk pada pembangunan pertanian berbasis kewilayahan untuk komoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- Memberikan akses air berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian
Misi ini menjelaskan terkait penyediaan akses jaringan irigasi pertanian untuk seluruh komoditas pertanian secara efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian misi ini adalah dengan melakukan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian mendapatkan akses irigasi pertanian. Dengan ini, diharapkan masalah terkait minimnya sumber air untuk lahan pertanian dapat teratasi.

3. Mengendalikan kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien

Misi ini menitik-beratkan kepada pengendalian pupuk dan pestisida dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Pengendalian yang dimaksud meliputi penyediaan, pendaftaran serta pengawasan pupuk dan pestisida. Penyediaan yang dimaksud adalah memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida. Pendaftaran yang dimaksud adalah pengelolaan pendaftaran formulasi pupuk dan pestisida yang beredar. Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu pupuk dan pestisida beredar.

4. Meningkatkan Akses Pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian

Misi ini berfokus pada peningkatan akses serta pemanfaatan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Secara konkret, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melebarkan cakupan pembiayaan dan perlindungan petani untuk seluruh komoditas pertanian. Pembiayaan pertanian ke depan diharapkan tidak hanya bersumber dari APBN, namun juga dari sektor lainnya. Sementara perlindungan, akan mengalami pengembangan lebih lanjut dengan cakupan asuransi pertanian yang lebih luas, tidak hanya fokus pada komoditas padi. Dengan demikian, permasalahan finansial yang dihadapi oleh para petani dalam mencari modal usahapertanian dapat diminimalisir.

5. Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk semua komoditas pertanian yang menjadi prioritas. Penyediaan lahan mengacu pada kebutuhan lahan pertanian untuk mendukung target produksi nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian, mengacu pada target perluasan lahan pertaniandalam rangka meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

6. Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas

Implementasi reformasi birokrasi merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan mengacu dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target pencapaian road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dapat tercapai.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang prasarana dan sarana pertanian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan peternakan.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha peternakan yang mudah di akses peternak.
- c. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana peternakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 31. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Sat	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%	75,84	75,84	75,84	75,84	75,84
		2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%	52,18	52,26	52,33	52,39	52,45
2	Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang	3	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana	%	80	80	80	80	80
	Efektif dan Efisien	4	Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	31,68	34,45	37,22	39,99	42,76
		5	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana yang Akuntabel dan Berkualitas	%	66,53	65,84	64,79	63,88	63,03

Sumber : Renstra Ditjen PSP

Tabel 32. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	a. Tidak tersedianya sumber air b. Tingginya biaya operasional pemanfaatan Pompa c. Lokasi lahan sulit dijangkau, dengan kemiringan yang cukup tinggi	a. Berkembangnya usaha peternakan b. Rencana Desa Korporasi Ternak c. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

Sumber: Renstra Ditjen PSP

3.3.3 Keterkaitan RENSTRA Kabupaten/Kota

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2015 maka terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagian besar perangkat daerah lingkup pertanian yang ada digabung menjadi satu, bahkan ada yang digabung dengan kehutanan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024- 2026 dengan Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur.

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2021 – 2026 :“ Meningkatkan Produksi Pertanian Dan Peternakan Dengan Menerapkan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Menjadikan Petani Yang Kreatif, Inovatif, Dan Mandiri Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2021 – 2026 : *“Mewujudkan Swasembada Dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”* .
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinergris dan Berkelanjutan”.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun

2021 – 2026 : Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan pertanian Kota Bontang adalah : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan; 2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah misi nomor 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan tujuan nomor 1 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu Meningkatkan efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahulu Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Aspek Kinerja dari SDG's)

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Belum adanya kawasan atau lahan khusus pengembangan peternakan dipandang sebagai salah satu faktor belum tercapainya swasembada daging sapi dan kerbau di Kalimantan Timur. Sebab, upaya percepatan mewujudkan swasembada daging dengan pengembangan peternakan skala besar bergantung pada lahan potensial sebagai lokasi pengembangan yang tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pakan di lahan tersebut.

Pengembangan kawasan peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional terbagi menjadi 4 kawasan yaitu :

1. Kawasan khusus padang penggembalaan termasuk di dalamnya lahan eks tambang di Kalimantan Timur.
2. Kawasan daerah padat penduduk terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Intensif umumnya di wilayah pengembangan peternakan dengan lokasi terbatas pada umumnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali
 - b. Kawasan integrasi ternak-tanaman:

Pada umumnya pengembangan peternakan berada di wilayah pertanian tanaman pangan seperti padi, singkong, jagung dan lain-lain.

3. Kawasan Integrasi ternak-tanaman perkebunan

Pada umumnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdiri atas :

a. Integrasi sapi-sawit:

Semua kawasan pengembangan sapi potong di Kalimantan Timur termasuk di dalam integrasi sapi-sawit.

b. Integrasi sapi dengan tanaman perkebunan lainnya

Pada umumnya tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, karet, kelapa dan lain-lain.

4. Kawasan pemanfaatan perhutanan sosial

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Bahwa Pemanfaatan kawasan perhutanan sosial (KPS) dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat serta menjaga kelestarian hutan. Berikut ini adalah beberapa acuan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial:

1. Pengembangan agroforestry

Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman hutan dan tanaman pertanian pada satu lahan. Dalam hal ini, masyarakat setempat dapat memanfaatkan lahan KPS dengan menanam berbagai jenis tanaman, seperti tanaman pangan, buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman kayu. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan untuk peternakan, seperti sapi, kambing, dan ayam.

2. Pemanfaatan kayu dan non-kayu

Masyarakat setempat dapat memanfaatkan kayu dan non-kayu yang ada di KPS. Pengambilan kayu dan non-kayu harus dilakukan secara berkelanjutan dan mengikuti aturan yang berlaku.

3. Pengembangan wisata alam

Kawasan perhutanan sosial dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata alam. Masyarakat setempat dapat mengembangkan objek wisata seperti trekking, camping, dan spot foto. Dalam pengembangan wisata alam, perlu diperhatikan aspek konservasi alam dan keberlanjutan.

4. Pengelolaan kehutanan

Masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam pengelolaan KPS. Hal ini meliputi pengawasan, pengendalian, dan pemantauan kegiatan di KPS. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu dalam pemulihan dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak.

5. Pengembangan energi terbarukan

KPS dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, seperti energi biomassa dan energi surya. Masyarakat setempat dapat mengembangkan sistem pengelolaan energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di KPS.

Dalam pemanfaatan kawasan perhutanan sosial harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi alam, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kemitraan antara masyarakat setempat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam pengelolaan KPS.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, maka pola pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan kawasan baik kawasan yang sudah ada maupun kawasan baru yang potensial di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan pengembangan sapi potong dengan pola integrasi terdiri atas :

- a. Kabupaten Berau
- b. Kutai Kartanegara
- c. Kutai Timur
- d. Paser
- e. Penajam Paser Utara

Di samping komoditas strategis nasional yaitu sapi potong dikembangkan pula kawasan komoditas unggulan sebagai berikut :

- a. Kawasan pengembangan ternak kerbau di Kutai Kartanegara
- b. Kawasan pengembangan ternak babi di Kutai Barat
- c. Kawasan pengembangan ayam Buras di Kota Samarinda

Kawasan industri tanaman pangan berlokasi di PPU dan Paser yang terletak di bagian Selatan Kalimantan Timur sebagai *hinterland* Kota Balikpapan. Sementara itu, sektor peternakan juga baik dikembangkan di wilayah tersebut. Penajam Paser Utara (PPU) fokus pada pengembangan unggas di Kecamatan Penajam dan Babulu, Sapi Brahman dan Sapi Bali di Kecamatan Sepaku serta Rusa Api-api di Kecamatan Waru. PPU dan Paser diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Kalimantan Timur

Program pengembangan ternak sapi melalui pemanfaatan lahan eks tambang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengambil nilai lebih dari lokasi eks tambang yang rata-rata tidak subur lagi. Dengan pembangunan kawasan integrasi ternak-tambang ini diharapkan tanah yang strukturnya telah rusak dapat kembali subur dengan penggunaan pupuk kandang hasil kotoran ternak. Selain itu, pemanfaatan lahan eks tambang telah dilakukan pemerintah dengan dukungan perusahaan, selaku pemilik lahan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Di antara daerah yang paling banyak lahan eks tambang batubara adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, akan dikembangkan juga di Paser, Kutim, Berau dan Samarinda.

3.4.2 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ SDGs

Sub sektor Peternakan merupakan bagian penting dari upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut adalah beberapa keterkaitan peternakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, tabel berikut:

Tabel 33. Keterkaitan Subsektor Peternakan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No.	TPB/ SDGs	KETERKAITAN SUBSEKTOR PETERNAKAN
1.		Pengentasan kemiskinan (SDG 1) Peternakan dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat pedesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, peternakan juga dapat memberikan akses ke sumber daya alam yang penting seperti tanah dan air.

2.  **Pangan yang cukup dan berkualitas (SDG 2)**
Pernakan dapat memproduksi makanan berprotein tinggi seperti daging, susu, dan telur. Namun, untuk mencapai SDG 2, peternakan harus dioperasikan dengan cara yang berkelanjutan dan etis, serta memperhatikan kesejahteraan hewan dan lingkungan.
 3.  **Kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3)**
Pernakan yang berkelanjutan dan etis dapat menghasilkan produk yang aman dan sehat bagi konsumen. Selain itu, peternakan juga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi peternak dan masyarakat sekitar melalui akses terhadap produk susu dan produk hewani lainnya
 4.  **Kesetaraan Gender (SDG 5)**
Penguatan Peran Perempuan dalam usaha Pernakan dalam Budidaya Unggas Lokal/Ayam Ras Petelur/Aneka Ternak/Plasma Nutfah/Pengolahan produk, *Peningkatan Kompetensi KWT(%)*
Aktifitas: Pelatihan Keterampilan dan fasilitasi Budidaya Ternak/Pengolahan Produk Pernakan
 5.  **Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDG 12)**
Pernakan yang berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara produksi dan penggunaan sumber daya alam. Ini berarti melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan
 6.  **Mengatasi perubahan iklim (SDG 13)**
Pernakan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca. Namun, peternakan juga dapat berperan dalam mengurangi emisi dengan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan seperti penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi emisi dari limbah ternak.
 7.  **Kehidupan di bawah air (SDG 14)**
Pernakan dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan air jika pengelolaannya tidak berkelanjutan. Namun, praktik-praktik peternakan yang berkelanjutan juga dapat berkontribusi pada keberlangsungan kehidupan di bawah air seperti pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
-

8.

**Kehidupan di atas daratan (SDG 15)**

Praktik peternakan yang berkelanjutan dapat mempromosikan konservasi dan restorasi habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, peternakan juga dapat mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan peternakan. Praktik-praktik peternakan yang berkelanjutan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

3.5 Faktor/Isu Strategis Pembangunan Peternakan dan Analisa SWOT

3.5.1 Penentuan (Identifikasi) dan Klasifikasi (Pengelompokan) Faktor/Isu Strategis

Faktor - faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut akan membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan.

Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini akan terkait dengan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Untuk itu perlu mengenal kondisi internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui peluang dan ancaman, dengan menggunakan pendekatan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Penentuan faktor dan isu strategis telah melibatkan berbagai unsur Internal pemerintah, Organisasi lingkup peternakan, swasta dan perguruan Tinggi, dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu tergambar pada tabel berikut:

Tabel 34. Klasifikasi Faktor/Isu Strategis Terkait pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur

FAKTOR DAN ISU STRATEGIS PETERNAKAN RPD 2024-2029	Internal/ Eksternal	SWOT
Biaya produksi ternak tinggi	E	ANCAMAN (THREATS)
Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Bahan Baku pakan relatif mahal (jagung, dedak)	E	ANCAMAN (THREATS)
Meningkatnya kebutuhan pupuk organik	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Konsumsi pangan asal hewan semakin meningkat	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Rendahnya minat Investor terhadap peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Akses permodalan/pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal	E	ANCAMAN (THREATS)
Bunga bank konvensional memberatkan usaha peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Minim offtaker (inti) usaha peternakan Ruminasia	E	ANCAMAN (THREATS)
Kurangnya perhatian/keberpihakan terhadap sub sektor peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Minimnya Kawasan Peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Terdapatnya obat hewan ilegal	E	ANCAMAN (THREATS)
Tergesernya lokasi peternakan oleh pemukiman warga atau peruntukan lainnya	E	ANCAMAN (THREATS)
Luas Kebun Kelapa Sawit KalimantanTimur Hampir 2 Juta Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Area perhutanan sosial seluas 618,11 Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Lahan reklamasi pasca tambang	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Letak geografis Kalimantan Timur diantara negara-negara ASIA TENGGARA	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Pembangunan Infastruktur IKN dan konektifitas pendukungnya	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Sarana prasarana pendukung produksi peternakan belum memadai	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pencemaran lingkungan akibat aktivitas Peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Aplikasi teknologi peternakan hulu hilir belum optimal	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Hasil sampingan sawit (bungkil sawit) belum optimal dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Kurangnya produksi daging sapi dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Ketidak seimbangan Supply demand daging Ayam Potong dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Daya saing produk peternakan dan jaminan mutu serta keamanan produk hewan masih rendah	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Belum terpenuhinya konsumsi protein hewani terhadap kasus balita stunting	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)
Masih rendahnya penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)
Minim komoditas unggulan (ekspor)	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pengendalian Pemotongan betina produktif	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Ketidak harmonisan pelaksanaan sistem kemitraan ternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Ternak sebagai usaha sambilan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Minimnya regenerasi peternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)
Pemberantasan kemiskinan	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)
Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisnis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Belum ada kejelasan kawasan peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)

3.5.2 Pembobotan Faktor/Isu Strategis

Proses pembobotan faktor/isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan seberapa besar dampak faktor/isu tersebut terhadap keberlangsungan organisasi, pembobotoan dilakukan dengan cara melibatkan beberapa unsur Pemerintah, swasta dan Perguruan Tinggi, Hasil pembobotan Faktor Ekternal dan Internal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Pembobotan Faktor Ekternal

FAKTOR/ ISU STRTEGIS	Internal /Ekster nal	SWOT	BOBOT 1-5	BOBOT	RATING 1-4	SKOR
			(BANTU)	(TINGK AT SIGNIFI KAN)	(URGensi)	
Biaya produksi ternak tinggi	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Bahan Baku pakan relatif mahal (jagung, dedak)	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Rendahnya minat Investor terhadap peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	4	0.055	2	0.11
Akses permodalan/pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal	E	ANCAMAN (THREATS)	3	0.041	2	0.08
Bunga bank konvensional memberatkan usaha peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	2	0.14
Minim offtaker (inti) usaha peternakan Ruminasia	E	ANCAMAN (THREATS)	3	0.041	1	0.04
Kurangnya perhatian/keberpihakan terhadap sub sektor peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Minimnya Kawasan Peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Terdapat Obat hewan ilegal	E	ANCAMAN (THREATS)	4	0.055	3	0.16
Tergesernya lokasi peternakan oleh pemukiman warga atau peruntukan lainnya	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
SUB TOTAL ANCAMAN						1.90
Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	2	0.11
Meningkatnya kebutuhan pupuk organik	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	2	0.11
Konsumsi pangan asal hewan semakin meningkat	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	3	0.16
Luas Kebun Kelapa Sawit KalimantanTimur Hampir 2 Juta Hektar	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	3	0.041	2	0.08
Area perhutanan sosial seluas 618,11Hektar	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	3	0.041	2	0.08
Lahan reklamasi pasca tambang	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	3	0.16
Letak geografis Kalimantan Timur diantara negara-negara ASIA TENGGARA	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	2	0.027	1	0.03
Pembangunan Infastruktur IKN dan konektifitas pendukungnya	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	5	0.068	4	0.27
SUB TOTAL PELUANG						1.01
TOTAL FAKTOR EKSTERNAL (ANCAMAN DAN PELUANG)			73			2.92

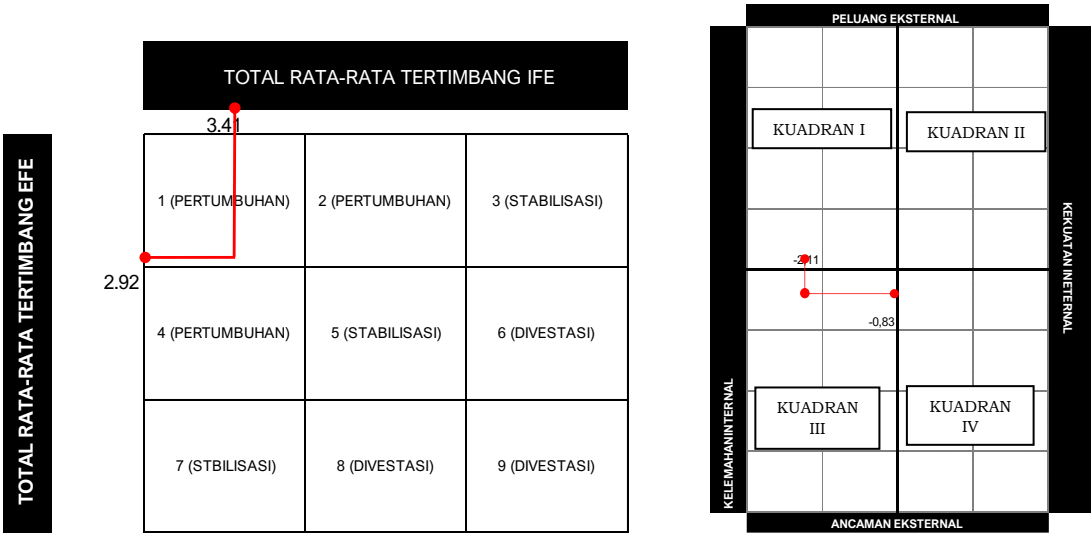
Tabel 36. Pembobotan Faktor Internal

FAKTOR/ ISU STRATEGIS	Internal /Eksternal	SWOT	BOBOT 1-5 (BANTU)	BOBOT (TINGKAT SIGNIFIKAN)	RATING 1-4 (URGENSI)	SKOR
Belum terpenuhinya konsumsi protein hewani terhadap kasus balita stunting	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)	5	0.054	3	0.16
Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)	5	0.054	3	0.16
Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)	5	0.054	4	0.22
Pemberantasan kemiskinan	I	KEKUATAN (STRENGTHNESS)	5	0.054	2	0.11
SUB TOTAL KEKUATAN						0.65
Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Sarana prasarana pendukung produksi peternakan belum memadai	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Pencemaran lingkungan akibat aktivitas Peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	3	0.032	2	0.06
Aplikasi teknologi peternakan hulu hilir belum optimal	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Hasil sampingan sawit (bungkil sawit) belum optimal dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Kurangnya produksi daging sapi dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Ketidak seimbangan Supply demand daging Ayam Potong dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	4	0.17
Daya saing produk peternakan dan jaminan mutu serta keamanan produk hewan masih rendah	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Masih rendahnya penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	3	0.032	2	0.06
Minim komoditas unggulan (ekspor)	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	3	0.032	3	0.10
Pengendalian Pemotongan betina produktif	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Ketidak harmonisan pelaksanaan sistem kemitraan ternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Ternak sebagai usaha sampingan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Minimnya regenerasi peternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisnis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Belum ada kejelasan kawasan peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
SUB TOTAL KELEMAHAN						2.76
TOTAL FAKTOR INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN)			93			3.41

3.5.3 Analisa arah Strategi berdasarkan pembobotan faktor strategis

Berdasarkan faktor strategis yang telah diidentifikasi, setelah faktor strategis yang paling penting telah diidentifikasi, maka dalam ditentukan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi, dengan menentukan arah

strategi berdasarkan pembobotan dan analisa faktor internal dan eksternal. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur, berdasarkan hasil analisa berada pada kuadran **“Pertumbuhan”** dan berada pada kuadran III, Dengan arti bahwa (*CONCERVATIVE*) : Peluang yang sangat besar berhadapan dengan kelemahan internal yang kuat. Strategi yang dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal untuk merebut peluang yang ada. Kuadran pertumbuhan menunjukkan bahwa Dinas peternakan dan kesehatan hewan harus melakukan upaya (effort) yang lebih keras untuk mendorong pergerakan pembangunan peternakan karena dihadapkan oleh kelemahan internal dan ancaman yang begitu kuat.



Gambar 8. Arah strategi berdasarkan pembobotan faktor internal dan eksternal.

3.5.4 Kebijakan strategi

Kebijakan strategi memberikan gambaran bagaimana dinas peternakan dapat mengoptimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengambil keuntungan dari peluang, dan mengatasi ancaman dengan cara yang tepat. Namun, kebijakan strategi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik. Kebijakan strategi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- ✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Peluang (S-O)
 1. Meningkatkan konsumsi pangan asal hewan dalam penanggulangan balita stunting
 2. Meningkatkan produksi pupuk organik dengan teknologi pengolahan dan biogas

3. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota
4. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial
5. KIE Masyarakat veteriner
6. Peningkatan KIE Penerapan Kesejahteraan hewan
7. Peningkatan pengawasan dan penerapan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
8. Peningkatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
9. Peningkatan pengawasan peredaran produk hewan.

✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mendorong akses pembiayaan usaha peternakan dengan subsidi/bantuan bunga
2. Mempermudah dan mendorong investor untuk usaha peternakan
3. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan
4. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi
5. Mengupayakan usaha peternakan sederhana untuk keluarga miskin
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan

✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Pencegahan dan pemberantasan PHMS dan zoonosis
2. Peningkatan pengawasan Lalu lintas ternak
3. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
4. Menambah jumlah sapi betina produktif
5. Optimalisasi reproduksi ternak
6. Memaksimalkan potensi kearifan ternak lokal (Plasma Nutfah)
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
8. Peningkatan dan penerapan teknologi peternakan
9. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan

10. Penanganan gangguan reproduksi
11. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millenial
12. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (ekspor)
13. Mendorong Sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit
14. Pengendalian Supply demand produk peternakan
- ✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Ancaman (S-T)
 1. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah
 2. Mendorong pembangunan pabrik pakan skala kecil (mini feedmil)
 3. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan
 4. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
 5. Mendorong ketersediaan lahan kawasan peternakan
 6. Mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan
 7. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan

Kebijakan strategi yang berdasarkan faktor kekuatan-kelemahan-Peluang dan Ancaman disusun berdasarkan hasil FGD bersama bidang terkait pada gambar.6 berikut;

BAK Kelemahan (Weakness) Kelebihan (Strength) <table><tr><td>SP45 Peternak (Government)</td><td>STRATEGI 50 1. Strategi strategi yang menggunakan kelemahan untuk meningkatkan peluang</td><td>STRATEGI 50 1. Strategi strategi yang menggunakan kelebihan untuk meminimalkan peluang</td></tr><tr><td>Ancaman (Threats)</td><td>STRATEGI 51 1. Strategi strategi yang menggunakan kelemahan SP45 untuk meningkatkan peluang</td><td>STRATEGI 51 1. Strategi strategi yang menggunakan kelebihan SP45 untuk meningkatkan peluang</td></tr></table>			SP45 Peternak (Government)	STRATEGI 50 1. Strategi strategi yang menggunakan kelemahan untuk meningkatkan peluang	STRATEGI 50 1. Strategi strategi yang menggunakan kelebihan untuk meminimalkan peluang	Ancaman (Threats)	STRATEGI 51 1. Strategi strategi yang menggunakan kelemahan SP45 untuk meningkatkan peluang	STRATEGI 51 1. Strategi strategi yang menggunakan kelebihan SP45 untuk meningkatkan peluang	Belum terpenuhinya konsumsi protein hewani terhadap kasus balita stunting Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan Pemerintahan yang profesional dan akuntabel Pemberantasan kemiskinan	KEKUATAN (STREGHTNESS) KEKUATAN (STREGHTNESS) KEKUATAN (STREGHTNESS) KEKUATAN (STREGHTNESS)	Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis Sarana prasarana pendukung produksi peternakan belum memadai Pencemaran lingkungan akibat aktivitas Peternakan Aplikasi teknologi peternakan hulu hilir belum optimal Hasil sampingan sawit (bungkil sawit) belum optimal dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan Kurangnya produksi daging sapi dan telur Ketidak seimbangan Supply demand daging Ayam Potong dan telur Daya saing produk peternakan dan jaminan mutu serta keamanan produk hewan masih rendah Masih rendahnya penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan Minim komoditas unggulan (ekspor) Pengendalian pemotongan betina produktif Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan Ketidak harmonisan pelaksanaan sistem kemitraan ternak Ternak sebagai usaha sampingan Minimnya regenerasi peternak Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisr Belum ada kejelasan kawasan peternakan	KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
SP45 Peternak (Government)	STRATEGI 50 1. Strategi strategi yang menggunakan kelemahan untuk meningkatkan peluang	STRATEGI 50 1. Strategi strategi yang menggunakan kelebihan untuk meminimalkan peluang										
Ancaman (Threats)	STRATEGI 51 1. Strategi strategi yang menggunakan kelemahan SP45 untuk meningkatkan peluang	STRATEGI 51 1. Strategi strategi yang menggunakan kelebihan SP45 untuk meningkatkan peluang										
Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatnya kebutuhan pupuk organik Konsumsi pangan asal hewan semakin meningkat Luas Kebun Kelapa Sawit KalimantanTimur Hampir 2 Juta Hektar Area perhutanan sosial seluas Juta Hektar Lahan reklamasi pasca tambang seluas Juta Hektar Letak geografis Kaltim diantara negara-negara ASIA TENGGARA Pembangunan Infrastruktur IKN dan konektifitas pendukungnya	E E E E E E E E	PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY) PELUANG(OPPORTU NITY)	1. Meningkatkan konsumsi pangan asal hewan dalam penanggulangan balita stunting 2. Meningkatkan produksi pupuk organik dengan teknologi pengolahan dan biogas 3. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota 4.Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial 5. KIE Masyarakat veteriner 6. Peningkatan KIE Penerapan Kesejahteraan hewan 7. Peningkatan pengawasan dan penerapan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 8.Peningkatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 9. Peningkatan pengawasan peredaran produk hewan.	1. Pencegahan dan pemberantasan PHMS dan zoonosis 2. Peningkatan pengawasan Lalu lintas ternak 3. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak 4. Menambah jumlah sapi betina produktif 5. Optimalisasi reproduksi ternak 6. Memaksimalkan potensi kearifan ternak lokal (Plasma Nutfah) 7.Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif 8. Peningkatan dan penerapan teknologi peternakan 9. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan 10. Penanganan gangguan reproduksi 11. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millenial 12. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (ekspor) 13. Mendorong Sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit 14. Pengendalian Supply demand produk peternakan								
Biaya produksi ternak tinggi Bahan Baku pakan relatif mahal (jagung, dedak) Rendahnya minat Investor terhadap peternakan Akses permodalan/pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal Bunga bank konvensional memberatkan usaha peternakan Minim offtaker (inti) usaha peternakan Ruminasia Kurangnya perhatian/keberpihakan terhadap sub sektor peternakan Minimnya Kawasan Peternakan Terdapat Obat hewan ilegal Tergesernya lokasi peternakan oleh pemukiman warga atau peruntukan lainnya	E E E E E E E E E E	ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS) ANCAMAN (THREATS)	1. Mendorong akses pembiayaan usaha peternakan dengan subsidi/bantuan bunga 2. Mempermudah dan mendorong investor untuk usaha peternakan 3. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan 4. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi 5. Mengupayakan usaha peternakan sederhana untuk keluarga miskin 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan 7. Penguatan tugas dan fungsi Cek point di wilayah perbatasan	1. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah 2. Mendorong pembangunan pabrik pakan skala kecil (mini feedmill) 3. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan 4. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas 5. Mendorong ketersediaan lahan kawasan peternakan 6. Mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan 7.Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan 8. Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet 9. Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Veteriner								

Gambar 9. Penyusunan Kebijakan strategi berdasarkan SWOT

Kebijakan strategi yang disusun kemudian dilakukan pemilahan, pengkategorian urusan, dan perumusan narasi, sehingga didapatkan Stretegi dan kebijakan teknis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37. Strategi dan Kebijakan Teknis yang disusun dan dirumuskan narasinya

STRATEGI	KEBIJAKAN PRODUKSI
MENDORONG PENINGKATAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	1. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan 2. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi
PENINGKATAN POPULASI, PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TERNAK	1. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak 2. Menambah jumlah sapi betina produktif
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PAKAN TERNAK	1. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah 2. Mendorong pembangunan pengolahan pakan skala kecil (<i>mini feedmil</i>) 3. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
PEMBERDAYAAN POTENSI KOMODITAS TERNAK LOKAL	Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka ternak, plasma nutfah)

STRATEGI	KEBIJAKAN KESEHATAN HEWAN
PENINGKATAN STATUS KESEHATAN HEWAN	1. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis 2. Mendorong penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MUTU OBAT HEWAN	1. Penjaminan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar 2. Penanganan gangguan reproduksi 3. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan
PENINGKATAN PENGAWASAN LALULINTAS HEWAN/TERNAK	1. Peningkatan pengawasan Lalu lintas Hewan/ Ternak 2. Analisa Risiko Penyakit Hewan

STRATEGI	KEBIJAKAN KESMAVET
PENINGKATAN PEMENUHAN PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL (ASUH)	1. Peningkatan Konsumsi pangan asal hewan yang ASUH dalam upaya berkontribusi menurunkan kasus balita stunting 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyakit zoonosis
PENINGKATAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN	1. Peningkatan Mutu dan keamanan produk hewan (ASUH) 2. Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan
PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	1. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia betina produktif 2. Peningkatan penerapan masyarakat terhadap Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)

STRATEGI	KEBIJAKAN KAWASAN DAN AGRIBISNIS
PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN	1. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota 2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial
PENGUATAN KEMUDAHAN DAN AKSES PEMBIAYAAN USAHA PETERNAKAN	1. Mendorong dan mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan
PENINGKATAN PERAN SWASTA DAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT	1. Mempermudah dan mendorong pelaku usaha peternakan 2. Mengupayakan usaha peternakan untuk keluarga miskin 3. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan
PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	1. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial 2. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PETERNAKAN	3.Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan
	1. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (keluar Kalimantan Timur)
	2. Meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan dengan teknologi pengolahan
	3. Pengendalian Supply demand produk peternakan
STRATEGI	KEBIJAKAN TEKNIS UPTD PTHPT
PENINGKATAN POPULASI, PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TERNAK PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PAKAN TERNAK	Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
	Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
	Peningkatan PAD dari UPTD PTHPT Api-api
STRATEGI	KEBIJAKAN TEKNIS LAB UPTD
PENGUATAN LAYANAN LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET	Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
	Peningkatan PAD UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru, sesuai hasil analisis SWOT yang dijabarkan pada bab terdahulu.

Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur harus mempunyai Motto sebagai cara pandang jauh ke depan terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”**, Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Motto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Korporasi Peternak wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan Yang Berdaulat, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”

Motto tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yakni: 1) Pengembangan Korporasi Peternak; dan 2) Ketahanan Pangan Asal Hewan

Korporasi Peternak, berarti model pemeliharaan ternak yang berbrntuk kelembagaan ekonomi peternak untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

Ketahanan Pangan Asal Hewan, berarti kondisi dimana Kalimantan Timur dapat memproduksi dan menyediakan sumber daya pangan yang cukup dari subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan memperhatikan pengelolaan ternak, penggunaan teknologi dan pengembangan pasar yang berkelanjutan.

Sebagaimana untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran diversifikasi ekonomi non migas dan batubara, maka hal

tersebut sejalan dengan pengembangan kelembagaan peternakan sapi potong di lahan eks tambang dan integrasi dengan tanaman merupakan upaya dalam meningkatkan populasi sapi potong di Kalimantan Timur melalui pengembangan Korporasi Peternak untuk penyediaan daging yang berdaulat sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewan.

4.1 Tujuan

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, sasaran ke-5 yaitu Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi; yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara horizontal adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (diluar sektor non-migas dan batubara) seperti sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, sektor industri dan sektor pariwisata). Sedangkan yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara vertikal adalah mendorong penganekaragaman pengolahan komoditas-komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (tidak hanya dipasarkan dalam bentuk produk mentah).

Penjabaran atau implementasi dari tujuan pembangunan daerah Kalimantan Timur 2024-2026 dengan pencapaian tujuan ke-2 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, dan sesuai dengan sasaran ke- 1 yaitu Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi, maka arah pembangunan sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 (Dua) tujuan mendasar yaitu:

Tujuan 1.

“Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara”

Indikator:**Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan (%)**

Pembangunan subsektor peternakan di Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai penyedia protein hewani, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sehingga akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan output dan pendapatan dengan memanfaatkan beberapa hasil dari produk-produk peternakan seperti biogas, pupuk, dan produk-produk hewani (daging, telur).

Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang dominan. Subsektor peternakan yang berkembang dengan baik, sehingga daerah dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga atau permintaan dalam sektor lain, seperti sektor pertambangan atau perkebunan.
- b. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, Pengembangan subsektor peternakan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Peternakan yang berkembang akan membutuhkan tenaga kerja untuk berbagai kegiatan seperti pemeliharaan ternak, pemrosesan produk peternakan, distribusi, dan pemasaran. Dengan demikian, diversifikasi ke sektor peternakan dapat memberikan peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Memperkuat keamanan pangan, Subsektor peternakan yang kuat dapat memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan pangan suatu daerah. Diversifikasi ekonomi melalui peternakan memungkinkan produksi lokal yang lebih tinggi dari produk hewani, seperti daging, susu, dan telur. Hal ini mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan ketahanan pangan, dan memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi populasi.
- d. Meningkatkan nilai tambah dan ekspor, Dengan mengembangkan subsektor peternakan yang beragam, daerah dapat meningkatkan nilai tambah pada produk hewani. Proses pemrosesan dan pengolahan yang

lebih maju dapat meningkatkan nilai jual produk, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan ekonomi. Selain itu, peternakan yang berkembang juga dapat menjadi sumber ekspor yang signifikan, memperkuat neraca perdagangan dan menghasilkan pendapatan devisa bagi negara.

- e. Peningkatan akses terhadap gizi dan pangan yang seimbang, Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap gizi yang seimbang. Peternakan dapat memproduksi berbagai produk hewani yang kaya protein, vitamin, dan mineral, yang penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi manusia. Dengan demikian, pengembangan peternakan yang beragam dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan memberikan berbagai manfaat tersebut, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi subsektor peternakan dari Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Target Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2023 (Akhir 2022)	Target		
			2024	2025	2026
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)	1,94	2,00	2,14	2,29

Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik didukung dengan ASN ber-AKHLAK

Selaras dengan tujuan ke-4 Rencana Pembangunan daerah yaitu Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjabarkan tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan publik ini memiliki beberapa maksud, antara lain:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan memiliki birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mempromosikan partisipasi publik, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Birokrasi yang berorientasi pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan efisien kepada masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip manajemen yang baik, penyederhanaan/reformasi birokrasi, dan penggunaan teknologi informasi, diharapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
- c. Birokrasi yang akuntabel berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, regulasi yang jelas, dan kultur organisasi yang berintegritas, praktik korupsi dapat diminimalkan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan menghasilkan pemerintahan yang bersih.
- d. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, Birokrasi yang berorientasi pelayanan publik harus memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, evaluasi, dan monitoring program dan kebijakan publik akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
- e. Menjaga akuntabilitas dan transparansi, Birokrasi yang akuntabel harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik, baik itu anggaran, aset, maupun keputusan yang diambil. Dengan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, dan pelaporan kinerja, birokrasi dapat menjaga akuntabilitasnya terhadap masyarakat dan membangun kepercayaan yang lebih besar.

Tujuan 2.

“Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas”

Indikator:

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)
- Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Peningkatan Evaluasi Nilai SAKIP dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menjawab tujuan dan sasaran dari perangkat daerah. Adapun target peningkatan nilai SAKIP selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Target Nilai SAKIP di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023	2024	2025	2026
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,84	78,50	79,30	80,01

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik atau kinerja pemerintah. IKM dapat dihitung dengan menggunakan metode survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah atau lembaga riset.
- Hasil survei tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan skor atau indeks yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat, dengan mengetahui indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah dapat mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki layanan yang disediakan.

Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat (%) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40.Target Indeks Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023	2024	2025	2026
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,60	85,00	85,50	86,00

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah (1) Meningkatnya kesejahteraan peternak; (2) Meningkatkan produksi pangan asal hewan atau ternak; dan (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kepuasan masyarakat.

Masing-masing sasaran tersebut, dapat dijabarkan ke dalam beberapa indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kesejahteraan peternak

Indikator:

1. Peningkatan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP) (Skor)

Peningkatan Kesejahteraan Peternak dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani. Pada Bulan Desember 2022, NTP Peternakan

dengan indeks 108,77. Sementara itu, untuk NTP Subsektor lain indeksnya masih di atas 100, terlihat dari nilai NTP Tahun 2022 mencapai 126,03. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya beli petani masih lebih dari biaya produksi. NTP Peternakan dan NTP keseluruhan dapat dilihat dari target berikut.

Tabel 41. Nilai Tukar Pertanian Tahun 2021-2022

No	Lapangan Usaha	NTP	
		2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	120,94	126,03
a	Tanaman Pangan	95,28	92,34
b	Tanaman Hortikultura	106,07	112,32
c	Tanaman Perkebunan	151,1	162,54
d	Peternakan	104,28	108,77
e	Perikanan	101,77	99,42

Sumber : Kalimantan Timur dalam angka BPS, 2023
Keterangan: NTPT = NTP Peternakan, NTP = NTP Pertanian

Semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan, semakin baik daya jual peternak terhadap produk-produk peternakan dibanding daya beli peternak terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibandingkan biaya rumah tangga dan secara relatif lebih sejahtera. Adapun Target NTP Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2023 (Akhir 2022)	Target		
			2024	2025	2026
1	Nilai Tukar Petani Peternak	108,04	108,58	109,12	110,00

Sasaran 2. Meningkatnya produksi pangan asal hewan

Indikator:

1. Produksi Daging

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Tahun 2022 terdapat penurunan produksi daging dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak sapi dan menyerang wilayah

asal bibit ternak di Kalimantan Timur, sehingga bibit ternak luar daerah tidak dapat memasuki wilayah Kalimantan Timur untuk mencegah penularan.

Tabel 43. Target Peningkatan Produksi Daging di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
1	Peningkatan Produksi Daging	74.461	76.024,70	77.773,30	79.717,60

2. Produksi Telur

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun target produksi telur selama 3 (tiga) Tahun dari Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 44. Tabel Target Peningkatan Produksi Telur di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		Awal 2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
1	Peningkatan Produksi Telur	14,834.64	15,294.50	15,799.20	16,352.20

3. Produksi Ternak (Aneka Ternak) Lainnya

Peningkatan Kesejahteraan peternak dengan meningkatkan produksi ternak selain daging, telur dan susu, tetapi juga sumber daya pangan lainnya seperti sarang burung walet, madu kelulut, magot dan hasil lainnya yang dihasilkan dari hewan atau ternak. Peningkatan Produksi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas hewan, pengembangan teknologi dan metode pengolahan

yang lebih efisien yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan peterna dan juga kontribusi subsektor peternakan dalam perekonomian.

Tabel 45. Target Peningkatan Aneka Ternak di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2023 (Akhir 2022)	Target		
			2024	2025	2026
1	Produksi Aneka Ternak Lainnya	166,62	174,95	183,70	192,88

Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat

Indikator:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Penilaian akuntabilitas kinerja perangkat dinas terdiri dari 5 Unsur yaitu (1)Kualitas Perencanaan Kinerja dapat dinilai berdasarkan pada kriteria-kriteria yaitu: (a) Perencanaan kinerja harus memiliki tujuan yang terkait dengan visi, misi, dan strategi organisasi yang jelas dan terukur, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatasan waktu (SMART) (b) Perencanaan kinerja harus mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan dan tepat untuk mengukur pencapaian tujuan (c) Perencanaan kinerja menetapkan target realistis untuk setiap indikator kinerja dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang relevan.

(2) Pengukuran dan Penilaian Kinerja, Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan langkah penting dalam evaluasi kinerja. Dalam hal ini, organisasi perlu memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur yang dapat digunakan untuk melacak pencapaian sasaran. Indikator ini harus relevan, dapat diandalkan, dan dapat diverifikasi. Penggunaan data yang akurat dan up-to-date juga penting untuk mengevaluasi kinerja dengan tepat.

(3) Pelaporan Kinerja, Pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam SAKIP. Organisasi harus memiliki sistem pelaporan yang efektif dan transparan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja kepada pemangku kepentingan. Pelaporan yang baik harus mencakup data yang akurat, ringkas, dan mudah dipahami. Selain itu, pelaporan kinerja harus memuat informasi yang relevan dan menarik bagi pembaca

agar dapat memahami prestasi dan dampak yang telah dicapai oleh organisasi. (4) Pengendalian dan Pengawasan Kinerja, Pengendalian dan pengawasan kinerja adalah unsur penting dalam menjamin kesuksesan evaluasi kinerja. Organisasi perlu memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa sasaran dan indikator kinerja tercapai sesuai dengan rencana. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses evaluasi kinerja. (5) Peningkatan Kinerja, Peningkatan kinerja adalah elemen yang tidak boleh diabaikan dalam SAKIP. Organisasi harus berkomitmen untuk terus-menerus. Target nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 46.Target Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023	2024	2025	2026
1	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP)	75,60	77,07	78,54	80,01

2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM) melaui pengumpulan data tentang persepsi, opini, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, program, atau kebijakan perangkat Dinas. Tujuan dari survei ini adalah untuk memahami pandangan masyarakat terhadap kualitas dan efektivitas layanan yang disediakan serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Survei kepuasan masyarakat dapat membantu pemerintah dan organisasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, mengukur tingkat kepuasan mereka, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan melibatkan responden secara terbuka dan memberikan tindak lanjut.

Tabel 47. Target Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024-2026

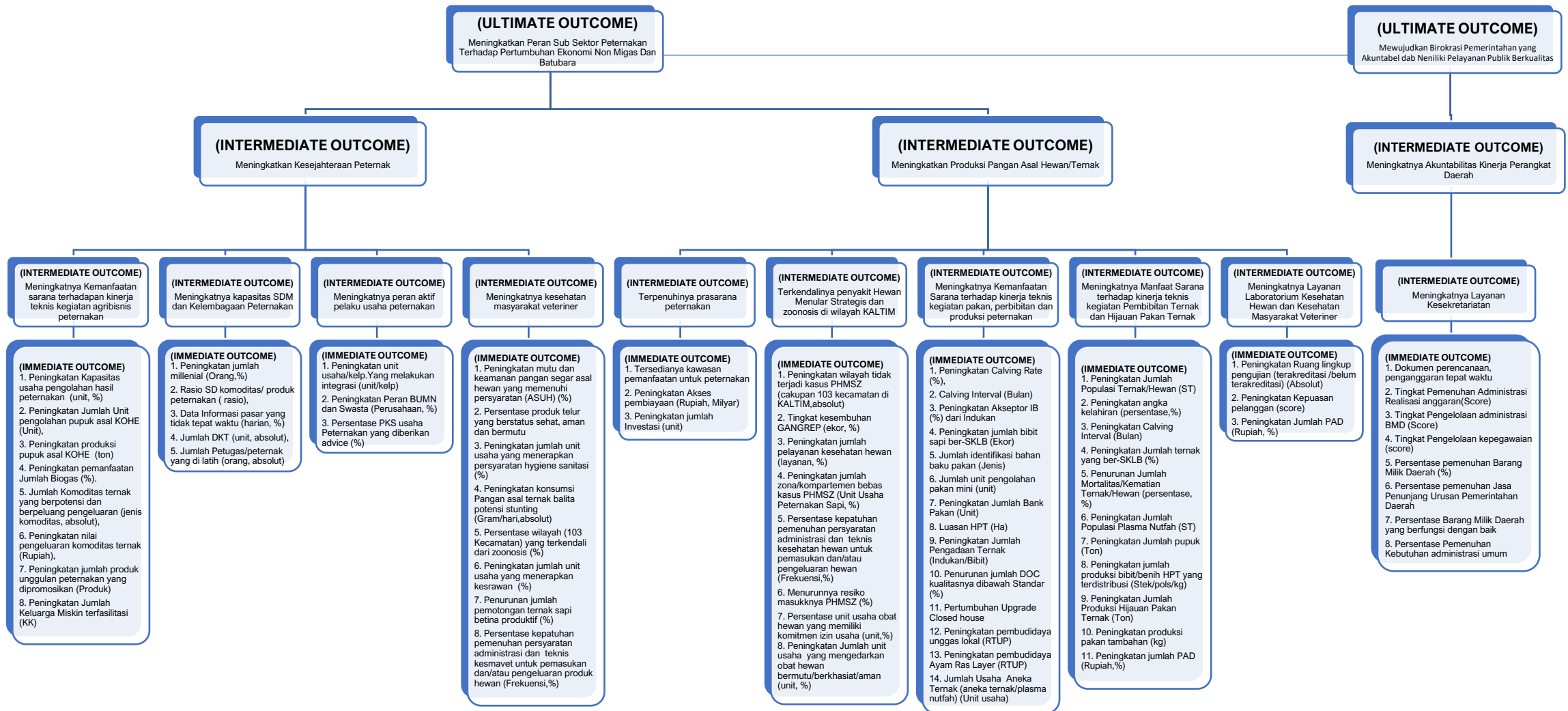
No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
2	Indek Kepuasan Masyarakat	80,25	85,00	85,50	86,00

4.3 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja (Tujuan, Output dan Outcome)

Pohon kinerja membantu dalam menyusun rencana tindakan yang terarah dan terukur serta memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja secara sistematis. Membantu para pemangku kepentingan dalam memahami hubungan antara tujuan, hasil, kegiatan, dan indikator kinerja, dengan menggunakan pohon kinerja, program atau proyek dapat lebih efektif dalam mengelola kinerja dan mengarahkan upaya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kinerja yang telah tersusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, divisualisasikan kedalam pohon kinerja agar memudahkan melakukan evaluasi, dan memahami keterkaitan pada masing masing kinerja bagian/bidang, dapat dilihat pada gambar berikut:

POHON KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Panduan)



.Gambar 10. Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Cascading (penjabaran) kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun melalui proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading dilakukan disusun secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi Bidang/Unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Cascading Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mencapai 2 (Dua) tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana pada lampiran 1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka panjang. Strategi umumnya melibatkan analisis situasi, pengembangan rencana tindakan, dan implementasi dan pengawasan rencana tersebut. Strategi dapat digunakan oleh organisasi, perusahaan, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pengembangan strategi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Analisis situasi: melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan atau visi yang ingin dicapai. Analisis ini akan membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal.
2. Penetapan tujuan: menentukan tujuan atau visi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tujuan harus jelas, spesifik, terukur, dan realistis.
3. Pengembangan strategi: merumuskan strategi yang dapat mencapai tujuan atau visi yang telah ditentukan. Strategi harus realistis, dapat diukur, dan berkelanjutan.
4. Implementasi strategi: melaksanakan strategi yang telah disusun. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penentuan tindakan prioritas, serta pengaturan dan pengawasan implementasi.
5. Pengawasan dan evaluasi: memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan strategi berjalan dengan baik. Jika ada masalah atau perubahan dalam situasi, strategi dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, politik, pendidikan, dan organisasi sosial. Penting untuk memperhatikan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan strategi, serta memastikan bahwa strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan.

Strategi yang disusun Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan telah melalui tahapan-tahapan dalam penyusunan dan perumusannya,

sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Peningkatan Dan Penerapan Teknologi Peternakan
2. Peningkatan Populasi, Produksi Dan Produktifitas Ternak
3. Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak
4. Pemberdayaan Potensi Komoditas Ternak Lokal
5. Peningkatan Status Kesehatan Hewan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Mutu Obat Hewan
7. Peningkatan Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak
8. Peningkatan Pemenuhan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh)
9. Peningkatan Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan
10. Peningkatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan
11. Pengembangan Kawasan Peternakan
12. Penguatan Kemudahan Dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan
13. Peningkatan Peran Swasta Dan Usaha Peternakan Rakyat
14. Peningkatan Kapasitas Sdm Dan Kelembagaan Peternakan
15. Pengendalian Dan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan
16. Peningkatan Populasi, Produksi Dan Produktifitas Ternak
17. Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak
18. Penguatan Layanan Laboratorium Keswan Dan Kesmavet

5.2 Arah Kebijakan Teknis

Arah kebijakan teknis adalah arah atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan yang berhubungan dengan aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan, Kebijakan teknis telah disusun dikelompokkan sebagaimana berikut:

5.2.1 Kebijakan Perbibitan, Pakan Dan Produksi Peternakan

1. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan
2. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi
3. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
4. Menambah jumlah sapi betina produktif
5. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah
6. Mendorong pembangunan pengolahan pakan skala kecil (mini feedmil)
7. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
8. Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka ternak, plasma nutfah)

5.2.2 Kebijakan Kesehatan Hewan

1. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis
2. Mendorong penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit
3. Penjaminan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar
4. Penanganan gangguan reproduksi
5. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan
6. Peningkatan pengawasan Lalu lintas Hewan/ Ternak
7. Analisa Risiko Penyakit Hewan

5.2.3 Kebijakan Kawasan Dan Agribisnis

1. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota
2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial
3. Mendorong dan mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan
4. Mempermudah dan mendorong pelaku usaha peternakan
5. Mengupayakan usaha peternakan untuk keluarga miskin
6. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan
7. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial
8. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan
9. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan

10. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (keluar Kalimantan Timur)
11. Meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan dengan teknologi pengolahan
12. Pengendalian Supply demand produk peternakan

5.2.4 Kebijakan Kesmavet

1. Peningkatan Konsumsi pangan asal hewan yang ASUH dalam upaya berkontribusi menurunkan kasus balita stunting
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyakit zoonosis
3. Peningkatan Mutu dan keamanan produk hewan (ASUH)
4. Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan
5. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
6. Peningkatan penerapan masyarakat terhadap Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)

5.2.5 Kebijakan Teknis Uptd Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak

1. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
3. Peningkatan PAD dari UPTD PTHPT Api-api

5.2.6 Kebijakan Teknis Uptd Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
2. Peningkatan PAD UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

5.3 Indikator Teknis

5.3.1 Bidang Perbibitan, Pakan Dan Produksi Peternakan

1. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi, *Indikator:* Pertumbuhan penerapan teknologi Upgrade Closed house.
2. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak, *Indikator:* Peningkatan Calving Rate (%), Calving Interval (Bulan), Peningkatan Akseptor IB (%) dari Indukan, Peningkatan jumlah bibit sapi ber-SKLB (%), Peningkatan pembudidaya unggas lokal (%), Penurunan

jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar (%), Peningkatan pembudidaya Ayam Ras (%), Menambah jumlah sapi betina produktif.

3. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah, *Indikator:* Peningkatan Jumlah identifikasi bahan baku pakan (Jenis).
4. Mendorong pembangunan pengolahan pakan skala kecil (mini feedmil), *Indikator:* Peningkatan jumlah unit pengolahan pakan mini (unit)
5. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas, *Indikator:* Peningkatan Luasan Hijauan (Ha)
6. Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka ternak, plasma nutfah), *Indikator:* Peningkatan Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) (Unit usaha)

5.3.2 Bidang Kesehatan Hewan

1. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, *Indikator:* Peningkatan wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, %)
2. Mendorong penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit, *Indikator:* Peningkatan jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ (Unit Usaha Peternakan Sapi, %)
3. Penjaminan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar, *Indikator:* Peningkatan Jumlah unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman (unit,%)
4. Penanganan gangguan reproduksi, *Indikator:* 'Tingkat kesembuhan GANGREP (ekor, %).
5. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan, *Indikator:* Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan (ekor, %).
6. Peningkatan pengawasan Lalu lintas Hewan/ Ternak, *Indikator:* 'persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan (Frekuensi,%).
7. Analisa Risiko Penyakit Hewan, *Indikator:* Menurunnya resiko masuknya PHMSZ (%),

5.3.3 Bidang Kawasan Dan Agribisnis

1. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota, *Indikator:* Tersedianya kawasan pemanfaatan untuk peternakan.
2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial, *Indikator:* Peningkatan unit usaha/kelp. Yang melakukan integrasi (unit/kelp, %)
3. Mendorong dan mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan, *Indikator:* Peningkatan Akses pembiayaan (Rupiah, %)
4. Mempermudah dan mendorong pelaku usaha peternakan, *Indikator:* Peningkatan jumlah Investasi (Rupiah, %)
5. Mengupayakan usaha peternakan untuk keluarga miskin, *Indikator:* Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi (KK, %)
6. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan, *Indikator:* Peningkatan Peran swasta (Perusahaan, %)
7. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial, *Indikator:* Peningkatan jumlah peternak millennial (Orang,%)
8. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan, *Indikator:* Jumlah DKT (unit, absolut), Jumlah Petugas/peternak yang di latih (orang, absolut)
9. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan, *Indikator:* Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice (%)
10. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (keluar Kalimantan Timur), *Indikator:* Jumlah Komoditas potensi pengeluaran (jenis komoditas), peningkatan nilai pengeluaran komoditas (Rupiah, %), Peningkatan jumlah komoditas produk unggulan peternakan yang dipromosikan (%)
11. Meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan dengan teknologi pengolahan, *Indikator:* Peningkatan Jumlah Unit pengolahan pupuk asal KOHE (Unit), Peningkatan Jumlah pupuk asal KOHE yang terjual (ton, %), Peningkatan pemanfaatan Jumlah Biogas (Unit,%).
12. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan, *Indikator:* Peningkatan penggunaan biogas.

13. Pengendalian Supply demand produk peternakan, *Indikator:* Rasio SD komoditas/ produk peternakan (dokumen analisa), Data Informasi pasar (harian, absolut).
14. Peningkatan Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan (unit, %), *Indikator:* Persentase usaha pengolahan hasil yang ditingkatkan kapasitasnya (%).

5.3.4 Bidang Kesmavet

1. Peningkatan Konsumsi pangan asal hewan yang ASUH dalam upaya berkontribusi menurunkan kasus balita stunting, *Indikator:* Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak balita stunting (Gram/hari, %)
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyakit zoonosis, *Indikator:* Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis (%)
3. Peningkatan Mutu dan keamanan produk hewan (ASUH), *Indikator:* Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) (%)
4. Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan, *Indikator:* persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan (Frekuensi,%)
5. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia betina produktif, *Indikator:* Penurunan jumlah Pemotongan ternak sapi betina produktif (%)
6. Peningkatan penerapan masyarakat terhadap Kesejahteraan Hewan (Kesrawan), *Indikator:* Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan (%)

5.3.5 UPTD Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak

1. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak, *Indikator:* Peningkatan Jumlah Populasi Ternak/Hewan (ST), Peningkatan angka kelahiran (persentase,%), Peningkatan Calving Interval (Bulan), Peningkatan Jumlah ternak yang ber-SKLB (%), Penurunan Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan (persentase, %),

Peningkatan Jumlah Populasi Plasma Nutfah (ST), Peningkatan Jumlah pupuk (Ton),

2. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas, Indikator: Peningkatan jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi (Stek/pols/kg), Peningkatan Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton), Peningkatan produksi pakan tambahan (kg), Peningkatan jumlah PAD (Rupiah,%).
3. Peningkatan PAD dari UPTD PTHPT Api-api

5.3.6 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet, *Indikator:* Peningkatan Ruang lingkup pengujian (terakreditasi /belum terakreditasi) (Absolut), Peningkatan Kepuasan pelanggan (score)
2. Peningkatan PAD UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional serta dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 3 Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provisini

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDH Tumbuhan dan Mikroorganisme
 - c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan
 - e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan:

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
 - Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis

- e. Kegiatan Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
- 5. Program Perizinan Pertanian
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dala Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Fasilitasi Pemenihan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- 6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawanan, meliputi sub kegiatan:
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka pendanaan serta indikator kinerja Tahun 2024-2026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Program Prioritas yang mendukung RPD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal			Target		Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
I.	Indikator Kinerja Tujuan							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	1.94	1.94	2.00	2.14	2.29	2.45
II.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis							
2	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	Skor	108.04	104,00	108.50	109.12	110.00	110.00
3	Produksi Daging	Ton	74,461,00	76,235.10	76,024.70	77,773.30	79,717.60	79,717.60
4	Produksi Telur	Ton	14,834.60	14,433,00	15,294.50	15,799.20	16,352.20	16,352.20
5	Produksi Aneka Ternak	Ton	166.62	166.62	174.95	183.70	192.88	192.88
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,06	75,60	77,07	78,54	80,01	80,01
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,12	80,25	85,00	85,50	86,00	86,00

Tabel 49. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
I.	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian							
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	83.67	-2	-2.74	-2.75	-3.64	-3.64

Tabel 50. Indikator kinerja Program Prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	72,55	97,19	97,67	97,1	
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Calving Rate	%	60,00	61	61,5	62	
	Persentase Akseptor IB (%) dari Indukan	%	12,14	12,5	13	13,5	
	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	150,00	175	225	280	
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penurunan Jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	2,00	1,95	1,85	1,75	
	Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	46,00	50	60	72	
	Jumlah Pembudidaya Unggas	RTUP	48,865	49,000	49,100	49,300	
	Jumlah Usaha Aneka Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	100	108	119	130	

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	72,55	97,19	97,67	97,1
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah Pengadaan Ternak Indukan/Bibit		1,254	2,700	4,700	7,200
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, Bank Pakan	Unit	10	17	30	40
	Luasan HPT	Ha	1,123	1,150	1,225	1,250
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	Unit	23,26%	25,00	27,00%	29,00%
	Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	383.768	385.000	410.000	435.000
	Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	26,46	30	45,00	55,00
	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	833	860	920	970
	jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	559	600	660	725

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	72,91	88,54	98,73	99
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	133,53	133,70	194,00	204,50
	Angka kelahiran	%	25,46	25,50	26,10	27,00
	Calving Interval	Bulan	17,05	17,01	16,66	16,3
	Persentase ternak yang ber-SKLB	%	0	0,00	5,00	10,00
	Angka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,14	2,13	2,05	1,97
	Jumlah produksi pupuk	Ton	5	10	20	25
	Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/Pols/Kg	6.000	10.000	15.000	20.000
	Jumlah Produksi HPT dan Pakan Tambahan	Ton	1400	1500	1800	1850

	Jumlah PAD	Rupiah	Rp 112.290.000	Rp 113.000.000	Rp 120.000.000	Rp 127.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	92,08	98,68	99,18	99,44
Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Ruang lingkup pengujian (terakreditasi /belum terakreditasi)	Absolut	34	39	45	50
	Nilai Kepuasan pelanggan	Skor	82,18	84,00	86,00	88,31
	Jumlah PAD	Rupiah	Rp 180.000.000	Rp 190.000.000	Rp 212.000.000	Rp 235.000.000
Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	79,51%	81,00%	86,00%	91,00%
	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/Hari	0	27,50	30,50	33,60
	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	5,83%	20,00%	22,50%	26%
Kegiatan Kesejahteraan Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,30%	1,32%	1,41%	1,50%

	Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	25%	24,80%	23,50%	22,00%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08	91,79	92,41	92,45
Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	57,42%	58,00%	60,00%	65,00%
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	63	64	68	72
	Tingkat kesembuhan GANGREP	%	76,10%	76,50%	80,00%	83,00%
	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	%	43,32%	43,50%	45,80%	49,00%

Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	15	23	36	47
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08	91,79	92,41	92,45
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	71,33%	72%	80%	88%
	Persentase Penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	3,47	3,20	2,85	2,40
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko. Retail. Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	1,17	32,90	65,80	100
	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	105	114,00	126	139

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	89,61	93,75	95,63	97,35
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Luasan kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Kawasan	126,00	134,00	147,00	158,00
	Jumlah Nilai Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	102,00	112,20	123,42	135,76
	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	2,00	3,00	4,00	5,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	46,4	99,58	99,67	99,81
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Presentase Jumlah peternak millennial	%	50	75	100	125
	Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	48.865	49.000	49.100	49.300
	Rasio SD komoditas/ produk peternakan	Rasio	1.156	1.154	1.146	1.139
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah DKT	Unit	1	8	13	11

Indikator yang mendukung program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang terdapat pada Bidang Pakan, Perbibitan dan Produksi diantaranya yaitu Peningkatan Calving Rate; Calving Interval; Peningkatan Akseptor IB dari Indukan; Peningkatan Jumlah Bibit Sapi Ber-SKLB; Penurunan Jumlah DOC Kualitasnya dibawah Standar; Pertumbuhan Upgrade Closed House; Peningkatan Pembudidaya Unggas Lokal; Peningkatan Pembudidaya Ayam Ras Layer; Jumlah Usaha Aneka Ternak (Aneka Ternak/Plasma Nutfah); Peningkatan Jumlah Pengadaan Ternak; Jumlah Identifikasi bahan baku pakan; Jumlah Unit Pengolahan Pakan Mini; Peningkatan Jumlah Bank Pakan; Luasan Hijauan Pakan Ternak (HPT);

Pada Bidang Kawasan dan Agribisnis terdapat indikator yaitu Peningkatan Kapasitas Usaha Pengolahan Hasil Peternakan; Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Pupuk asal KOHE; Peningkatan Produksi pupuk asal KOHE; Peningkatan Pemanfaatan Jumlah Biogas; Jumlah Komoditas Ternak yang Berpotensi dan berpeluang pengeluaran; Peningkatan nilai pengeluaran komoditas ternak; Peningkatan Jumlah Produk unggulan peternakan yang dipromosikan; Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi.

Indikator yang mendukung Program Penyuluhan Pertanian yaitu Jumlah Peningkatan Jumlah Peternakan Millennial; Rasio SD Komoditas/Produk Peternakan; Data Informasi Pasar yang tidak tepat waktu; Jumlah DKT; Jumlah Petugas/Peternak yang dilatih.

Indikator yang mendukung pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Bidang Kesehatan Hewan diantaranya yaitu Peningkatan Wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ dengan cakupan 103 kecamatan di Kalimantan Timur; Tingkat kesembuhan GANGREP; Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan; Peningkatan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Kasus PHMSZ; Persentase Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan teknis kesehatan; Persentase Unit Usaha obat hewan yang memiliki komitmen izin usaha; Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat.

Indikator yang mendukung pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner diantaranya yaitu Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan; Persentase Produk Telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu; Peningkatan Jumlah Unit usaha yang menerapkan persyaratan hygiene sanitasi; Peningkatan Konsumsi Pangan asal ternak balita

potensi stunting; Persentase wilayah 103 kecamatan yang terkendali zoonosis; Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang menerapkan kesrawan; Penurunan Jumlah Pemotongan ternak sapi betina produktif; Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untu pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan.

Rancangan

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (3) Tahun yang memuat strategi atau kebijakan umum, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Pada setiap Tahun akan disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RENSTRA, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sehingga tertuang dalam program dan kegiatan. Pendanaan setiap kegiatan akan dihitung secara rinci dan mengacu pada peraturan penganggaran yang dihimpun secara berjenjang melalui Musrenbang.

Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian **Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan.**

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, ST, M.T
Pembina Tingkat I
NIP 19741216 200604 1 006

RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 (3), Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya hutan sebagai salah satu kekayaan alam negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat, dengan tetap memastikan keberlangsungan manfaat ekologis.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki bentang alam hutan hujan tropis yang telah menopang perekonomian daerah dan nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1.844.969 hektare hutan lindung dan 6.055.793 hektare hutan produksi. Selain itu juga terdapat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 591.690 hektare, di mana 64.814,98 hektare merupakan Taman Hutan Raya yang dikelola oleh Provinsi.

Kondisi hutan, sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran masyarakat, telah mengalami penurunan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional dan bertanggung-gugat. Salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hutan, serta meningkatkan perekonomian daerah dan nasional, serta menyejahterakan masyarakat, memerlukan perencanaan pembangunan yang baik.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan pembangunan daerah (provinsi), serta perencanaan strategis perangkat daerah. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 perlu disusun dan ditetapkan pada tahun 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, menyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 ini.

I. 2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2024-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841));
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
 - f) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.249);
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
 - j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
- k) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
 - l) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 - m) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 - n) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 70);
 - o) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
 - p) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);
 - q) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011 – 2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 21), sebagaimana

telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN Lampiran Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 55);

- r) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 71);
- s) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 40);
- t) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

I. 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk:

- a) Menerjemahkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya urusan pembangunan sektor Kehutanan, dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perencanaan sektor kehutanan lainnya;
- b) Memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan bagi Dishut Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Sebagai salah satu acuan pemantauan dan evaluasi bagi Dishut Kaltim, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan secara transparan dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim bertujuan untuk:

- a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, serta rencana program, kegiatan dan anggaran Dishut Kaltim tahun 2024-2026;

- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dishut Kaltim dan UPTD pada Dishut Kaltim setiap tahun selama periode Renstra.

I. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dishut Kaltim tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan pengantar dari dokumen ini yang berisi latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berisikan tugas, fungsi dan struktur Dishut Kaltim, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, dan mitra Dishut Kaltim.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memberikan gambaran permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dishut Kaltim berdasarkan capaian kinerja sebelumnya, serta isu strategis berkaitan dengan urusan pemerintahan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, memuat tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim Tahun 2024-2026, berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat strategi dan arah kebijakan Dishut Kaltim dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim Tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, berisikan rincian program, kegiatan, dan pendanaan Dishut Kaltim Tahun 2024-2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dishut Kaltim melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sektor kehutanan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.

BAB VIII. PENUTUP, merupakan bagian akhir dari dokumen ini yang menggaris- bawahi hal-hal penting saat ini maupun ke depan yang harus diperhatikan agar Renstra Dishut Kaltim dapat berjalan baik.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

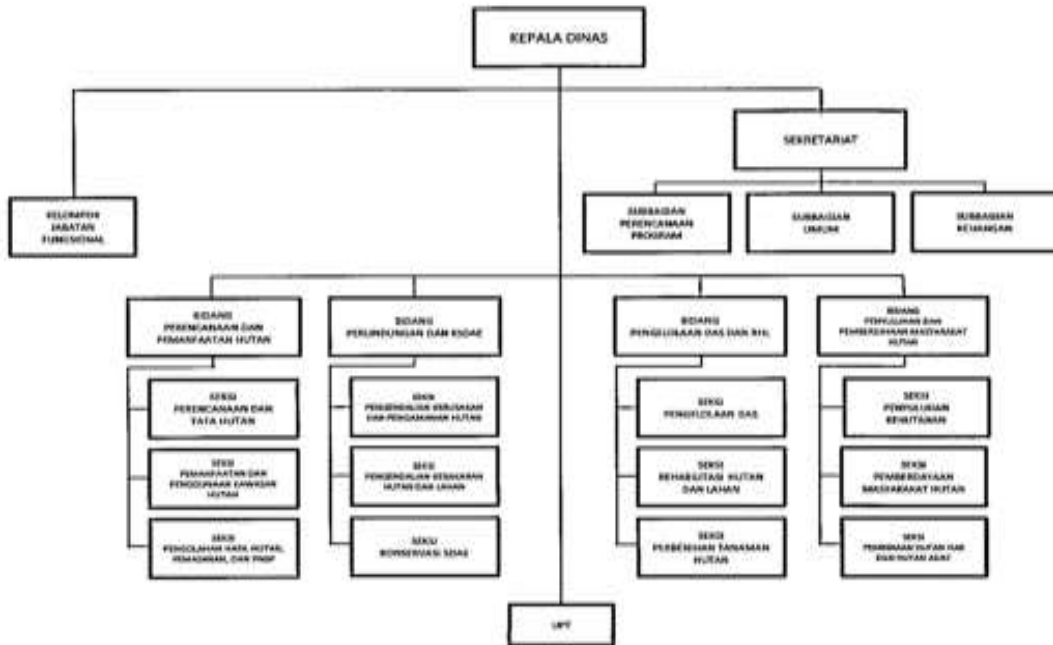
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

- 4) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a) Kepala Dinas,
- b) Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan hutan
 3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- e) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan DAS
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
- f) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan Kehutanan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan
 3. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat



*Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016*

Penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi rencana program dan anggaran
- b) Pengelolaan data dan informasi
- c) Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara,
dan
- d) Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan,
dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.

2) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki tugas pokok: merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
- e) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;
- f) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
- g) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
- h) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu
- i) (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
- j) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;
- k) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;

- 1) Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
- 3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bertugas: merumuskan kebijakan bersifat teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP), perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES, dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
 - b) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
 - c) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (Appendix) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
 - d) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.
 - 4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: merumuskan kebijakan

teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
 - b) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - c) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;
 - d) Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
 - e) Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
 - f) Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
- 5) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
- Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:
- a) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;

- b) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- c) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
- d) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- e) Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur yang meliputi:

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) UPTD dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut;
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XII;
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIV;
 - 3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
 - 4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
 - 5) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVII;
 - 6) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVIII;

- 7) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIX;
 - 8) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVI;
 - 9) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVII;
 - 10) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIX;
 - 11) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXII;
 - 12) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIV;
 - 13) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XX;
 - 14) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXX;
 - 15) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXI;
 - 16) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIII ; dan
 - 17) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Tanah Paser, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIV.
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu :

- 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXX; dan
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat meliputi kawasan hutan di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXII.
- c. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;

- n) pengelolaan urusan ketatausahaan; pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelas A, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II.2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Lindung ;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;

- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan Daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



*Gambar II.3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A*

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto;
- b) pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- d) pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- f) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- g) pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- h) pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- i) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.

- j) pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- k) pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan Tahura.
- l) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m) pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II.4. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

II. 2. Sumber Daya Manusia

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Januari 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 603 orang dengan rincian sebagaimana dalam Tabel II.1. Berdasarkan tingkat Pendidikan, terdapat 12,27% berpendidikan S2 (Magister); 40,13% berpendidikan S1 (Sarjana), 11,61% Diploma yang terdiri dari Diploma 3 dan Diploma 2, 33,00% berpendidikan SLTA dan 1,99 % berpendidikan SLTP, serta 1,00 % berpendidikan Sekolah Dasar. Terkait dengan kompetensi manajerial yang dimiliki sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kaltim dalam menunjang kinerja pelayanan,

tercatat sebanyak 116 orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM dan Adum), dan saat ini telah menduduki jabatan pada level pratama (1 orang), level administrator (13 orang), level pengawas sebanyak 41 orang dan pada level pelaksana sebanyak 703 orang.

Tabel II.1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

NO .	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	12	1	9	3	-	-	9	3	-	-	-	-
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	94	29	6	92	25	-	8	60	5	49	1	-
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	11	2	-	8	5	-	-	5	4	4	-	-
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	2	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	12	7	-	14	5	-	2	10	2	4	1	-
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	10	2	-	6	5	1	-	4	1	6	-	1
5	Kepala UPTD KPHP Bongan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongan	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bongan	15	5	-	15	5	-	1	2	4	12	1	-
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	16	4	-	15	5	-	1	8	2	9	-	-
7	Kepala UPTD KPHP Kendilo	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

[illegible]

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
	Kepala Seksi UPTD KPHP Telake	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Telake	10	2	-	6	6	-	-	6	5	1	-	-
18	Kepala UPTD KPHP Manubar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Manubar	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Manubar	14	5	-	15	4	-	1	10	2	6	-	-
19	Kepala UPTD KPHP Kelinjau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kelinjau	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kelinjau	13	7	-	18	2	-	1	11	1	8	-	-
20	Kepala UPTD KPHL Balikpapan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHL Balikpapan	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHL Balikpapan	15	1	-	14	-	2	-	5	2	7	-	2
21	Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Delta Mahakam	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Delta Mahakam	23	6	-	22	7	-	1	11	7	9	-	1
J U M L A H		478	125	58	418	121	6	74	242	70	199	12	6
JUMLAH PNS		603											

II. 3. Kinerja Pelayanan

Renstra Dishut Kaltim Tahun 2019-2023 telah menetapkan Tujuan dan Sasaran serta target sebagai berikut:

Tabel II.2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian dalam periode sebelumnya

Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Target					Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
Tujuan: Meningkatnya Peran Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,00	1,05	1,06	1,07	1,08	0,93	1,13	1,49	0,81
Sasaran: Meningkatkan penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan	Jumah Penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan	Miliar Rupiah	185	190	125	125	125	184	135	264	224

Berdasarkan Tabel II.2, dapati dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran Renstra Dishut Kaltim tahun 2019-2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh situasi Pandemi COVID-19 yang berlangsung

sejak akhir Desember 2019 dan mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020, serta mencapai puncak gelombang pertama pada Agustus 2020 dan berulang Kembali pada medio 2021. Pada tahun 2022, situasi pandemi berlangsung menurun, seiring dengan meningkatnya penerima vaksin dan tersedianya pengobatan yang lebih baik di berbagai tempat. Kondisi ini menjadikan ekonomi Kembali bergerak, termasuk untuk sub-sektor Kehutanan. Ini juga ditandai dengan meningkatnya kembali capaian, walaupun masih belum mencapai kondisi yang ditargetkan.

Tabel II.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.) Produksi Hasil Hutan Kayu	M3				4.950.000	5.000.000	5.050.000	4.798.049,68	4.470.460,11	5.050.000	96,93	89,41	100
		2.) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton				670	700	730	694,28	826,05	730	103,62	118,98	100
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%				1,25	1,25	1,25	0,12	0,12	1,25	100	100	100
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	Hektare				32.000	32.000	32.000	25.942	48.258	32.000	81,07	150,81	100

4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%				8	13,98	13,98	14,4	14,12	13,98	180	101	100
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%				82	83	84	82	83	84	100	100	100

Tabel II.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Anggaran			Realisasi			Rasio Capaian			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	245.092.289.426	112.009.940.674	211.282.101.422	97.904.199.304	74.141.066.287	211.282.101.422	39,95	66,19	100	17,16	80,35
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.526.788.600	1.681.530.750	12.649.911.900	552.143.752	1.561.643.415	12.649.911.900	12,20	92,87	100	294,72	446,44
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	40.644.411.176	31.031.406.328	50.959.096.932	17.264.230.139	25.806.300.490	50.959.096.932	42,48	83,16	100	20,28	73,47
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.303.750.000	2.385.054.500	3.578.275.000	1.117.339.399	1.585.978.092	3.578.275.000	85,70	66,50	100	66,48	83,78
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.387.395.500	383.200.535.778	279.262.240.433	131.597.622.269	142.250.904.197	279.262.240.433	76,34	37,12	100	47,58	52,21

II. 4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan

II. 4. 1. Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur sangat dipengaruhi dengan perubahan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan, terutama dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021. Walaupun tidak terdapat pengaturan baru di sektor kehutanan dalam UU dan PP tersebut, namun secara pelaksanaan, fungsi KPH dikembalikan sebagai unit pelayanan dan fasilitasi. Kewenangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014, yang diuraikan lebih lengkap dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan SK Mendagri sebagai pemutakhiran nomenklatur.

Tantangan lain adalah pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan KPH pada areal penggunaan lain (APL) ataupun Taman Hutan Raya provinsi. Namun untuk rehabilitasi di Taman Hutan Raya, masih belum tersedia nomenklatur spesifik terkait sub-kegiatan tersebut. Dalam menentukan lokasi pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan pun masih mengalami kesulitan, dikarenakan sebagian Kawasan areal penggunaan lain (APL) telah dibebani perijinan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan KPH dalam pengelolaan hutan, terutama dalam areal pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan, terbatas pada koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Izin Usaha atau kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat dengan UPT KLHK di provinsi. Tantangan ini juga semakin meningkat, di mana produksi hasil hutan kayu merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar untuk sektor kehutanan, namun angka produksi hasil hutan kayu tidak mengalami peningkatan signifikan, dan memiliki kecenderungan semakin menurun di masa datang.

Kebijakan baru di Uni Eropa terkait pencegahan deforestasi telah diberlakukan, melalui EU Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi pada 19 April 2023 dan mulai diberlakukan pada 16 Mei 2023. Kebijakan Uni Eropa tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko penggundulan hutan, terhadap produk yang diekspor ke pasar Eropa, utamanya minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet hingga kedelai. Kebijakan ini akan berdampak

pada pasar kayu Kalimantan Timur yang menjadikan Eropa sebagai tujuan ekspor.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum sebanding dengan luas Kawasan hutan yang dikelola Dinas Kehutanan dan KPH, termasuk dengan terbatasnya perekrutan aparatur sipil negara (ASN) yang baru, menjadikan proses pemenuhan jumlah tenaga teknis lapangan dan proses peningkatan kapasitas SDM memiliki tantangan yang besar.

II. 4. 2. Peluang

Peluang yang mulai dibuka untuk sektor kehutanan adalah dengan adanya Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021, yang mempersiapkan pelaksanaan nilai ekonomi karbon. Peluang provinsi hanya pada berharap adanya pembagian insentif ataupun keuntungan oleh Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang melaksanakan ekonomi karbon. Pun dengan menurunnya nilai pasar “Nature Based Solution” dalam Perdagangan Karbon, dapat menjadikan usaha pemanfaatan hutan dalam kerangka nilai ekonomi karbon masih belum terlalu menarik bagi pengusaha.

Peluang lain dalam pengembangan perhutanan sosial disediakan dalam Pasal 193 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui mengembangkan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial (integrated area development/IAD). Dengan pelaksanaan IAD, dimungkinkan kontribusi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah nasional, serta pihak di luar pemerintah, serta dilakukan lintas sektor, dapat berkontribusi bagi percepatan pelaksanaan perhutanan sosial dengan berbagai macam kegiatan untuk menguatkan kapasitas pelaksana perhutanan sosial.

Peluang lain yang masih terbuka adalah meningkatkan produk hasil hutan bukan kayu, yang memerlukan upaya kuat untuk memperkuat rantai pasok hasil hutan bukan kayu, termasuk membangun kerja sama di luar sektor kehutanan, terutama membangun industri perantara dan industri hilir produk non kayu.

II. 5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan terdiri dari masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan, perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), lembaga perhutanan sosial, kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok tani hutan, dan masyarakat peduli api.

II. 6. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan bersama lembaga lain, diantaranya adalah:

Tabel II.5. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XI, KLHK	a) fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; b) fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; c) pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah IV, KLHK	a) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; c) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; d) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
3.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan, KLHK dan Seksi Wilayah III di Balikpapan	a) pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial; b) pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; c) pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal; d) fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial; e) fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; f) fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; g) pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan; h) penetapan pendamping perhutanan sosial; i) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; j) fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; k) penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; l) pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
4.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, KLHK	a) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; b) evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; c) penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); d) penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; e) koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; f) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial; g) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; h) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;

No	Lembaga	Peran Mitra
5.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau, KLHK	a) penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; b) pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; c) pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; d) pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; e) penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; f) penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air

Selain dengan Kementerian, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga bekerja sama dengan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan sektor kehutanan. Adapun mitra pembangunan tersebut diantaranya adalah:

Tabel II.6. Mitra Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	UNDP Kalimantan Forest Project	Pengelolaan Kawasan berhutan di luar Kawasan hutan di Kabupaten Kutai Timur
2.	USAID-Segar	Peningkatan implementasi tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rantai pasok produksi komoditas sumber daya alam yang menurunkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan menurunkan emisi gas rumah kaca dari pemanfaatan lahan, melalui perhutanan sosial.
3.	GIZ-Propeat	Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut-Lahan Basah di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau
4.	Global Green Growth Institute	Pengembangan dan penguatan kapasitas bisnis rendah karbon, termasuk perhutanan sosial.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

III. 1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan bidang yang ada dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

III. 1. 1. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Kawasan hutan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi ke dalam 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdiri dari 18 unit KPH Produksi dan 2 unit KPH Lindung, serta 1 Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Unit KPH dan Tahura dikelola oleh 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas, kecuali untuk unit KPH Samarinda yang dikelola dalam bentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh Universitas Mulawarman. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang terkait Kehutanan dan Pemerintahan Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebabkan diperlukannya perubahan dari rencana pengelolaan hutan, dalam hal ini Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan juga menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, kontribusi subsektor kehutanan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi kenaikan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi subsektor kehutanan sebesar Rp. 1,12 Milyar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,13 Milyar. Kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,17 Milyar

sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar Rp. 1,04 Milyar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 3.042.557,42 m³ di triwulan ketiga tahun 2022, hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat yaitu curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu, dan biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November 2022). Perkiraan capaian hasil hutan kayu akan meningkat sebesar 4.247.600,41 m³. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendorong yaitu sudah ada peraturan yang menegaskan batas minimal realisasi produksi yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu minimal 50%. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021). Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 658,26 ton di triwulan ketiga tahun 2022 dengan target 700 ton. Walaupun demikian, perkiraan capaian di triwulan keempat optimis 100% target akan tercapai, hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap panen.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan	Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan yang Berkelanjutan	Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		Belum optimalnya Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
		Belum optimalnya Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor	Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kehutanan dan Penggunaan Lahan		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang masih belum optimal.

III. 1. 2. BIDANG PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, drone pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat
	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan Konservasi Provinsi	Belum optimalnya pengelolaan Tahura Provinsi
		Belum optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi
		Belum Optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

III. 1. 3. BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 hektare. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektare. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektare. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektare dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.144,00 hektare. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 184.856,64 hektare dengan persentase 67,15%.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum optimalnya Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan	Terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
		Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih.
	Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi.

III. 1. 4. BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektare. Lambatnya implementasi disebabkan oleh faktor karakter program yang tidak

luwes dalam menghadapi kondisi riil di lapangan seperti keterbatasan areal, rendahnya kapasitas banyak kelompok masyarakat dan ruang yang terbatas bagi modifikasi skema di tingkat lapangan. Hingga tahun 2022 baru mencapai 2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan kategori Gold, 37 kategori Silver, 68 kategori Green dan 107 kategori Blue.

Adapun rumusan permasalahan dan akar masalah pada bidang ini adalah:

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum terwujudnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Belum Optimalnya Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Masih Kurangnya kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

III. 2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2024-2026 harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025, dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, serta memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan. Keempat tujuan pembangunan dan sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing yang dimaksud adalah SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada kabupaten/kota dengan IPM tertinggal (di bawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lulusan SMK/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM. Perwujudan daya saing SDM dilakukan dengan pemerataan taraf pendidikan, pemerataan kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan pemberdayaan gender.
 - 1.1. Sasaran 1. Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat;

- 1.2. Sasaran 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 1.3. Sasaran 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja;
- 1.4. Sasaran 4. Meningkatnya daya saing perempuan.
2. Tujuan 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
 Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan ketahanan dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu menyejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.
 - 2.1. Sasaran 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi;
 - 2.2. Sasaran 6. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
 - 2.3. Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
3. Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 Tujuan ini diarahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, air laut, udara, lahan, bersinergi dengan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
 - 3.1. Sasaran 8. Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan;
 - 3.2. Sasaran 9. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan;
 - 3.3. Sasaran 10. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
4. Tujuan 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
 Tujuan ini dimaksudkan untuk penerapan *core value* ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.
 - 4.1. Sasaran 11. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 tersebut, maka yang berkaitan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1) Tujuan 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

a) Sasaran 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

Berdasarkan Aspek Makro dimana dengan Akar Masalah Masih rendahnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dalam Arti Luas, maka perlu dirumuskanlah Arah Kebijakan, yaitu:

- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan

Dengan Program prioritas:

- Program pengelolaan hutan

2) Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

a) Sasaran 9. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan`

Berdasarkan Aspek Makro dimana dengan Masalah Pokok Meningkatnya Resiko Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Akar Masalah:

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
- Belum optimalnya perlindungan hutan dan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Belum optimalnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan

Maka perlu dirumuskanlah Arah Kebijakan, yaitu:

- Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi.
- Meningkatkan upaya perlindungan Tumbuhan dan satwa liar
- Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat
- Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak
- Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan

- Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial

Program prioritas:

- Program pengelolaan hutan
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
- Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

3) Tujuan 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

- a) Sasaran 11. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK

III. 3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRWP Kaltim) tahun 2016-2036, yang ditetapkan dengan Perda Kaltim No. 1 tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi:

- a. pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
- b. pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
- c. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
- d. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan
- e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan

mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Adapun strategi yang berkaitan dengan sektor Kehutanan adalah strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau, meliputi:

- a. penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
- b. penguatan prinsip kerja sama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB); dan
- c. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.

Di dalam Pola Ruang RTRWP Kaltim, terdapat Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.844.969 hektare, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas kurang lebih 591.690 hektare, dan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih 6.055.793 hektare.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan (budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, budidaya perlebahan dan budidaya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah-buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
- b. pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
- c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;
- d. pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam termasuk kegiatan pertambangan terbuka; dan
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
- b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman hutan raya;
- c. arahan pembatasan di dalam zona pemanfaatan taman hutan raya, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
- d. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakat; dan
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi, meliputi:

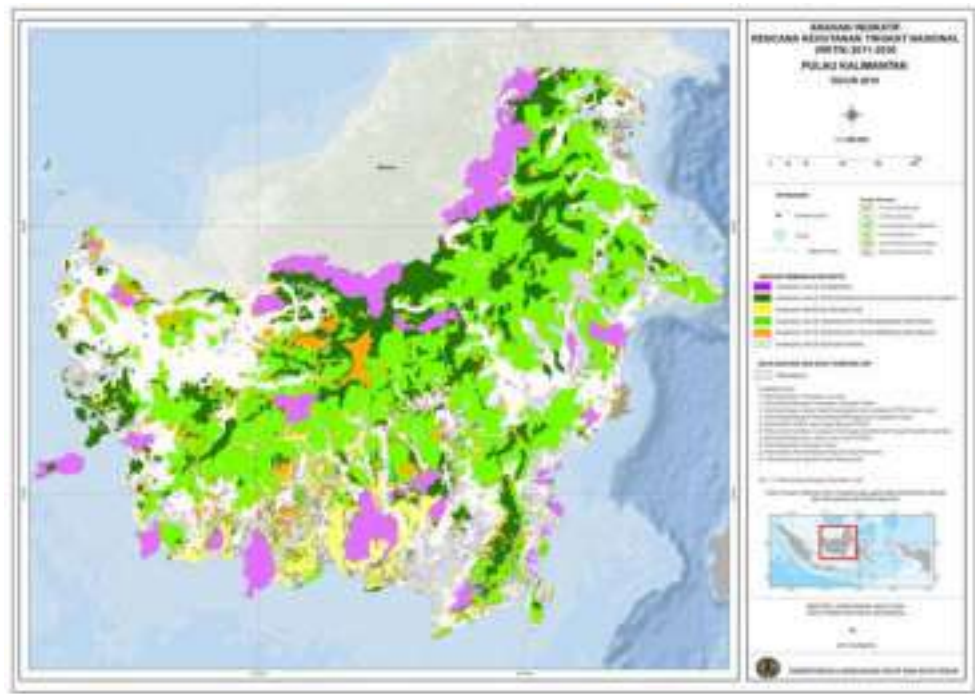
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. arahan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
- d. arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
- e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda Kaltim No. 1 tahun 2016.

III. 4. Telaah Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030

KLHK telah melakukan pembaharuan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional melalui Permen LHK No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Pulau Kalimantan di dalam RKTN Tahun 2011-2030, adalah:

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan
- Peningkatan peran konservasi
- Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan Sustainable Forest Management (SFM) bagi usaha kehutanan
- Pengembangan hutan tanaman.
- Pengembangan industri kehutanan
- Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan



Gambar III.1. Arah-an Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030

Dinas Kehutanan Kaltim juga telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) tahun 2011-2030, yang ditetapkan melalui Pergub

Kaltim No. 19 tahun 2012, yang kemudian diubah melalui Pergub Kaltim No. 55 tahun 2018. Berdasarkan RKTP tersebut, visi pembangunan kehutanan ke depan adalah: “Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur”. Secara terinci cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, kawasan kehutanan dan non-kehutanan)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumber daya dan tapak).

Misi untuk mencapai visi pengurusan hutan provinsi adalah:

- Misi 1. Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta pengembangan multi-produk kehutanan.
- Misi 2. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian, serta pemulihan kawasan hutan.
- Misi 3. Memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian konflik kehutanan dan memperkuat perhutanan sosial.
- Misi 4. Meningkatkan kapasitas pengelola kawasan hutan, utamanya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Arahan indikatif RKTP Kaltim tahun 2011-2030:

Tabel III.1. Hasil Analisis Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030

No.	Arahan/Rencana	Luas (Hektare)
1.	Kawasan untuk Konservasi	326.413
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	1.704.171
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	171.662
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	5.325.861
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	671.689
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	160.513
	Jumlah	8.360.308

ekonomi, dan PP 6 peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Kegiatan Prioritas (KP) pada PP 2 diantaranya pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumberdaya air dan ekosistemnya. KP pada PP 6 diantaranya peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, serta peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Pada PN 2, Kementerian LHK mendukung PP 4 pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, KP pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara. Pada PN 3, Kementerian LHK mendukung PP 6 pengentasan kemiskinan dan PP 7 peningkatan produktivitas dan daya saing. KP pada PP 6 diantaranya keberantaraan usaha dan dampak sosial, reforma agraria, dan perhutanan sosial. KP pada PP 7 yaitu pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Pada PN 6, Kementerian LHK mendukung PP 1 peningkatan kualitas lingkungan hidup, PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan PP 3 pembangunan rendah karbon. KP pada PP 1 diantaranya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan dan kerusakan SDA LH, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. KP pada PP 2 yaitu peningkatan ketahanan iklim. KP pada PP 3 diantaranya pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut.

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra Kementerian LHK) Tahun 2020-2024 sebelumnya yang ditetapkan melalui Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020, yang kemudian dilakukan perubahan Renstra KLHK tahun 2020-2024 dan ditetapkan dengan Permen LHK No. 1 tahun 2022. Visi KLHK adalah “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK tersebut, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni: Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang

mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Misi yang akan dijalankan berjumlah empat yang merepresentasikan tujuan dan sasaran strategisnya, masing-masing mewakili 4 pilar yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola, yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

Sasaran strategis untuk Pilar Lingkungan, kondisi lingkungan hidup dan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, adalah: (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (b) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah; (c) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon; dan (d) Menurunnya laju penyusutan hutan. Sasaran strategis pilar ekonomi, aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, adalah : (a) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah; (b) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan; (c) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*; (d) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pilar sosial, pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan, memiliki sasaran strategis: (a) terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate; (b) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan; (c) Meningkatnya pemanfaatan hutan

oleh masyarakat yang adil dan merata. Sedangkan pilar tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, memiliki sasaran strategis: (a) Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan, (b) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Milestone pembangunan LHK pada tahun 2024 adalah ekonomi sirkular dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.

Dinas Kehutanan Kalimantan Timur perlu mengacu pada Renstra KLHK sebagai dasar penetapan strategi dan arah kebijakan kehutanan Kalimantan Timur.

III. 6. Penentuan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur memberikan gambaran kondisi daerah yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis pembangunan kehutanan. Permasalahan pembangunan kehutanan, serta kebijakan nasional dan provinsi, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2024-2026.

Isu strategis pembangunan sektor Kehutanan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026 meliputi:

III. 6. 1. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

Pemanfaatan hutan masih bertumpu pada produk hasil hutan kayu, yang saat ini mulai mengalami stagnan, seiring dengan semakin tumbuhnya produk pengganti kayu. Perubahan peraturan dan kebijakan kehutanan nasional, diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk hasil hutan, terutama pengembangan pemanfaatan hutan untuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan tetap meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan kayu, sembari memastikan ketercukupan bahan baku untuk Industri Usaha Pengolahan Hasil Hutan, serta mendorong produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

III. 6. 2. PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR KEHUTANAN

Isu perubahan iklim dan perkembangan upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dapat menjadi peluang baru dalam meningkatkan upaya penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan. Terbitnya kebijakan Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink tahun 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai upaya pencapaian target Kontribusi Nasional yang Ditentukan tahun (*Nationally Determined Contribution/NDC*) tahun 2030 dan percepatan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, merupakan ruang bagi sektor Kehutanan Kalimantan Timur untuk berkontribusi dalam upaya tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Hutan dan Lahan (*East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program/EK-JERP*) melalui skema *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-Carbon Fund) yang berlangsung hingga 2024, menjadi potensi diperolehnya insentif finansial karbon untuk mendukung pembangunan sektor Kehutanan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis bidang kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah:

1. Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan

Tujuan ini mengacu pada Sasaran 5 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi dalam Tujuan 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan ini menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kehutanan sebesar 0,67% di tahun 2026.

a) Sasaran 1.1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan. Sasaran 1 ini menargetkan meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan sebesar 8,95 triliun Rupiah di tahun 2026.

2. Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Tujuan ini mengacu pada Sasaran 9 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dalam Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan ini menargetkan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan sebesar 25,49% di tahun 2026.

a) Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Sasaran ini menargetkan penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) sebesar 1,74 juta ton CO₂e di tahun 2026.

3. Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Tujuan ini mengacu pada Sasaran 11 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK dalam Tujuan 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berorientasi Pelayanan Publik RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan ini menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah dengan nilai indeks 86 di tahun 2026,

dan menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah senilai A (80,01) pada Tahun 2026.

a) Sasaran 3. 1. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sasaran ini menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan nilai indeks 86 di tahun 2026, dan menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah senilai A (80,01) pada Tahun 2026.

Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran , Indikator dan Target Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan	%	-8,097	0,45	0,57	0,67	0,67
Sasaran 1.1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	triliun rupiah	8,94	8,84	8,89	8,95	8,95
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	%	81,28	23,32	24,40	25,49	25,49
Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta ton CO ₂ e	5,54	1,59	1,67	1,74	1,74
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	84,41	85	85,5	86	86
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB (78,10)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)	A (80,01)
Sasaran 3.1. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	83	85	85,5	86	86
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB (71,92) (2021)	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)	A (80,01)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. strategi dan arah kebijakan menjadi satu rangkaian dari perumusan suatu perencanaan yang lebih komprehensif yang dapat digunakan sebagai tuntunan atau rujukan bagi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel V.1. Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi SubSektor Kehutanan			
Sasaran 1.1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Strategi 1.1. Meningkatkan produksi hasil hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu	1.1.	Arah Kebijakan 1.1. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
			Arah Kebijakan 1.2. Pembinaan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
			Arah Kebijakan 1.3 Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan			
Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Strategi 2.1. Meningkatkan Pengelolaan Hutan berkelanjutan	2.1.	Arah Kebijakan 2.1. Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi yang baik.
			Arah Kebijakan 2.2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang baik.
	Strategi 2.2. Meningkatkan Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas lahan yang dapat direhabilitasi.	2.2.	Arah Kebijakan 2.3. Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
			Arah Kebijakan 2.4. Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih.
	Strategi 2.3. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui kerja sama para pihak	2.3.	Arah Kebijakan 2.5. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak.
Strategi 2.4. Mengurangi Laju Deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan		Arah Kebijakan 2.6. Optimalisasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat	

Tujuan / Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Strategi 2.5. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP)	Arah Kebijakan 2.7. Meningkatkan upaya pengelolaan Tahura Provinsi
		Arah Kebijakan 2.8. Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi
		Arah Kebijakan 2.9. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
	Strategi 2.6. Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Hutan serta Peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis Perhutanan Sosial	Arah Kebijakan 2.10. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		
Sasaran 3. 1. Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Strategi 3.1. Peningkatan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan serta Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)	Arah Kebijakan 3.1. Meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

VI. 1. Rencana Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur umumnya telah mempertimbangkan program prioritas yang dirumuskan dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024–2026, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kaltim ini bersumber pendanaan dari Pemerintah Daerah.

VI. 1. 1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

Program ini memiliki 7 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pada 3 Bidang (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan indikator kinerja adalah produksi hasil hutan kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu, penurunan emisi GRK sektor Kehutanan, persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi, dan penurunan kerusakan kawasan hutan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
4. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/tahun
7. Perbenihan Tanaman Hutan

VI. 1. 2. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 18 sub-kegiatan, yang menjadi tugas dan fungsi pada bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UPTD Tahura Bukit Soeharto dan 19 UPTD

KPH yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola, jumlah tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran CITES, dan Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

VI. 1. 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat, dan emisi GRK berbasis hutan dari perhutanan sosial. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

VI. 1. 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah luas DAS dan sub DAS yang dikelola dan emisi GRK berbasis hutan di wilayah DAS yang dikelola. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

VI. 1. 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan sub-Bagian Tata Usaha pada 20 UPTD yang berada di

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

VI. 2. Pendanaan

Rencana pendanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 hanya mencakup program dan kegiatan yang didanai oleh dana pemerintah. baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). maupun Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi (DBH SDA DR).

Tabel VI.1. Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28	Dinas Kehutanan					586.992.590.000		535.400.847.000		577.001.767.000			
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Sasaran 1. 1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
				1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.471.286,16	4.420.000	25.324.422.000	4.450.000	25.324.422.000	4.475.000	27.324.422.000	4.475.000	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	826,05	850	5.558.990.000	900	5.558.990.000	950	5.558.990.000	950		
		3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	2.923.546,22	5.153.407,17	22.237.542.000	5.153.407,17	22.237.542.000	5.153.407,17	24.237.542.000	5.153.407,17		
		3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	20	26	4.047.281.000	26	4.047.281.000	26	4.047.281.000	26		
		3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	dokumen	12	9	1.656.693.500	9	1.656.693.500	9	1.656.693.500	27		
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	90	90	13.081.771.500	90	13.081.771.500	91	15.081.771.500	91		
		3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	dokumen	4	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	12		
		3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	dokumen	50	50	2.851.796.000	50	2.851.796.000	50	2.851.796.000	50		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kawasan Hutan Produksi	Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan											
		3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektare	5153407,17	5.153.407,17	4.784.400.000	5.153.407,17	4.784.400.000	5.153.407,17	4.784.400.000	5.153.407,17		
		3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	unit manajemen	2	9	4.784.400.000	9	4.784.400.000	9	4.784.400.000	9		
		3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil produksi izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	meter kubik	21.000	21.000	3.861.470.000	21.000	3.861.470.000	21.000	3.861.470.000	21.000		
		3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	unit manajemen	48	774.590.000	48	774.590.000	48	774.590.000	48	48		
		3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	dokumen	51	1.414.920.000	51	1.414.920.000	51	1.414.920.000	51	51		
		3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	unit manajemen	13	1.671.960.000	13	1.671.960.000	13	1.671.960.000	13	13		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Sasaran 2. 1 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47	0,47	89.670.958.000	0,71	92.830.132.000	0,95	102.670.958.000	0,95		
				2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,12	1,00	135.892.372.000	1,00	114.300.629.000	1,00	125.760.723.000	1,00		
		3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	24	19	57.255.127.100	19	35.663.384.100	19	35.663.384.100	19		
		3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	dokumen	3	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2		
		3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit KPH/L yang telah dilakukan pembagian blok	unit	14	14	2.050.260.100	14	2.050.260.100	14	2.050.260.100	14		
		3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasional resor dan kantor resor KPH yang terbangun	unit	304	262	54.009.867.000	258	32.418.124.000	256	32.418.124.000	256		
		3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	dokumen	7	10	970.000.000	10	970.000.000	10	970.000.000	10		
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun kecuali	dokumen	7	20	10.031.256.150	20	10.031.256.150	20	10.031.256.150	20		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Konservasi (KPHK)	pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	33	29	10.031.256.150	29	10.031.256.150	29	10.031.256.150	29		
		3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	1.366	1.200	85.099.333.000	1.200	86.558.507.000	1.200	96.399.333.000	3.600		
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	dokumen	16	16	2.842.862.000	16	2.842.862.000	16	2.842.862.000	16		
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan di Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	hektare	941	1.200	67.706.550.500	1.200	69.165.724.500	1.200	79.006.550.500	3.600		
		3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	unit	100	103	2.000.000.000	103	2.000.000.000	103	2.000.000.000	103		
		3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	laporan	35	43	12.549.920.500	43	12.549.920.500	43	12.549.920.500	43		
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	10.402	7.929.179,13	68.605.988.750	7.929.179,13	68.605.988.750	7.929.179,13	80.066.082.750	7.929.179,13		
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	10.385	938.660	2.318.473.000	938.660	2.318.473.000	938.660	2.318.473.000	938.660		
		3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	1.555.516	3.061.189,54	4.588.098.000	3.061.189,54	4.588.098.000	3.061.189,54	4.588.098.000	3.061.189,54		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Program/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kawasan Hutan												
		3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	operasi	1	6	2.435.342.000	6	2.435.342.000	6	2.435.342.000	6		
		3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	dokumen	155	156	15.144.413.000	156	15.144.413.000	166	21.104.507.000	166		
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	laporan	361	354	44.119.662.750	354	44.119.662.750	355	49.619.662.750	355		
		3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah SK	27	20	4.571.625.000	20	6.271.625.000	20	6.271.625.000	20		
				2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	Sertifikat	19	10		10		10		10		
		3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	unit usaha	27	23	2.307.422.000	26	4.007.422.000	26	4.007.422.000	20		
		3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	19	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	30		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	laporan	57	80	1.364.203.000	80	1.364.203.000	80	1.364.203.000	75		
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	hektare	72.311,38	610.540,98	18.556.035.000	730.007,98	18.556.035.000	930.007,98	18.556.035.000	930.007,98		
		3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	hektare	64.814,98	64.814,98	11.813.505.000	64.814,98	11.813.505.000	64.814,98	11.813.505.000	64.814,98		
		3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	operasi	5	12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	12		
		3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	hektare	400	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250		
		3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa	1	3	813.505.000	3	813.505.000	3	813.505.000	3		
		3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	spesies	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2		
		3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES											
		3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	hektare	7.496,4	545.726	6.642.530.000	665.193	6.642.530.000	865.193	6.642.530.000	865.193		
		3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	hektare	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50		
		3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	orang	450	570	2.327.191.200	570	2.327.191.200	570	2.327.191.200	570		
		3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	hektare	100.000	100.000	4.215.338.800	100.000	4.215.338.800	100.000	4.215.338.800	100.000		
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	48.258	20.000	35.367.302.000	20.000	35.367.302.000	20.000	41.167.302.000	60.000		
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	10	20	35.296.415.000	20	35.296.415.000	20	45.796.415.000	60		
		3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	kelompok	20	90	70.663.717.000	90	70.663.717.000	110	86.963.717.000	290		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	pemberdayaan masyarakat											
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	orang	102	266	21.262.346.500	266	21.262.346.500	308	26.262.346.500	308		
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	76	168	14.034.068.500	168	14.034.068.500	183	19.534.068.500	183		
		3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	hektare	66346	60.000	35.367.302.000	60.000	35.367.302.000	60.000	41.167.302.000	60.000		
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	hektare	258.130,31	10.104	4.289.275.000	196.336	4.289.275.000	358.190	4.289.275.000	358.190		
		3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	4.289.275.000	1	4.289.275.000	1	4.289.275.000	1		
		3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1		
		3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	7	8	1.411.000.000	8	1.411.000.000	8	1.411.000.000	8		
		3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	orang	6	300	1.928.275.000	300	1.928.275.000	300	1.928.275.000	300		
		3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan	Jumlah lembaga yang dibentuk dan	Laporan	4	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pengelolaan DAS	dikembangkan dalam forum pengelolaan DAS											
Tujuan 3. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Sasaran 3. 1 Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	81	191.764.977.000	83	158.605.803.000	85	160.605.803.000	85		
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	45.271.844.000	100	45.271.844.000	100	45.271.844.000	100		
		3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	2.813.200.000	100	2.813.200.000	100	2.813.200.000	100		
		3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4		
		3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2		
		3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	367.800.000	2	367.800.000	2	367.800.000	2		
		3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2		
		3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	4	945.400.000	4	945.400.000	4	945.400.000	4		
		3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	105.403.469.100	100	105.403.469.100	100	105.403.469.100	100		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	615	550	99.911.996.000	550	99.911.996.000	550	99.911.996.000	550		
		3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	202	203	3.647.852.000	203	3.647.852.000	203	3.647.852.000	203		
		3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24	37	1.153.356.000	37	1.153.356.000	37	1.153.356.000	37		
		3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	4	48.832.700	4	48.832.700	4	48.832.700	4		
		3.28.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1		
		3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	35	66	341.432.400	66	341.432.400	66	341.432.400	66		
		3.28.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1		
		3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	100	100	940.700.000	100	940.700.000	100	940.700.000	100		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	21	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2		
		3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	21	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4		
		3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	3	7	25.200.000	7	25.200.000	7	25.200.000	7		
		3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	13	670.000.000	13	670.000.000	13	670.000.000	13		
		3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	34	224.000.000	34	224.000.000	34	224.000.000	34		
		3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1		
		3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	5.120.196.000	100	5.120.196.000	100	5.120.196.000	100		
		3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	713	254	2.511.693.000	254	2.511.693.000	254	2.511.693.000	254		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1		
		3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	10	32	245.280.000	32	245.280.000	32	245.280.000	32		
		3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	2	302.466.000	2	302.466.000	2	302.466.000	2		
		3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	68	363	1.890.000.000	363	1.890.000.000	363	1.890.000.000	363		
		3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	29	70.757.000	29	70.757.000	29	70.757.000	29		
		3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100	100	21.475.816.000	100	21.475.816.000	100	21.475.816.000			
		3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	158	61	240.819.000	61	240.819.000	61	240.819.000	61		
		3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	184	164	4.843.968.000	164	4.843.968.000	164	4.843.968.000	164		
		3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	139	98	717.781.000	98	717.781.000	98	717.781.000	98		
		3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	76	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000	53		
		3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	82	69	529.214.000	69	529.214.000	69	529.214.000	69		
		3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	dokumen	48	86	8.243.000	86	8.243.000	86	8.243.000	86		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			dan Peraturan Perundang-Undangan	dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan											
		3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	465	364	14.347.218.000	364	14.347.218.000	364	14.347.218.000	364		
		3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	202.611.000	1	202.611.000	1	202.611.000	1		
		3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	6	525.962.000	6	525.962.000	6	525.962.000	6		
		3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100	100	58.227.441.700	100	27.607.467.700	100	29.419.667.700	100		
		3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1	494.890.000	1	494.890.000	1	494.890.000	1		
		3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	166	45	860.378.400	45	860.378.400	45	860.378.400	45		
		3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	803	397	47.828.451.000	200	17.208.477.000	214	19.020.677.000	214		
		3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	14	6.394.755.200	14	6.394.755.200	14	6.394.755.200	14		
		3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	7	1.989.470.000	7	1.989.470.000	7	1.989.470.000	7		
		3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	8	5	659.497.100	5	659.497.100	5	659.497.100	5		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Lainnya yang Disediakan											
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	23.796.028.000	100	23.796.028.000	100	23.796.028.000	100		
		3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	142	91	107.142.000	91	107.142.000	91	107.142.000	91		
		3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	242	208	4.054.264.000	208	4.054.264.000	208	4.054.264.000	208		
		3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	14	581.384.000	14	581.384.000	14	581.384.000	14		
		3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	242	205	19.053.238.000	205	19.053.238.000	205	19.053.238.000	205		
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	%	100	100	19.259.970.200	100	16.720.770.200	100	16.908.570.200	100		
		3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	14	6	234.808.500	6	234.808.500	6	234.808.500	6		
		3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	579	699	8.956.206.880	699	6.417.006.880	699	6.604.806.880	699		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2		
		3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	252	945	1.592.634.000	945	1.592.634.000	945	1.592.634.000	945		
		3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	21	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1		
		3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	14	14	4.921.696.520	14	4.921.696.520	14	4.921.696.520	14		
		3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	6	25	2.450.128.800	25	2.450.128.800	25	2.450.128.800	25		
		3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	3	3	1.085.495.500	3	1.085.495.500	3	1.085.495.500	3		
			Jumlah					586.992.590.000		535.400.847.000		577.001.767.000			

Rincian anggaran untuk setiap unit, bidang dan UPTD pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada bagian lampiran.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII. 1. Indikator capaian

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang/UPTD di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel VII.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	Target		
				2024	2025	2026
Tujuan 1. Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan	%	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : 1. $PDRB_t$: Nilai PDRB Tahun Sekarang (harga konstan) 2. $PDRB_{t-1}$: Nilai PDRB Tahun Sebelumnya (harga konstan)	0,45	0,57	0,67
Sasaran 1.1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	triliun rupiah	Produksi Hasil Hutan Kayu X Harga Kayu Berlaku	8,84	8,89	8,95
Tujuan 2. Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	%	$\frac{AER_b - ER_{tr}}{ER_b} \times 100\%$ Keterangan : ER= Penurunan emisi (%) AER_b: Rerata emisi GRK pada periode baseline (2006-2020) (tonCO2e) ER_tr = Emisi GRK pada tahun target (tonCO2e)	23,32	24,40	25,49
Sasaran 2.1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	juta ton CO ₂ e	Baseline Emisi – Emisi GRK (LUCt) Keterangan : LUC= Land Use Change/Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan Baseline= Tahun referensi, mengikuti tahun referensi 2 nd FRL Indonesia, yaitu dari tahun 2006-2020	1,59	1,67	1,74

Tabel VII.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
IKK Outcome						
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah Total Usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\%$	75,00	75,75	78,78	78,78
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	$\frac{\text{Jumlah Hutan yang Rusak}}{\text{Jumlah Hutan Keseluruhan}} \times 100\%$	1%	1%	1%	1%
3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	$\frac{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi yang di Rehabilitasi (Ha)}}{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi (Ha)}} \times 100\%$	89,00	93,07	97,14	97,14
IKK Output						
1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	dokumen	Dokumen Penataan Hutan KPH yang dibuat dalam 1 Tahun	19	19	19	19
2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	dokumen	Dokumen RPHJP dan RPHJPd yang Disahkan dalam 1 Tahun	19	19	19	19
3. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	dokumen	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang dibuat dalam 1 Tahun	20	20	20	20

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
4. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	dokumen	Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 Provinsi yang dibuat dalam 1 Tahun	1	1	1	3
5. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	hektare	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi dalam 1 Tahun	1.200	1.200	1.200	3.600
6. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	hektare	Luas Kebakaran Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam 1 Tahun	300	300	300	300
7. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	hektare	Luas Gangguan Kawasan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) dalam 1 Tahun	10.200	10.200	10.200	10.200
8. Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m ³ per tahun yang aktif	meter kubik (m ³)	Jumlah Produksi hasil izin usaha industri primer Hasil Hutan Kayu dalam 1 Tahun	21.000	22.000	23.000	66.000
9. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	desa	Masyarakat Desa yang diberdayakan di Daerah Penyangga dalam 1 Tahun	6	6	6	18
10. Pemulihan ekosistem pada Tahura	hektare	Luas Ekosistem pada Tahura yang di Pulihkan dalam 1 Tahun	400	400	400	12.000
11. Menurunnya gangguan kawasan Tahura	hektare	Luas Gangguan Pada Kawasan Hutan Tahura yang di Amankan dalam 1 Tahun	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98
12. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Tersedia dalam 1 Tahun	39	42	45	45
13. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kegiatan Penyuluhan yang disediakan dalam 1 Tahun	145	145	145	145

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
14. jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam 1 Tahun	17	17	17	51
15. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	kelompok	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Kelompok Perhutanan Sosial yang Difasilitasi dalam 1 Tahun	20	20	20	60
16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	forum	Jumlah Forum Komunikasi DAS yang dibentuk dalam 1 Tahun	1	1	1	3

VII. 2. Target Kinerja

Tabel VII.3. Target Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.471.286,16	4.420.000	4.445.000	4.475.000	4.475.000
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	826,05	850	900	950	950
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	2.923.546,22	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	20	26	26	26	26
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	dokumen	12	9	9	9	27
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	90	90	90	91	91

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	dokumen	4	4	4	4	12
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	dokumen	50	50	50	50	50
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektare	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17	5.153.407,17
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	unit manajemen	2	9	9	9	9
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	meter kubik	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	unit manajemen	9	48	48	48	48

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	dokumen	31	51	51	51	51
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	unit manajemen	15	13	13	13	13
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	1). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47	0,47	0,71	0,95	0,95
	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	24	19	19	19	19

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah KPH yang disusun	Dokumen	3	2	2	2	2
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	unit	14	14	14	14	14
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	unit	304	262	258	256	256
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	7	10	10	10	10
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	7	20	20	20	20
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	33	29	29	29	29

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	1.366	1.200	1.200	1.200	1.200
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	dokumen	16	16	16	16	16
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	hektare	941	1.200	1.200	1.200	3.600
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	unit	100	103	103	103	103
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	laporan	35	43	43	43	43
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	10.402	7.929.179,13	7.929.179,13	7.929.179,13	7.929.179,13
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	10.385	938.660	938.660	938.660	938.660
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	hektare	1.555.516	3.061.189,54	3.061.189,54	3.061.189,54	3.061.189,54
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	operasi	1	6	6	6	6

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	dokumen	155	156	156	166	166
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	laporan	361	354	354	355	355
Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	jumlah SK	27	20	20	20	20
	2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih ya ng terverifikasi"	Sertifikat	19	10	10	10	10
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	unit usaha	27	23	26	26	26
Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	19	20	20	20	20

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	laporan	57	80	80	80	80
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	hektare	72.311,38	610.540,98	730.007,98	930.007,98	930.007,98
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	hektare	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	operasi	5	12	12	12	12
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	hektare	400	250	250	250	250
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa	1	3	3	3	3
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	spesies	2	2	2	2	2

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi							
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	1	1	1	1
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	hektare	7.496,4	545.726	665.193	865.193	865.193
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	hektare	50	50	50	50	50
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	orang	450	570	570	570	570
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	hektare	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	48.258	20.000	20.000	20.000	60.000
	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	10	20	20	20	60
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	20	90	90	110	290
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	102	266	266	308	308
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	76	168	168	183	183
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	hektare	66.346	20.000	20.000	20.000	60.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	hektare	258.130,31	10.104	196.336	358.190	358.190

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	1	1	1
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	7	8	8	8	8
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	6	300	300	300	300
Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah lembaga yang dibentuk dan dikembangkan dalam forum pengelolaan DAS	laporan	4	1	1	1	1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							-
	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81	81	83	85	85
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	4	4	4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	2	2	2
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	4	4	4	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100	100	100	100	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	615	550	550	550	550
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	202	203	203	203	203
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	24	37	37	37	37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	4	4	4	4
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	laporan	35	66	66	66	66

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
	Triwulanan/Semestera n SKPD						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	100	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	21	2	2	2	2
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	21	4	4	4	4
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	3	7	7	7	7

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	13	13	13	13
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	34	34	34	34
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	713	254	254	254	254
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	10	32	32	32	32
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	2	2	2	2

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	68	363	363	363	363
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	29	29	29	29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	158	61	61	61	61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	184	164	164	164	164
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	139	98	98	98	98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	76	53	53	53	53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	82	69	69	69	69
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	48	86	86	86	86

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	465	364	364	364	366
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	1	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3	6	6	6	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100	100	100	100	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1	1	1	1
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	166	45	45	45	45
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	803	397	200	214	214
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	14	14	14	14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	7	7	7	7

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	8	5	5	5	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	142	91	91	91	91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	242	208	208	208	208
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	14	14	14	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	242	205	205	205	205
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	%	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	unit	14	6	6	6	6

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Capaian			
				2024	2025	2026	Target Akhir
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	579	699	699	699	699
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	2	2	2	2	2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	712	945	945	945	945
Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	21	1	1	1	1
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	unit	14	14	14	14	14
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	6	25	25	25	25
Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	3	3	3	3	3

BAB VIII. PENUTUP

Pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan terpilihnya Gubernur Kalimantan Timur sebagai hasil dari pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode tersebut menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu, perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan yang dapat mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan target-target pembangunan sektor Kehutanan dapat tercapai sesuai rencana.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan sektor Kehutanan dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan KLHK dan UPT KLHK, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah daerah sekitar ,terutama badan otorita IKN, serta masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya.
2. Renstra Dishut Kaltim menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renja Dishut Kaltim) tahun 2024, 2025 dan 2026.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Dishut Kaltim dengan menggunakan evaluasi hasil Renja Dishut Kaltim secara periodik.

4. Renstra Dishut Kaltim menjadi salah satu tolok ukur kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Samarinda, April 2023
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.

NIP. 19750807 200003 1 003

BAB IX. LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Pendanaan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	156.646.092.580,00	131.830.004.280,00	133.212.947.140,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	2.813.200.000	2.813.200.000	2.813.200.000
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	4	4	4	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	367.800.000	367.800.000	367.800.000
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	945.400.000	945.400.000	945.400.000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	101.459.506.800,00	101.459.506.800,00	101.459.506.800,00
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	12	550	550	550	99.911.996.000	99.911.996.000	99.911.996.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	20	20	20	743.332.000	743.332.000	743.332.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	1	1	1	350.640.000	350.640.000	350.640.000
3.28.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	4	4	4	153.538.800	153.538.800	153.538.800
3.28.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	960.916.000,00	960.916.000,00	960.916.000,00
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	147	5	5	5	511.693.000,00	511.693.000,00	511.693.000,00
3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	2	2	302.466.000,00	302.466.000,00	302.466.000,00
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	12	12	12	46.757.000,00	46.757.000,00	46.757.000,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	4.089.935.000	4.089.935.000	4.089.935.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	12	12	12	56.819.000,00	56.819.000,00	56.819.000,00
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	487.968.000,00	487.968.000,00	487.968.000,00
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	140.281.000,00	140.281.000,00	140.281.000,00
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	43.606	12	12	12	163.714.000,00	163.714.000,00	163.714.000,00
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	12	12	12	2.643.000,00	2.643.000,00	2.643.000,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
		undangan yang Disediakan								
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	208	12	12	12	2.558.733.240,00	2.558.733.240,00	2.558.733.240,00
3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	202.611.000,00	202.611.000,00	202.611.000,00
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	6	6	6	525.962.000,00	525.962.000,00	525.962.000,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	40.365.851.000,00	15.670.677.000,00	17.044.677.000,00
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	73	50	50	50	40.365.851.000,00	15.670.677.000,00	17.044.677.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	4.541.892.640,00	4.541.892.640,00	4.541.892.640,00
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	16.956.400,00	16.956.400,00	16.956.400,00
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	1.227.077.600,00	1.227.077.600,00	1.227.077.600,00
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	236.028.000,00	236.028.000,00	236.028.000,00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	3.061.830.640,00	3.061.830.640,00	3.061.830.640,00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	1.845.994.900,00	1.725.080.600,00	1.734.023.460,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	6	6	234.808.500,00	234.808.500,00	234.808.500,00
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	64	64	64	857.235.700,00	736.321.400,00	745.264.260,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	140	140	140	409.950.700,00	409.950.700,00	409.950.700,00
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	4	4	4	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	10.074.172.000,00	10.074.172.000,00	10.474.172.000,00
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	14	5.153.407	5.153.407	5.153.407	7.453.542.000	7.453.542.000	7.853.542.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	9	4	4	4	1.242.281.000,00	1.242.281.000,00	1.242.281.000,00
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	2	2	2	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3	2	2	2	1.859.465.000,00	1.859.465.000,00	2.259.465.000,00
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	50	50	50	50	2.851.796.000,00	2.851.796.000,00	2.851.796.000,00
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	15	16.499	16.499	16.499	3.320.630.000,00	3.320.630.000,00	3.320.630.000,00
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	9	48	48	48	774.590.000,00	774.590.000,00	774.590.000,00
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	24	28	28	28	874.080.000,00	874.080.000,00	874.080.000,00
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	15	13	13	13	1.671.960.000,00	1.671.960.000,00	1.671.960.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	43.191.282.911,00	45.495.456.911,00	54.843.819.691,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
		luas lahan yang dapat direhabilitasi								
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	19	19	19	19	518.000.000	518.000.000	518.000.000
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	518.000.000	518.000.000	518.000.000
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	20	20	20	1.514.852.000	1.514.852.000	1.514.852.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	2	2	2	1.514.852.000	1.514.852.000	1.514.852.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	530	250	250	250	25.409.338.131,00	25.063.512.131,00	26.924.338.131,00
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	7	1	1	1	560.757.630,00	560.757.630,00	560.757.630,00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	500	548	548	548	15.741.550.500,00	15.395.724.500,00	17.256.550.500,00
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	100	100	100	100	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	23	20	20	20	7.507.030.001,00	7.507.030.001,00	7.507.030.001,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	8	7.929.179	7.929.179	7.929.179	11.727.467.780,00	12.127.467.780,00	19.615.004.560,00
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	1	6	6	6	2.435.342.000,00	2.435.342.000,00	2.435.342.000,00
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	4	6	6	6	4.404.589.000,00	4.404.589.000,00	7.904.589.000,00
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	7	7	7	4.887.536.780,00	5.287.536.780,00	9.275.073.560,00
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	1.) Jumlah SK; 2.) Sertifikat	96	101	105	105	4.021.625.000	6.271.625.000	6.271.625.000
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	20	22	26	26	1.757.422.000,00	4.007.422.000,00	4.007.422.000,00
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	19	20	20	20	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	57	80	80	80	1.364.203.000,00	1.364.203.000,00	1.364.203.000,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	5.254.868.800,00	5.254.868.800,00	5.254.868.800,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
		Konservasi Provinsi yang dikelola								
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	7.496	545.675	665.142	865.142	5.826.687.000	5.826.687.000	5.826.687.000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	21	450	450	450	1.739.530.000,00	1.739.530.000,00	1.739.530.000,00
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Hektar	100.000	100.000	100.000	100.000	3.515.338.800,00	3.515.338.800,00	3.515.338.800,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	34.924.564.841	34.924.564.841	38.974.564.841
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	15	17	17	17	34.658.087.341,00	34.658.087.341,00	38.708.087.341,00
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	69	124	124	136	18.157.078.691,00	18.157.078.691,00	19.207.078.691,00
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	22	90	90	90	3.650.760.000,00	3.650.760.000,00	5.650.760.000,00
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	53.820	20.000	20.000	20.000	12.850.248.650,00	12.850.248.650,00	13.850.248.650,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	DINAS KEHUTANAN						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							253.109.498.632,00	230.597.584.332,00	245.778.889.972,00
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	258.130	10.104	196.336	358.190	3.284.995.000,00	3.284.995.000,00	3.284.995.000,00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	17	1	1	1	3.284.995.000	3.284.995.000	3.284.995.000
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	6	6	6	6	406.720.000,00	406.720.000,00	406.720.000,00
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	6	300	300	300	1.928.275.000,00	1.928.275.000,00	1.928.275.000,00
3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Laporan	1	1	1	1	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Lampiran 2. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Balikpapan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Balikpapan							19.164.500.104,00	14.119.776.294,00	14.766.481.614,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.717.636.187,00	3.173.521.902,00	3.213.764.759,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	179.820.000,00	179.820.000,00	179.820.000,00
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	148.100.000,00	148.100.000,00	148.100.000,00
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	12	12	12	31.720.000,00	31.720.000,00	31.720.000,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	88	200	200	200	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	15	15	15	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	902.924.238,00	902.924.238,00	902.924.238,00
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8	8	8	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50	50	50	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	20	20	20	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	530.000.000,00	106.800.000,00	138.100.000,00
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	40	13	14	530.000.000,00	106.800.000,00	138.100.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.159.191.260,00	1.159.191.260,00	1.159.191.260,00
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1	1	1	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	167.324.700,00	167.324.700,00	167.324.700,00
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	908.116.560,00	908.116.560,00	908.116.560,00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	740.700.689,00	619.786.404,00	628.729.261,00
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	41	41	41	412.350.689,00	291.436.404,00	300.379.261,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	50	50	50	38.350.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00

3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3	3	3	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	13.442.583.917,00	8.941.974.392,00	9.048.436.855,00
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	7.265.583.917	3.419.974.392	2.756.436.855
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	1	1	1	425.956.000	425.956.000	425.956.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3	20	20	20	6.839.627.917	2.994.018.392	2.330.480.855
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000

3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.497.170	7.497.170	7.497.170	2.592.000.000	2.392.000.000	2.742.000.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	12	12	12	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	12	12	12	1.842.000.000	1.642.000.000	1.992.000.000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	1.) Jumlah SK; 2.) Sertifikat	1	105	-	-	550.000.000	-	-
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	1	-	-	550.000.000	-	-
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	2	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000

	International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi									
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	2	2	2	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	2	2	2	400.000.000	400.000.000	600.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.500	1.500	1.500	1.500	200.000.000	200.000.000	500.000.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	258.130	10.104	196.336	358.190	1.004.280.000	1.004.280.000	1.004.280.000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1	1	1	1	1.004.280.000	1.004.280.000	1.004.280.000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	4	4	4	4	1.004.280.000	1.004.280.000	1.004.280.000

Lampiran 3. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	2.885.068.527	2.764.154.242	2.773.097.099
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	154.940.000	154.940.000	154.940.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	139.940.000,	139.940.000	139.940.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	235.000.000	235.000.000	235.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	23	2	2	2	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
		Pendidikan dan Pelatihan								
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	902.924.238	902.924.238	902.924.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40	40	40	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	152.600.000	152.600.000	152.600.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	23	2	2	2	110.000.000	110.000.000	110.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	1	1	1	42.600.000	42.600.000	42.600.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	841.435.200	841.435.200	841.435.200
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	171.810.800	171.810.800	171.810.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	669.624.400	669.624.400	669.624.400
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	570.169.089	449.254.804	458.197.661

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	18	18	18	280.499.089	159.584.804	168.527.661
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	28	28	28	59.670.000	59.670.000	59.670.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	230.000.000	230.000.000	230.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	604.500.000	604.500.000	604.500.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	25	5.153.407	5.153.407	5.153.407	604.500.000	604.500.000	604.500.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	3	3	3	304.500.000	304.500.000	304.500.000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	3	3	3	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	8.910.316.983	8.992.930.388	9.385.976.672
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	2	1	1	1	2.023.441.950	2.011.055.355	1.984.101.672
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah	Unit	2	2	2	2	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
		Dilakukan Pembagian Blok								
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	2	30	30	30	1.423.441.950	1.411.055.355	1.384.101.672
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	675.000.000	675.000.000	675.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	2	2	675.000.000	675.000.000	675.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	15	50	50	50	3.612.875.000	3.707.875.000	4.127.875.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1	1	1	727.875.000	727.875.000	727.875.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	5	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.599.000.033	2.599.000.033	2.599.000.000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	5	1.000	1.000	1.000	299.000.000	299.000.000	299.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	6	6	6	6	500.000.033	500.000.033	500.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang	Laporan	10	10	10	10	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Rook						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHL Batu Rook							13.843.532.697	13.805.231.817	14.907.220.958
	Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dilaksanakan Dalam Satu Tahun								
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.443.647.187	1.443.647.187	2.143.647.187
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1	3	3	3	1.443.647.187	1.443.647.187	2.143.647.187
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	2	2	6	399.999.809	399.999.809	649.999.809
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	4	4	4	473.647.800	473.647.800	723.647.800
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500	1.000	1.000	1.000	569.999.578	569.999.578	769.999.578

Lampiran 4. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.324.261.827	3.780.147.542	3.820.390.399
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	200.606.000	200.606.000	200.606.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	136.100.000	136.100.000	136.100.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	2	2	8.832.700	8.832.700	8.832.700
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	10	10	10	55.673.300	55.673.300	55.673.300
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	54.700.000	54.700.000	54.700.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3	3	3	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3	7	7	7	25.200.000	25.200.000	25.200.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Laporan	2	8	8	8	28.000.000	28.000.000	28.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
		Barang Milik Daerah pada SKPD								
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	312.280.000	312.280.000	312.280.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	33	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	14	14	14	95.280.000	95.280.000	95.280.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	10	10	10	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	10	10	10	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	902.924.238	902.924.238	902.924.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3	3	3	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42	40	40	40	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	753.624.400	330.424.400	361.724.400

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	14	14	14	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	223.624.400	223.624.400	223.624.400
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.435.975.800	1.435.975.800	1.435.975.800
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan							
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	14.500.000	14.500.000	14.500.000
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	12	12	12	174.610.500	174.610.500	174.610.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	221.198.500	221.198.500	221.198.500
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	832.198.300	832.198.300	832.198.300
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	23	23	23	253.598.589	132.684.304	141.627.161
3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	85	85	85	113.500.000	113.500.000	113.500.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	230.612.800	230.612.800	230.612.800

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	1	51.440.000	51.440.000	51.440.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.201.113.250	1.201.113.250	1.207.363.250
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	69.911	5.153.407	5.153.407	5.153.407	1.201.113.250	1.201.113.250	1.207.363.250
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	2	2	2	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		2	2	2	194.196.000	194.196.000	194.196.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		10	10	10	751.917.250	751.917.250	758.167.250
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	12.493.824.899	9.388.650.178	9.723.449.036
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	5.219.301.600	2.019.126.879	1.933.925.737
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	3	3	3	3	225.000.000	225.000.000	225.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	2	2	2	225.000.000	225.000.000	225.000.000	2
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	129	28	59	57	4.499.529.100	1.299.354.379	1.214.153.237
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen		2	2	2	222.000.000	222.000.000	222.000.000
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	4	1	1	1	354.946.300	354.946.300	354.946.300
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	354.946.300	354.946.300	354.946.300
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	100	50	50	50	4.282.420.999	4.377.420.999	4.797.420.999
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen		1	1	1	204.052.000	204.052.000	204.052.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	80	80	80	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	2	15	15	15	1.343.368.999	1.343.368.999	1.343.368.999
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.637.156.000	2.637.156.000	2.637.156.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Batu Ayau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Batu Ayau							18.719.199.976	15.069.910.970	16.671.202.685
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	1.500	1.500	1.500	1.500	215.783.600	215.783.600	215.783.600
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	13	13	13	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	20	29	29	29	1.821.372.400	1.821.372.400	1.821.372.400
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	700.000.000	700.000.000	1.920.000.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	11	4	4	6	700.000.000	700.000.000	1.920.000.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	11	8	8	12	200.000.000	200.000.000	300.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	8	6	6	8	300.000.000	300.000.000	720.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	5.000	2.000	2.000	2.000	200.000.000	200.000.000	900.000.000

Lampiran 5. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.301.778.387	3.757.664.102	3.797.906.959
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	171.280.300	171.280.300	171.280.300
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	4	4	4	145.700.000	145.700.000	145.700.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	4	4	4	25.580.300	25.580.300	25.580.300
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	58	58	58	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	864.424.238	864.424.238	864.424.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	1.457.270.000	1.034.070.000	1.065.370.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	4	4	4	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	16	6	8	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	2	2	861.270.000	861.270.000	861.270.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	840.280.560	840.280.560	840.280.560
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	4	4	247.039.600	247.039.600	247.039.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	593.240.960	593.240.960	593.240.960
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	763.523.289	642.609.004	651.551.861
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	35	35	35	401.602.689	280.688.404	289.631.261

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	99	99	99	71.920.600	71.920.600	71.920.600
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3	3	3	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	698.025.950	698.025.950	804.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	4	5.153.407	5.153.407	5.153.407	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4	5	5	5	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.355.931.836	7.486.749.362	8.117.767.110
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.308.678.736	1.544.496.262	1.505.514.010
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	4	4	4	1.308.678.736	1.544.496.262	1.505.514.010
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	404.225.500	404.225.500	404.225.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	404.225.500	404.225.500	404.225.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	1.200	1.200	1.200	2.795.000.000	2.890.000.000	3.310.000.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	405	405	405	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	6	7.497.170	7.497.170	7.497.170	2.848.027.600	2.648.027.600	2.898.027.600
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	10.000	641.969	641.969	641.969	400.000.400	400.000.400	400.000.400
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2	12	12	12	450.000.000	450.000.000	450.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	6	6	6	7	1.998.027.200	1.798.027.200	2.048.027.200
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.634.142.600	1.634.142.600	2.334.142.600
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	4	4	5	1.634.142.600	1.634.142.600	2.334.142.600

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bengalon						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bengalon							13.989.878.773	13.576.582.014	15.054.092.619
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	3	3	6	200.000.000	200.000.000	400.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	5	5	5	784.142.600	784.142.600	784.142.600
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500	1.000	1.000	1.000	650.000.000	650.000.000	1.150.000.000

Lampiran 6. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.939.953.029	3.395.838.744	3.436.081.601
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	141.620.000	141.620.000	141.620.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	141.620.000	141.620.000	141.620.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10	10	10	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	864.424.238	864.424.238	864.424.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	12	12	12	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	25	6	8	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	950.169.702	950.169.702	950.169.702
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	9.008.800	9.008.800	9.008.800
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	104.072.000	104.072.000	104.072.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	837.088.902	837.088.902	837.088.902
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	1.248.739.089	1.127.824.804	1.136.767.661
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	30	30	30	401.602.689	280.688.404	289.631.261
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	12	12	89.460.000	89.460.000	89.460.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	3	323.620.900	323.620.900	323.620.900
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	1	434.055.500	434.055.500	434.055.500
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	698.025.950	698.025.950	804.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	12	22	22	22	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	11.106.373.367	9.583.856.865	9.880.920.553
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.477.348.600	1.859.832.098	1.736.895.786
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	2	2	2	3.437.348.600	1.819.832.098	1.696.895.786
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.890.234.000	3.985.234.000	4.405.234.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	67	67	67	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	4	2	2	2	1.155.234.000	1.155.234.000	1.155.234.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	3	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.778.790.767	3.778.790.767	3.778.790.767
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar		50	50	50	800.000.000	800.000.000	800.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Barat						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Barat							17.930.321.346	15.863.690.559	17.007.247.104
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	11	12	12	12	1.122.960.967	1.122.960.967	1.122.960.967
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	11	12	12	12	1.855.829.800	1.855.829.800	1.855.829.800
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.185.969.000	2.185.969.000	2.885.969.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	3	3	10	2.185.969.000	2.185.969.000	2.885.969.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3	10	10	10	201.499.000	201.499.000	351.499.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	3	11	843.509.000	843.509.000	893.509.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	3	30	30	30	1.140.961.000	1.140.961.000	1.640.961.000

Lampiran 7. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.447.287.107	2.903.172.822	2.943.415.679
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	131.300.000	131.300.000	131.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	131.300.000	131.300.000	131.300.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	34	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	15	15	15	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	639.924.238	639.924.238	639.924.238
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	12	12	12	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	1.026.000.000	602.800.000	634.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6	2	2	2	66.000.000	66.000.000	66.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	6	2	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3	3	3	430.000.000	430.000.000	430.000.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	788.027.580	788.027.580	788.027.580
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	9.471.200	9.471.200	9.471.200
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	97.582.800	97.582.800	97.582.800
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8	8	8	20.157.500	20.157.500	20.157.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	660.816.080	660.816.080	660.816.080
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	657.035.289	536.121.004	545.063.861
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	20	20	20	326.906.489	205.992.204	214.935.061
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3	3	3	330.128.800	330.128.800	330.128.800
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	75.600	5.153.407	5.153.407	5.153.407	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	6	6	6	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6	6	6	6	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.687.774.187	8.023.296.877	8.423.076.627
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.057.844.900	1.298.367.590	1.278.147.340
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	20	20	20	1.017.844.900	1.258.367.590	1.238.147.340
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	566.481.000	566.481.000	566.481.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	2	566.481.000	566.481.000	566.481.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan	Hektar	50	50	50	50	2.921.150.000	3.016.150.000	3.436.150.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
		negara yang ditanam dan dipelihara								
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	186.150.000	186.150.000	186.150.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	20	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.182.298.287	3.182.298.287	3.182.298.287
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	8	158.000	158.000	158.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	30	12	12	12	1.134.000.000	1.134.000.000	1.134.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	50	12	12	12	1.738.298.287	1.738.298.287	1.738.298.287
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.905.020.400	2.905.020.400	3.955.020.400
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	6	6	6	2.905.020.400	2.905.020.400	3.955.020.400
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	15	15	21	105.000.000	105.000.000	655.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti	Kelompok	6	3	3	3	252.000.000	252.000.000	752.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Pantai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Pantai							14.993.107.644	14.784.516.049	16.380.788.656
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	273	2833	2833	2833	2.548.020.400	2.548.020.400	2.548.020.400

Lampiran 8. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.628.315.767	3.084.201.482	3.124.444.339
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	299.780.000	299.780.000	299.780.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	126.020.000	126.020.000	126.020.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	12	12	173.760.000	173.760.000	173.760.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	41	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	6	6	6	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	843.424.238	843.424.238	843.424.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	4	4	4	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	662.000.000	238.800.000	270.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	27	5	5	5	132.000.000	132.000.000	132.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	41	20	21	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	961.769.440	961.769.440	961.769.440
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	94.090.000	94.090.000	94.090.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	858.179.440	858.179.440	858.179.440
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	628.342.089	507.427.804	516.370.661
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	16	16	16	298.342.089	177.427.804	186.370.661
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	3	3	3	330.000.000	330.000.000	330.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	301.650	5.153.407	5.153.407	5.153.407	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6	6	6	6	698.025.950	698.025.950	804.275.950
6	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.232.332.900	7.185.561.115	7.575.162.694
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.555.360.900	1.413.589.115	1.383.190.694
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	5	5	5	1.555.360.900	1.413.589.115	1.383.190.694
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	321.664.000	321.664.000	321.664.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	321.664.000	321.664.000	321.664.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	12	1	1	1	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	12	120	120	120	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.620.308.000	2.620.308.000	2.620.308.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	316	300	300	300	357.996.000	357.996.000	357.996.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	389.900.000	389.900.000	389.900.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	24	12	12	12	1.872.412.000	1.872.412.000	1.872.412.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.774.620.000	1.774.620.000	1.924.620.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4	4	4	6	1.774.620.000	1.774.620.000	1.924.620.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan	Kelompok	3	3	3	4	726.000.000	726.000.000	876.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Tengah						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Berau Tengah							13.588.294.617	12.997.408.547	13.683.502.983
		Pendampingan Kelembagaan								
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100	1.000	1.000	1.000	1.048.620.000	1.048.620.000	1.048.620.000

Lampiran 9. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.473.956.807	2.929.842.522	2.970.085.379
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	321.200.000	321.200.000	321.200.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	131.300.000	131.300.000	131.300.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	12	12	12	189.900.000	189.900.000	189.900.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	42	42	42	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	914.924.238	914.924.238	914.924.238
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	12	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	568.000.000	144.800.000	176.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	14	2	2	2	38.000.000	38.000.000	38.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	3	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	826.549.480	826.549.480	826.549.480
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	90.957.800	90.957.800	90.957.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	727.091.680	727.091.680	727.091.680
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	539.770.000	539.770.000	539.770.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	14	22	22	22	354.110.589	233.196.304	242.139.161

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	32	32	32	81.172.500	81.172.500	81.172.500
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	175.000.000	175.000.000	175.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.136.103.950	1.136.103.950	1.242.353.950
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	953.025.950	953.025.950	1.059.275.950
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	7	7	7	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	1	1	1	1	183.078.000	183.078.000	183.078.000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang	Dokumen	2	7	7	7	183.078.000	183.078.000	183.078.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
		menjadi Kewenangan Provinsi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	8.134.063.600	8.123.039.588	8.763.592.912
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.505.098.600	1.399.074.588	1.369.627.912
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	7	7	7	1.505.098.600	1.399.074.588	1.369.627.912
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	342.270.000	342.270.000	342.270.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	342.270.000	342.270.000	342.270.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	60	50	50	50	2.880.660.000	2.975.660.000	3.395.660.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	50	50	50	3.280.660.000	3.375.660.000	3.795.660.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	10	1	1	1	145.660.000	145.660.000	145.660.000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun			95	95	95	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.006.035.000	3.006.035.000	3.256.035.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Berau Utara						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Berau Utara							13.978.445.357	13.423.307.060	15.110.353.241
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	20	44.126	44.126	44.126	857.555.000	857.555.000	857.555.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	350.000.000	350.000.000	350.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	70	70	70	70	1.798.480.000	1.798.480.000	2.048.480.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.234.321.000	1.234.321.000	2.134.321.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	3	3	1.234.321.000	1.234.321.000	2.134.321.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	10	10	10	21	102.261.000	102.261.000	502.261.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	3	3	487.880.000	487.880.000	487.880.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	250	600	600	600	644.180.000	644.180.000	1.144.180.000

Lampiran 10. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Bongan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Bongan							17.628.767.380	15.459.763.501	17.480.690.849
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.542.016.380	3.118.816.380	3.150.116.380
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	193.435.500	193.435.500	193.435.500
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	8	8	8	165.020.000	165.020.000	165.020.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	28.415.500	28.415.500	28.415.500
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000

		Pelayanan Kepegawaian								
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	8	8	8	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	4	4	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15	15	15	520.000.000	520.000.000	520.000.000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	66.000.000	66.000.000	66.000.000

3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	2	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	938.851.780	938.851.780	938.851.780
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	11.455.600	11.455.600	11.455.600
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	178.380.500	178.380.500	178.380.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	749.015.680	749.015.680	749.015.680
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	683.579.100	683.579.100	683.579.100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	27	27	27	327.950.100	327.950.100	327.950.100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	24	24	24	63.329.000	63.329.000	63.329.000
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1	1	1	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	2.761.400.000	2.761.400.000	2.861.400.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	93.859	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000

3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4	9	9	11	590.000.000	590.000.000	690.000.000
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	1.916.400.000	1.916.400.000	1.916.400.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	1.916.400.000	1.916.400.000	1.916.400.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.748.213.000	8.002.409.121	9.192.036.469
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.504.000.000	1.363.196.121	1.332.823.469
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3	11	8	8	1.504.000.000	1.363.196.121	1.332.823.469
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	395.000.000	395.000.000	395.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	395.000.000	395.000.000	395.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.414.213.000	3.414.213.000	4.214.213.000

3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	335.746	335.746	335.746	335.746	685.200.000	685.200.000	685.200.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	14	2	2	12	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	27	30	30	30	2.529.013.000	2.529.013.000	2.529.013.000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.) Jumlah SK Pengada/Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 2.) Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang terverifikasi	1.) Jumlah SK; 2.) Sertifikat	1	3	-	-	1.700.000.000	-	-
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	3	-	-	1.700.000.000	-	-
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.577.138.000	1.577.138.000	2.277.138.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	4	4	6	1.577.138.000	1.577.138.000	2.277.138.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4	4	4	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000

3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	4	4	6	620.991.000	620.991.000	820.991.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	600	1.600	1.600	1.600	856.147.000	856.147.000	1.356.147.000

Lampiran 11. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.510.177.500	3.086.977.500	3.118.277.500
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	214.300.000	214.300.000	214.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1	1	1	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	2	2	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2	2	2	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	30	30	30	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	4	4	4	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19	34	34	34	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	4	4	4	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	664.945.600	241.745.600	273.045.600
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	1	1	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	1	1	1	324.060.500	324.060.500	324.060.500
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	820.193.400	820.193.400	820.193.400
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4	4	4	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	4	4	138.382.600	138.382.600	138.382.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4	4	4	672.310.800	672.310.800	672.310.800

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	680.588.500	680.588.500	680.588.500
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	14	14	14	354.906.589	233.992.304	242.935.161
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	112.541	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	6	1	1	1	107.997.500	107.997.500	107.997.500
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	14	4	4	4	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3 / Tahun	-	1	1	1	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	15	15	15	15	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
		yang menjadi Kewenangan Provinsi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	10.709.885.025	8.726.888.959	9.064.940.690
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.477.742.325	1.399.746.259	1.317.797.990
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	7	7	7	149.999.600	149.999.600	149.999.600
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	36	6	6	6	3.327.742.725	1.249.746.659	1.167.798.390
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	660.468.500	660.468.500	660.468.500
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	1	1	1	660.468.500	660.468.500	660.468.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.378.152.500	3.473.152.500	3.893.152.500
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	115	115	115	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	2	1	1	1	643.152.500	643.152.500	643.152.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Damai						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Damai							17.524.336.525	15.118.140.459	16.037.492.190
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.193.521.700	3.193.521.700	3.193.521.700
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	541.626	554.253	554.253	554.253	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	10	10	10	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	30	10	10	10	1.853.521.700	1.853.521.700	1.853.521.700
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.459.274.000	2.459.274.000	2.909.274.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	4	4	6	2.459.274.000	2.459.274.000	2.909.274.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	20	20	20	250.000.000	250.000.000	500.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	10	5	5	5	659.274.000	659.274.000	859.274.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.000	200	200	200	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000

Lampiran 12. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.839.399.400	3.416.199.400	3.447.499.400
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	170.300.000	170.300.000	170.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	8	8	8	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	90	8	8	8	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	4	4	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	7	7	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15	15	15	520.000.000	520.000.000	520.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	2	2	2	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	5	2	3	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.350.144.400	1.350.144.400	1.350.144.400
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	156.829.200	156.829.200	156.829.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	-	-	-	1.193.315.200	1.193.315.200	1.193.315.200
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	592.805.000	592.805.000	592.805.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	15	15	15	191.599.000	191.599.000	191.599.000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	21	21	21	52.000.000	52.000.000	52.000.000
3.28.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	346.906.000	346.906.000	346.906.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.629.810.000	1.629.810.000	1.729.810.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	37.578	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2	9	9	11	590.000.000	590.000.000	690.000.000
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	5.153.407	5.153.407	5.153.407	5.153.407	784.810.000	784.810.000	784.810.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	784.810.000	784.810.000	784.810.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.763.342.622	7.004.873.386	8.402.150.704
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.190.000.000	1.336.530.764	1.313.808.082
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	29	27	15	15	2.150.000.000	1.296.530.764	1.273.808.082
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	1	1	1	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
	Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun								
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.843.100.000	2.938.100.000	3.358.100.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	108.100.000	108.100.000	108.100.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.330.242.622	2.330.242.622	3.330.242.622
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	2	2	12	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	4	4	12	1.830.242.622	1.830.242.622	1.830.242.622
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	1	50	50	50	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Hektar	1	50	50	50	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	4.507.766.622	4.507.766.622	5.107.766.622

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Delta Mahakam						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Delta Mahakam							17.840.318.644	16.658.649.408	18.787.226.726
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6	1	1	1	4.507.766.622	4.507.766.622	5.107.766.622
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	1	10	10	12	250.000.000	250.000.000	850.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	700	1.000	1.000	1.000	4.257.766.622	4.257.766.622	4.257.766.622

Lampiran 13. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.372.274.760	2.949.074.760	2.980.374.760
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	170.300.000	170.300.000	170.300.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	6	6	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	1	1	589.424.238	589.424.238	589.424.238
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	615.016.000	191.816.000	223.116.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	6	6	6	85.016.000	85.016.000	85.016.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	442	7	4	5	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	759.010.760	759.010.760	759.010.760
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	152.411.800	152.411.800	152.411.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1	1	1	606.598.960	606.598.960	606.598.960
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	697.798.000	697.798.000	697.798.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	32	32	32	412.441.089	291.526.804	300.469.661
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	8	8	8	65.870.000	65.870.000	65.870.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.002.762.000	1.002.762.000	1.102.762.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	950	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	1	1	1	698.025.950	698.025.950	804.275.950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	4.500	4.500	4.500	4.500	157.762.000	157.762.000	157.762.000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	1	1	1	157.762.000	157.762.000	157.762.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	7.908.435.800	7.592.289.679	8.613.514.372
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.058.929.100	1.647.782.979	1.588.913.639
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	19	8	8	8	2.058.929.100	1.647.782.979	1.588.913.639
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	471.899.500	471.899.500	471.899.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	471.899.500	471.899.500	471.899.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	60	50	50	50	2.835.000.000	2.930.000.000	3.350.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	60	100	100	100	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.542.607.200	2.542.607.200	3.202.701.233
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	4	237.500	237.500	237.500	375.000.000	375.000.000	375.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	5	1	1	1	350.000.000	350.000.000	1.010.094.033
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	37	42	42	42	1.817.607.200	1.817.607.200	1.817.607.200
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.635.611.200	1.635.611.200	2.635.611.200
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	8	3	3	3	1.635.611.200	1.635.611.200	2.635.611.200
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	5	5	5	300.000.000	300.000.000	300.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kelinjau						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							13.919.083.760	13.179.737.639	15.332.262.332
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	3	3	3	220.000.000	220.000.000	220.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.696	1.000	1.000	1.000	1.115.611.200	1.115.611.200	2.115.611.200

Lampiran 14. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.538.834.580	3.115.634.580	3.146.934.580
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	160.700.000	160.700.000	160.700.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	12	12	12	145.700.000	145.700.000	145.700.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	10	10	10	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	5	5	5	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	7	7	7	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	4	4	242.000.000	242.000.000	242.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4	4	4	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	662.362.400	239.162.400	270.462.400
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	6	6	6	132.362.400	132.362.400	132.362.400
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	20	20	20	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	999.774.880	999.774.880	999.774.880
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	139.328.800	139.328.800	139.328.800
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	860.446.080	860.446.080	860.446.080
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	585.847.300	585.847.300	585.847.300
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	31	34	34	34	357.071.189,00	236.156.904,00	245.099.761,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	37	37	37	56.460.000	56.460.000	56.460.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	242.829.200	242.829.200	242.829.200
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	1.487.756.000	1.487.756.000	1.587.756.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	137.495	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	9	1	1	1	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	1	5.153.407	5.153.407	5.153.407	642.756.000	642.756.000	642.756.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	642.756.000	642.756.000	642.756.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	11.037.698.692	7.733.654.812	8.313.158.997
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.729.144.322	1.330.100.442	1.239.604.627
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	50	10	10	10	4.729.144.322	1.330.100.442	1.239.604.627
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	356.006.200	356.006.200	356.006.200
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	356.006.200	356.006.200	356.006.200
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.491.866.170	3.586.866.170	4.006.866.170
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	101.191.170	101.191.170	101.191.170
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.460.682.000	2.460.682.000	2.710.682.000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	100	100	100	100	245.000.000	245.000.000	245.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	10	10	10	450.000.000	450.000.000	450.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	10	20	20	20	1.765.682.000	1.765.682.000	2.015.682.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Kendilo						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Dinas Kehutanan							17.766.515.172	14.039.271.292	15.230.075.477
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.702.225.900	1.702.225.900	2.182.225.900
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2	6	6	10	1.702.225.900	1.702.225.900	2.182.225.900
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3	3	3	5	150.000.000	150.000.000	300.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	6	6	10	500.000.000	500.000.000	830.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	20	200	200	200	1.052.225.900	1.052.225.900	1.052.225.900

Lampiran 15. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.358.488.940	2.935.288.940	2.966.588.940
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	159.740.000	159.740.000	159.740.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	4	4	4	144.740.000	144.740.000	144.740.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5	5	5	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	4	4	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	2	2	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	3	4	4	4	21.500.000	21.500.000	21.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
		Penggandaan yang Disediakan								
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	15	15	15	520.000.000	520.000.000	520.000.000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	5	5	5	66.000.000	66.000.000	66.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	10	6	7	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	919.199.440	919.199.440	919.199.440
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	4	4	4	150.781.200	150.781.200	150.781.200
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	4	4	4	768.418.240	768.418.240	768.418.240
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	553.399.500	553.399.500	553.399.500
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	31	31	31	271.002.589	150.088.304	159.031.161
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	147	147	147	62.910.000	62.910.000	62.910.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.847.405.750	8.389.187.715	8.826.860.647
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.977.480.700	1.424.262.665	1.366.935.597
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	12	7	7	7	2.977.480.700	1.424.262.665	1.366.935.597
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	742.035.500	742.035.500	742.035.500
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	2	742.035.500	742.035.500	742.035.500
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.535.000.000	3.630.000.000	4.050.000.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	2	2	2	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	126	126	126	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.592.889.550	2.592.889.550	2.667.889.550
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2	4	4	4	750.000.000	750.000.000	750.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	12	12	12	1.842.889.550	1.842.889.550	1.917.889.550
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.257.632.250	1.257.632.250	1.257.632.250

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Manubar						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Manubar							15.308.526.940	13.427.108.905	13.996.081.837
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	4	4	4	1.257.632.250	1.257.632.250	1.257.632.250
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	4	4	4	995.319.900	995.319.900	995.319.900
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	400	30	30	30	262.312.350	262.312.350	262.312.350

Lampiran 16. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.452.384.000	3.029.184.000	3.060.484.000
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	150.500.000	150.500.000	150.500.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2	2	2	135.500.000	135.500.000	135.500.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	12	12	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12	12	12	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	39	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	4	4	4	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2	2	2	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	%	100%	100%	100%	100%	596.000.000	172.800.000	204.100.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	7	4	5	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	807.901.400	807.901.400	807.901.400
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2	2	2	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	122.607.400	122.607.400	122.607.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	675.794.000	675.794.000	675.794.000
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	767.832.600	767.832.600	767.832.600
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	33	46	46	46	493.215.689,00	372.301.404,00	381.244.261,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	44	44	44	55.130.000	55.130.000	55.130.000
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	1	1	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	2.285.434.000	2.285.434.000	2.385.434.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	3	2	2	2	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	5	3	3	3	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektar	1	5.153.407	5.153.407	5.153.407	1.440.434.000	1.440.434.000	1.440.434.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen	1	1	1	1	1.440.434.000	1.440.434.000	1.440.434.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.158.490.698	8.249.893.349	9.684.337.768
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	8	1	1	1	2.485.904.900	1.482.307.551	2.434.288.750
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	8	35	35	35	2.485.904.900	1.482.307.551	2.434.288.750
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	1	1	1	921.892.650	921.892.650	921.892.650
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3	2	2	2	921.892.650	921.892.650	921.892.650
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	208	208	208	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.015.693.148	3.015.693.148	3.078.156.368
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	1	150	150	150	284.400.000	284.400.000	284.400.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	4	4	4	920.000.000	920.000.000	920.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	4	4	4	4	1.811.293.148	1.811.293.148	1.873.756.368

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Meratus						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Meratus							16.263.608.698	14.931.811.349	17.047.555.768
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.367.300.000	1.367.300.000	1.917.300.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	8	7	7	7	1.367.300.000	1.367.300.000	1.917.300.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2	10	10	10	350.000.000	350.000.000	650.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	8	6	6	6	300.000.000	300.000.000	550.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	3	30	30	30	717.300.000	717.300.000	717.300.000

Lampiran 17. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.750.707.280	4.327.507.280	4.358.807.280
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	160.700.000	160.700.000	160.700.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	145.700.000	145.700.000	145.700.000
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12	12	12	439.056.000,00	439.056.000,00	439.056.000,00
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10	10	10	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	5	5	5	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	1.604.676.000	1.181.476.000	1.212.776.000
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	698.200.000,00	698.200.000,00	698.200.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	927.332.280	927.332.280	927.332.280
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	138.382.600	138.382.600	138.382.600
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	780.449.680	780.449.680	780.449.680
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	927.849.000	927.849.000	927.849.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	15	30	30	30	259.670.289,00	138.756.004,00	147.698.861,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	35	35	35	62.470.000	62.470.000	62.470.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	85.751	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	2	2	2	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	8.573.334.900	8.157.309.895	8.821.249.082
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	2.393.744.900	1.882.719.895	1.851.659.082
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	1	1	1	268.904.000	268.904.000	268.904.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Unit	1	2	2	2	2.124.840.900	1.613.815.895	1.582.755.082

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
	Prasarana Operasionalisasi KPH	dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun								
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	318.260.000	318.260.000	318.260.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	318.260.000	318.260.000	318.260.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	3.430.610.000	3.525.610.000	3.945.610.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	120	120	120	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.430.720.000	2.430.720.000	2.705.720.000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	410.738	410.738	410.738	410.738	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	3	3	3	340.000.000	340.000.000	340.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3	5	5	5	1.790.720.000	1.790.720.000	2.065.720.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Mook Manoor Bulatn						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Mook Manor Bulatn							16.051.550.180	15.212.325.175	16.257.564.362
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.882.508.000	1.882.508.000	2.132.508.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	15	5	5	5	1.882.508.000	1.882.508.000	2.132.508.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3	4	4	4	196.508.000	196.508.000	446.508.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	5	5	5	706.000.000	706.000.000	706.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	1.643	1.000	1.000	1.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000

Lampiran 18. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	4.026.033.240	3.602.833.240	3.634.133.240
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	177.020.000	177.020.000	177.020.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	162.020.000	162.020.000	162.020.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	7	7	7	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	3	3	3	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	9	9	1.191.316.800,00	1.191.316.800,00	1.191.316.800,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	879.899.640	879.899.640	879.899.640
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	118.198.200	118.198.200	118.198.200
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	761.701.440	761.701.440	761.701.440
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	1.308.963.600	1.308.963.600	1.308.963.600
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65	56	56	56	793.175.489,00	672.261.204,00	681.204.061,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	63	63	63	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	267.068	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	11	11	11	11	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	100	100	100	100	773.640.000	773.640.000	773.640.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	1	1	1	1	822.306.000,00	822.306.000,00	822.306.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	11.377.074.450	10.075.133.570	10.404.693.745
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.721.187.450	3.324.246.570	3.233.806.745
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3	1	1	1	4.721.187.450,00	3.324.246.570,00	3.233.806.745,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	305.000.000	305.000.000	305.000.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	2	2	305.000.000	305.000.000	305.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	25	50	50	50	3.456.987.500	3.551.987.500	3.971.987.500

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Santan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Santan							17.108.415.090	15.383.274.210	15.844.134.385
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	25	115	115	115	2.735.000.000,00	2.830.000.000,00	3.250.000.000,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.893.899.500	2.893.899.500	2.893.899.500
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	267.068	267.068	267.068	267.068	325.502.000	325.502.000	325.502.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	592.963.000	592.963.000	592.963.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	38	12	12	12	1.975.434.500	1.975.434.500	1.975.434.500
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	860.307.400	860.307.400	860.307.400
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5	1	1	1	860.307.400	860.307.400	860.307.400
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1	1	1	1	266.477.500,00	266.477.500,00	266.477.500,00
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	200	1.000	1.000	1.000	860.307.400	860.307.400	860.307.400

Lampiran 19. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.768.467.920	3.345.267.920	3.376.567.920
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	162.740.000	162.740.000	162.740.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	147.740.000	147.740.000	147.740.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	117	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	10	10	10	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5	5	5	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.012.243.920	1.012.243.920	1.012.243.920
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	109.994.400	109.994.400	109.994.400
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	902.249.520	902.249.520	902.249.520
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	933.334.000	933.334.000	933.334.000
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	50	50	50	577.587.089,00	456.672.804,00	465.615.661,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	30	30	30	136.260.000	136.260.000	136.260.000
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	4	4	4	290.000.000	290.000.000	290.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	272.566	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	1	1	1	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3	4	4	5	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	100	100	100	100	773.640.000	773.640.000	773.640.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	2	2	2	2	773.640.000,00	773.640.000,00	773.640.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	9.289.980.900	8.199.284.307	8.561.092.533
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.023.146.400	1.837.449.807	1.779.258.033
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1	4	4	4	3.023.146.400	1.837.449.807	1.779.258.033
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	297.250.000	297.250.000	297.250.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	2	2	2	2	297.250.000	297.250.000	297.250.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
		Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun								
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50	50	50	50	2.855.471.200	2.950.471.200	3.370.471.200
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	120.471.200	120.471.200	120.471.200
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	50	100	100	100	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	3.114.113.300	3.114.113.300	3.114.113.300
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	3	997.384	997.384	997.384	350.000.000	350.000.000	350.000.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3	3	3	3	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3	3	3	12	2.264.113.300	2.264.113.300	2.264.113.300
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.063.601.900	2.063.601.900	2.063.601.900
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	172	3	3	3	2.063.601.900	2.063.601.900	2.063.601.900
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang	Orang	5	8	8	8	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Sub DAS Belayan						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Sub DAS Belayan							15.967.050.720	14.453.154.127	14.946.262.353
	Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Dilakukan Peningkatan Kapasitas								
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1	3	3	3	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	2.000	1.000	1.000	1.000	1.263.601.900	1.263.601.900	1.263.601.900

Lampiran 20. Rencana Pendanaan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	3.973.180.818,00	3.549.980.818,00	3.581.280.818,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	225.220.000	225.220.000	225.220.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3	3	3	155.300.000	155.300.000	155.300.000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	44.920.000	44.920.000	44.920.000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100%	100%	100%	100%	36.250.000	36.250.000	36.250.000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	4	4	28.000.000	28.000.000	28.000.000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	247.000.000	247.000.000	247.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	2	2	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	4	4	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	12	60	60	60	105.000.000	105.000.000	105.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
		Pendidikan dan Pelatihan								
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	2	2	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	5	5	5	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2	2	2	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	21.500.000	21.500.000	21.500.000
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2	2	2	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100%	100%	100%	100%	740.812.200	317.612.200	348.912.200
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	494.890.000,00	494.890.000,00	494.890.000,00
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	3	3	3	99.000.000	99.000.000	99.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	78	15	16	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	3.503.438.400,00	3.503.438.400,00	3.503.438.400,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	1.034.682.018	1.034.682.018	1.034.682.018
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	70.811.000	70.811.000	70.811.000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	963.871.018	963.871.018	963.871.018
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	867.316.600	867.316.600	867.316.600
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	30	30	30	416.628.589,00	295.714.304,00	304.657.161,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	30	30	30	30.940.000	30.940.000	30.940.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	2	2	200.261.100	200.261.100	200.261.100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3 / Tahun	4.471.286	4.420.000	4.445.000	4.475.000	845.000.000	845.000.000	945.000.000
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826	850	900	950			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	96.298	5.153.407	5.153.407	5.153.407	845.000.000	845.000.000	945.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	2	2	2	255.000.000	255.000.000	255.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di	Dokumen	9	2	2	2	698.025.950,00	698.025.950,00	804.275.950,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
		Kawasan Hutan Produksi								
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	18	18	18	18	304.054.000	304.054.000	304.054.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit manajemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	2	2	2	2	304.054.000,00	304.054.000,00	304.054.000,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	10.842.227.800	10.325.564.768	11.332.688.080
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	3.653.187.800	3.041.524.768	3.628.648.080
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1	2	2	2	332.628.000	332.628.000	332.628.000
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	6	10	10	10	3.320.559.800	2.708.896.768	3.296.020.080
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	330.816.000	330.816.000	330.816.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	2	2	2	330.816.000	330.816.000	330.816.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	64	50	50	50	4.044.740.000	4.139.740.000	4.559.740.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2	2	2	2	136.480.000	136.480.000	136.480.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	64	50	50	50	2.735.000.000	2.830.000.000	3.250.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	6	4	4	4	1.173.260.000	1.173.260.000	1.173.260.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	2	7.929.179	7.929.179	7.929.179	2.813.484.000	2.813.484.000	2.813.484.000
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	249.965	249.965	249.965	249.965	301.134.000,00	301.134.000,00	301.134.000,00
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	8	8	8	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	5	10	10	10	1.913.484.000	1.913.484.000	1.913.484.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	1.350.000.000	1.350.000.000	3.050.000.000
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3	3	3	3	1.350.000.000	1.350.000.000	3.050.000.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	6	10	10	10	100.000.000	100.000.000	850.000.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Telake						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	KPHP Telake							17.010.408.618,00	16.070.545.586,00	18.908.968.898,00
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	3	3	3	150.000.000	150.000.000	500.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	2.563	2.000	2.000	2.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.700.000.000

Lampiran 21. Rencana Pendanaan di UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83	81	83	85	5.147.128.320	4.723.928.320	4.755.228.320
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	151.820.000	151.820.000	151.820.000
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	136.820.000,00	136.820.000,00	136.820.000,00
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	217.000.000	217.000.000	217.000.000
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	40	40	40	105.000.000	105.000.000	105.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	846.900.000	846.900.000	846.900.000
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1	1	1	242.000.000	242.000.000	242.000.000
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	38.500.000	38.500.000	38.500.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	1	1	21.500.000	21.500.000	21.500.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	589.424.238,00	589.424.238,00	589.424.238,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100%	100%	100%	100%	641.812.200	218.612.200	249.912.200
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	26	26	26	530.000.000	106.800.000	138.100.000
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	111.812.200	111.812.200	111.812.200
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100%	100%	100%	100%	981.002.420	981.002.420	981.002.420
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	203.590.500	203.590.500	203.590.500
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	777.411.920	777.411.920	777.411.920
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100%	100%	100%	100%	2.272.343.700	2.272.343.700	2.272.343.700
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	62	62	62	769.084.389,00	648.170.104,00	657.112.961,00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	44	44	44	96.241.200	96.241.200	96.241.200
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1	3	3	3	3.172.466.520,00	3.172.466.520,00	3.172.466.520,00

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,47%	0,47%	0,71%	0,95%	353.189.000	353.189.000	353.189.000
		2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1%	1%	1%	1%			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	353.189.000	353.189.000	353.189.000
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1	1	1	1	353.189.000	353.189.000	353.189.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	72.312	610.540,98 Hektar	730.007,98 Hektar	930.007,98 Hektar	12.113.505.000	12.529.348.000	12.529.348.000
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Hektar	64.814,98	64.814,98	64.814,98	64.814,98	12.113.505.000	12.113.505.000	12.113.505.000
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	12	12	12	12	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Hektar	400	250	250	250	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	1	3	3	3	813.505.000	813.505.000	813.505.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	1	1	1	1	415.843.000	415.843.000	415.843.000

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	INDIKATOR	Satuan	Tahura						
				Baseline	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.00	Tahura Bukit Soeharto							20.627.732.020	20.204.532.020	20.835.832.020
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Kelompok	120	120	120	120	587.661.200,00	587.661.200,00	587.661.200,00
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	100	100	100	100	700.000.000	700.000.000	700.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	48.258	20.000	20.000	20.000	2.598.066.700	2.598.066.700	3.198.066.700
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	20	20	20			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	8	4	4	2	2.598.066.700	2.598.066.700	3.198.066.700
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5	3	3	3	1.098.066.700	1.098.066.700	1.698.066.700
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100	20	20	20	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian Dinas/Badan Daerah wajib menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan ber sasaran.

Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 (Perda 15 Tahun 2006)	Agenda Pemb. RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)	Misi RPJMD 2019-2023 (Perda 8 Tahun 2021)	Ren Strategis Daerah 2024-2026	RPD Kaltim 2024-2026
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Aspek Sumber Daya Manusia
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Aspek Ekonomi Wilayah
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	Aspek Lingkungan Hidup
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan seasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum	Memperkuat stabilitas politikhukum dan transformasi pelayanan publik	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Aspek Tata Kelola Pemerintahan

RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi

lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan telah menjalankan peran yang cukup penting dalam kemajuan pembangunan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sudah tentu pelaksanaan program pembangunan harus tetap dilaksanakan, namun perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan prioritas program yang telah ditetapkan sebelumnya, agar tujuan dan sasaran pembangunan lebih fokus terhadap permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan mengubah konstelasi arah pembangunan Kalimantan Timur. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru, Kalimantan akan membawa potensi pengembangan ekonomi yang lebih besar sekaligus menjadi episentrum pertumbuhan yang semakin merata di luar Jawa. Sehingga, akan muncul keterkaitan antar sektor dan antar wilayah yang baru yang akan mendorong pengembangan Kalimantan Timur di masa mendatang.

Ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur yang tinggi atas sumberdaya alam menghambat proses untuk menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi ekonomi untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sumber pertumbuhan ekonomi utama yang berbasis tenaga kerja low skilled dan sumber daya alam ke arah sumber pertumbuhan yang berbasis produktifitas. Hadirnya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi pemantik sekaligus peluang dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan kemandirian daerah Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya mendorong hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam, memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai pusat pertumbuhan berbasis maritim serta melalui pengembangan

dan pembangunan perkotaan yang lebih modern di Kalimantan Timur. Tahun 2024-2026 menjadi tahun yang penting untuk dapat meletakkan dasar rencana pembangunan ke depan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis saja, namun juga menyiapkan arah kebijakan untuk menangkap peluang yang ada dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan sosial.

Dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi serta ketergantungan pada harga pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjamin keberlanjutannya dan mendorong pengembangan ekonomi potensial melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dominasi kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap keberlangsungan pembangunan daerah telah menimbulkan ketergantungan terhadap sumberdaya yang tersedia pada sektor ini. Pada kenyataannya semenjak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 kontribusi penerimaan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami penurunan, baik penerimaan dari Batubara maupun dari Minyak dan Gas Bumi. Hal ini menjadi tugas bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menjamin ketersediaan energi melalui pengembangan sector Energi Baru Terbarukan dan sumber daya mineral lainnya baik dalam bentuk cadangan maupun produksi dan penjualan.

1.2. Landasan Hukum

Perencanaan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55333);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERA
- Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran guna melaksanakan masa transisi pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta penjabaran arah dan kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam program/kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral secara terpadu dengan arah yang jelas dan terintegrasi dengan dokumen rencana lainnya. Penjabaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 untuk perencanaan masa transisi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tujuannya adalah :

1. Menggambarkan kondisi pembangunan sector energi dan sumber daya mineral yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan;
2. Menjelaskan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan serta sasaran-sasaran tahunan yang harus dicapai selama periode perencanaan;
3. Acuan dalam perencanaan kerja dan kinerja tahunan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bab dengan rician sebagai berikut : :

- Bab I Pendahuluan : memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra perangkat daerah;
- Bab II Gambaran Pelayan Perangkat Daerah : menguraikan tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan memuat tantangan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;
- Bab III Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah : memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penentuan Isu-isu Strategis;
- Bab IV Tujuan dan sasaran : memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah dengan merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan : memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah;
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan : memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah, pagu indikatif, lokasi kegiatan, kelompok sasaran kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- Bab VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan : menyajikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah
- Bab VIII Penutup : Berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah sejak era reformasi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun di dalam perjalannya selama kurun waktu satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dengan beberapa peraturan turunannya mengalami perkembangan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan terakhir Pemerintah melakukan perubahan peraturan perUndang-Undangan tersebut dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal tanggal 2 Oktober 2014.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan mengenai pembagian urusan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) yang dijabarkan kedalam tiga urusan yang meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren dan termasuk dalam urusan pilihan, dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah, oleh sebab itu dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk penataan kembali kelembagaan dan fungsi organisasi perangkat daerah perlu dilakukan perubahan fungsi organisasi pemerintahan daerah khususnya yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan azas otonomi.

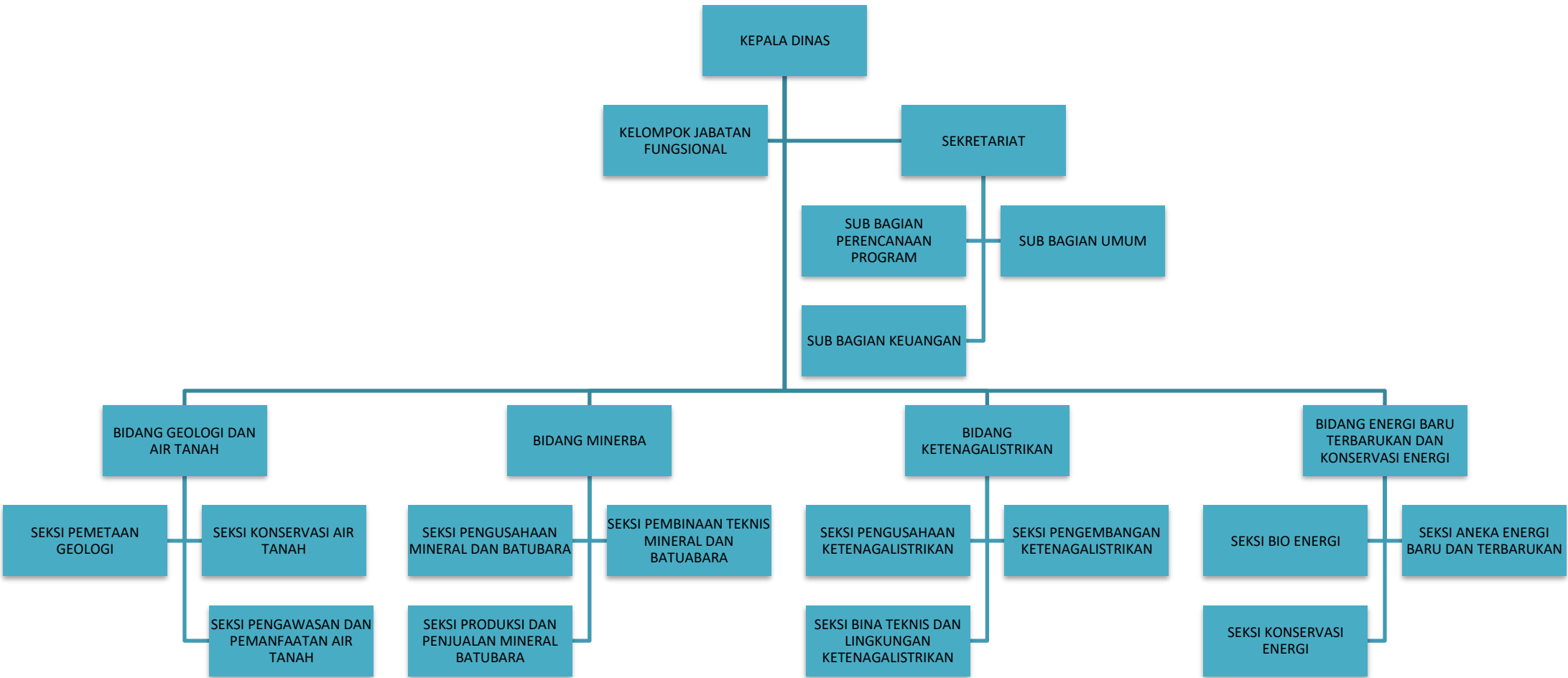
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan air tanah;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang energy baru terbarukan dan konservasi energi;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketetapan pencapaian sasaran program;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas
5. Mendistribusikan tugas kepada sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai program kerja masing-masing;
6. Menandatangani surat dinas sesuai dengan kewenangannya untuk terti administrasi;
7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknik bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas pokok Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kab/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbag Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LPKD, TEPPRA dan laporan program sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
 - f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
 - h. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi

anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- k. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatan agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- l. Mengawasi dan mengendahkan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- m. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
- n. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- o. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- p. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan, penerimaan penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- j. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi kegiatan inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Geologi dan Air Tanah dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pemetaan geologi, konservasi air tanah dan pengawasan dan pemanfaatan air tanah;
7. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknik pemetaan geologi, konservasi air tanah dan pengawasan dan pemanfaatan air tanah;
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada Pimpinan.

Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas :

1. Seksi Pemetaan Geologi; mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemetaan Geologi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemetaan Geologi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - Melakukan persiapan, penyelidikan, laboratorium, studio, dan pelaporan pemetaan geologi tematik skala lebih besar dari 1:50.000;
 - Melakukan pemetaan kawasan rawan bencana geologi skala lebih besar dari 1:50.000; dan
 - Penyusunan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara dan migas;
 - Membuat perkiraan lifting minyak dan gas bumi dan dana bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi;
 - Melaksanakan konsultasi daerah dalam rangka rencana penawaran wilayah kerja dan pengembangan lapangan wilayah yang pertama kali (plan of development);
 - Fasilitasi Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) antara kegiatan minyak dan gas bumi dengan kegiatan selain kegiatan minyak dan gas bumi;
 - Pemantauan pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh kegiatan minyak dan gas bumi;

- Memberikan advis teknis dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi serta advis teknis.pengelolaan sumur tua oleh KUD dan BUMD;
- Melakukan dan penyebaran data dan informasi geologi pada wilayah provinsi;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pemetaan Geologi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pemetaan Geologi di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan;

2. Seksi Konservasi Air Tanah; mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan penyelidikan dan pemantauan air tanah untuk penyusunan peta zonasi konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi (selain cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara);
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menetapkan

zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi (selain CAT lintas provinsi dan lintas negara);

- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk melakukan perlindungan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dari hal-hal yang akan mengancam kualitas dan kuantitas air tanah antara lain melalui pembatasan pemakaian air tanah dan perlindungan daerah imbuhan air tanah dalam Daerah provinsi;
- Pengeboran eksplorasi air tanah dan pemanfaatannya
- Mengelola dan menyebarluaskan informasi peta zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di dalam Daerah provinsi;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan konservasi air tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah; mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengawasan

dan Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi teknik air tanah dalam Daerah Provinsi oleh dinas teknik terkait kepada instansi penerbit izin (selain cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara);
- Mengelola data rekomendasi teknik air tanah dan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian/pemanfaatan, dan izin perusahaan air tanah serta nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi teknik yang tertuang dalam izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian/pemanfaatan, dan izin perusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.
- Menetapkan nilai perolehan air tanah sebagai bahan untuk perhitungan pajak air tanah.
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pengawasan dan pemanfaatan air tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

D. Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengusahaan mineral dan batubara, pembinaan teknik mineral dan batubara serta produksi dan penjualan mineral dan batubara;
7. Melakukan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknik pengusahaan mineral dan batubara, pembinaan teknik mineral dan batubara serta produksi dan penjualan mineral dan batubara;
8. Melakukan bimbingan teknik bidang mineral dan batubara, fasilitasi permasalahan bidang mineral dan batubara dan koordinasi dengan sektor lain;
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi realitas kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi

serta upaya pemecahan;

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari :

1. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan evaluasi permohonan IUP Mineral dan Batubara, evaluasi laporan dan bimbingan laporan RKAB, FS, Laporan Eksplorasi dan Operasi Produksi, evaluasi permohonan kegiatan IUP dan SKT, penyusunan pedoman dan standar evaluasi IUP Mineral dan Batubara, penyusunan data statistik IUP, pertimbangan teknik permohonan IUP Mineral dan Batubara baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi, melaksanakan Comissioning dan evaluasi pematokan batas IUP, menyelesaikan permasalahan tumpang tindih IUP dan permasalahan lahan kegiatan usaha pertambangan;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perusahaan mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan

Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan penerbitan Izin Tangki BBC, Gudang Bahan Peledak, Kartu Izin Meledakkan dan pengesahan Kepala Teknik Tambang, menyelenggarakan kegiatan persetujuan RKTTLAB Perusahaan Pertambangan, bimbingan teknik kegiatan Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara, melaksanakan monitoring dan evaluasi K3 dan Lingkungan Pertambangan, melakukan fasilitasi permasalahan pada kegiatan pembinaan Teknik Mineral dan Batubara serta melakukan koordinasi dengan sektor lain;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pembinaan teknik mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pembinaan

Teknik Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan penerbitan Surat keterangan belum produksi dan surat keterangan untuk Penjualan Batubara, melaksanakan advise teknik penerbitan IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan, IUP OP khusus penjualan dan izin blanding, menyelenggarakan kajian teknik pengolahan dan atau pemurnian, bimbingan teknik kegiatan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara, monitoring dan evaluasi Produksi dan Penjualan, Pembayaran PNBPN Mineral dan Batubara dan rekapitulasi data CSR di sekitar perusahaan, melaksanakan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Penjualan Mineral dan Batubara serta PNBPN, fasilitasi permasalahan pada kegiatan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara serta koordinasi dengan sektor lain;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

E. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
7. Melakukan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
8. Melakukan bimbingan teknik bidang energi, fasilitasi permasalahan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan koordinasi dengan sektor lain;
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

10. Melakukan monitoring dan evaluasi realitas kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

Bidang Energi, terdiri dari :

1. Seksi Bio Energi, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi teknik dalam rangka penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang kegiatan pemanfaatan bioenergi yang kegiatannya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - f. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi teknik dalam rangka penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
 - g. Melakukan inventarisasi/evaluasi kebutuhan bahan bakar dan ketersediaannya termasuk bio energi dalam rangka pemanfaatannya;
 - h. Menyelenggarakan penyediaan energi dengan

memanfaatkan bio energi untuk masyarakat;

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan bio energi;
 - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
 - k. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan bio energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - m. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Bio Energi di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.
2. Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. Menyusun Rencana Umum Energi Daerah.
 - f. Melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi aneka energi baru dan terbarukan dalam rangka pemanfaatannya,

termasuk inventarisasi pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi baik yang telah berizin maupun yang belum berizin.

- g. Menyelenggarakan penyediaan energi untuk masyarakat dengan memanfaatkan aneka energi baru dan terbarukan.
 - h. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan.
 - j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi;
 - k. Monitoring dan evaluasi kegiatan usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi;
 - l. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - m. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Aneka Energi Baru dan Terbarukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - n. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
 - o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.
3. Seksi Konservasi Energi, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat

waktu;

- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Evaluasi laporan pemakaian energi listrik dan air semua SKPD se-Kaltim untuk mengetahui tingkat efesiensi penggunaan listriknya.
- f. Membuat laporan pemakaian/penghematan energi listrik SKPD se-Kaltim ke Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kemneterian ESDM setiap 6 (enam) bulan sekali
- g. Sosialisasi Penghematan Energi dan Air agar dapat terwujud pola hidup hemat energi listrik di Kabupaten yang bersangkutan
- h. Melakukan pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Energi Listrik dan Air di Ling. SKPD Kab./Kota dan SKPD Provinsi Kaltim agar Tercipta Pola Hidup Hemat Energi Listrik dan Air.
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Konservasi Energi di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

F. Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, pengembangan serta teknik

dan lingkungan ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengusahaan, pengembangan serta teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
7. Melakukan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan pengusahaan, pengembangan serta teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
8. Melakukan pembinaan inspektur ketenagalistrikan provinsi;
9. Melakukan bimbingan teknik, fasilitasi permasalahan bidang ketenagalistrikan dan koordinasi dengan sektor lain;
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi realitas kegiatan Bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan

melaporkan kepada pimpinan.

Bidang Ketenagalistrikan, terdiri dari:

1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - Melakukan penerbitan rekomendasi teknik izin operasi (IO), wilayah usaha, izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) dan/atau IUPTL sementara yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika, persetujuan harga jual tenaga listrik, persetujuan sewa jaringan tenaga listrik, persetujuan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri.
 - Melakukan pendampingan (witness) lembaga inspeksi dan penerbitan atau nomor register sertifikat laik operasi, fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha ketenagalistrikan serta perlindungan konsumen;
 - Melakukan pembinaan pemegang IO, IUPTL dan IUJPTL yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai

peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perusahaan ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Perusahaan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan inventarisasi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, potensi sumber tenaga listrik di daerah, kebutuhan listrik daerah, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD), dan data ketenagalistrikan daerah;
- Melakukan evaluasi penyusunan RUPTL, penyusunan tarif tenaga listrik yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi,
- Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di

daerah yang belum berkembang, terpencil dan perdesaan;

- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pengembangan ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Seksi Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan pengawasan dan inspeksi teknik pemegang IO, IUPTL dan IUJPTL yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemberian pertimbangan sanksi atau pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelayakan teknik, lindung lingkungan;
- Melaksanakan pemantauan pembangunan sarana/infrastruktur ketenagalistrikan, CSR/Comdev dan pengelolaan lingkungan pada usaha ketenagalistrikan;

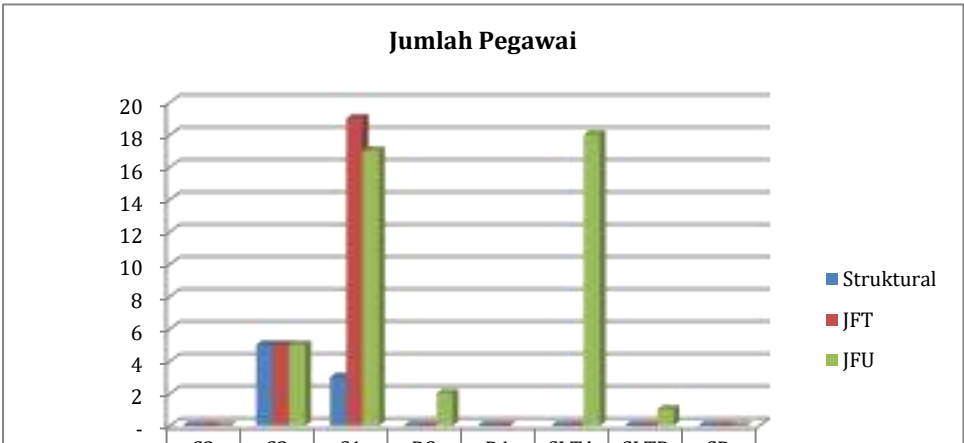
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan teknik dan lingkungan ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang paling penting dan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berupaya secara berkesinambungan tetap menjaga peran sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas demi kelancaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berdasarkan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.



2.2.2. Aset, Sarana, dan Prasarana

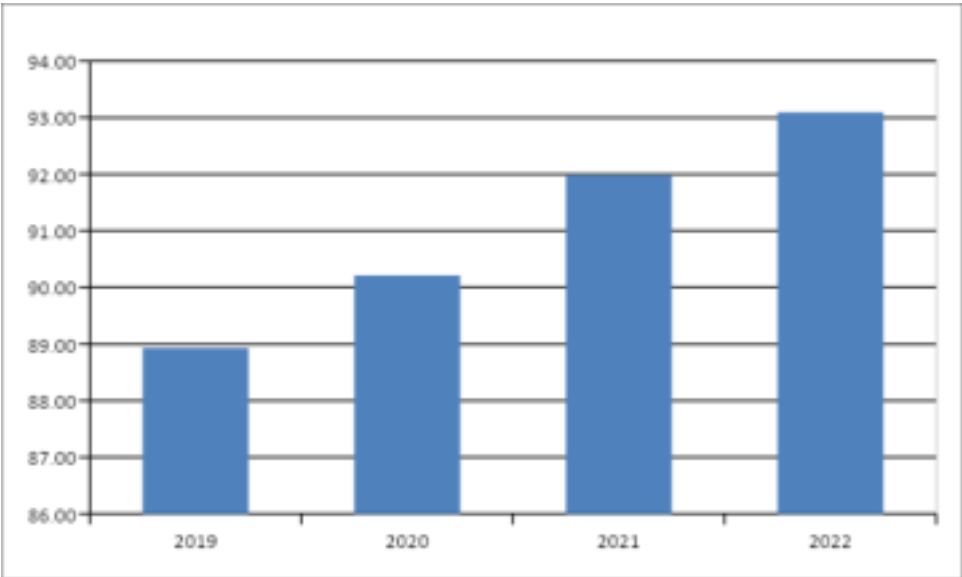
Aset, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik berupa barang modal bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana diuraikan pada Lampiran-2.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dinilai dari pencapaian target sebagaimana sasaran/indikator yang tercantum dalam Renstra periode Tahun 2019-2023.

Bidang Urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral termasuk dalam kategori urusan pilihan, sehingga kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi diukur berdasarkan indikator yang telah disepakati, dan tidak memiliki indikator SPM maupun IKK sebagaimana pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

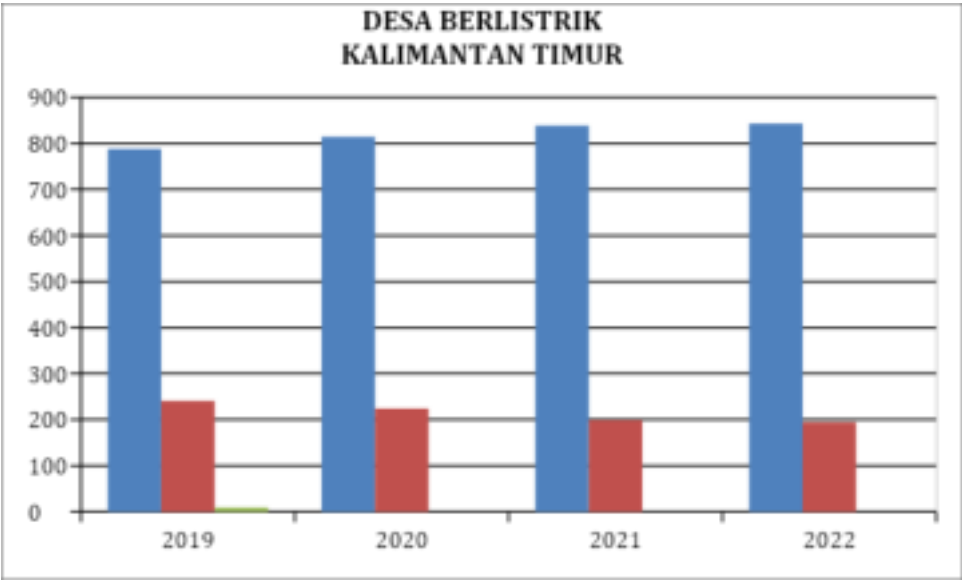
1. Persentase rumah tangga pengguna listrik



Jumlah penduduk Kalimantan Timur meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 3.551.187 jiwa menjadi 33,892,006 jiwa pada Tahun 2022, sedangkan jumlah KK pada Tahun 2019 sebanyak 1.137.384 menjadi 1,286,389 Kepala Keluarga pada Tahun 2022. Pada tahun 2019 jumlah Jumlah Kepala Keluarga pengguna Listrik (RE) sebanyak 1.011.485 menjadi 1.197.475 pada Tahun 2022 atau sebesar 93.03%. Pertumbuhan KK berlistrik dari periode Tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga pada akhir Tahun 2023 jumlah KK berlistrik Provinsi Kalimantan Timur sebesar 93.28% atau sebanyak 1.200.000 KK.

Faktor-faktor penyebab meningkatnya Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 adalah infrstruktur ketenagalistrikan semakin baik yang ditandai dengan pembangunan-pembangunan pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik yang sudah ada sehingga tercatat secara produksi listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltimara mengalami surplus. Disamping itu pula dari pembangunan sector Energi berupa penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari tenaga matahari (PLTS) selama kurung waktu 2019-2022 pembangunan PLTS Terpusat yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 21 Desa dengan kapasitas 637.44 kWp terdiri dari 1.775 Jumlah Rumah/Fasum/Pelanggan.

2. Rasio ketersediaan daya listrik



Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 788 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 241 Desa.

Dalam rangka mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dengan melaksanakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi meliputi public utilities, telekomunikasi, sanitasi (air minum, air limbah domestik dan persampahan), pekerjaan umum (jalan, bendungan, irigasi, drainase, dan sektor transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang) dan ketenagalistrikan.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan adalah melalui pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan seperti jaringan distribusi untuk masyarakat dengan arah kebijakan yang dilakukan adalah penambahan akses infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah 3T.

Aspek Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dimana ditandai dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan pemanfaatan dan peningkatan kualitas air, air laut, udara dan lahan yang bersinergi dengan upaya penurunan

emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mendorong pembangkitan listrik dengan menggunakan EBT dan pengembangan bahan bakar nabati dengan melakukan Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan sumber Energi Baru Terbarukan yang dapat meningkatnya pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk meningkatkan jumlah KK berlistrik yang bersumber dari EBT.

Memasuki era Tahun 2000, sektor tambang non migas yakni batubara menggeser posisi sektor tambang migas. Di era ini mulai lahirnya perusahaan-perusahaan tambang baru, baik skala CV sampai skala-skala yang lebih besar yaitu Perseroan Terbatas. Harga batubara yang tergolong tinggi dan permintaan yang begitu banyak untuk batubara thermal membuat investor domestik dan luar negeri tergiur untuk berinvestasi. Memasuki Tahun 2011, sektor pertambangan batubara mulai tak lagi dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Kalimantan Timur. Anjloknya harga batubara akibat krisis ekonomi global dan penurunan konsumsi untuk batubara menjadi penyebab utamanya. Hingga akhir Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni minus 0,85 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019, pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur tercatat mencapai 4,47 persen. Pada Tahun 2022 Triwulan III menurun kisaran 3,53%.

Kondisi Kaltim saat ini berbeda, akibat pandemic covid-19 menyebabkan terhempas jauh dan terlalu terlena dengan komoditas batubara. Selain karena harga batubara yang jatuh dan kondisi perekonomian global, banyak faktor yang membuat batubara ini tak diminati lagi. Semua ini terjadi karena faktor belum siapnya masyarakat untuk menerima dampak anjloknya bisnis pertambangan. Perekonomian menurun mengakibatkan daya jual dan daya beli di kalangan masyarakat pun ikut menurun. Kalimantan Timur tidak siap dan terlalu terlena karena booming pertambangan. PDRB disumbang sebagian besar dari komoditas batubara sehingga kalau sumbangan komoditi berkurang berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019, harga batubara hanya berada di kisaran US\$ 78,44 per ton menjadi US\$ 345 per ton pada Tahun 2022. Hal ini dipicu karena krisis perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi belakangan ini menyebabkan harga batubara melonjak jauh dari tahun 2019. Batubara sama dengan bahan bakar fosil artinya adalah sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain, seperti gas alam, memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara.

Dengan tingkat produksi saat ini (dan apabila cadangan baru tidak ditemukan), cadangan batubara global diperkirakan habis sekitar 112 tahun ke depan. Cadangan batubara terbesar ditemukan di Amerika Serikat, Russia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Kalimantan Timur merupakan salah satu tempat cadangan terbesar di Indonesia selain Sumatra dan Kalimantan Selatan.

Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil (terutama batubara) akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga batubara terus menjadi sumber energi vital. Kendati begitu, teknologi batubara bersih dalam pertambangan batubara akan sangat diperlukan di masa mendatang (sebagian karena faktor komersil) dan Indonesia diharapkan akan terlibat secara aktif di

dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang terkait dengan pertambangan batubara, seperti pengembangan waduk-waduk coalbed methane (CBM) yang potensinya banyak dimiliki oleh Indonesia, telah mulai mendapatkan perhatian belakangan ini.

Salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah pemerataan sarana infrastruktur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk tim obligasi daerah yang memiliki tugas untuk membiayai sarana infrastruktur yang masih tertinggal seperti jalan, jembatan, air bersih dan terutama kebutuhan energy listrik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai sangat penting untuk dapat menarik investor berinvestasi di wilayah Bumi Etam ini.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			TINGKAT CAPAIAN		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.135.000	1.165.000	1.200.000	1.143.453	1.197.475	1.200.000	100,74	102,79	100,00
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	%	6,08	7,34	8,40	6,53	7,27	8,40	107,40	99,05	100,00
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang terpetakan	%	33	33,64	38,38	27,50	29,50	38,38	83,33	87,69	100,00
4	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	%	35	50	50	35	70,46	50	100,00	140,92	100,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	82	83	84	82	83	84	100,00	100,00	100,00

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	INDIKATOR	Satuan	PAGU			Realisasi			TINGKAT CAPAIAN		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	KK	46.921.080.638	44.245.192.659,20	59.911.034.460	39.092.429.018	41.149.510.955,20	59.911.034.460	83,32	93,00	100,00
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	%	2.219.129.000	2.184.337.000	5.450.847.000	1.812.325.181	2.003.793.750	5.450.847.000	81,67	91,73	100,00
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang terpetakan	%	1.949.999.960	1.181.515.399	2.280.786.700	1.430.449.240	1.062.333.414	2.280.786.700	73,36	89,91	100,00
4	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	%	2.225.000.000	2.220.630.250	1.423.175.808	1.319.969.362	1.505.896.450	1.423.175.808	59,32	67,81	100,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	22.164.685.402	21.461.319.924,80	23.888.624.462	18.791.116.082	19.683.881.144	23.888.624.462	84,78	91,72	100,00

Beberapa Keberhasilan Indikator Kinerja seperti pada Tabel T-C.23 diatas, pelaksanaan program kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Setiap peningkatan pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Kontribusi pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berkontribusi sangat besar bagi keberhasilan program/kegiatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dan kreativitas pemerintah daerah di dalam merumuskan model pembangunan daerah sesuai kewenangannya, melalui pendekatan komunikasi pembangunan dengan seluruh komponen pembangunan di daerah baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Model pembangunan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah adalah penerapan pola kemitraan pemerintah-swasta. Hal ini tentunya akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Keberadaan swasta yang berinvestasi dalam sektor pertambangan dan energy Provinsi Kalimantan Timur merupakan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi sejak melakukan kemitraan dengan swasta (investor) dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Kemitraan pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui kerjasama pembangunan sarana-saran pembangkit listrik yang menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan bersama berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan, dimana masing-masing mitra mengalokasikan sumber daya dalam mendukung kegiatan program.

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan program sebagai model pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah

tertinggal dan hasil prakarsa dan inisiatif lokal dalam era desentralisasi dan otonomi daerah dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Model kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program adalah wujud keberpihakan swasta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung Kalimantannya untuk turut serta dalam membangun dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal selama ini selalu mengandalkan kemampuan sumber daya dan organisasi pemerintah daerah.

Kombinasi kerjasama antara dua lembaga yang berbeda orientasi antara pemerintah daerah dengan swasta (investor) melalui pola kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini didasarkan pada perbedaan karakteristik dan orientasi kedua organisasi kemitraan ini, dimana pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang memiliki orientasi sosial, sedangkan swasta merupakan organisasi privat yang berorientasi keuntungan (komersial). Kesadaran baru mengenai perlunya dikembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan pada era persaingan global, bahwa tidak mungkin lagi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri. Kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan yang terbatas sementara permasalahan pembangunan yang kompleks memerlukan penanganan yang komprehensif dan memadai, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan swasta untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dengan tetap memaksimalkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan.

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program/kegiatan dipandang sebagai nilai baru dalam pembangunan daerah yang berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal serta memberikan pandangan bahwa pembangunan dan pemberdayaan

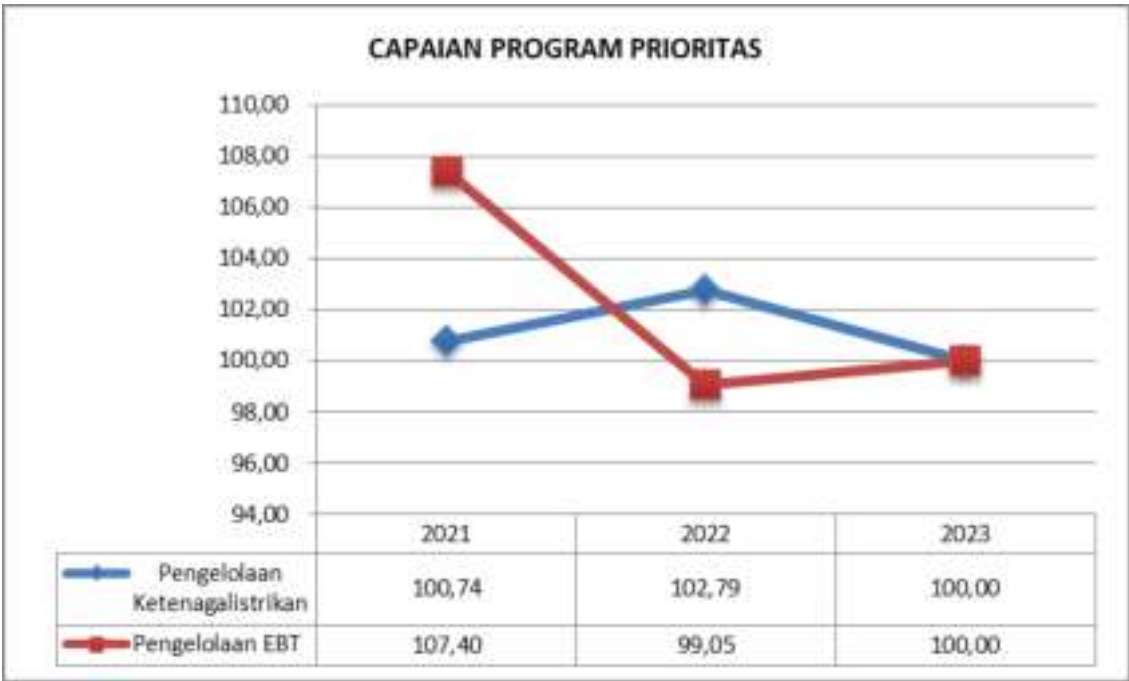
masyarakat bukan lagi semata-mata menjadi tanggung Kalimantanb pemerintah daerah dalam arti formal, akan tetapi menjadi tanggung Kalimantanb bersama swasta dan masyarakat. Sinergitas ketiga faktor pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode Renstra Tahun ke 3 Dinas Pertambangan dan Energi berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada periode Tahun 2013-2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan 4 Prioritas Pembangunan sebagaimana table berikut :

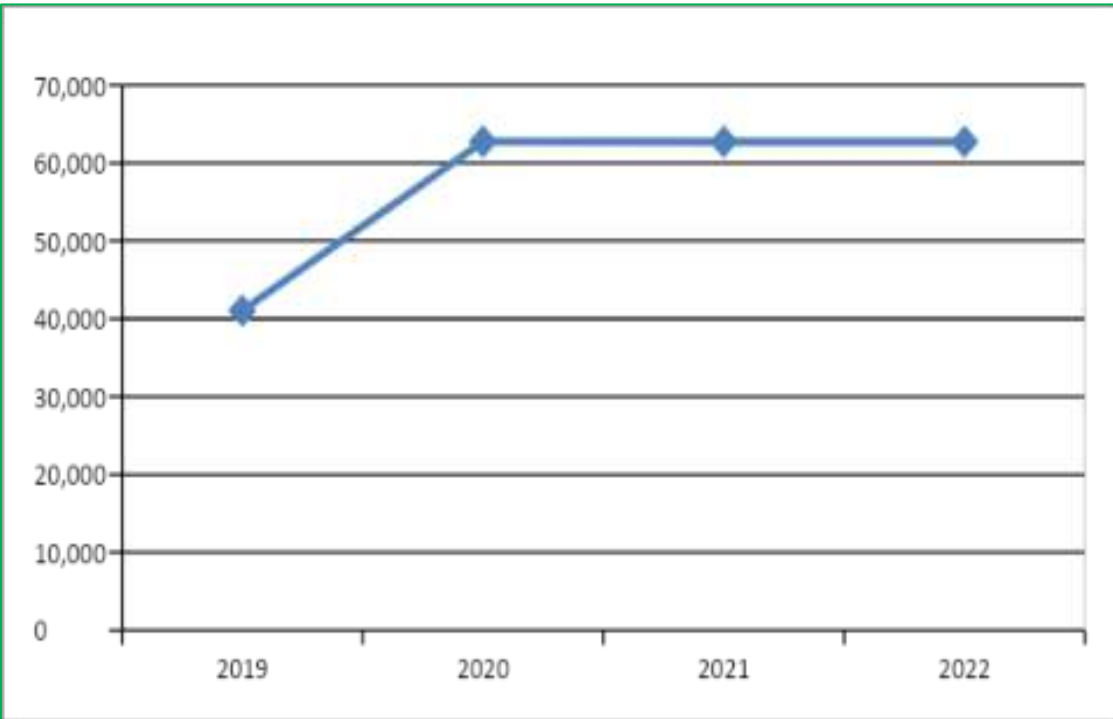
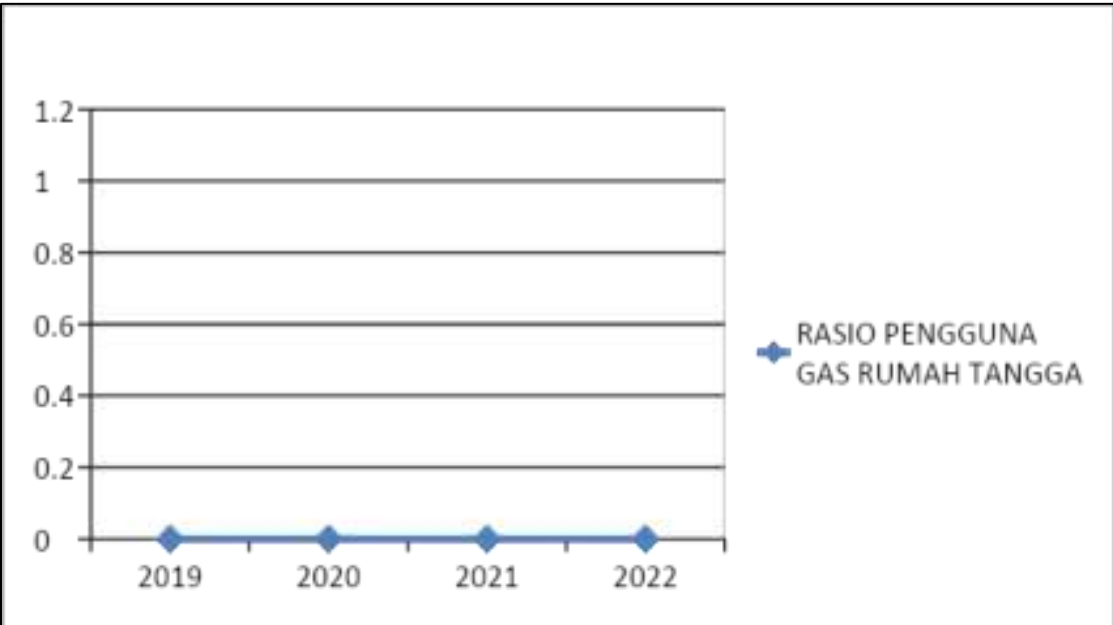
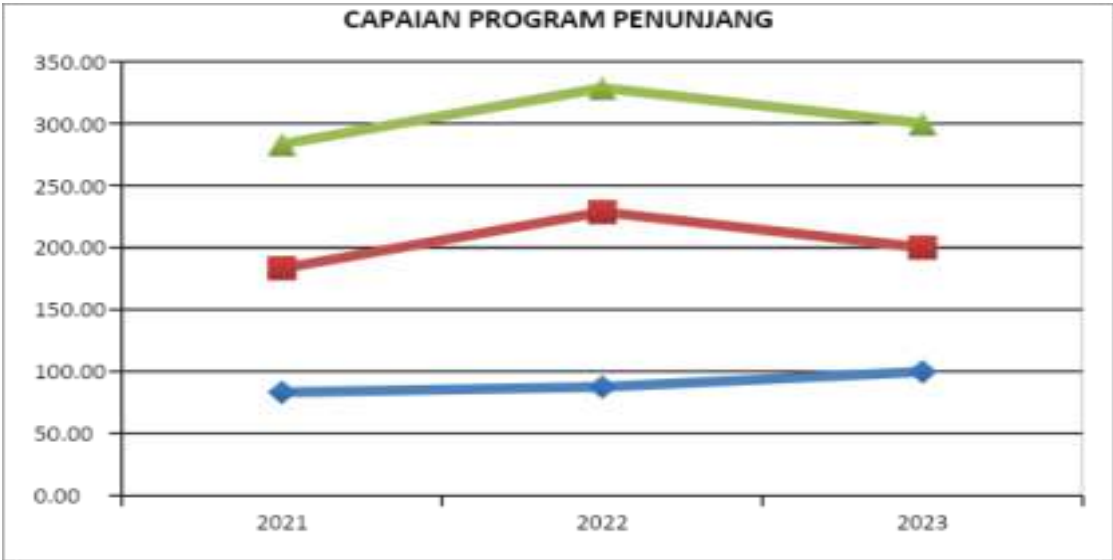
Tabel 2.2
Program Prioritas Tahun 2019-2023

No	Program	INDIKATOR	Target		
			2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	1.165.000	1.200.000
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	6,08	7,34	8,40

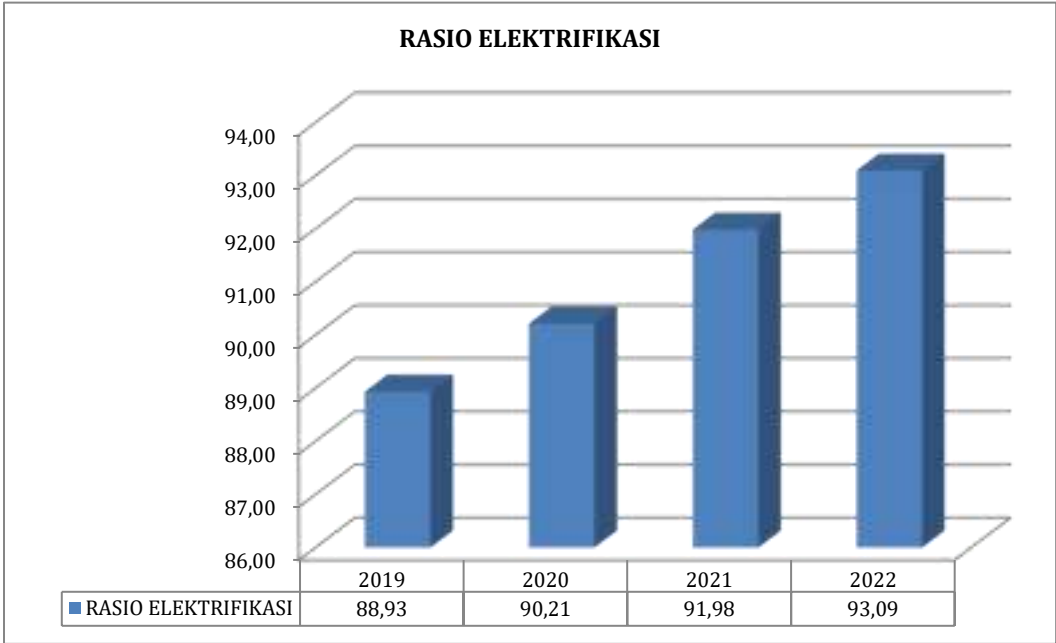
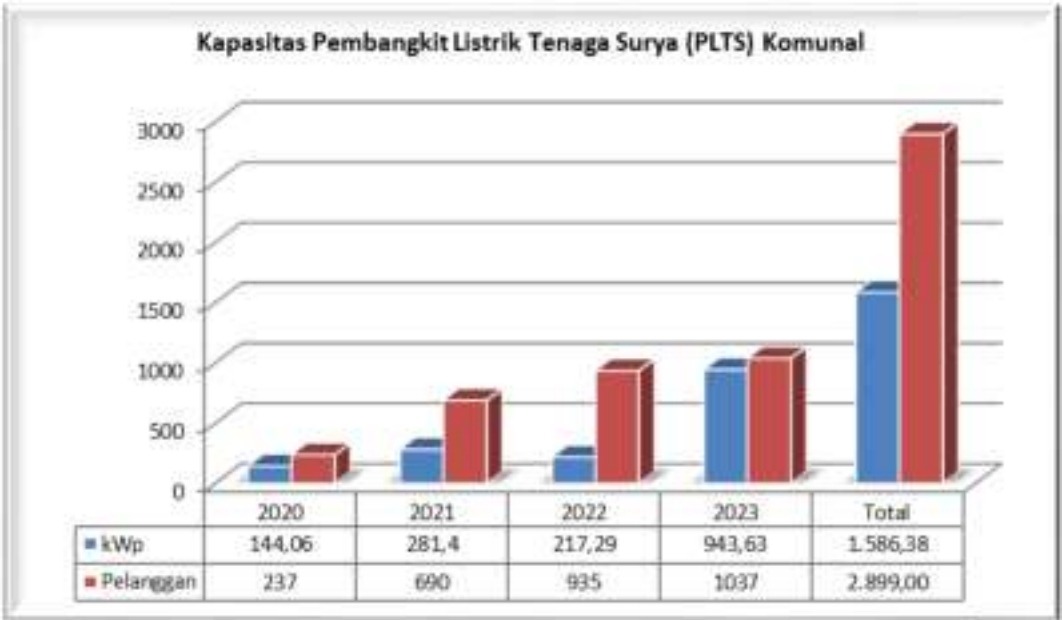
Realisasi Capaian Program Prioritas
Tahun 2021-2023



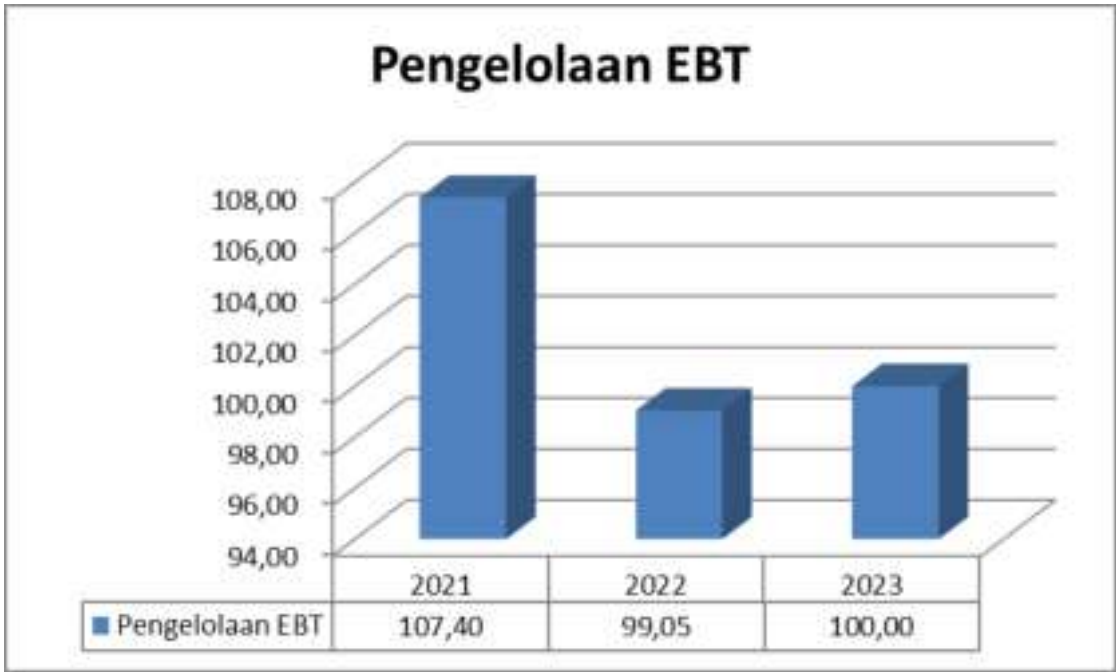
A. Kinerja Pelayanan Penunjang



B. Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Ketenagalistrikan



C. Kinerja Pelayanan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi



Keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang sangat membanggakan karena besarnya partisipasi pelaku swasta dan masyarakat dalam pencapaian realisasi yang melebihi target. Pencapaian pada Bidang energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melebihi target Tahun 2021, karena seluruh rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim berjalan sesuai rencana.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik untuk masyarakat, dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah

padat penduduknya, Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik menggunakan genset dan listrik PLN yang menyala tidak lebih dari 6 jam perharinya. Sebanyak 199 Desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat kebutuhan energi listrik berbasis potensi local tersedianya di seluruh desa yaitu potensi energi matahari selalu tersedia diseluruh Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah yang sangat luas pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari merupakan pilihan yang lebih baik mengingat masalah Infrastruktur jaringan PLN yang hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya saja.

Belum Optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan, besarnya potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur tidak cukup signifikan memacu pencapaian bauran energi. Hal ini disebabkan pemanfaatannya belum secara optimal belum memenuhi target yang direncanakan dimana untuk pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala seperti lokasi, sebagian besar berada dikawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, bioenergy, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang belum termanfaatkan sepenuhnya secara nyata.

Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan

konservasi energy, Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Cell) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) serta jumlah potensinya yang sangat besar dan merata di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Wattpeak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Selain sinar matahari pemanfaatan sumber energy baru terbarukan juga sangat melimpah diantaranya Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang bersumber dari limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas, limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka, limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, biomass seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal, belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi menjadi kendala dalam pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang berdampak pada terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kalimantan Timur, lambatnya penetapan cekungan air tanah karena keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah, belum ditetapkannya zona konservasi air tanah karena kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas, database dan sistem informasi hidrogeologi belum tersedia, terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan serta belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan

air tanah di Provinsi Kalimantan Timur.

Belum optimalnya pemanfaatan sumber Daya alam yang berwawasan lingkungan, hal ini menyebabkan masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis sehingga belum optimalnya inventarisasi atas Pengumpulan, Penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian, belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB.

Potensi permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral seperti tersebut diatas menjadi basis utama perumusan permasalahan dan isu-isu strategis. Permasalahan disusun berdasarkan sebab indikasi dari berbagai data kondisi daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait sector Energi dan Sumber Daya Mineral dan berbagai data lainnya yang akan diuraikan untuk mengetahui faktor penyebab baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan idintifikasi factor-faktor penyebabnya adalah :

1. Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya
2. Belum Optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan

- 3. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi
- 4. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal
- 5. Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis

Upaya untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan telah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dengan serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian ESDM, Renstra kabupaten/kota, serta RTRW Provinsi Kalimantan Timur berimplikasi terhadap pelayanan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024-2026 ke depan, berbagai tantangan yang harus dihadapi/dilaksanakan diwujudkan menjadi peluang pembangunan sector Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Bidang Geologi dan Air Tanah	
Tantangan	Peluang
Belum termanfaatkannya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah, lingkungan geologi dan kawasan pertambangan dan peta daerah rawan bencana geologi serta pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah	Optimalisasi pengelolaan air tanah, inventarisasi dan pemetaan sumberdaya geologi
Undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi , dimana kegiatan usaha hulu dan hilir migas adalah kewenangan pemerintah pusat	Terdapat wilayah kerja migas di wilayah Kaltim : 1. 0–4 mill untuk Kabupaten/Kota diantaranya : Vico Indonesia, PT. Pertamina EP Asset 5, Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia (Cico), Pertamina Hulu Attaka, Chevron Indonesia Company East Kalimantan, Pertamina Hulu Mahakam , 2. 4–12 mill untuk provinsi diantaranya Chevron Indonesia Company East Kalimantan , Total E&P Indonesia, Pertamina Hulu Attaka, Pertamina Hulu

	Mahakam, diatas 12 mill untuk pemerintah pusat diantaranya : Pertamina Hulu Attaka, Pertamina Hulu Mahakam, Eni Muara Bakau B.V.
Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan Kegiatan Hulu dan Hilir Migas Ketersediaan kelembagaan atau perusahaan daerah yang focus pada pengelolaan kegiatan hulu dan hilir migas terkait PI 10% Aturan yang mengatur mekanisme dan tata kelola terhadap pengelolaan PI 10 % antara kontraktor pertamina dengan perusahaan daerah yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati yang berbadan Hukum,	Permen No. 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 % pada wilayah kerja migas, maka terdapat wilayah kerja migas di kaltim akan berubah status dari eksplorasi ke produksi atau habis masa kontraknya (POD I) diantaranya : - o WK Bontang (Salamander Energy) - o WK Rapak (Chevron Rapak) - o WK Ganai (Chevron Ganai) - o WK Paser (Paser Petroleum Resources) - o WK Wain (Pandawa Prima Lestari) - o WK Sanga-sanga (VICO Indonesia) - o WK East Kalimantan & Attaka
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana penetapan sumberdaya dan cadangan, penetapan rawan bencana adalah kewenangan pemerintah pusat.	Adanya rekonsiliasi data sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan daerah.
Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 telah memperluas lingkup tugas dan kewenangan daerah provinsi khususnya dalam sub urusan air tanah, yang mencakup kegiatan inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, konservasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan	Daerah provinsi dapat mengatur sendiri pengelolaan air tanah secara terpadu, sehingga potensi air tanah dalam daerah provinsi dapat mendukung program pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan air bersih untuk semua keperluan sesuai dengan skala prioritas.
Intensitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk.	Pengaturan pengelolaan air tanah melalui produk perundang-undangan di daerah agar pemanfaatan air tanah dapat berkesinambungan dan menerus

Bidang Mineral dan Batubara

Tantangan	Peluang
Perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi hanya mineral bukan logam dan batuan untuk pemerintah Provinsi.	Optimalisasi Pelayanan tata kelola pertambangan baik dari sisi administrasi perizinan maupun pembinaan dan pengawasan teknis dapat lebih difokuskan.
Pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan banyak yang berskala kecil, dan berdampak pada kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dalam melakukan pertambangan.	Penyampaian informasi dan petunjuk teknis dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada pengusaha dalam bentuk yang lebih sederhana, informatif, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Proses perizinan MBLB lintas stakeholders	Optimalisasi penggunaan OSS, dengan melakukan peningkatan terhadap hal hal yang belum terlingkupi.
Masih kurangnya koordinasi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan program PPM yang dilaksanakan perusahaan.	Pengawasan terpadu terkait keberhasilan program PPM yang melibatkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
Pendapatan daerah yang berasal dari penjualan mineral bukan logam dan batuan belum optimal.	Sinkronisasi dan kolaborasi Dinas ESDM bersama Bapenda Kabupaten/Kota untuk tarif dan harga jual patokan Mineral bukan logam dan batuan dengan memasukkan variable yang berpengaruh seperti klasifikasi besar usaha, harga pasar terkini dan terbaru,, dan aspek lainnya.

Bidang Ketenagalistrikan

Tantangan	Peluang
Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan luasnya wilayah (terutama wilayah yang desanya belum terkoneksi dengan	Meningkatkan penganggaran kegiatan terkait dengan pembangunan infrastruktur tenaga listrik terutama di pedesaan (Program /

transportasi darat (jalan) maupun air yang memadai)	Kegiatan Listrik Pedesaan)
Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembebasan/pinjam pakai lahan pada area perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	Mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur
Belum optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh PLN (khususnya sector Perkebunan)	Mendukung, dan membantu koordinasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bagi Badan Usaha Swasta yang mempunyai usaha penyediaan tenaga listrik yang terkoneksi dengan PLN (baik berbentuk IPP maupun excess power).
Masih adanya masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai pemasangan instalasi dan biaya penyambungan listrik PLN.	Mendorong Pemerintah dan Perusahaan Swasta untuk membangun Sambungan Listrik PLN di rumah
Kurangnya kesadaran tentang keselamatan & lingkungan ketenagalistrikan (K2) pada Pelaku Usaha Ketenagalistrikan	Banyaknya usaha ketenagalistrikan yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan Ketenagalistrikan

Bidang Energi Baru dan Terbarukan

Tantangan	Peluang
Lokasi terpencil, terluar dan tertinggal, tidak memiliki akses terhadap energi.	Pembangunan dalam rangka penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat.
Harga jual energi listrik yang berasal dari Energi Baru terbarukan masih mahal sehingga belum kompetitif	Pemerintah memberikan insentif yang cukup terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan dan berperan serta dalam menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan
Lokasi yang memiliki potensi energi terbarukan jenis tenaga air, biogas dan biomassa terletak didaerah terpencil	Mendorong perluasan jaringan transmisi dan distribusi energi hingga mencapai daerah yang memiliki potensi energi terbarukan atau menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi pada lokasi-lokasi yang dekat dengan daerah yang memiliki potensi energi terbarukan tersebut.
Kurangnya budaya dan kesadaran serta pengetahuan tentang hemat energi	Penyebar luasan informasi dan pengetahuan hemat energi pada masyarakat dan industri yang belum menggunakan energui secara efisien.
Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri energi baru dan terbarukan di Prov. Kaltim belum berkembang	Terbuka peluang usaha dalam infrastruktur, jasa dan industri bidang energi baru dan terbarukan
Diversifikasi bahan bakar kendaraan bermotor, dari BBM ke Penggunaan Motor/kendraan Listrik	Mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik kepada pengguna kendaraan bermotor

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktorfaktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktorfaktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi basis utama perumusan permasalahan dan isu-isu strategis. Permasalahan disusun berdasarkan sebab indikasi dari

berbagai data kondisi daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait sector Energi dan Sumber Daya Mineral dan berbagai data lainnya yang akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya insfrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya	1. Kendala dalam pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik 2. Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai sambungan Listrik 3. Belum optimalnya pembinaan, Pengawasan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 4. Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik PLN karena jauhnya jangkauan dari jaringan PLN, sehingga perlu dibangun infrastruktur listrik dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan yaitu PLTS terpusat sehingga masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam 5. Masih adanya pelaku usaha tenagalistrikan yang belum memahami perizinan usaha ketenagalistrikan dan kurangnya kesadaran tentang keselamatan ketenagalistrikan (K2)
Belum optimalnya peningkatan pembangkit listrik dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Belum Optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan	1. Belum optimalnya cakupan Pelayanan Listrik Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan 2. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil 3. Belum optimalnya pembinaan, pengusahaan dan pengendalian pengusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan
	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi	1. Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah 2. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil

		3. Masih rendahnya persentase konsumsi energi di Kalimantan Timur dari sumber energi baru terbarukan
Belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal	1. Masih terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kaltim 2. Belum ditetapkannya cekungan air tanah, yang disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah 3. Belum ditetapkannya zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas 4. Belum tersedianya database dan sistem informasi hidrogeologi 5. Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan 6. Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah
Belum optimalnya pemanfaatan sumber Daya alam yang berwawasan lingkungan	Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis	1. Belum optimalnya inventarisasi atas Pengumpulan, Penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 2. Belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian 3. Belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 4. Belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Melaksanakan penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, pengelolaan dan penyelamatan lingkungan pertambangan, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.

Pendekatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilandaskan atas Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang berkesesuaian terhadap tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim Periode 2019-2023 (Tahun ke-Empat), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Surat Menteri ATR/BPN No B/PB.01/280/II/2023 tentang Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kaltim) serta Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (PERGUB No. 79 Tahun 2019).

Peran penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 yaitu Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional dengan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendorong ketersediaan kebutuhan dasar akan energi listrik yang bersumber dari PLN yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil serta meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai salah satu upaya mendukung transisi energi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian adalah arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri;
2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (availability), akses masyarakat terhadap energi (accessibility) pada harga yang terjangkau (affordability) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (acceptability).

Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Strategi Kementerian ESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM yang tercakup dalam 5 (lima) agenda pembangunan adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan 1 : *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas*

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sektor ESDM adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT;
- b. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan ketenagalistrikan;

- c. Perkembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT.

Agenda Pembangunan 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah kepulauan. Secara umum arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan pada sektor ESDM adalah pemenuhan kebutuhan energi untuk menjamin pemerataan melalui konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran dan petani sasaran serta pemberian bantuan konverter kit untuk nelayan dan mesin pompa air bagi petani.

Pemberian bantuan berupa konverter kit merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM pada kapal nelayan kecil, dengan mengalihkan dari konsumsi BBM dalam hal ini premium yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih. Melalui pembagian konverter kit, nelayan kecil dapat melakukan penghematan biaya melaut, menaikkan daya beli masyarakat nelayan, menumbuhkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM nelayan kecil, menghemat biaya operasional sebesar Rp. 30.000 – Rp. 50.000/hari, mengurangi konsumsi BBM, serta penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan aman.

Penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan ditargetkan sekitar 100.000 paket pada periode 2020-2024. Sedangkan penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk petani sebanyak 50.000 paket pada periode 2020-2024. Perubahan target penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani disebabkan keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19.

Pemberian bantuan dilaksanakan melalui strategi :

Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan:

1. Alokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 78.190 GWh pada tahun 2024;
2. Alokasi LPG 3 kg untuk masyarakat, usaha makro, nelayan dan petani sasaran dengan target 8.614-8.870 juta metrik ton pada tahun 2024;
3. Konversi minyak tanah ke LPG, tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 mengingat keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19. Program ini hanya akan direalisasikan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 1.106.905 unit;
4. Pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Agenda Pembangunan 4 : *Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*

Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 yang terkait dengan sektor ESDM akan difokuskan pada :

1. Infrastruktur pelayanan dasar berupa pengelolaan air tanah

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Dalam periode 5 tahun RPJMN 2020-2024 indikator pembangunan sumur air tanah untuk air baku ditargetkan sebesar 3.000 sumur. Namun setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pembangunan sumur air tanah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian PUPR, sehingga KESDM mulai tahun 2021 tidak memasukkan indikator tersebut dalam Renstra. Sedangkan untuk tahun 2020 indikator tersebut berubah menjadi eksplorasi dan pelayanan sumur pantau air tanah dengan target 570 sumur dan untuk tahun 2021 sampai 2024 indikator berubah menjadi pengembangan jaringan pemantauan air tanah (Cekungan Air Tanah/CAT) dengan target total 52 CAT.

2. Energi dan ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan. Lima arah kebijakan dan strategi untuk mendukung implementasi pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan;
2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik;
3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik;
4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan;
5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

**Agenda Pembangunan 5 : Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim**

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut :

- a. Menerapkan standar emisi pembangkit listrik;
- b. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sektor ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
- d. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan ketentuan reklamasi dan/atau pascatambang pada lahan bekas tambang oleh pemegang IUP dilaksanakan dengan :
 - Perencanaan dalam dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
 - Penetapan dan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
 - Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; dan
 - Pelaporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

- f. Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) melalui sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

2. Peningkatan ketahanan bencana;

Strategi peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang terkait dengan Sektor ESDM mencakup penanggulangan bencana yang dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dilaksanakan dengan :

- a. Pemantauan bencana geologi
- b. Pemetaan geologi dan KRB geologi
- c. Sosialisasi dan diseminasi informasi kampanye rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi.
- d. Rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi,

3. Pembangunan rendah karbon.

Strategi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK terhadap baseline khusus untuk sektor energi dengan target penurunan mencapai 142 juta ton CO₂ di tahun 2024, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penerapan efisiensi energi di sisi penyediaan dan pemanfaatan energi (industri, transportasi, bangunan, rumah tangga);
- b. Pengelolaan EBT melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta peningkatan pasokan BBN dari bahan baku rendah karbon;
- c. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi;
- d. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan CCT dengan boiler SC dan USC untuk PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW;
- e. Pengalihan bahan bakar (fuel switching) untuk mengurangi pemakaian BBM; dan f. Update faktor emisi batubara untuk kegiatan inventarisasi dan mitigasi emisi GRK

Berdasarkan identifikasi arah kebijakan dan strategi seperti diuraikan diatas, KESDM telah menyusun perencanaan strategis (Renstra) periode Tahun 2020-2024 dan mencanangkan kondisi yang diharapkan terwujud pada akhir

periode perencanaan Tahun 2024 sebagaimana tercermin dalam visinya yaitu :

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata”

Upaya untuk mewujudkan Visi diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
3. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
5. Menjamin ketersediaan energi nasional;
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Untuk mewujudkan kondisi seperti yang dinyatakan dalam visi tersebut, KESDM menetapkan tujuan jangka menengah yang harus dicapai beserta sasaran-sasaran tahunan, sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Tujuan-1 | : | Peningkatan kemandirian dan ketahanan energi |
| Tujuan-2 | : | Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah |
| Tujuan-3 | : | Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM |
| Tujuan-4 | : | Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan Geologi yang cepat dan akurat |

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;

5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Dari uraian visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM diatas terlihat adanya kesamaan beberapa permasalahan yang juga ditemui di daerah, dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur akan mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan visi Kementerian ESDM.

Kondisi Energi dan Sumberdaya Mineral

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempengaruhi kondisi Provinsi Kalimantan Timur di antaranya adalah :

1. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;
2. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;
3. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah kehutanan;
4. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;
5. Rasio elektrifikasi sebesar 84.21% sehingga, masih 15.79% Kepala Keluarga yang belum mempunyai akses tenaga listrik;

6. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal;
7. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, maka terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM yang harus diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian ESDM adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, dengan upaya kemandirian energi di Kalimantan Timur melalui pengembangan energi baru terbarukan;
2. Terwujudnya peningkatan peran Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan daerah, dengan upaya peningkatan infrastruktur sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Terwujudnya pengurangan beban subsidi di BBM dan Listrik, dengan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
4. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan, diharapkan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan efek berantai dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Terkait dengan program yang terdapat dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, perlu ditelaah sasaran pada Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diidentifikasi sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Telaahan Sasaran
Renstra Kementerian ESDM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian ESDM	Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM	Belum tersedianya data dan informasi secara terukur	Belum disusun dan ditetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).	Potensi energi dan sumberdaya mineral yang menyebar dan sangat besar di setiap Kabupaten dan Kota
			Konflik kepentingan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi serta PD terkait (Kehutanan, perkebunan dan Lingkungan Hidup serta LSM Pemerhati Lingkungan Hidup	- Minat investor cukup tinggi - Meningkatnya kebutuhan sector energy dan sumber daya mineral
2	Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam Penerimaan Negara	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM	Kurangnya ketaatan pelaku usaha penambang terhadap aturan PerUU dan kurangnya pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN	- Wilayah cakupan pembinaan dan pengawasan yang sangat luas - Jumlah pemegang IUP yang sangat banyak.
3	Terwujudnya Peran Penting Sektor ESDM Dalam Pembangunan Daerah	Konflik kepentingan sektoral dalam penetapan WIUP (Kehutanan, perkebunan dan Lingkungan Hidup)	Rentannya Kepastian Hukum bagi pelaku usaha serta kegiatan Pertambangan rentan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	Investasi sector ESDM berpotensi besar membangkitakan “MULTIPLIER EFEK”
		Hilangnya potensi pendapatan dari sector mineral dan batubara	Banyaknya tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat	Peluang usaha oleh pemodal untuk bekerjasama dengan masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangankarena lemahnya penegakan hukum
4	Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan	Rendahnya kualitas dan kuantitas pengetahuan pertambangan terkait Sumber Daya Manusia yang ada	Masih rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Banyaknya lulusan sekolah yang tidak memiliki keahlian berdsarkan sertifikasi keahlian (Non Skil)

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS RPJMD

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 yang secara umum memuat rencana strategis struktur dan pola pemanfaatan ruang akan berimplikasi terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan ditetapkan pusat-pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan lokal seperti:

1. Rencana sistem perkotaan;
2. Rencana Jaringan Transportasi meliputi Jaringan Transportasi Darat, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Transportasi Laut serta Transportasi Udara;
3. Rencana jaringan energi/kelistrikan, Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai macam jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan

Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi nasional serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan lima tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

4. Rencana jaringan telekomunikasi;
5. Rencana sistem jaringan sumber daya air, Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan amanah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan tujuan mewujudkan sumberdaya manusia global berkualitas, meningkatkan perekonomian global dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta pembangunan yang

berkelanjutan. Pada tahun 2014 oleh PBB dilakukan pembaharuan Milenium Development Goals (MDGs) menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) (TPB/SDGs) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Secara nasional telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berlanjutan (RAN TPB), dan terdapat amanah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berlanjutan (RAD TPB) setelah setahun Peraturan Presiden tersebut ditetapkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dibagi menjadi empat pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola, sedangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;

11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam mendukung capaian TPB/SDG's Dinas Energi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan yang sangat strategis secara langsung ataupun tidak langsung yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam aspek pelaksanaan dan implementasi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) secara langsung sebagaimana pada Tujuan 7 TPB/SDG's dari 17 Tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Matrik TPB/SDG’s Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN TPB		TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPD
7	Energi Bersih dan Terjangkau	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (%)
				7.1.1.(a)	Rasio Desa Berlistrik 24 jam	Rasio Desa Berlistrik 24 jam	
				7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		
				7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*		
		7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energy terbarukan	
		7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.		

Rekomendasi Pertambangan Batubara

1. Skenario penurunan produksi batubara bertahap yang paling direkomendasikan adalah skenario ke-2 dengan tingkat penurunan produksi sebesar 5% per tahun, sehingga produksi batubara akan berhenti total pada tahun 2033.
2. Selama penurunan produksi ini upaya pemulihan lahan bekas tambang hingga menyerupai fungsi awal penyediaan lahan dan air dapat didekati.
3. Upaya penurunan produksi disertai dengan pengalihan bertahap tenaga kerja ke sektor produktif yang lain.

Berikut ini adalah usulan perubahan dan/atau penyesuaian KRP berdasarkan hasil kajian enam muatan KLHS untuk aspek pertambangan batubara.

Rekomendasi Kebijakan/Rencana Pertambangan Batu Bara

No. KRP	Deskripsi	Arahan Rekomendasi	Usulan Perubahan/ Penyesuaian KRP
4.	Kebijakan/ rencana pertambangan batubara	- Perlu memastikan proses pemulihan lahan bekas tambang batubara dapat mengembalikan fungsi penyediaan air dan lahan pertanian - Perlu evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap hasil pemulihan lingkungan - Perlu memastikan proses penurunan produksi dan pengalihan fokus ke hilirisasi produk pertambangan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih fatal - Rencanakan pengalihan tenaga kerja ke sektor lain yang prospektif - Mempertahankan vegetasi alami sejalan dengan penurunan target produksi - Membuka lahan untuk pertambangan tidak di areal berhutan	Penurunan bertahap produksi batubara harus dilakukan dengan memperhatikan: - Pemulihan lahan bekas tambang ke fungsi penyediaan lahan dan air - Pengalihan fokus ke hilirisasi produk batubara - Pengalihan bertahap tenaga kerja ke sektor produktif

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi tujuan, sasaran, output, outcome, pembiayaan dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun (2024-2026) mendatang menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah satu daerah dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar. Sebagai daerah yang sebagian besar dikuasai perusahaan pertambangan Mineral dan batubara serta perkebunan menyumbang emisi karbon terbesar dibandingkan sektor lain. Perijinan pertambangan batubara telah mengurangi total luas hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur kedua setelah perijinan sector perkebunan. Total luas lahan ijin pertambangan hingga Tahun 2018 seluas : 1.851.053,31 Ha atau sebesar 57,85% dari total luas ijin perkebunan (3.2 juta Hektar). Hilangnya fungsi hutan akibat penambangan ini diperkirakan sebesar 10-12% dari jumlah total luas lahan hutan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada dikawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, biomassa dan gelombang laut; berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Potensi energi air terinventarisasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten diantaranya Kabupaten Kutai Timur jumlah potensi sebesar 250 kW, Kabupaten Paser jumlah

potensi 1.020 kW, Kabupaten Berau jumlah potensi 342 kW, Kutai Kartanegara jumlah potensi 120 kW, Kabupaten Kutai Barat jumlah potensi 1.380 kW, Kabupaten Mahakam Ulu jumlah potensi 392 kW dengan jumlah total potensi air Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3.112 kW.

- Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Untuk Kalimantan Timur intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 8.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaiik atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut.
 - Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-5 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 4 knot.
3. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 24 jam di Kalimantan Timur belum optimal; Sementara potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.
- Daya terpasang pembangkit listrik PT PLN (Persero) di Kalimantan Timur dan listrik swasta (*Independen Power Producer/IPP*) sampai dengan Semester I Tahun 2018 mencapai 1.283 MW, panjang Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 1599 Kms, Panjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 4926 Kms, Panjang Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 4934 Kms, Gardu Induk (GI) 1.786 MVA berjumlah 33 unit, dan Gardu Distribusi 855 MVA.
4. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).
- Komoditas penambangan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi batubara yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Sampai akhir Tahun 2017 luas Penambangan Tanpa Izin yang telah dimonitoring seluas 38 Ha dan yang telah ditertibkan bersama aparat penegak hukum seluas 30,1.

- Selain komoditas batubara aktivitas penambangan liar juga terjadi pada komoditas bahan galian C yang tersebar hampir diseluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Timur. Kewajiban untuk mengurus perijinan kadang kala terkendala oleh jarak dan biaya yang sangat besar untuk dapat mengurus perijinannya di Provinsi, hal tersebut disebabkan karena perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimana Otonomi Daerah berada di Provinsi.
5. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.
- Pengelolaan Mineral adalah usaha pertambangan mineral yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang.
 - Di Provinsi Kalimantan Timur jumlah izin pertambangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota sebanyak 1.404 IUP dengan rincian; Kabuapten Kutai Kartanegara berjumlah 625 IUP, Kabupaten Kutai Barat berjumlah 244 IUP, Kabupaten Paser berjumlah 67 IUP, Kabupaten Berau 93 IUP, Kabupaten Kutai Timur berjumlah 161 IUP, Kota Samarinda berjumlah 63 IUP dan Kabupaten Panajam Paser Utara berjumlah 151 IUP.
 - Sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 penataan perijinan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 1.404 IUP yang berstatus CNC sebanyak 457 IUP dan yang Non CNC berjumlah 418 IUP.
 - Sedangkan untuk target pencabutan, pengakhiran dan penyerahan pada periode yang sama sebanyak 875 IUP dengan rincian sebagai berikut :
 - Yang sudah diakhiri berjumlah 553 IUP (Bupati/Walikota berjumlah 166 IUP terdiri dari CNC 123 IUP dan Non CNC 43 IUP, sedangkan yang diakhiri oleh Gubernur berjumlah 387 IUP terdiri dari CNC 62 IUP dan Non CNC 325 IUP);

- Tahap evaluasi dokumen berjumlah 177 IUP dengan kategori CNC sebanyak 177 IUP;
 - Dengan kategori bermasalah sebanyak 57 IUP.
 - Permasalahan yang akan timbul akibat evaluasi dan penataan perizinan IUP di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
 - Izin yang telah dicabut melakukan gugatan melalui PTUN;
 - Pengurusan CNC berdasarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 sudah tidak ada lagi sehingga banyak pengusaha yang perizinannya dicabut melakukan gugatan ke OMBUSDMAN;
 - Surat Keputusan Penerbitan IUP banyak yang tidak diserahkan oleh Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan evaluasi penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang di Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian :
 - Jaminan Reklamasi sebesar Rp. 760.209.766.736,36 dan sebesar 50.740,45 US\$ dengan jumlah perusahaan sebanyak 829 IUP
 - Jaminan Pascatambang sebesar Rp. 137.009.324.835,11 dan 628.896,22 US\$ dengan jumlah perusahaan sebanyak 360 IUP.
 - Jumlah piutang PNBPN sampai akhir Triwulan I Tahun 2017 dari produksi batubara Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari; Iuran Tetap sebesar Rp. 3.351.183.597,45 dan 17.708.018,23 US\$, Royalti sebesar Rp. 51.916.438.679,19 dan 48.410.413,15 US\$. Sedangkan realisasi pembayaran hutang PNBPN pada periode yang sama untuk iuran tetap terdiri dari Rp. 40.886.516,02 atau sebesar 1.22% dan 270.376,38 US\$ atau sebesar 1.53%, royalty terdiri dari Rp. 635.828.973,20 atau sebesar 1.23% dan 3.014.279,07 US\$ atau sebesar 6.23%.
 - Jumlah lubang bekas tambang di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir Tahun 2017 berjumlah 537 void dengan rincian; di Kabupaten Berau sebanyak 29 void, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 10 void, Kabupaten Kutai Barat berjumlah 27 void, Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 264 void, Kota Samarinda berjumlah 130 void, Kabupaten Panajam Paser Utara berjumlah 10 void dan Kabupaten Paser berjumlah 67 void.
6. Kondisi geologi di Kalimantan Timur, membuka peluang investasi dan juga pengembangan wilayah. Namun demikian hal tersebut

membutuhkan pengaturan untuk menjamin keserasian pembangunan dengan daya dukung lingkungan. Adapun keadaan geologi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di pulau besar Kalimantan yang sangat luas dengan berbagai keanekaragaman karakteristik wilayah seperti kawasan perkotaan, perbatasan, pedalaman, terpencil, pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Secara geografis, posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4° 24' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara Malaysia. Batas antar negara dengan Malaysia dapat ditempuh melalui jalur darat meskipun harus melalui medan yang cukup sulit.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Kondisi ini akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40 persen dan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak

pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

Evolusi tektonik dari Asia Tenggara dan sebagian Kalimantan yang aktif menjadi bahan diskusi yang masih menjadi bahan kajian sampai saat ini. Pada zaman Kapur Bawah, bagian dari continental passive margin di daerah Barat daya Kalimantan, yang terbentuk sebagai bagian dari lempeng Asia Tenggara yang dikenal sebagai Paparan Sunda. Pada zaman Tersier, terjadi peristiwa interaksi konvergen yang menghasilkan beberapa formasi akresi, pada daerah Kalimantan. Selama zaman Eosen, daerah Sulawesi berada di bagian Timur kontinen dataran Sunda. Pada pertengahan Eosen, terjadi interaksi konvergen ataupun kolisi antara lempeng utama, yaitu lempeng India dan lempeng Asia yang mempengaruhi makin terbukanya busur belakang samudra, Laut Sulawesi dan Selat Malaka.

Wilayah Kalimantan merupakan daerah yang memiliki tektonik yang kompleks. Adanya interaksi konvergen atau kolisi antara 3 lempeng utama, yakni lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang membentuk daerah Timur Kalimantan. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan yang dihasilkan oleh perkembangan regangan cekungan yang besar pada daerah Kalimantan. Pada Pra-Tersier, Pulau Kalimantan ini merupakan salah satu pusat pengendapan, yang kemudian pada awal tersier terpisah menjadi 6 cekungan sebagai berikut:

1. Cekungan Barito yang terletak di Kalimantan Selatan,
2. Cekungan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur,
3. Cekungan Tarakan yang terletak di Timur laut Kalimantan,
4. Cekungan Sabah yang terletak di Utara Kalimantan,
5. Cekungan Sarawak yang terletak di Barat laut Kalimantan, dan
6. Cekungan Melawai dan Ketungau yang terletak di Kalimantan Tengah.

Di Kalimantan timur, terdapat 3 (tiga) pola patahan utama. Di antaranya Patahan Mangkalihat, Patahan Sangkulirang, dan

Megashear Adang. Serta terdapat pula Antiklinorium Samarinda. Potensi mineral yang terdapat di Kalimantan Timur ialah Batubara, Minyak dan Gas Bumi, emas, galena, dan lain-lain.

Isu – isu strategis tersebut merupakan akumulasi isu-isu strategis dari unit-unit yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

A. Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis Bidang geologi dan Air Tanah :

1. Perlindungan Karst.

Karst di Kalimantan Timur yang sudah dilindungi baru yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, yaitu melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 140 K/40/MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang–Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan karst pada daerah yang lain masih belum ditetapkan.

Pentingnya perlindungan karst ini dilakukan karena beberapa fungsi karst yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, yaitu sebagai pengatur alamiah tata air yang terdapat pada daerah itu dan sekitarnya serta menyimpan nilai ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu proses karsifikasi berupa proses pelarutan alamiah yang terus berjalan pada bentang alam karst menyebabkan terserapnya karbon dioksida yang ada di udara dan di dalam tanah. Terlebih lagi bila pada Kawasan karst tersebut tumbuh hutan, maka karbon dioksida juga akan terserap pada hutan tersebut melalui proses foto sintesa.

Melihat fungsi karst secara alamiah tersebut, maka kajian upaya perlindungan terhadap keberadaan Kawasan karst yang terdapat diseluruh Kalimantan Timur penting untuk dilakukan.

2. Perlindungan Keragaman Geologi

Diwilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat sejumlah keragaman geologi yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi,

langka, unik dan indah. Namun demikian sampai dengan sekarang ini keragaman geologi tersebut masih belum dilindungi menjadi warisan geologi, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi. Lebih dari itu, bila keragaman geologi tersebut telah ditetapkan menjadi warisan geologi, maka wilayah yang terdapat keragaman budaya dan keragaman hayati yang ada disekitar warisan geologi tersebut dapat dijadikan taman bumi (geopark) utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata. Upaya perlindungan keragaman geologi dan inventarisasi keragaman hayati dan keragaman budaya disekitar keragaman geologi tersebut saat ini sedang dilakukan untuk diusulkan menjadi taman bumi (geopark).

3. Isu strategis Air Tanah adalah belum adanya pedoman pengelolaan air tanah untuk menjamin kelestarian air tanah yang ada dan pengambilan air tanah yang berkeadilan. Akibat dari pada itu, maka belum ada pengaturan alokasi air tanah untuk berbagai sektor pengguna. Selain itu juga upaya konservasi air tanah masih belum optimal. Upaya konservasi yang dilakukan masih berupa, pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik sumur bor air tanah dan juga beberapa hutan kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Upaya tersebut masih belum cukup bila melihat akuifer-akuifer yang disadap sumur-sumur bor air tanah yang sudah ada dan pada waktu yang akan datang. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemetaan zona imbuhan berbasis hidrogeologi, yang menampilkan perlindungan bukaan akuifer yang disadap airnya oleh sumur-sumur bor air tanah yang ada. Sehingga terjadi recharge kedalam akuifer yang airnya disadap oleh sumur-sumur bor air tanah yang sudah ada maupun pada waktu yang akan datang.

Untuk menciptakan keadilan bagi berbagai sector pengguna, dan untuk menjamin tersedianya air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan secara swadaya dan juga untuk pertanian rakyat, maka sebaiknya pengambilan

air tanah dapat dilakukan pada semua akuifer, baik yang dangkal maupun yang dalam. Sedangkan Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum dan usaha mikro dan kecil, maka sebaiknya menyadap air pada kedalaman menengah. Sedangkan untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya, hanya diperbolehkan menyadap akuifer dalam.

Oleh sebab itu agar supaya pengelolaan air tanah dapat diarahkan untuk menjamin kelestarian air tanah yang ada dan pemanfaatan yang berkeadilan, maka pemetaan zona konservasi air tanah sedang dilakukan. Berdasarkan zona tersebut maka akan dibuat produk hukum yang mengatur pengelolaan air tanah berbasis lestari dan adil.

B. Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah:

1. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain. Sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material, disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling dan lainnya.
2. Maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) komoditas batubara dan batuan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan dari sektor mineral dan batubara.
3. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

4. Timbulnya implikasi hukum akibat penataan perijinan yang diserahkan ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan Kabupaten/Kota.

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan daerah selama bertahun-tahun. Sebagai merusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan. Deforestasi dan degradasi hutan akibat proses pertambangan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim global, karena perubahan penggunaan lahan hutan mejadi bukan hutan menyebabkan vegetasi hutan yang menyerap emisi CO₂ di udara semakin berkurang. Deforestasi dan degradasi hutan di kawasan pertambangan umumnya terjadi karena pembukaan lahan yang tidak diimbangi dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi bahkan cenderung ditinggalkan terbuka begitu saja yang menyebabkan berubahnya fungsi hutan., penataan perijinan dengan melakukan evaluasi keseluruhan adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurasi tingginya perubahan iklim global.

C. Bidang Ketenagalistrikan

Pada tahun 2022 desa belum berlistrik PLN 24 jam adalah :

18,02%, dari 1038 desa di Kalimantan Timur sebanyak 187 desa belum menikmati listrik PLN, dan Rasio Elektrifikasi (RE) sekitar 93,09%, Efisiensi penggunaan energy listrik belum optimal. Potensi energy terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan namun proses pengembangannya memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang tidak sedikit.

Belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai tahun 2022 rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 93,03%. Namun demikian tingkat elektrifikasi perdesaan telah mencapai 100%, prosentase ini termasuk desa berlistrik kurang dari 24 jam. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

D. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid yang sudah terbangun sebanyak 61 Unit dengan total kapasitas pembangkit sebesar 4.043,46 kWp dengan menggunakan baterai kering VRLA yang pada umumnya umur ekonomis baterai hanya 5 tahun. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam monitoring dan revitalisasi PLTS Terpusat tersebut.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tujuan yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada periode Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
3. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas
4. Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan
5. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merumuskan Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah
4. Tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi
5. Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas MBLB yang jadi kewenangan provinsi

Misi RPJPD Tahun 2020-2025 sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008 adalah Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional dengan Prioritas Pembangunan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur serta Mewujudkan pembangunan yang terpadu

dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi fokus Prioritas Pembangunannya adalah Menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pernyataan seperti tersebut diatas secara jelas mengisyaratkan pentingnya peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung tercapainya Misi tersebut.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional dan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi yang meliputi kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan, DED, Pembangunan PLTS Komunal pada daerah terpencil dan terisolir, pembangunan Instalasi Biogas, Pembangunan PJUTS dan Pembangunan PLTS Atap, survei dan inventarisasi, percobaan pemanfaatan (pilot project), serta pengembangan-pengembangan atau pemanfaatan skala besar, untuk mendukung tercapainya MISI RPJPD Kaltim Tahun 2020-2025.

Tabel T-C.26
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM

TUJUAN/SASARAN (RESNTRA)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (RENSTRA)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2022)	TARGET			PROGRAM (RENSTRA)
				2024	2025	2026	
TUJUAN 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	95,70	96,40	97,10	
Peningkatan infrastuktur ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.233.000	1.265.000	1.300.000	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
Tujuan 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran EBT	%	7,27	10,39	12,39	14,68	
Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT	Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100	100	100	100	1. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
	Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan	%	-	1	2	3	2. PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
Tujuan 3: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	85,00	85,50	86,00	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	85,00	85,50	86,00	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Tujuan 4 : Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan	Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan	Sumur	156	221	271	271	
Tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	km2	6.770	1.606	1.836	2.065	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
Tujuan 5 : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan	Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	80,00	85,00	90,00	
Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas mblb yang jadi kewenangan provinsi	Tindaklanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengaasan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	-	100,00	100,00	100,00	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

TABEL 4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
I. Indikator Kinerja Tujuan:								
1	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	-	95,7	96,4	97,1	97,1
2	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	7,27	-	10,39	12,39	14,68	14,68
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	-	85,00	85,50	86,00	86,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	-	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	80.01 A
4	Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan	Sumur	156	-	221	271	371	371
5	Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	-	80	85	90	90
II. Indikator Kinerja Sasaran:								
1.	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.200.000	1.233.000	1.265.000	1.300.000	1.300.000
2.	Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan	%	-	-	1	2	3	3
	Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84,41	85,00	79.30 BB	89,12	89,12
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	70,03 BB	78.10 BB	78.50 BB	86,51	100	100
4	Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	km ²	6.770		1.606	1.836	2.065	14.324
5	Tindakan lanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Penguasaan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	100	100	100	100	100	100

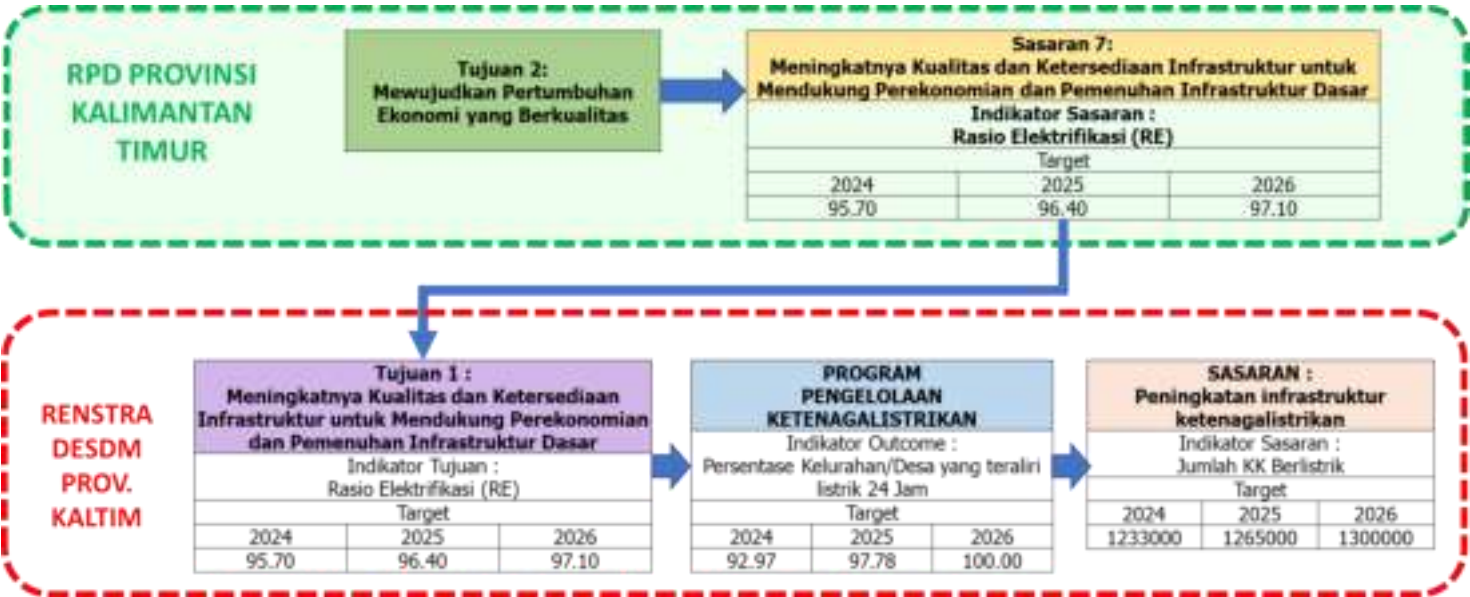
TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
TAHUN 2022-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	-	100	100	100	100

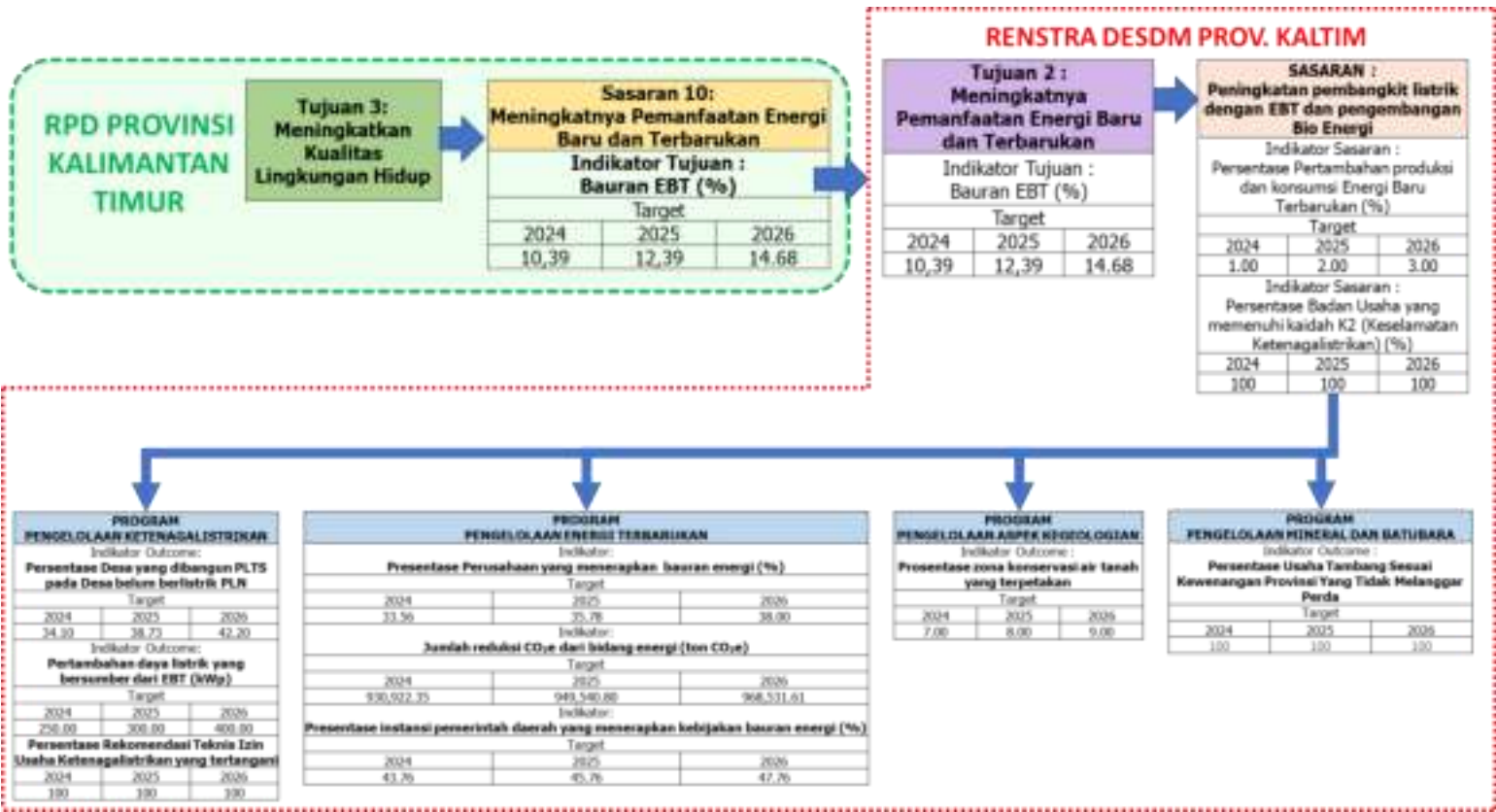
Sasaran dan tujuan sebagaimana disebut diatas diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariatan dan program strategis/teknis.

4.2 CASCADING KINERJA PD

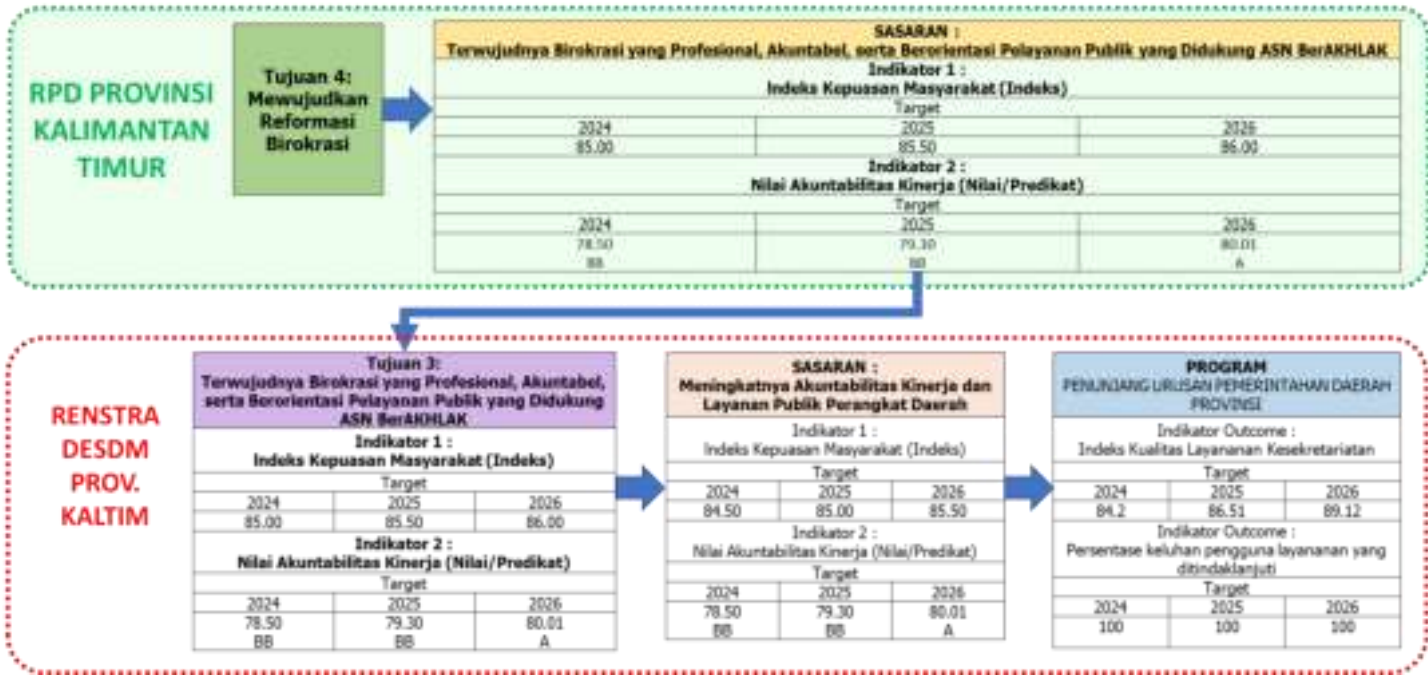
Cascading Tujuan 2 RPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DESDM Prov. Kaltim



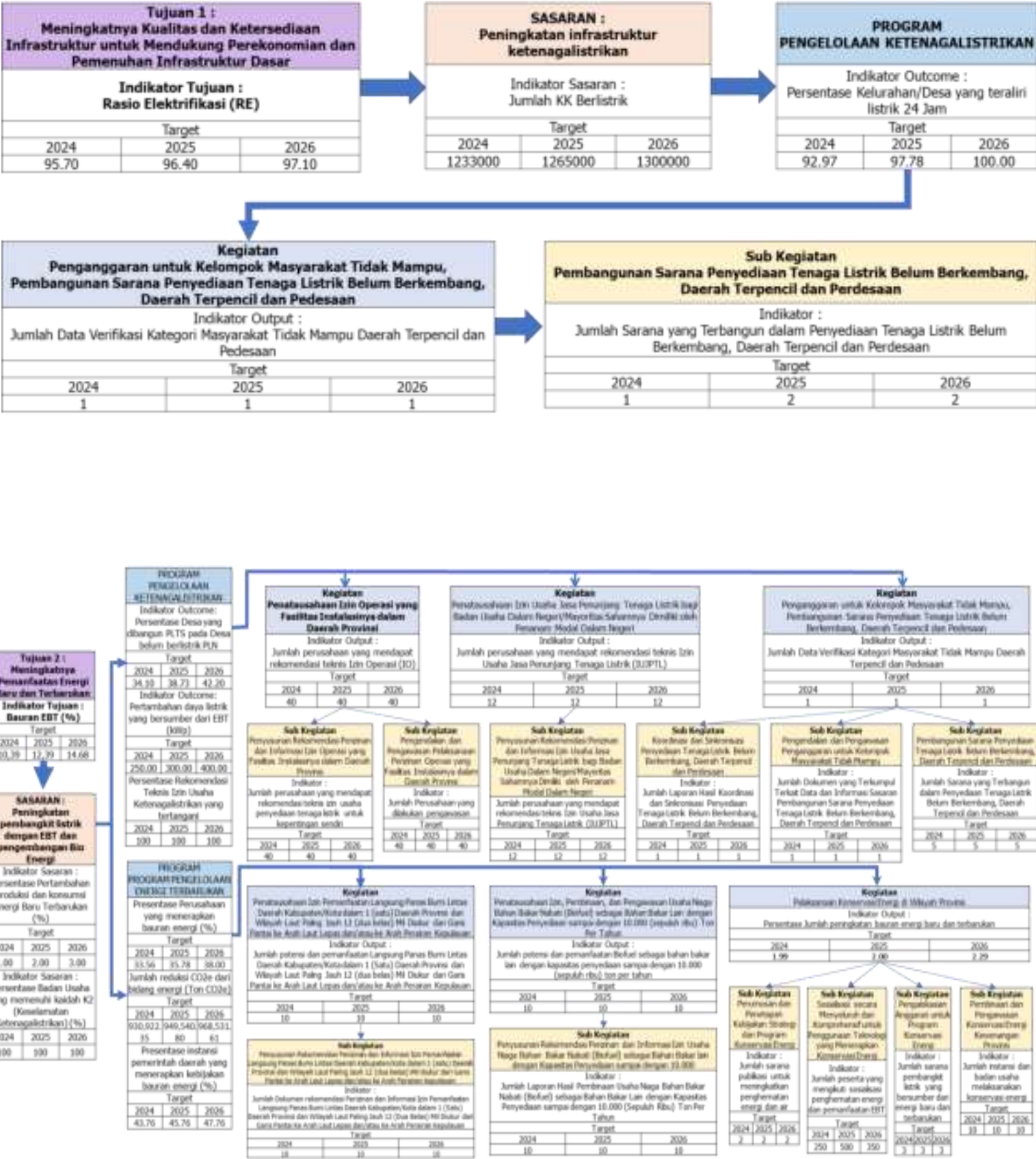
Cascading Tujuan 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DESDM Prov. Kaltim

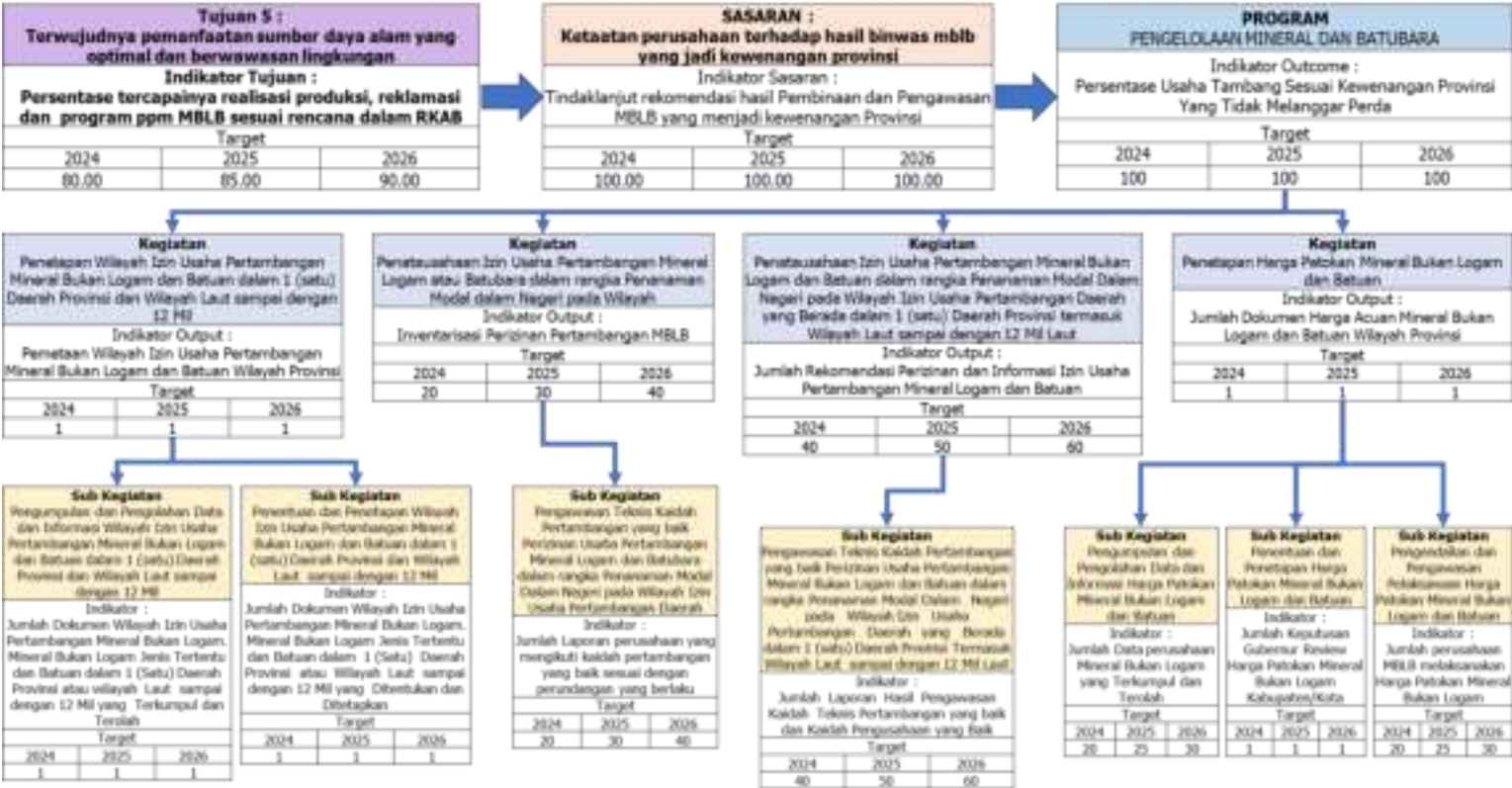


Cascading Tujuan 4 RPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DESDM Prov. Kaltim



CASCADING TUJUAN , SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026





BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral didaerah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, sebagai berikut, yaitu :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJKAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM

TUJUAN/SASARAN (RESNTRA)	STRATEGI (RENSTRA)	ARAH KEBIJAKAN (RENSTRA)
1	2	3
TUJUAN 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Peningkatan infrastuktur ketenagalistrikan	Meningkatnya akses infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah 3T
Peningkatan infrastuktur ketenagalistrikan	Pemenuhan Infrastruktur ketenagalistrikan daerah berkembang, terpencil dan terisolir	1. Pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik untuk daerah/desa yang belum terjangkau PLN. 2. Penyediaan pembiayaan pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN untuk masyarakat tidak mampu. 3. Pembinaan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
Tujuan 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan EBT
Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan EBT menggantikan energi konvensional	a. Inventarisasi potensi EBT b. Pembangunan infrastruktur EBT c. Pembinaan EBT d. Meningkatkan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi
Tujuan 3: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik secara transparan dan berintegritas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tujuan 4 : Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan	Pengelolaan air tanah berbasis lingkungan	Penurunan muka air tanah tidak melebihi ketentuan
Tersedianya data kualitas dan kuantitas air tanah	- Pengukuran muka air tanah - Analisa kandungan zat padat terlarut (TDS)	- Pengukuran muka air tanah paling sedikit 1 (satu) kali setahun - Analisa kandungan zat padat terlarut (TDS) paling sedikit 1 (satu) kali setahun

1	2	3
Tujuan 5 : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan	Mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui.
Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas mblb yang jadi kewenangan provinsi	Melakukan monitoring dan evaluasi ijin-ijin yang tumpang tindih dengan sektor lain / beda komoditas	a. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan izin lainnya agar dapat melakukan kegiatannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku b. Berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Melaksanakan keputusan gubernur tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	- Melakukan sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat terhadap Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara - Berkoordinasi dengan instansi terkait

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sasaran dan tujuan sebagaimana dijabarkan pada bab-bab terdahulu diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariatan dan program strategis/teknis.

Uraian program dan kegiatan tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026 terdiri atas 5 program dan 22 kegiatan serta 73 sub kegiatan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PILIHAN) :

1. Bidang Ketenagalistrikan

3.29.06	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29.06.1.05.01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan
3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

2. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.05.01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa
3.29.05.1.05.02	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas
3.29.05.1.05.06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas
3.29.05.1.05.08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.06.04	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, Produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
3.29.05.1.07.01	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
3.29.05.1.07.02	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
3.29.05.1.07.03	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
3.29.05.1.07.05	Revitalisasi Infrastruktur Aneka EBT
3.29.05.1.07.06	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
3.29.05.1.07.07	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
3.29.05.1.07.10	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
3.29.05.1.08.01	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
3.29.05.1.08.02	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
3.29.05.1.09.02	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
3.29.05.1.09.03	Perencanaan kegiatan konservasi energi
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
3.29.05.1.10.04	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
3.29.05.1.10.05	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

3. Bagian Sekretariat

3.29.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.29.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.29.1.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.29.1.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.29.1.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.29.1.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.29.1.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
3.29.1.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.29.1.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.29.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.29.1.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.29.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.29.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.29.1.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.29.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.29.1.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.29.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.29.1.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3.29.1.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.29.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.29.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.29.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.29.1.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.29.1.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.29.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.29.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.29.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.29.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.29.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.29.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.29.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.29.1.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material
3.29.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.29.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.29.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.29.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.29.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.29.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.29.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.29.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.29.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.29.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.29.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.29.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
3.29.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Bidang Geologi dan Air Tanah

3.29.02	PENGLOLAAN ASPEK KEGEOLGIAN
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.02.1.03.02	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah

5. Bidang Mineral dan Batubara

3.29.03	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								100.135.953.000		156.973.950.000		154.975.550.000	
Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar				Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93.09	95,70		96,40		97,10		97,10
	Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan			Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.233.000		1.265.000		1.300.000		1.300.000
		3.29.06	PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83,33	92,97	5.000.000.000	97,78	33.000.000.000	100,00	35.000.000.000	100,00
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dokumen	-	1	5.000.000.000	2	33.000.000.000	2	35.000.000.000	2
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Unit	-	4	5.000.000.000	2	33.000.000.000	2	35.000.000.000	6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan				Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	7,27	10,39		12,39		14,68		14,68
	Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT			Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi EBT	%	0	1		2		3		6
				Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	3.29.05	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	28,00	33,56	6.500.000.000	35,78	23.080.900.000	38,00	15.485.000.000	38,00	
			Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	136.682,402	243.246,516		484.906,515		726.566,514		726.566,514	
			Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	43,76	43,76		45,76		47,76		47,76	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen		1	100.000.000		-		-		1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target							
		3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	1	1	100.000.000	-	-	-	-	1
		3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	925.000.000	1	1.495.900.000	1	1.400.000.000	1
		3.29.05.1.05.01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	Dokumen	1	1	100.000.000	1	295.900.000	1	300.000.000	1
		3.29.05.1.05.02	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Laporan	3	3	100.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3
		3.29.05.1.05.06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1
		3.29.05.1.05.08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	1	1	625.000.000	1	750.000.000	1	650.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	150.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.06.04	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, Produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan	1	1	150.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	4.825.000.000	1,00	20.150.000.000	1,00	12.635.000.000	
		3.29.05.1.07.01	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Laporan	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6
		3.29.05.1.07.02	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	350.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.05.1.07.03	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3
		3.29.05.1.07.05	Revitalisasi Infrastruktur Aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit	1	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	3
		3.29.05.1.07.06	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen	8	8	100.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	18
		3.29.05.1.07.07	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	123	128	2.725.000.000	200	16.650.000.000	300	10.285.000.000	300
		3.29.05.1.07.10	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen		1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	1	1	150.000.000	1	235.000.000	1	300.000.000	1
		3.29.05.1.08.01	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	1	1	50.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1
		3.29.05.1.08.02	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Dokumen	1	1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1
		3.29.05.1.09.02	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	2	10	100.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10
		3.29.05.1.09.03	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Dokumen	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Laporan	1	1	150.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1
		3.29.05.1.10.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2	10	100.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10
		3.29.05.1.10.05	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	1	50.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Perusahaan	20	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	60
		3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	20	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	60
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dokumen	1	1	49.243.953.000	1	64.000.000.000	1	66.800.000.000	1
		3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	1	1	1.000.000.000	1	1.700.000.000	1	1.500.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	0	4	47.943.953.000	3	62.000.000.000	3	65.000.000.000	10
Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan				Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan	Sumur	156	221		271		271		271
	Tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi			Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	KM2	6.770	1.606		1.836		2.065		2.065
		3.29.02	PENGLOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	29,5	45,38	3.020.000.000	53,38	3.300.000.000	61,38	3.530.000.000	61,38
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	CAT	1	3	2.895.000.000	2	3.150.000.000	3	3.355.000.000	8
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.150.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	3	3	95.000.000	3	100.000.000	3	105.000.000	3
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	16	1.800.000.000	16	1.950.000.000	16	2.100.000.000	16
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1
		3.29.02.1.03.02	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan				Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	80,00		85,00		90,00		90,00
	Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas mblb yang jadi kewenangan provinsi			Tindakanjutan rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
		3.29.03	PENGLOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	100,00	2.750.000.000	100,00	4.675.550.000	100,00	5.027.550.000	100,00
		3.29.03.1.01	Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Peta	-	1	750.000.000	1	850.000.000	1	800.000.000	1
		3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	500.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen WIUP Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	Laporan	-	40	1.000.000.000	50	1.825.550.000	60	2.077.550.000	60
		3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik	Laporan	-	40	1.000.000.000	50	1.825.550.000	60	2.077.550.000	60

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Dokumen	-	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.150.000.000	1
		3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Data perusahaan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	20	300.000.000	25	700.000.000	30	750.000.000	30
		3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	1	200.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	-	20	500.000.000	25	750.000.000	30	800.000.000	30

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,10 BB	78.50 BB		79.30 BB		80.01 A		80.01 A
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	84,41	85,00		85,50		86,00		86,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,10 BB	78.50 BB		79.30 BB		80.01 A		80.01 A
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	84,41	85,00		85,50		86,00		86,00
		3.29.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	Indeks	77,35	84,2	32.122.000.000	86,51	26.617.500.000	89,12	26.833.000.000	89,12
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
		3.29.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100,00
		3.29.1.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1
		3.29.1.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.1.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
		3.29.1.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	60
		3.29.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	85,00	85,00	16.679.500.000	87,00	16.554.500.000	90,00	16.554.500.000	90,00
		3.29.1.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	73	73	16.000.000.000	73	16.000.000.000	73	16.000.000.000	73
		3.29.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	600.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12
		3.29.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.1.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1
		3.29.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	75.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4
		3.29.1.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1
		3.29.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	%	100,00	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00
		3.29.1.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
		3.29.1.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
		3.29.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	27,40	54,79	372.000.000	61,64	475.000.000	68,49	660.000.000	68,49
		3.29.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	150.000.000	1	140.000.000	1	175.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.1.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
		3.29.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	40	220.000.000	45	300.000.000	50	450.000.000	50
		3.29.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	Unit	5	5	2.772.000.000	5	2.516.000.000	5	2.491.500.000	5
		3.29.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	30.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5
		3.29.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10	70.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	30
		3.29.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1
		3.29.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12
		3.29.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.1.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	6	7.000.000	6	7.000.000	6	8.000.000	6
		3.29.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12
		3.29.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	36	2.500.000.000	36	2.245.500.000	36	2.228.500.000	36
		3.29.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	1	43.500.000	1	25.000.000	1
		3.29.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	39	15	130.000.000	10	140.000.000	10	140.000.000	74
		3.29.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	10	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5
		3.29.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5
		3.29.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	Laporan	12	12	5.175.000.000	12	4.775.000.000	12	4.805.000.000	12
		3.29.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12
		3.29.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	280.000.000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4.900.000.000	12	4.500.000.000	12	4.500.000.000	12
		3.29.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	100,00	5.421.500.000	100,00	585.000.000	100,00	610.000.000	100,00
		3.29.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	350.000.000	9	275.000.000	9	300.000.000	9
		3.29.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11
		3.29.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
		3.29.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	4.961.500.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang yang direncanakan akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

TABEL 7.1

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

No	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun Renstra RPD			RUMUS CAPAIAN
						Tahun ke-1 2024	Tahun ke-2 2025	Tahun ke-3 2026	
1	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83,33	83,33	92,97	97,78	100,00	$\frac{\text{Desa Berlistrik 24 Jam}}{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}} \times 100$
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	24,28	24,28	34,10	38,73	42,20	Total desa dibangun PLTS/Desa yang belum dibangun jaringan PLN tahun 2022
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	238,98	250,00	250,00	300,00	400,00	Kapasitas Pembangkit yang dibangun per Tahun (kWp)
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	$\frac{\text{Jumlah Rekomtek yang Tertangani}}{\text{Jumlah Rekomtek yang Masuk}} \times 100$
2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	-	28,00	33,56	35,78	38,00	$\frac{\text{Perusahaan Penerapan Bauran Energi}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$
		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e	-	930.344,35	930.922,35	949.540,80	968.531,61	Reduksi emisi CO2e yang dihasilkan dari kegiatan terbarukan dari bidang energi
		Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	-	43,76	43,76	45,76	47,76	$\frac{\text{Instansi Pemerintah Daerah Penerapan Kebijakan Bauran Energi}}{\text{Jumlah Instansi Pemerintah Daerah}} \times 100$
3	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	Indeks	77,35	84,00	84,20	86,51	89,12	$\frac{\text{Jumlah Keluhan yang Tertangani}}{\text{Jumlah Keluhan Keseluruhan}} \times 100$
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	$\frac{\text{Luas wilayah konservasi yang terpetakan}}{\text{Luas seluruh CAT dalam wilayah Prov. Kaltim}} \times 100\%$
4	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	29,50	38,38	45,38	53,38	61,38	$\frac{\text{Jumlah IUP MBLB yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah IUP MBLB Keseluruhan}} \times 100$
5	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	86,17	100,00	100,00	100,00	

TABEL 7.2
PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-206
MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
I. Indikator Kinerja Tujuan:								
1	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	-	95,7	96,4	97,1	97,1
2	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	7,27	-	10,39	12,39	14,68	14,68
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	-	85,00	85,50	86,00	86,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	-	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	80.01 A
4	Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan	Sumur	156	-	221	271	371	371
5	Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	-	80	85	90	90
II. Indikator Kinerja Sasaran:								
1.	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.200.000	1.233.000	1.265.000	1.300.000	1.300.000
2.	Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan	%	-	-	1	2	3	3
	Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84,41	85,00	79.30 BB	89,12	89,12
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	70,03 BB	78.10 BB	78.50 BB	86,51	100	100
4	Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	km ²	6.770		1.606	1.836	2.065	14.324
5	Tindaklanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Penguasaan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	100	100	100	100	100	100

TABEL 7.3
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024-206
MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	-	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024-2026 merupakan dokumen wajib yang harus dilaksanakan dan dapat menjadi acuan bagi pengelola Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan Dokumen Renstra ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar instansi, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance.

Samarinda,

2023

Kepala,

Munawwar, S.T, M.Si

Pembina Utama Muda/IV-C
NIP. 19671129 1998303 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) ini disusun berdasarkan aturan terbaru yakni Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dengan berlakunya aturan tersebut maka terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang berdampak pada adanya perubahan di beberapa tugas dan fungsi bidang maupun seksi, sehingga berdampak pada perubahan beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dan memenuhi serta mendukung baik capaian Program, Sasaran maupun Tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya perubahan Renstra ini maka diharapkan terjadi keselarasan antara, Renstra PD dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dapat mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPD. Dalam proses penyusunan perubahan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun”, perencanaan di Daerah ada dua yakni Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, khusus Rencana Perangkat Daerah sebagaimana pasal 11 ayat (3) disebutkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : (a) Renstra Perangkat daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah. Dalam Pasal pasal

13 ayat (1) “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas atau fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Perubahan Renstra PD mengikuti alur sesuai dengan urutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur serta pagu yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD setiap tahunnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategi menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD (Renja PD) setiap tahunnya.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra PD

Sehubungan dengan adanya Perubahan Aturan perundang-undangan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dengan maksud tidak mengurangi perjalanan perencanaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maka Review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 359 disebutkan “Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan Rencana Pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah, sedangkan dalam pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Review Renstra ini juga memperhatikan pada pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan :

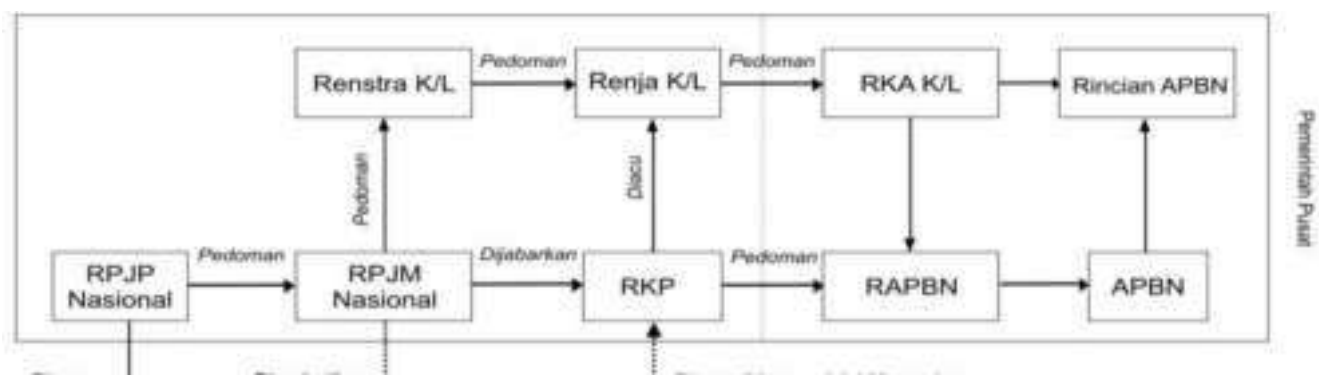
- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 juga Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Provinsi Maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif, gambaran keterkaitan dokumen seperti gambar 1.2 di bawah:

Gambar 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penggaraan



Landasan Hukum

Adapun keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen RKPD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Hal ini mengacu pada :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
 - a. RPD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan
 - b. RPD provinsi; RPD kota, RTRW kota, RPD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan PD

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- g) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor no 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru
- h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- i) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- j) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- k) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

Ketentuan tentang Perencanaan.

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025;
 - g) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/ 0378 /B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (Rpd) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Ketentuan tentang Penganggaran

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
- d) Undang – undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) UU nomor. 23 tahun 2014.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan sebagai dasar Pemerintahan Transisi perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk :

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

- b. Sebagai acuan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti perkembangan keadaan serta penyesuaian terhadap dengan kebijakan pusat maupun daerah terkait Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Menjaga konsistensi perencanaan penetapan program serta prioritas kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur

Bab II memuat paling sedikit Tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan dan Kelompok sasaran Layanan

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat pada Bab II dan Isu Strategis .

BAB IV Tujuan dan Sasaran;

Memuat Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi, norma , Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat

sesuai kewenangan daerah serta Cascading Kinerja PD mulai Tujuan, Sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VI memuat menguraikan program. Kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Industri , Perdagangan, Koperasi dan UKM.

BAB VII memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan Pemerintah Daerah.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 3 (tiga) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional maka 17 PNS Esselon IV dalam struktural tugas menjadi Jabatan Fungsional sedangkan dasar hukum Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam perubahan

pada Biro Organisasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas pokok dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

a). Tugas Pokok.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

b). Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b.2 Subbagian Umum Tugas Pokok

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b.3 Subbagian Keuangan

karena Penyetaraan jabatan Fungsional menjadi Analis Perencanaan muda untuk tugas keuangan di akomodir langsung oleh Sekretaris Dinas

Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur rencananya akan dibentuk menjadi 4 (empat) Bidang yaitu :

c. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan; dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya :

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM
- 2) Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya :

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu

f.1 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan program kegiatan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.

- 4) Pemberian pelayanan teknis pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 5) Pelaksanaan pengembangan jasa pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan,
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.2 UPTD Pelatihan Koperasi

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi .

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

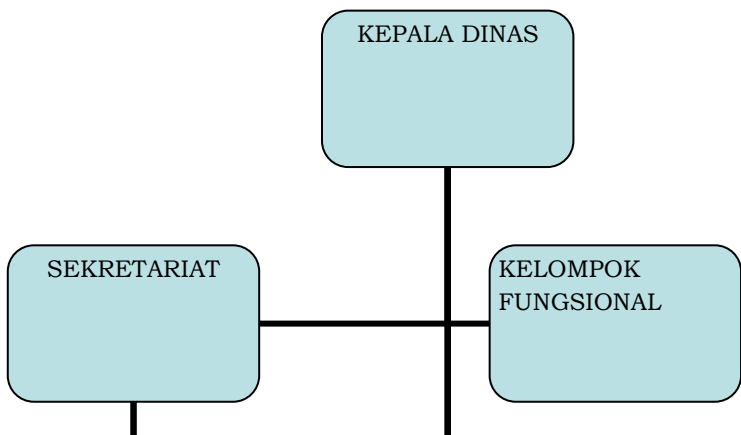
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan koperasi.
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- 5) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

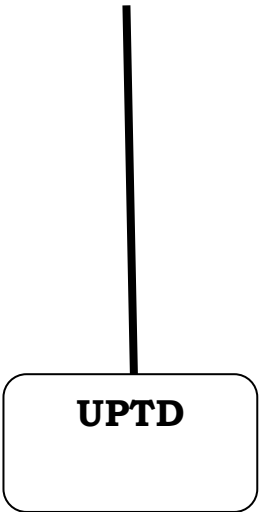
2.1.3 Struktur Organisasi PD dan UPTD

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

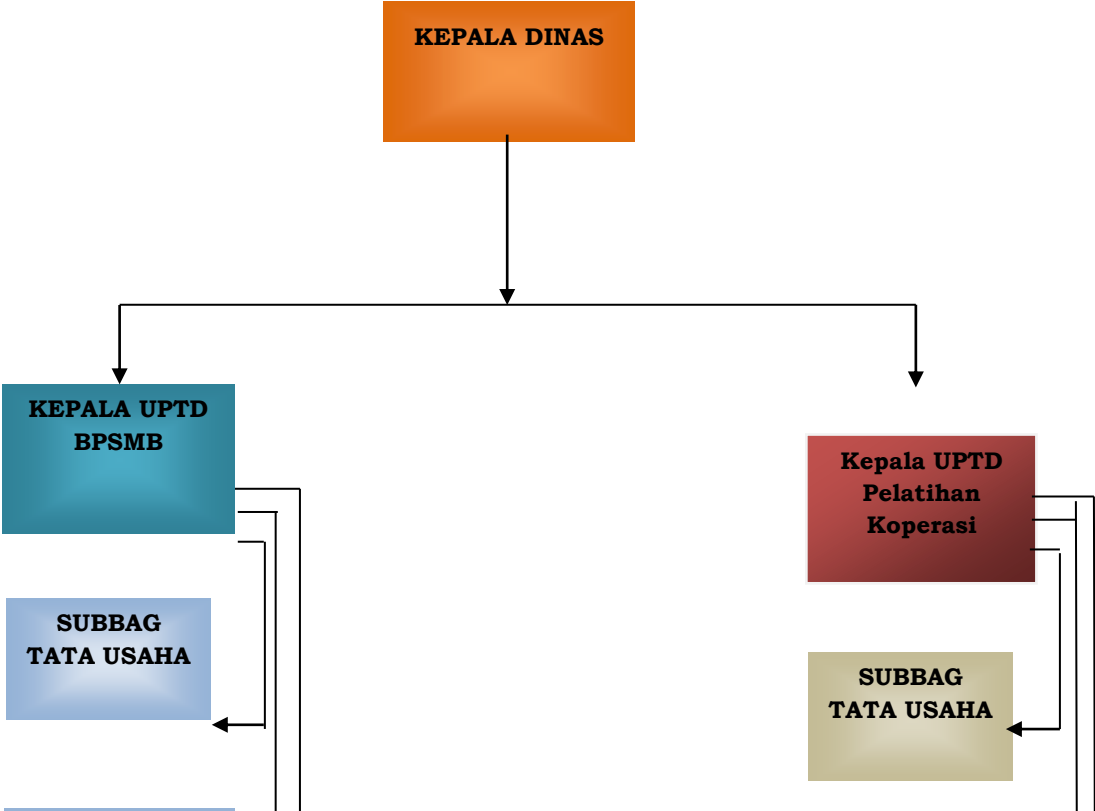
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas

Dasar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No.9 Tahun 2016 Pasal 5 ayat





Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD



**2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Provinsi Kalimantan Timur**

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur
Pada Tahun 2022 sebagai mana pada table dibawah ini :

Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri dan Non PNS yang bertugas

No	Unit Kerja	Jumlah PNS Golongan (orang)				Jumlah		Jumlah Pegawai
		IV	III	II	I	PNS	NONPNS	
1	Kepala Dinas	1				1		1
2	Sekretariat	1	9	4		14	34	38
3	Bidang Industri	2	6			10	8	18
4	Bidang Perdagangan	1	4			5	9	15
5	Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen		8	1		9	7	16
6	Bidang Koperasi & UKM	1	4			5	8	13
7	UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	2	12	2		17	24	37
8	UPTD Pelatihan Koperasi	2	2	3		7	24	25

	Jumlah	10	45	10		68	93	163
--	--------	----	----	----	--	----	----	-----

Sumber: Subbag Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Per Desember 2022)

Berdasarkan tingkat pendidikan formal secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri yang bertugas di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah (orang)
1	SMP	1
2	SLTA	17
3	SARJANA MUDA / D-3	9
4	STRATA-1	33
5	STRATA-2	8
6	STRATA-3	-
	JUMLAH	68

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 3. Kondisi Sarana Kerja Tahun 2020

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	Kondisi			KETERANGAN
			Baik	Rusak	Rencana penghapusan barang	
1.	Tanah bangunan kantor	7 LS				Baik
2.	Rumah Dinas	3 buah				Baik
3.	Kendaraan Roda 4	27 Mobil				Baik
		1 Mobil			1	Rusak Ringan
		3 Mobil			1	Rusak Berat
4.	Kendaraan Roda 2	37 Motor	37	5		
5.	Komputer PC	68 buah				
6.	Laptop	63 buah				
7.	Mesin Tik	51 buah	48	3		
8.	Mesin Hitung	1 buah				Baik
9.	Telepon	4 unit				1. (0541) 742482 PABX
						2. (0541) 747161
						3. (0541) 206335
						4. (0541) 736993
10.	Faximile	1 unit				Baik: (0541)

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	Kondisi			KETERANGAN
						742495
11.	Mesin Foto Copy	1 unit				Kurang Baik
12.	Camera	5 buah				1 (Rusak Ringan)
13.	Mesin Absen Digital	1 unit				Baik
TOTAL						

Sumber data: *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020*

Tabel 4. Sarana Prasarana Tahun 2020

NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	5 LS	APBD
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	71 unit	APBD/APBN
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan	1.061 buah	APBD
4.	Lain-lain	Pemeliharaan	406 buah	APBD

Sumber data: *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020*

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Komposisi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Komposisi Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 s/d 2022

No	Sumber Dana	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	APBD					
	Belanja Langsung	15.541.700.000	31.960.281.000	24.760.371.822		
	Belanja Tidak Langsung	15.855.437.000	18.464.459.716	19.119.032.000		
	Belanja Operasi				51.432.079.126	89.539.902.623
	Belanja Modal				4.455.176.500	32.667.978.180
2	APBN					
	Kementerian Koperasi & UKM RI	2.488.466.000	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.000	6.249.930.000
	Kementerian Perdagangan RI	1.776.815.000	1.944.824.000	915.515.000	1.083.015.000	980.181.000
	Kementerian Perindustrian RI	1.671.000.000	2.117.760.000	1.637.097.000	949.472.000	973.000.000

Sumber: Subbag Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (per Desember 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi

Kalimantan Timur

Kinerja Pelayanan OPD dalam hal ini Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dianalisis dari data series tahun 2018 – 2022. Analisa Kinerja ditelusuri dari pelaksanaan program dari setiap tahunnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 diukur dengan beberapa indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD indikator tersebut dari :

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas
4. Persentase penanganan pengaduan konsumen
5. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
6. Tertib Usaha
7. Persentase kinerja realisasi pupuk
8. Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan
9. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
10. Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi
11. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
12. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
13. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
14. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

15. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Berikut Indikator Kinerja utama tahun 2018 Rencana Strategis Tahun 2013 s.d 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB peningkatan jumlah produk unggulan daerah
2. Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Menurunnya jumlah barang yang tidak sesuai standar
3. Nilai Ekspor Non Migas
4. Disparitas harga Antar Wilayah
5. Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar per tahun
6. Jumlah Koperasi Unggulan.
7. Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.
8. Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.
9. Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.
10. Penumbuhan Jumlah WUB
11. Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB
12. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM

Berikut Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Tahun 2019 s/d 2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengalami terjadi perubahan pengukuran Adapun

yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan Perubahan RPJMD:

Tabel 6. Perubahan Tujuan Renstra Tahun 2019-2023

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara
	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut maka Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Industri Pengolahan non migas dan non batubara.
2. Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim
3. Disparitas harga antar wilayah.
4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
5. Nilai Omset Koperasi , Nilai Omset UKM

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 - 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pertumbuhan industry	3,6%	4,2				2,7%	2,1				75%	50%			
2	Jumlah produk OVOP dan KIID	4 Produk	4				3 Produk	2				75%	50%			
3	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,8%	15,2	5	19		10%	19,5	5	19	18,44	76,34	128,29	100	100	97,05
4	Jumlah klaster industri pengolahan	1 buah	2				1 buah	2				50	100			
5	Jumlah desain produk unggulan daerah	4 desain produk	7	8	7	12	2 produk	5	6	7	6	40	71,42	75	100	85,71
6	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah	4 teknologi	6				2 teknologi	2				50	33,34			
7	Disparitas harga antar wilayah	10%	8	8	7	4%	5%	7,5	7	5	7	50	93,75	87,5	71,43	7
8	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun	30	25	30	15	10 item	31	21	24	14	0	96,67	84	80	93,3	
9	Jumlah penurunan impor barang konsumsi	129,70	103,76				397,44	496				306,43	481,50			
10	Nilai ekspor non migas	18,31	18,67		7	5 M US\$	15,24	11,68	13,8	12	13,79	84,06	62,56		171,4	
11	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk	3	3				4	4				133	133			
12	1. Jumlah koperasi berkualitas	200	250			500	189	250				94,50	100			
	Jumlah kopaerasi unggulan			30	30				30	30	61			100	100	
13	Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM	15%	18	20	3	40	12,39	14,82	15	12,18	12,83	82,60	82,30	75	40,6	
14	Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM	57%	60	65	67	70	52%	56,77	68,85	68,85	68,85	91,23	94,61	105,9	102,8	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
15	Penumbuhan jumlah WUB	1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	760	1200	1459	104	104,	70,82	120	145.9
16	Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/ WUB	300	150	300	300	300	437	155	200	155	325	146	103.30	200	51,7	108.33
17	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM	150	80				233	85				155	105,30			
18	Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang	50	50	100	150	50	50	60	75	60	210	100	120	75	40	140
19	Jumlah Koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan	150	150	25	300	150	71	344	20	344	407	47,33	229,30	80	114,7	
20	Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan	100	100				55	200				55	200			
21	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	50	60	25	25	80	49	46	20	5	7	98	76,67	80	20	
22	Jumlah sarana pelayanan public	10	10	10	10	11	8	10	10	10	10	80	100	100	100	100
23	Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022

Indikator Kinerja sesuai	Target Renstra Tahun	Realisasi Capaian Tahun Ke	Rasio Capaian Pada Tahun Ke
--------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------

No	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah														
		2019	2020	2021	2022	2023*	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara thd PDRB (%)	7,46	8,24	9,44	9,64		7,46	8,24	7,79	8,24		100	100	83	85
2	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	11,76	12,87	1,7	1,72		11,76	12,87	4,75	5,01		100	100	279	0
3	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,07	15,07	12,92	13		15,07	15,07	15,13	15,13		100	100	0	116
4	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	7,79	1,43%	3,38%	4,17%		7,79	1,43%	2,09	3,38		100	100	6183	8106
6	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	-	-	17,55	18,25		-	-	20,23	18,83		0	0	115	103
7	Disparitas harga antar wilayah %	13,8	16,4	18	18		13,8	16,4	11,52	18,47		100	100	64	103
8	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	38,4	51,3	54	53		38,4	51,3	52,57	55,25		0	100	97	104
9	Nilai Omset Koperasi (Milyar)	998	849	872	907		998	849	1100	1297		100	100	126	143
10	Nilai Omset UKM (Trilyun)	2,9	3,5	50	52		2,9	3,5	76,8	77		100	100	154	148

*realisasi tahun 2023 adalah estimasi

Berikut analisis table 8 untuk indikator kinerja pada tahun 2019-2022:

1. Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 7,46%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 7,46%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 8,24%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 8,24%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 9,44%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 7,79%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 83%
- Target Renstra Tahun 2022: 9,64%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 8,24%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 85%

2. Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$):

- Target Renstra Tahun 2019: 11,76 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 11,76 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 12,87 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 12,87 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 1,7 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 4,75 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 279%
- Target Renstra Tahun 2022: 1.72 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 5,01 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 0%

3. Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 15,07%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 15,07%

- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 15,07%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 15,07%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 12,92%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 15,13%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 0%
- Target Renstra Tahun 2022: 13%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 15,13%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 116%

4. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 7,79%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 1,43%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 1,43%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 2,09%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 3,38%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 3,38%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 6183%
- Target Renstra Tahun 2022: 4,17%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 8106%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 100%

6. Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim:

- Target Renstra Tahun 2021: 17,55%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 20,23%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 115%
- Target Renstra Tahun 2022: 18,25%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 18,83%

- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 103%

7. Disparitas harga antar wilayah (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 13,8%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 13,8%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 16,4%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 16,4%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 18%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 11,52%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 64%
- Target Renstra Tahun 2022: 18%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 18,47%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 103%

8. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK):

- Target Renstra Tahun 2019: 38.4
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 38.4
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 0%
- Target Renstra Tahun 2020: 51.3
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 51.3
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 54
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 52,57
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021 : 97%
- Target Renstra Tahun 2022: 53
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 55,25
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 104%

9. Nilai Omset Koperasi (Milyar):

- Target Renstra Tahun 2019: 998 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 998 Milyar

- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 849 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 849 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 872 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 1,100 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 126%
- Target Renstra Tahun 2022: 907 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 1,297 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 143%

10. Nilai Omset UKM (Trilyun):

- Target Renstra Tahun 2019: 2,9 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 2,9 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 3,5 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 3,5 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 50 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 76,8 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 154%
- Target Renstra Tahun 2022: 52 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 77 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 148%

Tabel di atas memberikan informasi tentang target dan realisasi capaian pada berbagai indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam periode 2019-2022.

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari Hasil Retribusi Daerah realisasinya selama 5(lima) tahun terakhir (2018 s/d 2022) dapat tercapai dan bahkan melebihi dari target.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung realisasinya selama lima tahun terakhir (2015 s/d 2018) bervariasi akan tetapi selalu diatas 90 persen.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.292.811.500	4.183.145.018				2.996.178.554	4.024.922.212				69,80	96,22	0,00	0,00	0,00	2,62	34,34
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3.726.148.500	2.740.508.657				3.468.364.140	2.391.972.222				93,08	87,28	0,00	0,00	0,00	35,97	-31,03
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.576.015.000	1.327.775.000				1.561.081.214	1.207.951.430				99,05	90,98	0,00	0,00	0,00	18,70	-22,62
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1.066.200.000	911.306.492				933.379.830	894.498.198				87,54	98,16	0,00	0,00	0,00	17,00	-4,17
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	1.194.160.000					1.121.651.700					93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	571.570.000					515.599.076					90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4.441.790.000					4.326.123.237					97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Penataan Struktur Industri	626.000.000					572.891.667					91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Industri	2.604.800.000					2.441.033.750					93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	971.600.000					920.099.800					94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	1.079.400.000					1.039.014.500					96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	737.000.000					710.218.000					96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Menengah	923.136.000	733.950.000				893.095.330	698.566.230				96,75	95,18	0,00	0,00	0,00	25,78	-21,78
Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Ukm		4.052.304.000					3.592.606.555				0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Industri		2.290.825.000					2.215.092.165				0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	2.150.000.000	987.070.000				1.855.363.111	950.864.500				86,30	96,33	0,00	0,00	0,00	117,82	0,00
Program Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan		1.612.280.000					1.553.841.680				0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.132.000.000	1.358.680.988				1.090.481.850	1.280.582.172				96,33	94,25	0,00	0,00	0,00	-16,68	17,43
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	320.400.000	637.518.500				357.177.400	575.007.419				111,48	90,19	0,00	0,00	0,00	-49,74	60,99
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	308.100.000	324.750.000				307.320.460	305.815.628				99,75	94,17	0,00	0,00	0,00	-5,13	-0,49

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	1.924.400.000	989.407.500				1.948.422.494	884.392.948				101,25	89,39	0,00	0,00	0,00	94,50	-54,61
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.209.200.000	1.430.090.668				1.112.899.569	1.343.326.400				92,04	93,93	0,00	0,00	0,00	-15,45	20,71
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	622.650.000	861.200.000				547.365.638	777.555.019				87,91	90,29	0,00	0,00	0	-27,70	42,05
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	409.900.000	319.560.000				379.938.300	303.641.397				92,69	95,02	0,00	0,00	0	28,27	0,00
*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			36.734.778.108	#####	#####			31.799.481.677	#####	#####	0,00	0,00	86,57	100,00	100	0,00	0,00
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi			500.000.000	-	-			498.688.330			0,00	0,00	99,74	0,00	0	0,00	0,00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi			3.387.679.890	782.356.000	1.593.231.000			2.937.321.843	748.659.100	1.593.231.000	0,00	0,00	86,71	95,69	100	-50,90	0,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)			500.000.000	32.418.126.000	463.700.000			436.292.550		463.700.000	0,00	0,00	87,26	0,00	100	6891,19	0,00
Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				731.659.500	583.040.000				705.461.493	583.040.000	0,00	0,00	0,00	96,42	100	25,49	0,00
Program Pengembangan Umkm			500.000.000	8.779.714.000	327.600.000			498.824.200	8.108.087.742	327.600.000	0,00	0,00	99,76	92,35	100	2580,01	0,00
Program Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian					2.222.710.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			1.000.000.000	1.815.264.834	1.315.400.000			804.479.650	1.815.264.834	1.315.400.000	0,00	0,00	80,45	100,00	100	38,00	0,00
Program Pengembangan Ekspor			1.000.000.000	1.185.650.240	1.736.027.000			682.531.738	556.639.658	1.736.027.000	0,00	0,00	68,25	46,95	100	-31,70	0,00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			800.000.000	722.960.880	995.820.000			625.899.800	434.599.325	995.820.000	0,00	0,00	78,24	60,11	100	-27,40	0,00
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			4.864.797.628	8.057.968.737	5.368.554.700			3.865.445.858	8.057.968.737	5.368.554.700	0,00	0,00	79,46	100,00	100	50,10	0,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			2.000.000.000	3.818.212.642	2.984.344.373			587.368.100	3.818.212.642	2.984.344.373	0,00	0,00	29,37	100,00	100	27,94	#DIV/0!
Program Pengendalian Izin Usaha Industri			3.000.000.000	845.930.000	2.078.142.632			2.125.162.598	477.339.699	670.858.000	0,00	0,00	70,84	56,43	32	-59,29	#DIV/0!
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			600.000.000	627.380.000	943.439.586			279.319.098	419.181.190	454.000.000	0,00	0,00	46,55	66,81	48	-33,50	#DIV/0!

Diliat dari tabel 9 diatas terjadi perubahan anggaran maupun realisasi karena adanya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 10. Realisasi APBN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Sumber Dana	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kementerian Koperasi & UKM RI	2.469.138.756	2.525.071.000	1.942.830.000	1.812.844.000	6.249.930.000
2	Kementerian Perdagangan RI	1.752.711.300	1.928.021.000	850.668.659	1.005.973.491	980.181.000
3	Kementerian Perindustrian RI	1.671.000.000	2.101.771.000	1.471.527.100	788.563.896	973.000.000
Total APBN		5.892.850.056	6.554.863.000	4.265.025.759	3.607.381.387	8.203.111.000

Tabel 11. Kinerja Pelayanan Pendapatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022

No	Kegiatan	Realisasi		
----	----------	-----------	--	--

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Retribusi Pengujian dan Kalibrasi (juta Rupiah)	285.945.000,-	370.216.000,-	517.881.800,-	721.561.600,-	680.474.800,-	761.123.200	877.230.501
2	Pengujian							
3	Pelatihan							
4	Pemakaian Kekayaan Daerah							
5	Retribusi Surat Keterangan Asal (SKA) (Juta Rupiah)			128.500.000	108.500.000	Tidak ada Langsung ke Kemenkeu	Tidak ada Langsung ke Kemenkeu	Tidak ada Langsung ke Kemenkeu

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pertumbuhan industri				3,6%	4,2				2,7%	2,1				75%	50%			
2	Jumlah produk OVOP dan KIID				4 Produk	4				3 Produk	2				75%	50%			
3	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB				10,8%	15,2	5	19		10%	19,5	5	19	18,44	76,34	128,29	100	100	97,05
4	Jumlah klaster industri pengolahan				1 buah	2				1 buah	2				50	100			
5	Jumlah desain produk unggulan daerah				4 desain produk	7	8	7	12	2 produk	5	6	7	6	40	71,42	75	100	85,71
6	Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah				4 teknologi	6				2 teknologi	2				50	33,34			
7	Disparitas harga antar wilayah				10%	8	8	7	4%	5%	7,5	7	5	7	50	93,75	87,5	71,43	7
8	Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun				30	25	30	15	10 item	31	21	24	14	0	96,67	84	80	93,3	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
9	Jumlah penurunan impor barang konsumsi				129,70	103,76				397,44	496				306,43	481,50			
10	Nilai ekspor non migas				18,31	18,67		7	5 M US\$	15,24	11,68	13,8	12	13,79	84,06	62,56		171,4	
11	Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk				3	3				4	4				133	133			
12	1. Jumlah koperasi berkualitas				200	250			500	189	250				94,50	100			
	Jumlah kopaerasi unggulan						30	30				30	30	61			100	100	
13	Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM				15%	18	20	3	40	12,39	14,82	15	12,18	12,83	82,60	82,30	75	40,6	
14	Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM				57%	60	65	67	70	52%	56,77	68,85	68,85	68,85	91,23	94,61	105,9	102,8	
15	Penumbuhan jumlah WUB				1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	760	1200	1459	104	104,	70,82	120	145.9

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
16	Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/ WUB				300	150	300	300	300	437	155	200	155	325	146	103,30	200	51,7	108,33
17	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM				150	80				233	85				155	105,30			
18	Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang				50	50	100	150	50	50	60	75	60	210	100	120	75	40	140
19	Jumlah Koperasi/ UMKM yang melakukan kemitraan				150	150	25	300	150	71	344	20	344	407	47,33	229,30	80	114,7	
20	Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan				100	100				55	200				55	200			
21	Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi				50	60	25	25	80	49	46	20	5	7	98	76,67	80	20	
22	Jumlah sarana pelayanan publik				10	10	10	10	11	8	10	10	10	10	80	100	100	100	100
23	Jumlah dokumen				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi																		

Tabel 13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	*2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Urusan Wajib Koperasi																	
Pengembangan Koperasi	32,025,863,750	11,024,600,000	7,887,294,200	3,300,000,000	3,997,550,000	22,152,152,282	8,782,790,837	7,546,295,359	3,274,834,001	3,968,054,925	69.17	79.67	95.68	99.24	99.26	11,647,061,590	8,608,081,015.80
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perindagkop&UKM	5,263,161,156	3,817,683,400	2,284,195,500	574,150,000	598,250,000	3,161,767,046	2,995,542,408	1,990,088,098	511,039,240	571,458,400	60.07	78.46	87.12	89.01	95.52	2,507,488,011	1,810,221,538.40
Belanja Rutin Dinas	8,636,000,000	9,267,270,000	6,186,343,540	9,024,300,000	6,668,419,000	7,215,445,101	8,111,044,170	5,733,570,309	7,932,574,072	6,456,788,998	83.55	87.52	92.68	87.90	96.83	7,956,466,508	6,313,401,413.80
Urusan Perindustrian																	
Kegiatan Pemberdayaan Industri	6,567,805,000	9,740,300,000	4,181,623,425	950,000,000	1,253,000,000	5,661,855,182	7,962,900,806	3,804,280,957	937,717,270	1,237,765,563	86.21	81.75	90.98	98.71	98.78	4,538,545,685	3,721,731,963
Urusan Perdagangan																	
Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (P2LN)	2,092,838,000	2,765,750,000	2,403,686,250			2,043,778,050	2,563,908,315	2,364,409,650			97.66	92.70	98.37			2,420,758,083	2,324,032,005
Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam	11,485,970,250	3,709,011,600	2,712,715,109			9,556,069,890	3,376,207,781	2,295,825,200			83.20	91.03	84.63			5,969,232,320	5,076,034,290

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	*2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Negeri (P2DN)																	
Pengawasan Barang dan Jasa				493,750,000	500,000,000				463,290,800	430,775,293				93.83	86.16	496,875,000	332,122,173
Perdagangan				330,000,000	673,250,000				329,286,940	672,705,276				99.78	99.92	501,625,000	262,323,958
UPTD																	
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	14,704,530,000	8,166,535,000	3,933,053,850	704,800,000	1,000,000,000	13,389,172,231	7,522,773,543	3,763,496,072	677,198,630	996,240,781	91.05	92.12	95.69	96.08	99.62	5,701,783,770	5,119,896,481
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi	4,127,812,500	5,470,750,000	3,118,547,000	661,000,000	862,000,000	3,985,851,684	5,302,963,378	2,691,081,278	637,277,800	824,430,050	96.56	96.93	86.29	96.41	95.64	2,848,021,900	2,553,716,668
UPTD Metrologi	10,916,821,875	33,499,741,850	2,642,598,476			9,609,188,426	27,678,236,111	2,496,083,607			88.02	82.62	94.46			15,686,387,400	13,261,169,381

2.3. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Berikut ini adalah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur.

2.3.1. Peluang

1. Kebijakan-kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Peluang Pasar Ekspor yang cukup banyak.
3. Meningkatnya jumlah pasar di daerah.
4. Peraturan daerah terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kerjasama dengan Perusahaan Industri Tambang dan jasa melalui Program CSR.
5. Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank.

2.3.2. Tantangan

1. Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang.
2. Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
3. Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal.
4. Banyaknya usaha -usaha baru melalui on line dan retail modern.
5. Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan.
6. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi.

7. Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sektor lain, terutama usaha pertanian dan Perkebunan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, dipilih berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kontribusi UMKM & koperasi terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	•Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi •Rendahnya Kualitas SDM Koperasi •Lemahnya sistem pengawasan koperasi
	Rendahnya Produktivitas UKM	•Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital Aspek produksi dan restrukturisasi usaha : 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk usaha mikro belum memenuhi standarisasi 3. Banyaknya usaha mikro dan koperasi yang mengalami kemancetan usaha •Rendahnya daya saing produk UKM •Kurang informasi permodalan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya neraca perdagangan non-migas luar negeri	1. Belum optimalnya kinerja peningkatan ekspor non-migas 2. Belum optimalnya pengendalian impor 3. Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional
	Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	1. Tingginya biaya distribusi dan logistik 2. Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)" 3. Fluktuasi harga barang pokok dan penting 4. Tingginya biaya Logistik (antar pulau), dikarenakan keterbatasan konektivitas angkutan laut di wilayah Indonesia"
	Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	1. Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
	Belum optimalnya standardisasi mutu barang	Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi "Belum optimalnya pengembangan mutu tembakau"
Belum Optimalnya Ekspor non migas dan non batubara	Ekspor kaltim masih didominasi oleh produk primer (migas & batubara)	• Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara • Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur
	Rendahnya Daya Saing Produk yang Dipasarkan	• Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi & Produk Ekspor • Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok • Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan • Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan
	Kebutuhan pangan kaltim tergantung dari luar	• Belum adanya entitas yang menjadi food station daerah
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum optimalnya progress pengembangan kawasan industri prioritas provinsi	• Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah
		• Terbatasnya sumber daya manusia industri
		• Kelembagaan industri belum efektif • Minimnya pembinaan pengembangan wirausaha IKM.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri	1. Tumpang tindih kepemilikan lahan. 2. Tingginya harga lahan. 3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang. 4. Koordinasi, sinkronisasi dan komitmen antar organisasi belum optimal. 5. Kinerja kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan belum optimal. 6. Belum optimalnya penerapan dan pengawasan standar produk.
	Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia industri	1. Belum sesuai lulusan SLTA dengan kebutuhan industri. 2. Rendahnya kapasitas keterampilan dan penguasaan teknologi. 3. Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas. 4. Kurangnya kerjasama lembaga pendidikan/pelatihan dan pelaku industri dalam pemenuhan tenaga kerja industri.
	Belum kuatnya struktur industri di daerah	1. Integrasi industri hulu dan hilir antar sektor belum optimal. 2. Belum maksimalnya upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan perijinan (Berbasis resiko). 3. Belum terbangunnya basis data sektor industri. 4. Belum optimalnya pemberdayaan industri melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis dan penyediaan fasilitas.

3.2 Isu Strategis

konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan Tiga tahun ke depan, Hal tersebut sejalan dengan

amanat RPD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama Tiga tahun ke depan (2024-2026).

berikut tabel isu strategis Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 15 Isu Strategis

No	Isu Strategis
1	Rendah nya kinerja koperasi dan UKM, hilirasi produk non-migas dan non-batubara, ekspor non-migas dan non-batubara, serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2	Ditetapkan Ibukota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur .

Penjelasan Tabel Diatas

1. Kinerja Koperasi dan UKM yang Rendah:

Koperasi dan UKM memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, rendahnya kinerja koperasi dan UKM dapat menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi daerah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja ini antara lain kurangnya akses ke modal, rendahnya kualitas manajemen, keterbatasan keterampilan teknis, serta kurangnya akses pasar dan peluang pemasaran.

2. Hilirasi Produk non-migas dan non-batubara yang Belum Optimal:

Hilirasi produk non-migas dan non-batubara merujuk pada proses penambahan nilai dan pengolahan produk sebelum mencapai konsumen akhir. Jika hilirasi ini tidak optimal, potensi ekonomi dari produk-produk tersebut tidak akan terwujud sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hilirasi produk non-migas dan non-batubara meliputi infrastruktur yang terbatas, kurangnya keterampilan dalam pengolahan produk, serta kendala akses pasar dan distribusi.

3. Ekspor non-migas dan non-batubara yang Belum Optimal:

Ekspor non-migas dan non-batubara memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, rendahnya tingkat ekspor produk non-migas dan non-batubara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan dan akses pasar internasional, standar kualitas yang

rendah, keterbatasan kapasitas produksi, serta kendala logistik dan infrastruktur yang terbatas.

4. Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat:

Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan penduduk. Jika ketersediaan kebutuhan pokok tidak optimal, dapat menyebabkan ketidakstabilan harga, kenaikan inflasi, dan kesulitan akses bagi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat meliputi kendala distribusi dan logistik, rendahnya produktivitas sektor pertanian, serta kurangnya diversifikasi sumber pangan.

5. Ditetapkan Ibukota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur

Pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sana adalah sebuah isu strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa isu strategis yang muncul terkait masuknya ibu kota IKN Nusantara di Kalimantan Timur:

Dampak Lingkungan: Pembangunan IKN Nusantara memerlukan luas tanah yang cukup besar, dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak direncanakan dengan baik. Beberapa isu strategis terkait dengan dampak lingkungan ini adalah ketersediaan air, pengelolaan limbah, deforestasi, dan perubahan iklim.

Infrastruktur: Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur memerlukan investasi besar dalam infrastruktur,

seperti jalan, jembatan, dan bandara, serta jaringan listrik dan telekomunikasi. Jika infrastruktur yang dibangun tidak cukup baik, maka dapat mempengaruhi kemudahan akses dan mobilitas warga, serta membatasi perkembangan ekonomi daerah.

Kehidupan Sosial: Masyarakat yang tinggal di sekitar IKN Nusantara harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, seperti adanya perubahan lingkungan, perubahan sosial, dan peningkatan harga tanah dan kebutuhan hidup. Selain itu, integrasi antara masyarakat lokal dan pendatang harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi konflik sosial.

Ketersediaan Sumber Daya: Pembangunan IKN Nusantara memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang cukup besar. Selain itu, adanya perpindahan kantor-kantor pemerintahan ke IKN Nusantara juga memerlukan ketersediaan tenaga kerja yang handal dan berkompeten. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang memadai juga harus diperhatikan.

Pengembangan Ekonomi: Masuknya IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dapat meningkatkan potensi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah, serta peluang investasi baru. Namun, harus diperhatikan pula agar pembangunan ekonomi tidak merugikan masyarakat lokal dan lingkungan sekitar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Tujuan Berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur yang Merupakan Sasaran RPD

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan RPD 2024-2026:

Tabel 16. Keterkaitan Sasaran RPD 2024-2026 Prov Kaltim dengan Tujuan Renstra 2024-2026 Disperindagkop

SASARAN RPD PROV KALTIM	TUJUAN DISPERINDAGKOP
Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	1. Terwujudnya diversifikasi ekonomi sektor Industri
	2. Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Perdagangan
Sasaran 6 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	3. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Penjelasan terhadap Tujuan Terwujudnya diversifikasi ekonomi adalah upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang beragam dan tidak tergantung pada yang saat ini berlangsung sector pertambangan. Diversifikasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi risiko ketika terjadi

perubahan dalam suatu sektor ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Diversifikasi ekonomi dapat terwujud dengan berbagai cara, antara lain:
Pengembangan sektor-sektor baru: Pemerintah dapat mempromosikan dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan, seperti sektor teknologi, industri kreatif, dan pariwisata.

Pengembangan sektor non-pertanian: Dalam banyak negara, sektor pertanian masih menjadi sektor utama dalam perekonomian. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dapat dicapai dengan memperkuat sektor non-pertanian, seperti sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat memfasilitasi pengembangan sektor ekonomi yang baru dan berpotensi.

Pelibatan sektor swasta: Pemerintah dapat memfasilitasi pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal kepada perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi.

Diversifikasi ekonomi penting untuk meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan mengurangi risiko ketika terjadi perubahan dalam sektor ekonomi tertentu.

Tujuan meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor koperasi dan UKM adalah untuk memberikan dukungan dan memperkuat sektor ini sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu Provinsi dengan Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor koperasi dan UKM akan membantu

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki dan mengelola usaha mereka sendiri, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka sendiri serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi dan UKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatkan keberdayaan sektor ini, lebih banyak peluang kerja dapat tercipta bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Koperasi dan UKM seringkali berlokasi di daerah pedesaan atau pinggiran kota yang terpinggirkan. Meningkatkan keberdayaan sektor ini akan membantu mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah negara, mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Penjelasan tujuan Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas sebagai berikut :

Akuntabilitas: Tujuan ini mencakup tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam birokrasi yang akuntabel, pemerintah harus melibatkan mekanisme kontrol internal dan eksternal untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, etis, dan legal. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Pelayanan publik berkualitas: Birokrasi yang efektif harus mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, kesederhanaan, kesetaraan, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Tujuan ini

melibatkan perbaikan proses administrasi, pengurangan birokrasi yang berlebihan, pelatihan dan pengembangan staf, serta penerapan teknologi informasi yang modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Keterlibatan masyarakat: Birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi dan keandalan data.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya dalam hal perumusan kebijakan yang mendukung, reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai negeri, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, investasi dalam teknologi informasi, serta pendekatan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait peningkatan kontribusi industri pengolahan Kaltim antara lain Peningkatan produksi dan kualitas: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional.

Diversifikasi produk: Sasaran ini bertujuan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur.

Peningkatan ekspor: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pasar ekspor, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar internasional.

Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transportasi, distribusi, dan penyimpanan produk industri pengolahan di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang

efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur.

Dengan implementasi sasaran-sasaran di atas, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor.

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi di Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Kaltim, meningkatkan produksi komoditi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai dengan stake holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui promosi dan branding produk, penyediaan informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan pelaku bisnis dan industri yang memiliki jaringan luas di pasar domestik dan internasional.

Untuk menunjang sasaran ini diawali Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan transportasi, pengiriman,

dan distribusi produk komoditi di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi dan ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan penyediaan fasilitas pergudangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor komoditi dan ekspor di Kalimantan Timur.

3. Sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Sasaran peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup konsumen di provinsi Kalimantan Timur. Dalam sasaran ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan secara efektif.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang tersedia di Kaltim. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang memproduksi produk dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa bangga menggunakan produk-produk tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari penipuan atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Sasaran Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

5. **Sasaran Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.**

Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi, dan ekspor non-migas di Kaltim adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perdagangan, industri, dan ekspor non-migas di provinsi tersebut. Sasaran ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltim dan meningkatkan daya saing produk dan komoditi di pasar global.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur logistik yang memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan transportasi lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka distribusi komoditi dan produk non-migas di Kaltim dapat menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, arah kebijakan Pusat Distribusi (Food Station) lokasi pusat yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke pelanggan atau lokasi penjualan. Pusat distribusi dapat berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, serta sebagai pusat kontrol untuk pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan persediaan, Fungsi utama dari pusat distribusi adalah:

Penyimpanan dan pengelolaan persediaan: Pusat distribusi digunakan untuk menyimpan barang-barang dari berbagai produsen sehingga dapat dikirimkan ke berbagai tujuan secara efisien. Dalam pusat distribusi, persediaan barang dipantau dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup saat diperlukan.

Pengolahan dan pengemasan: Pusat distribusi sering kali dilengkapi dengan fasilitas untuk mengemas dan memproses barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Fasilitas ini mencakup pelabelan, pengemasan ulang, dan perakitan produk.

Pengiriman dan distribusi: Pusat distribusi berfungsi sebagai pusat pengiriman dan distribusi barang ke lokasi penjualan atau konsumen akhir. Pengiriman dilakukan melalui berbagai mode transportasi, termasuk truk, kapal, dan pesawat terbang.

Pengendalian mutu dan audit: Pusat distribusi juga digunakan untuk memeriksa kualitas dan keamanan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar dan efektif.

6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan anggaran di dalam Disperindagkop. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya Disperindagkop.

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Disperindagkop perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Disperindagkop dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan sebagainya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Disperindagkop perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan

harapan masyarakat. Disperindagkop dapat melakukan berbagai bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Meningkatkan kualitas layanan publik: Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Disperindagkop kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas. Disperindagkop dapat melakukan langkah-langkah seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan.

7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik

UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang:

Transparansi: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil pengujian.

Standar dan Kualitas: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang akurat,

peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.

Evaluasi Kinerja: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian dan sertifikasi mutu barang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat mengadakan forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan yang diberikan.

Penanganan Keluhan: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

Akuntabilitas Internal: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat di tempatnya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen

8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Pelatihan Koperasi .

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi mengacu pada usaha untuk memperbaiki

transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi.

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi:

Transparansi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan.

Standar Kualitas: UPTD Pelatihan Koperasi harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan up-to-date, fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang koperasi.

Evaluasi Kinerja: UPTD Pelatihan Koperasi perlu melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan koperasi di masyarakat.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat melibatkan

komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian program pelatihan.

Pengawasan Internal: UPTD Pelatihan Koperasi harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

Komunikasi dan Informasi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat

Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Disperindagkop dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat tercapai

peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim. Dampak positif yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang tersedia di pasar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17. tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 -2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Tujuan1 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	3,58	6	6	6	6	6
Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	6,84	10,06	10,06	10,43	10,8	11
Tujuan2 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	18,83	18,77	20	22	25	25
Sasaran 2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	534,53	566,60	566,60	600,60	636,64	636,64
sasaran 3 Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen	Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)	55	60	60	62	64	64
TUJUAN 3 : Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	0	2	2	6	7	7%
	Inflasi pangan bergejolak (%)	5,35	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Sasaran 4 : Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omzet UKM	0,26	5,80	5,80	6,3	6,8	6,8
	Pertumbuhan Omzet Koperasi	17,91	19,00	19,00	21	23,0	23,0
Sasaran 5 : Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasipemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,1	78,25	78,50	79,50	80,01	80,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	72,8	75	75,5	77,5	80,00	80,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	88,01	85,00	85,00	85,50	86,00	86,00

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL 2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	Galeri UKM (%)	30	100	100	-	-	100
Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	Skor Kepuasan Masyarakat	95,44	95,5	95,6	95,7	96	96
Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	Skor Kepuasan Masyarakat	0	85	86	87	88	88

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

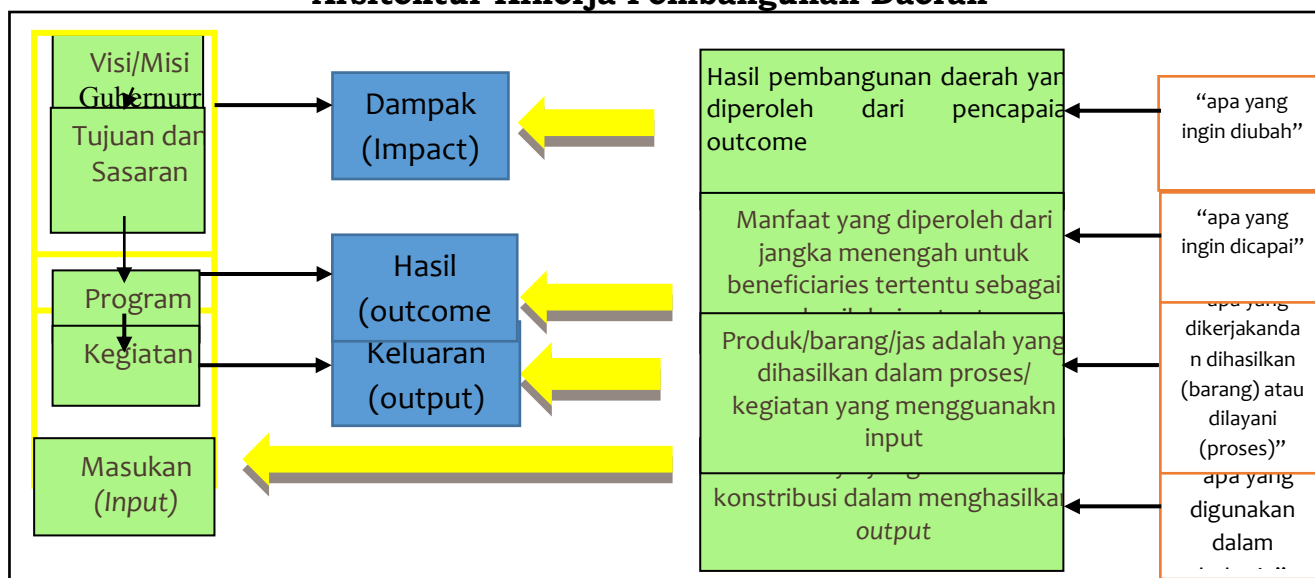
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

RPD Provinsi Kalimantan Timur , maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Melakukan Perubahan dari Tujuan hingga Arah Kebijakan Agar Selaras dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur,

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim mengikuti pola sebagai berikut:

Gambar 5.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Dalam rangka Rangka Perubahan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim menetapkan 3 (tiga) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2024-2026, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 18.
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1: Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Industri	Sasaran 1.1 : Peningkatan Kontribusi industri pengolahan.	Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil Menengah	1. Membangun Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil Menengah. 2. Menerapkan industri hijau yang ramah lingkungan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana industry	1. Mendorong pembangunan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang 2. Fasilitasi industri kecil menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib 3. Pengembangan pengolahan CPO 4. Pengembangan Produk Rotan 5. Pengembangan hilirisasi industri
		Meningkatkan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, inovasi dan kreativitas serta dukungan pembiayaan.	1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi dan pemagangan. 2. Mendorong pengembangan, peningkatan, penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri. 3. Mendorong pengembangan dan peningkatan kreativitas inovasi dalam membangun industri 4. Dukungan penyediaan sumber pembiayaan usaha industri.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kerjasama sektor Industri.	Meningkatkan kerjasama yang mendukung pengembangan industri, meliputi standardisasi; penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi; peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri; pengembangan perwilayahan industri; promosi dan pemasaran; pengelolaan sumber daya alam; inovasi dan kreativitas; prasarana dan sarana industri
		Mewujudkan kebijakan afirmatif dan pemberdayaan industri kecil menengah.	1. Meningkatkan upaya diversifikasi produk 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri unggulan 3. Meningkatkan kompetensi internal IKM 4. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM 5. Pemberian fasilitas kepada industri kecil menengah
		Menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung jawab.	1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian 2. Memberikan kemudahan perizinan berusaha 3. Memperkuat basis data sektor industri yang terintegrasi 4. Mendorong penyusunan regulasi yang menjamin pasokan bahan baku
Tujuan 2 : Terwujudnya Diversifikasi EkonomiI sektor Perdagangan	Sasaran 2.2 : Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Peningkatan Daya Saing Komoditas Non Migas dan Batubara Di Pasar Internasional	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri	Penguatan pendampingan UKM dan promosi produk melalui kurasi
		Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain terkait peningkatan daya saing komoditi ekspor	Melakukan misi dagang dengan daerah produsen
		Peningkatan SDM UKM untuk tumbuh menjadi Eksportir	1. Peningkatan Daya Saing UKM
		Meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha ekspor dan potensial ekspor	Mempersiapkan Skema Rancangan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
		Peningkatan Sistem Distribusi	membangun sinergitas Provinsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 2.3 : Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen	Yang Efisien	dengan Kab/Kota Pusat distribusi perdagangan
		Meningkatkan wawasan terkait peluang ekspor bagi pelaku usaha	Peningkatan Sosialisasi bagi pelaku usaha
		Meningkatkan promosi citra produk unggulan kaltim dalam dan luar negeri	Peningkatan Promosi Perdagangan
		peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan/ atau Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen
			Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas;
TUJUAN 3 : Meningkatkannya keberdayaan ekonomi masyarakat.	Sasaran 3.4 : Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Revitalisasi Pembinaan dan Pengelolaan Koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM
		Pemanfaatan TIK(teknologi informasi dan komunikasi) untuk perluasan akses pemasaran secara modern	Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi
			Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM
		Pemberian Pelatihan kepada SDM Koperasi dan UKM	Peningkatan SDM Koperasi dan UKM
		Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan	Pendampingan dan Dukungan Modal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 3.5 Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.	Melakukan monitoring dan pemantauan ke pasar	Peningkatan koordinasi pemantauan harga kebutuhan bahan pokok di tingkat Kab/ kota se- kaltim
		Menjalin Kerjasama dengan stakeholder terkait yang menangani distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Membangun Sinergitas Dan Harmonisasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait
		Menjalin Kerjasama dengan daerah produsen dalam rangka perluasan pasar dan pemenuhan barang pokok dan barang penting	Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan distribusi barang kebutuhan pokok
		Mendorong pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah	Memberikan subsidi barang kebutuhan pokok pada kegiatan operasi pasar
		mendorong terbentuk Pusat Distribusi (Food Station)	Meningkatkan Kerjasama antar Dinas Perindagkop Kab/kota dan Dinas Lintas (Dinas Pangan tanaman Pangan dan Holtikultura)
Tujuan 4: Mewujudkan Disperindagkop yang memiliki Birokrasi pelayanan publik berkualitas	Sasaran 4. 6 : Peningkatan Nilai Akip disperindagkop & UKM	Peningkatan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan	Penerapan reformasi birokrasi dan Core value ASN
	Sasaran 4.7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	- Peningkatan Transparansi - Penguatan Sistem Pelaporan	- meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPTD BPSMB. - Bangun sistem pelaporan yang efektif dan terintegrasi untuk mengumpulkan data kinerja secara berkala.
	Sasaran 4.8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	- Peningkatan Transparansi - Penguatan Sistem Pelaporan	- meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPTD Pelkop - Bangun sistem pelaporan yang efektif dan terintegrasi untuk mengumpulkan data kinerja secara berkala.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu Tiga tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DISPERINDAGKOP dan UKM Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Perubahan RPD Kalimantan Timur 2024-2026 yang sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 .

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini :

A. Program DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, yaitu:

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi & UKM

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan KoperasiProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Program Pengembangan Umkm
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan UKM
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Program Pengembangan Ekspor
2. Program Perizinan dan Pendaftaran PerusahaanProgram Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeriProgram Penerapan Standarisasi Mutu Barang.
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UKM

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kaltim

b. Industri

1. Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
2. Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

a. Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Kegiatan DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim

Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim meliputi:

I. Sumber Dana Desentralisasi

a. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kegiatan Kordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
3. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK).
4. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Pelatihan KUMKM.
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Urusan Pilihan Perindustrian

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

c. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2. Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3. Kegiatan : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
4. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi Kegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran.
5. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan.
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota.
7. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kegiatan Pengendalian usaha Perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.

II. Sumber Dana Dekonsentrasi

a. Koperasi & UKM

- Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

B. Industri

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

C. Perdagangan

1. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri.
2. Kegiatan Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang.
3. kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2024 s/d 2026 tercantum pada lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Tabel 18 Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			RENCANA PAGU DINAS dan UPTD						64.000.000.000		95.900.000.000		97.800.000.000			
			RENCANA PAGU DINAS				92.850.847.240		52.950.000.000		83.950.000.000		84.950.000.000			
Terwujudnya Diversifikasi Ekonoml sektor industri				LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	3,58	6		6		6		6		6		
	Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan			Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	6,84	10,06		10		10,43		11		11		
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)	4,76	4,15	1.958.039.000	5,20	2.820.000.000	5,56	13.020.000.000	5,92	12.920.000.000	5,92	Bidang Industri	
		3.31.02.1.01	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)	0	5	1.958.039.000	5	2.820.000.000	5	13.020.000.000	5	12.920.000.000	15	Bidang Industri	
		3.31.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0			1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.31.02.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	295.608.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.31.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dok um en	112.890.000	1 Dokum en	120.000.000	1 Doku men	120.000.000	1 Doku men	120.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.02.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	0	1 Dokum en	100.000.000	1 Doku men	10.200.000.000	1 Doku men	10.000.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.02.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	7 Dok um en	1.413.148.500	7 Dokum en	2.000.000.000	7 Doku men	2.100.000.000	7 Doku men	2.200.000.000	7 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.02.1.01.06	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dok um en	136.392.000	1 Dokum en	150.000.000	1 Doku men	150.000.000	1 Doku men	150.000.000	3 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.02.1.01.00.07	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0			1 Dokum en	60.000.000	1 Doku men	60.000.000	1 Doku men	60.000.000	3 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.02.1.01.00.08	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0			1 rekome ndasi	60.000.000	1 rekom endasi	60.000.000	1 rekom endasi	60.000.000	3 Rekomen dasi	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.02.1.01.00.09	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0			1 rekome ndasi	80.000.000	1 rekom endasi	80.000.000	1 rekom endasi	80.000.000	3 Rekomen dasi	Bidang Industri	10 kab/Kot a
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha	Persentase Pengendalian Perijinan	5%	5%"	670.858.000	5%	680.000.000	0,1	690.000.000	0,15	700.000.000	15%	Bidang Industri	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Industri	Berusaha Sektor Industri												
		3.31.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK ouput)	24%	24 %	670.858.000	25	680.000.000	25,5	690.000.000	26	700.000.000	26	Bidang Industri	
		3.31.03.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	197.872.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.31.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	472.986.000	2 Dokumen	480.000.000	2 Dokumen	490.000.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	17,04%	18,51	454.001.000	18,69 %	500.000.000	0,1902	500.000.000	0,1958	500.000.000	19,58%	Bidang Industri	
		3.31.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	5 Industri	5 Industri	454.001.000	3 industri	500.000.000	3 industri	500.000.000	3 industri	500.000.000	3 industri	Bidang Industri	
		3.31.04.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	117.006.500	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.31.04.1.01.02	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	96.994.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota
		3.31.04.1.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	10 Dokumen	10 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	Bidang Industri	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas												
Tujuan2 Terwujud nya Diversifik asi Ekonoml sektor Perdagangan an				Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	18,83	18,77		20,00		22		25		25,00		
	Sasaran 2 Peningkat an daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim			Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	534,53	566,604		566,60		600,601		636,636		636,64		
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	64 jenis produk	64 jenis produk	1.671.425.175	67 jenis produk	1.570.000.000	70 Jenis produk	1.895.509.000	73 Jenis produk	2.085.059.900	73 Jenis	Bid Perd	
		3.30.05.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	0		1.671.425.175	10 Pelaku Usaha	1.570.000.000	10 Pelaku Usaha	1.895.509.000	10 Pelaku Usaha	2.085.059.900	30 pelaku usaha	Bid Perd	
		3.30.05.1.01.01	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	0		0	3 Pelaku Usaha	700.000.000	3 Pelaku Usaha	726.569.000	4 Pelaku Usaha	769.225.900	10 Pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.05.1.01.02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	0		0	4 Pelaku Usaha	200.000.000	4 Pelaku Usaha	298.969.000	4 Pelaku Usaha	328.865.900	12 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.05.1.01.03	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor	0		1.309.981.875	5 Prelaku Usaha	260.000.000	5 Prelaku Usaha	306.515.000	5 Prelaku Usaha	337.166.500	15 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Unggulan												
		3.30.05.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	0		0	20 Produk	410.000.000	20 Produk	563.456.000	20 Produk	649.801.600	30 pelaku usaha	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.05.1.01.05	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50		361.443.300	0	-	0	-	20 Pelaku Usaha	-	60 pelaku usah	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.02	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)	100	0	202.398.600	100	406.798.600	100	648.157.600	100	731.789.120	100	Bid Perd	
				persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	100	0		100		100		100		100	Bid Perd	
				persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	70%	0		80%		0,85		0,9		90	Bid PKPB	
		3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	0	0	-	100	250.000.000	100	280.000.000	100	290.000.000	100%	Bid Perd	
				jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan		0		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		9 pelaku usaha		27 pelaku usaha	Bid PKPB	
		3.30.02.1.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	0	0	0	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	140.000.000	30 Dokumen	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.02.1.03.03	pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya	0	0	0	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	9 Laporan	Bid PKPB	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.30.02.1.04	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	150 eksportir	260 Eks port ir	202.398.600	260 Ekspor tir	156.798.600	265 Ekspo rtir	368.157.600	270 Ekspo rtir	441.789.120	270 Eksportir	Bid Perd	
		3.30.02.1.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	3814	350 0	202.398.600	3600 Dok	156.798.600	4000 Dok	368.157.600	4100 Dok	441.789.120	11700 Dokumen	Bid Perd	10 kab/Kot a
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	50%	60 %	681.397.860	75%	1.078.201.400	0,9	988.785.000	1	1.150.380.000	100%	Bid Perd	
		3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)	32%	0	0	25,0	278.384.300	33,33	336.000.000	41,67	420.000.000	41,7	Bid Perd	
		3.30.07.1.01.01	Sub KegiatanFasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	0	0	0	6	278.384.300	8	336.000.000	10,00	420.000.000	24	Bid Perd	10 kab/Kot a
		3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)	34,51	0	681.397.860	13,51	349.817.100	23,437 5	172.785.000	45,45	230.380.000	45,45	Bid Perd	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.30.07.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	0	14	681.397.860	10	349.817.100	15	172.785.000	20	230.380.000	45	Bid Perd	10 kab/Kot a
		3.30.07.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	0	0	0	800 orang	450.000.000	800 orang	480.000.000	800 orang	500.000.000	2400 orang	Bid Perd	
		3.30.07.1.03.02	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	7 Lapora n	450.000.000	7 Lapo ran	480.000.000	7 Lapo ran	500.000.000	21 laporan	Bid Perd	10 kab/Kot a
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)	76,09	0	4.668.554.700	77	5.000.000.000	79	8.660.171.780	80	9.566.188.958	80	Bid PKPB	
		3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1151	0	4.104.974.700	1000	3.669.145.260	1000	5.477.695.520	1000	6.025.465.072	3.000	Bid PKPB	
		3.30.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (Pelayanan Pengaduan, Operasional BPSK, Survey IKK)	3 BPSK	3 BP SK	865.877.400	3 BPSK	1.819.145.260	3 BPSK	3.442.863.600	3 BPSK	3.787.149.960	9 BPSK	Bid PKPB	10 kab/Kot a
		3.30.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (Forum, Pembentukan	1 LPKSM	0	0	1 LPKS M	450.000.000	1 LPKS M	489.748.600	1 LPKS M	538.723.460	3 kali	Bid PKPB	10 kab/Kot a

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				LPKSM, Peningkatan Kompetensi SDM Perlindungan Konsumen, Evaluasi LPKSM)												
		3.30.06.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	6 Pengaduan	20 pengaduan	3.239.097.300	20 pengaduan	1.400.000.000	25 pengaduan	1.545.083.320	30 pengaduan	1.699.591.652	75 pengaduan	Bid PKPB	10 kab/Kota

		3.30.06.1.03	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5%	0	563.580.000	5%	1.330.854.740	5%	3.182.476.260	5%	3.540.723.886	5%	Bid PKPB	
		3.30.06.1.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Serta Pengawasan Tertib Niaga	3 Laporan	3 laporan	563.580.000	3 Laporan	1.330.854.740	3 Laporan	3.182.476.260	3 Laporan	3.540.723.886	9 Laporan	Bid PKPB	10 kab/Kota
TUJUAN 2 : Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.				Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	0	0	0	2	49.750.650.000	6	79.866.306.312	7	83.312.864.269	6	BID. KOPERASI	
	Sasaran 4 : Peningkat			Pertumbuhan Omzet UKM	5,60	0	0	5,80	9.247.850.000	6,3	35.442.877.884	6,8	43.050.872.972	6,8	BID. KOPERASI	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	an Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM			Pertumbuhan Omzet Koperasi	16%			19,00		21		23		23,0	BID. KOPER ASI	
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	15,29%	15	583.040.000	31%	1.068.670.000	34,55 %	1.200.000.000	35,53 %	1.500.000.000	35,53%	BID. KOPER ASI	
		2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	24%	50	583.040.000	54,00 %	534.335.000	0,54	600.000.000	0,7524	750.000.000	75%	BID. KOPER ASI	
		2.17.03.1.01.01	Sub KegiatanPenguat an Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke Pada Anggota KUKM dan Masyarakat	0	0,0	0	25 unit usaha	534.335.000	30 unit usaha	600.000.000	46 unit usaha	750.000.000	85 unit	BID. KOPER ASI	10 kab/Kot a
			kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi				20	534.335.000	20	600.000.000	20	750.000.000	20%	BID. KOPER ASI	
		2.17.03.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat Sehat	0	30 unit usa ha	583.040.000	25 unit usaha	534.335.000	30 unit usaha	600.000.000	46 unit usaha	750.000.000	101 kop	BID. KOPER ASI	10 kab/Kot a

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel												
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	0	0	1.593.231.000	34%	1.965.315.000	0,66	2.161.846.500	1	2.378.031.150	100%	BID. KOPERASI	
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	57,65	0	1.593.231.000	59,65	1.965.315.000	61,65	2.161.846.500	63,65	2.378.031.150	65,65	BID. KOPERASI	
		2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	0	0	0	10 unit usaha	1.581.095.000	11 unit usaha	1.739.204.500	12 unit usaha	1.913.124.950	33 unit usaha	BID. KOPERASI	10 kab/Kota
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	101 unit usaha	150	1.593.231.000	25 unit usaha	384.220.000	30 unit usaha	422.642.000	46 unit usaha	464.906.200	101 unit usaha	BID. KOPERASI	10 kab/Kota
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	0,91	3%	463.700.000	5,00	1.818.165.000	10	2.042.752.000	15	2.121.328.850	15,00	BID. KOPERASI	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)	3,85	0	463.700.000	7,5	1.818.165.000	7,5	2.042.752.000	7,5	2.121.328.850	7,5	BID. KOPER ASI	
		2.17.07.1.01.01	Sub Kegiatan Menumbuhkembangan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (115 UKM)	175	200 unit usaha	463.700.000	115 UKM	598.180.000	125UKM	785.768.500	140 UKM	864.345.350	380	BID. KOPER ASI	10 kab/Kota
		2.17.07.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	0	0	0	150 Orang	369.985.000	150 Orang	406.983.500	150 Orang	406.983.500	450	BID. KOPER ASI	10 kab/Kota
		2.17.07.1.01.05	subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata				3500 unit	500.000.000	3500 unit	500.000.000	3500 unit	500.000.000	3500 unit	BID. KOPER ASI	10 kab/Kota
		2.17.07.1.01.08	subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				150 unit usaha	350.000.000	150 unit usaha	350.000.000	150 unit usaha	350.000.000	150 unit usaha	BID. KOPER ASI	10 kab/Kota
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	50	0	327.600.000	20 UKM	1.347.850.000	40 UKM	14.094.139.692	60 UKM	17.525.756.486	60 UKM	BID. KOPER ASI	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.08.1.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	409	0	327.600.000	455 UKM	1.347.850.000	455 UKM	14.094.139.692	455 UKM	17.525.756.486	1365 ukm	BID. KOPERASI	
		2.17.08.1.01.01	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	602	50	327.600.000	40 UKM	863.260.000	40 UKM	13.561.090.692	40 UKM	16.939.402.586	120 UKM	BID. KOPERASI	10 kab/Kota
		2.17.08.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (258 UKM), Syarat Peserta UKM yang Sudah Punya Hubungan Kerja Dengan Pihak Lain	220	0	0	258 UKM	484.590.000	258 UKM	533.049.000	258 UKM	586.353.900	774 UKM	BID. KOPERASI	10 kab/Kota
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			520	1.248.241.000									
		2.17.005.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan			500	1.248.241.000									
			Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi													
		2.17.005.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			500	1.248.241.000									

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 5: Peningkata n efisiensi Distribusi Perdagangan an			Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	1,17	1,16		1,15		1,15		1,15		1		
		3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	18,47	0,17	967.510.100	16%	1.245.000.000	0,14	1.305.500.000	0,12	1.398.000.000	12%	Bid Perd	
				Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)	92,27			85%		0,9		0,92		92	Bid PKPB	
		3.30.04.1.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)	100%	1	356.893.300	100%	275.500.000	100%	300.500.000	100%	335.000.000	100	Bid Perd	
		3.30.04.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0	2400 laporan	356.893.300	2400 laporan	140.000.000	2400 lapora n	165.000.000	2400 lapora n	185.000.000	2400 laporan	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.04.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0	0	0	480 laporan	135.500.000	480 lapora n	135.500.000	480 lapora n	150.000.000	480 laporan	Bid Perd	10 kab/Kota
		3.30.04.1.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	73	80 %	610.616.800	80%	719.500.000	80	755.000.000	85	813.000.000	85	Bid Perd	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Perdagangan													
		3.30.04.1.02.01	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0	12 lap ora n	524.025.800	12 lap	429.500.000	15 lap	465.000.000	15 lap	487.500.000	36 lap	Bid Perd	10 kab/Kot a
		3.30.04.1.02.02	Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	10 Lap ora n	86.591.000	14 lap	290.000.000	15 lap	290.000.000	16 lap	325.500.000	48 lap	Bid Perd	10 kab/Kot a
		3.30.04.1.03	kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	0	0	0	10 laporan	250.000.000	10 lapora n	250.000.000	10 lapora n	250.000.000	30 laporan	Bid PKPB	
		3.30.04.1.03.03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran danPenggunaan Pupuk Bersubsidi dengan RealisasiMinimal 90%	0	0	0	5 laporan	200.000.000	5 lapora n	200.000.000	5 lapora n	200.000.000	15 Laporan	Bid PKPB	10 kab/Kot a

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.30.04.1.03.04	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0	0	0	5 laporan	50.000.000	5 lapora n	50.000.000	5 lapora n	50.000.000	15 Laporan	Bid PKPB	10 kab/Kota
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	0	0	0	10	500.000.000	50	800.000.000	100	900.000.000	100	Bid Perd	
		3.30.03.101	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi , FGD)	0	0	0	6 kegiatan	500.000.000	7 kegiatan	800.000.000	10 kegiatan	900.000.000	15 kegiatan	Bid Perd	
		3.30.03.101.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	0	0	3 unit	500.000.000	3 unit	800.000.000	2 unit	900.000.000	15 laporan	Bid Perd	10 kab/Kota
Tujuan 3 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,1	78,25		78,50	40.502.800.000	79,3	44.423.428.428	80,01	40.261.991.297	80,01	SEKRETARIAT	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	84,6		85,00		85,5		86		86,00	SEKRETARIAT	
	Sasaran 5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	72,8	75		75,5		77,5		80		80		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	layanan publik Disperinda gkop			Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	88,01	85		85,00		85,5		86		86,00		
				Galeri UKM (%)	30	0		100		0		0		100	SEKRET ARIAT	
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88,5	64.257.293.690	88,5	34.000.000.000	88,8	36.993.138.428	89	32.523.465.536		SEKRET ARIAT	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	0	100		100		100		100		100		
		2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	25	29	1.424.495.600	29	1.566.945.160	29	1.645.292.418	29	1.645.292.418		SEKRET ARIAT	
		2.17.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	859.696.100	6	731.715.710	6	768.301.496	6	768.301.496	18	SEKRET ARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	-	5	148.500.000	5	155.925.000	5	155.925.000	15	SEKRET ARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	-	4	65.450.000	4	68.722.500	4	68.722.500	12	SEKRET ARIAT	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11	564.799.500	11	446.379.450	11	468.698.423	11	468.698.423	33	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	-	3	174.900.000	3	183.645.000	3	183.645.000	9	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	70	80	17.022.372.350	75 Dok	16.977.480.000	75 Dok	17.048.580.350	75 Dok	17.048.580.350	225 dok	SEKRETARIAT	
		2.17.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	80	16.071.100.350	75 orang	16.050.000.000	75 orang	16.071.100.350	75 orang	16.071.100.350	75	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	25	422.280.000	12 dok	398.360.000	12 dok	398.360.000	12 dok	398.360.000	36	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	12	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	255.192.000	2	215.200.000	2	215.200.000	2	215.200.000	6	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3	203.120.000	3	173.520.000	3	223.520.000	3	223.520.000	9	SEKRETARIAT	10 kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		14	70.680.000	14	75.400.000	14	75.400.000	14	75.400.000	42	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah (SIMDA BARANG, SIKAP , RKMBD , daftar pemeliharaan , laporan rekonsiliasi barang (2) dan laporan penatausahaan		0	0	18	245.800.000	18	245.800.000	18	245.800.000	54	SEKRETARIAT	
		2.17.01.1.03.01	SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3		
		2.17.01.1.03.02	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
		2.17.01.1.03.05	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	4	67.200.000	4	67.200.000	4	67.200.000	12	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.03.06	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	16	15.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	48	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.03.07	SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	2	63.600.000	2	63.600.000	2	63.600.000	6	SEKRETARIAT	Kota Samari nda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosiali sasi	31	60	362.961.000	189	2.149.005.000	189	2.413.879.000	189	2.013.170.000	567	SEKRETARIAT	
		2.17.01.1.05.01	Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0	-	4	224.800.000	4	63.600.000	4	63.600.000	3	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.05.02	subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		3	362.961.000	3	286.335.000	3	350.709.000	0	-	618	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.05.03	subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	-	3	755.950.000	3	1.056.450.000	3	1.006.450.000	9	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.05.04	subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0	-	4	61.200.000	4	61.200.000	4	61.200.000	3	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.05.05	subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	4	158.640.000	4	219.840.000	4	219.840.000	6	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.05.09	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30	1.674.530.000	30	662.080.000	35	662.080.000	40	662.080.000	105	SEKRETARIAT	10 kab/Kota
		2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	1.356.176.690	12	3.352.630.540	12	3.196.391.800	12	3.196.391.800	36	SEKRETARIAT	
		2.17.01.1.06.01	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	10	75.020.000	10	50.020.000	10	50.020.000	15	SEKRETARIAT	Kota Samarinda
		2.17.01.1.06.02	subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	768.525.100	4	171.957.400	4	171.957.400	4	171.957.400	3	SEKRETARIAT	Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.06.03	subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	4	53.660.000	4	20.000.000	4	20.000.000	3	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.04	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9	152.627.400	5	314.562.600	5	314.562.600	5	314.562.600	15	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.05	subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5	411.753.790	12	581.125.140	12	643.546.400	12	643.546.400	36	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.06	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4	23.270.400	12	23.270.400	12	23.270.400	12	23.270.400	12	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.08	subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0	0	5	59.410.000	5	59.410.000	5	59.410.000	15	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.09	subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	12	1.833.625.000	12	1.813.625.000	12	1.813.625.000	36	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.10	subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0	4	190.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	3	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.11	subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3		
		2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	15	25	34.524.640.330	100	1.850.703.400	100	4.601.496.000	100	339.056.000	300	SEKRETARIAT	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Urusan Pemerintah Daerah	Daerah												
		2.17.01.1.07.01	subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	492.610.000	6	500.000.000	6	2.262.440.000	0	-	12	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.05	subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		7	2.248.958.200	3	100.000.000	3	2.000.000.000	1	100.000.000	7	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.06	subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		34	501.624.030	61	833.435.400	4	150.000.000	2	50.000.000	67	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.08	subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		0	0	5	205.000.000	4	50.000.000	4	49.500.000	13	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.09	subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	31.281.448.100	1	500.000	0	500.000	0	500.000	1	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.10	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1	119.056.000	1	89.056.000	1	89.056.000	3	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.11	subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1	92.712.000	1	49.500.000	1	50.000.000	3	SEKRETARIAT	Kota Samari nda

		2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	8.415.264.920	12	4.829.381.500	12	5.013.644.460	12	5.207.120.568	36	SEKRETARIAT	
		2.17.01.1.08.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	4.722.300	12	4.722.300	12	4.722.300	12	4.722.300	36	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	876.699.000	36	1.139.400.000	36	1.139.400.000	36	1.139.400.000	108	SEKRETARIAT	Kota Samari nda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.08.04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	7.533.843.620	12	3.685.259.200	12	3.869.522.160	12	4.062.998.268	36	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		12	1.151.382.800	200	3.028.054.400	200	2.828.054.400	200	2.828.054.400	600	SEKRETARIAT	
		2.17.01.1.09.01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		25	455.153.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	24	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	16	437.340.400	16	437.340.400	16	437.340.400	48	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	105	238.960.000	105	188.960.000	105	188.960.000	315	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.07	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		0	0	160	171.500.000	103	171.500.000	103	171.500.000	366	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.08	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		0	0	1	49.920.000	1	49.920.000	1	49.920.000	3	SEKRETARIAT	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	696.229.800	10	1.335.600.000	10	1.335.600.000	10	1.335.600.000	30	SEKRETARIAT	Kota Samari nda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.09.10	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20	0	3	661.438.000	3	511.438.000	3	511.438.000	9	SEKRETARIAT	Kota Samarinda
		2.17.01.1.09.12	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitas		0	0	1	93.296.000	1	93.296.000	1	93.296.000	3	SEKRETARIAT	Kota Samarinda
	Sasaran 7 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)			Skor Kepuasan Masyarakat	95,44	95,5		95,6		95,7		96		96		
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	72,22	0	0	73	1.797.200.000	74	1.619.710.000	75	2.061.474.239	75	UPTD.B PSMB	
-	-	-	-	mutu pelayanan BPSMB	85%	0	-	(A) 82 %		(A) 83 %		(A) 84 %		(A) 84 %	UPTD.B PSMB	
		3.30.06.1.02	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluhan pelanggan	0,06	0	5.537.639.605	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.797.200.000	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	1.619.710.000	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	2.061.474.239	≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)	UPTD.B PSMB	
				jumlah laporan mutu akreditasi	11	0		11		12		12		12	UPTD.B PSMB	
				jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	10	0		10		12		14		14	UPTD.B PSMB	
				persentase capaian penerbitan sertifikat layanan						100		100			UPTD.B PSMB	
		3.30.06.1.02.01	Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	4	3	295.829.335	5	133.000.000	6	123.800.000	6	191.180.000	6	UPTD.B PSMB	10 Kab/Kota
		3.30.06.1.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	60	60	2.820.149.120	165	528.000.000	180	353.000.000	195	508.800.000	195	UPTD.B PSMB	10 Kab/Kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengujian													
		3.30.06.1.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	1	327.981.700	1	347.100.000	1	414.310.000	1	510.741.000	1	UPTD.B PSMB	10 Kab/Ko ta
		3.30.06.1.02.04	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2215	2215	2.093.679.450	2400	789.100.000	2600	728.600.000	2800	850.753.239	7.800	UPTD.B PSMB	10 Kab/Ko ta
		3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	88	3.020.087.010	88,5	3.002.800.000	88,8	3.680.290.000	89	3.738.525.761	89	UPTD.B PSMB	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	90	80		90	90	100		100		
		3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun		100	445.540.000	13	88.540.000	13	97.540.000	13	97.540.000	39	UPTD.B PSMB	
		3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		26	445.540.000	13	88.540.000	13	97.540.000	13	97.540.000	39	UPTD.B PSMB	10 Kab/Ko ta
		3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosiali sasi	10	10	104.100.000	20	206.000.000	20	227.000.000	20	228.000.000	60	UPTD.B PSMB	
		3.30.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0		1	26.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	3	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTuga s dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	104.100.000	20	180.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	60	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Peranakot Daerah		12	159.817.035	7	595.414.320	7	624.327.632	7	629.762.275	21	UPTD.B PSMB	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10	10.003.900	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	30	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	61.092.735	4	43.500.000	4	61.000.000	4	65.000.000	12	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		24	40.200.000	24	57.000.000	24	58.200.000	24	59.400.000	72	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		11	46.581.200	11	46.581.200	11	46.581.200	11	46.581.200	33	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	1.939.200	12	2.133.120	12	2.346.432	12	2.581.075	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0	0	4	19.200.000	4	19.200.000	4	19.200.000	12	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	14	415.000.000	14	425.000.000	14	425.000.000	42	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah		0	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	UPTD.B PSMB	
		3.30.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.30.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53	23	139.500.295	10	70.000.000	11	580.000.000	10	500.000.000	31	UPTD.B PSMB	
		3.30.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	-	0	-	1	500.000.000	1	400.000.000	1	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		23	139.500.295	10	70.000.000	10	80.000.000	10	100.000.000	30	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	1.783.964.280	38	1.690.631.680	38	1.773.022.368	38	1.867.123.486	114	UPTD.B PSMB	
		3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	8.336.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		15	179.996.600	14	189.000.000	14	198.450.000	14	208.372.500	42	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1.595.631.680	12	1.491.631.680	12	1.563.572.368	12	1.646.750.986	36	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		12	387.165.400	58	252.214.000	58	278.400.000	58	316.100.000	174	UPTD.B PSMB	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	79.633.300	4	75.000.000	4	82.500.000	4	90.750.000	12	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51	170.912.700	50	135.000.000	50	148.500.000	50	163.350.000	150	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
		3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	136.619.400	4	42.214.000	4	47.400.000	4	62.000.000	12	UPTD.B PSMB	Kota Samari nda
			TOTAL BPSMB				8.557.726.615		4.800.000.000		5.300.000.000		5.800.000.000			
			RANCANGAN PAGU BPSMB						4.800.000.000		5.300.000.000		5.800.000.000			
			SELISIH						-		-		0			
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2,03%	300	1.639.670.000	2,34%	1.700.000.000	5,0%	1.850.000.000	8%	2.000.000.000	7,81%	UPTD PELKOP	
		2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan	570 orang	300	1.639.670.000	660 orang	1.700.000.000	1400 orang	1.850.000.000	2200 orang	2.000.000.000	290 Koperasi	UPTD PELKOP	
			Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan													
		2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	570 orang	240	1.639.670.000	660 orang	1.700.000.000	1400 orang	1.850.000.000	2200 orang	2.000.000.000	2200 orang	UPTD PELKOP	10 kab/kota

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran 8 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)			Skor Kepuasan Masyarakat	0	85		86		87		88		88		
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	90	2.906.160.500	88,5	3.500.000.000	88,8	3.750.000.000	89	4.000.000.000	89	UPTD PELKOP	
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	90	80		90		100				
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	12 Dokumen	100	250.200.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	93.000.000	12 bulan	95.000.000	36	UPTD PELKOP	
		2.17.01.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12	250.200.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	93.000.000	12 bulan	95.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	12 orang	25	67.080.000	20 orang	145.000.000	20 orang	155.000.000	20 orang	165.000.000	12 bulan	UPTD PELKOP	
		2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	-	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	102	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	67.080.000	10	85.000.000	12	90.000.000	15	95.000.000	37	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dok	12	1.409.255.800	12 Dok	492.000.000	12 Dok	529.000.000	12 Dok	563.200.000	36	UPTD PELKOP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	21.517.700	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0		70	70.000.000	75	75.000.000	80	80.000.000	225	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0		12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	7	1.282.660.900	12	25.000.000	12	27.000.000	12	29.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	4	103.138.000	12	40.000.000	12	43.900.000	12	45.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	0		25	200.000.000	30	210.000.000	35	220.000.000	90	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12	1.939.200	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.200.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	0		24	100.000.000	24	110.000.000	24	120.000.000	72	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah		0	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	UPTD PELKOP	
		2.17.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	25	319.318.400	12 unit	400.000.000	12 unit	452.000.000	12 unit	505.000.000	36	UPTD PELKOP	
		2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0		1	150.000.000	1	152.000.000	1	155.000.000	3	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	21	319.318.400	6	250.000.000	7	300.000.000	9	350.000.000	22	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	205.405.600	12 keg	1.470.000.000	12 keg	1.636.000.000	12 keg	1.602.000.000	36	UPTD PELKOP	
		2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	400	4.000.000	50	5.000.000	60	6.000.000	60	7.000.000	170	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12	201.405.600	12	220.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0	0	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.08.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	12	1.200.000.000	12	1.350.000.000	12	1.300.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						tar get	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 unit	12	654.900.700	18 unit	803.000.000	18 unit	785.000.000	18 unit	969.800.000	54	UPTD PELKOP	
		2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 bulan	0	0	1 Unit	15.000.000	1 Unit	17.000.000	1 Unit	19.000.000	3	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	3	70.009.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	34.000.000	2 Unit	38.000.000	6	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 bulan	0	0	15 Unit	25.000.000	15 Unit	27.000.000	15 Unit	30.000.000	45	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	80	75.158.000	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	37.000.000	12 Bulan	38.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	2	509.733.700	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	420.000.000	12 Bulan	500.000.000	36	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
		2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	0		1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	344.800.000	3	UPTD PELKOP	Kota Samari nda
				TOTAL USULAN PAGU PELKOP			4.545.830.500		5.200.000.000		5.600.000.000		6.000.000.000			
				TOTAL USULAN PAGU PELKOP					5.200.000.000		5.600.000.000		6.000.000.000			
			Tota Rancangan Pagu I Dinas dan UPTD						64.000.000.000		95.900.000.000		97.800.000.000			

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD**

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi dana realisasi anggaran, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana capaian sasaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal itu, berikut ini disajikan indikator-indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2024-2026, meliputi:

**TABEL 20 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RPD TAHUN 2024 – 2026**

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,588	39	39	40	40	40
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	77,382	75	75	75	75	75
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	55,71	55,73	55,75	55,77	55,80	55,80
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	72,222	72	73	74	75	75
4	Tertib Usaha	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,668	76	85	90	92	92
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	76,09	75	77	79	80	80

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (Target)	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	Perundang-Undangan							
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,17	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	20,702	18	17	16	15	15
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	111,56	115	117	118	120	120
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	23,611	24,5	25	25,5	26	26

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim Tahun 2024 sampai Tahun 2026 ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2023

Plt. Kepala Dinas,

Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si.

Pembina Tk 1 (IV/b)

NIP. 1973031419988032009

Lampiran

Tabel 21. Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN
Tujuan1 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	Laju Pertumbuhan = [(Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal]x100
Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara = (Nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara / PDRB) * 100
Tujuan2 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan	Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)	nilai ekspor nonmigas dan non batubara/ total ekspor * 100
Sasaran 2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)	Nilai ekspor pada tahun berjalan bersumber data BPS
sasaran 3 Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen	Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)	Indeks Keberdayaan Konsumen (Consumer Empowerment Index). Indeks Keberdayaan Konsumen adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana konsumen memiliki kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya untuk membuat keputusan yang cerdas dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumsi mereka. di ukur oleh lembaga dari kementerian perdagangan / pihak ketiga
TUJUAN 3 : Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.	Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi dan UKM = [(Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sekarang - Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sebelumnya) / Nilai PDRB

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN
		Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sebelumnya] * 100
	Inflasi pangan bergejolak (%)	inflasi volatil food sumber data dari BPS
Sasaran 4 : Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omzet UKM	Pertumbuhan omzet =[(nilai omzet tahun akhir- nilai omzet awal)/ Nilai omzet] x 100
	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Pertumbuhan omzet =[(nilai omzet tahun akhir- nilai omzet awal)/ Nilai omzet] x 100
Sasaran5 : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{P}$
Tujuan 4: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	SAKIP melibatkan berbagai aspek dan faktor yang relevan, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Tujuan utama dari SAKIP adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah kepada publik.

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja suatu instansi atau pelayanan yang diberikan dengan : 1. survei yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dinilai. 2. Pengumpulan Data 3. skoring dan analisis data
Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop	Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop	Perhitungan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
	Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop	Melakukan survey dengan mitra Sektor Indagkop
	Galeri UKM (%)	perhitungan fisik dari pembangunan Gedung Galeri yang sampai dengan tahun 2022 sebesar 30%
Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)	Skor Kepuasan Masyarakat	perhitungan dari survey yang dilakukan oleh UPTD dalam triwulan maupun tahunan
Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)	Skor Kepuasan Masyarakat	perhitungan dari survey yang dilakukan oleh UPTD dalam triwulan maupun tahunan

Tabel 22 .Formula Perhitungan Program Indikator

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)	$= [(PDRB \text{ tahun ini} - PDRB \text{ tahun sebelumnya}) / PDRB \text{ tahun sebelumnya}] \times 100$
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	$= \text{jumlah ijin yg dikendalikan} / \text{jumlah keseluruhan ijin} \times 100$
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	rumus perhitungan : jumlah industri tahun N di SIINas / jumlah industri total terdata SIINAS sampai dengan tahun N x 100 % . Tahun 2022 : $60 / 352 \times 100 \% = 17,04$. Tahun 2023 : $80 / 432 \times 100 \% = 18,51$. Tahun 2024 : $100 / 532 \times 100 \% = 18,69$. Tahun 2025 : $125 / 657 \times 100 \% = 19,02$. Tahun 2026 = $160 / 817 \times 100 \% = 19,58$
Program Pengembangan Ekspor	Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	jumlah produk baru dan atau jumlah negara tujuan baru
Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)	$= \text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)} / \text{Jumlah Permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}$
	persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	$= \text{jumlah perijinan} / \text{jumlah permohonan perijinan} \times 100\%$
	persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	jumlah pelaku yang taat peraturan dibagi total pelaku yang dilakukan pengawasan dikali 100%

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	Disparitas Harga = $[(\text{Harga Barang komoditi di pasar induk} - \text{Harga rata-rata Barang kab/kota}) / \text{Harga Barang pasar induk}] * 100$ Dalam rumus di atas, Harga Barang Pokok mengacu pada harga rata-rata atau harga tertentu dari barang pokok yang diamati. Harga Barang Penting adalah harga rata-rata atau harga tertentu dari barang penting yang menjadi perbandingan.
	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)	= Realisasi Penyaluran pupuk / RDKK(rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	awal tahun 2024 berupa kajian , tahun 2025 - 2026 lembaga food station awal tahun 2024 kajian sebesar 10 %
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	= jumlah produk UMKM binaan yang masuk pasar dibagi jumlah total produk UMKM yang dibina X 100% Produk Daerah yg masuk pasar dalam negeri tahun 2023 = 60% , Tahun 2024 = 75% , tahun 2025 = 90% , tahun 2026 = 100% istimasi Produk UMKM yang didamping pertahun 15 jenis produk diakhir tahun ada 39 Jenis Produk UMKM
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)	= Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan / Jumlah barang beredar yang diawasi

Nama Program	Indikator	Cara Perhitungan
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	jumlah koperasi yang masuk katagori sehat adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT (rapat anggota Tahunan rumus = jumlah koperasi provinsi yang RAT dibagi Jumlah Koperasi diawasi dan menindaklanjuti X 100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	= jumlah koperasi modern provinsi dibagi total koperasi provinsi yang didampingi nuju kop modern X 100%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	= jumlah UKM Digital / jumlah UKM yang ada x 100%
Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	Jumlah UKM Potensial Ekspor
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)	= Jumlah sampel yang sesuai ketentuan / Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun
-	mutu pelayanan BPSMB	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	=jumlah Anggota kop prov dan UKM yg ikut pelatihan dibagi anggota koperasi aktif dan UKM x 100%

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Periode RENSTRA biasanya adalah 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Penentuan tujuan dan sasaran pada Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RENSTRA perangkat daerah provinsi yang tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru (DOB) dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) RENSTRA PD masing masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Sedangkan dalam perumusan tugas fungsi perangkat daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Selain itu, Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, penetapan lokasi (penlok) penegasan batasan wilayah dan pertanahan, pada Biro POD, pemilihan pengadaan barang dan jasa, pembinaan pelaku barang dan jasa, LPSE pada Biro PBJ, fungsi pengelolaan pemberian dana hibah terkait sarana prasarana keagamaan, dan hibah pendidikan khusus berbasis keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat

Hubungan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RENSTRA PD disusun berpedoman pada RPD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. RENSTRA PD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
4. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah;

5. RENSTRA PD adalah acuan sebagai penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah; dan
6. RENSTRA PD adalah acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Terkait dengan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan penjabaran dalam bentuk kegiatan dan rencana aksi secara konsisten yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Landasan Hukum

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
- (14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- (15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
- (16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- (17) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18);
- (18) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
- (19) Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0378/B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan arahan kebijakan dan strategi untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024-2026 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diidentifikasi berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang kemudian dicari strategi penyelesaiannya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan PD (Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah pada BAB II)
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan sasaran RENSTRA PD Provinsi Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah
- 4.2 *Casecading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing

BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA PD tahun 2024-2026

BAB 6 Rencana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan serta Pendanaan

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 8 Penutup

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) biro yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, dan hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Otonomi Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Gubernur dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang agama dan kesehatan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Bagian Bina Mental Spiritual;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual serta kelembagaan bina spiritual.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan biro.

Bagian Bina mental membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;

- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum, membawahkan :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
- c. Bagian Bantuan Hukum.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan,

penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II, dan produk hukum Daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah wilayah I, produk hukum Daerah wilayah II dan produk hukum Daerah wilayah III; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, litigasi dan non litigasi dan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bantuan Hukum membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

2.1.2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan administrasi pembangunan;
- c. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2.1. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumberdaya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Perekonomian, membawahi :

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian;
- b. Bagian Sumber Daya Alam; dan
- c. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kebijakan Daerah membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan Badan Layanan Umum Daerah serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan

Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2.2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan serta evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik,

pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan sumber daya manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/ataubimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pembinaan Sumber Daya Manusia dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan serta tata usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2.3. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Anggaran Pembangunan Belanja Negara dan tata usaha; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III.

Untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan

- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- (3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah; dan
- (4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang, organisasi, umum dan administrasi pimpinan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3.1. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (2) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
- (3) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

- (4) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi, membawahi :

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Bagian Tata Laksana.

Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- (4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik.

Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Laksana membawahi Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha

2.1.3.2. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Biro Umum mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tatausaha;
- (2) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum, membawahi :

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Bagian-bagian sebagaimana di maksud dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Bagian Rumah Tangga fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusanrumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, dan urusan dalam;

- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur dan urusan dalam; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset Sekretariat Daerah, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah, akuntansi dan penatausahaan aset, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, pengelolaan kendaraan, dan persuratan dan arsip;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan danstafahli, pengelolaan kendaraan dan persuratan dan arsip; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Staf ahli yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha pimpinan dan staf ahli.

2.1.3.3. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan, membawahi :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Bagian Protokol.

Bagian sebagaimana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, dan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha; dan
- (3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tata usaha.

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 138, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang acara, tamu dan hubungan keprotokolan.

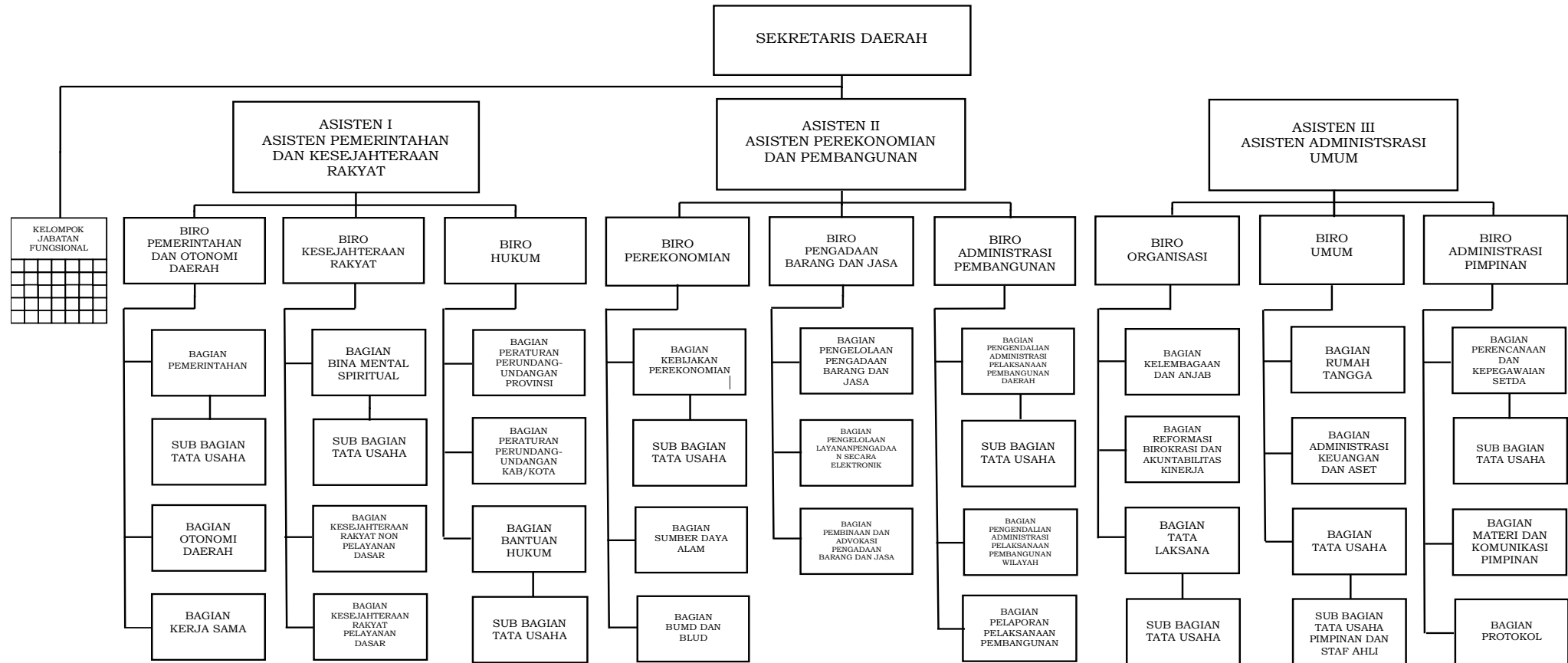
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 142, Bagian Protokol, mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan;
- (2) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan; dan

- (3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) berada di bawah Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering:

1. Pendidikan

Sampai dengan 31 Januari 2023 sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 629 orang yang terdiri dari 333 PNS dan 296 Non PNS dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD hingga S3. Berdasarkan rekapitulasi yang telah disusun, maka jumlah PNS dengan pendidikan S1/DIV menduduki urutan pertama dengan jumlah 149 orang, urutan kedua adalah pendidikan SLTA sebanyak 104 orang, dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 69 orang. Rekapitulasi jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan per 31 Januari 2023 ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan

NO.	EKSEKUTIF/BIRO	S.3	S.2	S.1	SM	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	-	-	3
3	Staf ahli	-	1		-	-	-	-	1
4	Tenaga Fungsional Utama	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	7	17	-	7	1	-	32
6	Biro Hukum	-	8	10	-	2	-	-	20
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	4	10	-	3	-	-	17
8	Biro Perekonomian	-	10	13	-	3	-	-	26
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	8	11	-	4	-	-	23
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	10	31	2	6	-	-	49
11	Biro Administrasi Pimpinan	-	8	15	1	11	-	-	36
12	Biro Umum	-	5	15	9	62	8	9	99
13	Biro Organisasi	-	5	14	-	6	-	-	25
Jumlah		-	71	136	12	104	9	9	333
Keadaan Per 31 Januari 2023									
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)									

2. Golongan, Eselon, dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Per 31 Januari 2023, PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki golongan III sebanyak 182 orang, diikuti oleh golongan II sebanyak 82 orang, golongan IV sebanyak 60 orang, dan golongan I sebanyak 9 orang.

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Golongan

NO.	EKSEKUTIF/BIRO	GOL. IV	GOL.III	GOL. II	GOL. I	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten	3	-	-	-	3
3	Staf ahli	2	-	-	-	1
4	Tenaga Fungsional Utama	1	-	-	-	1
5	Biro Pemerintahan, dan Otonomi Daerah	5	23	3	1	32
6	Biro Hukum	7	10	3	-	21
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	4	10	3	-	17
8	Biro Perekonomian	9	14	3	-	26
9	Biro Administrasi Pembangunan	7	14	2	-	23
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	35	7	-	49
11	Biro Administrasi Pimpinan	5	22	8	-	35
12	Biro Umum	4	39	48	8	99
13	Biro Organisasi	5	15	5	-	25
Jumlah		60	182	82	9	333
Keadaan Per 31 Januari 2023						
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)						

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural maupun fungsional yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Gender

No.	EKSEKUTIF/BIRO	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	-	1	1
2	Asisten	3	-	3
3	Staf ahli	2	-	2
4	Tenaga Fungsional Utama	-	1	1
5	Biro Pemerintahan, dan Otonomi Daerah	20	12	32
6	Biro Hukum	12	8	20
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	12	5	17
8	Biro Perekonomian	18	8	26
9	Biro Administrasi Pembangunan	15	8	23
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	39	10	49
11	Biro Administrasi Pimpinan	24	11	35
12	Biro Umum	71	28	99

13	Biro Organisasi	16	9	25
Jumlah		232	101	333
Keadaan Per 31 Januari 2023				
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kepegawaian)				

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil inventarisasi data dari Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2022, adapun rekapitulasi barang ke neraca terdiri dari Aset Tetap dengan nilai aset sebesar Rp 2.293.787.590.641,27 dan Aset Lainnya dengan nilai aset sebesar Rp 6.400.837.825 Rincian sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021-2023 berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
1	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%			100			100		
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan				100%			100			100		
3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				2 Dokumen			2			100		
4	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Keuangan Daerah Dengan Baik				1 Laporan			100			100		
5	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Laporan			12			100		
6	Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan				12 Laporan			12			100		
7	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada perangkat daerah				100%			100			100		
8	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis				6 Orang			2			33,33		
9	Persentase tersedianya penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%			100			100		
10	Jumlah Peralatan Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai				30 Unit			30			100		
11	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan			12			100		
12	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			100			100		
13	Jumlah Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12 Laporan			12			100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				100%			100			100		
15	Jumlah laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara				40 Unit			40			100		
16	Presentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat EKPPD "Tinggi"				70%			65			92,857		
17	Presentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota Yang di Sepakati				80%			85			100,000		
18	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				3 Laporan			3			100		
19	Jumlah laporan fasilitasi penataan wilayah				4 Laporan			4			100		
20	Jumlah Kegiatan Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah				85 Jumlah			85			100		
21	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara				3 Laporan			3			100		
22	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				4 Laporan			4			100		
23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3 Laporan			3			100		
24	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti				100%			100			100		
25	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Pemerintah				1 Dokumen			1			100		
26	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta				1 Dokumen			1			100		
27	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Dokumen			1			100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
28	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan					100%			100,00%			100	
29	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran					2 Dokumen			2 Dokumen			100	
30	Persentase Realisasi Keuangan					98%			100,00%			100	
31	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelola Keuangan					12 Laporan			12 Laporan			100	
32	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%			100%			100	
33	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis					6 Orang			6 Orang			100	
34	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah					100%			100%			100	
35	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan			12 Laporan			100	
36	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Bulan			12 Bulan			100	
37	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90 OT			90 OT			100	
38	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%			100%			100	
39	Jumlah benda pos yang disediakan					350 Lembar			350 Lembar			100	
40	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis					12 Dokumen			12 Dokumen			100	
41	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%			100%			100	
42	Jumlah laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara					12 laporan			12 laporan			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
43	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional					9 Unit			9 Unit			100	
44	Persentase Jumlah Unit pengaadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi					100%			100%			100	
45	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Unit			12 Unit			100	
46	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat EKPPD "Tinggi"					80%			80%			100	
47	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati					90%			90%			100	
48	Jumlah Laporan Koodinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					3 Laporan			3 Laporan			100	
49	Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan Wilayah					4 Laporan			4 Laporan			100	
50	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah					85 Kegiatan			85 Kegiatan			100	
51	Jumlah laporan fasilitasi pejabat negara					3 Laporan			3 Laporan			100	
52	Jumlah Laporan Korrdinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					4 Laporan			4 Laporan			100	
53	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					3 Laporan			3 Laporan			100	
54	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti					100%			100%			100	
55	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Pemerintah					1 Laporan			1 Laporan			100	
56	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta					1 Laporan			1 Laporan			100	
57	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama					1 Laporan			1 Laporan			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
58	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan						100						
59	Jumlah Dokumen Perencanaan						2 Dokumen						
60	Persentase Realisasi Keuangan						98						
61	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan						12 Laporan						
62	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						100						
63	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						6 orang						
64	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah						100						
65	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						12 Laporan						
66	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan						12 Laporan						
67	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90 Laporan						
68	Persentase jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang terealisasi						100						
69	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						12 Unit						
70	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100						
71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						350						
72	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
73	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik						100						
74	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						9 Unit						
75	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Laporan						
76	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat EKPPD "Tinggi"						80%						
77	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati						90%						
78	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						3 Dokumen						
79	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah						4 Dokumen						
80	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah						85%						
81	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						3 Dokumen						
82	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan						4 Dokumen						
83	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						3 Laporan						
84	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti						100%						
85	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi						1 Dokumen						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
86	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi						1 Dokumen						
87	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi						2 Laporan						
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT													
88	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat				80%	83%	84%	82,998%	80,638%		103,75	97,15	
89	Persentase Realisasi Keuangan				91%	92%	92%	81%	93,61%		89,01	101,75	
90	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100	100	
91	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100	100	
92	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu				100%	100%	100%	100%	100%		100	100	
93	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	2 Orang	4 Orang	0	2 Orang		0	100	
94	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	
95	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17 Paket	53 Paket	12 Laporan	17 Paket		100	100	
96	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100	100	
97	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	12 Paket	12 Paket	12 Laporan	12 Paket		100	100	
98	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100	100	
99	Jumlah Surat atau dokumen yang dikirim				1000 Laporan			900 lembar			90		
100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
101	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan		0	100	
102	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						17 Laporan				0	0	
103	Persentase Barang Milik Daerah yang Kategori Baik				90%	90%	90%	90%	90%		100	100	
104	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	18 Unit	10 Unit	7 Unit	18 Unit		70	100	
105	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18 Unit	20 Unit	25 Unit	18 Unit		100	100	
106	Persentase kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi				90%	90%	90%	90%	100%		100	111,11	
107	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
108	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dibidang Sarana dan Prasarana Spiritual					160 Unit	100 Unit		163 Unit			101,88	
109	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Dokumen			1 Dokumen			100		
110	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi					10 lembaga	10 Lembaga		9 lembaga			90	
111	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				1 Dokumen			1 Dokumen			100		
112	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
113	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	15 Dokumen		100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
114	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	16 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen		100	100	
115	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				2 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen		100	100	
116	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti				90%	90%	100%	90%	100%		100	111,11	
117	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				3 Dokumen	11 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	11 Dokumen		100	100	
118	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				3 Dokumen	13 Dokumen	20 Dokumen	3 Dokumen	13 Dokumen		100	100	
119	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				3 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen		100	90	
BIRO HUKUM													
120	Persentase pelayanan publik pada Biro Hukum				85	85	89	85	87		85	87	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
121	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik				100	100	100	100	100		100	100	
122	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan				12	12	12	12	12		100	100	
123	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
124	Jumlah laporan penatausahaan BMD				12	12	12	12	12		100	100	
125	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				0	100	100	0	100		100	100	
126	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat				0	3	2	0	3		100	100	
127	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
128	Jumlah Laporan pengadaan ATK				12	12	12	12	12		100	100	
129	Jumlah dan Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan				0	701	701	0	701		100	100	
130	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				12	12	12	12	12		100	100	
131	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				40	40	40	40	40		100	100	
132	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
133	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor				1	1	1	1	1		100	100	
134	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	1	1	1	1		100	100	
135	Jumlah benda pos yang disediakan				0	500	500	0	500		100	100	
136	jumlah laporan gaji non ASN				12	12	12	12	12		100	100	
137	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik										100	100	
138	jumlah laporan pemeliharaan peralatan kantor				12	12	12	12	12		100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
139	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi, Kab/Kota serta Penanganan Litigasi dan Non litigasi dan HAM				100	100	100	100	100		100	100	
140	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah				100	100	100	100	100		100	100	
141	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi				80	80	80	80	80		100	100	
142	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan				600	600	600	600	600		100	100	
143	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan				610	680	680	610	680		100	100	
144	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota				250	250	250	250	250		100	100	
145	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan				100	100	100	100	100		100	100	
146	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum				10	10	10	10	10		100	100	
147	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM				2	2	2	2	2		100	100	
BIRO PEREKONOMIAN													
148	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan												
149	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan				100%	100%	8 Dokumen	100%	100%		100%	100%	
150	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%	100%	
151	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%	100%	
152	Persentase Realisasi Keuangan				90%	92%	95%	73%	85,94%		81%	95,49%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
153	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Daftar	12 Laporan	3 Dokumen	12 Daftar	12 Laporan		100%	100%	
154	Persentase Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
155	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
156	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah					100%	100%		100%				
157	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					28 Laporan	25 Dokumen		26 Orang			92,86%	
158	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					14 Orang	3 Orang		9 Orang			64,29%	
159	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%			100%	
160	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Unit	12 Laporan	50 Paket	7 Unit	12 Laporan		100%	100%	
161	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Pak	600 Porsi	25 Paket	12 Pak	540 Porsi		100%	90,00%	
162	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1600 Lembar	12 Laporan	2 Paket	1000 Lembar	12 Laporan		62,50%	100%	
163	Jumlah Laporan Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar				4 Terbitan	12 Laporan	96 Eksemplar	4 Terbitan	12 Laporan		100%	100%	
164	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi				45 kali	153 OT	120 Laporan	31 kali	124 OT		68,89%	81,05%	
165	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik					100%	100%		100%			100%	
166	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	4 unit		1 Laporan			100%	
167	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%				
168	Jumlah benda pos yang disediakan				200 Lembar	120 Lembar	1 Laporan	90 lembar	114 Lembar		45%	57%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
169	Jumlah dokumen gaji tenaga kontrak teknis/non teknis				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		100%	100%	
170	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
171	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		100%	100%	
172	Jumlah Laporan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang dipelihara				12 Unit	12 Laporan	25 Unit	12 Unit	12 Laporan		100%	100%	
173	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian				90%	95%	100%	100%	96,77%		111,11%	96,77%	
174	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	6 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
175	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Laporan	2 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
176	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
177	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	7 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
178	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				1 Laporan	6 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	6 Laporan		100%	100%	
179	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
180	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan		100%	100%	
181	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				1 Laporan	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
182	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Laporan	4 Laporan	10 Dokumen	1 Laporan	4 Laporan		100%	100%	
183	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
184	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan		100%	100%	
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA													
185	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	-	-	-	Level 3	Level 3	PKP-PB Pro Aktif	8/9					
186	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	88	90	100					
187	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12					
188	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12					
189	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12					
190	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	95	95	95	100					
191	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	0	0	2	12					
192	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	2	12					
193	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	3	700					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
194	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	75	87,5	100					
195	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa diberi Pembinaan	-	-	-	0	0	200	100					
196	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12					
197	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0	0	1	12					
198	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	82	83	84	100					
199	Tercapainya Laporan Keuangan yang Akuntabel	-	-	-	0	90	90	0					
200	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	-	-	-	0	0	90	0					
201	Meningkatnya Kapasitas Pegawai	-	-	-	0	80	-	0					
202	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	0	0	1	0					
203	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi	-	-	-	0	10	20	0					
204	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	-	-	-	0	12	100	0					
205	Meningkatnya Pelayanan Administasi Umum	-	-	-	0	90	90	0					
206	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	20	1	0					
207	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	0	50	1	0					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
208	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	0	40	20	0					
209	Meningkatnya Pelayanan Kantor	-	-	-	0	85	85	0					
210	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	0	20	20	0					
211	Meningkatnya Pelayanan Administasi Umum	-	-	-	0	0	85	0					
212	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	0	1	4	0					
213	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	0	12	12	0					
214	Jumlah laporan pelaksanaan jasa pelayanan	-	-	-	0	12	12	0					
215	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	-	-	0	85	85	0					
216	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	-	-	-	0	3	1	0					
217	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	0	6	2	0					
218	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	-	-	0	50	20	0					
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
219	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			80%			80,00		
220	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
221	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
222	Jumlah dokumen keuangan daerah				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
223	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Tugas				5Laporan			5Laporan			100,00		
224	Laporan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan				12Laporan			12Laporan			100,00		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
225	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian				2Dokumen			2Dokumen			100,00		
226	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan				8Laporan			2Laporan			25,00		
227	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi				12Laporan			5Laporan			41,67		
228	Jumlah dokumen administrasi umum				3Dokumen			0Dokumen					
229	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai				57Unit			54Unit			94,74		
230	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan				100Buku			100Buku			100,00		
231	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				20Laporan			20Laporan			100,00		
232	meningkatnya pelayanan kantor				90%			85%			94,44		
233	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat				12Laporan			12Laporan			100,00		
234	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12Bulan			12Bulan			100,00		
235	Jumlah Non ASN				25Orang			25Orang			100,00		
236	Persentase BMD dalam kondisi baik				85%			80%			94,12		
237	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan				8Unit			8Unit			100,00		
238	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4Unit			4Unit			100,00		
239	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja				30Unit			20Unit			66,67		
240	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				100%			100%			100,00		
241	Tersusunnya Dokumen LPPD				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
242	Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah				1Dokumen			1Dokumen			100,00		
243	Persentase pengendalian administrasi Pembangunan				75%			70%			93,33		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
244	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3Dokumen			3Dokumen			100,00		
245	dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				12Laporan			12Laporan			100,00		
246	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				12Laporan			12Laporan			100,00		
247	laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III				36Laporan			36Laporan			100,00		
248	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				3Dokumen			3Dokumen			100,00		
249	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan				12Laporan			12Laporan			100,00		
250	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah				12Laporan			12Laporan			100,00		
251	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan yang telah dilaksanakan				2Laporan			2Laporan			100,00		
252	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan					83%			84,03%			101,24	
253	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)					1Dokumen			1Dokumen			100,00	
254	Laporan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan					12Laporan			12Laporan			100,00	
255	Jumlah dokumen administrasi pegawai					1Dokumen			1Dokumen			100,00	
256	Tersedianya pakaian pegawai					33stel			33stel			100,00	
257	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan					10Laporan			10Laporan			100,00	
258	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi					12Laporan			12Laporan			100,00	
259	Jumlah dokumen administrasi umum					3Dokumen			3Dokumen			100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
260	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai					32Unit			32Unit			100,00	
261	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan					10Buku			10Buku			100,00	
262	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi					15Laporan			15Laporan			100,00	
263	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00	
264	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat					12Laporan			12Laporan			100,00	
265	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia					12Bulan			12Bulan			100,00	
266	Jumlah ASN					25Orang			25Orang			100,00	
267	Jumlah BMD yang terpelihara					30unit			30unit			100,00	
268	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan					1Unit			1Unit			100,00	
269	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional					3Unit			3Unit			100,00	
270	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja					30Unit			30Unit			100,00	
271	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan					100%			100%			100,00	
272	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan					75%			85,37%			113,83	
273	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00	
274	Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					12Laporan			12Laporan			100,00	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
275	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					12Laporan			12Laporan			100,00	
276	Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III					12Laporan			12Laporan			100,00	
277	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					3Dokumen			3Dokumen			100,00	
278	Laporan Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan					4Dokumen			4Dokumen			100,00	
279	Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah					12Laporan			12Laporan			100,00	
280	Laporan Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan yang telah dilaksanakan					1Dokumen			1Dokumen			100,00	
281	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan						84%						
282	Dokumen Administrasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan						1Dokumen						
283	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1Dokumen						
284	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan						100%						
285	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan						15Paket						
286	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						100Orang						
287	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100Orang						
288	Jumlah dokumen administrasi umum						3Dokumen						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
289	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12Laporan						
290	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						10Paket						
291	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15Laporan						
292	Meningkatnya pelayanan kantor (Biro Adbang)						85%						
293	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12Laporan						
294	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12Laporan						
295	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12Laporan						
296	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)						85%						
297	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1Unit						
298	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						3Unit						
299	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						30Unit						
300	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang						85%						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
301	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						20Unit						
302	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (Biro Administrasi Pembangunan)						1Dokumen						
303	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2Dokumen						
304	Persentase pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan						100%						
305	Persentase koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang infrastruktur fisik, administrasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan						80%						
306	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						3Dokumen						
307	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						12Laporan						
308	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						12Laporan						
309	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Wilayah II dan Wilyah III						6Laporan						
310	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						3Dokumen						
311	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan						1Dokumen						
312	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah						12Laporan						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
313	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						1Dokumen						
BIRO ORGANISASI													
314	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	0	0	0	69%	70%	71%	62,34%	72,67%	85,11%	90,35%	103,81%	119,87%
315	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal B (BAIK)	0	0	0	77%	79%	81%	78,38%	75,68%	89,19%	101,79%	95,80%	110,11%
316	Indeks Kelembagaan	0	0	0	66	67	69	65,64	68,14	71,528	99,45%	101,70%	103,66%
317	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (Persentase)	0	0	0	79%	79%	79%	81%	81%	81%	102,53%	102,53%	102,53%
318	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Kota menyampaikan hasil Penataan Evalauasi Kinerja Pelayanan Publik	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
319	Persentase SOP Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	0	0	0	90%	95%	100%	78,38%	78,38%	78,38%	87,09%	82,50%	78,38%
320	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis sesuai ketentuan	0	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	100,00%
321	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan/Dokumen SAKIP sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
322	Persentase Kabupaten Kota yang menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sesuai Ketentuan	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
323	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Persentase)	0	0	0	54%	54%	54%	70%	70%	70%	130,13%	130,13%	130,13%
324	Prosentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Budaya Kerja (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	92%	92%	92%	91,89%	91,89%	91,89%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
325	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur kriteria (NSPK) (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	92%	92%	92%	91,89%	91,89%	91,89%
326	Persentase Kabupaten Kota yang Kelembagaan Organisasinya Sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
327	Persentase Anjab dan ABK Perangkat Daerah dan UPTD yang disusun sesuai Ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
328	Persentase Perangkat Daerah dan UPTD yang menyampaikan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
329	Persentase Kabupaten Kota yang telah menyusun Anjab dan ABK (Persentase)	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
330	Persentase hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
SS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	0	0	0	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%
332	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
333	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
334	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
335	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
336	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
337	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
338	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
339	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
340	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
341	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
342	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
343	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
344	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
345	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
346	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
347	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	0	0	0	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%
348	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
349	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
350	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	0	0	0	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
351	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
BIRO UMUM													
352	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim	-	-	-	80	83	84	79,81	83,30	-	99,76%	100,36%	-
353	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro Umum	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
354	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
355	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
356	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	500 Dokumen	14 Dokumen	373 Orang/Bulan	500 Dokumen	14 Dokumen	-	100%	100%	-
357	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	500 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	500 Dokumen	12 Dokumen	-	100%	100%	-
358	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
359	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	200 Dokumen	1 Laporan	12 Laporan	200 Dokumen	1 Laporan	-	100%	100%	-
360	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	-	100%	100%	-
361	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
362	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	400 Stel	358 Stel	3 Paket	400 Stel	358 Stel	-	100%	100%	-
363	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	-	-	-	300 Orang	1 Dokumen	4 Dokumen	300 Orang	1 Dokumen	-	100%	100%	-
364	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	100 orang	3 Laporan	125 Orang	100 orang	3 Laporan	-	100%	100%	-
365	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
366	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	15 Jenis	15 Jenis	6 Paket	15 Jenis	15 Jenis	-	100%	100%	-
367	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	102 Jenis	12 Laporan	6 Paket	102 Jenis	12 Laporan	-	100%	100%	-
368	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	261600 Porsi	12 Laporan	225 Paket	261600 Porsi	12 Laporan	-	100%	100%	-
369	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	5 Jenis	5 Jenis	14 Paket	5 Jenis	5 Jenis	-	100%	100%	-
370	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-		-	-		-	-	100%	100%	-
371	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	750 Dokumen	12 Laporan	1920 Orang/Perjalanan	750 Dokumen	12 Laporan	-	100%	100%	-
372	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	1500 Dokumen	2 Laporan	4 Dokumen	1500 Dokumen	2 Laporan	-	100%	100%	-
373	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	450 Orang	3 Aplikasi	4 Dokumen	450 Orang	3 Aplikasi	-	100%	100%	-
374	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
375	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	-	12 Unit	25 Unit	111 Unit	12 Unit	25 Unit	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
376	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-
377	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	200 Jenis	10 Jenis	150 Unit	200 Jenis	10 Jenis	-	100%	100%	-
378	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
379	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	1000 Surat	2100 Lembar	12 Laporan	1000 Surat	2100 Lembar	-	100%	100%	-
380	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	-	-	-	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	12 Laporan	1000 Mbps 155736 M3 1337616 Kwh	12 Laporan	-	100%	100%	-
381	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	-	100%	100%	-
382	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	137500 m2	12 Laporan	12 Laporan	137500 m2	12 Laporan	-	100%	100%	-
383	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
384	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	-	-	150 Unit	150 Unit	80 Unit	150 Unit	150 Unit	-	100%	100%	-
385	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	447 Unit	-	-	-	100%	100%	-
386	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	-	100%	100%	-
387	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	150 Unit 150 Jenis	150 Unit	325 Unit	150 Unit 150 Jenis	150 Unit	-	100%	100%	-
388	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
389	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-	-	24 Laporan	2 Laporan	2 Orang/Bulan	24 Laporan	2 Laporan	-	100%	100%	-
390	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	8 Paket	-	-	-	-	-	-
391	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	8 Orang	-	-	-	-	-	-
392	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	2 Orang/Bulan	-	-	-	-	-	-
393	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
394	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	17 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	-	100%	100%	-
395	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	17 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	-	100%	100%	-
396	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	-	-	100 Kegiatan	1 Laporan	28 Paket	100 Kegiatan	1 Laporan	-	100%	100%	-
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN													
397	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%			100%			100%		
398	Persentase Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan					84%	84%		97,44%	?		116,0%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
399	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				100%			100%			100%		
400	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%		90%	?		100%	
401	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen			2 Dokumen			100		
402	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen			100	
403	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen			4 Dokumen			100		
404	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen			100	
405	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik				100%								
406	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
407	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan				12 Laporan			12 Laporan			100		
408	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan				12 Dokumen			12 Dokumen			100		
409	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
410	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah				100%								
411	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
412	Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan				24 Kegiatan			24 Kegiatan			100		
413	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100	
414	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen			100	
415	Persentase Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%								
416	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
417	Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor				12 Bulan			12 Bulan			100		
418	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100	
419	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan				12 Bulan			12 Bulan			100		
420	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					12 laporan	12 laporan		12 laporan			100	
421	Jumlah Makanan & Minuman				12 Bulan			12 Bulan			100		
422	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					1000 porsi	1000 paket		627 Porsi			62,70	
423	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi				100 Kegiatan			100 Kegiatan			100		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
424	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					160 O/T	160 O/T		160 O/T			100	
425	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%								
426	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
427	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor				12 Bulan			12 Bulan			100		
428	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis			100	
429	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%								
430	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha					90%	90%						
431	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan			12 Bulan			100		
432	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					15 Unit	15 Unit		7 Unit			46,67	
433	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor & Mesin Lainnya				12 Bulan			12 Bulan			100		
434	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan			100	
435	Terlaksananya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan				100%								

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
436	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan					100%	100%						
437	Jumlah Sistem Penyedia Data dan Informasi				27 Laporan			27 Laporan			100		
438	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	
439	Jumlah Kerja Sama Media dan Informasi yang Tersampaikan				1210 Berita			1210 Berita			100		
440	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	
441	Jumlah Kerja Sama Media				4 kegiatan			4 kegiatan			100		
442	Jumlah Pengumpulan dan Penyediaan Data yang Terdokumentasi				24 Kegiatan			24 Kegiatan			100		
443	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan					12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen			100	
444	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Sekretariat Daerah				100%								
445	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan					100%	100%						
446	Jumlah Acara Kegiatan Pemda yang Terjadwalkan				121 Kegiatan			121 Kegiatan			100		
447	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen				
448	Jumlah Tamu yang Terlayani				50 Tamu			50 Tamu			100		
449	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
450	Jumlah Administrasi Keprotokolan yang Terdokumentasi				109 Tamu			109 Tamu			100		
451	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan					2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen			100	
452	Persentase Terlaksananya Koordinasi dalam Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				100%								
453	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah				100%								
454	Laporan Kerja Sama Antar Pemerintah				24 Laporan								
455	Laporan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintah				24 Laporan								
456	Jumlah Administrasi Kerja Sama yang Terdokumentasi				24 Dokumen								

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, digambarkan keterkaitan atau mitra Biro-Biro kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, SKPD teknis terkait, termasuk instansi/lembaga/pihak swasta terkait, sebagai berikut :

2.4.1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah :

- a. Pihak Aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) selaku yang tergabung sebagai Tim Pengamanan dan Penertiban Massa dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bermitra juga dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, dalam hal ini membantu berjalannya pelaksanaan urusan pertanahan;
- c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melakukan mitra kerja dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
- d. Direktorat Jendral Pembangunan Daerah dan Direktorat Jendral Administrasi Kewilayahan serta Perangkat Daerah terkait sebagai Mitra juga turut andil dalam pelaksanaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Mitra Biro POD juga memiliki keterkaitan dengan perangkat daerah lainnya dalam Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, di antaranya :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membantu dalam hal ketersediaan aset dan anggaran dalam hal kerja sama yang memerlukan kedua hal tersebut;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu dalam melihat kerja sama yang di usulkan kesesuaiannya dengan RPD Kaltim; dan
- c. Kantor Wilayah Kaltim Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum membantu dalam menyusun kalimat agar terhindar dari permasalahan hukum akibat kerja sama tersebut;

2.4.2 Biro Kesejahteraan Rakyat

Dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat bermitra dengan :

1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:

- (a) Dinas Kesehatan;
- (b) Dinas Kependudukan, Pemeberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- (c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (e) Dinas Perhubungan;
- (f) Dinas Pariwisata;
- (g) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (h) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (i) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- U) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- (k) Dinas Sosial.

2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

- (a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (d) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie;
- (e) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo; dan
- (f) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.

3) Instansi Vertikal:

- (a) Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- (b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (c) Kejaksaan Tinggi;
- (d) Pengadilan Tinggi;
- (e) Pengadilan Tinggi Agama;
- (f) Badan Pertanahan Nasional;
- (g) Badan Pusat Statistik;
- (h) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- (i) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim;
- U) Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- (k) Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4) Instansi lainnya:

- (a) Kepolisian Daerah Kaltim; dan
- (b) Komando Resor Militer 091 Aji Surya Natakesuma.

Biro Kesejahteraan Rakyat bermitra dengan beberapa instansi tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

2.4.3 Biro Hukum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bermitra kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seKalimantan Timur. selain itu melalui SKPD teknis terkait, termasuk instansi/lembaga/pihak swasta terkait, antara lain Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi manusia Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama dalam bentuk Koordinasi Legislasi Daerah, penyusunan, pembahasan dan Harmonisasi serta sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah guna meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah yang harmonis, aspiratif dan responsif, bernuansa perlindungan Hak Asasi Manusia.

2.4.4 Biro Perekonomian

Mitra Biro Perekonomian dalam rangka menyusun kebijakan daerah di bidang perekonomian selain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui SKPD teknis terkait, termasuk instansi/lembaga/pihak swasta terkait juga menjadi mitra Biro Perekonomian antara lain :

1. Bank Indonesia, TNI/POLRI, BULOG, PT. Pertamina yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Biro Perekonomian merupakan sekretariat TPID bertugas mengkoordinasikan anggota tim dalam rangka melakukan upaya pengendalian inflasi daerah agar tetap stabil melalui stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga barang strategis/kebutuhan pokok masyarakat;
2. PT. Pertamina merupakan mitra Biro Perekonomian dalam urusan pendistribusian/penyaluran BBM dan LPG. Dalam menjaga pendistribusian BBM subsidi dan LPG Tabung 3 Kg diperlukan

peran SKPD teknis terkait dan POLRI agar pendistribusiannya aman dan tepat sasaran. Biro Perekonomian juga mempunyai fungsi koordinasi dalam penyusunan Harga Eceran Tertinggi Tabung 3 Kg dan Usulan Volume Kuota BBM subsidi (JBT dan JBKP) Kabupaten/Kota se- Kaltim;

3. Biro Perekonomian bermitra dengan BUMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan Penghasilan Asli Daerah sesuai dengan core bisnis masing-masing BUMD; dan
4. Perusahaan di bidang pupuk, di Kaltim PT. PKT merupakan mitra Biro Perekonomian dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut memerlukan pengawasan yang melibatkan POLRI agar penyaluran pupuk 6 T (Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Tempat).

Hal yang baru pada Renstra Setda Prov Kaltim 2024-2016 adalah kedudukan Biro Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Pengelola Program Penurunan Emisi Gas rumah Kaca dalam Kerangka Forest Carbon Partnership Facility Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas untuk membantu Unit Manajemen Proyek yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian manfaat Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/K.28/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Penurunan Emisi Gas rumah Kaca dalam Kerangka Forest Carbon Partnership Facility Provinsi Kalimantan Timur.

Tim ini dibentuk guna menjamin kelancaran pelaksanaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yaitu Langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Tugas Sekretariat Unit Manajemen Proyek adalah : Membantu operasional dan administrasi unit manajemen proyek.

Fungsi Sekretariat Unit Manajemen Proyek untuk :

1. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan efektif dan efisien;
2. Mendukung dan memastikan pengadministrasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Kalimantan Timur, termasuk pengukuran pemantauan dan pelaporan, kerangka pengamanan sosial dan lingkungan hidup, serta pembagian manfaat; dan
3. Memanfaatkan anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan.

2.4.5 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa bermitra dengan :

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
- b. Biro Hukum Setda Prov. Kaltim
- c. Dan APH (Aparat Penegak Hukum)

Biro Pengadaan Barang dan Jasa bermitra dengan beberapa instansi tersebut untuk membentuk *Clearing House* agar Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Kalimantan Timur lebih transparan dan akuntabel, secara garis besar fungsi dari *clearing house* antara lain untuk membahas masalah atau potensi masalah yang mungkin timbul terkait pengadaan barang dan jasa, memberikan solusi penyelesaian suatu masalah dan melaksanakan pendampingan advokasi terkait permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa. Secara garis besar mitra Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelayanan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah dan para penyedia/para pihak yang berperan dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah.

2.4.6 Biro Administrasi Pembangunan

Dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan bermitra dengan :

- d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Inspektorat;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim;
- i. BPJN XII Balikpapan;
- j. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III; dan
- k. Badan Pengatur Jalan Tol.

Biro Administrasi Pembangunan juga bermitra dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memfasilitasi :

- 1) Rapat Pimpinan Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Rapat Pengendalian Oprasional Kegiatan (Radalok);
- 3) Evaluasi Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 4) Fasilitasi Penyelesaian Pekerjaan;
- 5) Evaluasi Pekerjaan Prioritas Gubernur;
- 6) Kegiatan Coaching Clinic Kegiatan Pengendalian Sektoral;
- 7) Kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan (pokja ampl);
- 8) Kegiatan *Kick Off Meeting* kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- 9) Rapat Bankeu Kab/Kota;
- 10) Sistem Aplikasi Realisasi Fisik dan Keuangan (Teptra); dan
- 11) Analis Capaian Kinerja Perangkat Daerah (ACKPD).

2.4.7 Biro Organisasi

Dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan pelayanan Biro Organisasi bermitra dengan :

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Biro Organisasi juga bermitra dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memfasilitasi :

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- 3) Tata Naskah Dinas;
- 4) Pakaian Dinas;

- 5) Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi;
 - 6) Penyusunan Standar Pelayanan (SP);
 - 7) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - 8) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK);
 - 9) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
 - 10) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
 - 11) Penyusunan e-formasi;
 - 12) Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK); sesuai dengan Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK);
 - 13) Evaluasi Kelembagaan;
 - 14) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Monitoring dan Evaluasinya; dan
 - 15) Penyusunan atau Penerapan Reformasi Birokrasi
- Dan juga bermitra dengan OMBUSMAN, Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri.

2.4.8 Biro Umum

Dalam memberikan pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim Bermitra kepada PT. Angkasa Pura I Bandara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan terkait objek kesepakatan bersama yaitu Gedung VVIP/VIP Room Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan penerbangan melalui Gedung VVIP/VIP Room.

2.4.9 Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) berada di bawah Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol, dan dalam Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Biro Adpim dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dengan bermitra dengan :

- (a) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- (b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- (c) Badan Pendapatan Daerah;
- (d) Badan Kepegawaian Daerah;
- (e) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (f) Badan Penghubung;
- (g) Organisasi Masyarakat; dan
- (h) Perbankan.

Biro Administrasi Pimpinan, apabila diperlukan juga bermitra dengan instansi vertikal meliputi :

- (a) Badan Pemeriksa Keuangan;
- (b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- (c) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- (d) Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara;
- (e) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

- (f) kementerian Dalam Negeri;
- (e) Dewan Pers Nasional;
- (f) PWI;
- (g) Badan Usaha Milik Daerah;
- (h) Badan Usaha Milik Negara; dan
- (i) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Selain hal tersebut juga bermitra dengan instansi lainnya diluar instansi yang telah disebutkan di atas. Terutama terhadap pelayanan audiensi dengan pimpinan, pelayanan tamu dan lain sebagainya, sebagai fasilitasi keprotokolan maupun fasilitasi Materi Komunikasi Pimpinan.

Hal ini kian meningkat dikarenakan pelayanan Adpim dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan Ibukota Negara baru. Adpim juga bermitra dengan media massa baik lokal maupun nasional dalam diseminasi informasi pembangunan dan kegiatan pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol dan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Setda, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol mempunyai Standar Pelayanan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelayanan Administrasi pimpinan, dengan bermitra pada seluruh Biro di

lingkup Setda dan seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur, dalam menyelenggarakan pelayanan :

- Fasilitasi Tamu Audiensi Pimpinan;
- Fasilitasi pelaksanaan upacara/acara;
- Fasilitasi pembuatan materi pimpinan (sambutan);
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
- Fasilitasi hubungan kelembagaan;
- Fasilitasi dokumentasi pimpinan; dan
- Fasilitasi Kepegawaian lingkup Setda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur dengan berbagai indikator yang menggambarkan kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja dari berbagai indikator tersebut maka diketahui indikator apa saja dari masing-masing urusan yang sudah tercapai atau belum tercapai. Kinerja yang belum tercapai atau masih membutuhkan upaya untuk mencapai dan/atau mempertahankan kinerja menjadi masukan untuk merumuskan permasalahan pembangunan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang dipilah berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah	Belum optimalnya kinerja aparaturnya dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
		Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat
		Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid
		Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan
		Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah
	Belum optimalnya target penawaran kerjasama	Kurangnya pemahaman penawaran kerjasama secara mendalam

	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kurangnya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang-undangan dan produk-produk Hukum
	Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa	Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
	Belum optimalnya Penerapan SAKIP	Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja
	Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan sebagai berikut :

1. Isu strategis terhadap penyelenggaraan pemerintahan

- Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Isu strategis terhadap perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
 - Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas
3. Isu strategis pelayanan publik yang prima
 - Belum optimalnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 3(tiga) tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond*, dan *continously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-			UNIT KERJA
		2024	2025	2026					2024	2025	2026	
Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK <i>(Yang dimaksud adalah menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas (koheren, rasional, konsisten) di bidang pembangunan sosial meliputi seluruh aspek kesra, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup melalui birokrasi yang berAKHLAK)</i>	Indeks Kualitas Kebijakan	50	55	60	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro Kesra
									100%	100%	100%	
						2	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro POD
						3	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100%	100%	100%	
						4	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi		100%	100%	100%	
						5	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	Persen	100%	100%	100%	Biro Hukum

					Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	1	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang fasilitasi	Persen	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
						2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian		90%	95%	100%	
						3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	71	73	76	Biro PBJ
						4	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	Persen	90%	91%	92%	Biro Adbang
					Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	1	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	Persen	70%	80%	100%	Biro Organisasi
						2	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	85	85,5	86	Biro Umum
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai/Predikat)	BB	BB	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat	70	71	72	Biro Adpim
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	85	85,5	86		2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	85,5	86	

Tabel 4.2

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2024	2025	2026
(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(11)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85	85	87	90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pereangkat Daerah	Tersusun nya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Realisasi Keuangan yang tinggi	Persentase Realisasi Keuangan	100%	95%	95%	95%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro POD	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	7 orang	7 orang	7 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT	100 laporan	100 laporan	100 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kegiatan Pelayanan	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350 Lembar	29 Unit	29 Unit	29 Unit

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	442 Lembar	442 Lembar	442 Lembar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	9 Unit	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	9 Unit	9 Unit	9 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Tercapainya kerja sama daerah yang difasilitasi	1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100	100	100
	Terwujudnya LPPD yang dilaporkan	2. Persentase LPPD yang di laporkan	100%	100	100	100
	Terlaksananya kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	3. Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	95%	100	100	100
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	90%	100%	100%	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Fasilitasi Penataan Wilayah	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	85 Kegiatan	95%	95%	95%
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Tersedianya Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Tersedianya Dokumen Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Laporan	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Tersedianya Dokumen Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Laporan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tersedianya Laporan Evaluasi Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Ksekretariat Biro Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Layanan Ksekretariat Biro Kesejahteraan Rakyat	100,00	100	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		93	94	95

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi BMD yang berfungsi dengan baik	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	-	90%	90%	90%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu		100	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	4 orang	4 orang	4 orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Koordinasi & Monev bidang kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyiapan bahan bidang bina mental spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 unit	200 unit	250 unit	300 unit
Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja dalam penyiapan bahan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyiapan bahan bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						
BIRO HUKUM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	87	87	89	90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	12	12	12
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	12	12	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaser Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	3	12	12	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12	12	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12	12	12	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40	45	50	55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500	500	700	700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	30	30	30
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100	100	100	100
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pendokumentasian Produk Hukum	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100	100	100	100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80	0	0	0

		Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang di harmonisasi	0	100	100	100
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600	0	0	0
		Persentase Keputusan Gubernur yang ditetapkan	0	100	100	100
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680	0	0	0
		Persentase produk hukum Provinsi yang dipublikasikan	0	100	100	100
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	250	0	0	0
		Persentase Produk Hukum pengaturan Kab/kota yang difasilitasi/ evaluasi	0	100	100	100
Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100	100	100	100
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya penanganan masalah Hukum Litigasi serta Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10	0	0	0
		Persentase penanganan Perkara Litigasi	0	100	100	100
		Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	0	100	100	100
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan masalah hukum non litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2	0	0	0
		Persentase masalah Non Litigasi	0	100	100	100
		Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM dan Kabupate/Kota Peduli HAM	0	4	4	4
BIRO PEREKONOMIAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	81	82	83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92%	95%	95%	95%
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	90%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	41 paket	41 paket	41 paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50 paket	50 paket	50 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	120 Laporan	130 Laporan	130 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	Tersediannya jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	5 paket	5 paket	5 paket
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 unit	25 unit	25 unit	25 unit
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	1 unit	1 unit
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	90%	95%	100%
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	71	78	80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Realisasi Anggaran	tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90%	-	-	-
		Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	n/a	85	88	90
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	1		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan	12			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	12	12	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80%	-	60	70
		Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	n/a	50	60	70
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas untuk ASN	70	-	-	-
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1	1	1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	3	-	-	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10	10	10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	2	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	20	20	20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum	90%	-	-	-
		Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	n/a	80	83	86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	36	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	3	3	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	30	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12	12	12

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	72	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	40	40	40
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85%	-	-	-
		Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	n/a	85	88	90
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	96	-	-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	40	40	40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	85	-	-	-
		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80	83	86
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	-	-	-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	n/a	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		-	-	-
		Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	n/a	80	83	86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakny	n/a	2	2	2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaannya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	17	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	40	40	40
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terwujudnya UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	88,89	3	3	3
	Meningkatnya transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia		30	35	40

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-
		Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	n/a	4	4	4
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya strategi Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapinya pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	tercapinya pengendalian pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya layanan Pengadaan secara elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	95%	-	-	-
		Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	n/a	1	1	1
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Tercapinya penggunaan layanan spse	Jumlah Layanan LPSE	667	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	n/a	1	1	1
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya pengembangan sistem informasi pengadaan	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	tercapainya pendokumentasian hasil pengadaan barang dan jasa	jumlah informasi yang dilayani	2	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kapasitas SDM PBJ	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-
		Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	n/a	4	4	4
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas sdm pbj	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	292	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	250	250	250
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	terpenuhinya dokumen kelengkapan variabel kematangan UKPBJ	Laporan pelaksanan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1

Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pendampingan dan konsultasi untuk pelaku PBJ	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	6	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	1	1
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	79	80	83	85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	100%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33stel	50 Stel	50 Stel	50 Stel
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10 Orang	15 Orang	20 Orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	10 Orang	15 Orang	20 Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	80%	82%	85%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	15Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Tingkat Pelayanan Kantor	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80%	82%	85%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi/ Internet yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Persentasi BMD dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	n/a	85%	85%	85%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	n/a	90%	92%	95%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	10 Unit	10 Unit	10 Unit
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85,37%	80%	85%	90%
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	85%	90%
	Meningkatnya persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	n/a	80%	85%	90%
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terpenuhinya Dokumen evaluasi dan pelaporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Terpenuhinya Laporan pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	85%	90%
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Dokumen Analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	TerpenuhinyaDokumen Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembanguan yang telah dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
BIRO ORGANISASI						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan pada Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	81	82	83	84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90,03	100	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	12	12	12

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	12	12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	2	2	2
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	3	3	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	90	92	95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	2	2
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2	2	2
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		15	15	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	4	18	18	18

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	21	21
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Organisasi yang dibentuk	Indeks Kelembagaan	71,53	72	73	74
		Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	45	47
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	1	3
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	0	40%	60%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0	86%	87%	89%
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	100	100	100
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1	2	2	2
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	1	1	1
Penataan Analisis Jabatan	Terwujudnya Penyusunan Analisis Jabatan dan ABK yang sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1	2	2	2
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Ketatalaksanaan Pemerintah menuju optimalisasi pelayanan publik Meningkatkan Penguatan SAKIP pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	90	90	90
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	100	100	100
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi pada Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	1	1	1
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan Penguatan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	3	3	3
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksannya Penerapan Budaya Kerja dilingkungan PD Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	1	1	1
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Tatalaksana Pemerintah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	1	3	3	3
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	3	3	3
BIRO UMUM						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84	84	84,5	85
	Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Pimpinan	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	100%	100%	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	373 Orang/Bulan	380 Orang/Bulan	390 Orang/Bulan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan Setda yang akuntabel	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaan barang milik daerah pada SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada Biro Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	358 Stel	9 Paket	9 Paket	9 Paket
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Laporan	125 Orang	135 Orang	145 Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	6 Paket	6 Paket	6 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Paket	6 Paket	6 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	415 Paket	225 Paket	225 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	14 Paket	14 Paket	14 Paket
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	1920 Laporan	1800 Laporan	1850 Laporan
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip Dinamis di lingkungan Setda Prov.Kaltim	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen pelaksanaan sistem informasi berbasis elektronik penunjang kegiatan pelayan	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	3 Aplikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Penunjang Kegiatan Pelayanan	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	25 Unit	20 Unit	15 Unit	15 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	20 Unit	15 Unit	15 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Jenis	150 Unit	150 Unit	150 Unit

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	2100 Lembar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	150 Unit	200 Unit	211 Unit	222 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	447 Unit	500 Unit	550 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	325 Unit	325 Unit	325 Unit
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH yang Akuntabel	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepada daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Laporan	1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	4 Paket	8 Paket	8 Paket
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4 Orang	8 Orang	8 Orang
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	17 Paket	17 Paket	17 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	8 Paket	17 Paket	17 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Laporan	28 Paket	28 Paket	28 Paket
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Pengguna Layanan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 porsi	1000 porsi	1000 porsi	1000 porsi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 O/T	160 O/T	160 O/T	160 O/T
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	90%	90%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%
Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Keprotokolan	Terselenggaranya Kualitas Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang,
2. Didasarkan pada capaian kinerja pembangunan,
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan
4. Terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang

telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat	Optimalisasi penerapan SPM
			Optimalisasi pelaporan IKK
			Optimalisasi tata kelola dan kapasitas manajemen kebijakan
			Optimalisasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
			Fasilitasi lembaga bina spiritual dan sarana prasarana keagamaan
			Fasilitasi Rancangan Produk Hukum dan bantuan hukum
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	Menciptakan kebijakan bidang perekonomian yang koheren, adaptif, rasional dan konsisten	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam penyiapan Kebijakan Daerah di bidang perekonomian
			Meningkatkan Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan bidang perekonomian (BUMD)
		Menciptakan pengadaan yang melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek KKN	Optimalisasi tingkat kematangan UKPBJ
		Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi terkait Kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan Daerah	Menindaklanjuti rekomendasi Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK	Peningkatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya > 80 (B)

			Peningkatan Fasilitas /Asistensi SAKIP terhadap Perangkat Daerah Utama sebagai Piloting
			Peningkatan Indeks Kelembagaan/Kematangan Organisasi
		Peningkatan Kualitas Penyusunan Standar Pelayanan dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti serta evaluasinya	Optimalisasi terhadap pelayanan Pimpinan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
			Optimalisasi tindak lanjut atas keluhan pengguna layanan
			Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Setda Prov. Kaltim	Meningkatkan nilai AKIP Setda Prov. Kaltim
			Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penataan Organisasi, serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Administrasi Umum.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun keempat RENSTRA Sekretariat Daerah dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun kelima diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
SEKRETARIAT DAERAH							322.500.992.000,00		311.242.177.000,00		331.862.709.000,00			
Terwujudnya kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditopang oleh birokrasi yang BerAKHLAK	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					13.008.264.000,00		7.148.430.000,00		7.291.398.000,00			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85	85	4.179.414.720,00	87	2.434.420.345,00	90	2.577.388.345,00	90	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	48.700.000,00	100%	51.135.000,00	100%	53.691.750,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000,00	1 Dokumen	25.567.500,00	1 Dokumen	26.845.875,00	1 Dokumen		
		4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000,00	1 Dokumen	25.567.500,00	1 Dokumen	26.845.875,00	1 Dokumen		
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	100%	95%	151.800.000,00	95%	151.800.000,00	95%	151.800.000,00	95%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	2 laporan	151.800.000,00	2 laporan	151.800.000,00	2 laporan	151.800.000,00	2 laporan		
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	100%	79.891.500,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	7 orang	79.891.500,00	7 orang	40.000.000,00	7 orang	40.000.000,00	7 orang	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	100%	2.530.000.000,00	100%	1.216.000.000,00	100%	1.360.968.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	80.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	70.000.000,00	12 laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 laporan	50.000.000,00	12 laporan	46.000.000,00	12 laporan	46.000.000,00	12 laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT	100 laporan	2.400.000.000,00	100 laporan	1.100.000.000,00	100 laporan	1.244.968.000,00	100 laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100%	100%	499.690.500,00	100%	129.061.000,00	100%	124.504.250,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	350 Lembar	29 Unit	499.690.500,00	29 Unit	129.061.000,00	29 Unit	124.504.250,00	29 Unit	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	100%	799.832.720,00	100%	796.924.345,00	100%	796.924.345,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	442 Lembar	8.000.000,00	442 Lembar	5.091.625,00	442 Lembar	5.091.625,00	442 Lembar	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	791.832.720,00	12 Laporan	791.823.720,00	12 Laporan	791.832.720,00	12 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	9 Unit	100%	69.500.000,00	100%	49.500.000,00	100%	49.500.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	9 Unit	9.500.000,00	9 Unit	9.500.000,00	9 Unit	9.500.000,00	9 Unit	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	100%	5.963.504.480,00	100%	2.555.007.780,00	100%	2.555.007.780,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
				Persentase LPPD yang di laporkan	100%	100%	765.344.800,00	100%	600.000.000,00	100%	600.000.000,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
				Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	95%	100%	2.100.000.000,00	100%	1.559.001.875,00	100%	1.559.001.875,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	90%	100%	2.863.504.480,00	100%	1.305.007.780,00	100%	1.305.007.780,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Laporan	3 Dokumen	2.277.983.960,00	3 Dokumen	805.007.780,00	3 Dokumen	805.007.780,00	3 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Laporan	3 Dokumen	585.520.520,00	3 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	85 Kegiatan	95%	3.865.344.800,00	95%	1.850.000.000,00	95%	1.850.000.000,00	95%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Laporan	3 Dokumen	800.000.000,00	3 Dokumen	450.000.000,00	3 Dokumen	450.000.000,00	3 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Dokumen	2.300.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	4 Dokumen	800.000.000,00	4 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	765.344.800,00	3 Laporan	600.000.000,00	3 Laporan	600.000.000,00	3 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.100.000.000,00	100%	1.559.001.875,00	100%	1.559.001.875,00	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Laporan	30 Dokumen	800.000.000,00	30 Dokumen	609.001.875,00	30 Dokumen	609.001.875,00	30 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Laporan	20 Dokumen	650.000.000,00	20 Dokumen	450.000.000,00	20 Dokumen	450.000.000,00	20 Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama	1 Laporan	3 Laporan	650.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	500.000.000,00	3 Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.355.746.000,00		8.340.861.000,00		8.503.319.000,00			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100,00	100	2.505.746.000,00	100	2.340.861.000,00	100	2.378.319.000,00	100	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan		93	283.266.000,00	94	15.000.000,00	95	20.000.000,00	95	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	263.266.000,00	12 dokumen	263.266.000,00	12 dokumen	263.266.000,00	12 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	1,00	100%	37.000.000,00	100%	37.000.000,00	100%	37.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	

		4.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	4 orang	37.000.000,00	4 orang	37.000.000,00	4 orang	37.000.000,00	4 orang	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	1.105.266.000,00	12 Bulan	919.381.000,00	12 Bulan	951.839.000,00	12 Bulan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 paket	6 Paket	150.266.000,00	6 Paket	125.381.000,00	6 Paket	125.000.000,00	6 Paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	57.000.000,00	12 paket	58.000.000,00	12 paket	59.000.000,00	12 paket	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	898.000.000,00	12 Laporan	736.000.000,00	12 Laporan	767.839.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	1,00	1	922.480.000,00	1	930.480.000,00	1	930.480.000,00	1	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.480.000,00	12 Laporan	12.480.000,00	12 Laporan	12.480.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	890.000.000,00	12 Laporan	898.000.000,00	12 Laporan	898.000.000,00	12 Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	132.000.000,00	1	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	85.000.000,00	8 Unit	90.000.000,00	8 Unit	92.000.000,00	8 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	35.000.000,00	18 Unit	40.000.000,00	18 Unit	40.000.000,00	18 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100%	100%	4.100.000.000,00	100%	4.200.000.000,00	100%	4.325.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	1.750.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	1.750.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 unit	200 unit	950.000.000,00	250 unit	1.000.000.000,00	300 unit	1.000.000.000,00	300 unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	

		4.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 lembaga	10 lembaga	800.000.000,00	10 lembaga	800.000.000,00	10 lembaga	800.000.000,00	10 lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.100.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	100%	2.175.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02.03	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	2.100.000.000,00	100%	2.150.000.000,00	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 dokumen	4 dokumen	650.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 dokumen	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	725.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 dokumen	4 dokumen	650.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	700.000.000,00	4 dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	

		BIRO HUKUM					6.252.178.000,00		6.122.222.000,00		6.244.666.000,00		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum	87	87	1.800.000.000,00	89	1.800.000.000,00	90	1.800.000.000,00	90	Biro Hukum
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100	100	103.920.000,00	100	103.920.000,00	100	103.920.000,00	100	Biro Hukum
		4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi keuangan	12	12	103.920.000,00	12	103.920.000,00	12	103.920.000,00	12	Biro Hukum
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	7.680.000,00	100	7.680.000,00	100	7.680.000,00	100	Biro Hukum
		4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	12	12	7.680.000,00	12	7.680.000,00	12	7.680.000,00	12	Biro Hukum
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	72.000.000,00	100	72.000.000,00	100	72.000.000,00	100	Biro Hukum
		4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat	3	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	72.000.000,00	12	Biro Hukum
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	100	990.995.672,00	100	990.995.672,00	100	990.995.672,00	100	Biro Hukum
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan ATK	12	12	142.043.110,00	12	142.043.110,00	12	142.043.110,00	12	Biro Hukum
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	12	12	22.075.020,00	12	22.075.020,00	12	22.075.020,00	12	Biro Hukum
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	40	45	826.877.542,00	50	826.877.542,00	55	826.877.542,00	60	Biro Hukum
		4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	134.693.884,00	100	134.693.884,00	100	134.693.884,00	100	Biro Hukum
		4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan perlengkapan kantor	1	1	134.693.884,00	1	134.693.884,00	1	134.693.884,00	1	Biro Hukum
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	460.762.944,00	1	460.762.944,00	1	460.762.944,00	1	Biro Hukum
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	500	500	7.000.000,00	700	7.000.000,00	700	7.000.000,00	700	Biro Hukum
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan gaji non ASN	12	12	453.762.944,00	12	453.762.944,00	12	453.762.944,00	12	Biro Hukum
		4.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	29.947.500,00	100	29.947.500,00	100	29.947.500,00	100	Biro Hukum
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	30	29.947.500,00	30	29.947.500,00	30	29.947.500,00	30	Biro Hukum

		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100	100	4.452.178.000,00	100	4.322.222.000,00	100	4.444.666.000,00	100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100	100	2.652.178.000,00	100	2.626.222.000,00	100	2.729.666.000,00	100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah dokumen rancangan produk hukum pengaturan yang diharmonisasi	80	0	817.462.280,00	0	828.222.000,00	0	860.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang di harmonisasi	0	100		100		100		100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah dokumen surat keputusan yg ditetapkan	600	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	0	310.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase Keputusan Gubernur yang ditetapkan	0	100		100		100		100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah dokumen produk hukum yang dipublikasikan	680	0	684.715.720,00	0	645.000.000,00	0	690.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase produk hukum Provinsi yang dipublikasikan	0	100		100		100		100	Biro Hukum	
		4.01.05.05.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	250	0	850.000.000,00	0	853.000.000,00	0	869.666.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase Produk Hukum pengaturan Kab/kota yang difasilitasi/ evaluasi	0	100		100		100		100	Biro Hukum	
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100	100	1.800.000.000,00	100	1.696.000.000,00	100	1.715.000.000,00	100	Biro Hukum	
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah dokumen penanganan perkara/sengketa hukum	10	0	1.100.000.000,00	0	1.096.000.000,00	0	1.105.000.000,00	0	Biro Hukum	
				Persentase penanganan Perkara Litigasi	0	100		100		100		100	Biro Hukum	
				Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	0	100		100		100		100	Biro Hukum	
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah laporan Non Litigasi dan HAM	2	0	600.000.000,00	0	600.000.000,00	0	610.000.000,00	0	Biro Hukum	
Persentase masalah Non Litigasi	0			100	100	100		100		Biro Hukum				
Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM dan Kabupate/Kota Peduli HAM	0			4	4	4		4		Biro Hukum				
Meningkatnya kualitas kebijakan	BIRO PEREKONOMIAN						17.441.481.000,00		17.585.423.000,00		30.537.706.000,00			

	bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81	81	2.495.711.527,00	82	2.317.862.000,00	83	3.275.706.000,00	83	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	92%	95%	126.054.000,00	95%	126.054.000,00	95%	117.163.361,00	95%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	126.054.000,00	12 Dokumen	126.054.000,00	12 Dokumen	117.163.361,00	12 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100%	100%	70.667.500,00	100%	71.067.500,00	90%	93.400.000,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Laporan	25 Dokumen	18.000.000,00	25 Dokumen	18.000.000,00	25 Dokumen	18.000.000,00	25 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	3 Orang	32.667.500,00	3 Orang	32.667.500,00	3 Orang	55.000.000,00	3 Orang	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	41 paket	20.000.000,00	41 paket	20.400.000,00	41 paket	20.400.000,00	41 paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	90%	1.123.183.362,00	90%	1.054.054.000,00	90%	1.993.557.288,00	90%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50 paket	50.000.000,00	50 paket	51.000.000,00	50 paket	52.020.000,00	50 paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Porsi	25 Paket	45.300.000,00	25 Paket	30.600.000,00	25 Paket	51.212.000,00	25 Paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	2 Paket	18.016.000,00	2 Paket	18.376.320,00	2 Paket	20.743.846,00	2 Paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Berlangganan Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 Dokumen	96 Dokumen	7.756.800,00	96 Dokumen	7.911.936,00	96 Dokumen	8.070.175,00	96 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	120 Laporan	120 Laporan	1.002.110.562,00	130 Laporan	946.165.744,00	130 Laporan	1.861.511.267,00	130 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	234.275.200,00	100%	98.796.500,00	100%	101.511.337,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	5 paket	36.075.000,00	5 paket	36.796.500,00	5 paket	36.075.000,00	5 paket	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan/Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit	14 Unit	198.200.200,00	14 Unit	62.000.000,00	14 Unit	65.436.337,00	14 Unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	842.112.465,00	100%	866.482.620,00	100%	883.776.273,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	1 Laporan	6.400.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	837.912.465,00	12 Laporan	860.082.620,00	12 Laporan	871.776.273,00	12 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	99.419.000,00	100%	101.407.380,00	100%	86.297.741,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	2 unit	53.709.000,00	2 unit	54.783.180,00	2 unit	39.850.441,00	2 unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Laporan	25 unit	18.250.000,00	25 unit	18.615.000,00	25 unit	18.987.300,00	25 unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	1 unit	27.460.000,00	1 unit	28.009.200,00	1 unit	27.460.000,00	1 unit	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	13.137.769.473,00	100%	13.078.561.000,00	100%	21.722.000.000,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	90%	90%	1.808.000.000,00	95%	2.189.000.000,00	100%	5.540.000.000,00	100%	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1.595.000.000,00	1 Laporan	1.503.969.000,00	1 Laporan	2.700.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Laporan	2 Dokumen	1.200.000.000,00	2 Dokumen	1.011.969.000,00	2 Dokumen	1.900.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Laporan	2 Dokumen	395.000.000,00	2 Dokumen	492.000.000,00	2 Dokumen	800.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	11.542.769.473,00	1 Laporan	11.574.592.000,00	1 Laporan	19.022.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.744.369.473,00	6 Dokumen	10.750.000.000,00	6 Dokumen	17.352.000.000,00	6 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	390.000.000,00	2 Dokumen	810.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	398.400.000,00	2 Dokumen	434.592.000,00	2 Dokumen	860.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	1.808.000.000,00	1 Laporan	2.189.000.000,00	1 Laporan	5.540.000.000,00	1 Laporan	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur

			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000,00	10 Dokumen	1.260.000.000,00	10 Dokumen	3.900.000.000,00	10 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	363.000.000,00	1 Dokumen	408.000.000,00	1 Dokumen	812.000.000,00	1 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	445.000.000,00	1 Dokumen	521.000.000,00	1 Dokumen	828.000.000,00	2 Dokumen	Biro Perekonomian	Kalimantan Timur
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					10.297.871.000,00		10.503.829.000,00		10.713.905.000,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	71	2.833.969.100,00	78	3.039.927.100,00	80	3.250.003.100,00	80		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya laporan keuangan yang akuntabel	90%	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	n/a	85	134.278.000,00	88	134.278.000,00	90	134.278.000,00	90		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	1	133.278.000,00		134.278.000,00		134.278.000,00		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan	12								Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	80%	-	-	60	156.820.000,00	70	156.820.000,00	70	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	n/a	50	222.220.000,00	60	222.220.000,00	70	222.220.000,00	70		
		1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk ASN	70	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1	71.040.000,00	1	71040000	1	71040000	1		
		1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Pendidikan	3	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10	85.780.000,00	10	85780000	10	85780000	10		
		1.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pegawai Yang Telah Mengikuti Sosialisasi	2	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	20	65.400.000,00	20	65400000	20	65400000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	90%	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	n/a	80	785.000.000,00	83	785.000.000,00	86	785.000.000,00		
		1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk meningkatkan kinerja Pegawai	36	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	3	90.000.000,00	3	90000000	3	90000000		
		1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan dan Kebijakan	30	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12	45000000	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
		1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	72	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	40	650.000.000,00	40	650000000	40	650000000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	meningkatnya pelayanan kantor	85%	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	n/a	85	165.345.465,00	88	371.303.465,00	90	581.379.465,00		
		1.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kerja	96	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	40	165.345.465,00	40	371303465	40	581379465		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	85	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80	1.466.427.635,00	83	1.466.427.635,00	86	1.466.427.635,00		
		1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Surat Menyurat		-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12	5.222.400,00	12	5222400	12	5222400		

		1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi/Internet yang tersedia	12	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12	82.470.700,00	12	82470700	12	82470700		
		1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	12	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pelayanan	n/a	12	1.378.734.535,00	12	1378734535	12	1378734535		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	n/a	80	60.698.000,00	83	60.698.000,00	86	60.698.000,00		
		1.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	1	13.499.000,00	1	13499000	1	13499000		
		1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	2	13.499.000,00	2	13499000	2	13499000		
		1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kerja	17	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	40	33.700.000,00	40	33700000	40	33700000		
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	3	3	6.166.479.900,00	3	6.166.479.900,00	3	6.166.479.900,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	10%	30%	1.297.422.000,00	35%	1.297.422.000,00	40%	1.297.422.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	n/a	4	2.275.962.000,00	4	2.275.962.000,00	4	2.275.962.000,00		

		7.1.01.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan strategi pengadaan yang barang dan jasa yang dilaksanakan	1	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	417.852.000,00	1	417.852.000,00	1	417852000	1	
		7.1.01.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa tender dan non tender	2	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	879.570.000,00	1	879.570.000,00	1	879570000	1	
		7.1.01.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan monitoring pengadaan barang dan jasa	2	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	978.540.000,00	1	978.540.000,00	1	978540000	1	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	95%	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	n/a	1	2.633.982.900,00	1	2.633.982.900,00	1	2.633.982.900,00	1	
		7.1.02.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE	667	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	n/a	1	1.184.267.900,00	1	1.184.267.900,00	1	1184267900	1	
		7.1.02.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa (3 Sistem)	2	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	755.300.000,00	1	755.300.000,00	1	755300000	1	
		7.1.02.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah informasi yang dilayani	2	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	694.415.000,00	1	694.415.000,00	1	694415000	1	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	n/a	4	2.553.957.000,00	4	2.553.957.000,00	4	2.553.957.000,00	4	
		7.1.03.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang diberi Pembinaan	292	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	250	894.522.000,00	250	894.522.000,00	250	894522000	250		
		7.1.03.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	11	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	971.875.000,00	1	971.875.000,00	1	971.875.000,00	1		
		7.1.03.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan	6	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	1	687.560.000,00	1	687.560.000,00	1	687560000	1		
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					12.500.000.000,00		12.750.000.000,00		13.005.000.000,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	79	80	5.800.000.000,00	83	6.050.000.000,00	85	6.305.000.000,00	85	Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	100%	260.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	100%	145.377.520,00	100%	145.377.520,00	100%	145.377.520,00	100%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33stel	50 Stel	80.000.000,00	50 Stel	80.000.000,00	50 Stel	80.000.000,00	50 Stel	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	10 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	20 Orang	50.000.000,00	20 Orang	Biro Administrasi Pembangunan	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	10 Orang	15.377.520,00	15 Orang	15.377.520,00	20 Orang	15.377.520,00	20 Orang	Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	80%	3.530.000.000,00	82%	3.780.000.000,00	85%	4.035.000.000,00	85%	Biro Administrasi Pembangunan	

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	15Laporan	4 Laporan	3.500.000.000,00	4 Laporan	3.750.000.000,00	4 Laporan	4.005.000.000,00	4 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	80%	1.631.105.480,00	82%	1.631.105.480,00	85%	1.631.105.480,00	85%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	1 Laporan	208.359.800,00	1 Laporan	208.359.800,00	1 Laporan	208.359.800,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	1 Laporan	1.420.745.680,00	1 Laporan	1.420.745.680,00	1 Laporan	1.420.745.680,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	n/a	85%	133.517.000,00	85%	133.517.000,00	85%	133.517.000,00	85%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1Unit	2 Unit	11.499.000,00	2 Unit	11.499.000,00	2 Unit	11.499.000,00	2 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3Unit	3 Unit	102.018.000,00	3 Unit	102.018.000,00	3 Unit	102.018.000,00	3 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30Unit	20 Unit	20.000.000,00	20 Unit	20.000.000,00	20 Unit	20.000.000,00	20 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	n/a	90%	100.000.000,00	92%	100.000.000,00	95%	100.000.000,00	95%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10 Unit	Biro Administrasi Pembangunan	

			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	85,37%	80%	6.700.000.000,00	85%	6.700.000.000,00	90%	6.700.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	1.200.000.000,00	85%	1.200.000.000,00	90%	1.200.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	
				Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	n/a	80%	3.300.000.000,00	85%	3.300.000.000,00	90%	3.300.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	4 Laporan	2 Laporan	3.300.000.000,00	2 Laporan	3.300.000.000,00	2 Laporan	3.300.000.000,00	2 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	4 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	4 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	n/a	80%	2.200.000.000,00	85%	2.200.000.000,00	90%	2.200.000.000,00	90%	Biro Administrasi Pembangunan	
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	Biro Administrasi Pembangunan	
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00	1 Dokumen	Biro Administrasi Pembangunan	
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAKHLAK	BIRO ORGANISASI					7.488.046.000,00		7.637.807.000,00		7.790.563.000,00			
		X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	81	82	2.088.046.000,00	83	2.088.046.000,00	84	2.090.563.000,00	85	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90,03	100	115.440.200,00	100	115.440.200,00	100	115.440.200,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	12	115.440.200,00	12	115.440.200,00	12	115.440.200,00	12	Biro Organisasi	Samarinda

		X.XX.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90	100	10.230.000,00	100	10.230.000,00	100	10.230.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	10.230.000,00	12	10.230.000,00	12	10.230.000,00	12	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	100	85.217.500,00	100	85.217.500,00	100	85.217.500,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	2	60.217.500,00	2	60.217.500,00	2	60.217.500,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80	90	1.185.674.800,00	92	1.185.674.800,00	95	1.185.674.800,00	95	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	37.473.800,00	3	37.473.800,00	3	37.473.800,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	278.350.000,00	2	278.350.000,00	2	278.350.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	16.500.000,00	2	16.500.000,00	2	16.500.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	47.700.000,00	1	47.700.000,00	1	47.700.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	707.250.000,00	1	707.250.000,00	1	707.250.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2	98.401.000,00	2	98.401.000,00	2	98.401.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	191.559.000,00	100	191.559.000,00	100	194.076.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		15	191.559.000,00	15	191.559.000,00	15	194.076.000,00	15	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	419.330.500,00	100	419.330.500,00	100	419.330.500,00	100	Biro Organisasi	Samarinda

		X.XX.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	12	418.330.500,00	12	418.330.500,00	12	418.330.500,00	12	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90	100	80.594.000,00	100	80.594.000,00	100	80.594.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	4	18	61.812.000,00	18	61.812.000,00	18	61.812.000,00	18	Biro Organisasi	Samarinda
		X.XX.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	18.782.000,00	21	18.782.000,00	21	18.782.000,00	21	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	71,53	72	1.450.000.000,00	73	1.510.000.000,00	74	1.550.000.000,00	74	Biro Organisasi	Samarinda
				Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	750.000.000,00	45	780.000.000,00	47	800.000.000,00	47	Biro Organisasi	Samarinda
				Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	900.000.000,00	1	920.000.000,00	3	950.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40%	40%	1.200.000.000,00	60%	1.220.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	85,11%	86%	1.100.000.000,00	87%	1.119.761.000,00	89%	1.150.000.000,00	89%	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100	100	2.200.000.000,00	100	2.290.000.000,00	100	2.350.000.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	100	100		100		100		100	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1	2	750.000.000,00	2	780.000.000,00	2	800.000.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab Kota	1	1	700.000.000,00	1	730.000.000,00	1	750.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda

		4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1	2	750.000.000,00	2	780.000.000,00	2	800.000.000,00	2	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	90	1.100.000.000,00	90	1.119.761.000,00	90	1.150.000.000,00	90	Biro Organisasi	Samarinda
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	100	100	2.100.000.000,00	100	2.140.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	1	900.000.000,00	1	920.000.000,00	1	950.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	3	900.000.000,00	3	920.000.000,00	3	950.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah	1	3	500.000.000,00	3	510.000.000,00	3	530.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	3	600.000.000,00	3	609.761.000,00	3	620.000.000,00	3	Biro Organisasi	Samarinda
		BIRO UMUM					228.986.724.000,00		226.136.525.000,00		231.399.255.000,00			
		04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84	84	211.686.351.300,00	84,5	204.195.480.980,00	85	208.361.158.779,00	85	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
				Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	17.300.372.700,00	100%	21.941.044.020,00	100%	23.038.096.221,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100%	100%	82.450.665.774,00	100%	82.536.587.149,00	100%	82.716.304.592,75	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	373 Orang/Bulan	80.932.238.274,00	380 Orang/Bulan	80.942.238.274,00	390 Orang/Bulan	81.042.238.274,00	390 Orang/Bulan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.518.427.500,00	12 Dokumen	1.594.348.875,00	12 Dokumen	1.674.066.318,75	12 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100%	100%	1.165.320.000,00	100%	1.223.586.000,00	100%	1.284.765.300,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	

		4.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	12 Laporan	522.000.000,00	12 Laporan	548.100.000,00	12 Laporan	575.505.000,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	12 Laporan	643.320.000,00	12 Laporan	675.486.000,00	12 Laporan	709.260.300,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100%	100%	3.241.204.800,00	100%	3.403.265.040,00	100%	3.573.428.292,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	358 Stel	9 Paket	1.021.980.000,00	9 Paket	1.073.079.000,00	9 Paket	1.126.732.950,00	9 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	4 Dokumen	1.331.568.000,00	4 Dokumen	1.398.146.400,00	4 Dokumen	1.468.053.720,00	4 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Laporan	125 Orang	887.656.800,00	135 Orang	932.039.640,00	145 Orang	978.641.622,00	145 Orang	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100%	100%	40.261.914.550,00	100%	31.395.584.192,50	100%	32.237.863.402,13	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	6 Paket	270.249.500,00	6 Paket	283.761.975,00	6 Paket	297.950.073,75	6 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	6 Paket	497.466.100,00	6 Paket	522.339.405,00	6 Paket	548.456.375,25	6 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	415 Paket	20.085.758.000,00	225 Paket	9.386.108.697,50	225 Paket	9.855.414.132,38	225 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	14 Paket	733.290.000,00	14 Paket	769.954.500,00	14 Paket	808.452.225,00	14 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	1.265.361.000,00	12 Laporan	1.328.629.050,00	12 Laporan	1.395.060.502,50	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	1920 Laporan	16.937.196.650,00	1800 Laporan	18.608.567.600,00	1850 Laporan	18.811.495.980,00	1850 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	210.828.800,00	4 Dokumen	221.370.240,00	4 Dokumen	232.438.752,00	4 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda

		4.01.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	3 Aplikasi	4 Dokumen	261.764.500,00	4 Dokumen	274.852.725,00	4 Dokumen	288.595.361,25	4 Dokumen	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	23.080.078.849,00	100%	20.884.082.791,45	100%	22.478.286.931,02	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	25 Unit	20 Unit	8.440.470.000,00	15 Unit	6.187.493.500,00	15 Unit	6.496.868.175,00	15 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	20 Unit	7.630.000.000,00	15 Unit	7.336.500.000,00	15 Unit	8.253.325.000,00	15 Unit		
		4.01.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Jenis	150 Unit	7.009.608.849,00	150 Unit	7.360.089.291,45	150 Unit	7.728.093.756,02	150 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	26.808.206.440,00	100%	27.159.916.712,00	100%	27.529.212.497,60	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	2100 Lembar	12 Laporan	83.700.000,00	12 Laporan	87.885.000,00	12 Laporan	92.279.250,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.774.001.000,00	12 Laporan	9.774.001.000,00	12 Laporan	9.774.001.000,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	12 Laporan	2.659.168.400,00	12 Laporan	2.792.126.820,00	12 Laporan	2.931.733.161,00	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.291.337.040,00	12 Laporan	14.505.903.892,00	12 Laporan	14.731.199.086,60	12 Laporan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100%	100%	27.989.971.045,00	100%	23.714.469.597,25	100%	24.400.193.077,11	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	150 Unit	200 Unit	7.241.459.200,00	211 Unit	7.603.532.160,00	222 Unit	7.983.708.768,00	222 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	447 Unit	856.184.000,00	500 Unit	898.993.200,00	550 Unit	943.942.860,00	550 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	19.660.077.845,00	13 Unit	14.968.081.737,25	13 Unit	15.216.485.824,11	13 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda

		4.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	325 Unit	232.250.000,00	325 Unit	243.862.500,00	325 Unit	256.055.625,00	325 Unit	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Balikpapan; Kota Samarinda
		4.01.01.1.11	Kegiatan Administrasi Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	6.688.989.842,00	100%	13.877.989.497,80	100%	14.141.104.686,39	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Laporan	1 Orang/Bulan	125.126.116,00	2 Orang/Bulan	275.903.085,78	2 Orang/Bulan	289.698.240,07	2 Orang/Bulan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.11.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	4 Paket	94.738.000,00	8 Paket	208.897.290,00	8 Paket	219.342.154,50	8 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4 Orang	435.000.000,00	8 Orang	959.175.000,00	8 Orang	1.007.133.750,00	8 Orang	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1 Orang/Bulan	6.034.125.726,00	2 Orang/Bulan	12.434.014.122,02	2 Orang/Bulan	12.624.930.541,82	2 Orang/Bulan	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	17.300.372.700,00	100%	21.941.044.020,00	100%	23.038.096.221,00	100%	Biro Umum Setda Prov Kaltim	
		4.01.01.1.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	17 Paket	7.534.010.900,00	17 Paket	7.910.711.445,00	17 Paket	8.306.247.017,25	17 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Laporan	8 Paket	2.640.703.500,00	17 Paket	6.548.391.360,00	17 Paket	6.875.810.928,00	17 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
		4.01.01.1.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Laporan	28 Paket	7.125.658.300,00	28 Paket	7.481.941.215,00	28 Paket	7.856.038.275,75	28 Paket	Biro Umum Setda Prov Kaltim	Kota Samarinda
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						18.170.682.000,00		15.017.080.000,00		16.376.897.000,00			
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	100	6.093.092.387,00	100	6.293.092.387,00	100	6.354.909.387,00	100	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	603.879.481,00	100%	436.199.381,00	100%	501.099.381,00	100	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
				Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	100	11.473.710.132,00	100	8.287.788.232,00	100	9.520.888.232,00	100	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	514.441.000,00	90%	514.441.000,00	90%	514.441.000,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	514.441.000,00	12 Dokumen	514.441.000,00	12 Dokumen	514.441.000,00	12 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	1.702.754.287,00	90%	1.702.754.287,00	90%	1.702.754.287,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	282.099.853,00	150 Paket	282.099.853,00	150 Paket	282.099.853,00	150 Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12.049.491,00	15 Paket	12.049.491,00	15 Paket	12.049.491,00	15 Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	82.882.800,00	50 Paket	82.882.800,00	50 Paket	82.882.800,00	50 Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	1.325.722.143,00	150 Laporan	1.325.722.143,00	150 Laporan	1.325.722.143,00	150 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	621.716.450,00	90%	621.716.450,00	90%	621.716.450,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	621.716.450,00	20 Unit	621.716.450,00	20 Unit	621.716.450,00	20 Unit	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	61.406.550,00	90%	61.406.550,00	90%	61.406.550,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15 unit	51.019.750,00	15 unit	51.019.750,00	15 unit	51.019.750,00	15 unit	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	10.386.800,00	15 Unit	10.386.800,00	15 Unit	10.386.800,00	15 Unit	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	1.909.113.700,00	90%	1.909.113.700,00	90%	1.909.113.700,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.879.624.480,00	12 Laporan	1.879.624.480,00	12 Laporan	1.879.624.480,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.489.220,00	12 Laporan	29.489.220,00	12 Laporan	29.489.220,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	849.152.500,00	90%	1.049.152.500,00	90%	1.049.152.500,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9 Dokumen	563.940.000,00	9 Dokumen	663.940.000,00	9 Dokumen	663.940.000,00	9 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 laporan	285.212.500,00	4 laporan	385.212.500,00	4 laporan	385.212.500,00	4 laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100%	90%	434.507.900,00	90%	434.507.900,00	90%	496.324.900,00	90%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	309.668.000,00	2 Dokumen	309.668.000,00	2 Dokumen	309.668.000,00	2 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	124.839.900,00	20 Orang	124.839.900,00	20 Orang	186.656.900,00	20 Orang	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100%	100%	9.727.598.013,00	100%	6.686.598.013,00	100%	7.684.598.013,00	100%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	558.383.600,00	12 Dokumen	558.383.600,00	12 Dokumen	558.383.600,00	12 Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	12 Laporan	4.648.067.213,00	12 Laporan	3.107.067.213,00	12 Laporan	3.600.067.213,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur

			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	4.521.147.200,00	12 Laporan	3.021.147.200,00	12 Laporan	3.526.147.200,00	12 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100%	100%	2.349.991.600,00	100%	2.037.389.600,00	100%	2.337.389.600,00	100%	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	4 laporan	1.445.160.800,00	4 laporan	1.133.160.800,00	4 laporan	1.333.160.800,00	4 laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Laporan	2 Laporan	600.880.800,00	2 Laporan	600.278.800,00	2 Laporan	650.278.800,00	2 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2 Laporan	303.950.000,00	2 Laporan	303.950.000,00	2 Laporan	353.950.000,00	2 Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Kalimantan Timur

**Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah**

[illegible]

3	Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi dan kabupaten/kota yang difasilitasi/dievaluasi serta penanganan masalah hukum dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
4	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang disiapkan	-	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	-	90%	95%	100%	100%	
5	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	71	73	76	76	Biro PBJ
6	Tingkat Capaian Realisasi Pembangunan	75%	90%	91%	92%	92%	Biro Adbang
7	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	0	40%	60%	100%	100	Biro Organisasi
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kaltim	83	84	84.5	85	85	Biro Umum
9	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Biro Adpim	84	85	85,5	86	86	Biro Adpim
	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	-	70	71	72	72	

Tabel 7.2
Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja
Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kelembagaan	71,53	72,00	73,00	74,00	74
2	Indeks Kematangan Organisasi	43,59	44	45	47	47
3	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	0	1	1	3	3
4	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	0	40	60	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	0	85,00%	87,00%	89,00%	89
6	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4,35	4,25	4,00	4,00	4,00
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	63,00	69,00	75,00	75,00	75,00
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-	2,2	2,5	2,7	2,7

BAB VIII PENUTUP

Poin Penting dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD. RENSTRA Setda Prov Kaltim merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, RENSTRA ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target.

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2022

Provinsi	:	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota	:	-
Bidang	:	Sekretariat Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	2.293.787.590.641,27
01	Tanah	1.786.414.092.617,54
02	Peralatan dan Mesin	213.325.944.892,50
02	Alat-alat Besar	8.460.596.980,00
03	Alat-alat Angkutan	102.518.320.324,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.159.621.851,00
05	Alat Pertanian	111.685.500,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.194.341.876,14
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.653.954.336,36
08	Alat-alat Kedokteran	488.690.825,00
09	Alat Laboratorium	3.709.690.200,00
10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	29.043.000,00
03	Gedung dan Bangunan	288.563.836.291,23
11	Bangunan Gedung	283.487.123.291,23
12	Monumen	5.076.713.000,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.328.843.090,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00

	14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	15	Instalasi	2.131.713.890,00
	16	Jaringan	197.129.200,00
05		Aset Tetap Lainnya	1.385.785.750,00
	17	Buku dan Perpustakaan	264.445.750,00
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	1.121.340.000,00
	19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	20	Aset Renovasi	0,00
06		Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.088.000,00
		ASET LAINNYA	6.400.837.825,00
07		Aset Lainnya	6.400.837.825,00
	21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	2.683.266.000,00
	22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	24	Aset Tidak Berwujud	3.717.571.825,00

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BARANG KE NERACA

TAHUN ANGGARAN 2022

PER DESEMBER 2022

BIDANG PEMERINTAHAN

: 4

Sekretariat Daerah

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	NILAI (Rp)
1	Tanah	1.786.414.092.617,54
01 . 01	Tanah	1.786.414.092.617,54
01 . 01 . 01	Tanah Perkampungan	902.902.000,00
01 . 01 . 01 . 01	Kampung	902.902.000,00
01 . 01 . 01 . 01 . 02	Tanah Kampung Lain-lain	902.902.000,00
01 . 01 . 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.537.090.210.027,54
01 . 01 . 11 . 01	Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	432.203.058.075,85
01 . 01 . 11 . 01 . 01	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	63.053.315.000,00
01 . 01 . 11 . 01 . 02	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1.322.894.000,00
01 . 01 . 11 . 01 . 03	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	43.243.825.075,85
01 . 01 . 11 . 01 . 04	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	368.816.000,00
01 . 01 . 11 . 01 . 05	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	10.055.937.000,00
01 . 01 . 11 . 01 . 11	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	314.158.271.000,00
01 . 01 . 11 . 02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	252.743.158.866,67
01 . 01 . 11 . 02 . 03	Tanah Bangunan Gedung	66.211.612.200,00
01 . 01 . 11 . 02 . 15	Tanah Utk Bangunan Gd. Perdagangan Lain-lain	186.531.546.666,67
01 . 01 . 11 . 03	Tanah Untuk Bangunan Industri	17.755.920.000,00
01 . 01 . 11 . 03 . 23	Tanah Bangunan Industri Lainnya	17.755.920.000,00
01 . 01 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	601.600.766.412,00

01 . 01 . 11 . 04 . 01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	74.701.193.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 02	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	31.941.677.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 03	Tanah Bangunan Rumah Sakit	12.189.355.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 05	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	6.860.842.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 08	Tanah Bangunan Olah Raga	357.146.757.650,00
01 . 01 . 11 . 04 . 09	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	11.039.397.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 10	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	42.483.653.162,00
01 . 01 . 11 . 04 . 16	Tanah Bangunan Karantina	4.818.930.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 18	Tanah Bangunan Kandang Hewan	9.460.750.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 20	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	50.000.000.000,00
01 . 01 . 11 . 04 . 25	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	958.211.600,00
01 . 01 . 11 . 05	Tanah Kosong	232.462.268.673,02
01 . 01 . 11 . 05 . 01	Tanah kosong yang tidak diusahakan	21.992.343.214,00
01 . 01 . 11 . 05 . 05	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	183.263.949.000,00
01 . 01 . 11 . 05 . 07	Tanah Kosong Lainnya	27.205.976.459,02
01 . 01 . 11 . 08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	325.038.000,00
01 . 01 . 11 . 08 . 01	Tanah Jalan	325.038.000,00
01 . 01 . 13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	248.420.980.590,00
01 . 01 . 13 . 01	Tanah Lapangan Olah Raga	83.979.872.070,00
01 . 01 . 13 . 01 . 01	Tanah Lapangan Tennis	2.500.274.500,00
01 . 01 . 13 . 01 . 05	Tanah Lapangan Sepak Bola	32.981.623.500,00
01 . 01 . 13 . 01 . 06	Tanah Lapangan Bola Volly	135.377.000,00
01 . 01 . 13 . 01 . 12	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	48.362.597.070,00
01 . 01 . 13 . 06	Tanah Lapangan Terbang	122.115.636.000,00
01 . 01 . 13 . 06 . 02	Tanah Lapangan Komersial	122.115.636.000,00
01 . 01 . 13 . 11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	14.430.407.000,00
01 . 01 . 13 . 11 . 07	Tanah Utk Bangunan Bersejarah Lain-lain	14.430.407.000,00
01 . 01 . 13 . 12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	9.956.385.000,00
01 . 01 . 13 . 12 . 02	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	9.956.385.000,00

01 . 01 . 13 . 13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	17.938.680.520,00
01 . 01 . 13 . 13 . 01	Tanah Untuk Bangunan Mesjid	17.938.680.520,00
2	Peralatan dan Mesin	213.325.944.892,50
02 . 02	Alat-alat Besar	8.460.596.980,00
02 . 02 . 01	Alat-Alat Besar Darat	5.940.000,00
02 . 02 . 01 . 10	Alat Pengangkat	5.940.000,00
02 . 02 . 01 . 10 . 08	Alat Pengangkat Lain-lain	5.940.000,00
02 . 02 . 03	Alat-alat Bantu	8.454.656.980,00
02 . 02 . 03 . 04	Electric Generating Set	8.384.186.980,00
02 . 02 . 03 . 04 . 02	Portable Generating Set	1.608.500.000,00
02 . 02 . 03 . 04 . 03	Stationary Generating Set	6.150.686.980,00
02 . 02 . 03 . 04 . 04	Electric Generating Set Lain-lain	625.000.000,00
02 . 02 . 03 . 05	Pompa	70.470.000,00
02 . 02 . 03 . 05 . 01	Transportable Water Pump	950.000,00
02 . 02 . 03 . 05 . 02	Portable Water Pump	14.300.000,00
02 . 02 . 03 . 05 . 03	Stationary Water Pump	3.750.000,00
02 . 02 . 03 . 05 . 07	Pompa Lain-lain	51.470.000,00
02 . 03	Alat-alat Angkutan	102.518.320.324,00
02 . 03 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	102.492.470.324,00
02 . 03 . 01 . 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	78.516.218.734,00
02 . 03 . 01 . 01 . 01	Sedan	7.966.217.000,00
02 . 03 . 01 . 01 . 02	Jeep	37.270.995.400,00
02 . 03 . 01 . 01 . 03	Station Wagon	32.474.688.724,00
02 . 03 . 01 . 01 . 04	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	384.257.610,00
02 . 03 . 01 . 01 . 05	Double Cabin	420.060.000,00
02 . 03 . 01 . 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	16.100.072.250,00
02 . 03 . 01 . 02 . 01	Bus (Penumpang 30 Orang ke atas)	11.059.308.250,00
02 . 03 . 01 . 02 . 02	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	3.113.024.000,00
02 . 03 . 01 . 02 . 03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.927.740.000,00
02 . 03 . 01 . 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.009.750.000,00

02 . 03 . 01 . 03 . 01	Truck + Attachhment	348.750.000,00
02 . 03 . 01 . 03 . 02	Pick Up	661.000.000,00
02 . 03 . 01 . 04	Kendaraan Bermotor Khusus	2.318.381.600,00
02 . 03 . 01 . 04 . 01	Mobil Ambulance	2.083.491.600,00
02 . 03 . 01 . 04 . 02	Mobil Jenazah	92.000.000,00
02 . 03 . 01 . 04 . 21	Mobil Unit Pengangkut Uang	142.890.000,00
02 . 03 . 01 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.548.047.740,00
02 . 03 . 01 . 05 . 01	Sepeda Motor	3.605.853.250,00
02 . 03 . 01 . 05 . 02	Scooter	548.944.490,00
02 . 03 . 01 . 05 . 03	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	393.250.000,00
02 . 03 . 02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	25.850.000,00
02 . 03 . 02 . 02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	25.850.000,00
02 . 03 . 02 . 02 . 01	Sepeda	25.850.000,00
02 . 04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.159.621.851,00
02 . 04 . 01	Alat Bengkel Bermesin	241.026.590,00
02 . 04 . 01 . 04	Perkakas Bengkel Service	5.550.000,00
02 . 04 . 01 . 04 . 06	Brake Drum Lathe/Mesin Peralatan Tromol	5.550.000,00
02 . 04 . 01 . 05	Perkakas Pengangkat Bermesin	19.800.000,00
02 . 04 . 01 . 05 . 01	Overhead Grane	19.800.000,00
02 . 04 . 01 . 06	Perkakas Bengkel Kayu	1.600.000,00
02 . 04 . 01 . 06 . 18	Mesin Lamelo	1.600.000,00
02 . 04 . 01 . 09	Perkakas Pabrik Es	214.076.590,00
02 . 04 . 01 . 09 . 02	Air Blower	8.950.000,00
02 . 04 . 01 . 09 . 04	Filling Dvice	900.000,00
02 . 04 . 01 . 09 . 10	Receiver	47.676.590,00
02 . 04 . 01 . 09 . 11	Elektrik Panel Cintrol	150.000.000,00
02 . 04 . 01 . 09 . 12	Trafo Stater	150.000,00
02 . 04 . 01 . 09 . 17	Bak Air	6.400.000,00
02 . 04 . 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	38.592.501,00

02 . 04 . 02 . 05	Perkakas Standar (Standart Tool)	34.695.000,00
02 . 04 . 02 . 05 . 02	Tool Kit Boks	2.695.000,00
02 . 04 . 02 . 05 . 10	Perkakas Standar Lain-lain	32.000.000,00
02 . 04 . 02 . 11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	897.501,00
02 . 04 . 02 . 11 . 08	Cermin Besar (200 x 75 cn)	897.501,00
02 . 04 . 02 . 12	Peralatan Bengkel Keramik	3.000.000,00
02 . 04 . 02 . 12 . 02	Bak penampungan	3.000.000,00
02 . 04 . 03	Alat Ukur	880.002.760,00
02 . 04 . 03 . 01	Alat Ukur universal	207.170.000,00
02 . 04 . 03 . 01 . 01	Af Generator Tone Generator	2.500.000,00
02 . 04 . 03 . 01 . 31	Digital Multimeter	28.500.000,00
02 . 04 . 03 . 01 . 71	Global Positioning System	156.870.000,00
02 . 04 . 03 . 01 . 73	DCP (Alat Control) Sensor	19.300.000,00
02 . 04 . 03 . 03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	16.500.000,00
02 . 04 . 03 . 03 . 09	Vidio Measurement	16.500.000,00
02 . 04 . 03 . 07	Universal Tester	95.429.760,00
02 . 04 . 03 . 07 . 10	Scanner	76.429.760,00
02 . 04 . 03 . 07 . 13	Vidio Noise Meter	19.000.000,00
02 . 04 . 03 . 08	Alat Ukur/Pembanding	559.878.000,00
02 . 04 . 03 . 08 . 24	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	473.528.000,00
02 . 04 . 03 . 08 . 29	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	26.500.000,00
02 . 04 . 03 . 08 . 63	Prople Proyektor Toyo Serie	59.850.000,00
02 . 04 . 03 . 10	Alat Timbangan/Blora	1.025.000,00
02 . 04 . 03 . 10 . 02	Timbangan	675.000,00
02 . 04 . 03 . 10 . 03	Timbangan Meja Kapasitas 5 kg	350.000,00
02 . 05	Alat Pertanian	111.685.500,00
02 . 05 . 01	Alat Pengolahan	63.270.700,00
02 . 05 . 01 . 04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	63.270.700,00
02 . 05 . 01 . 04 . 04	Rak-rak penyimpanan	125.000,00
02 . 05 . 01 . 04 . 05	Lemari Penyimpanan	63.145.700,00

02 . 05 . 02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	48.414.800,00
02 . 05 . 02 . 01	Alat Pemeliharaan Tanaman	1.200.000,00
02 . 05 . 02 . 01 . 05	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	1.200.000,00
02 . 05 . 02 . 03	Alat Penyimpanan	47.214.800,00
02 . 05 . 02 . 03 . 01	Oven	7.500.000,00
02 . 05 . 02 . 03 . 04	Rak-rak Penyimpanan	4.757.000,00
02 . 05 . 02 . 03 . 05	Lemari Penyimpanan	34.957.800,00
02 . 06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.194.341.876,14
02 . 06 . 01	Alat Kantor	14.413.627.945,86
02 . 06 . 01 . 01	Mesin Ketik	246.584.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	35.920.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	44.666.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 03	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	20.150.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 04	Mesin Ketik Listrik Portable	2.745.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 05	Mesin Listrik Standar	3.500.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 07	Mesin Ketik Elektronik	120.903.000,00
02 . 06 . 01 . 01 . 12	Mesin Ketik Lain-lain	18.700.000,00
02 . 06 . 01 . 02	Mesin Hitung/Jumlah	63.317.000,00
02 . 06 . 01 . 02 . 01	Mesin Hitung Manual	10.957.000,00
02 . 06 . 01 . 02 . 02	Mesin Hitung Listrik	2.500.000,00
02 . 06 . 01 . 02 . 03	Mesin Hitung Elektronik	5.860.000,00
02 . 06 . 01 . 02 . 11	Mesin Calculator	8.600.000,00
02 . 06 . 01 . 02 . 12	Mesin Penghitung Uang	35.400.000,00
02 . 06 . 01 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)	2.642.609.600,00
02 . 06 . 01 . 03 . 01	Mesin Stensil Manual Folio	2.500.000,00
02 . 06 . 01 . 03 . 07	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1.003.986.800,00
02 . 06 . 01 . 03 . 08	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	877.752.800,00
02 . 06 . 01 . 03 . 09	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	288.655.000,00
02 . 06 . 01 . 03 . 10	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	469.715.000,00
02 . 06 . 01 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.198.793.948,00

02 . 06 . 01 . 04 . 01	Lemari Besi	452.251.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 02	Rak Besi/Metal	497.181.800,00
02 . 06 . 01 . 04 . 03	Rak Kayu	790.737.561,00
02 . 06 . 01 . 04 . 04	Filling Besi/Metal	893.188.051,00
02 . 06 . 01 . 04 . 05	Filling Kayu	567.596.536,00
02 . 06 . 01 . 04 . 06	Brand Kas	513.625.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 11	Lemari Sorok	40.100.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 12	Lemari Kaca	136.865.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 13	Lemari Makan	9.150.000,00
02 . 06 . 01 . 04 . 14	Lemari kayu	298.099.000,00
02 . 06 . 01 . 05	Alat Kantor Lainnya	7.262.323.397,86
02 . 06 . 01 . 05 . 01	Papan Visuil	105.701.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 05	Alat Penghancur Kertas	332.494.700,00
02 . 06 . 01 . 05 . 06	Papan Nama Instansi	847.112.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 07	Papan Pengumuman	11.800.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 08	Papan Tulis	90.785.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 10	White Board	27.112.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 40	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3.454.246.201,00
02 . 06 . 01 . 05 . 44	Sablon	17.100.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 45	Camera CCTV	1.982.945.996,86
02 . 06 . 01 . 05 . 14	Peta	1.000.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 17	Mesin Absensi	15.851.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 24	Alat Pemotong Kertas	4.200.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 28	Overhead Projektor	323.625.500,00
02 . 06 . 01 . 05 . 38	Laser Pointer	1.500.000,00
02 . 06 . 01 . 05 . 39	Display	46.850.000,00
02 . 06 . 02	Alat Rumah Tangga	40.601.909.615,03
02 . 06 . 02 . 01	Meubelair	15.853.314.969,50
02 . 06 . 02 . 01 . 01	Lemari Kayu	519.942.000,00

02 . 06 . 02 . 01 . 02	Rak Kayu	165.798.712,00
02 . 06 . 02 . 01 . 03	Meja Besi/Metal	388.550.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 04	Meja Kayu	1.862.105.285,00
02 . 06 . 02 . 01 . 05	Kursi Besi/Metal	408.683.010,00
02 . 06 . 02 . 01 . 06	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	382.369.500,00
02 . 06 . 02 . 01 . 63	MOUBILER LAINNYA	231.475.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 49	Sofa	2.606.026.318,00
02 . 06 . 02 . 01 . 50	Daun Pintu Alumunium	4.603.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 51	Kaca Bening	4.136.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 54	Lemari Pakaian	661.904.700,00
02 . 06 . 02 . 01 . 55	Lemari Rias	28.320.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 61	Kursi Plastik	864.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 40	Guling	17.960.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 42	Selimut Wol	200.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 45	Seprei	194.455.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 46	Tikar	9.350.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 47	Tenda	750.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 48	Meja Biro	65.100.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 30	Kursi Putar	272.949.400,00
02 . 06 . 02 . 01 . 31	Kursi Biasa	174.362.600,00
02 . 06 . 02 . 01 . 34	Kursi Lipat	329.668.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 37	Meja Komputer	64.925.500,00
02 . 06 . 02 . 01 . 38	Kasur	731.194.400,00
02 . 06 . 02 . 01 . 39	Bantal	145.395.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 21	Meja Periksa Pasien	6.000.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 23	Meja Kartu	1.166.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 24	Meja Suntik	5.500.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 27	Kursi Rapat	678.505.320,50
02 . 06 . 02 . 01 . 28	Kursi Tamu	1.010.555.920,00

02 . 06 . 02 . 01 . 29	Kursi Tangan	112.330.645,00
02 . 06 . 02 . 01 . 15	Meja Podium	25.920.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 16	Meja Tik	1.625.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 17	Meja Reseption	195.538.559,00
02 . 06 . 02 . 01 . 18	Meja Tambahan	343.454.220,00
02 . 06 . 02 . 01 . 19	Meja Panjang	24.429.300,00
02 . 06 . 02 . 01 . 20	Meja Bundar	301.425.500,00
02 . 06 . 02 . 01 . 08	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	668.530.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 09	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1.811.000.000,00
02 . 06 . 02 . 01 . 10	Meja Rapat	405.827.200,00
02 . 06 . 02 . 01 . 11	Meja Tulis	166.187.980,00
02 . 06 . 02 . 01 . 12	Meja Makan	819.570.300,00
02 . 06 . 02 . 01 . 13	Meja Telpon	4.661.600,00
02 . 06 . 02 . 02	Alat Pengukur Waktu	17.850.000,00
02 . 06 . 02 . 02 . 01	Jam Mekanis	10.105.000,00
02 . 06 . 02 . 02 . 03	Jam Elektronik	7.745.000,00
02 . 06 . 02 . 03	Alat Pembersih	520.156.236,00
02 . 06 . 02 . 03 . 01	Mesin Penghisap Debu	184.260.036,00
02 . 06 . 02 . 03 . 03	Mesin Potong Rumput	15.300.000,00
02 . 06 . 02 . 03 . 04	Mesin Cuci	249.205.200,00
02 . 06 . 02 . 03 . 06	Mesin Penyedot Air	71.391.000,00
02 . 06 . 02 . 04	Alat Pendingin	5.427.030.250,00
02 . 06 . 02 . 04 . 01	Lemari Es	460.364.400,00
02 . 06 . 02 . 04 . 02	AC Sentral	27.500.000,00
02 . 06 . 02 . 04 . 03	AC Unit	1.823.866.550,00
02 . 06 . 02 . 04 . 04	AC Split	2.965.640.300,00
02 . 06 . 02 . 04 . 06	Kipas Angin	76.454.000,00
02 . 06 . 02 . 04 . 07	Exhause Fan	11.955.000,00
02 . 06 . 02 . 04 . 13	Alat Pendingin Lain-lain	61.250.000,00

02 . 06 . 02 . 05	Alat Dapur	302.461.750,00
02 . 06 . 02 . 05 . 02	Kompore Gas	78.733.250,00
02 . 06 . 02 . 05 . 03	Kompore Minyak	300.000,00
02 . 06 . 02 . 05 . 04	Teko Listrik	5.250.000,00
02 . 06 . 02 . 05 . 05	Alat Dapur Lainnya	102.889.500,00
02 . 06 . 02 . 05 . 06	Oven Listrik	6.550.000,00
02 . 06 . 02 . 05 . 07	Alat Dapur Lainnya	3.898.000,00
02 . 06 . 02 . 05 . 08	Kitchen Set	64.615.000,00
02 . 06 . 02 . 05 . 09	Tabung Gas	11.675.000,00
02 . 06 . 02 . 05 . 14	Alat Dapur Lain-lain	28.551.000,00
02 . 06 . 02 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.442.614.409,53
02 . 06 . 02 . 06 . 01	Alat Pemanas	51.600.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 02	Radio	132.225.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 03	Televisi	4.825.834.584,53
02 . 06 . 02 . 06 . 04	Cassette Recorder	2.545.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 05	Amplifier	32.909.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 06	Equalizer	33.990.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 59	Tandon Air	10.300.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 51	Rice Box	650.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 52	Lampu Hias	410.400.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 53	Hiasan Dinding	5.958.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 55	Gorden	163.607.900,00
02 . 06 . 02 . 06 . 56	WEBCAM	2.000.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 58	Ambal	173.083.300,00
02 . 06 . 02 . 06 . 40	Mimbar/Podium	26.957.200,00
02 . 06 . 02 . 06 . 41	Gucci	2.664.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 45	Lambang Instansi	11.900.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 48	Coofie Maker	9.798.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 49	Handy Cam	328.487.500,00

02 . 06 . 02 . 06 . 50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2.384.087.800,00
02 . 06 . 02 . 06 . 34	Lift	6.065.467.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 35	Seterika	620.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 36	Water Filter	25.000.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 37	Tangga Alumunium	7.155.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 38	Kaca Hias	14.046.500,00
02 . 06 . 02 . 06 . 39	Dispenser	157.088.300,00
02 . 06 . 02 . 06 . 26	Timbangan Badan	51.450.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 27	Alat Hiasan	658.050.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 28	Lambang Garuda Pancasila	33.759.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 29	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.206.600,00
02 . 06 . 02 . 06 . 31	Aquarium	1.322.500,00
02 . 06 . 02 . 06 . 32	Tiang Bendera	17.953.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 20	Stabilisator	6.100.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 21	Camera Video	347.487.850,00
02 . 06 . 02 . 06 . 22	Camera Film	492.715.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 23	Tustel	310.610.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 24	Mesin Jahit	5.800.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 25	Timbangan Orang	250.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 14	Microphone	180.837.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 15	Microphone Floor Stand	3.900.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 16	Microphone Table Stand	32.300.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 17	Mic Conference	164.187.500,00
02 . 06 . 02 . 06 . 18	Unit Power Supply	54.600.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 19	Step Up/Down	720.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 07	Loudspeaker	664.180.275,00
02 . 06 . 02 . 06 . 08	Sound System	265.983.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 09	Compact Disc	2.800.000,00
02 . 06 . 02 . 06 . 11	Karaoke	21.890.000,00

02 . 06 . 02 . 06 . 12	Wireless	240.638.600,00
02 . 06 . 02 . 06 . 13	Megaphone	5.500.000,00
02 . 06 . 02 . 07	Alat Pemadam Kebakaran	38.482.000,00
02 . 06 . 02 . 07 . 01	Alat Pemadam Portable	37.482.000,00
02 . 06 . 02 . 07 . 10	Pakaian Panas/Lengkap	1.000.000,00
02 . 06 . 03	Peralatan Komputer	23.899.125.734,25
02 . 06 . 03 . 01	Server Komputer	1.032.297.000,00
02 . 06 . 03 . 01 . 01	Mainframe / Komputer Server	194.695.000,00
02 . 06 . 03 . 01 . 02	Mini Komputer	4.995.000,00
02 . 06 . 03 . 01 . 05	Personal Komputer Lain-lain	523.669.500,00
02 . 06 . 03 . 01 . 06	Oprating System	15.400.000,00
02 . 06 . 03 . 01 . 07	Software Aplikasi	293.537.500,00
02 . 06 . 03 . 02	Personal Komputer	15.165.113.913,00
02 . 06 . 03 . 02 . 01	PC Unit	4.760.123.120,00
02 . 06 . 03 . 02 . 02	Lap Top	1.928.828.668,00
02 . 06 . 03 . 02 . 03	Note Book	6.584.942.545,00
02 . 06 . 03 . 02 . 05	Personal Komputer Lain-lain	246.138.000,00
02 . 06 . 03 . 02 . 06	Komputer All In One	1.645.081.580,00
02 . 06 . 03 . 03	Peralatan Komputer Mainframe	1.207.576.866,25
02 . 06 . 03 . 03 . 01	Card Reader	8.988.000,00
02 . 06 . 03 . 03 . 06	CPU	412.656.000,00
02 . 06 . 03 . 03 . 10	Line Printer	25.200.000,00
02 . 06 . 03 . 03 . 11	Plotter	74.000.000,00
02 . 06 . 03 . 03 . 12	Hard Disk	499.312.866,25
02 . 06 . 03 . 03 . 13	Keyboard	106.440.000,00
02 . 06 . 03 . 03 . 14	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	80.980.000,00
02 . 06 . 03 . 04	Peralatan Mini Komputer	2.008.012.200,00
02 . 06 . 03 . 04 . 06	CPU	24.000.000,00
02 . 06 . 03 . 04 . 08	Printer	1.500.465.080,00

02 . 06 . 03 . 04 . 10	Scanner	360.312.120,00
02 . 06 . 03 . 04 . 11	Computer Compatible	123.110.000,00
02 . 06 . 03 . 04 . 14	Keyboard	125.000,00
02 . 06 . 03 . 05	Peralatan Personal Komputer	1.808.380.300,00
02 . 06 . 03 . 05 . 01	CPU	49.353.000,00
02 . 06 . 03 . 05 . 02	Monitor	468.748.750,00
02 . 06 . 03 . 05 . 03	Printer	681.418.480,00
02 . 06 . 03 . 05 . 04	Scanner	234.046.720,00
02 . 06 . 03 . 05 . 05	Plotter	75.800.000,00
02 . 06 . 03 . 05 . 07	External	12.600.000,00
02 . 06 . 03 . 05 . 09	Keyboard Komputer	20.225.000,00
02 . 06 . 03 . 05 . 10	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	266.188.350,00
02 . 06 . 03 . 06	Perlatan Jaringan	2.677.745.455,00
02 . 06 . 03 . 06 . 01	Server	1.546.967.775,00
02 . 06 . 03 . 06 . 02	Router	287.779.800,00
02 . 06 . 03 . 06 . 03	Hub	83.720.880,00
02 . 06 . 03 . 06 . 04	Modem	46.100.000,00
02 . 06 . 03 . 06 . 06	Peralatan Jaringan Lain-lain	713.177.000,00
02 . 06 . 04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.279.678.581,00
02 . 06 . 04 . 01	Meja Kerja Pejabat	3.462.619.892,00
02 . 06 . 04 . 01 . 01	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	23.400.000,00
02 . 06 . 04 . 01 . 02	Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota	49.550.000,00
02 . 06 . 04 . 01 . 04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	121.235.300,00
02 . 06 . 04 . 01 . 05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	246.128.000,00
02 . 06 . 04 . 01 . 06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.293.967.654,00
02 . 06 . 04 . 01 . 08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.709.138.938,00
02 . 06 . 04 . 01 . 09	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	19.200.000,00
02 . 06 . 04 . 02	Meja Rapat Pejabat	209.770.453,00
02 . 06 . 04 . 02 . 04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	14.994.600,00

02 . 06 . 04 . 02 . 06	Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/W	19.050.000,00
02 . 06 . 04 . 02 . 07	Meja Tamu Ruangan Tunggu Eselon I/Wakil Gubernur/B	7.000.000,00
02 . 06 . 04 . 02 . 09	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	4.854.707,00
02 . 06 . 04 . 02 . 10	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2.000.000,00
02 . 06 . 04 . 02 . 11	Meja Tamu Ruangan Biasa	157.194.646,00
02 . 06 . 04 . 02 . 13	Meja Operator	4.676.500,00
02 . 06 . 04 . 03	Kursi Kerja Pejabat	781.699.140,00
02 . 06 . 04 . 03 . 01	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	50.750.000,00
02 . 06 . 04 . 03 . 02	Kursi Kerja Eselon I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikot	1.000.000,00
02 . 06 . 04 . 03 . 04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	57.884.000,00
02 . 06 . 04 . 03 . 05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	93.621.800,00
02 . 06 . 04 . 03 . 06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	162.827.540,00
02 . 06 . 04 . 03 . 08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	321.665.800,00
02 . 06 . 04 . 03 . 09	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	93.950.000,00
02 . 06 . 04 . 04	Kursi Rapat Pejabat	15.752.550,00
02 . 06 . 04 . 04 . 04	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	15.752.550,00
02 . 06 . 04 . 05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	169.254.960,00
02 . 06 . 04 . 05 . 01	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupa	8.000.000,00
02 . 06 . 04 . 05 . 02	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon I/Wakil Gubern	1.000.000,00
02 . 06 . 04 . 05 . 04	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	25.500.700,00
02 . 06 . 04 . 05 . 05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	47.511.100,00
02 . 06 . 04 . 05 . 06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	69.772.110,00
02 . 06 . 04 . 05 . 08	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	17.471.050,00
02 . 06 . 04 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	157.266.660,00
02 . 06 . 04 . 06 . 02	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon I/Wkl. Gubern	12.400.000,00
02 . 06 . 04 . 06 . 04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	19.266.660,00
02 . 06 . 04 . 06 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupa	125.600.000,00
02 . 06 . 04 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat	483.314.926,00
02 . 06 . 04 . 07 . 01	Lemari Buku untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	9.000.000,00

02 . 06 . 04 . 07 . 03	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	96.983.000,00
02 . 06 . 04 . 07 . 04	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1.750.000,00
02 . 06 . 04 . 07 . 05	Lemari Buku untuk Perpustakaan	24.875.000,00
02 . 06 . 04 . 07 . 06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	302.861.926,00
02 . 06 . 04 . 07 . 07	Buffet Kayu	34.542.000,00
02 . 06 . 04 . 07 . 09	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	13.303.000,00
02 . 07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.653.954.336,36
02 . 07 . 01	Alat Studio	9.451.050.986,36
02 . 07 . 01 . 01	Peralatan Studio Visual	6.195.349.740,00
02 . 07 . 01 . 01 . 01	Camera + Attachment	120.243.900,00
02 . 07 . 01 . 01 . 03	Proyektor + Attachment	1.770.208.250,00
02 . 07 . 01 . 01 . 09	Audio Amplifier	21.543.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 20	Compact Disc. Player	14.862.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 21	Cassette Duplicator	9.100.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 26	Telephone Hybird	8.700.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 76	Audio Tape Reel Recorder	1.450.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 80	Digital Audio Tape Recorder	131.192.600,00
02 . 07 . 01 . 01 . 81	Microphone Table stand	600.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 82	Peralatan studio Visual Lain-lain	760.945.750,00
02 . 07 . 01 . 01 . 83	ultro Delegate	1.299.550.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 85	Home Teater	21.100.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 45	Professional Sound System	4.750.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 46	Audio Master Control Unit	329.783.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	922.225.140,00
02 . 07 . 01 . 01 . 60	Battery Charger	7.100.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 64	Power Amplifier	258.590.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 69	Chairman/Audio Conference	173.426.400,00
02 . 07 . 01 . 01 . 29	Equalizer	68.772.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 32	Audio Compresor	3.850.000,00

02 . 07 . 01 . 01 . 40	Microphone/Wireless Mic	263.527.700,00
02 . 07 . 01 . 01 . 41	Microphone/Boom Stand	2.500.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 43	Microphone Floor Stand	800.000,00
02 . 07 . 01 . 01 . 44	Power Supply Microphone	530.000,00
02 . 07 . 01 . 02	Peralatan Studio Video dan Film	3.189.674.146,36
02 . 07 . 01 . 02 . 01	Assignment Switcher	13.640.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 03	Camera Electronic	405.701.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 13	Video Monitor	2.156.176.693,00
02 . 07 . 01 . 02 . 14	Video Tape Recorder Portable	42.623.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 15	Video Tape Recorder Stationer	41.276.603,36
02 . 07 . 01 . 02 . 39	Power Supply	41.760.850,00
02 . 07 . 01 . 02 . 62	Camera Film	50.050.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 63	Lensa Kamera	138.560.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 69	Printer	83.500.500,00
02 . 07 . 01 . 02 . 88	Alat Pemanas Prosesing / Water Heater	87.562.500,00
02 . 07 . 01 . 02 . 00	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	11.550.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 43	Rak Peralatan	2.950.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 45	Digital	78.153.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 46	Video Effect	7.800.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 47	Tripod Camera	5.200.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 58	Film Projector	14.970.000,00
02 . 07 . 01 . 02 . 59	Slide Projector	8.200.000,00
02 . 07 . 01 . 03	Peralatan Studio Video dan Film A	57.187.100,00
02 . 07 . 01 . 03 . 01	Automatic Emergency Light	9.474.000,00
02 . 07 . 01 . 03 . 03	Photo Tustel	8.500.000,00
02 . 07 . 01 . 03 . 09	Layar Film	28.943.100,00
02 . 07 . 01 . 03 . 19	Standard Point Animation	9.720.000,00
02 . 07 . 01 . 03 . 24	Peralatan studio Video dan film A Lain-lain	550.000,00
02 . 07 . 01 . 04	Peralatan Cetak	8.600.000,00

02 . 07 . 01 . 04 . 09	Mesin Pemotong Biasa	2.000.000,00
02 . 07 . 01 . 04 . 20	Camera Vertikal	6.600.000,00
02 . 07 . 01 . 06	Peralatan Pemetaan Ukur	240.000,00
02 . 07 . 01 . 06 . 33	Kompas	240.000,00
02 . 07 . 02	Alat Komunikasi	2.985.308.350,00
02 . 07 . 02 . 01	Alat Komunikasi Telephone	1.111.153.350,00
02 . 07 . 02 . 01 . 04	Amplifier	15.500.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 05	Microphone	2.475.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 06	Loudspeaker	3.450.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 08	Sound System	60.200.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 09	Telephone (PABX)	15.100.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 11	Pesawat Telephone	103.689.500,00
02 . 07 . 02 . 01 . 14	Handy Talky	673.631.950,00
02 . 07 . 02 . 01 . 16	Intercom	15.871.900,00
02 . 07 . 02 . 01 . 20	Facsimile	99.150.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 21	Handphone	92.550.000,00
02 . 07 . 02 . 01 . 24	Alat Komunikasi Lain-lain	29.535.000,00
02 . 07 . 02 . 02	Alat Komunikasi Radio SSB	1.706.000.000,00
02 . 07 . 02 . 02 . 01	Unit Transceiver SSB Portable	446.000.000,00
02 . 07 . 02 . 02 . 02	Unit Transceiver SSB Transportable	1.173.120.000,00
02 . 07 . 02 . 02 . 04	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	86.880.000,00
02 . 07 . 02 . 03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	31.185.000,00
02 . 07 . 02 . 03 . 04	Unit Transceiver FM	31.185.000,00
02 . 07 . 02 . 04	Alat Komunikasi Radio VHF	41.100.000,00
02 . 07 . 02 . 04 . 04	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	41.100.000,00
02 . 07 . 02 . 05	Alat Komunikasi Radio UHF	59.900.000,00
02 . 07 . 02 . 05 . 04	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	59.900.000,00
02 . 07 . 02 . 06	Alat Komunikasi Sosial	32.670.000,00
02 . 07 . 02 . 06 . 02	Wireless Amplifier	27.670.000,00

02 . 07 . 02 . 06 . 03	Slide Projector (Lapangan)	5.000.000,00
02 . 07 . 02 . 07	Alat-alat Sandi	3.300.000,00
02 . 07 . 02 . 07 . 04	Alat-alat Sandi Lain-lain	3.300.000,00
02 . 07 . 03	Peralatan Pemancar	217.595.000,00
02 . 07 . 03 . 03	Peralatan Pemancar VHF/FM	63.100.000,00
02 . 07 . 03 . 03 . 02	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	63.100.000,00
02 . 07 . 03 . 05	Peralatan Pemancar SHF	4.800.000,00
02 . 07 . 03 . 05 . 04	Satelite Link (Up/Down Link)	2.800.000,00
02 . 07 . 03 . 05 . 05	Alat Pemancar SHF Lain-lain	2.000.000,00
02 . 07 . 03 . 07	Peralatan Antena HF/SW	9.000.000,00
02 . 07 . 03 . 07 . 04	Peralatan Antena HF/SW Lain-lain	9.000.000,00
02 . 07 . 03 . 08	Peralatan Antena VHF/FM	5.900.000,00
02 . 07 . 03 . 08 . 01	Antena VHF/FM Portable	5.900.000,00
02 . 07 . 03 . 09	Peralatan Antena UHF	125.000,00
02 . 07 . 03 . 09 . 03	Antena UHF Stationary	125.000,00
02 . 07 . 03 . 10	Peralatan Antena SHF/Parabola	43.330.000,00
02 . 07 . 03 . 10 . 01	Antena SHF/Parabola Portable	34.850.000,00
02 . 07 . 03 . 10 . 03	Antena SHF/Parabola Stationary	7.500.000,00
02 . 07 . 03 . 10 . 04	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	980.000,00
02 . 07 . 03 . 19	Switcher Antena	9.250.000,00
02 . 07 . 03 . 19 . 02	Switcher Manual	9.250.000,00
02 . 07 . 03 . 23	Program Input Equipment	73.310.000,00
02 . 07 . 03 . 23 . 01	Receiver STL/VHF (FM)	57.310.000,00
02 . 07 . 03 . 23 . 02	Receiver STL/UHF	16.000.000,00
02 . 07 . 03 . 24	Peralatan Antena Penerima VHF	8.780.000,00
02 . 07 . 03 . 24 . 02	Peralatan Antena Penerima VHF Lain-lain	8.780.000,00
02 . 08	Alat-alat Kedokteran	488.690.825,00
02 . 08 . 01	Alat Kedokteran	254.496.375,00
02 . 08 . 01 . 01	Alat Kedokteran Umum	65.406.375,00
02 . 08 . 01 . 01 . 04	Stetoscope	5.000.000,00

02 . 08 . 01 . 01 . 05	Tensi Meter	25.000.000,00
02 . 08 . 01 . 01 . 08	Waskom	270.000,00
02 . 08 . 01 . 01 . 09	Timbangan Badan	250.000,00
02 . 08 . 01 . 01 . 10	Timbangan Bayi	1.050.000,00
02 . 08 . 01 . 01 . 34	Trocart	500.000,00
02 . 08 . 01 . 01 . 62	Tabung Oksigen	2.863.375,00
02 . 08 . 01 . 01 . 65	Kereta Makan	20.073.000,00
02 . 08 . 01 . 01 . 71	Trolley	10.400.000,00
02 . 08 . 01 . 02	Alat Kedokteran Gigi	156.950.000,00
02 . 08 . 01 . 02 . 01	Dental Chair	156.750.000,00
02 . 08 . 01 . 02 . 11	Infra Red	200.000,00
02 . 08 . 01 . 06	Alat Rotgen	50.000,00
02 . 08 . 01 . 06 . 17	Cassette	50.000,00
02 . 08 . 01 . 08	Alat Kedokteran Bedah	8.000.000,00
02 . 08 . 01 . 08 . 45	Video Camera dan Recorder	8.000.000,00
02 . 08 . 01 . 09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	8.960.000,00
02 . 08 . 01 . 09 . 74	Alat Kesehatan Kebidanan Lain-Lain	8.960.000,00
02 . 08 . 01 . 13	Poliklinik Set	14.000.000,00
02 . 08 . 01 . 13 . 62	Poloklinik set Lain-Lain	14.000.000,00
02 . 08 . 01 . 14	Penderita Cacat Tubuh	1.130.000,00
02 . 08 . 01 . 14 . 07	Tiang Keseimbangan	1.130.000,00
02 . 08 . 02	Alat Kesehatan	234.194.450,00
02 . 08 . 02 . 01	Alat Kesehatan Perawatan	188.374.450,00
02 . 08 . 02 . 01 . 02	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain	188.374.450,00
02 . 08 . 02 . 02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	19.150.000,00
02 . 08 . 02 . 02 . 13	Tread Mill	17.450.000,00
02 . 08 . 02 . 02 . 26	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lain-Lain	1.700.000,00
02 . 08 . 02 . 03	Alat Kesehatan Matra Laut	12.650.000,00
02 . 08 . 02 . 03 . 22	Compressor	5.500.000,00

02 . 08 . 02 . 03 . 26	Audio/Video Communication	7.150.000,00
02 . 08 . 02 . 05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	3.000.000,00
02 . 08 . 02 . 05 . 03	Boneka	3.000.000,00
02 . 08 . 02 . 06	Alat Kesehatan Olahraga	11.020.000,00
02 . 08 . 02 . 06 . 04	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	6.820.000,00
02 . 08 . 02 . 06 . 03	Sepeda Statis	4.200.000,00
02 . 09	Alat Laboratorium	3.709.690.200,00
02 . 09 . 01	Unit-Unit Laboratorium	2.288.852.900,00
02 . 09 . 01 . 02	Alat Laboratorium Microbiologi	2.909.900,00
02 . 09 . 01 . 02 . 02	Incubator	2.659.900,00
02 . 09 . 01 . 02 . 03	Blender	250.000,00
02 . 09 . 01 . 03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	4.000.000,00
02 . 09 . 01 . 03 . 04	Mikroskop Dengan Kamera	4.000.000,00
02 . 09 . 01 . 05	Alat laboratorium Buatan/Geologi	17.225.000,00
02 . 09 . 01 . 05 . 07	Camera Photo Micrograph	17.100.000,00
02 . 09 . 01 . 05 . 25	Safety Gauge	125.000,00
02 . 09 . 01 . 06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	2.500.000,00
02 . 09 . 01 . 06 . 53	Screen	2.500.000,00
02 . 09 . 01 . 07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	1.000.000,00
02 . 09 . 01 . 07 . 17	Pesawat Kip	1.000.000,00
02 . 09 . 01 . 08	Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	75.869.500,00
02 . 09 . 01 . 08 . 58	Mixer	75.869.500,00
02 . 09 . 01 . 11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	70.250.000,00
02 . 09 . 01 . 11 . 08	Digital	70.250.000,00
02 . 09 . 01 . 12	Alat Laboratorium Umum	3.500.000,00
02 . 09 . 01 . 12 . 07	Botol Oxigen	3.500.000,00
02 . 09 . 01 . 15	Alat Laboratorium Microbiologi	71.587.500,00
02 . 09 . 01 . 15 . 28	Stabilizer	11.587.500,00
02 . 09 . 01 . 15 . 41	Tube for Centrifuge	60.000.000,00
02 . 09 . 01 . 16	Alat Laboratorium Kimia	45.220.000,00

02 . 09 . 01 . 16 . 41	TLC Reagent Spreyer	500.000,00
02 . 09 . 01 . 16 . 74	Alat ultra Filtrasi	32.500.000,00
02 . 09 . 01 . 16 . 82	TV Monitor	12.220.000,00
02 . 09 . 01 . 17	Alat Laboratorium Microbiologi A	35.000.000,00
02 . 09 . 01 . 17 . 10	Micro Hematocrite Centrifuge	35.000.000,00
02 . 09 . 01 . 18	Alat Laboratorium Patologi	14.750.000,00
02 . 09 . 01 . 18 . 05	Freezer	11.250.000,00
02 . 09 . 01 . 18 . 27	Rotator	3.500.000,00
02 . 09 . 01 . 19	Alat Laboratorium Immunologi	9.750.000,00
02 . 09 . 01 . 19 . 06	Power Suply	9.750.000,00
02 . 09 . 01 . 22	Alat Laboratorium Makanan	3.070.000,00
02 . 09 . 01 . 22 . 02	Wajah Teflon	220.000,00
02 . 09 . 01 . 22 . 22	Rice Cooker	900.000,00
02 . 09 . 01 . 22 . 28	Work Bench	1.750.000,00
02 . 09 . 01 . 22 . 29	Kompore Minyak Tanah	200.000,00
02 . 09 . 01 . 24	Alat Laboratorium Farmasi	530.000,00
02 . 09 . 01 . 24 . 09	Mixer	530.000,00
02 . 09 . 01 . 29	Alat Laboratorium Pasir	19.175.000,00
02 . 09 . 01 . 29 . 04	Central Controler	19.175.000,00
02 . 09 . 01 . 38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	7.650.000,00
02 . 09 . 01 . 38 . 10	Exhaust Fan	7.650.000,00
02 . 09 . 01 . 39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	378.648.500,00
02 . 09 . 01 . 39 . 36	Mesin Gintir	374.300.000,00
02 . 09 . 01 . 39 . 55	Mesin Printing	4.348.500,00
02 . 09 . 01 . 43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	14.200.000,00
02 . 09 . 01 . 43 . 30	Pompa Airasil	14.200.000,00
02 . 09 . 01 . 46	Alat Laboratorium Pertanian	110.433.500,00
02 . 09 . 01 . 46 . 04	Alat Pemadam Kebakaran	97.433.500,00
02 . 09 . 01 . 46 . 34	Cosmotektur	4.500.000,00

02 . 09 . 01 . 46 . 75	Frezeer	8.500.000,00
02 . 09 . 01 . 47	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	1.049.923.000,00
02 . 09 . 01 . 47 . 17	Kompur Distilasi	1.000.000,00
02 . 09 . 01 . 47 . 62	Personal Komputer (Laboraturium)	1.048.923.000,00
02 . 09 . 01 . 48	Alat Laboratorium Pertanian B	35.500.000,00
02 . 09 . 01 . 48 . 11	Spring Balance	35.500.000,00
02 . 09 . 01 . 56	Alat Laboratorium Geofisika	30.722.500,00
02 . 09 . 01 . 56 . 06	Automatic Point Counter	29.205.000,00
02 . 09 . 01 . 56 . 10	Digital Thermometer	1.517.500,00
02 . 09 . 01 . 58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	216.220.000,00
02 . 09 . 01 . 58 . 19	Packaging Machine	216.000.000,00
02 . 09 . 01 . 58 . 24	Gentong Plastik	220.000,00
02 . 09 . 01 . 62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	3.218.000,00
02 . 09 . 01 . 62 . 01	Centrifuge Heamatorite	3.218.000,00
02 . 09 . 01 . 63	Alat Laboratorium Lainnya	66.000.500,00
02 . 09 . 01 . 63 . 48	Alat Box Compression Test	325.500,00
02 . 09 . 01 . 63 . 83	Meja Kerja	65.675.000,00
02 . 09 . 02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.087.539.400,00
02 . 09 . 02 . 01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	451.750.000,00
02 . 09 . 02 . 01 . 02	Papan Panel	450.000.000,00
02 . 09 . 02 . 01 . 04	Kotak Alat-alat Peraga Meloce SAS	750.000,00
02 . 09 . 02 . 01 . 06	Gambar Analitik	250.000,00
02 . 09 . 02 . 01 . 07	Kotak Bahasa utk Kartu Kalimat Huruf Cetak & Kartu	750.000,00
02 . 09 . 02 . 02	Bidang Studi : Matematika	10.100.000,00
02 . 09 . 02 . 02 . 07	Papan Panel	9.250.000,00
02 . 09 . 02 . 02 . 26	Simetri Cermin	850.000,00
02 . 09 . 02 . 03	Bidang Studi : IPA Dasar	27.040.000,00
02 . 09 . 02 . 03 . 01	Kotak Peti lengkap	625.000,00
02 . 09 . 02 . 03 . 08	Kabel Listril	26.415.000,00

02 . 09 . 02 . 04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	442.271.000,00
02 . 09 . 02 . 04 . 31	Buku	1.500.000,00
02 . 09 . 02 . 04 . 59	Layar	85.250.000,00
02 . 09 . 02 . 04 . 60	Lensa	30.000.000,00
02 . 09 . 02 . 04 . 71	Alas Dengan Lampu + Kontak	325.250.000,00
02 . 09 . 02 . 04 . 76	Pot Plastik	250.000,00
02 . 09 . 02 . 04 . 77	Pisau	21.000,00
02 . 09 . 02 . 05	Bidang Studi : IPA Menengah	15.338.200,00
02 . 09 . 02 . 05 . 75	Pot Besar	1.925.000,00
02 . 09 . 02 . 05 . 28	Layar	10.863.200,00
02 . 09 . 02 . 05 . 29	Cermin Datar dan Skala	2.350.000,00
02 . 09 . 02 . 05 . 69	Rak Tabunga Reaksi	200.000,00
02 . 09 . 02 . 06	Bidang Studi : IPA Atas	75.000,00
02 . 09 . 02 . 06 . 24	Foto Meter	75.000,00
02 . 09 . 02 . 09	Bidang Studi : Ketrampilan	1.379.000,00
02 . 09 . 02 . 09 . 04	Gunting Pemangkas	750.000,00
02 . 09 . 02 . 09 . 07	Panci	629.000,00
02 . 09 . 02 . 10	Bidang Studi : Kesenian	114.285.200,00
02 . 09 . 02 . 10 . 01	Gitar Spanish	2.450.000,00
02 . 09 . 02 . 10 . 02	Gitar Elektrik	46.605.200,00
02 . 09 . 02 . 10 . 04	Organ/Electone	47.655.000,00
02 . 09 . 02 . 10 . 16	Gendang	2.750.000,00
02 . 09 . 02 . 10 . 17	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	14.825.000,00
02 . 09 . 02 . 11	Bidang Studi : Olah Raga	22.915.000,00
02 . 09 . 02 . 11 . 08	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	22.915.000,00
02 . 09 . 02 . 12	Bidang Studi : PMP	2.386.000,00
02 . 09 . 02 . 12 . 02	Bendera Merah Putih	280.000,00
02 . 09 . 02 . 12 . 03	Gambar Presiden	1.003.000,00
02 . 09 . 02 . 12 . 04	Gambar Wakil Presiden	903.000,00
02 . 09 . 02 . 12 . 05	Gambar Tokoh-tokoh Nasional	200.000,00

02 . 09 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	110.147.900,00
02 . 09 . 04 . 02	Modular Counting and Scentific	4.200.000,00
02 . 09 . 04 . 02 . 39	Serial Scanner/Printe	4.200.000,00
02 . 09 . 04 . 04	Recorder Display	51.697.500,00
02 . 09 . 04 . 04 . 04	Printer (Laboraturium)	51.397.500,00
02 . 09 . 04 . 04 . 09	Recorder Display Lain-lain	300.000,00
02 . 09 . 04 . 05	System/Power Supply	51.950.400,00
02 . 09 . 04 . 05 . 17	System/Power Supplay Lain-lain	51.950.400,00
02 . 09 . 04 . 06	Measuring / Testing Device	2.300.000,00
02 . 09 . 04 . 06 . 12	Digital LCR Meter	2.300.000,00
02 . 09 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	15.000.000,00
02 . 09 . 05 . 03	Proteksi Lingkungan	15.000.000,00
02 . 09 . 05 . 03 . 03	Sirine	15.000.000,00
02 . 09 . 06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	13.900.000,00
02 . 09 . 06 . 04	Peralatan Hidrologi	13.900.000,00
02 . 09 . 06 . 04 . 19	Range Finder	13.900.000,00
02 . 09 . 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	22.250.000,00
02 . 09 . 07 . 02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	4.200.000,00
02 . 09 . 07 . 02 . 42	Standard Voltage Generator	4.200.000,00
02 . 09 . 07 . 03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	18.050.000,00
02 . 09 . 07 . 03 . 01	Tape Recorder	11.750.000,00
02 . 09 . 07 . 03 . 10	Tripod	6.300.000,00
02 . 09 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	172.000.000,00
02 . 09 . 08 . 03	Data Accquistion and Analyzing System	172.000.000,00
02 . 09 . 08 . 03 . 08	Software Cont Off-line Computer	172.000.000,00
02 . 10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	29.043.000,00
02 . 10 . 01	Senjata Api	26.643.000,01
02 . 10 . 01 . 11	Senjata Lain-Lain	26.643.000,00
02 . 10 . 01 . 11 . 12	Dispencer	26.643.000,00
02 . 10 . 02	Persenjataan Non Senjata Api	2.400.000,00

02 . 10 . 02 . 02	Non Senjata Api	2.400.000,00
02 . 10 . 02 . 02 . 08	Pentung	2.400.000,00
3	Gedung dan Bangunan Gedung	288.563.836.291,23
03 . 11	Bangunan Gedung	283.487.123.291,23
03 . 11 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	161.641.043.241,23
03 . 11 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor	128.505.046.705,00
03 . 11 . 01 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	126.071.804.405,00
03 . 11 . 01 . 01 . 05	Bangunan Pagar Gedung Kantor	2.433.242.300,00
03 . 11 . 01 . 02	Bangunan Gudang	5.503.237.700,00
03 . 11 . 01 . 02 . 01	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5.235.475.000,00
03 . 11 . 01 . 02 . 07	Bangunan Gudang Lain-lain	267.762.700,00
03 . 11 . 01 . 04	Bangunan Gedung Instalasi	702.669.182,00
03 . 11 . 01 . 04 . 04	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	702.669.182,00
03 . 11 . 01 . 05	Bangunan Gedung Laboratorium	162.451.000,00
03 . 11 . 01 . 05 . 01	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	162.451.000,00
03 . 11 . 01 . 06	Bangunan Kesehatan	18.762.525.000,00
03 . 11 . 01 . 06 . 01	Bangunan Rumah Sakit Umum	3.557.175.000,00
03 . 11 . 01 . 06 . 12	Bangunan Kesehatan Lain-lain	15.205.350.000,00
03 . 11 . 01 . 08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	832.665.000,00
03 . 11 . 01 . 08 . 01	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	832.665.000,00
03 . 11 . 01 . 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	488.162.000,00
03 . 11 . 01 . 10 . 01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	348.162.000,00
03 . 11 . 01 . 10 . 04	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	140.000.000,00
03 . 11 . 01 . 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	765.390.000,00
03 . 11 . 01 . 11 . 01	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	429.060.000,00
03 . 11 . 01 . 11 . 04	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	336.330.000,00
03 . 11 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	515.317.000,00
03 . 11 . 01 . 13 . 01	Gedung Pos Jaga Permanen	176.917.000,00
03 . 11 . 01 . 13 . 07	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	338.400.000,00

03 . 11 . 01 . 14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.379.110.004,23
03 . 11 . 01 . 14 . 01	Gedung Garasi/Pool Permanen	1.131.780.004,23
03 . 11 . 01 . 14 . 04	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	247.330.000,00
03 . 11 . 01 . 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	2.150.494.000,00
03 . 11 . 01 . 21 . 01	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	2.150.494.000,00
03 . 11 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.533.610.000,00
03 . 11 . 01 . 27 . 04	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1.533.610.000,00
03 . 11 . 01 . 28	Bangunan Sarana Publik	340.365.650,00
03 . 11 . 01 . 28 . 04	Banguan Taman Rekreasi	340.365.650,00
03 . 11 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	121.846.080.050,00
03 . 11 . 02 . 01	Rumah Negara Golongan I	76.728.314.300,00
03 . 11 . 02 . 01 . 01	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	76.728.314.300,00
03 . 11 . 02 . 02	Rumah Negara Golongan II	3.759.416.000,00
03 . 11 . 02 . 02 . 01	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	2.468.896.000,00
03 . 11 . 02 . 02 . 04	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	1.290.520.000,00
03 . 11 . 02 . 03	Rumah Negara Golongan III	594.000.000,00
03 . 11 . 02 . 03 . 01	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	324.000.000,00
03 . 11 . 02 . 03 . 02	Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen	270.000.000,00
03 . 11 . 02 . 04	Mess/Wisma	21.718.304.750,00
03 . 11 . 02 . 04 . 01	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	21.718.304.750,00
03 . 11 . 02 . 05	Asrama	18.874.517.000,00
03 . 11 . 02 . 05 . 01	Asrama Permanen	18.874.517.000,00
03 . 11 . 02 . 12	Bangunan Rumah Sederhana	171.528.000,00
03 . 11 . 02 . 12 . 01	Bangunan Rumah Sederhana	171.528.000,00
03 . 12	Monumen	5.076.713.000,00
03 . 12 . 02	Tugu Peringatan	530.627.000,00
03 . 12 . 02 . 03	Tugu Peringatan Lainnya	530.627.000,00
03 . 12 . 02 . 03 . 01	Tugu Peringatan Lainnya	530.627.000,00
03 . 12 . 05	Tugu Peringatan Lain	410.860.000,00
03 . 12 . 05 . 01	Tugu Peringatan Lain	410.860.000,00

03 . 12 . 05 . 01 . 01	Tugu Peringatan Lainnya	410.860.000,00
03 . 12 . 06	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.135.226.000,00
03 . 12 . 06 . 01	Tugu/Tanda Batas	4.135.226.000,00
03 . 12 . 06 . 01 . 02	Tugu/Tanda Batas Administrasi Propinsi	389.891.900,00
03 . 12 . 06 . 01 . 03	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	1.033.077.000,00
03 . 12 . 06 . 01 . 09	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	486.326.000,00
03 . 12 . 06 . 01 . 10	Tugu/Tanda Batas Lain-lain	2.225.931.100,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.328.843.090,00
04 . 15	Instalasi	2.131.713.890,00
04 . 15 . 06	Instalasi Gardu Listrik	2.111.713.890,00
04 . 15 . 06 . 01	Instalasi Gardu Listrik Induk	97.570.000,00
04 . 15 . 06 . 01 . 01	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	97.570.000,00
04 . 15 . 06 . 02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	2.014.143.890,00
04 . 15 . 06 . 02 . 01	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1.868.720.890,00
04 . 15 . 06 . 02 . 04	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	145.423.000,00
04 . 15 . 07	Instalasi Pertahanan	20.000.000,00
04 . 15 . 07 . 01	Instalasi Radar	20.000.000,00
04 . 15 . 07 . 01 . 03	Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek)	20.000.000,00
04 . 16	Jaringan	197.129.200,00
04 . 16 . 02	Jaringan Listrik	191.729.200,00
04 . 16 . 02 . 01	Jaringan Transmisi	191.729.200,00
04 . 16 . 02 . 01 . 03	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	22.500.000,00
04 . 16 . 02 . 01 . 04	Jaringan Transmisi Lain-lain	169.229.200,00
04 . 16 . 03	Jaringan Telepon	5.400.000,00
04 . 16 . 03 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	5.400.000,00
04 . 16 . 03 . 01 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil	5.400.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.385.785.750,00
05 . 17	Buku dan Perpustakaan	264.445.750,00
05 . 17 . 01	Buku	156.145.750,00

05 . 17 . 01 . 01	Umum	109.952.370,00
05 . 17 . 01 . 01 . 01	Ilmu Pengetahuan umum	91.930.570,00
05 . 17 . 01 . 01 . 10	Buku Umum Lain-lain	18.021.800,00
05 . 17 . 01 . 03	Agama	19.902.900,00
05 . 17 . 01 . 03 . 01	Agama Islam	10.495.400,00
05 . 17 . 01 . 03 . 05	Buku Agama Lain-lain	9.407.500,00
05 . 17 . 01 . 04	Ilmu Sosial	15.031.000,00
05 . 17 . 01 . 04 . 05	Hukum	15.031.000,00
05 . 17 . 01 . 07	Ilmu Pengetahuan Praktis	6.779.080,00
05 . 17 . 01 . 07 . 01	Ilmu Kedokteran	3.135.880,00
05 . 17 . 01 . 07 . 02	Teknologi	402.600,00
05 . 17 . 01 . 07 . 10	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	3.240.600,00
05 . 17 . 01 . 09	Geografi, Biografi, Sejarah	4.480.400,00
05 . 17 . 01 . 09 . 04	Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	4.480.400,00
05 . 17 . 02	Terbitan	49.300.000,00
05 . 17 . 02 . 01	Terbitan Berkala	49.300.000,00
05 . 17 . 02 . 01 . 03	Terbitan Berkala Lain-lain	49.300.000,00
05 . 17 . 03	Barang-Barang Perpustakaan	59.000.000,00
05 . 17 . 03 . 01	Peta	59.000.000,00
05 . 17 . 03 . 01 . 23	Peta Citra Satelit	59.000.000,00
05 . 18	Barang Bercorak Kebudayaan	1.121.340.000,00
05 . 18 . 01	Barang Bercorak Kebudayaan	1.117.590.000,00
05 . 18 . 01 . 01	Pahatan	1.065.790.000,00
05 . 18 . 01 . 01 . 03	Pahatan Logam	1.065.790.000,00
05 . 18 . 01 . 03	Alat Kesenian	2.400.000,00
05 . 18 . 01 . 03 . 01	Alat Musik/Band	2.400.000,00
05 . 18 . 01 . 04	Alat Olah Raga	45.800.000,00
05 . 18 . 01 . 04 . 04	Alat Tennis Meja	11.000.000,00
05 . 18 . 01 . 04 . 07	Alat Olah Raga Lain-lain	34.800.000,00
05 . 18 . 01 . 06	Maket dan Foto Dokumen	440.000,00

05 . 18 . 01 . 06 . 11	Globe	440.000,00
05 . 18 . 01 . 08	Barang Kerajinan	3.160.000,00
05 . 18 . 01 . 08 . 02	Logam (Gong, Mandau)	3.160.000,00
05 . 18 . 02	Alat Olah Raga Lainnya	3.750.000,00
05 . 18 . 02 . 04	Alat Olah Raga Lainnya	3.750.000,00
05 . 18 . 02 . 04 . 03	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	3.750.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.088.000,00
06 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.088.000,00
06 . 20 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.088.000,00
06 . 20 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.088.000,00
06 . 20 . 01 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.088.000,00
7	Aset Lainnya	3.717.571.825,00
07 . 24	Aset Tidak Berwujud	3.717.571.825,00
07 . 24 . 01	Perangkat Lunak	3.717.571.825,00
07 . 24 . 01 . 01	Perangkat Lunak	3.717.571.825,00
07 . 24 . 01 . 01 . 02	Software/Aplikasi	2.382.516.825,00
07 . 24 . 01 . 01 . 03	Website	1.335.055.000,00
JUMLAH ASET		2.297.505.162.466,27

LAMPIRAN 3

NOTULEN
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2016

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Maret 2023
 Waktu : 08.30 WIB - Selesai
 Tempat : Gren Alia Hotel Jakarta
 Peserta : (Absen Terlampir)

PEMBUKAAN:

- Laporan Ketua Panitia Penyelenggara *Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* Penyusunan RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim, Ibu Hj. Syarifah Awlayiah, S.Sos., M.Si.
- Sambutan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.PP., sekaligus membuka Acara *Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* Penyusunan RENSTRA Setda Prov. Kaltim Tahun 2024-2026
- Pemaparan Rancangan RENSTRA Setda Prov. Kaltim disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan kepegawaian, Ibu Inni Indarpuri, S.Hut, M.Si.

ARAHAN SEKRETARIS DAERAH:

- Apresiasi terhadap Rancangan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang sudah lebih baik, fokus dan terarah, khususnya pada Tujuan, Sasaran, hingga Program serta Indikatornya
- Posisi RENSTRA yang disusun oleh Seluruh perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada dibawah satu level indikator dari RPD(Rencana Pembangunan Daerah)
- Dalam proses penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 mengacu pada tagline Membangun Kaltim Untuk Nusantara
- Ketika menyusun dokumen perencanaan, khususnya pada kebijakan - kebijakan yg dikeluarkan merupakan usaha dari Kalimantan Timur sebagai mitra dari IKN untuk menyokong dan mempermudah pembangunan IKN
- Provinsi Kalimantan Timur secara langsung terlibat sesuai kewenangan dalam membantu dan mempercepat pembangunan IKN

MODERATOR:**ASISTEN 1**

- Dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, diperlukan masukan saran, dan kritikan yang membangun untuk menyempurnakan dan mengambil kesimpulan terbaik untuk kelengkapan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Rencana Strategis yang akan di bahas dan di sempurnakan ini merupakan landasan dan acuan penyelenggaraan program pemerintah daerah khususnya di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
- Dalam Forum Perangkat Daerah ini, seluruh Asisten telah membedah Rancangan RENSTRA ini, kemudian juga memberikan masukan dan saran khususnya terhadap isu is strategis khususnya pada pelayanan Setda yang tentunya harus diselesaikan pada tahun 2024-2026 termasuk kesesuaian program termasuk pada tujuan, dan sasaran serta kegiatan dan sub kegiatan, yang telah di susun dan akan menjadi Indikator Utama dan Indikator Kinerja Kunci Setda Prov.Kaltim
- Dalam Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan seluruh OPD agar aktif dalam memberikan masukan dan saran agar perumusan Rancangan RENSTRA menjadi acuan yang baik
- Rancangan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan produk yang sudah di bahas khususnya di tingkat Asisten
- Dan yang tidak kalah penting adalah kesesuaian antara dokumen rancangan RENSTRA Perangkat daerah dan RPD, sebagaimana kita ketahui bahwa RPD saat ini juga sementara dalam proses penyusunan dan tentunya harus bersamaan atau paralel dengan RENSTRA, sehingga nantinya kita berharap segera menjadi rumusan Bersama, dan diterbitkan untuk di implementasikan di lingkungan Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
- Menurut hemat saya, indikator asisten sudah masuk di sasaran yang ada di biro biro
- Terkait birokrasi yang ber Akhlak adalah keseragaman seluruh provinsi, apakah ini akan di kaji lagi atau bagaimana nanti, ini menyangkut orientasi pelayanan dari ASN

PEMAPARAN :

KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Rancangan Awal RENSTRA Setda Prov. Kaltim

(Slide terlampir)

HASIL DISKUSI:

Plt. Kepala Bappeda:

- Menurut kami apa yang sudah disusun oleh tim penyusun perencanaan Setda ini sudah cukup baik, hanya saja nantinya ada beberapa masukan dari kami
- Dalam merumuskan tujuan (cascading) sudah mengkoposit tujuan dan sasaran yang ada di RPD, sudah sangat tepat sekali karena Setda sendiri adalah pembuat Kebijakan pembangunan

Daerah, hanya saja ada kalimat sambung yang belum ada, apakah yang berkualitas, atau ada kalimat lain terkait hasil di akhir

- Kemudian terkait Indikator Tujuan, apakah ketika nanti pada saat penyusunan kebijakan, atau evaluasi, mana kebijakan yang dilaksanakan perangkat daerah, kebijakan yang sudah disusun ini seberapa jauh yang sudah di implementasikan oleh Perangkat daerah, apakah ini pada saat Menyusun kebijakannya, apakah Ketika sudah di Implementasikan
- Indikator sasaran, menurut hemat saya, kata kerja di situ akan lebih baik jika menggunakan kata "Meningkatnya" bukan meningkatkan, karena itu ada di level tujuan
- Terkait strategi, merupakan upaya merumuskan program, arah kebijakan mudah mudahan sudah dirumuskan juga untuk arah kebijakan program penunjang yang ada di Biro biro
- Rumusan untuk menghitung Indikator, pada Asisten I menurut saya sudah sangat tepat perhitungan indikator terkait kebijakan ini sudah mengarah ke salah satu tugas Setda yaitu pemantauan dan evaluasi kebijakan.
- Seluruh indikator yang ada di biro biro terkait kebijakan, seluruh kebijakan yang ditetapkan, di bagi kebijakan yang diterapkan.
- Tujuan yang ada di Setda sudah mencakup seluruh tujuan dan sasaran yang ada di RPD
- Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah asisten juga mampu indikator atau bagaimana, sampai saat ini kami juga masih berdiskusi terkait itu.
- Antara indikator sasaran dan indikator tujuan, sebaiknya indikator sasaran yang berkenaan dengan kebijakan itu, dikatakan pada indikator yang menggunakan IKK dan rumusan pengukuran indikator tujuan dan indikator sasaran sebaiknya dapat konsisten dan berkesinambungan
- Pengampu nilai SAKIP Sekretariat Daerah ada di Biro Administrasi Pimpinan

Inspektur Pembantu:

- terkait dengan RENSTRA terdapat beberapa catatan kalo secara cascadingnya RENSTRA Setda sudah nuntut dan sudah mencakup seluruh tugas dan wewenang dan target dan indikator kinerja sdh terukur dan persentase sdh dibuat pembilang dan penyebutnya.
- Tujuan itu biasanya bukan lagi kata kerja mewujudkan menjadi (terwujudnya) dan bs diukur.
- Kami dari Inspektorat secara cascadingnya, sudah cukup baik dan sudah runtut dan sudah cukup baik
- Target indikator juga sudah terukur, hingga pembilangnya juga sudah ada, karena ada beberapa OPD yang cakupan persentasenya masih belum tepat

Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup :

- Ada tujuan dari bu sekda ada terkait mewujudkan kebijakan pengendalian sosial dan lingkungan hidup, namun sampai di lingkup asisten terkait kebijakan di bidang lingkungan Hidup tidak terbilang
- Kami menghimbau akan mencoba mengurangi pemakaian plastik, sekretariat mulai dari contoh seperti rapat-rapat di lingkungan sekretariat daerah agar mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan sampah tidak terurai (plastik) seperti botol plastik, alangkah baiknya dapat menggunakan alternatif lain, dengan menggunakan gelas kaca, dan air galon isi ulang.

- Dalam catatan kami, pada tahun 2021 plastik sampai ke Laut sebesar 30%, kami harap kedepan kita dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah agar dapat lebih peduli lagi dengan sampah

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup :

- Kebijakan strategi (PERGUB), Bisa dimulai dalam rapat membawa tumblr dan di undangan sekalian di sosialisasikan, sehingga Tumbler yang sering dibagikan dapat bermanfaat.
- Kami pernah mengusulkan program kerja sama terhadap pemanfaatan sampah plastic dasampah kemasan, akan lebih bermanfaat jika kita sebagai pembuat kebijakan agardibuatkan kebijakan terkait pembuatan teknologi yang mendukung dan membantu untuk pengelolaan sampah

TANGGAPAN:

Asisten II :

- Apabila masukan masukan yang sudah disampaikan tadi dapat diterima oleh kita semua, alangkah baiknya jika langsung di perbaiki saja dan di implementasikan yang sudah kita sepakati Bersama, seperti perubahan kata “mewujudkan” menjadi “terwujudnya”
- Terkait hal hal yang masih dalam pembahasan dan perlu dibahas lebih lanjut, nanti akan kita bahas lagi seperti contoh kebijakan yang belum masuk di asiasten terkait pengelolaan sampah tadi, bisa kita bahas Kembali kemudian jika diperlukan akan di lakukan perbaikan nantinya
- Fungsi kita adalah mengkordinasikan dan memfasilitasi, apakah membuat atau memperbaiki kebijakan, menurut saya presentase kebijakan dan di fasilitasi itu tidak masuk di indikator sasaran, itu masih berada di bawahnya. Itu masih perlu di kaji lagi dan kita diskusikan bersama

Kepala Biro Ekonomi:

- Jika berbicara tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah menyiapkan kebijakan, dengan indikatornya kebijakan yang berkualitas. Indikator kebijakan yg berkualitas adalah dari perencanaan sampe pemanfaatan itu sudah menjadi satu kesatuan dan dapat diukur dengan menggunakan tolak ukur kualitas, yang dibunyikandi sini adalah Indikator Kualitas Kebijakan

Kepala Biro Adpim:

- Segala masukan yang tadi sudah disampaikan, diharapkan dapat di rumuskan Kembali, itu menjadi bahan kita lagi setelah ini nantinya akan kita rumuskan lagi dan akan dituangkan didalam berita acara

Kepala Dinas Kesehatan :

- Menyambung dari tujuan dan sasaran belum mewakili kesehatan (indikator Tujuan) disitu

hanya tercantum, hal hal lain yang belum masuk terkait dengan kebijakan yang menyangkut tentang kesehatan, khususnya pada biro ekonomi, bisa dimasukkan terkait kesejahteraan dan kesehatan

- terkait birokrasi yg berakhlak perilaku individu dan perilaku Organisasi, Birokrasi clean and clear Berakhlak lebih condong ke individu, tidak mengacu pada perilaku Organisasi.

Kepala BKD:

- Terkait kerja sama, Pada point ke empat Asisten I, presentase kebijakan yang ditindaklanjuti menyangkut kerja sama dan Kerjasama daerah itu sesuatu yang berbeda, disini hanya berbeda persepsi dan nomenklatur saja, karena antara kerja sama daerah dan kerja sama keluar itu berbeda
- Pada presentase kerja sama yang di tindak lanjuti, antara usulan dan pembagi sebuah usulan. Kerja sama itu prosesnya usulan itu adalah tahap awal, itu sudah ada kerja sama daerah. Tindak lanjutnya adalah penandatanganan dan pengesahan. Jadi alangkah baiknya ditulis saja pengesahan saja jumlah kesepakatan Bersama, artinya kerja sama dengan pihak lain, itu sudah ada pengesannya, kemudian di atasnya adalah kesepakatan yang di tindaklanjuti, karena yang bertugas untuk menindak lanjuti adalah perangkat daerah
- Selama ini banyak kesepakatan atau kerja sama yang di sepakati, namun belum ada tindak lanjutnya

Direktur Rumah Sakit AWS :

- Pada point Meningkatkan angka harapan hidup agar output dimasukan bidang kesehatan dan pendidikan menjadi komoditas menjadi outcome (TEKNIS)
- Untuk tujuan yang lain lain juga diturunkan sampai ke outcomenya agar lebih menjuruskan teknis

Kepala Biro Kesra :

- Salah satu kesulitan dalam menuliskan narasi dari beberapa isu OPD, sosial agar mencakup semua aspek adalah menurunkannya dari isu yang ada di RPD
- Akan lebih komplis lagi jika tidak hanya sekedar sosial, namun jika dimasukkan aspek kesejahteraan menurut kami itu sudah mencakup semuanya
- Kata berakhlak tadi adalah core valuenya ASN, bukan berakhlak secara individu

Kepala Biro Umum :

- Ingin mengusulkan untuk ada penambahan kata-kata pada indikator sasaran pada asissten 3 yaitu “meningkatkan” menjadi “meningkatkan” kualitas layanan dan kebijakan
- Pada indikator ke 2 : untuk menambahkan indeks pada nomor dua kepuasan masyarakat pada setda menjadi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Setda Prov Kalimantan timur.
- Untuk tujuan besar setda sudah cukup baik dan tidak perlu ada penambahan lain

Kepala Bagian Sekretariat DPRD :

- Terkait nilai SAKIP apakah perlu ditampilkan nilai SAKIP setda sendiri, atau hanya perlu nilai SAKIP Provinsi saja

Kepala Bagian Biro Organisasi (Bu Nani) :

- Biro Organisasi mengawal pada tahapan awal perencanaan, evaluasi hingga pelaporan, sampai terakhir sesuai dgn fungsi dari organisasi
- Penyusunan LKJIP dilakukan untuk mengukur capaian kinerja, pada tahapan awal sampai mengidentifikasi

- Substansi FPD ini dapat menjadi running wheel jika mendapat dukungan dari seluruh perangkat daerah, khususnya dari biro biro yang ada di lingkungan Sekretariat daerah itu sendiri, bukan hanya dari biro organisasi tapi dapat dukungan dari seluruh biro yang ada di lingkungan Setda
- Kami dari Biro Organisasi akan membuka komunikasi yg baik antara bappeda, adbandan inspektorat agar apa yang menjadi sasaran di SAKIP dapat tercapai
- Seluruh perangkat daerah agar dapat mengutus staf yg relevan diutus untuk menghadiri analisis LKJIP (PNS) agar dapat memahami terkait LKJIP agar ketika ditanya nanti dapat menjawab dengan baik.

Karo Adbang:

- Masukkan Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah akan berpengaruh pada Biro Adbang.
- evaluasi terhadap PD, membuat kebijakan dari penyusunan awal sampai evaluasi.
- Kepada seluruh perangkat daerah Jika ada kebijakan dari Sekretariat Daerah yang disahkan, untuk di tindak lanjuti, mohon untuk di tindaklanjuti dengan baik, karena itu akan berpengaruh pada kinerja Sekretariat Daerah nantinya.
- Kami akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah di tetapkan, tentunya harapan kami, seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti dengan baik, seperti Ketika dalam rapat atau kordinasi terkait kebijakan itu akan kami perhatikan apakah sudah ditindaklanjuti dengan baik atau bagaimana

Bu Ning (JFU) :

- kami semua merasa berbahagia dan sangat berterimakasih kepada seluruh tim penyusun rancangan RENSTRA karena sudah sangat baik Menyusun rancangan ini, tentunya juga kepada seluruh Asisten yang turut ikut dalam membahas rancangan RENSTRA ini
- terkait indikator tujuan, yang sudah ditetapkan khususnya pada tahun 2023 ini harus betul betul paham agar angka yang di tetapkan pada target Indikator tujuan dapat terwujud

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Menyongsong 2024-226 ini Birokrasi yang kita bangun ini adalah Birokrasi yang gesit dan profesional, jafung dituntut harus lincah dan segit serta profesional ditopang oleh ASN yang berakhlak.
- Nanti hasil rumusan hari ini rapikan, kemudian kita undang para ahli bisa dalam bentuk workshop yang membahas secara menjurus terhadap RENSTRA Sekretariat Daerah ini agar RENSTRA yang kita susun ini dapat menjadi lebih baik lagi, dan sempurna
- sebagai pembanding, ada tenaga ahli yg mereview azwar anas menjabat bupati banyuwangi, mereview struktur organisasi, eselon 4 yang hanya sosialisasi, urusannya di efisiensi.
- Rencana kegiatan yang dibuat harus harus mensejahterakan masyarakat.
- perdebatan : persentasi kebijakan yg dibuat, perlu indikator baru, bahan kebijakan yang di siapkan.
- Seluruh Biro harus sudah bisa menguasai kebijakan masing-masing Biro kemudian terkait hal teknis turunkan penugasan ke staf yang berkompeten untuk ditindaklanjuti kemudian kepala biro dapat mengawal hingga seluruh biro dapat cepat merespon berbagai hal yang ada di internal biro
- Saat kita menerapkan RENSTRA ini nantinya kita berharap dapat menciptakan output review kebijakan baru yang bermanfaat
- sekretariat pelayanan internal dan eksternal, menarik isu2 PD dalam perumusan kebijakan.
- Alur pikir yang kita inginkan sudah berada dalam frame yang sama, bahwa dalam perumusan RENSTRA ini harus kita tajamkan narasinya agar lebih sempurna, namun perlu di apresiasi

bahwa alur pikirnya sudah sangat maju.

- RENSTRA ini hanya tiga tahun, dari 2024 – 2026, untuk target yang disusun, harus realistis, yang dapat di capai sesuai dengan rentang waktu yang ada.

RANGKUMAN:

- Posisi RENSTRA yang disusun oleh Seluruh perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada dibawah satu level indikator dari RPD(Rencana Pembangunan Daerah)
- Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan hasil pembahasan dari internal Sekretariat Daerah yang kemudian dibahas secara langsung pada Forum Perangkat Daerah
- Metode Perbaikan terhadap Rancangan RENSTRA Sekretariat Daerah ini diberlakukan secara langsung dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap beberapa hal yang masih perlu di kaji dan dilakukan pendalaman
- Rumusan dari rancangan RENSTRA Setda Prov Kaltim Tahun 2024 – 2026 setelah nantinya akan dibawa ke para ahli dalam bentuk workshop yang membahas secara menjurus terhadap RENSTRA Sekretariat Daerah agar dapat menyempurnakan khususnya pada nomenklatur yang ada di dalam RENSTRA Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Mengetahui,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian

Notulis,

Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP 19700805 199203 2 016

M. Aditya Rahman, S.ST., M.Si.
Penata
NIP 19840601 201101 1 001

LAMPIRAN 4

**HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari Rabu tanggal 1 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 yang disampaikan oleh tim penyusun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 01 Maret 2023
Jam : 08.00 WIB -Selesai
Tempat : Hotel Gren Alia Prapatan , Jakarta
Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

MENYEPAKATI

- | | |
|----------------|--|
| KESATU | : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. |
| KEDUA | : Rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. |
| KETIGA | : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. |
| KEEMPAT | : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini. |
| KELIMA | : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026. |

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Maret 2023

**KEPALA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PIMPINAN SIDANG FORUM
PERANGKAT DAERAH**

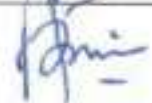
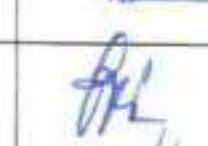
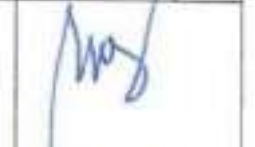


Dra. SRI WAHYUNI., M.PP

Menyetujui.

Wakil Peserta Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022,

NO	NAMA	LEMBAGA / INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra.Sri Wahyuni., M.PP	Setda Prov. Kaltim	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
2	H. M. Syirajudin, S.H., M.T.	Setda Prov. Kaltim	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3	Ir. Ujang Rachmad, M.Si.	Setda Prov. Kaltim	Plt. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4	Ir. Riza Indra Riadi, M.Si.	Setda Prov. Kaltim	Asisten Administrasi Umum	
5	Imanudin, SH.,MH	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
6	Yusliando, S.T	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Plt.Kepala Badan	
7	Deni Sutrisno. M.Si	Badan Kepegawian Daerah	Kepala Badan	
8	Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kepala Biro	
9	Suparmi, S.H., M.H.	Biro Hukum	Kepala Biro	
10	H. Iwan Darmawan, Ak., MM., AAP., CRMO, CA.	Biro Perekonomian	Kepala Biro	

11	Ir. H. Irhamsyah, S.T., M.T.	Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Biro	
12	Buyung Dodi Gunawan, S.T., M.M.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Biro	
13	Hj. Nani Nuraini, S.T.,M.T	Biro Organisasi	Kepala Bagian Biro Organisasi	
14	Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si.	Biro Umum	Kepala Biro	
15	Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos., M.Si.	Biro Administrasi Pimpinan	Kepala Biro	
16	Yudha Pranoto, S.E	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	
17	dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ.M.Kes, MARS.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	
18	Ir. E.A. Rafiddin Rizal, S.T.,M.Si.,IPM	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	
19	H.Joko Istanto, S.P.,M.Si	Dinas Kehutanan	Kepala Dinas	
20	dr.David H.M.,Sp.OT	RSUD Abdul Wahab Sjahranie	Direktur	
21	Mahlan	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris	
22	Abdurrahman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Plt.Sekretaris	
23	Aris Munandar S.Stp.,M.Si	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Bagian	
24	Drs.Noor Fathoni.,M.Si	Dinas pariwisata	Kepala Bidang	
25	Hardiyanto.,S.E	Sekratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Bagian	
26	H.Irawan Aliwardana, AK.,M.Si	Inspektorat	Inspektur Pembantu	

27.	Hj. Ardiningsih	Setda Prov Kaltim	JF. AK Ahli Utama	
-----	-----------------	----------------------	----------------------	---

LAMPIRAN 5

Analisis SWOT dan Penyusunan Arah Kebijakan

Identifikasi dan Analisis Data Strategis Faktor Eksternal dan Internal

No.	Uraian	Sifat	Peringkat (1-4)	Nilai (1-10)	Poin	Urutan Sifat
Faktor Kunci Eksternal						
1.	Asisten I					
	a. Belum adanya perubahan atas Permendagri No. 18 Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah saat ini.	T	3	3	9	9
	b. Konsistensi penilaian atas LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setiap tahun.	T	4	3	12	2
	c. Masih banyaknya konflik pertanahan, batas wilayah, penetapan lokasi dan pendelegasian, serta penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	T	3	2	6	15
	d. Kebijakan dan regulasi yang sudah mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	O	3	2	6	13
	e. Sistem informasi perencanaan yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan	O	4	3	12	4
	f. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	O	3	3	9	8
2.	Asisten II					
	a. Kinerja BUMD yang baik.	O	2	3	6	15
	b. Tersedianya akses/infrastruktur yang memadai.	O	3	2	6	11
	c. Tersedianya jalur transmisi/jaringan PLN.	O	3	3	9	9
	d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan energi alternatif (EBT).	T	4	3	12	5
	e. Mahalnya teknologi EBT.	T	3	2	6	16
	f. Kebijakan strategis Pemerintah Pusat untuk konservasi air tanah dan permukaan.	O	3	2	6	10
	g. Kinerja Ditjen Migas, SKS Migas, dan KKKs.	O	2	2	4	18
	h. Koordinasi antar instansi atau perangkat daerah terkait.	O	2	2	4	16
	i. Pelaksanaan Peraturan Daerah untuk penurunan emisi.	O	4	3	12	5

Identifikasi dan Analisis Data Strategis Faktor Eksternal dan Internal (Lanjutan)

No.	Uraian	Sifat	Peringkat (1-4)	Nilai (1-10)	Poin	Urutan Sifat
	j. Proses persiapan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Perangkat Daerah dengan pihak penyedia terkait sekaligus sebagai penanggungjawab.	O	2	2	4	17
	k. Kurangnya jumlah Tim Evaluator.	T	2	2	4	17

	l. Belum tertibnya administrasi pelaksanaan pembangunan.	T	4	3	12	3
	m. Belum diterapkannya kebijakan pelaksanaan pembangunan.	T	3	3	9	13
	n. Belum dilaksanakannya tertib pelaporan pelaksanaan pembangunan.	T	4	3	12	4
	o. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai teknologi digital.	T	3	2	6	14
	p. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.	T	3	4	12	8
3. Asisten III						
	a. Berjalannya pola mekanisme hubungan kerja antar Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.	O	4	3	12	6
	b. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pentingnya menyusun dokumen SAKIP.	T	4	4	16	1
	c. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pentingnya implementasi Reformasi Birokrasi.	T	3	4	12	7
	d. Belum optimalnya implementasi/penerapan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah.	T	3	3	9	11
	e. Skor kepuasan masyarakat mencapai target.	O	2	3	6	14
	f. Komitmen Pimpinan terhadap tugas dan fungsi biro.	O	4	4	16	1
	g. Adanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pelayanan biro.	O	3	2	6	12
	h. Tingginya permintaan fasilitasi pelayanan.	O	4	3	12	7
	i. Kerja sama biro-biro dalam pengumpulan data dukung dokumen perencanaan.	O	4	4	16	3
	j. Komitmen dan dukungan Pimpinan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.	O	4	4	16	2

Identifikasi dan Analisis Data Strategis Faktor Eksternal dan Internal (Lanjutan)

No.	Uraian	Sifat	Peringkat (1-4)	Nilai (1-10)	Poin	Urutan Sifat
	k. Belum optimalnya kewenangan kepegawaian.	T	3	3	9	10
	l. Sering terkendalanya kompilasi data dari biro-biro.	T	3	3	9	12
	m. Tidak sebandingnya jumlah sumber daya manusia dengan tuntutan pekerjaan.	T	4	3	12	6
	Total Nilai			100		
Faktor Kunci Internal						
1. Asisten I						
	a. Semua IKK sesuai kewenangan sudah dilaporkan oleh Perangkat Daerah dan dikompilasi dalam LPPD.	S	3	4	12	7
	b. Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang terbatas.	W	2	2	4	13
	c. Jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monev pelaksanaan kebijakan yang tepat dan akurat.	S	3	3	9	12

	d. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monev pelaksanaan kebijakan yang tepat dan akurat.	W	3	3	9	11
	e. Perencanaan pelaksanaan yang belum mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	W	3	3	9	9
	f. Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia tentang penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.	W	4	3	12	5
2.	Asisten II					
	a. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi serta sumber daya manusia yang kurang secara kualitas maupun kuantitas.	W	3	3	9	12
	b. Belum lengkapnya data dan informasi terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian.	W	4	4	16	1

Identifikasi dan Analisis Data Strategis Faktor Eksternal dan Internal (Lanjutan)

No.	Uraian	Sifat	Peringkat (1-4)	Nilai (1-10)	Poin	Urutan Sifat
	c. Penyamaan persepsi antar pihak terkait tugas dan fungsi BUMD untuk peningkatan PAD.	S	3	4	12	8
	d. Kebijakan penyediaan listrik desa dan daerah terpencil di Kalimantan Timur.	S	4	3	12	3
	e. Kebijakan penggunaan EBT di kantor pemerintahan dan industri.	S	3	3	9	10
	f. Sosialisasi penggunaan EBT untuk ketenagalistrikan.	S	3	3	9	15
	g. Kebijakan strategis daerah pengelolaan air tanah dan permukaan.	S	3	4	12	9
	h. Regulasi dan koordinasi Pemerintah Daerah terkait dengan PI 10%.	S	4	3	12	4
	i. Regulasi terkait dengan upaya pelestarian Danau Kaskade Mahakam.	S	3	2	6	16
	j. Belum terbangunnya sinergitas data administrasi pembangunan.	W	4	4	16	4
	k. Belum optimalnya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.	W	4	4	16	2
	l. Fasilitasi terhadap penyediaan dan penunjang sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan.	S	3	4	12	5
3.	Asisten III					
	a. Jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam akuntabilitas kinerja.	S	4	5	20	2
	b. Inovasi dalam menunjang Reformasi Birokrasi masih rendah.	W	4	4	16	3
	c. Rendahnya upaya pelaksana kegiatan terhadap peningkatan kualitas layanan.	W	4	3	12	6
	d. Sarana dan prasarana yang mendukung.	S	3	3	9	14
	e. Sinergitas dan kolaborasi antar unit kerja yang semakin meningkat.	S	3	3	9	11

f. Terpenuhiya dokumen pendukung dalam evaluasi SAKIP.	S	4	5	20	1
g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Rencana Aksi per triwulan.	S	3	4	12	6
h. Komitmen pejabat dan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi.	S	3	3	9	13
i. Belum terintegrasinya pelayanan terhadap Pimpinan.	W	3	4	12	7

Identifikasi dan Analisis Data Strategis Faktor Eksternal dan Internal (Lanjutan)

No.	Uraian	Sifat	Peringkat (1-4)	Nilai (1-10)	Poin	Urutan Sifat
j.	Pelayanan belum berbasis teknologi informasi.	W	3	3	9	10
k.	Penghimpunan data-data belum berbasis teknologi informasi.	W	3	4	12	8
Total Nilai				100		

Sumber: Data primer diolah (2023)

Keterangan:

- S = Kekuatan, W = Kelemahan, O = Peluang, T = Ancaman, setiap sifat ditetapkan berdasarkan pemahaman dan pengalaman.
- Peringkat, 1 = sangat tidak berpengaruh, 2 = tidak berpengaruh, 3 = berpengaruh, 4 = sangat berpengaruh.
- Nilai, 1 (sangat tidak penting) sampai 10 (sangat penting), total nilai semua faktor eksternal dan internal tidak boleh melebihi angka 100.
- Poin = Nilai x Peringkat, poin tertinggi diberi nomor urut 1 dan seterusnya yang dikategorikan berdasarkan sifatnya.

Matriks IFE dan EFE

Faktor Internal		Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan				
1.	Terpenuhiya dokumen pendukung dalam evaluasi SAKIP.	0,09	4	0,36
2.	Jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam akuntabilitas kinerja.	0,08	4	0,32
3.	Kebijakan penyediaan listrik desa dan daerah terpencil di Kalimantan Timur.	0,06	3	0,18
4.	Regulasi dan koordinasi Pemerintah Daerah terkait dengan PI 10%.	0,04	3	0,12
5.	Fasilitasi terhadap penyediaan dan penunjang sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan.	0,05	3	0,15
6.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Rencana Aksi per triwulan.	0,06	3	0,18
7.	Semua IKK sesuai kewenangan sudah dilaporkan oleh Perangkat Daerah dan dikompilasi dalam LPPD.	0,04	3	0,12
8.	Penyamaan persepsi antar pihak terkait tugas dan fungsi BUMD untuk peningkatan PAD.	0,04	2	0,08
9.	Kebijakan strategis daerah pengelolaan air tanah dan permukaan.	0,04	2	0,08
10.	Kebijakan penggunaan EBT di kantor pemerintahan dan industri.	0,02	2	0,04
Sub Total		0,52		1,63
Kelemahan				
1.	Belum lengkapnya data dan informasi terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian.	0,07	4	0,28
2.	Belum optimalnya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.	0,07	3	0,21
3.	Inovasi dalam menunjang Reformasi Birokrasi masih rendah.	0,06	4	0,24

4. Belum terbangunnya sinergitas data administrasi pembangunan.	0,06	4	0,24
5. Keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia tentang penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.	0,05	4	0,20
6. Rendahnya upaya pelaksana kegiatan terhadap peningkatan kualitas layanan.	0,05	3	0,15
7. Belum terintegrasinya pelayanan terhadap Pimpinan.	0,05	3	0,15
8. Penghimpunan data-data belum berbasis teknologi informasi.	0,03	2	0,06
Kelemahan			
9. Perencanaan pelaksanaan yang belum mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	0,02	2	0,04
10. Pelayanan belum berbasis teknologi informasi.	0,02	2	0,04
Sub Total	0,48		1,61
Total	1		3,24
Selisih Skor			0,02
Peluang			
1. Komitmen Pimpinan terhadap tugas dan fungsi biro.	0,07	4	0,28
2. Komitmen dan dukungan Pimpinan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.	0,07	4	0,28
3. Kerja sama biro-biro dalam pengumpulan data dukung dokumen perencanaan.	0,06	3	0,18
4. Sistem informasi perencanaan yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan.	0,05	4	0,20
5. Pelaksanaan Peraturan Daerah untuk penurunan emisi.	0,05	4	0,20
6. Berjalannya pola mekanisme hubungan kerja antar Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya.	0,05	3	0,15
7. Tingginya permintaan fasilitasi pelayanan.	0,04	3	0,12
8. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	0,04	3	0,12
9. Tersedianya jalur transmisi/jaringan PLN.	0,02	3	0,06
10. Kebijakan strategis Pemerintah Pusat untuk konservasi air tanah dan permukaan.	0,02	3	0,06
Sub Total	0,47		1,65
Ancaman			
1. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pentingnya menyusun dokumen SAKIP.	0,08	4	0,32
2. Konsistensi penilaian atas LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setiap tahun.	0,06	4	0,24
3. Belum tertibnya administrasi pelaksanaan pembangunan.	0,06	4	0,24
4. Belum dilaksanakannya tertib pelaporan pelaksanaan pembangunan.	0,05	4	0,20
Ancaman			
5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan energi alternatif (EBT).	0,05	4	0,20
6. Tidak sebandingnya jumlah sumber daya manusia dengan tuntutan pekerjaan.	0,05	3	0,15
7. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pentingnya implementasi Reformasi Birokrasi.	0,05	4	0,20
8. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.	0,05	4	0,20
9. Belum adanya perubahan atas Permendagri No. 18 Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kewenangan Daerah saat ini.	0,04	3	0,12
10. Belum optimalnya kewenangan kepegawaian.	0,04	3	0,12
Sub Total	0,53		1,99
Total	1		3,64
Selisih Skor			0,34

Sumber: Data primer diolah (2023)

Catatan:

- Bobot merupakan nilai seberapa penting suatu faktor. Bobot ini ditentukan berdasarkan intuisi atau pengalaman. Total bobot untuk faktor eksternal dan internal harus sama dengan 1.
- Peringkat menunjukkan tingkat pengaruh setiap faktor, 4 = sangat berpengaruh, 3 = berpengaruh, 2 = tidak berpengaruh, 1 = sangat tidak berpengaruh.

Kesimpulan:

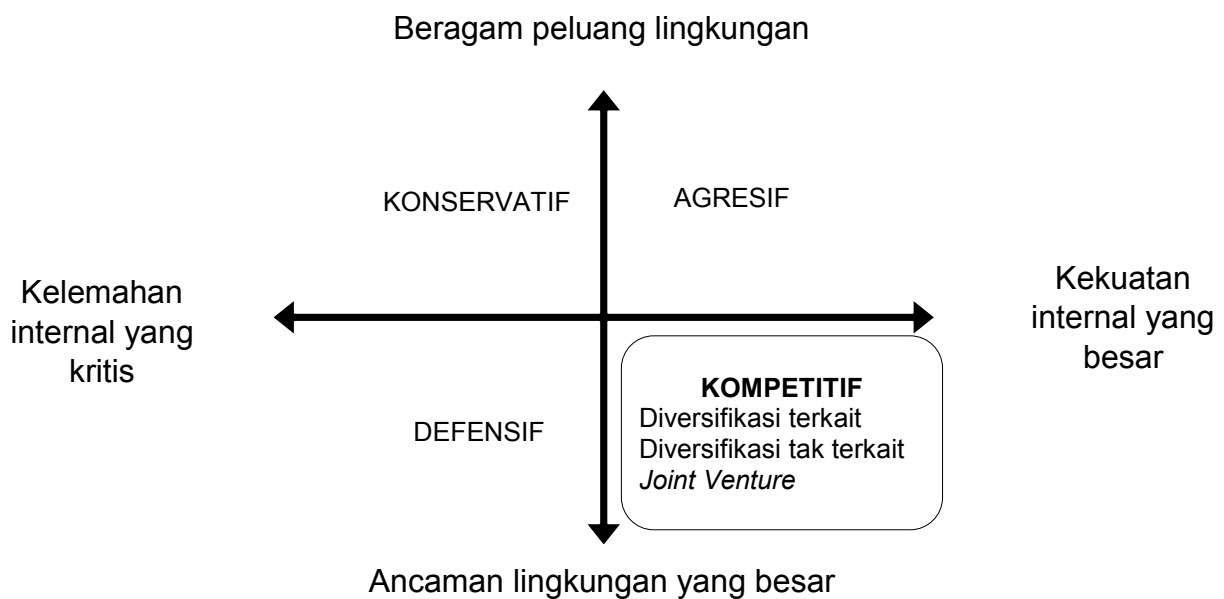
- Faktor kekuatan (skor 1,63) > faktor kelemahan (skor 1,61) dengan selisih skor 0,02.
- Faktor peluang (skor 1,65) < faktor ancaman (skor 1,99) dengan selisih skor 0,34.
- Faktor kekuatan (S) dan ancaman (T) lebih dominan, sehingga dipilih strategi ST.

Matriks IFE dan EFE

Nilai Internal	Nilai Eksternal	Strategi
$S > W (+)$	$O > T (+)$	Berkembang (Agresif)
$S < W (-)$	$O < T (-)$	Bertahan (Defensif)
$S > W (+)$ $1,63 > 1,61$	$O < T (-)$ $1,65 < 1,99$	Diversifikasi (Kompetitif)
$S < W (-)$	$O > T (+)$	Berbenah Diri (Konservatif)

Sumber: Data primer diolah (2023)

Diagram Analisis SWOT



Sumber: Data primer diolah (2023)

Matriks SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Peluang (O)	
Ancaman (T)	Strategi ST 1. Strategi 1: a. Arah Kebijakan 1.1 b. Arah Kebijakan 1.2 2. Strategi 2: a. Arah Kebijakan 2.1 b. Arah Kebijakan 2.2 3. dst	

Sumber: Data primer diolah (2023)

LAMPIRAN 6



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
 Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 000.7.2/161 /B.Adpm-I

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-
 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dalam rangka proses penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18);
 15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/0378/B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2023

Sekretaris Daerah,

SETDA
Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pembina Utama Madya
NIP 197012291990032003

Terbaca:

1. Kepala Biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR: ~~000-7.2~~ / 1161 /B.Adpm-I TENTANG TIM
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. |
| Sekretaris | : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur. |
| Anggota | : 1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | : 2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | : 3. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | : 4. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | 5. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | 7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | 8. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur |
| | 9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur. |
| | 10. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
-

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analisis Perencanaan).
 2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan).
 3. Rahmatullah Surya Nugraha, S.Tr.IP. (Analisis Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan).
 4. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan).
 5. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan).
 6. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan : Samarinda
 Pada tanggal : 11 Januari 2023

 **Sekretaris Daerah,**
Dra. Sri Wahyuni, M.PP
Pemblina Utama Madya
NIP 197012291990032003

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
 Home Page : <http://kalimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.7.2/ 0444 /B. Adpim-I

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dalam rangka proses penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

- d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18);
 15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/0378/B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Surat Plt. Kepala Badan Perencanaan
16. Pembangunan Daerah Prov. Kaltim Nomor
0007/301/Bapp-II tentang Substansi Pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Tim Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :
- Tugas-tugas kepanitiaan sebagai narasumber, moderator, pembawa acara, rohaniwan serta pelaksanaan tugas lainnya dalam rangka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- KETIGA :** Panitia Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : ~~17~~ Februari 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,



Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19710808 199103 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 000.7.2/ 0444 /B.Adpirn-I, TENTANG PANITIA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PERSONIL PANITIA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

- | | |
|---------|--|
| | Narasumber 1 |
| | Narasumber 2 |
| | Moderator |
| | Pembawa Acara |
| | Rohaniwan |
| Anggota | : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda Prov. Kaltim. |
| | 2. Analis Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim. |
| | 3. M. Aditya Rahman, S.ST, M.Si. (Analis Perencanaan). |
| | 4. Eduardo Heyko, M.Si. (Analis Perencanaan dan Pelaporan). |
| | 5. Rahmatullah Surya Nugraha, S.Tr.IP. (Analis Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan). |
| | 6. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan). |
| | 7. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan). |
| | 8. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim. |

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 27 Februari 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,


Hj. Syarifah Alawiyah, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19710808 199103 2 007

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 point KESATU Huruf a yang menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) Tahun yakni untuk Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) tahunan yang juga berpedoman pada RPD 2024 - 2026 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Revisi Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk pengembangan Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelebagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor1);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan selama 3 tahun kedepan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kepada masyarakat antara lain, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD
- 2.3. Kinerja Sekretariat DPRD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026;
- 4.2. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung Kalimantanb kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung Kalimantanb kepada Gubernur melalui Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

A. Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

- 3) Subbagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
 - 1) Subbagian Fasilitas Penganggaran;
 - 2) Subbagian Fasilitas Pengawasan; dan
 - 3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan dan fasilitas penganggaran dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitas penganggaran dan pengawasan;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan pengelolaan barang milik negara daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi persidangan dan risalah, hukum dan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan persidangan dan perundang-undangan;

- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program urusan persidangan dan perundang-undangan;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian kajian perundang-undangan;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian persidangan dan risalah;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian humas, protokol dan publikasi;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris dprd yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program fasilitasi penganggaran, dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi penganggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi pengawasan;

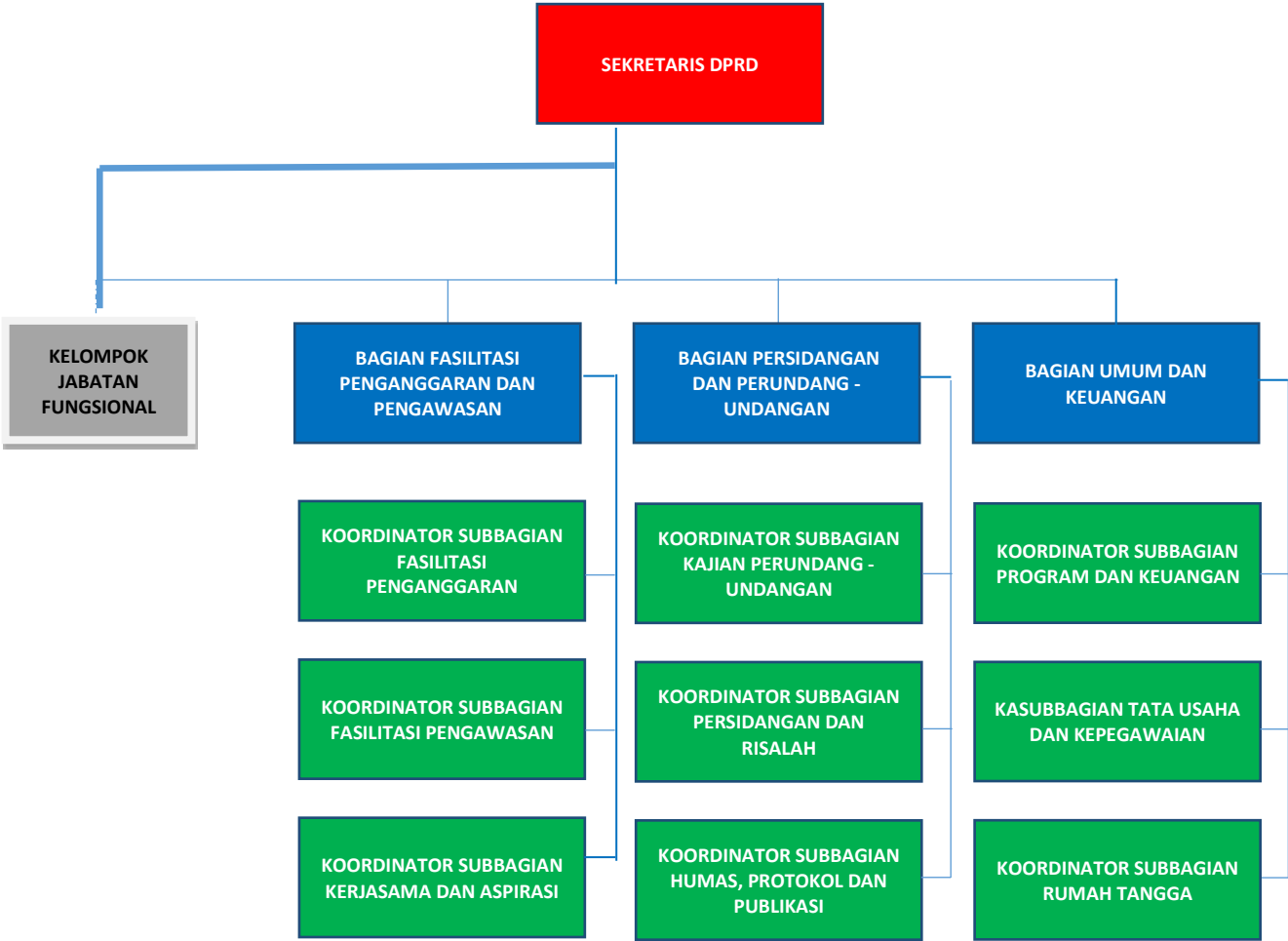
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian urusan kerjasama dan aspirasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan dan urusan kerjasama dan aspirasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Selain susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(Pergub Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020)**



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 283 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Klasifikasi ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan status Kepegawaian Tahun 2023

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	69
2.	Non ASN	214
	Jumlah	283

Tabel 2.2.2. Klasifikasi jumlah ASN dan PTT-PK setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

No.	URAIAN	Jumlah Pegawai	
		ASN	NON ASN
1	Sekretaris DPRD	1	-
2	Bagian Umum dan Keuangan	28	168
3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	18	33
4	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	22	13
	Jumlah	69	214

Tabel 2.2.3. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	32
3	Golongan II	28
4	Golongan I	4
	JUMLAH	69

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja berdasarkan Pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 3	0
2.	Strata 2	7
3.	Strata 1	17
4.	Diploma 3	3
5.	Diploma 1	0
6.	Sekolah Menengah Atas /Sederajat	39
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	2
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	1
	JUMLAH	69

Tabel 2.2.5 Klasifikasi Pegawai Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 2	2
2.	Strata 1	107
3.	Diploma 3	13
4.	Diploma 1	1
5.	Sekolah Menengah Atas	53
6.	Sekolah Menengah Kejuruan	34
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	4
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	0
	JUMLAH	214

b. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

Tabel 2.2.6 Asset/Modal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Peralatan / Perlengkapan	Jumlah
1	Komputer	195
2	Meja Kerja	309
3	Kursi Kerja	757
4	Tablet	70
5	Laptop	69
4	Printer	399

5	Video Tron	3
6	Mesin Genset	4
7	Kendaraan Dinas Roda 4	47
8	Kendaraan Dinas Roda 2	72
9	Kendaraan Dinas Roda 6	4
10	Meja Rapat	191
11	Kursi Rapat	587
12	Mesin Fotocopy	4
	Jumlah	2711

Sumber : Data Bagian Umum dan Keuangan, Januari 2023

2.3 KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7					
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-		-	-	77	77,75	80	81	82	83

Realisasi Capaian		Rasio Capaian		Keterangan
2021	2022	2021	2022	
8		9		10
78.07	81.71	97,59	100,88	

Dari tabel diatas diketahui bahwa target kinerja ditahun 2019 hingga tahun 2023 ada kenaikan target indikator kinerja utama dengan rasio capaian kinerja yang variatif setiap tahunnya. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut secara keseluruhan memperoleh angka bervariasi ada yang kurang dari target dan ada yang melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada perolehan capaian nilai IKM tahun 2022 telah melampaui target yang di tetapkan di

akhir Renstra. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanannya guna mendukung kinerja DPRD.

Setiap evaluasi, masukan dan rekomendasi dari anggota DPRD terhadap hasil IKM setiap tahunnya akan menjadi dasar/acuan bagi Sekretariat DPRD untuk berintropeksi dalam meningkatkan kinerjanya.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah **Pimpinan dan Anggota DPRD**, terhadap dukungan kinerja DPRD masih dalam kategori “baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya” sehingga menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah agar terus berpacu dalam meningkatkan kinerjanya, namun demikian terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD perlu dikembangkan dan dibina menjadi tim yang solid sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Perlunya motivasi kerja dalam rangka pengembangan SDM yang bervariasi;
3. Penyusunan Target Kinerja yang Terukur serta penilaian Kinerja yang rasional dan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
6. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur karena Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD

Provinsi Kalimantan Timur sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah bukan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD.

Pada bagian ini ditinjau kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah hanya ditinjau dari gambaran pelayan Perangkat Daerah yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kapabel dibidangnya;
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja guna mengoptimalkan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD ;
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Tanggap, Transparan dan Responsif).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi fasilitator yang menjembatani antara eksekutif dan legislatif dalam rangka proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	3	4
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya standar layanan yang diberikan kepada DPRD	Kurangnya koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD
		Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan DPRD
		Kurangnya pemahaman terkait prosedur administrasi keuangan
	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Minimnya pemahaman terhadap teknologi informasi sehingga belum banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD
		Lamban dalam memberikan informasi terupdate/perubahan kepada Anggota DPRD terkait regulasi maupun jadwal kegiatan kedewanan
		tidak adanya teknologi informasi internal terkait verifikasi SPJ kegiatan Anggota DPRD yang sudah selesai
	Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum tersedianya Nursery room dan play ground
		fasilitas peralatan kerja di ruangan anggota DPRD sering rusak
		Fasilitas ruang kerja Anggota DPRD yang sudah puluhan tahun mengalami kerusakan

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

1. Faktor internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (*Strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
2. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
4. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- 4) Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

2. Faktor eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Oppoturnities*)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
 - 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
 - 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
 - 4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - 5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- b. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- 3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

3. Pilihan Langkah Strategis

a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) - Peluang (*Opportunities*)

- 1) Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli.
- 2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

- b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) - Tantangan/Ancaman (*Threats*)
 - 1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
 - 2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.
- c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Oppoturnities*)
 - 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) - Kelemahan (*Weaknesses*)
 - 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
 - 2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan

organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT / TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- c. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026 serta memperhatikan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 2 (dua) tujuan jangka menengah untuk periode Tahun 2024 - 2026 yaitu :

- 1. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD;**
- 2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

Tujuan Sekretariat DPRD	Sasaran Sekretariat DPRD	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	1. Meningkatnya kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD
2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	2. Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Sekretariat DPRD dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN		
			2024	2025	2026
1.	TUJUAN RPD : I. Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas; II. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Baik (85) BB (78,50)	Baik (85,50) BB (79,30)	Baik (86) A (80,01)
2.	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD: I. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD II. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD Predikat Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	BAIK 83 BB (71)	BAIK 84 BB (72)	BAIK 85 BB (73)
3.	SASARAN SEKRETARIAT DPRD: I. Meningkatnya Kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	83	84	85

	II. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	BB (71)	BB (72)	BB (73)
--	--	--	---------	---------	---------

Dari tabel di atas dirumuskan bahwa indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sama yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah yaitu indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan target indikator kinerja utama di akhir Renstra Tahun 2024 - 2026 sebesar 85 dan Nilai AKIP Sekretariat Dewan dengan kategori BB (73).

4.2. CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Mewujudkan dukungan prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
						Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda
									Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan
									Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi
						Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan				
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun
									Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
							Terlaksananya Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS
									Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
									Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
									Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD
									Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD
							Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha	Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
									Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
									Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
									Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
									Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
									Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah
							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan orientasi DPRD
									Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
									Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan
									Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
									Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
									Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD
							Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laopran Hasil Kunjungan Kerja DPRD
									Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
									Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
									Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
							Terlaksananya Pelaksanaan dan	Persentase Pelaksanaan dan	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

							Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi		
Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
							Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas	Terlaksananya Fasilitasi. Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
									Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
							Terlaksananya Tugas-tugas AKD yang difasilitasi	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
									Tersusunnya Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
									Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
									Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
									Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
									Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah
							Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
									Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
									Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.
									Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
							Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
									Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
									Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD
									Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
							Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
									Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
									Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
									Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.
									Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Terlaksananya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
									Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
									Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang Disediakan.
									Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
									Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
									Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
									Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
							Tersedianya Aset/Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
									Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
									Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
									Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.
							Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
									Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
									Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
							Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.
									Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
									Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
									Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
									Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.
									Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
									Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
									Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
									Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Tujuan RPD	Indikator Tujuan	Tujuan Set. DPRD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan
							Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.
									Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.
									Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD.
							Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
									Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD
									Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
									Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk strategi yang akan dipilih.

Arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan sekretariat DPRD Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	Tujuan Sekretariat DPRD	Sasaran Sekretariat DPRD	Strategi Strategi Sekretariat DPRD	Arah Kebijakan
I. Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas; II. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel.	I. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD; II. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	1.Meningkatkan kualitas layanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	1. Peningkatan kualitas Layanan bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD
			2.Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan	2. Peningkatan kualitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, Bimtek serta sosialisasi peraturan perundang-undangan
			3.Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan	3. Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD
			4. Meningkatkan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya	4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

			5.Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka pelaksanaan administrasi umum dan keuangan	5. Peningkatan pelayanan umum dan keuangan serta Official website
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai *ultimate target* pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (“Permendagri No 70 Tahun 2019”) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik.

Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional maka berdasarkan pemikiran ini terbitlah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkrue antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Seiring dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di tahun 2024, dalam 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) program yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Capaian pengukuran kinerja terhadap 2 program yang sudah terbagi sesuai dengan peran dan fungsinya tersebut digunakan untuk merencanakan target dan mengevaluasi realisasi capaian yang ingin diperoleh secara maksimal beserta pengendaliannya 2 (dua) program ini diharapkan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi Gubernur lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan

antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi dengan kenaikan anggaran $\pm 1,5$ % setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2024 sampai dengan Tahun 2026
(Sesuai dengan PMD 90 tahun 2019 dan KEMENDAGRI 050-5889 tahun 2021)

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan								
Tujuan RPD : Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	85		85,50		86		
Tujuan RPD : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB 78,50		BB 79,30		A 80,01		
Tujuan Sekretariat DPRD I : Mewujudkan dukungan prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Predikat Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	Baik 83		Baik 84		Baik 85		
Tujuan Sekretariat DPRD II : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	BB 71		BB 72		BB 73		
Sasaran Sekretariat DPRD: Meningkatnya kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	83		84		85		
Sasaran Sekretariat DPRD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	BB 71		BB 72		BB 73		
Sekretariat DPRD			355.000.000.000		360.000.000.000		365.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan	83	49.536.128.657	84	50.000.000.000	85	51.500.000.000	
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	83	49.536.128.656	84	50.000.000.000	85	51.500.000.000	

	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	83	49.536.128.656	84	50.000.000.000	85	51.500.000.000	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	49.536.128.656	100	50.000.000.000	100	51.500.000.000	
Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	40.981.684.300	100	41.596.409.565	100	42.220.355.708	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	879.740.000	1	892.936.100	1	906.330.142	
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan perda	10	5.166.659.200	10	571.359.088	10	509.837.474	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	656.509.100	3	666.356.737	3	676.352.088	
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi.	3	592.536.000	3	601.424.040	3	610.445.401	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun.	1	271.580.000	1	275.653.700	1	279.788.506	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000	33.414.660.000	66000	38.588.679.900	66000	39.237.602.099	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100	8.098.774.000	100	8.220.255.610	100	8.343.559.444	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.	1	1.183.880.000	1	1.201.638.200	1	1.219.662.773	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	1	1.183.360.000	1	1.201.110.400	1	1.219.127.056	

Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD.	1	2.559.526.000	1	2.597.918.890	1	2.636.887.673	
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	2.390.240.000	1	2.426.093.600	1	2.462.485.004	
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.	1	235.036.000	1	238.561.540	1	242.139.963	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.	1	546.732.000	1	554.932.980	1	563.256.975	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100	17.319.107.000	100	21.993.205.605	100	22.389.318.369	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.	12	3.556.000.000	12	3.609.340.000	12	3.663.480.100	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.	12	4.676.000.000	12	4.746.140.000	12	4.817.332.100	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	3.064.000.000	12	3.109.960.000	12	3.156.609.400	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkenomian	12	3.769.000.000	12	3.825.535.000	12	3.882.918.025	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	1.235.000	12	2.253.525	12	2.302.328	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	411.360.000	1	417.530.400	1	423.793.356	

Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1.000.000	1	4.139.727.000	1	4.263.903.585	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1.840.512.000	1	2.142.719.680	1	2.178.979.475	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas	100	52.000.114.600	100	57.815.976.319	100	58.758.753.864	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	1.146.420.000	1	1.163.616.300	1	1.181.070.545	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9	4.306.500.000	9	4.543.357.500	9	4.614.091.763	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	10.026.654.600	12	10.177.054.419	12	10.329.710.235	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20	1.040.520.000	20	1.056.127.800	20	1.071.969.717	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	520.260.000	9	528.063.900	9	535.984.859	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	33.346.760.000	1	33.846.961.400	1	34.354.665.821	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1.613.000.000	1	6.500.795.000	1	6.671.260.925	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100	32.586.130.000	100	24.377.069.950	100	24.612.258.219	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laopran Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48	8.558.112.000	48	4.546.771.680	48	4.552.877.575	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	510.570.000	1	518.228.550	1	526.001.978	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	23.017.448.000	3	18.804.569.720	3	19.018.266.166	
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	33000	500.000.000	33000	507.500.000	33000	515.112.500	

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100	1.870.919.000	100	1.898.982.785	100	1.927.467.527	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	317.536.000	1	322.299.040	1	327.133.526	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1.553.383.000	1	1.576.683.745	1	1.600.334.001	
Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas	100	2.255.754.000	100	1.454.390.310	100	1.463.678.165	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	431.686.000	4	438.161.290	4	444.733.709	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	1.824.068.000	12	1.016.229.020	12	1.018.944.455	
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100	43.432.031.725	100	44.083.512.201	100	44.744.764.884	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	28.443.185.525	12	28.869.833.308	12	29.302.880.808	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3	59.400.000	3	60.291.000	3	61.195.365	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	5.670.000.000	6	5.755.050.000	6	5.841.375.750	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	393.743.000	12	399.649.145	12	405.643.882	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	8.865.703.200	6	8.998.688.748	6	9.133.669.079	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85	156.855.485.375	90	160.000.000.000	95	159.000.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.432.061.948	100	1.584.218.377	100	1.628.241.930	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	306.153.248	2	341.421.047	2	347.002.495	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	261.061.200	2	364.977.118	2	390.251.919	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	60.330.000	2	61.234.950	2	62.153.474	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	389.563.000	2	395.406.445	2	401.337.542	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	414.954.500	2	421.178.818	2	427.496.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	15.812.698.819	100	15.887.037.201	100	16.104.599.834	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	13.675.554.669	980	13.880.687.989	980	14.088.898.309	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.279.107.500	12	1.059.390.813	12	1.071.698.125	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	286.452.250	12	290.749.034	12	295.110.270	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	200.000.000	2	179.051.200	2	171.734.964	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.	12	300.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	71.584.400	1	77.158.166	1	77.158.166	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	100	1.105.384.400	100	1.121.965.166	100	1.138.794.643	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	138.660.000	2	140.739.900	2	142.850.999	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	843.124.400	4	855.771.266	4	868.607.835	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	23.600.000	1	25.454.000	1	27.335.810	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.670.370.441	100	1.767.522.557	100	1.795.116.843	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.	300	66.100.000	300	67.091.500	300	68.097.873	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	195.200.000	1	198.128.000	1	201.099.920	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	2	300.528.000	2	305.035.920	2	309.611.459	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	65.183.441	1	62.027.752	1	62.896.166	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.	1	250.000.000	1	329.980.000	1	336.073.150	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	347.650.000	41	352.864.750	41	358.157.721	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	291.575.000	60	295.948.625	60	300.387.854	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	154.134.000	10	156.446.010	10	158.792.700	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.876.445.400	100	4.198.782.081	100	4.249.703.814	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	20	199.735.100	30	202.731.127	40	205.772.094	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	12	1.289.250.000	12	1.308.588.750	12	1.328.217.581	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.	5	1.750.000.000	5	1.026.250.000	5	1.030.393.750	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	10	296.677.300	10	301.127.460	10	305.644.372	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	478.335.500	12	485.510.533	12	492.793.191	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.200.000	1	5.278.000	1	5.357.170	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	570.912.500	1	579.476.188	1	588.168.331	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3	232.335.000	3	235.820.025	3	239.357.325	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	29.879.375.500	100	24.724.376.133	100	22.657.566.257	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	4	2.908.000.000	4	2.898.430.000	4	1.587.480.932	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	3.213.800.000	4	2.312.007.000	4	1.332.437.105	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	2	1.000.000.000	2	1.015.000.000	2	1.030.225.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	70	5.957.575.500	50	1.946.939.133	50	1.914.643.220	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	2	16.800.000.000	2	16.552.000.000	2	16.792.780.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100	21.336.520.000	100	21.793.656.105	100	21.065.167.551	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	12	15.560.000	12	74.593.400	12	76.594.301	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12	6.075.760.800	12	7.208.719.597	12	6.275.028.006	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	3	693.725.200	4	115.525.878	4	108.429.688	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	14.551.474.000	12	14.394.817.230	12	14.605.115.555	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100	8.672.179.300	100	9.202.261.990	100	9.346.295.920	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	10	745.898.000	10	757.086.470	10	768.442.767	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	75	1.765.034.200	83	1.791.509.713	91	1.818.382.359	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	9.750.000	1	9.896.250	1	10.044.694	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	1396	2.548.407.900	1456	2.586.634.019	1500	2.625.433.529	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.	6	1.802.822.000	6	1.829.864.330	6	1.857.312.295	
Pemeliharaan Aset Tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara.	5	60.000.000	5	60.900.000	5	61.813.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	6	1.360.267.200	7	1.780.671.208	7	1.813.381.276	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1	200.000.000	1	203.000.000	1	206.045.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	1	180.000.000	1	182.700.000	1	185.440.500	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	54.672.559.567	100	60.637.516.841	100	61.624.252.627	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.	770	52.413.607.567	770	58.344.680.561	770	59.297.023.802	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.	6	1.645.460.000	3	1.670.141.900	3	1.695.194.029	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD.	55	613.492.000	55	622.694.380	55	632.034.796	
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100	17.397.890.000	100	19.082.663.550	100	19.390.260.581	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4	24.955.000	4	860.529.325	4	885.965.265	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	195.108.000	12	198.034.620	12	201.005.139	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.	12	11.129.707.000	12	11.885.257.805	12	12.072.365.750	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	6.048.120.000	4	6.138.841.800	4	6.230.924.427	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEKRETARIATAN DPRD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, indikator kinerja Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Sebagaimana Tujuan 4 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026:

“Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”, dengan indikator tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) **“INDEKS REFORMASI BIROKRASI”** dan masuk pada sasaran 11 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu **“Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas”** dan dengan indikator sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dengan indikator tujuan Renstra **“Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”** dan sasaran Renstra Perangkat Daerah **“Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD”** dan **“Terwujudnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”** dengan indikator sasaran Renstra **“Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”** serta **“Nilai AKIP Sekretariat Dewan”**.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, maka indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang baru merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja Perangkat Daerah akan dituangkan sebagaimana Tabel 7.1 dibawah ini diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81,71		83	84	85	85
2.	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Predikat	BB (70,15)		BB (71)	BB (72)	BB (73)	BB (73)

BAB VIII

PENUTUP

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2. KAIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 3 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kesiambungan antara Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

3. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung suksesnya Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 21 Mei 2023

Sekretaris,

Dra. Hj. Norhayati US,. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660531 198609 2 001

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Hal ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diinstruksikan untuk melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan tantangan, peluang, permasalahan dan isu strategis dan memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu masa perencanaan Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan guna menghasilkan perencanaan yang responsif, berkelanjutan, sinergis, berkeadilan, dan akuntabel.

Tujuan utama penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026. Terutama dengan mengoptimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, secara sistematis adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan,** memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,** menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran pelayanan.
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja dan memuat isu strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah serta *cascading* kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 tahun mendatang.

- BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai.
- BAB VIII Penutup,** berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;

- 8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

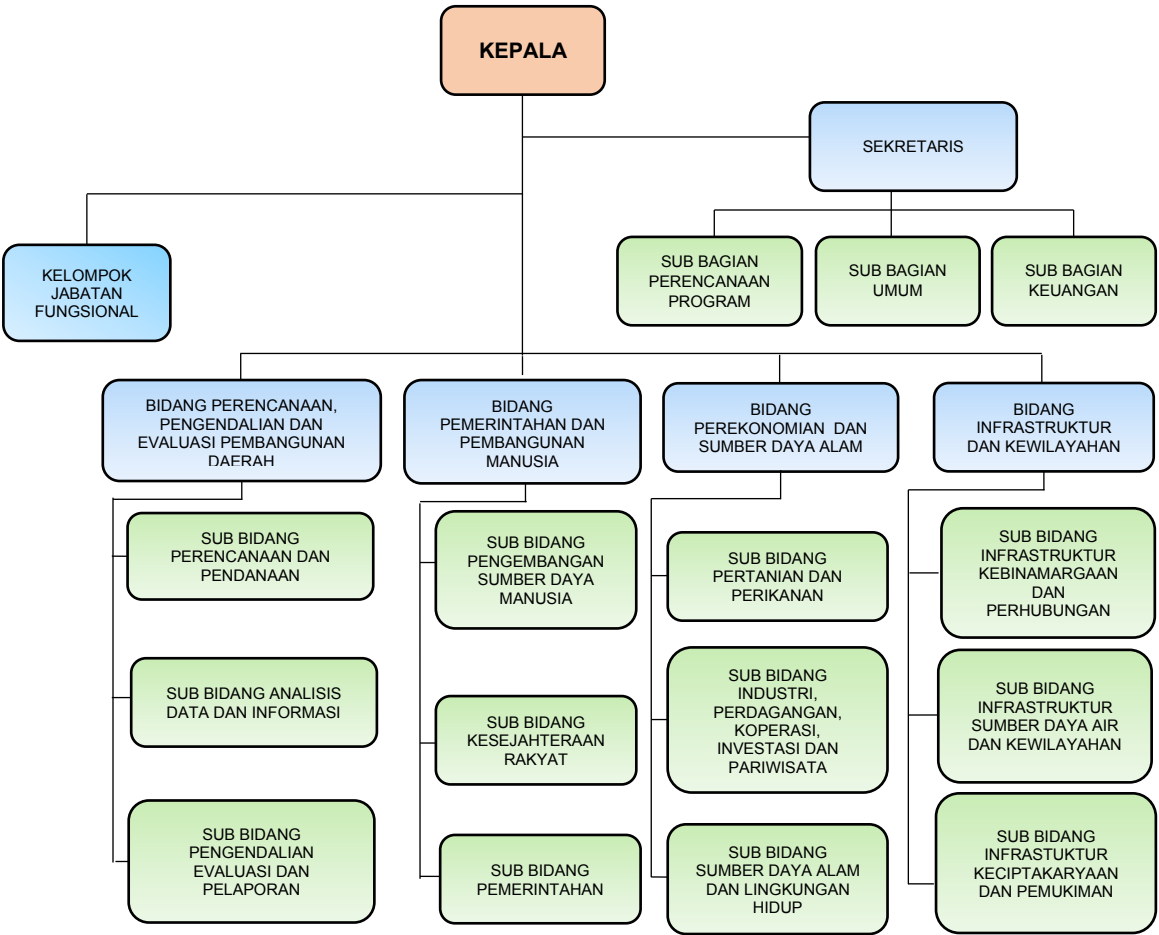
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Subbidang Pemerintahan.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
 2. Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata; dan
 3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
 1. Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 2. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan; dan
 3. Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Tahun 2022 terjadi penyetaraan jabatan administrasi (Jabatan Pengawas) kedalam jabatan fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Adapun jabatan pengawas dilingkungan Bappeda Prov. Kaltim yang mengalami penyetaraan yaitu seluruh Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Keuangan, sehingga pejabat struktural dilevel Esselon IV atau jabatan pengawas hanya diisi Kepala Subbagian di Sekretariat, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Perencanaan Program. Dibawah ini adalah Gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan timur Nomor 11 Tahun 2020.

Gambar II.1
Struktur Organisasi



2.1.4 Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

1. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan perlengkapan, administrasi keuangan,

pengelolaan aset, dan pengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Prov. Kaltim

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyediaan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik negara/daerah.

Subbagian pada Sekretariat :

- 1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- 3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, analisis, perumusan, kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan perencanaan teknis bidang pembangunan daerah.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan peraturan teknis subbidang analisis data dan informasi;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya

Subbidang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan dan pendanaan.
- 2) Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi,

analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan analisis data dan informasi.

- 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pemantauan terhadap pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi subbidang – subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kesejahteraan rakyat;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemerintahan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; dan

- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia :

- 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengaturan teknis dalam pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kesejahteraan rakyat.
- 3) Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemerintahan.

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi subbidang-subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian dan perikanan;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang pertanian dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

- 1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dan perikanan.
- 2) Subbidang Industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.
- 3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

F. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang prasarana wilayah.
- 2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi subbidang – subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur keciptakarya dan permukiman;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan, infrastruktur keciptakarya dan permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :

- 1) Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan.
- 2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan.
- 3) Subbidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dan permukiman.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Bappeda, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pemimpin dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Tembusan Laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Bappeda, wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan peta proses bisnis ;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

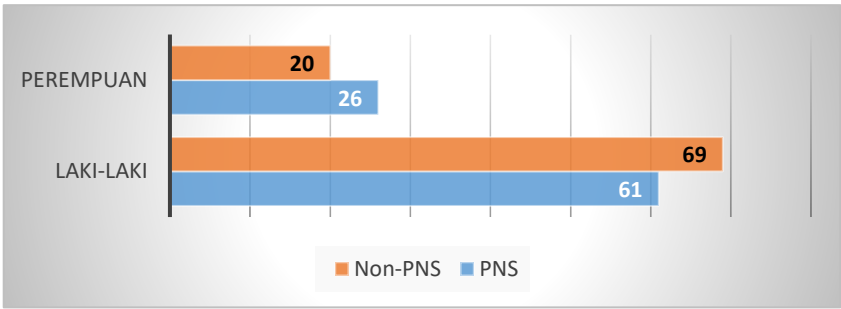
Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat ditentukan pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sampai dengan Maret 2023, jumlah pegawai yang bekerja di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) orang Pegawai PNS dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang Pegawai Non-PNS, sehingga jumlah sumber daya manusia di Bappeda sejumlah 176 orang. Rekapitulasi sumber daya manusia pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tersaji dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diplo-ma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kepala Badan	1		1					1				
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang	4		3	1			4					
Kasubbag	2		1	1			1	1				
Fungsional	9	3	2	10			4	8				
Pelaksana	44	23	1	50	14	2	3	21	4	37		2
Jumlah PNS	61	26	9	62	14	2	13	31	4	37		2
Jumlah Pegawai Non-PNS	69	20					3	49	3	33		1
Jumlah PNS + Non-PNS	130	46	9	62	14	2	16	80	7	70		3

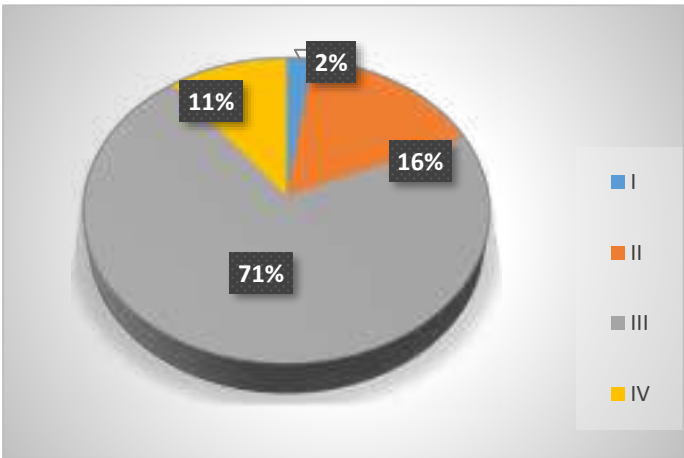
Dari Tabel II.1 dapat dilihat berdasarkan komposisi jabatan struktural, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, kemudian Jabatan Administrator sebanyak 5 (Lima) Orang terdiri dari 1 (satu) Orang Sekretaris dan 4 (Empat) Orang Kepala Bidang, Pejabat Pengawas terdiri dari 2 (dua) Orang yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepala Sub Bagian Umum, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda terdapat sebanyak 11 Orang serta Fungsional Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 1 (Satu) Orang.

Gambar II.2
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



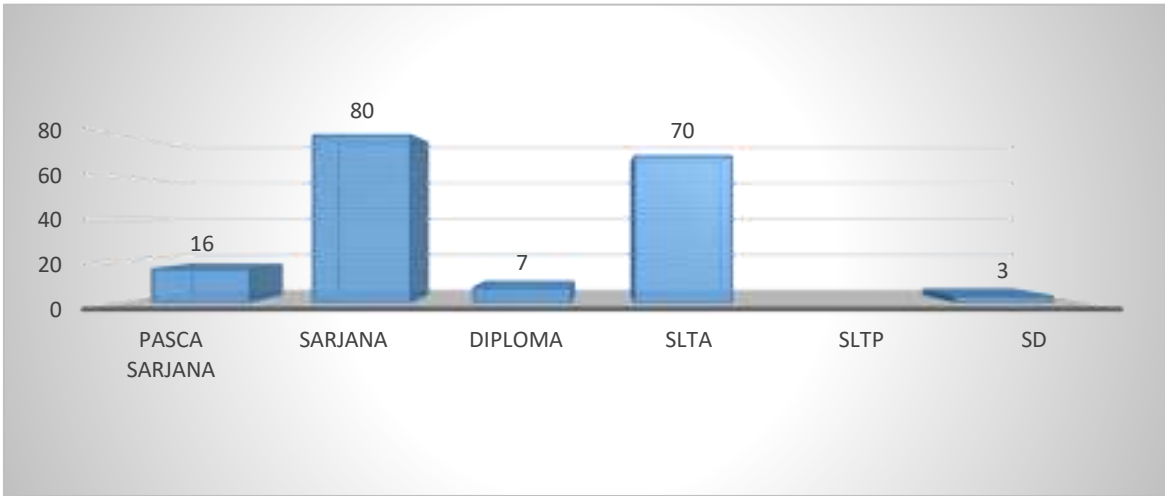
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non-PNS. Dari Gambar II.2 diatas berdasarkan pada jenis kelamin PNS Pria berjumlah 61 orang dan PNS Wanita berjumlah 26 orang yang ditempatkan pada seluruh bidang dan Sekretariat di lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selain PNS terdapat pula Pegawai Non-PNS yang ditempatkan di seluruh bidang dan sekretariat untuk membantu tugas dan fungsi di masing-masing bidang dan sekretariat.

Gambar II.3
Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Golongan Tahun 2023



Berdasarkan golongan pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersaji pada gambar II.3 terdapat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV berjumlah 9 orang (11%), Golongan III berjumlah 62 orang (71%), Golongan II berjumlah 14 orang (16%) dan Golongan I berjumlah 2 orang (2%).

Gambar II.4
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan tingkat pendidikan, secara keseluruhan Pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) dengan total sebanyak 80 orang (45,5%), kemudian disusul oleh tingkat pendidikan SLTA sebanyak 70 Orang (39,8%), tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 16 Orang (9,14%), tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 7 Orang (3,9%) dan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 Orang (1,7%)

2.2.2 Aset dan Modal Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi berupa aset dan modal meliputi mebeler, peralatan elektronik dan komputer, alat komunikasi serta alat transportasi yang memadai dan dalam kondisi yang baik. Secara garis besar, aset dan modal Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tersaji pada tabel II.5 sebagai berikut :

Tabel II.5
Aset dan Modal Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
1	Komputer	139
2	Laptop	281
3	Mini PC	31
4	Scanner	14
5	AC Split	96
6	AC Central	5
7	AC Casette	12
8	Printer	121
9	Kursi Kayu / Busa	7
10	Kursi Kerja	21
11	Mesin Fotocopy	9
12	Lemari Arsip	102
13	Mesin Penghancur Kertas	14
14	Meja Resepsionis	20
15	Kursi Tamu	32
16	Meja Tamu	26
17	Meja Kecil Samping	3
18	TV	33
19	Telephone Pabx	2
20	Meja Kerja	66
21	Sekat Partisi Staf	87
22	Sekat Partisi Esselon IV	17
23	Lemari	25
24	Meja Bundar	3
25	Kursi Putar	30
26	Server CCTV	2
27	Brankas	4
28	Meja Rapat	93
29	Dispenser	7
30	Mesin Ketik	6
31	Kursi Rapat	530
32	Kipas Angin	7
33	Rak Buku	3
34	Peta Wilayah	1
35	Lambang Garuda Pancasila	1
36	Foto Presiden	1
37	Foto Wakil Presiden	1
38	Tiang Bendera	2
39	Sound System	1
40	Kursi Rapat Coklat	109
41	Kursi Rapat Biasa	63

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
42	Kursi Rapat Pimpinan	3
43	Meja Lipat	2
44	Router / Microbyte	1
45	Cisco Switch Atas	1
46	Cisco Switch Bawah	1
47	Mikrotik	1
48	IBM System X3650	1
49	Dell Power Edge R420	1
50	Meja Arsip	8
51	White Board	3
52	Telephon	8
53	Filling Kabinet 2 Laci	18
54	Filling Kabinet	9
55	PC Server	6
56	UPS	14
57	Filling Kabinet 3 Laci	3
58	Kursi Besi	219
59	Kursi Rapat Kayu	9
60	Foto Gubernur	2
61	Foto Wakil Gubernur	2
62	Meja Samping/Tambahan	1
63	Monitor CCTV	2
64	Meja Panjang Khusus TV	1
65	Sofa	1
66	Kursi Hadap	28
67	Meja Keamanan	1
68	Kursi	1172
69	Screen Proyektor	8
70	Proyektor	22
71	Meja Panjang	2
72	Power Amplifier	1
73	Meja Tambahan Kecil	1
74	Mixer	4
75	Kursi Rapat Pimpinan	8
76	Meja	424
77	Speaker Luar	2
78	Amplifier	1
79	Meja Makan	4
80	Kursi Makan	50

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
81	Meja Makan bundar	10
82	PC Karaoke	1
83	Microphone	84
84	Kendaraan Roda 4 (empat)	32
85	Kendaraan Roda 2 (dua)	45

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Fungsi utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rencana pembangunan daerah yang dihasilkan antara lain:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Fungsi lain dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai pelaksana monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Beberapa dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yaitu:

1. Dokumen Evaluasi RPJMD;
2. Dokumen Evaluasi RKPD;
3. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota;
4. Laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
5. Dokumen Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Selain dokumen terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, juga disusun dokumen-dokumen yang merupakan *output* dari pelaksanaan Kegiatan maupun Sub Kegiatan antara lain yaitu:

1. Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
2. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA- LH
3. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
5. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
7. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
8. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kebinamargaan dan Perhubungan
9. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
10. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Keciaptakaryaan, Perumahan, Permukiman dan Bina Konstruksi
11. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
12. Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
13. Laporan Penanggulangan Kemiskinan

Gambaran kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu/periode Renstra Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel II.6 dan Tabel II.7 sebagai berikut :

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi rencana program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	87	89				43,33	79,30				49,80	89,10			
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%)	85	89				83	75,00				97,65	84,27			
3	Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%)	63	67				80	81,48				126,98	121,61			
4	Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target (%)			65	85				43,09	93,75				66,29	110,29	
5	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%)			85	90				96,97	99,61				114,08	110,68	
6	Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)			86,88					87,5					100,71		
7	Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim (%)				79,46					79,6					100,18	
Rata-rata Rasio Capaian Indikator Kinerja												91,48	98,33	93,69	107,05	
Peringkat Kinerja												Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Selama periode Renstra 2019-2023, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengalami beberapa perubahan sasaran strategis beserta indikatornya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan rekapitulasi persandingan antara target, realisasi dan rasio capaian kinerja Bappeda selama periode Renstra 2019-2023 yang tersaji pada tabel 2.6 diatas terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran strategis dengan rata-rata rasio capaian indikator kinerja mendapatkan peringkat sangat baik, meskipun pada beberapa tahun awal perencanaan terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi ada kecenderungan perbaikan pencapaian target di tahun berikutnya.

Dari analisa yang dilakukan terhadap rekapitulasi capaian kinerja sasaran, beberapa faktor penghambat sehingga target kinerja sasaran strategis belum dapat tercapai pada tahun-tahun awal perencanaan strategis yaitu dikarenakan adanya perbedaan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan sebagian Kabupaten/Kota masih belum melakukan penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi dikarenakan belum menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dampaknya adalah sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dari Provinsi terhadap Kabupaten/Kota belum terlaksana secara optimal.

Faktor pendorong yang melatarbelakangi perbaikan dan peningkatan tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu antara lain :

1. Adanya dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian terkait sehingga memudahkan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan digunakannya Aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri untuk Tahapan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Kebijakan satu data Indonesia bersamaan dengan transformasi digital.

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selain dapat diukur dari ketercapaian sasaran strategis, juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Anggaran dan Realisasi Pendanaan disajikan dalam tabel II.7 sebagai berikut :

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Ang- garan	Real- sasi
Proporsi rencana program pengembangan daerah dan sinergi antar Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	25.606.435.000	15.326.911.500				25.262.745.049	13.764.062.464				98,66	89,10				-40,14	-45,51
Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	5.362.160.000	2.070.600.000				3.773.641.767	1.982.289.650				70,37	95,74				-61,38	-47,47
Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data	2.021.940.000	1.111.950.000				1.925.202.167	1.054.157.480				95,22	94,80				-45,01	-45,24
Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target			10.427.448.800	11.670.429.760				9.121.617.554	11.035.622.206				87,48	94,56		11,92	20,98
Persentase program/ kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			7.285.000.000	9.160.309.800				6.553.607.459	8.727.207.666				89,96	95,27		25,74	33,16
Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat			30.075.785.959					24.121.926.314					80,20				
Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim				31.258.257.956					26.530.832.674					84,88			

Rasio antara anggaran dan realisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019 sampai dengan 2022 berdasarkan Tabel II.4 dapat dikatakan baik dengan rata-rata rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 80,08%. Hanya saja beberapa sasaran rasionya mengalami fluktuasi, terutama pada periode tahun 2019 dan 2020 rata-rata pertumbuhan mendapatkan hasil minus (negatif) karena pada Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kali *Refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan Pandemi *Covid-19*. Pada periode tahun 2021 dan 2022 rata-rata pertumbuhan sudah mulai membaik dimana hal tersebut dipengaruhi oleh prosedur/mekanisme yang semakin baik dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya dan Pandemi *Covid-19* yang membatasi aktifitas sudah mulai mereda sehingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil telaahan terhadap KLHS, beberapa tantangan bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun masih terdapat sasaran strategis yang *redundant*.
- 2) Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound*)
- 3) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi).
- 4) Kualitas dan ketersediaan data masih perlu ditingkatkan.
- 5) Data hasil capaian program dan kegiatan belum tersedia tepat waktu.
- 6) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
- 7) Keterbatasan staf teknis terkait analisis, monitoring dan evaluasi
- 8) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- 1) Dalam mewujudkan sinergi pembangunan lintas sektor dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, diperlukan

peningkatan kapasitas pegawai Bappeda, sehingga Bappeda mampu berfungsi sebagai lembaga *Clearing House*. Sebagaimana pada level nasional, Kementerian PPN/Bappenas berperan menjadi *clearing house* dalam perencanaan pembangunan yang berwenang dalam menentukan prioritas pembangunan, persetujuan terhadap usulan Program dan Pendanaan. Sedangkan dalam aspek pengendalian perencanaan, *clearing house* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas serta menyusun rekomendasi-rekomendasi dalam upaya meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan program prioritas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Fungsi Kementerian PPN/Bappenas ini hendaknya juga dijalankan oleh lembaga perencana di daerah.

- 2) Pengintegrasian sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam satu Aplikasi/Sistem

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana dipetakan dalam tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya ketepatan mutu dan ketepatan waktu dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya penyusunan substansi materi rencana pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu
		Belum optimalnya dukungan ketersediaan serta pemanfaatan hasil analisis data dan informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
	Konsistensi antara dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana kerja perangkat daerah belum optimal	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
		Koordinasi Perencanaan antar bidang belum optimal
		Koordinasi perencanaan dengan perangkat daerah belum optimal

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Tingkat akuntabilitas kinerja Bappeda belum maksimal	Belum optimalnya kualitas tata kelola internal Bappeda	Pelaksanaan pengukuran dokumen perencanaan yang ditetapkan belum dilaksanakan secara baik
		Masih kurangnya kompetensi pegawai
		Pengelolaan BMD belum optimal

3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu

dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang saling terkait sebagaimana tersaji dalam tabel III.2 sebagai berikut :

Tabel III.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong							
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa					Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien		
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia			Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien		
Sasaran	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapasitas SDM		
Indikator Sasaran	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi	Kinerja proses pengendalian pembangunan nasional	Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Indeks RB	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang perencanaan pembangunan nasional	Integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

3.4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan

Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di

Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Kawasan Lindung Bawahan
2. Kawasan Lindung Setempat
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi
6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi
2. Kawasan peruntukan pertanian
3. Kawasan peruntukan perikanan
4. Kawasan peruntukan industri
5. Kawasan peruntukan pariwisata
6. Kawasan peruntukan pemukiman
7. Kawasan peruntukan pertambangan
8. Kawasan peruntukan lainnya

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

Dengan merujuk pada pemetaan permasalahan dan berdasarkan pada tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, maka dirumuskan isu - isu strategis yang menggambarkan persoalan/peluang untuk diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan sinergi lintas sektor dan daerah dalam perumusan perencanaan pembangunan;
2. Penyusunan perencanaan yang konsisten, responsif dan adaptif sesuai kebutuhan dan dinamika pembangunan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di Kalimantan Timur;
3. Menangkap peluang diakomodirnya prioritas daerah pada kebijakan jangka panjang dan menengah nasional termutakhir.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dilakukan selaras dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar strategis dan menjadi pedoman pada perumusan kinerja sebagai gambaran tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta memperhatikan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 2 (dua) tujuan jangka menengah untuk periode Tahun 2024 - 2026 yaitu :

- 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;**
- 2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.**

Tujuan pertama dimaknai bahwa Bappeda Provinsi Kalimantan Timur harus mampu menciptakan perencanaan yang berkualitas, menjamin pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan konsisten dengan yang telah ditetapkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tujuan kedua dimaksudkan dalam rangka penyelarasan *cascading*/penjenjangan kinerja antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pencapaian sasaran ke-11 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan indikator kinerja Nilai

Akuntabilitas Kinerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan kinerja strategis sesuai dengan tugas dan fungsi urusan yang diperoleh dari hasil (*Outcome*) program Perangkat Daerah. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Dengan memperhatikan hubungan logis dengan rumusan tujuan dan sebagai penjabaran dari tujuan, maka Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan)		Capaian Terkini (Tahun 2022)	Target		
				2024	2025	2026
Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		90,50	92,00	92,50	93,00
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	89,94	92,00	94,00	96,00
	2	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi (%)	89,00	91,00	93,00	95,00
	3	Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	76,56	80,00	85,00	90,00
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (poin)	78,10	78,50	79,30	80,01
	2	Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah (Indeks)	84,41	85,00	85,50	86,00
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	74,56	79,00	80,00	81,00
	2	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)	79,60	85,00	85,50	86,00

4.2 Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Penjabaran kinerja (*Cascading Kinerja*) merupakan proses penyelarasan kinerja secara vertikal dari level/unit yang lebih tinggi ke level/unit yang lebih rendah dan harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, serta secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). Rumusan *Cascading Kinerja* Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang menjabarkan Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output* beserta masing-masing indikatornya tersaji pada Tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2
Cascading Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indikator 1: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan Indikator 2: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD
								Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
								Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi
								Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
					Tersedianya hasil analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya hasil analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data pembangunan
								Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
			Persentase Program Prioritas yang Mencapai Target		Indikator 3: Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	Tersedianya hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
								Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
								Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
								Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
			Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Indikator 1: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Indikator 2: Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi
								Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
								Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
						Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
								Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
								Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
						Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Indikator 1 : Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indikator 2 : Persentase keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Bappeda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
								Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
						Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
								Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah		Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah			Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
								Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
								Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
								Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
								Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Tujuan (Ultimate Outcome)	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (Ultimate Outcome)	Indikator Sasaran	Sasaran Program (Intermediate Outcome)	Indikator Program	Sasaran Kegiatan (Immediate Outcome)	Indikator Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan (Output)	Indikator Sub Kegiatan
						Tersedianya pelayanan jasa penunjang	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
								Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan sehingga pencapaian kinerja tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Kinerja perangkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi perangkat daerah memahami lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan menentukan strategi serta arah kebijakan yang sesuai. Perangkat daerah harus dapat merespon peluang dari lingkungan eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, agar dapat mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi dengan langkah mengidentifikasi penyebab masalah pokok, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan, menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis serta melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat. Pernyataan arah dan kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dirumuskan melalui cara menghubungkan strategi kepada sasaran, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Renstra akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang dipilih akan diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan, program dan kegiatan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tersaji sebagaimana tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan fungsi Perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana pembangunan daerah antar waktu dan antar level pemerintahan	Optimalisasi proses penyusunan dan penyelerasan dokumen perencanaan pembangunan daerah antar waktu yang tepat mutu dan tepat waktu
			Optimalisasi analisis data dan informasi dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah
			Optimalisasi pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dalam upaya penyelerasan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah antar waktu dan antar level pemerintahan
		Mendorong konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah	Meningkatkan Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan
			Memaksimalkan Sinkronisasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan,	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Program,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dan memiliki pelayanan publik berkualitas	perangkat daerah	pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyediaan informasi Perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah
			Optimalisasi proses evaluasi rencana kerja perangkat daerah untuk ditindaklanjuti
			Peningkatan kompetensi pegawai
			Pengelolaan sarana dan prasarana kantor secara optimal
			Optimalisasi penyediaan layanan informasi dan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara lebih inovatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang dijabarkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

6.1 Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama, yakni pembentukan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah berkualitas. Berikut Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang disusun dengan berpedoman kepada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya :

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah difokuskan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam unsur penunjang urusan Perencanaan. Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi program tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), melaksanakan proses analisis, pembinaan dan pemanfaatan terhadap data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah serta melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah.

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk menyusun dan menjabarkan program jangka panjang (RPJPD) dan program jangka menengah (RPD) Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim serta menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi di setiap bidang dalam perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintah merupakan Program yang berfungsi memberikan pelayanan bagi organisasi perangkat daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan fungsi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi umum pada perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta pemeliharaan barang milik daerah.

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap Program mencakup:

A. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan:
 - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik

- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan profil pembangunan daerah provinsi
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait koordinasi dan sinkronisasi

Kegiatan dan Sub Kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terkait koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

C. Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, penunjang urusan pemerintah daerah. Program ini ada pula di SKPD lain, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Pengadaan Bahan logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.3 Indikator Pencapaian Kinerja dan Target

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada periode 3 (tiga) tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator hasil (*outcome*) yang menjadi indikator dari Program dan Kegiatan, sedangkan pada level Sub Kegiatan indikator berupa keluaran (*output*). Oleh karena itu, masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, target, pagu indikatif, unit kerja penanggung jawab serta lokasi pelaksanaan.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target serta pendanaan indikatif pada Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana tersaji pada tabel VI.1 berikut:

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												68.541.155.000		68.541.155.000		72.967.598.000		210.049.908.000		
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	4.361.909.000	100%	4.361.909.000	100%	4.361.909.000	100%	13.085.727.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah
									Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%	100%	4.361.904.100	100%	4.361.904.100	100%	4.361.904.100	100%	13.085.712.300		
									Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	4.361.900.000	100%	4.361.900.000	100%	4.361.900.000	100%	13.085.700.000		
		5	01	02	1	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	6.700.000.000	3 Dokumen	6.700.000.000	2 Dokumen	6.700.000.000	8 Dokumen	20.100.000.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhanjika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	N/A	2 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	02	1	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	590.000.000	2 Berita Acara	590.000.000	1 Berita Acara	590.000.000	5 Berita Acara	1.770.000.000		Samarinda, Balikpapan
		5	01	02	1	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	2 Berita Acara	750.000.000	2 Berita Acara	750.000.000	1 Berita Acara	750.000.000	5 Berita Acara	2.250.000.000		Samarinda, Balikpapan
		5	01	02	1	01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	4.360.000.000	3 Dokumen	4.360.000.000	2 Dokumen	4.360.000.000	8 Dokumen	13.080.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	110 Data dan Informasi	115 Data dan Informasi	1.800.000.000	120 Data dan Informasi	1.800.000.000	125 Data dan Informasi	1.800.000.000	360 Data dan Informasi	5.400.000.000	Sub Bidang Analisis Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	800.000.000	9 Dokumen	2.400.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	76 Orang	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	240 Orang	1.350.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	02	1	02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Orang	40 Orang	400.000.000	40 Orang	400.000.000	40 Orang	400.000.000	120 Orang	1.200.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	1 Buku	150.000.000	1 Buku	150.000.000	1 Buku	150.000.000	3 Buku	450.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	3 Dokumen	4.585.713.100	2 Dokumen	4.585.713.100	3 Dokumen	4.585.713.100	8 Dokumen	13.757.139.300	Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	3 Laporan	2.205.644.000	3 Laporan	2.205.644.000	2 Laporan	2.205.644.000	8 Laporan	6.616.932.000		Proivinsi dan Luar Daerah
		5	01	02	1	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	3 Laporan	1.463.733.000	3 Laporan	1.463.733.000	3 Laporan	1.463.733.000	9 Laporan	4.391.199.000		Semua Kabupaten/ Kota
		5	01	02	1	03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	2 Dokumen	3 Dokumen	916.336.100	3 Dokumen	916.336.100	3 Dokumen	916.336.100	9 Dokumen	2.749.008.300		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	100%	8.068.975.000	100%	8.068.975.000	100%	11.250.249.900	100%	27.388.199.900		Provinsi dan Luar Daerah
									Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	100%	8.068.970.000	100%	8.068.970.000	100%	11.250.245.000	100%	27.388.185.000		
		5	01	03	1	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	99,65%	100%	4.810.000.000	100%	4.810.000.000	100%	4.810.000.000	100%	14.430.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	500.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	10 Laporan	500.000.000	10 Laporan	500.000.000	10 Laporan	500.000.000	30 Laporan	1.500.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	10 Laporan	610.000.000	10 Laporan	610.000.000	10 Laporan	610.000.000	30 Laporan	1.830.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	N/A	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	6 Laporan	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	N/A	8 Dokumen	1.100.000.000	8 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.100.000.000	20 Dokumen	3.300.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	13 Laporan	600.000.000	13 Laporan	600.000.000	13 Laporan	600.000.000	39 Laporan	1.800.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	13 Laporan	500.000.000	13 Laporan	500.000.000	13 Laporan	500.000.000	39 Laporan	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	N/A	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	6 Laporan	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	99,51%	100%	7.827.945.000	100%	7.827.945.000	100%	14.190.494.900	100%	29.846.384.900	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	8 Dokumen	500.000.000	8 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	500.000.000	20 Dokumen	1.500.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	9 Laporan	180.000.000	9 Laporan	180.000.000	9 Laporan	180.000.000	27 Laporan	540.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	9 Laporan	315.000.000	9 Laporan	315.000.000	9 Laporan	315.000.000	27 Laporan	945.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	N/A	4 Laporan	1.010.000.000	3 Laporan	1.010.000.000	3 Laporan	1.010.000.000	10 Laporan	3.030.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	N/A	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.200.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	130.000.000	9 Laporan	390.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	3 Laporan	201.790.000	3 Laporan	201.790.000	3 Laporan	201.790.000	9 Laporan	605.370.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	N/A	5 Laporan	5.091.155.000	4 Laporan	5.091.155.000	4 Laporan	11.453.704.900	13 Laporan	21.636.014.900		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	10.500.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	03	1	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	4 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.100.000.000	2 Dokumen	1.100.000.000	10 Dokumen	3.300.000.000		Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	03	1	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	500.000.000	6 Laporan	1.500.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	2 Laporan	1.100.000.000	2 Laporan	1.100.000.000	2 Laporan	1.100.000.000	6 Laporan	3.300.000.000		Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua Kelurahan
		5	01	03	1	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	N/A	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	800.000.000	2 Laporan	800.000.000	6 Laporan	2.400.000.000		Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	5	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	75,88	80	37.442.315.900	82	38.142.496.900	85	35.675.921.000	85	110.760.733.800	Sekretariat	Provinsi dan Luar Daerah
									Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.875.181.000	100%	1.175.000.000	100%	1.705.469.000	100%	4.755.650.000		
		5	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95%	97%	1.499.953.000	98%	2.030.000.000	99%	2.060.000.000	99%	5.589.953.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	7 Dokumen	4.000.000.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	48.332.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	163.332.000	Subbagian Perencanaan Program	Samarinda
		5	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	48.905.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	163.905.000	Subbagian Perencanaan Program	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	167.190.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	175.000.000	3 Laporan	512.190.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	235.526.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	265.000.000	3 Laporan	750.526.000	Subbagian Perencanaan Program	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	96%	100%	16.395.921.000	100%	17.095.921.000	100%	17.595.921.000	100%	51.087.763.000	Subbagian Keuangan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang	90 Orang	15.300.000.000	90 Orang	16.000.000.000	90 Orang	16.500.000.000	270 Orang	47.800.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.921.000	1 Dokumen	1.060.921.000	1 Dokumen	1.060.921.000	3 Dokumen	3.182.763.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	36 Dokumen	30.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	10.000.000	18 Laporan	10.000.000	54 Laporan	30.000.000	Subbagian Keuangan	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000	Subbagian Keuangan	Samarinda
		5	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	N/A	7 Dokumen	275.000.000	7 Dokumen	275.000.000	7 Dokumen	175.000.000	21 Dokumen	725.000.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	350.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	12 Laporan	30.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	N/A	100%	1.875.181.000	100%	1.175.000.000	100%	1.705.469.000	100%	4.755.650.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4 Paket	700.181.000	-	-	3 Paket	530.469.000	7 Paket	1.230.650.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokume n	150.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	N/A	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	3 Laporan	75.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	80 Orang	1.000.000.000	80 Orang	1.000.000.000	80 Orang	1.000.000.000	240 Orang	3.000.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	95%	96%	3.075.058.000	97%	3.031.033.000	99%	3.280.000.000	99%	9.386.091.000	Subbagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100.035.000	22 Paket	100.035.000	35 Paket	200.000.000	79 Paket	400.070.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	182.595.000	6 Paket	182.595.000	6 Paket	200.000.000	18 Paket	565.190.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000	5 Paket	200.000.000	11 Paket	400.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	521.219.000	4 Paket	475.919.000	4 Paket	475.000.000	12 Paket	1.472.138.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	187.368.000	2 Paket	187.368.000	2 Paket	200.000.000	6 Paket	574.736.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.116.000	1 Dokumen	60.116.000	1 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	200.232.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	3 Laporan	4.500.000.000	Sub Bagian Umum	Provinsi dan Luar Daerah
		5	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	750.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	123.725.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	373.725.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000.000	1 Dokumen	2.310.000.000	1 Dokumen	2.010.000.000	3 Dokumen	8.180.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	-	-	2 Unit	1.000.000.000	-	-	2 Unit	1.000.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	4 Unit	1.500.000.000	4 Unit	1.500.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2 Paket	200.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	6 Unit	300.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	3 Unit	1.700.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	1 Unit	135.000.000	1 Unit	135.000.000	1 Unit	135.000.000	3 Unit	405.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	3.200.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	6 Unit	75.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	7.388.046.000	100%	7.575.735.000	100%	7.990.000.000	100%	22.953.781.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.612.311.000	1 Laporan	1.800.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	3 Laporan	5.412.311.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.760.735.000	1 Laporan	5.760.735.000	1 Laporan	5.975.000.000	3 Laporan	17.496.470.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	87%	90%	4.948.337.900	94%	5.824.807.900	98%	2.565.000.000	98%	12.838.145.800	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	107.497.000	2 Unit	65.000.000	4 Unit	75.000.000	8 Unit	247.497.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	833.360.000	31 Unit	950.000.000	35 Unit	1.000.000.000	97 Unit	2.783.360.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	272.412.500	20 Unit	19.200.000	20 Unit	20.000.000	60 Unit	311.612.500	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	328.154.000	30 Unit	144.448.000	30 Unit	145.000.000	90 Unit	617.602.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	3 Unit	170.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		K	Rp		
											K	RP	K	RP	K	RP				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	01	01	1	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.770.240.400	1 Unit	4.393.659.900	1 Unit	750.000.000	1 Unit	7.413.900.300	Sub Bagian Umum	Samarinda
		5	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	591.674.000	20 Unit	202.500.000	20 Unit	500.000.000	60 Unit	1.294.174.000	Sub Bagian Umum	Samarinda

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh peran strategis dan kontribusi setiap perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran dan fungsi strategis terhadap keberhasilan mengatasi permasalahan pokok dan pencapaian tujuan pembangunan melalui fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga bertanggungjawab untuk memastikan agar proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Pencapaian target dari tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan inilah yang akan menjadi kinerja dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2024-2026.

Kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan yang digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Penetapan Indikator dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur beserta cara perhitungan diuraikan dalam tabel VII.1 dan VII.2 sebagai berikut:

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2022)	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,5	92	92,5	93	93
2	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	89,94	92	94	96	96
3	Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	89	91	93	95	95
4	Persentase Program Prioritas Pembangunan yang mencapai target	76,56	80	85	90	90
5	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	74,56	79	80	81	81
6	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	79,60	85	85,50	86	86

Tabel VII.2
Cara Perhitungan Capaian IKU Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dalam RKPD : Jumlah program dalam RPJMD/RPD) x 100%	Range skor penilaian PPD terhadap Dokumen Kabupaten/Kota: ≤5,22 = 50 ; 5,23-5,72 = 70 ; 5,73-6,22 = 80 ; 6,23-7,22 = 90 ; ≥7,23 = 100.
		b. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	
		c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD/RPD) x 100%	
		d. Menghitung kesesuaian antara APBD dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	Range skor penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional): 17-24 indikator = 100; 13-16 indikator = 90; 10-13 indikator = 80; 8-10 indikator = 70; <8 indikator = 50
		e. Menghitung capaian program prioritas = (Jumlah Program Prioritas pembangunan daerah yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan) : (Jumlah seluruh Program Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan) x 100%	
		f. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota (Penilaian terhadap dokumen)	
		g. Hasil penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional)	
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = (20%*a)+(20%*b)+(20%*c)+(10%*d)+(10%*e)+(10%*f)+(10%*g)	

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator 1: Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = (Target tujuan, sasaran, dan program dalam RKPD) : (Target tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD/RPD) x 100%	
		b. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RENJA = (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RENJA yang sama dengan RKPD) : (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RKPD) x 100%	
		c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dan indikator dalam RENSTRA yang sama dengan RPJMD/RPD) : (Jumlah program dan indikator dalam RPJMD/RPD) x 100%	
		d. Menghitung kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD = (Jumlah sasaran RPJMD/RPD yang didukung oleh tujuan Renstra PD) : (Jumlah sasaran RPJMD/RPD) x 100%	
		Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah = (30%*a)+(30%*b)+(20%*c)+(20%*d)	
	Indikator 2: Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	a. Jumlah Rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah x 100%	
		b. Jumlah Kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi : Jumlah seluruh Kabupaten/Kota x 100%	
		c. Jumlah indikator sasaran provinsi yang mendapat dukungan program dari kabupaten/kota : jumlah indikator sasaran provinsi x 100%	
		Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi = (50%*a)+(25%*b)+(25%*c)	
	Indikator 3: Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	Jumlah Indikator Program Prioritas yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator program prioritas x 100%	

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indikator 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Menggunakan hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah	
	Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)	
		b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi	
		c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah = Jumlah NRR Tertimbang x 25	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target pencapaiannya. Dokumen Renstra juga disertai pagu indikatif dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sangat bergantung pada tingkat koordinasi dan komitmen dari setiap unit kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kapasitas sumberdaya manusia yang terus menerus meningkat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan strategis juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Disamping itu koordinasi antara Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat juga perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat tercapai.

Samarinda, Juni 2023

Kepala,

Yusliando
NIP. 196710091998031009

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Amanat dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa untuk Daerah yang masa berlaku RPJMD berakhir pada tahun 2023, agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024 – 2026, serta seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026.

Perencanaan strategis ini merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab serta sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada apakah organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visi-nya. Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian dan

melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi.

Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau ketidak mampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 No 54. Tambahan Lembaran Negara No 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.2 Isu Strategis Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
- 4.2 Cascading Kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok "Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi"

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;

- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD Badan Pendapatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD PPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Pendapatan Daerah di bidang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Retribusi, serta melaksanakan urusan ketatausahaan. Didalam melaksanakan tugasnya UPTD PPRD memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diatas komposisi struktur sebagai berikut :

A. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak;
 - Sub Bidang PKB dan BBNKB;
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;
 - Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi:
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan.

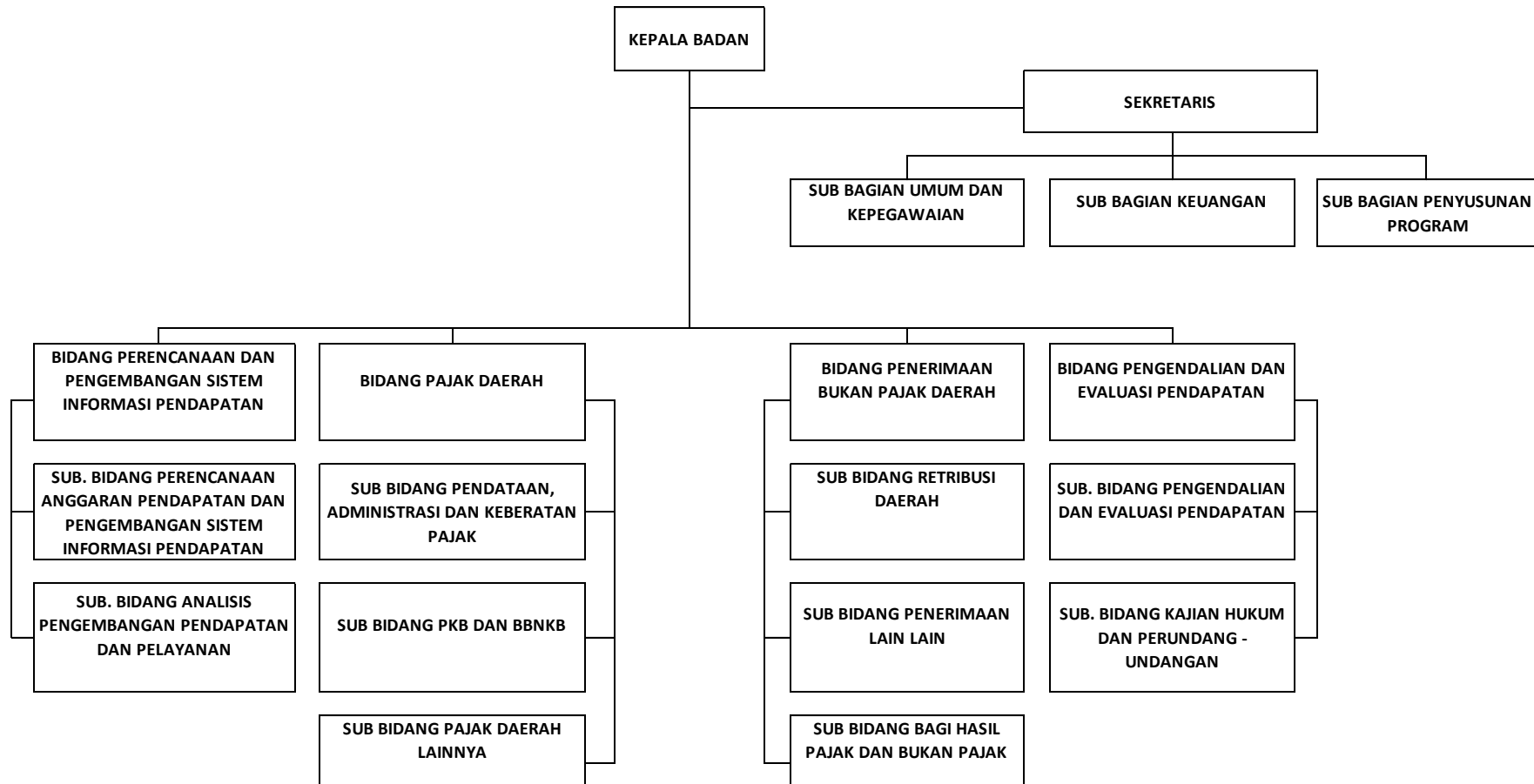
B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur (UPTD PPRD)

- a. Kepala UPTD
- b. Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan
- d. Seksi Pembukuan dan PenagihanKelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2022 mempunyai personil sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) orang yang bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9 UPTD Se-Kalimantan Timur yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II, III dan IV beserta 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang staf.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 14 (empat belas) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala UPTD, serta 40 (empat puluh) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubag, 10 (sepuluh) Kasubid dan 9 (sembilan) orang Kasubag di UPTD dan 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi di seluruh UPTD.

Tabel 2.1

REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN ESELON DAN GOLONGAN TAHUN 2022

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	ESELON				GOLONGAN				JUMLAH
		II	III	IV	STAF	I	II	III	IV	
1	BAPENDA PROV. KALTIM	1	5	12	40	2	20	23	13	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA		1	3	36	1	14	23	2	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN		1	3	27		23	4	4	31
4	UPTD PPRD PPU		1	3	18		17	3	2	22
5	UPTD PPRD KUTIM		1	3	23	1	20	3	3	27
6	UPTD PPRD KUKAR		1	3	36	2	25	11	2	40
7	UPTD PPRD KUBAR		1	3	24	0	22	5	1	28
8	UPTD PPRD BONTANG		1	3	16	2	11	6	1	20
9	UPTD PPRD BERAU		1	3	18	1	15	3	3	22
10	UPTD PPRD PASER		1	3	15	1	12	5	1	19
JUMLAH		1	14	39	253	10	179	86	32	307

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Daerah untuk pemenuhan pembiayaan daerah. Komposisi jumlah pegawai Bapenda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berikut adalah tabel komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 2.2

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2022**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	S2	S1	D4	D3	SMA/ Sederajat	SMP	SD	JUMLAH
1	BAPENDA PROV. KALTIM	18	15	0	10	12	1	2	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA	7	11		5	15	1	1	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN	4	1	0	18	8	0	0	31
4	UPTD PPRD PPU	2	2	0	14	3	1	0	22
5	UPTD PPRD KUTIM	3	1	0	17	5	0	1	27
6	UPTD PPRD KUKAR	1	10	0	17	10	0	2	40
7	UPTD PPRD KUBAR	1	3	1	17	6	0	0	28
8	UPTD PPRD BONTANG	1	5	0	9	3	1	1	20
9	UPTD PPRD BERAU	3	4	0	12	2	0	1	22
10	UPTD PPRD PASER	2	3	0	6	6	1	1	19
JUMLAH		42	55	1	125	70	5	9	307

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Komposisi pegawai Bapenda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 185 orang laki-laki atau 60,26% dan perempuan sebanyak 122 Orang atau 39,74% yang berarti jumlah pegawai laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah pegawai perempuan sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM BERDASARKAN
JENIS KELAMIN TAHUN
2022**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BAPENDA PROV. KALTIM	30	28	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA	24	16	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN	16	15	31
4	UPTD PPRD PPU	16	6	22
5	UPTD PPRD KUTIM	17	10	27
6	UPTD PPRD KUKAR	29	11	40
7	UPTD PPRD KUBAR	15	13	28
8	UPTD PPRD BONTANG	11	9	20
9	UPTD PPRD BERAU	16	6	22
10	UPTD PPRD PASER	11	8	19
JUMLAH		185	122	307

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sarana dan prasarana yang tersebar di Bapenda Provinsi dan seluruh UPT Bapenda se Kalimantan Timur. seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

DATA ASET BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA BARANG		JUMLAH / UNIT									
			Prov.	SMD	BPP	Kukar	Bontang	Kutim	Kubar	Paser	PPU	Berau
1	Tanah	Tanah Bangunan Kantor/Rumah	1	5	5	4	2	1	2	2	2	4
2	Gedung & Bangunan		8	9	23	15	9	15	16	6	13	11
3	Peralatan dan Mesin	Alat - Alat Besar	10	6	3	4	1	1	4	2	-	3
		Alat - Alat Angkutan	89	9	2	12	5	9	3	14	9	7
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	40	38	1	12	7	8	3	23	1	3
		Alat Pertanian	1	15	1	1	3	-	4	-		-
		Alat Kantor & Rumah Tangga	3699	1525	470	606	506	219	708	323	220	240
		Alat Studio & Alat Komunikasi	199	97	30	84	58	12	52	22	14	13
		Alat - Alat Kedokteran	11	-	1	-	-	-	3	4	-	-
		Alat Laboratorium	113	73	25	58	43	6	15	18	3	5
4	Aset Tetap Lainnya	Buku dan Perpustakaan	232	8	35	31	-	5	62	57	64	14
Jumlah			4.403	1.785	596	827	634	276	872	471	326	300

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan :

1. Pajak Daerah
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan
 - e) Pajak Rokok
2. Retribusi Daerah :
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Perusda Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
 - a) Bagian Laba Perusahaan Daerah
 - b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
 - c) Kontribusi Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a) Hasil Penjualan barang Milik Daerah
 - b) Penerimaan Jasa Giro
 - c) Penerimaan Bunga Deposito
 - d) Penerimaan TP/TGR
 - e) Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - g) Pendapatan Dari Pengembalian
 - h) Sumbangan Pihak Ketiga
5. Dana Perimbangan
 - a) Bagi Hasil Pajak
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan
 - 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - 3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps 21

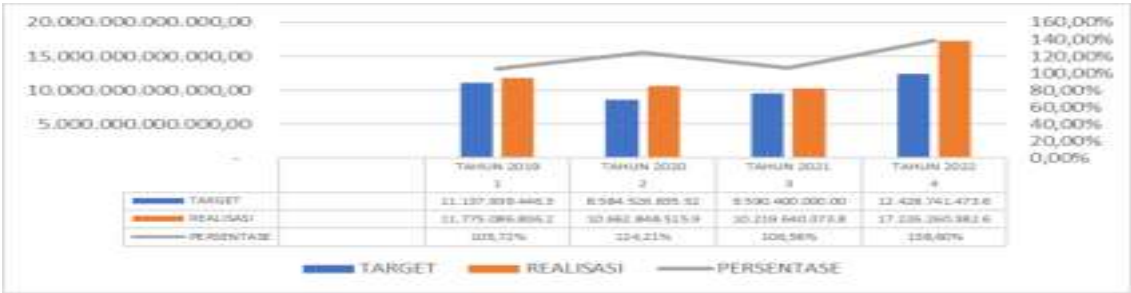
- b) Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Provisi Sumber Daya Hutan
 - 2) Landrent
 - 3) Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi
 - 4) Minyak Bumi
 - 5) Gas Alam
- c) Dana Alokasi Umum

2.3.2. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2022 sesuai dengan Tujuan Renstra Bapenda Provinsi Kaltim tahun 2019 – 2023 yaitu “Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah” dengan Sasarannya “Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah” dan “Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur” secara umum dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3

CAPAIAN KINERJA TUJUAN BAPENDA TAHUN 2019 S/D 2022



Tabel 2.5

CAPAIAN KINERJA SASARAN BAPENDA TAHUN 2019 S/D 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra PD			Realisasi			Proyeksi	Rasio Keberhasilan					Catatan
		2019-2020	2021	2022	2019-2020	2021	2022*	2023	2019	2020	2021	2022*	2023	
1	Persentase peningkatan pendanaan pembangunan daerah wilayah kabupaten	2,84	2,84		2,84	6,45			201,36	246,34	9,86	9,90	9,90	Realisasi Tahun 2021 tercapai pendanaan (sangat ID)
2	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.196.942.167,671	5.986.210.902,382	7.623.468.699,234				0,00	0,00	124,70	117,31	130,31	Realisasi masih dibawah pendanaan awal ID, Kaltim mengalami penurunan eksistensi pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022
3	Jumlah Realisasi Dana Transfer		4.110.457.452,129	5.052.407.698,182	5.898.972.547,333				0,00	0,00	93,33	106,88	100,00	

Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 – 2022 terhadap pendapatan masih besar yaitu 52 s/d 55 persen. Sedangkan Perimbangan Keuangan dari pemerintah pusat kedaerah dilihat dari tahun 2019 – 2022 sebesar 45 s/d 48 persen sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 4

KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH



Sumber data : Badan Pendapatan Prov. Kaltim

Dilihat dari gambar diatas kinerja pelayanan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 s/d 2022 terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya :

- a) Pada Tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.
- b) Konsumsi rumah tangga / daya beli masyarakat sebagai penopang ekonomi mengalami kontraksi sehingga berpengaruh pada penjualan / pembelian kendaraan bermotor.

Dari sisi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga terjadi fluktuasi sehingga menghambat jalannya kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5



Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 129.066,64 km² dengan 10 Kabupaten dan Kota, 103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.501.232 Jiwa. Sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

- 1. Masyarakat Umum
- 2. Perangkat Daerah yang mempunyai pendapatan
- 3. Perusahaan perusahaan yang mempunyai kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah provinsi.

Dalam rangka melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa tantangan, disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya :

Tantangan :

- a. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
- b. Perlunya optimalisasi manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.
- c. Tuntutan masyarakat terhadap aparaturnya yang bebas KKN.
- d. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan manajemen kinerja dan tuntutan pengembangan organisasi yang berkualitas dan tersedianya sumber daya aparaturnya yang berkompeten.
- e. Jumlah lifting migas yang menunjukkan angka penurunan, Harga dan Kurs rupiah terhadap dolar yang sulit diprediksi menjadikan penetapan asumsi DBH SDA dipatok pada angka yang aman.

Peluang :

- a. Dengan banyaknya pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan didaerah yg terpencil akan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.
- b. Peningkatan kerjasama dengan perbankan dalam rangka mendukung pengembangan model pembayaran pajak.
- c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim telah berinovasi dalam rangka pembayaran Pajak maupun Retribusi yang sudah berbasis Electronic Trading Platform (ETP) yang merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti pembayaran pajak melalui LinkAja, Tokopedia dan lainnya.
- d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

2.5. MITRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan mitra kerja antara lain yaitu:

- 1. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2. PT. Jasa Raharja
- 3. PT. Bankaltimtara
- 4. Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terdapat jenis – jenis layanan yang sudah dilakukan di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangan layanan / inovasi layanan seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6

JENIS – JENIS PELAYANAN

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN / KETERANGAN
1	SAMSAT PENUH	11
2	SAMSAT PEMBANTU	28
3	SAMSAT PAYMENT POINT	18
4	SAMSAT CORNER	3
5	SAMSAT KELILING	6
6	SAMSAT JELAJAH	2
7	SAMSAT DRIVE THRU	4
8	SAMSAT TERAPUNG	1
9	SAMSAT DESA	10
10	E-SAMSAT	BANKALTIMTARA, BNI, BANK MANDIRI, BCA, BTN, BRI SYARIAH, INDOMARET, PT.PEGADAIAN, PT. POS INDONESIA
11	SAMSAT DELIVERY POS (SADELPOS)	KANTOR POS SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, TENGGARONG, TANJUNG REDEB

Pada tahun 2019 s/d 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan beberapa pelayanan diantaranya :

- Layanan E Samsat Pegadaian, 10 Januari 2019.

- Samsat penuh Samarinda Seberang Kota Samarinda, 24 Oktober 2019.
- Samsat penuh Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, 4 Desember 2019.
- Samsat Mall Mesra Indah.
- Samsat penuh Long Ikis Kabupaten Paser, 2 Juli 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Palaran Kota Samarinda, 31 Agustus 2020.
- Samsat Pembantu Berbas Pantai Kota Bontang, 1 September 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Muara Komam Kabupaten Paser, 9 November 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Segah, Batu Putih, Tanjung Batu Kabupaten Berau, 19 November 2020.
- Samsat Paten Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, 30 November 2020.
- Layanan Samsat Penuh Jl. MT. Haryono Kota Samarinda, 29 Desember 2020.
- Cetak Online Digital (Condi) Simpator, Inovasi Terbaik Perangkat Daerah Kalimantan Timur dalam Kompetisi Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda) 2020.
- E-Samsat Bhabinkamtibnas.
- E-Samsat LinkAja.
- E Samsat Tokopedia.
- E Samsat Pay Bankaltimtara.
- Sistem Informasi Pemberitahuan Masa Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPAN JAJA).
- Jemput Pajak Online Melalui Operasional Kendaraan Kantor (JEMPOL OK).
- Pembuatan Aplikasi Pelaporan Elektronik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor E-WAPU.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan permasalahan dan menentukan isu strategis secara tepat dalam rangka mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi Tujuan dan Sasarannya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan.

Dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026, maka Renstra Bapenda Prov. Kaltim tahun 2024 – 2026 untuk memberikan dukungan arah dan sasaran dalam kinerjanya untuk mencapai target RPD Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

➤ Faktor Internal

A. Kekuatan

- Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.
- Jumlah dan lokasi Unit layanan yang tersebar diseluruh penjuru wilayah di Kalimantan Timur.
- Sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Sistem pembayaran pajak melalui digitalisasi yang sudah diterapkan.

B. Kelemahan

- Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang semakin berkurang khususnya yang berada didaerah yang jauh lokasinya.
- Sarana prasarana operasional peralatan dan perlengkapan yang perlu ditingkatkan secara terus menerus khususnya peralatan pelayanan.
- Sistem Basis Data Wajib Pajak yang belum maksimal.
- Belum dilakukan perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).
- Kurangnya pengawasan penjualan/distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Timur.

➤ **Faktor Eksternal**

A. Peluang

- Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.
- Perkembangan dinamika nasional dan internasional
- Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik.
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait.
- Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

B. Ancaman

- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
- Belum maksimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Kalimantan Timur yang potensial menyumbang pendapatan Retribusi Daerah.
- Kurangnya sanksi terhadap kelalaian menyetorkan Deviden ke Kas Daerah.

- Fluktuasi Dana Transfer yang tidak stabil karena kondisi harga minyak dunia dan kurs rupiah terhadap dolar.
- Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelaahan unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman baik dari internal maupun eksternal maka permasalahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

MASALAH POKOK :

- Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah
- Belum optimalnya pelayanan publik perangkat daerah
- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

MASALAH :

- Belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah berbasis digitalisasi
- Belum optimalnya kualitas Layanan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah

AKAR MASALAH :

- Belum optimalnya penyusunan perencanaan pendapatan daerah
- Menurunnya tarif PKB dan BBNKB
- Masih tingginya piutang pajak daerah
- Berkurangnya jenis pemungutan retribusi 13 menjadi 8 jenis
- Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi
- Belum tersedianya system informasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 1 Thn 2022
- Database berbasis digital belum aktual
- Belum terlaksananya Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- Proses Perencanaan dan Penganggaran serta pelaporan yang masih belum optimal
- Pemetaan SDM yang belum sesuai kompetensinya
- Penyediaan sarana dan prasarana belum memadai

3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan rencana strategis karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan berdasarkan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah dengan identifikasi secara nasional dan regional. Adapun isu strategis Bapenda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- ▣ Penerapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ▣ Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- ▣ Masih Rentannya Kemandirian Fiskal Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Yudikatif, Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten / Kota, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPD tahun 2026.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi melaksanakan **Tujuan ke 4 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”** dan **Sasaran ke 11 “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAklhak”** yang tertuang didalam RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim selama kurun waktu Tahun 2024 – 2026

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Indikator Tujuan.

Adapun indikator tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah *angka absolut* seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		2024	2025	2026
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah	Miliar Rp.	18,850	19,450	21,300

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Persen	100	100	100
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	9.510.000.000.000	10.335.000.000.000	11.235.000.000.000
2	Meningkatnya layanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM)	Skor	≥86,80	≥86,90	≥87,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akip	78,50	79,30	80,01

Formula perhitungan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

✚ Rasio Efektifitas :

Rasio Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$

Realisasi PAD : **Angka Absolut**

✚ Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM) :

IKM = $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

✚ Nilai Akip perangkat daerah : **Hasil Penilaian Inspektorat Daerah**

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit / pegawai yang lebih tinggi ke level unit / pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat proses penjabaran dan penyelarasan yang berawal dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1

CASCADING KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN



KEKURHAN		
Kegiatan Pengelolaan Pendataan Daerah Indikator : 1. Jumlah realisasi Pajal Daerah 2. Jumlah dokumen perencanaan pendataan pajal daerah 3. Jumlah Pelayanan Berwujud/ Jasa Integrasi menuju WIS/ISSBT 4. Jumlah sistem elektronik yang dikembangkan dan dibuat 5. Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengkajian dan pemantauan serta peninjauan dan penyelesaian pajal daerah 6. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Sumatera 7. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Kutai 8. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Kutim 9. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Kubar 10. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Balikpapan 11. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Bontang 12. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Penangin 13. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Paser 14. Jumlah realisasi penerimaan PIS, SPPIS dan AP WIS, Berau	Koordinasi dan Pengalokasian Perencanaan Daerah Indikator : 1. Jumlah Realisasi hasil pengalokasian Kabupaten Daerah yang ditetapkan 2. Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Ter 3. Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Ter	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan setiap tahun
	Regulasi Penunjang Indikator : 1. Jumlah realisasi Peraturan Transfer	Administrasi Keuangan Indikator : 1. Jumlah RDN yang merupakan sistem administrasi keuangan hasil revisi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang dihasilkan setiap tahun
		Administrasi Pendapatan Daerah Berwenangan Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah GDN Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah bentuk pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : 1. Jumlah Barang milik Daerah yang diadakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : 1. Jumlah Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeriksaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : 1. Jumlah jasa dan prosedur kantor yang berfungsi dengan baik

SUB REGISTRASI		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator : 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Reimburse dan Dana Transfer Lainnya	Pengurusan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah 2. Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan kebijakan Pajak Daerah	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Indikator : 1. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD Indikator : 1. Jumlah Dokumen RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RRA-SKPD
Pengalokasian dan Penyaluran Kegiatan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran dan Penyaluran Kegiatan Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perubahan RRA-SKPD Indikator : 1. Jumlah Dokumen Perubahan RRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RRA-SKPD
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Objek Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengawasan DPA-SKPD Indikator : 1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Pengalokasian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan Hasil Pengalokasian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengawasan Perubahan DPA-SKPD Indikator : 1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Pengalokasian Wajik Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pajak Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahapan Realisasi Kinerja SKPD Indikator : 1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tahapan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahapan Realisasi Kinerja SKPD
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan Pemantauan yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pemeliharaan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen yang telah dilakukan Pemeliharaan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator : 1. Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN
Perangkoan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perangkoan Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akrif Tahun SKPD Indikator : 1. Jumlah Laporan Keuangan Akrif Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akrif Tahun SKPD
Pelaksanaan Peraturan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen pelaksanaan yang telah dilaksanakan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Indikator : 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
Pengalokasian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen hasil pemeliharaan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengalokasian dan Pengawasan Pajak Daerah		Koordinasi dan Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD Indikator : 1. Jumlah Laporan Hasil Pengalokasian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pengalokasian Barang Milik Daerah SKPD
Pemeliharaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan hasil Pemeliharaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator : 1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah Indikator : 1. Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator : 1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah

Analisa dan Pengembangan Kelembut Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Kelembut Daerah	
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Kelembut Daerah dan Kebijakan Kelembut Daerah
Penyusunan dan Persebarluasan Kebijakan Kelembut Daerah	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan dan Persebarluasan Kebijakan Kelembut Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Kelembut Daerah	
Indikator	Jumlah Data Objek, Jumlah dan nilai Kelembut Daerah
Pengalihan Data Kelembut Daerah	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pengisian Data Kelembut Daerah
Penetapan Wujud Kelembut Daerah	
Indikator	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelembut Daerah
Pelaporan Pengalihan Kelembut Daerah	
Indikator	Jumlah Laporan Pengalihan Kelembut Daerah
Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kebangkitannya	
Indikator	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kebangkitannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Indikator	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
Indikator	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Bangunan Kantor	
Indikator	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	
Indikator	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Indikator	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Indikator	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Indikator	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Indikator	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
Pengadaan Mobil	
Indikator	Jumlah Paket Mobil yang disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Indikator	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Indikator	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Indikator	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Pengadaan Jasa Surat Menyurat	
Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertarungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Indikator	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Pertarungannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Indikator	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Membalikkan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Indikator	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dibalikkan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

5.1. STRATEGI

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success faktor*). Berikut strategi-strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Optimalisasi pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah berbasis digitalisasi.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Optimalisasi implementasi Standar pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan langkah - langkah yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung target RPD tahun 2024 – 2026. Adapun arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian potensi pendapatan daerah.
2. Merumuskan rencana proyeksi Pendapatan Daerah.
3. Merumuskan kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah.
4. Membuat perda dan petunjuk teknis pajak daerah.
5. Peningkatan kualitas pemutakhiran data pajak daerah.
6. Manajemen identitas wajib pajak dengan memanfaatkan NIK.
7. Meningkatkan Kerjasama dengan Kab/ Kota dan instansi terkait.
8. Sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah.
9. Intensifikasi, ekstensifikasi dan elektronifikasi retribusi daerah.
10. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait.
11. Merumuskan kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah.
12. Membuat perda dan petunjuk teknis Retribusi Daerah.
13. Penerapan ETPD pada pajak & retribusi daerah.
14. Pembuatan dan pengembangan system informasi Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Meningkatkan pemutakhiran database sistem.
16. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kriteria penilaian.
17. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
18. Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
19. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
20. Pelaksanaan SKM.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024 -2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bapenda Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Dengan berpedoman kepada Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun Program dan kegiatan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai berikut :

PROGRAM

1. Program penunjang urusan daerah provinsi.
2. Program pengelolaan keuangan daerah.
3. Program pengelolaan pendapatan daerah.

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
13. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
14. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
15. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
16. Pengolahan Data Retribusi Daerah
17. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
18. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
21. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel

32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
42. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
43. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
44. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
45. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
46. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
47. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
48. Penetapan Wajib Pajak Daerah
49. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
50. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
51. Penagihan Pajak Daerah
52. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
53. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
54. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
55. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Adapun rencana pendanaan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTB se Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Kinerja Program dan Pendanaan

UNIT	URAIAN	INDIKATOR						PENDANAAN		
		KONDISI KINERJA AWAL	2024	2025	2026	KONDISI KINERJA AKHIR	SATUAN	2024	2025	2026
Bapenda Provinsi								244.418.320.000	286.811.694.000	306.348.036.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan Kesekretariatan	72	75	76	77	77	Indek	226.873.344.300	267.512.230.620	285.118.615.282
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	100	100	Persen	2.074.616.900	2.282.078.150	2.510.385.965
- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kelayaan Daerah yang dipisahkan	93	100	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100	100	100	100	100	Persen	129.000.000	141.500.000	155.890.000
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	100	100	100	100	Persen	1.100.000.000	1.218.000.000	1.331.000.000
	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100	100	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100	100	100	100	100	Persen	13.835.359.300	15.218.898.230	16.742.384.753
	Persentase keluhan pengguna layanan yang diindaklanguti	100	100	100	100	100	Persen	150.000.000	168.000.000	180.000.000
UPTD PPRD Samarinda								8.969.793.000	9.631.063.000	10.344.203.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	72	75	76	77	77	Indek	8.231.930.600	8.819.414.360	9.491.391.496
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100	100	100	100	100	Persen	69.484.000	76.433.280	84.076.608
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100	100	100	100	100	Persen	483.671.200	522.038.320	564.242.152
	Persentase keluhan pengguna layanan yang diindaklanguti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100	100	100	100	100	Persen	184.706.400	213.177.040	244.484.744
UPTD PPRD Kukar								7.611.884.000	8.330.991.000	9.104.356.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	72	75	76	77	77	Indek	6.948.556.040	7.589.130.244	8.299.509.168
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	100	100	100	100	100	Persen	76.560.000	84.216.000	92.637.600
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	100	100	100	100	100	Persen	526.067.960	578.674.756	636.542.232
	Persentase keluhan pengguna layanan yang diindaklanguti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100	100	100	100	100	Persen	62.700.000	68.970.000	75.867.000
UPTD PPRD Kutim								4.610.993.000	4.935.208.000	5.282.263.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	72	75	76	77	77	Indek	4.176.923.000	4.487.728.800	4.757.037.080
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	100	100	100	100	100	Persen	170.236.000	187.259.600	205.965.560
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100	100	100	100	100	Persen	227.810.000	250.591.000	275.630.100
	Persentase keluhan pengguna layanan yang diindaklanguti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100	100	100	100	100	Persen	36.025.000	39.627.500	43.590.250

UNIT	URAIAN	INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL	TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR	SATUAN	PENDANAAN		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
UPTD PPRD Kubur								4.784.541.000	5.098.058.000	5.454.923.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretaratan (UPTD PPRD Kubur)	72	75	76	77	77	Indek	4.207.514.200	4.485.328.520	4.780.920.572
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubur)	100	100	100	100	100	Persen	88.760.000	98.736.000	108.609.600
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubur	100	100	100	100	100	Persen	304.854.000	423.340.280	465.674.308
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubur (UPTD PPRD Kubur)	100	100	100	100	100	Persen	82.412.000	90.653.200	99.718.520
UPTD PPRD Balikpapan								7.315.790.000	7.627.895.000	8.375.847.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretaratan (UPTD PPRD Balikpapan)	72	75	76	77	77	Indek	6.917.623.000	7.389.911.300	7.894.064.930
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100	100	100	100	100	Persen	45.540.000	50.094.000	55.103.400
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100	100	100	100	100	Persen	269.797.000	296.776.700	326.454.370
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100	100	100	100	100	Persen	82.830.000	91.113.000	100.224.300
UPTD PPRD Bontang								4.426.852.000	4.736.731.000	5.068.302.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretaratan (UPTD PPRD Bontang)	72	75	76	77	77	Indek	4.009.358.000	4.277.487.600	4.563.134.260
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100	100	100	100	100	Persen	27.720.000	30.492.000	33.541.200
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	97	100	100	100	100	Persen	297.214.000	321.935.400	349.128.940
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	100	100	100	100	100	Persen	92.560.000	106.816.000	122.497.600
UPTD PPRD PPU								4.406.423.000	4.714.872.000	5.044.913.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretaratan (UPTD PPRD PPU)	72	75	76	77	77	Indek	3.836.933.200	4.005.433.220	4.355.030.342
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	100	100	100	100	100	Persen	42.372.000	46.609.200	51.270.120
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Pemasam	100	100	100	100	100	Persen	405.927.000	441.519.700	480.671.670
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	100	100	100	100	100	Persen	121.190.800	126.308.880	157.140.866
UPTD PPRD Paser								4.506.687.000	4.822.155.000	5.159.705.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretaratan (UPTD PPRD Paser)	72	75	76	77	77	Indek	3.906.065.000	4.181.470.800	4.432.982.380
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	100	100	100	100	100	Persen	27.720.000	30.492.000	33.541.200
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	99	100	100	100	100	Persen	469.637.000	500.500.700	535.550.770
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100	100	100	100	100	Persen	104.265.000	129.691.500	167.660.680
UPTD PPRD Berau								4.572.708.000	4.892.797.000	5.235.293.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretaratan (UPTD PPRD Berau)	72	75	76	77	77	Indek	3.995.234.400	4.257.578.040	4.536.549.944
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100	100	100	100	100	Persen	109.982.400	120.980.640	133.078.704
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100	100	100	100	100	Persen	384.991.200	423.490.320	465.839.352
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100	100	100	100	100	Persen	82.500.000	90.780.000	99.828.000
Jumlah								295.603.991.000	341.791.464.000	365.418.043.000

Tabel 6.2

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
SEKRETARIAT							226.873.344.300	247.913.338.438	269.118.813.383
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	7	7	7	Dokumen / Laporan	799.012.900	878.913.790	966.808.125
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	309	309	309	Orang	163.872.924.410	198.261.758.848	208.993.107.333
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	4	4	4	Laporan	304.964.000	335.460.400	369.006.440
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SOP Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	10	10	10	Orang	1.792.348.800	1.971.583.680	2.168.742.048
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	10	10	10	Buah	7.908.004.500	8.698.804.950	9.568.685.445
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	10	10	Unit	39.282.339.000	42.871.872.900	46.808.730.190
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	5	Jenis	10.880.633.790	11.968.719.172	13.165.591.089
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	170	170	170	Unit	2.023.097.200	2.328.406.920	2.677.947.612
KABID BUKAN PAJAK							1.237.430.000	1.483.183.000	1.731.479.300
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.080	15.035	16.236	Milyar Rupiah	772.420.000	849.662.000	934.628.200
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan keuangan Daerah yang dipisahkan	244.444	264.373	295.304	Milyar Rupiah	385.000.000	423.500.000	465.850.000
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	951.308	1.007.373	1.063.423	Milyar Rupiah			
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	13.861	13.864	13.867	Milyar Rupiah			
5 02 02 1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7.048	7.905	8.681	Triliun Rupiah	1.100.000.000	1.310.000.500	1.331.000.000
KABID PAJAK							8.935.740.000	9.829.314.000	10.812.245.400
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah	8.300	9.050	9.860	Triliun Rupiah	8.935.740.000	9.829.314.000	10.812.245.400
KABID PPSP							4.082.715.800	4.468.927.380	4.919.886.115
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	3	3	3	Dokumen	836.496.800	920.100.180	1.012.112.365
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	3	3	3	Dokumen	3.226.259.300	3.548.695.230	3.903.773.753
		Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	2	2	Predikat			
		Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	2	2	2	Aplikasi			
KABID PEP							1.289.100.000	1.518.818.000	1.769.811.800
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyelelesaian retribusi daerah	7	7	7	Dokumen	465.740.000	512.314.000	563.545.400
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyelelesaian pajak daerah	22	22	22	Dokumen	1.823.360.000	2.006.696.000	2.206.266.400

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR	PENGANAAN							
			Urutan	Target			Sesuai	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
KA UPT PPD SARANGGA							3.968.793.000	4.621.902.000	28.344.305.000	
5 02 00 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	Persen	95.080.608	83.888.000	75.275.900	
5 02 00 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	80	80	Persen	180.680.000	110.746.000	120.822.800	
5 02 00 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.086	15.035	16.228	Milyar Rupiah	48.464.880	76.403.280	84.375.608	
5 02 00 1.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase SDH aparat yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	29.040.000	31.944.000	28.136.400	
5 02 00 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	602.343.424	673.677.356	746.935.340	
5 02 00 1.07	Pengadaan Barang HSD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	484.940.760	531.994.836	586.294.320	
5 02 00 1.08	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	6.490.870.258	6.890.248.683	7.296.309.218	
5 02 00 1.09	Pemeliharaan Barang HSD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	484.375.580	546.611.108	600.614.416	
5 02 04 1.01	Kapital Pengeluaran Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PBB, BMDB dan AP WU Sarangg	768.544	820.902	898.353	Milyar Rupiah	888.377.600	708.215.360	808.706.896	
KA UPT PPD KUTAI KARTASANGGA							7.611.564.000	6.120.993.000	5.384.556.000	
5 02 00 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	Persen	25.186.974	28.410.000	27.980.000	
5 02 00 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	80	80	Persen	180.600.000	111.812.000	122.113.200	
5 02 00 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.086	15.035	16.228	Milyar Rupiah	76.560.000	84.216.000	92.637.600	
5 02 00 1.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase SDH aparat yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	36.280.000	41.198.000	46.518.800	
5 02 00 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	937.113.880	1.000.827.496	1.113.818.179	
5 02 00 1.07	Pengadaan Barang HSD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	131.462.550	284.606.808	288.369.688	
5 02 00 1.08	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	6.981.175.496	6.427.218.818	6.821.403.410	
5 02 00 1.09	Pemeliharaan Barang HSD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	634.486.160	687.946.686	767.742.886	
5 02 04 1.01	Kapital Pengeluaran Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PBB, BMDB dan AP WU Kutai	422.578	462.188	497.113	Milyar Rupiah	586.767.960	647.644.756	712.409.232	
KA UPT PPD KUTAI TENGGH							4.618.966.000	4.935.306.000	5.280.240.000	
5 02 00 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	Persen	45.680.088	50.215.000	55.236.500	
5 02 00 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	80	80	Persen	89.780.000	96.796.000	105.809.800	
5 02 00 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.086	15.035	16.228	Milyar Rupiah	170.226.000	187.239.600	205.960.560	
5 02 00 1.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase SDH aparat yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	46.180.000	51.888.000	58.297.600	
5 02 00 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	471.140.280	520.484.278	572.488.700	
5 02 00 1.07	Pengadaan Barang HSD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	402.232.180	464.544.348	499.999.802	
5 02 00 1.08	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	2.461.434.824	2.604.794.301	2.718.807.711	
5 02 00 1.09	Pemeliharaan Barang HSD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	614.534.688	675.988.159	740.566.975	
5 02 04 1.01	Kapital Pengeluaran Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PBB, BMDB dan AP WU Kutai	300.417	325.752	358.304	Milyar Rupiah	283.035.000	290.218.500	319.240.200	

KODE	KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR				SATUAN	PENDANAAN		
			Target			2024		2025	2026	
			2024	2025	2026					
KA UPT PPRD KUTAI BARAT							4.764.341.000	5.298.058.000	5.454.923.000	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	33.440.865	36.784.000	40.462.400	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.080	15.035	16.226	Milyar Rupiah	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	46.200.000	50.820.000	55.902.000	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	475.351.360	522.886.496	575.175.146	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang HSB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	347.148.300	271.863.130	299.048.443	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	3.815.941.219	3.954.596.192	3.097.119.211	
5 02 01 1.09	Peneliharaan Barang HSB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	499.672.456	548.629.702	604.603.673	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBKKB dan AP Wil. Kutai	120.931	129.070	140.424	Milyar Rupiah	467.266.800	513.993.480	565.392.828	
KA UPT PPRD GALLIAPAH							7.315.790.000	7.827.883.000	8.373.847.000	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	19.672.204	21.638.478	23.802.326	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	111.120.000	122.332.000	134.468.200	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.080	15.035	16.226	Milyar Rupiah	45.540.000	50.094.000	55.103.400	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	22.440.000	24.684.000	27.152.400	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	738.709.820	810.380.800	881.418.882	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang HSB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	494.932.020	544.425.222	596.867.744	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	4.475.934.735	4.704.055.156	4.939.623.171	
5 02 01 1.09	Peneliharaan Barang HSB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	1.058.814.220	1.162.495.842	1.278.748.206	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBKKB dan AP Wil. Balikpapan	811.649	868.838	951.615	Milyar Rupiah	352.627.000	387.889.700	426.679.670	
KA UPT PPRD BONTANG							4.428.852.000	4.736.721.000	5.088.302.000	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	29.040.897	31.944.000	35.138.400	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	90.240.000	99.264.000	108.190.400	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14.080	15.035	16.226	Milyar Rupiah	27.720.000	30.492.000	33.541.200	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	48.040.000	53.724.000	59.086.400	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	859.163.690	945.000.059	1.039.588.065	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang HSB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	215.134.139	236.647.553	260.312.308	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	2.345.014.614	2.326.710.618	2.428.279.600	
5 02 01 1.09	Peneliharaan Barang HSB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	521.924.700	574.117.170	631.528.887	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBKKB dan AP Wil. Bontang	151.389	160.701	174.139	Milyar Rupiah	389.774.000	428.751.400	471.626.540	

KODE	KEGIATAN	INDEKATOR					PENDANAAN	
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025
			2024	2025	2026			
KA UPT PRPD PERADAM PASEN UTARA							4.406.423.000	4.714.373.000
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	2	2	Dokumen	28.912.837	31.363.200
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penarikan retribusi daerah	14.080	15.035	16.226	Milyar Rupiah	42.372.000	46.609.200
5.02.01.1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	4	4	Dokumen / Laporan	86.100.000	61.710.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	7	7	Buah	708.118.043	866.529.840
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	2	2	2	Paket	76.802.440	84.482.884
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6	Jenis	2.376.870.200	2.482.384.829
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	2	2	2	Paket	516.529.690	561.582.699
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penarikan PBB, BPHTB dan AP Wil. Peraden	92.785	99.968	106.777	Milyar Rupiah	527.117.800	579.629.500
KA UPT PRPD PASEN							4.506.487.000	4.822.129.000
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	2	2	Dokumen	23.886.882	25.168.000
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penarikan retribusi daerah	14.080	15.035	16.226	Milyar Rupiah	27.720.000	30.482.000
5.02.01.1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	4	4	Dokumen / Laporan	45.940.000	50.094.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	7	7	Buah	905.619.800	1.084.381.700
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	2	2	2	Paket	77.857.250	85.422.975
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6	Jenis	2.311.258.046	2.407.184.123
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	2	2	2	Paket	402.109.020	509.419.922
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penarikan PBB, BPHTB dan AP Wil. Pasen	172.523	184.337	200.523	Milyar Rupiah	572.902.000	630.192.200
KA UPT PRPD BERAN							4.572.709.000	4.893.797.000
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	2	2	Dokumen	45.620.050	50.181.120
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penarikan retribusi daerah	14.080	15.035	16.226	Milyar Rupiah	109.982.400	120.880.640
5.02.01.1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	4	4	Dokumen / Laporan	44.000.000	48.400.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	7	7	Buah	389.252.640	626.177.904
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	2	2	2	Paket	512.679.420	563.947.362
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6	Jenis	2.264.848.516	2.354.153.586
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	2	2	2	Paket	558.832.700	614.716.050
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penarikan PBB, BPHTB dan AP Wil. Beran	170.134	182.244	199.146	Milyar Rupiah	467.491.200	514.240.320

Tabel 6.3
Rencana Kinerja Sub Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
RAPENDIA PROV. KALTIM							344.418.338.000	389.811.894.000	308.348.036.000
SUBAG PROGRAM							799.013.888	876.813.358	966.885.128
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3	Dokumen	220.000.000	342.000.000	266.200.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	2	2	2	Dokumen	128.645.000	141.509.500	155.660.450
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	Dokumen	17.545.000	19.295.500	21.229.450
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	14	14	Laporan	314.985.000	346.483.500	381.131.850
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	Laporan	117.837.500	129.621.250	142.583.375
SUBAG KEUANGAN DAN ASSET							214.190.845.110	233.516.596.318	288.723.416.230
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	309	309	309	Orang / Bulan	163.645.404.520	190.005.486.969	206.712.508.166
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	415	415	415	Dokumen	515.520.000	567.072.000	623.779.200
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	Laporan	70.000.000	80.000.000	90.000.000
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	19	Laporan	157.519.890	173.271.879	190.599.067
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang HSK Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang HSK Daerah SKPD	10	10	10	Dokumen	175.164.000	192.680.400	211.948.440
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang HSK Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang HSK Daerah pada SKPD	36	36	36	Laporan	129.900.000	142.780.000	157.058.000
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	3	3	Paket	863.200.000	618.820.000	681.472.000
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	Paket	110.000.000	121.000.000	133.100.000
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	4	Paket	1.100.000.000	1.310.000.000	1.331.000.000
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	2	2	Paket	4.476.884.500	4.924.572.950	5.417.030.246
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72	72	72	Dokumen	21.120.000	23.232.000	25.555.200

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	0	0	Dokumen	175.000.000	-	-
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	2	Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	4	4	Paket	375.000.000	1.605.000.000	1.665.500.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197	222	249	Unit	4.950.000.000	4.445.000.000	4.989.500.000
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	Unit	29.522.339.000	32.474.572.900	35.722.030.190
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	6	6	Unit	3.770.000.000	3.847.000.000	3.931.700.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.870.000.000	2.067.000.000	2.262.700.000
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	17	Unit	416.891.200	458.580.320	504.438.352
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	150	150	Unit	756.206.000	831.826.600	915.009.260
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3	3	3	Unit	850.000.000	1.235.000.000	1.658.500.000
SUBAG UNIH DAN KEPENGAWATAN							11.824.282.550	13.116.710.852	14.428.381.927
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10	10	10	Dokumen	207.000.000	220.000.000	250.000.000
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	10	10	Dokumen	300.548.800	338.303.680	364.134.048
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70	75	80	Orang	360.800.000	396.880.000	436.568.000
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	75	80	Orang	360.800.000	396.880.000	436.568.000
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	72	84	Laporan	2.200.000.000	2.420.000.000	2.662.000.000
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	11.000.000	12.100.000	13.310.000
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	Laporan	8.484.133.790	9.332.547.172	10.265.801.888
SUB20 PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN							2.971.432.300	3.268.576.430	3.595.434.202
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	2	Dokumen	464.244.000	510.668.400	561.735.240
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	2	Dokumen	746.577.700	821.235.470	903.359.017
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13	13	13	Laporan	880.303.800	968.336.380	1.065.170.018
5 02 04 1.01 14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20	15	10	Laporan	880.303.800	968.336.380	1.065.170.018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
SUBID ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAN PELAYANAN							1.091.282.500	1.200.416.750	1.330.451.825
S 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	372.212.500	409.433.750	450.377.125
S 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1	1	1	Dokumen	719.070.000	790.977.000	870.074.700
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	1	Laporan			
SUBID RETRIBUSI DAERAH							772.430.000	848.861.000	934.838.200
S 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3	3	3	Laporan	281.620.000	310.002.000	341.002.200
S 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3	3	3	Dokumen	254.100.000	279.510.000	307.461.000
S 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	236.500.000	260.150.000	296.165.000
SUBID PENERIMAAN LAJUR - LAJUR							285.000.000	423.500.000	465.850.000
S 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	4	4	Dokumen	385.000.000	423.500.000	465.850.000
SUBID BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK							1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
S 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	4	4	Laporan	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
SUBID PENDATAAN, ADMINISTRASI DAN KESEHATAN PAJAK							434.940.000	478.834.000	528.277.400
S 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	4	4	Dokumen	271.700.000	298.670.000	328.757.000
S 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4	4	4	Dokumen Surat Persetujuan/Pencabutan	163.240.000	179.564.000	197.520.400
SUBID PNB DAN BBNKB							7.400.800.000	8.140.880.000	8.954.968.000
S 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	2	2	Laporan	7.400.800.000	8.140.880.000	8.954.968.000
SUBID PAJAK DAERAH LAINNYA							1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
S 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	3	3	Dokumen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
SUBSID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN							1.247.638.000	1.372.882.000	1.389.638.200
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	4	4	4	Dokumen LHP	925.740.000	1.038.336.000	1.120.389.800
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9	9	9	Laporan			
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	3	3	Laporan	321.840.000	354.046.000	388.452.800
SUBSID KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN							1.041.488.000	1.145.838.000	1.368.180.000
5.02.05.1.04.03	Penyuluhan dan Penyelebaran Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyelebaran Kebijakan Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	465.740.000	512.314.000	563.545.400
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyelebaran Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyelebaran Kebijakan Pajak Daerah	9	9	9	Laporan	575.740.000	633.314.000	686.645.400

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR				PENDANAAN			
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UMPD PRWD WILAYAH SAMARINDA							8.866.793.000	9.631.963.000	10.344.303.000
SUBAG TATA USAHA							8.231.938.000	8.819.414.388	9.451.381.486
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	58.080.600	63.088.000	70.276.600
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	95	95	95	Dokumen	100.680.000	110.748.000	121.822.800
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	6	7	Orang	29.040.000	31.944.000	35.136.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	7.610.460	8.371.506	9.206.657
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	262.362.740	310.599.014	341.658.915
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	57.372.304	63.109.534	69.420.488
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	2.133.120	2.346.432	2.581.075
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	10	Laporan	262.864.800	289.151.280	318.086.408
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Habis	Jumlah Paket Habis yang Disediakan	1	1	1	Paket	104.729.700	125.202.670	166.722.937
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	12	Unit	379.611.060	197.792.166	217.571.383
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	3.300.000	3.630.000	5.993.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.112.629.630	1.224.112.593	1.346.523.852
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	5.334.740.628	5.632.506.060	5.945.792.368
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perintah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perintahnya	10	12	12	Unit	171.293.750	186.412.135	207.253.338
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	11	12	Unit	150.000.280	155.000.308	160.500.339
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	175.091.620	202.600.672	232.860.739
SEKSI PENGOTAAN DAN PENETAPAN							291.313.380	436.434.530	485.077.972
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	19.958.400	21.954.140	24.149.664
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	19.958.400	21.954.140	24.149.664
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Suiyasa Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	167.590.000	179.349.000	192.283.900
5 02 04 1.01 06	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemecatan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	184.706.400	213.177.040	244.494.744
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENALIHAN							346.546.388	375.314.130	407.735.832
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	29.868.000	32.824.800	35.777.280
5 02 04 1.01 10	Pemagham Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang memiliki Putang Pajak	94	92	101	Dokumen SSPD	316.091.200	342.609.320	371.956.252

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR				PENDANAAN			
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UPDIS PRPD WILAYAH KUTAS HARTAMEGARA							7.411.894.888	8.330.991.888	9.104.556.888
BUDAC TATA USAHA							6.846.556.840	7.528.556.844	8.399.509.168
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	23.100.974	25.410.000	27.993.000
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	73	73	73	Dokumen	106.920.000	111.012.000	122.113.200
5 02 01 1.05 08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	8	9	Orang	38.280.900	42.108.000	46.318.800
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.657.200	7.322.820	8.055.212
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	613.001.620	674.301.782	741.731.960
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	27.305.190	30.035.799	33.036.280
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	4.266.240	4.692.884	5.182.180
5 02 01 1.06 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	14	14	Laporan	285.885.800	314.479.190	345.921.576
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	79.631.860	77.894.826	85.444.308
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	13	13	Unit	160.830.890	176.913.979	194.605.377
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surti Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surti Menyurat	12	12	12	Laporan	2.780.910	3.059.001	3.364.901
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.174.925.620	1.292.418.182	1.421.668.000
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	3.803.471.876	4.131.738.735	4.496.378.506
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	15	Unit	432.012.680	475.213.948	522.735.343
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61	67	74	Unit	92.012.580	101.213.838	111.335.222
5 02 01 1.09 08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	110.473.000	121.520.300	133.672.330
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							384.825.000	413.887.300	444.386.390
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	28.300.000	31.218.000	34.339.800
5 02 01 1.04 08	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	29.140.000	31.094.000	33.189.400
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	174.405.000	191.845.500	211.639.080
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Ditraktakan/diikuti dan Belum Ditraktakan/diikuti	4	4	4	Laporan	62.700.000	68.970.000	75.867.000
SEKSI PENGURUAN DAN PENAGIHAN							390.703.900	419.773.290	460.656.582
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	29.040.000	31.944.000	35.138.400
5 02 04 1.01 10	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang memiliki Risiko Pajak	75	82	91	Dokumen SSPD	381.662.900	386.829.290	425.512.182

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR				PENDANAAN			
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
DPRD PKPD WILAYAH KUTAI TIMUR							4.418.993.000	4.435.300.000	5.282.263.000
SUBAS TATA UMMAH							4.178.823.600	4.487.726.900	4.787.837.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	45.690.000	50.215.000	55.236.500
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	62	62	62	Dokumen	89.760.000	98.736.000	108.609.000
5 02 01 1.03 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	10	11	Orang	48.180.000	52.998.000	58.297.800
5 02 01 1.04 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	24.304.500	26.734.950	29.400.445
5 02 01 1.04 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	159.883.750	175.102.125	192.612.330
5 02 01 1.04 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	Paket	34.854.600	38.340.060	42.174.066
5 02 01 1.04 06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	11.821.120	12.133.232	13.335.955
5 02 01 1.04 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	23	23	Laporan	243.776.290	268.153.000	294.969.290
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	157.876.560	119.664.216	130.530.630
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	12	Unit	308.345.990	338.885.149	369.468.184
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	5.500.000	6.080.000	6.655.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	806.570.160	887.227.176	975.949.894
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	8	8	Laporan	1.680.364.664	1.711.516.928	1.734.202.818
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	Unit	308.542.890	339.297.138	373.336.849
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	54	54	Unit	139.616.240	152.578.524	168.936.576
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	186.375.000	183.012.500	201.313.750
SEKSI PENGADAAN BARU PENETAPAN							388.475.000	339.513.600	353.975.960
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	66.440.000	73.084.000	80.392.400
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	50.996.000	56.095.600	61.705.160
5 02 04 1.01 09	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	147.815.000	161.716.500	177.888.100
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	36.825.000	39.627.500	43.590.200
SEKSI PENGUKURAN BARU PENGUKURAN							133.995.000	146.054.500	162.648.950
5 02 01 1.04 07	Penyusunan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	52.800.000	58.080.000	63.888.000
5 02 04 1.01 03	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang memiliki Hutang Pajak	271	268	327	Dokumen SKPD	80.795.000	88.674.500	97.761.950

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR				PENDANAAN			
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
OPD PMD WILAYAH KUTAI KART							4.764.941.300	5.098.858.000	5.454.923.000
KUBAS TATA RUANG							4.287.514.396	4.485.328.520	4.790.426.572
5 02 01 1.01 02	Koordinat dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinat Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	33.440.000	36.784.000	40.462.400
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	92	92	92	Dokumen	89.760.000	98.736.000	109.609.600
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	9	9	10	Orang	46.200.000	50.620.000	55.902.000
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.400.000	7.268.000	7.986.000
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	165.946.000	182.540.600	200.794.660
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	22.242.990	24.467.209	26.914.018
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	3.910.720	4.301.792	4.731.971
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	19	19	Laporan	276.651.690	304.316.815	334.748.497
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	74.699.000	82.168.900	90.385.790
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	11	12	Unit	172.446.300	189.694.230	208.663.653
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	5.500.000	6.060.000	6.655.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	633.546.763	696.901.438	766.591.562
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	2.176.894.456	2.351.647.763	2.523.671.728
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	7	Unit	252.090.656	278.299.622	306.129.585
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	57	57	Unit	81.895.000	90.084.500	99.082.950
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	164.777.600	181.255.980	199.381.138
SEKSI PENGADAAN DAN PENETAPAN							238.190.000	249.776.000	266.753.000
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	41.580.000	45.736.000	50.311.800
5 02 01 1.04 05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	19.900.000	21.786.000	23.868.000
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	192.360.000	211.604.800	232.765.280
5 02 04 1.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	82.412.000	90.883.200	99.718.920
SEKSI PEMBIYUHAN DAN PENAGIHAN							220.866.800	242.952.480	267.246.820
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	28.380.000	31.218.000	34.339.600
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Hutang Pajak	760	826	920	Dokumen SSPD	192.486.800	211.735.480	232.909.620

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
DPTD RPMD WILAYAH BALIKPAPAN							1.315.790.000	1.827.885.000	8.379.447.000
BURAIK TATA USAHA							8.917.423.000	7.389.811.300	7.894.864.830
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	19.672.204	21.638.478	23.802.326
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	86	86	86	Dokumen	111.120.000	122.232.000	134.458.200
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	5	Orang	22.440.000	24.684.000	27.152.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.440.500	7.584.550	7.793.005
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	191.151.620	210.266.762	231.293.460
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	20.102.500	22.112.750	24.324.025
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	11.000.000	12.100.000	13.310.000
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	25	Laporan	508.015.200	558.816.720	614.698.362
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Hebel	Jumlah Paket Hebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	95.000.000	60.500.000	66.550.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	24	Unit	439.932.030	483.925.222	532.317.744
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	1.650.000	1.815.000	1.996.500
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.313.238.400	1.444.563.340	1.529.019.674
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	3.161.045.336	3.257.676.816	3.348.606.997
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	15	Unit	485.023.220	533.525.542	586.578.086
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114	114	114	Unit	132.561.000	145.017.100	160.393.610
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	439.230.000	483.153.000	531.468.300
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							162.597.800	178.196.700	196.016.370
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	25.740.000	28.314.000	31.143.400
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	10.560.000	11.626.000	12.777.600
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	42.567.000	47.153.700	51.889.070
5 02 04 1.01 06	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	82.830.000	91.113.000	100.224.300
SEKSI PEMBUNGAJIAN DAN PENAGIHAN							236.170.800	259.787.000	285.743.700
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.190.400
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Rutang Pajak	103	114	125	Dokumen SKPD	226.930.000	249.623.000	274.583.300

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
MPD DPRD WILAYAH KINTANG							4.426.852.000	4.736.731.000	5.166.302.000
SUBAG TATA USAHA							4.006.358.000	4.277.487.600	4.563.134.300
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	29.040.857	31.944.000	35.138.400
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	41	41	41	Dokumen	90.240.000	99.264.000	108.190.400
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	10	11	Orang	48.940.000	53.724.000	59.096.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.868.400	7.555.240	8.310.764
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	312.965.500	344.251.050	376.676.158
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	59.556.750	65.512.425	72.063.668
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	4.266.240	4.692.364	5.162.150
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	19	19	Laporan	475.516.800	523.068.480	575.375.328
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	1	1	1	Paket	27.500.000	30.250.000	33.275.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	10	Unit	187.634.139	206.397.553	227.037.308
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	3.300.000	3.630.000	3.995.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	347.124.030	381.836.433	420.020.076
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	8	8	Laporan	1.894.590.594	1.951.244.365	2.004.266.724
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorannya	10	10	10	Unit	201.364.700	221.523.170	243.675.487
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67	67	67	Unit	45.150.000	44.165.000	48.581.500
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	280.290.000	306.429.000	339.271.900
SEKSI PENDATAAN DAN PEMETAPAN							228.074.000	250.881.400	275.966.940
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 06	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	117.034.000	123.737.400	131.111.140
5 02 04 1.01 06	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	92.560.000	106.816.000	122.497.600
SEKSI PEMBUKUAN DAN PERAGIHAN							188.428.000	206.362.800	229.186.200
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 10	Pemagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang memiliki Pokok Pajak	497	547	602	Dokumen SSPD	180.180.000	196.196.000	218.017.600

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UPD PRD WILAYAH PENAJAH							4.406.423.000	4.714.872.000	5.044.913.000
KURAS TATA USAHA							3.834.913.299	4.088.453.229	4.355.950.342
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	28.512.827	31.363.200	34.499.520
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	75	75	75	Dokumen	100.800.000	110.880.000	121.968.000
5 02 01 1.03 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	12	13	Orang	86.100.000	81.710.000	87.881.000
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	15.798.870	17.365.557	19.102.113
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	370.895.633	407.985.197	448.783.717
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	20.441.300	22.489.430	24.733.873
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	4.266.240	4.692.864	5.162.130
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	19	19	Laporan	376.728.000	414.400.800	455.040.800
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.022.060	6.624.386	7.286.693
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	8	7	Unit	70.780.380	77.858.418	85.844.260
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	10.367.500	11.404.250	12.544.675
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	434.047.153	477.451.867	525.197.054
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	1.831.855.547	1.882.628.712	1.929.445.383
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	15	10	10	Unit	246.723.180	271.395.498	298.535.048
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	67	67	Unit	66.180.510	72.790.561	80.078.417
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	1	1	Unit	197.626.000	217.388.600	239.127.460
SEKSI PENGADAAN DAN PENETAPAN							171.794.800	183.834.680	194.318.148
5 02 01 1.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	14.124.000	15.536.400	17.090.040
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	14.124.000	15.536.400	17.090.040
5 02 04 1.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	122.320.000	134.552.000	148.007.200
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	121.190.800	136.309.680	157.140.868
SEKSI PENGUKURAN DAN PENAGIHAN							297.731.000	322.504.180	348.794.510
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	14.124.000	15.536.400	17.090.040
5 02 04 1.01 10	Pemeghan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Hutang Pajak	1272	1399	1529	Dokumen SSPD	263.607.000	306.967.700	332.664.470

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
HPTD PRPD WILAYAH PASER							4.586.687.800	4.822.555.800	5.158.705.800
SUBAG TATA USAHA							3.906.065.800	4.161.470.800	4.422.952.300
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	22.880.882	25.168.000	27.684.800
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	72	72	Dokumen	100.800.000	110.880.000	121.968.000
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	10	11	Orang	45.540.000	50.094.000	55.103.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	17.621.100	19.603.210	21.563.531
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	331.123.900	364.236.378	400.660.016
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	113.919.080	125.310.908	137.642.087
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	2.279.640	2.507.604	2.758.364
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	25	Laporan	620.476.000	672.623.600	729.775.960
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	22.657.250	24.922.975	27.419.273
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	Unit	55.000.000	60.900.000	66.550.000
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	5.496.800	6.002.568	6.602.828
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	866.144.380	932.758.818	1.006.034.700
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	1.536.056.788	1.557.542.737	1.568.631.511
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	16	Unit	181.300.790	199.430.069	219.373.956
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112	112	112	Unit	67.306.230	74.039.053	81.442.958
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	214.600.000	235.960.000	259.545.000
SEKSI PENGATAAN DAN PENETAPAN							304.000.000	336.405.500	372.046.000
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	181.260.000	196.386.000	192.024.600
5 02 04 1.01 06	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang Telah Dihadirkan/diikuti dan Belum Dihadirkan/diikuti	4	4	4	Laporan	104.265.000	129.691.500	157.660.650
SEKSI PENBUKUAN DAN PENAGIHAN							296.617.000	324.278.700	354.706.570
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Pulang Pajak	106	116	128	Dokumen SSPD	287.377.000	314.114.700	343.526.170

UPTD PPMD WILAYAH BEKAS							4.172.708.000	4.802.787.000	5.235.393.000
SUBAB TATA USAHA							3.999.234.400	4.257.876.040	4.536.548.944
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	45.620.050	50.181.120	55.199.232
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	116	116	116	Dokumen	90.240.000	99.264.000	109.190.400
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	5	6	7	Orang	44.000.000	48.400.000	53.240.000
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.597.800	7.257.580	7.983.338
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	137.500.000	151.250.000	166.375.000
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	90.540.480	99.603.320	109.563.660
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Salinan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	3.732.960	4.106.256	4.516.882
5 02 01 1.06 08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	35	35	Laporan	330.073.400	363.960.740	400.356.814
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	77.077.660	84.785.426	93.263.968
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	18	19	Unit	435.601.760	479.161.936	527.076.130
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	17.590.760	19.349.836	21.294.820
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	399.079.310	399.066.141	435.452.755
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	Laporan	1.797.140.440	1.839.673.619	1.876.857.281
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	17	17	17	Unit	195.405.980	214.946.578	236.441.236
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	96	96	Unit	82.478.000	90.725.800	99.796.380
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	280.948.800	309.043.680	339.948.048
BENSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							851.892.400	887.180.640	929.898.794
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	43.989.000	48.387.900	53.226.890
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	32.993.400	36.292.740	39.922.014
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	192.500.000	211.750.000	232.925.000
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditraktasikan dan Belum Ditraktasikan	4	4	4	Laporan	82.500.000	90.750.000	99.825.000
BENSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							225.491.200	246.040.320	272.844.352
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	33.000.000	36.300.000	39.930.000
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	598	658	724	Dokumen SSPD	192.491.200	211.740.320	232.914.352

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026 adalah untuk menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkorelasi pada **Tujuan ke 4 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”** dan **Sasaran ke 11 “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAklhak”** Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

7.1 PENENTUAN TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Berikut ini adalah IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024 - 2026;

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Persen	127,58	100	100	100
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	8.997.262,537,258	9.510.000.000,000	10.335.000.000,000	11.235.000.000,000
2	Meningkatnya layanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM)	Skor	86,65	≥86,90	≥86,90	≥87,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akip	75,71	78,5	79,3	80,01

7.2 PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

UNIT	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)					PENDANAAN		
	URAIAN	TARGET			SATUAN	2024	2025	2026
		2024	2025	2026				
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur						295.603.881.000	341.791.464.000	365.418.043.000
	1. Indeks kualitas layanan Kasiekratasatan	75	76	77	Indeks	271.121.480.640	317.339.710.604	338.190.000.464
	2. Persentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	100	100	Persen	20.279.321.160	22.267.853.276	24.461.809.604
	3. Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	100	100	Persen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
	4. Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sali	100	100	100	Persen	138.000.000	141.000.000	156.000.000
	5. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Persen	999.189.200	1.134.106.120	1.281.058.932

Perumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut didasarkan pada rincian IKK yang mana telah diselaraskan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 7.3
Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)					PENDANAAN		
	URAIAN	2024	2025	2026	SATUAN	2024	2025	2026
Rupaida Provinsi								
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	344.418.518.000	389.811.894.000	396.348.879.000
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	226.873.344.250	267.812.720.620	285.118.815.202
	3. Persentase Realisasi hasil pengisian rekening Daerah yang dipisahkan	100	100	100	Persen	2.079.628.800	2.082.078.190	2.910.298.888
	4. Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	183.000.000
	5. Persentase tercapainya target dana pembangunan dan dana transfer lainnya	100	100	100	Persen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.721.000.000
	6. Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100	100	100	Persen	125.000.000	141.000.000	155.000.000
	7. Persentase tercapainya target Peak Daerah	100	100	100	Persen	13.835.389.300	15.218.889.230	16.742.284.702
	8. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Persen	150.000.000	165.000.000	180.800.000
UPTD PPRD Samarinda						8.906.791.000	9.831.063.000	10.344.263.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	8.211.930.600	8.818.424.360	9.481.781.496
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	69.484.600	76.423.280	84.876.608
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Samarinda	100	100	100	Persen	483.671.300	523.038.520	564.242.152
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100	100	100	Persen	184.786.400	213.177.040	244.494.744
UPTD PPRD Kutai						7.811.364.000	8.130.991.000	8.164.356.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	6.946.556.040	7.568.130.244	8.299.509.168
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	79.560.000	84.238.080	83.437.600
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Kutai	100	100	100	Persen	638.087.960	678.674.784	686.542.312
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutai (UPTD PPRD Kutai)	100	100	100	Persen	62.700.000	68.970.000	79.867.000
UPTD PPRD Kutim						6.810.993.000	6.931.208.000	6.282.383.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	4.176.922.200	4.497.728.800	4.797.227.280
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	176.136.000	187.269.600	205.888.848
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Kutim	100	100	100	Persen	227.600.000	286.391.000	275.680.000
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100	100	100	Persen	36.033.000	38.627.600	41.946.280
UPTD PPRD Kubar						6.764.540.000	5.996.058.000	5.454.913.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	4.207.304.500	4.468.326.520	4.780.420.972
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	59.760.000	58.736.000	106.008.800
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Kubar	100	100	100	Persen	384.884.800	423.340.280	465.674.308
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100	100	100	Persen	62.412.000	60.683.200	86.718.816
UPTD PPRD Balikpapan						7.325.796.000	7.827.901.000	8.375.647.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	6.917.623.000	7.389.921.300	7.894.064.816
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	45.540.000	50.094.000	55.003.400
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Balikpapan	100	100	100	Persen	268.767.000	296.776.700	328.494.276
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100	100	100	Persen	62.030.000	61.113.000	100.024.300
UPTD PPRD Bontang						4.426.833.000	4.736.731.000	5.068.383.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	4.009.356.000	4.277.467.600	4.582.134.260
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	27.720.000	30.482.000	31.941.000
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Bontang	100	100	100	Persen	247.214.000	321.935.400	349.126.940
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	100	100	100	Persen	52.060.000	106.850.000	122.497.400
UPTD PPRD PPU						4.406.633.000	4.714.873.000	5.048.913.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	3.836.933.200	4.088.432.220	4.355.836.342
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	42.372.000	48.609.200	51.276.120
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS PPU	100	100	100	Persen	405.927.800	441.529.796	486.671.676
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	100	100	100	Persen	121.190.000	136.309.880	157.346.868
UPTD PPRD Paser						4.506.567.000	4.821.155.000	5.159.765.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	3.908.068.000	4.182.470.800	4.421.952.280
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	27.720.000	30.482.000	31.941.000
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Paser	100	100	100	Persen	468.637.000	500.890.700	538.886.776
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100	100	100	Persen	104.269.000	127.691.500	127.660.600
UPTD PPRD Berau						4.372.798.000	4.861.797.000	5.232.283.000
	1. Indeks kualitas layanan kesehatan	75	76	77	Indeks	3.868.234.400	4.207.076.040	4.536.346.344
	2. Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	109.962.400	120.960.640	133.076.704
	3. Persentase tercapainya target pemenuhan PAB, BSWAS dan AP VS Berau	100	100	100	Persen	384.981.200	423.480.320	466.839.362
	4. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100	100	100	Persen	62.580.000	96.750.000	96.820.000
Jumlah						293.603.091.000	341.761.404.000	367.418.543.000

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2024 – 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Tujuan dan sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi Kebijakan serta Program dan Kegiatan.

Terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, langkah strategisnya diterjemahkan dalam 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 55 (lima puluh dua) sub kegiatan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya dan hasil gunanya sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR,**

DRA. Hj. ISMIATI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650914 199012 2 001

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan Renstra Tahun 2024-2026, mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Pergub Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra BPKAD 2024-2026 adalah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 2024 s.d 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai tugas, wewenang dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tahapan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan dan aset Provinsi Kalimantan Timur serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD setiap tahun sebagaimana diamanatkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra BPKAD dilakukan dengan melakukan orientasi mengenai Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.

Dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra BPKAD adalah dokumen RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang menunjukkan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tersebut untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Keterkaitan Renstra BPKAD dengan dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 :

1. Mempelajari RPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan;
2. Perumusan sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai target kinerja RPD Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan BPKAD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Perumusan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur; dan

5. Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKAD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Kepmendagri 050-5889 Tentang Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klarifikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 dimaksudkan untuk merumuskan Tujuan, Sasaran guna melaksanakan masa transisi Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta penjabaran arah dan kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam program/kegiatan pembangunan secara terpadu dengan arah yang jelas dan terintegrasi dengan dokumen rencana lainnya. Penjabaran RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun

2024-2026 untuk perencanaan masa transisi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah :

- 1.3.1 Menggambarkan pengelolaan keuangan dan aset yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan;
- 1.3.2 Menjelaskan tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan;
- 1.3.3 Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
- 4.2 Cascading Kinerja

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Sub. Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 6 (enam) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 4 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional yang secara lengkap Struktur Organisasi pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;
- Menyenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan, Dokumen Pengelolaan Perubahan Anggaran – Perangkat Daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penandatanganan SPM;
- Menyenggarakan pengelolaan utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan penyampaian laporan serta mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyenggarakan tugas sebagai pengguna anggaran;
- Menyenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan layanan informasi keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- Menyenggarakan penetapan pembagian wilayah kerja pada Bidang dalam lingkup Badan;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan fungsi BUD;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan Penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

- Menyelenggarakan pengesahan Dokumen Pengelolaan Anggaran – Perangkat Daerah/ SKPKD dan Dokumen Perubahan Pengelolaan Anggaran – Perangkat Daerah/ SKPKD dalam lingkungan pemerintah Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kebijakan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset dan;
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Sekretaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta memfasilitasi pelayanan informasi;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Perencana Ahli Muda dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Sub Bagian dan JF tersebut antara lain :

- (1) JF Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

3. Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Anggaran. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran II;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran III;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran I, anggaran II dan anggaran III dan;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA/PPASPerubahan;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKA Perubahan/DPPA SKPD;
- Melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBDdan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

- Melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- Melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah I, Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah II, dan Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah III;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- (1) Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi Sub Bidang Anggaran I.
- (2) Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi Sub Bidang Anggaran II.
- (3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang sebelumnya menjadi kewenangan Sub Bidang Anggaran III.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perbendaharaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan II;

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I dan perbendaharaan II; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Perbendaharaan meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- Mengkoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- Mengkoordinasikan proses penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban SPJ;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan.
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan Teknis dan Pengendalian yang meliputi Sub Bidang Perbendaharaan I.
- 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang sebelumnya menjadi kewenangan Sub Bidang Perbendaharaan II.

5. Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Bidang Akuntansi dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang akuntansi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi belanja;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pelaporan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- Mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;

- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- Menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang

keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi penerimaan Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, dan pembukuan keuangan daerah;

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi. Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- (1) Sub Bidang Akuntansi pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- (2) Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.

- (3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pelaporan.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (P. BMD)

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang P.BMD. Bidang P. BMD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugas Bidang P. BMD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang P. BMD meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang P. BMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang P. BMD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

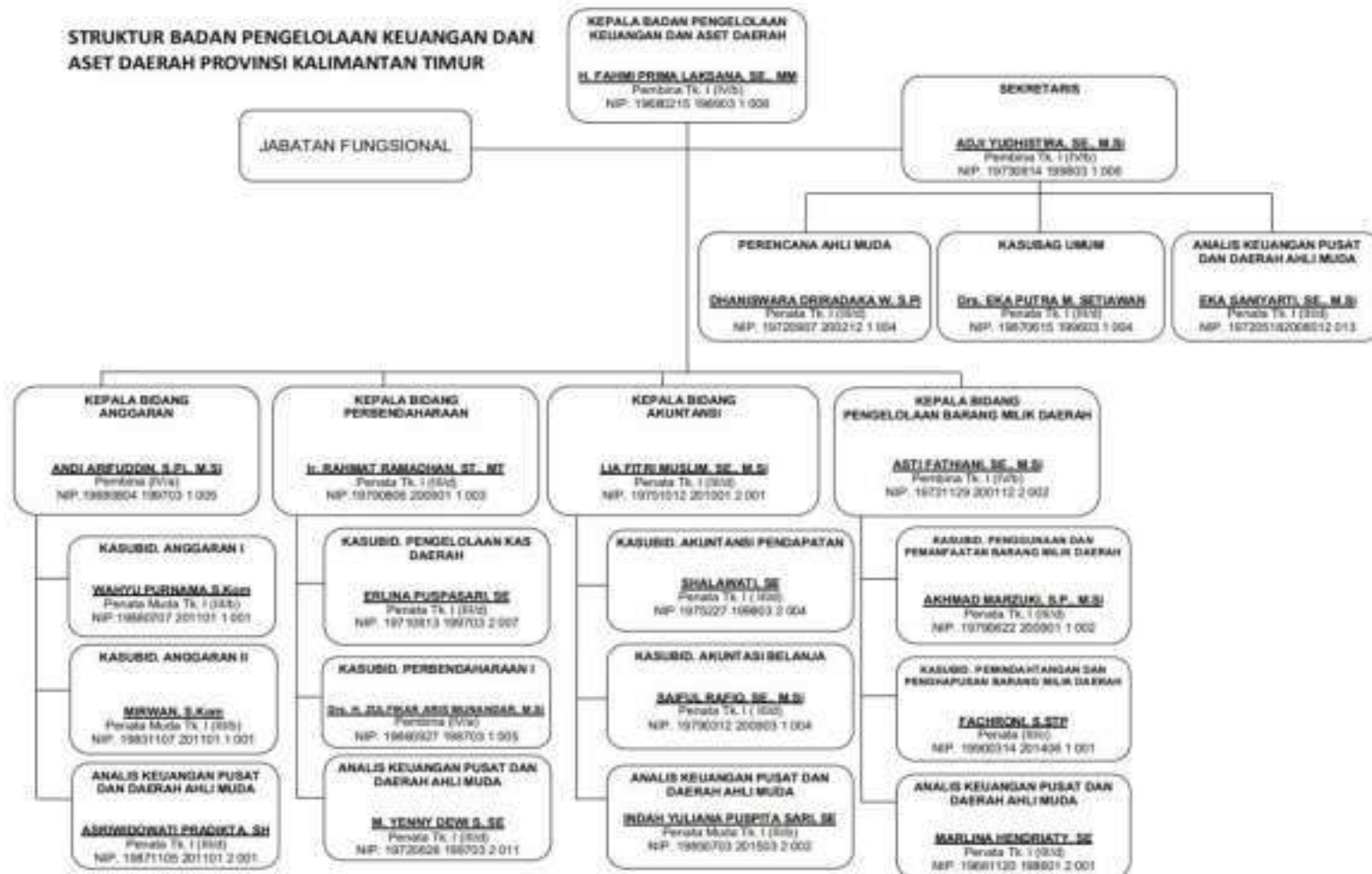
- Mengkoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang P. BMD serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- 1) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan.
- 2) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian terhadap pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Tabel.2.1 Struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur *Per Januari 2023* dibawah ini :



2.2 Sumber Daya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Tabel.2.2

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
2.	Pembina	IV/a	4
3.	Penata Tk. I	III/d	13
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	25
6.	Penata Muda	III/a	3
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	6
8.	Pengatur	II/c	48
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
	TOTAL		109

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	8
2.	S-1	27
3.	D-IV	3
4.	D-III	53
5.	SLTA	17
6.	SMK	1
7.	SD	0
	TOTAL	109

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan	JPT	1
2.	Sekretaris	Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	9
5.	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan	Jabatan Fungsional Ahli Muda	6
	TOTAL		21

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 2.5

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	17
2.	Bidang Anggaran	6
3.	Bidang Perbendaharaan	4
4.	Bidang Akuntansi	4
5.	Bidang Pengelolaan BMD	11
	TOTAL	42

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

2.2.2 Sumber Daya Aset/ Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh sarana dan prasarana. Sebagaimana Gedung kantor yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan ruangan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Susunan ruangan pada gedung BPKAD Prov. Kaltim

No.	Nama Ruangan	Lokasi Ruangan	Kondisi Ruangan
01.	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 2	Baik
02.	Ruang Sekretaris	Lantai 2	Baik
03.	Ruang Kepala Bidang Anggaran	Lantai 4	Baik
04.	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan	Lantai 1	Baik
05.	Ruang Kepala Bidang Akuntansi	Lantai 3	Baik
06.	Ruang Kepala Bidang P. BMD	Lantai 3	Baik
07.	Ruang staf Sekretariat	Lantai 2 dan 3	Baik
08.	Ruang staf Anggaran	Lantai 4	Baik
09.	Ruang staf Perbendaharaan	Lantai 1	Baik
10.	Ruang staf Akuntansi	Lantai 3	Baik
11.	Ruang staf P. BMD	Lantai 3	Baik
12.	Ruang PPID	Lantai 1	Baik
13.	Ruang Rapat Utama (Ballroom)	Lantai 5	Baik

14.	Ruang Rapat Bidang dan Sekretariat	Lantai 1 s/d 4	Baik
15.	Ruang Laktasi	Lantai 1	Baik
16.	Ruang Server/PABX	Lantai 4	Baik
17.	Ruang Arsip (Rollpack)	Lantai 1 s/d 4	Baik
18.	Musholla	Lantai Dasar	Baik
19.	Kantin	Lantai Dasar	Baik
20.	Ruang Simda P.BMD	Lantai 3	Baik
21.	Ruang SIKAP	Lantai 3	Baik
22.	Ruang Arsip Aset	Lantai Dasar	Baik
23.	Parkir Area	Lantai 1 dan Dasar	Baik
24.	Rumah Genset	Lantai Dasar	Baik
25.	Record Center Arsip	Jln. Perjuangan	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

2.3.1 Jenis Pelayanan Bidang Perbendaharaan :

- a. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c. Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

2.3.2 Jenis Pelayanan Bidang Anggaran :

- a. Usulan pergeseran anggaran perangkat daerah.
- b. Usulan perubahan anggaran perangkat daerah.
- c. Penerbitan SK pengelola keuangan perangkat daerah.
- d. Evaluasi APBD Kab/Kota

2.3.3 Jenis Pelayanan Bidang Akuntansi :

- a. Konsultasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.
- b. Evaluasi pertanggungjawaban Kab/Kota

2.3.4 Jenis Pelayanan Bidang Pengelolaan BMD :

- a. Penyusunan daftar RKBMD dan RKPBMMD dan verifikasi.
- b. Usulan SHS dari perangkat daerah.
- c. Konsultasi penyusunan laporan inventarisasi BMD perangkat daerah.
- d. Pendampingan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan kepada perangkat daerah.
- e. Penggunaan BMD berupa penetapan status penggunaan BMD perangkat daerah.

- f. Penggunaan sementara BMD perangkat daerah.
- g. Penetapan status penggunaan BMD perangkat daerah.
- h. Pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, Kerjasama penyediaan infrastuktur, pemanfaatan tanah hak pengelolaan perangkat daerah.
- i. Pendampingan penyusunan laporan BMD perangkat daerah.
- j. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota.
- k. Bantuan penyaluran keuangan ke Kab/Kota. (SKPKD)
- l. Penyaluran bagi hasil ke Kab/Kota SKPKD)
- m. Penyertaan modal ke Perusda (SKPKD)
- n. Penyaluran BTT untuk keadaan darurat (SKPKD)

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

[illegible]

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 2 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019-2023 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:

**SASARAN I : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

kemudian dari segi alokasi belanja, komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan

perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik

dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.

Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.

Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat di laporkan antara lain :

- a. Jumlah SKPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan BMD sebanyak 48 SKPD dari 48 SKPD (Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan);
- b. Jumlah 290 sertifikat tanah yang telah terbit pada tahun 2022 (subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD);
- c. Jumlah Surat Keputusan Penghapusan akibat pemusnahan sebanyak 11 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- d. Jumlah Surat Keputusan Akibat Alih Status sebanyak 1 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);

- e. Jumlah Surat Keputusan akibat hibah keluar sebanyak 4 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD)
- f. Jumlah Berita Acara Serah Terima dari Hibah masuk sebanyak 6 BAST pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- g. Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- h. Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- i. Jumlah SK Gubernur akibat penjualan rumah dinas 5 SK pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- j. Jumlah SK Penghapusan akibat penjualan ada 8 SK, pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);

SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan

perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

Survey ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim dalam hal pelayanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) kinerja/kualitas kepada SKPD dan Masyarakat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada BPKAD Provinsi Kaltim agar dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Nilai Konversi IKM Per unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah	Nilai rata-rata	Konversi IKM
1.	Persyaratan	259	3,20	79,94
2.	Prosedur	266	3,28	82,10
3.	Waktu Pelayanan	263	3,25	81,17
4.	Biaya/Tarif	262	3,23	80,86
5.	Produk Layanan	269	3,32	83,02
6.	Kompentensi Pelaksanaan	270	3,33	83,33
7.	Prilaku Pelaksana	264	3,26	81,48
8.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	260	3,21	80,25
9	Sarana dan prasarana	253	3,12	78,09

10	Prosedur Informasi publik	260	3,21	80,25
11.	Pelayanan Informasi publik	262	3,32	80,86

Dapat dilihat dari Tabel 2.7 nilai konversi IKM masing-masing pelayanan dikatakan BAIK dengan interval Nilai Konversi IKM sebesar 76,61 – 88,30. Dari 11 (sebelas) unsur pelayanan yang ada dilihat bahwa unsur pelayanan kompetensi pelaksana memiliki nilai konversi IKM paling besar diantara 10 (sepuluh) unsur pelayanan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanannya kepada masyarakat mengelola aset/barang milik daerah dengan nilai total sebesar Rp 40.382.881.431.560,80 yang terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak dengan rincian sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Aset Tetap	Jumlah Barang	Jumlah Nilai
	Aset Bergerak :		
1	Peralatan Mesin		4.806.980.415.775,18
2	Aset Tetap Lainnya		510.610.670.445,67
	- Aset Renovasi		
	Aset Tidak Bergerak :		
1	Tanah		7.532.180.862.686,70
2	Gedung dan Bangunan		9.594.520.563.841.18
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan		16.763.372.347.691,20
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.175.216.571.120,87
Jumlah Total			40.382.881.431.560,80

Sumber : BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan BMD) Data unaudited

Terhadap aset tersebut diatas pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan yang dilakukan hanya terbatas terhadap aset-aset tertentu meliputi :

1. Adanya alih kewenangan dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi menyebabkan penambahan aset disertai dengan permasalahannya karena tidak semua aset yang diserahkan dalam kondisi *clean and clear*. Saat ini perlu penanganan intensif yaitu aset hasil alih kewenangan

pengelolaan SMA, SMK dan SLB Negeri se-Kalimantan Timur. Adapun jumlah SMA, SMK dan SLB Negeri yang merupakan hasil alih kewenangan pengelolaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.10 Daftar Aset Hasil Alih Kewenangan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (*P3D*) SMA, SMK & SLB

No	Kabupaten / Kota	SMA	SMK	SLB	Jumlah
1	Samarinda	18	21	1	40
2	Balikpapan	9	6	1	16
3	Kutai Kartanegara	35	17	1	53
4	Kutai Timur	21	13	1	35
5	Kutai Barat	17	7	1	25
6	Berau	15	8	1	24
7	Bontang	3	4	1	8
8	Paser	13	4	1	18
9	Penajam Paser Utara	7	6	1	14
10	Mahakam Ulu	4	0	1	5
Jumlah Total		1 42	86	10	238

Sumber : BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan BMD)

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim TA 2019-2023

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34,881,743,000	70,331,155,148	91,653,469,537	26,743,154,556	44,915,900,888	91,653,469,537	77%	64%	100%	62.10	85.13
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,500,000,000	1,842,936,000	2,061,085,464	1,105,424,662	1,259,856,078	2,061,085,464	44%	68%	100%	-9.20	36.55
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,773,980,152	38,221,458,275	32,187,225,593	15,127,811,220	17,966,273,749	32,187,225,593	77%	47%	100%	27.58	45.87
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	599,972,000	414,144,000	922,200,000	506,653,160	344,422,264	922,200,000	84%	83%	100%	23.98	34.91
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,662,420,600	1,423,592,600	1,879,010,600	1,109,325,566	1,150,040,741	1,879,010,600	67%	81%	100%	6.31	30.15

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,135,499,416	19,041,295,500	21,492,915,790	2,474,635,722	15,863,097,536	21,492,915,790	79%	83%	100%	161.81	194.71
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,916,124,000	1,571,652,000	5,982,285,200	1,789,626,500	1,453,877,817	5,982,285,200	93%	93%	100%	76.69	82.83
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,126,384,932	3,009,476,941	16,918,195,674	1,848,194,320	2,731,902,889	16,918,195,674	87%	91%	100%	182.07	202.55
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,167,361,900	4,806,599,832	10,210,551,216	2,781,483,406	4,146,429,814	10,210,551,216	88%	86%	100%	79.55	91.60
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4,638,354,341,172	4,950,069,730,312	5,441,213,141,552	4,236,476,348,626	4,428,852,755,721	5,441,213,141,552	91%	89%	100%	8.31	28.44
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6,968,750,000	6,129,856,000	7,011,568,089	3,051,497,896	5,879,249,044	7,011,568,089	44%	96%	100%	0.31	51.58

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2,071,250,000	782,924,000	753,364,000	1,034,162,812	584,095,847	753,364,000	50%	75%	100%	-39.69	-14.65
11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4,384,929,000	5,668,454,200	6,275,277,885	2,530,248,160	4,919,377,258	6,275,277,885	58%	87%	100%	19.63	57.48
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5,730,000,000	4,484,493,800	5,166,231,160	3,190,843,688	3,754,713,139	5,166,231,160	56%	84%	100%	-5.05	27.24
13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,618,679,412,172	4,932,093,117,312	5,420,542,165,418	4,226,527,294,071	4,412,877,634,309	5,420,542,165,418	92%	89%	100%	17.36	28.25
14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	520,000,000	910,885,000	1,464,535,000	142,302,000	837,686,124	1,464,535,000	27%	92%	100%	67.82	220.81

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7,900,000,000	6,722,637,500	6,973,836,564	5,019,854,369	6,221,862,085	6,973,836,564	64%	93%	100%	-6.04	17.87
Pengelolaan Barang Milik Daerah	7,900,000,000	6,722,637,500	6,973,836,564	5,019,854,369.00	6,221,862,085	6,973,836,564	64%	93%	100%	-6.04	17.87

Kelompok Sasaran Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan layanan kepada :

1. Masyarakat umum (bidang Pengelolaan BMD).
2. Perangkat Daerah.
3. Kab/Kota dalam penyusunan APBD.

Mitra BPKAD Prov.Kaltim

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan mitra kerja antara lain :

1. PT.Taspen
2. BPJS
3. Bankkaltimtara
4. Bank yang terlibat pada KSO
5. Pemerintah Kab/Kota sekaltim
6. BPK.RI
7. BPKP Perwakilan Kaltim
8. DJKN Perwakilan Kaltim
9. SKPD dilingkungan Prov.Kaltim

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat

memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya;

2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah, peraihan opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna;
4. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan yang diberikan;
5. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan.

- **Tantangan (Threats)**

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum memadai, dimana masih terdapat kendala dalam proses koordinasi, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada khususnya;
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan;
5. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan harus dipahami dan dipublikasikan dengan benar, hal ini menjadi kendala ketika alokasi anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru;

6. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan Good Corporate Governance (GCG);
7. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan, misalnya regulasi yang mengatur transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya;
8. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah good corporate governance (GCG) serta berbasis pada visi dan misi. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa metode SWOT dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni :

1. Faktor Internal

- **Kekuatan (Strength)**

1. Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
4. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Tersedianya sarana kerja yang memadai (hardware maupun software) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BPKAD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kelemahan (Weakness)**

1. Penerapan jabatan Fungsional bagi masing-masing ASN belum diimbangi dengan kompetensi yang sesuai dan belum diimbangi oleh pemahaman bagi pejabat pada tiap-tiap level;

2. Kualitas SDM masih belum memadai, meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional;
3. Belum terujinya secara komprehensif sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, dimanafungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah.

2. Faktor Eksternal

- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya;

2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah, peraihan opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna;
4. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan yang diberikan;
5. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan.

- **Tantangan (Threats)**

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum memadai, dimana masih terdapat kendala dalam proses koordinasi, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada khususnya;
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan;
5. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan harus dipahami dan dipublikasikan dengan benar, hal ini menjadi kendala ketika alokasi anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena

bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru;

6. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan Good Corporate Governance (GCG);
7. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan/ transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya;
8. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan sumber-sumber pendapatan dalam yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka dibutuhkan perencanaan yang akurat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada tersebut.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses

pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi nasional pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka peranan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan aset daerah namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah,

maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode 2024-2026 ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK
PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Pemeliharaan BMD pengelola belum dilaksanakan dengan maksimal. Sementara di Pasal 15 ayat (1) dan (2) Permendagri 19 Tahun 2016 Pengurus Barang Pengelola adalah BPKAD (Pejabat Penatausahaan Barang) Usulan Pembentukan UPTD PP (Penggunaan dan Pemanfaatan) BMD ditolak	BMD Pengelola belum dapat dikelola sesuai ketentuan/regulasi. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyediaan saat ini hanya tersedia pada kegiatan Bidang Sekretariat, dan sesuai Tupoksinya kegiatan Bidang Sekretariat hanya untuk mengakomodir pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada pada wilayah Pengguna Barang. Saat ini pelaksanaan kegiatan tersebut di letakkan pada : A.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01.1.09) Sub Kegiatan (5.02.01.1.09.09) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya). B.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (5.02.01.106) (Sub Kegiatan (5.02.01.1.06.02) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) (Sub Kegiatan (5.02.01.1.06.03) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Belum adanya Kegiatan/Subkegiatan yang sesuai untuk melaksanakan/melaksanakan anggaran terkait Pengelolaan (pemeliharaan dan pengadaan) BMD Pengelola (belum ada pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Nomenklatur pada Kepmendagri No. 50-5889 Th. 2021)
2	Pengelolaan Arsip Lingkup BPKAD Prov. Kaltim belum maksimal	Distribusi / koordinasi antara unit kearsipan perangkat daerah (UKPD) dengan unit pengolah pencipta arsip (UPPA) belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.	Pelaksana pengelola arsip baik pada UKPD maupun UPPA belum memahami dan melaksanakan sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya.

3	Penetapan APBD yang tidak tepat waktu	transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, mengakibatkan Penetapan APBD yang tidak tepat waktu	Regulasi yang mendukung penyusunan APBD terlambat ditetapkan
4	Pelaksanaan pergeseran anggaran belum optimal karena masih dilaksanakan secara manual	Proses pergeseran DPA SKPD yang dilakukan secara manual harus memperhatikan banyak komponen seperti rekening belanja dan uraian, SHS, kewenangan pergeseran dan realisasi belanja terhadap pergeseran	Belum dapat dilakukan Akses ke database SIPD
5	Terlambatnya penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1. Lambatnya Kabupaten/Kota melengkapi persyaratan 2. Dokumen yang di upload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sehingga verifikasi berulang 3. Lambatnya progres pekerjaan (untuk bantuan keuangan non spesifik)	Kurangnya koordinasi internal di Kabupaten/Kota antar SKPD terkait 2. Kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota terkait persyaratan dokumen yang harus dilengkapi 3. Terlambatnya proses lelang di Kabupaten/Kota 4. Penyedia lambat dalam melaksanakan pekerjaan di Kabupaten/Kota
6	Penyaluran Dana Bagi Hasil Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), akan berpotensi merugikan daerah	TDF dicatat sebagai penerimaan pada tahun berkenaan	Penggunaan dana kas daerah tidak fleksibel/optimal
7	KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah)	KKPD memiliki dua kartu yaitu Kartu Perjalanan Dinas dan KKPD Belanja Modal Barang Jasa yang hanya diberikan kepada PA/KPA dan BP	Kartu hanya diberikan satu kartu untuk BP sehingga apabila BPP ingin menggunakan kartu harus bergantian
8.	Kurang akuratnya data pelaporan BMD	Belum optimalnya pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1. Kurangnya pemahaman pengelolaan barang pada pengguna barang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang Milik Daerah terkait dengan siklus pengelolaan BMD 2. Tingginya intensitas pergantian pengurus barang sehingga permasalahan yang terjadi di SKPD tidak diselesaikan secara tuntas

Secara spesifik, pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi- fungsi tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu;
 - b. Pelaksanaan pergeseran anggaran belum optimal karena masih dilaksanakan secara manual;
 - c. Terlambatnya penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - d. Penyaluran Dana Bagi Hasil Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), akan berpotensi merugikan daerah;
 - e. KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah).
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Kurang akuratnya data pelaporan BMD
3. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu

dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan dan ketepatan layanan administrasi.

Pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah, adalah :

- a. Dibutuhkan (SOP) untuk masing- masing layanan administrasi sehingga diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.
- b. Pemeliharaan BMD pengelola belum dilaksanakan dengan maksimal.
- c. Pengelolaan Arsip Lingkup BPKAD Prov. Kaltim belum maksimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Adanya penyesuaian pada tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan, kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas, ini tertuang pada dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RPD tersebut yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yaitu :

1. Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur harus mencerminkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Diharapkan Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai objek dalam melakukan pengawasan pelaksanaan setiap program dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
4. Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan mempedomani RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA PD Kabupaten/Kota;

5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RENSTRA masing-masing PD dan wajib melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kedepannya yakni :

1. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan SKPD.
2. Optimalisasi penerapan SIPD secara utuh dan menyeluruh mulai dari Perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan.
3. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan

keuangan yang lebih baik, dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;

4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (*E-Planning, E-Budgeting dan E-RKBMD/ SIMDA*).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki lima pilar utama yaitu inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dan secara bertahap pencapaiannya.

Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 2024-2026

**"1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
YANG BERKUALITAS"**

***INDIKATOR TUJUAN : 1. Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD)***

2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

**"2. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN"**

***INDIKATOR TUJUAN : NILAI SAKIP
PEMERINTAH DAERAH***

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama tiga tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 2024 - 2026 adalah

SASARAN I

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH**

Indikator Sasaran :

1. Opini BPK atas LKPD
2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD

SASARAN II

**MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS
KINERJA DAN PELAYANAN BPKAD PROV.
KALTIM**

Indikator Sasaran :

1. Nilai SAKIP BPKAD
2. Indeks Kepuasan Atas Pelayanan BPKAD

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu periode Renstra Tahun 2024-2026 :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
1	TUJUAN Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Perhitungan sesuai Permendagri 19 Tahun 2020	N/A	Indeks	60	65	70
		2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Perhitungan sesuai ketentuan Kemenkeu RI No. 127/KM.6/2022	N/A	Indeks	40	45	50
2	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	59 (CC)	Poin	65 (B)	70 (B)	75 (BB)
	SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK atas LKPD	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur oleh BPK RI	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
		2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD		N/A	Persentase	40	45	47
	SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	1. Nilai SAKIP BPKAD Prov.Kaltim 2. Indeks Kepuasan atas pelayanan BPKAD	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017	CC (59) 80,22	Poin Indeks	65 (B) 82	70 (B) 84	75 (BB) 86

4.2 Cascading Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja serta target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah, cascading harus dilakukan secara jelas, akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah membuat proses penjabaran dan penyelarasan yang berawal dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Cascading BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4.2.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan langkah-langkah strategis berupa rencana aksi yang akan ditempuh pada periode 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Rencana Aksi

MASALAH POKOK	RENCANA AKSI
Pemeliharaan BMD pengelola belum dilaksanakan dengan maksimal. (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	Akan melakukan usulan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah/ Bidang yang dapat disertai tanggung jawab untuk mengelola BMD Pengelola.
Pengelolaan Arsip Lingkup BPKAD Prov. Kaltim belum maksimal (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	Dilaksanakan Bimtek, Coaching Clinic dan pendampingan terkait pengelolaan arsip.
Penetapan APBD yang tidak tepat waktu (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait regulasi-regulasi yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD
Pelaksanaan pergeseran anggaran belum optimal karena masih dilaksanakan secara manual (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri selaku pemilik server dan aplikasi, sehingga Pemerintah Daerah memperoleh akses ke database SIPD untuk data DPA dan SHS

Terlambatnya penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	1. Melakukan koordinasi yang intens dengan Kabupaten/Kota
	2. Melakukan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota terkait dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan
	3. Melakukan komunikasi yang intens dengan Kabupaten/Kota agar segera melakukan proses lelang dan memilih penyedia yang berkompeten
Penyaluran Dana Bagi Hasil Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), akan berpotensi merugikan daerah (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Konsolidasi Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	BP dan BPP saling berkoordinasi dalam penggunaan KKPD
Kurang akuratnya data pelaporan BMD (Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah)	1. Kurang akuratnya data pelaporan BMD
	2. Pemberian reward bagi pengurus barang

Secara lebih rinci, berdasarkan rencana aksi dituangkan dalam strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026, dapat dilihat dari matriks berikut ini :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengeloaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Mendorong terwujudnya perencanaan anggaran keuangan daerah yang berkualitas	1.1 Optimalisasi capaian target perencanaan anggaran keuangan daerah
		2. Mendorong terwujudnya layanan perbendaharaan keuangan daerah yang optimal.	2.1 Percepatan peningkatan layanan perbendaharaan keuangan daerah
		3. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik	3.1 optimalisasi capaian target pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
		4. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 10 Kabupaten/kota Se-Kaltim	4.1 Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan
		5. Menyajikan data siklus barang milik daerah yang akurat dan akuntabel	5.1 Pencatatan/ Inventarisasi aset daerah secara akuntabel

			5.2 Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan lainnya
			5.3 Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel
		6. Menertibkan administrasi dan fisik barang milik daerah transparan, efektif, efisien dan profesional	6.1 Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang Lembaga pengawasan Lembaga hukum dan Pemerintah Setempat
			6.2 Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan pengguna barang
		7. Pendayagunaan dan pemanfaatan Aset Daerah dioptimalkan dalam menunjang sumber-sumber pendapatan daerah	7.1 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah
			7.2 Pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa, pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim	8. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur	8.1 Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia

		9. Mendorong terlaksananya optimalisasi dukungan teknis dan layanan administrasi umum perkantoran	9.1 Mengoptimalkan layanan administrasi perkantoran
			9.2 Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor
		10. Melakukan upaya percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	10.1 Meningkatkan capaian target perencanaan dan penganggaran perangkat daerah melalui evaluasi kinerja perangkat daerah yang optimal
			10.2 Meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM aparatur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah Menyusun Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk tahun 2024-2026 meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu program pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dengan berpedoman kepada kepada Kepmendagri No.50-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang digunakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Program :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota
3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Pengelolaan data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

9. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
12. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten/Kota

14. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
15. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
16. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
17. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
18. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
19. Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
20. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
21. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
23. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
24. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
25. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
26. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.

28. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
29. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
30. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
31. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
32. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
33. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
34. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
35. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
36. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
37. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi.
38. Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Bidang Perbendaharaan).
39. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Anggaran).
40. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Bidang Akuntansi).
41. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Bidang Akuntansi).
42. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah .
43. Penyusunan Standar Harga.
44. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
45. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
46. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

47. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
48. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
49. Pengamanan Barang Milik Daerah.
50. Penilaian Barang Milik Daerah.
51. Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
52. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
53. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
54. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
55. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
56. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
57. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
58. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
59. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPD-SKPD
60. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
61. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
62. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
63. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
64. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
65. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
66. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
67. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
68. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
69. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
70. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
71. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
72. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

73. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
74. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
75. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
76. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
77. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
78. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
79. Fasilitas Kunjungan Tamu.
80. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
81. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
82. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
83. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
84. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
85. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
87. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
88. Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
89. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
90. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
91. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya.
92. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN 2024-2026**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Keuangan					6,807,272,022,000		6,511,622,199,000		7,100,936,289,000		7,100,936,289,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80,22	82	63,449,356,000	84	58,951,617,816	86	60,774,478,304	86	60,774,478,304	BPKAD
	2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	24,550,000,000	100%	22,437,859,000	100%	23,293,874,000	100%	23,293,874,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	82,98%	100%	2,030,000,000	100%	1,688,352,000	100%	1,826,815,000	100%	1,826,815,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	2 Dokumen	700,000,000	2 Dokumen	582,191,000	2 Dokumen	629,937,000	2 Dokumen	629,937,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	174,657,000	1 Dokumen	188,981,000	1 Dokumen	188,981,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	74,853,000	1 Dokumen	80,991,000	1 Dokumen	80,991,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	182,974,000	1 Dokumen	197,980,000	1 Dokumen	197,980,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	91,487,000	1 Dokumen	98,990,000	1 Dokumen	98,990,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	2 Laporan	350,000,000	2 Laporan	291,095,000	2 Laporan	314,968,000	2 Laporan	314,968,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	7 Laporan	350,000,000	7 Laporan	291,095,000	7 Laporan	314,968,000	7 Laporan	314,968,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	%	77,37%	100%	38,019,356,000		37,801,441,816	100%	37,889,760,304	100%	37,889,760,304	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	124 Orang/Bulan	34,724,356,000	124 Orang/Bulan	34,724,389,816	124 Orang/Bulan	34,724,379,304	124 Orang/Bulan	34,724,379,304	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	400 Dokumen	2,000,000,000	400 Dokumen	2,000,000,000	400 Dokumen	2,000,000,000	400 Dokumen	2,000,000,000	
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	400 Dokumen	560,000,000	400 Dokumen	465,753,000	400 Dokumen	503,949,000	400 Dokumen	503,949,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	99,804,000	12 Dokumen	107,989,000	12 Dokumen	107,989,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	124,755,000	1 Laporan	134,986,000	1 Laporan	134,986,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	3 Dokumen	280,000,000	3 Dokumen	232,876,000	3 Dokumen	251,974,000	3 Dokumen	251,974,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	3 Laporan	110,000,000	3 Laporan	91,487,000	3 Laporan	98,990,000	3 Laporan	98,990,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	62,377,000	1 Dokumen	67,493,000	1 Dokumen	67,493,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	%	83,16%	100%	1,000,000,000	100%	831,702,000	100%	899,910,000	100%	899,910,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	831,702,000	12 Laporan	899,910,000	12 Laporan	899,910,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselaran Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	80,78%	85%	2,100,000,000	85%	1,746,572,000	85%	1,889,811,000	85%	1,889,811,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	1 Paket	300,000,000	1 Paket	249,510,000	1 Paket	269,973,000	1 Paket	269,973,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	12 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	124,755,000	12 Dokumen	134,986,000	12 Dokumen	134,986,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	140 Orang	1,350,000,000	140 Orang	1,122,797,000	140 Orang	1,214,879,000	140 Orang	1,214,879,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	140 Orang	300,000,000	140 Orang	249,510,000	140 Orang	269,973,000	140 Orang	269,973,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Prov. Kaltim	%	83,31%	83,31%	11,950,000,000	83,31%	9,938,838,000	83,31%	10,753,928,000	83,31%	10,753,928,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	-	12 Paket	250,000,000	12 Paket	207,925,000	12 Paket	224,977,000	12 Paket	224,977,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	-	12 Paket	3,000,000,000	12 Paket	2,495,106,000	12 Paket	2,699,731,000	12 Paket	2,699,731,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	12 Paket	3,000,000,000	12 Paket	2,495,106,000	12 Paket	2,699,731,000	12 Paket	2,699,731,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	-	12 Paket	500,000,000	12 Paket	415,851,000	12 Paket	449,955,000	12 Paket	449,955,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	-	6 Lapora n	700,000,000	6 Lapora n	582,191,000	6 Lapora n	629,937,000	6 Lapora n	629,937,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	-	12 Lapora n	2,000,000,000	12 Lapora n	1,663,404,000	12 Lapora n	1,799,821,000	12 Lapora n	1,799,821,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	-	12 Dokum en	2,500,000,000	12 Dokum en	2,079,255,000	12 Dokum en	2,249,776,000	12 Dokum en	2,249,776,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	92,51%	100%	2,600,000,000	100%	2,162,425,000	100%	2,339,766,000	100%	2,339,766,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kend.operasional atau lapangan	Unit	-	1 Unit	1,600,000,000	1 Unit	1,330,723,000	1 Unit	1,439,856,000	1 Unit	1,439,856,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	20 Unit	1,000,000,000	20 Unit	831,702,000	20 Unit	899,910,000	20 Unit	899,910,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90,78%	100%	12,600,000,000	100%	12,499,021,000	100%	12,539,946,000	100%	12,539,946,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	-	12 Lapora n	100,000,000	12 Lapora n	83,170,000	12 Lapora n	89,991,000	12 Lapora n	89,991,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	-	12 Laporan	5,000,000,000	12 Laporan	5,000,000,000	12 Laporan	5,000,000,000	12 Laporan	5,000,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan	-	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	415,851,000	12 Laporan	449,955,000	12 Laporan	449,955,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12 Laporan	7,000,000,000	12 Laporan	7,000,000,000	12 Laporan	7,000,000,000	12 Laporan	7,000,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Prov. Kaltim	%	86,27%	100%	17,700,000,000	100%	14,721,125,000	100%	15,928,416,000	100%	15,928,416,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	6 Unit	200,000,000	6 Unit	166,340,000	6 Unit	179,982,000	6 Unit	179,982,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	25 Unit	1,500,000,000	25 Unit	1,247,553,000	25 Unit	1,349,865,000	25 Unit	1,349,865,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	12 Unit	1,000,000,000	12 Unit	831,702,000	12 Unit	899,910,000	12 Unit	899,910,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	5 Unit	15,000,000,000	5 Unit	12,475,530,000	5 Unit	13,498,659,000	5 Unit	13,498,659,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD Pemprov. Kaltim	%	89%	100%	6,707,422,666,000	100%	6,419,544,067,184	100%	7,005,794,848,696	100%	7,005,794,848,696	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	%	92,91%	100%	8,540,000,000	100%	7,102,731,000	100%	7,685,231,000	100%	7,685,231,000	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	-	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	166,340,000	2 Dokumen	179,982,000	2 Dokumen	179,982,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	-	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	207,925,000	2 Dokumen	224,977,000	2 Dokumen	224,977,000	
Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	1,350,000,000	37 Dokumen	1,122,797,000	37 Dokumen	1,214,879,000	37 Dokumen	1,214,879,000	
Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	1,000,000,000	37 Dokumen	831,702,000	37 Dokumen	899,910,000	37 Dokumen	899,910,000	
Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	160,000,000	37 Dokumen	133,072,000	37 Dokumen	143,985,000	37 Dokumen	143,985,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	160,000,000	37 Dokumen	133,072,000	37 Dokumen	143,985,000	37 Dokumen	143,985,000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	-	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	274,461,000	2 Dokumen	296,970,000	2 Dokumen	296,970,000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	-	2 Dokumen	220,000,000	2 Dokumen	182,974,000	2 Dokumen	197,980,000	2 Dokumen	197,980,000	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	-	3 Doku	270,000,000	3 Doku	224,559,000	3 Doku	242,975,000	3 Doku	242,975,000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	4,500,000,000	1 Dokumen	3,742,659,000	1 Dokumen	4,049,597,000	1 Dokumen	4,049,597,000	
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	-	74 Orang	100,000,000	74 Orang	83,170,000	74 Orang	89,991,000	74 Orang	89,991,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	%	74,60%	100%	1,200,000,000	100%	998,040,000	100%	1,079,892,000	100%	1,079,892,000	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD kab/Kota	Laporan	-	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	249,510,000	20 Laporan	269,973,000	20 Laporan	269,973,000	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Perda tentang perubahan APBD kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran perubahan APBD kab/Kota	Laporan	-	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	249,510,000	20 Laporan	269,973,000	20 Laporan	269,973,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	-	10 Laporan	400,000,000	10 Laporan	332,680,000	10 Laporan	359,964,000	10 Laporan	359,964,000	
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Laporan	-	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	166,340,000	3 Laporan	179,982,000	3 Laporan	179,982,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	%	86,79%	100%	6,750,000,000	100%	5,613,984,000	100%	6,074,409,000	100%	6,074,409,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	-	12 Dokumen	320,000,000	12 Dokumen	266,144,000	12 Dokumen	287,971,000	12 Dokumen	287,971,000	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	-	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	66,536,000	1 Laporan	71,992,000	1 Laporan	71,992,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	-	460 Dokumen	100,000,000	460 Dokumen	83,170,000	460 Dokumen	89,991,000	460 Dokumen	89,991,000	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	83,170,000	1 Dokumen	89,991,000	1 Dokumen	89,991,000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	-	16 Dokumen	1,700,000,000	16 Dokumen	1,413,893,000	16 Dokumen	1,529,848,000	16 Dokumen	1,529,848,000	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	-	2 Dokumen	650,000,000	2 Dokumen	540,606,000	2 Dokumen	584,941,000	2 Dokumen	584,941,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga dan Laporan hasil Koordinasi Dalam Rangka penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	-	12 Laporan	1,250,000,000	12 Laporan	1,039,627,000	12 Laporan	1,124,888,000	12 Laporan	1,124,888,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	-	12 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	291,095,000	12 Dokumen	314,986,000	12 Dokumen	314,986,000	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Dokumen	-	12000 Dokumen	650,000,000	12000 Dokumen	540,606,000	12000 Dokumen	584,941,000	12000 Dokumen	584,941,000	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	-	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	665,361,000	1 Dokumen	719,928,000	1 Dokumen	719,928,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	10 Orang	750,000,000	10 Orang	623,776,000	10 Orang	674,932,000	10 Orang	674,932,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	83,73 %	100%	6,550,000,000	100%	5,447,644,000	100%	5,894,409,000	100%	5,894,409,000	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	Laporan	-	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	182,974,000	4 Laporan	197,980,000	4 Laporan	197,980,000	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	-	84 Dokumen	2,000,000,000	84 Dokumen	1,663,404,000	84 Dokumen	1,799,821,000	84 Dokumen	1,799,821,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	-	12 Laporan	140,000,000	12 Laporan	116,438,000	12 Laporan	125,987,000	12 Laporan	125,987,000	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi.	Laporan	-	48 Laporan	220,000,000	48 Laporan	182,974,000	48 Laporan	197,980,000	48 Laporan	197,980,000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	-	106 Dokumen	1,000,000,000	106 Dokumen	831,702,000	106 Dokumen	899,910,000	106 Dokumen	899,910,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	6 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen	332,680,000	6 Dokumen	359,964,000	6 Dokumen	359,964,000	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	576 Dokumen	270,000,000	576 Dokumen	224,559,000	576 Dokumen	242,975,000	576 Dokumen	242,975,000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	207,925,000	1 Dokumen	224,977,000	1 Dokumen	224,977,000	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	166,340,000	1 Dokumen	179,982,000	1 Dokumen	179,982,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pemerintah Daerah												
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	-	480 Orang	1,300,000,000	480 Orang	1,081,212,000	480 Orang	1,169,883,000	480 Orang	1,169,883,000	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang dibina	Lembara	-	6 Lembara	550,000,000	6 Lembara	457,436,000	6 Lembara	494,950,000	6 Lembara	494,950,000	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	88,52 %	90%	6,682,782,666,000	90%	6,399,050,945,184	90%	6,983,621,051,696	90%	6,983,621,051,696	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	-	2 Laporan	210,000,000	2 Laporan	174,657,000	2 Laporan	188,981,000	2 Laporan	188,981,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	-	10 Laporan	1,300,750,000,000	10 Laporan	1,931,836,461,000	10 Laporan	2,145,558,720,000	10 Laporan	2,145,558,720,000	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Laporan	-	21 Laporan	793,322,666,000	21 Laporan	650,774,901,184	21 Laporan	708,633,536,696	21 Laporan	708,633,536,696	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	-	16 Laporan	4,588,500,000,000	16 Laporan	3,816,264,926,000	16 Laporan	4,129,239,814,000	16 Laporan	4,129,239,814,000	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	%	91,96 %	100%	1,600,000,000	100%	1,330,723,000	100%	1,439,856,000	100%	1,439,856,000	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	-	3 Dokumen	1,600,000,000	3 Dokumen	1,330,723,000	3 Dokumen	1,439,856,000	3 Dokumen	1,439,856,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	%	-	40%	11,850,000,000	45%	10,688,655,000	47%	11,073,088,000	47%	11,073,088,000	BPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	%	-	40%	11,850,000,000	45%	10,688,655,000	47%	11,073,088,000	47%	11,073,088,000	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	-	1 Dokumen	850,000,000	1 Dokumen	706,946,000	1 Dokumen	764,924,000	1 Dokumen	764,924,000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	124,755,000	1 Dokumen	134,986,000	1 Dokumen	134,986,000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	166,340,000	1 Dokumen	179,982,000	1 Dokumen	179,982,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	582,191,000	1 Dokumen	629,937,000	1 Dokumen	629,937,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	665,361,000	1 Laporan	719,928,000	1 Laporan	719,928,000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	-	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	415,851,000	1 Laporan	449,955,000	1 Laporan	449,955,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	-	2 Laporan	3,000,000,000	2 Laporan	3,328,096,000	2 Laporan	3,108,884,000	2 Laporan	3,108,884,000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	-	3 Laporan	1,000,000,000	3 Laporan	831,702,000	3 Laporan	899,910,000	3 Laporan	899,910,000	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Laporan	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	124,755,000	1 Laporan	134,986,000	1 Laporan	134,986,000	

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku pengelola keuangan daerah berkewajiban menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 pada masa transisi pasca pemilu serentak tahun 2024 dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur. Namun secara khusus, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 2024-2026 secara internal berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yakni :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah” dan
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim”.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan indikator kinerja dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang selaras dengan tujuan dan sasaran pada RPD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPKAD Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2							3	5	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	point	N/A	N/A	N/A	N/A	60	65	70
		2.Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	point	N/A	N/A	N/A	N/A	40	45	50
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	1.Nilai SAKIP BPKAD	Skor	54,12 (CC)	51,11 (CC)	59,45 (CC)	-	65 (B)	70 (B)	75 (BB)
		2.Indeks Kepuasan Atas Layanan BPKAD	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	82	84	86

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator Kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target. BPKAD Prov. Kaltim telah merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai Berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja pada Tahun				Target Kinerja Pada Tahun			Ket
	Indikator Kinerja Program		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kesesuaian Program	Persentase	100	100	100	-	100	100	100	Indikator ini merupakan indikator komposit untuk membentuk nilai indeks pengelolaan keuangan (direct cascade)
2	Persentase pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai ketentuan :									
	- Alokasi 20% anggaran belanja untuk Pendidikan.	Persentase	100	90.75	96	-	100	100	100	
	- Alokasi 10% anggaran belanja untuk Kesehatan (diluar gaji)	Persentase	100	100	100	-	100	100	100	
	- Alokasi 25% anggaran belanja untuk infastuktur dari penerimaan dana transfer	Persentase	100	100	100	-	100	100	100	
3.	Ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban	Kualitatif (jika tepat = 100, jika tidak=0)	100	100	100	-	100	100	100	

	keuangan daerah melalui SIPD.									
4.	Persentase serapan anggaran belanja APBD (anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer)	Persentase	87,13	87,76	84,43	-	100	100	100	
5.	Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Pengelolaan Aset	Persentase	100	100	100	-	100	100	100	Indikator ini merupakan indikator komposit untuk membentuk nilai indeks pengelolaan keuangan (direct cascade)
6.	Ketepatan waktu penyampaian laporan dari RKBMD	Kulitaitf (jika tepat = 100, jika tidak=0	100	100	100	-	100	100	100	
7.	Persentase tindaklanjuti temuan BPK terkait BMD	Persentase	100	100	100	-	100	100	100	
8.	Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan	Persentase	15	15	15	-	15	15	15	
9.	Persentase penggunaan BMD sesuai ketentuan	Persentase	100 (3)	100 (4)	100 (9)	100 (10)	100 (9)	100 (6)	100 (6)	
10.	Persentase BMD yang diasuransikan	Persentase	N/A	100	N/A	-	100	100	100	
11.	Nilai SAKIP BPKAD	Skor	54,12 (CC)	51,11 (CC)	59,45 (CC)	-	65 (B)	70 (B)	75 (BB)	
12.	Indeks Kepuasan Atas Layanan BPKAD Prov. Kaltim	Indeks	N/A	N/A	N/A	-	82	84	86	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 disusun dalam rangka penyelarasan atas disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan pada masa transisi pasca kekosongan kepala daerah dan pemilu serentak tahun 2024 dalam rangka keberlanjutan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen RENSTRA ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2024-2026, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Renstra ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024 hingga Tahun 2026;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing tiap tahunnya, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun;
4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renstra secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama periode Tahun 2024-2026;

5. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berencana mengusulkan Kembali pembentukan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya ini merupakan hal yang sangat mendesak (urgent) karena sampai saat ini secara kelembagaan belum ada entitas yang khusus melaksanakan operasionalisasi/pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan BMD secara baik dan profesional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sumberdaya manusia sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai hasil dari perhitungan beban kerja / Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap bagian/unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Tidak tertutup kemungkinan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM

Pembina Utama Muda
NIP.19680215 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 4 (empat) tahapan Perencanaan meliputi :

- a) Penyusunan Rencana;
- b) Penetapan Rencana;
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- d) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 di tahun 2023 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengatur penyusunan rencana pembangunan pada masa transisi sampai pilkada serentak tahun 2024. Melalui instruksi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan kepala daerah berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang diikuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim tahun 2023-2026.

Penyusunan Ranwal Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026.

Perencanaan ini memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026.

Dokumen Ranwal Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam pelaksanaannya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah setiap tahun. Rencana kerja tahunan ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempedomani sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2025, dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036. Selain itu, dokumen RPD disusun dengan memperhatikan:

- (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 - (3) Isu-isu strategis yang berkembang;
 - (4) Kebijakan nasional; dan
 - (5) Regulasi yang berlaku. Termasuk Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Ranwal Renstra ini merupakan langkah awal untuk perencanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengukuran kinerjanya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014.
-

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian secara otonom.

Secara umum, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah suatu upaya manajemen perencanaan untuk mengatasi masalah dan kendala yang belum tuntas tertangani, dan mengantisipasi masalah, tantangan dan peluang yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis ditingkat regional, nasional maupun global. Rencana Strategis disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun sebagai pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur dan penyempurnaan manajemen.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 – 2025, RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;

- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam mewujudkan sumber daya aparatur daerah;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan arah dan perannya dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diamanatkan didalam RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2024 – 2026.

Pencapaiannya yaitu melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunannya sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan renstra BKD Provinsi Kalimantan Timr, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil Renstra. Evaluasi terhadap hasil Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Perubahan Renstra juga didasari adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Kebijakan untuk melakukan perubahan Renstra sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD Provinsi menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, adalah adanya perubahan kebijakan nasional diantaranya :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Substansi Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi terkini, permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerja serta indikator kinerja utama kepala BKD Prov.Kaltim & target kinerjanya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya BAB IV tentang Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang yang terkait dengan reformasi birokrasi disebut bahwa “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
-

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun tujuan penyusunan perencanaan strategis adalah untuk:

- (1) Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada serentak tahun 2024
 - (2) Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2024-2026
 - (3) menjabarkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024–2026 ke dalam program kerja operasional;
 - (4) menyediakan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - (5) menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi.
-

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra BKD Prov. Kaltim.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROV. KALTIM

Bab ini mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim, Sumber Daya BKD Prov. Kaltim, Kinerja Pelayanan BKD Prov. Kaltim, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Prov. Kaltim.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD PROV. KALTIM

Bab ini mancakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Prov. Kaltim, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Prov. Kaltim, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis, dan Penentuan Isu-isu Startegis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Prov. Kaltim.

BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan BKD Prov. Kaltim dalam 5 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD Prov. Kaltim dalam 5 Tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD PROV. KALTIM

Pelayanan publik dewasa ini menjadi isu strategis yang merupakan gambaran harapan masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian secara berkelanjutan akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (*trust*) dan legitimasi terhadap Pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan khususnya pelayanan kepegawaian menjadi indikator terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Kualitas pelayanan terkait erat dengan manajemen sumber daya yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya di bidang kepegawaian dalam membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses pelaksanaan dan pengembangan serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan menindaklanjuti hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terus dipacu mengingat kualitas sumber daya manusia yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur.

Terorganisirnya basis data dan informasi kepegawaian merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses peningkatan kualitas aparatur daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin produk kepegawaian dan hasil kajian strategik tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemetaan Kepegawaian sesuai dengan kompetensi serta kualifikasinya dan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Aparatur yang memadai, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Proses yang dimulai dari tahap ke tahap, kompilasi data, analisis data sampai ke tahap pembuatan rencana, semuanya memerlukan Pemetaan Kepegawaian sebagai bahan kerja dan implementasi dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur keberadaan Pemetaan Kepegawaian ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dalam melakukan proses peningkatan sumberdaya aparatur daerah yang memadai. Beberapa Pemetaan Kepegawaian yang telah dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat dijadikan sebagai data awal dalam menganalisa dan membuat rencana bagi para pengambilan keputusan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui program pembinaan dan pengembangan aparatur telah berhasil menjalankan pekerjaannya melalui evaluasi RPJMD Tahun 2013-2018 dengan estimasi capaian kinerja mencapai 96,05% serta dalam mendukung Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik melalui penjabaran program prioritas berdasarkan indikator kinerja yang terukur, efektif dan akuntabel. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada kelemahan dalam menjalankan strategi dan kebijakan diarah kepegawaian dikarenakan beberapa faktor eksternal dan internal dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

Dalam mendukung pembangunan ASN untuk mencapai

ketahap birokrasi berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menjalankan sistem merit dalam pelaksanaan program strategisnya, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas, dan reformasi kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Inilah yang menjadi tantangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedepan nantinya dan akan menjadi program prioritas dalam mendukung RPJMD dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada bagian ketiga pasal 6 poin d dinyatakan bahwa : "Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian".

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu : "Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi "

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 7) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, Mutasi ASN, Pengembangan ASN dan Pembinaan ASN;
- 8) Pelaksanaan Administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Jumlah personil di Sekretariat sebanyak 32 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- 2) Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan kinerja ASN.

3) Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran, pelaporan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis dalam pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN. Jumlah personil di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN sebanyak 14 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pengadaan ASN;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemberhentian ASN;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang sistem informasi dan pengolahan data ASN;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan dan pengadaan ASN, pemberhentian ASN serta sistem informasi dan pengolahan data ASN;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi, pengkajian, analisis, pengaturan teknis, fasilitasi, pengendalian dan pelaporan dalam perencanaan dan pengadaan ASN.

- 2) Sub Bidang Pemberhentian ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pengaturan teknis, fasilitasi dan pengendalian dan pelaporan dalam proses pemberhentian ASN.
- 3) Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengaturan teknis, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan terhadap sistem informasi dan pengolahan data ASN.

d. Bidang Mutasi ASN

Bidang Mutasi ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dalam pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan Mutasi ASN. Jumlah personil di Bidang Mutasi ASN sebanyak 10 PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi ASN;
 - 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang mutasi ASN;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mutasi jabatan pelaksana;
 - 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang kepegangatan ASN;
 - 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mutasi jabatan structural;
 - 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mutasi jabatan pelaksana, kepegangatan dan mutasi jabatan structural;
-

- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Mutasi ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mutasi jabatan pelaksana.
- 2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mengenai kepangkatan.
- 3) Sub Bidang Mutasi Jabatan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mutasi jabatan struktural.

e. Bidang Pengembangan ASN

Bidang Pengembangan ASN mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian teknis dalam pengembangan ASN. Jumlah personil di Bidang Pengembangan sebanyak 10 PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan ASN menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan ASN;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan ASN;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Peningkatan Kualitas ASN;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Sertifikasi Jabatan ASN;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pembinaan jabatan fungsional ASN;

- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas ASN, sertifikasi jabatan ASN serta pembinaan jabatan fungsional ASN;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengembangan ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas ASN.
- 2) Sub Bidang Sertifikasi Jabatan ASN, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan dalam sertifikasi jabatan ASN.
- 3) Sub Bidang Jabatan Fungsional ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap pembinaan jabatan fungsional bagi ASN.

f. Bidang Pembinaan ASN

Bidang Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dalam pembinaan ASN. Jumlah personil di Bidang Pembinaan sebanyak 22 orang (termasuk PNS dan Non PNS).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan ASN;
 - 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pembinaan ASN;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan ASN;
-

- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Organisasi Profesi ASN;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian, evaluasi kinerja, dan penghargaan ASN, kedudukan hukum dan disiplin ASN serta organisasi profesi ASN;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pembinaan ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan terhadap kedudukan hukum dan disiplin ASN.
- 2) Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan ASN, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan terhadap penilaian, evaluasi kinerja dan penghargaan bagi ASN.
- 3) Sub Bidang Organisasi Profesi ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan organisasi profesi bagi ASN.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penilaian Kompetensi Pegawai

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah dibidang Penilaian Kompetensi Pegawai dan melaksanakan urusan ketatausahaan. Jumlah personil di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebanyak 15 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang perencanaan, evaluasi, dan penilaian kompetensi pegawai;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasio dan pelaporan.
- b. Seksi Pengujian dan Penilaian, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pengujian dan penilaian kompetensi pegawai.
- c. Seksi Pengembangan Instrumen, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan instrument kompetensi pegawai.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Merupakan sekelompok jabatan yang berisikan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai personil sebanyak 16 PNS dan terdiri dari 3 rumpun jabatan, yaitu Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, dan Assessor.

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tata kerja sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
4. Setiap laporan yang di isikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
5. Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
6. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

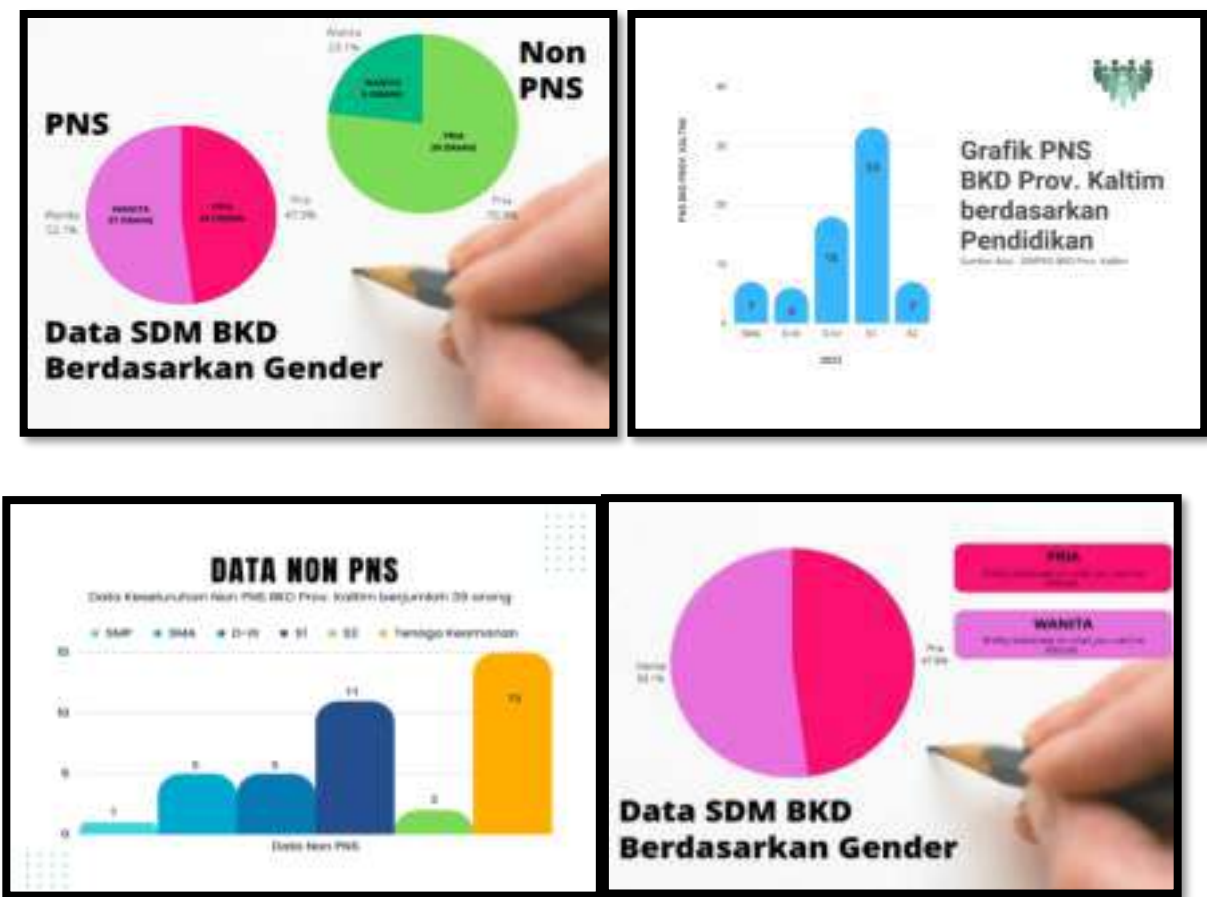
2.2 Sumber Daya BKD Prov. Kaltim

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 mempunyai personil sebanyak 110 orang terdiri dari 12 pejabat struktural, 29 orang pejabat fungsional, 30 orang pejabat pelaksana, dan 36 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai BKD Prov. Kaltim
Berdasarkan Jabatan & Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur per Maret 2023

Tabel 2.3
Rekapitulasi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	Keterangan
1	Strata 2	8	1. Manajemen Keuangan = 1 2. Ilmu Adm. Negara = 5 3. Ilmu Adm. Publik = 1 4. Ekonomi Umum = 1 5. Psikologi Industri Organisasi =1
2	Strata 1/ Diploma IV	50	1. Ilmu Jurnalistik = 1 2. Psikologi Umum = 5 3. Ekonomi Keuangan = 1 4. Ekonomi Manajemen = 1 5. Ekonomi Akuntansi = 2 6. Ilmu Adm. Negara = 5 7. Teknik Informatika = 1 8. Ilmu Komputer = 1 9. Sistem Informasi = 1

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	Keterangan
			10.Manajemen Pembangunan = 3 11.Politik Pemerintahan = 7 12.Manajemen Pemerintahan = 2 13.Ilmu Administrasi =1 14.Ilmu Hukum = 1 15.Manajemen Informasi Komunikasi = 1 16.Kuangan Daerah = 5
3	Diploma III	7	1. Ilmu Adm. Negara = 2 2. Adm Keuangan Daerah = 1 3. Teknik Informasi = 1 4. Teknologi Informasi = 2 5. Bahasa Inggris = 1
4	SLTA	6	
	JUMLAH	71	

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Center of Knowledge* dan *Learning Organization*. Komposisi jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan mampu memberikan andil yang cukup besar.

2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Uraian	Banyak ya	Satuan
1	Tanah Kantor BKD Jl. M. Yamin	2.880	m ²
2	Tanah UPTD Penkom Jl. Kartini	2.513	m ²
3	Tanah Kantor Sekretariat DP Korpri Jl. Bhayangkara	2523	m ²
4	Bangunan Gedung BKD Jln. M. Yamin	4.231	m ²
5	Bangunan Gedung UPTD Penkom	1.848	m ²
6	Bangunan Gedung Kantor Sekretariat DP Korpri	1840	m ²
7	Jumlah Lantai Gedung BKD	5	Lantai
8	Jumlah Lantai Gedung Assessment Center	3	Lantai
9	Jumlah Lantai Gedung Korpri	2	Lantai
10	Lantai 1 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Parkir	1	Area/Halam an
	• Ruang Arsip	1	Ruang
	• Toilet Lantai 1	2	Ruang
	• Ruang Panel	1	Ruang
	• Ruang Pengairan	1	Ruang
	• Ruang Genset	1	Ruang
11	Lantai 2 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Rapat	2	Ruang
	• Ruang Kerja Sekretariat	2	Ruang
	• Ruang Kerja Kepala BKD	1	Ruang
	• Ruang Data	1	Ruang
	• Ruang Perpustakaan	1	Ruang
	• Ruang PABX	1	Ruang
	• Ruang Panel	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Ruang Kontrol	1	Ruang
	• Musholla	1	Ruang
	• Toilet Lantai 2	2	Ruang
12	Lantai 3 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Rapat	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pengembangan	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Mutasi	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Ruang Panel	1	Ruang
	• Toilet Lantai 3	2	Ruang
13	Lantai 4 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Kerja Bidang PPI	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pembinaan	1	Ruang
	• Ruang Kerja JFT	1	Ruang
	• Ruang Panel	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Toilet Lantai 4	2	Ruang
14	Lantai 5 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Makan	1	Ruang

	• Kantin	1	Ruang
	• Ruang Panel	1	Ruang
	• Roof Top	1	Ruang
15	Lantai 1 UPTD Penkom terdiri dari :		
	• Ruang CAT	2	Ruang
	• Ruang Data/Monitor	1	Ruang
	• Ruang Tamu	2	Ruang
	• Parkir	1	Area/Halaman
	• Toilet Lantai 1	2	Ruang
16	Lantai 2 UPTD Penkom terdiri dari :		
	• Ruang TU	1	Ruang
	• Ruang Kepala	1	Ruang
	• Ruang Pengawas&Asesor	2	Ruang
	• Ruang Rapat	1	Ruang
	• Kamar	3	Ruang
	• Dapur	1	Ruang
	• Toilet Lantai 2	2	Ruang
	• Ruang Arsip	1	Ruang
	• Mushola	1	Ruang
17	Lantai 3 UPTD Penkom terdiri dari :		Ruang
	• Ruang Monitor	1	Ruang
	• Ruang Simulasi Individu	7	Ruang
	• Ruang FGD	2	Ruang
	• Musholla	1	Ruang
	• Ruang Makan	1	Ruang
	• Dapur	1	Ruang
	• Toilet Lantai 3	2	Ruang
18	Genset	3	unit
19	Alat Bengkel dan Alat Ukur	10	Unit
20	Alat Pertanian	33	Unit
21	Alat Angkutan		
	a. Kendaraan Roda 4	24	unit
	b. Kendaraan Roda 2	18	unit
22	Peralatan Kantor dan rumah tangga	2.440	unit
23	Alat Studio dan Alat Komunikasi	174	unit
24	Alat Keselamatan Kerja	8	unit
25	Komputer PC	159	unit
26	Laptop/Note Book	53	unit
27	Printer	79	unit
28	Alat Laboraturium	92	unit
29	Alat Kedokteran	73	unit
30	Buku Perpustakaan	213	buku
31	Alat Persenjataan	1	unit

Sumber Data : Inventaris BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

2.4 Kinerja Pelayanan BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyikapi era globalisasi informasi, dan reformasi demokrasi, akan berpengaruh terhadap sikap kritis dan keterbukaan dari berbagai elemen masyarakat dalam keterlibatannya pada proses

manajemen kepegawaian. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mampu memberikan pelayanan informasi hasil-hasil perencanaan manajemen kepegawaian baik dalam bentuk publikasi maupun visual dan sebagai wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Kalimantan Timur.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jenis Layanan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
1. Permohonan Pindah Instansi Antar Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim	Bidang Mutasi ASN
2. Permohonan Pindah Instansi Antar Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	
3. Permohonan Pindah Instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
4. Permohonan Pindah Instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur ke Luar Provinsi Kalimantan Timur (ke Departemen; Kementerian/Lembaga; Provinsi lain; Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Timur)	
5. Permohonan Pindah Instansi dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Ke Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	
6. Permohonan Pindah Instansi dari Luar Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
7. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/a dan IV/b	
8. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/c ke atas	
9. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kaltim Golongan I dan II	
10. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kaltim Golongan Ruang IV/c ke atas	
11. Perbaikan lain-lain pada SK Kenaikan Pangkat	
12. Perbaikan Masa Kerja pada SK Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim	
13. Peninjauan Masa Kerja PNS Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/a dan IV/b	
14. Peninjauan Masa Kerja PNS Provinsi Kaltim	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
15. Penetapan Pengangkatan Jabatan Struktural Kabupaten/Kota (SK Gubernur) 16. Penetapan Pengangkatan Jabatan Struktural Prov (SK Gubernur) 17. Pengangkatan dalam Jabatan struktural secara Terbuka 18. Penetapan Hasil Konsultasi Pengangkatan Es II/b (Gub)	
19. Penetapan Pemberhentian Jabatan Struktural 20. Penetapan Pembebasan Sementara-Pemberhentian-Penyesuaian Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur) 21. Penetapan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur) 22. Penetapan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur) 23. Penetapan PLT/PLH Struktural 24. Penetapan Calon Peserta Diklat Teknis Fungsional bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim 25. Penetapan Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; II; III dan IV. 26. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah 27. Penetapan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; II; III; dan IV 28. Assessmen Center/Fit And Proper Test / Tes Psikologi Bagi PNS Dilingkungan Pemprov. Kaltim 29. Penetapan Calon Bimbingan Teknis bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim 30. Penetapan Calon Peserta Diklat Prajabatan bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim	Bidang Pengembangan ASN
31. Penetapan Pemberian Cuti Besar Pegawai 32. Penetapan Pemberian Cuti Sakit Pegawai 33. Pemberhentian Sementara dan Tetap karena Tindak Pidana 34. Penetapan Hukuman Pelanggaran Disiplin PNS 35. Penetapan Keputusan Perceraian PNS 36. Pelaksanaan Medical Check Up 37. Pemroses Usulan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 38. Pemroses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) untuk Esselon II 39. Pemrosesan Gaji Berkala 40. Pemrosesan Konseling 41. Pemrosesan Usulan Satyalancana Karya Satya	Bidang Pembinaan ASN
42. Penetapan Peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil 43. Pembuatan SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Golongan I; II dan III	Bidang Pengadaan, Pemberhe

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
44. Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	ntian dan Informasi ASN
45. Penyusunan Rincian Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	
46. Pengambilan Sumpah Janji PNS	
47. Pemrosesan Usulan Kartu Taspen	
48. Implementasi Biometrik KPE	
49. Pengelolaan Tata Naskah Khusus Pejabat Eselon II (baru)	
50. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Masuk	
51. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Pensiun	
52. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Mutasi	
53. Pengusulan Penetapan Karis	
54. Pengusulan Penetapan Karpeg	
55. Pengusulan Penetapan Karsu	
56. Penyusunan Brosur	
57. Penyusunan Buku profil	
58. Penyusunan Buku saku	
59. Pemeliharaan jaringan (LAN)	
60. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	
61. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	
62. Pemberian SK MPP (Masa Persiapan Pensiun)	
63. Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol. IV/b kebawah	
64. Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol. IV/c keatas	
65. Penetapan SK Pensiun Dini Kabupaten/Kota	
66. Pengelolaan Website BKD Prov Kaltim	
67. Penyusunan Penetapan Kinerja	Sekretariat
68. Penyusunan RKA	
69. Penyusunan RKPD	
70. Penyusunan DPA	
71. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	
72. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
73. Penyusunan Renstra	
74. Penyusunan LAKIP	
75. Proses Pembayaran Pihak Ketiga atau LS	
76. Proses Penerbitan Ganti Uang (GU)	
77. Proses Penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) Triwulan	
78. Proses Penerbitan Tambahan Uang (TU)	
79. Proses Penerbitan Uang Persediaan (UP)	
80. Pelaporan Keuangan	
81. Pemberian Cuti Pegawai	
82. Pemrosesan Perjalanan Dinas Pegawai	
83. Pemrosesan SK Kenaikan Gaji Berkala Golongan IIIId ke bawah	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
84. Pemrosesan Surat Masuk	
85. Pemrosesan Usul Administrasi Kepegawaian	
86. Penerima Tamu	
87. Pengadaan Belanja Modal	
88. Penyusunan Laporan Daftar Hadir Pegawai	

2.4 Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi

Kinerja pelayanan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan 5 tahun terakhir, diuraikan berdasarkan tugas fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pembinaan;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi yang telah dilakukan, maka pencapaian kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat struktural di lingkungan Pemprov. Kaltim				PNS	1.189	699	80	40	155	954	907	80	40	54	80%	130%	100%	100%	35%
2	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas				PNS	4	4	350	1.000	114	3	1	348	971	256	75%	25%	99%	97%	225%
3	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional				PNS	510	400	-	380	150	317	173	-	395	72	62%	43%	0%	104%	48%
4	Jumlah Dokumen Penyusunan E-Formasi				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS				SK	90	168	-	27	24	99	168	-	29	24	110%	100%	0%	107%	100%
	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS				PNS	-	-	-	100	90	-	-	-	98		0%	0%	0%	98%	0%
7	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi				SK	300	200	200	1.000	300	224	310	250	950	168	75%	155%	125%	95%	56%
8	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu				SK	2.700	2.000	2.000	1.800	1.300	2.785	2.127	1.522	1.889	1.543	103%	106%	76%	105%	119%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Jumlah Aplikasi kepegawaian yang dikembangkan				Aplikasi	-	-	6	3	3	-	-	6	3	3	0%	0%	100%	100%	100%
10	Jumlah data PNS yang terupdate dalam sistem SIMPEG dan SAPK				Data PNS	7.500	7.234	7.288	11.500	1.954	5.581	6.699	6.635	11.566	1.017	74%	93%	91%	101%	52%
11	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun				PNS	400	370	262	225	300	425	377	262	225	218	106%	102%	100%	100%	73%
12	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I				PNS	26	21	30	30	10	26	21	30	31	7	100%	100%	100%	103%	70%
13	Jumlah PNS yang mendapat izin perceraian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.				PNS	-	10	-	-	12	-	16	-	-	16	0%	160%	0%	0%	133%
14	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar				PNS	115	140	62	32	120	144	206	62	32	45	125%	147%	100%	100%	38%
15	Jumlah Praja IPDN yang mendapatkan Biaya penunjang Pendidikan				Orang	38	125	-	-	-	38	122	-	-	-	100%	98%	0%	0%	0%
16	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi				Laporan	12	8	12	1	-	12	8	12	1	-	100%	100%	100%	100%	0%
17	Jumlah peserta yang mengikuti konseling menjelang purna tugas				PNS	200	149	80	-	-	160	149	80	-	-	80%	100%	100%	0%	0%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Jumlah Peserta yang lulus dalam Ujian Dinas				PNS	51	60	-	173	-	51	59	-	173	-	100%	98%	0%	100%	0%
19	Jumlah rekomendasi permasalahan kepegawaian				Rekomendasi	-	-	-	29	10	-	-	-	29	7	0%	0%	0%	100%	70%
20	Jumlah Pegawai yg mengikuti Pengujian Kesehatan PNS				PNS	213	146	146			208	154	104	-	-	98%	105%	71%	0%	0%
21	Persentase Tingkat Kehadiran PNS				%	-	90	98	99	98	-	88	99	99	98	0%	98%	101%	100%	100%
22	Jumlah pegawai yang mengambil masa cuti				PNS	100	100	100	300	200	172	122	121	258	84	172%	122%	121%	86%	42%
23	Jumlah Pegawai yang Pensiun				PNS	60	95	95	400	255	71	154	162	380	132	118%	162%	171%	95%	52%
24	Persentase PNS yang memiliki nilai diatas cukup				%	-	-	99	99	99	-	-	99	99	94	0%	0%	100%	100%	95%
25	Jumlah Pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya				PNS	-	-	-	960	200	-	-	-	875	26	0%	0%	0%	91%	13%
26	Jumlah Peremajaan Data PNS				Data PNS	-	-	-	11.500	11.570	-	-	-	11.566	5.300	0%	0%	0%	101%	46%

 : Kegiatan belum terakomodir dalam DPA

2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan pada level program; selanjutnya, akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode perencanaan sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Total APBD		Jumlah Prog/Keg yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket
					BL	BTL	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019	35.916.135.262	27,407,070,963.98	8,509,064,298.02	76.31	26,035,000,000	9.881.135.262	5	24	5	24	APBD
2020	34.450.519.415	30.532.062.972	3.918.456.443	88.63	23.265.036.415	11.185.483.000	8	19	8	19	APBD
2021	46.568.661.000	41.450.087.977	5.118.573.023	89.01	32.001.250.160	14.567.410.840	10	23	10	23	APBD

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Jumlah Prog/Keg yang dialokasikan			Total Program / Kegiatan			Ket
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
2022	52.270.625.316	50.298.736.664	1.971.888.652	96.23	4	15	36	4	15	36	APBD

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2024-2026 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

Munculnya berbagai kebijakan baru mengenai manajemen dan administrasi kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Kepegawaian Negara; dan Kementerian Dalam Negeri, yang harus segera diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pandemi Covid-19 telah merubah seluruh tantangan masyarakat dunia. Salah satunya struktur social pada masyarakat. Mulai tata kelakuan (*mores*), kebiasaan (*folkways*), cara (*usage*), dan adat istiadat (*custom*) berubah dan beradaptasi.

Untuk periode 2024-2026, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

1. Tersedianya UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
2. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi.
4. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS BKD

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan yang terjadi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD

Berdasarkan Isu Startegis dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam menjalankan tujuan ke 4 yaitu “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAHKLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ditangani oleh BKD Prov. Kaltim selama 3 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Isu Startegis

Dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim

Masalah Utama	Masalah	Akar Permasalahan
Implementasi penyelenggaraan Sistem Merit yang belum berjalan secara optimal	1. Belum terpenuhinya ASN sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	a. Belum tersedianya perhitungan kebutuhan ASN sesuai dengan ketentuan b. Sebagian besar ASN yang telah diukur kompetensinya belum memenuhi standar kompetensi jabatan
	2. Belum terukurnya penilaian kinerja ASN sesuai kaidah dan belum optimalnya	c. Instrumen pengukuran kinerja masih dalam tahap penyiapan d. Penilaian SKP masih sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian
	3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	e. Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja

		secara objektif
		f. Pelaksanaan reward dan punishment belum optimal
		g. Belum semua ASN diukur kompetensinya
		h. Belum tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat

Berdasarkan identifikasi permasalahan isu startegis diatas, permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah :

1. Belum tersedianya perhitungan kebutuhan ASN sesuai dengan ketentuan
2. Sebagian besar ASN yang telah diukur kompetensinya belum memenuhi standar kompetensi jabatan
3. Instrumen pengukuran kinerja masih dalam tahap penyiapan
4. Penilaian SKP masih sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian
5. Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara objektif
6. Pelaksanaan reward dan punishment belum optimal
7. Belum semua ASN diukur kompetensinya
8. Belum tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat

3.2. Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan pembangunan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan kedalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 khususnya tahap

terakhir (kelima). Selain itu, tujuan dan sasaran yang dihasilkan juga mempertimbangkan penyelarasan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik

Visi RPJP Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”.

Misi RPJP Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dalam Pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi, dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi

Adapun Sasaran pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang menunjang Tujuan 4 (empat) “ Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut :

Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Sasaran 12 : Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel

Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah **“Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”**, yang mana dalam menunjang sasaran tersebut yaitu pelaksanaan Sistem Merit yang merupakan amanat dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2024-2026

Tujuan: “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional yang memiliki pelayanan public berkualitas	1. Belum tersedianya perhitungan kebutuhan ASN sesuai dengan ketentuan 2. Sebagian besar ASN yang telah diukur kompetensinya belum memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Instrumen pengukuran kinerja masih dalam tahap penyiapan 4. Penilaian SKP masih sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian 5. Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara objektif 6. Pelaksanaan reward dan punishment belum optimal 7. Belum semua ASN diukur kompetensinya 8. Belum tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat	a. Dokumen standar kompetensi jabatan (SKJ) belum tersedia b. Belum terimplementas inya pembinaan pola karir ASN dalam menggambarkan alur pengembangan karir ASN c. Belum Optimalnya Anjab/ABK dan Peta Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan d. Belum terintegrasinya sistem informasi database kepegawaian dengan pusat e. Belum optimalnya kesadaran ASN dalam pemutakhiran data mandiri f. Belum optimalnya pemahaman ASN terhadap penilaian kinerja	1. Tersedianya Database Kepegawaian (Simpeg BKD Kaltim) 2. Tersedianya UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai yang terakreditasi “A” 3. Tersedianya Sistem Absensi Online dan Layanan kepegawaian lain yang tersedia di website bkd kaltim 4. Ketersediaan Jumlah Personil dan Kapasitas kemampuan yang cukup memadai

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota

Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.3.2

Tujuan dan Sasaran Strategi Kemenpan & RB



Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut.
“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, Kriteria manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan dibawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
6. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut.
 “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa ”.

Misi :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Visi dan Misi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah sebagai berikut :

“ Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”

Misi :

1. Mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;

2. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, professional dan akuntabel.

Apabila dikaitkan dengan visi misi Kementerian/Lembaga, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Visi dan Misi Kementerian/ Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
Visi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”			
1	Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy	-SDM aparatur dan sapras pendukung yang belum bejalan secara optimal	Adanya Sistem dan regulasi yang mendukung jalannya birokrasi berbasis elektronik
2	Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global	Lemahnya perubahan mainset SDM Aparatur, lemahnya sistem yang ada, kebijakan yang tidak mendukung	Perbaikan sistem pengembangan kompetensi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural
3	- Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Inkonsistensi terhadap aturan yang ada, kebijakan yang tidak mendukung, SDM Aparatur yang kurang kompeten	Adanya sistem yang mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi tidak didukung dengan sumber daya yang kompeten, kompetitif, dan profesional	Adanya regulasi yang mengatur pengelolaan reformasi birokrasi
Visi Badan Kepegawaian Negara : “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”			
1	Mewujudkan Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Belum semua ASN memenuhi standar kompetensi jabatan	Pemetaan kompetensi pegawai sudah dilaksanakan
2	Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN	Pengelolaan ASN yang belum optimal	Penyusunan formasi ASN sesuai dengan standar kompetensi jabatan
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)	Sistem manajemen kepegawaian belum terintegrasi antara pusat/pemprov/kab/kota dengan baik	Adanya sistem informasi dan SDM aparatur yang handal
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima	Tata Kelola dan tata laksana manajemen ASN	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKD masuk kategori “BB”
5	Mewujudkan Pengawasan Dan	Sistem pengendalian dan pengawasan yang masih konvensional dan lemahnya	Adanya sistem dan aturan yang mengatur

No	Visi dan Misi Kementerian/ Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
	Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN	kesadaran aparatur dalam pelayanan publik	tentang pelaksanaan NSPK , setiap instansi memiliki standar pelayanan
Visi Kementerian Dalam Negeri : “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa ”			
1	Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan	Lemahnya sosialisasi tentang pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan	Adanya aturan yang jelas terhadap pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan
2	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum	SDM Aparatur yang kurang kompeten	Pengembangan kompetensi Aparatur melalui diklat
3	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	Terbenturnya kebijakan pusat terhadap keadaan di daerah yang menyebabkan inkonsistensi terhadap aturan yang berlaku.	Adanya aturan yang jelas terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
4	Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah	Adanya kebijakan dan regulasi yang dinilai kurang berkeadilan terhadap kebijakan yang ada	Konsistensi pimpinan terhadap kebijakan pembangunan kewilayahan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif	Masih adanya kasus korupsi yang terjadi di berbagai instansi baik pusat maupun daerah	Adanya sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan aparatur yang efektif, dan penegakan hukum yang baik.
Visi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) : “ Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Berkelas Dunia”			
1	Meningkatkan kualitas penarapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN	Kondisi Sistem Merit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berada di kategori II “Kurang”	Adanya peraturan yang mengatur tentang penilaian mandiri pelaksanaan sistem merit dilingkungan intansi pemerintah

Selain hal tersebut diatas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu Kepegawaian pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah belum sesuai dengan analisis jabatan dan analisi beban kerja;
2. Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara BKD Prov. Kaltim dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kab/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur untuk

mewujudkan misi BKN RI “Satu Data ASN” dalam mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data;

3. Belum terimplementasinya pembinaan pola karir ASN dalam menggambarkan alur pengembangan karir ASN;
4. Adanya dualisme regulasi antara Peraturan KEMENPAN-RB dan Peraturan BKN;
5. Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 mendapatkan poin sebesar 263,5 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait dengan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tentunya tidak bisa terlepas oleh adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). BKD Prov. Kaltim senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS yang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan sekitar. Namun kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil kajian RTRW dan KLHS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilingkungan BKD Prov. Kaltim selama 5 Tahun kedepan, dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan aturan RTRW maupun KLHS. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

3.5. Penentu Isu-isu Strategis Kepegawaian

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis terkait pengelolaan kepegawaian, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Isu-isu Strategis Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2018-2023

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Lainnya
Penataan Manajemen SDM Aparatur	Penataan Manajemen SDM Aparatur	Pemekaran/ pembentukan daerah baru (proyek pemindahan ibukota negara baru)	Pengukuran kompetensi melalui sistem Computer Assessted Test (CAT)
Peningkatan Disiplin PNS	Peningkatan Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemprov Kaltim		Penyelenggaraan sistem absensi online/terintegrasi
Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	Peningkatan Kesehatan PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim		Penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan data kab/kota
Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim		Proses mutasi kepegawaian menjadi <i>lesspaper</i>
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Data Kepegawaian yang Cepat, Tepat, dan Akurat		Perkembangan era digitalisasi tatanan new normal menuju birokrasi berkelas dunia
Pengadaan CASN dan PPPK	Tersedianya Informasi Kepegawaian yang Terbuka, Cepat, dan Akurat		Penyelenggaraan SI ASN “Satu Data ASN” yang terintegrasi
	Menciptakan Pembinaan Administrasi Manajemen Kepegawaian yang Penuh Perhatian		Pengukuran sistem dan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan NSPK
	Meningkatkan Pengelola Kepegawaian yang Profesional		Penerapan Tunjangan berbasis kinerja
	Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Lainnya
	Peningkatan Pendidikan Kedinasan		
	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
	Pengadaan PNSD sesuai dengan kebutuhan organisasi		

Berdasarkan gambaran isu-isu pengelolaan kepegawaian, maka secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah akan dilakukan

“Optimalisasi implementasi penyelenggaraan system merit “.

Adapun isu strategis yang dihadapi perbidang tugas fungsi BKD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis Dalam Pemberian dukungan terhadap Kebijakan Kepegawaian Daerah
2. Isu Strategis bidang Mutasi ASN:
 - a. Perencanaan Mutasi Umum Pegawai yang tepat guna dan Konsisten dalam pelaksanaannya.
 - b. Adanya Digitalisasi Proses Mutasi Kepegawaian sehingga proses pelayanan kepegawaian dilakukan secara digital dan *lesspaper*
 - c. Kemampuan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance
 - d. Optimalisasi Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai
 - e. Penyempurnaan penerapan sistem merit yang berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian, dalam peningkatan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Isu Strategis bidang Pengembangan ASN :
 - a. Dapat menciptakan Tenaga Kepamongan yang profesional

- b. Kemampuan mewujudkan Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional secara Profesional sesuai Kompetensi.
 - c. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta yang bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leader) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business);
4. Isu Strategis bidang Pembinaan ASN Pegawai :
- a. Penguatan kerjasama lembaga baik horizontal maupun vertikal.
 - b. Pemantapan sosialisasi, Workshop dan Bimtek guna meningkatkan mutu Pegawai secara Profesional sesuai dengan kompetensi.
 - c. Mampu mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan kepada PNS di lingkungan Pemprov. Kaltim.
 - d. Kemampuan untuk meningkatkan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim.
5. Isu Strategis bidang Perencanaan, Pengadaan dan Informasi ASN :
- a. Pemantapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dalam menunjang pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian
 - b. Kajian pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Pengelolaan Tata Naskah berbasis E-File Sistem untuk peningkatan mutu, kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan.
 - c. Kemampuan mewujudkan pengadaan ASN berdasarkan perbandingan obyektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan.
 - d. Kemampuan mewujudkan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK serta dapat mengundang talenta global
 - e. Kemampuan mewujudkan Satu Data ASN mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data.

6. Isu Strategis Kesekretariatan BKD

Dalam menghadapi isu-isu strategis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor – faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2021 dan Pergub Kaltim No, 78 tahun 2019 2. Ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang cukup memadai ; 3. Fasilitas yang dimiliki ; 4. Kerjasama yang solid dengan <i>stakeholders</i> yang sudah semakin meningkat. 5. Tersedianya database kepegawaian (Simpeg bkd kaltim); 6. Tersedianya Sistem Absensi Online BKD; 7. Tersedianya UPTD Penilaian Kompetensi dalam rangka pengembangan komptensi ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim ;	1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum tersedia secara menyeluruh; 2. Belum terimplementasinya pembinaan pola karir ASN dalam menggambarkan alur pengembangan karir ASN 3. Belum Optimalnya Anjab/ABK dan Peta Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan 4. Belum terintegrasinya sistem informasi database kepegawaian dengan pusat 5. Belum Optimalnya kesadaran ASN dalam pemutkhiran data mandiri 6. Belum optimalnya pemahaman ASN terhadap penilaian kinerja
Peluang (O)	Ancaman/Tantangan (T)
1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ; 2. Tersedianya inovasi teknologi yang memadai ; 3. Penerimaan CPNS dan PPPK di Pemprov.Kaltim; 4. Banyaknya PNS diluar Pemprov.Kaltim / PNS Kab/Kota diluar Pemprov.Kaltim masuk ke Pemprov.Kaltim 5. Kalimantan Timur menjadi penyangga Ibu Kota Negara Nusantara	1. Adanya Tuntutan Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi 2. Penerapan Sistem Merit pada Kategori IV “Sangat Baik” 3. Penerapan Sistem Informasi (SI-ASN) yang terintegrasi secara Nasional 4. Penerapan Transformasi Digital Manajemen ASN’ 5. Tuntutan Kapasitas ASN dalam mempersiapkan Kalimantan Timur menjadi penyangga Ibu Kota Negara

Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta pengkajian strategis pembangunan dalam 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan fasilitas yang ada secara optimal dan meningkatkan sumber daya aparatur secara profesional dengan prinsip good governance (SO).

Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 dan Pergub Kaltim No. 78 Tahun 2019 tentang SOTK BKD Prov.Kaltim ;
2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang ada;
3. Cakupan tuposi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi ;
4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki;

5. Melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien;
 6. Penyelenggaraan pelayanan kepegawaian berbasis digitalisasi;
 7. Penyelenggaraan peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja melalui Asessment Center;
 8. Peningkatan penyempurnaan penerapan sistem merit;
- b. Mengoptimalkan Personil dan Sistem pada Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kaltim dalam tuntutan peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi (ST), dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan sistem penganggaran secara efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis Teknologi;
 2. Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan pusat dan daerah;
 3. Pelaksanaan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi seluruh ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim untuk membangun manajemen talenta ASN;
- c. Meningkatkan sosialisasi terkait Manajemen ASN kepada ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (WO) :
1. Mengisi jabatan fungsional Tenaga Perencanaan guna peningkatan kualitas dan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Mengoptimalkan pengelolaan data statistik dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ;
 3. Mengoptimalkan penerimaan PNS dan PPPK sesuai dengan ANJAB dan ABK dan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan;
- d. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (WT) :
1. Melakukan konsolidasi dan penyesuaian mandat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan;
 2. Meningkatkan kuantitas basis statistik dan kajian pembangunan ;
 3. Menjaga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan;
 4. Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Kaltim
(2024-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang BeraKHLAKN pada Pelayanan Publik	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Skor Perencanaan Kebutuhan	35	35	35
			Skor Pengadaan	36	36	36
			Skor Pengembangan Karir	75	85	92,5
			Skor Promosi dan Mutasi	17,5	17,5	20
			Skor Manajemen Kinerja	50	57,5	65
			Skor Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30	30
			Skor Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16
			Skor Sistem Informasi	19	21	21
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,20	79,50	80,00
			Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan (IKM)	91,10	91,20	92,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Berikut kami kemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun mendatang untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-
2026

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1. Skor Perencanaan Kebutuhan 2. Skor Pengadaan 3. Skor Pengembangan Karir 4. Skor Promosi dan Mutasi 5. Skor Manajemen Kinerja 6. Skor Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin 7. Skor Perlindungan 8. Skor Sistem Informasi	Peningkatan Manajemen ASN	1. Pengadaan dan Pemberhentian secara akuntabel yang didukung dengan Informasi Kepegawaian ASN yang terintegrasi; 2. Peningkatan layanan Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan 4. Penilaian dan pelaksanaan evaluasi kinerja secara transparan dan berkelanjutan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Optimalisasi kinerja dan layanan perangkat daerah	1. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan (IKM)		

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2. Peningkatan Layanan Administrasi Keuangan, kepegawaian, dan adminstrasi umum Perangkat Daerah
				3. Peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				4. Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional	Sistem Merit	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Skor Perencanaan Kebutuhan		KEPEGAWAIAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian	Indeks NSPK Manajemen ASN	89	90	21.160.000.000	90.5	21.783.000.000	91	22.465.000.000	91	22.465.000.000	BKD	Samarinda
			Skor Pengadaan															
			Skor Pengembangan Karir															
			Skor Promosi dan Mutasi															
			Skor Manajemen Kinerja															
			Skor Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin															
			Skor Perlindungan dan Pelayanan															
			Skor Sistem Informasi															
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85%	85%	4.440.179.000	85%	4.520.179.000	85%	4.580.000.000	85%	4.580.000.000	Bidang PPI	Samarinda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		yang didukung dengan Informasi Kepegawaian ASN yang terintegrasi				yang didukung dengan Informasi Kepegawaian ASN yang terintegrasi												
					1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Subbid Perencanaan dan Pengadaan	Samarinda
					2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	Subbid Perencanaan dan Pengadaan	Samarinda
					3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Subbid Pemberhentian ASN	Samarinda
					4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1	2.320.179.000	1	2.400.179.000	1	2.400.000.000	1	2.400.000.000	Subbid Profesi ASN	Samarinda
					5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	120.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	Subbid SIPD	Samarinda
					6) Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Subbid SIPD	Samarinda
		Meningkatnya layanan Mutasi dan Promosi ASN			1. Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya layanan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	85%	1.506.993.000	86%	1.506.993.000	88%	1.540.000.000	88%	1.540.000.000	Bidang Mutasi ASN	Samarinda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	1	400.000.000	Subbid Mutasi ASN	Samarinda
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2	360.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000	Subbid Kenaikan Pangkat	Samarinda
					Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		4	746.993.000	4	746.993.000	4	780.000.000	1	780.000.000	Subbid Mutasi Jabatan ASN	Samarinda
		Meningkatnya kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan			2. Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	85%	85%	6.875.828.000	86%	6.975.828.000	88%	6.945.000.000	85%	6.945.000.000	Bidang Pengembangna ASN	Samarinda
					Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	2	800.000.000	2	900.000.000	2	845.000.000	2	845.000.000	Subbid Sertifikasi ASN	Samarinda
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN		4	5.500.000.000	4	5.500.000.000	4	5.500.000.000	4	5.500.000.000	Subbid Peningkatan Kualitas ASN	Samarinda
					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1	575.828.000	1	575.828.000	1	600.000.000	1	600.000.000	Subbid Pengembangna Jabatan Fungsional	Samarinda
		Meningkatnya kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan			3. Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya		8%	700.000.000	8%	725.000.000	8%	750.000.000	8%	750.000.000	UPTD Penilaian Kompetensi	Samarinda
					Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		2	1.300.000.000	2	1.300.000.000	2	1.400.000.000	2	1.400.000.000	Seksi Pengukuran dan Kompentesi; Seksi Pengembangna Instrumen	Samarinda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Meningkatnya transparansi Penilaian dan pelaksanaan evaluasi kinerja			4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya transparansi Penilaian dan pelaksanaan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang berkinerja baik		90%	7.037.000.000	90%	7.480.000.000	90%	8.000.000.000	90%	8.000.000.000	Bidang Pembinaan ASN	Samarinda
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	300.000.000	1	300.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	Subbid PEKPA	Samarinda
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	550	560	6.057.000.000	580	6.500.000.000	580	7.200.000.000	290	7.200.000.000	Subbid PEKPA	Samarinda
					Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa		250	175.000.000	250	175.000.000	280	175.000.000	280	175.000.000	Subbid PEKPA	Samarinda
					Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		90	270.000.000	80	270.000.000	70	270.000.000	70	270.000.000	Subbid Kedudukan Hukum & Disiplin ASN	Samarinda
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin		Jumlah Laporan Hasil Pengeloalan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	Subbid Kedudukan Hukum & Disiplin ASN	Samarinda
					Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yagn dilayani		1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	Subbid Kedudukan Hukum & Disiplin ASN	Samarinda
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan		85	23.477.000.000	87	24.182.000.000	89	24.307.000.000	89	24.307.000.000	BKD	
			indeks kepuasan				Persentase keluhan pengguna		100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	BKD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			pengguna layanan (IKM)				layanan yang ditindaklanjuti											
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		100%	370.000.000	100%	420.000.000	100%	690.000.000	100%	690.000.000	SEKRETARIAT	Samarinda
					1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	100.000.000	3	120.000.000	3	170.000.000	3	170.000.000	Sub Perencanaan Program	Samarinda
					2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	270.000.000	6	300.000.000	6	520.000.000	6	520.000.000	Sub Perencanaan Program	Samarinda
					3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Perencanaan Program	Samarinda
					4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Perencanaan Program	Samarinda
					5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Perencanaan Program	Samarinda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	69	72	14.921.500.000	72	15.000.000.000	72	15.025.000.000	72	15.025.000.000	SEKRETARIAT	Samarinda
					6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	72	14.921.500.000	72	15.000.000.000	72	15.025.000.000	72	15.025.000.000	Sub Bagian Umum	Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70%	70%	602.500.000	80%	565.500.000	85%	602.500.000	85%	602.500.000	SEKRETARIAT	Samarinda
					7) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	537.000.000	2	500.000.000	2	537.000.000	2	537.000.000	Sub Bagian Umum dan TU UPTD	Samarinda
					8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		22	65.500.000	22	65.500.000	22	65.500.000	22	65.500.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasara kantor			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya fasilitas kerja ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	1.860.000.000	100%	2.330.000.000	100%	2.830.000.000	100%	2.830.000.000	SEKRETARIAT	Samarinda
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8	110.000.000	8	110.000.000	8	110.000.000	8	30.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	850.000.000	6	1.253.561.200	7	1.300.000.000	7	1.300.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD Penkom	Samarinda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	900.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu		100%	3.513.000.000	100%	3.534.000.000	1	2.660.000.000	1	2.660.000.000	SEKRETARIAT	Samarinda
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6	1.288.000.000	6	1.309.000.000	6	1.309.000.000	1	1.309.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	2.200.000.000	2	2.200.000.000	2	2.450.000.000	1	2.450.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		85%	1.905.000.000	85%	1.900.000.000	85%	2.015.938.000	85%	2.515.500.000	SEKRETARIAT	Samarinda
					1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12	425.000.000	12	465.500.000	12	465.500.000	12	465.500.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)					
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		2	1.480.000.000	2	1.550.438.800	2	2.050.000.000	2	2.050.000.000	Sub Bagian Umum dan UPTD	Samarinda

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Pemprov. Kaltim, yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Sebelumnya	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks NSPK Manajemen ASN	89	90	90.5	91	91
2	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	-	85	87	89	89
3	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2024-2026, mengikuti periode berlakunya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kedudukan yang sangat penting selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dokumen ini memberikan arah, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dokumen RPJMD Perubahan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rencana tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun, 2019-2023 yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Pada penyusunan hingga penetapan dokumen ini, BKD Prov. Kaltim senantiasa akan melakukan penajaman dan penyesuaian target sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah,

serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Dr. Deni Sutrisno, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepaladerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD diinstruksikan untuk melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024 – 2026 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPDN).

Dengan ditetapkannya RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026, mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dalam merumuskan isu strategis, menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Kaltim. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) setelah RPDD ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal - eksternal) dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis BPSDM memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta cara pencapaian yang realistis sesuai tupoksi OPD untuk mengantisipasi perkembangan masa depan berpedoman pada RPD Tahun 2024 - 2026 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Renstra BPSDM merupakan dokumen perencanaan BPSDM untuk periode transisi selama 4 (empat) tahun ke depan sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu serentak pada Tahun 2024.

Renstra yang sudah disusun oleh BPSDM sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta berpedoman Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan RKPD Tahunan 2024 dan RKP Tahun 2024 selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kepala Bappeda, kemudian baru ditetapkan oleh Gubernur. Renstra yang sudah ditetapkan oleh Gubernur selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana penyusunan anggaran, pengukuran kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Aparatur daerah baik pada skala Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan

dilaksanakan langsung oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur adalah:

(1) pendekatan politik, dengan menyelaraskan program kepala Daerah
(2) pendekatan teknokratik, Artinya Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.(3)pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder).(4) pendekatan atas-bawah (top-down) , dan (5) pendekatan bawah-atas (bottom-up).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Pembangunan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia selama periode 3 (tiga) tahun ke depan terutama bagi pemerintah daerah, Stakeholder, dan seluruh komponen aparatur di Provinsi Kalimantan Timur, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kaltim ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjabaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ke dalam strategi BPSDM untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi BPSDM.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dan pihak terkait lainnya dalam upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Menjadi acuan resmi dalam penganggaran program/kegiatan dibidang pengembangan SDM Aparatur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-

2026.

- d. Menjadi acuan resmi untuk penilaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Prov. Kaltim) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang perlunya Renstra yang diawali dengan latar belakang, Landasan hukum penyusunan renstra, Maksud dan Tujuan Renstra, Keterkaitan dengan RPD Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta uraian singkat tentang Sistematika penyusunan Renstra ini.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bab ini memuat Gambaran Umum Aparatur Kalimantan Timur, Kondisi aparatur BPSDM Prov. Kaltim, Struktur Organisasi, Urusan, Tugas pokok dan fungsi, Kondisi Organisasi yang meliputi: Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Jenis Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi isu atau permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPSDM Prov. Kaltim. Beberapa pokok bahasannya adalah: telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta penentuan isu-isu strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024– 2026.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026, serta target kinerja tentang tujuan dan sasaran sesuai Rencana Jangka Menengah BPSDM Prov. Kaltim.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPSDM Prov. Kaltim selama lima tahun kedepan untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Prov. Kaltim.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan serta pendanaannya disajikan dalam bentuk tabel rincian.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini merumuskan Indikator Kinerja BPSDM Prov. Kaltim yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPSDM Prov. Kaltim dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan tujuan sasaran RPD.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra Daerah Provinsi yang diturunkan ke dalam substansi Renstra BPSDM Prov. Kaltim, yang diharapkan berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan bagi jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. Bab ini juga memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra BPSDM Prov. Kaltim, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan sampai dengan Tahun 2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bagian ini juga menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, dan mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPSDM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau disebut juga BPSDM Provinsi Kaltim mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, BPSDM Provinsi Kaltim menyelenggarakan fungsinya sebagai:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Provinsi;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Adapun struktur organisasi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas, memimpin, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam merencanakan, pembinaan, pengendalian dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dengan Sekretariat, Bidang Pengembangan Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Provinsi;
- b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas:

- 1) **Subbag Perencanaan Program dan Keuangan**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi, urusan akuntansi, pelaporan keuangan dan aset, serta penyusunan laporan

kinerja program pengembangan sumber daya aparatur.

- 2) **Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2.1.3 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga.

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama.
- b. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
- c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
- e. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan;
- f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan terdiri atas:

- a. **Subbidang Sertifikasi Kompetensi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- b. **Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangkompetensi.
- c. **Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan sumber belajar, termasuk perpustakaan dan laboratorium, penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, pendidikan kepamongprajaan, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.

2.1.4 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis umum, inti, pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, dan bagi jabatan administrasi perangkat daerah penunjang, serta bagi penyelenggara

urusan pemerintahan umum.

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintah dalam negeri kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- c Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- d Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum; dan
- e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi.

b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan

rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi pejabat administrasi.

- c. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang,** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi perangkat daerah penunjang.

2.1.5 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

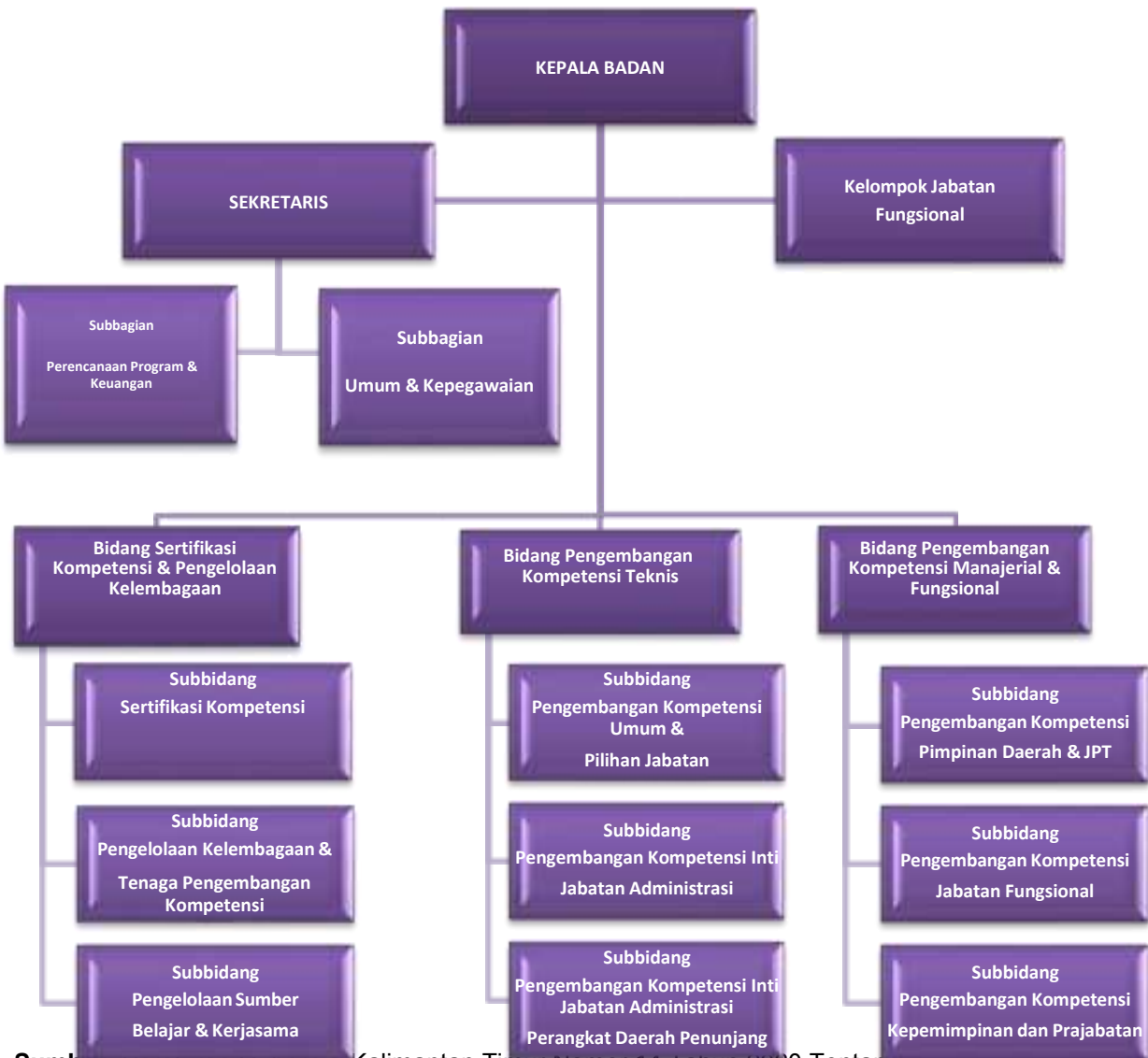
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan;
- b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional;
- c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri atas:

- a. **Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi.
- b. **Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagi jabatan fungsional.
- c. **Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan. Adapun struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIM



Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

2.2 Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia yang ada diantaranya yaitu:

Tenaga Pengajar

Untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, BPSDM Provinsi didukung oleh tenaga pengajar yang berasal dari Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Widyaiswara yang berada dilingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 16 (Lima Belas) orang. Gambar 2.2 di bawah ini menggambarkan jumlah dan pengelompokan Widyaiswara atas dasar Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan Ruang, dan Jenjang Jabatannya.

Gambar 2.2
Gambaran Tenaga Pengajar (Widyaiswara)



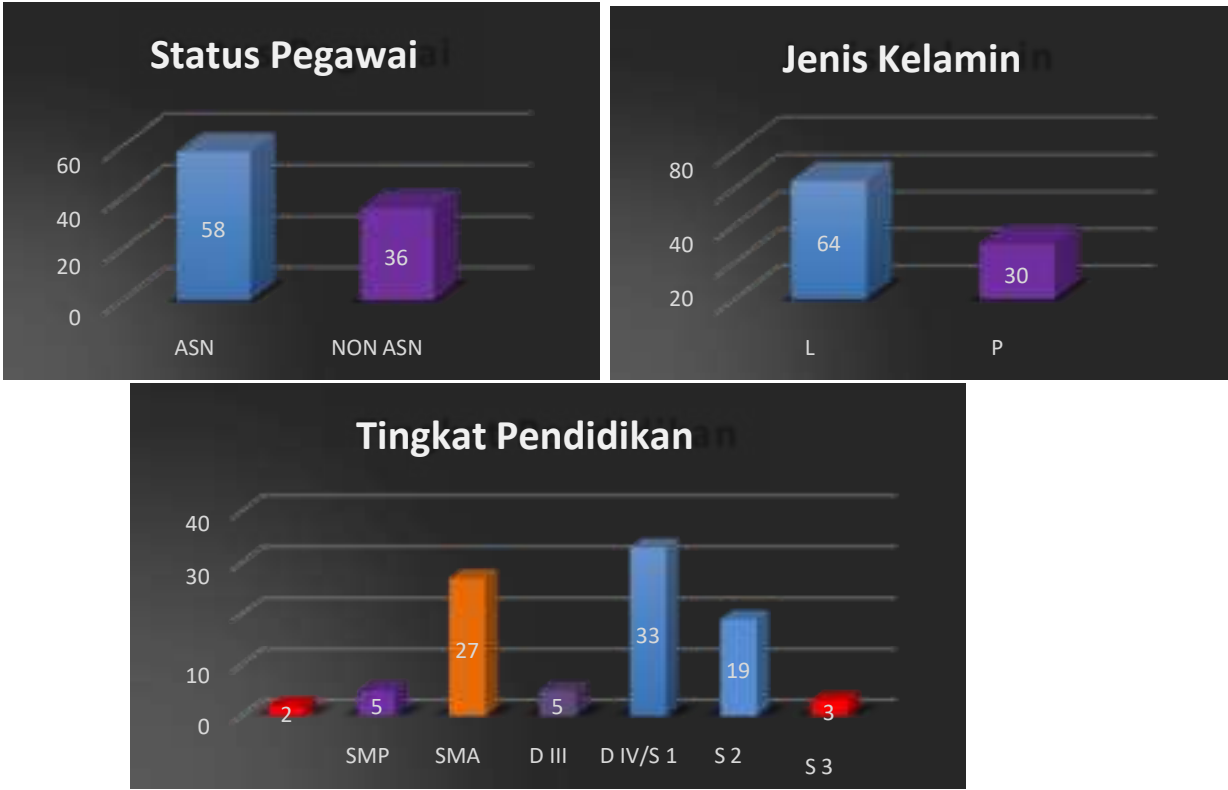
Keterangan : Jumlah Widyaiswara = 16 orang
Sumber : BPSDM Prov.Kaltim, 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kelancaran proses pelaksanaan Pengembangan SDM, BPSDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah personil ASN sebanyak 100 (seratus) orang, dengan komposisi lengkap sesuai yang terdapat pada **Gambar 2.3** di bawah. Dilihat daristatus kepegawaiannya, BPSDM Provinsi memiliki 66 orang PNS Daerah dan 34 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, jika dilihat dari tingkat pendidikannya terutama yang berstatus PNS (keseluruhannya merupakan Pegawai Otonom Daerah) tampak bahwa sebagian besar berstatus pernah mengenyam Pendidikan/Perguruan Tinggi sampai dengan

jenjang S3.

Gambar 2.3
Personil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sumber : DUK BPSDM Prov. Kaltim, Januari 2023

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang terselenggaranya Pengembangan SDM di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, saat ini telah tersedia fasilitas-fasililtas pendukung diantaranya adalah:

- a. Ruang Belajar, dilengkapi dengan peralatan penunjangnya(berupa alat bantu pembelajaran) sejumlah 14 (empat belas) ruang dan mampu menampung peserta diklat sebanyak ± 560 (lima ratus enam puluh) orang. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Kapasitas Ruang Belajar Gedung A

No.	Nama Ruang	Luasan (Pjg x Lbr)	Kapasitas (Tmpt duduk maks)
1	A.1.1	8x8 m	40 Seat
2	A.1.2	8x8 m	40 Seat
3	A.1.3	8x8 m	40 Seat
4	A.2.1	8x8 m	40 Seat
5	A.2.2	8x8 m	40 Seat
6	A.2.3	8x8 m	40 Seat
7	A.3	8x8 m	40 Seat

Tabel 2.2
Kapasitas Ruang Belajar Gedung B

No.	Nama Ruang	Luasan (Pjg x Lbr)	Kapasitas (Tmpt duduk maks)
1	B.1.1	8x8 m	40 Seat
2	B.1.2	8x8 m	40 Seat
3	B.1.3	8x8 m	40 Seat
4	B.2.1	8x8 m	40 Seat
5	B.2.2	8x8 m	40 Seat
6	B.2.3	8x8 m	40 Seat
7	B.3	8x8 m	40 Seat

Tabel 2.3
Alat Bantu Pembelajaran Ruang Belajar

No	Jenis Alat	Jumlah (Unit)
1	Papan Tulis (White Board)	14
2	Projector	13
3	LCD	14
4	Wireless	14
5	Sound System	14

- b. Perpustakaan, dengan koleksi buku berjumlah 1.703 buah judul buku, yang dikelola sistem inventarisasinya dengan menggunakankomputer dan manual. Koleksi buku tersebut belum termasuk Laporan Proyek Perubahan (Kertas Kerja) alumni Diklat PIM IV dan III, serta Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS. Perpustakaan BPSDM Prov. Kaltim telah mendapatkan Akreditasi dari Badan Perpustakaan Nasional.
- c. Laboratorium Komputer dan Bahasa, yang berkapasitas 20 unit komputer berbasis LAN dan Wifi.
- d. Asrama sebanyak 4 (empat) Gedung, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya.

Tabel 2.4
Asrama dan Fasilitasnya

No.	Asrama	Nama (Unit)	Kapasitas (Tempat Tidur)	Fasilitas
1	A	25	75 Bed	AC, TV & tabung pemadam perkamar serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
2	B	25	75 Bed	AC, TV & tabung pemadam perkamar serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
3	C	25	50 Bed	AC, TV & tabung pemadam perkamar serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
4	D	25	50 Bed	AC, TV & tabung pemadam perkamar serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
Jumlah		100	250 Bed	

- e. Ruang (bangunan) untuk keperluan pelayanan administratif dan penunjang kegiatan lainnya serta dilengkapi dengan fasilitas yangtersedia antara lain adalah sebagai berikut :
- 1) 1 unit gedung administrasi;
 - 2) 4 unit gedung asrama;
 - 3) 2 unit gedung kelas/belajar;
 - 4) 1 unit aula besar;
 - 5) 1 unit aula sedang;
 - 6) 1 unit gedung perpustakaan;
 - 7) 1 unit gedung Lab. bahasa;
 - 8) 1 unit Lab. komputer;
 - 9) 4 unit ruang seminar;
 - 10) 1 unit gedung poliklinik;
 - 11) 1 unit komplek guest house dan sport centre;
 - 12) 1 unit musholla yang dapat difungsikan masjid;
 - 13) 1 unit gedung cafetaria;
 - 14) 1 unit gedung koperasi (mini market);
 - 15) 6 unit rumah dinas;
 - 16) 1 unit tempat loundry;
 - 17) 1 unit rumah keamanan;
 - 18) 3 unit pos keamanan;
 - 19) Pagar pengaman keliling kantor;

- 20) 1 unit gedung genset;
- 21) 1 unit mesin genset;
- 22) Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2;
- 23) 24 Unit pompa air; dan
- 24) Fasilitas olah raga, meliputi:
 - a) Gedung Fitnes Center;
 - b) Lapangan Tenis;
 - c) Lapangan Volly;
 - d) Lapangan Basket; dan
 - e) Tenis Meja.
 - f) Kendaraan Operasional, berupa roda 4 maupun roda 2.

Rincian kendaraan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kendaraan Operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
	Kendaraan Roda 4	16
1	Kijang Inova Reborn Venturer	1
2	Kijang Inova Deluxe Putih	1
3	Kijang Inova Hitam	1
4	Toyota Kijang Pick-Up	1
5	Mitsubishi Colt L-300 Biru	1
6	Mini Bus (30 seat)	2
7	Toyoa Avanza Veloz Putih	1
8	Toyota Avanza Silver	3
10	Toyota Kijang Kapsul Biru	1
11	Toyota Hilux	1
12	Toyota Rush	3
	Kendaraan Roda 2	6
1	Honda Kharisma	4
3	Honda Supra X 125	2

Sumber: BPSDM Prov. Kaltim, 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan SumberDaya Manusia

Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM aparatur dalam membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 2018 – 2023. Hal ini sangat penting sebagaimana gambaran bahwa dengan sangat luasnya wilayah Kalimantan Timur yaitu ± 127.346,92 Km² dan populasi sebesar 3.766.000

juta sebelum di mekarkan dengan Kaltara. Berdasarkan wilayah pemerintahan Provinsi ini terbagi menjadi 3 pemerintahan kota dan 7 pemerintahan kabupaten serta 103 kecamatan dengan 1.038 desa/kelurahan. Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019

berjumlah 3.766.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 30 jiwa per Km², dan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,13 % sejak tahun 2010 – 2020.

Dari jumlah penduduk Kalimantan Timur yang ada saat ini diantaranya adalah berprofesi sebagai aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 63.046 orang yang berstatus sebagai PNS Provinsi dan PNS dari 10 Kabupaten dan Kota. sehingga secara keseluruhan total PNS Provinsi sebanyak 10.621 orang (lihat tabel 2.6).

Inilah yang menjadi tugas pokok dan kewajiban bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia secara umum dan Aparatur secara khusus agar kedepan menjadi lebih baik dan meningkatkan kompetensinya, bersama jajaran Instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan data dari Kaltim Dalam Angka BPS Tahun 2021, kaum Pria lebih banyak yakni 3.956 jiwa dan wanita

2.569 jiwa. Dari hasil Sensus tersebut, masih tampak penyebaran penduduk didominasi wilayah perkotaan, di mana ibukota Kaltim yakni Samarinda menduduki peringkat pertama dengan prosentase 21,99%, Kutai Kartanegara (Kukar) kedua dengan prosentase 19,37%. Kemudian Balikpapan dengan prosentase 18,28%.

Data mengenai jumlah aparatur di wilayah Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam Tabel 2.6. Dengan banyaknya jumlah Sumber Daya Manusia dan Aparatur di wilayah Kalimantan Timur, maka sudah barang tentu permasalahan ini menjadi tugas pokok dan kewajiban bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim untuk menjadi lebih baik yaitu meningkatkan kapasitasnya bersama jajaran Instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan PNS Provinsi, Kab/KotaSe-Kalimantan Timur

No	Prov/Kab/Kota	Penduduk (ribu) (2022)	PNS (2022)
1	Provinsi Kaltim	3.941,7	10.621
2	Kutai Kartanegara	778,0	13.582
3	Kutai Barat	175,6	3.635
4	Kutai Timur	425,7	6.057
5	Paser	296,0	4.574
6	PPU	191,9	3.534
7	Berau	272,8	4.879
8	Samarinda	849,7	7.602
9	Balikpapan	727,6	4.664
10	Bontang	186.1	2.862
11	Mahakam Ulu	37,3	1.036
	Jumlah	3.941,7	63.046

Sumber: Kaltim Dalam Angka BPS 2022

Merujuk pada posisi perkembangan PNS Provinsi Kaltim tersebut, pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa komposisi PNS Kaltim terbesar adalah pada Golongan III sebesar 6.231 orang atau 58,66

% dari jumlah PNS Provinsi Kaltim, disusul dengan golongan IV sebanyak 2.542 orang atau 23,93 % dari jumlah PNS Provinsi. Sedangkan komposisi PNS struktural di Provinsi Kaltim yang terbesar adalah Esselon IV sebanyak 687 orang atau 6,46 % dari jumlah PNS Provinsi, dan disusul esselon III sebanyak 248 orang atau 2,33 %. dari jumlah PNS Provinsi, dan yang non eselon sebanyak 9.638 orang.

Tabel 2.7
Komposisi PNS Pemprov Kalimantan Timur berdasarkan Golongan, Esselon dan Jenis Kelamin

No	Gol	Gender		Jumlah	No	Eselon	Gender		Jumlah
		P	W				P	W	
1	IV	1.364	1.178	2.542	1	I	1	0	1
2	III	3.014	3.217	6.231	2	II	38	9	47
3	II	1.160	535	1.695	3	III	165	81	246
4	I	135	18	153	4	IV	446	279	725
					5	Jafung Umum	2069	2702	4771
					6	Jafung Tertentu	2795	1925	4720
	Jml	5.673	4.948	10.621		Jmlh	5514	4996	10.510

Sumber: Kaltim Dalam Angka BPS 2022

Gambaran dari kondisi diatas, apabila dikaitkan dengan: Pertama, syarat kompetensi jabatan terutama lingkup eselon III dan IV mengharuskan penguasaan terhadap keterampilan kerja (kompetensi teknis dan sosio kultural), disamping pendidikan penjenjangan (kompetensi manajerial dan pemerintahan). Kedua, jabatan fungsional yang saat ini

9.491 orang dan sangat memerlukan penguasaan ketrampilan fungsional terkait untuk dapat menduduki jabatan tersebut.. Berarti dari 47 Perangkat Daerah yang ada, BPSDM harus mempersiapkan banyak jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh semua aparatur. Realitasnya, sampai dengan saat ini Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Provinsi Kalimantan Timur dalam arti sesungguhnya belum dimiliki, sementara pada tingkatan Instansi analisis dimaksud sifatnya hanya pemenuhan kebutuhan diklat yang sifatnya parsial dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

Selanjutnya, memperhatikan pada Tabel 2.8, berikut ini data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan PNS Provinsi terbanyak adalah yang berpendidikan Sarjana/Doktor/Phd yaitumencapai 7.348 orang atau 69.97 % dari jumlah PNS Pemerintah Provinsi, dan berpendidikan SMA sebanyak 1.838 orang atau 17,10% dari jumlah PNS Provinsi.

Tabel 2.8
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan dan Gender

No	Pendidikan	Gender		Jumlah
		P	W	
1	Sarjana/Doktor/Phd	3596	3752	7348
2	Diploma III	398	609	1007
3	Diploma I	27	25	52
4	SMA	1276	562	1.838
5	SMP	135	30	165
6	SD	82	18	100
	Jumlah			10.510

Sumber: Kaltim Dalam Angka BPS,2022

Dari keseluruhan uraian tadi, berdasarkan arah pembangunan ASN dalam RPJM Nasional perlu ada upaya perubahan paradigma dari ASN Sistem Merit (RPJM 3 tahun 2015-2019) menjadi World Class Goverment (RPJM 4 tahun 2020-2024) dimana seorang ASN wajib memiliki profil Nasionalisme, Integritas, Hospitality, Networking, teknologi Informasi, Penguasaan Bahasa Asing, dan Entrepreneurship. Oleh karenanya, upaya pengembangan Aparatur Pemerintah lingkup Pemerintah Provinsi, bukanlah

suatu pekerjaan yang mudah, apalagi dikaitkan dengan kewajiban untuk turut membantu pengembangan aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat luas, karena itu diperlukan upaya-upaya optimal yang harus dilakukan oleh BPSDM Kaltim.

Pelayanan sebagai pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi SDM aparatur adalah adanya saling kerjasama dalam mengembangkan dari berbagai aspek pengembangan kompetensi, baik dengan sesama institusi pengembangan kompetensi milik pemerintah maupun swasta, lembaga pengembangan kompetensi yang ada di dalam daerah maupun diluar daerah, dengan cara yang dilakukan ini dimulai dengan perencanaan yang baik, pembinaan kepada penyelenggara langsung serta pengendalian kebijakan pengembangan kompetensi dan forum kerjasama antar institusi pengembangan kompetensi.

Selain itu, pelayanan BPSDM sebagai perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengembangan kompetensi SDM aparatur, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, merupakan dasar untuk menentukan dalam menyusun dan merumuskan rencana kerja pembangunan SDM aparatur, baik yang bersifat jangka panjang (RPJMP), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD), yang kemudian untuk diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang dalam APBD Kaltim. Berbagai langkah dan upaya yang ingin dicapai oleh BPSDM Kaltim tentu harus melakukan upaya-upaya motivasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi SDM aparatur. Berdasarkan kepada sasaran atau target Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, kinerja pelayanan BPSDM Provinsi dapat digambarkan secara ringkas dalam tabel-tabel berikut, dimana semua data yang tersaji bersumber dari LkjIP (LAKIP) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Tabel 2.9
TARGET KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
1	2	6
	Permen No.90	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti)	88%
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87%
	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	86%
	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	86%
	Persentase SDM / Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	86%
	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	86%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,50%

Tabel 2.10
PROYEKSI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	2024	2025	2026	KETERANGAN
			PAGU	PAGU	PAGU	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan BPSDM Prov.Kaltim</i>	31.550.000.000	33.864.324.000	36.408.409.500	Kepala BPSDM
		<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	1.040.040.000	1.148.640.000	1.475.040.000	Sekretaris
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650.000.000	750.600.000	800.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.040.000	133.040.000	400.040.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan	265.000.000	265.000.000	275.000.000	Kasubag

	Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	14.977.030.000	14.945.920.000	14.945.920.000	Sekretaris
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.500.000.000	14.500.000.000	14.500.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	432.850.000	401.740.000	401.740.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.180.000	44.180.000	44.180.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	6.310.000	6.310.000	6.310.000	Sekretaris
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.000	6.310.000	6.310.000	Kasubag Umum
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	45.210.000	45.210.000	45.210.000	Sekretaris

8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.210.000	45.210.000	45.210.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	507.553.800	657.554.300	811.839.800	Sekretaris
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200.839.800	250.839.800	361.839.800	Kasubag Umum
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	306.714.000	406.714.500	450.000.000	Kasubag Umum
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	1.970.825.300	2.121.205.300	2.184.605.300	Sekretaris
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60.005.500	60.005.500	60.005.500	Kasubag Umum
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	75.560.000	75.560.000	75.560.000	Kasubag Umum
13	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	316.505.800	316.505.800	316.505.800	Kasubag Umum
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi	24.040.000	24.040.000	24.040.000	Kasubag Umum

		Kunjungan Tamu				
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.336.000.000	1.536.600.000	1.600.000.000	Kasubag Umum
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.774.000	8.774.000	8.774.000	Kasubag Umum
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.940.000	99.720.000	99.720.000	Kasubag Umum
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	2.973.426.200	3.706.031.900	3.706.031.900	Sekretaris
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.467.394.300	2.000.000.000	2.000.000.000	
19	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan	1.506.031.900	1.706.031.900	1.706.031.900	Kasubag Umum

	Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	3.522.584.890	3.854.116.390	3.854.116.390	Sekretaris
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.709.200	6.709.200	6.709.200	Kasubag Umum
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.527.654.690	1.420.514.190	1.420.514.190	Kasubag Umum
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.988.221.000	2.426.893.000	2.426.893.000	Kasubag Umum

IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	6.507.019.810	7.379.336.110	9.379.336.110	Sekretaris
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59.769.000	59.769.000	59.769.000	Kasubag Umum
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127.981.600	127.981.600	127.981.600	Kasubag Umum
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400.000.000	565.092.300	665.092.300	Kasubag Umum

26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.083.200.000	2.126.493.210	2.526.493.210	Kasubag Umum
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.836.069.210	4.500.000.000	6.000.000.000	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.774.000	8.774.000	8.774.000	Kasubag Umum
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.940.000	99.720.000	99.720.000	Kasubag Umum
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemenuhan BMD	2.973.426.200	3.706.031.900	3.706.031.900	Sekretaris

	Urusan Pemerintah Daerah					
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.467.394.300	2.000.000.000	2.000.000.000	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.506.031.900	1.706.031.900	1.706.031.900	Kasubag Umum
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	3.522.584.890	3.854.116.390	3.854.116.390	Sekretaris
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.709.200	6.709.200	6.709.200	Kasubag Umum
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.527.654.690	1.420.514.190	1.420.514.190	Kasubag Umum

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.988.221.000	2.426.893.000	2.426.893.000	Kasubag Umum
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	6.507.019.810	7.379.336.110	9.379.336.110	Sekretaris
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59.769.000	59.769.000	59.769.000	Kasubag Umum
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	127.981.600	127.981.600	127.981.600	Kasubag Umum

	Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400.000.000	565.092.300	665.092.300	Kasubag Umum
26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.083.200.000	2.126.493.210	2.526.493.210	Kasubag Umum
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.836.069.210	4.500.000.000	6.000.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	8.268.078.000	10.302.198.000	10.502.198.000	Kepala BPSDM
		Persentase	2.234.120.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

	SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah				
	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	2.497.802.000	2.997.802.000	3.497.802.000	
	Perentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	7.450.000.000	8.050.000.000	8.500.000.000	
	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	4.200.000.000	5.150.000.000	5.650.000.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	350.000.000	450.000.000	550.000.000	

		Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
I	Pengembangan Kompetensi Teknis		7.450.000.000	8.050.000.000	8.500.000.000	Kabid PKT
28	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	7.450.000.000	8.050.000.000	8.500.000.000	Subbid PKIJA, Subbid PKIJAPDP, Sub PKUJA
II	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		17.550.000.000	19.900.000.000	21.200.000.000	Kabid PKMF dan Kabid SKPK

	Bidang SKPK		4.550.000.000	5.600.000.000	6.200.000.000	Kabid SKPK
29	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. dan Pengembangan Kompetensi.	300.000.000	500.000.000	300.000.000	Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
30	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	300.000.000	450.000.000	550.000.000	Subbid Sertifikasi Kompetensi

	Negeri Provinsi					
31	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	600.000.000	700.000.000	800.000.000	Subbid Sertifikasi Kompetensi
32	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar	3.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000	Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
33	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	350.000.000	450.000.000	550.000.000	Subbid Kerjasama dan Sumber Belajar
	BIDANG PKMF		13.000.000.000	14.300.000.000	15.000.000.000	Kabid PKMF
34	Penyelenggaraan	Jumlah ASN yang	13.000.000.000	14.300.000.000	15.000.000.000	Subbid PKKP,

	Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan				Subbid PKPDJPT, dan Subbid PKJF
	TOTAL		56.550.000.000	61.814.324.000	66.108.409.500	

Tabel 2.11
LAPORAN RENJA 2022 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2021 Renja		Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja		Realisasi 2021	Tingkat Capaian Kinerja Dan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			K	K	K	K	K	K
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
5.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPSDM	80	%	100	%	0	
5.04.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	60	Dokumen	65	Dokumen	0	
5.04.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	4	Dokumen	0	
5.04.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3	Dokumen	1	Dokumen	0	
5.04.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	1	Laporan		100
5.04.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Fungsi Penatausahaan Keuangan	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Orang	57	Orang	0	
5.04.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1	Dokumen	0	
5.04.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	0	
5.04.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	Laporan	1	Laporan	0	
5.04.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada BPSDM	0	Laporan	1	Laporan	0	
5.04.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	0	
5.04.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Target Pendapatan Daerah pada BPSDM	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	1	Laporan		100
5.04.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administarsi Kepegawaian pada BPSDM	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	1	Paket		100
5.04.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	5	Orang		100
5.04.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	2	Orang		100
5.04.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum pada BPSDM	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	Paket	1	Paket	0	
5.04.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	Paket	1	Paket		100
5.04.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material	0	Paket	1	Paket	0	

5.04.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	Laporan	1	Laporan	0	
5.04.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan	1	Laporan		200
5.04.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen		100
5.04.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen		100
5.04.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah pada BPSDM	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Unit	3	Unit	0	
5.04.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang pada BPSDM	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	1	Laporan		100
5.04.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0	Laporan	1	Laporan	0	
5.04.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	Laporan	1	Laporan		100
5.04.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada BPSDM	100	%	100	%	0	
5.04.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	Unit	8	Unit		100
5.04.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	0	Unit	8	Unit		100
5.04.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0	Unit	20	Unit		870
5.04.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	Unit	1	Unit		100
5.04.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	Unit	1	Unit		800
5.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM/ASN	15	%	80	%	0	
5.04.002.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	10	%	100	%	0	
5.04.002.1.01.003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1077	Orang	480	Orang	0	
5.04.002.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya SDM/ASN yang tersertifikasi kompetensi dan Pemenuhan Hak SDM/ASN untuk Memperoleh Bangkom Manajerial dan Fungsional Minimal 20 Jam Pelajaran per Tahun	0	%	85	%	0	
5.04.002.1.02.001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1	Dokumen	1	Dokumen	0	
5.04.002.1.02.002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0	Dokumen	1	Dokumen		100
5.04.002.1.02.003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersertifikasi	350	Orang	139	Orang	0	
5.04.002.1.02.004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi dan Sumber Belajar	0	Laporan	7	Laporan	0	
5.04.002.1.02.005	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	10	Dokumen	10	Dokumen		50
5.04.002.1.02.007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1560	Orang	3180	Orang	0	
5.04.002.1.02.008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	3	Dokumen	3	Dokumen	0	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPSDM

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur memang dirasakan cukup berat, terutama yang terkait dengan cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi disegala bidang. Begitu pula dengan capaian kinerja dan mutu aparatur yang dinilai belum maksimal dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa tantangan utama yang harus dihadapi oleh BPSDM Provinsi Kaltim kedepannya.

1. Dinamika peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur tentang upaya pengembangan sumber daya manusia yang dinilai sangat cepat perubahannya, sehingga perlu pula kecepatan organisasi untuk merespon dan mengadaptasinya. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan baru tersebut yang harus perlu dipahami, dimengerti, ditindaklanjuti, dan dikembangkan dalam rangka proses penyempurnaan kebijakan ke arah yang lebih baik. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah:
 - a. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang menyebutkan bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh pengembangan ASN sebanyak 20 (dua puluh) jam pelajaran setiap tahunnya.
 - b. Permendagri No. 38 tahun 2018 yang mengamanatkan penggunaan anggaran 0,34% dari APBD untuk pengembangan kompetensi aparatur.
 - c. Perubahan Peraturan-peraturan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai Instansi Pembina BPSDM di daerah.
2. Perubahan nomenklatur organisasi baru yang belum dapat sepenuhnya diadaptasi untuk dapat diimplementasikan sepenuhnya. Terlebih lagi dengan adanya pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada dibawah naungan BPSDM Provinsi.
3. Kewajiban BPSDM untuk dapat mengembangkan 4 (empat) jenis kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni kompetensi manajerial, teknis, sosio kultural, dan pemerintahan.

4. Penyesuaian-penyesuaian kurikulum pengembangan kompetensi oleh Instansi Pembina yang hampir setiap tahun terjadi perubahan menyebabkan BPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota agak kesulitan untuk melakukan perubahan perencanaan dengan segera dan adaptif, terutama pada masalah penganggaran program/kegiatan.
5. Secara kuantitatif, masih banyak pengguna (*user*) yang berasal berbagai bidang/sektor yang harus dikembangkan kompetensinya. Dari sisi kualitatif, kualitas pengembangan kompetensi SDM pun harus mendapat perhatian yang lebih pula.
6. Pada era milenial dan Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, mayoritas para Pengguna (*user*) adalah generasi milenial yang terlahir pada tahun 1980 keatas. Sehingga perlu ada upaya penyesuaian bentuk dan metode pengembangan SDM sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan akhir. Saat ini BPSDM Prov. Kaltim sudah mengembangkan Pelatihan secara *online* dan nantinya diharapkan dalam penerbitan sertifikat digital (*e-sertifikat*).
7. Tantangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang merencanakan Arah Pembangunan ASN mengarah kepada perwujudan *World Class Government*.
8. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai Instansi Pembina BPSDM telah mengarahkan BPSDM di daerah mengimplementasikan *Corporate University* dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah, seperti halnya yang telah dilakukan di beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
9. Membentuk Pengembangan Kompetensi yang terintegrasi dan dapat melakukan pengembangan dengan cepat sesuai dengan kondisi yang diperlukan melalui *Grand Design Corporate University* di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan organisasi BPSDM lebih memacu lagi kinerjanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari para Pengguna.
11. Tingginya persaingan antar lembaga penyelenggara

Pengembangan SDM (PSDM) Pemerintah dan lembaga swasta (private) yang menawarkan jenis Pelatihan yang sama dan lebih inovatif.

12. Terbatasnya kemampuan para Pengelola Pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan, termasuk di pihak Kabupaten/Kota.
13. Pengukuran tingkat kegunaan (*outcome*) dari para lulusan BPSDM Provinsi yang harus lebih dapat dikembangkan lagi demi terciptanya ketepatan *outcome* yang terukur, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang pengembangan pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sangat dimungkinkan untuk meningkatkan pelayanan yang kearah yang lebih baik. Peluang-peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Dukungan kebijakan Kepala Daerah dan segala potensi yang dimiliki Daerah dalam mewujudkan peningkatan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia demi terciptanya Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berintegritas.
2. Dukungan dan koordinasi antar lembaga/*stakeholders* terkait sehingga terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar daerah Provinsi, antar Kab/Kota, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah, terutama dari Instansi Pembina pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Peluang peningkatan profesionalisme aparatur BPSDM dalam melakukan inovasi pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip Kepemerintahan yang Baik (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik atau pengguna.
4. Dukungan optimalisasi partisipasi aparatur dan masyarakat terhadap BPSDM demi peningkatan upaya pengembangan kompetensi SDM yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Ketersediaan sumber daya yang ada di BPSDM Provinsi, terutama berupa sarana dan prasarana fisik yang cukup lengkap

dan memadai, disertai kecukupan lahan untuk pengembangan kedepannya.

6. Peluang pengembangan jenis dan metode pengembangan kompetensi, khususnya kompetensi manajerial, teknis, sosio kultural dan pemerintahan.
7. Peluang pengembangan penggunaan informasi teknologi dan komunikasi, disertai tenaga IT yang profesional dalam rangka pengembangan metode pembelajaran dalam upaya peningkatan kompetensi para pengguna.
8. Ketersediaan tenaga pengembang kompetensi (Widyaiswara) yang profesional dengan tingkat pendidikan sampai ke jenjang Strata 3 (S3) dan dapat berkolaborasi dengan tenaga pengembang kompetensi lainnya.
9. Tersedianya peluang untuk dapat berkolaborasi dengan lembaga PSDM baik pemerintah maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri.

Gambar 2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diketahui, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra BPSDM Provinsi Kaltim telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, analisis tantangan dan peluang, telaahan Renstra K/L dan Lingkungan Hidup Strategis, maka BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pun merumuskan dan menetapkan Tujuannya, yakni **"Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional dalam Pelayanan Publik"** di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berikutnya, BPSDM Prov. Kaltim telah menetapkan Sasaran dan Arah Kebijakan yang kemudian dirumuskan pula Strategi Utama BPSDM Prov. Kaltim dengan **"Mengoptimalkan pengelolaan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi"**.

Gambaran umum tentang profile pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur, per Februari 2023 (<https://bkd.kaltimprov.go.id/>), jumlah keseluruhan pegawai Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 10.291 orang dengan komposisi sebagai berikut.

a. Berdasarkan Golongan Ruang

Dari total pegawai Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dapat dikelompokkan berdasarkan golongan ruangnya sebagai berikut:

Gambar 3.1
Persebaran Pegawai Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan Ruang, Per Februari 2023



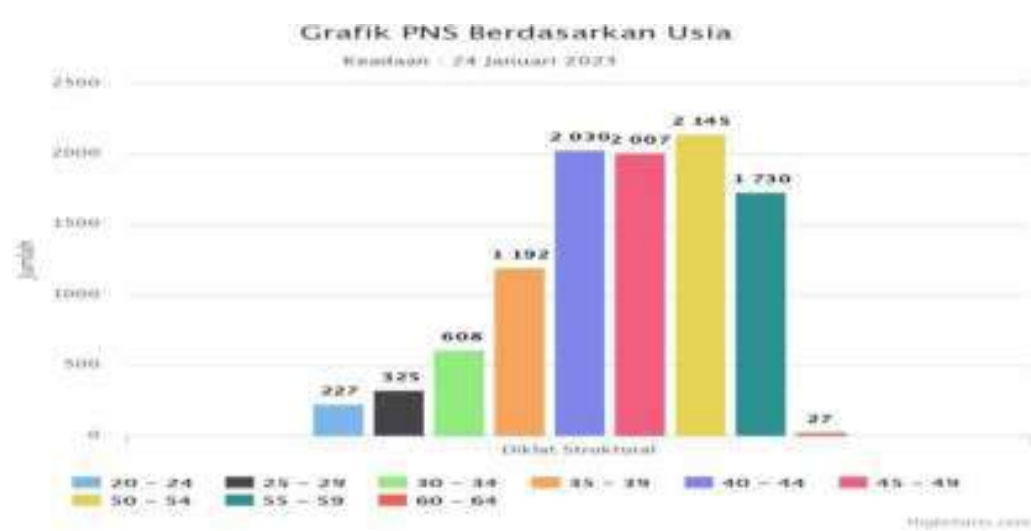
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, 2023

Dari gambar di atas, tampak bahwa jumlah golongan III/d mendominasi sebesar 1.874 orang, disusul oleh golongan III/b sebesar 1.815 orang dan yang paling sedikit yakni golongan I/b sebanyak 1 (Satu) orang.

b. Berdasarkan Usia

Dari jumlah pegawai Provinsi Kalimantan Timur tersebut, rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan usia pegawai per 24 Januari 2023, dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Persebaran Pegawai Kalimantan Timur Berdasarkan
Usia, Per Februari 2023



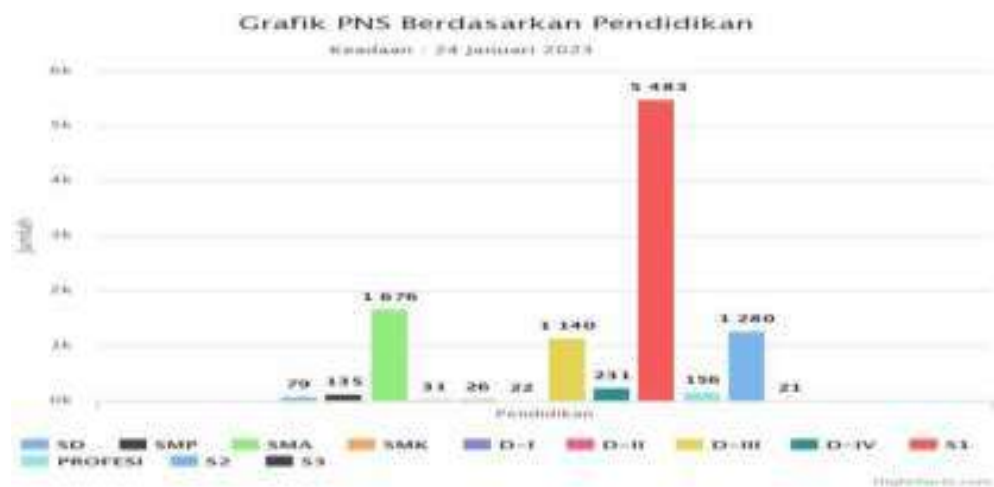
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, 2023

Dengan pegawai berusia di atas 40 tahun sebanyak 7.939 pegawai menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.

c. Berdasarkan Pendidikan

Adapun persebaran pegawai Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan per Februari 2023, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.3
Persebaran Pegawai Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan,
PerFebruari 2023



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, 2023

Dari gambar diatas, tampak bahwa pegawai dengan lulusan S1 mendominasi dari seluruh pegawai di Kalimantan Timur sebanyak

5.483 orang, disusul dengan lulusan SMA sebanyak 1.676 orang, lulusan S2 sebanyak 1.280 orang, lulusan D-III sebanyak 1.140 orang, dan yang paling sedikit yakni lulusan S3 sebanyak 21 orang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia di daerah. Dalam kondisi ideal, pelaksanaan pelayanan pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Akan tetapi sampai dengan saat ini kondisi ideal tersebut masih belum dapat terwujud, hal tersebut dikarenakan ada beberapa permasalahan pada tiap-tiap bidang dilingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dan ditambah lagi dengan beberapa isu strategis terkait dengan Visi dan Misi Daerah yang merupakan tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur kedepannya.

BPSDM Provinsi Kalimantan Timur masih perlu meningkatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan tugasnya sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan. Begitu pula dalam menjalankan

fungsinya sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia, dimana upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur dengan harapan dapat terlaksana dan berjalan serta mendukung program-program pembangunan SDM, dan juga pengembangan kompetensi SDM/aparatur yang meliputi lingkup bidang manajerial, fungsional, dan teknis, termasuk juga upaya sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.

Disisi lain, upaya peningkatan pelayanan sekretariat dan pembinaan jabatan fungsional perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Oleh karena itu, BPSDM terus melakukan perbaikan untuk menjawab tantangan kedepan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Lebih fokus lagi, permasalahan utama yang dihadapi dan harus segera dipecahkan oleh BPSDM Prov. Kalimantan Timur adalah rendahnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia/aparatur pada lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun penyebab permasalahan utama atau pokok tersebut berasal dari dua faktor penyebabnya, yakni:

- a. Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi SDM/Aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas guna mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- b. Masih rendahnya aparatur yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural, termasuk

juga kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengarahkan visi dan misi pembangunan sebagai arah sasaran dan strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021. Dokumen Renstra yang disusun sudah sepantasnya harus sejalan dengan arah tujuan pembangunan di

Kalimantan Timur.

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan pula 5 (lima) Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Misi ke-5 Kemendagri menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif wajib didukung oleh kapasitas aparatur yang kompeten. Disinilah peranan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pencapaian Misi Ke-5 Kemendagri tersebut, karena BPSDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Adapun tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur yang terkait secara langsung pada ke-5 Misi Kemendagri tersebut adalah:

1. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
3. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Provinsi.

3.3 Telaahan Rencana Startegis Lembaga Administrasi Negara

Pembangunan nasional pada periode RPJMN ke-4 pada RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk mencapai tujuan utama dari RPJPN yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. LAN juga merupakan salah satu aktor utama dalam program reformasi birokrasi nasional. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah menetapkan visi reformasi birokrasi untuk “mewujudkan pemerintahan berkelas dunia”. Dengan demikian, LAN juga harus mengarahkan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan program reformasi birokrasi nasional. Untuk mewujudkan Visi LAN dan mendukung Visi Presiden, LAN melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden no.1 yaitu peningkatan Kualitas Manusia Indonesia yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.

Misi 2 : Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten.

Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas Melalui pengembangan model inovasi serta penguatan

Misi 4 : kapasitas dan budaya inovasi

Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik

Program prioritas “Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas” merupakan pelaksanaan pembangunan nasional pada bidang aparatur. Sasaran pembangunan bidang aparatur mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 tahap ke-IV yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berlandaskan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral dalam bentuk reformasi kelembagaan birokrasi melalui ASN profesional, berintegritas, dan netral; manajemen kinerja yang andal, efektif, dan akuntabel; organisasi dan proses bisnis birokrasi yang responsif dan adaptif; serta pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif.

Di dalam kebijakan pengembangan kompetensi ASN, ada 4 (empat) jenis kompetensi yang wajib dikembangkan oleh para ASN yakni: kompetensi Manajerial, Teknis, Sosio-kultural, dan Pemerintahan. Untuk jenis kompetensi Manajerial dan Sosio-kultural

dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai Instansi Pembina.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau dari upaya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dalam pengelolaan RTRW, BPSDM Prov. Kaltim secara tidak langsung terkait atau berhubungan dalam hal pengelolaan RTRW secara keseluruhan, dimana lembaga BPSDM berfungsi sebagai faktor pendukung atau penunjang dalam pemenuhan sumber daya manusia di daerah yang kompeten dalam pengelolaan RTRW tersebut.

Adapun dari implikasi langsung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lokasi dan letak bangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Letak BPSDM Prov. Kaltim yang sekarang berada diluar Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi, yakni terletak di jalan H.A.M.M Riffadin, Kelurahan Harapanbaru, Samarinda Seberang atau berjarak kurang lebih 13 kilometer dari pusat Kota Samarinda. Letak gedung BPSDM Prov. Kaltim dan pusat kota Samarinda dipisahkan oleh alur Sungai Mahakam, sehingga harus melalui jembatan untuk melaluinya.

Luasan areal BPSDM Prov. Kaltim kurang lebih 10 Ha dengan lingkungan hijau yang asri dan dihiasi juga oleh pemandangan sebuah danau kecil yang berada dibelakang gedung BPSDM.

Penempatan kantor administrasi, ruang belajar, asrama, ruang

makan, kantin, masjid, dan fasilitas pendukung lainnya sudah berdasarkan pada kondisi dan suasana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dengan berada jauh dari kebisingan kota sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi dengan baik. Dan pada saat ini masih perlukan upaya pengembangan fasilitas-fasilitas yang mendukung pengembangan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, areal BPSDM Prov. Kaltim masih memungkinkan untuk pembangunan prasarana fisik penunjang tersebut. Selanjutnya, untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diawali dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dinyatakan bahwa Tujuan Negara adalah: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Program Prioritas Pemerintah guna mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Program-program pembangunan tersebut harus dijalankan oleh Aparatur Sipil Negera (ASN) sebagai roda penggerak pembangunan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Aparatur Sipil Negera (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Pemerintah (dengan tidak ada lagi dikotomi antara ASN Pusat atau ASN Daerah. Profesi ASN ini dikelola melalui Sistem Merit, dimana faktor kualifikasi, kompetensi, dan kinerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam proses pengelolaannya.

Aparatur Sipil Negera wajib melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga setiap ASN diamanahi tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai Pelaksana Kebijakan.
2. Sebagai Pelayanan Publik.
3. Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Setiap ASN dengan Jabatan tertentu (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana) diikat oleh

sebuah Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu pula, setiap ASN pun diberikan jaminan pengembangan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum ketika melaksanakan tugas-tugasnya.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, terlihat bahwa terdapat perubahan arah paradigma pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dimulai sejak lama, yakni dimulai pada tahun 2005 sampai dengan 2009, dimana arah pembangunan ASN pada saat itu berupaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Selanjutnya, paradigma *Good Governance* berubah arahnya menuju perubahan birokrasi atau yang biasanya dikenal sebagai Reformasi Birokrasi (2010-2014). pengimplementasian Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara, Setiap ASN pada tahap ini wajib memiliki (menguasai) beberapa profil, yakni: nasionalisme, integritas, *hospitality*, *networking*, teknologi informasi, penguasaan bahasa asing, dan *entrepreneurship*.

Gambar 3.4
Arah Pembangunan Aparatur Sipil Negara



Sumber: LAN RI

Kebijakan Nasional pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara telah disusun oleh pihak eksekutif dan legislatif dimana didalamnya memuat beberapa hal, diantaranya:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN telah meletakkan dasar yang kuat bagi perwujudan Birokrasi Kelas Dunia melalui Profesionalisme ASN.
2. Jenis kompetensi yang harus dikuasai ASN adalah kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural, serta jenis kompetensi pemerintahan (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

3. Jaminan bahwa setiap PNS mendapatkan hak pengembangan kompetensi setiap tahunnya dalam rangka pengembangan kariernya (minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun) serta bagi PPPK mendapatkan hak pengembangan Kompetensi setiap tahun (Minimal 24 Jam Pelajaran/Tahun).
4. Variasi jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan.
5. Keharusan Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi bagi setiap instansi yang tertuang dalam penganggaran.
6. Pengembangan Kompetensi harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi.
7. Kegiatan pengembangan kompetensi harus terekam dalam sistem informasi Pengembangan Kompetensi SDM/ASN Nasional.

Terdapat pula perubahan paradigma yang berhubungan dengan penyelenggaraan peningkatan kompetensi ASN, dimana terdapat perubahan dari nomenklatur penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berubah sekarang menjadi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi (Bangkom) atau Latihan Pengembangan (Latbang). Perubahan paradigma penyelenggaraan ini meliputi antara lain:

1. Pendidikan Formil (Perguruan Tinggi).
2. Variasi bentuk Pengembangan Kompetensi: Pelatihan **Klasikal** (Pelatihan, seminar, kursus, penataran, lokakarya, bimtek, pembekalan/orientasi, pendalaman tugas, pelatihan dalam jabatan, dll) dan **Nonklasikal** (*e-learning*, pelatihan jarak jauh, *coaching/mentoring*, magang, pertukaran pegawai, *data-sharing*, dll.).
3. Pemanfaatan berbagai sumber belajar: Widyaiswara, praktisi, dan akademisi.
4. Dari bentuk Konvensional (Klasikal) ke *Blended* atau *Fully e-Learning*.
5. Dari orientasi ke dalam (kebutuhan institusi) kepada kebutuhan Nasional.
6. Bentuk: mandiri, kerjasama dengan lembaga pendidikan pemerintah/swasta, kerjasama dengan instansi pembina.
7. Evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaahan isu-isu atau permasalahan-permasalahan strategis yang menjadi acuan yang sesuai dengan isu strategis dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur “BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Menyiapkan SDM/Aparatur yang Kompeten Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” serta “Pemantapan Pengembangan Kapasitas SDM/Aparatur Pemerintah Daerah sebagai Mitra ASN”. Menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 3 (Tiga) tahun kedepan 2024-2026 adalah Masih minimnya SDM/Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi, yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural, dan pemerintahan sebagai jaminan kualitas (quality assurance bahwa setiap ASN memiliki kapasitas

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika ditinjau dalam skala makro, isu strategis tersebut dapat diuraikan dalam 2 (dua) isu atau permasalahan pokok, yakni:

1. Kebutuhan Pelayanan Publik yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045
2. Pemantapan Pengembangan Kapasitas SDM / Aparatur Pemerintah Daerah Sebagai Mitra IKN

Masing-masing masalah tersebut di atas memiliki sumber- sumber atau akar-akar masalah masing-masing pula. Kedua permasalahan diatas terdapat strategi untuk menghadapinya bagi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan “Membangun Budaya Corporate University dalam Pengelolaan Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM / Aparatur”.Pembentukan strategi untuk mengatasi 2 permasalahan pokok yang telah disebutkan di atas terdapat arah kebijakan dalam menindaklanjuti strategi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur antara lain yaitu, Pemenuhan hak SDM /Aparatur untuk mendapatkan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Kalimantan Timur, Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi bagi Seluruh SDM/Aparatur melalui Uji Kompetensi di Kalimantan Timur Serta Memberikan Pelayanan Pengembangan Kompetensi yang Berkualitas dan Profesional. Sehingga dilihat dari arah kebijakannyapun sangat luas yang memang meliputi tugas dan fungsi semua Bidang yang berada dinaungan BPSDM Prov. Kaltim. Lebih detail tentang uraian akar masalah yang bersumber dari kedua masalah diatas digambarkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran BPSDM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Minimnya Komepetensi SDM /Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik	Masih minimnya SDM/Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi, yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural, dan pemerintahan sebagai jaminan kualitas (quality assurance bahwa setiap ASN memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1. Kurangnya Komitmen dari Pimpinan dalam Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM / Aparatur
			2. Kurangnya Minat dan Kesadaran daripada SDM / Aparatur dalam Hal Pengembangan Kompetensi Diri

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

BPSDM Provinsi Kalimantan Timur hingga kini terus bermetaforsis dalam perbaikan layanannya, Terkhusus Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih menjadi calon ibukota Negara Republik Indonesia dimana akan menjadikan Provinsi Kaltim sebagai pusat pengembangan kompetensi SDM termasuk pengembangan uji kompetensi dan sertifikasi profesi terbaik dimana Provinsi Kaltim akan memiliki kekhususan seperti ibukota negara saat ini yakni DKI Jakarta. . Disebutkan dalam Undang-Undang dimaksud bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota NKRI perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat *well-informed* maka keunggulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar. Tujuan

Tujuan dalam Rencana Strategis ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (Tiga) tahun kedepan. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan utama perlu dirumuskan dan ditetapkan untuk menjawab permasalahan mendasar yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Guna mewujudkan tujuan Prioritas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tujuan prioritas **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas Demi Tercapainya Efektifitas dan Efesiensi”** di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan Ke-4 dari RPD Kaltim 2024 – 2026 yakni, **“Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan BerAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan Publik”** merupakan tanggung jawab dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Prov. Kaltim).

Pada Tujuan RPD Kaltim 2024-2025 Ke-4 tersebut memiliki sebuah sasaran tujuan dan terkait langsung dengan BPSDM Prov. Kaltim, yakni **“Meningkatnya Kompetensi SDM / Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur”** Tujuan dalam RPD memiliki Sasaran beserta dengan indikator-indikatornya, yakni:

1. Meningkatkan Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional, dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur dengan indikator **Persentase SDM/Aparatur yang Telah Memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi**
2. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur dengan Indikator **Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi**
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi **dengan Indikator Skor Kepuasan Masyarakat**

Sesuai dengan Sasaran tersebut secara tidak langsung merupakan tanggung jawab BPSDM Prov. Kaltim. Oleh karena itu, selanjutnya BPSDM Prov. Kaltim telah berupaya untuk melakukan proses perumusan dan penyelarasan Tujuan prioritasnya, terkhusus pada **aparatur yang berkualitas demi tercapainya efektifitas dan efesiensi**, sehingga menghasilkan sebuah rumusan Tujuan Prioritasnya yang pada akhirnya ditetapkan didalam Rencana Strategis ini. Adapun hasil rumusan **Tujuan** prioritasnya adalah **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas Demi Tercapainya Efektifitas dan Efesiensi”** di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian arah sasaran dan strategi yang selanjutnya disusun harus berfokus kepada upaya untuk mencapai Tujuan prioritas tersebut.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan

yang SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound, Continuously improvement*) untuk pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas.

Telah dipaparkan pada bagian sebelumnya mengenai Sasaran-sasaran yang terdapat pada RPD Kaltim 2024 - 2026 yang sebagiannya secara tidak langsung merupakan tanggung jawab BPSDM Prov. Kaltim.

Untuk mewujudkan Tujuan prioritas **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas Demi Tercapainya Efektifitas dan Efesiensi”** di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu disusun Sasaran-sasaran Prioritas sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan tersebut. Rumusan **Sasaran** yang akan dicapai didalam Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah atau Rencana Strategis bagi BPSDM Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Kinerja ini meliputi, Perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan PD, Administrasi Kepegawaian PD, Administrasi Umum PD, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD, Pemeliharaan BarangMilik Daerah urusan PD).
2. Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis. Pengembangan Kompetensi Teknis sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Standart Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam jabatannya, yang menjadi sangat penting dalam pengembangan kompetensi Teknis.

Meningkatnya pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang didalamnya mewajibkan setiap ASN berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensinya sebanyak minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya.

Dalam Undang-Undang ASN tersebut juga menyatakan jenis kompetensi aparatur yang harus dikembangkan adalah manajerial, teknis, sosio kultural bagi para Aparatur Sipil Negara, termasuk pula untuk jabatan fungsional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya menyatakan bahwa aparatur harus dibekali Kompetensi Pemerintahan beserta sertifikasinya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP PDN) yang melekat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusiadi daerah.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tantangan, peluang, permasalahan dan isu strategis yang tengah dan akan dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Prov. Kaltim) kedepannya, dimana banyak sekali hal yang wajib diupayakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pengembangan sumberdaya manusia aparatur di Kalimantan Timur. Termasuk pula kewajiban- kewajiban BPSDM Prov. Kaltim untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 2024- 2026.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang wajib dipecahkan oleh BPSDM Prov. Kaltim maka perlu disusun sebuahstrategi yang jitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut demi menjawab tantangan-tantangan organisasi. Analisis tantangan dan peluang pada BPSDM Prov. Kaltim menghasilkan rumusan sebuah Strategi Utama (*a Grand Strategy*) yang akan diimplementasikan nantinya. Rumusan strategi utama ini merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPSDM Provinsi KalimantanTimur

Hasil analisis internal BPSDM Provinsi Kaltim menetapkan sebuah Strategi Utama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, yakni:

Strategi Utama BPSDM Prov. Kalimantan Timur

“Membangun Budaya Corporate University dalam Pengelolaan Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM / Aparatur ”

Selain untuk menyelesaikan permasalahan, pernyataan Strategi Utama BPSDM Prov. Kaltim ini juga menjawab tantangan kewajiban untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan perintah peraturan perundangan-undangan yang terkait. Strategi Utama ini juga dikhususkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPSDM Prov. Kaltim untuk menuju ke arah pembangunan ASN yang mengarah kepada perwujudan Indonesia Emas 2045, Pemantapan Pengembangan Kapasitas SDM / Aparatur Pemerintah Daerah sebagai mitra IKN dan menjalankan arahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 untuk mengimplementasikan *Corporate University* dalam pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Dalam rangka pelaksanaan strategi agar dapat mencapai sasaran dengan lebih baik, maka perlu disusun suatu aturan yang memandu setiap pelaksanaan strategi tersebut agar dapat terarah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Karenanya, dalam suatu pelaksanaan strategi tentu memerlukan penciptaan kondisi-kondisi tertentu agar strategi dapat berjalan dengan baik dan benar demi mencapai tujuan dan sasaran, maka dari itu perlu disusun arah kebijakan (*policy guidance*) untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Lebih jauh lagi, kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan konfigurasi program kegiatan untuk memecahkan akar permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Arah Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program strategis didalam organisasi maupun bersifat eksternal yaitu arah kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pihak diluar organisasi.

Berdasarkan tujuan turunan dari RPD Provinsi Kalimantan Timur yaitu meningkatnya kompetensi SDM / Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Sasaran turunan dari RPD yang akan dicapai pada Jangka Menengah BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur dengan indikator persentase SDM / Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi, diturunkan program Pengembangan Sumber daya Manusia dengan rincian :
 - a) Melalui Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan rincian sub. kegiatan:
 - 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - 2) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - 3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - 4) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
 - b) Melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta

Jabatan Fungsional.

- 2) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi.
 - 3) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 4) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
2. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur dengan indikator Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi, diwujudkan melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
- 1) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar;
 - 2) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional;
 - 3) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
3. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur dengan indikator Skor Kepuasan Masyarakat, diwujudkan melalui kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Administrasi Umum

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 7) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 8) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 11) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

Selanjutnya Arah Kebijakan Jangka Menengah BPSDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026, yaitu:

1. Pemenuhan hak SDM / Aparatur untuk mendapatkan pengembangan Kompetensi di Provinsi Kalimantan Timur (manajerial, teknis, sosio kultural dan pemerintahan);

Pengembangan kompetensi dan sertifikasi bagi seluruh SDM Aparatur melalui Uji Kompetensi di Kalimantan Timur;

2. Memberikan pelayanan pengembangan kompetensi yang berkualitas dan profesional;
3. Peningkatan SDM penyelenggara pelatihan, widyaiswara/pengajar, sarana dan prasarana.

Selanjutnya untuk memudahkan pembaca, mengenai strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel, dibawah ini :

Tabel 5
Strategi dan Arah Kebijakan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal		Target		
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kompetensi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	80	85	86	87	88

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target			Strategi	Arah Kebijakan	Kinerja /Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target		
		2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024	2025	2026						2024	2025	2026
Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	80%	85%	86%	87%	88%	Mengoptimalisasi Pengelolaan Standarisasi, Sertifikasi dan pengembangan kompetensi SDM/Aparatur serta membangun budaya Corporate University	Pemenuhan hak SDM/Aparatur untuk mendapatkan pengembangan kompetensi di Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Sumber Daya Manusia/ Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Program Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86	87	88
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	cc	B	B	BB	BB				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	88	90	92
										Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	86	87	88

Sumber: Diolah, 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Review Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan adalah sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya review program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pada bagian-bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun mendatang. Adapun review Sasaran dan Program Prioritas BPSDM Prov. Kaltim tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Penentuan Program BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Kinerja /Sasaran Program	Program	Indikator Program	Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target		
							2024	2025	2026
Meningkatnya Sumber Daya Manusia/ Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Program Sumber Daya Manusia	Persentase SDM/Aparetur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ASN yang telah memperoleh Sertifikasi /STTP	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	87	88	89
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	Persen	86	87	88
					Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	Persen	86	87	88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Terpenuhinya layanan kesekretariat an	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	82	85	90
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80	85	88
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	Persen	80	85	90
				Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	Persen	65	70	80
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat korn	Persen	60	65	70
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	80	90	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Persen	80	90	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	80	82	85
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	Persen	85	90	95

Sumber : Diolah: 2023

Secara mendetail, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan BPSDM
Provinsi Kalimantan Timur

Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun 2024		Output Utama	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah
		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Pendidikan dan Pelatihan									
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86	25.000.000.000	ASN yang telah memperoleh Sertifikasi / STPP	87	27.794.100.500	88	29.544.100.500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88	16.576.143.800	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	90	16.803.634.300	92	17.284.319.800	
	Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti	86	14.973.856.200	Meningkatnya Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	88	17.060.689.700	90	19.124.089.700	

Sumber : Diolah, 2023

TABEL 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
- 2026 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Timur

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026		KETERANGAN
				PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
A	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i> <i>Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti</i>	16.576.143.800 14.973.856.200	88 86	33.864.324.000	90 87	36.408.409.500	92 88	Kepala BPSDM
I	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	1.040.286.000	82	1.148.640.000	85	1.475.040.000	90	Sekretaris
1	5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650.599.000	5	750.600.000	55	800.000.000	5	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.040.000	1	133.040.000	1	400.040.000	1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.647.000	2	265.000.000	2	275.000.000	2	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
II	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	14.945.920.000	80	14.945.920.000	85	14.945.920.000	88	Sekretaris
4	5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.500.000.000	54	14.500.000.000	54	14.500.000.000	54	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5	5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	401.740.000	1	401.740.000	1	401.740.000	1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6	5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.180.000	4	44.180.000	44	44.180.000	4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
III	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	6.310.000	80	6.310.000	85	6.310.000	90	Sekretaris
7	5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.000	1	6.310.000	1	16.310.000	1	Kasubag Umum
IV	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	45.210.000	85	45.210.000	70	45.210.000	80	Sekretaris
8	5.04.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.210.000	1	45.210.000	1	45.210.000	1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
V	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	507.554.300	65	657.554.300	70	811.839.800	80	Sekretaris
9	5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumia Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.839.800	89	250.839.800	89	361.839.800	80	Kasubag Umum
10	5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	306.714.500	202	406.714.500	0	450.000.000	20	Kasubag Umum
VI	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	1.920.605.300	80	2.121.205.300	85	2.184.605.300	90	Sekretaris
11	5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60.005.500	4	60.005.500	4	60.005.500	4	Kasubag Umum
12	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	75.560.000	2	75.560.000	2	75.560.000	2	Kasubag Umum
13	5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	316.505.800	6	316.505.800	6	316.505.800	6	Kasubag Umum
14	5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumia Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.040.000	1	24.040.000	1	24.040.000	1	Kasubag Umum
15	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumia Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.336.000.000	3	1.536.600.000	3	1.600.000.000	3	Kasubag Umum
16	5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumia Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.774.000	1	8.774.000	1	8.774.000	1	Kasubag Umum
17	5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumia Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	99.720.000	2	99.720.000	2	99.720.000	21	Kasubag Umum
VII	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	3.506.031.900	80	3.706.031.900		3.706.031.900		Sekretaris
18	5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.000.000.000	100	2.000.000.000		2.000.000.000		
19	5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1.506.031.900	42	1.706.031.900		1.706.031.900		Kasubag Umum
VIII	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	2.454.116.390	80	3.854.116.390		3.854.116.390		Sekretaris
20	5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.709.200	1	6.709.200		6.709.200		Kasubag Umum
21	5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang	1.420.514.190	1	1.420.514.190		1.420.514.190		Kasubag Umum

22	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1.026.893.000	1	2.426.893.000		2.426.893.000		Kasubag Umum
IX	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	6.695.243.810	85	7.379.336.110		9.379.336.110		Sekretaris
23	5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40.769.000	1	59.769.000		59.769.000		Kasubag Umum
24	5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127.981.600	23	127.981.600		127.981.600		Kasubag Umum
25	5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400.000.000	45	565.092.300		665.092.300		Kasubag Umum
26	5.04.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.126.493.210	45	2.126.493.210		2.526.493.210		Kasubag Umum
27	5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.000.000.000	49	4.500.000.000		6.000.000.000		

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	2024		2025		2026		KETERANGAN
				PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
B	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	25.000.000.000	86	27.950.000.000	87	29.700.000.000	88	Kepala BPSPDM
I	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	7.450.000.000	87	8.050.000.000	88	8.500.000.000	89	Kabid PKT
28	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,danurusan Pemetintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	7.450.000.000	1450	8.050.000.000	1450	8.500.000.000	1500	Subbid PKIJA, Subbid PKIJAPDP, Sub PKUJA
II	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	17.550.000.000	87	19.900.000.000	88	21.200.000.000	89	Kabid PKMF dan Kabid SKPK
		Bidang SKPK		4.550.000.000		5.600.000.000		6.200.000.000		Kabid SKPK
29	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi. Pengelolaan Kelembagaan. dan Pengembangan Kompetensi.	300.000.000	10	500.000.000	11	300.000.000	12	Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga
30	5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	300.000.000	3	450.000.000	3	550.000.000	3	Subbid Sertifikasi
31	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	600.000.000	130	700.000.000	130	800.000.000	130	Subbid Sertifikasi Kompetensi
32	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar	3.000.000.000	53	3.500.000.000	54	4.000.000.000	57	Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga
33	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	350.000.000	201	450.000.000	20	550.000.000	20	Subbid Kerjasama dan Sumber Belajar
		BIDANG PKMF		13.000.000.000		14.300.000.000		15.000.000.000		Kabid PKMF
34	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	13.000.000.000	7153	14.300.000.000	6954	15.000.000.000	7003	Subbid PKKP, Subbid PKPDJPT, dan Subbid PKJF
		TOTAL		56.121.277.700		61.814.324.000		66.108.409.500		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 7.1 Dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang menacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Perkiraan Target			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (%)
		2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	87	86	87	88	89
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,5	85,5	86	86,5	86,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	BB

Indikator Kinerja Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Persentase ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Persentase ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator ini berkontribusi terhadap sasaran yang ada pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Sedangkan untuk indikator Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, juga berkontribusi terhadap sasaran RPD yakni Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan, acuan dan pedoman yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pendanaan lain.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki BPSDM Provinsi Kaltim, penyusunan Rancangan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal BPSDM di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 agar dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak serta kerjasama yang harmonis semua stakeholder yang terkait. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, Rencana Strategis (Renstra) akan dievaluasi dan dipertimbangkan kembali isi dan rumusannya untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perubahan.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra ini sangat tergantung pada seluruh pemangku kepentingan, untuk itu perlu mengawal secara bersama -sama dalam mewujudkan tujuan dari rencana strategis ini agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2023
Kepala BPSDM Prov.Kaltim

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Nopember 2024, dan Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023, sehingga masa berlaku RPJMD Provinsi Kalimantan Timur akan berakhir di tahun 2023. Menjelang Pilkada serentak tahun 2024 nantinya, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum daerah otonom telah menerbitkan Kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai panduan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di masa transisi.

Masa transisi bagi pemerintah daerah menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, tetap memerlukan perencanaan pembangunan menengah daerah. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi para pejabat kepala daerah, dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi para kepala perangkat daerah.

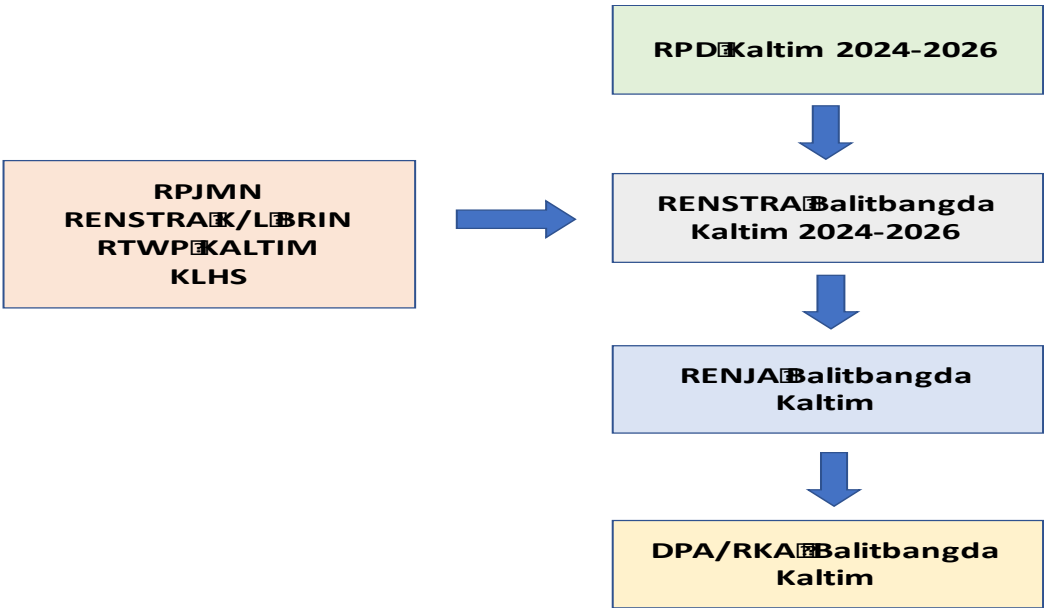
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya sesuai amanat Undang Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim saat ini dalam proses percepatan transformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Timur. Kelembagaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) memiliki lingkup penelitian dan pengembangan menjadi lebih luas, semula meliputi penelitian dan pengembangan, saat ini akan menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan evaluasi kebijakan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim menyusun Rencana Strategis untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempedomani tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Selain itu, dokumen Renstra disusun dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim, dengan memperhatikan: (1) Penyelarasan tematik riset dan inovasi dengan sasaran prioritas pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Renstra tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Arah dan Kebijakan Riset dan Inovasi; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan kerangka anggaran.

Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan selama periode tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggungjawab yang diemban sesuai tugas dan fungsi Pegawai Balitbangda Provinsi Kaltim yang sesuai dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Provinsi Kaltim tahun 2024-2026.
2. Memberikan arahan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan komitmen target kinerja yang disepakati ingin dicapai (*performance agreement*) dalam periode tahun 2024-2026.
3. Menjadi acuan untuk menyusun rencana kerja organisasi serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan organisasi yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran.
4. Menjadi acuan dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kelitbangan dengan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ini terdiri atas delapan bab, sistematika penulisannya dapat disajikan seperti berikut ini.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya memuat sumberdaya organisasi, kondisi capaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan badan, telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kaltim, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan serta sebagai alat ukur kinerja untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan, harapan dan komitmen terhadap Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang serta Rumpun Jabatan Fungsional Peneliti.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provisi Kalimantan Timur

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur** mempunyai tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuaidengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang

sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;

- Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2) **Sekretariat** dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi Subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat. Disamping itu juga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

3) **Bidang Sosial dan Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerinahan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

4) **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5) **Bidang Inovasi dan Teknologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbang;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

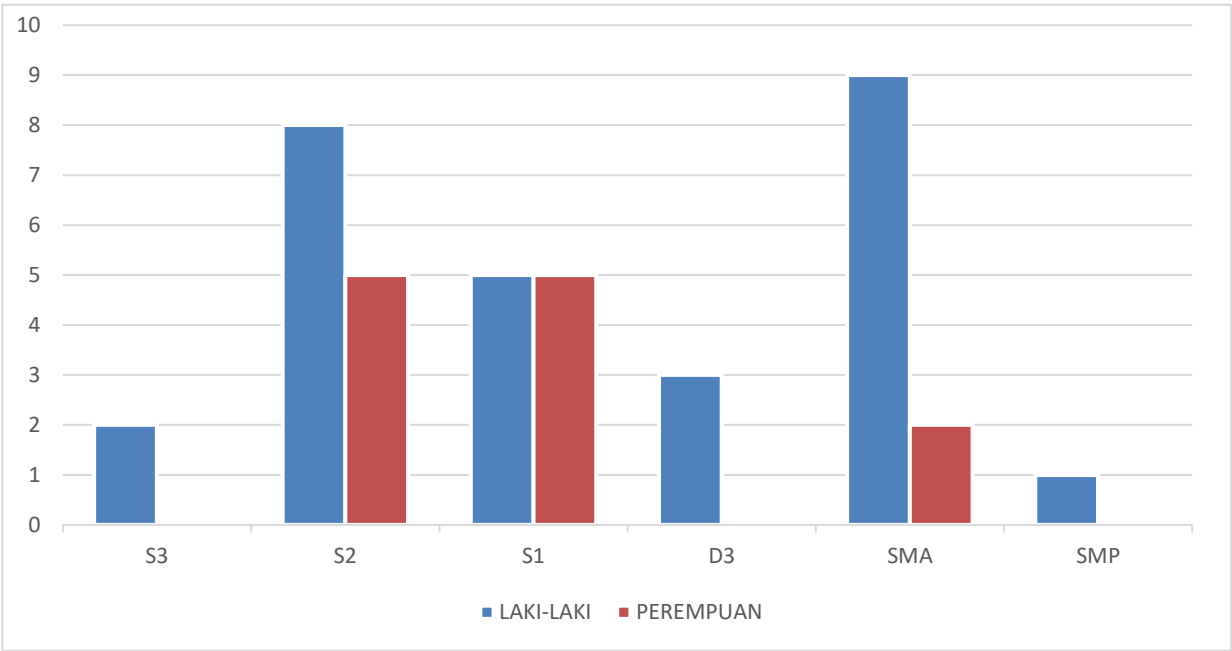
6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Peneliti, Fungsional Analis Kebijakan, Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah, Fungsional Litkayasa, Fungsional Perencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai peraturan ketentuan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

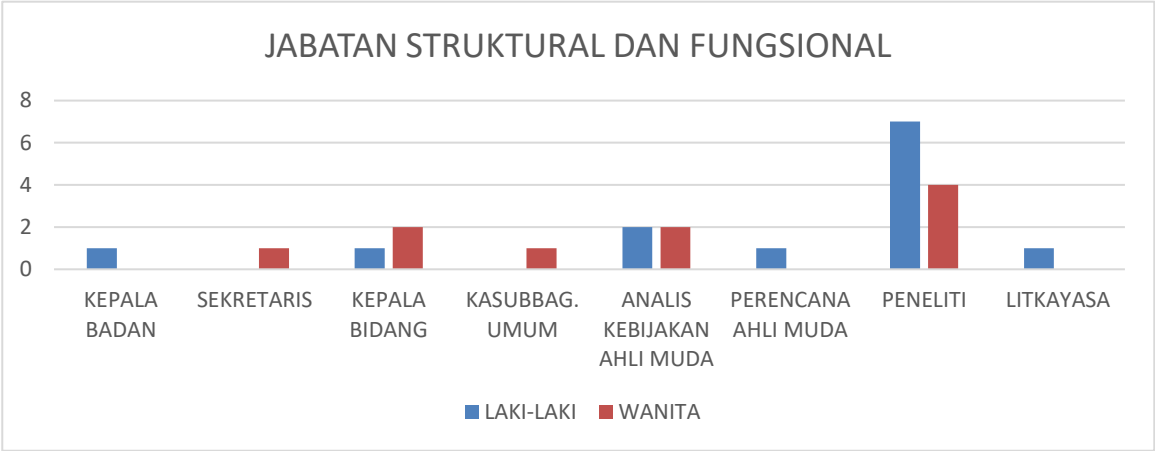
Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2023 berjumlah 43 orang yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar berikut :



Gambar 2.2 Tingkat Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

Keterangan : Tingkat pendidikan S3 : 1 (satu) orang, S2 sejumlah 8 (delapan) orang, S1 sejumlah 19 (sembilan belas) orang, D3 sejumlah 3 (tiga) orang, SMP sejumlah 1 (satu) orang

SDM yang mendududuki jabatan struktural dan fungsional



Gambar 2.3 Jabatan Struktural dan Fungsional pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

SDM ASN yang menduduki jabatan struktural sejumlah 6 (enam) orang terdiri kepala badan, sekretaris, kepala bidang (sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, kepala bidang inovasi dan teknologi), kepala sub bagian umum. Jabatan fungsional 20 (dua puluh) orang terdiri dari analis kebijakan ahli utama 1 (satu) orang, analis kebijakan ahli muda 5 (lima) orang, penata penerbitan ilmiah ahli muda 1 (satu) orang, perencana ahli muda 1 (satu) orang, peneliti 12 (dua belas) orang. Adapun kepakaran dari fungsional peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keahlian/Kepakaran dari Jabatan Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim

No.	Nama	Jabatan	Kepakaran
I. Bidang Ilmu Teknik			
1.	Dr. Ari Sasmoko Adi, ST.,M.T.	Peneliti Muda/IIIId	Teknik Transportasi Jalan
2.	Puput Wahyu Budiman, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Perencanaan Wilayah
3.	Zhikry Fitrian, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Manajemen Industri
4.	Suharsono, ST	Peneliti Pertama/IIIa	Teknik Lingkungan
5.	Muhammad Setiawan Prabowo, A.Md	Teknisi Penelitian Perekayasaan	Teknik Sipil
II. Bidang Ilmu Alam			
1.	Hj. Eka Nor Santi, SP, MP	Peneliti Muda/IIIId	Sistem UsahaPertanian
2.	Noor Wahyuningsih, ST	Peneliti Pertama/IIIb	Kebijakan Publik
3.	Mardiany, S. Hut, M.Si	Peneliti Pertama/IIIa	Kebijakan Publik
III. Bidang Ilmu Sosial			
1.	Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	Peneliti Muda/IIIId	Kebijakan Ekonomi
2.	Adi Hendro Purnomo, S.IP, MAP	Peneliti Muda/IIIId	Administrasi Publik
3.	Ratih Fenty Anggriani Bintoro, SAP, MAP	Peneliti Pertama/IIIa	Kebijakan Publik
4.	Yuli Fitrianto, S.Sos, MAP	Peneliti Pertama/IIIa	Politik dan Pemerintahan
5.	Pebiansyah Hapsari, SH, MH	Peneliti Pertama/IIIa	Hukum Tata Negara

Sumber : DUK Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2023

Komposisi pangkat dan golongan/ruang PNS dan Tenaga Teknis/Non Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2023, tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pangkat dan Golongan/Ruang PNS
dan Tenaga Teknis/Non Teknis Balitbangda Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina Utama	IV/e	1
2	Pembina Utama Madya	IV/c	1
3	Pembina Tingkat I	IV/b	3
4	Pembina	IV/a	2
5	Penata Tingkat I	III/d	9
6	Penata	III/c	2
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	11
8	Penata Muda	III/a	1
9	Pengatur Tingkat I	II/d	5
10	Pengatur	II/c	6
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
12	Pengatur Muda	II/a	1
J u m l a h			43
13	Tenaga Teknis/Non Teknis		36

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dan fungsi Badan litbang adalahsebagai berikut :

- Bangunan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Ruang seminar, diskusi, persentasi dan lain-lain dilengkapi *meubelair* dan *Audio Visual System*
- Ruang rapat staf lengkap dengan *meubelair*
- Ruang Peneliti
- Ruang Diseminasi Kelitbangan
- Ruang Satpam
- Jaringan Internet
- Gudang
- Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
- Notebook, PC dan Printer
- Sarana Dokumentasi
- Televisi

- Layar persentasi/LC
- Sarana/prasarana lainnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan penelitian

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dari target kinerja 72% terealisasi sebesar 79%, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja utama berada pada kategori **Tinggi** dengan tingkat capaian kinerja 110%, atau lebih dari 100%. Realisasi capaian kinerja tersebut tercapai melampaui target karena dari 71 hasil kelitbangan tahun 2020-2022 yang dimanfaatkan, tercapai sejumlah 78 hasil kelitbangan yang dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mencapai kategori sangat baik dengan nilai 82,06. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	77 B	61,26 B
2.	Sasaran : Terwujudnya Kinerja Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	Persentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara	%	72	79
3.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	%	72	59
		Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan Untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	%	63	73
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan publik pada tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	97	97

Sumber : SAKIP Tahun 2022

Tabel. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%			100	100	100	100	100		100	100	
2	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
3	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
4	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
5	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
6	Jumlah laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan			2	2	2	2	2		100	100	

7	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%			100	100	100	100	100		100	100	
8	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
9	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
10	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	%			100	100	100	100	100		100	100	
11	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan			0	1	1	0	1		100	100	
12	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan			0	1	1	0	1		100	100	
13	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan			0	1	1	0	1		100	100	
14	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan			1	0	0	1	0		100	100	
15	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Laporan				0	0		0		100	100	
16	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Laporan			1	0	0	1	0		100	100	
17	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
18	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
19	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
20	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	

21	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
22	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
23	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Laporan			0	0	0	0	0		100	100	
24	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%			100	100	100	100	100		100	100	
25	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan			2	1	1	2	1		100	100	
26	Jumlah rancang bangun yang diuji cobakan	Rancang bangun			1	0	0	1	0		100	100	
27	Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim	Inovasi			12	0	0	12	0		100	100	
28	Rakor Kelitbagan	Laporan			1	1	1	1	1		100	100	
29	Jumlah hasil kelitbagan yang di Diseminasikan	Disemina si			25	0	0	25	0		100	100	
30	Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan	artikel			20	0	0	20	0		100	100	
31	Jumlah HKI yang difasilitasi	HKI			1	0	0	1	0		100	100	
32	terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	%			100	100	100	100	100		100	100	
33	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi konerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Dokumen			31	31	31	31	31		100	100	
34	Jumlah dokumenkoordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Laporan			21	21	21	21	21		100	100	

35	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			10	10	10	10	10		100	100	
36	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen			14	14	14	14	14		100	100	
37	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen			14	14	14	14	14		100	100	
38	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen			10	10	10	10	10		100	100	
39	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai			10	0	0	10	0		100	100	
40	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Bulan			12	12	12	12	12		100	100	
41	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dokumen			12	12	12	12	12		100	100	
42	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Jenis			27	0	0	27	0		100	100	
43	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit			8	0	0	8	0		100	100	
44	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Jenis			27	12	12	27	12		100	100	
45	Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pegawai			358	329	329	358	329		100	100	
46	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit			56	0	0	56	0		100	100	
47	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit			3	0	0	3	0		100	100	
48	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Unit			16	0	0	16	0		100	100	
49	jumlah mebelair yang diadakan	Unit			37	0	0	37	0		100	100	

50	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Bulan			12	12	12	12	12		100	100	
51	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Surat			100	100	100	100	100		100	100	
52	Jumlah Pelayanan Umum Yang Dilaksanakan	Layanan			38	49	49	38	49		100	100	
53	jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, air, dan listrik	Bulan			12	12	12	12	12		100	100	
54	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	Kegiatan			5	5	5	5	5		100	100	
55	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit			1			1			100	100	
56	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit			25	27	27	25	27		100	100	
57	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit			2	2	2	2	2		100	100	
58	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit			52	0	0	52	0		100	100	
59	luas areal yang dilakukan pemeliharaan	M ²			0	7000	7000	0	7000		100	100	
60	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit			1	1	1	1	1		100	100	

Tabel. 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total Belanja	19,558,892,000	20,097,060,990	31,802,815,364	16,794,771,429	17,701,309,835		86	88		2.75	5.12
Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	867,075,500	803,660,000	2,549,781,000	783,918,864	778,913,322		90	97		(7.31)	(0.64)
Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	83,100,000	312,600,000	-	64,325,800	303,674,957		77	97		2.76	78.82
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	118,250,000	27,660,000	1,643,057,000	105,497,000	27,357,000		89	99		(0.77)	(285.63)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	95,900,000	41,090,000	259,032,000	87,892,000	36,789,500		92	90		(0.57)	(138.91)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	177,900,000	193,400,000	147,180,000	167,161,404	192,454,440		94	100		0.09	13.14
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	391,925,500	228,910,000	402,762,000	359,042,660	218,637,425		92	96		(0.42)	(64.22)
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-	-	97,750,000	-	-		-	-		-	-
Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	263,100,000	624,872,000	926,470,000	250,866,610	605,296,840		95	97		1.38	58.55
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36,600,000	485,472,000	570,870,000	35,436,000	473,572,317		97	98		12.26	92.52

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	226,500,000	139,400,000	355,600,000	215,430,510	131,724,523		95	94		(0.38)	(63.55)
Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1,196,374,500	775,875,000	3,901,000,000	1,011,964,565	745,896,375		85	96		(0.35)	(35.67)
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	279,100,000		1,541,000,000	218,063,600			78	-		(1.00)	-
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	200,375,000	-	-	194,282,200		-	97		-	100.00
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	292,250,000	550,000,000	-	279,617,900		-	96		-	100.00
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	637,184,500	-		531,082,405	-		83	-		(1.00)	-
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	480,000,000	-	-		-	-		-	-
Litbang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	280,090,000	-	350,000,000	262,818,560	-		94	-		(1.00)	-
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	330,000,000	-	-		-	-		-	-
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	283,250,000	650,000,000		271,996,275		-	96		-	100.00
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1,180,115,000	910,973,000	4,780,618,700	921,880,100	894,822,742		78	98		(0.23)	(3.02)
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	203,500,000	910,973,000	2,021,672,500	203,119,000	894,822,742		100	98		3.48	77.30
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	158,250,000	-	744,261,000	137,694,100	-		87	-		(1.00)	-
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	398,900,000	-	1,541,543,200	343,254,000	-		86	-		(1.00)	-
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	383,465,000	-	311,564,000	209,123,000	-		55	-		(1.00)	-
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	36,000,000	-	161,578,000	28,690,000	-		80	-		(1.00)	-
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,950,000	961,450,400	481,290,000	38,950,000	854,038,560		49	89		11.18	95.44

~ 3750 ~

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,400,000	694,575,400	401,340,000	34,400,000	665,272,000		100	96		19.19	94.83
Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	44,550,000	266,875,000	79,950,000	4,550,000	188,766,560		10	71		4.99	97.59
Administrasi Keuangan	11,038,257,632	10,246,164,396	10,036,736,114	9,283,129,400	8,393,985,068		84	82		(0.07)	(10.59)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,038,257,632	10,246,164,396	10,036,736,114	9,283,129,400	8,393,985,068		84	82		(0.07)	(10.59)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000	-	96,112,500	28,500,000			81	-		(1.00)	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35,000,000	-	96,112,500	28,500,000	-		81	-		(1.00)	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,507,343,193	2,634,590,960	3,870,311,650	2,311,067,427	2,500,750,671		92	95		0.05	7.59
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81,275,568	186,985,000	208,495,750	80,794,800	132,212,700		99	71		1.30	38.89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,090,395	-	19,121,100	18,585,240	-		97	-		(1.00)	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,007,200	-	48,492,400	12,315,500	-		88	-		(1.00)	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39,999,925	112,671,000	34,620,400	34,954,550	101,093,000		87	90		1.82	65.42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,352,970,105	2,334,934,960	3,559,582,000	2,164,417,337	2,267,444,971		92	97		(0.01)	4.54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310,452,500	-	1,182,666,000	258,549,500	-		83	-		(1.00)	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,800,000	-	428,814,500	49,324,000	-		99	-		(1.00)	-
Pengadaan Sarana d Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	186,652,500	-	685,738,900	135,685,000	-		73	-		(1.00)	-
Pengadaan Mebel	74,000,000	-	68,112,600	73,540,500	-		99	-		(1.00)	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,731,085,675	2,091,317,484	2,968,951,000	1,641,399,849	1,947,164,724		95	93		0.21	15.70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	20,000,000	17,385,000	3,180,500	11,277,000		42	56		1.67	71.80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,417,354,750	1,816,980,880	2,655,845,200	1,370,130,000	1,719,769,744		97	95		0.28	20.33
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	306,230,925	254,336,604	293,720,800	268,089,349	216,117,980						

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi, Penataan ruang dan Lingkungan menjadi tantangan dan peluang bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 (tiga) tahun ke depan tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Arah Kebijakan, Tantangan dan Peluang
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026 dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah

NO.	PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TANTANGAN	PELUANG
	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		
1.	RPJMN 2020-2024		
a.	Target Makro Pembangunan Kaltim	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif untuk mendukung pencapaian prioritas nasional terkait peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, pengembangan sektor unggulan, perikanan, dan hilirisasi pertambangan	Pengembangan riset dan inovasi terkait peluang sektor unggulan yang dapat dikembangkan, penguatan konektivitas infrastruktur, telekomunikasi dan informasi
	Laju Pertumbuhan Ekonomi 8,5%		
	Tingkat Kemiskinan 3,35%		
	Tingkat Pengangguran 5,10%		
b.	Pengembangan sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan hilirisasi pertambangan		Pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung industri manufaktur, agrobisnis dan agroteknologi, industri kreatif, rekayasa teknologi, energi dan pertambangan
c.	Pengembangan dan penguatan konektivitas infrastruktur, telekomunikasi dan informasi		
d.	Pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung industri manufaktur, agrobisnis dan agroteknologi, industri kreatif, rekayasa teknologi, energi dan pertambangan		pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan sekitar KN, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
e.	Pengembangan dan penguatan desa-kota terkait dengan pembangunan KN		
f.	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim		Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
g.	Peningkatan riset dan inovasi Daerah		
2.	RENSTRA/LBADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL		
a	Memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional dengan dukungan kemitraan multipihak melalui mekanisme <i>Open Platform</i> terkait SDM yang unggul, infrastruktur riset yang lebih terbuka serta pendanaan riset yang lebih kompetitif	Membangun ekosistem riset dengan SDM yang unggul, infrastruktur dan pendanaan riset yang memadai dengan dukungan kemitraan multipihak	Pengembangan kerjasama riset dan inovasi yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan yang terkait dengan bencana, pemanfaatan sumberdaya alam, pengembangan potensi kemaritiman, dan peningkatan kualitas lingkungan
	peningkatan kapasitas dan mobilitas periset melalui pengembangan talenta riset dan inovasi		
	Pengembangan kema pendanaan Riset dan Inovasi melalui keterlibatan swasta		
	Riset dan inovasi difokuskan pada bidang kebumihan dan Maritim, untuk menyelesaikan persoalan nasional khususnya dalam ketahanan bencana, eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut, pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, pengelolaan sumber daya perairan darat, pengelolaan sumber daya geologi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup		

NO.	PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	TANTANGAN	PELUANG
	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	RPD Kaltim 2024-2026		
a	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif untuk mendukung pencapaian prioritas Daerah terkait peningkatan daya saing SDM, Diversifikasi ekonomi, Peningkatan tata kelola pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan penguatan daerah sebagai mitra KKN	Pengembangan Riset dan Inovasi yang difokuskan pada pencapaian target prioritas pembangunan daerah terkait peningkatan daya saing SDM, Diversifikasi ekonomi, Peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya terkait pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, transformasi pelayanan publik, dan penguatan daerah sebagai mitra KKN
b	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya;		
c	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan		
d	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
e	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem		
f	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
g			
h	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra KKN dengan mengoptimalkan kerjasama		
2.	RTRWP Kaltim dan KLHS		
	Pengembangan sistem perkotaan berbasis air untuk mendukung pengembangan industri pengolahan, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan pariwisata	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis analisis spasial terkait dengan peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana	Pengembangan riset dan inovasi yang berbasis spasial terkait dengan peningkatan sektor unggulan daerah, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana
	Pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan dan peningkatan kualitas dan pelayanan seluruh wilayah provinsi		
	Pelestarian kawasan berfungsi lindung dan konservasi		
	pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah bagi kesejahteraan masyarakat		
	pengembangan kawasan perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan		
	Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem		
	Pengembangan kawasan budidaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
	Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana		
	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara		

Arah Kebijakan, Tantangan dan Peluang tersebut menjadi pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah, sehingga untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut diperlukan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak sebagai Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Komitmen kerjasama Riset dan Inovasi Daerah perlu ditingkatkan baik dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, asosiasi profesi, maupun badan usaha swasta, meliputi berbagai aspek sebagai berikut :

- **Aspek Organisasi dan Tata Laksana**, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Transformasi kelembagaan BRIDA Kaltim yang sedang dalam proses (telah terbit Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA Prov. Kaltim, 19 Agustus 2022), diharapkan dapat memotivasi transformasi kelembagaan BRIDA di kab/kota.
- **Aspek Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama bagi fungsional peneliti sebagai ujung tombak organisasi litbang. Seluruh pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknis maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek, meningkatkan wawasan melalui seminar, diseminasi, workshop, lokakarya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, para ASN baik tingkat eselon maupun staf perlu diberikan pengetahuan dan kompetensi mengenai kelitbangan semisal dalam hal pembuatan KAK/TOR, penyusunan proposal, dan sebagainya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**, salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas ruang perkantoran berikut fasilitas pendukungnya. Terutama laboratorium data/pusat data litbang yang belum ada, fasilitas perpustakaan yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta fasilitas teknologi informasi yang perlu dikembangkan. Hal ini untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan.
- **Aspek Pembiayaan**, dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan aspek anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran yang dikelola masih terbatas dan bersumber pada APBD, sementara pembangunan dan pengembangan IPTEK di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan pengembangan skema pendanaan melalui sumber dana lainnya dari sumber yang sah dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- **Aspek Kerjasama**, aspek kerjasama litbang akan dikembangkan

bersama dengan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Pihak Swasta, dan beberapa kementerian teknis terkait di pusat. Hal ini perlu dilakukan karena litbang di Perguruan Tinggi dan Kementrian/Lembaga di pusat memiliki SDM Peneliti yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya. Kemudian diperlukan juga kerjasama dengan donor internasional pada kegiatan riset dan pengembangan inovasi. Disamping itu, diperlukan regulasi terkait penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu yang memperkuat peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi di daerah.

**PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ada 2 (dua) permasalahan utama, sehingga ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

No.	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat	Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan	Kepedulian dan perhatian terhadap hasil kelitbangan masih rendah
			Pembinaan kab/kota belum optimal
			Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan naskah kebijakan yang dihasilkan sebagai dasar kebijakan Pemprov Kaltim
		Hasil Kelitbangan belum aplikatif	Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Riset
			Skema pendanaan riset yang belum memadai
			Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Riset
			kurangnya kemitraan (praktisi) dalam penelitian
			Monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan belum

No.	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
			dilaksanakan secara periodik
			Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan publikasi ilmiah/buku/naskah akademik/ di nasional dan internasional/ prosiding
2	Belum berkembangnya Inovasi Daerah	Produk-produk Inovasi yang dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan	keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Inovasi dan Teknologi
			Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan parapihak yang dibina
			Kemampuan inovator dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan parapihak yang dibina masih kurang
			Kemampuan SDM IPTEK dalam menghasilkan perekayasaan IPTEK untuk daerah masih kurang
		Regulasi pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara optimal	standart penilaian terkait indeks inovasi daerah dari pusat yg meningkat dan berubah ubah
		Komitmen pengembangan inovasi masih rendah	pemahaman terkait inovasi masih kurang

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026

Telaahan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi tugas dan fungsi Balitbangda Kaltim dalam mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026. Sesuai dengan Tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk pencapaian Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026, seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan RPD Provinsi Kaltim 2024-2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN RPD	OUTPUT TEMA RISET DAN INOVASI DARI RENSTRA	PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
P1 Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. (Sasaran 1,3,4)	Peran Perempuan, Anak, Lansia, Disabilitas dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan gender	1. Dampak sosial dari Bonus Demografi Lansia 2. Rendahnya Tingkat ekonomi Perempuan dan Difable
	Riset Pernikahan Dini dan Permasalahan Remaja	Darurat Remaja Menikah Dini dampak dari media sosial yang berimplikasi terhadap penurunan daya saing
	Relevansi Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja / daya saing tenaga kerja	Rendahnya penyerapan tenaga kerja dari alumni pendidikan lokal
P2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya. (Sasaran 2)	Penanganan Stunting	Meningkatnya stunting di Kaltim 1,1 % (dari 22,8 % menjadi 23,9 %
	Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Kesenjangan akses pelayanan kesehatan
P3 Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan. (Sasaran 5,6)	Potensi investasi berbasis ekonomi kreatif di provinsi kaltim	Belum berkembangnya diversifikasi ekonomi yang berimplikasi terhadap melambatnya Transformasi ekonomi
	Identifikasi kinerja kelembagaan koperasi, dan pemasaran digital dalam peningkatan pendapatan UMKM di Kaltim	
	Sumberdaya wilayah untuk pengembangan industri di prov Kaltim	
	Pengembangan Model Industri pariwisata, dan analisis Pasar destinasi pariwisata di Kaltim	
	Pengembangan pertanian, dan penerapan teknologi pertanian modern di kaltim.	
	Pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan di kaltim	
P5 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem (Sasaran 6)	Pengembangan UMKM dalam mengurangi masyarakat miskin di daerah perkotaan kaltim	Meningkatnya penduduk miskin perkotaan
P4 Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (Sasaran 7)	Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan di kaltim	
	Identifikasi Efektifitas Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kaltim	
P8 Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN (Sasaran 7)	Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan pada daerah mitra IKN	Masih rendahnya kesiapan daerah sebagai Mitra IKN
	Pengembangan kota Balikpapan dan Samarinda sebagai MICE City dalam mendukung IKN	
	Pengembangan kota Balikpapan dan Samarinda sebagai MICE City dalam mendukung IKN	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN RPD	OUTPUT TEMA RISET DAN INOVASI DARI RENSTRA	PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
	Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang sudah ada	inefisiensi dan ketidakefektifan tata kelola pemerintahan dampak dari peraturan yang diterapkan dan yang akan diterapkan
	Otonomi daerah dan kesejahteraan	Belum optimalnya hubungan pemerintah

Seluruh arah kebijakan dari prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 merupakan faktor pendorong untuk peningkatan kinerja pelayanan Balitbangda di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan kinerja pelayanan Balitbangda, dalam upaya mendukung tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026, faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Balitbangda adalah :

- a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Inovasi dan Teknologi
- c. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Riset dan Pengembangan inovasi.
- d. Skema pendanaan riset dan pengembangan inovasi yang belum memadai.

3.3 Telaahan RPJMN dan Renstra K/L

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah dijelaskan bahwa kapasitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi di Indonesia masih dinilai rendah sehingga pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat Global Innovation Index 85 dari 129 negara. Namun, pada tahun 2021 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 87. Kondisi ini tentunya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh BRIN dan beberapa kementerian/lembaga lain yang mendukung tercapainya indikator terkait Global Innovation Index dalam menetapkan strategi kedepannya, karena meskipun infrastruktur iptek strategis serta persentase sumber daya manusia iptek berkualifikasi S3 mengalami peningkatan namun nyatanya belum mampu mendorong peningkatan ekosistem riset sepenuhnya sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat.

Oleh karena itu, infrastruktur sektor iptek yang telah terbangun,

dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi serta dukungan sumber daya iptek lainnya perlu dimaksimalkan kebermanfaatannya sehingga dapat mendukung perwujudan ekosistem riset sebagaimana yang diharapkan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai badan otonom baru yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi nyata sektor iptek terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan tugas dan fungsi BRIN adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BRIN berusaha menyiapkan strategi yang tepat untuk menghasilkan keluaran riset dan inovasi yang lebih berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam menjawab kebutuhan Indonesia serta menjadi dasar kuat dalam mendukung upaya transformasi ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam agenda pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan hal tersebut, BRIN menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2022-2024 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BRIN yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu kebijakan yang digunakan dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ruang dan wilayah tersebut.

Arahan dari penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek menjadi penting sebagai acuan dalam menetapkan peruntukkan ruang dan wilayah, sehingga peruntukkan ruang dan wilayah tersebut tidak semata-mata ditetapkan secara subjektif, namun ditetapkan secara objektif berdasarkan

potensi dan kehandalan sumber daya yang dimiliki di masing-masing ruang atau wilayah.

Kebijakan RTRWP dan KLHS merupakan faktor pendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk berperan menyediakan hasil penelitian dan pengembangan berbasis spasial, yang dapat dimanfaatkan untuk dasar kebijakan dalam peningkatan perekonomian, pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan Mitigasi bencana.

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim adalah :

- a. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan bidang kepakaran Sistem Informasi Geografis untuk mendukung Riset dan pengembangan inovasi yang berbasis spasial.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Sistem Informasi Geografis.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tiga tahun mendatang. Berdasarkan dari rumusan masalah utama, masalah dan akar masalah tersebut di atas, isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim ke depan adalah :

1. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
2. Peningkatan pengembangan inovasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Sesuai dengan Tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan

sebagai salah satu Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk pencapaian Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

Berdasarkan isu strategis, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim di masa yang akan datang adalah “ **Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Yang Optimal** “ dengan tolok ukur “ Jumlah Penerapan Hasil Riset yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Daerah” dan “Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah”.

Tujuan tersebut tercapai jika jumlah **Hasil Riset** yang telah dilaksanakan telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah dan jumlah **Hasil INOVASI** yang telah dilaksanakan telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsih untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui rekomendasi hasil riset dan pengembangan inovasi untuk pencapaian seluruh Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : **Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat**, dengan tolok ukur “Jumlah Hasil Riset yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah” dan “Jumlah Hasil Inovasi yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Diterapkan dalam arti bahwa Hasil Riset dan Inovasi yang dilaksanakan akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2024	2025	2026
Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan hasil	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.	Riset	1	3	6

Keterangan : Tabel tersebut merupakan tujuan dan sasaran yang mendukung urusan Balitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Non Urusan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2024	2025	2026
TUJUAN : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	85	86	86
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Poin	75 (BB)	77,5 (BB)	80 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	84	85

Keterangan : Tabel tersebut merupakan tujuan dan sasaran yang mendukung non urusan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur atau bersifat rutin pada sekretariat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi

dankebijakan, maka disusun langkah-langkah atau rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Strategi dan Arah kebijakan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024-2026, tampak pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan RPD Provinsi Kaltim : 1. Mewujudkan SDM Berdaya Saing; 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Sasaran RPD Provinsi Kaltim : 1. Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Menurunnya tingkat pengangguran 4. Meningkatnya daya saing perempuan 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi 6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin 7. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar 8. Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan 9. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan 10. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 11. Terwujudnya Birokrasi yang professional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Yang Optimal	1. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi Oleh Perangkat Daerah Dan Masyarakat	1. Membuat Regulasi Yang Mengatur Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Riset, Inovasi dan Pemajuan IPTEK 2. Meningkatkan Sosialisasi dan pemahaman terhadap hasil Riset dan Inovasi
			3. Penciptaan system pembinaan dan pengawasan (binwas) berbasis elektronik/teknolo

			gi kepada kab/kota 4. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan terkait perumusan kebijakan pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi
		2. Mengembangkan Produk Riset dan Inovasi yang lebih aplikatif	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perisest dan Inovator 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Riset, Pengembangan Inovasi dan Teknologi 3. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kelitbangnan Secara periodik 4. Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan Dalam Menghasilkan Publikasi Ilmiah/Buku/Naskah Akademik/Prosiding di nasional dan Internasional 5. Pembentukan Sentra HAKI

		3. Mengembangkan produk-Produk Riset	1. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Berfokus Pada Konsep Scienced Based Policy
--	--	--------------------------------------	---

		dan Inovasi Yang Ditujukan Untuk Penyelesaian Permasalahan Pembangunan	Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah 2. Pengembangan Sistem Informasi riset dan Inovasi Daerah Berbasis Teknologi Yang Terpadu (IRIS) 3. Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan Stakeholders Dalam Menghasilkan Produk Riset, Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4. Peningkatan Kapasitas Perekayasaan IPTEK
		4. Peningkatan Komitmen dan Kerjasama Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah	1. Pengembangan Skema Pendanaan Riset dan Pengembangan Inovasi Serta Teknologi Lintas Wilayah Dan Lintas Sector 2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pemahaman Terhadap Pengembangan Inovasi 3. Peningkatan kemitraan (Pemerintah dan Swasta) Dalam Riset, Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penerapan Standar Penilaian Indeks Inovasi Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN: Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Yang Optimal



Gambar 5.1 Tujuan, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN PENDANAAN

Dalam rangka pelaksanaan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD dibutuhkan program dan kegiatan. Adapun

indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim tahun 2024-2026.

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masih bersifat indikatif. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Nomenklatur program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.1 Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

1.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi di Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi Penilaian Perang Daerah Terbaik

1.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi Panji-Panji Keberhasilan dan Tokoh Berjasa

1.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset reformasi birokrasi

1.1.5 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset POLHULKAM Kaltim

- 1.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset Penerapan Desa Binaan

- 1.1.7 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset model hubungan desa dengan kecamatan dan kabupaten

- 1.1.8 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset model pengembangan aparatur desa

- 1.1.9 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset pengembangan pengelolaan keuangan dan aset desa

- 1.1.10 Sub Kegiatan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil riset Pemerintah Desa, BUMDES, Industri dan Kemandirian Desa

- 1.1.11 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil aplikasi data dan laporan

- 1.1.12 Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait naskah kebijakan

- 1.1.13 Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil ata Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan

- 1.1.14 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait fasilitasi hasil rekomendasi peneliti asing

1.2 Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang sosial dan kependudukan

1.2.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian permasalahan sosial di Kaltim

1.2.2 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Perempuan ,Anak, Lansia, Disabilitas dalam Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

1.2.3 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian pendidikan dan daya saing SDM di Kaltim, Sumber Daya Budaya di Kaltim Menjadi Warisan Dunia (Haritage)

1.2.4 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Pemuda dan Olahraga

1.2.5 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian pengembangan pariwisata

1.2.6 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Kesehatan Masyarakat Di Kaltim

1.2.7 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian kependudukan

1.2.8 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Administarsi Kependudukan Di Kaltim

1.2.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Kebutuhan Dunia Usaha Terhadap Tenaga Kerja Di Kaltim

1.2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Daerah

1.2.11 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Transmigrasi Di Kaltim

1.3 Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang ekonomi dan pembangunan

1.3.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Potensi Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif Di Provinsi Kalimantan Timur, Identifikasi Kinerja Kelembagaan Koperasi di Kalimantan Timur, identifikasi kinerja pemasaran digital dalam peningkatan pendapatan umkm di Kalimantan Timur

1.3.2 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian sumber Daya Wilayah Untuk Pengembangan Industri Di Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan model industri pariwisata di Kalimantan Timur, Analisa Pasar Destinasi Pariwisata Kalimantan Timur

1.3.3 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan BUMD Sektor Kehutanan, riset BUMD

1.3.4 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Optimasi Peningkatan Produksi Padi,dan Pengembangan Produk Pangan di Kalimantan Timur, Identifikasi Jaringan Irigasi di Kalimantan Timur, Identifikasi Penerapan Teknologi Pertanian Modern di Kalimantan Timur

1.3.5 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy, Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Kelautan dan Perikanan, Identifikasi Kebutuhan Armada Penangkapan Ikan di Kalimantan Timur

1.3.6 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Dampak Transisi Energi Terhadap Tenaga Kerja Sektor Batubara dan Migas di Kalimantan Timur, Identifikasi Mineral Tanah Jarang di Kalimantan Timur (Lanjutan), Pengembangan Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Biogas, Analisis Potensi Energi Sampah Sebagai Energi Terbarukan

1.3.7 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Mitigasi Bencana Terkait Lingkungan di Kalimantan Timur, Identifikasi Pencemaran Sungai di Provinsi Kalimantan Timur, Pengelolaan Lingkungan dan Ancaman Bencana di Wilayah Pesisir

1.3.8 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Analisis Dampak Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur dan Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat Sekitar IKN, Analisis Pengembangan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kalimantan Timur, Analisis Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur

1.3.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pemantapan Material Lokal Dalam Campuran Aspal Panas, Identifikasi Pembukaan Jalan Usaha Tani di Kalimantan Timur, Identifikasi Pembukaan Jalan Usaha Tani di Kalimantan Timur

1.3.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Kinerja Sisa Umur Jalan Wilayah Utara Kalimantan Timur, Identifikasi Kendaraan ODOL dan Penanganannya di Kalimantan Timur, Identifikasi Kelengkapan Fasilitas Jalan Provinsi di Wilayah Utara Kalimantan Timur

1.3.11 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Analisis Potensi Penembangan Permukiman dan Perumahan Pada Kawasan Wilayah Pengembangan Ibukota Negara, Identifikasi Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan Kalimantan Timur, Konsep Bermukim Masyarakat Adat Dayak Kenyah di Desa Long Anai Kabupaten Kutai Kartanegara

1.3.12 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Potensi dan Konflik Agraria Pasca Ibukota Negara, Perubahan Penggunaan Lahan Pada Kawasan Penyangga Ibukota Negara, Evaluasi Struktur Ruang Pada Kota dan Kabupaten Daerah Mitra Ibukota Negara

1.3.13 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja terkait riset atau kajian Pengembangan Smart Province di Kaltim, Riset Komunikasi dan Informatika

1.4 Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi

Kegiatan ini diperuntukkan riset atau kajian di bidang pengembangan inovasi dan teknologi

1.4.1 Sub Kegiatan Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sub kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja riset atau kajian Potensi Ketersediaan Air Bersih di Daerah Penyangga IKN, Riset Potensi Pengembangan EBT Berbasis Kelapa Sawit (POME) otensi Pengembangan EBT Berbasis Tenaga Bayu, Riset Pemanfaatan Teknologi Nutrient Film Technique sebagai Penyokong Pangan Bergizi, Riset Pakan Ternak dan Perikanan Berbasis Bahan Lokal, Riset Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS di Kaltim, Riset Penetapan Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Daerah, Riset Potensi Pemanfaatan Pasir Kuarsa untuk mendukung Bauran EBT di Kaltim

1.4.2 Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja Uji Coba Prototipe Pengolahan Limbah Daun Nanas Menjadi Serat, Uji Coba Protitope Pembasmi Hama Otomatis, Fasilitasi Workshop Inovas, Uji Coba dan Penerapan Teknologi Pakan Ternak dan Perikanan Berbasis Bahan

Lokal, Fasilitasi Workshop Inovasi

- 1.4.3 Sub Kegiatan Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja Penjaringan Inovasi (Pepes Ikan Peda) dan Pelaksanaan Quick Win 1 PD 1 Inovasi, Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah, Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Inovasi,
- 1.4.4 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja tentang Penerbitan Jurnal Riset Pembangunan, Ekspose Hasil Riset Bidang Inovasi dan Teknologi, Pelaksanaan Pameran/Expo Dalam Rangka Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Riset
- 1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Sub Kegiatan ini berisikan tentang rincian belanja Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen perencanaan Perencanaan, Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen seperti Renstra, Renja dan Perubahan Renja
- 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen RKA Murni
- 2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Perubahan RKA
- 2.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan koordinasi dan penyusunan DPA murni
- 2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA
- 2.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan koordinasi dan penyusunan LKjIP san

SAKIP

2.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan evaluasi renja dan evaluasi Renstra

2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan PD

Kegiatan ini diperuntukan penyelesaian administrasi keuangan PD

2.2.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan Dokumen SPJ Honor ASN seperti Honor PA/KPA/PPTK, PBJ, Pengurus Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pembantu penerimaan, Bendahara pembantu pengeluaran

2.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD

2.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen hasil koodinasi dan pelaksanaan akuntansi PD

2.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PD

2.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diperuntukan bagi penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

2.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD

2.3.2 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah PD

2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Penilaian Barang Milik Daerah PD

- 2.3.4 Sub Kegiatan Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD
- 2.3.5 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PD
- 2.3.6 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD
- 2.3.7 Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah PD
- 2.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini diperuntukkan penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Sub kegiatan ini diperuntukan pembelian Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub kegiatan ini diperuntukan penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2.4.3 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 2.4.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2.4.5 Sub Kegiatan Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 2.4.6 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.4.7 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pelaksanaan pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.5.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan pembelanjaan Komponen Instalasi Listrik

2.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan pembelanjaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti flashdisk, tinta printer, umbul-umbul dll

2.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja Peralatan Rumah Tangga seperti alat kebersihan taman dan toilet kantor

2.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja bahan logistic kantor

2.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja Barang Cetak dan Penggandaan

2.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja tamu

2.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja perjalanan dinas dalam dan luar kaltim, luar negeri

2.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan belanja Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD

2.5.9 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sub kegiatan ini diperuntukan penyusunan dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan bagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- 2.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan mebel
- 2.6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.6.6 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
- 2.6.7 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
- 2.6.8 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi pengadaan mebel
- 2.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa Surat Menyurat
 - 2.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.7.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan dan pelaporan Jasa pelayanan umum kantor

2.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan.

2.8.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan.

Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Yang Optimal				Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	1 Riset	1 Riset		3 Riset		6 Riset		6 Riset							
				Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	N/A	1 Inovasi		3 Inovasi		6 Inovasi		6 Inovasi							
	Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi Oleh Perangkat Daerah Dan Masyarakat			Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	N/A	2 Riset		5 Riset		10 Riset		10 Riset							
				Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	N/A	2 Inovasi		5 Inovasi		10 Inovasi		10 Inovasi							
		5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	N/A	70%	7.235.000.000	72%	8.367.675.000	75%	10.644.350.000	75%	15.602.675.000	Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Bidang Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim		
						Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	N/A	65%		66%		67%							
		5	5	2	1.01	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	2%	1.193.000.000	4%	1.407.950.000	5%	1.891.170.000	5%	4.492.120.000			
		5	5	2	1.01	1	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	N/A	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	228.500.000	3 Laporan	578.500.000		
		5	5	2	1.01	2	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	228.500.000	5 Laporan	528.500.000		
		5	5	2	1.01	3	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	228.500.000	3 Laporan	528.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5	5	2	1.01	4	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	52.690.000		
		5	5	2	1.01	5	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	3 Laporan	2 Laporan	110.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	185.900.000	3 Laporan	445.900.000		
		5	5	2	1.01	6	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	7	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	0	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	200.950.000	1 Laporan	295.750.000	3 Laporan	671.700.000		
		5	5	2	1.01	8	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	9	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	10	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000		
		5	5	2	1.01	11	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	0	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	397.500.000	3 Laporan	897.500.000		
		5	5	2	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000		
		5	5	2	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	0	4 Rekomendasi	200.000.000	5 Rekomendasi	250.000.000	5 Rekomendasi	313.000.000	14 Rekomendasi	763.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.690.000	3 Laporan	3.690.000
		Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	0	1 Rekomendasi	1.000.000	1 Rekomendasi	1.000.000	1 Rekomendasi	1.690.000	3 Rekomendasi	3.690.000
		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	2%	1.382.000.000	4%	1.577.000.000	5%	1.932.980.000	5%	4.891.980.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	1 Dokumen	325.000.000	1 Dokumen	375.000.000	1 Dokumen	499.250.000	3 Dokumen	1.199.250.000
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Dokumen	1 Dokumen	201.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	314.690.000	3 Dokumen	765.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	433.900.000	4 Dokumen	1.133.900.000
		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	290.250.000	3 Dokumen	765.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	52.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	248.000.000	1 Dokumen	384.750.000	3 Dokumen	907.750.000
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	52.690.000
		Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	0	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.690.000	3 Dokumen	3.690.000
		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	2%	2.100.000.000	4%	2.392.500.000	5%	3.021.400.000	5%	7.513.900.000
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	585.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	660.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	140.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	745.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	271.400.000	3 Dokumen	641.400.000
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6	6 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	745.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	650.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	172.500.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	572.500.000
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	670.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	260.000.000	3 Dokumen	595.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	660.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	660.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	190.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	N/A	11%	2.560.000.000	11%	2.990.225.000	12%	3.798.800.000	12%	9.349.025.000
		Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	2 Dokumen	760.000.000	3 Dokumen	1.140.000.000	3 Dokumen	1.200.000.000	8 Dokumen	3.100.000.000
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0	2 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	548.800.000	5 Laporan	948.800.000
		Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis. Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	3 Laporan	1.150.000.000	3 Laporan	1.200.000.000	3 Laporan	1.450.000.000	9 Laporan	3.800.000.000
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	400.000.000	9 Laporan	1.000.000.000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.225.000	1 Laporan	200.000.000	3 Laporan	500.225.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,50 (BB)	78,50 (BB)		79,30 (BB)		80,01 (A)		80,01 (A)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	83 Indeks	85 Indeks		86 Indeks		86 Indeks		86 Indeks	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	61,26 (B)	75 (BB)		77,50 (BB)		78,10 (BB)		78,10 (BB)	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	83 Indeks	83 Indeks		84 Indkes		85 Indeks		85 Indeks	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	83 Indeks	83 Indeks	23.765.000.000	84 Indeks	26.382.325.000	85 Indeks	24.874.400.000	85 Indeks	75.021.725.000
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%	
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80%	80%	375.000.000	85%	487.500.000	90%	487.500.000	90%	1.350.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	65.000.000	10 Dokumen	65.000.000	30 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	21 Laporan	75.000.000	21 Laporan	97.500.000	21 Laporan	97.500.000	63 Laporan	270.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	65.000.000	5 Laporan	65.000.000	15 Laporan	180.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0%	0,18%	10.773.000.000	0,08%	11.344.900.000	0%	11.394.900.000	0%	33.512.800.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	10.500.000.000	50 Orang/Bulan	11.000.000.000	50 Orang/Bulan	11.000.000.000	145 Orang/Bulan	32.500.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	300.000.000	36 Bulan	750.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	36.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.000.000	3 Dokumen	36.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Reestru Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.900.000	1 Dokumen	3.900.000	3 Dokumen	10.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	30 Laporan	50.000.000	30 Laporan	65.000.000	30 laporan	65.000.000	90 laporan	180.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	N/A	20%	24.000.000	15%	31.000.000	10%	31.000.000	10%	86.000.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	11.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	11.000.000
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	3 Laporan	11.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	36 Laporan	11.000.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	36 Laporan	42.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Reastra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40%	40%	355.000.000	50%	305.000.000	70%	430.000.000	70%	1.090.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	2 Paket	160.000.000	1 Paket	85.000.000	2 Paket	160.000.000	5 Paket	405.000.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	25 Orang	125.000.000	30 Orang	150.000.000	35 Orang	200.000.000	90 Orang	475.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	90 Orang	180.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75%	75%	2.340.000.000	85%	3.562.000.000	95%	4.512.000.000	95%	10.414.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000	1 Paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	3 paket	250.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	3 paket	350.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	26.000.000	3 paket	72.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	1 paket	30.000.000	1 Paket	39.000.000	1 paket	39.000.000	3 paket	108.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	90.000.000	1 Paket	117.000.000	1 paket	117.000.000	3 paket	324.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	104.000.000	1 Laporan	104.000.000	3 Laporan	288.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.750.000.000	12 laporan	2.675.000.000	12 Laporan	3.700.000.000	36 Laporan	8.125.000.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	72.000.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	825.000.000
		kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	0%	30%	5.903.000.000	70%	6.055.925.000	100%	2.155.000.000	100%	14.113.925.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 Unit	500.000.000	2 Unit	1.000.000.000	0 Unit	-	3 Unit	1.500.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.300.000	1 Unit	1.300.000	3 Unit	3.600.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1 paket	370.000.000	1 paket	78.000.000	1 Paket	458.700.000	3 Paket	906.700.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5 Unit	380.000.000	10 Unit	1.381.625.000	12 Unit	1.500.000.000	27 Unit	3.261.625.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	4.502.000.000	1 Unit	3.400.000.000	0 Unit	-	2 Unit	7.902.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	130.000.000	3 Unit	360.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	65.000.000	3 Unit	180.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100%	100%	3.290.000.000	100%	3.537.000.000	100%	3.537.000.000	100%	10.364.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	39.000.000	12 Laporan	39.000.000	36 Laporan	108.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	520.000.000	36 Laporan	1.440.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	78.000.000	36 Laporan	216.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	2.800.000.000	35 Laporan	2.900.000.000	35 Laporan	2.900.000.000	83 Laporan	8.600.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60%	60%	705.000.000	70%	1.059.000.000	80%	2.327.000.000	80%	4.091.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	2 Unit	75.000.000	6 Unit	210.000.000	6 Unit	210.000.000	6 Unit	495.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	400.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	70 Unit	140.000.000	80 Unit	182.000.000	90 Unit	250.000.000	90 Unit	572.000.000
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	1 Unit	50.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.125.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	4 Unit	325.000.000	6 Unit	600.000.000	6 Unit	1.175.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40.000.000	3 Unit	52.000.000	3 Unit	52.000.000	3 Unit	144.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	180.000.000
TOTAL ANGGARAN						31.000.000.000		34.750.000.000		35.518.750.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Balitbangda Provinsi Kaltim yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Balitbangda Prov. Kaltim yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Prov Kaltim 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	TUJUAN 1 : Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal						
	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Riset	0	1	3	6	6
	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Inovasi	0	1	3	6	6
II	SASARAN 1 yang mendukung tujuan 1 : Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat						
	Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	0	2	5	10	10
	Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	0	2	5	10	10
III	TUJUAN 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80.01 (A)	80.01 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	84	85	86	86	86
IV	SASARAN 2 yang mendukung tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Perangkat Daerah						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Poin	70 (B)	75 (BB)	77,50 (BB)	78,10 (BB)	78,10 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	82	83	84	85	85
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	0	4	9	18	18
	Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	0	4	9	18	18
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	83	84	85	85
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026⁷ ini merupakan perencanaan strategis yang dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan komitmen, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara para pihak agar seluruh sumber daya yang ada dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Membuat Rencana Kerja (Renja) tahunan, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD. Mengevaluasi capaian kinerja Renstra, khususnya terkait tindak lanjut hasil kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada tahun Renstra.

Samarinda, Maret 2023

Kepala,

Dr. M. H. FITRIANSYAH, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19731127 200604 1 009

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam perjalanannya terus disempurnakan, terakhir dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi yang meliputi, pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, termasuk didalamnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah mempedomani sistematika, substansi, tahapan dan tata cara sebagaimana yang diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam jangka waktu tiga tahun. Gubernur bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 tersebut dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda, pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 10) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.
- 11) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dijadikan panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dan juga memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Bab II memuat:

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
4. Kelompok Sasaran Layanan
5. Mitra Badan Penghubung Pemberian Pelayanan

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Bab III memuat:

1. Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung Kalimantan Timur
2. Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab IV memuat:

1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Penghubung Tahun 2024-2026
2. Cascading Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA PD Tahun 2024-2026

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VI menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VII memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD Pemangku Urusan Pemerintah Daerah.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di “Taman Mini Indonesia Indah” (TMII) Jakarta dan Pimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
3. Kepala Seksi Promosi dan Informasi
4. Kepala Seksi Pelayanan

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pembentukan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

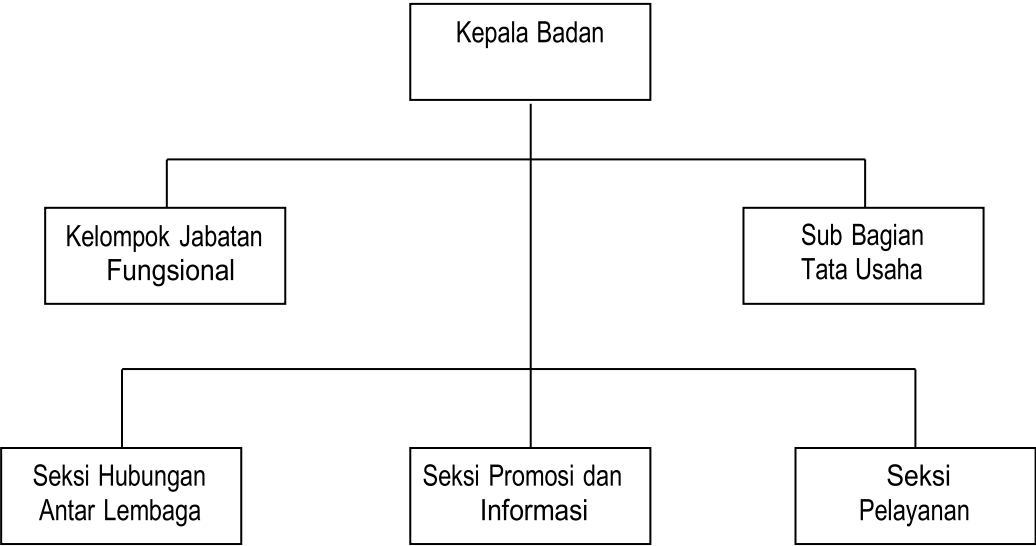
- 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan anjungan Kaltim;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan dan pengelolaan Mess;
- 7) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat digambarkan bagan struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur



Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, membawahi:

1. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
2. **Seksi Hubungan Antar Lembaga** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga.
3. **Seksi Promosi dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan Anjungan Kaltim.
4. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pelayanan dan pengelolaan Mess.

2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Strategis adalah suatu arah dan tindakan mengenai pernyataan yang diinginkan oleh Organisasi di waktu yang akan datang, strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan akan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas dengan memperhatikan sumber daya

yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Adapun gambaran sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Penghubung sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022 memiliki pegawai sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang, terdiri dari 22 (dua puluh dua) PNS dan 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai non PNS/kontrak, baik yang berada di Badan Penghubung, Mess dan Anjungan Kaltim TMII.

Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dan pegawai perempuan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Dengan tingkat pendidikan; SD sebanyak 4 (empat) orang, SLTP sebanyak 5 (lima) orang, SLTA sebanyak 61 (enam puluh satu) orang, D3 sebanyak 12 (dua belas) orang, S1 sebanyak 15 (lima belas) orang, dan S2 sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai per 31 Desember 2022

STATUS PEGAWAI		GENDER		PENDIDIKAN						JML
PNS	NON PNS	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
22	77	68	31	4	5	61	12	15	2	99

Tabel 2.2.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022

NO.	JABATAN	GOLONGAN				ESELON		
		I	II	III	IV	III	IV	V
1	KEPALA BADAN	-	-	1	-	1	-	-
2	KASUBBAG. TATA USAHA DAN STAF	-	1	7	-	-	1	-
3	KASI. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN STAF	-	-	3	-	-	1	-
4	KASI. PROMOSI DAN INFORMASI DAN STAF	1	2	2	-	-	1	-
5	KASI. PELAYANAN DAN STAF	-	3	2	-	-	1	-
	JUMLAH	1	6	15	-	1	4	-

2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan kantor, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan sampai dengan tahun 2022 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung yaitu dengan melakukan pembelian/pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung serta pembelian/pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

No.	Aset Kantor	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Kantor jalan Kramat II No.42	930 m ²	Baik
2.	Bangunan Kantor jalan Kramat II No.42	900 m ²	Baik
3.	Tanah Kantor jalan Kramat II No.34	662 m ²	Baik
4.	Bangunan Kantor jalan Kramat II No.34	400 m ²	Baik
5.	Tanah Rumah Dinas	332 m ²	Baik
6.	Bangunan Rumah Dinas	170,61 m ²	Baik
7.	Bangunan Anjungan Kaltim TMII	7 unit	Baik
8.	Kendaraan Roda Empat	20 unit	Baik
9.	Kendaraan Roda Dua	14 unit	Baik
10.	Inventaris Kantor		Baik

3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu : (1). sumber internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) sumber eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Berikut ini revidi kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Renstra periode 2019-2023.

Tabel 2.4.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
Renstra 2019-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
1. Indikator Tujuan																	
1.1	Persentase pelayanan Badan Penghubung yang dapat terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%			
1.2	Persentase SDM yang memiliki standar kompetensi	50%	50%	50%	60%	80%	50%	58%	66%			110%	116%	132%			
1.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja			70	70	71				72,43	-				103,47%	-	<
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	87	90				91,60	-				105,29%	-	<
2. Indikator Sasaran																	
2.1	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung	80%	80%	82%	82%	85%	87,77%	90,90%	91,34%			100,71%	113,70%	111,30%			
2.2	Persentase Kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan	70,16%	83,33%	87,5%	91,66%	95,83%	80,77%	91,30%	91,30%			102,03%	109,56%	104,34%			
2.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	66	66	67	68	70	66,52	67,63	71,07			100,79%	102,47%	106,07%			
2.4	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Badan Penghubung			80	82	85				91,64	-				111,76%	-	<
2.5	Persentase Pelayanan Publik Pada Tugas Badan Penghubung Provinsi			85%	90%	95%				91,56%	-				101,73%	-	<
3. Indikator Program																	
3.1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70%	75%				87,77%	90,90%				125,39%	121,28%				
3.2	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 Unit	2 Unit				1 Unit	2 Unit				100%	100%				
3.3	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%	50%				50%	58%				122,22%	116,00%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
3.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66	66				66,52	67,63				100,70%	102,47%				
3.5	Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan	250 Orang	250 Orang														
3.6	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	80%	80%	85%			87,77%	90,96%	89,59%			109,71%	113,70%	105,40%			
3.7	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi			90%	92%	93%			98,76%	91,56%	-			108,73%	99,52%	-	<
3.8	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung			80	82	85				91,64%	-				1,12%	-	<
4	Indikator Kegiatan																
4.1	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%				
4.2	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	57 Jenis	16 Jenis				57 Jenis	16 Jenis				100%	100%				
4.3	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%				
4.4	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 Kegiatan	85 Kegiatan				96 Kegiatan	102 Kegiatan				112,94%	120,00%				
4.5	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%				
4.6	Jumlah PTIS yang mengikuti diklat/bimtek	50 Orang	50 Orang				50 Orang	50 Orang				100%	100%				
4.7	Jumlah pakaian dinas	240 Setel	240 Setel				240 Setel	240 Setel				100%	100%				
4.8	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	10 Dokumen				10 Dokumen	10 Dokumen				100%	100%				
4.9	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%				
4.10	Jumlah laporan kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMI	90 Laporan	90 Laporan				90 Laporan	90 Laporan				100%	100%				
4.11	Jumlah laporan kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta	9 Laporan	9 Laporan				9 Laporan	9 Laporan				100%	100%				
4.12	Jumlah laporan kegiatan propaganda pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%				
4.13	Banyaknya pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	75 Kali	75 Kali				62 Kali	74 Kali				82,67%	98,67%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
4.14	Jumlah laporan kegiatan sosial kemasyarakatan	18 Laporan	18 Laporan				18 Laporan	18 Laporan				100%	100%				
4.15	Jumlah pengunjung mess yang mengisi form survey kepuasan	600 Orang	600 Orang				581 Orang	200 Orang				96,83%	33,33%				
4.16	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1077 Dokumen	1077 Dokumen				1242 Dokumen	1235 Dokumen				115,32%	114,67%				
4.17	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen			16 Dokumen	16 Dokumen	8 Dokumen			100%	100%	50%	<
4.18	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.19	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi			50%	60%	60%			66%	77%	-			132,00%	128,33%	-	<
4.20	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.21	Jumlah Unit Barang Milk Daerah Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah			76 Unit	79 Unit	181 Unit			74 Unit	79 Unit	42 Unit			97,37%	100%	23,20%	<
4.22	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.23	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.24	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			100%	100%	18,94%	<
5	Indikator Sub Kegiatan																
5.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen			9 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen			100%	100%	44,44%	<
5.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	=

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
5.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	-			100%	100%	-	<
5.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	=
5.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	-			100%	100%	-	<
5.6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen			100%	100%	66,67%	<
5.7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan			23 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	21 Orang/ Bulan			100%	90,00%	84,00%	=
5.8	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			49 Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen			49 Dokumen	61 Dokumen	15 Dokumen			100%	100%	24,59%	<
5.9	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	2 Paket	2 Paket			2 Paket	2 Paket	-			100%	100%	-	<
5.10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			68 Orang	63 Orang	63 Orang			68 Orang	63 Orang	2 Orang			100%	100%	3,17%	<
5.11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket			100%	100%	27,19%	<
5.12	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	8 Paket	25 Paket			10 Paket	8 Paket	11 Paket			100%	100%	44,00%	<
5.13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket			100%	100%	23,66%	<
5.14	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	3 Paket			3 Paket	3 Paket	3 Paket			100%	100%	16,74%	<
5.15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106 Laporan	80 Laporan	102 Laporan			174 Laporan	80 Laporan	23 Laporan			164%	100%	22,55%	<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
5.16	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			76 Unit	79 Unit	181 Unit			74 Unit	79 Unit	42 Unit			97,37%	100%	23,20%	<
5.17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			100%	100%	18,25%	<
5.18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan			48 Laporan	48 Laporan	12 Laporan			100%	100%	25,00%	<
5.19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya			40 Unit	40 Unit	40 Unit			40 Unit	40 Unit	15 Unit			100%	100%	37,50%	<
5.20	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			290 Unit	367 Unit	457 Unit			290 Unit	367 Unit	126 Unit			100%	100%	27,57%	<
5.21	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	4 Unit			4 Unit	4 Unit	4 Unit			100%	100%	3,43%	<
5.22	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan			1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan			100%	100%	50,00%	<
5.23	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan			100%	100%	50,00%	<
5.24	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditrockatkan			19 Laporan	16 Laporan	16 Laporan			19 Laporan	16 Laporan	6 Laporan			100%	100%	37,50%	<
5.25	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			3 Laporan	6 Laporan	7 Laporan			3 Laporan	6 Laporan	-			100%	100%	-	<
5.26	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Pendukung			2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			2 Laporan	4 Laporan	1 Laporan			100%	100%	33,33%	<

Pada indikator “Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Badan Penghubung” dihasilkan dari perhitungan 3 survei pelayanan antara lain:

- a. Survey kepuasan terhadap pelayanan fasilitasi hubungan antar lembaga digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan yang diberikan kepada *stakeholder*. Layanan hubungan antar lembaga menjadikan tingkat kepuasan pejabat/instansi/lembaga pusat/daerah yang di fasilitasi sebagai indikator kinerja dengan menggunakan kuisioner kepuasan sedangkan saran dan masukan berupa keluhan yang disampaikan oleh *stakeholder* yang dilayani baik secara lisan maupun tertulis sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung.
- b. Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Mess pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2022 mendapat hasil 91,61 yang artinya mutu pelayanan Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur “Sangat Baik”. Akan tetapi, walaupun dalam kategori “Sangat Baik” yang artinya pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perubahan yang meningkat, masih ada unsur-unsur pelayanan yang perlu diperbaiki untuk lebih memaksimalkan mutu pelayanan A (Sangat Baik) dan ada pula unsur pelayanan yang perlu dipertahankan tetapi masih perlu ditingkatkan agar pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya pelayanan terhadap tamu mess lebih baik. Untuk indikator ini dianggap masih relevan untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi masih ditemukan keluhan terhadap berbagai pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan Mess salah satunya dengan cara menindaklanjuti kritik dan saran agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.
- c. Survei kepuasan terhadap pelayanan fasilitasi promosi dan informasi, khususnya di Anjungan Kaltim TMII pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2022 mendapat hasil 96,84 yang artinya mutu pelayanan terhadap mitra kerja dan pengunjung Anjungan Kaltim TMII “Sangat Baik”. Meskipun hasil survei dalam kategori “Sangat Baik” yang artinya pelayanan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perubahan yang meningkat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada keluhan dari pengguna layanan fasilitasi promosi dan informasi di

Anjungan Kaltim, sehingga penanganan keluhan serta tindak lanjutnya menjadi perhatian khusus dan bahan masukan untuk perbaikan layanan fasilitasi promosi dan informasi yang akan datang.

Salah satu faktor yang membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim di TMII dapat terealisasi dengan baik adalah letak Anjungan Kaltim yang berada di salah satu tempat wisata yang diminati dan sebagai tempat tujuan liburan dan refreshing pada saat momen- momen tertentu seperti perayaan tahun baru, akhir pekan, libur sekolah, dan lain sebagainya. Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana di Anjungan Kaltim juga ditingkatkan berupa media aplikasi *Changing Background, Custome Changing* 3D, Video promosi daerah 360° /Tour 3D dan papan informasi *digital touchscreen*. Pada tahun 2023 di Anjungan Kaltim TMII akan dilakukan revitalisasi secara menyeluruh dan mengubah tampilan bangunan-bangunan di Anjungan Kaltim menjadi miniatur bangunan-bangunan khas Kaltim seperti Lamin (media informasi Kabupaten/Kota), Rumah Barrau (kantor), Rumah Gajah Menyusu (panggung), Rumah Dahor (kantin), Rumah Lou Upak (ruang UMKM), Mesjid Shiratal Mustaqim (musholla), Plaza IKN dan penambahan ruang Hologram/Informasi Digital. Diharapkan dengan penambahan sarana prasarana tersebut maka upaya Anjungan Kaltim TMII sebagai *show window* Provinsi Kalimantan Timur di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan informasi mengenai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur lebih maksimal lagi. Pencapaian terhadap jumlah kunjungan wisatawan tidak sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pencapaian dalam hal realisasi program/kegiatan yang ada. Tetapi program/kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang atau bahkan mendorong pencapaian tersebut lebih baik lagi.

Selain kinerja, realisasi APBD juga dijadikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan dana untuk mencapai kinerja pada Renstra periode sebelumnya. Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada PD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
Renstra 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
	1	2	3	4	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
PENDAPATAN	Rp 320,000,000.00	Rp 326,400,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 417,500,000.00	Rp 329,040,000.00	Rp 68,470,000.00	Rp 108,501,200.00	Rp 650,871,200.00
1. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 320,000,000.00	Rp 326,400,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 417,500,000.00	Rp 329,040,000.00	Rp 68,470,000.00	Rp 108,501,200.00	Rp 650,871,200.00
BELANJA	Rp 19,048,090,000.00	Rp 10,613,295,882.50	Rp 14,137,890,000.00	Rp 15,988,861,403.00	Rp 17,678,466,599.50	Rp 10,004,269,800.00	Rp 12,705,243,318.00	Rp 15,418,496,289.00
1. Belanja Operasi	Rp 10,277,620,000.00	Rp 9,335,895,882.50	Rp 11,285,279,760.00	Rp 15,040,664,903.00	Rp 9,147,134,420.00	Rp 8,727,029,300.00	Rp 11,882,120,963.00	Rp 14,516,162,474.00
a. Belanja Pegawai	Rp 1,841,080,000.00	Rp 2,193,140,000.00	Rp 2,360,720,000.00	Rp 2,593,569,426.00	Rp 1,457,435,000.00	Rp 1,801,685,000.00	Rp 2,182,205,000.00	Rp 2,448,900,000.00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 8,436,540,000.00	Rp 7,142,755,882.50	Rp 10,924,559,760.00	Rp 12,447,095,477.00	Rp 7,689,699,420.00	Rp 6,925,344,300.00	Rp 9,699,915,963.00	Rp 12,067,262,474.00
2. Belanja Modal	Rp 8,770,410,000.00	Rp 1,277,400,000.00	Rp 852,610,240.00	Rp 948,196,500.00	Rp 8,551,332,179.50	Rp 1,277,240,500.00	Rp 823,122,355.00	Rp 902,243,815.00
a. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 6,673,580,000.00	Rp 1,277,400,000.00	Rp 502,030,000.00	Rp 756,117,500.00	Rp 6,507,880,479.50	Rp 1,277,240,500.00	Rp 476,947,420.00	Rp 715,043,815.00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 2,096,830,000.00	Rp -	Rp 299,160,240.00	Rp 180,101,000.00	Rp 2,023,451,700.00	Rp -	Rp 388,809,935.00	Rp 175,500,000.00
c. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 57,420,000.00	Rp 11,978,000.00	Rp -	Rp -	Rp 57,365,000.00	Rp 11,700,000.00

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
1,03	0,21	0,30	1,56	0,09	1,60
1,03	0,21	0,30	1,56		
0,93	0,94	0,90	0,96	0,01	0,02
0,89	0,93	0,89	0,97		
0,79	0,82	0,92	0,94		
0,91	0,97	0,89	0,97		
0,97	1,00	0,97	0,95		
0,98	1,00	0,95	0,95		
0,96		0,99	0,97		
		1,00	0,98		

Berdasarkan tabel 2.5. di atas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari sisi keuangan selama tahun 2019-2022 pada masa RENSTRA 2019-2023 menunjukkan realisasi serapan anggaran rata-rata diatas 90 persen, dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana selama periode tahun 2020-2021 terdapat penurunan rasio penerimaan dan realisasi anggaran yang disebabkan bencana nasional Covid-19 yang melanda Indonesia.

Besarnya alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran Belanja Periode Tahun Anggaran 2019-2023

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH ANGGARAN	KENAIKAN (%)
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1	2019	17.206.950.000,00	1.841.080.000,00	19.048.030.000,00	-
2	2020	8.728.055.882,50	1.885.240.000,00	10.613.295.882,50	(44,28)
		BELANJA			
3	2021	14.137.890.000,00		14.137.890.000,00	33,21
4	2022	15.988.861.403,00		15.988.861.403,00	11,57
5	2023	27.473.058.552,00		27.473.058.552,00	41,80

4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan

standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari Permen PAN dan RB Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah proses penyusunan dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Bidang, maka kelompok sasaran dapat dijelaskan berdasarkan jenis pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

Tabel 2.7.
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan Mess	Layanan Pengguna Mess	Masyarakat umum, pelaku usaha, instansi, ASN di Lingkungan Prov. Kaltim
2	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitas Kelembagaan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kaltim
3	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitas Pejabat Pusat dan Daerah	Kementerian/Lembaga dan Pemda
4	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitas Pengurusan PDLN	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kaltim
5	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitas Sosial dan Kemasyarakatan	Masyarakat Kaltim di Jakarta
6	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Pembinaan Mahasiswa	AMKT Pulau Jawa
7	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Publikasi dan Dokumentasi Pejabat Prov.Kaltim di Jakarta	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kaltim
8	Promosi dan Informasi	Layanan fasilitas promosi produk unggulan daerah dan pelestarian seni budaya di Anjungan Kaltim TMII	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Kab/Kota, DPMPSTP, Disperindagkop, Dispora, Diskominfo, Masyarakat Umum, Pelaku Usaha dan Instansi serta K/L terkait lainnya

9	Promosi dan Informasi	Layanan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya di Jabodetabek	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Kab/Kota, DPMPTSP, Disperindagkop, Dispora, Diskominfo, Masyarakat Umum, Pelaku Usaha dan Instansi serta K/L terkait lainnya
10	Promosi dan Informasi	Layanan pemberian informasi terhadap wisatawan nusantara/mancanegara di Anjungan TMII	Wisatawan Nusantara/ Mancanegara, kedutaan besar

5. Mitra Badan Penghubung dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping mematuhi kode etik, aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat; dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun mitra Badan Penghubung dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. Pelayanan Mess dalam hal pembayaran kamar secara non tunai bekerjasama dengan Bankaltim Kaltara melalui QRis.
2. Pelayanan Keprotokolan terhadap pejabat daerah/pusat bekerjasama dengan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim.
3. Pelayanan Promosi dan Informasi bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Kab/Kota, DPMPTSP, Disperindagkop, Dispora, Diskominfo dan Instansi terkait lainnya dalam hal penyediaan informasi terkait Produk Unggulan, Pelestarian Seni Budaya dan Peluang Investasi yang ada di Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROV. KALTIM DI JAKARTA

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

A. Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum maksimalnya target penerimaan retribusi mess di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah pengelolaan mess, untuk meningkatkan PAD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat dan Perangkat Daerah karena kurangnya informasi mengenai mess (fasilitas, tarif, lokasi dan lain-lain). Selain itu kondisi bangunan gedung Mess Kaltim di Jl. Kramat II No. 42 Jakarta perlu peremajaan sarana dan prasarana agar lebih menarik minat dan menambah kenyamanan aparatur dan masyarakat Kalimantan Timur sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD.

2. Belum maksimalnya integrasi antara sistem pelaporan dengan sistem keuangan mengenai retribusi sewa kamar.

Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek pelaporan dengan penganggaran, tetapi seharusnya dilakukan antar satuan kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian program dan atau target hasil (*outcome*) suatu kegiatan menuju visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar OPD. Sistem pelaporan dan sistem keuangan mengenai retribusi sewa kamar meskipun belum terintegrasi secara maksimal, namun telah ada upaya untuk meningkatkan sistem pembayaran melalui secara non tunai (QRIS) ke kas daerah melalui bank kaltimara.

3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di segala bidang merupakan keharusan mutlak.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah pegawai sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS dan 77 (tujuh puluh tujuh) tenaga Non PNS. Sesuai Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja jumlah PNS yang ideal adalah 39 (tiga puluh Sembilan) orang sehingga jumlah PNS yang ada sekarang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang maksimal ditambah adanya PNS yang memasuki masa purna tugas. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan kualitas dan kuantitas SDM di setiap seksi sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Anjungan Kaltim di TMII

Pada tahun 2021 Anjungan Kaltim di TMII mulai direvitalisasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih meningkat dan

berkembang ke arah digitalisasi layanan sehingga perlu ditunjang oleh SDM yang kompeten dan berkualitas agar sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dapat berfungsi maksimal.

Selain itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian promosi dan informasi mengenai potensi pariwisata dan peluang investasi di Kalimantan Timur dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mampu menjelaskan mengenai peluang promosi dan informasi Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui perangkat Teknologi Informasi.

Pengetahuan mengenai teknologi informasi, kondisi terkini Provinsi Kalimantan Timur, isu-isu terbaru tentang Ibu Kota Negara (IKN), peluang investasi, destinasi wisata unggulan serta seni budaya Kalimantan Timur perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, baik dari BPSDM Prov. Kaltim, Dinas Pariwisata Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pusat/Daerah

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah pelayanan fasilitasi pejabat daerah/pusat. Pada tahun 2022 pelayanan fasilitasi tidak hanya diberikan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah), tetapi melayani hampir seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuat pelayanan fasilitasi yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang menangani khususnya seksi Hubungan Antar Lembaga, terutama pada saat kegiatan berlangsung secara bersamaan ditempat yang berbeda.

c) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kegiatan Pelayanan Mess

Kondisi sarana dan prasarana mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini sudah mulai meningkat sehingga perlu ditunjang SDM yang kompeten dan berkualitas. SDM yang ada saat ini baik PNS dan Non PNS masih perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan baik dari BPSDM Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta.

4. Belum Maksimalnya Pelayanan Informasi Melalui Sarana dan Prasarana Promosi Seni Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi Daerah Kalimantan Timur

Fungsi penting lainnya yang diemban Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam pelayanan informasi daerah dan fasilitasi penyelenggaraan promosi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi dari pihak eksternal yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur selain memiliki ragam budaya dan destinasi wisata yang menarik juga mempunyai peluang investasi yang beragam dan menguntungkan. Terutama setelah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur.

Tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur salah satunya adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Kalimantan Timur serta memfasilitasi kegiatan promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya di wilayah Jabodetabek. Sarana dan prasarana promosi mengenai Kaltim terutama di Anjungan Kalimantan Timur dirasa masih kurang maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dalam rangka menunjang promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya serta peluang investasi agar Kalimantan Timur bisa sejajar dengan provinsi lain terutama dalam penggunaan teknologi yang lebih maju (*digital technology*).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian promosi dan informasi mengenai potensi pariwisata dan peluang investasi di Kalimantan Timur serta pelayanan fasilitasi promosi potensi daerah dibutuhkan masukan (*feedback*) dari mitra kerja dan masyarakat umum, salah satunya melalui survei kepuasan atas pelayanan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya di Jabodetabek serta pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Kaltim di TMII.

5. Kurangnya Informasi Terkait Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Khususnya Pelayanan Fasilitas Kelembagaan dan Keprotokolan untuk Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penghubung mempunyai kedudukan yang strategis sebagai duta/perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal fasilitas kelembagaan dan keprotokolan antara daerah dengan pusat, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga mulai tahun 2022 pelayanan fasilitas kelembagaan dan keprotokolan telah ditingkatkan dengan menginformasikan hal tersebut melalui website dan media sosial Badan Penghubung, dengan demikian tugas dan fungsi Badan Penghubung khususnya pada fasilitas kelembagaan dan keprotokolan dapat lebih maksimal.

B. Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan Badan Penghubung Prov. Kaltim tiga tahun ke depan, meliputi:

1. Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Representatif

Struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan (Eselon III), yang membawahi 4 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV) yaitu Subbag Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi dan Informasi seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak representatif sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja.

Dengan tersedianya berbagai fasilitas kegiatan (pengembangan mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta dan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah) serta semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dikembangkan menjadi organisasi yang lebih representatif dan koordinatif melalui peningkatan eselonering menjadi Eselon II.

2. Diperlukan Sarana dan Prasarana yang Baik untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang baik. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memerlukan gedung dan interior gedung serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan sehingga muncul rasa nyaman sebagai daya tarik bagi aparatur yang bertugas ke Jakarta dan masyarakat luas.

3. Perlu Pengembangan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan pembinaan kepada SDM Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.

Selain itu upaya untuk meningkatkan jumlah SDM, Badan Penghubung mengajukan usulan penambahan pegawai (SDM) melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk mengisi formasi sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

4. Diperlukan Kegiatan Promosi dan Fasilitasi untuk Penyampaian Informasi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan etalase daerah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerjasama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, adalah :

1. Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas

Tujuan ini diharapkan dapat melakukan reformasi pelayanan publik dalam menghadapi revolusi industri. Pemahaman tentang budaya pariwisata, pembangunan, potensi dan peluang investasi Kaltim juga merupakan hal terpenting dalam upaya mewujudkan misi Badan

Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Kemampuan aparaturnya memahami budaya memiliki kejelasan formal atas nilai, norma dan wewenang sebagai penuntun menuju ke arah kesiapan yang mampu memasuki setiap perubahan dengan tujuan membangun kebiasaan yang produktif. Aparatur yang telah memahami budaya Kalimantan Timur akan dapat mempromosikan Kalimantan Timur ke wisatawan agar tertarik berkunjung ke Kalimantan Timur. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan menarik investor yang akan menanamkan modalnya ke Kalimantan Timur sehingga tujuan ini dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut juga harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil harus meningkatkan fasilitas penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap serta kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi

2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel

Birokrasi pemerintahan yang akuntabel adalah struktur tatanan organisasi yang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik. Dengan tujuan ini diharapkan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkannya melalui sasaran:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Badan Penghubung Prov. Kaltim
Tahun 2024-2026

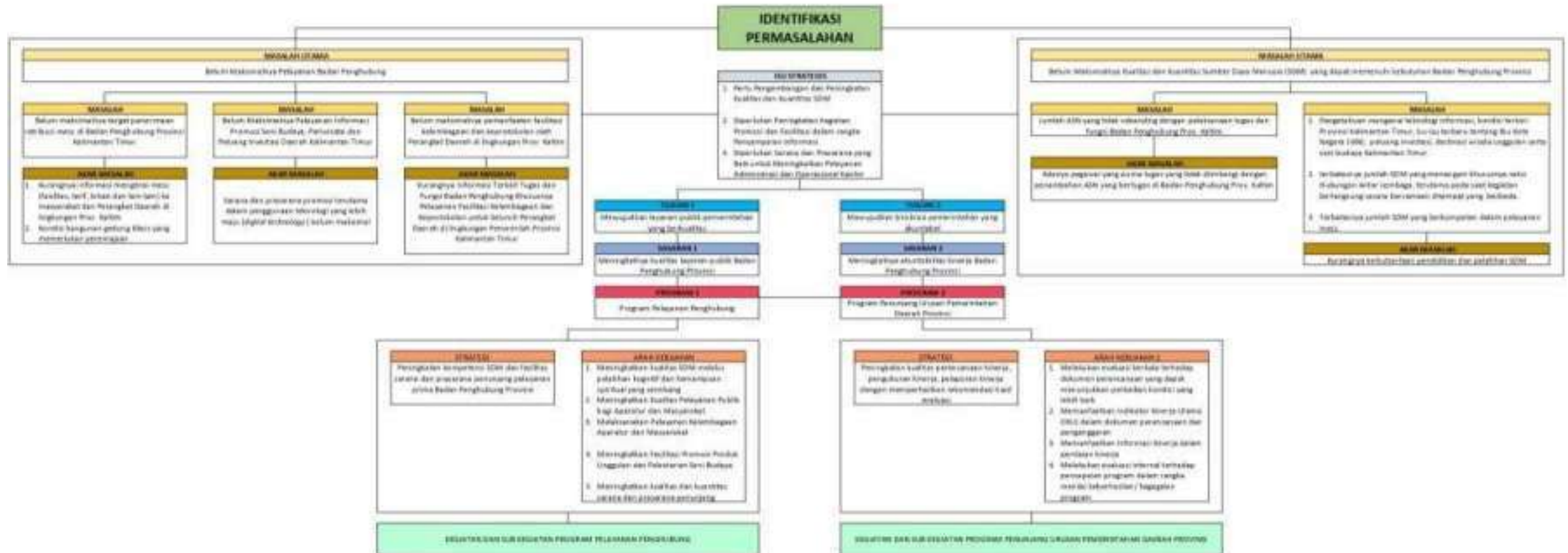
Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target					Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	Program/Kegiatan
			Awal	2024	2025	2026	Akhir					2024	2025	2026		
Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penghubung Provinsi	Poin	89,84	91,27	92,00	92,93	92,93	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess	Poin	91,61	91,80	92,00	92,30	92,30	Program Pelayanan Penghubung
									Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	Poin	86,87	87	88	90	90	Pelaksana Pelayanan Penghubung
									Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi	Poin	96,84	95,00	96,00	96,50	96,50	
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Poin	72,43	72,47	72,51	72,55	72,55	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Poin	72,43	72,47	72,51	72,55	72,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
																Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

																Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
																Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
																Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
																Administrasi Umum Perangkat Daerah
																Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.2. Cascading Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

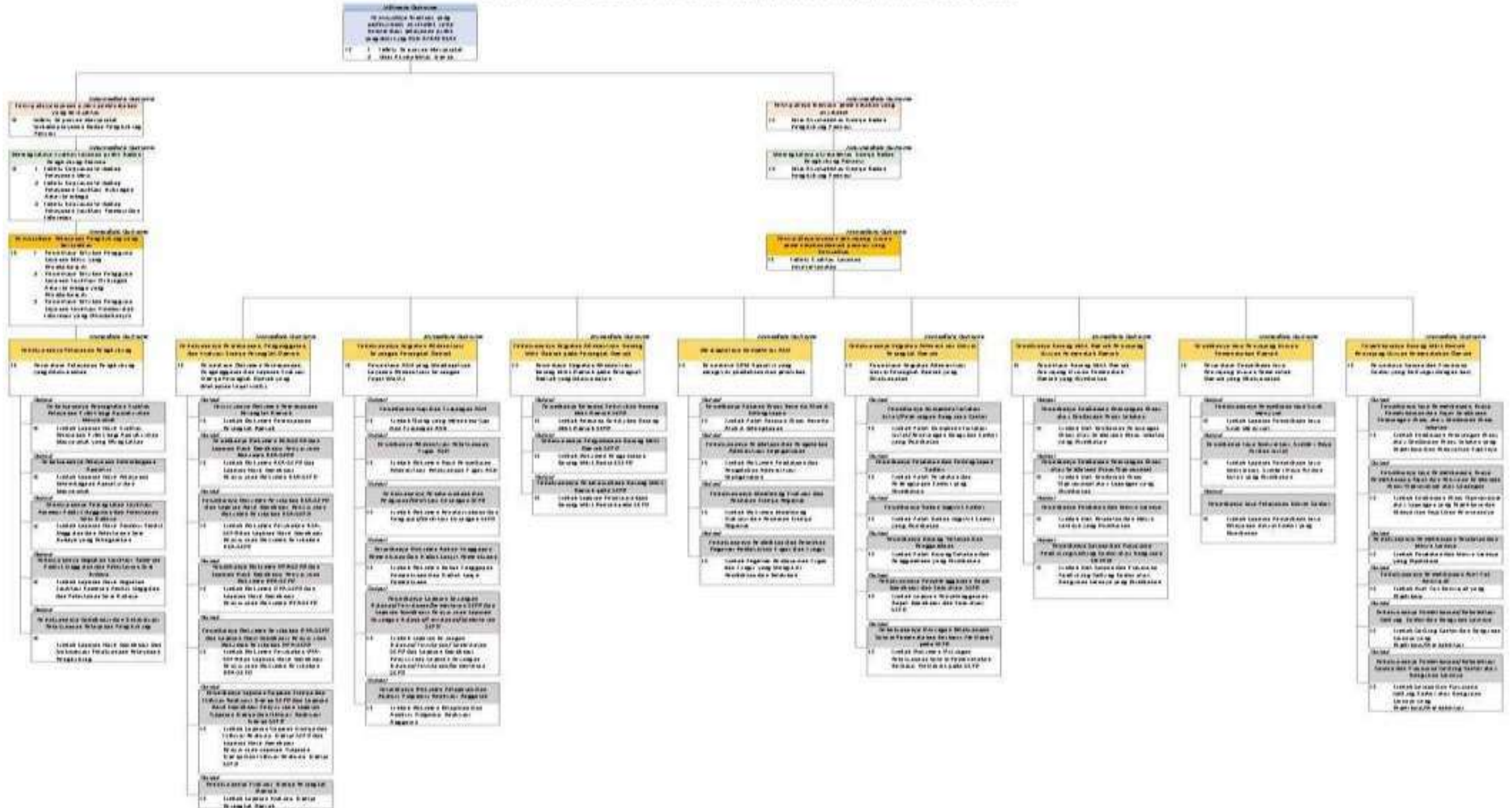
Gambar 4.1.

CASCADING PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

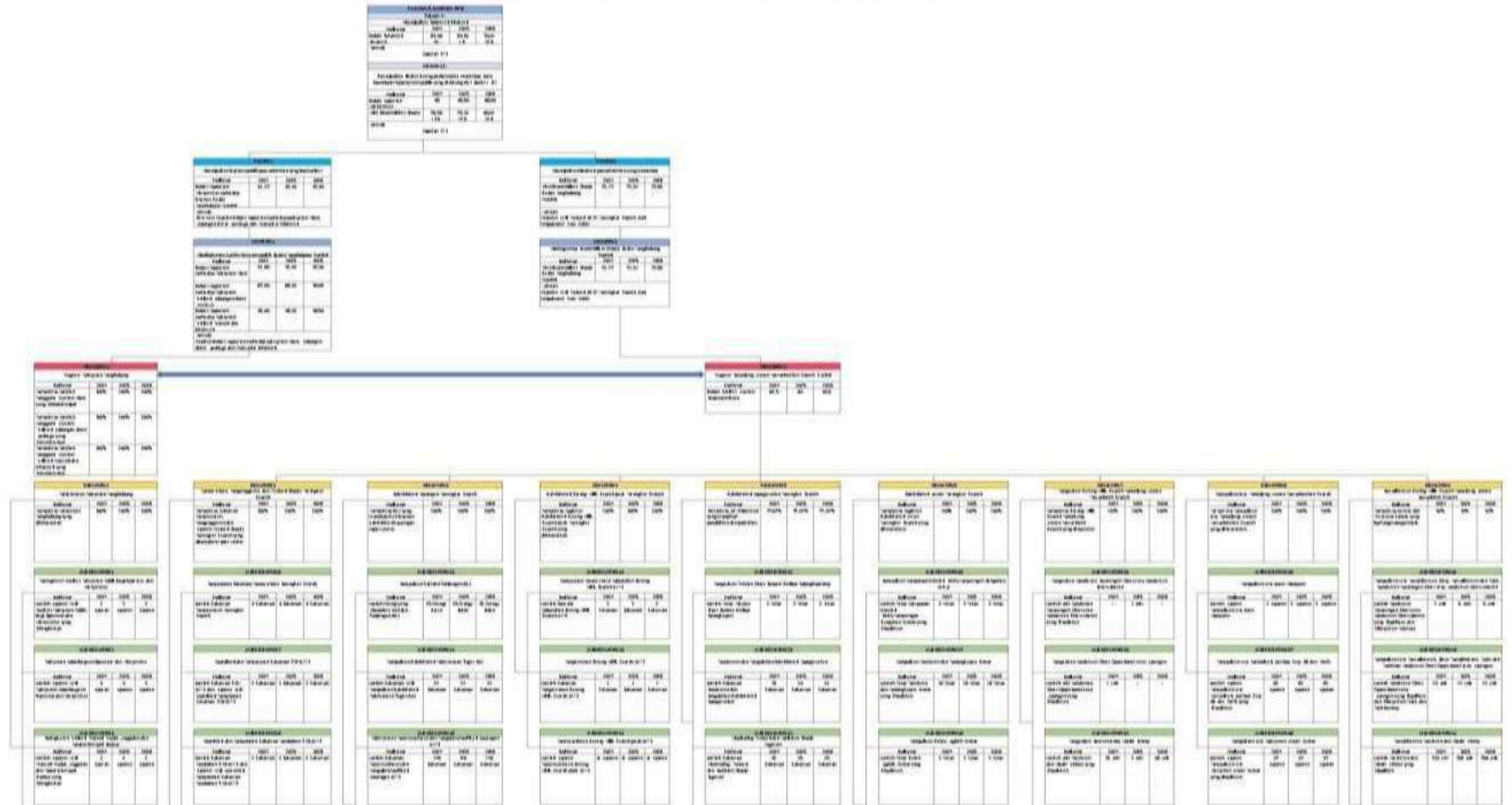


Gambar 4.2.

POHON KINERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026



CASCADING KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROV. KALTIM TAHUN 2024-2026



[illegible]

Jurnal Pembelian			
Berdasarkan Transaksi (1 Januari)			
Referensi	Saldo	Salin	Saldo
Saldo Pembelian 1 Jan	0	Saldo Pembelian	0
(1 Jan 2000) 1000			
Salin 1 Januari 2000			
(Salin 1 Jan 2000)			

Jurnal Praktikum			
Tanggal praktikum : Sabtu, 20 Mei 2023			
Nama dan No. Urut			
No. Urut	Nama	No. Urut	Nama
1	Adrianus	2	Adrianus
3	Adrianus	4	Adrianus
5	Adrianus	6	Adrianus
7	Adrianus	8	Adrianus
9	Adrianus	10	Adrianus
11	Adrianus	12	Adrianus
13	Adrianus	14	Adrianus
15	Adrianus	16	Adrianus
17	Adrianus	18	Adrianus
19	Adrianus	20	Adrianus
21	Adrianus	22	Adrianus
23	Adrianus	24	Adrianus
25	Adrianus	26	Adrianus
27	Adrianus	28	Adrianus
29	Adrianus	30	Adrianus
31	Adrianus	32	Adrianus
33	Adrianus	34	Adrianus
35	Adrianus	36	Adrianus
37	Adrianus	38	Adrianus
39	Adrianus	40	Adrianus
41	Adrianus	42	Adrianus
43	Adrianus	44	Adrianus
45	Adrianus	46	Adrianus
47	Adrianus	48	Adrianus
49	Adrianus	50	Adrianus
51	Adrianus	52	Adrianus
53	Adrianus	54	Adrianus
55	Adrianus	56	Adrianus
57	Adrianus	58	Adrianus
59	Adrianus	60	Adrianus
61	Adrianus	62	Adrianus
63	Adrianus	64	Adrianus
65	Adrianus	66	Adrianus
67	Adrianus	68	Adrianus
69	Adrianus	70	Adrianus
71	Adrianus	72	Adrianus
73	Adrianus	74	Adrianus
75	Adrianus	76	Adrianus
77	Adrianus	78	Adrianus
79	Adrianus	80	Adrianus
81	Adrianus	82	Adrianus
83	Adrianus	84	Adrianus
85	Adrianus	86	Adrianus
87	Adrianus	88	Adrianus
89	Adrianus	90	Adrianus
91	Adrianus	92	Adrianus
93	Adrianus	94	Adrianus
95	Adrianus	96	Adrianus
97	Adrianus	98	Adrianus
99	Adrianus	100	Adrianus

Jumlah Sampel per Kelas			
Kategori	2007	2008	2009
Salah satu faktor	15.000	17.000	17.000
Salah satu faktor	15.000	17.000	17.000
Salah satu faktor	15.000	17.000	17.000

Jahresabschluss			
veränderte Form der Bilanzveränderung			
veränderte	2004	2005	2006
veränderte Form der Bilanzveränderung	2.000	2.000	2.000
veränderte Form der Bilanzveränderung			
veränderte Form der Bilanzveränderung			

Sub-Activity Results				
Sub-Activity	Sub-Activity 1	Sub-Activity 2	Sub-Activity 3	Sub-Activity 4
Sub-Activity 1	100%	100%	100%	100%
Sub-Activity 2	100%	100%	100%	100%
Sub-Activity 3	100%	100%	100%	100%
Sub-Activity 4	100%	100%	100%	100%

LAW SCHOOL RANKING			
	Lawrence University Law School		Unranked
Ranking	2011	2015	2016
Lawrence University Law School	5 / 146	8 / 146	7 / 146
Lawrence University Law School			

[illegible][illegible]

TABLE 1. Summary of the results of the study				
Variable	Mean	SD		
		10	20	30
Age	25.5	1.5	1.5	1.5
Gender	Male	Female	Male	Female
Education	12	12	12	12
Occupation	Student	Student	Student	Student
Marital status	Single	Single	Single	Single
Religion	Muslim	Muslim	Muslim	Muslim
Income	1000	1000	1000	1000

Question	Answer	Mark	Score
1. The following are the components of the accounting cycle:	1. Analyze the business transaction 2. Journalize the business transaction 3. Post the journal entry to the ledger 4. Prepare a trial balance 5. Adjust the ledger accounts 6. Prepare financial statements 7. Close the books	10	10

2018 Annual Report				
Executive Summary				
Item	2018	2017	2016	2015
Revenue	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234
Operating Profit	345,678	312,345	289,012	267,890
Net Income	234,567	212,345	198,765	187,654
EPS	2.34	2.12	1.98	1.87
Dividend	0.50	0.45	0.40	0.35

STANDARDIZATION			
	2007	2008	2009
1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
0.9997	0.9997	0.9997	0.9997
0.9996	0.9996	0.9996	0.9996
0.9995	0.9995	0.9995	0.9995
0.9994	0.9994	0.9994	0.9994
0.9993	0.9993	0.9993	0.9993
0.9992	0.9992	0.9992	0.9992
0.9991	0.9991	0.9991	0.9991
0.9990	0.9990	0.9990	0.9990
0.9989	0.9989	0.9989	0.9989
0.9988	0.9988	0.9988	0.9988
0.9987	0.9987	0.9987	0.9987
0.9986	0.9986	0.9986	0.9986
0.9985	0.9985	0.9985	0.9985
0.9984	0.9984	0.9984	0.9984
0.9983	0.9983	0.9983	0.9983
0.9982	0.9982	0.9982	0.9982
0.9981	0.9981	0.9981	0.9981
0.9980	0.9980	0.9980	0.9980
0.9979	0.9979	0.9979	0.9979
0.9978	0.9978	0.9978	0.9978
0.9977	0.9977	0.9977	0.9977
0.9976	0.9976	0.9976	0.9976
0.9975	0.9975	0.9975	0.9975
0.9974	0.9974	0.9974	0.9974
0.9973	0.9973	0.9973	0.9973
0.9972	0.9972	0.9972	0.9972
0.9971	0.9971	0.9971	0.9971
0.9970	0.9970	0.9970	0.9970
0.9969	0.9969	0.9969	0.9969
0.9968	0.9968	0.9968	0.9968
0.9967	0.9967	0.9967	0.9967
0.9966	0.9966	0.9966	0.9966
0.9965	0.9965	0.9965	0.9965
0.9964	0.9964	0.9964	0.9964
0.9963	0.9963	0.9963	0.9963
0.9962	0.9962	0.9962	0.9962
0.9961	0.9961	0.9961	0.9961
0.9960	0.9960	0.9960	0.9960
0.9959	0.9959	0.9959	0.9959
0.9958	0.9958	0.9958	0.9958
0.9957	0.9957	0.9957	0.9957
0.9956	0.9956	0.9956	0.9956
0.9955	0.9955	0.9955	0.9955
0.9954	0.9954	0.9954	0.9954
0.9953	0.9953	0.9953	0.9953
0.9952	0.9952	0.9952	0.9952
0.9951	0.9951	0.9951	0.9951
0.9950	0.9950	0.9950	0.9950
0.9949	0.9949	0.9949	0.9949
0.9948	0.9948	0.9948	0.9948
0.9947	0.9947	0.9947	0.9947
0.9946	0.9946	0.9946	0.9946
0.9945	0.9945	0.9945	0.9945
0.9944	0.9944	0.9944	0.9944
0.9943	0.9943	0.9943	0.9943
0.9942	0.9942	0.9942	0.9942
0.9941	0.9941	0.9941	0.9941
0.9940	0.9940	0.9940	0.9940
0.9939	0.9939	0.9939	0.9939
0.9938	0.9938	0.9938	0.9938
0.9937	0.9937	0.9937	0.9937
0.9936	0.9936	0.9936	0.9936
0.9935	0.9935	0.9935	0.9935
0.9934	0.9934	0.9934	0.9934
0.9933	0.9933	0.9933	0.9933
0.9932	0.9932	0.9932	0.9932
0.9931	0.9931	0.9931	0.9931
0.9930	0.9930	0.9930	0.9930
0.9929	0.9929	0.9929	0.9929
0.9928	0.9928	0.9928	0.9928

Societate: S.C. "SOLARIS" S.R.L.				
Activitate: Activitate de servicii				
Anul de referință: 2023				
Indicator	2023	2022	2021	2020
1. Venituri totale	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
2. Cheltuieli totale	800.000	750.000	700.000	650.000
3. Profit brut	400.000	350.000	300.000	250.000
4. Profit net	250.000	220.000	180.000	150.000
5. Impozite și taxe	150.000	130.000	120.000	100.000
6. Alte venituri	50.000	40.000	30.000	20.000
7. Alte cheltuieli	30.000	20.000	10.000	10.000

[illegible]

Lernaktivitäten			
Lernaktivitäten und die zugehörigen Lernaktivitäten			
Lernaktivität	100%	50%	100%
Lernaktivitäten und	100%	100%	100%
Lernaktivitäten und	100%	100%	100%
Lernaktivitäten und	100%	100%	100%
Lernaktivitäten und	100%	100%	100%
Lernaktivitäten und	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Rumusan strategi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S - O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Strategi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi.

Strategi ini juga sebagai upaya mewujudkan tujuan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada pelayanan publik yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang, meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, melaksanakan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, meningkatkan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, melaksanakan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kepada mitra kerja.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya kualitas layanan Publik Badan Penghubung Provinsi
2. Strategi 2: Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi
Upaya untuk mewujudkan tujuan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel yaitu dengan meningkatkan Pelayanan birokrasi yang transparan dan berintegritas dengan mengembangkan profesionalisme aparatur guna meningkatkan kualitas layanan publik khususnya pada kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang dapat menunjukkan

perbaikan kondisi yang lebih baik, memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, memanfaatkan Informasi Kinerja dalam penilaian kinerja dan melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian program dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan program.

Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi.
 - ✓ Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang.
 - ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
 - ✓ Melaksanakan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
 - ✓ Meningkatkan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
2. Strategi 2: Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi.
 - ✓ Melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang dapat menunjukkan perbaikan kondisi yang lebih baik
 - ✓ Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
 - ✓ Memanfaatkan Informasi Kinerja dalam penilaian kinerja
 - ✓ Melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian program dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan program

Tabel 5.1.
PENENTUAN STRATEGI
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI
JAKARTA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Mess	Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi
	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi Dan Informasi	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi

Tabel 5.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1 Mewujudk an layanan publik pemerinta han yang berkualitas	1 Meningkatkan kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	1 Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi	1 Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampua n spiritual yang seimbang. 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 3 Melaksana kan Pelayanan Kelembaga an Aparatur dan Masyarakat 4 Meningkatkan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Program Pelayanan Penghubung Pelaksana Pelayanan Penghubung - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghuung

			5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang	
2 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	2 Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi	6 Melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang dapat menunjukkan perbaikan kondisi yang lebih baik 7 Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 8 Memanfaatkan Informasi Kinerja dalam penilaian kinerja 9 Melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian program dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

			- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--	---

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun terakhir pada masa Renstra tahun 2024-2026, meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kalimantan Timur 2024-2026.

6.1. Rencana Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang diturunkan menjadi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra perangkat daerah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penghubung

Program ini menggambarkan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur pada Seksi Pelayanan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi dan Informasi disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam Program Pelayanan Penghubung terdapat kegiatan dan beberapa sub kegiatan yang mencakup:

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.
- Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.
- Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
- Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas rutin, operasional kantor dan urusan pemerintahan Badan Penghubung yang dilaksanakan oleh Subbag Tata Usaha. Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat kegiatan dan beberapa sub kegiatan yang mencakup :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholder* dan masyarakat.

Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode tiga tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan serta sub kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1.** berikut ini:

Tabel 6.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan

Kode Perangkat Daerah : 5.06.5.07.0.00.05.0000
Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Date Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Target			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas																
	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi															
		5.01.02	PROGRAM PELAYANAN PETERBUKUK													
				Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Jarak Jauh yang ditingkatkan	100 %	100 %	1.204.933.410,00	100 %	1.204.933.410,00	100 %	1.204.933.410,00	100 %		Badan Penghubung Provinsi		
				Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang ditingkatkan	100 %	100 %	2.684.253.789,00	100 %	2.684.253.789,00	100 %	2.684.253.789,00	100 %		Badan Penghubung Provinsi		
				Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Monev yang ditingkatkan	100 %	100 %	986.378.200,00	100 %	986.506.200,00	100 %	1.078.296.200,00	100 %		Badan Penghubung Provinsi		
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel																
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi															
		X.XX.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				Indeks Kualitas Layanan Masyarakat	82,5 Indeks	82,5 Indeks	17.564.450.001,00	83 Indeks	18.106.296.001,00	83,5 Indeks	18.472.616.001,00	83,5 Indeks		Badan Penghubung Provinsi		

Tabel 6.2.

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kategori dan Program	Indikator Kinerja (Subsistem) dan (Subsistem)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Periode Rencana		PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
							Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Memajukan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Memngkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat	02.1.01.02	PROGRAM PELAYANAN PENGADUAN	Hasil	PERSENTASE KELLUAN PERHODUNA LAYANAN MISS YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100	884.376.300	100	884.376.300	100	1.078.294.300	100	2.035.156.600	Badan Penghubung	Sabutau
					PERSENTASE KELLUAN PERHODUNA LAYANAN PASUTASI RUBONGAN ANTAR LEMBAGA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100	1.264.933.410	100	1.264.933.410	100	1.264.933.410	100	3.794.900.238			
					PERSENTASE KELLUAN PERHODUNA LAYANAN PASUTASI PROMOSI DAN INFORMASI YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100	2.684.233.789	100	2.684.233.789	100	2.684.233.789	100	8.852.791.307			
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	02.1.01.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Keluaran	Perencanaan Pelayanan Penghubung yang Diaksanakan	100%	100	4.835.543.389	100	4.843.793.389	100	5.027.303.389	100	14.896.650.997	
			Hasil			Terlaksananya Pelayanan Penghubung	100%	100		100		100		100			
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Inovasi	02.1.01.02.1.01.01		Penggiatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Diunggah	2 Laporan	2	876.700.000	2	876.700.000	2	876.700.000	8	2.830.100.000	
			Hasil			Terlaksananya Penggiatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	2		2		2		8			
			02.1.01.02.1.01.02		Pelayan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3	824.844.410	3	824.844.410	3	824.844.410	8	2.474.533.230	
			Hasil			Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3		3		3		8			
			02.1.01.02.1.01.03		Penggiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Diunggah	17 Laporan	2	688.208.789	2	688.208.789	2	688.208.789	8	2.888.800.387	
			Hasil			Terlaksananya Penggiatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17 Laporan	2		2		2		8			
			02.1.01.02.1.01.04		Kegiatan Fasilitas Pemran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pemran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	6 Laporan	3	1.728.026.000	3	1.728.026.000	3	1.728.026.000	8	8.186.072.000	
			Hasil			Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pemran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	6 Laporan	3		3		3		8			
			02.1.01.02.1.01.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	8	848.768.200	8	487.828.200	7	847.808.200	18	1.848.288.800	
			Hasil			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	8		8		7		18			
Memajukan kinerja pemerintahan yang akuntabel	Memngkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Rinc Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	02.1.01.01	PROGRAM PENJUALAN LRUJAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Hasil	BIDERS NULITAS LAYANAN KESERIKS TARIK AH	82,3	82,5	17.564.496.881	83	18.158.296.881	83,5	18.472.636.881	83,5	54.193.586.881		
			02.1.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Perencanaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	100	321.660.700	100	321.660.700	100	321.660.700	100	1.564.982.100	
			Hasil			Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100		100		100		100			
			02.1.01.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8	186.187.400	8	186.187.400	8	186.187.400	27	488.387.200	
Hasil	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8			8		8									

Tupai	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (satuan) dan (subjek)	Kombi Kinerja Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Kombi Kinerja Pelaksanaan Periode Berjalan		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Kinerja	Paga (Rp)	Kinerja	Paga (Rp)	Kinerja	Paga (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	84.220.000 -	2 2	84.220.000 -	2 2	84.220.000 -	8 8	182.000.000 -		
			05.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	84.220.000 -	2 2	84.220.000 -	2 2	84.220.000 -	8 8	182.000.000 -		
			05.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	88.220.000 -	2 2	88.220.000 -	2 2	88.220.000 -	8 8	182.000.000 -		
			05.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	88.220.000 -	2 2	88.220.000 -	2 2	88.220.000 -	8 8	182.000.000 -		
			05.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan 4 Laporan	8 8	76.182.280 -	8 8	76.182.280 -	8 8	76.182.280 -	24 24	228.576.740 -		
			05.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan 3 Laporan	6 6	40.401.250 -	6 6	40.401.250 -	6 6	40.401.250 -	24 24	121.203.750 -		
			05.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase ASR yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu Hasil : Terlaksananya Registrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 100%	100 100	3.545.097.700 -	100 100	3.545.097.700 -	100 100	3.545.097.700 -	100 100	16.647.203.100 -		
			05.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN Hasil : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan 22 Orang/Bulan	25 25	2.885.137.700 -	25 25	2.885.137.700 -	25 25	2.885.137.700 -	25 25	6.885.413.100 -		
			05.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Hasil : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81 Dokumen 81 Dokumen	24 24	237.860.000 -	24 24	237.860.000 -	24 24	237.860.000 -	72 72	713.860.000 -		
			05.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD Hasil : Tersedianya Pemeliharaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	148 Dokumen 148 Dokumen	148 148	182.000.000 -	148 148	182.000.000 -	148 148	182.000.000 -	447 447	842.000.000 -		
			05.07.01.1.02.04	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeliharaan dan Tindak Lanjut Pemeliharaan Hasil : Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeliharaan dan Tindak Lanjut Pemeliharaan	2 Dokumen 2 Dokumen	2 2	2.000.000 -	2 2	2.000.000 -	2 2	2.000.000 -	8 8	8.000.000 -		

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kerja dan Program	Indikator Kinerja (intern) dan (output)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Kondisi Kinerja Pada 2024 Periode Rencana		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Ra		
							Kerja	Pago (Rp)	Kerja	Pago(Rp)	Kerja	Pago (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05 07 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran retriw.	12 Dokumen	12	82.000.000	12	82.000.000	12	82.000.000	30	278.000.000		
					Hasil: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran retriw.	12 Dokumen	12		12		12		30			
			05 07 01 1 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program, Realisasi Anggaran	Keluaran: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4	71.000.000	4	71.000.000	4	71.000.000	12	216.000.000		
					Hasil: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4		4		4		12			
			05 07 01 1 03 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran: Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100	81.990.000	100	81.990.000	100	81.990.000	100	249.000.000		
					Hasil: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100		100		100		100			
			05 07 01 1 03 01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	36.000.000	2	36.000.000	2	36.000.000	8	108.000.000		
					Hasil: Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2		2		2		8			
			05 07 01 1 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000		
					Hasil: Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1		1		1		3			
			05 07 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	24	135.000.000		
					Hasil: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8		8		8		24			
			05 07 01 1 08 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran: Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	76,24%	76,04	743.234,980	76,04	743.234,980	76,04	743.234,980	76,04	2.228.704,760		
					Hasil: Meningkatnya Kompetensi ASN	76,24%	76,04		76,04		76,04		76,04			
05 07 01 1 08 02	Pengadaan Pakaian Dinas Berseka Aktiva Keanggotaannya	Keluaran: Jumlah Paket Pakaian Dinas Berseka Aktiva Keanggotaannya	2 Paket	2	337.262,960	2	337.262,960	2	337.262,960	6	1.011.787,960					
		Hasil: Tersedianya Pakaian Dinas Berseka Aktiva Keanggotaannya	2 Paket	2		2		2		6						
05 07 01 1 08 03	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Keluaran: Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	31	144.000.000	31	144.000.000	31	144.000.000	81	402.000.000					
		Hasil: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	31		31		31		81						
05 07 01 1 08 08	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	23 Dokumen	23	27.000.000	23	27.000.000	23	27.000.000	76	81.000.000					
		Hasil: Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	23 Dokumen	23		23		23		76						
05 07 01 1 08 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	77	234.962.400	77	234.962.400	77	234.962.400	231	704.947.200					
		Hasil: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	77		77		77		231						
05 07 01 1 08 10	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Keluaran: Persentase Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100	1.537.963,901	100	1.536.448,975	100	1.537.269,975	100	4.715.763,901					
		Hasil: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	100%	100		100		100		100						

Tahun	Sesuai	Indikator Sesuai	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (Indikasi) dan Output	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rencana		PD Penanggung Jawab	Lokasi							
							Tahun 2023		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp									
							Kinerja	Pago (Rp)	Kinerja	Pago (Rp)	Kinerja	Pago (Rp)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			05	07	01	1	05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	103.886.875	2	103.886.875	2	103.886.875	6	211.080.323			
			Hasil	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2		2		2		6											
			05	07	01	1	05	02	Penyediaan Personel dan Peningkatan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Personel dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	20 Paket	16	621.580.325	16	464.375.180	16	504.875.180	46	1.466.626.726			
			Hasil	Tersedianya Personel dan Peningkatan Kantor	20 Paket	16		16		16		46											
			05	07	01	1	05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2	66.300.000	2	66.300.000	2	66.300.000	6	264.000.000			
			Hasil	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	2		2		2		6											
			05	07	01	1	05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	3 Paket	2	103.623.860	2	103.623.860	2	103.623.860	6	310.869.700			
			Hasil	Tersedianya Barang Cetak dan Penggantian	3 Paket	2		2		2		6											
			05	07	01	1	05	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	66	946.583.500	67	706.887.300	67	706.887.300	116	1.062.637.500			
			Hasil	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	66		67		67		116											
			05	07	01	1	05	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1	91.640.000	1	183.680.000	6		2	276.520.000			
			Hasil	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1		1		6		2											
			05	07	01	1	07		Pengadaan Barang MIB Daerah Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Persentase Barang MIB Daerah Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	100	903.309.560	100	2.276.060.326	100	1.811.461.436	100	3.632.979.962			
			Hasil	Tersedianya Barang MIB Daerah Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100		100		100		100											
			05	07	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Penyanggah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Penyanggah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	6	0	1	2.800.000.000	6		6	1	2.800.000.000		
			Hasil	Tersedianya Kendaraan Penyanggah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	6		1		6		1											
			05	07	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1	66.500.000	6	0	6	6	1	36.000.000			
			Hasil	Tersedianya Kendaraan Penyanggah Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	1		6		6		1											
			05	07	01	1	07	06	Pengadaan Pesawat dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Pesawat dan Mesin Lainnya yang Disediakan	79 Unit	23	246.900.000	2	63.150.000	36	664.891.836	67	667.961.836			
			Hasil	Tersedianya Pesawat dan Mesin Lainnya	79 Unit	23		6		36		67											
			05	07	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	102	660.706.900	36	722.060.026	66	1.346.706.800	108	2.460.576.026			
			Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	102		36		66		108											
			05	07	01	1	08		Penyediaan Jasa Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Persentase Penyediaan Jasa Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	100	5.896.763.666	100	5.894.693.666	100	5.897.723.666	100	17.662.476.666			
			Hasil	Tersedianya Jasa Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100		100		100		100											
			05	07	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2	11.560.000	2	11.560.000	2	11.560.000	6	34.660.000			
			Hasil	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2		2		2		6											

[illegible]

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun selama masa Renstra 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagai “Pengendali Hubungan Antar Lembaga; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta” yang ketiga peran dan fungsi tersebut bersifat Pelayanan Publik serta dalam rangka mengukur keberhasilan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess	91,61	91,80	92,00	92,30	92,30
2	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	86,87	87	88	90	90

3	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi	96,84	95,00	96,00	96,50	96,50
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	72,43	72,47	72,51	72,55	72,55

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra ini memuat Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur dan sebagai panduan bagi seluruh sub bagian/seksi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur serta memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sekaligus juga menjadi rambu-rambu untuk mengukur kinerja tahunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan

kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan adanya Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun yang membidangi fungsi lainnya.

Jakarta, 17 Mei 2023

KEPALA BADAN

Raihan Fida Nuzband, S.Hut.

Pembina

NIP 197407042007011030

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 s.d. 2026. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan umpan balik (feed back) yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan mengacu kepada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 s.d. 2026. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Provinsi

Kalimantan Timur untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Reperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka

menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 s.d. 2026 dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai dengan Peraturan Daerah 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 s.d. 2026, dan juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra BPKP, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2024-2026. Selain itu, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, tambahan lembaran Negara RI Nomor 1106);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembar Negara RI Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
31. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

- b. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun (2024-2026);
- c. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- e. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

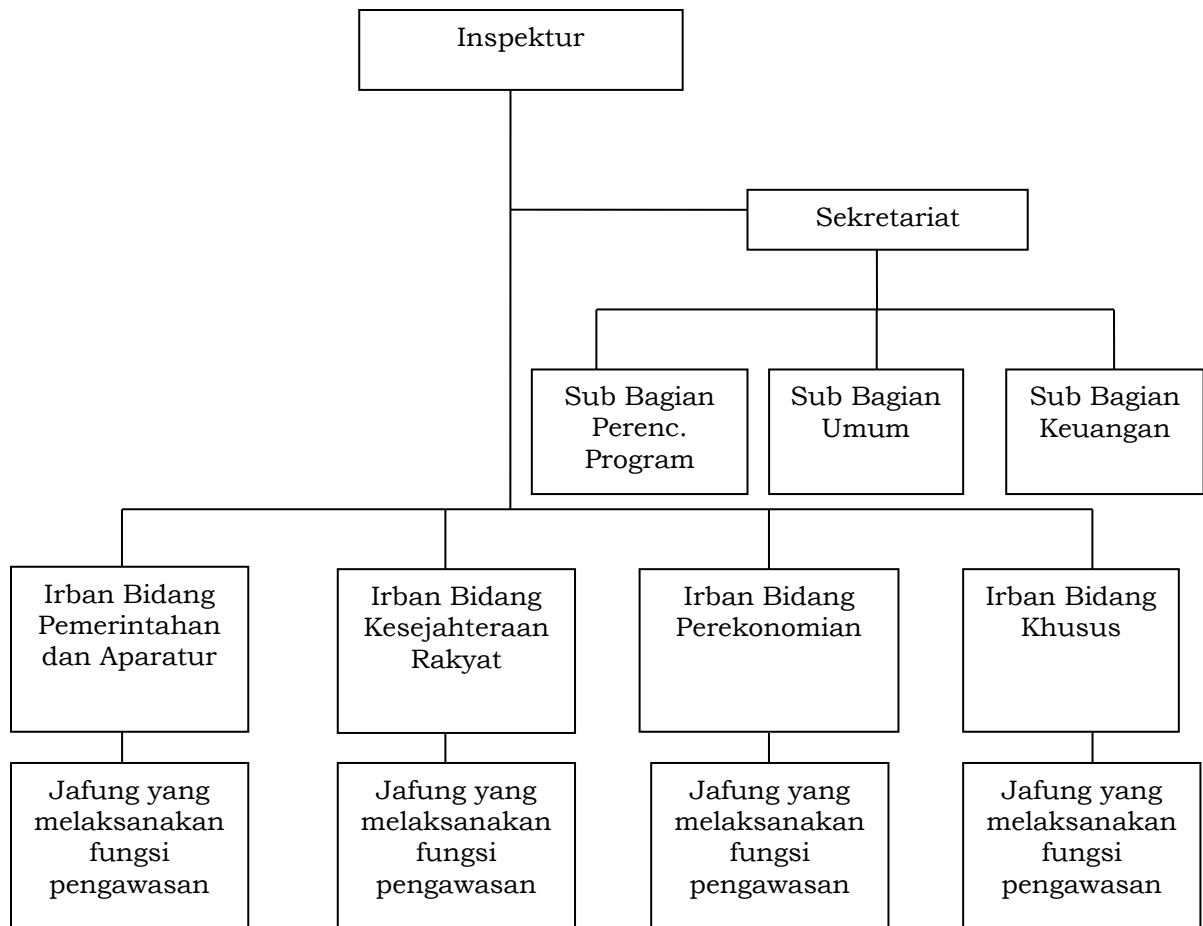
1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program / Diseterakan Fungsional Ahli Kebijakan Publik Muda
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan / Disetarakan Fungsional Ahli Kebijakan Publik Muda.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD).

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



2. Uraian Tugas

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- c. penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020, tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri, dan dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud, terdapatb indikasi penyalahgunaan wewenang dan /atau kerugian negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program; / Disetarakan Fungsional Kebijakan Publik Muda
- 2) Sub Bagian Umum; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan / Disetarakan Fungsional Kebijakan Publik Muda

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, pengelolaan aset, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada

perangkat daerah dibidang Pemerintahan dan Aparatur serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. pengawasan pelaksanaan Progran Reformasi Birokrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perekonomian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Perekonomian;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Perekonomian;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;

- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Khusus;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Khusus;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Khusus;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Khusus;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- h. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan kasus pengaduan;
- k. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV/Penyetaraan Jabatan serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), serta jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak/PTT. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang operasional kedinasan.

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir tahun 2023 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil berjumlah 108 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari Pejabat Struktural 7 orang, Auditor 55 orang, P2UPD 2 orang, Fungsional Umum 15 orang dan Tenaga Kontrak/PTT 29 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan
Tahun 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Penddikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	1		-	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Fungsional Tertentu	21	18	5	33	1	-	8	30	-	-	-	-
Fungsional Umum	24	9	-	11	21	1	-	6	19	6	1	-
Jumlah PNS	51	28	10	46	22	1	11	56	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	18	11	-	-	-	-	-	18	3	8	-	-
Jumlah PNS dan PTT	69	39	14	56	6	1	12	58	24	14	1	-

Tabel 2. 2.
Jumlah Pejabat Struktural di Inspektoat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	5	-	5
3.	Eselon IV	-	1	1
	Jumlah	6	1	7

Tabel 2. 3.
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektoat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Auditor Terampil	1	1	2
2.	Auditor Pertama	10	4	14
3.	Auditor Muda	8	3	15
4.	Auditor Madya	3	3	6
5.	P2UPD Pertama	0	0	0
6.	P2UPD Muda	2	0	2
7.	P2UPD Madya	0	0	0
8.	Auditor Kepegawaian	0	0	0
9.	Fungsional Analis Kebijakan Muda / Penyetaraan Jabatan	1	0	1
	Jumlah	25	15	40

Peta Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel 2.3 diatas, diketahui bahwa Jabatan Fungsional baik auditor maupun P2UPD dan Analis Kebijakan yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah, hal ini dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak untuk diawasi/diperiksa, yaitu ada 36 perangkat daerah dan ditambah dengan UPTD nya, disamping adanya tugas – tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang telah diamankan oleh peraturan perundang-undangan, pencapaian kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada di level 3 dan maturitas SPIP baik Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemda Prov. Kaltim sudah di level 3. Maka berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pegawai atau pejabat fungsional masih perlu ditingkatkan jumlahnya dan kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan dan ditingkatkan.

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Sampai Dengan Tahun 2023

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang
9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	28	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	151	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	5	Set
19.	Kursi Putar	269	Buah

20.	Kursi Tamu	15	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	30	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	36	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	39	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	104	Unit
29.	Laptop	110	Buah
30.	Dispenser	16	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Kamera	8	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	2	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	Proyektor / LCD / Infocus	23	Buah
38.	AC Split	11	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	42	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi / Finger Print	3	Buah
44.	Kulkas	9	Buah
45.	Sound System	4	Set
46.	Speaker Besar	2	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	10	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set
54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakaian	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	19	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Asphalt Highway	1	Set

75.	Gorden	3	Set
76.	Lemari Rak Arsip Besi	50	unit
77.	Handy Cam	2	unit
78.	Finger Print	4	unit
79.	Tablet / Gadget	6	unit
80.	Perangkat Meeting On Desk (MOD) Conference	1	set
81.	Meja Kerja Staf	25	Unit
82.	Kursi Kerja Staf	25	Unit
83.	Scanner	29	Unit
84.	PC All In One	40	Unit
85.	Meteran Roda	2	Buah
86.	Hard Disk	11	Buah
87.	Brite Screen Tripod	1	Buah
88.	Penghancur Kertas	14	Buah
89.	Lemari ½ Biro	6	Buah
90.	Aplikasi Pengawasan + Sim HP	2	Perangkat
91.	AC Standing	5	unit
92.	Lemari Kaca Arsip	21	unit
93.	Webcam Conference	1	unit
94.	Pemotong Kertas	1	unit
95.	Acces Point UNIFI	3	unit
96.	Speaker Portable	2	buah

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali hal lain dan tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 710/2502-

Khusus/Itprov/VII/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan hasil Evaluasi sebesar **79,21** atau predikat **“BB” (Sangat Baik)**, sebagaimana hasil evaluasi berikut ini :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Tambah/Kurang/Tetap
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,52	26,52	Tetap
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,63	20,63	Tetap
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,22	Tetap
4.	Evaluasi Kinerja	10	7,43	7,43	Tetap
5.	Capaian Kinerja	20	12,35	12,41	+ 0,06
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,15	79,21	+ 0,06
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut : Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **98,33 %** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	WTP	WTP	100	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	-	-	-	
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	8	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	8	8	100	
					Triwulan IV	-	-	-	
			%	95	Triwulan I	-	-	-	

		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah			Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	95	86,00	90,53
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	34	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	34	33	93,55
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	85	85	100
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	95	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	95	100
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	7	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	7	7	100

		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	7	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	7	7	100	
		Jumlah Laporan Monev SPM Kab/Kota	Laporan	10	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	10	10	100	
					Triwulan IV	-	-	-	
		Persentase Laporan Monev Dana Desa Kab/Kota	Persentase	100	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	100	100	100	
					Triwulan IV	-	-	-	
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	100	100	100	
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	75	Triwulan I	75	100	133,34	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	-	-	-	

4.		Persentase Pelaporan Gratifikasi yang ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	100	100	100	
		Hasil / Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	75	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	80	73,04	91,30	
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	1	1	100	
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	36,30	24,50	67,50	
		Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	60	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	60	55	92
			Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
Triwulan III	-					-	-		

					Triwulan IV	3	3	100
--	--	--	--	--	----------------	---	---	-----

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada akhir tahun 2022 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 98,33%, sehingga termasuk dalam kategori “ Baik”. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pencapaian atas kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP pada Level 3. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya komitmen dari pimpinan, dukungan anggaran yang memadai serta kesiapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Adanya pendampingan dari BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Perangkat Daerah.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi keseuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas akibat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain atau instansi lain atau yang bersifat kerugian Negara/daerah, belum maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan, adanya permasalahan yang berulang- ulang setiap tahunnya, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, belum disusunnya rencana tindak pengendalian (RTP) atas

pelaksanaan penilaian risiko/ self assessment pada program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, belum disusunnya peta risiko dan belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas manajemen risiko.

Dari beberapa permasalahan tersebut telah dilakukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut antara lain melakukan koordinasi dan pemberian advis/konsultasi berkaitan dengan masalah pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan pengawasan lainnya, pembuatan peraturan kepala daerah antara lain pedoman penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penilaian risiko terhadap program dan kegiatan. Sedangkan untuk anggaran dan raelisasi pendanaan terakit dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.43.695.454.226,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.37.982.586.731,00 **(86,93%)** dengan sisa anggaran sebesar Rp.5.712.867.535,00 **(13,07%)** hal ini dapat dilaihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

**Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2022**

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	4	5	6
	Inspektorat	43,695,454,226.00	37,982,586,731.00	86.93%	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29,805,523,162.00	26,230,640,542.00	88.01%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337,226,280.00	245,140,444.00	72.69%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	337,226,280.00	245,140,444.00	72.69%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,084,382,114.00	15,588,343,657.00	91.24%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,729,341,650.00	15,235,044,909.00	91.07%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	355,040,464.00	353,298,748.00	99.51%	100%

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,726,507,000.00	6,371,990,426.00	82.47%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	422,337,000.00	389,043,700.00	92.12%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,304,170,000.00	5,982,946,726.00	81.91%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,213,196,000.00	2,950,361,563.00	91.82%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,156,271,000.00	1,997,199,550.00	92.62%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266,057,000.00	225,609,685.00	84.80%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142,564,000.00	123,384,390.00	86.55%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648,304,000.00	604,167,938.00	93.19%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698,298,232.00	678,859,714.00	97.22%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	14,426,500.00	72.13%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,884,000.00	64,024,970.00	86.66%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604,414,232.00	600,408,244.00	99.34%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745,913,536.00	395,944,738.00	53.08%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510,940,000.00	172,057,138.00	33.67%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,973,536.00	34,227,600.00	76.11%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190,000,000.00	189,660,000.00	99.82%	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11,409,744,064.00	9,872,851,607.00	86.53%	100%

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,720,546,000.00	3,323,220,162.00	89.32%	100%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	391,618,000.00	247,876,190.00	63.30%	100%
	Reviu Laporan Keuangan	1,150,563,000.00	1,036,563,507.00	90.09%	100%
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1,129,018,000.00	1,061,801,038.00	94.05%	100%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1,049,347,000.00	976,979,427.00	93.10%	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7,689,198,064.00	6,549,631,445.00	85.18%	100%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	210,235,000.00	9,948,000.00	4.73%	100%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7,478,963,064.00	6,539,683,445.00	87.44%	100%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2,480,187,000.00	1,879,094,582.00	75.76%	100%
	Pendampingan dan Asistensi	2,480,187,000.00	1,879,094,582.00	75.76%	100%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	790,552,000.00	270,526,809.00	34.22%	100%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,689,635,000.00	1,608,567,773.00	95.20%	100%

3. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan monitoring urusan pemerintahan desa terutama berkaitan dengan monitoring dana desa. Sebagai upaya pemecahan masalah belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan pengawasan akan dilaksanakan beberapa jenis pelayanan pengawasan untuk periode 2024 s.d. 2026 sebagaimana

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022, maka jenis pelayanan pengawasan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawas meliputi :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP :
 1. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif.
 2. Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*probity advice*).
 3. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Risiko.
 4. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi
- b. Kegiatan Asistensi/Pendampingan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,
 2. Pengadaan barang dan jasa.
 3. Operasional sapu bersih pungutan liar / SABERPUNGLI.
 4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 5. Pemberian Advis/Saran/Pendapat/Konsultasi.
 6. Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan Reviu :
 1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
 4. Reviu Laporan Keuangan Pemda.
 5. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah
 6. Reviu Laporan Kinerja.
 7. Reviu Penyerapan Anggaran.
 8. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa.
 9. Reviu Dana DAK
 10. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemda
 11. Reviu Laporan SAKIP Pemda
 12. Kegiatan Reviu lainnya.
- d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi :
 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).
 3. Monitoring Dana Desa
 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah
 5. Aksi Pencegahan Korupsi
 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 7. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
 8. Penanganan Laporan Gratifikasi.
 9. Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
 10. Penanganan Benturan Kepentingan.
 11. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 12. Pemeriksaan Khusus / Investigatif.
 13. Penilaian Internal Zona Integritas.
 14. Verifikasi LHKPN dan LHKASN
 15. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah PPK.
 16. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 17. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
 18. Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
 19. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko
 20. Pelayanan Publik bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
 21. Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
 22. Survey Penilaian Integritas.
 23. Pembangunan Budaya Integritas.
- e. Kegiatan Pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah/Audit Kinerja.
 2. Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah
 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 5. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kab/Kota.
- f. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; 2. Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan; 3. Koordinasi program pengawasan; 4 Pelatihan di Kantor Sendiri dan 2. Tugas lain sesuai

kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7.
Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No	Obyek Pengawasan	Jumlah
1.	Biro di Sekretariat Daerah	9
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Dinas dan UPTD	21 + 71
4.	Badan dan UPTD	8 + 10
5.	Inspektorat	1
6.	RSUD Provinsi Kalimantan Timur	5
7.	Kantor Satpol PP	1
8.	Kantor Penghubung di Jakarta	1
9.	Perusahaan Daerah / Perusda Prov. Kaltim	6
10.	Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kaltim	10
	Jumlah	144

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi sumber daya manusia aparat pengawas dan jumlah obyek pemeriksaan yang ada, tentunya belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas sumber daya manusia apaturur pengawasan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dapat

tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 4;
- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 4; dan 5. Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 5) Terbatasnya SDM Aparatur Pengawasan dibandingkan dengan Jumlah Obyek Pemeriksaan;
- 6) Belum optimalnya Pengendalian Internal di lingkungan Inspektorat;
- 7) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- 8) Dukungan sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang masih dirasakan belum optimal

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu:

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan perilaku opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah; (3) meningkatkan pengendalian internal pemerintah; (4) melaksanakan pencegahan KKN dan (5) penguatan peran Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan. Benturan kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah direncanakan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimasa yang akan

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait Tupoksi Inspektorat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengawasan		
Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah	SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan	Pedoman Pelaksanaan SPIP Terintegrasi , sehingga harus disosialisasikan kembali

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal
	Kapabilitas APIP masih pada Level 3	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal
		Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten
		Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik
	Belum optimalnya program yang terkait Implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan	Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survey Penilaian Integritas, Wistle Blowing Sistem, Probity Audit, LHPKN dan LHKASN
		Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal
		Peran Inspektorat Daerah selaku Quality Assurance (QA) dan Advisory belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
	Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan - penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, reviu atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.
		Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal dalam mencegah korupsi baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya
		Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas
	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawasan maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan cakupan pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP	Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun mandatory
	Masih belum optimal nya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah	Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya, dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR, serta kurangnya komitmen perangkat daerah

B. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.2

Analisis SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Faktor Internal	STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
	1. Auditor yang kompeten. 2. Kewenangan dalam bidang pengawasan intern. 3. Sarana prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.	1. Terbatasnya jumlah dan jenis Auditor 2. Belum optimalnya penggunaan Sistem IT untuk report data dan dokumen hasil pemeriksaan atau temuan.

	4. Anggaran untuk mencapai target. 5. Komitmen pimpinan untuk peningkatan kinerja pengawasan.	3. Belum tersedianya SOP untuk beberapa aktivitas pengawasan.
Faktor Eksternal	OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
	1. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan intern. 2. Tekonologi Informasi yang mendukung kinerja Inspektorat. 3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kompetensi auditor. 4. Peluang join audit dalam bidang pengawasan dengan APIP Lain 5. Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan profesional	1. Pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat 2. Pemahaman beberapa SKPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penangan kasus oleh APH yang berdampak pada penyelesaian pemeriksaan kasus

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan

seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- c. Tingkat maturitas SPIP pada tahun 2026 berada pada level 4 pada Pemda dan Perangkat Daerah.
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Identifikasi Risiko dan Penilaian Risiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah
- g. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko belum dilaksanakan
- h. Kapabilitas APIP pada tahun 2026 harus mencapai level 4.

C. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

“ Kalimantan Timur yang Berdaulat Untuk Nusantara ”

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Sedangkan Misi yang akan diwujudkan adalah :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulai dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke 5 sangat terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, komitmen dan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat. Namun dalam mengimplementasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut

terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	• Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah	• PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko • Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. • Masih rendahnya komitmen perangkat daerah. • Belum adanya mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas kinerja perangkat daerah. • Adanya perubahan peraturan. • Belum ada sanksi yang tegas.	• Organisasi dan Tata Kerja yang jelas. • Dukungan aturan pengawasan yang cukup. • Ketersediaan anggaran dan SDM. • Ketersediaan Sistem Informasi Teknologi. • Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. • Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

		• Kelemahan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah. • Maturitas SPIP Pemda dan Perangkat Daerah	• Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Fasilitator SPIP • Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SPIP • Kurangnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah	• Aturan dan pedoman yang berubah-ubah • Terbentuknya Satgas SPIP Pemprov dan Perangkat Daerah. • Kerjasama dengan BPKP selaku instansi Pembina.
		• Cakupan Pengawasan	• Belum optimalnya peran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawawauan terhadap Pemda Kab/Kota • Kurangnya Jumlah Personil APIP	• Adanya aturan dan pedoman yang jelas.

Visi : Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara

No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	• Hasil penilaian Integritas Pemda	• Komitmen dari Perangkat Daerah terhadap	• Adanya aturan dan pedoman yang jelas terkait KKN

			pemberantasan KKN • Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Peringatan Dini • Survey atas Penilaian Integritas masih kurang responsive dari Audiensi. • Belum optimalnya tingkat kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	• Koordinasi yang baik antara APIP dan APH serta instansi terkait lainnya. • Terbentuknya Satgas Saberpungli Provinsi
--	--	--	---	--

Visi : Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara				
No.	Misi dan Program Prioritas	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi ke -5 : <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemeriksa • Kapabilitas APIP pada Level 3	• Belum optimalnya penerapan Standar Audit. • Juklak dan SOP belum berbasis risiko. • Kurangnya kualitas SDM APIP. • Kurangnya Jumlah personil APIP	• Adanya aturan dan pedoman yang jelas. • Dukungan Anggaran yang memadai • Adanya kesempatan pengembangan kapasitas APIP. • Koordinasi yang baik dengan

			• Adanya Dualisme Pembinaan APIP	instansi terkait.
--	--	--	--	-------------------

D. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementrian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2024 - 2026 adalah “meningkatnya akuntabilitas kinerja”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh perangkat daerah yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meraih predikat A pada implementasi SAKIP, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2024 - 2026 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada perangkat daerah serta pengelolaan keuangan pada perangkat daerah belum optimal, pencapaian level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada level 3. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat daerah paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan dan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

Selain sasaran tersebut di atas, terdapat sasaran “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L dan Pemda serta korporasi”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah penerapan sistem kendali mutu audit belum optimal dan belum ada analisis risiko dalam penyusunan PKPT. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan secara tertib, sedangkan faktor pendorongnya yaitu pimpinan memonitor pelaksanaan reviu secara berjenjang.

3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2024-2026 adalah “meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. sebagai faktor penghambatnya adalah belum optimalnya penerapan pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system* serta survey kepuasan penilaian publik dan survey penilaian integritas. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

4. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2024-2026, antara lain :

No.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	67 point	68 point	69,00 (B) point	69,50 (B) point	70,01 (BB) point

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor 3,226	Skor 3,226	Skor 3,500	Skor 3,750	Skor 4,000
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	66%	70%	75%	80%	85%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86

E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

F. Nilai – Nilai Organisasi

Adapun Nilai - Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan

serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

No.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET
-----	--------	-----------	--------------	--------

			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	67 point	68 point	69,00 (B) point	69,50 (B) point	70,01 (BB) point

b. Sasaran :

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor 3,226	Skor 3,226	Skor 3,500	Skor 3,750	Skor 4,000
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan Kkn	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	66%	70%	75%	80%	85%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86

B. Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Penjabaran Kinerja (cascading Kinerja) merupakan proses penyelarasan secara vertical dari level/unit yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah dan harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, serta secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas. Rumusan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjabarkan Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output beserta masing-masing indikator pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1. Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Prov Kaltim 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Persentase Identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
							Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Terlaksananya Pengawasan atas Keuangan Pemerintah Daerah Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
							Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Pengawasan atas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
								Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksanannya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah
							Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
							Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
							Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Persentase Laporan Penerimaan Gratifikasi yang ditangani		
							Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti		
							Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah		
							Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM		
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			Skor Kepuasan Masyarakat					Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Teradministrasikannya Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Teradministrasikannya Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
								Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Teradministrasikannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Tertatausahakannya Barang Milik Daerah perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
						Teradministrasikannya dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
							Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi	Tersedianya data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pendidikan dan Pelatihan
								Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
						Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan
								Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
								Tersedianya Mebel Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara
								Terpeliharanya dan Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

C. Indikator Program Sesuai RPD

Berdasarkan dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, maka terdapat 3 sasaran dengan 5 indikator, 3 program dengan 3 indikator, 10 Kegiatan dengan 21 indikator, dan 47 sub kegiatan dengan 47 indikator yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 - 2026, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang melakukan pengawasan kepada perangkat daerah dengan perannya sebagai konsultan dan quality assurance, seperti pada tabel 4.2. berikut, yaitu :

Tabel 4.2. Indikator Progran Sesuai RPD

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
Inspektorat Daerah					64.090.000.000		66.470.000.000		73.100.000.000
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH		LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA	Level / Skor	Level 3 / Skor 3,476		Level 3 / Skor 3,726		Level 4 / Skor 4,000	
MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	3.500		3.750		4.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Persen	100	16.862.522.000	100	18.270.000.000	100	23.270.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Persen	100	6.516.308.000	100	7.620.000.000	100	10.320.000.000
		Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persen	100		100		100	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	75		80		85	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	30	850.000.000	30	1.050.000.000	30	1.700.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	850.000.000	2	1.050.000.000	2	1.700.000.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	82	1.983.808.000	84	2.220.000.000	86	2.620.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	850.000.000	6	1.050.000.000	9	1.700.000.000
	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	1.982.500.000	32	2.250.000.000	35	2.600.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	10.346.214.000	100	10.650.000.000	100	12.950.000.000
		Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100		100			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Laporan	12	550.000.000	14	650.000.000	17	950.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	86	9.796.214.000	88	10.000.000.000	91	12.000.000.000
MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN		Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75		80		85	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	Persen	83	3.700.000.000	85	4.700.000.000	87	5.700.000.000
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Persen	100	3.700.000.000	100	4.700.000.000	100	5.700.000.000
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	100		100		100	
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	Persen	100		100		100	
		Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani	Persen	100		100		100	
		Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti	Persen	100		100		100	
		Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Persen	100		100		100	
		Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	Persen	100		100		100	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	20	850.000.000	21	1.350.000.000	22	1.850.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	20	2.850.000.000	21	3.350.000.000	22	3.850.000.000
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		INDEKS BIROKRASI	Poin	69,00 (B)		69,50(B)		70,01 (BB)	
MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK		Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	3		3		3	
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	80		82		85	
		Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	85		85,50		86	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	100	43.527.478.000	100	43.500.000.000	100	44.130.000.000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100		100		100	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persen	100	17.900.000.000	100	17.900.000.000	100	17.900.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	17.000.000.000	100	17.000.000.000	122	17.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	Persen	100	8.200.000.000	100	8.200.000.000	100	8.200.000.000
		Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi	Persen	100		100		100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	500.000.000	108	500.000.000	108	500.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85	7.000.000.000	118	7.000.000.000	122	7.000.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	110	200.000.000	110	200.000.000	110	200.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	Persen	100	2.150.000.000	100	2.116.000.000	100	2.746.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	5	250.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	<i>Peyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Paket	12	500.000.000	12	500.000.000	17	600.000.000
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	7	300.000.000
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan	Paket	5	250.000.000	5	250.000.000	7	400.000.000
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	250.000.000	5	216.000.000	5	296.000.000
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	700.000.000	36	700.000.000	38	750.000.000
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>9.900.000.000</i>	<i>100</i>	<i>9.900.000.000</i>	<i>100</i>	<i>9.900.000.000</i>
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000
	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>2.364.000.000</i>	<i>100</i>	<i>2.364.000.000</i>	<i>100</i>	<i>2.364.000.000</i>
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	850.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	Persen	100	1.063.478.000	100	1.070.000.000	100	1.070.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	400.000.000	16	400.000.000	16	400.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	163.478.000	8	170.000.000	8	170.000.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan, sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2024	2025	2026			
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	3.500	3.750	4.000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.	Melakukan Kegiatan Pemeriksaan, Pengawasan, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pemantauan
							2.	Melakukan Pendampingan,

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2024	2025	2026			
								Asistensi dan Konsultasi
							3.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
							4.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
							5.	Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Manajemen Risiko
							6.	Implementasi Pergub Kaltim No. 70/2020 ttg Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemprov. Kaltim
							7.	Implementasi Pergub Kaltim No. 70/2020 ttg Pedoman Pengelolaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemprov. Kaltim
	MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	75	80	85	Impelementasi Pencegahan Korupsi	1.	Melakukan Penanganan Atas Pengaduan Masyarakat
							2.	Melaksanakan Sosialisasi dan Penegakan atas Regulasi Anti Korupsi
							3.	Membuat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Temuan dan Saran Hasil Penilaian Integritas Pemda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2024	2025	2026			
							4.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi
							5.	Membentuk Tim Satgas Saberpungli Provinsi
							6.	Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Unit Kerja dan Meningkatkan Perannya
							7.	Penerapan Zona Integritas baik WBK dan WBBM
MEWUJUD KAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Peningkatan Kapabilitas APIP	1.	Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	80	82	85		2.	Peningkatan Integritas APIP
		Skor Kepuasan Masyarakat	85	85,50	86		3.	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengawasan Berbasis Risiko
							4.	Penerapan Kendali Mutu Audit
							5.	Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan
							6.	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
							7.	Menerapkan Sistem Informasi dalam Kegiatan Pengawasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan (2024 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun

kedepan yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019, maka sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH	LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA
MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah
	Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP
<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
<i>Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti
<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah</i>	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah
<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN
		Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani
		Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti
		Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		INDEKS BIROKRASI
MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK		Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah
		Nilai SAKIP Inspektroirat Daerah
		Skor Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD</i>		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP

<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya
	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
<i>Peyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan

<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<i>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara
<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
Inspektorat Daerah				64.090.000.000		66.470.000.000		73.100.000.000
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH	LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA	Level / Skor	Level 3 / Skor 3,476		Level 3 / Skor 3,726		Level 4 / Skor 4,000	
MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	3.500		3.750		4.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Persen	100	16.862.522.000	100	18.270.000.000	100	23.270.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Persen	100	6.516.308.000	100	7.620.000.000	100	10.320.000.000
	Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persen	100		100		100	
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	75		80		85	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	30	850.000.000	30	1.050.000.000	30	1.700.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	850.000.000	2	1.050.000.000	2	1.700.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	82	1.983.808.000	84	2.220.000.000	86	2.620.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	850.000.000	6	1.050.000.000	9	1.700.000.000
Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	1.982.500.000	32	2.250.000.000	35	2.600.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	10.346.214.000	100	10.650.000.000	100	12.950.000.000
	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100		100		100	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Laporan	12	550.000.000	14	650.000.000	17	950.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	86	9.796.214.000	88	10.000.000.000	91	12.000.000.000
MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	75		80		85	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	Persen	83	3.700.000.000	85	4.700.000.000	87	5.700.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Persen	100	3.700.000.000	100	4.700.000.000	100	5.700.000.000
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	100		100		100	
	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	Persen	100		100		100	
	Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani	Persen	100		100		100	
	Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti	Persen	100		100		100	
	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Persen	100		100		100	
	Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	Persen	100		100		100	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	20	850.000.000	21	1.350.000.000	22	1.850.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	20	2.850.000.000	21	3.350.000.000	22	3.850.000.000
MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	INDEKS BIROKRASI	Poin	69,00 (B)		69,50(B)		70,01 (BB)	
MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah</i>	<i>Level</i>	<i>3</i>		<i>3</i>		<i>3</i>	
	<i>Nilai SAKIP Inspektorat Daerah</i>	<i>Nilai</i>	<i>80</i>		<i>82</i>		<i>85</i>	
	<i>Skor Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Skor</i>	<i>85</i>		<i>85,50</i>		<i>86</i>	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	100	43.527.478.000	100	43.500.000.000	100	44.130.000.000
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100		100		100	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000	100	1.850.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persen	100	17.900.000.000	100	17.900.000.000	100	17.900.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	17.000.000.000	100	17.000.000.000	122	17.000.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	Persen	100	8.200.000.000	100	8.200.000.000	100	8.200.000.000
	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi	Persen	100		100		100	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	500.000.000	108	500.000.000	108	500.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85	7.000.000.000	118	7.000.000.000	122	7.000.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	110	200.000.000	110	200.000.000	110	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	Persen	100	2.150.000.000	100	2.116.000.000	100	2.746.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	5	250.000.000
Peyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Paket	12	500.000.000	12	500.000.000	17	600.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	7	300.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan	Paket	5	250.000.000	5	250.000.000	7	400.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	250.000.000	5	216.000.000	5	296.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	700.000.000	36	700.000.000	38	750.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	Persen	100	9.900.000.000	100	9.900.000.000	100	9.900.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	2.364.000.000	100	2.364.000.000	100	2.364.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	850.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>1.063.478.000</i>	<i>100</i>	<i>1.070.000.000</i>	<i>100</i>	<i>1.070.000.000</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	400.000.000	16	400.000.000	16	400.000.000
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	163.478.000	8	170.000.000	8	170.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPD Tahun 2024-2026

a. Tujuan :

No.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	67 point	68 point	69,00 (B) point	69,50 (B) point	70,01 (BB) point

b. Sasaran :

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor 3,226	Skor 3,226	Skor 3,500	Skor 3,750	Skor 4,000
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	66%	70%	75%	80%	85%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86

Kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan yang digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Penetapan Indikator dan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta cara perhitungan diuraikan dalam tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level / Skor	Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/L embaga dan Pemda	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	BPKP dan Inspektorat Daerah	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000	Level 4 / Skor 4,000	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Ber kualitas	Indeks Birokrasi	Point / Indeks	Sesuai amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Setda / Biro Organisasi, Inspektoratda n Semua PD Pelayanan Publik	67	68	69,00 (B)	69,5 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/L embaga dan Pemda	Hasil Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim	BPKP dan Inspektorat Daerah	3,226	3,226	3,500	3,750	4,000	4,000	Laporan Hasil Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim
4.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	%	Sesuai amanat Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 8 huruf c dan huruf e, dan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan	Hasil Mitigasi Risiko Korupsi melalui 5 Instrumen MCP dan Hasil Survey Penilaian Integritas dari KPK-RI	KPK-RI dan Inspektorat Daerah	66%	70%	75%	80%	85%	85%	Laporan Hasil Mitigasi MCP dan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas oleh KPK-RI

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
				Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI).									
5.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level	Sesuai Amanat Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/L embaga/ Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	BPKP dan Inspektorat Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	Sesuai Amanat Perman PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85	85	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah
		Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	Sesuai amanat Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara n Pelayanan Publik	Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persapri Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Inspektorat Daerah	84,41	84,6	85	85,50	86	86	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi misi RPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPD 2024 - 2026, dan isu strategis aktual.

Sistematika penulisan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun pengelompokan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu, disesuaikan dengan visi misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 19 Mei 2023

Inspektur,

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pada konteks pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Timur, hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa terutama masyarakat Kalimantan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ideologi politik ekonomi sosial budaya (Ipolekseosbud) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik ini, sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sehingga, salah satu tahapan proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di bidang ini, yakni penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah, sebagai dasar acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu lima tahunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, disusun memuat program-program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renja). Rumusan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsan dan

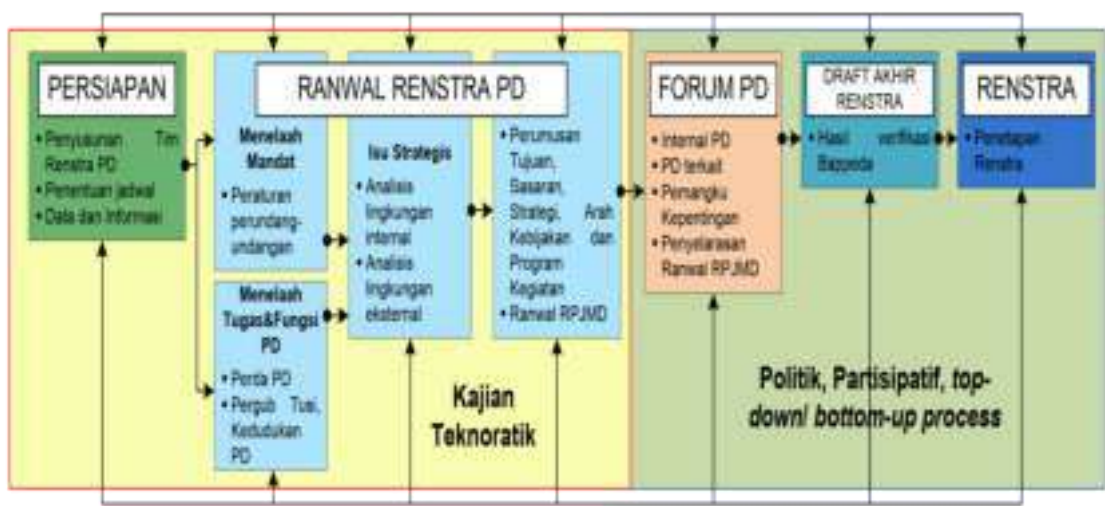
politik, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Kualitas penyusunan Renstra ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 ke dalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur selama masa kepemimpinan nya.

Proses penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up process. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1.1.
Alur tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - a) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Tahap penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup:
 - a) analisis gambaran pelayanan;
 - b) analisis permasalahan;
 - c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d) analisis isu strategis;
 - e) perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPD;
 - f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran

berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan RPD.

3. Tahap pembahasan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan RPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah selaras dengan Rancangan RPD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.
4. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Setelah verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappeda.
5. Tahap penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap

sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyampaian rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diverifikasi oleh Bappeda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, disusun selain berpedoman kepada RPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPD, mempunyai hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra K/L.

Hubungan dokumen Renstra Badan Kesebangpol Provinsi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur. RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik berpedoman pada dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) dilakukan melalui penyalarsan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ini, memiliki sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta akuntabilitas selama tiga tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

48. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;
49. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
50. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
51. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 disusun dengan maksud, yaitu:

1. Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai dalam tiga tahun kedepan;
2. Menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan eksternal pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun kedepan;
4. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, yaitu:

1. Tersedianya pedoman pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun yang disesuaikan dengan perubahan regulasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tersedianya instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
4. Tersedianya pedoman penilaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur; Telaah Renstra K/L; serta Penentuan Isu- Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang disertai dengan indikator kinerja targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah. Selain IKU Perangkat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

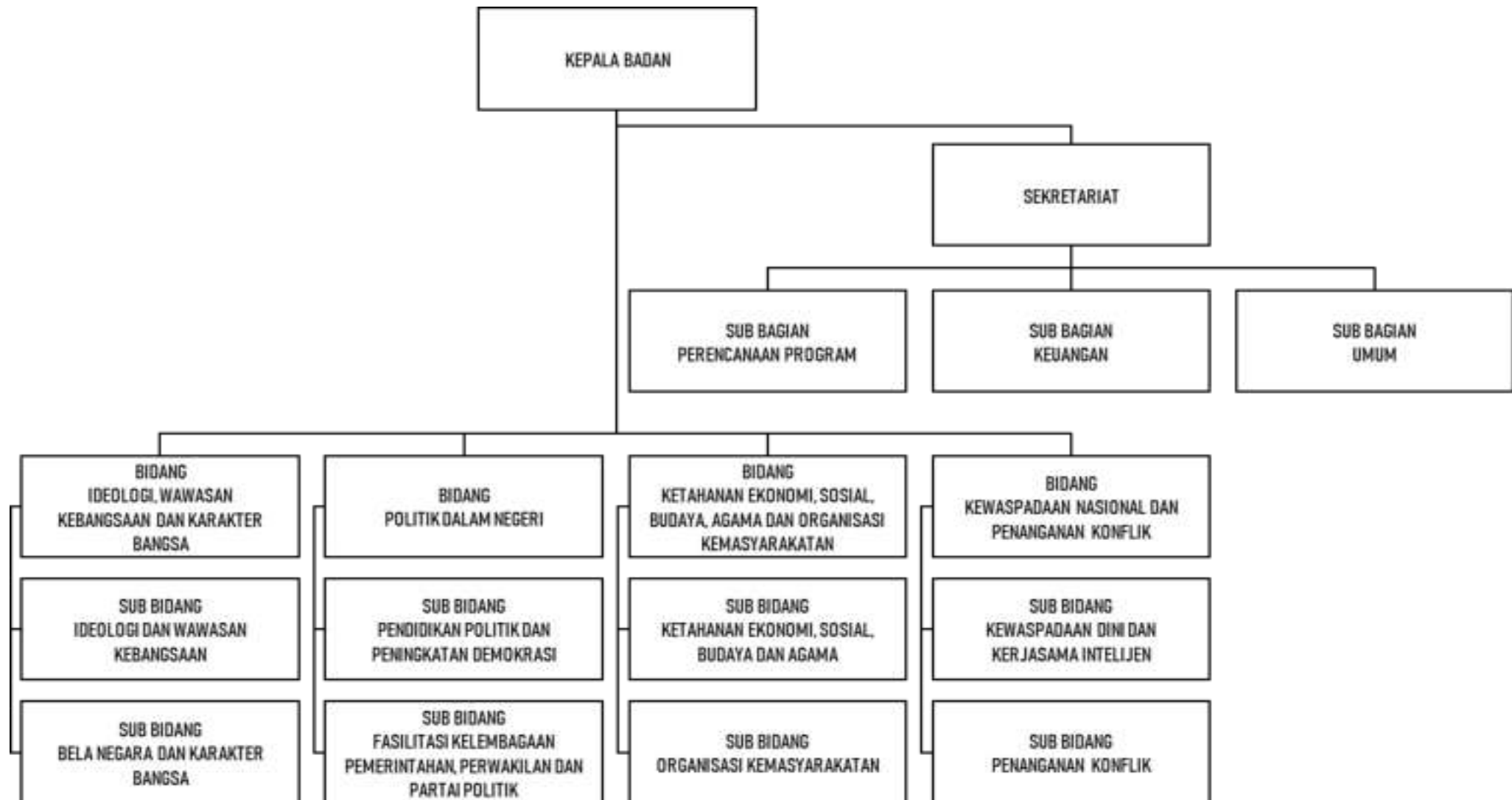
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub bagian Umum.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:

1. Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub bidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI**Gambar 2.1.1.****Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur**

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegaiwaan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

- b. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dalam penghayat kepercayaan;
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Serta berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan tugas Unsur Pemerintahan Umum memiliki 5 Program, 5 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 41 orang, sebagaimana terlihat dibawah ini:

Table 2.2.1.
Rekap PNS berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
IV	6	2	8
III	15	10	25
II	6	2	8
I	0	0	0
Jumlah	27	14	41

Table 2.2.2
Rekap PNS berdasarkan Eselon dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
I	0	0	0
II	1	0	1
III	3	2	5
IV	1	0	1
Eselon	5	2	7
Non Eselon	22	12	33
Jumlah	27	14	41

Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 15 (lima belas) orang.

Adapun jumlah asset/modal dan unit usaha yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Table 2.2.3.
Rekap Aset Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Alat-Alat Besar	3	33.000.000
2	Alat-Alat Angkutan	51	5.220.930.500
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukir	27	138.050.000
4	Alat Pertanian	5	5.600.000
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.064	5.071.751.946
6	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	123	482.376.000
7	Alat-Alat Kedokteran	15	3.750.000
8	Alat Laboratorium	30	47.763.152
9	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	1	227.986.550
10	Buku Dan Perpustakaan	42	39.954.000
TOTAL		2361	11.271.162.148

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.1. dibawah ini:

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	97,00	98,00	99,00	97,00	98,00		100,00	100,00	0,00
2	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		100,00	100,00	0,00
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		100,00	100,00	0,00
5	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
7	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
8	Jumlah DPPA SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
10	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00	100,00	0,00
11	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
12	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
13	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		100,00	100,00	0,00
14	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
15	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00		100,00	0,00	0,00
17	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
18	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan (TLHP)	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
19	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		100,00	100,00	0,00
20	Jumlah Dokumen Analisis dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
21	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
22	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00		100,00	0,00	0,00
23	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Jumlah Laporan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
25	Jumlah Laporan Rekapitulasi Nilai Aset	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
26	Jumlah Laporan Inventarisasi Kendali Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
27	Jumlah Dokumen Barang Milk Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
28	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
29	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
30	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	Orang	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		100,00	100,00	0,00
32	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00		100,00	0,00	0,00
33	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN	Orang	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00		100,00	100,00	0,00
34	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00		100,00	0,00	0,00
35	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00
36	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00		100,00	0,00	0,00
37	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
39	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00
40	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		100,00	0,00	0,00
41	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		100,00	0,00	0,00
42	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		100,00	100,00	0,00
43	Jumlah Surat Kabar	Surat Kabar	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00	4380,00		100,00	100,00	0,00
44	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
45	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00		100,00	0,00	0,00
47	Tersedianya Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00		100,00	18,18	0,00
48	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00		100,00	18,18	0,00
49	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00		100,00	18,18	0,00
50	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
51	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
52	Jumlah Materai	Lembar	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		100,00	100,00	0,00
53	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
54	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN	Laporan	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		100,00	100,00	0,00
55	Tersedianya Pemeliharaan	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang Milik Daerah										
56	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00	100,00	0,00
57	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		100,00	100,00	0,00
58	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00	100,00	0,00
59	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	6,00	7,00	8,00	6,00	10,43		100,00	149,00	0,00
60	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	7,00	11,00	2,00	7,00	11,00		100,00	100,00	0,00
61	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan	Orang	9140,00	10664,00	12187,00	9140,00	15888,00		100,00	148,99	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Karakter Kebangsaan										
62	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
63	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		100,00	100,00	0,00
64	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00
65	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
66	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
67	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	%	74,50	75,00	75,50	74,50	72,00		100,00	96,00	0,00
68	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	10,00	10,00	2,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
69	Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	%	56,65	56,75	56,85	56,65	56,75		100,00	100,00	0,00
70	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
71	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00	100,00	0,00
72	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		100,00	100,00	0,00
73	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
74	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
75	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	%	27,25	32,70	40,05	27,25	32,70		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
77	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	Organisasi Masyarakat	100,00	120,00	147,00	100,00	120,00		100,00	100,00	0,00
78	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
79	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
80	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00	0,00
81	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
82	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
83	Persentase Rekomendasi Ketahanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama										
84	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
85	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Rekomendasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00	100,00	0,00
86	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
87	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00	100,00	0,00
88	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		100,00	100,00	0,00
89	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
90	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
91	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	%	33,66	33,33	33,01	33,66	30,21		100,00	90,63	0,00
92	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00	100,00	0,00
93	Jumlah Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Konflik	102,00	101,00	100,00	102,00	64,00		100,00	63,37	0,00
94	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00	100,00	0,00
95	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00	100,00	0,00
96	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		100,00	100,00	0,00
97	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00
98	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	100,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		Satuan	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring dan Evaluasi										
99	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00

B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dianalisis pendanaan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Tabel 2.3.2. dan 2.3.3.. sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur (PERMENDAGRI 54 2010)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
BAKESBANGPOL	15.658.861.000	14.169.818.950	13.869.330.691	12.289.643.705	88,57	86,73
Belanja Tidak Langsung	8.092.461.000	7.911.392.000	6.712.926.198	6.167.970.098	82,95	77,96
Belanja Langsung	7.566.400.000	6.258.426.950	7.156.404.493	6.121.673.607	94,58	97,81
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	865.806.000	963.742.150	802.922.347	947.810.568	92,74	98,35
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	865.806.000	963.742.150	802.922.347	947.810.568	92,74	98,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219.500.000	449.350.000	186.269.280	438.420.370	84,86	97,57
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	88.900.000	61.150.000	61.572.200	56.203.970	69,26	91,91
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	130.600.000	388.200.000	124.697.080	382.216.400	95,48	98,46
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.190.458.000	532.091.250	1.119.718.843	532.014.749	94,06	99,99
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	835.000.000	480.291.250	769.373.255	480.214.749	92,14	99,98
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rakor Kesbangpol)	355.458.000	51.800.000	350.345.588	51.800.000	98,56	100,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	343.836.000	695.644.550	322.795.645	692.935.580	93,88	99,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	142.556.000	425.685.800	124.305.655	424.086.080	87,20	99,62

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	201.280.000	269.958.750	198.489.990	268.849.500	98,61	99,59
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	721.900.000	789.675.000	668.093.038	764.609.750	92,55	96,83
Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	308.340.000	459.779.813	280.901.238	440.708.850	91,10	95,85
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	225.400.000	315.997.087	214.111.200	310.002.800	94,99	98,10
Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan	188.160.000	-	173.080.600	-	91,99	0,00
Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	-	6.898.100	-	6.898.100	0,00	100,00
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	-	7.000.000	-	7.000.000	0,00	100,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	735.800.000	768.844.500	683.467.980	739.158.400	92,89	96,14
Peningkatan Kesadaran Bela Negara	467.900.000	346.130.450	431.008.680	333.979.900	92,12	96,49
Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	267.900.000	422.714.050	252.459.300	405.178.500	94,24	95,85
Program Pendidikan Politik Masyarakat	2.692.300.000	1.264.647.000	2.604.075.677	1.234.663.000	96,72	97,63
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	1.593.200.000	521.878.200	1.532.724.520	509.251.200	96,20	97,58
Penyusunan IDI	706.325.000	299.650.000	690.290.300	293.115.000	97,73	97,82
Penyusunan Data Base Partai Politik	392.775.000	226.434.000	381.060.857	219.997.500	97,02	97,16

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	-	41.684.800	-	41.684.000	0,00	100,00
Pendidikan Politik Masyarakat	-	175.000.000	-	170.615.300	0,00	97,49
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	796.800.000	794.432.500	769.061.683	772.061.190	96,52	97,18
Peningkatan Kapasitas Ormas	150.850.000	322.830.000	148.135.400	315.016.190	98,20	97,58
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	305.150.000	157.980.000	296.525.560	154.670.800	97,17	97,91
Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	340.800.000	289.920.700	324.400.723	278.672.400	95,19	96,12
Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	-	23.701.800	-	23.701.800	0,00	100,00

Tabel 2.3.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur (PERMENDAGRI 90 2019)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.695.186.938	82.166.190.481	111.878.505.813	17.284.478.570	79.456.846.717	5.149.487.625	87,76	96,70	4,60
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.695.186.938	82.166.190.481	111.878.505.813	17.284.478.570	79.456.846.717	5.149.487.625	87,76	96,70	4,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.078.753.960	14.187.826.391	20.278.873.813	9.463.994.465	12.014.868.715	4.229.486.798	85,42	84,68	20,86
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	415.231.800	363.576.000	985.224.000	404.121.900	359.810.234	483.652.090	97,32	98,96	49,09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.722.600	9.798.000	690.559.000	168.590.700	9.798.000	480.016.590	96,49	100,00	69,51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.692.000	-	-	2.691.800	-	-	99,99	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.692.000	-	-	1.143.500	-	-	42,48	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.092.000	-	-	2.092.000	-	-	100,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.092.000	-	-	242.000	-	-	11,57	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.333.200	-	-	2.111.100	-	-	90,48	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.608.000	353.778.000	294.665.000	227.250.800	350.012.234	3.635.500	99,41	98,94	1,23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.435.799.112	10.246.998.935	10.088.553.463	7.919.756.434	8.141.694.896	1.486.912.229	83,93	79,45	14,74
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.818.071.000	9.791.846.935	9.574.575.963	7.308.430.976	7.715.042.445	1.391.120.229	82,88	78,79	14,53
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	567.392.112	47.560.000	-	561.272.358	21.240.000	-	98,92	44,66	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	346.320.000	388.200.000	-	346.320.000	88.020.000	0,00	100,00	22,67

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	-	-	999.800	-	-	99,98	0,00	0,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.336.000	61.272.000	125.777.500	49.053.300	59.092.451	7.772.000	99,43	96,44	6,18
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.600.000	9.636.000	36.090.000	20.720.000	9.586.500	-	35,97	99,49	0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	9.636.000	36.090.000	-	9.586.500	-	0,00	99,49	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.600.000	-	-	20.720.000	-	-	35,97	0,00	0,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	51.000.000	44.440.000	-	42.840.000	39.600.000	0,00	84,00	89,11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	51.000.000	44.440.000	-	42.840.000	39.600.000	0,00	84,00	89,11
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.002.844.910	1.961.118.000	3.030.256.150	991.017.089	1.951.919.166	653.541.620	98,82	99,53	21,57
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.674.410	811.508.000	822.694.650	337.686.300	808.083.353	7.620.000	98,26	99,58	0,93
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.880.000	-	-	150.170.000	-	-	99,53	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.546.500	40.000.000	59.640.000	8.099.800	39.998.300	6.657.350	70,15	100,00	11,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.520.000	11.520.000	-	11.040.000	11.520.000	-	95,83	100,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.224.000	1.098.090.000	1.733.621.500	484.020.989	1.092.317.513	639.264.270	99,75	99,47	36,87
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	414.300.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	788.750.000	4.955.296.000	-	788.750.000	1.368.000.000	0,00	100,00	27,61
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	788.750.000	4.955.296.000	-	788.750.000	1.368.000.000	0,00	100,00	27,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.222.838	493.885.656	969.987.200	58.180.814	482.329.094	193.530.859	79,46	97,66	19,95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	15.000.000	-	12.000.000	15.000.000	-	100,00	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.222.838	63.500.400	183.606.000	46.180.814	56.302.814	11.286.876	75,43	88,67	6,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	415.385.256	786.381.200	-	411.026.280	182.243.983	0,00	98,95	23,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.055.300	272.861.800	169.027.000	70.198.228	237.938.825	4.250.000	74,64	87,20	2,51

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.055.300	150.194.000	151.947.000	52.898.228	116.194.125	-	78,89	77,36	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	122.667.800	17.080.000	17.300.000	121.744.700	4.250.000	64,07	99,25	24,88
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.098.351.368	1.671.848.000	1.879.494.500	932.609.384	1.583.278.400	414.561.820	84,91	94,70	22,06
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.098.351.368	1.671.848.000	1.879.494.500	932.609.384	1.583.278.400	414.561.820	84,91	94,70	22,06
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.370.000	19.510.000	-	240.000	14.156.760	-	17,52	72,56	0,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3.360.000	5.280.000	-	3.360.000	5.280.000	-	100,00	100,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	534.999.368	1.173.058.000	1.388.694.500	375.679.482	1.092.381.278	242.400.000	70,22	93,12	17,46
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	203.806.000	163.200.000	243.000.000	198.518.000	160.742.261	91.214.920	97,41	98,49	37,54
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	354.816.000	310.800.000	247.800.000	354.811.902	310.718.101	80.946.900	100,00	99,97	32,67

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan									
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.821.773.138	3.789.323.800	12.377.372.500	4.452.807.677	3.701.176.047	190.906.897	92,35	97,67	1,54
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.821.773.138	3.789.323.800	12.377.372.500	4.452.807.677	3.701.176.047	190.906.897	92,35	97,67	1,54
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.133.125.838	1.950.770.800	-	1.950.738.800	1.950.756.800	-	91,45	100,00	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1.720.100	3.240.000	-	1.599.100	2.880.000	-	92,97	88,89	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.031.647.200	1.003.713.000	11.707.172.500	1.852.150.875	939.852.698	87.215.950	91,16	93,64	0,74
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	297.000.000	378.000.000	288.000.000	290.560.302	360.381.599	33.756.447	97,83	95,34	11,72
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	358.280.000	453.600.000	382.200.000	357.758.600	447.304.950	69.934.500	99,85	98,61	18,30
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	992.426.122	57.988.266.290	72.202.966.500	901.390.940	57.903.209.640	46.194.200	90,83	99,85	0,06
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	992.426.122	57.988.266.290	72.202.966.500	901.390.940	57.903.209.640	46.194.200	90,83	99,85	0,06

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.640.000	18.652.000	-	772.600	18.190.400	-	47,11	97,53	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.250.000	1.509.000	-	1.249.900	480.000	-	99,99	31,81	0,00
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	730.239.122	57.658.505.290	71.748.766.500	657.195.722	57.576.969.960	-	90,00	99,86	0,00
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	117.000.000	108.000.000	214.800.000	99.959.182	106.144.080	17.962.200	85,44	98,28	8,36
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	142.297.000	201.600.000	239.400.000	142.213.536	201.425.200	28.232.000	99,94	99,91	11,79
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	510.947.700	779.608.000	906.220.000	424.444.900	753.911.123	66.621.390	83,07	96,70	7,35
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	510.947.700	779.608.000	906.220.000	424.444.900	753.911.123	66.621.390	83,07	96,70	7,35

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.600.000	364.000	-	521.300	240.000	-	32,58	65,93	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.001.100	1.303.000	-	697.100	480.000	-	9,96	36,84	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	276.243.600	493.541.000	489.820.000	202.655.000	468.960.090	-	73,36	95,02	0,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.000.000	108.000.000	231.600.000	84.571.900	107.868.133	49.320.390	93,97	99,88	21,30
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	136.103.000	176.400.000	184.800.000	135.999.600	176.362.900	17.301.000	99,92	99,98	9,36
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	1.192.934.650	3.749.318.000	4.233.578.500	1.109.231.204	3.500.402.792	201.716.520	92,98	93,36	4,76

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.192.934.650	3.749.318.000	4.233.578.500	1.109.231.204	3.500.402.792	201.716.520	92,98	93,36	4,76
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.781.800	720.000	-	-	240.000	-	0,00	33,33	0,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.451.000	1.848.000	-	696.000	1.704.000	-	28,40	92,21	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	503.635.850	817.615.000	1.160.568.500	438.914.862	722.148.345	66.113.000	87,15	88,32	5,70
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	306.000.000	216.000.000	288.000.000	296.667.900	214.566.268	90.532.020	96,95	99,34	31,43

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023 (TW1)	2021	2022	2023
Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	379.066.000	315.000.000	340.200.000	372.952.442	313.007.907	45.071.500	98,39	99,37	13,25
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-	2.398.135.000	2.444.810.000	-	2.248.736.272	-	0,00	93,77	0,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

1. Kondisi Internal

- a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
- c. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- d. Terlalu sering berubahnya aturan dan tidak adanya keseragaman aturan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sehingga bisa menghambat koordinasi antar satuan kerja (badan/kantor) Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota.

2. Kondisi Eksternal

Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum serta Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila.

- a. Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Karakteristik Kalimantan Timur yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur yang rawan konflik, implementasi

otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial / massa yang mengarah pada anarkhisme. Di samping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

- b. Politisasi Nilai-Nilai Agama. Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara - cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.
- c. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik

dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tri tunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (civil society) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai "penengah" yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

- d. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.
- e. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik. Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (citizen) bukan sebagai pelanggan

(customer). Dengan adanya perubahan perundang undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

- f. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan harmonisasi masyarakat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat belum maksimal pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah pusat tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).
- g. Program Pro-Masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- h. Adanya perkembangan digitalisasi yang semakin maju sehingga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat kita yang mengakibatkan pemahaman dan penghayatan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurun.

B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan:

1. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan, peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau early warning system untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.
2. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik, upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, utamanya

lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga - lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3. Pemulihan Wilayah Pasca Konflik stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan excess dan dispute yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.
4. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para stakeholder (Partai Politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik yang melibatkan Partai Politi, Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat.
5. Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi Masyarakat Kalimantan Timur sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial

tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.
7. Peningkatan Anggaran dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.
8. Sarana dan Prasarana dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Pembinaan terhadap masyarakat dengan kegiatan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara diskusi, dialog, interaktif, seminar, perlombaan dan kegiatan lainnya serta meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sarana peningkatan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa masyarakat Kalimantan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir (2019-2023), menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan “*gap expectation*” dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut

Tabel 3.1.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur	Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan
		Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial
	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa	Kurangnya pemahaman nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat
	Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba
	Meningkatnya penganut agama yang menyimpang	Kurangnya edukasi moderasi beragama
	Peningkatan penggunaan produk import atau penurunan penggunaan produk dalam negeri	Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri
	Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART	Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya
	Tingginya potensi konflik sosial diwilayah Kalimantan Timur	Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial
		Geografis Kalimantan Timur yang multikultural

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020 - 2024 adalah: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 tersebut adalah:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan admin istrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Badan

Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- A. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
- B. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
- C. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
- D. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan kristalisasi dari Renstra Perangkat Daerah agar apa yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 tahun mendatang lebih spesifik dan terukur. Kejelasan indikator pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sumber daya organisasi selama 3 tahun mendatang lebih fokus dalam agenda kerjanya. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

A. TUJUAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu kepada Rancangan RPD 2024-2026, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi: yang dimaksud adalah penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Tabel 4.1.
Tujuan RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

TUJUAN	
Uraian	Indikator
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan tujuan Rancangan RPD 2024-2026 yang telah ditentukan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada sasaran:

Sasaran 1 1: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK.

Tabel 4.2.
Sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

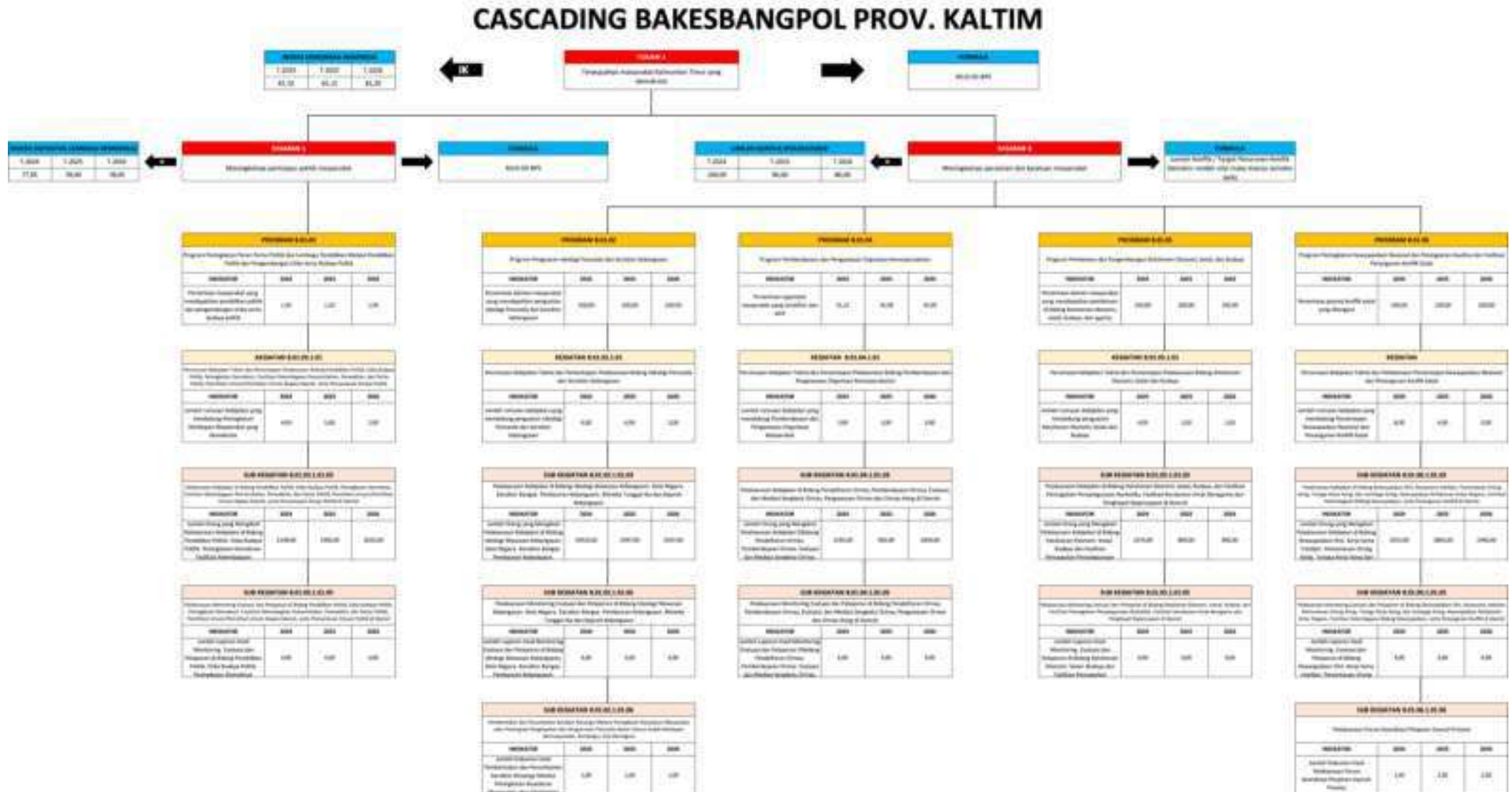
Sasaran	
Uraian	Indikator
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Sistem Merit
	Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)
	Nilai Akutabilitas Kinerja
	Tingkat Maturitas SPIP

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 4.3.. berikut:

Tabel 4.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				Satuan	2024	2025	2026
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,02	Indeks	81,10	81,15	81,20
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90	Indeks	77,95	78,00	78,05
	Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	31	Potensi Konflik	100	90	80
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	Indeks	85,00	85,50	86,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,10	Poin	78,50	79,30	80,01

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				Satuan	2024	2025	2026
	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	74,26	Indeks	75,00	75,50	76,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,97	Nilai	68,00	68,50	69,00



Gambar 4.1.
Cascading Tujuan 1, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

CASCADING BAKESBANGPOL PROV. KALTIM



Gambar 4.2.
Cascading Tujuan 2, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis	Sasaran 1: 1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensi	1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensi
	Sasaran 2: 1. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	1. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan secara berkesinambungan	1. Penguatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
		2. Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan	2. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dengan mendorong kemandirian ormas dan memberikan fasilitas kepada organisasi kemasyarakatan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
		3. Meningkatkan peran serta dan kolaborasi penta helix antara pemerintah, masyarakat, cendikiawan dan media	3. Penguatan internalisasi nilai-nilai seni dan budaya guna menguatkan identitas masyarakat yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dalam upaya melestarikan seni dan budaya.	berbudaya dan tidak terpengaruh oleh efek negatif globalisasi.
		4. Mengembangkan kampanye cinta produk indonesia.	4. Menggencarkan upaya meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri melalui media konvensional maupun media mainstream.
		5. Meningkatkan peran tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama.	5. Memelihara tri kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama.
		6. Meningkatkan kemampuan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap P4GN dan PN.	6. Peningkatan kemampuan penanganan P4GN dan PN melalui preemtif dan preventif dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
		7. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM bagi aparatur INTELIJEN	7. Penguatan kelembagaan dalam menciptakan kondusifitas daerah
		8. Meningkatkan kegiatan sosialisasi anti kekerasan bagi masyarakat, pemuda dan pelajar	8. Membentuk Tim Terpadu dan Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9. Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas	Melakukan pembaharuan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kalimantan Timur

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dapat diuraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
- c. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis				Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,02 Indeks	81,10	396.550.027.000	81,15	15.000.000.000	81,20	16.440.000.000	81,20	294.698.302.963
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat			Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90 Indeks	77,95	288.338.302.963	78,00	3.000.000.000	78,05	3.360.000.000	78,05	294.698.302.963
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,28 %	1,30	288.338.302.963	1,32	3.000.000.000	1,34	3.360.000.000	1,34	294.698.302.963
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	5,00 Dokumen	4,00	288.338.302.963	5,00	3.000.000.000	2,00	3.360.000.000	11,00	294.698.302.963
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315,00 Orang	2148,00	287.338.302.963	1900,00	2.580.000.000	2020,00	2.940.000.000	6068,00	292.858.302.963
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	4,00	1.000.000.000	4,00	420.000.000	4,00	420.000.000	12,00	1.840.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat			Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	31,00 Potensi Konflik	100,00	108.211.724.037	90,00	12.000.000.000	80,00	13.080.000.000	270,00	133.291.724.037
		08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	16,67 %	100,00	18.700.000.000	100,00	3.000.000.000	100,00	3.360.000.000	100,00	25.060.000.000
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,00 Dokumen	6,00	18.700.000.000	6,00	3.000.000.000	2,00	3.360.000.000	14,00	25.060.000.000
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13200,00 Orang	10910,00	16.823.262.500	2497,00	2.430.000.000	2597,00	2.790.000.000	16004,00	22.043.262.500
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	4,00	1.726.200.000	4,00	420.000.000	4,00	420.000.000	12,00	2.566.200.000
		8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat. Berbangsa. dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat	0,00 Dokumen	1,00	150.537.500	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	3,00	450.537.500
		08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	28,85 %	31,21	80.961.724.037	33,58	1.500.000.000	35,94	1.680.000.000	100,00	84.141.724.037
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3,00 Dokumen	3,00	80.961.724.037	3,00	1.500.000.000	3,00	1.680.000.000	9,00	84.141.724.037
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620,00 Orang	1295,00	80.751.724.037	900,00	1.290.000.000	1000,00	1.470.000.000	3195,00	83.511.724.037
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas.	4,00 Laporan	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	12,00	630.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
		08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100,00 %	100,00	1.850.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	1.680.000.000	100,00	5.030.000.000
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,00 Dokumen	4,00	1.850.000.000	1,00	1.500.000.000	1,00	1.680.000.000	6,00	5.030.000.000
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,00 Orang	1070,00	1.640.000.000	800,00	1.290.000.000	900,00	1.470.000.000	2770,00	4.400.000.000
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	4,00	210.000.000	12,00	630.000.000
		08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	90,63 %	100,00	6.700.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	6.360.000.000	100,00	19.060.000.000
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7,00 Dokumen	8,00	6.700.000.000	4,00	6.000.000.000	3,00	6.360.000.000	15,00	19.060.000.000
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	989,00 Orang	2015,00	3.112.000.000	1865,00	2.580.000.000	1940,00	2.940.000.000	5820,00	8.632.000.000
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang	4,00 Laporan	4,00	588.000.000	4,00	420.000.000	4,00	420.000.000	12,00	1.428.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah									
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	1,00	3.000.000.000	1,00	3.000.000.000	1,00	3.000.000.000	3,00	9.000.000.000
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas				Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah	84,41 Indeks	85,00	18.628.479.000	85,50	17.000.000.000	86,00	17.060.000.000	86,00	52.688.479.000
				Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	78,10 Poin	78,50		79,30		80,01		80,01	
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	74,26 Indeks	75,00	18.628.479.000	75,50	17.000.000.000	76,00	17.060.000.000	76,00	52.688.479.000
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,97 Nilai	68,00		68,50		69,00		69,00	
		08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,00 Indeks	78,63	11.445.099.000	78,68	10.915.125.000	78,72	11.317.280.000	78,72	33.677.504.000
				Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100,00 %	100,00	7.183.380.000	100,00	6.084.875.000	100,00	5.742.720.000	100,00	19.010.975.000
		8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100,00 %	100,00	984.145.000	100,00	880.725.000	100,00	1.282.880.000	100,00	3.147.750.000
		8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00 Dokumen	3,00	452.845.000	4,00	347.845.000	4,00	750.000.000	11,00	1.550.690.000
		8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00	14.940.000	2,00	14.940.000	2,00	14.940.000	6,00	44.820.000
		8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	6,00	10.770.000
		8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	2,00	3.590.000	2,00	23.290.000	2,00	23.290.000	6,00	50.170.000
		8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	4,00	509.180.000	4,00	491.060.000	4,00	491.060.000	12,00	1.491.300.000
		8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,70 %	96,50	9.867.770.000	96,75	9.780.770.000	97,00	9.780.770.000	97,00	29.429.310.000
		8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41,00 Orang/ Bulan	45,00	9.000.000.000	45,00	9.000.000.000	45,00	9.000.000.000	45,00	27.000.000.000
		8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	12,00	587.400.000	12,00	587.400.000	12,00	587.400.000	36,00	1.762.200.000
		8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12,00 Dokumen	12,00	9.330.000	12,00	9.330.000	12,00	9.330.000	36,00	27.990.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	3,00	5.385.000
		8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00 Laporan	12,00	267.450.000	12,00	180.450.000	12,00	180.450.000	36,00	628.350.000
		8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	3,00	5.385.000
		8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	23,81 %	30,00	44.975.000	35,00	62.975.000	40,00	62.975.000	40,00	170.925.000
		8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00 Dokumen	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	2,00	3.590.000	6,00	10.770.000
		8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	1,00	1.795.000	3,00	5.385.000
		8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	2,00	37.795.000	2,00	55.795.000	2,00	55.795.000	6,00	149.385.000
		8.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	2,00	1.795.000	2,00	1.795.000	2,00	1.795.000	6,00	5.385.000
		8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	7,14 %	25,00	548.209.000	30,00	190.655.000	35,00	190.655.000	35,00	929.519.000
		8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00 Paket	5,00	222.794.000	2,00	110.240.000	2,00	110.240.000	9,00	443.274.000
		8.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56,00 Dokumen	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	23.122.500
		8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41,00 Dokumen	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	7.707.500	60,00	23.122.500
		8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	24,00	310.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	44,00	440.000.000
		8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	90,00 %	95,00	4.847.432.800	96,00	3.931.001.800	97,00	3.793.846.800	97,00	12.572.281.400
		8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00 Paket	1,00	75.000.000	0,00	-	0,00	-	1,00	75.000.000
		8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17,00 Paket	15,00	1.606.250.200	15,00	1.249.711.800	15,00	1.043.316.800	15,00	3.899.278.800
		8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00 Paket	3,00	80.915.000	3,00	70.415.000	3,00	70.415.000	3,00	221.745.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
						2024		2025		2026		TARGET	Rp (Ribu)
						TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)	TARGET	Rp (Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00 Laporan	6,00	2.615.892.600	6,00	2.436.875.000	6,00	2.506.115.000	18,00	7.558.882.600
		8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00 Dokumen	5,00	469.375.000	6,00	174.000.000	6,00	174.000.000	17,00	817.375.000
		8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00	1.320.563.200	100,00	1.320.563.200	100,00	1.320.563.200	100,00	3.961.689.600
		8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	3,00	90.000.000
		8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00	228.392.000	12,00	228.392.000	12,00	228.392.000	36,00	685.176.000
		8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13,00 Laporan	13,00	1.062.171.200	13,00	1.062.171.200	13,00	1.062.171.200	39,00	3.186.513.600
		8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	80,00 %	100,00	1.015.384.000	100,00	833.310.000	100,00	628.310.000	100,00	2.477.004.000
		8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	1,00	84.960.000	1,00	84.960.000	1,00	84.960.000	1,00	254.880.000
		8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14,00 Unit	13,00	107.750.000	13,00	107.750.000	13,00	107.750.000	10,00	323.250.000
		8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43,00 Unit	61,00	42.674.000	60,00	40.600.000	60,00	40.600.000	60,00	123.874.000
		8.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00 Unit	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	10,00	200.000.000	10,00	600.000.000
		8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	5,00	580.000.000	5,00	400.000.000	5,00	195.000.000	5,00	1.175.000.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 7.1.. sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	Indikator Kinerja Tujuan:							
1.	Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	Indeks	81,02	-	81,10	81,15	81,20	81,20
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	84,41	-	85,00	85,50	86,00	86,00
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	78,10	-	78,50	79,30	80,01	80,01
II	Indikator Kinerja Sasaran:							
1.	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	77,90	-	77,95	78,00	78,05	78,05
2.	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	102	31	100	90	80	270
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	74,26	-	75,00	75,50	76,00	69,00
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	66,97	-	68,00	68,50	69,00	76,00

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2024-2026, yang dibuat untuk menunjang RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun, pada tahun 2024 sampai dengan 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Badan,

Drs.Sufian Agus, M.Si.

NIP. 19660204 198803 1 016

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009